KERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA DALAM SEJARAH:

Sumatera

Pengarah
Hilmar Farid
Direktur Jenderal Kebudayaan

Penanggung Jawab
Triana Wulandari
Direktur Sejarah

Penulis
Agus Aris Munandar
Isman Pratama
Jajat Burhanudin

Editor
Mukhlis PaEni
Karsono Hardjosaputra

Narasumber
Taufik Abdullah

Desain dan Layout
Bimo Trisaksono

Tim Produksi:

Pengarah Produksi
Agus Widiatmoko

Penanggung Jawab
Tirmizi
Fider Tendiardi

Penyusun Program Penulisan
Budi Harjo Sayoga
Bimo Adriawan

Analis Sumber Sejarah
Nina Wonsela
Annisa Mardiani

Pengumpul Sumber Sejarah
Krida Amalia Husna

Pengolah Data
Bariyo
Dwi Artiningsih
Esti Warastika
Oti Murdiyati Lestari

Penerbit
Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta 10270
Telp/Fax: +62-21-5725044

@2019

Hak Cipta dimiliki oleh Penerbit dan dilindungi Undang-undang.
Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin tertulis pemegang Hak Cipta.

ISBN : 978-623-7092-56-8

959.801 AGU k

KERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA DALAM SEJARAH:

Sumatera

SAMBUTAN DIREKTUR SEJARAH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kami menyambut gembira dengan terbitnya buku yang berjudul *Kerajaan-Kerajaan Nusantara dalam Sejarah: Sumatera*. Buku ini berisi narasi mengenai kerajaan-kerajaan yang pernah ada di wilayah Sumatera.

Buku ini hadir dalam upaya untuk menginventarisasi kerajaan Nusantara sebagai bagian dari kekayaan sejarah dan budaya Indonesia, serta dinamika peradaban kerajaan Nusantara dari masa ke masa dan sumbangannya terhadap terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kisah jalinan dan jaringan antar kerajaan-kerajaan yang sudah terbina sejak awal berdiri merupakan bagian dari memori kolektif dalam perjalanan bangsa dan negara yang kini bernama Indonesia.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Khususnya kepada para penulis, editor dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Semoga buku *Kerajaan-Kerajaan Nusantara dalam Sejarah: Sumatera* dapat menambah wawasan dan kesadaran dalam menguatkan karakter dan nilai-nilai kebudayaan kita. Akhirmya, selamat membaca, Salam Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direktur Sejarah
Triana Wulandari

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Perjalanan sejarah Nusantara ditandai oleh tumbuhnya berbagai kerajaan sebagai bentuk pengorganisasian masyarakat dengan aneka ekspresi budayanya. Kerajaan-kerajaan ini telah ada sejak masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Nusantara dan berlanjut hingga masuknya pengaruh Islam. Selama ratusan tahun kerajaan-kerajaan di Nusantara mengalami pergeseran kekuasaan, perpindahan pusat pemerintahan hingga perubahan pengaruh politik dan budaya.

Banyak kerajaan yang pada akhirnya menghilang karena sudah tidak lagi memiliki wilayah ataupun penerus kekuasaan. Namun ada juga kerajaan-kerajaan yang masih terus bertahan di tengah berbagai perubahan zaman setelah melalui perjalanan sejarah di tengah masa kolonialisme bangsa Eropa dan pada akhirnya menjadi bagian dari Republik Indonesia. Di antara kerajaan-kerajaan itu ada pula yang masih mempertahankan keberadaannya hingga saat ini. Sebagai sumber rujukan kebudayaan masyarakat, kerajaan-kerajaan tersebut berperan penting dalam melestarikan kebudayaan bangsa dan memperhalus budi pekerti manusia. Oleh karenanya, penulisan sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah ada di wilayah Nusantara menjadi penting. Buku ini juga menjadi salah satu jawaban dari tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia untuk menjadikan sejarah sebagai landasan untuk memperekat persatuan bangsa.

Saya menyambut baik terbitnya buku *Kerajaan-kerajaan Nusantara dalam Sejarah: Sumatera* ini. Saya ucapkan selamat atas terbitnya buku ini serta apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para penulis, editor, dan seluruh tim yang sudah bekerja keras sehingga buku ini dapat terselesaikan penyusunannya dan hadir ke tangan pembaca. Semoga terbitnya buku ini dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Direktur Jenderal Kebudayaan
Hilmar Farid

DAFTAR ISI

SAMBUTAN
DIREKTUR SEJARAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA III

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA IV

PENDAHULUAN 1

KERAJAAN HINDU BUDHA 6
1. Panai 7
2. Kerajaan Malayu 19
3. Kedatuan Sriwijaya 50

KERAJAAN AWAL MASUKNYA ISLAM 88
1. Kerajaan Peurelak 89
2. Kerajaan Barus 114
3. Kerajaan Samudera Pasai 143

MASA KESULTANAN 172

1. Kerajaan Aceh 173
2. Kerajaan Riau Johor 212
3. Kesultanan Palembang 253
4. Kesultanan Jambi 292
5. Kerajaan Pagaruyung 326
6. Kerajaan Inderapura 352
7. Kesultanan Deli 375
8. Kesultanan Serdang 400
9. Kesultanan Langkat 420
10. Kesultanan Asahan 441
11. Kerajaan Pelalawan 457
12. Kesultanan Indragiri 477
13. Kesultanan Siak 488

PENUTUP 509

DAFTAR PUSTAKA 514

INDEKS 530

RIWAYAT HIDUP EDITOR DAN PENULIS 540

Pendahuluan

Kalau lembaran sejarah tanah air dibuka-buka maka tampaklah betapa perlawanan rakyat Aceh Darussalam menghadapi agresi tentara kolonial Hindia Belanda adalah peristiwa yang tidak mungkin terlupakan. Perang ini bermula pada tahun 1872 dan secara resmi barulah berakhir pada tahun 1904. Tetapi siapapun tahu juga bahwa sejak waktu itupun Aceh dikenal sebagai wilayah yang tidak mudah dilupakan para pejabat Belanda—jangankan oleh tentara kolonial. Sejak kesultanan Aceh resmi dikalahkan—artinya Sultan Aceh telah tertawan dan Kotaraja telah sepenuhnya dikuasai—tentara pendudukan Belanda selalu saja dihantui oleh apa yang disebut *Atjehsch moorden* (pembunuhan Aceh). Inilah peristiwa tragis yang bisa terjadi begitu saja. Ketika sang pejabat Belanda yang sempat terlengah—tiba-tiba tubuhnya telah ditusuk rencong Aceh

Salah satu kisah sejarah dari perang Aceh yang tidak mudah terlupakan ialah kemarahan Teungku Cik di Tiro, ulama terkemuka yang merangkap pemimpin perlawanan rakyat Aceh-Darussalam melawan *kompeni*. Seketika ia mendengar bahwa Teuku Umar (dan isterinya Teuku Cut Nyak Dien) telah menggabungkan diri dengan pasukan musuh, maka ia secara spontan mengeluarkan cercaan yang penuh kemarahan. "Dasar *anak jame* tidak tahu diri",konon begitulah kira-kira yang dikatakannya.

Dengan mengucapkan kata-kata ini sang ulama—pejuang ini bukan saja memaki seorang bangsawan lokal—seorang *teuku*—tetapi juga menyatakan kedongkolannya atas perilaku seorang *anak jame*—seorang keturunan pendatang dari luar wilayah kesultanan Aceh. Ternyata Teuku Umar adalah seorang keturunan Minangkabau,yang telah menjadikan wilayah pantai barat kesultanan Aceh Darussalam ini sebagai "tanah air"-nya. Maka timbullah juga pertanyaan, "Seperti apakah gerangan reaksi sang-ulama pejuang Aceh ini, kalau ia mengetahui juga betapa Teuku Umar bukan saja berhasil merampas senjata tentara *kompeni* dan melanjutkan perlawanan tetapi gugur dalam pertempuran melawan *kompeni*?" Tjut Nyak Dien, isterinya, terus berjuang betapapun dirinya telah diserang berbagai penyakit. Maka bisalah dipahami juga kalau para pengiringnya terpaksa menyerah pada Belanda agar Tjut Nyak Dien bisa mendapat perawatan.

Kisah selintas ini memperlihatkan bahwa Aceh, sebuah kesultanan di Sumatra bagian Utara ternyata bersuasana etnis-kultural yang pluralistik juga—ada penduduk dari suku-bangsa lain yang menghuni wilayahnya dan menjadikan Aceh sebagai tanah kelahirannya. Maka bisalah dikatakan bahwa pesan kultural dari peristiwa yang terjadi di masa Perang Aceh ini ini tidaklah terlalu sukar untuk dirumuskan. Tetapi pesan kultural apakah yang bisa disampaikan kalau pergolakan sosial di kota Padang, kota terbesar di pantai Barat, yang terjadi pada awal abad ke-20, dikisahkan?

Ketika awal abad ke-20 telah dimasuki bisalah dikatakan bahwa Padang adalah sebuah kota yang telah mulai melangkah ke wilayah "kemajuan"—sebuah istilah yang diperkenalkan oleh majalah *Insulinde* (terbit 1901-1904), yang terbit di kota ini. Tetapi siapakah yang akan heran pada waktu itu kalau sudah sejak tahun 1910-an seorang redaktur dan kemudian juga menjadi penerbit surat kabar, dan kebetulan ia adalah seorang penghulu adat (kepala komunitas adat di *nagari*/desa) yang berasal dari pedalaman—dari wilayah *darek (*darat*)*– mengadakan apa yang disebut para peninjau Belanda sebagai "revolusi adat". Lewat tulisan-tulisannya di surat kabar dan perkumpulan para pendatang dari wilayah pedalaman (dari yang berhasil didirikannya sang editor surat kabar yang kebetulan adalah pula seorang penghulu adat (ia bergelar *Datuk* menurut tradisi Minangkabau) berkampanye agar para bangsawan kota Padang meninggalkan kebangsawanan mereka (dengan gelar *sutan* dan *marah* serta *puti* dan sitti) kembali menjadi menjadi bagian dari adat Minangkabau yang "demokratis" tanpa gelar yang bersandar pada keturunan ayah dan ibu. Masalahnya ialah gelar-gelar kebangsawanan itu bukanlah bertolak dari adat Minangkabau tetapi warisan dari kerajaan Aceh, yang sempat menguasai pantai Barat wilayah Minangkabau selama beberapa puluh tahun pada abad ke-17.

Kedua kasus yang dikisahkan di atas memperlihatkan bahwa meskipun berdiam dalam kerajaan yang mempunyai wilayah kekuasaan yang berbeda-beda dan mungkin pula mempunyai landasan kultural yang berlainan tetapi hubungan kultural dan bahkan sosiologis dari kerajaan-kerajaan bukan saja biasa terjadi tetapi meninggalkan bekas yang dalam kehidupan sosial kultural.

Keadaan yang paling dramatis barangkali bisa dilihat juga dengan kasus kesultanan kesultanan Siak Sri Indrapura. Pada tahun 1699 Sultan dari kesultanan Johor mati terbunuh. Karena baginda tidak mempunyai putra maka ia pun digantikan oleh Bendahara sebagai Sultan. Tetapi sementara itu isteri baginda—konon, bukan permaisuri—telah mengandung dan akhirnya melahirkan seorang laku-laki. Karena takut dengan berbagai kemungkinan politik, maka anak inipun dibesarkan di Pagaruyung—tempat kedudukan *Raja Alam* Minangkabau. Begitulah ketika putra raja yang mengungsi ini telah menginjak dewasa, maka dengan dikawal oleh para prajurit asal Minangkabau iapun menyerbu Johor dan berhasil menduduki istana. Tetapi anak sang Bendahara, yang telah menyatakan dirinya Sultan ini, menjalin persekutuan dengan para pelaut Bugis. Persekutuan Johor-Bugis ini akhirnya berhasil mengusir sang raja ke wilayah yang kemudian disebut kesultanan Siak Sri Indrapura. Dari sinilah sang raja dan keturunannya memupuk kesultanan sehingga berhasil juga meluas pengaruh ke wilayah bagian Utara. Maka dikatakanlah bahwa beberapa kesultan di sana– Deli, Serdang, Langkat dan Asahan—" ber-sultan ke Aceh Darussalam, be-raja ke Siak Sri Indrapura".

Semua peristiwa yang dikisahkan selintas ini hanya mengatakan satu hal saja bahwa betapapun sekian banyak kerajaan atau kesultanan telah berdiri tetapi keakraban dan ikatan keluarga ataupun bahkan permusuhan antara kerajaan-kerajaan itu bisa saja terjadi. Bisalah dipahami juga kalau seketika pusat kekuasaan yang terdapat di Sumatra telah disebut maka ingatan yang paling awal melintas ialah Sriwijaya, sebuah kerajaan yang berada di bawah dinasti Syailandra. Masalahnya sederhana saja. Kerajaan Sriwijaya–yang mulai menyatakan kehadirannya berdasarkan empat prasasti dari abad ke-7 di wilayah Sumatra bagian tengah dan Timur dan mulai meredup sejak abad ke-13—bukan hanya dikenal di pulau Sumatera tetapi di seluruh Nusantara. Karena itu janganlah heran kalau para bhiksu Buddha asal Tiongkok biasa mampir lebih dulu di ibukota Sriwijaya untuk mempelajari ajaran agama Buddha, sebelum meneruskan perjalanan ke Nalanda. Bahkan seketika nama dinasti yang menguasai kerajaan ini telah disebut—Syailandra—maka ingatan pun melayang begitu saja pada sebuah candi besar dan indah yang terletak di Jawa Tengah, dekat kota Magelang, bernama Borobudur. Mungkin tidak begitu diketahui tetapi yang menirikan candi yang megah ini adalah dinasti Syailandra. Maka janganlah heran kalau arti kehadiran nama ini menyebabkan terjadinya perdebatan para ahli purbakala—apakah arti kehadiran ini? Apakah ini berarti bahwa pernah di suatu zaman dinasti Syailandra di suatu saat berada di bawah kekuasan Jawa ataukah—seperti dikatakan oleh ilmuwan lain—sebaliknya. Pernah di suatu saat dinasti Syailandra berkuasa di Jawa Tengah. Barulah sekian puluh tahun–di akhir tahun 1950an—perdebatan ini dengan gemilang diselesaikan. Menurut penemuan purbakala ini ternyata Syailandra adalah nama dinasti yang berkuasa di Jawa Tengah dan Sumatera Selatan, tetapi kemudian keluarga ini pecah menjadi dua dinasti.

Kalau dihitung-hitung jumlah kerajaan—besar dan kecil, berumur panjang atau sekedarnya saja— yang pernah berkuasa di Sumatra sebanyak 36 buah. Tetapi dalam buku ini hanya bisa memuat kisah ringkas dari 25 kerajaan/kesultanan—yaitu 3 (tiga) kerajaan dari zaman Hindu-Buddha (Panai, Melayu, Sriwijaya), 3 (tiga) kerajaan dari masa awal masuknya Islam (Perlak, Samudra Pasai, Barus) dan akhirnya 13 (tiga belas) *kesultanan* di zaman Islam (yang terkuat secara militer Aceh, tetapi yang tertua mungkin Pagaruyung). Maka bisalah pula dikatakan bahwa beberapa kesultanan ini mempunyai hubungan akrab atau kadang-kadang kerajaan-kerajaan ini terlibat dalam konflik kekuasaan dengan kerajaan/kesultanan di Tanah Semenanjung–Aceh pernah mengalahkan Johor dan Pahang, Palembang dan Jambi serta Johor adalah tiga kesultanan yang selalu terikat dalam irama "konflik dan persahabatan". Kelahiran Siak Sri Indrapura tidak bisa diterangkan tanpa memperhitungkan arti kehadiran kesultanan Johor dan para advonturir kelautan dari Sulawesi Selatan—Daeng Perani dan para saudaranya–pelaut dan pedagang Bugis yang tak enggan memakai senjata. Ketika konflik kesultanan telah mereda—Siak Sri Indrapura telah mantap di bawah keturunan putra raja Johor, yang dibesarkan di Pagaruyung. Putra

sang Bendahara telah mantap sebagai sultan Djohor, sedangkan kakak tertua dari lima bersaudara pelaut Bugis menjalankan peranan sebagai Raja Muda, dengan pusat kekuasan di pulau Penyengat. Pada abad ke-19 pulau ini tampil sebagai salah satu pemikiran Islam yang menghasilkan naskah-naskah yang bermutu tinggi antar lain *Tuhfat an-Nafis.*

Raja terakhir kerajaan Pagaruyung ditawan Belanda, karena ia dicurigai mendukung Tuanku Imam Bonjol dalam menghadapi *kompeni.* Tetapi Pagaruyung sampai kinipun—meskipun sekian lama waktu telah berlalu—tetap dihormati oleh Negeri Sembilan. Bukankah yang mendirikan kesultanan Negeri Sembilan adalah para pendatang dari Minangkabau?

Jadi dengan menelaah sejarah dari sebuah kerajaan atau kesultanan saja kita seakan-akan ditarik untuk mempelajari sejarah dari kesultanan lain. Tetapi mengapa tidak? Bukankah tampak juga betapa hampir semua kerajaan atau kesultanan itu saling terkait dalam dinamika sejarah.

KERAJAAN

Hindu Budha

— 1 —

Panai

1. Lokasi Panai

Panai dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai kerajaan yang terletak di Sumatera Utara (Schnitger, 1964; Mulia, 1980; Suleiman, 1985; Sedyawati dan Hasan Djafar, 2009). Kerajaan tersebut dikaitkan dengan berbagai kepurbakalaan di kawasan Padang Lawas, yang ditemukan banyak bangunan kuna berbentuk candi dengan satu bilik, sisa struktur *mandapa*, pagar keliling, runtuhan pintu gerbang, sisa-sisa pondasi, berbagai bangunan berupa susunan bata, dan prasasti-prasasti pendek. Di tempat itu juga ditemukan sejumlah arca atau fragmen arca batu dan logam yang mencerminkan *pantheon* Buddha Mahayana. Bernet Kempers (1959: 76) menyatakan bahwa berbagai kepurbakalaan di Padang Lawas berasal dari abad ke-13–14 M, yang berarti masih berfungsi ketika Majapahit dan Malayupura berdiri.

Berita pertama tentang keberadaan Panai ditemukan dalam uraian Prasasti Tanjore yang berangka tahun 1030/1031. Prasasti itu dikeluarkan oleh Rajendra I, penguasa Cholamandala di wilayah Koromandel, India Selatan, yang antara lain menyatakan bahwa pada tahun 1025 Rajendra I memerintahkan bala tentara dan armadanya menggempur wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Sriwijaya di pantai-pantai Pulau Sumatera, Semenanjung Malayu, dan wilayah Selat Malaka. Dalam penyerangan tersebut banyak daerah kekuasaan Sriwijaya ditaklukan oleh armada Chola, bahkan Raja Sriwijaya Sanggrama Wijayatunggawarman dapat ditangkap (Mulia, 1980: 1).

Prasasti Tanjore menyebut Panai sebagai daerah yang dialiri sejumlah sungai. Hal ini berarti Panai merupakan dataran rendah yang subur sebagai daerah pertanian, yang mungkin merupakan daerah kekuasaan Sriwijaya (Wheatley, 1961: 199). Suleiman (1983: 3–4) memperkirakan bahwa Panai yang diserang Cholamandala tersebut sangat mungkin bukan Panai yang memiliki peninggalan kuna di Padang Lawas, melainkan Sibolga—pelabuhan dagang yang berada di pantai barat Sumatera—yang menurut riwayat lama merupakan pelabuhan Panai di pantai barat Sumatera sampai bandar dagang kuna lainnya, yaitu Barus. Serangan armada Cholamandala yang datang melalui Samudera India itu menghancurkan bandar-bandar di pantai barat Sumatera, yang salah satu di antaranya Panai. Walaupun sejumlah wilayah bawahan Sriwijaya ditaklukkan pasukan Cholamandala, namun daerah-daerah tersebut cepat pulih kembali karena pasukan Cholamandala tidak mendudukinya. Bandar Panai porak poranda akibat serangan Cholamandala. Walaupun cepat pulih sebagai bandar niaga kembali, namun kaum

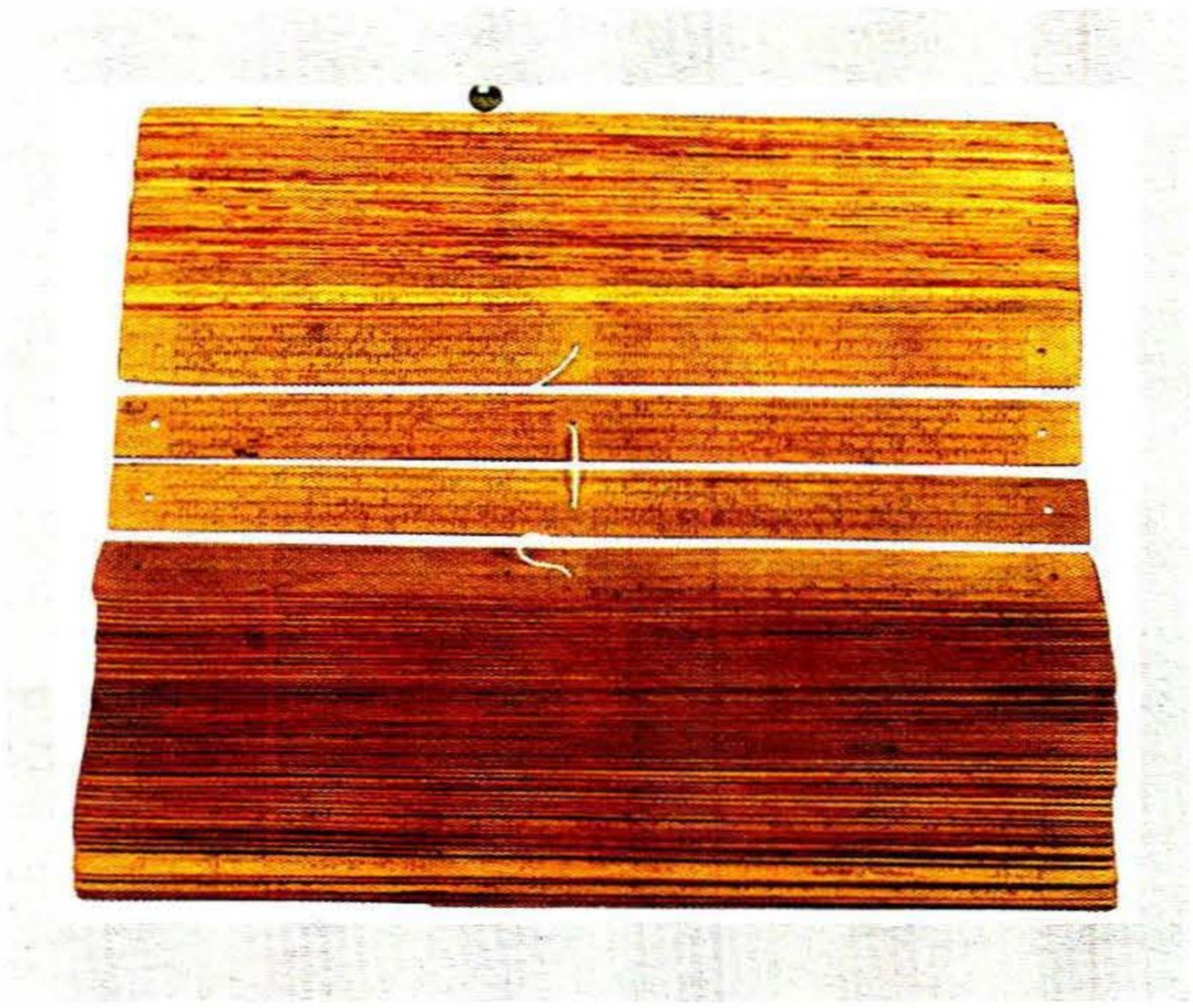

Kakawin Negarakertagama
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

agamawannya memindahkan kegiatan keagamaannya lebih ke pedalaman, yaitu ke wilayah Padang Lawas.

Para penguasa Cholamandala merupakan pendukung dan pemeluk taat agama Hindu, sedangkan Sriwijaya dan daerah-daerah kekuasaannya mendukung agama Buddha Mahayana. Ketika itu banyak wihara Buddha di India dihancurkan oleh raja-raja Hindu sehingga agama Buddha tidak berkembang di sana. Pusat keagamaan Buddha (*Mahavihara*) Nalanda, misalnya, diserang dan dihancurkan pada masa Kerajaan Pala pada paruh kedua abad ke-12 dan pada tahun 1235 Nalanda benar-benar dibumihanguskan sehingga ditinggalkan oleh para bhiksu Buddha (Gosh 2006: 13–15). Agaknya hal itulah yang mendasari serangan Cholamandala terhadap Sriwijaya, dengan alasan menghancurkan pusat-pusat keagamaan Buddha, terbukti tentara Chola kemudian kembali ke tanah India setelah menghancurkan bandar-bandar Sriwijaya pendukung perkembangan agama Buddha.

Panai masih disebut-sebut dalam *Kakawin Nagarakrtagama* (*pupuh* 13: 1) gubahan Mpu Prapanca tahun 1365. Dalam *pupuh* itu Panai disebut bersama beberapa daerah lain yang mengirim utusan dan upeti ke istana Majapahit, antara lain Malayu, Jambi, Palembang, Teba, Dharmmasraya, Kandis, Kahwas, Manangkabwa, Siyak, Rkan, Kampar, **Pane,** Kumpe, Harw (Haru), Mandahiling, Tumihang, Parllak, dan Barat. Hal itu berarti pada pertengahan abad ke-14 daerah Panai masih bertahan sebagai kegiatan perekonomian. Para ahli kemudian menafsirkan bahwa di Panai pada sat itu masih berdiri suatu kerajaan (Schnitger, 1964: 85; Suleiman 1985: 23, 1980; Suhadi 2009: 137–148). Berdasarkan sumber-sumber sejarah dan peninggalan arkeologis yang berhasil dikaji kembali sangat mungkin pada masa yang akan datang dihasilkan tafsiran baru terhadap keberadaan Panai yang bukan merupakan kerajaan.

2. Monumen Keagamaan: Buddha Mahayana Wajrayana

Kawasan Padang Lawas seluas sekitar 1.500 km^2, meliputi Daerah Aaliran Sungai (DAS) Barumun, Batang Pane, dan sungai-sungai kecil yang lain. Dalam lingkup kawasan yang relatif luas tersebut terdapat tinggalan budaya yang sebagian besar berasal dari masa Hindu-Buddha. Situs-situs atau monumen-monumen yang bercorak Hindu-Buddha di tepian Batang Pane antara lain Gunung Tua, Si Topayang, Hayuara, Haloban, Rondaman, Bara, Pulo, Biaro Bahal I, Biaro Bahal II, dan Biaro Bahal III. Sementara situs-situs di tepian Sungai Sirumambe meliputi Batu Gana, Aek Korsik, Lobu Dolok, Si Doldop, Padang Bujur, Nagasaribu, dan Mangaledang. Adapun situs-situs di tepi Sungai Barumun terdiri atas Pangeran Bira, Porlak Dolok, Si Sangkilon, Tandihat I (Si Joreng Belangah), Tandihat II, Tandihat III (Longgong), dan Sipamutung. Tinggalan reruntuhan bangunan memang tidak terdapat di semua situs tersebut, namun temuan dapat berupa fragmen prasasti, arca atau fragmen arca, *stambha* (tiang batu), batu lapik, umpak batu, makara, dan sisa-sisa bangunan. Beberapa kepurbakalaan yang berupa bangunan sudah dipugar, walaupun masih banyak yang rumpang. Bengunan-bangunan tersebut meliputi Biaro Bahal I, Biaro Bahal II, Biaro Bahal III, dan Biaro Sipamutung (Susetyo, 2010: 2).

Sangat banyak reruntuhan bangunan kuna di Kawasan Padang Lawas, namun yang dibincangkan dalam buku ini hanya empat monumen yang telah dipugar di atas sebagai bukti bahwa di kawasan monumen-monumen tersebut berlangsung kegiatan keagamaan pada masa silam.

2.1 Bangunan Biaro Bahal I

Biaro Bahal I terbuat dari susunan bata, menghadap ke arah tenggara, berdenah bujur sangkar dengan denah batur berukuran 10 x 10 m, tubuh candi berukuran 5 x 5 m dengan satu bilik candi yang telah kosong tidak berisi arca apa pun, dan tinggi keseluruhan candi setelah pemugaran 14 m. Latar keagamaan bangunan bersifat *bauddha* (agama Buddha), yang dapat diketahui dari atap berbentuk silindris. Di samping itu, dahulu, di bagian puncak bentuk silindris itu terdapat stupa sebagai hiasan kemuncak, namun sekarang tidak tersisa lagi.

Biaro Bahal I berupa kompleks yang terdiri atas beberapa bangunan yang dikelilingi oleh pagar dengan gapura di sisi tenggara, segaris dengan arah hadap pintu bangunan. Di antara gapura dan bangunan *biaro* terdapat batur sisa *mandapa* berdenah empat persegi panjang, yang dahulu merupakan tempat para *bhiksu* berkumpul untuk melaksanakan upacara pemujaan. Selain *mandapa* juga terdapat beberapa sisa stupa di sekitar bangunan utama. Di wilayah percandian juga ditemukan fragmen arca Dwarapala tanpa kepala dan arca Makara—yang tinggal satu—di ujung tangga naik menuju tubuh candi (Suleiman,

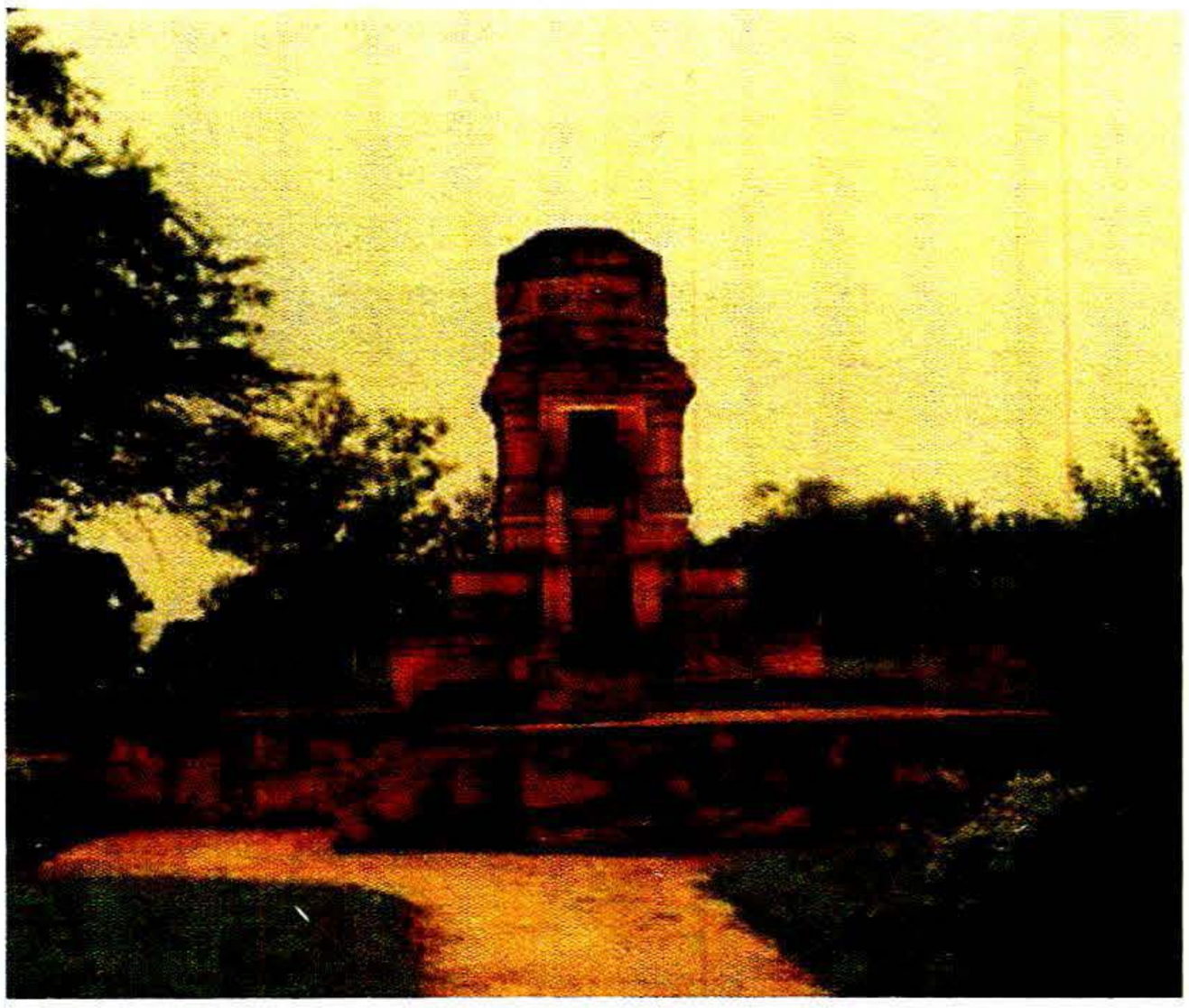

Biaro Bahal I dari arah tenggara.
Sumber: A.A. Munandar, 2015

1985: 27). Di dinding kaki candi terdapat relief raksasa yang sedang menari dengan mengangkat tangan dan kaki. Sosok pada relief tersebut sangat mungkin berkaitan dengan latar belakang keagamaan candi, yakni Buddha Mahayana aliran Tantarayana-Bhairawapaksa (Bernet Kempers, 1959: 75–76, *plate* 225; Suleiman, 1985: 26).

Sangat mungkin dahulu bangunan Biaro Bahal I sepenuhnya merupakan stupa tertutup, tidak berongga, dan tidak dapat dimasuki seseorang, namun terjadi perombakan dengan membuat bilik dan menempatkan stupa di bagian atap bangunan. Bangunan kemudian ditambah pula deretan anak tangga yang dapat digunakan menaiki batur candi menuju bilik (Suleiman dkk., 1983: 14).

2.2 Biaro Bahal II

Biaro Bahal II terletak di sebelah timur Biaro Bahal I pada jarak sekitar 1 km. Sama dengan Biaro I, Biaro Bahal II juga merupakan gugusan bangunan. Wilayah percandian dikelilingi pagar tembok bata berukuran 60 x 50 m dengan dilengkapi gapura. Bangunan yang masih dapat diamati sebanyak tiga buah, yaitu (1) candi induk, menghadap ke arah tenggara, berukuran 10,5 x 10,5 m dan tinggi setelah pemugaran sekitar 9 m, (2) batur *mandapa*, yang terletak di antara candi induk dan gapura, serta (3) reruntuhan candi lebih kecil, terletak di sisi timur laut candi induk.

Biaro Bahal II memiliki keistimewaan pada atap tingkat pertama berdenah segi delapan dengan dilengkapi relung-relung dangkal di setiap sisinya. Di atas tingkat pertama terdapat bentuk melandai yang merupakan sisa *anda* (bentuk setengah lingkaran pada stupa) dan kemuncaknya sangat mungkin merupakan bentuk susunan *chatra* dan *yasthi*–nya (payung dan tiangnya) (Suleiman dkk., 1983: 15).

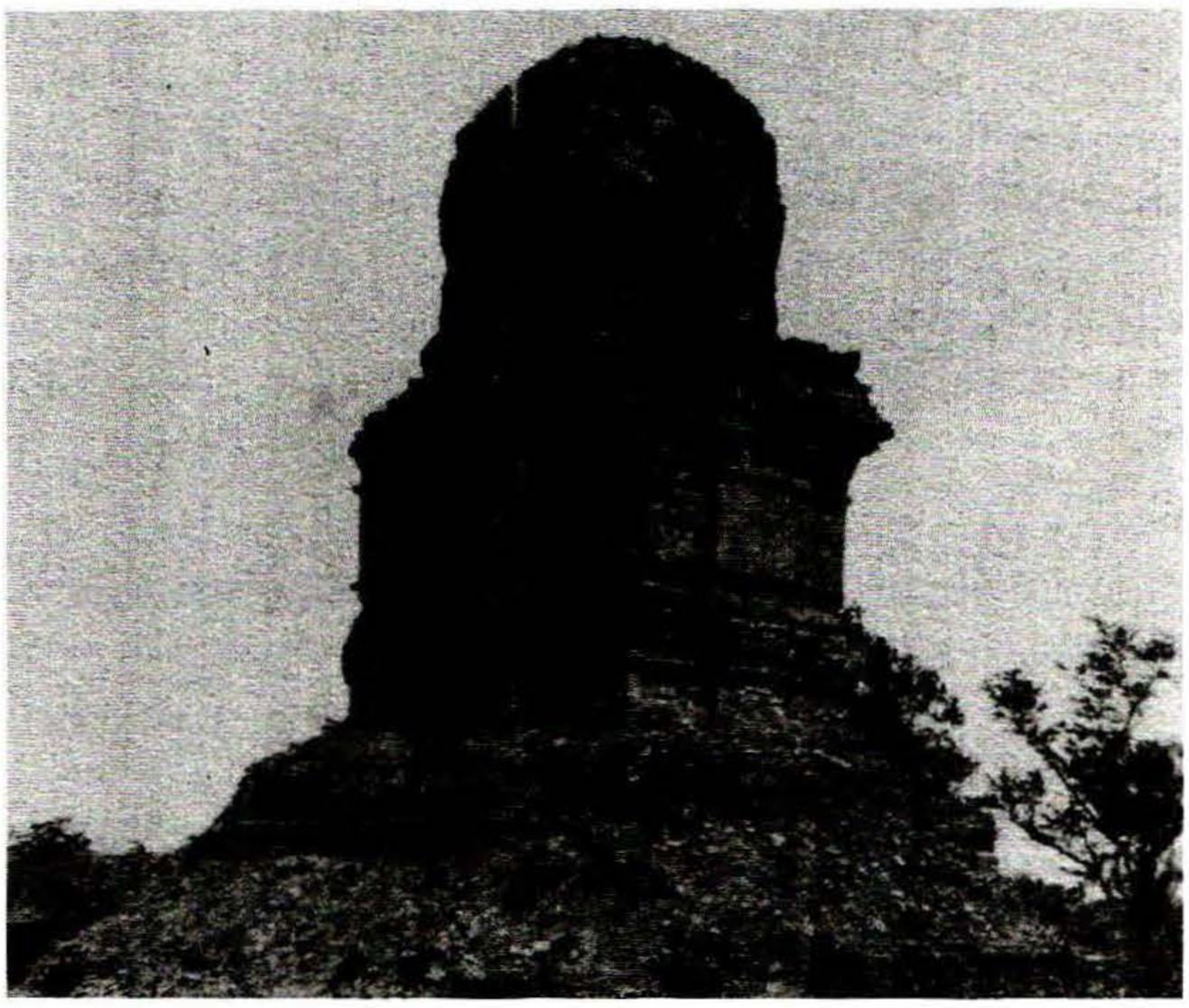

Biara Bahal I
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

2.3 Biaro Bahal III

Biaro ini terletak sekitar 1 km dari Biaro Bahal II. Ukuran denah bangunan utamanya 11,4 x 8,4 m dengan tinggi keseluruhan setelah pemugaran 10,7 m. Sama dengan dua *biaro* lainnya, Biaro III juga menghadap ke arah tenggara. Di halaman depan candi utama percandian terdapat batur *mandapa* dan tiga batur kecil yang mungkin merupakan alas (lapik) stupa, hanya saja stupa-stupanya telah rusak.

Di halaman percandian ini ditemukan fragmen arca-arca Dwarapala (raksasa penjaga) tanpa kepala (Mulia, 1980: 14), sementara dinding kaki candi polos tanpa hiasan relief apa pun. Keistimewaan Biaro Bahal III berupa adanya sisa-sisa plester (*lepa*) berwarna putih menutupi bangunan tubuh candi, yang tidak ditemukan pada bangunan Biaro Bahal I dan Biaro Bahal II (Suleiman, 1983: 17–18). *Lepa* putih sejenis—disebut *wajralepa*—ditemukan pada dua candi *bauddha* di Jawa bagian tengah, yaitu Candi Kalasan dan Candi Sari, menutup wujud relief hias dan relief makhluk kedewataan yang dipahatkan di tubuh candi (Bernet Kempers dan R. Soekmono, 1954). Di samping itu *lepa* juga ditemukan menutup dinding beberapa kepurbakalaan di situs Batujaya, Karawang (Djafar, 2010).

Agaknya pada masa silam terjadi upacara atau prosesi keagamaan yang menghubungkan antara ketiga *biaro* tersebut. Dugaan itu didasarkan adanya beberapa kemiripan, yaitu (1) ketiganya menghadap ke tenggara, (2) bangunan utama berhadapan dengan *mandapa*, (3) terdapat bentuk-bentuk stupa di halaman percandian, dan (4) ketiganya berlatar agama Buddha Mahayana-Tantrayana.

2.4 Biaro Sipamutung

Biaro Sipamutung merupakan gugusan *biaro* terbesar di kawasan Padang Lawas dan sangat mungkin menjadi bangunan keagamaan terpenting pada masanya di kawasan tersebut (Mulia, 1980: 9). Biaro

Sipamutung terdiri atas empat bangunan candi dan tiga batur *mandapa* yang berdiri berderet utara-selatan. Gugusan tersebut terletak lebih ke timur dari Biaro Bahal III, dipisahkan oleh aliran Sungai Barumun. Candi induk Sipamutung berdenah bujur sangkar berukuran 11 x 11 m, tinggi keseluruhan bangunan setelah pemugaran 13 m, dengan sebuah bilik di tengah bangunan. Tepat di bagian depan candi induk terdapat batur *mandapa* besar (*mandapa* utama), sementara di sisi utara dan selatan terdapat dua *mandapa* yang lebih kecil.

Di sisi utara candi induk terdapat candi perwara dengan denah bujur sangkar dan memiliki penampil di keempat sisinya. Bangunan ini satu-satunya yang terbuat dari *sand stone* (balok-balok batu pasir) di kawasan Padang Lawas, sementara semua bangunan penting di kawasan tersebut terbuat dari batu bata. Di sisi selatan candi induk terdapat candi kecil yang hanya tersisa bagian kakinya berikut tangga naik di sisi timur (menghadap ke timur). Seluruh gugusan bangunan dikelilingi oleh pagar tembok bata dengan gerbang terletak di sisi timur.

Menilik banyaknya runtuhan bangunan di kompleks Biaro Sipamutung dapat ditafsirkan apabila pada masa silam terjadi kegiatan keagamaan yang ramai di bangunan suci tersebut. Keistimewaan Biaro Sipamutung terletak pada bangunan yang terbuat dari balok-balok batu pasir yang tidak dijumpai di kompleks *biaro* lainnya. Mungkin saja dahulu di bangunan batu tersebut disemayamkan arca utama yang terbuat dari logam, namun sekarang telah hancur dan tidak tersisa.

2.5 Gaya Seni Bangun dan Seni Arca Padang Lawas

Arsitektur bangunan candi dan seni arca di wilayah Padang Lawas mempunyai kedekatan bentuk dan penggarapan arsitektur dengan candi-candi lain di Sumatera dan Jawa. Meskipun demikian bangunan candi-candi Padang Lawas mempunyai kekhasan apabila dibandingkan dengan peninggalan sejenis dari kawasan tinggalan arkeologi tempat lain. Rumbi Mulia, seorang arkeolog yang lama meneliti kepurbakalaan Padang Lawas, menyatakan bahwa semua peninggalan purbakala di kawasan tersebut merupakan peninggalan keagamaan yang erat kaitannya dengan kegiatan magis, yang berbeda dengan candi-candi di Tanah Jawa, sehingga candi-candi Padang Lawas dapat dianggap sebagai sumber kekuatan gaib. Hal itu didasarkan pada konsep pemujaan leluhur yang direfleksikan pada wujud seni bangun dan seni arcanya. Apabila dilihat lurus dari depan bentuk-bentuk bangunan tampak sederhana dan kaku, yang dianggap sebagai bentuk pengendali kehalusan spiritual (Mulia, 1980: 29). Dalam pada itu tampak adanya pengaruh gaya seni arca India selatan, bahkan beberapa arca dibuat di India selatan kemudian dibawa ke Padang Lawas untuk keperluan upacara. Tentu saja terdapat arca-arca buatan para *silpin* setempat, yang mungkin dibuat di suatu tempat di Pulau Sumatera dan kemudian dibawa ke Padang Lawas, atau dibuat di lingkungan kesenian Padang Lawas sendiri (Suleiman, 1985: 36).

Bangunan utama Biaro Bahal II berikut sisa pintu gerbangnya.
Sumber: A.A. Munandar, 2015

Beberapa ciri bangunan candi di Padang Lawas juga dikenal pada bangunan candi-candi di Sumatera dan Jawa, antara lain sebagai berikut:

(1) Gugusan bangunan candi dikelilingi oleh pagar dengan gapura yang letaknya segaris dengan pintu masuk ke bilik candi. Denah halaman cenderung bujur sangkar.

(2) Apabila ditarik garis diagonal dari sudut-sudut pagar halaman candi induk tidak terletak di titik tengah halaman (*brahmasthana*).

(3) Denah bangunan utama sebagian besar bujur sangkar sempurna, walaupun ada yang tidak tepat benar bentuk bujur sangkarnya.

(4) Tubuh candi berdiri di permukaan lapik bangunan berupa batur dan di permukaan batur berdiri kaki bangunan sebagai alas tubuh candi.

(5) Hanya mempunyai satu bilik di tengah tubuh candi yang dapat dimasuki melalui satu pintu masuk di bagian depan tubuh candi.

(6) Pada dinding luar tubuh dan dinding dalamnya tidak dibuat relung untuk menempatkan arca-arca dewa.

(7) Atap candi berbentuk stupa, atau berbentuk tingkatan kubus yang dilengkapi dengan bentuk-bentuk stupa kecil sebagai mercu atap, namun banyak stupa kecil tersebut sekarang telah hilang.

(8) Di bagian depan candi induk terdapat batur *mandapa*, yang dahulu merupakan bangunan terbuka tanpa dinding dengan atap terbuat dari bahan cepat rusak (tiang dari kayu atau bambu serta penutup atap dari ijuk, anyaman rumput ilalang, atau susunan daun kelapa kering).

(9) Di halaman percandian terdapat reruntuhan bangunan candi kecil sebagai perwara dan stupa-stupa, mungkin berisi relik para guru yang telah meninggal.

Berdasarkan data yang tersedia dapat disimpulkan bahwa semua bangunan kuna di kawasan Padang Lawas merupakan bekas bangunan keagamaan dan bukan bangunan profan atau bangunan hunian. Di kawasan tersebut tidak pernah ditemukan reruntuhan bekas pemukiman yang dapat ditafsirkan sebagai *kedaton* (istana raja). Selain itu tidak ada temuan arkeologis yang menunjukkan pemukiman luas sebagai suatu *nagara* (kota). Walaupun kawasan arkeologis Padang Lawas sangat luas dan dipenuhi bermacam monumen purbakala, namun seluruh peninggalan monumen itu bersifat keagamaan dalam semangat agama Buddha Mahayana- Tantrayana.

3. Panai sebagai *Mahaksetra*

Sampai sekarang kawasan Padang Lawas masih sulit dijangkau dari pusat-pusat keramaian, bahkan dewasa ini lahan di sekitar *biaro-biaro* dikepung oleh perkebunan kelapa sawit. Pada masa silam daerah di sekitar percandian Biaro Bahal tentu merupakan pedalaman yang penuh hutan rimba lebat dan sulit dijelajahi. Satyawati Suleiman, seorang arkeolog senior Indonesia yang berkunjung ke lokasi tersebut dalam tahun 1960-an, menyaksikan bahwa kawasan Sungai Barumun dan Sungai Pane tempat berbagai kepurbakalaan tersebut berada merupakan padang ilalang yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar dan jarang dikunjungi orang (Suleiman, 1985: 23). Tempat yang jauh dari keramaian, senyap, berada di tepian sungai, dan memiliki padang terbuka yang dikelilingi hutan merupakan tempat yang cocok untuk melakukan upacara keagamaan esoterik. Upacara keagamaan yang bersifat rahasia, tertutup, dan tidak boleh diikuti oleh sembarang orang tersebut lazim dilakukan oleh para pemeluk Tantrayana, baik Hindu Tantrayana maupun Buddha Mahayana Tantrayana. Tempat seperti itu disebut dengan *ksetrajna* (Moens, 1974: 57), sedang arti *ksetra* adalah "tanah lapang" atau "tanah lapang untuk pekuburan dan sebagai tempat pembakaran mayat" (Zoetmulder, 1982, I: 905). Sebagai perbandingan di Jawa dan Bali dikenal kisah Calon Arang, seorang janda yang melaksanakan praktek Hindu Tantrayana. Dalam kisah tersebut Calon Arang dan para muridnya melakukan upacara pemujaan kepada Dewi Bhagawati di tempat yang jauh dari keramaian (*ksetra*), di tepi hutan lebat, dan dilaksanakan pada tengah malam waktu bulan gelap (Poerbatjaraka, 1975).

Berdasarkan uraian prasasti, temuan fragmen arca, dan penggambaran reliefnya, dapat diketahui bahwa di kawasan percandian Biaro Bahal dahulu sangat mungkin pernah berlangsung upacara keagamaan, sehingga peninggalan berbagai kepurbakalaan tersebut merupakan monumen keagamaan yang masih bertahan hingga kini. Adapun ritualnya berkaitan dengan ajaran Buddha Mahayana Tantrayana—sangat mungkin

Tantrayana sekte Wajrayana—yang memuja dewa-dewa *kroddha* (menyeramkan) dengan salah satu dewa utamanya Yamari, sebagaimana disebut dalam Prasasti Aek Sangkilon. Yamari—yang berarti "musuh Yama"—merupakan dewa *Wajrayana-bauddha*, yang hadir dalam Buddha Wajrayana karena pengaruh konsep Hindu berupa Kalarimurti, yakni salah satu wujud Siwa atau wujud Yama yang disebut Yamantaka (Liebert, 1976: 352; Jordan, 2004: 353). Penggambaran arca Yamari, menurut ikonografinya, berwujud dewa dengan delapan kepala dan 24 mata, mengenakan kalung dan selempang rangkaian tengkorak. Hanya arca Yamari tidak ditemukan lagi di wilayah Padang Lawas, (Suleiman, 1985: 28).

Sejumlah prasasti yang ditemukan di kawasan Padang Lawas dan wilayah sekitarnya umumnya merupakan prasasti pendek. Isinya berkenaan dengan maklumat keagamaan, misalnya tentang pembuatan arca, angka tahun, dan kalimat mantra yang diucapkan dalam suatu upacara. Hal yang menarik adalah ada penyebutan raja tetapi tanpa penyebutan nama raja bersangkutan.

Berdasarkan data prasasti yang berhasil dikaji diketahui bahwa *biaro-biaro* di Padang Lawas mulai dibangun pada abad ke-11, 12, hingga abad ke-14 M. Di bilik Biaro si Joreng Belangah yang telah runtuh ditemukan batu dengan pahatan angka tahun 1101 Saka atau 1179 M. Di samping itu juga ditemukan kertas emas tipis yang mempunyai goresan aksara Prenagari dalam 3 baris kalimat, namun hurufnya telah sangat aus sehingga sulit dibaca. Berdasarkan palaeografi huruf Prenagari dapat ditafsirkan bahwa pertulisan pada kertas emas itu berasal dari abad ke-13 atau awal abad ke-14 M (Suleiman, 1985: 25).

Berikut lima prasasti penting yang merupakan inskripsi singkat dari kawasan Padang Lawas.

(1) Prasasti Gunung Tua; dipahatkan pada lapik arca Lokanatha-Awalokiteswara yang diapit oleh arca Dewi Tara, namun salah satu arca Tara itu telah hilang. Hasil pembacaan prasasti: "*swasti saka warsatita 961 juru pandai suryya barbwat bakas bhatara lokanatha*". Angka tahun yang disebut dalam prasasti masih belum jelas karena hurufnya telah rusak. F.D.K. Bosch menafsirkan tahun 1024 M, sedangkan L.Ch. Damais membacanya tahun 1039 M. Sekarang arca Lokanatha ini disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor inventaris B.626d (Mulia, 1980: 25; Suhadi, 2009: 142). Berita sebagaimana termaktub dalam prasasti tersebut menginformasikan bahwa seorang pandai logam bernama Suryya yang membuat arca Bhatara Lokanatha, yang berarti si pembuat arca menyatakan bahwa arca logam Lokanatha tersebut merupakan buatannya tanpa ada informasi lain yang lebih luas. Maksud pembuatan arca tersebut jelas bertujuan keagamaan, sementara membuat arca dewata merupakan perbuatan baik untuk mengharapkan *dharmaphala*.

(2) Prasasti Si Topayan; ditemukan pada dua lapik arca batu di halaman Biaro Si Topayan. Arca yang dimaksud telah hilang

dipenggal dan hanya tersisa lapiknya. Pada salah satu lapik terdapat inskripsi yang mewartakan bahwa seseorang bernama Hang Tahi si Rang-ngit Kabayin dan seorang lain bernama pu Anyawarin membuat tempat kediaman untuk para dewa di bawah satu atap. Inskripsi pada lapik lain berisi *candrasangkala* yang berpadanan dengan tahun 1157 Saka atau tahun 1235 M. Selain itu terdapat juga kata *"byara"* dan kata *"paduka sri maharaja"* tanpa menyebut nama raja (Suleiman, 1985: 25–26). Prasasti ini hanya menyebut maklumat tentang orang-orang yang membuat bangunan suci sebagai persemayaman arca dewa di bawah naungan atap. Mungkin semula arca-arca dewa diletakkan pada suatu *batur sabha* terbuka tanpa atap sehingga terkena hujan dan panas. Kata *paduka sri maharaja* tanpa diikuti jati diri raja agaknya merupakan kesengajaan karena—menurut para penulis prasasti—yang dimaksud Paduka Sri Maharaja pada masanya tentu sudah dipahami. Tiada penyebutan nama raja dalam prasasti sangat mungkin pembuatan bangunan suci bagi arca dewa dan *byara* termaksud bukan atas perintah Paduka Sri Maharaja dan juga tidak ada kaitannya dengan keputusan raja.

(3) Prasasti Porlak Dolok; dipahatkan pada tugu batu yang bagian puncaknya berbentuk kepala Ganesa (gajah), masih *in-situ*. Aksara prasasti berbentuk aksara Jawa kuna, tetapi huruf-hurufnya sudah sangat aus, dan terdapat kata *"paduka sri maharaja"*. Damais memberi tarikh 25 Oktober 1213 untuk prarsti tersebut (Mulia, 1980: 25; Suhadi, 2009: 142).

(4) Prasasti Aek Sengkilon; ditemukan dari reruntuhan tubuh candi Aek Sengkilon, tidak berangka tahun, tetapi diperkirakan berasal dari abad ke-14. Prasasti hanya berupa inskripsi ringkas, digoreskan pada lempengan emas tipis berukuran 13 x 5 cm. Di bagian tengah lempengan emas digoreskan bentuk *wajra* serta kata *"hum"* dalam aksara Nagari. W.F. Stutterheim berpendapat prasasti ini berkaitan dengan pemujaan terhadap Dewa Yamari. Saat ini Prasasti Aek Sengkilon disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor inventaris 6146 (Mulia, 1980: 25; Suleiman, 1985: 28; Suhadi, 2009: 142).

(5) Prasasti Tandihet; diperkirakan berasal dari abad ke-13, digoreskan pada lempengan kertas emas berukuran 12,5 x 4,5 cm, pada bagian tengah prasasti terdapat bentuk persegi dan *wajra* pada keempat sisinya. Hasil pembacaan W.F. Stutterheim menyatakan bahwa prasasti berisi bunyi orang tertawa, yang mungkin dilakukan dalam upacara Tantrayana, karena berbunyi: *"hahaha hum huhu hai ho hauhaha ..."*. Sekarang Prasasti Tandihet disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan Nomor 6149 (Mulia, 1980: 25; Suhadi, 2009: 142). Pembacaan lain yang lebih lengkap atas Prasasti Tandihet berbunyi: *"wanwa wanwanagi bukangrhugrhu citra samasya satun ha ha ha ha, hum, hu hu he hai, ho ha u haha oma hum ..."*. Bertolak pada pendapat Stutterheim, Satyawati Suleiman menyatakan bahwa bunyi *"ha, he ho"* merupakan suara tawa,

sedangkan bunyi *"hum"* merupakan suara banteng (Suleiman, 1985: 27–28). Tertawa yang dimaksud kedua pakar tersebut bukan sekedar tertawa biasa, melainkan mungkin mantra yang harus diucapkan selama upacara pemujaan dewata berlangsung.

Masih ada beberapa prasasti lain yang ditemukan di kawasan Padang Lawas, sedang yang diuraikan di atas hanya sebagai bukti bahwa pada masa silam agaknya terjadi bermacam kegiatan keagamaan di Padang Lawas. Isi prasasti pada umumnya merupakan uraian pendek berkenaan dengan keagamaan dan tidak seperti prasasti-prasasti kerajaan-kerajaan di Jawa, Sriwijaya, atau Malayu yang menguraikan nama raja dengan gelarnya, para pejabat kerajaan, para menteri, dan sebagainya. Uraian semua prasasti di Padang Lawas hanya berupa narasi keagamaan Buddha Mahayana-Tantrayana. Dengan demikian jelas bahwa Panai pada masanya bukanlah suatu kerajaan sebagaimana yang diperkirakan selama ini, karena bukti-bukti sebagai kerajaan belum atau tidak ditemukan hingga sekarang. Hal itu tampak pada seluruh data yang ada tentang Panai sebagai berikut:

(1) Tidak pernah menyebut nama raja. Walaupun Prasasti Si Topayan dan Porlak Dolok menyebutkan kata "*paduka sri maharaja*", namun nama raja tidak disebutkan, sehingga tidak jelas sri maharaja mana yang dimaksud. Mungkin saja arca dewa utama yang terdapat di *biaro-biaro* tersebut yang layak dijuluki sebagai "Paduka Sri Maharaja".

(2) Sebagai suatu kerajaan Panai tentu pernah mengirim utusan ke Cina sebagaimana lazimnya kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara pada masanya, namun sejauh ini catatan Cina tidak ada yang memberitakan perihal utusan dari Panai, kecuali Mo-lo-yeu, Chan-pi, Pa-lin-fong, dan beberapa yang lain.

(3) Apabila Panai merupakan suatu kerajaan tentu batas wilayahnya dapat diidentifikasi, sekalipun hanya merupakan perkiraan. Batas-batas wilayah dan pengaruh kekuasaan Panai sampai sekarang belum dapat diketahui secara pasti.

(4) Tidak ada berita dari wilayah sekitarnya (Sumatera dan Semenanjung Melayu) yang menyatakan bahwa Panai merupakan suatu kerajaan. Walaupun *Kakawin Nagarakrtagama* menyebut Pane atau Panai sebagai daerah di Sumatera mengirim utusan ke istana Majapahit, namun tidak ditegaskan sebagai kerajaan.

Mungkin Pane atau Panai merupakan bandar niaga yang tetap ramai walaupun pernah diserang oleh armada Cholamandala pada awal abad ke-11, sehingga mengirim utusan ke Majapahit. Wilayah Pane sebagai bandar niaga mungkin sampai ke tepi pantai barat Sumatera, namun jauh di pedalamannya terdapat padang atau tanah lapang luas (*padang lawas*) tempat melakukan upacara esoterik Buddha Mahayana-Tantrayana. Di tempat itulah kemudian berdiri puluhan *biaro*, *caitya*, stupa, *mandapa*, gugusan percandian, puluhan arca, prasasti, *stambha*, dan tinggalan arkeologis lain di

DAS Barumun, Pane, dan Sirumambe (Schnitger, 1964: 86; Mulia, 1980: 6, Fig. 2). Menurut laporan Belanda pada pertengahan abad ke-19 wilayah tersebut memang masih merupakan lahan datar yang luas dan disebut sebagai "padang luas" atau "padang lawas", atau "tanah datar yang agung" (*great plain*) (Schnitger, 1964: 85). Padang Lawas yang meliputi lahan 1.500 km^2 (Susetyo 2010: 2) pada masanya merupakan kawasan upacara keagaman yang tersembunyi di pedalaman hutan rimba Sumatera. Tempat tersebut merupakan kumpulan *ksetra-ksetra*, karena setiap kompleks *biaro* merupakan satu *ksetra*. Oleh karena itu ketika masih didukung oleh kegiatan keagamaan kawasan Padang Lawas layak apabila disebut dengan *Mahaksetra Panai*, bukan Kerajaan Panai.

4. Masa Akhir Panai

Masih belum diketahui secara pasti kronologi kapan Panai di wilayah Padang Lawas ditinggalkan sebagai kegiatan keagamaan *bauddha*. Yang jelas masuknya agama Islam ke Pulau Sumatera sejak abad ke-13 dan semakin merebak dalam abad ke-15 menjadi salah satu sebab hilangnya peran *Mahaksetra* Panai dalam kehidupan agama Buddha di Nusantara. Agama Buddha di Sumatera tidak ada lagi jejaknya pada abad ke-16 seiring dengan berkembangnya pusat-pusat kekuasaan baru yang berlandaskan konsepsi agama Islam. Mungkin sekali beberapa konsep *Buddhadharma* yang dikembangkan di Panai telah menyatu dalam kepercayaan masyarakat setempat yang belum memeluk Islam waktu itu.

Dalam pada itu harus diperhatikan maklumat kelompok Prasasti Sorik Marapi yang ditemukan di lereng timur Gunung Sorik Marapi dekat Kotanopan, di selatan Padang Sidempuan, yang masih termasuk kawasan Padang Lawas. Prasasti yang dipahatkan pada empat tugu batu itu sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta dengan nomor inventaris D.53, D.65, D.83., dan D.84, serta mempunyai kronologi 1242 hingga 1372 M, yang berarti rentang kegiatan di *Mahaksetra* Panai masih berlangsung hingga sekitar tahun-tahun itu. Selain menggunakan aksara Jawa kuna prasasti-prasasti dari Padang Lawas juga mengenal bentuk-bentuk yang menjadi aksara Batak pada masa kemudian; artinya prasasti-prasasti itu juga ditulis dengan proto-aksara Batak (terlihat pada pemahatan Prasasti Si Topayan). Hal itu menunjukkan beberapa anasir kebudayaan yang pernah berkembang di Panai masih bertahan dalam lingkungan kebudayaan Batak dewasa ini (Suhadi, 2009: 143).

Kajian tentang Panai agaknya masih perlu dilakukan secara mendalam sebelum *biaro-biaro* dan berbagai peninggalan purbakala di Padang Lawas semakin rusak binasa karena termakan usia. Bangunan-bangunan tersebut hanya terbuat dari bata dan telah berdiri sekurangnya sejak 500 tahun yang lampau. Jika bukti-bukti arkeologis tersebut semakin berkurang dan hilang niscaya peran dan riwayat Panai dalam sejarah kebudayaan Indonesia semakin sukar dilacak.

— 2 —

Kerajaan Malayu

1. Mandala Malayu dan Malayupura di Dharmmaśraya

Malayu sebagai nama tempat telah dikenal sejak abad ke-7 M bersamaan dengan berkembangnya Śrîwijaya, namun kemudian tidak ada beritanya lagi sebab sangat mungkin Malayu kemudian menjadi bagian Kerajaan Śrîwijaya. Dengan demikian sepanjang perkembangan Śrîwijaya dari abad ke-8 hingga abad ke-11 Malayu tidak disebut-sebut lagi sebagai pusat kekuasaan atau bandar. Para ahli memperkirakan tempat kedudukan Malayu berada di wilayah Jambi di tepian Sungai Batang Hari, hanya saja belum dapat diketahui secara pasti titik lokasinya. Malayu, pada masa Śrîwijaya, agaknya tidak mempunyai penguasa sendiri dan sangat mungkin hanya merupakan pusat pendidikan dan penziarahan Buddha Mahayana yang ramai dikunjungi oleh kaum agamawan.

Di tepian Sungai Batang Hari di wilayah Kabupaten Muaro Jambi terdapat situs percandian yang sangat luas dan memiliki beraneka bentuk bangunan keagamaan Buddha, dinamakan situs Muarojambi. Situs tersebut berjarak sekitar 20 km di arah timur laut kota Jambi sekarang, ke arah hilir Sungai Batang Hari. Ada kemungkinan Malayu pada zaman Kerajaan Śrîwijaya berkembang di wilayah tersebut. Berdasarkan uraian berita musafir Cina, I-tsing, Malayu merupakan tempat persinggahan dalam pelayarannya menuju India dan sebaliknya, tetapi tidak disebutkan sebagai tempat yang diperintah oleh seorang raja.

Peran Malayu pada masa Śrîwijaya belum dapat diketahui secara jelas. Meskipun demikian hal yang pasti adalah Malayu merupakan salah satu negeri yang berada di bawah pengaruh Śrîwijaya pada saat kejayaan. Berita-berita Cina abad ke-10–11 menyebut adanya kerajaan *San-fo-tsi* yang berkuasa di Sumatera dan tidak menyebut *Mu-lai-you* sebagai kerajaan. Hal yang masih belum jelas adalah apakah *San-fo-tsi* berarti Śrîwijaya atau sebutan lain untuk Malayu, sebab jika berita Cina menyebut Śrîwijaya ejaannya menjadi *She-li-fo-she*, namun sebutan *She-li-fo-she* sudah tidak dicatat lagi dalam berita-berita Cina pada masa itu. Kebetulan pada abad ke-10–11 tidak dijumpai lagi prasasti-prasasti Kerajaan Śrîwijaya, atau mungkin belum ditemukan. Dengan demikian uraian sejarah Śrîwijaya abad ke-10 sampai keruntuhannya abad ke-11 mengandalkan sumber luar, yaitu berita Cina dan prasasti-prasasti dari India.

Situs Percandian Muaro Jambi.
Sumber: Agus Widiatmoko

Jauh beberapa abad kemudian, yakni abad ke-13, terdapat lagi data yang berkenaan dengan Malayu dengan penemuan Prasasti Amoghapasa A dan B. Prasasti yang dipahatkan pada bagian belakang *prabhamandala* (sandaran) arca disebut Prasasti Amoghapasa A, ditemukan di daerah Rambahan (Padang Candi), di tepian Sungai Batang Hari, Jambi. Pada waktu Prasasti Amoghapasa A ditemukan alas arca (lapik) telah terpisah dan ditemukan di daerah Padang Roco (Sungai Langsat), Sumatera Barat. Pada lapik arca tersebut juga terdapat pahatan prasasti, yang kemudian disebut Prasasti Amoghapasa B. Sekarang keduanya telah disatukan dan disimpan di Museum Nasional, Jakarta, dengan nomor inventaris D.198/6469.

Kitab *Pararaton* menguraikan Raja Singhasari Krtanagara mengirimpasukanke Tanah Melayu (*Suwarnabhummi*) pada tahun 1275 M (Hardjowardojo, 1965: 37 dan 46). Akan tetapi Prasasti Amoghapasa A menyatakan bahwa pada tahun 1286 M (1208 S) Raja Krtanagara mengirimkan arca *Amoghapasalokeswara* kepada Raja Malayu Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa untuk didirikan di suatu tempat suci bernama Dharmmaśraya. Mungkin sekali pengiriman arca tersebut ke Malayu terjadi antara tahun 1286 M (arca selesai dibuat) dan sebelum runtuhnya Singhasari akibat serangan Raja Gelang-Gelang Jayakatwang tahun 1292 M.

Prasasti Amoghapasa A dipahatkan pada bagian alas (lapik) arca, sedang di sisi belakang sandaran arca juga terdapat prasasti namun dipahatkan pada masa yang kemudian, yakni tahun 1347 M (1269 S), pada masa pemerintahan Adityawarman. Prasasti di belakang *prabhamandala* itu seringkali disebut Prasasti

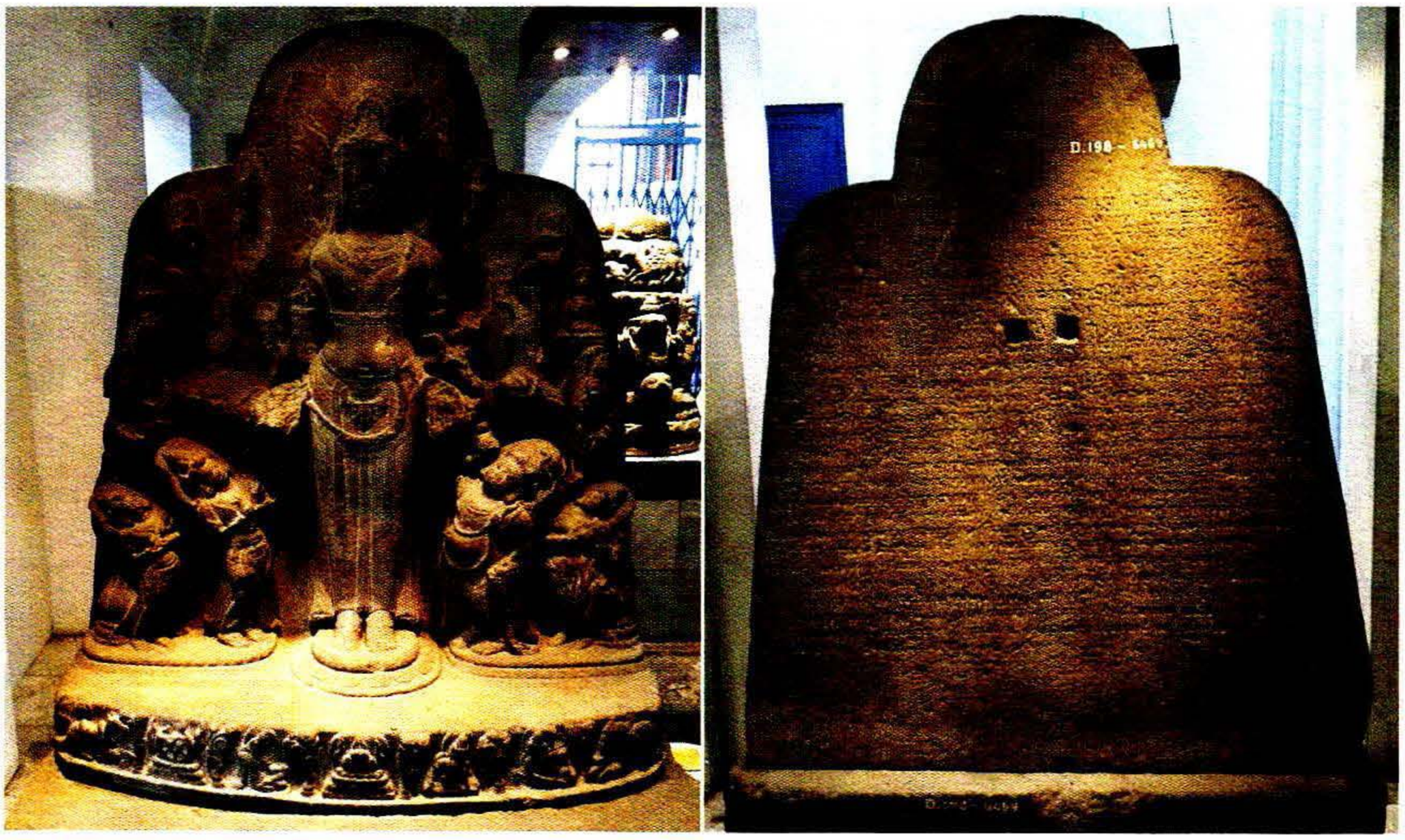

Kiri: Patung Amoghapasa yang ditemukan di Rambahan. Kanan: Prasasti Amoghapasa A terpahat di bagian belakang *prabhamandala* arca tersebut. Sumber: Agus Widiatmoko

Arca Amoghapasa B. Isinya secara garis besar menyatakan perbaikan bangunan suci *bauddha* yang rusak, menegakkan kembali arca Buddha yang berwujud *Gaganaganja* (sebutan lain Amoghapasa), dan pemujaan tokoh raja yang telah mangkat dan dianggap sebagai Jina, di suatu bangunan *Jinalaya* (Sri Handari, 2015: 68–69).

Malayu yang disebut dalam Prasasti Amoghapasa A merupakan nama kerajaan, nama lain Malayupura sebagaimana disebut dalam prasasti-prasastinya. Malayupura tidak lagi berada di tepian Sungai Batang Hari bagian hilir, namun berdasar temuan prasasti-prasastinya berada di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Hari. Dengan memperhatikan sebaran prasasti-prasastinya, pusat kekuasaan Kerajaan Malayu pada masa itu berkembang di wilayah pedalaman Jambi dan Sumatera Barat sekarang.

Demikianlah terdapat dua Malayu pada masa yang berbeda, yaitu (1) Malayu zaman Śrîwijaya (abad ke-7–8 M) dan (2) Kerajaan Malayu atau Malayupura abad ke-13–14. Keduanya berkembang di DAS Batang Hari, namun di tempat berbeda. Berdasarkan data yang tersedia terdapat perbedaan di antara dua Malayu tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

PEMBEDA	MANDALA MALAYU	MALAYUPURA
Lokasi	Di tepian Sungai Batanghari hilir, di wilayah Jambi.	Di pedalaman Sumatera Barat di daerah hulu Sungai Batanghari, daerah Dharmmaśraya.
Kronologi	Dikenal dalam abad ke-7—8 M, masa Śrîwijaya berkembang, tidak dikenal lagi	Mulai dikenal dalam abad ke-13 bersamaan dengan masa Singhasari di Jawa, sampai akhir abad ke-14.
Kegiatan Utama	Aktivitas keagamaan, tempat ritual-penziarahan, dan pendidikan agama Buddha.	Pusat pemerintahan, kedudukan raja-raja yang berkuasa di Suwarnabhumi.
Masa Akhir	Tidak begitu jelas, mungkin ditinggalkan sejak lenyapnya Kerajaan Śrîwijaya dalam abad ke-12, dan berkembangnya Kerajaan Malayu di pedalaman.	Sekitar akhir abad ke-15, bersamaan dengan tumbuh kembangnya agama Islam di wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan data dapat dinyatakan bahwa sejarah tentang Malayu lebih menguraikan Malayu di Dharmmaśraya atau Malayupura sebagai kerajaan yang mulai dikenal pada abad ke-13 dan berakhir pada abad ke-14. Dalam pada itu pembicaraan tentang Malayu sebagai *mandala Buddha* pada masa Śrîwijaya harus membahas beberapa peninggalannya yang diduga berada di kawasan purbakala Muarojambi. Di kawasan tersebut terdapat beraneka monumen, seperti candi, stupa, *caitya,* wihara, *mandapa*, dan gerbang. Di samping itu juga terdapat bangunan prasarana berupa kolam-kolam, saluran air kuna, dan kanal-kanal yang memotong kawasan Muarojambi; serta temuan berbagai pecahan artefak lain berupa arca dan fragmen arca, bagian bangunan candi, ribuan pecahan keramik Cina, artefak-artefak logam, dan sebagainya.

2. Mandala Malayu

Pada masa awal perkembangan Śrîwijaya tempat yang dinamakan Malayu disinggahi oleh pendeta Cina I-tsing dalam perjalanannya dari Cina ke India dan juga sebaliknya. Berita Cina tersebut menyebut dua lokasi berbeda antara Śrîwijaya (*She-li-fo-shih*) dan Malayu (*Mu-lai-you*). Pada tahun 671 M I-tsing datang pertama kali ke Śrîwijaya dan Malayu—yang kemudian disebut Śrîwijaya—dan melaporkan bahwa agama Buddha yang berkembang kala itu Buddha Hinayana aliran *Mulasarwatiwada* (Takakusu, 2014: 33). Antara tahun 672 dan tahun 685 M I-tsing berada di Nalanda, India, mempelajari agama Buddha dan pada tahun 685 M pulang dari India namun singgah kembali ke Śrîwijaya (Malayu) sebelum melanjutkan pelayaran ke Tiongkok. Antara tahun 685 dan tahun 689 M I-tsing tinggal di Malayu yang telah menjadi bagian Śrîwijaya untuk menerjemahkan kitab-kitab ajaran Buddha dan menyusun dua kitab gubahannya sendiri. Pada tahun 692 M I-tsing mengiriman kitab-kitab hasil terjemahan dan gubahannya ke Cina dan baru pada tahun 695 ia pulang ke negerinya (Sumadio, 1984: 76 dan 81; Takakusu, 2014: 44).

Masalah penting berkenaan dengan berita yang berkait Pendeta I-tsing adalah di mana sebenarnya ia singgah untuk belajar agama

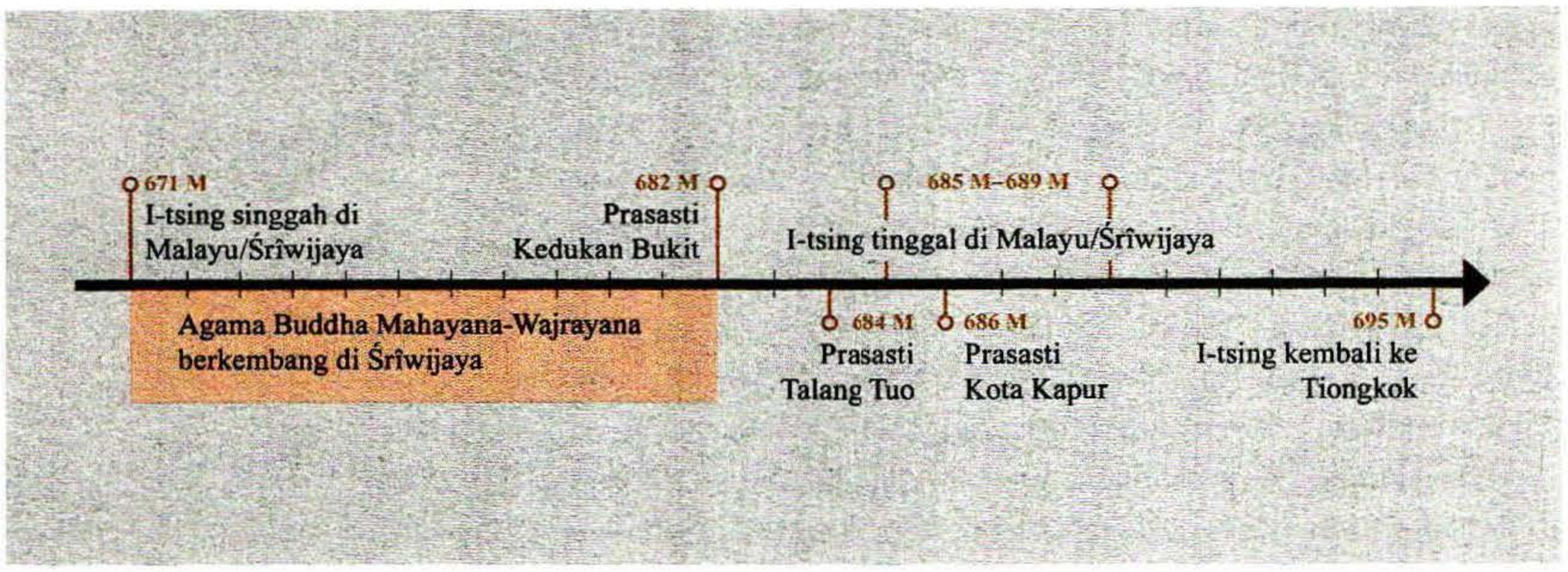

Bagan Lini masa kedatangan I-tsing, kronologi beberapa prasasti, dan mulai merebaknya agama Buddha Mahayana-Wajrayana di Malayu/Śrîwijaya.

Buddha dan tata bahasa Sansekerta sebelum melanjutkan perjalanan ke India. Dalam catatannya ia melaporkan bahwa ia singgah di *She-li-fo-che* atau Śrîwijaya. Di Śrîwijaya banyak sekali bhiksu Buddha yang menjalankan agamanya sama persis dengan yang dilakukan di Nalanda, yang berarti terdapat sejumlah besar wihara, stupa, *caitya*, dan bangunan lain di dalam kompleks wihara yang luas.

Apabila Śrîwijaya terletak di tepian Sungai Musi, Palembang, tentu situs *bauddha* yang luas dengan aneka peninggalan bangunan sucinya banyak ditemukan di sana, namun ternyata sampai sekarang belum pernah terjadi. Alih-alih yang ditemukan adalah situs Muarojambi di tepian Sungai Batang Hari di Jambi. Dengan demikian sangat mungkin kegiatan keagamaan Buddha yang dilaporkan I-tsing di Śrîwijaya itu sejatinya terjadi di kompleks wihara yang sekarang disebut Muarojambi.

Para sarjana sepakat bahwa tempat kedudukan *Mu-lai-you* (Malayu) dahulu berada di Jambi sebagaimana dijelaskan oleh I-tsing bahwa Malayu yang dia singgahi telah menjadi Śrîwijaya atau merupakan bagian dari Śrîwijaya. Dengan demikian apabila Muarojambi dihipotesiskan sebagai Śrîwijaya dengan 1.000 orang bhiksu yang tiap hari menjalankan aktivitas keagamaannya menjadi sah saja. Kegiatan keagamaan Buddha terjadi di Malayu bagian Śrîwijaya, di suatu kompleks wihara yang merupakan *mandala* atau *Mahawihara Malayu*. Adapun tempat kedudukan Raja Śrîwijaya masa itu (ketika I-tsing bermukim di Śrîwijaya) bukan di *Mandala Malayu* di tepian Sungai Batang Hari, tetapi mungkin saja di suatu tempat di tepian Sungai Musi. Atas dasar argumentasi itulah maka yang dimaksud dengan Malayu pada saat I-tsing berkunjung ke Sumatera bukan suatu tempat kedudukan raja, melainkan pusat pendidikan agama Buddha yang dapat disebut *mandala*, yang bentuknya merupakan suatu *mahawihara*. Sudah barang tentu tempat itulah yang layak disebut dengan *Mandala Malayu* yang sekarang tinggal sisa-sisanya dan dinamakan kawasan kepurbakalaan Muarojambi.

Dalam perjalanan menyusuri Sungai Batang Hari tahun 1820 S.C. Crook, seorang kapten kapal Inggris, sengaja singgah di

desa Muarojambi di tepian sungai tersebut. Dalam laporannya ia menjelaskan bahwa di dekat desa itu terdapat runtuhan bangunan kuna dari bata, yang sebagian besar masih tertutup tanah membukit. Di sekitar reruntuhan tersebut juga terdapat arca-arca yang sebagian besar telah rusak dan banyak pula fragmen keramik Cina. Crook menyimpulkan bahwa sangat mungkin dahulu di kawasan desa Muarojambi berupa kota besar atau suatu ibukota kerajaan. Pada tahun 1824 seorang peneliti lain, John Anderson, menulis laporan tentang adanya kepurbakalaan di Muarojambi. Berkat tulisan itu Muarojambi mulai dikenal di kalangan ilmiah. Para peneliti yang juga memberi perhatian kepada situs Muarojambi pada masa yang lebih kemudian antara lain T. Adam, G. Rouffeur, dan F.M. Schnitger.

Schnitger merupakan sarjana pertama yang melakukan penelitiannya, yakni tahun 1934. Ia menyimpulkan bahwa percandian Muarojambi berkaitan dengan Kerajaan Malayu. Ia menyebutkan beberapa runtuhan candi selain Candi Stano (Astano) yang memang masih terlihat strukturnya. Candi-candi lain yang telah dikenali Schnitger antara lain Candi Gumpung, Tinggi, Gunung Perak, Gudang Garem, Gedong I, dan Gedong II (Schnitger,1964: 15–32).

Pada masa Indonesia merdeka penelitian terhadap situs Muarojambi dimulai pada tahun 1954. R. Soekmono merupakan arkeolog pertama orang Indonesia yang memimpin langsung penelitian-penelitian awal situs Muarojambi. Kajian intensif dilakukan sejak tahun 1975 untuk membuka beberapa *menapo* yang masih menutupi sisa bangunan candi. Kegiatan yang berlangsung hingga tahun-tahun berikutnya berhasil memperlihatkan adanya reruntuhan yang luas dari situs Kota Mahligai, Kedaton, Gedong I dan II, Gumpung, Tinggi, Kembar batu, dan Astano. Kegiatan "pembersihan" lahan sekitar situs dan pemugaran dilakukan sejak tahun 1978. Pemugaran pertama kali dilakukan terhadap Candi Tinggi, yang berlangsung antara tahun 1978 dan tahun 1979, kemudian Candi Gumpung dan beberapa candi lain pada tahun 1982–1988. Walaupun tidak mungkin seluruh bangunan dapat lengkap seperti wujudnya semula, namun sampai sekarang pekerjaan penelitian dan upaya pemugaran terhadap beberapa candi atau *batur mandapa* masih terus dilakukan, dengan catatan sejauh data yang tersedia.

Berikut beberapa fenomena arkeologis di Muarojambi yang menarik.

(1) Kawasan kepurbakalaan memanjang timur-barat mengikuti tepian aliran Sungai Batang Hari.

(2) Struktur bangunan candi tanpa bilik dan yang tersisa hanyalah bagian kaki bangunan atau batur-batur berdenah bujur sangkar atau empat persegi panjang.

(3) Halaman percandian cenderung luas dengan dikelilingi pagar; bagian halaman dalam yang berpagar ada yang disekat-sekat oleh pagar pembatas ke dalam beberapa halaman dengan sisa struktur bangunan di dalamnya.

(4) Latar belakang keagamaan yang menjadi konsep dasar adalah Buddha Mahayana, bukan agama Buddha Hinayana atau bahkan Hindu-saiwa.

Kepurbakalaan di kawasan Muarojambi terutama berada di tepian utara aliran Sungai Batang Hari. Rentang kawasan situs sekitar 7,5 km, melebar sekitar 3 km, dibatasi oleh Sungai Brembang di sebelah utara dan Sungai Batang Hari di sebelah selatan. Bagian paling barat situs tampak anasir kuna berupa bukit buatan yang oleh penduduk dinamai Bukit Perak dan situs paling timur yang masih dapat dilacak keberadaannya adalah *Menapo* Kemingking. Di kawasan tersebut terdapat bermacam bukti kegiatan keagamaan Buddha pada masa silam. Berikut keistimewaan kawasan percandian Muarojambi yang dapat dikemukakan.

(1) Muarojambi merupakan situs percandian Buddha terluas di Indonesia dan tidak ada lagi situs percandian Buddha lain yang kaya data kepurbakalaan *bauddha*. Memang di Kecamatan Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat, terdapat situs percandian *bauddha* yang dinamakan Batujaya, namun keluasan area dan khasanah situsnya tidak setara dengan kawasan Muarojambi.

(2) Muarojambi dilengkapi danau buatan, yang disebut Telago Rajo, yang pada masanya berkait dengan kegiatan keagamaan di tempat tersebut. Pada masa silam memang terdapat beberapa danau buatan di Indonesia, seperti Segaran di Trowulan dan Tasik Ardi di kawasan Banten Lama, namun kedua danau buatan ini tidak berkaitan dengan kegiatan keagamaan.

(3) Di kawasan situs Muarojambi dilengkapi parit-parit yang dibuat mengelilingi candi-candi tertentu (misalnya *kanal tuo* dan Danau Kelari). Pembuatan parit keliling yang "menyayat-nyayat" kawasan Muarojambi didasarkan pada konsepsi keagamaan *bauddha* sebagai pelengkap bangunan suci yang dikelilingi aliran air.

(4) Pelataran (halaman) candi-candi Muarojambi diperkeras batu bata atau dibuat menjadi semacam batur/lapik sebagai alas bangunan. Hal itu menunjukkan adanya kegiatan keagamaan di pelataran percandian seperti berjalan mengelilingi *caitya* atau bangunan candi yang dilakukan oleh para penziarah dengan gerak searah jarum jam (*pradaksina*). Apabila pelataran tersebut tidak dilapisi susunan batu bata atau batu-batu kerikil, maka tanahnya akan mudah becek, apalagi pada musim hujan. Tanah yang becek dan kotor akan membuat para penziarah tidak nyaman melakukan upacara mengelilingi bangunan suci.

2.1 Candi Kedaton

Candi Kedaton merupakan percandian terluas di kawasan Muarojambi. Halamannya dikelilingi pagar (*vedika*) yang dilengkapi dengan beberapa pintu gerbang (*gopuram*) di keempat arah mata angin. Pintu gerbang utama terdapat pada rentang utara pagar keliling dengan rentang celah gerbang berukuran sekitar 2,5 m. Gerbang utama mempunyai bangunan tambahan ke kanan (timur) dan kiri (barat), sehingga gerbang itu berdenah seperti Salib Yunani atau denah berbentuk *tapak dara* yang bersambung dengan tembok kelilingnya. Deretan anak tangga pada gerbang baik di sisi luar maupun dalam gerbang dilengkapi dengan empat pipi tangga, yang ujungnya dihias bentuk *Makara* dari batu andesit.

Ruang dalam lingkup pagar keliling terbagi menjadi beberapa halaman, yang masing-masing juga disekat pagar, sehingga dengan demikian terdapat 14 halaman yang disekat-sekat pagar di dalam lingkup area percandian. Agaknya dahulu pada saat candi masih berfungsi di dalam setiap lingkup pagar terdapat bangunan wihara kayu untuk tempat tinggal para bhiksu, namun sekarang bangunan itu sudah tidak tersisa lagi.

Bangunan percandian Kedaton terbuat dari bata. Candi terbesar atau bangunan utama berupa batur tinggi (tinggi setelah pemugaran sekitar 3 m), terdapat bekas penampil untuk tangga kayu di sisi utara, dan tidak memiliki bilik untuk menempatkan arca. Ukuran panjang bangunan utama 24,25 m dan lebar 24,10 m, sehingga hampir mendekati denah bujur sangkar. Dinding candi polos dan tidak dihias dengan relief apa pun, baik relief ornamen maupun relief cerita, namun terdapat ragam hias arsitektural berupa perbingkaian rata dan variasinya.

Ditemukan hal menarik pada waktu pemugaran candi. *Inner stones* (batu isian) bangunan utama ternyata berupa kerikil putih dalam jumlah banyak mengisi rongga di tubuh candi. Tubuh candi dibangun dengan susunan bata hingga puncak bangunan (*outer bricks*). Ada dugaan di puncak candi dahulu terdapat objek sakral berupa arca atau stupa yang dinaungi atap dari bahan yang mudah lapuk dengan ditopang sejumlah tiang dan terbuka tanpa dinding.

Pada jarak sekitar 2 m, tepat di sisi utara candi induk, terdapat bangunan batur *mandapa* dengan ukuran panjang 15 m, lebar 13,5 m dan tinggi sekitar 1,45 m. *Mandapa* ini mempunyai deretan anak tangga di sisi utara dan selatan untuk menaiki permukaannya. Di permukaan *mandapa* masih terdapat empat bangunan bata berbentuk kubus dan di puncaknya terdapat batu andesit pipih, yang sangat mungkin dahulu sebagai umpak keempat tiang kayu *mandapa* tersebut.

Sisa struktur pintu gerbang percandian Kedaton, kawasan Muarojambi. Sumber: Agus Widiatmoko

Dalam lingkungan pagar percandian Kedaton terdapat berbagai sisa bangunan lain, antara lain batur-batur alas stupa, *mandapa-mandapa* kecil, bahkan juga sumur yang di sekitarnya dilengkapi dengan lantai dari susunan bata. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada masa lalu ketika masih berfungsi kegiatan keagamaan yang berlangsung di percandian ini tentu sangat ramai. Di samping percandian terbesar, penduduk sekarang memberi nama bangunan itu sebagai *kedaton* (istana) karena memang kemegahan bangunan dan keragaman tinggalan reruntuhan di area yang luas.

2.2 Candi Tinggi

Percandian Tinggi merupakan gugusan bangunan. Di sisi barat terdapat dua *mandapa* yang lebih kecil dari *mandapa* di depan bangunan utama. Halamannya disekat-sekat pagar dan masih tersisa struktur *mandapa* cukup melebar di arah barat daya candi utamanya. Bangunan ini dinamakan penduduk dengan "Candi Tinggi" karena pada waktu pertama kali dikenal sebagai sisa bangunan tertinggi di kawasan Muarojambi. Candi Tinggi merupakan gugusan bangunan yang dikelilingi oleh pagar (*vedika*), terletak di arah timur Candi Kedaton pada jarak sekitar 2,5 km, dan hanya memiliki satu gapura di sisi timur percandian sehingga para penziarah masuk ke dan keluar dari area percandian melalui gerbang tersebut. Agaknya pembuatan gerbang di sisi timur sengaja dilakukan untuk memudahkan para penziarah melakukan upacara di Candi Kembar Batu yang terletak di sisi timur percandian Candi Tinggi.

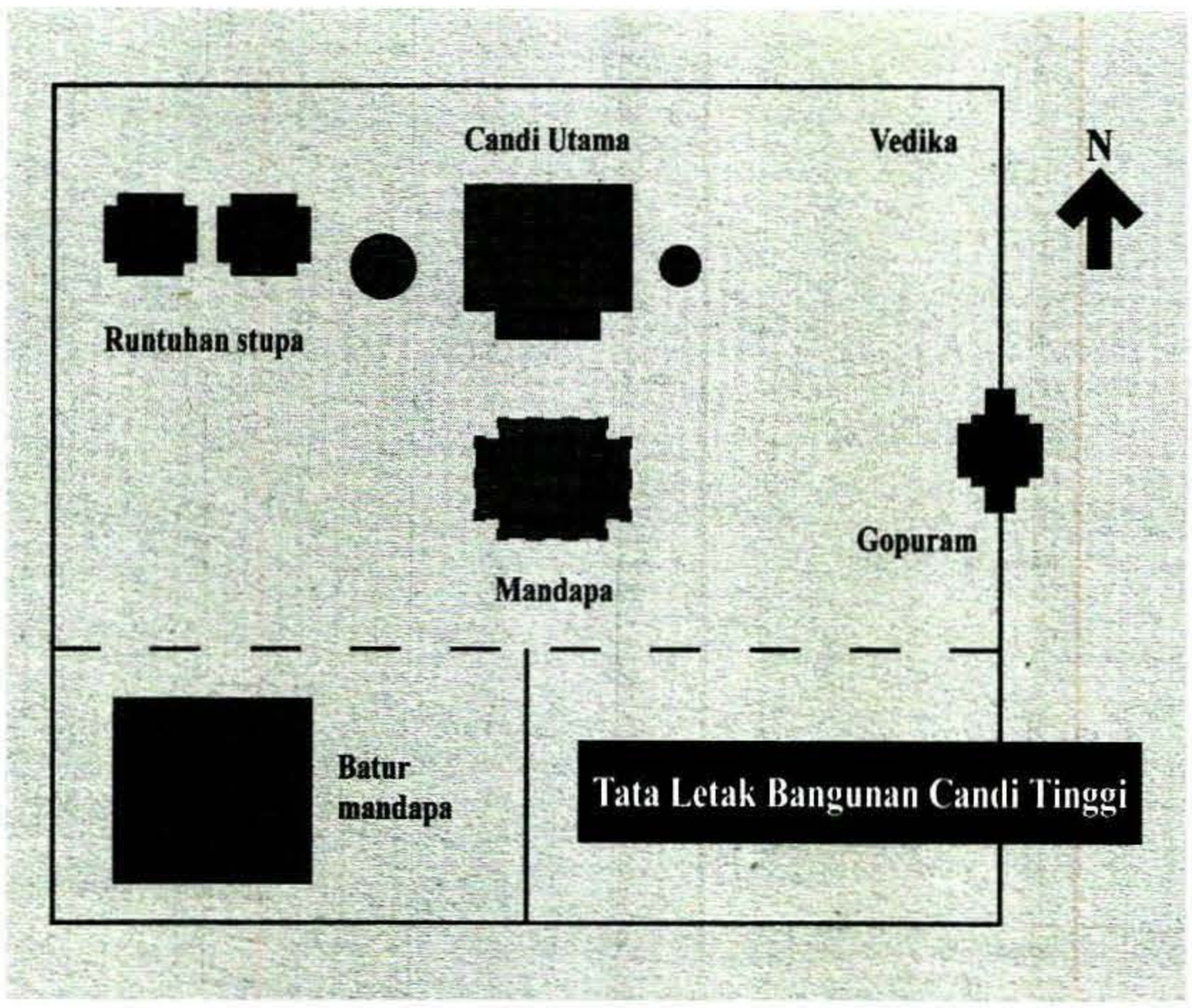

Bangunan terbesar (Candi Tinggi) di percandian tersebut merupakan batur bertingkat tiga dengan penampil tangga menjorok di sisi selatan. *Anda* (bentuk setengah lingkaran) stupa di batur tertinggi sudah berhasil dipugar, meskipun tidak lengkap sebagai suatu stupa. Bangunan ini lebih tepat dinamakan dengan *stupa-prasadha* atau "stupa yang berada di puncak kakinya yang bertingkat".

Di depan Candi Tinggi (arah selatan) terdapat reruntuhan bangunan bata, yang sangat mungkin merupakan batur *mandapa* sebagaimana dijumpai di Candi Kedaton. Di samping itu terdapat penampil bekas tangga menuju permukaan *mandapa* di sisi utara (ke arah Candi Tinggi) dan sisi selatan.

2.3 Candi Gumpung

Candi Gumpung memiliki lahan percandian luas kedua setelah Candi Kedaton. Halaman yang dibatasi pagar keliling berdenah hampir bujur sangkar dan berukuran 150 x 147 m. Pagar dibentuk dengan susunan bata, namun sebagian besar telah runtuh. Berdasarkan temuan reruntuhan yang batanya berserak di rentang sisi utara, diperkirakan tinggi tembok pagar sekitar 4 m dan tebal 1,26 m (Widiatmoko, 2015: 55). Menilik pagar keliling yang cukup tinggi tersebut agaknya kegiatan yang dilakukan di dalam lingkup pagar agak tertutup. Selain bangunan suci utama sangat mungkin di dalam pagar terdapat bangunan-bangunan tempat tinggal bhiksu (wihara). Pintu gerbang terdapat di sisi timur, sangat mungkin sengaja dibuat demikian untuk memudahkan para bhiksu menuju ke Kolam Telago Rajo dan Candi Tinggi yang merupakan *stupa-prasadha*.

Bangunan Candi Tinggi setelah dipugar. Di bagian puncak seharusnya terdapat stupa, namun sisa bata yang membentuk stupa sangat kurang untuk dilakukan pembinaan ulang.
Sumber: Agus Aris Munandar

Di dalam lingkup pagar keliling terdapat lahan percandian yang dibagi ke dalam beberapa halaman dengan pagar-pagar penyekat yang dilengkapi pintu-pintu gerbang. Di halaman tengah, agak bergeser ke belakang kompleks (ke arah barat), berdiri bangunan utama Candi Gumpung. Sama dengan Candi Kedaton, candi ini pun lebih merupakan bangunan batur yang tinggi sekitar 6,50 m dengan ukuran panjang bangunan 25,53 m, dan lebar 17,45 m (Widiatmoko, 2015: 55). Candi Gumpung mempunyai penampil di sisi timur, sehingga bangunan itu dianggap menghadap ke timur. Di bagian depan penampil terdapat lantai lebih menjorok, yang ujungnya dihias dengan Makara dari batu. Saat ini tidak dijumpai arca apa pun di Candi Gumpung. Arca Prajnaparamita dengan kepala terpenggal, namun penggarapannya halus dan detail, yang dahulu didapatkan pada saat proses pemugarannya sekarang disimpan di Museum Situs Muaro Jambi.

Di sisi timur dan berhadapan dengan Candi Gumpung terdapat sisa *batur mandapa* berukuran 12,73 x 9,83 m dengan ketinggian 0,35–0,40 m dari permukaan tanah sekarang. Di bagian tengah *mandapa* terdapat dua lubang berbentuk lingkaran, yang sangat mungkin dahulu untuk menancapkan tiang penopang atap *batur mandapa*. Pada waktu mengadakan upacara keagamaan kaum agamawan biasanya duduk di *mandapa* menghadap ke arah bangunan utama, menghadap ke objek sakral, berupa arca dewa atau dewi *bauddha* atau *caitya* (stupa yang menjadi sasaran pemujaan). Agak jauh dari bangunan candi, di arah tenggara *mandapa*, terdapat fetur bekas kolam berdenah empat persegi panjang dengan ukuran panjang 29 m, lebar 11,50 m, dan kedalaman yang sekarang tersisa sekitar 1 m (Widiatmoko, 2015: 56). Candi Gumpung diperkirakan mempunyai pertalian

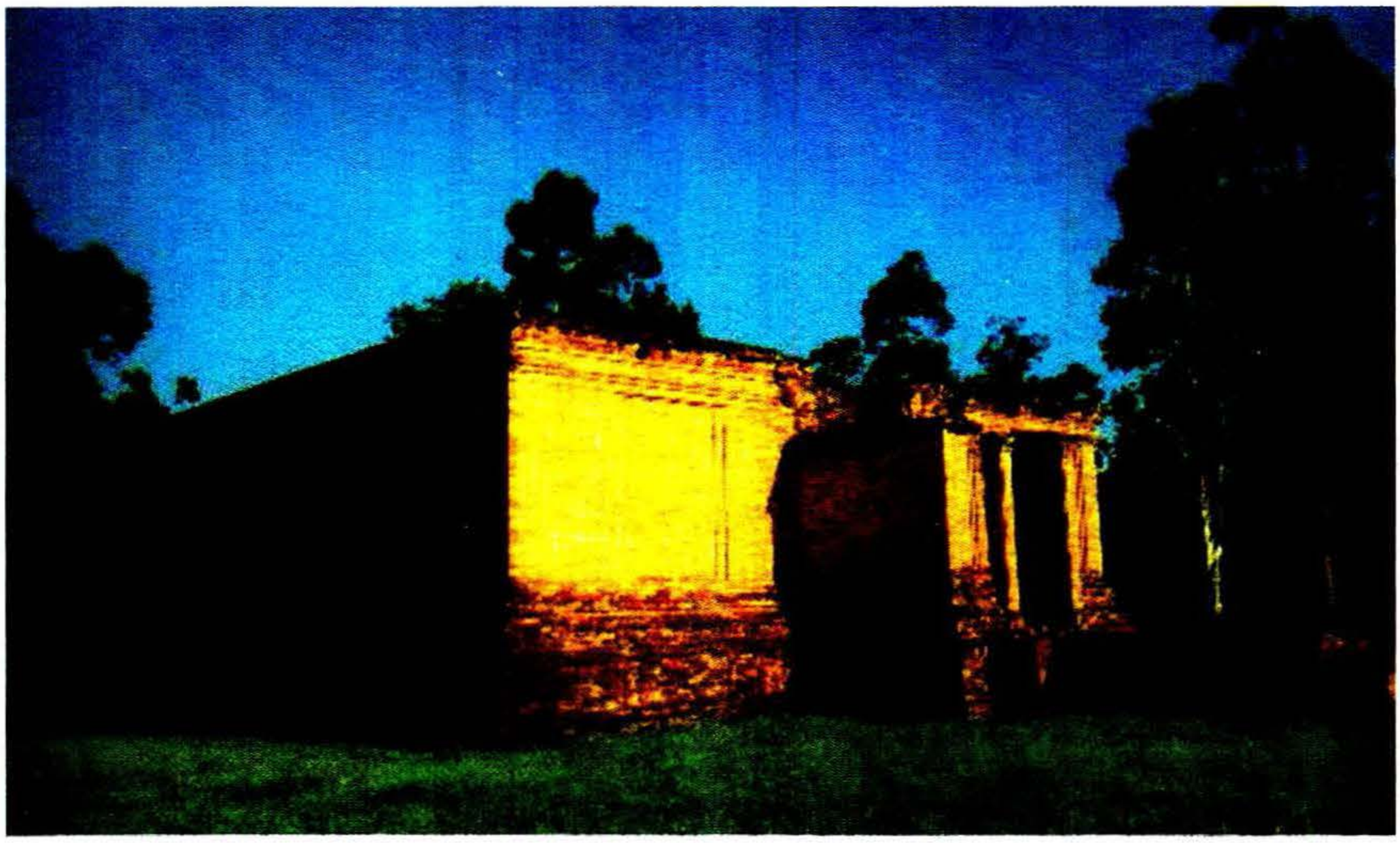

Candi Gumpung dari arah tenggara.
Sumber: Agus Widiatmoko

kegiatan keagamaan dengan bangunan-bangunan suci lainnya, baik yang berada di sisi timur laut (Candi Tinggi) maupun di sisi timur (Candi Kembar Batu).

2.4 Candi Kembar Batu

Candi Kembar Batu berdiri di permukaan lahan yang sengaja ditinggikan, dikelilingi pagar tembok bata berukuran 57,73 x 54, 77 m dan tinggi pagar sekarang antara 30 cm–1 m. Di luar pagar terdapat parit buatan di sisi selatan, barat, dan utara, sedang di sisi timur lahan lebih tinggi sebagai tempat bagi para penziarah memasuki dan keluar melalui pintu gerbang yang masih tersisa bagian dasarnya. Lahan percandian agaknya sengaja ditinggikan agar gugusan bangunan tidak terendam luapan air Sungai Batang Hari pada waktu musim penghujan sehingga para penziarah tetap dapat melaksanakan upacara keagamaan.

Percandian Kembar Batu terdiri atas 10 bangunan: dua bangunan hanya tinggal pondasinya dan terpendam tanah, serta delapan yang lain hanya tersisa bagian kaki bangunan yang umumnya berbentuk batur. Bangunan utama terdiri dari dua candi, hanya tersisa bagian kaki dan dasar tubuh bangunan, berdenah empat persegi panjang dan memiliki ukuran sama, yakni panjang 16,67 m dan lebar 11,70 m (Widiatmoko, 2015: 47). Itulah sebabnya penduduk menamakannya Candi Kembar Batu karena disangka berbahan batu. Kedua bangunan utama itu menghadap ke arah timur, hampir satu garis lurus dengan gerbang percandian yang berada di rentang pagar keliling sisi timur.

Dua bangunan Candi Kembar Batu (depan dan belakang) dari arah timur laut. Sumber: Agus Widiatmoko

Delapan bangunan lain berbentuk batur rendah atau batur agak tinggi dengan berbagai ukuran. Batur yang agak tinggi dan berukuran besar sangat mungkin sisa *mandapa* karena berorientasi ke arah dua candi kembar, sedang batur-batur kecil mungkin sekali lapik stupa. Pada permukaan salah satu batur terdapat lubang-lubang lingkaran, sangat mungkin tempat untuk mendirikan tiang-tiang penopang atap batur.

Secara umum percandian Kembar Batu berukuran tidak terlalu luas, namun banyak sisa bangunan yang ditemukan. Mungkin sekali pada masanya percandian ini dipenuhi oleh berbagai kegiatan keagamaan yang ramai dengan para bhiksu melakukan berbagai kegiatan di bangunan-bangunan keagamaan yang berdiri berdekatan dalam satu kompleks.

2.5 Bukit Perak

Bangunan yang sebenarnya bukit buatan ini merupakan kepurbakalaan paling barat dari rentang kawasan Muarojambi di tepian Sungai Batang Hari. Denah dasarnya berupa lingkaran, namun tanah di beberapa bagian yang membentuk bukit telah longsor. Begitupun di bagian puncak bukit telah terdapat lubang galian, konon sengaja digali oleh para pencari harta karena menduga di dalam bukit itu terdapat benda berharga terpendaman. Pada masanya bukit perak sangat mungkin jauh lebih tinggi dari sekarang, meskipun tinggi yang tersisa dewasa ini sekitar 13 m saja. Fitur ini merupakan satu-satunya kepurbakalaan yang berbentuk bukit di Kawasan Muarojambi, sementara di sekeliling kaki bukit masih terdapat bentuk kanal yang mengitarinya. Air kanal itu diperoleh dari rawa-rawa yang berhubungan dengan Sungai Amburan Jalo (Widiatmoko, 2015: 74).

Bukit perak dari arah timur.
Sumber: Agus Aris Munandar

Peran Bukit Perak belum dapat diketahui secara pasti dalam kaitannya dengan kegiatan keagamaan di kawasan Muarojambi pada masa silam. Bentuknya yang seperti gunung buatan sangat mungkin dianggap sebagai simbol Gunung Mahameru bagi kawasan tersebut.

Diperlukan kajian lebih lanjut mengingat di situs percandian *bauddha* Batujaya, Karawang Utara, juga terdapat suatu *unur* (tanah membukit) di tengah persawahan yang oleh penduduk disebut Unur Gundul (Djafar, 2010: 58). Bukit itu dinamakan demikian karena ketika diekskavasi tidak dijumpai struktur apa pun, sama halnya dengan Bukit Perak. Terdapat kemiripan yang sangat dekat antara kawasan Muarojambi di tepian Sungai Batang Hari dan Batujaya di tepian Sungai Citarum. Tinggalan di kedua kawasan itu berlatar belakang agama Buddha Mahayana. Penelitian arkeologis yang lebih mendalam pada masa mendatang diharapkan dapat menjelaskan peran Bukit Perak dalam kegiatan keagamaan di Kawasan Muarojambi.

2.6 Candi Astano

Sama dengan bangunan-bangunan kuna di Kawasan Muarojambi, Candi Astano pun terbuat dari bata dan terletak di bagian timur kawasan Muarojambi. Candi Astano sekarang hanya tersisa bangunan utamanya dengan denah dasar empat persegi panjang, namun terdapat tampilan di bagian baratnya sehingga denahnya berbentuk seperti huruf "L". Bentuk bangunan berupa batur tanpa struktur di atasnya. Sangat mungkin batur dahulu mempunyai atap tetapi dari bahan cepat lapuk dan ditopang sejumlah tiang kayu atau bambu, sehingga sekarang tidak tersisa lagi. Panjang bangunan 17, 5 m, bagian terlebar akibat adanya penampil 12,7 m, dan tinggi sekarang setelah pemugaran 2,09 m. Di permukaan batur terdapat

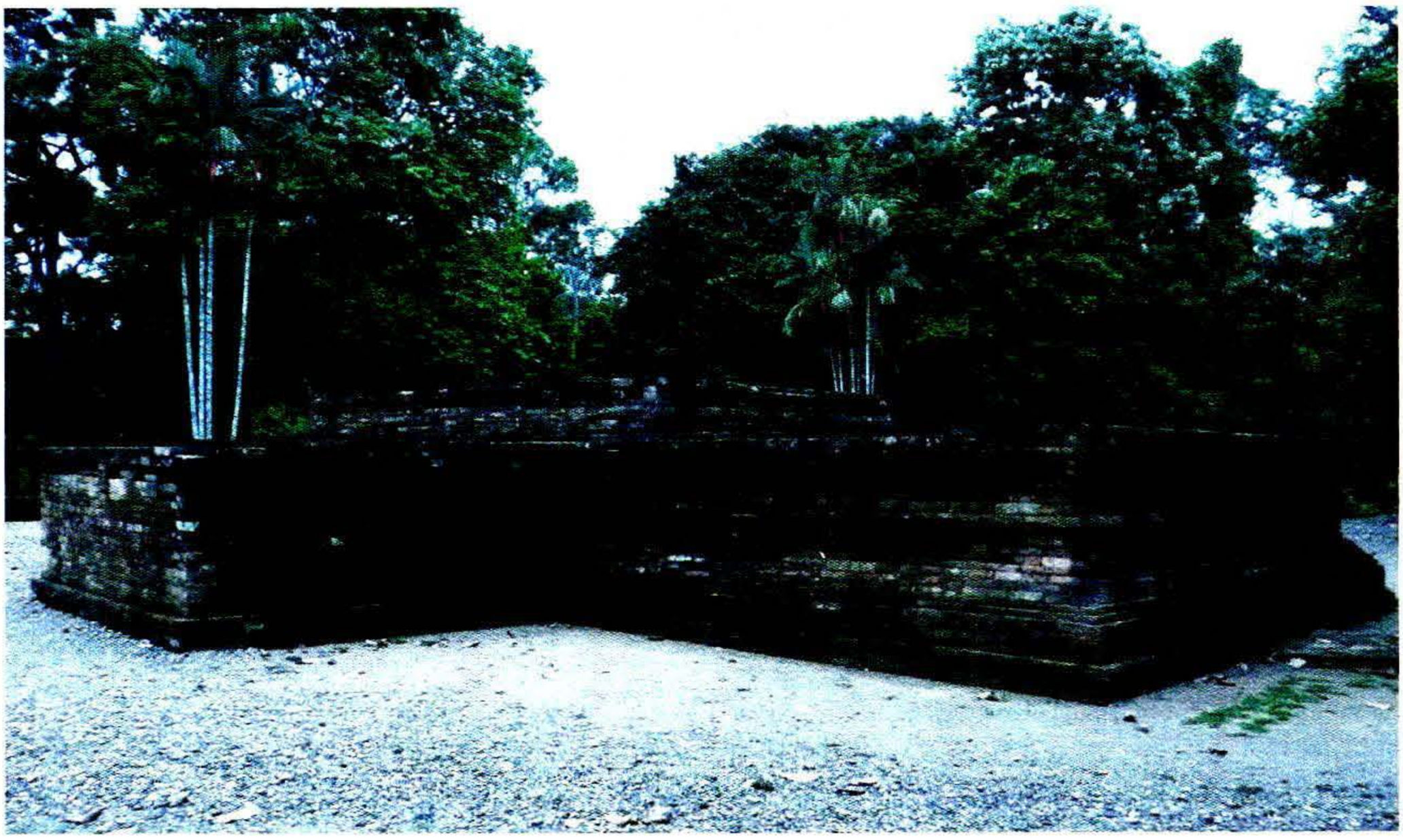

Bangunan Candi Astano dari arah barat daya.
Sumber: Agus Widiatmoko

dua lubang berdenah empat persegi panjang. Lubang I berukuran 3,8 x 2,12 m dengan kedalaman 1,37 m, sedang Lubang II berukuran 2,5 x 1,42 m dengan kedalaman 1 m (Widiatmoko, 2015: 44). Belum dapat diketahui apa fungsi kedua lubang tersebut pada masa silam; mungkin digunakan sebagai lubang perapian (*vedi*) dalam upacara persembahan sajian kepada para dewa.

Bangunan Candi Astano didirikan pada lahan yang di sekitarnya dikelilingi parit buatan dengan lebar sekarang sekitar 3,50 m dan kedalaman 1,5 m, tetapi hanya berair pada musim penghujan. Di sisi selatan di seberang parit terdapat lahan terbuka dan lapang. Di lahan itu hingga tepian Sungai Batang Hari di bagian selatan lahan ditemukan ribuan fragmen keramik Cina dalam berbagai ukuran dan bentuk. Fragmen keramik tersebut berasal dari kronologi yang berbeda, mulai keramik abad ke-8 hingga abad ke-15. Temuan keramik tersebut mengindikasikan adanya permukiman yang cukup padat pada masa silam di sekitar Candi Astano.

Demikianlah uraian beberapa bangunan suci penting di dalam Kawasan Muarojambi. Sebenarnya masih banyak bangunan dan fetur lain di kawasan tersebut, namun narasi beberapa candi di atas dianggap cukup untuk menyatakan bahwa pada masa silam telah berlangsung kegiatan keagamaan *bauddha* di bagian hilir Sungai Batang Hari. Kegiatan keagamaan *bauddha* yang ramai itulah yang menurut I-tsing berlangsung di Sriwijaya, sehingga Sriwijaya yang dimaksudkan I-tsing adalah Malayu yang memang menjadi bagian Sriwijaya. Malayu sebagai pusat pendidikan agama Buddha itu sekarang menjadi situs Muarojambi yang kaya berbagai reruntuhan monumen *bauddha*.

2.7 Muarojambi sebagai Pusat Pengajaran Buddha

Tiada dapat dimungkiri banyaknya reruntuhan monumen *bauddha* di kawasan Muarojambi menunjukkan bahwa kawasan itu pada masanya diramaikan aneka macam kegiatan keagamaan Buddha. Dalam pada itu berita-berita dari India dan Cina menyatakan bahwa di *Suwarnnabhumi* atau *Suwarnnadwipa* terdapat pusat pendidikan agama Buddha. Pada abad ke-10, tepatnya tahun 983 M, pendeta Cina bernama Fa-yu datang ke *Suwarnadwipa* sekembalinya dari India untuk mencari sejumlah kitab suci Buddha untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Ketika singgah ke San-fo-chi ia bertemu dengan bhiksu India bernama *Mi-mo-lo-shih-li* (Wimalasri) yang agaknya telah bermukim lama di San-fo-chi. Wimalasri meminta kepada Fa-yu untuk ikut pergi ke Cina dan membantu menerjemahkan kitab-kitab suci (Coedes, 2010: 186). Hingga awal abad ke-11 Suwarnnadwipa—yang ditafsirkan sebagai Śrîwijaya—masih menjadi pusat pengajaran agama Buddha bertaraf internasional. Pada masa itu di Suwarnnadwipa hidup seorang pendeta Buddha agung bernama Dharmmakirtti (wajah *Dharmma* berwajah ajaran Buddha). Ia mampu menyusun kitab tinjauan dan kritik terhadap naskah *bauddha* berjudul *Abhisamayalankara*. Pada tahun 1011 datanglah seorang bhiksu dari India bernama Atisa Dipangkara Srijnaña ke Suwarnnadwipa. Ia berguru kepada Dharmmakirtti sampai tahun 1023 untuk kemudian kembali ke India (Sumadio, 1984: 68). Ajaran Dharmmakirtti merupakan ajaran keagamaan Buddha yang paling utama dibawa oleh Atisa Dipangkara ke Tibet untuk mereformasi ajaran Buddha Mahayana di sana. Sampai sekarang ajaran tersebut masih dipelihara dengan baik (Widiatmoko, 2015: 308).

Berdasar peninggalan bauddha di Kawasan Muarojambi yang sangat banyak dan berita tentang *San-fo-tsi* atau *San-fo-che* (*Suwarnadwipa*) sebagai pusat keagamaan Buddha yang terkemuka dapat ditafsirkan bahwa kawasan Muarojambi merupakan bekas pusat pendidikan agama Buddha terkemuka yang menghubungkan India dan Cina dari abad ke-7 sampai awal abad ke-11. Di tempat itulah tinggal para mahaguru agama Buddha, yang terkemuka di antaranya adalah Dharmmakirtti. Ritual pengajaran Buddha senantiasa dilaksanakan di berbagai percandian Muarojambi di suatu kawasan yang luas. Apabila dibandingkan dengan kompleks Mahawihara Nalanda di India kawasan Muarojambi tentu masih lebih besar, sehingga dengan demikian Muarojambi pantas apabila disebut Mahawihara Muarojambi (Widiatmoko, 2015: 306–309). Sebagai tempat para bhiksu dan mahabhiksu berkumpul yang dilengkapi bangunan suci, *stupa, caitya, mandapa*, telaga, dan membentuk suatu permukiman kaum agamawan, maka kawasan Muarojambi juga merupakan *mandala*, bahkan dapat disebut *mandalapura* (kota-mandala).

Uraian tentang segala aktivitas dan bukti-bukti kepurbakalaan di Mandala Malayu (Kawasan Muarojambi) di atas adalah Malayu

ketika telah menjadi bagian dan dikuasai oleh Sriwijaya, sehingga perlu dijelaskan apakah Malayu pernah mempunyai raja sebelum dikuasai oleh Sriwijaya. Data tentang masalah tersebut cukup terbatas, namun terdapat uraian berita Cina Dinasti T'ang awal abad ke-8 bahwa Malayu masih mempunyai raja, mungkin penguasa daerah (raja bawahan) Sriwijaya. Hal ini seturut laporan I-Tsing yang menyatakan bahwa ketika pulang dari India tahun 685 M ia singgah di Malayu yang telah menjadi bagian Sriwijaya, yang berarti Malayu telah dikuasai Sriwijaya.

Berita Dinasti T'ang tahun 718 M Malayu mempunyai raja bernama Sindrawarman yang telah mengenal agama Islam berkat hubungannya dengan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz. Hubungan dengan pihak Arab tersebut berkenaan dengan pembelian lada hitam yang diperdagangkan di Malayu. Pemerintahan dinasti T'ang khawatir adanya monopoli perdagangan lada hitam yang bernilai tinggi yang dilakukan oleh orang-orang Arab. Oleh karena itu orang-orang Cina berupaya menggagalkan persekutuan antara Malayu dan dunia Arab dengan cara meminta Raja Sriwijaya (*Shih-li-fo-shih*) bertindak tegas terhadap Malayu. Raja Sindrawarman diganti oleh Raja Indrawarman, yang agaknya terbunuh dalam suatu pertempuran dengan Sriwijaya pada tahun 730 M. Sejak itu Malayu dikuasai sepenuhnya oleh Sriwijaya dan kemudian berkembang menjadi pusat agama Buddha. Setelah kedatangan I-Tsing pada pertengahan abad ke-7 datang pula dua orang Bhiksu Cina, Wajrabhodi dan Amogawajra, berguru ke Malayu (Halimi, 2008: 112 dan 2015: 32). Masa-masa selanjutnya Malayu menjelma menjadi *mandala* pusat pengajaran agama Buddha terkemuka.

3. Awal berdirinya Kerajaan Malayupura

Kerajaan Malayu yang berkembang di pedalaman Jambi, Sumatera Barat, belum tentu merupakan kesinambungan Malayu masa Śrîwijaya. Sangat mungkin hanya namanya saja yang sama, yaitu Malayu. Kerajaan Malayupura masa Mauliwarmadewa (abad ke-13) sangat mungkin tidak ada kaitannya secara langsung dengan Malayu sebagai *mandala* Buddha. Jika ada kaitannya pun hanya dapat dijelaskan secara hipotetik, bahwa pada abad ke-11 terjadi serangan dari Kerajaan Chola terhadap wilayah-wilayah Śrîwijaya. Banyak bandarnya yang sebelah-menyebelah selat Malaka dihancurkan dalam serangan bergelombang tersebut. Kekuatan Śrîwijaya pun lemah dan Śrîwijaya runtuh. Sebagai kerajaan kehadirannya tidak terlalu penting lagi.

Malayu sebagai pusat agama Buddha Mahayana mungkin masih ada sampai abad ke-11 dan mengalami kehancuran akibat serangan Chola yang raja-rajanya memeluk agama Hindu. Bekas-bekas Malayu sebagai *mandala* pusat pendidikan agama Buddha sangat mungkin situs Muarojambi di tepian Sungai Batang Hari di Jambi. Akibat peristiwa serangan Kerajaan Chola terhadap bandar-

bandar Sriwijaya, muncul dugaan bahwa kaum elit Śrîwijaya, para bhiksu, dan *mahabhiksu* di *Mandala Malayu* kawasan Muarojambi kemudian mengungsi, menyusuri Sungai Batang Hari lebih ke dalam, hingga ke kawasan Dharmmaśraya.

Selain menghindari serangan musuh yang seringkali datang dari Selat Malaka, pilihan di pedalaman digenapi alasan religis, yaitu mendekati lereng pegunungan dan gunung-gunung. Kebetulan di pedalaman Sumatera terdapat deretan Pegunungan Bukit Barisan yang sambung menyambung dari Lampung hingga Aceh. Di daerah yang bergunung-gunung itulah Kerajaan Malayu didirikan. Malayu di daerah Dharmmaśraya dalam prasasti disebut pula dengan Malayupura. Sampai sekarang pendirinya tidak diketahui, namun pada paruh pertama abad ke-13 Kerajaan Malayu diperintah oleh Raja Sri Mauliwarmadewa, yang mendapat kiriman arca *Amoghapasalokeswara* dari penguasa Singhasari, Krtanagara. Kerajaan Malayu Dharmmaśraya mempunyai beberapa orang raja. Salah satu yang terkenal adalah Adityawarman, yang akan dibicarakan lebih lanjut dalam bab ini. Kerajaan yang bercorak Buddha ini agaknya bertahan hingga masa penyebaran agama Islam di Sumatera abad ke-15.

4. Silsilah Raja Malayupura

Kerajaan Malayu Dharmmaśraya atau Malayupura sangat mungkin telah berdiri sebelum Pamalayu tahun 1275 sebagaimana disebut dalam kitab *Pararaton*. Mungkin sekali kerajaan itu berkembang pada paruh kedua abad ke-12 M, yang pada masa itu di Jawa bagian timur berkembang Kerajaan Kadiri. Data yang dapat dirujuk hingga sekarang adalah Prasasti Amoghapasa A (tahun 1286). Prasasti itu menyebut bahwa raja pertama Malayupura ialah Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa.

Sejarah pun terus berlangsung. Pada tahun 1292 Singhasari runtuh akibat serangan Jayakatwang. Pada tahun 1293 datang bala tentara Tatar yang dikirim Kubhilai Khan untuk menghukum raja Jawa. Setelah mengalahkan Jayakatwang, bala tentara Tatar diusir kembali ke luar dari Tanah Jawa oleh Raden Wijaya dan kawan-kawan dan berdirilah Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Sri Krtarajasa Jayawarddhana (1293–1309 M).

Peristiwa penting yang terjadi di Sumatera pada tahun-tahun tersebut belum diketahui karena tidak banyak berita sejarah yang dapat dijadikan sumber. Mungkin saja Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa digantikan oleh raja lain atau sementara kekuasaan dipegang oleh seorang pejabat tinggi Singhasari yang dititah Krtanagara mengiring dan membawa arca Amoghapasalokeswara ke Malayu. Prasasti Amoghapasa A menguraikan para pejabat yang disebut pertama ialah Rakryan Mahamantri Dyah Adwayabrahma, kemudian berturut-turut pejabat lain Rakryan Sirikan Dyah Sugatabrahma,

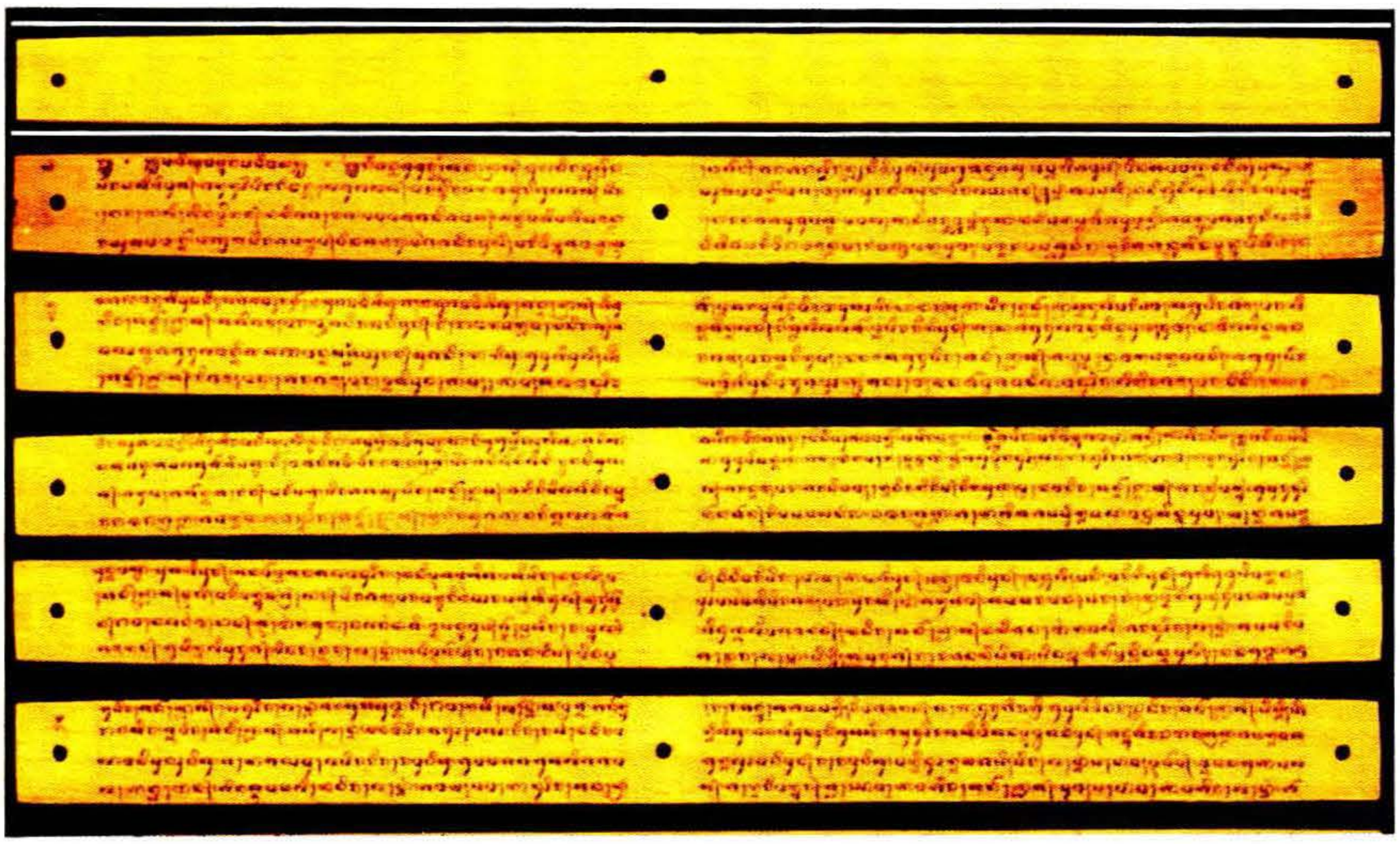

Pararaton
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Pamgat Payangan Dang Dipangkaradasa, dan Rakyan Dmung Pu Wira (Utomo, 2007: 51). Prasasti Kuburajo I (tanpa tahun) yang dikeluarkan oleh Raja Adityawarman menyebutkan bahwa Adityawarman yang disebut sebagai Kanakamedinindra (Raja Tanah Emas = Sumatera) adalah putra Adwayawarman. Kata pertama nama Adwayawarman, yaitu *adwaya*, sama dengan pejabat utama Singhasari yang mengiringkan arca Amoghapasa ke Malayu, yaitu Adwayabrahma. Agaknya kedua nama itu merupakan satu orang. Tokoh Adwayabrahma, setelah menetap di Malayu, mengubah namanya menjadi Adwayawarman (kata *warman* atau *warmman* berarti 'baju pelindung', tepatnya 'baju besi pelindung tubuh'), sesuai kedudukannya sebagai utusan Singhasari yang bertugas melindungi Malayupura.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pada waktu Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa memerintah Malayu datang balatentara Singhasari seraya membawa arca Amoghapasalokeswara untuk ditahbiskan di tanah Dharmmaśraya. Sudah barangtentu kedatangan balatentara Singhasari ke Malayu merupakan bentuk pengesahan kekuasaan Krtanagara atas Tanah Malayu. Sepeninggal Tribhuwanaraja kekuasaan Malayupura rupa-rupanya dipegang oleh raja Rajendra Mauliwarmadewa yang disebutkan dalam Prasasti Padangroco tahun 1347 M. Prasasti itu menguraikan tokoh Adityawarman atau Udyadityawarman sudah disebut sebagai *maharajadiraja*, yang berarti telah berkuasa di Malayupura, namun menyebut Rajendra Mauliwarmadewa sebagai raja terdahulu yang pernah berkuasa (Suhadi, 1990: 223–224). Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pengganti Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa (Raja I) adalah Rajendra Mauliwarmadewa (Raja II), kemudian disusul Adityawarman (Raja III). Adityawarman anak Panglima

Bagan Susunan Raja-raja Malayupura di Dharmmaśraya

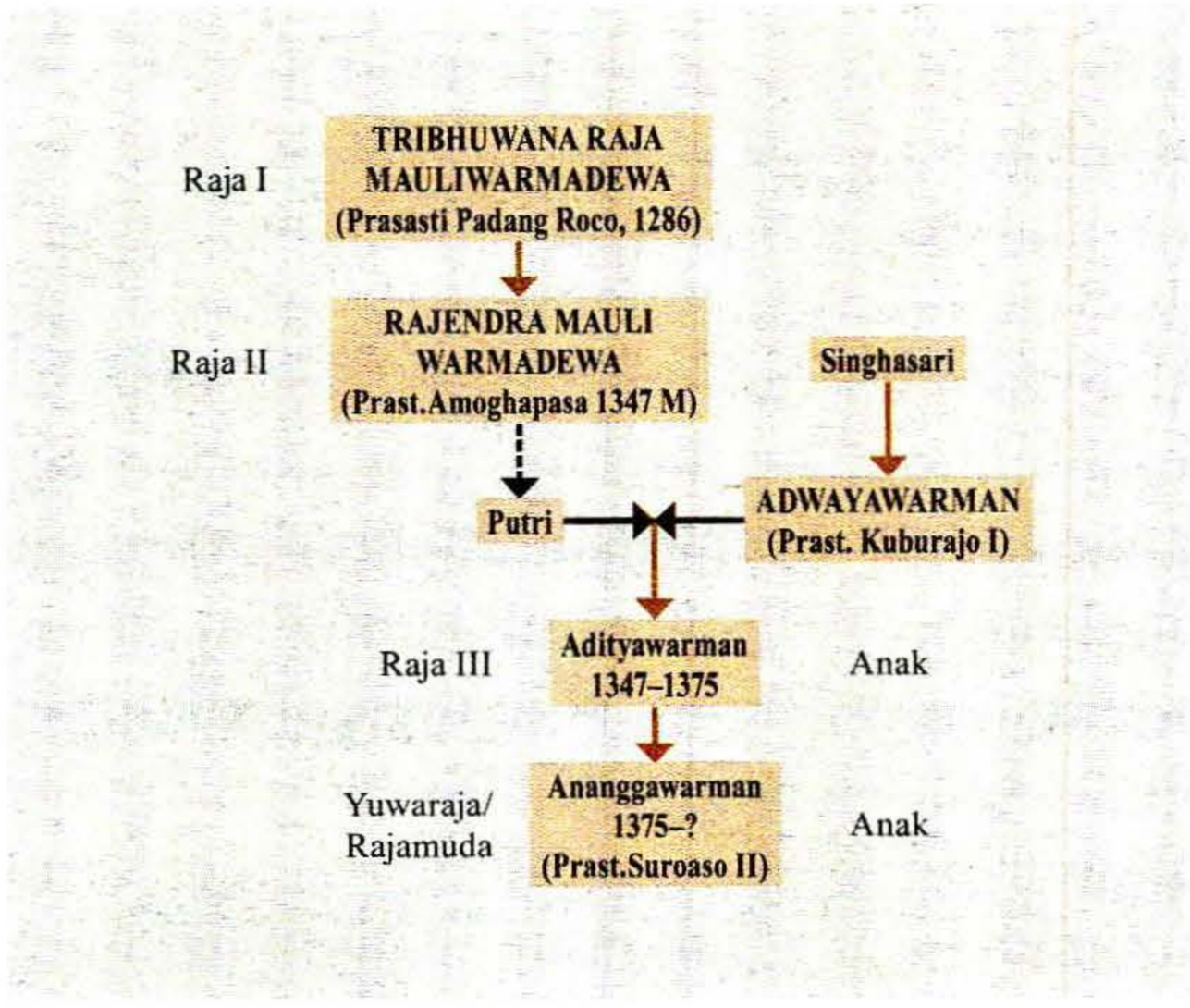

Singhasari Adwayawarman yang ditempatkan di Malayu. Sangat mungkin ibunda Adityawarman seorang putri Malayu. Ketika usia muda Adityawarman tinggal di istana Majapahit dan membantu perjuangan Majapahit menegakkan kejayaan pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwanottunggadewi Jayawisnuwarddhani (1328–1351 M).

Pada tahun 1343 M Adityawarman kembali ke Malayu dari Majapahit, namun baru pada tahun 1347 ditahbiskan menjadi raja di Malayupura dan berkuasa hingga hingga tahun 1375.

Ketika Adityawarman berkuasa di Tanah Malayu, menurut uraian Prasasti Pagaruyung II, terdapat nama tokoh lain yang disebut-sebut, yaitu Akarendrawarman. Mengingat disebut dalam prasasti tokoh ini pasti mempunyai kedudukan penting, namun tidak diketahui perannya secara pasti dalam kerajaan. Mungkin saja Akarendrawarman anak lelaki lain Adwayawarman, atau mungkin kakak Adityawarman (Suhadi, 1990: 225 dan 229).

Adityawarman mempunyai anak lelaki, sebagaimana disebutkan dalam Prasasti Suroaso II, bernama Ananggawarman. Prasasti itu menyebut "*sri yauwarajapadam...*" dan "*ananggawarman tanaya adityawarmanprabhoh*". Hal itu menunjukkan bahwa Anggawarman adalah anak lelaki Adityawarman dan pada waktu prasasti itu dipahatkan telah menjadi *yuwaraja* (raja muda) (Suhadi, 1990: 224). Akan tetapi Prasasti Lubuk Layang menyebutkan tokoh bernama Biyajendrawarman yang mengaku sebagai *yauwaraja* dan mendirikan stupa di Parwatapuri. Biyajendrawarman mungkin adik Ananggawarman yang disebut sebagai *yauwaraja* pula. Jika Ananggawarman disebut bersama ayahandanya, Adityawarman, tetapi sang adik hanya disebutkan sendiri (Suhadi, 1990: 227 dan 237).

J.G.de Casparis berpendapat bahwa Akarendrawarman ialah pengganti Raja Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa. Akarendrawarman memerintah antara tahun 1316 sampai 1347, kemudian baru disusul oleh pemerintahan Adityawarman. Berdasarkan berita dari Prasasti Bandar Batu Bapahat diketahui bahwa Adityawarman menyebut Akarendrawarman sebagai pendahulunya yang telah menyuruh penggalian "sungai', yang sesungguhnya suatu terusan, kemudian terusan itu dibina dan diperindah oleh Adityawarman (de Casparis, 1992: 241–242). Dengan demikian apabila Akarendrawarman dimasukkan ke dalam deretan raja-raja Malayupura susunannya sebagai berikut:

1. Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa, disebutkan dalam Prasasti Padang Roco (1286 M) sebagai Raja Malayu yang menerima kiriman arca Amoghapasalokeswara dari Krtanagara.
2. Rajendra Mauliwarmadewa, disebutkan dalam Prasasti Amoghapasa (1347 M) yang dikeluarkan oleh Adityawarman, dinyatakan bahwa Rajendra adalah raja yang memerintah sebelum dirinya.
3. Akarendrawarman, disebut dalam uraian Prasasti Pagaruyung II, dari masa pemerintahan Adityawarman. De Casparis menyebut Prasasti Pagaruyung II dengan nama Prasasti Ponggonan dan berangka tahun dalam bentuk *candrasangkala* yang berbunyi *"sasi-kara-avacara-turangga"* setara dengan 1238 Saka (1316 M) (de Casparis, 1992: 240).
4. Adityawarman, disebutkan di banyak prasastinya dan sangat mungkin memerintah antara tahun 1347 dan tahun 1375.
5. Ananggawarman, disebutkan dalam Prasasti Suroaso II (tanpa tahun), anak Adityawarman.

Satu tokoh lagi yang disebut dalam prasasti Prasasti Lubuk Layang (anpa tahun), yakni Bijayendrawarman. Prasasti itu menyebutkan bahwa Bijayendrawarman adalah seorang *yauwaraja* (raja muda) yang mendirikan stupa di Parwatapuri, namun perannya di Kerajaan Malayupura belum diketahui.

5. Wilayah Kekuasaan

Kerajaan Malayupura pada abad ke-13–14 sangat mungkin mempunyai rentang kekuasaan di wilayah Sumatera bagian selatan (termasuk Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu), Sumatera Barat, Riau, Palembang, serta mencapai Pulau Bangka dan Belitung. Meskipun demikian kekuasaan Malayupura tidak menjangkau Sumatera Utara dan Aceh, karena wilayah itu telah dikuasai oleh kerajaan Islam, Kesultanan Samudera Pasai, yang telah berdiri sejak pertengahan abad ke-13. Dalam perjalanannya kembali ke Italia dari Cina Marco Polo singgah di Sumatera bagian utara. Pelabuhan pertama yang disinggahinya *Ferlec* (Perlak), kemudian ia pun singgah di bandar Samudera. Marco Polo menyatakan bahwa di kawasan tersebut telah berdiri kerajaan Islam dan banyak sekali para pelaut dan niagawan Islam yang mampu mempengaruhi kepercayaan penduduk asli sehingga akhirnya banyak yang memeluk agama Islam (Hall, 1988: 187–88).

Begitupun pengaruh Malayupura tidak sampai menyeberangi Selat Malaka menjangkau wilayah Semenanjung Melayu. Walaupun pada abad ke-13–14 kerajaan-kerajaan Islam di Semenanjung belum banyak berdiri, namun bandar-bandar di tepi pantai barat telah dipenuhi para niagawan Islam yang gencar berlayar ke timur seraya menyebarkan agama Islam. Negeri-negeri di Semenanjung Melayu disebut dalam *Kakawin Nagarakrtagama* mengirim utusan ke istana Majapahit setiap tahun. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Kerajaan Malayupura pada masa pemerintahan Adityawarman menguasai kawasan Sumatera bagian selatan, Sumatera Barat, dan daerah Riau, namun mengakui Majapahit sebagai kerajaan acuan. *Sejarah Melayu* pun hanya menyebut Majapahit sebagai kerajaan utama di Nusantara, bukan suatu kerajaan lain di Sumatera.

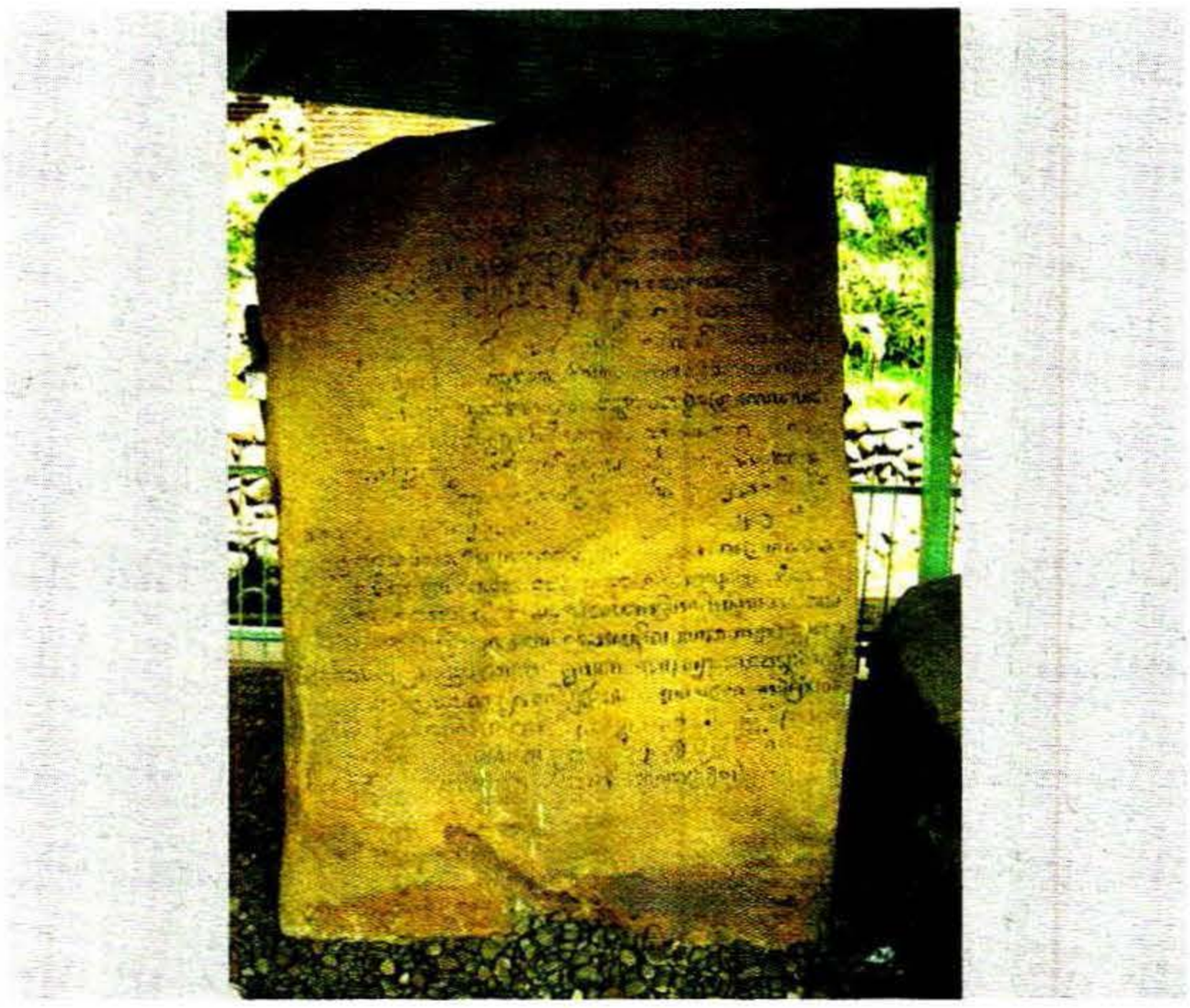

Prasasti Pagarruyung I (Prasasti Bukit Gombak), tahun 1356 M, dari masa pemerintahan Ādityawarmman Pratāpaparākrama Rajendra Maulimaniwarmadewa.
Sumber: Agus Aris Munandar

6. Masa Kejayaan

Kejayaan Malayupura terjadi ketika berada pada masa pemerintahan Adityawarman yang disebut juga Udayadityawarman. Raja tersebut melakukan banyak upacara keagamaan Buddha, mendirikan bangunan suci keagamaan, serta mengeluarkan banyak prasasti yang ditemukan tersebar di pedalaman Jambi dan Sumatera Barat. Hampir dapat dinyatakan bahwa Malayupura pada abad ke-14 identik dengan Raja Adityawarman. Adityawarman telah berkiprah di Jawa Timur (Majapahit) sebelum kembali ke Sumatera dan menjadi penguasa Malayupura. Beberapa tindakan Adityawarman dapat diketahui berdasarkan uraian prasasti dan sejumlah karya sastra masa Majapahit.

Prasasti arca Manjusri yang berasal dari Candi Jago (Jajaghu) Malang menyebutkan bahwa pada tahun 1265 S (1343 M) Adityawarman masih tinggal di Majapahit. Pada masa itu yang menjadi penguasa Majapahit adalah Ratu Tribhuwanottunggadewi. Prasasti itu juga menyatakan bahwa Adityawarman tinggal di negara Rajapatni, sedang Rajapatni Gayatri adalah ibunda Tribhuwanottunggadewi, nenek Hayam Wuruk. Agaknya Adityawarman memugar *Jajaghu* dengan bentuk arsitektur candi gaya Majapahit, sebagaimana diberitakan dalam prasasti bahwa Adityawarman membangun candi *bauddha* yang sangat indah di Tanah Jawa dengan tujuan untuk memudahkan pemindahan arwah leluhur dan kerabatnya ke alam kebahagiaan di nirwana (Moens, 1974: 44; Hardjowardojo, 1966: 17; Suhadi 1990: 219–220).

Sebagaimana diketahui bahwa Candi Jago, menurut *Nagarakrtagama* (*pupuh* 41: 4) dan kitab *Pararaton* (Hardjowardojo, 1965: 36), merupakan candi untuk memuliakan Raja Singhasari yang telah mangkat, yaitu Sri Jaya Wisnuwarddhana (Ranggawuni), yang

memerintah antara tahun 1248 dan tahun 1268. Dengan memugar Candi Jago dapat ditafsirkan bahwa nenek moyang Adityawarman berpangkal pada Wisnuwarddhana. Interpretasi berikutnya lebih kurang Wisnuwarddhana berputra Krtanagara (1268–1292 M) dari permaisuri. Krtanagara menjadi raja pengganti Wisnuwarddhana di Singhasari. Dari salah seorang selir Wisnuwarddhana berputra Adwayabrahma (saudara lain ibu Krtanagara), yang memimpin bala tentara Singhasari ke Malayupura membawa Arca Amoghapasa. Adwayabrahma kemudian menetap di Malayu dan menjadi panglima perang Malayu dengan gelar Adwayawarman pada masa pemerintahan Raja Malayupura Rajendramauliwarmadewa. Adwayawarman itulah yang kemudian memperanakkan Adityawarman. Oleh karena itu sangat masuk akal apabila Adityawarman memugar Jajaghu, sebab candi itu memang pen-*dharma*-an bagi Wisnuwarddhana dalam wujud Buddha Amoghapasa. Hal ini berarti Wisnuwarddhana adalah kakek Adityawarman.

Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1343 M, setelah selesai memugar Candi Jago (seakan-akan meminta restu dari kakeknya), sangat mungkin ia kembali ke Malayupura. Di Malayu Adityawarman melakukan upacara keagamaan *bauddha* yang besar pada tahun 1347 M (1269 S). Demikian berita dari Prasasti Kapalo Bukit Gombak. Prasasti itu juga menyebut Adityawarman sebagai Indrabajra (Suhadi, 1990: 220). Berita berikutnya diperoleh dari Prasasti Bukit Gombak II tahun 1375 (1297 Saka), yang menyebutkan adanya upacara pentahbisan Adityawarman sebagai tokoh *bauddha*, dinobatkan sebagai *Sutathagata Bajradaiya* ("Buddha mulia daripada keteguhan yang tak tergoncangkan"), dan segala pujian lain seperti *dharmmaraja kulatilaka* (perhiasan keturunan Dharmaraja), *ekanggawira* (pahlawan yang hanya memandang satu tujuan, tiada tergoyahkan), juga dipuji-puji sebagai raja Suwarnabhumi, dan sebutan lain sebagai Indrabajra. Upacara penobatan dipimpin oleh Mahagurubhiksu Dharmmaddhwaja (Moens, 1974: 45; Suhadi, 1990: 220).

Prasasti Pagarruyung I (Prasasti Bukit Gombak I), berangka tahun 1356, menyebutkan nama Adityawarmman Pratapaparakrama Rajendramaulimaniwarmadewa, yang berarti prasasti tersebut dikeluarkan oleh Raja Adityawarman. Isinya menguraikan puja-puji kepada tokoh Adityawarman sebagai penganut Buddha Bhairawapaksa. Di samping itu ada berita lain tentang penyelesaian pembangunan wihara untuk kaum agamawan (Utomo, 2007: 64). Hal yang menarik adalah gelar Adityawarman dilengkapi dengan kata Rajendramaulimaniwarmadewa. Dengan gelar itu dapat ditafsirkan bahwa Adityawarman hendak menyatakan bahwa dia sebenarnya penerus kekuasaan dari dua raja sebelumnya yang bergelar Mauliwarmadewa, yaitu Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa dan Rajendra Mauliwarmadewa, yang mungkin memang masih ada hubungan darah antara Adityawarman dan dua raja tersebut melalui ibunya.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Adwayawarman (ayahanda Adityawarman) menikah dengan putri Malayu, mungkin sekali putri Rajendra Mauliwarmadewa. Sementara itu Adwayawarman (Adwayabrahma) sangat mungkin putra Wisnuwarddhana dari selir dan dititah oleh Krtanagara (saudara lain ibu) untuk memimpin perjalanan ke Malayu disertai bala-tentara Singhasari dan arca Amoghapasa. Proposisi bahwa Adwayawarman adalah putra Wisnuwarddhana dapat diketahui berkat tindakan Adityawarman yang melakukan pembangunan ulang Candi Jago, pen-*dharma*-an kakeknya, Wisnuwarddhana.

Dalam tradisi Jawa kuna zaman Majapahit hanya keturunan langsung yang dapat membangun candi pen-*dharma*-an untuk leluhurnya. Sebagai contoh Hayam Wuruk membangun candi Prajnaparamitapuri (Bayalango) bagi neneknya, Rajapatni Gayatri, sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam *Kakawin Nagarakrtagama pupuh* 67–69. Hal yang sama juga dilakukan oleh Gajah Mada ketika membangun Candi Singasari (Siwa-Buddhalaya) bagi raja Krtanagara. Gajah Mada memerintahkan pembangunan candi (*caitya*) untuk memuliakan Krtanagara yang gugur bersama para pendeta pengiringnya sebagaimana diuraikan dalam prasasti yang ditemukan di halaman Candi Singasari (disebut Prasasti Gajah Mada) yang berangka tahun 1273 S (1351 M). Hal ini dapat ditafsirkan bahwa sebenarnya Gajah Mada adalah cucu Krtanagara. Ayah Gajah Mada adalah anak Krtanagara yang lahir dari seorang selir (Munandar, 2010: 63–78). Dengan mempertimbangkan tradisi tersebut maka dapat dipastikan bahwa Adityawarman sejatinya cucu Wisnuwardhana atau Nararyya Smining Rat, yang memerintah tahun 1248–1268. Dengan demikian silsilah keluarga Adityawarman sang Raja Negeri Emas (Kanakamedinindra) dapat dilihat pada bagan berikut:

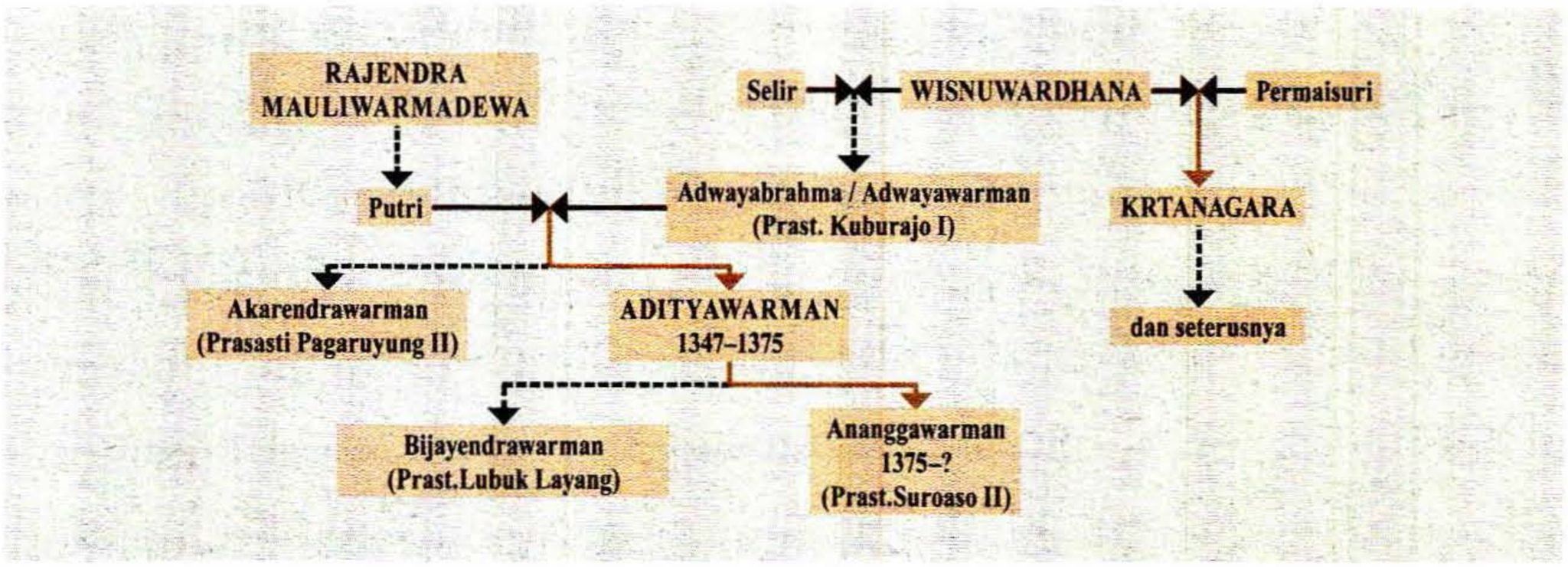

Bagan Silsilah Keluarga Adityawarman Malayupura di Dharmmaśraya

Pada tahun 1369 M (1291 S), menurut uraian Prasasti Rambatan, Adityawarman menyediakan atau menata tempat pemujaan untuk memuliakan batu jejak kaki Buddha (*Jinapada*) yang ramai dikunjungi penziarah di Desa Rambatan, sementara para mantrinya membuat atap pelindung tempat pemujaan tersebut (Suhadi, 1990:

221). Prasasti Suroaso I tahun 1375 (1297 S) menyebut Adityawarman ditahbiskan sebagai *ksetrajna* (orang yang telah mendekatkan diri pada dewata dan tinggal di lapangan tempat mayat-mayat) dengan julukan Wisesadharani sekte Bhairawapaksa. Sebagai penguasa di Surawasa ia duduk di atas kursi tinggi, sambil makan makanan lezat (dan) minum, di luar istana. Ribuan dari puluhan juta bunga, harumnya menyebar ke mana-mana, harum semerbaknya sesajian Raja Adityawarman semoga tiada taranya (Moens, 1974: 60). Masih terdapat beberapa prasasti batu yang dikeluarkan pada masa kekuasaan Adityawarman di Malayupura, namun semua prasasti tersebut tanpa angka tahun. Mungkin saja semula prasasti-prasasti itu berangka tahun sebagai penanda kronologi, namun bagian yang menyatakan angka tahun telah rusak (aus) tidak terbaca atau batunya patah dan hilang.

Sepanjang pemerintahan Adityawarman banyak didirikan bangunan suci, tempat-tempat pemujaan untuk menyembah Buddha, dan wihara-wihara. Hal itu menunjukkan bahwa kehidupan keagamaan di Malayu, terutama agama Buddha, hidup dengan subur. Berdasarkan uraian prasasti-prasastinya diketahui bahwa Adityawarman menjalankan upacara agama Buddha, terutama dari aliran Bhairawapaksa. Hal itu siperkuat oleh sesosok arca Bhairawa Amoghapasa berbahan batu dengan tinggi 4, 41 m yang ditemukan di situs Padang Roco, di hulu Sungai Batang Hari, Sumatera Barat. Arca tersebut sangat mungkin merupakan arca perwujudan bagi Adityawarman (Bernet Kempers, 1959: 87; Moens 1974).

Arca Bhairawa-Amoghapasa bertangan dua, tangan kanan membawa pedang pendek (*kadga*) dan tangan kiri membawa mangkuk dari tengkorak (*kapala*). Wajah digambarkan dengan mata metotot dan mulut menyeringai menyeramkan (sekarang telah rusak). Rambut panjang ditata meninggi berbentuk sasak di kepalanya, bentuknya seperti bonggol umbi (Suleiman, 1981: 43). Di bagian depan sasak rambut digambarkan sosok kecil Tathagata Amitabha, penanda bahwa arca itu sebenarnya menggambarkan emanasi Amitabha dalam wujud Lokeswara yang *ugra* (disebut dengan Amoghapasa). Dahinya mengenakan *jamang*, seperti ikat dahi yang kokoh, serta mengenakan perhiasan telinga (*kundala*), *kelat bau* (*kangkana*), gelang tangan (*keyura*), dan gelang kaki berbentuk ular. Sabuk lebarnya dibentuk dalam bentuk wajah kepala Kala, mengikat kain yang hanya dikenakan hingga bagian atas lutut. Arca itu dalam sikap berdiri menginjak mayat (*narawahana*) yang diletakkan terlentang dengan kaki terlipat ke belakang. Lapik di bawah penggambaran mayat dibuat melebar, bukan dihias dengan dengan daun-daun bunga teratai mekar (*padmasana*), melainkan dengan deretan tengkorak berjumlah delapan. Di bagian belakang arca terdapat *prabhamandala*, tetapi sisi kanannya telah patah. Tepat di belakang *prabhamandala* arca terdapat pahatan *sirascakra* ganda dalam bentuk api yang menyala-nyala. Menilik wujud arca tersebut dapat diketahui bahwa Adityawarman memiliki *silpin* yang sangat cermat dan piawai, di samping pengetahuan keagamaan Buddhanya

Prasasti Suroaso I
Sumber: referensi.data.kemdikbud.go.id

cukup mendalam, sehingga estetika dan detail arca Amoghapasa-Bhairawa masih nyata terlihat walaupun sekarang sudah tidak lengkap lagi.

7. Masa Akhir

Menurut berita Cina, catatan dinasti Ming (1368–1643), pada tahun 1376 datang utusan dari *San-bo-zhai* yang menyatakan bahwa Raja *Dan-ma-sa-na-ho* mangkat dan putranya, *Ma-la-zha Wu-li*, menggantikannya. Setahun kemudian, atau tahun 1377, utusan *San-bo-zhai* mengirim utusan dan upeti ke Cina berupa cula badak, burung kasuari, monyet putih, burung nuri hitam dan hijau, tempurung penyu, cengkeh, kapur barus, dan lain-lain. Utusan itu berkata bahwa putra raja tidak berani menaiki takhta tanpa dukungan Kaisar Cina. Sang Kaisar menghargai rasa pegabdian putra raja dan memberi stempel dan surat pengangkatan raja kepada utusan untuk dipersembahkan kepada Raja *San-bo-zhai* (Groeneveldt, 2009: 97). San-bo-zhai atau San-fo-tsi ditafsirkan sebagai nama asli Pulau Sumatera dalam bahasa Sansekerta, yaitu Suwarnabhumi (Irfan, 1983: 85). Prasasti Arca Amoghapasa A (pada lapiknya) menyebutkan Krtanagara mengirim arca Amoghapasa dari Bhumi Jawa Ke Suwarnnabhumi untuk disemayamkan di Dharmmaśraya, sementara uraian berita Cina menyatakan bahwa Raja *Dan-ma-sa-na-ho* mangkat pada tahun 1376. Kata *Dan-ma-sa-na-ho* merupakan pengucapan bahasa Cina untuk Dharmmaśraya. Menilik tahunnya, yaitu 1376, dapat ditafsirkan bahwa yang meninggal tersebut adalah Adityawarman. Raja di Dharmmaśraya itu masih mengeluarkan Prasasti Suroaso I tahun 1375 dan pada tahun 1376 meninggal. Tentu anaknya, yaitu Ananggawarman Mauliwarmmadewa, yang menggantikan takhta. Berita Cina menyebutkan bahwa *Ma-la-zha-Wu-Li* (*maharaja mauli*) mengirimkan utusan ke Cina dalam tahun 1377. Menurut berita Cina Anggawarman baru resmi menjadi

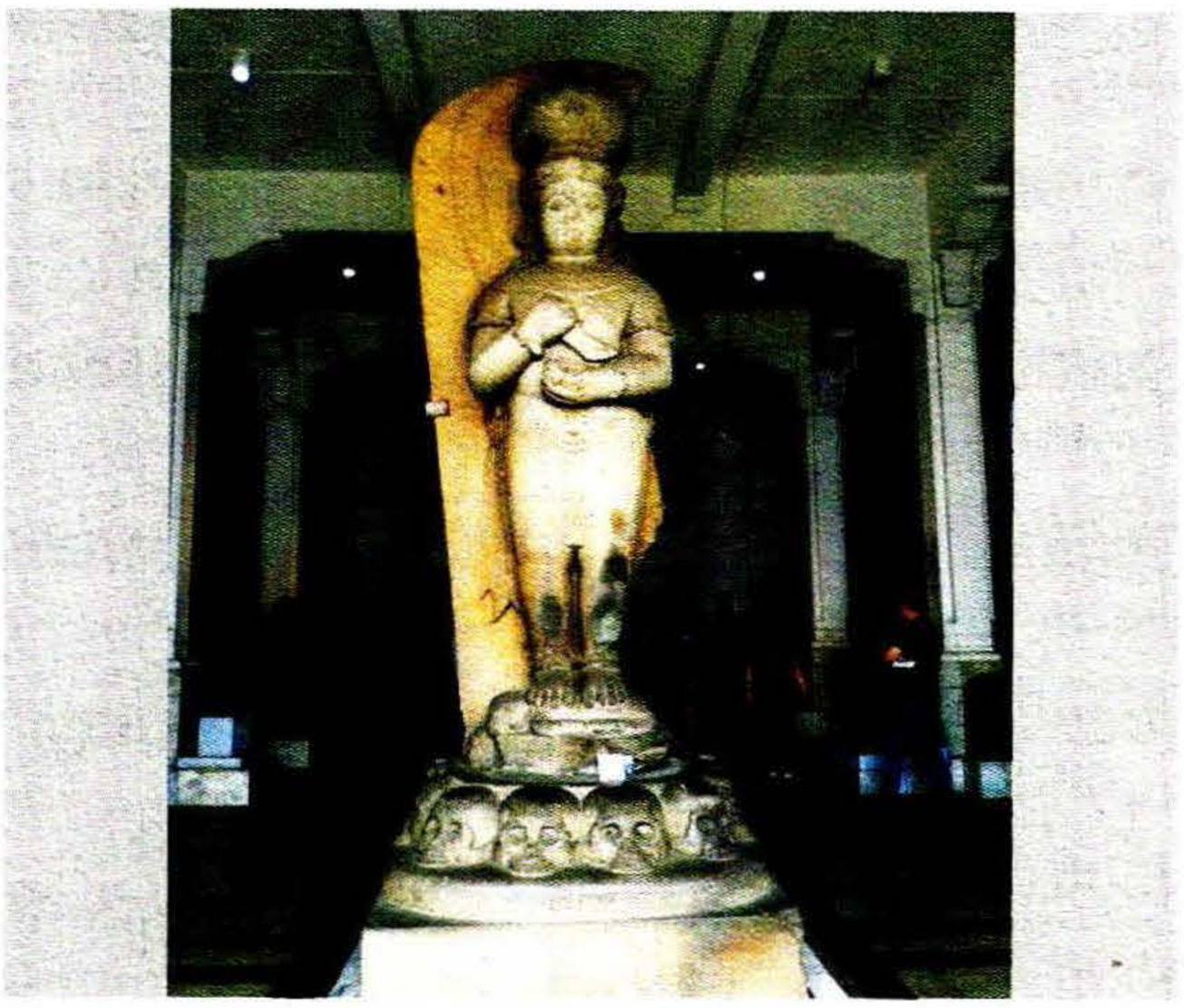

Arca Bhairawa-Amoghapasa dari Padangroco, mungkin menggambarkan Raja Adityawarman, sekarang disimpan di Museum Nasional Jakarta.
Sumber: Agus Widiatmoko

raja di *San-bo-zhai* pada tahun 1377 setelah mendapat stempel dan surat pengangkatan dari Kaisar Cina. Akan tetapi utusan itu tidak pernah sampai ke Sumatera. Raja Jawa mendengar bahwa Kaisar Cina hendak mengangkat seorang raja di Sumatera. Ia marah dan memerintahkan armadanya untuk mencegat dan membunuh utusan tersebut. Sejak itu Sumatera dikuasai oleh Raja Jawa.

Perkembangan Kerajaan Malayupura setelah Ananggawarman Mauliwarmadewa naik takhta belum ada penjelasan yang memadai. Sumber-sumber dalam negeri tentang Malayu pada paruh kedua abad ke-14 sampai sekarang belum dijumpai. Hanya saja berita Cina kembali mengabarkan bahwa pada tahun 1397 Dewan Upacara Kekaisaran Cina mengeluh karena sejumlah negara barbar (dari selatan) tidak lagi mengirimkan utusan dan upeti ke Cina. Beberapa negara masih teratur mengirimkan utusan ke Cina, seperti Annam, Champa, Kamboja, Siam, dan Liu-qiu. Hanya Jawa dan *San-bo-zhai* yang tidak pernah lagi mengirimkan utusan (Groeneveldt, 2009: 98–99). Hal itu sangat mungkin terjadi seiring dengan perkembangan dan kejayaan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 dan banyak daerah di kepulauan Nusantara justru mengirimkan utusannya ke istana Majapahit. Para duta dan utusan dari berbagai daerah dari selatan (Cina) berkunjung ke Majapahit seraya membawa persembahan dan tidak lagi mempersembahkannya ke istana Cina.

8. Beberapa Kepurbakalaan yang Dikaitkan dengan Kerajaan Malayu

Ada berbagai peninggalan Kerajaan Malayu berupa monumen keagamaan yang terbuat dari batu bata, namun setelah dilakukan pemugaran tetap tidak dapat diketahui bentuk lengkapnya. Hal itu terjadi karena yang masih tersisa hanya bagian pondasi, kaki bangunan, dan sedikit bagian tubuh, sedang atapnya tidak tersisa

lagi, atau sangat mungkin merupakan bangunan terbuka tanpa dinding dengan struktur atap dari material yang mudah lapuk. Sisa-sisa monumen keagamaan tersebut antara lain sebagai berikut:

8.1 Percandian Padang Roco

Semula di situs Padang Roco, Desa Nagari Siguntur, Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, terdapat gundukan tanah seperti bukit kecil (*munggu*) dan setelah dilakukan penggalian diketahui ada susunan batu bata yang merupakan sisa bangunan. Penelitian terakhir di situs tersebut menemukan tiga sisa bangunan, yang sangat mungkin dahulu merupakan candi atau bentuk bangunan keagamaan lainnya. Sisa bangunan dengan ukuran terbesar disebut Candi Padang Roco I, denah bujur sangkar dengan ukuran 21 x 21 m, dan mempunyai empat tangga di keempat sisinya. Di bagian tengah bangunan terdapat urugan tanah setinggi sekitar 3 m dari permukaan tanah dan tidak menyisakan struktur atap bangunan (Ramelan, 2014: 90–93). Sisa bangunan yang berhasil direkonstruksi menunjukkan bahwa sangat mungkin Candi Padang Roco I dahulu merupakan stupa.

Candi Padang Roco II merupakan susunan bata yang membentuk batur dengan denah berukuran 4,40 x 4,40 m dan tinggi batur yang ada sekarang 1, 28 m. Bangunan ini sangat mungkin berkait dengan Candi Padang Roco I karena mempunyai satu tangga di arah barat daya menghadap ke Candi Padang Roco I. Gugusan candi Padang Roco III terdiri atas dua sisa bangunan, yaitu bangunan yang berdenah bujur sangkar ukuran 8,50 m x 8,50 m dan sisa *mandapa* berdenah empat persegi panjang ukuran 13,50 x 8,50 m. Kedua bangunan tersebut berdiri pada batur berukuran sama, yaitu 22 x 8,50 m, dan keduanya sama-sama tidak menyisakan adanya tangga.

8.2 Percandian Pulau Sawah

Terletak di situs Jorong Siguntur, Desa Nagari Siguntur, Sitiung, Dharmmaśraya. Sebenarnya terdapat sembilan *munggu*, namun yang baru diteliti tiga *munggu*. Struktur bata pada dua *munggu* (Candi Pulau Sawah I dan II) berhasil ditampilkan. Sisa Candi Pulau Sawah I berdenah bujur sangkar dengan ukuran 6,40 x 6,40 m, diduga sebagai bagian kaki candi, di bagian tengahnya terdapat sumuran, tinggi kaki candi sekarang dari dasar sumuran 2,50 m. Sisa struktur tangga terdapat di sisi timurnya. Candi Pulau Sawah II belum dipugar secara keseluruhan, bagian yang telah dipugar adalah tembok kelilingnya, di bagian dalam lingkungan pagar keliling tersebut terdapat beberapa sisa struktur bangunan yang belum ditampilkan. Pada masa silam dipastikan percandian Pulau Sawah didukung oleh kegiatan keagamaan yang ramai, sebab di situs tersebut ditemukan artefak lain, seperti fragmen tangan arca, pecahan inskripsi, dan pecahan medalion dari terakota (Ramelan, 2014: 94–97).

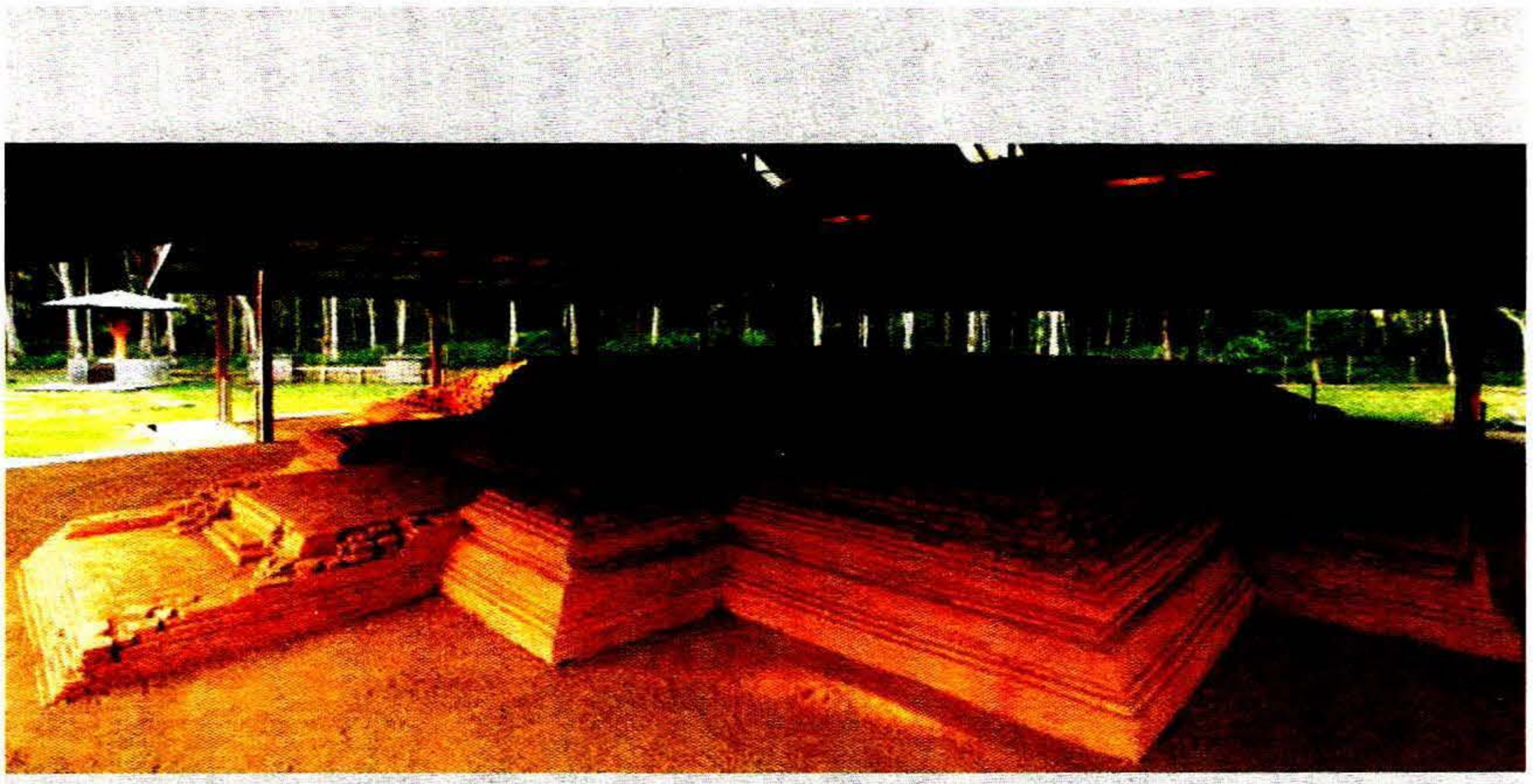

Candi Padang Roco.
Sumber: kebudayaan.kemdikbud.go.id

8.3 Kompleks Candi Tanjung Medan

Situs percandian ini terletak di Jorong Tanjung Medan, Desa Nagari Petok, Panti, Kabupaten Pasaman. Di situs tersebut terdapat enam runtuhan bangunan candi, namun yang berhasil dipugar baru empat bangunan, yaitu Candi Tanjung Medan I, II, V, dan VI. Dua runtuhan lainnya (Candi III dan IV) tidak tersedia data untuk rekonstruksi. Pernah ditemukan prasasti berisi mantra dengan menyebut-nyebut nama Dhyani Buddha Aksobhya, Amoghasiddhi, dan Ratnasambhawa, sehingga dapat diketahui bahwa percandian Tanjung Medan bernapaskan agama Buddha Mahayana (Ramelan, 2014: 101).

Candi Tanjung Medan I hanya tersisa bagian kaki candi dan kaki tubuh candi, berdenah bujur sangkar dengan ukuran 8,50 x 8,50 m, mempunyai penampil menjorok di arah tenggara sehingga dapat dipastikan bahwa bangunan ini menghadap ke arah tenggara. Candi Tanjung Medan II terletak di sebelah timur dan agaknya berkait dengan Candi Tanjung Medan I. Candi Tanjung Medan II berdenah bujur sangkar dengan ukuran 8,90 x 8,90 m. Hal yang istimewa candi ini mempunyai dua tangga naik, yaitu di arah barat laut dan tenggara. Candi Tanjung Medan V juga merupakan batur dengan denah hampir berbentuk bujur sangkar, berukuran 5,65 x 5,95 m, dibentuk dengan susunan batu bata. Di bagian tengah batur tidak diisi dengan susunan bata, tetapi diisi dengan urugan tanah. Di permukaan tanah itu terdapat empat batu alam yang diduga sebagai alas tiang penopang atap (batu umpak). Tangga berada di sisi timur bangunan. Di halaman depan terdapat bentuk batu kemuncak yang masih kasar, tetapi mungkin bukan bagian Candi Tanjung Medan V, tetapi dari candi lain yang diletakkan di halaman Candi V. Candi Tanjung Medan VI hanya tersisa bentuk batur berdenah bujur sangkar dengan ukuran 11, 70 x 11, 70 m. Bangunan ini menghadap ke arah tenggara, ditandai

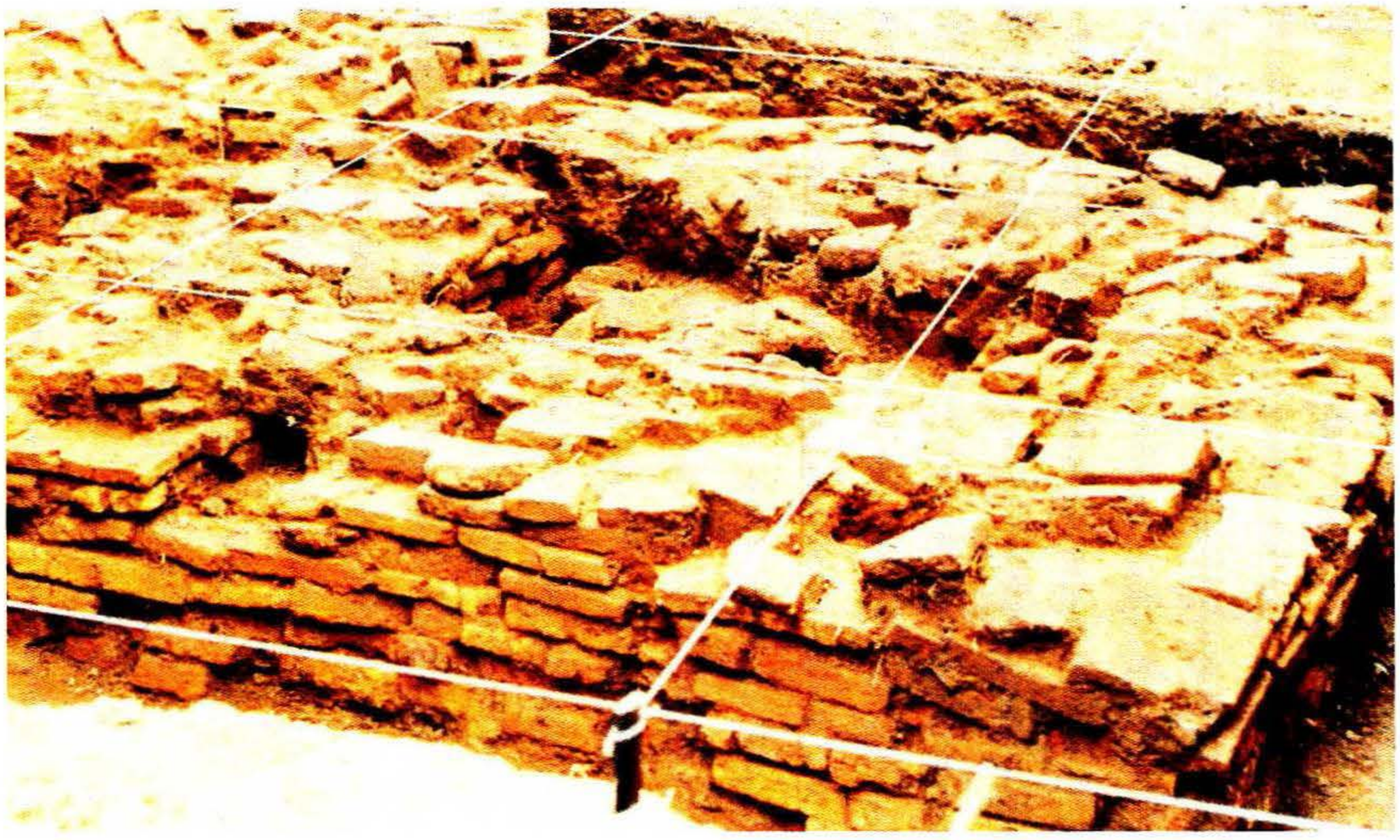

Candi Pancahan
Sumber: kebudayaan.kemdikbud.go.id

dengan adanya penampil yang mengarah ke tenggara (Ramelan, 2014: 102–103). Candi Tanjung Medan VI merupakan sisa bangunan terbesar yang berada di gugusan percandian Tanjung Medan dan sangat mungkin merupakan bangunan utama percandian tersebut.

Diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap percandian Tanjung Medan karena berdasar palaeografi prasasti dan bentuk arsitekturnya ada dugaan bahwa percandian Tanjung Medan berasal dari abad ke-12–13 M. Kronologi tersebut belum tentu akurat dan penelitian yang lebih cermat mungkin dapat menghasilkan kronologi yang lebih tepat.

8.4 Candi Pancahan

Candi Pancahan terletak di Desa Pancahan, Rao, Kabupaten Pasaman. Situs ini baru diketahui keberadaannya pa tahun 1990-an. Penelitian arkeologis pada tahun 1992 menemukan struktur bata yang merupakan sisa bangunan dinding candi, lantai, dan fondasi, serta bagian isian bangunan berupa campuran tanah dan batu kerakal. Keadaannya sudah rusak parah, sehingga belum dapat direkonstruksi. Meskipun demikian hasil penelitian sementara menyimpulkan bahwa di situs Candi Pancahan terdapat dua sisa bangunan, yaitu (1) bangunan besar, yang disebut Candi Pancahan I sebagai candi induk menghadap ke selatan, serta (2) sisa bangunan yang lebih kecil (Candi Pancahan II) sebagai perwara dan mengahadap ke utara. Kedua bangunan berhadap-hadapan dan dikelilingi parit (Ramelan, 2014: 104). Sebenarnya kedua bangunan tersebut bukan candi induk dan perwaranya, melainkan candi pemujaan yang berhadapan dengan bangunan terbuka sebagai *mandapa*. Keadaan demikian lazim dijumpai pada gugusan percandian di Muarojambi dan percandian kawasan Bumiayu di Sumatera selatan.

Masih terdapat beberapa kepurbakalaan lain di bekas kawasan Kerajaan Malayu di Sumatera Barat, seperti Candi Bukik Awang Maombiak dan Candi Patani, namun keadaannya telah rusak, belum dilakukan penelitian memadai, dan belum dilakukan rekonstruksi. Candi-candi tersebut terbuat dari bata dan tidak ada yang menggunakan balok batu. Mungkin saja material batu hanya digunakan untuk bagian-bagian penting bangunan dan juga untuk arca-arcanya yang sekarang telah hilang.

9. Epilog

Kejayaan Majapahit mulai pudar pada abad ke-15 akibat konflik berkepanjangan di dalam negeri. Perang perebutan takhta terjadi antara 1404 dan tahun 1406 (Perang Paregreg) antara pihak Wikramawarddhana (menantu Hayam Wuruk) dan Bhre Wirabhumi, anak Hayam Wuruk dari selir yang juga merasa berhak atas takhta Majapahit. Walaupun peperangan dimenangkan oleh Wikramawarddhana yang berkedudukan di istana Majapahit peninggalan Hayam Wuruk, namun keagungan Majapahit telah surut. Banyak daerah di Nusantara menghentikan pengiriman utusan ke Majapahit.

Daerah-daerah di Pulau Sumatera dan Semenanjung Melayu yang semula mengakui kejayaan Majapahit tidak lagi merasa terikat dengan Majapahit. Mereka menjadi daerah yang bebas mengatur pemerintahan sendiri dan mengembangkan hubungan dengan wilayah lain. Selama abad ke-15 berita tentang Malayupura yang berpusat di Dharmmaśraya sampai sekarang belum jelas benar dan tidak ada sumber sejarah ontentik yang dapat diacu untuk menjelaskan kesejarahan pedalaman Jambi dan Sumatera Barat.

Penduduk Malayupura secara perlahan menerima agama Islam yang masuk ke Sumatera melalui bandar-bandar di pantai barat yang ramai dikunjungi para niagawan beragama Islam. Islam telah berkembang di wilayah Sumatera Barat sekitar akhir abad ke-15 dan memperoleh sambutan dari kalangan penduduk setempat (Tjandrasasmita, 2012: 33). Banyak penduduk Malayu yang semula menganut agama Buddha beralih menjadi pemeluk Islam. Sebagaimana diketahui agama Buddha yang tanpa kasta bersifat lebih terbuka untuk "berdialog" dengan religi lain. Terbukti setelah Siddharta Gautama meninggal agama Buddha terpecah menjadi Hinayana dan Mahayana. Buddha Mahayana banyak mendapat pengaruh pemikiran Hinduisme, baik dalam pantheonnya maupun ritualnya, sehingga muncul berbagai sekte, antara lain Buddha Mahayana sekte Bhairawapaksa di Malayupura. Kerajaan Malayupura agaknya tidak lagi populer di kalangan penduduknya dan mereka beralih memeluk Islam. Wilayah bekas kekuasaan Malayupura pun terbagi dalam sistem pemerintah daerah (*kenagarian*) hingga masuknya pengaruh Belanda ke Sumatera Barat.

— 3 —

Kedatuan Śrîwijaya

1. Pengantar

Kedatuan Śrîwijaya, atau lebih sering disebut dengan Kerajaan Śrîwijaya, merupakan salah satu kerajaan pada masa Indonesia kuna yang berkembang relatif lama dan beritanya tercatat sejak abad ke-7 sampai awal abad ke-12 M. Kehadiran Śrîwijaya dalam riwayat Indonesia kuna, bahkan sejarah Asia Tenggara, cukup mengesankan karena kerajaan itu merupakan satu-satunya kerajaan di Asia Tenggara yang mengembangkan kekuatan maritim, sedang kerajaan-kerajaan lain yang sezaman tumbuh dengan dukungan aktivitas agraris. Hal itu dapat diketahui berkat prasasti-prasasti yang dikeluarkan dan dipahatkan pada batu atau logam. Selain prasasti-prasasti juga terdapat catatan para musafir Cina yang memberitakan Kerajaan Śrîwijaya, terutama kedudukannya sebagai salah satu pusat pendidikan agama Buddha terkemuka di kawasan Asia Tenggara. Śrîwijaya menjadi mata rantai penghubung para musafir dan para *bhiksu* pengembara antara Cina dan India. Śrîwijaya sangat berperan dalam pengembangan agama Buddha dan mendukung keadiluhungan kesenian Buddha di luar India.

Terdapat kenyataan menarik mengenai prasasti-prasasti Kerajaan Śrîwijaya. Di antara banyak prasasti dari kerajaan awal di Nusantara, hanya prasasti-prasasti Śrîwijaya yang ditulis dengan menggunakan bahasa setempat, yaitu bahasa Melayu kuna, yang bercampur dengan beberapa kosa kata Sansekerta. Uraian prasasti suatu kerajaan merupakan upaya untuk mengabadikan beberapa aspek yang dianggap harus diketahui oleh warga masyarakat. Aspek-aspek itu antara lain perintah raja, keputusan kerajaan, dan peristiwa penting dalam bidang keagamaan. Meskipun demikian juga terdapat sisi lain prasasti-prasasti Śrîwijaya yang hingga sekarang belum banyak dibicarakan, karena para peneliti terdahulu cenderung lebih memilih perbincangan tentang sejarah politik perihal tumbuh-kembang Kerajaan Śrîwijaya.

Kerajaan Śrîwijaya meninggalkan tidak kurang sembilan prasasti batu, baik dalam uraian panjang maupun hanya berupa inskripsi ringkas. Prasasti-prasasti Śrîwijaya senantiasa menguraikan tema keagamaan, walaupun juga mengandung narasi yang berkenaan dengan kehidupan kerajaan. Apabila dibandingkan dengan prasasti-prasasti kerajaan sezaman di Nusantara, maka dapat dijumpai data sebagai berikut:

(1) Kerajaan Kutai kuna mengeluarkan sejumlah prasasti, disebut prasasti Yupa, tidak berkronologi, namun diperkirakan dari sekitar akhir abad ke-4 M. Prasasti-prasasti Yupa menggunakan

bahasa Sansekerta, isinya terutama perihal upacara keagamaan Veda-brahmana dan berbagai persembahan untuk kaum pendeta.

(2) Kerajaan Tarumanagara mengeluarkan sekitar lima prasasti penting, tanpa kronologi, berdasarkan palaeografinya diperkirakan dipahatkan pada abad ke-5 M. Sama dengan Kutai kuna, prasasti-prasasti Tarumanagara juga menggunakan Bahasa Sansekerta, isinya terutama tentang pemerintahan raja Purnnawarman, pembangunan saluran air, dan hadiah bagi kaum brahmana dalam ajaran Veda.

(3) Śrîwijaya mengeluarkan Prasasti Kedukan Bukit berangka tahun 682 M. Tahun itu dianggap sebagai tahun pendirian kerajaan bersangkutan, bercorak agama Buddha, menggunakan Bahasa Melayu kuna, isinya antara lain maklumat kejayaan, upacara agama, ajaran kebajikan, dan persumpahan bagi mereka yang berani melawan dan memberontak terhadap raja Śrîwijaya.

(4) Mataram Kuna mengeluarkan Prasasti Canggal berangka tahun 732 M, menggunakan Bahasa Sansekerta, isinya tentang Raja Sanjaya yang menegakkan lingga (simbol Siwa Mahadewa) di Bukit Sthirangga. Bukit yang dimaksudkan adalah Gunung Wukir di Muntilan, yang di puncaknya terdapat reruntuhan Candi Gunung Wukir bersemangat Hindu-saiwa. Tahun 732 dianggap sebagai tahun awal berdirinya Kerajaan Mataram kuna yang bertahan hingga abad ke-10 M (Poerbatjaraka, 1952: 53–56; Bernet Kempers & R. Soekmono, 1974: 4–6).

(5) Kerajaan Kanjuruhan di Jawa Timur mengeluarkan satu-satunya prasasti, yaitu Prasasti Dinoyo, berangka tahun 760 M, menggunakan Bahasa Sansekerta, isinya antara lain menyebutkan nama Raja Liswa-Gajayana dari Kerajaan Kanjuruhan yang meresmikan arca Agastya dari batu hitam menggantikan arca lama dari kayu cendana yang telah lapuk (Poerbatjaraka, 1952: 61–63). Prasasti Kerajaan Kanjuruhan hanya satu-satunya dan tidak pernah ditemukan prasasti lain, sehingga keberlangsungan kerajaan itu masih belum dapat diketahui hingga kini karena keterbatasan data.

Berdasarkan data prasasti diketahui bahwa Śrîwijaya mulai berkembang dalam kurun waktu abad ke-7 setelah munculnya Kerajaan Kutai Kuna dan Tarumanagara serta sebelum berkembang Kerajaan Mataram Kuna dan Kanjuruhan di Jawa. Hal yang menarik adalah bahwa seluruh prasasti Śrîwijaya menggunakan bahasa Melayu Kuna, sedangkan prasasti Mataram Kuna dan Kanjuruhan tetap memakai bahasa Sansekerta; padahal kedua kerajaan tersebut berkembang lebih belakangan dari Śrîwijaya. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa penguasa dan rakyat Śrîwijaya ternyata lebih percaya diri untuk mengungkapkan prasastinya dalam bahasa setempat, yaitu bahasa Melayu kuna. Sementara itu penggunaan bahasa Jawa kuna dalam prasasti-prasasti di Jawa justru terjadi sangat kemudian, sekitar pertengahan abad ke-9 M.

Hampir semua kajian terdahulu menyatakan bahwa prasasti-prasasti Śrîwijaya yang dikeluarkan pada abad ke-7–8 sebagai pernyataan kutukan atau persumpahan yang ditujukan bagi musuh-musuh Śrîwijaya, baik dari dalam maupun dari luar. Uraian prasasti itu juga dapat dianggap sebagai pernyataan kekuasaan Śrîwijaya atas daerah-daerah tempat ditemukannya prasasti bersangkutan (Krom, 1954: 53–54; De Casparis, 1956: 15–46; Faisal Iskandiar 1993: 01–7). Selain Prasasti Kedukan Bukit, isi prasasti-prasasti Śrîwijaya—yang meliputi Prasasti Talang Tuwo, Kota Kapur, Telaga Batu, Karang Berahi, dan Palas Pasemah—memang berisi ancaman, sumpah, dan kutukan terhadap orang-orang yang akan melawan Śrîwijaya. Uraian tentang ancaman dan kutukan memang memenuhi isi prasasti, sehingga tidak keliru jika para ahli menyebutnya sebagai "prasasti persumpahan Kerajaan Śrîwijaya". Mengenai banyaknya uraian prasasti yang berisi persumpahan, sangat mungkin berkenaan dengan kehidupan dan perkembangan kerajaan Śrîwijaya.

Hal yang menjadi diskusi menarik berkait "prasasti persumpahan" adalah apabila Palembang dianggap sebagai letak ibukota Śrîwijaya, mengapa prasasti persumpahan juga ditemukan di kawasan Palembang. Jika prasasti persumpahan dijumpai di kawasan luar ibukota yang merupakan wilayah taklukan bala tentara Śrîwijaya dapat dipahami karena ada kekhawatiran pemeberontakan di daerah tersebut, namun jika prasasti persumpahan ditemukan di Palembang berarti raja Śrîwijaya tidak percaya terhadap kesetiaan penduduk ibukotanya sendiri. Atau, tafsir lain, Palembang bukan letak ibukota Śrîwijaya: ibukota berada di tempat lain, sedang Palembang merupakan salah satu daerah yang ditaklukkan Śrîwijaya.

2. Awal Berdiri dan Perkembangan

Prasasti Kedukan Bukit merupakan prasasti Śrīwijaya yang menyita banyak perhatian para ahli sejak masa awal penemuannya. Terjemahanan yang dilakukan Boechari (1993: A1–4), seorang pakar epigrafi Indonesia yang terkenal, sebagai berikut:

(1) "Selamat ! tahun Saka telah lewat 604, pada hari ke sebelas
(2) paro-terang bulan waisakha dapunta hyang naik di
(3) perahu "mengambil siddhayatra". pada hari itu ke tujuh paro-terang
(4) bulan jyestha dapunta hyang bertolak ke Minanga
(5) sambil membawa 20.000 tentera dengan perbekalan
(6) sebanyak dua ratus (peti) berjalan dengan perahu
(7) tiga ratus dua belas datang di mukha upang
(8) dengan sukacita. pada hari kelima paro terang bulan asada
(9) dengan cepat dan penuh kegembiraan datang membuat wanua (...)
(10) Śrîwijaya menang, perjalanan berhasil dan menjadi makmur senantiasa

N.J. Krom (1954: 51–52) mengemukakan bahwa Prasasti Kedukan Bukit dimaksudkan untuk memperingati pembentukan negara Śrīwijaya, namun Krom melanjutkan bahwa pada waktu itu belum terbukti pusat Śrīwijaya terletak di Palembang. Dalam pada itu R.M.Ng. Poerbatjaraka (1952: 35) menyatakan bahwa Dapunta Hyang Sri Jayanasa berasal dari pertemuan dua aliran sungai (*Minanga Kampwan*). Dia membawa pasukan darat dan ada yang menyusuri sungai, kemudian singgah di Malayu (Jambi), untuk kemudian sampai di Palembang. Di tempat itu Sri Jayanasa dan pasukannya membuka permukiman baru yang diberi nama Śrîwijaya. Poerbatjaraka menjelaskankan, "Djikalau kepertjajaan kami betul, maka djaman dulu ada seorang besar dari Minangkabau pergi berperang, berhenti dulu di Jambi, lalu terus ke Palembang dengan mendapat kemenangan, lalu membuat kota di daerah itu dengan diberi nama Śri-widjaja" Poerbatjaraka (1952: 35). Pendapat penting Poerbatjaraka ini adalah Prasasti Kedukan Bukit merupakan narasi tentang riwayat Sri Jayanasa sebelum sampai di Palembang untuk membuka kerajaan yang bernama Śrîwijaya.

George Coedes tidak meragukan bahwa Prasasti Kedukan Bukit merupakan dokumen yang amat penting bagi sejarah Śrīwijaya dan barangkali prasasti pertama yang pernah dipahat atas perintah seorang rajanya yang pertama (Coedes, 1989: 55). Dengan kata lain Coedes menyatakan bahwa Prasasti Kedukan Bukit merupakan "proklamasi" pernyataan tentang berdirinya Kerajaan Śrīwijaya pada tahun 604 S (682 M). Adapun komentar Boechari mengenai isi Prasasti Kedukan Bukit cukup jelas, didedahkannya bahwa uraian prasasti itu merupakan peringatan "peletakan batu pertama" suatu pembangunan kota, sedang kota yang dimaksud adalah pusat Kerajaan Śrīwijaya yang sangat mungkin terletak di *wanua Palimban* atau *Malemban*, hanya saja bagian aksara yang menyebutkan nama *wanua* itu telah rusak (Boechari 1993: A1-9–A1-10).

Wanua yang kemudian diberi nama Śrīwijaya itu merupakan permukiman yang di dalamnya bersemayam seorang *datu* (pemimpin). Oleh karena itu Śrīwijaya, dalam prasasti, disebut sebagai *Kedatuan Śrīwijaya*. *Datu* pertama berdasarkan data yang tersedia adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Di dalam uraian Prasasti Talang Tuo yang ditemukan di Palembang, berangka tahun 606 S (684 M), disebutkan bahwa Sri Jayanasa juga membuat dan menata taman Sri Ksetra dalam hubungan dengan ajaran Buddha yang diharapkan dilaksanakan oleh penduduk Śrīwijaya. Uraian terjemahan Prasasti Talang Tua sebagai berikut:

> "Kemakmuran, keberuntungan ! Tahun Saka 606,
> hari kedua paruh terang, bulan Caitra; pada saat itulah
> taman ini [yang dinamai] Sriksetra dibuat di bawah
> pimpinan Sri Baginda Sri Jayanasa. Inilah niat Sri
> Baginda: semoga segala yang ditanam di sini, pohon

kepala, pinang, aren, sagu dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu *haur*, *wuluh* dan *pattum* dan sebagainya; dan semoga taman-taman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan, dapat dipergunakan untuk kebaikan-kebaikan semua makhluk yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan.

Jika mereka lapar waktu beristirahat atau dalam perjalanan, semoga mereka menemukan makanan serta air minum. Semoga semua kebun yang mereka buka menjadi berlebih [panennya]. Semoga suburlah ternak bermacam jenis yang mereka pelihara, dan juga budak-budak milik mereka. Semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa karena tidak dapat tidur. Apa pun yang mereka perbuat, semoga semua planet dan rasi menguntungkan mereka, dan semoga mereka terhindar dari penyakit dan ketuaan selama menjalankan usaha mereka. Dan juga semoga semua hamba mereka setia kepada mereka dan berbakti, lagi pula semoga teman-teman mereka tidak mengkhianati mereka dan semoga istri mereka bagi mereka [adalah] istri yang setia. Lebih-lebih lagi di mana pun mereka berada, semoga di tempat itu tidak ada pencuri atau orang yang menggunakan kekerasan, atau pembunuh, atau pezinah. Selain itu semoga mereka mempunyai seorang kawan yang menjadi penasihat baik *(kalyanamitra);* semoga dalam diri mereka lahir pikiran *Bodhi* dan persahabatan [...] dari Tiga Ratna (*Tri Ratna*), dan semoga mereka tidak terpisah dari Tri Ratna itu.

Dan juga semoga senantiasa [mereka bersikap] murah hati, taat kepada peraturan dan sabar, semoga dalam diri mereka terbit tenaga, kerajinan, pengetahuan akan semua kesenian berbagai jenis, semoga semangat mereka terpusatkan, mereka memiliki pengetahuan, ingatan, kecerdasan. Lagi pula semoga mereka teguh pendapatnya, bertubuh intan seperti para *Mahasattwa*, berkekuatan tiada bertara, berjaya, dan juga ingat akan kehidupan-kehidupan mereka sebelumnya, berindra lengkap, berbentuk penuh, berbahagia, bersenyum, tenang, bersuara yang menyenangkan, suara Brahma. Semoga mereka dilahirkan sebagai laki-laki, dan keberadaannya berkat mereka sendiri, semoga mereka menjadi wadah batu ajaib, mempunyai kekuasaan atas kelahiran-kelahiran, kekuasaan atas *karma,* kekuasaan

atas noda, dan semoga akhirnya mereka mendapatkan Penerangan sempurna lagi agung" (Coedes, 1989b: 58).

Berdasarkan uraian Prasasti Talang Tuo dapat disimpulkan bahwa Śrîwijaya merupakan kerajaan yang sangat religius. Raja mengharapkan penduduknya hidup dalam berbagai suasana yang aman sejahtera dan penuh kebajikan sesuai dengan konsep *pranidhāna* dalam *Buddhadharma*. Prasasti juga menyebutkan bahwa pada waktu Sri Jayanasa berkuasa agama Buddha Mahayana telah berkembang dengan baik di Śrîwijaya. Ajaran agama Buddha dipahami betul oleh penduduk Śrîwijaya. Sementara pada bagian awal prasasti menyatakan pembuatan taman Sri Ksetra yang ditanami berbagai tumbuhan tertentu. Tanaman itu dirinci jenisnya, seperti kelapa, pinang, aren, sagu, dan bermacam jenis bambu. Tanaman yang disebut bukan sembarang tanaman, melainkan tanaman yang mempunyai makna dari sudut agama Buddha atau berkaitan dengan riwayat kehidupan Buddha dan agama Buddha.

Prasasti juga menguraikan ajaran *Dasaśila* yang harus dilaksanakan para bhiksu dan pemeluk agama Buddha pada umumnya. Sebagian dari *Dasaśila* itu tercantum dalam uraian prasasti, antara lain dinyatakan "... semoga di tempat itu tidak ada pencuri atau orang yang menggunakan kekerasan, atau pembunuh, atau pezinah". Disebutkan juga prinsip dasar agama Buddha, yaitu *Tri Ratna*, artinya diharapkan *Buddha, Dharma* dan *Samha* melindungi setiap manusia penduduk Srîwijaya. Berbagai harapan tentang kebaikan yang dapat dicapai oleh seseorang dikemukakan dalam uraian Prasasti Talang Tuo, seperti sifat murah hati, taat kepada peraturan, sabar, rajin, serta paham ilmu pengetahuan, kesenian, dan mendapatkan kecerdasan. Uraian prasasti itu ditutup dengan harapan semoga penduduk Śrîwijaya "bertubuh intan seperti Mahasattwa", yakni Bhoddhisattwa yang menunda pencapaian memasuki *Nirwana* demi menolong sesamanya. Jayanasa mengharapkan agar manusia memperoleh kebahagiaan yang dimulai dari kebahagiaan material, tetapi diharapkan sedikit demi sedikit meningkat ke tingkat moral, ke tingkat pertemuan dengan dewata (mistik), dan akhirnya sampai ke pencerahan (*nirwana*) (Coedes, 2010: 127).

Tidak ada prasasti di Indonesia yang isinya menguraikan kebajikan dan harapan-harapan baik dari seorang raja untuk kesejahteraan rakyatnya selain Prasasti Talang Tuo. Uraian prasasti tersebut seakan-akan meruapakan ajaran Buddha yang diringkas untuk kemudian dipahatkan pada permukaan batu agar dapat diketahui secara umum oleh para pembacanya, penduduk Kerajaan Śrîwijaya.

Mengenai kehidupan keagamaan Buddha yang marak dan penuh semangat di Śrîwijaya agaknya perlu diperhatikan catatan I-Tsing, yang pertama kali singgah di Śrîwijaya pada tahun 671 M. Pendeta Buddha dari Cina itu mencatat bahwa kehidupan agama Buddha di Śrîwijaya (Shi-li Foshi) sangat ramai. Selanjutnya pendeta I-Tsing menyatakan sebagai berikut:

"Saya berlayar selama 20 hari, kapal mencapai Foshi, di mana saya mendarat dan tinggal selama enam bulan, secara bertahap saya mempelajari *sabdawidya* (tata bahasa Sansekerta). Raja setempat memberikan saya bantuan dan mengirim saya ke Mo-luo-you (Malayu) yang sekarang disebut Shi-li Foshi, di sana saya tinggal selama dua bulan, dan dari situ saya berangkat ke Jiecha (Kedah). Di sini, di bulan dua belas, saya bertolak, dan sekali lagi naik kapal milik raja menuju India Timur. Bertolak ke utara dari Jiecha...." (Takakusu, 2014: 33).

I-Tsing, dalam persiapannya berziarah ke *Mahaboddhi* di Bodhgaya, India, menyatakan singgah terlebih dahulu di Śrîwijaya, yang disebut dalam bahasa Cina masa itu "Shi-li Foshi". Di Śrîwijaya ia tinggal selama enam bulan untuk mempelajari terlebih dahulu bahasa Sansekerta yang sangat berguna dalam melakukan perjalanan ziarahnya ke India. Sepulang dari India, dengan perjalanan laut pula, I-Tsing singgah lagi di Śrîwijaya. Kali ini catatan yang berkenaan dengan Śrîwijaya sebagai berikut:

> "Banyak raja dan penguasa di Pulau-pulau Lautan Selatan [yang] mengagumi dan meyakini (ajaran Buddha), dan hati mereka bertekad melakukan tindakan-tindakan bijak. Di kota Foshi yang berbenteng terdapat bhiksu Buddhis berjumlah ribuan di mana hati mereka bertekad untuk belajar dan menjalankan tindakan bajik. Mereka menganalisa dan mempelajari semua mata pelajaran persis seperti yang ada di Kerajaan Tengah (Madyadesa, India); tata cara dan upacaranya sama sekali tak berbeda. Jika seorang bhiksu dari Tiongkok ingin pergi ke India untuk mendapatkan (ajaran) dan melafalkan (kitab asli), lebih baik dia tinggal di sini selama satu atau dua tahun dan mempraktikkan tata cara yang benar, kemudian baru berlanjut ke India Tengah (Takakusu 2014: 40)."

Mengacu kepada catatan I-Tsing dengan segera diketahui bahwa pada abad ke-7 kehidupan agama Buddha di Śrîwijaya telah sangat berkembang. Segala ritus dan sistem pelajaran yang diadakan di Śrîwijaya mempunyai tradisi yang sama dengan yang dipraktikkan di India. Agaknya Śrîwijaya pada masa itu menjadi pusat penyebaran agama Buddha di kawasan Asia Tenggara. I-Tsing menyebutkan jumlah bhiksu yang tinggal di Śrîwijaya hingga mencapai ribuan orang, yang menunjukkan betapa ramainya kegiatan keagamaan Buddha di tempat tersebut.

Sebagai kerajaan yang mendukung agama Buddha agaknya sistem penataan wilayah Śrîwijaya mengikuti pola *mandala*, yakni ada *mandala* pusat dikelilingi oleh sejumlah *mandala* daerah yang

masing-masing dipimpin oleh seorang *datu* (De Casparis, 1956). Semula pengertian *mandala* dipahami sebagai sistem penataan dewa-dewa dengan pola konsentris memusat atau bangunan suci yang berisi sejumlah arca dewa, tetapi pada akhirnya dipahami sebagai sistem penataan wilayah yang mengacu pada susunan dewa. Herman Kulke (1991) menyatakan bahwa penataan wilayah Śrîwijaya meliputi kedudukan raja (*datu*) di pusat yang sangat kuat dengan dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran konsentris dari daerah-daerah, yang di wilayah itu wewenang raja tidak terlalu kuat. Kekuasaan mutlak seorang raja hanya berlaku dan ditaati di wilayah inti, di istananya, dan di ibukota tempat raja bersemayam. Apabila ibukota Śrîwijaya berkedudukan di Palembang, maka dalam jaringan Sungai Musi dan anak sungainya tentu terdapat kekuasaan para *datu* daerah yang membentuk *mandala*-nya pula. Di wilayah ini Raja Śrîwijaya berbagi wewenang dengan para pangeran daerah. Lingkar terluar *Mandala* Śrîwijaya adalah daerah-daerah kekuasaan para *datu* yang berkembang di DAS lain di Sumatera, di pulau-pulau, dan di Semenanjung Malaysia (Munoz, 2006: 211).

Śrîwijaya mengalami perkembangan wilayah kekuasaannya. Beberapa prasasti yang dikeluarkan kemudian ada yang mengandung narasi kutukan. Hal itu, bagaimanapun, menunjukkan adanya kekhawatiran penguasa Śrîwijaya akan adanya perlawanan atau pemberontakan terhadap kekuasaan Śrîwijaya yang telah ditanamkan di suatu wilayah. Prasasti-prasasti kutukan yang dikeluarkan oleh penguasa Śrîwijaya meliputi Prasasti Karang Berahi (ditempatkan di wilayah Jambi), Prasasti Kota Kapur (di Pulau Bangka), serta Prasasti Bungkuk dan Palas Pasemah (ditemukan di wilayah Lampung).

Di Palembang, sebagai lokasi pusat Śrîwijaya, ditemukan Prasasti Telaga Batu yang juga berisi narasi kutukan. Prasasti ini tidak mencantumkan angka tahun dan nama raja yang mengeluarkannya, namun berdasarkan perbandingan dengan Prasasti Talang Tuo dapat diduga bahwa Prasasti Telaga batu dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Sri Jayanaśa. Bentuk batu prasasti berupa batu pipih yang telah melalui pengerjaan. Pada bagian puncak prasasti terdapat hiasan tujuh kepala ular kobra yang menaungi bidang tulisan. Di bagian bawah bidang tulisan terdapat bentuk semacam cerat untuk mengalirkan air, mengesankan bahwa pada masanya prasasti tersebut diguyur dengan air, mulai bagian kepala kobra, lalu air mengalir membasahi tulisan prasasti dan mengucur ke bawah melalui cerat. Di bawah cerat air terdapat wadah penampung. Mungkin air di penampung itu diminum oleh orang-orang yang terkena sumpah atau untuk mencuci wajah dan tubuhnya sebagaimana tercantum dalam Prasasti Telaga Batu.

Para pejabat yang disebut dalam Prasasti Telaga Batu dan harus mengikuti upacara persumpahan antara lain putra mahkota (*yuwaraja*), putra-putra *datu*, pemimpin, komandan tentara, *nayaka, pratiaya*, hakim, para pemimpin, pemimpin buruh,

penyelia kelompok kasta rendah, pembuat pisau (senjata tajam), *kumaramatya, catabhata, adhikarana*, juru tulis, pemahat, para pemimpin kegiatan bahari, pedagang, para pembersih, dan pelayan istana (De Casparis, 1956: 18; Sedyawati & Hasan Djafar, 2012: 83–84). Mungkin sekali para pejabat yang disebut dalam Prasasti Telaga Batu adalah mereka yang dekat dengan kehidupan istana raja dan yang diduga mampu menggerakan masyarakat untuk melawan raja.

N.J. Krom berpendapat bahwa prasasti-prasasti dengan narasi kutukan sengaja dikeluarkan oleh raja Śrîwijaya sebagai pernyataan atas kekuasaan Śrîwijaya terhadap daerah-daerah tempat prasasti tersebut ditegakkan. Pendapat tersebut dibantah oleh J.G. de Casparis, yang menyatakan bahwa ancaman dan kutukan yang tercantum di dalam uraian Prasasti Karang Brahi dan Kota Kapur ditujukan kepada musuh-musuh dalam negeri dan bukan kepada musuh-musuh luar. Di wilayah Palas Pasemah, Lampung, juga ditemukan prasasti kutukan yang isinya sejenis dengan Prasasti Karang Brahi dan Kota Kapur namun tidak mencantumkan angka tahun. Berdasar perbandingan aksara dan isinya Boechari menduga bahwa Prasasti Palas Pasemah dikeluarkan oleh raja Śrîwijaya pada akhir abad ke-7. Prasasti itu dikeluarkan untuk memperingati penaklukan wilayah Lampung Selatan, termasuk wilayah Bhumi Jawa yang berlokasi di Lampung. Kutukan-kutukan pada prasasti Śrîwijaya dimaksudkan agar penduduk daerah yang telah ditaklukkan dan wilayah sekitarnya tidak berani melakukan pemberontakan dan melawan kekuasaan Śrîwijaya (Sumadio, 1984: 59).

Dalam kitab sejarah Dinasti Sung (*Sung-Shih*) terdapat uraian tentang San-fo-shi atau San-bo-tsai (Śrîwijaya) sebagai salah satu kerajaan orang-orang selatan. Dinyatakan bahwa kerajaan itu terletak di antara Kamboja dan Jawa. Hasil buminya antara lain rotan, kino (getah kamper merah), kayu gaharu, buah pinang, dan kelapa. Penduduknya tidak menggunakan uang tembaga, namun biasa berniaga menggunakan logam emas dan perak. Cuaca San-fo-shi hampir selalu panas sepanjang tahun, jarang sekali dingin, dan pada musim dingin tidak ada salju. Banyak penduduk melumuri tubuh mereka dengan minyak yang berbau harum. Negara San-fo-shi tidak menghasilkan *barley* (gandum), tetapi menghasilkan beras, kacang hijau, dan kacang kedelai. Peternakan unggas mereka yang banyak adalah angsa dan bebek, hampir sama dengan di Cina. Penduduk membuat arak dari bunga kelapa, pinang, atau madu. Hasilnya sangat memabukkan, walaupun mereka tidak mengenal *leaven* atau *yeast* (sejenis ragi). Mereka memainkan musik dengan gitar kecil dan kendang kecil serta menulis dengan menggunakan Bahasa Sansekerta. Mereka juga mengenal aksara Cina dan menggunakannya untuk menulis surat ketika mengirimkan upeti ke Cina. Raja menggunakan cincinnya sebagai segel cap kerajaan. Mereka membangun kota dengan dikelilingi tembok dari bata sebagai benteng pertahanan, panjang tembok itu beberapa puluh *li* (sepuluh *li* sekitar 5 km). Daun palem disusun digunakan sebagai

atap rumah. Penduduk banyak yang tinggal bertebaran di luar kota dan tidak membayar pajak. Ketika akan berperang penduduk San-fo-shi segera memilih seorang pemimpin yang memimpin mereka. Setiap orang yang menjadi prajurit menyediakan perlengkapam perang dan perbekalan masing-masing. Banyak penduduk yang namanya dimulai dengan kata Bu (Mpu). Apabila angin baik dan cuaca cerah jarak pelayaran negara ini dengan Guangzhou di Cina selatan selama 20 hari (Groeneveldt, 1960: 62–63).

Berita Cina tentang kehidupan di Śrîwijaya di atas sangat jelas. Terdapat uraian menarik perihal pemimpin perang, yakni jenderal atau hulubalang sebagai pemimpin pasukan dipilih secara mendadak sebelum berangkat berperang. Hal ini mungkin melanjutkan tradisi konsep pemimpin *primus interpares* dalam kebudayaan Austronesia prasejarah. Orang Cina juga mencatat banyak orang yang berasal dari keluarga *Bu*. Dalam tradisi Cina nama depan seseorang menunjukkan nama marga atau keluarganya, padahal *Bu* yang digunakan oleh penduduk Śrîwijaya merupakan gelar *Pu*/Mpu yang merupakan kata sandang penghormatan untuk seseorang.

Telah dikemuakan bahwa hingga sekarang raja pertama Śrîwijaya yang dikenal ialah Sri Jayanasa sebagaimana disebutkan dalam Prasasti Talang Tuwo (684 M) dan mungkin telah memerintah ketika Prasasti Kedukan Bukit (682 M) dipahatkan. Kata *jayanasa* merupakan gabungan kata *jaya* (menguasai, menang, atau seruan kemenangan) dan *nasa* (merusak, menghancurkan, membuat tidak ada lagi) (Zoetmulder & S.O. Robson, 1982, I: 735 dan 1177), sehingga secara keseluruhan dapat diartikan sebagai "menguasai dan menghancurkan" atau diterjemahkan secara bebas menjadi "menang dalam penghancuran" musuh-musuhnya. Raja itulah yang mungkin membinasakan musuh-musuhnya dan mengutuk para pembangkang yang mencoba memberontak pada kekuasaan Śrîwijaya. Pilihan nama raja pertama Śrîwijaya tersebut tentu dengan harapan agar kerajaan tersebut dapat berjaya dan terus berkembang pada masa selanjutnya. Dengan demikian Sri Jayanasa telah mempersiapkan kerajaannya secara spiritual untuk meraih kejayaan pada masa-masa selanjutnya

Dalam pada itu kata *jaya siddhayatra* sebagaimana disebutkan dalam banyak prasasti Srîwijaya mempunyai arti yang menarik untuk ditafsirkan lebih lanjut. Kata *siddhayatra* berasal dari Bahasa Sansekerta yang berarti "memperoleh perjalanan yang berhasil" (Zoetmulder & S.O. Robson, 1982, II: 1758). Dengan demikian kata *Jaya Siddhayatra* berarti "menang, menguasai, dan memperoleh perjalanan yang berhasil". Apabila *siddhayatra* dipenggal menjadi dua kata, *siddha* dan *yatra*, diperoleh makna lain yang lebih luas. Kata *siddha* berarti "selesai sempurna, berhasil, dan diberkati kekuatan supernatural (dewa-dewa)", sedang *yatra* dapat berarti "barisan (arak-arakan) atau perjalanan ekspedisi" (Zoetmulder & S.O. Robson 1982, II: 1756 dan 2361). Oleh karenanya *siddhayatra*

dapat diartikan sebagai "perjalanan ekspedisi yang berhasil dari balatentara Śrîwijaya karena perlindungan dewa-dewa".

Setelah Dapunta Hyang Sri Jayanasa meninggal digantikan oleh penguasa yang baru, tetapi ia telah membangun landasan kokoh bagi perkembangan Śrîwijaya selanjutnya dengan dasar agama Buddha. Belum diketahui secara pasti apakah pergantian itu berlangsung wajar karena Raja Jayanasa wafat atau karena ada peristiwa lain sehingga tampil seorang *datu* dari *mandala* sekitar ibukota sebagai penguasa baru di Śrîwijaya karena data yang terbatas. Berdasarkan data yang ada, terutama uraian prasasti dan catatan orang-orang Cina, dapat ditafsirkan bahwa raja-raja Śrîwijaya berupaya menjadikan kerajaannya menempati posisi penting, setidaknya di kawasan Selat Malaka.

3. Raja-raja Śrîwijaya

Sebagai kerajaan yang berkembang cukup lama Śrîwijaya mempunyai banyak raja yang berkuasa dan mengatur pemerintahannya. Untuk menderetkan nama raja-raja tersebut tentu harus mengacu pada banyak berita prasasti, sebab prasasti yang dikeluarkan oleh seorang raja merupakan data otentik tentang masa pemerintahan raja bersangkutan. Meskipun demikian berita tentang para raja Śrîwijaya tidak hanya diperoleh dari uraian prasasti, tetapi juga harus diperhatikan catatan para musafir Cina yang pernah berkunjung ke Srîwijaya dan catatan kunjungan para utusan Śrîwijaya ke negeri Cina. Berdasarkan data prasasti yang telah berhasil dikaji berikut uraian Berita Cina diketahui sejumlah penguasa yang memerintah Śrîwijaya sebagai berikut:

3.1 Śrî Jayanasa/Jayanaga

Nama Sri Jayanasa disebut dalam Prasasti Kedukan Bukit tahun 605 S (682 M) dan Prasasti Talang Tuo tahun 606 S (684 M). Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Prasasti Kedukan Bukit menyatakan bahwa Sri Jayanasa merupakan pemimpin Śrîwijaya yang sukses mengadakan perjalanan ziarah (*jaya siddhayatra*) dan berhasil membuat *wanua* baru yang sangat mungkin menjadi tempat kedudukannya sebagai raja Śrîwijaya. Sementara itu Prasasti Talang Tuo menyatakan bahwa Śrî Jayanasa melakukan pembangunan taman *Sri Ksetra* dalam kaitan dengan ajaran Buddha agar dilaksanakan oleh penduduk Śrîwijaya. Asal-usul tokoh ini masih belum jelas, namun R.M.Ng. Poerbatjaraka berpendapat bahwa sangat mungkin Dapunta Hyang Sri Jayanasa adalah seorang tokoh penting dari daerah Minangkabau yang melakukan perjalanan militer menaklukkan beberapa daerah, singgah di wilayah Jambi, kemudian menuju *mudita* (mudik, ke arah selatan). Dalam perjalanan penaklukkan tersebut Dapunta Hyang dan tentaranya senantiasa mendapat kemenangan (*jaya siddhayatra*), sampai akhirnya tiba di wilayah

Palembang, membuat *wanua* (kota) yang kemudian berkembang menjadi Kerajaan Śrîwijaya (Poerbatjaraka, 1952: 35).

3.2 Dharmasetu

Nama raja Dharmasetu disebutkan dalam Prasasati Nalanda (sekitar tahun 949 M). Raja inilah yang dijuluki *Śrîwijaya Jayendraraja* dalam Prasasti Ligor A. Pada sisi lain batu yang sama terdapat uraian berbeda, dinamakan Prasasti Ligor B, menyebutkan nama raja lain. Prasasti Ligor A berangka tahun 697 S (775 M) menyebutkan bahwa pada tahun tersebut diresmikan bangunan suci *Bauddha* dari bata, bernama *trisamaya-caitya* (kelompok tiga *caitya*), untuk memuliakan Kajakara (Padmapani), Pembasmi Mara (Sakyamuni), dan Wajrin (Wajrapani) (Coedes, 1989a: 30). Raja Śrîwijaya yang jaya, yaitu Dharmasetu, mempunyai putri bernama Tara, yang disebut dalam Prasasti Kalasan (778 M). Para Sarjana menafsirkan bahwa Dewi Tara itulah yang kemudian menikah dengan raja Samarottuga atau Samaragrawira dari dinasti Śailendra yang berkuasa di Jawa Tengah abad ke-8–10 M (Bosch & Poerbatjaraka, 1975: 24).

3.3 Sesasarwarimadawimathana

Raja ini disebutkan dalam Prasasti Ligor B, yang sangat mungkin dipahatkan setelah pemahatan Prasasti Ligor A. Nama yang sama juga disebut dalam Prasasti Kelurak—berangka tahun 792 M, ditemukan di Jawa Tengah—dengan nama Dharanindra bergelar Wairiwarawirawimardana (Boech & Poerbatjaraka, 1975: 35–36). Raja tersebut diduga sebenarnya Raja Mataram yang bernama Rakai Panangkaran Sri Sanggramadhananjaya. Menurut daftar raja Mataram Kuna, sebagaimana tercantum dalam Prasasti Mantyasih (907 M), Rakai Panangkaran menggantikan kedudukan Sanjaya sebagai raja. Sangat mungkin kekuasaannya berkembang hingga luar Jawa, Sumatera, dan Semenanjung Melayu. Kitab *Carita Parahyangan* menyatakan bahwa Sanjaya melakukan banyak peperangan dan penaklukkan di Tanah Jawa, menyeberang ke Malayu, Khmer, dan Cina, sebelum kembali lagi ke Jawa (Atja, 1968). Agaknya penyusun *Carita Parahyangan* silap dalam berkisah. Raja yang melakukan penyerangan hingga ke luar Jawa seharusnya pengganti Sanjaya, yaitu Rakai Panangkaran bergelar Sesasarwarimadawimathana, yang menjadi penguasa di Mataram dan penguasa Śrîwijaya. Kesilapan itu dapat dimengerti karena kitab *Carita Parahyangan* disusun pada akhir abad ke-15, jauh dari terjadinya peristiwa.

3.4 Balaputradewa

Raja Balaputradewa dikenal dalam Prasasti Nalanda yang dikeluarkan oleh Raja Benggala Dewapaladewa sekitar tahun 949 M dan ditemukan di situs Nalanda, Bihar, India, dikeluarkan. Prasasti

Balaputradewa, raja dari Suwarnadwipa (Śrîwijaya) yang membangun wihara dalam kompleks pendidikan agama Buddha di Nalanda, Bihar, India. Sampai sekarang reruntuhan yang dibangun oleh Balaputradewa tersebut masih berdiri dan menjadi khasanah arkeologis penting di India. Beberapa keistimewaan bangunan *Wihara Śrîwijaya* di Nalanda yang dibangun atas perintah Balaputradewa, yaitu (1) kamar-kamar wihara dilengkapi dengan sistem pendingin ruang berupa saluran air bersih di lantai ruang-ruang wihara, (2) pada salah satu dinding *Wihara Śrîwijaya* terdapat relung agaknya untuk menempatkan arca dewata, hal yang tidak dijumpai pada ruang wihara lainnya di Nalanda, (3) dinding ruang dilapisi dengan sejenis lepa berwarna putih (*wajralepa*) yang juga dijumpai di candi-candi Bauddha di Jawa Tengah (Candi Kalasan dan Sari), (4) gugusan bangunan *Wihara Śrîwijaya* menempati lokasi strategis dalam kompleks Mahawihara Nalanda, dekat dengan gerbang utama dan dekat juga dengan stupa besar yang menjadi pusat ritual di Nalanda (Gosh, 2006).

menyebutkan bahwa Raja Balaputradewa dari Suwarnadwipa meminta izin untuk mendirikan wihara di pusat keagamaan Buddha *Mahawihara* Nalanda (Mulyana, 2006: 221). Balaputradewa juga menyebut dirinya sebagai cucu raja Wirawairimarthana, mungkin merujuk pada Dharanindra yang bergelar Wairiwarawirawimardana atau Sesasarwarimadawimathana. Apabila tokoh Sesasarwarimadawimathana adalah Rakai Panangkaran, maka Balaputradewa adalah cucu Rakai Panangkaran yang berkuasa juga di Jawa bagian tengah. Dengan demikian Balaputradewa merupakan anggota Dinasti Śailendra yang berkuasa di Jawa tengah dan mendirikan candi-candi megah abad ke-9–10 M.

3.5 Śrî Udayadityawarman

Menurut catatan sejarah Dinasti T'ang (Groeneveldt, 1960: 64), Śrî Udayadityawarman mengirim utusan sambil membawa upeti ke Cina pada tahun 960 M. Namanya mengandung kata *warman*, sama dengan nama-nama raja Tarumanagara dan Kutai Kuna yang pernah berkembang sebelum Śrîwijaya. Kata *warman* juga biasa dijumpai pada gelar raja-raja di daratan Asia Tenggara. Mungkin sekali pada masa pemerintahan Śrî Udayadityawarman ada hubungan erat dengan raja-raja Khmer kuna yang juga mempunyai tradisi menggunakan nama *warman* sebagai gelar resminya. Ia mungkin anak Balaputradewa, karena menjadi raja setelah pemerintahan Balaputradewa.

3.6 Śrî Sûdhāmaniwarmadewa (Culamaniwarmadewa)

Śrî Sûdhāmaniwarmadewa memerintah pada awal abad ke-11 M. Berita Cina menyebutnya dengan *Si-li Chu-la-wu-ni-fo-ma-diao-hua.* Pada tahun 1003, menurut berita Cina, Raja Sri Sudhamaniwarmadewa mengirim utusan sambil mempersembahkan upeti ke Cina. Para utusan mengatakan bahwa di negara mereka telah dibangun wihara Buddha dengan tujuan yang baik. Mereka meminta nama dan genta untuk wihara tersebut. Kaisar Cina menyetujui permintaan itu dan memberi nama untuk wihara yang baru dibangun dengan *Ch'eng-t'ien-wan-shou* serta memerintahkan para tukang tuang logam membuat beberapa genta

yang kemudian dibawa pulang oleh para utusan ke negaranya (Groeneveldt, 1960: 65).

3. 7 Śrî Marawijayottunggawarman (Marawijayottunggawarmadewa)

Śrî Marawijayottunggawarman putra Culamaniwarmadewa. Namanya disebut dalam Prasasti "Leiden", berangka tahun 1044 dan berbahasa Sansekerta, serta prasasti berangka tahun 1046 dan berbahasa Tamil yang ditemukan di bekas kawasan Kerajaan Chola (India Selatan). Prasasti "Leiden" memberitakan bahwa Raja Marawijayottunggawarman, dengan bantuan Raja Chola Rajakesariwarman Rajaraja I, mendirikan bangunan suci Bauddha di Nagipattana (India selatan) dan diberi nama *Cudamaniwarma-wihara* (Sumadio, 1984: 69). Pada tahun 1005 Raja Chola menetapkan agar hasil satu desa di wilayahnya digunakan untuk pemeliharaan bangunan suci milik Śrîwijaya di Nagipattana (Wolters, 2011: 303). Bangunan suci itulah yang mungkin didirikan oleh Raja Marawijayottunggawarman. Di dalam berita Cina Marawijayottunggawarman disebut dengan nama Se-li-ma-la-p'i, yang pada tahun 1008 mengirimkan tiga orang utusan untuk menyerahkan upeti dan persembahan kepada kaisar Cina (Groeneveldt, 1960: 65).

3.8 Śrî Sanggramawijayottunggawarman

Ia anak raja Sri Marawijayottunggawarman. Pada masa pemerintahan Sanggramawijayottunggawarman Śrîwijaya diserang Rajendracholadewa dari Cholamandala (India selatan) pada tahun 1017 dan 1025. Dalam peperangan tahun 1025 ia ditawan oleh Rajendrachola. Peristiwa itu disebutkan dalam prasasti yang dipahatkan di kuil Raja-raja di Tanjore tahun 1030 M (Munoz, 2009: 245 dan 271; Sedyawati & Hasan Djafar, 2012: 97–98).

Demikianlah beberapa raja penting yang pernah berkuasa di Śrîwijaya, sejak masa awal berdiri hingga keruntuhannya pada pertengahan abad ke-11. Nama raja-raja tersebut diperoleh dari prasasti dan catatan orang-orang Cina namun dengan pelafalan Cina sehingga banyak hal yang perlu penjelasan lebih lanjut mengenai kata yang berbeda pelafalan tersebut. Setelah pemerintahan Sanggramawijayottunggawarman berakhir, berdasarkan beberapa sumber di wilayah Semenanjung Malaya dan Sumatera masih terdapat penguasa yang berdasarkan gelarnya mengaku masih ada hubungan dengan Śrîwijaya, meskipun agaknya hanya penguasa tempatan.

4 Wilayah Kekuasaan

Hampir seluruh kerajaan awal di Nusantara bersemangat ajaran Veda-brahmana dan Hindu-Saiwa. Kerajaan Kutai Kuna dan Tarumanagara, berdasarkan prasasti-prasastinya, masih

menerapkan konsepsi Veda-brahmana, sedangkan Kerajaan Mataram kuna di Jawa Tengah dan Kañjuruhan di Jawa Timur dalam uraian prasastinya melaksanakan agama Hindu Trimurti (Munandar, 2017: 43). Hanya Kerajaan Śrîwijaya yang berdasarkan prasasti-prasastinya bersemangat agama Buddha, terutama Buddha Mahayana, sementara menurut berita Cina pada awalnya pernah berkembang Buddha Hinayana.

Prasasti Kota Kapur di Pulau Bangka menyebut adanya *Kadatuan* Śrîwijaya dan *Datu* Śrîwijaya. Kata *kadatuan* kemudian diterjemahan menjadi kerajaan, sehingga *Kadatuan* Śrîwijaya berarti Kerajaan Śrîwijaya (Irfan, 1983: 55; Coedes, 1989a: 3; Mulyana, 2006: 160). Boechari menyatakan bahwa ucapaan *kadatuan* sama dengan bahasa Jawa kuna *karatwan*, yang berarti "tempat dari *datu*", kemudian diartikan sebagai kediaman raja atau istana (*keraton*) yang mempunyai tembok keliling dan di dalam lingkungan tembok tersebut juga terdapat bangunan-bangunan untuk para pengawal dan kuil pemujaan. Kata *kadatuan* akhirnya dimaknai sebagai "kerajaan", karena dapat ditafsirkan sebagai wilayah di bawah kekuasaan seorang *datu* (Boehari, 1979: 22–23, Munoz, 2009: 157; Miksic & Geok Yian Goh, 2017: 296). Sementara itu George Coedes (1989b: 64) menerjemahkan *kedatuan* menjadi "provinsi", sehingga kata *datu* ditafsirkan sebagai "gubernur provinsi" dan *kadatuan* sebagai "kantor *datu*". Interpretasi Coedes ini dapat diterima oleh De Casparis, sebab *kadatuan* dapat dianggap "sebagai kesatuan kerajaan secara keseluruhan", sehingga ada kemungkinan kerajaan Śrîwijaya dibagi ke dalam sejumlah *mandala* yang memiliki *datu* sebagai pemimpin pemerintahannya (Sumadio, 1984: 57). Walaupun demikian secara umum para peneliti Śrîwijaya mengartikan *Kedatuan Śrîwijaya* adalah Kerajaan Śrîwijaya dan *datu* dianggap sinonim sebagai penguasa *kedatuan*, yang berarti setara dengan raja.

Apabila dimaknai ulang, kata itu berasal dari Bahasa Sansekerta *dhatu* atau *datu* yang berkaitan dengan terminologi Buddha. *Dhatu* berarti "unsur, zat dasar, esensi", yang dapat dilihat pada istilah *kamadhatu*, *rupadhatu*, *arupadhatu, tridhatu*, dan *lokadhatu*. *Dhatu* juga dapat dikaitkan dengan unsur utama bumi, mineral, dan inti zat. Dalam panteon Buddha Mahayana dikenal *Dhatwiswari*, yakni salah satu dewi dari *pancatathagata*. *Dhatu* kemudian menjadi kosa kata Melayu kuna atau Jawa kuna yang berarti "*ratu*" (penguasa kerajaan) atau "raja", sedang kata *kadatuan* atau *kadatwan* berarti istana raja (Zoetmulder & S.O. Robson, 1982, I: 378–379). Dalam hal ini dapatlah dimengerti bahwa *datu* diartikan sebagai penguasa (raja), karena memang esensi, unsur utama, atau inti (*dhatu*) suatu kerajaan adalah raja. Dengan demikian *dhatu = inti kerajaan à raja*, sedang *kadatwan* adalah persemayaman raja dan kemudian maknanya diperluas menjadi "kerajaan".

Dengan demikian dapat dipahami Śrîwijaya memilih kata *Kadatuan Śrîwijaya*. Kerajaan itu berlandaskan agama Buddha,

sehingga karenanya memilih terminologi dalam agama Buddha. Kata *śrîwijaya*, tidak perlu dimungkari, dari kata *wijaya* yang berarti "menang, kemenangan, keberhasilan" (Zoetmulder & S.O. Robson, 1982 II: 2270). Dengan kata sandang *sri* didepannya, *śrîwijaya* berarti "pemenang" atau "sang pemenang" sebagaimana kata *Raden Wijaya* (Raden yang menang) pendiri Majapahit yang disebut-sebut dalam kitab *Pararaton* (Hardjowardojo, 1965). Oleh karena itu Śrîwijaya senantiasa menang apabila menyerbu dan menghancurkan wilayah musuh-musuh mereka.

Berdasarkan data yang tersedia dapat ditafsirkan bahwa wilayah inti kekuasaan Śrîwijaya berada di Sumatera bagian selatan, Jambi, Bangka, dan Belitung; sedang daerah-daerah yang berada di bawah pengaruhnya terbentang sejak wilayah Pulau Jawa (Sunda kuna, Jawa bagian barat), wilayah Riau daratan, hingga kawasan Asia Tenggara daratan yang meliputi Semenanjung Melayu (Kedah, Pattani, Sinagara, Ligor, Chaiya), Takuapa, dan Indrapura (pendahulu Champa), Dwarawati awal; bahkan mungkin Kutai kuna juga berada di bawah pengaruh Śrîwijaya (Munoz, 2009: 158, Gambar 26). Dalam pada itu raja-raja Śrîwijaya memiliki hubungan akrab dengan raja-raja Śailendra Mataram kuna karena mereka berasal dari dinasti yang sama (Munandar, 2017: 51). Bukti-bukti adanya hubungan dekat antara Śrîwijaya dan Mataram kuna dapat dijelaskan melalui tiga aspek, yakni (1) hubungan perkawinan, (2) kesamaan agama yang dipeluk para rajanya, dan (3) menghasilkan bentuk seni arca yang sama.

Hubungan perkawinan terjadi antara Tara, putri Raja Śrîwijaya Dharmmasetu, dan Raja Samarottunga (Samaragrawira). Perkawinan tersebut menurunkan seorang putra, Balaputradewa, pembangun *Wihara Śrîwijaya* di Nalanda, dan putri Pramodawarddhani yang disebut dalam Prasasti Karang Tengah atau Kayumwungan (tahun 746 S/824 M). Balaputradewa menurunkan raja Śrîwijaya berikutnya, Udayadityawarman, yang kemudian digantikan oleh Culamaniwarman dan memerintah hingga awal abad ke-11. Culamaniwarman berputra Marawijayottunggawarman yang mendirikan *Culamaniwarma-wihara* di Nagipattana. Adapun di Mataram kuna putri Pramodawarddhani yang beragama Buddha Mahayana menikah dengan Rakai Pikatan pemeluk Hindu-saiwa. Mereka menurunkan raja-raja Mataram selanjutnya, yaitu Rakai Kayuwangi, Rakai Watuhumalang, dan Rakai Watukura (Bosch, 1975: 24; Sumadio, 1984: 64–65).

Dalam hal kesamaan agama, baik Śrîwijaya maupun Mataram kuna mendukung perkembangan agama Buddha Mahayana. Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu apabila dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan yang tumbuh dan berkembang pada awal sejarah Nusantara, yaitu Kutai kuna, Tarumanagara, Mataram kuna, dan Kañjuruhan, Śrîwijayalah yang sejak awal mendukung dan bersemangat agama Buddha. Sementara keempat kerajaan lain pada awal berdiri berdasar pada agama Veda-brahmana (Kutai

kuna dan Tarumanagara) dan Hindu-saiwa (Mataram kuna dan Kañjuruhan). Mataram kuna tidak hanya mengembangkan agama Hindu-saiwa, tetapi pada saat bersamaan dengan membangun candi-candi Hindu juga banyak mendirikan candi besar dengan latar belakang Buddha Mahayana. Dengan demikian walaupun berkembang Hindu-śaiwa namun Mataram kuna juga mendukung perkembangan agama Buddha Mahayana.

Baik Śrîwijaya maupun Mataram menghasilkan seni arca dengan ciri sama dan merupakan arca-arca pantheon Buddha Mahayana. Hal itu terjadi karena di antara keduanya mempunyai hubungan kedinastian dan menyokong perkembangan agama Buddha. Kedekatan bentuk seni arca Śrîwijaya dengan Mataram kuna akan dibicarakan dalam bagian berikutnya pada masa kejayaan Śrîwijaya.

5. Masa Kejayaan

Berdasarkan nama kerajaan dan isi yang termaktub dalam prasasti-prasastinya dapat diketahui bahwa sejak awal didirikan kerajaan Śrîwijaya telah bercorak Buddha. Berkembangnya Buddha Mahayana-Wajrayana menggantikan aliran Therawada sangat berkaitan dengan politik kerajaan dan upaya perluasan wilayah kerajaan. Dalam Buddha Hinayana hanya dikenal seorang tokoh penyeru, Siddharta Gautama, yang mengajarkan konsep dasar *Buddhadharma*. Konsep terpenting ajaran tersebut adalah *ahimsa* (dilarang menyakiti sesama makhluk) (Honig, 1987: 196; Zimmer 2003: 237).

Seorang raja yang memeluk agama Buddha Hinayana akan sulit menjalankan tugas-tugas manakala memerlukan ketegasan dan yang seringkali dapat dianggap kejam. Sifat adil dan melindungi rakyat sejalan dengan *Buddhadharma*, namun membinasakan musuh dan lawan-lawan raja secara fisik dan tegas tentu bertentangan dengan ajaran *ahimsa*. Lain halnya dengan agama Buddha Mahayana. Agama tersebut menawarkan konsep dewa-dewa yang mampu, tegas, dan bersifat sangar, yaitu dewa-dewa dalam wujud *ugra* atau *krodha* (penggambaran bengis menyeramkan), di samping dewa-dewa *santa* (bersifat tenang, baik hati, dan berwujud tidak menakutkan).

Seorang raja harus dapat mengalahkan dan menghancurkan musuhnya. Raja harus tegas dan menghukum mereka yang akan memberontak dan menentang kekuasaannya. Atas dasar pertimbangan itulah sangat mungkin seorang raja yang beragama Buddha sepantasnya memeluk agama Buddha Mahayana karena dapat mengacu pada kesangaran dewa-dewa panteon Mahayana yang bersifat *krodha* dan mengharapkan bantuan dewa-dewa tersebut agar senantiasa menang dalam melawan musuh-musuhnya (Munandar, 2017: 42). Itulah sebabnya peran agama Buddha Hinayana di Śrîwijaya berangsur-angsur memudar dan

raja-rajanya merasa lebih sesuai memeluk dan mengembangkan agama Buddha Mahayana, sehingga selama hampir 500 tahun lamanya Kerajaan Śrîwijaya dapat bertahan.

Berdasar sumber Arab diketahui bahwa balatentara Śrîwijaya pernah menyerang suatu pusat pemerintahan di wilayah Khmer selatan antara tahun 782 m dan 790 M. Pada waktu itu yang berkuasa di Śrîwijaya Raja Sanggramadhananjaya bergelar Sesasarwarimadawimathana. Tentara Śrîwijaya berhasil menduduki untuk sementara waktu pusat kekuasaan Indrapura yang terletak di kawasan hilir Sungai Mekong. Abu Zaid Hasan, seorang sejarawan Arab yang hidup dalam abad ke-10, menyusun narasi tentang Kerajaan Zabag (ucapan orang Arab untuk Śrîwijaya). Naskah Arab yang diperkirakan disusun pada tahun 916 M itu mengisahkan serangan singkat Zabag untuk menghukum raja Khmer (Munoz, 2009: 187). Dikisahkan seorang Raja Khmer berkata kepada menterinya bahwa ia ingin sekali melihat kepala raja Zabag diletakkan di nampan di hadapannya. Sang menteri menjawab tidak ada alasan untuk berperang dengan Zabag, sebab rakyat mereka berhubungan baik, letak Zabag cukup jauh dan tidak bertetangga dekat, dan rajanya tidak pernah berhasrat untuk menaklukkan Khmer. Oleh karena itu sebaiknya raja jangan berkata demikian, karena khawatir terdengar ke mana-mana hingga sampai ke telinga Maharaja Zabag. Mendengar ucapan menterinya Raja Khmer sangat marah. Nasihat menteri tidak didengarkannya. Ia malah menceritakan angan-angannya itu kepada para jenderal dan semua bangsawan yang hadir dalam suatu pertemuan. Ucapan raja Kamboja yang congkak itu sampai juga ke Maharaja Zabag, yang oleh karenanya menjadi sangat tersinggung. Diam-diam ia memerintahkan menterinya untuk mempersiapkan 1.000 kapal berukuran sedang dan melengkapinya dengan persenjataan. Secara terbuka Raja Zabag menyatakan bahwa ia mempersiapkan armada dengan dalih akan melakukan kunjungan ke pulau-pulau dan daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaannya. Mendengar kabar itu para gubernur (*datu*) di daerah-daerah bersiap menyambut maharaja. Armada Maharaja Zabag ternyata menuju pantai Kamboja dan menyusuri Sungai Mekong masuk ke istana Raja Khmer. Tentara Zabag menduduki ibukota, mengepung istana raja, dan menangkap sang raja Kamboja.

Maharaja Zabag mengumumkan bahwa ia tidak memusuhi rakyat Kamboja dan menjamin keselamatan mereka. Ia lalu memasuki istana dan duduk di takhtanya. Sebenarnyalah Maharaja Zabag hendak menghukum raja Khmer yang congkak. Yang bersalah memang rajanya, yang berangan-angan melampaui kemampuannya. Raja Khmer dihukum penggal kepala atas perintah Maharaja Zabag. Ia pun memerintahkan menteri Kamboja untuk memilih raja baru yang berperangai lebih baik daripada raja yang bersikap bodoh tersebut. Setelah beberapa waktu berada di Khmer, maharaja dan balatentara Zabag pun kembali ke kerajaannya tanpa mengambil apa pun dari Kerajaan Khmer.

Śrîwijaya sebagai kerajaan maritim tentu mempunyai armada kapal layar besar dan kecil cukup yang memadai. Berdasarkan penggambarkan bermacam kapal layar pada relief Candi Borobudur, dapatlah diketahui bahwa pada sekitar candi itu dibangun sekitar abad ke-9 M, kapal-kapal layar jenis itulah yang banyak berlalu lalang di laut dan selat-selat Nusantara, oleh karena itu para *silpin* pemahat relief menggambarkan kapal-kapal layar yang tengah populer pada masanya, ketika Śrîwijaya sedang di tengah kejayaannya.

Kapal-kapal layar memiliki konstruksi yang kompleks, dibuat dengan teknik menggabungkan keping-keping papan dengan tali-temali kuat, seakan-akan "dijahit" antara satu keeping dengan keeping lainnya. Kemudian keping-keping kayu tersebut disambungkan dengan lunas kapal yang menjadi kerangka utamanya. Dalam pelayaran mengarungi laut dan selat-selat yang kerapkali dihantam hujan badai, diperlukan penyeimbang di bagian kanan-kiri badan kapal, maka dibuatlah cadik. Cadik kemudian digabungkan dengan badan kapal dengan dua kayu kuat yang menjulur keluar dari badan kapal. Pada kapal-kapal layar besar untuk pelayaran jarak jauh, posisi tiang kapal dibuat agak miring (doyong) ke depan (haluan), tentu bertujuan untuk mempercepat jelajah kapal akibat daya dorong angin buritan yang meniup layar ke depan. Kapal-kapal layar masa itu tidak menggunakan paku besi, mungkin pasak kayu digunakan untuk memperkuat beberapa bagiannya. Di bagian belakang kapal (buritan) dipasang dayung dengan kepingan besar sebagai kemudi untuk mengarahkan haluan kapal (Munoz 2009: 191). Sudah barang tentu, kegiatan pelayaran laut masa itu diramaikan juga dengan bermacam bentuk perahu layar lainnya, seperti jung-jung Cina, dan kapal para niagawan dari India. Agaknya di antara kapal-kapal layar yang mengaruhi perairan Nusantara kala itu, kapal yang paling cepat adalah milik para pelaut Śrîwijaya, karena itu pengaruh niaga, agama Buddha, dan kekuasaannya cukup luas di Asia Tenggara.

Di Zabag maharaja duduk di takhtanya, di tengah telaga ribuan batangan emas. Di sampingnya terdapat nampan berisi kepala Raja Khmer. Ia pun memanggil seluruh menteri dan penasihatnya untuk menjelaskan maksud kepergiannya ke Kamboja. Ia lalu memerintahkan untuk membersihkan dan mengawetkan kepala raja Khmer. Kepala itu kemudian ditaruh di dalam jambangan dan dikirim kembali ke Raja Khmer yang baru beserta surat yang berbunyi: "Aku harus melakukan hal ini kepada pendahulumu karena rasa bencinya kepada kami. Dia telah menerima apa yang diinginkannya. Karena dirasa tidak penting untuk menyimpannya di sini, kami memutuskan untuk mengirim kepalanya kembali kepadamu. Kami tidak merasakan kemenangan apa pun dalam mengalahkannya." (Munoz, 2009: 187–189).

Ada dugaan bahwa kisah itu sebagai produk propaganda populer untuk membenarkan penaklukan suatu kerajaan atas kerajaan lain (Munoz, 2009: 190). Agaknya tidak benar bahwa narasi itu merupakan narasi propaganda dari Śrîwijaya, sebab tidak ada bukti bahwa raja Śrîwijaya meminta Abu Zaid menulis peristiwa penyerangan atas Khmer. Makna yang dapat diperoleh dari kisah penyerangan Maharaja Zabag atas raja Khmer adalah bahwa Zabag tidak memerintah langsung *mandala-mandala* yang ditaklukkannya. Daerah-daerah yang berada di bawah Śrîwijaya tetap diperintah oleh penguasa tempatan, namun harus patuh kepada Maharaja Śrîwijaya (Munoz, 2009: 191).

Hal lain yang dapat ditafsirkan dari sumber Arab tersebut adalah pada abad ke-10 M Śrîwijaya berada dalam puncak kejayaannya, sedang Khmer belum berkembang menjadi kekuasaan yang kuat di daratan Asia Tenggara. Untuk melakukan pelayaran ke Khmer sudah jelas Śrîwijaya harus mengandalkan kapal-kapalnya. Raja mempunyai kapal dalam berbagai ukuran, sedang nahkodanya

adalah penduduk yang tinggal di permukiman di balik paya-paya bakau dan pulau-pulau yang berdekatan. Raja-raja Śrîwijaya memerintahkan agar kapal-kapal yang menuju Cina dan yang datang dari Cina diarahkan untuk singgah berlabuh di bandar-bandar yang dikuasai Sriwijya. Para pedagangnya diminta membayar cukai pelabuhan dan melakukan perniagaan. Pada awalnya peraturan itu hanya berlaku untuk kapal-kapal pedagang dari berbagai pulau Nusantara, namun akhirnya semua pelayaran dari negeri asing harus patuh (Wolters, 2011: 292–293).

Śrîwijaya merupakan kerajaan di Nusantara yang dikenal sampai *mandala* terjauh, yaitu India dan Cina. Adapun kerajaan lain hanya dikenal oleh orang-orang Cina. Kerajaan Mataram kuna di Jawa Tengah, misalnya, hanya dicatat dalam berita-berita Cina, tetapi kehadirannya tidak dikenal dalam kebudayaan India. Kerajaan Majapahit pun hanya dicatat dalam sumber-sumber susastra sejumlah daerah Nusantara dan Semenanjung Melayu (Sutrisno, 1985: 355–361), namun tidak sampai dicatat oleh orang-orang India atau Asia Tenggara lain. Hal ini berbeda dengan Śrîwijaya yang beritanya dicatat oleh orang-orang Cina dan bukti tertulis dari India.

Salah satu berita Cina menyatakan bahwa *Raja Si-ri-zhu-la-wu-ni-fo-ma-diao-hua* (Sri Sudhamaniwarmadewa) dari *San-fo-ts'i* (Śrîwijaya) mengirim beberapa duta ke Cina pada tahun 1003 M, sedang kaisar menghadiahkan lonceng kuil dan menamakan kuil di Śrîwijaya itu dengan *Ch'eng-t'ien-wan-show*, yang mungkin kemudian diucapkan menjadi Candi Bungsu, di dekat Muaro Takus sekarang (Suleiman, 1981: 45; Groeneveldt, 1960: 65). Pada tahun 1017 Raja *Ha-chi-su-wu-cha-pu-mi* (Aji Suwarnabhumi) mengirim utusan ke Cina dengan membawa surat berhuruf emas serta upeti berupa gading, mutiara, buku-buku Sansekerta yang dilipat dalam bentuk papan, dan budak. Utusan itu diterima oleh kaisar dan diizinkan untuk mengunjungi beberapa gedung kekaisaran. Ketika pulang mereka diberi surat untuk raja Śrîwijaya dan berbagai hadiah yang diperkirakan akan menyenangkan raja Śrîwijaya. Tahun 1028 datang lagi utusan Raja *Si-li-die-hua* (Sridewa/Śrîwijaya [?]) yang membawa upeti persembahan kepada kaisar Cina. Para utusan dari negeri-negeri jauh itu biasanya akan mendapat hadiah ikat pinggang dari perak atau emas, tetapi kali ini para utusan mendapat hadiah ikat pinggang emas. Pada tahun 1067 datang utusan dari *San-bo-tsai* dipimpin oleh seorang pejabat tinggi bernama *Ti-hwa-ka-la* (Dewa Kala). Seorang jenderal besar Cina kemudian memberi sertifikat atas kepatuhan utusan itu dalam melakukan perjalanan ke Cina (Groeneveldt, 1960: 65–66). Agaknya dapat dipahami mengapa pejabat *San-bo-tsai* tidak diterima di istana kaisar Cina, hanya diterima seorang jendral, dan jendral itu memberikan sertifikat ketaatan kepada utusan. Pada tahun 1067 Śrîwijaya sebagai kerajaan sudah tidak ada lagi. Raja terakhirnya, Śrî Sanggramawijayottunggawarman, diserang Rajendracholadewa dari Cholamandala pada tahun 1025. Saat itulah masa akhir Śrîwijaya.

Berdasarkan uraian berita Cina tentang kedatangan berbagai utusan Śrîwijaya ke Cina dapat dimaknai ada hubungan antara Śrîwijaya dan Cina secara langsung melalui kunjungan para utusan. Hal itu berarti Śrîwijaya dikenal hingga ke Cina; bukan hanya orang-orang Cina yang datang ke Sumatera, melainkan penduduk Śrîwijaya juga melakukan kunjungan ke Cina sebagaimana catatan istana kaisar Cina. Hubungan antara Śrîwijaya dan Cina sangat kental nuansa hubungan niaga, karena banyak barang pecah belah Cina (keramik Cina) yang ditemukan di situs-situs Śrîwijaya di Sumatera, baik dalam bentuk utuh maupun pecahanannya. Keramik Cina tersebut merupakan bukti adanya hubungan dagang antara Śrîwijaya dan Cina, mengingat keramik Cina merupakan barang dagangan yang ramai diperdagangkan pada masa kuna di kepulauan Indonesia.

Śrîwijaya juga dikenal di India. Sebagaimana telah diketahui di Nalanda (Bihar), India, terdapat *mahawihara* yang berkembang sejak abad ke-2 sampai paruh pertama abad ke-13 (Gosh, 2006: 3 dan 5). Nalanda dikunjungi banyak penziarah dari berbagai negeri, seperti Cina, Tibet, dan Suwarnadwipa (Sumatera) untuk belajar agama Buddha langsung di tanah kelahirannya. Di Nalanda ditemukan prasasti perunggu yang berkenaan dengan Raja Balaputradewa dari Suwarnadwipa (Śrîwijaya). Prasasti tersebut dikeluarkan oleh raja Dewapaladewa, tidak berangka tahun, namun diperkirakan berasal dari paruh ke-2 abad ke-9 M. Dalam prasasti tersebut dinyatakan bahwa Raja Balaputradewa diizinkan membuat wihara bagi para pelajar Śrîwijaya yang datang ke Nalanda untuk belajar agama Buddha (Sumadio, 1984: 74–75).

Demikianlah bahwa berdasarkan data yang ada diketahui Śrîwijaya sebagai kerajaan dikenal dan diakui oleh dua wilayah (*mandala*) terjauh pada masanya, yaitu Cina dan India. Hubungan di antara ketiganya pun berlangsung dengan baik, walaupun kemudian pada abad ke-11 kekuatan dari India (Kerajaan Cholamandala) menyerang Śrîwijaya. Dalam pada itu di wilayah Asia Tenggara Śrîwijaya menguasai Semenanjung Malaya dan Thailand selatan; dikenal hingga Kamboja, Champa, Filipina selatan, dan sudah tentu Jawa. Kerajaan itu senantiasa diidentikan dengan agama Buddha karena sejak awal awal berdiri dan masa-masa selanjutnya menjadi pusat pendidikan agama Buddha.

Sebagai kerajaan yang mendukung perkembangan agama Buddha Mahayana Śrîwijaya menghasilkan peralatan upacara dan keagamaan agama tersebut. Peralatan upacara yang paling mudah diamati adalah bangunan candi dan arca. Berdasarkan data sejumlah arca logam yang ditemukan di wilayah Sumatera, Semenanjung Melayu, dan Thailand selatan diketahui ada kemiripan gaya seni dengan arca-arca batu dan logam abad ke-8–ke-10 M yang ditemukan di wilayah Jawa bagian tengah.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pada masa yang sama dengan perkembangan Śrîwijaya di Jawa bagian tengah sedang berkembang kekuasaan wangsa Sailendra yang memerintah di Kerajaan Mataram kuna. Satyawati Suleiman, seorang ahli ikonografi Hindu-Buddha, menyatakan bahwa gaya seni arca yang berkembang di wilayah-wilayah Śrîwijaya sangat dekat dengan gaya seni arca Hindu dan Buddha di Jawa bagian tengah ketika wangsa Sailendra berkuasa tahun 750–850 M. Oleh karena itu gaya seni arca tersebut dapat dinamakan dengan *Sailendra style* (gaya Sailendra) (Suleiman, 1981: 52).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap sejumlah arca dewa dan relief yang dipahatkan pada abad ke-8–9 M di Jawa bagian tengah ditemukan sejumlah ciri sebagai berikut:

(1) Penggambaran arca secara proporsional sebagaimana manusia (upaya personifikasi yang mendekati sempurna).

(2) Penggambaran ornamen *hara* (kalung), *kundala* (hiasan telinga), *kangkana* (gelang), *keyura* (kelat bahu), dan *mukuta* (mahkota) dibuat dalam bentuk ukiran yang halus dengan komposisi seimbang.

(3) Wajah arca/relief tokoh senantiasa digambarkan manis dan penuh ketenangan, walaupun dewata itu bersifat sangar (*ugra*). Kesangaran itu ditunjukkan pada jumlah tangan yang lebih dari empat dan berbagai hiasan yang mengesankan angker, misalnya motif tengkorak.

(4) Tampilan arca/relief mengesankan "hidup", karena mengandung nilai estetika yang tinggi. Mungkin disesuaikan dengan konsep keindahan *sad-angga* yang dikenal dalam kesenian India kuna. Konsep keindahan *sad-angga* agaknya tidak hanya dikenal di kalangan seniman India kuna, namun juga dipahami oleh para *silpin* (seniman-agamawan) masa Hindu-Buddha di Indonesia, terdiri dari *rupabheda* (ketepatan bentuk), *sadrsyam* (menghasilkan pemahaman untuk pengamat), *pramanam* (kesesuaian ukuran), *varnikabhanggam* (penggunaan warna), *bhava* (*pancaran rasa*), dan *lavanya* (daya pesona) (Sedyawati, 1981: 14–18). Keenam kaidah itu dapat disaksikan pada arca-arca yang dibuat oleh *silpin* Śrîwijaya dan Mataram kuna.

Arca-arca yang disebut dengan *Sailendra style*, menurut Suleiman, dapat diamati melalui keempat ciri yang telah dibincangkan di atas. Ciri-ciri seperti itu pula yang dapat ditemukan pada sejumlah arca di Sumatera, Semenanjung Malaysia (Kedah), dan daerah Chaiya (Thailand Selatan). Hal yang perlu mendapat perhatian adalah arca-arca yang ditemukan di sekitar Palembang, Jambi, dan Sumatera Barat secara kuat menyimpan ciri *Sailendra style*. Arca-arca tersebut dihasilkan ketika wangsa Sailendra masih berkuasa penuh di Jawa tengah. Adapun arca-arca yang dijumpai di Semenanjung Melayu dan Thailand Selatan dihasilkan ketika keluarga Sailendra telah menyingkir dari Jawa dan berkuasa di Sumatera dan mengembangkan kuasa Śrîwijaya pada abad ke-11

Arca Maitreya, Manusi Buddha masa mendatang, bahan perunggu, ditemukan dari Palembang, sekarang disimpan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Arca ini mempunyai gaya seni arca Sailendra, diperkirakan berasal dari Abad ke-8-9 M.
Sumber: Agus Aris Munandar

(Suleiman, 1981: 54–55). Dengan demikian Śrîwijaya meneruskan dan mendukung seni arca Sailendra yang awalnya berkembang di Jawa bagian tengah, sedangkan seni arca di Jawa bagian timur zaman Singhasari-Majapahit menemukan gayanya tersendiri.

Terdapat proposisi yang menyatakan bahwa perkembangan gaya seni arca Sailendra bersamaan dengan pembangunan Candi Borobudur. Dalam melakukan pembangunan candi yang megah tersebut sudah selayaknya apabila para *silpin* yang ahli di bidang masing-masing berkumpul dan bekerja sama. Mereka senantiasa mendapat arahan para mahabhiksu yang bernaung dan mengakui kekuasaan raja-raja dinasti Sailendra. Banyak cabang seni rupa keagamaan *Bauddha* sezaman yang diperdalam dan diekspresikan untuk keperluan pembangunan dan melengkapi keindahan Borobudur. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa bersamaan dengan pembangunan Borobudur hingga selesai, dan beberapa abad sesudahnya, di Kerajaan Mataram kuna berkembang gaya seni arca Sailendra. Perkembangan gaya seni arca klasik tersebut sejatinya berkat pembangunan Candi Borobudur.

Ciri lain yang dapat diamati dari gaya seni Sailendra adalah (1) berlatar belakang Buddha Mahayana atau Hindu-saiwa, (2) meliputi bidang seni arca, seni relief, dan arsitektur keagamaan, (3) mengandung tema naturalis, harmoni, dan kesempurnaan, (4) menampilkan penggarapan detail yang dikerjakan dengan cermat.

Penggarapan seni arca gaya seni Sailendrawangsa ditandai dengan beberapa ciri khusus sebagai berikut:

(1) Ukuran arca (*pramana*) disesuaikan dengan ruang penempatannya, artinya arca-arca dalam sikap berdiri atau

duduk ditempatkan dalam relung-relung secara sesuai, tidak berkesan arca terlalu besar dari relungnya atau sebaliknya.

(2) Penggambaran anatomi tubuh dan bagian-bagiannya diperhitungkan secara seimbang, artinya ukuran kepala arca disesuaikan dengan bentuk dan ukuran lehernya, begitupun panjang kaki dan tangan dibuat proporsional dengan tubuh arca dan bagian badan lainnya, sehingga tidak terkesan anggota tubuh terlalu panjang atau terlalu pendek.

(3) Busana disesuaikan dengan penggambaran tokoh dewa serta disertai dengan penggarapan rinci dan cermat.

(4) Wajah arca tampil dengan penuh keagungan dewata, air muka *santa* (tenang), dan anggun. Penggarapan wajah sebenarnya bagian yang paling sulit, tetapi para *silpin* Sailendrawangsa justru berhasil mengerjakannya.

(5) Pada akhirnya secara keseluruhan arca-arca bergaya seni Sailendrawangsa berhasil menampilkan keagungan sosok dewa.

Ciri seni arca sebagaimana dikemukakan di atas juga dijumpai pada arca-arca Hindu-Buddha dari batu atau logam periode yang sama di Sumatera. Ternyata, berdasarkan uraian beberapa prasasti, diketahui bahwa antara Śrîwijaya dan Mataram kuna terdapat keterkaitan yang bersifat keluarga (dinasti Sailendra) dan pemeluk agama sama, yaitu Buddha Mahayana (De Casparis, 1956; Poerbatjaraka, 1952; Bosch, 1975). Dalam hal perkembangan gaya seni keagamaan (candi dan arca), menurut Soekmono, terjadi persamaan gaya antara Jawa bagian tengah, Śrîwijaya di Sumatera, dan Chaiya di Thailand selatan, tetapi persamaan itu hanya berlangsung antara abad ke-8 dan abad ke-10 M. Pada masa selanjutnya, sekitar abad ke-11, terdapat persamaan arsitektur bangunan suci di Kedah dan di Padang Lawas, Sumatera Utara. R. Soekmono (1982: 138) selanjutnya menyatakan bahwa terdapat "tali halus" yang mengikat Thailand Selatan, Kedah, Padang Lawas, Śrîwijaya, dan Mataram kuna. "Tali halus" yang dimaksud adalah ajaran Buddha.

Sebagai pendukung dan pusat pendidikan agama Buddha Mahayana Śrîwijaya tidak banyak meninggalkan bangunan suci dan percandian. Hal itu bukan berarti kerajaan itu lalai dan tidak memerlukan candi-candi Buddha sebagaimana banyak dijumpai pada zaman yang sama di Jawa bagian tengah. Masyarakat Śrîwijaya secara umum merupakan masyarakat maritim dan lebih memusatkan perhatian pada perniagaan yang dinamis (Wolters, 2011). George Coedes menyatakan bahwa keterbatasan peninggalan arkeologis dan prasasti Śrîwijaya membuktikan raja-raja Śrîwijaya lebih menyibukkan diri pada pengawasan perdagangan di Selat Malaka daripada membangun candi-candi dan memahat relief (Coedes, 1918: 25).

Keterbatasan peninggalan arkeologis yang dikaitkan dengan Śrîwijaya dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) berbagai bangunan keagamaan masa Śrîwijaya banyak yang terbuat dari bahan mudah

lapuk, baik sebagian maupun seluruh bangunan, sehingga sulit dilacak keberadaannya karena telah hancur termakan usia dan (2) mungkin belum ditemukan data arkeologis baru, terbukti pada waktu akhir-akhir ini banyak dilakukan kajian dan pemugaran terhadap berbagai kawasan arkeologi dan situs baru yang dapat dikaitkan dengan Śrîwijaya. Kawasan Muaro Jambi di Jambi yang sebagian monumennya telah dipugar menunjukkan kawasan yang luas penuh dengan bermacam bentuk monumen Bauddha yang berhubungan dengan masa Śrîwijaya. Situs Mahligai Stupa (Muaro Takus) di pedalaman Riau—setelah dipugar—bekas kegiatan keagamaan Buddha masa lalu yang meliputi area luas, percandian Bumiayu (delapan bangunan) bernapaskan Hindu dan Buddha di Kabupaten Penukal Abab Pematang Ilir (PALI), reruntuhan Candi Jepara di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan situs Kota Kapur di Kabupaten Bangka tempat penemuan Prasasti Kota Kapur yang memiliki reruntuhan candi bata dan arca-arca. Semua situs dan peninggalan arkeologis tersebut belum dikaji secara tuntas dan menyeluruh, sehingga kajian mendatang diharapkan menghadirkan pemahaman yang lebih baik tentang eksistensi Śrîwijaya.

6. Pesan-pesan Kebajikan Beberapa Prasasti Śriwijaya

Kerajaan Śrîwijaya dikenal sepanjang sejarah, sejak awal berdiri hingga dewasa ini pada zaman Indonesia modern. Hal itu terjadi berkat adanya prasasti-prasasti yang dipahatkan pada batu atau logam. Prasasti-prasasti tersebut merupakan upaya mengabadikan beberapa hal yang dianggap harus diketahui oleh warga masyarakat. Aspek-aspek itu antara lain perintah raja, keputusan kerajaan, dan peristiwa penting dalam bidang keagamaan. Meskipun demikian terdapat kandungan isi lain yang hingga sekarang belum banyak dibicarakan dan akan dibincangkan pada bagian berikut.

Hampir semua kajian terdahulu menyatakan bahwa Prasasti Śrīwijaya yang dikeluarkan pada abad ke-7 sebagai pernyataan kutukan atau persumpahan yang ditujukan kepada musuh, baik musuh dari dalam negeri maupun dari luar, di samping dapat dianggap sebagai pernyataan kekuasaan Śrīwijaya atas daerah-daerah tempat prasasti bersangkutan ditemukan (Krom, 1954: 53–54; De Casparis, 1956: 15–46; Faisal Iskandiar, 1993: 01–7). Senyatanya, apabila ditelisik lebih lanjut, isi prasasti-prasasti Śrīwijaya mengandung beberapa pesan kebajikan yang masih dapat diacu hingga sekarang. Salah satu prasasti tersebut adalah Prasasti Talang Tuo, yang ditemukan pada tahun 1920 oleh Residen Palembang L.C.Westenenk. Prasasti tersebut berangka tahun 606 S atau 684 M, berbahasa Melayu kuna, dan beraksara Pasca Pallawa. Inti isi prasasti ini berkenaan dengan pembangunan Taman Śrî Kşetra di lingkungan kota Śrīwijaya. Berikut beberapa kutipan yang sesuai dengan kajian ini.

> *(1) "śwasti śrî śakawarsātîta 606 dim dwitiya śuklapaksa wulan caitra sāna tatkalaña parlak śrîkşetra ini niparwuat*

(2) parwan dapunta hiyam śrî jayanāśa ini pranidhānāṇda punta hiyam sawanyakña yam nitanam di sini, niyur pinam hanau, rum

(3) wiya dngan samisrana yam kāyu nimākan wuahnya tathāpi hāur wuluh tattum ityewamādi..."

(Kemakmuran, keberuntungan !, Tahun Saka 606, hari kedua, paruh terang bulan Citra; pada saat itulah taman ini [yang dinamai] Śrî Kşetra dibuat di bawah pimpinan Sri Baginda Śrî Jayanāśa. Inilah niat Sri Baginda: Semoga segala yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang, aren, sagu, dan bermacam-macam pohon yang buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu *haur wuluh,* bambu *pattum*, dan sebagainya..."). (Coedes, 1989: 57–58).

Kutipan di atas memberitakan bahwa pada masa itu telah ada upaya melakukan pembuatan taman di kota Śrīwijaya dan penanaman pohon-pohon yang diperlukan oleh warga, baik untuk dikonsumsi maupun diambil manfaat lainnya. Pohon kelapa, pinang, aren, sagu, dan tanaman buah-buahan lain yang tidak disebutkan satu per satu merupakan tanam yang dianggap bermanfaat hingga sekarang. Tidak ada yang menyangkal apabila pohon kelapa merupakan tanaman yang dapat dimanfaatkan sejak akar hingga daunnya. Pohon itu tentu sangat dekat dengan masyarakat Śrīwijaya yang berjiwa bahari karena selalu tumbuh di dataran rendah dan pantai. Pohon-pohon pinang, aren, dan sagu merupakan jenis pohon penting dalam masyarakat kuna, bahkan hingga zaman Majapahit di Jawa bagian timur. Pohon pinang dan aren dimanfaatkan batangnya, daunnya, dan disadap untuk dijadikan minuman tuak yang dianggap minuman istimewa pada masanya. Sebelum penggunaan daun lontar untuk media tulis-menulis daun pinang dan daun aren juga digunakan sebagai sarana menulis. Selain itu batangnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan rumah tinggal. Pohon sagu pada masa itu merupakan tanaman yang menghasilkan makanan pokok banyak penduduk Nusantara di berbagai tempat. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila pohon-pohon kelapa, pinang, aren, dan sagu disebutkan terdahulu, baru selanjutnya dinyatakan tanaman buah yang dapat dimakan walaupun tidak disebutkan jenisnya satu per satu. Bambu yang disebut *haur wuluh* dan *pattum* masih dikenal di Tatar Sunda saat ini. Di Pasundan *haur wuluh* disebut dengan *haur wulung*, bambu besar, berwarna ungu kehitaman; sedangkan *pattum* disebut *bitung* atau *betung*, bambu besar, kuat, dan tahan lama untuk tiang rumah.

Demikianlah bagian awal Prasasti Talang Tuo menyatakan ada uraian untuk memelihara tanam-tanaman tertentu yang pada masa itu sangat penting bagi warga Śrīwijaya. Pelajaran yang dapat diacu adalah bahwa pada 14 abad yang lalu di wilayah Sumatera bagian selatan sudah terdapat kerajaan yang sadar pelestarian lingkungan

hidup. Kerajaan itu telah membuat taman yang isinya berbagai tanaman penting bagi kehidupan masyarakat. Jika zaman sekarang perbuatan Śrî Jayanāśa itu ditiru, mungkin yang dikembangkan bukan lagi sekedar taman melainkan kebun raya seperti halnya di Bogor, Jawa Barat, atau di Purwodadi, Jawa Timur.

Berikut kutipan bagian lain prasasti Prasasti Talang Tuo.

> *"Anukula yam graha naksatra parawis diya, nirwyadhi ajarakawuatanaña tathapi sawanyakña yam bhrtyanya satyārjjawa dṛdhabhakti muah ya dya yam mitranya tuwi jangan ya kapata yam winiña mulam anukula bharyya muah ya waram sthananya lagi curi ucca wadhnya paradara di sana, punarapi tmu ya kalyanamitra..."*
>
> ("Apa pun yang mereka perbuat, semoga planet dan rasi menguntungkan mereka, dan semoga mereka terhindar dari penyakit dan ketuaan selama menjalankan usaha mereka. Dan juga semoga semua hamba mereka setia kepada mereka dan berbakti, lagi pula semoga teman-teman mereka tidak menghianati mereka dan semoga istri mereka menjadi istri setia. Lebih-lebih lagi di mana pun mereka berada, semoga di tempat itu tidak ada pencuri, atau orang yang menggunakan kekerasan, atau pembunuh atau penzinah. Selain itu semoga mereka mempunyai seorang kawan sebagai penasihat baik....")

Selanjutnya Prasasti Talang Tuo juga dinyatakan:

> *"Tathapi nityakala tyaga marśila ksanti marwwangun wiryya rajin rāhu di samisrana silpakalā parawis smahitacinta, tmu ya prajña smrti medhawi ..."*
>
> ("Dan semoga senantiasa [mereka bersikap] murah hati, taat kepada peraturan, dan sabar; semoga dalam diri mereka terbit tenaga, kerajinan, pengetahuan akan semua kesenian berbagai jenis, semoga semangat mereka terpusatkan, mereka memiliki pengetahuan, ingatan, kecerdasan....") (Coedes, 1989: 57–58).

Berdasarkan kutipan di atas diketahui bahwa isi prasasti Talang Tuo juga mengharapkan keadaan aman dan sejahtera, tidak ada kekerasan, selalu beruntung dalam berusaha, serta hubungan rumah tangga yang damai. Tidak ada prasasti dari kerajaan lain di Jawa masa Klasik yang menyebutkan kesetiaan istri dan hamba-hamba.

Uraian selanjutnya menyatakan harapan penguasa Śrīwijaya kepada rakyatnya agar mereka selalu murah hati, taat kepada peraturan, dan sabar. Mereka juga diharapkan mempunyai semangat, pengetahuan, daya ingat, dan kecerdasan yang baik. Prasasti-prasasti kerajaan Mataram kuna, Pu Sindok, Airlangga, Kerajaan Singhasari, dan

bahkan Majapahit tidak pernah ada doa dan harapan dari seorang penguasa (raja) untuk kebaikan kehidupan rakyatnya. Dengan demikian uraian Prasasti Talang Tuo merupakan suatu unikum dalam sejarah kuna Indonesia.

Prasasti Śrīwijaya lain, yaitu Prasasti Karang Brahi, Kota Kapur, dan Telaga Batu, sering disebut sebagai prasasti-prasasti persumpahan, karena isinya berupa kutukan yang dilekuarkan oleh pengusasa Śrīwijaya bagi mereka yang tidak tunduk dan memberontak terhadap kekuasaannya. Dari ketiga prasasti persumpahan tersebut hanya satu yang berangka tahun, yaitu Prasasti Kota Kapur, yakni bertarikh 608 S atau 686 M (Coedes, 1989: 64; Muljana, 2006: 155). Inskripsi persumpahan lain yang diduga sezaman dengan ketiga prasasti sebelumnya adalah prasasti yang ditemukan di Desa Palas Pasemah, wilayah Kalianda, Lampung bagian selatan. Setelah dilakukan kajian terhadap aksara dan juga isinya, diketahui bahwa Prasasti Palas Pasemah dikeluarkan oleh Kerajaan Śrīwijaya sekitar akhir abad ke-7 M (Boechari, 1979: 20). Pada intinya prasasti-prasasti persumpahan tersebut berisi ancaman terhadap jenis-jenis makar yang dilakukan terhadap raja Śrîwijaya. Pihak dan kejahatan yang dianggap sebagai makar sebagai berikut:

(1) Para pemberontak.
(2) Mereka yang berbicara, bersekongkol, mendengarkan kata-kata, dan mengenal para pemberontak.
(3) Mereka yang tidak takluk kepada raja, tidak berlaku hormat, dan tidak setia kepada raja.
(4) Mengganggu ketenteraman.
(5) Membuat orang sakit, orang gila, dan pekasihan dengan menggunakan mantra.
(6) Meracun, membuat racun upas, tuba, dan ganja.
(7) Memaksakan kehendaknya kepada orang lain.
(8) Para penghasut untuk melawan raja dan para pembunuh.

Bagi mereka yang melakukan tindak kejahatan tersebut akan mati terkena kutukan atau jika ketahuan akan dihukum langsung oleh sang raja. Mereka akan dihukum bersama keluarganya berikut seluruh keluarga besarnya (marganya) (Coedes, 1989: 64–65; Muljana, 2006: 156).

Apabila berbakti dan tunduk kepada raja, sebagaimana dinyatakan dalam Prasasti Kota Kapur, warga akan memperoleh berkah atas segala usaha mereka beserta keluarga dan marganya serta akan memperoleh keberhasilan, kesentosaan, kesehatan, kebebasan dari bencana, dan segala kelimpahan untuk semua daerah mereka (Coedes, 1989: 65). Dengan contoh Prasasti Kota Kapur menunjukkan tidak seluruh prasasti yang dinamakan dengan prasasti persumpahan berisi kata-kata kutukan bagi mereka yang melanggar perintah raja, tetapi ada uraian yang menyatakan bahwa

sang raja juga menjamin kehidupan sejahtera bagi mereka yang hidup secara baik-baik dan tidak membuat onar.

Hal yang menarik lain adalah tempat prasasti-prasasti Śrîwijaya ditegakkan. Berdasarkan perbandingan dengan lokasi prasasti kerajaan-kerajaan kuna lain diketahui bahwa prasasti-prasasti itu merupakan penanda rentang wilayah inti Śrîwijaya di Sumatera bagian selatan. Di Palembang, yang merupakan ibukota Śrîwijaya, ditemukan Prasasti Kedukan Bukit sebagai prasasti pernyataan proklamasi berdirinya Śrîwijaya dan juga Prasasti Talang Tuo yang berisi peri kehidupan sejahtera. Kemudian di wilayah tertentu dijumpai prasasti persumpahan, yaitu di Jambi (Prasasti Karang Berahi), di Pulau Bangka (Prasasti Kota Kapur), di Lampung (Prasasti Palas Pasemah), dan temuan prasasti baru yang dinamakan Prasasti Bungkuk. Dengan demikian ibukota Śrîwijaya dilindungi oleh prasasti-prasasti persumpahan di tiga lokasi berbeda, dengan harapan di Śrîwijaya senantiasa tidak ada pemberontakan ataupun peperangan secara internal. Terbukti dalam sejarahnya tidak ada pemberitaan bahwa di Śrîwijaya pernah terjadi konflik internal. Yang terjadi justru perang dengan pihak luar, yaitu dengan Kerajaan Chola dan kerajaan Sindok-Airlangga di Jawa.

Berdasarkan uraian isinya prasasti-prasasti Sriwijaya dapat dimaknai atau ditafsirkan maknaya yang tersembuyi, misalnya penggunaan bahasa Melayu kuna dan bukan bahasa Sansekerta sebagaimana prasasti kerajaan-kerajaan pertama lain di Nusantara. Makna yang dapat ditafsirkan dari hal tersebut adalah Sriwijaya mendukung dan mengembangkan agama Buddha yang tidak mengenal penggolongan kasta dan bukan agama Hindu-saiwa. Penggunaan bahasa Sansekerta menunjukkan adanya semangat yang mengistimewakan golongan agamawan (brahmana) dan

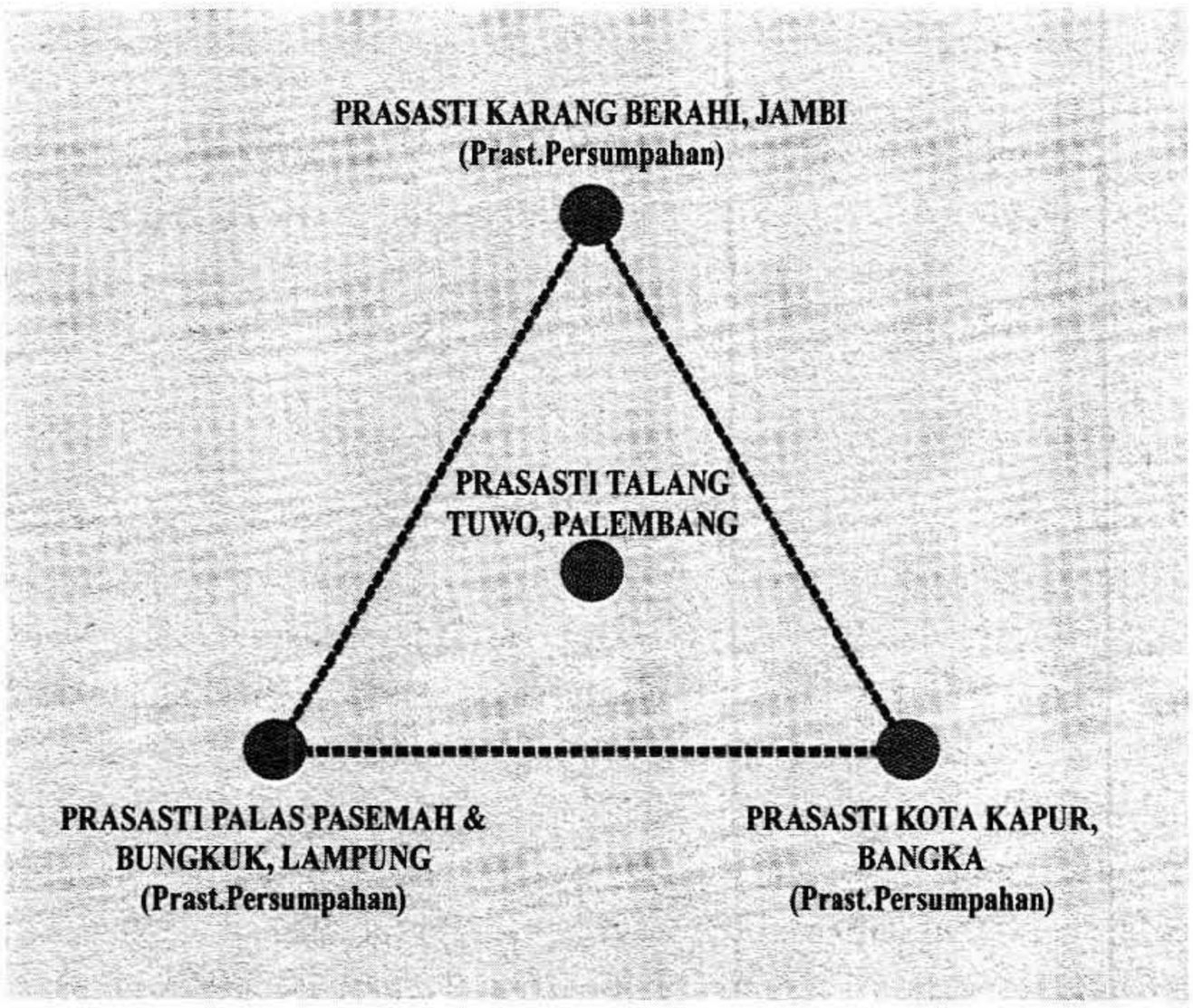

Bagan daerah inti Sriwijaya berdasarkan lokasi prasasti-prasastinya

ksatrya dalam agama Weda-Brahmana dan Hindu-śaiwa, sebab hanya kedua golongan itu yang mampu memahami Bahasa Sansekerta secara baik. Dengan menilik penggunaan bahasanya saja sudah terlihat agama yang dianut di Śrīwijaya, yaitu Buddha Mahāyana yang egaliter, tanpa kasta, semua pemeluk berkedudukan sama dalam *Buddhadharma*, sedangkan kerajaan-kerajaan awal lainnya beragama Weda-Brahmana dan/atau Hindu-śaiwa yang setia dengan bahasa Sansekerta.

"Prasasti persumpahan" pun dapat diinterpretasikan maknanya yang tersembunyi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai "prasasti persumpahan" adalah (1) kesamaan uraian isinya, (2) ditempatkan di lokasi berjauhan, dan (3) semua bersifat ancaman. Sangat mungkin terdapat kesengajaan untuk dibuat demikian. Argumen yang mendorong kesengajaan itu harus ditelaah lewat makna yang mungkin dapat diungkapkan, sehingga mestinya terdapat arti lain dalam hal kemampuan teks prasasti menyampaikan pesannya kepada pembaca. Pembaca sezaman sudah tentu memahami bahwa teks prasasti tersebut berbicara tentang "ancaman untuk tidak memberontak ṭerhadap Śrīwijaya", "larangan untuk tidak melawan Śrīwijaya", dan disertai "kutukan bagi mereka yang mencoba memberontak". Makna seperti itulah yang dipahami oleh para peneliti Śrīwijaya, karena memang arti yang tampil pertama kali adalah tentang persumpahan. Pengamatan secara lebih mendalam memunculkan penafsiran bahwa prasasti-prasasti persumpahan sejatinya bermakna ketaatan kepada *dharma* Buddha. Melawan raja berarti melawan *dharma* yang sedang dilaksanakan oleh seorang penguasa sebagai raja, sehingga sebaiknya jangan memberontak dan melawan raja sebab berarti melawan ajaran kebajikan yang diberikan oleh sang Buddha kepada manusia.

Setelah meninjau secara ringkas isi beberapa prasasti yang dikeluarkan Kerajaan Śrīwijaya, dapat kiranya disimpulkan bahwa terdapat beberapa ajaran yang memuat kebajikan dalam prasasti-prasasti yang dipahatkan pada akhir abad ke-7 M tersebut. Ajaran itu sebagai berikut:

(1) Memelihara lingkungan hidup, menanam pohon-pohon yang banyak manfaatnya bagi manusia.

(2) Mengajarkan sifat-sifat kebaikan yang senantiasa harus dilaksanakan oleh semua orang, seperti rajin, pengetahuan berbagai jenis kesenian, ethos kerja yang tinggi, memiliki pengetahuan, ingatan, dan kecerdasan.

(3) Mengajarkan sifat kesetiaan dalam keluarga, kesetiaan dan saling menasihati antarteman, dan kesetiaan kepada negara.

(4) Mencegah berbagai tindak kekerasan dan penyelewengan.

(5) Menekan upaya yang merongrong kewibawaan raja dan kerajaan dengan cara mengeluarkan, sekaligus berarti upaya menjaga integritas negara.

(6) Raja dan rakyat Śrīwijaya lebih percaya diri dan memiliki rasa nasionalisme tinggi, terbukti mereka memilih untuk mengeluarkan prasasti-prasastinya dalam Bahasa Melayu kuna, bukan dengan bahasa Sansekerta yang berasal dari luar Nusantara.

7. Masa Surut dan Berakhirnya Kekuasaan Śrîwijaya

Telah disebutkan pada bagian terdahulu bahwa Śrîwijaya runtuh pada awal abad ke-11 M akibat serangan Kerajaan Cholamandala yang berkedudukan di India selatan. Alasan penyerangan Chola terhadap Śrîwijaya sampai sekarang masih menjadi bahan diskusi yang menarik, sebab beberapa tahun sebelum penyerangan Chola hubungan kedua kerajaan tersebut berlangsung baik. Terdapat catatan Cina bahwa pada tahun 1015 pemerintah Kerajaan Chola mengirimkan utusan pertama ke Cina. Tahun berikutnya, yakni tahun 1016, pemerintah Cina mengakui Chola sebagai kerajaan jajahan yang besar (Wolters, 2011: 303). Sudah barangtentu delegasi Chola ke Cina itu diketahui oleh Raja Śrîwijaya, sebab jalur laut terdekat harus melalui Selat Malaka yang dikuasai Śrîwijaya. Alasan peperangan antara Chola dan Śrîwijaya agaknya dimulai dari rasa kurang nyaman penguasa Śrîwijaya apabila Chola melakukan hubungan dagang langsung dengan Cina.

Pada masa kekuasaan Raja Marawijayottunggawarman (Marawijayottungga-warmadewa), hubungan antara Chola dan Śrîwijaya terbina baik. Pada tahun 1005 Raja Chola menetapkan satu desa yang penghasilannya digunakan untuk pemeliharaan kuil milik Śrîwijaya di Nagipattana. Agaknya hubungan baik itu, menurut Raja Śrîwijaya, dicederai dengan pengiriman langsung utusan Chola ke Cina tahun 1015 dan dengan cepat (tahun 1016) Cina mengakui Chola sebagai daerah wilayahnya. Pada tahun 1017 *Ha-chi-su-wu-cha-puni* (Haji Suwarnabhumi, Raja Śrîwijaya) mengirimkan utusan ke Cina sambil membawa surat berhuruf emas dan membawa upeti berupa mutiara, gading, dan buku-buku Sansekerta yang dilipat di antara dua papan (kropak), dan budak. Para utusan itu diterima oleh kaisar Cina dan diizinkan melihat beberapa gedung milik kaisar. Ketika pulang mereka diberi sebuah maklumat yang ditujukan kepada raja mereka (Groeneveldt, 1960: 65).

Pada tahun 1017 pula datang serangan pertama dari Cholamandala ke bandar-bandar milik Śrîwijaya, terutama Kataha (Hall, 1988: 57; Coedes, 2010: 119; Wolters, 2011: 303). Serangan Cholamandala pasti ada penyebabnya dan tidak mungkin terjadi serangan tanpa alasan kuat karena mereka bersahabat. Sangat mungkin penyebabnya berkaitan dengan pengakuan Cina terhadap Chola. Pada tahun 1017 agaknya Cholamandala akan mengirim utusan lagi ke Cina, namun utusan tersebut ditahan, dihalang-halangi, bahkan mungkin ditawan oleh Raja Śrîwijaya yang waktu itu Śrî Sanggramawijayottunggawarman, anak dari raja sebelumnya, Marawijayottunggawarman. Raja baru berkepentingan menjaga

kewibawaan Śrîwijaya di hadapan kaisar Cina. Cholamandala dapat dianggap sebagai "pesaing yang baru datang" dalam membina hubungan dengan Cina, sementara Śrîwijaya sudah berhubungan dengan Cina sejak abad ke-7 M. Oleh karena itu, dalam pandangan Raja Śrîwijaya, sebaiknya Cholamandala jangan langsung berhubungan dengan Cina, melainkan harus tetap melalui Śrîwijaya. Sudah barangtentu Raja Chola marah ketika utusannya ke Cina dihalangi dan ditahan oleh Śrîwijaya, sehingga melakukan serangan pertama tahun 1017 yang mungkin merupakan serangan percobaan untuk mengukur kekuatan militer Śrîwijaya.

Dalam serangan Cholamandala tahun 1017 hanya Kedah dan beberapa daerah di utara Semenanjung Malaya yang berhasil "dibebaskan" dari pengaruh Śrîwijaya dan masih banyak bandar lain di sepanjang Selat Malaka yang masih ramai dalam perniagaan mendukung kekuasaan Śrîwijaya. Maka serangan kedua dari Cholamandala terhadap Śrîwijaya dilakukan dengan menghancurkan bandar-bandar dagangnya. Serangan itu terjadi tahun 1025. Uraian Prasasti Tanjore yang dikeluarkan oleh Raja Rajendracholadewa menyatakan sebagai berikut:

> "(Rajendra) setelah mengirim kapal banyak di tengah laut bergelombang, dan setelah menangkap Sangrama Vijayottunggavarman, Raja *Kadaram* (*Kedah*) bersama dengan gajah-gajah dalam pasukannya yang perkasa (mengambil) tumpukan besar harta benda berharga yang telah dikumpulkan secara benar (oleh raja itu); dicekam oleh bunyi ribut (panah yang bernama) *Vidhyadharatorana* di pintu gerbang perang ibu kotanya yang luas, Srivijaya, dengan pintu gerbang kecil bertatahkan permata sangat indah, dan pintu gerbang besar penuh permata; *Panai* dengan air di kolam mandi; *Malayur* Kuna dengan bukit yang kuat sebagai bentengnya; *Mayirudinggam* yang dikelilingi laut dalam seperti oleh parit; *Ilangkasoka* yang sangat berani (dalam) peperangan yang kejam; *Mappappalam* penuh dengan air (dalam) sebagai pertahanannya; *Mevilimbanggam* dijaga oleh tembok-tembok yang indah; *Valaippanduru* mempunyai yang memiliki (baik) tanah-tanah yang digarap (?), (maupun) tanah kosong; *Talittakkolam* dipuji oleh orang-orang besar, (lagi mahir dalam) ilmu pengetahuan; *Madamalinggam* yang besar (mampu untuk) melakukan tindakan kuat dalam peperangan yang berbahaya; *Illamuridesam,* yang kekuatan dahsyatnya ditaklukkan dalam serangan yang seru; *Manakkawaram* yang taman-taman sarinya bagaikan sabuk (peri) dari selatan, dan Kadaram yang kekuatannya dahsyat, dan terlindung karena berdekatan dengan laut" (Hall 1988: 57; Coedes 1989: 6–7).

Daerah-daerah yang disebutkan dalam prasasti tersebut agaknya berada di kawasan sebelah-menyebelah Selat Malaka, baik di Pulau Sumatera maupun di Tanah Semenanjung. Daerah-daerah yang dapat ditafsirkan terletak di Semenanjung Malayu meliputi *Mappappalam*, *Langkasuka* (*Ligor*), *Talaittakkola* (*Takola*), *Mayirudinggam* (Jeloting, di utara Semenanjung), dan Kedah, kemudian Tumasik. Di Sumatera sangat mungkin yang diserang adalah Palembang (*Mevilimbanggam*), Malayu (Jambi), Pane/ Panai, dan daerah Aceh (*Illamuridesam*).

Armada Chola agaknya juga menyerang pulau-pulau Nikobar (Hall, 1988: 58; Coedes, 1989: 9–24). Penyerangan Cholamandala tidak dilanjutkan dengan pendudukan atas daerah-daerah yang telah ditaklukkan. Balatentara Chola kembali ke negerinya seraya membawa harta rampasan perang. Dengan demikian sebenarnya yang dilakukan oleh Cholamandala lebih tepat apabila disebut dengan penjarahan atas bandar-bandar Śrîwijaya. Tujuannya jelas untuk melemahkan Śrîwijaya dan bandar-bandarnya agar kapal-kapal Śrîwijaya tidak lagi menghalangi hubungan langsung Chola dengan Cina. Maksud tersebut agaknya tidak tercapai, karena di Sumatera dan Jawa pada babakan selanjutnya berdiri Kerajaan Wwatan-Mas dengan raja Airlangga (abad ke-11), lalu berkembang pula Singhasari di Jawa Timur dan Malayupura di Dharmmasraya. Perdagangan dan utusan Cholamandala hanya tercatat satu kali lagi mengunjungi Cina pada tahun 1077 (Hall, 1988: 59) dan kemudian tidak ada berita tentang hubungan itu. Berdasarkan letak geografis memang terlalu jauh pelayaran dari India Selatan ke Cina dan dapat dipastikan harus melalui pulau-pulau di Nusantara bagian barat. Mungkin atas sebab itu dan sebab perkembangan politik di Nusantara sezaman hubungan Chola dan Cina tidak diriwayatkan lagi.

Śrîwijaya sebagai sistem kerajaan masih bertahan sepanjang abad ke-11 hingga awal abad ke-12 dan sekitar awal abad ke-13 runtuh bersamaan dengan berkembangnya Kerajaan Singhasari di Jawa. Satu per satu daerah yang semula di bawah naungan Śrîwijaya, yakni Semenanjung Malaya dan Sumatera, melepaskan diri dari kekuasaannya.

Grahi, daerah Śrîwijaya di wilayah utara Semenanjung Malaya, dapat dianggap sebagai daerah perbatasan antara kuasa Śrîwijaya dan Kerajaan Khmer. Grahi sekarang disebut dengan Ch'ai-ya. di wilayah Thailand selatan. Di daerah tersebut pernah ditemukan Prasasti Grahi, berbahasa Khmer kuna, dan berangka tahun 1103 S/1183 M, antara lain menyatakan Maharaja Srimat Trailokyaraja Maulibhusanawarmadewa memerintahkan Mahasenapati Galanai yang berkuasa di Grahi meminta Sri Nano (seorang pejabat tinggi) membuat arca Buddha untuk melegakan semua pemeluk agama Buddha yang menyembahnya. Pada tahun 1230 wilayah Grahi diperintah oleh Candrabhanu Sri Dharmmaraja. Nama itu tercantum dalam Prasasti Ch'ai-ya berbahasa Sansekerta.

Candrabhanu agaknya raja yang menduduki Grahi (Ch'ai-ya). Ia memberontak terhadap kekuasaan Śrîwijaya dan menyatakan diri sebagai penguasa Tambralinggeswara, sekarang disebut Tembeling dan disebut oleh berita Cina dengan Ta-ma-ling. Candrabhanu berkuasa sampai tahun 1294, sebab dalam tahun itu kerajaannya runtuh akibat serangan bala tentara Siam. Gelar Candrabhanu, Sri Dharmmaraja, sampai sekarang masih diabadikan sebagai nama kota Sri Tammarat di pantai Teluk Siam (Muljana, 2006: 280–283, dan 287). Dengan berdirinya Tambralinggeswara di Semenanjung Malaya tiada lagi wilayah kekuasaan Śrîwijaya di kawasan tersebut.

Di wilayah Sumatera pun agaknya kuasa Śrîwijaya tiada terpusat lagi, tetapi tidak ada kepastian kronologi kapan Śrîwijaya runtuh di Sumatera. Raja terakhir Śrîwijaya yang disebutkan Prasasti Grahi (1183 M) ialah Srimat Trailokyaraja Maulibhusanawarmadewa, tetapi sampai sekarang tempat kedudukannya belum diketahui. Begitupun sebab-sebab akhir kekuasaannya belum ada data yang menjelaskan. Peristiwa sejarah yang dapat diketahui pada paruh kedua abad ke-13 adalah kedatangan rombongan tentara Singhasari dari Jawa Timur ke Malayu seraya membawa arca Amoghapasa. Arca tersebut merupakan hadiah Maharajadhiraja Sri Krtanagara Wikrama Dhammotunggadewa untuk Raja Malayu Sri Maharaja Srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa. Berita tersebut diketahui berkat uraian prasasti yang dipahatkan pada lapik arca Amoghapasa yang berangka tahun 1286 M (Muljana, 2006: 288).

Pada akhir abad ke-13 tidak ada lagi penyebutan Kerajaan Śrîwijaya, sedang yang didatangi tentara Singhasari adalah Kerajaan Malayupura dengan rajanya menggunakan gelar Mauliwarmadewa. Berdasarkan data prasasti dapat ditafsirkan sangat mungkin terdapat tokoh keturunan keluarga Raja Śrîwijaya yang mendirikan kuasa baru di daerah pedalaman Sungai Batanghari dan menjadi penguasa Malayupura. Kerajaan itu tidak ada kaitannya dengan Malayu (*Mo-lo-yeu*) yang pernah disebut-sebut ketika pendeta Cina I-Tsing singgah ke Sumatera abad ke-7, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu "penerus Śrîwijaya".

Pada abad ke-14, menurut berita Cina, telah banyak kerajaan merdeka di Pulau Sumatera, antara lain *Chan-pi* (Jambi), Malayu (Sumatera Barat), dan *Pa-lin-fong* yang menjadi kedudukan raja dan dikuasai oleh para pedagang dan penyamun Cina. Dengan demikian terdapat tafisran bahwa setelah Śrîwijaya runtuh berkembang banyak bandar dan kekuasaan di pedalaman, antara lain Malayupura dan Palembang (*Pa-lin-fong*).

Sementara itu Palembang—yang lama kosong tak ada yang dipertuan dan Majapahit tidak memperhatikannya—pada tahun 1377 dikuasai dan diperintah oleh para perompak Cina di bawah pimpinan Liang Tao-Ming dan berkedudukan di *Ku-kang*

Atisha Dipangkara Srijnana, adalah seorang pendeta Buddha dari Jambhudwipa yang pernah belajar pada Mahabhiksu Dharmmakirtti di Suwarnadwipa. Menurut berita tradisi Atisha dilahirkan sekitar tahun 982 M di Vikramapura, sekarang termasuk Bangladesh. Masa mudanya ia belajar di Mahawihara Nalanda dan ditahbiskan menjadi bhiksu oleh Bhiksu Silaraksita. Pada sekitar usia 33 tahun Atisha melakukan pelayaran menuju Suwarnadwipa, karena dia mendengar adanya Mahabhiksu yang sangat tinggi ilmunya bernama Dharmmakirtti. Mulai tahun 1012 Atisha berada di Sriwijaya, namun tidak mudah bagi Atisha untuk bertemu dengan Mahabhiksu Dharmmakirtti, ia harus bersabar menunggu dan melalui tahapan demi tahapan ujian yang dilakukan murid-murid Dharmmakirtti yang juga telah tinggi ilmu keagamaannya. Akhirnya pertemuan dengan Dharmmakirtti yang sangat diharapkan terjadi, sang Mahabhiksu memperkenalkan Atisha kepada murid-murid di tengah lapangan yang terbuka. Konon terdapat tradisi di Suwarnadwipa seorang guru memberikan pelajarannya di tempat terbuka dikelilingi oleh para muridnya.

Atisha berada di Sriwijaya untuk belajar kepada Mahacaryya Sherlingpa Dharmmakirtti dalam *dharma* tentang *Abhisamaya-alamkara-nama-Prajanaparamita-upadesa-sastra-vrtti-durbhoda-aloka-nama-tika.* Atisha berguru kepada Dharmmakirtti sampai tahun 1024, ia kemudian kembali ke India. Di India Atisha mendirikan dan mengembangkan wihara Wikramasila, di Bihar, yang akhirnya menarik banyak murid-murid dan menjelma sebagai Mahawihara pula. Sebagai Mahaguru dan Adhyaksa di Wikramasila antara tahun 1034—1038. Atisha yang harum namanya terkenal sebagai mahabhiksu terdengar hingga Tibet, lalu Raja Tibet mengundang memohon Atisha untuk mengajarkan agama Buddha Mahayana Tantrayana di Tibet. Antara tahun 1040—1053 M Atisha berada di Tibet dan menjadi Mahaguru hingga wafatnya. Hal yang menarik adalah pelajaran dari Atisha yang pernah berguru kepada Mahabhiksu Dharmmakirtti di Sriwijaya sampai sekarang masih dikenal dan terpelihara di Tibet dan juga di Dharmmasala Dalai Lama di India (Widiatmoko, 2015: 306–314).

(*Kiu-kiang*, yang berarti "pelabuhan lama", bekas Śrîwijaya) (Budenani, 1974: 52; Yuan Zhi, 1993: 70; Utomo dkk., 2012: 146–149). Pada masa itu jejak kemegahan Śrîwijaya memang sudah tidak ada lagi. Kerajaan Śrîwijaya telah berakhir dan bekas pusat kekuasaannya diperintah para lanun Cina. Keluarga raja dan kaum kerabat istananya tentu tersebar dan sulit dilacak keberadaannya. Orang-orang Cina penguasa Palembang mengembangkan sistem pemerintahan tersendiri. Majapahit di Jawa pun masa itu menjelang masa surut dan disibukkan oleh perang saudara yang berkepanjangan, yaitu Perang Paregreg (1401–1406 M) sehingga tidak memperhatikan wilayah lain di luar Jawa bagian timur.

Penguasaan atas Palembang atau *Kiu-Kiang* oleh para perompak Cina berlanjut hingga awal abad ke-15 M di bawah pimpinan Chen Zhu-yi (Tan Tjo Gi). Pada tahun 1407 armada Zheng He yang melakukan pelayaran muhibah ke Asia Tenggara kembali ke Cina. Mereka singgah di Palembang. Ming Shi Lu (Catatan Sejarah Dinasti Ming) memberitakan Zheng He dan armadanya diserbu oleh kawanan lanun Chen Zhu-yi pada malam hari ketika kapal-kapal lego jangkar, namun armada Cina telah siaga menghadapi para penyerbu. Dalam pertempuran itu Zheng-He berhasil menewaskan 5.000 orang bajak laut Cina anak buah Chen Zhu-yi, membakar habis 10 kapal dan menahan tujuh kapal, dan menyita dua stempel perunggu milik Chen Zhu-yi. Pada akhir pertempuran gembong bajak laut Chen Zhu-yi dan dua kaki tangannya ditahan dan dibawa ke Cina, kemudian dihukum mati atas perintah Kaisar (Yuan Zhi, 1993: 71–72).

Setelah pembersihan perompak Cina Palembang memasuki babak baru dengan berkembangnya agama Islam yang disebarkan oleh para perantau Cina Islam di bawah pimpinan Shi-jin-king.

Sementara itu di Palembang telah ada pemimpin Islam setempat bernama Sultan Mugni. Dia berputri Semindang Biduk. Menurut berita tradisi Arya Damar, anak Raja Majapahit Brawijaya, diperintah menjadi penguasa di Palembang. Setiba di Palembang Arya Damar menikah dengan Putri Semindan Biduk. Arya Damar pun menggantikan Mugni sebagai penguasa Palembang dengan nama Arya Dilah pada tahun 1445. Arya Dilah berkuasa hingga tahun 1485 dan digantikan oleh Karang Widara. Kemudian hadir pembesar dari Demak, Ki Gede ing Suro, yang diutus oleh Raden Patah memperkuat berdirinya Kesultanan Palembang. Demikianlah mulai sejarah Kesultanan Palembang (Yuan Zhi, 1993: 72; Utomo dkk., 2012: 163–64).

8. Beberapa Catatan tentang Sriwijaya

Pada awal perkembangannya—berdasarkan uraian sejumlah prasasti—ditafsirkan bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang agresif dengan melakukan penyerangan dan menaklukkan daerah-daerah yang belum berada di bawah pengaruh kekuasaannya. Kata-kata *siddhayatra* (ekspedisi yang berhasil berlindungan dewa-dewa) umum dikenal dalam prasasti-prasasti Sriwijaya, bahkan prasasti-prasasti pendeknya pun hanya menyebut kata *siddhayatra*. Hal itu mengindikasikan peperangan yang dilakukan bala tentara Sriwijaya senantiasa berhasil. Pasukan Sriwijaya menyerbu musuh-musuh dengan berbaris menyusuri daratan, melalui sungai-sungai, dan menyeberang ke pulau lain (Bangka, Lampung, dan Kedah).

Musuh bala tentara Sriwijaya sangat mungkin ada dua jenis, yaitu (1) penduduk pedalaman Sumatera yang belum memeluk agama Buddha Mahayana, yang kemudian dapat dikalahkan dan sebagian di antara mereka memeluk agama Buddha, dan (2) penduduk Sumatera pemeluk agama Hindu-Trimurti yang mulai berkembang berkat adanya gelombang pengaruh baru dari India. Pemeluk agama Hindu-Trimurti diperkirakan mulai menyebar di Sumatera dan Jawa pada periode tersebut. Fragmen Prasasti Bukit Siguntang, yang diperkirakan dipahatkan antara tahun 682 dan tahun 684, menguraikan adanya peperangan ramai, banyaknya darah tertumpah (*vanyak pramirahnya*), dan memerah oleh darah (*pauravirakta*) (Sumadio, 1984: 59). Hal itu menunjukkan pernah terjadi perang di sekitar Bukit Siguntang, mungkin dalam rangka memperebutkan bukit tersebut.

Sangat mungkin Bukit Siguntang dipertahankan oleh para pemeluk Hindu yang baru mulai berkembang di wilayah tersebut. Bukit itu dianggap sebagai penjelmaan Gunung Mahameru sebagaimana yang masih diingat dalam *Sejarah Melayu* dengan menyebutnya *Siguntang Mahamiru* sebagai tempat turunnya nenek moyang *puak* Melayu (Situmorang & A. Teeuw, 1952: 1 dan 25). Di bawah Bukit Siguntang itulah pemeluk Hindu bermukim. Mungkin mereka mulai mendirikan bangunan-bangunan keagamaan di bukit tersebut. Sejatinya para pemeluk Hindu saja yang sangat menghormati

Gunung Mamaheru yang berdiri di tengah "benua" Jambhudwipa dan menganggapnya sebagai titik pusat alam semesta yang pipih seperti cakram. Gunung Meru menjadi *axis mundi* dari tiga dunia (*tri loka*), yaitu *bhurloka*, *bhuwarloka*, dan *swarloka* (Geldern, 1982: 4–5). Para pemeluk Hindu meneruskan konsep pemuliaan Mahameru sebagai warisan ajaran Brahmana pada zaman Veda purba, sedangkan para pemeluk Buddha tidak mengganggap terlalu penting Gunung Mahameru walaupun mereka mengenalnya. Terbukti mitos Buddha Mahayana menyatakan bahwa "benua" Jambhudwipa tidak berada di tengah alam semesta sebagai tempat kedudukan Mahameru. Benua itu telah digeser ke arah selatan Mahameru di lautan terluar yang mengelilingi Mahameru, sedang Gunung Mahameru sendiri tetap sebagai pusat alam semesta yang berbentuk pipih (Geldern, 1982: 5–6).

Setelah Bukit Siguntang direbut dan para pemeluk Hindu diusir keluar dari wilayah tersebut para bhiksu Buddha, atas perintah Raja Sriwijaya, menegakkan arca-arca Buddha. Hal itu terbukti dengan banyak temuan arca Buddha di Bukit Siguntang, antara lain arca "Buddha Berdiri" berbahan batu yang sangat terkenal (Bernet Kempers, 1959: 31; Suleiman, 1981: 37; Sedyawati & Hasan Djafar, 2012: 74) serta arca-arca perunggu yang menggambarkan Sakyamuni dan Awalokiteswara (Suleiman 1981: 39). Dengan demikian Bukit Siguntang menjelma sebagai tempat keramat yang bersemangat agama Buddha Mahayana.

Setelah merebut Bukit Siguntang bala tentara Sriwijaya menyeberang ke Pulau Bangka dan menguasai pulau tersebut. Demikian berita Prasasti Kota Kapur (686 M). Agaknya di Bangka terdapat masyarakat beragama Hindu yang memuja Dewa Wisnu, sebab di dekat penemuan Prasasti Kota Kapur ditemukan tiga arca Wisnu dengan gaya seni Pra-Angkor dan sisa perbentengan tanah yang mungkin sebagai sarana pertahanan. Menurut prasasti yang sama bala tentara Sriwijaya meneruskan ekspedisi ke Bhumi Jawa, yang sangat mungkin Kerajaan Tarumanagara di Jawa bagian barat (Sedyawati & Hasan Djafar, 2012: 94). Sangat mungkin pula Tarumanagara yang mengembangkan agama Veda-Brahmana dikuasai oleh Sriwijaya pada paruh kedua abad ke-7 sampai kemudian berhasil bebas dari kekuasaan Sriwijaya pada tahun 854 S/932 M. Berita itu sesuai dengan berita Prasasti Kebon Kopi (Kampung Muara), yang menyatakan kekuasaan dikembalikan kepada Raja Sunda atas perintah Juru Pangambat (Djafar, 2010: 108 dan 130).

Perkembangan Kerajaan Sriwijaya telah dirancang secara baik oleh para penguasanya. Kerajaan itu mendukung perkembangan agama Buddha, namun juga bersifat ekspansif. Para penguasa Sriwijaya sengaja tidak mengembangkan Buddha Hinayana yang mengajarkan *ahimsa* secara teduh, melainkan mengembangkan agama Buddha Mahayana yang mengizinkan ketegasan untuk menghancurkan musuh-musuh. Memang benar di wilayah Palembang dan

sekitarnya, Bangka, dan di Bumiayu di tepian Sungai Lematang ditemukan banyak arca dan sisa bangunan bercorak kehinduan, namun masyarakat Hindu tersebut tidak berperang dalam politik kerajaan. Mereka diizinkan tinggal di wilayah Sriwijaya selama tidak melawan dan memberontak kepada kekuasan Sriwijaya.

Pada akhirnya ada beberapa hal yang dapat dicatat dari riwayat *Kedatuan* Śrîwijaya yang panjang (sejak abad ke-7–11 M) sebagai berikut:

(1) Srîwijaya merupakan kerajaan yang mengembangkan kekuatan maritim. Untuk menjaga kekuasaan di wilayah yang besebarangan dengan laut dan selat-selat tentu diperlukan armada dengan kapal-kapal layar berbagai ukuran.

(2) Śrîwijaya merupakan pendukung perkembangan agama *Buddha Mahayana*. Pada awalnya berkembang agama *Buddha Theravada*, namun karena alasan politik para raja Śrîwijaya kemudian mendukung perkembangan *Buddha Mahayana*.

(3) Walaupun mempunyai hubungan dinasti dengan raja-raja Mataram kuna, yaitu Dinasti Sailendra, Śrîwijaya tidak banyak meninggalkan monumen keagamaan (candi-candi dan stupa) karena para penguasanya lebih memperhatikan kegiatan maritim untuk menjaga kuasanya di wilayah barat Nusantara. Penduduk Śrîwijaya juga hidup di dunia bahari, bukan agraris sebagaimana di Jawa, sehingga bangunan keagamaan yang harus diupacarai secara tetap agaknya tidak diperlukan oleh mereka.

Sebagai salah satu kerajaaan besar yang berkembang cukup lama, peran Śrîwijaya lebih banyak dikenal di berbagai negara Asia Tenggara. Kisah-kisah tentang Śrîwijaya terus dikenang dalam memori penduduk Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja-Champa, Brunei, Filipina, dan Indonesia yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan raja-raja Śrîwijaya.

KERAJAAN AWAL MASUKNYA

Islam

4

Kerajaan Peurelak
(840-1292)

1. Awal Berdiri

Tidaklah mudah menelusuri keberadaan Peurelak manakala catatan dan bukti tinggalan materi nya sangat terbatas dan belum banyak digali secara mendalam oleh para sejarawan. Namun demikian catatan perjalanan para musafir, seperti catatan Marcopolo, membantu dan sedikit memperjelas gambaran sejarah kerajaan Islam Peurelak sebagai sebuah kerajaan Islam awal di Sumatera, bahkan di Nusantara. Selain itu catatan dari Arab dan Cina serta kisah-kisah setempat dapat memberi keterangan tambahan mengenai kerajaan itu. Beberapa naskah tua yang digunakan untuk dapat menguraikan gambaran tentang Peurelak atau Perlak dalam buku ini, sebagaimana yang digunakan oleh Hasjmy dalam makalahnya,[1] antara lain *Kitab Idharul Haqq*, *Kitab Tazkirah Thabakat Jumu Sultan As Salathin*, *Hikayat Raja-raja Pasai,* dan *Sejarah Melayu*.[2]

Nasution (1980: 27) menyatakan bahwa merupakan suatu kemungkinan, sebagaimana diuraikan dalam *A Concise History of Islam*, menjelang abad ke-10 para pedagang Islam telah menetap di pusat-pusat perdagangan penting di kepulauan Indonesia, terutama di pulau-pulau yang terletak di Selat Malaka yang merupakan terusan sempit dalam jalur perdagangan laut dari negeri-negeri Islam ke Cina. Tiga abad kemudian, menurut dokumen-dokumen sejarah tertua, permukiman orang-orang Islam didirikan di Perlak dan Samudera Pasai di timur laut pantai Sumatera. Di kawasan itu kemudian muncul Kesultanan Aceh. Kelompok Islam menguasai daerah luas di Sumatera dan disegani sampai jauh di luar perbatasannya. Dari Sumatera bagian utara Islam menyebar secara damai ke Malaka kemudian ke Jawa melalui jalan perdagangan sepanjang pantai pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia yang tak terbilang jumlahnya itu.

Menurut sumber-sumber tua yang menyebut suatu pendudukan orang-orang Islam di beberapa bagian Asia Tenggara dan Asia Timur ialah sumber-sumber Cina abad ke-7 dan 8 M. Sementara itu berita-berita yang dapat dipercaya mengenai imigrasi orang-orang Islam secara besar-besaran ke berbagai bagian Asia berasal dari orang-orang Arab. Sumber-sumber itu menyebutkan bahwa para pedagang, terutama pedagang Islam, seperti Arab, Persia, dan India, menetap di Khanfu (Canton). Mereka menjadi bagian dalam suatu pemberontakan di Cina selatan bersama-sama dengan petani-petani setempat terhadap kekuasaan kaisar Hi Tsung (878–889 M) dari dinasti Tang. Akibat pemberontakan itu banyak orang Islam

kemudian melarikan diri dan mencari perlindungan di Kalah (Kedah) di pantai barat semenanjung Malaya. Berdasar berita-berita tersebut Uka Tjandrasasmita (1976: 77–78) menyimpulkan bahwa sejak abad ke-7 M orang-orang Islam telah terlibat dalam kegiatan kebudayaan dan kegiatan politik.

Selanjutnya Tjandrasasmita (1976: 77–78) juga menyebutkan bahwa perdagangan dan pelayaran antara timur dan barat Asia berkembang terutama disebabkan berdiri dan berkembangnya tiga dinasti, yaitu Khalifah Umayah (660–749 M) di Asia Barat, dinasti Tang (618–907 M) di Asia Timur, dan dinasti Śrîwijaya (abad ke-7–14 M) di Asia Tenggara. Pada abad ke-10 Selat Malaka merupakan suatu jalur laut di Asia Tenggara yang berperan penting dan kemungkinan besar dikuasai Kerajaan Śrîwijaya. Para pedagang dan penulis Islam memberitakan pentingnya selat ini dilihat dari sudut politik dan ekonomi. Tokoh-tokoh Islam itu antara lain Ibn al Fakih, Ibn Rosteh, Ibn Zaid, Ibn Sulaeman, dan Masudi. Melalui jalan laut tersebut para pedagang Islam datang dengan tujuan pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa yang telah berkembang sebagai pelabuhan. Penemuan batu nisan di Leran, Gresik, tertanggal 495 H atau sekitar 1082 M merupakan bukti kehadiran Islam di Jawa. Adapun bukti awal adanya kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia diperoleh dari berita Marcopolo, yang berasal dari tahun 1292 M, di samping cerita-cerita, kronik, dan tradisi setempat.

Nama Perlak telah disebutkan dalam beberapa sumber setempat, di antaranya *Sejarah Melayu*, *Hikayat Raja-raja Pasai*, dan *Negarakertagama*, yang meskipun ditulis dengan bermacam ejaan namun disebutkan terletak di Sumatera. W.P. Groeneveldt menerangkan bahwa nama Perlak juga terdapat dalam kisah ekspedisi Tionghoa ke Jawa pada tahun 1292/1293 dengan sebutan Pa-la-la atau Pa-ra-ra (Aboebakar Aceh, 2018: 13).

Perlak, menurut Marcopolo, seorang musafir Venesia yang melakukan perjalanan ke Cina dan kemudian ke Persia tahun 1292, merupakan satu dari delapan kerajaan yang dikunjunginya di Sumatera, telah memeluk Islam, dan disebut sebagai kerajaan *Ferlec* (Marsden, 1966; Azra, 1989: 3; Ricklefs, 1981: 4). Para pedagang Islam mengislamkan penduduk perkotaan, tetapi di luar itu kekafiran tetap hidup seperti binatang buas yang memakan tubuh manusia dan segala macam benda tidak halal, dan sepanjang hari menyembah terhadap apa pun yang pertama kali terlihat oleh mata mereka pada waktu pagi (Reid, 2010: 7). Dengan demikian Islam di sini masih tetap belum sempurna sama sekali (Azra, 1989: 3). Dari catatan tersebut dapat diketahui bahwa *Ferlec* atau Perlak, ketika Marcopolo hadir pada akhir abad ke-13 M, telah menjadi kerajaan yang menganut Islam. Sebelumnya orang-orang Perlak penyembah berhala, tetapi karena berhubungan dengan pedagang Saracen yang sering berlabuh mereka berpindah menganut ajaran Muhammad (Islam) (Reid, 2010: 7). Vlekke (1961) menulis Perlak merupakan satu-satunya tempat Islam di Kepulauan Indonesia (Pulungan, 2018:

334). Mungkin Perlak, menurut Marsden (1966), merupakan tempat (Marcopolo) mula-mula mendarat.

Pada umumnya para ahli sejarah menyepakati beberapa teori mengenai masuknya Islam ke Nusantara, yaitu "teori Gujarat", "teori Arab", dan "teori Persia".[3] Teori Gujarat menjelaskan bahwa asal muasal kedatangan Islam di Nusantara melalui jalur Gujarat pada abad ke-13 dan ke-14 M sebagaimana diungkapkan oleh W.F. Stutterheim. Pendapat itu didasarkan bukti batu nisan sultan pertama Kerajaan Samudera Pasai Malik Al Shalik yang berangka tahun 1297 M. Berdasarkan persamaan batu nisan di Pasai dengan batu nisan di Gujarat ia berpendapat bahwa Islam datang dari Gujarat. Pada mulanya teori Gujarat dikemukakan oleh Pijnapel, yang mengkaitkan asal mula Islam di Nusantara dengan Islam di wilayah Gujarat dan Malabar. Ia berpendapat bahwa orang-orang Arab mazhab Syafii yang bermigrasi dan menetap di wilayah India kemudian membawa Islam ke Nusantara. Teori ini kemudian dikembangkan oleh Snouck Hurgronje, yang menyatakan bahwa setelah Islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan anak benua India, Muslim Deccan datang ke dunia Melayu Indonesia sebagai penyebar Islam pertama. Orang-orang Arab, yang kebanyakan keturunan Nabi Muhammad SAW—karena menggunakan gelar *sayyid* atau *syarif*—menyusul kemudian dan memperluas penyebaran Islam di Nusantara. Ia menyebut abad ke-12 sebagai periode paling mungkin permulaan Islam masuk Nusantara (Azra, 2015: 43). Selain itu sarjana Belanda, Moquette, berkesimpulan bahwa tempat asal Islam di Nusantara adalah Gujarat.

Teori Persia muncul berdasarkan kesamaan tradisi di Nusantara dengan budaya Persia, sehingga Islam yang sampai ke Nusantara diduga berasal dari Persia. Adapun teori Arab berpandangan bahwa pedagang Arab yang mendominasi perdagangan Barat dan Timur sejak abad ke-7 atau ke- 8 M sekaligus melakukan penyebaran Islam di Nusantara. Thomas W. Arnold menyebut para pedagang Arab terlibat dalam penyebaran Islam kepada penduduk Nusantara. Sumber Cina menyatakan bahwa menjelang akhir abad ke-7 M seorang pedagang Arab menjadi pemimpin suatu permukiman Arab muslim di panatai Sumatera. Sebagian di antara mereka diberitakan melakukan perkawinan dengan wanita setempat, sehingga membentuk *nucleus* komunitas muslim yang terdiri dari orang-orang Arab pendatang dan penduduk setempat. Teori ini dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dalam buku *The Preaching of Islam* (1981). Teori Arab juga disetujui oleh Crawfurd, sementara Keijzer menganggap Islam di Nusantara berasal dari Mesir berdasar pertimbangan kesamaan mazhab yang dipeluk oleh kedua masyarakat tersebut. Niemann dan de Hollander melakukan sedikit revisi. Mereka menganggap bukan Mesir sebagai sumber Islam di Nusantara, melainkan Hadramaut. Teori Arab kemudian dikumandangkan para ahli dalam seminar *Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia* (1963), yang menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya pada abad pertama Hijriah atau

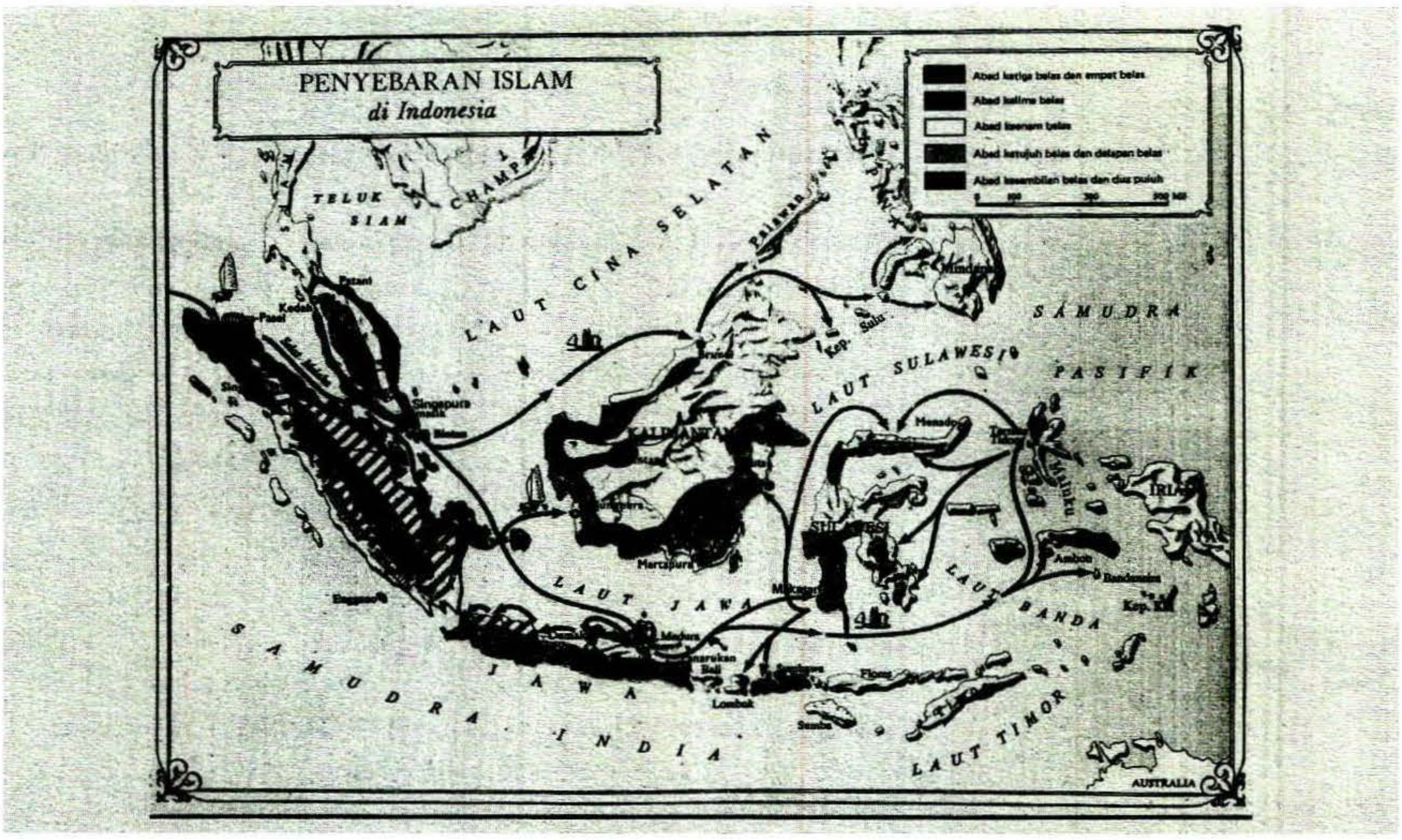

Peta proses penyebaran Islam di Indonesia
Sumber: Harun Nasution, 1980

abad ke-7 hingga abad ke- 8 M dan langsung dari Arab. Daerah pertama kedatangan Islam adalah pesisir Sumatera dan setelah masyarakat Islam terbentuk muncul raja Islam pertama di Aceh. Dalam proses pengislaman selanjutnya orang-orang Indonesia aktif ambil bagian. Selain sebagai penyiar agama para mubaligh Islam itu juga berperan sebagai pedagang. Penyiaran Islam pun dilakukan dengan cara damai (Panitia Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia, 1963: 265).

Berdasar pandangan tentang teori Arab tersebut dapat diduga bahwa Perlak telah bersentuhan dengan para pedagang muslim pada awal abad pertama Hijriah atau abad ke-7–8 M. Kehadiran para pedagang itu lama-kelamaan membentuk suatu komunitas pada abad ke-9 M dan membangun pemerintahan bercorak Islam di Perlak pada abad-abad berikutnya. Hasjmy—berdasarkan makalahnya yang merujuk pada kitab-kitab seperti *Izhar Al-Haqq* karangan Abu Ishak Makarani Al-Fasy dan Kitab *Tadzkirah Thabaqat Jam u Sulthan Al-Salathin* karangan Sayyid Abdullah bin Sayyid Habib Saifuddin pada tahun 1275 H atas titah Alaidin Mansur Syah—menyebutkan bahwa kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah Kesultanan Perlak yang berdiri pada abad ke-3 H atau abad ke-9 M. Sementara itu kitab *Izhar Al Haqq* menyebutkan Perlak berdiri tahun 225 H, sedangkan kitab *Tadzkirah Thabaqat* menyebutkan tahun 227 H (Hasjmy, 1993: 70; Pulungan, 2018: 333).

Aboebakar Aceh (2018: 32), dalam *Sekitar Masuknya Islam di Indonesia*, membuat kesimpulan bahwa di Perlak dan Pase inilah Islam mula-mula masuk ke Indonesia. Kesimpulan itu didapat berdasarkan berita kitab sejarah yang pernah ditulis sekitar masa kemajuan Kerajaan Perlak dan Pase.

Ilustrasi Wajah Marcopolo
Sumber: Anthony Reid, 2010

Slamet Mulyana (2005) menguraikan sedikit perihal kerajaan Perlak. Pada akhir abad ke-12 di pantai timur Sumatera terdapat negara Islam bernama Perlak, yang kemudian sering disebut Peurelak. Perlak berdiri dengan dukungan para pedagang asing dari Mesir, Maroko, Persi, dan Gujarat yang menetap sejak awal abad ke-12. Adapun pendirinya pedagang Arab keturunan suku Qurays. Pedagang itu menikah dengan putri keturunan Raja Perlak. Dari perkawinan itu lahirlah seorang anak lelaki bernama Sayid Abdul Aziz, yang kemudian menjadi sultan pertama Negeri Perlak. Setelah dikukuhkan menjadi sultan Perlak, ia bernama Alaiddin Syah, memerintah tahun 1161–1186 M. Kedatangan pedagang-pedagang asing yang kemudian membentuk Kesultanan Perlak itu berlangsung sejak tahun 1028. Sebelumnya Perlak diperintah oleh raja bergelar *mohra/meurah/marah*, yang berarti "raja". Kesultanan Perlak bertahan sampai satu abad lebih dan diperintah beberapa sultan. Slamet Mulyana (2005: 132–133) juga menguraikan secara ringkas beberapa sultan yang pernah memerintah di Perlak berikut masa pemerintahannya sejak masa awal hingga akhir kekuasaan pada tahun 1292.

Nama Perlak berasal dari Peurelak, yang memiliki beberapa makna. Versi pertama diduga berkaitan dengan nama pohon yang banyak tumbuh di daerah pesisir timur Aceh (sekarang Kabupaten Aceh Timur), yang oleh orang Aceh disebut "kayei peurelak" atau "kayu perlak" (Syamsu, 1996: 13). Karena begitu banyak kayu perlak tumbuh di daerah tersebut, kemudian dikenal sebagai "rimba perlak". Kayu ini sangat baik sebagai bahan pembuat perahu atau kapal, sehingga banyak orang datang mengambilnya. Atas dasar itu kemudian daerah penghasil "kayu perlak" ini disebut dengan "Negeri Perlak". Dalam perkembangan berikutnya para pedagang atau pengembara yang datang dari Cina, Arab, Persia, dan India yang singgah di wilayah ini menyebutnya dengan "Bandar

Makam Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ahmad Syah Johan Berdaulat yang memerintah Peurelak antara tahun 1109-1135
Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh

Perlak" (Yusuf, 2006: 55; Darmawijaya, 2010; Hasmy, 1993: 152; Syahrul, 2008: 33). Sebagaimana diketahui Perlak berada di sisi timur Pulau Sumatera, menghadap Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan dan pelayaran. Kapal-kapal yang melintasinya seringkali mendarat di Perlak untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman serta perbaikan bagian kapal yang rusak, seraya menunggu angin baik untuk mengantar mereka menuju Cina, sebagaimana dialami Marcopolo.

Versi kedua, menurut Zainuddin (1961:115), kerajaan yang didiami oleh orang Islam pertama di Nusantara dan terletak di Aceh Timur (Sumatera) itu disebut kerajaan Perlak dan kemudian disebut Peurelak. Kata itu berasal dari bahasa Arab: *fallah*, yang berarti "kampung tani".

Perihal keberadaan Kerajaan Islam Peurelak juga dapat ditelusuri dari hikayat yang hidup di tengah masyarakat, yaitu *Hikayat Putri Nurul A'la* dan *Hikayat Banta Bransah*. Konon Ahmad Branta dan Nurul Ala merupakan putra dan putri Sultan Makhdum Alaidin Abdullah Syah, yang memerintah pada tahun 1078 sampai 1108 M (Zainuddin, 1961; Syahrul, 2008: 36–37).

Selain bukti tertulis sebagaimana telah disebutkan di atas, baik berita asing maupun tradisi lisan, terdapat bukti material yang membuktikan keberadaan Kerajaan Peurelak pada masa lalu berupa tinggalan mata uang, stempel kerajaan, dan makam Sultan Peurelak (Syamsu, 1996; 12–13; Syahrul, 2008: 36–37; Hasjmy, 1993).

Mata uang Perlak, menurut A. Hasjmy, merupakan mata uang asli tertua di Nusantara. Ada tiga jenis mata uang, yaitu *dirham*

Nisan makam Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ahmad Syah Johan Berdaulat
Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh

(emas), *kupang* (perak), dan *keuh* (timah). Pada keping mata uang *dirham* dijumpai tulisan beraksara Arab berbunyi "Al ala" dan sisi lain berbunyi "sultan". Pada mata uang *kupang* dijumpai tulisan beraksara Arab "dhuribat mursyidan" dan pada sisi lainnya tulisan "syah alam Barinsyah". Di kedua sisi mata uang kuningan juga ditemukan tulisan aksara Arab (Hasjmy, 1981; Syamsu, 1996: 12–13). Ketiga jenis mata uang tersebut dijumpai di beberapa daerah di Aceh. Mata uang *dirham* dijumpai di daerah Kampung Paya, Meuligou, kira-kira 150 meter dari Bandar Khalifah. Mata uang *kupang* ditemukan di daerah kampung Sarah Pineung, kerukunan Blang Simpo Perlak, selatan Kota Perlak (Syamsu, 1996:12).

Benda penting yang mempertegas keberadaan Kerajaan Perlak adalah temuan stempel kerajaan dari Negeri Bendahara, yang menurut kitab *Idharul Haq* merupakan negeri bagian kerajaan Perlak. Stempel terbuat dari perak murni dan tertulis kalimat Arab yang berbunyi "*al waziq billah Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 521*" (Syamsu, 1996: 13).

Selain mata uang dan stempel juga terdapat makam para penguasa Perlak, di antaranya makam sultan pertama Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah di Bandar Khalifah, tidak jauh dari istana Perlak di bukit Meuligou. Beberapa makam keluarga sultan juga dijumpai di sebelah selatan Bandar Khalifah, di antaranya makam putri Nurul A'la. Di samping itu juga ditemukan makam raja Kerajaan Benua, yang menurut kitab *Idharul Haq* merupakan negara bagian Kerajaan Perlak. Nisan makam diperkirakan dari abad ke-11 M (Syahrul, 2008: 35–36).

Sebagai sebuah pelabuhan perniagaan yang maju dan aman pada abad ke-8 M Perlak menjadi tempat persinggahan kapal-kapal niaga orang-orang Arab dan Persi. Seiring dengan perjalanan waktu di

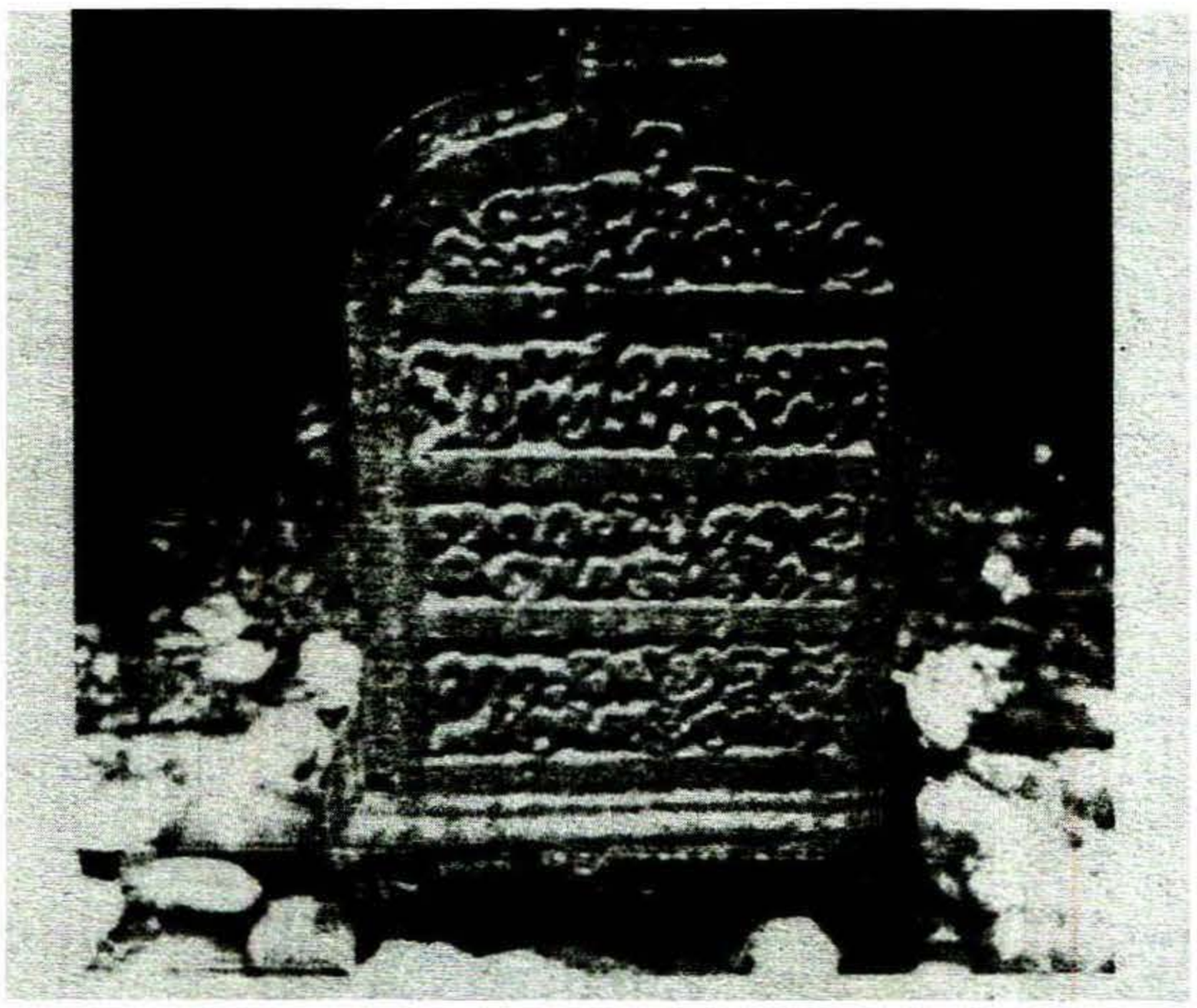

Makam sultan dan keluarga kerajaan Perlak
Sumber: Syahrul, 2008

daerah ini terbentuk dan berkembang masyarakat Islam, terutama sebagai akibat perkawinan di antara sudagar-saudagar muslim dan perempuan anak negeri. Perkawinan ini menyebabkan lahirnya keturunan muslim percampuran Arab, Persi, dengan perempuan Perlak. Hal inilah yang kemudian menyebabkan berdirinya kerajaan Islam Perlak pertama pada hari Selasa tanggal satu bulan Muharam tahun 225 H yang setara dengan tahun 840 M dengan raja bernama Sayed Maulana Abdul Aziz Shah (peranakan Arab Qurays dengan putri Perlak) atau yang terkenal dengan gelar Sultan Alaidin Syed Maulana Abdul Azis Shah (Yusuf, 2006: 55). Kaum pendatang yang juga pedagang muslim ini mempunyai peran penting dalam proses berdirinya kerajaan Islam di Perlak. Atau dengan kata lain hasil perkawinan campur antara penduduk Perlak dan Persi, Arab, dan India keturunan Arab di Perlak menjadi pangkal berdirinya kerajaan Islam di Negeri Perlak. Dalam perkembangan politik di kemudian hari persaingan dan perebutan kekuasaan antara dinasti Marah Perlak yang merupakan asli pribumi dan dinasti Sayid Aziz yang merupakan pendatang tidak dapat dielakkan dan terjadi dalam beberapa periode kepemimpinan Kesultanan Perlak (Slamet Mulyana, 2005: 133–134).

2. Raja-raja

Para raja yang memerintah dan berkuasa di Kerajaan Perlak pada umumnya merupakan keturunan Ali bin Muhammad bin Jafar Shadiq yang menikah dengan Makkhdum Tansyuri, adik Syahir Nuwi, Raja Perlak keturunan Persi. Dari perkawinan itu lahirlah Sultan Alaiddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Syah, sultan pertama Kesultanan Perlak (Pulungan, 2018: 334; Slamet Mulyana, 2005: 132). Dalam perkembangan selanjutnya raja-raja yang memerintah Kesultanan Perlak berasal dari dinasti yang menggunakan gelar *sayid*[4] dan namanya menggunakan kata Aziz, sehingga dikenal

sebagai raja-raja dinasti Azizah. Umumnya mereka beraliran syiah. Pada periode pertengahan hingga akhir raja-raja Perlak tidak berasal dari lingkup dinasti Azizah, namun dari dinasti Makhdum yang merupakan keturunan bangsawan asli Perlak (*Meurah*) dan beraliran Ahlus Sunnah. Pertentangan antara syiah dan ahlus sunnah wal jamaah di Perlak kelak menjadi pemicu terjadinya perang saudara. Dampak perang saudara itu di kemudian hari Kesultanan Perlak dibagi menjadi dua, yang masing-masing mempunyai sultan dan pusat pemerintahan sendiri.

Berdasar sumber-sumber yang ada dan pendapat beberapa ahli diketahui beberapa nama sultan yang memerintah di Kesultanan Perlak, namun nama dan masa pemerintahannya berbeda-beda antara sumber yang satu dan sumber yang lain. Meskipun demikian semua sumber sepakat bahwa sultan pertama adalah Sayid Abdul Aziz atau Sultan Alaiddin Syah.

Tabel berikut menunjukkan nama sultan yang pernah memerintah Perlak (Pulungan, 2018: 335–338; Darmajaya, 2010; Hasjmi, 1983: 46).

Sultan ke-	Nama	Masa Pemerintahan
1	Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Aziz Syah	225–249 H (840–864 M)
2	Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdurahim Syah	249–285 H (864–888 M)
3	Sultan Alaiddin Sayid Maulana Abbas Syah	285–300 H (888–913 M)
4	Sultan Alaiddin Sayid Maulana Ali Mughayat Syah	302–305 H (915–918 M)
5	Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Kadir Syah Johan Berdaulat	306–310 H (918–922 M)
6	Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Syah Johan Berdaulat	310–344 H (922–946 M)
7	Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Malik Syah Johan Berdaulat	344–365 H (946–973 M)
8	Sultan Alaiddin Sayid Maulana Mahmud Syah Johan Berdaulat	365–377 H (976–988 M)
9	Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ibrahim Syah Johan Berdaulat	365–402 H (976–1012 M)
10	Sultan Makhdum Alaiddin Malik Mahmud Syah Johan Berdaulat	402–450 H (1012–1059 M)
11	Sultan Makhdum Alaiddin Mansyur syah Johan Berdaulat	450–470 H (1059–1078 M)
12	Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdullah Syah Johan Berdaulat	470–501 H (1078–1108 M)
13	Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ahmad Syah Johan Berdaulat	501–527 H (1108–1134 M)
14	Sultan Makhdum Alaiddin Malik Mahmud Syah Johan Berdaulat	527–551 H (1134–1158 M)
15	Sultan Makhdum Alaiddin Malik Usman Syah Johan Berdaulat	551–563 H (1158–1170 M)
16	Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Syah Johan Berdaulat	565–592 H (1170–1196 M)
17	Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Jalil Syah Johan Berdaulat	592–622 H (1196–1225 M)
18	Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat	622–662 H (1225–1263 M)
19	Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Syah Johan Berdaulat	662–692 H (1263–1292 M)

Adapun menurut H.M. Zainuddin, berdasar makalah Tgk. M. Junus Djamil dalam "Pekan Kebudayaan Aceh di Kutaraja" tahun 1958 yang diperbaiki dan disesuaikan perhitungan tahunnya dengan inskripsi yang didapatkan pada makam-makam di Pasai dan yang lain, urutan raja Peurelak sebagaimana termuat dalam tabel berikut (Zainuddin, 1961: 95–96; Slamet Mulyana, 2005: 132–133).[5]

Sultan ke-	Nama	Masa Pemerintahan
1	Sultan Alaidin Syah (Sayid Abdul Aziz), putra seorang putri Meurah atau Raja Peurelak	520–544 H (1161–1186 M)
2	Sultan Alaiddin Abdurahim Syah Ibnu Al Sayid Abdul Aziz	544–568 H (1186–1210 M)
3	Sultan Alaiddin Sayid Abbas Syah Ibnu Sayid Abdurahim Syah	568–594 H (1210–1236 M)
4	Sultan Alaiddin Mughayat Syah	594–597 H (1236–1239 M)
5	Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Kadir Syah (Orang Kaya Meurah Abdul Kadir)	597–641 H (1239–1243 M)
6	Sultan Makhdum Alaiddin Muhammad Amin Syah bin Malik Abdul Kadir	641–665 H (1243–1267 M)
7	Sultan Makhdum Abdul Malik Syah bin Muhammad Amin Syah	665–674 H (1267–1275 M)
8	Sultan Alaiddin Mahmud Syah	678–691 H (1280–1292 M)
9	Sultan Makhudum Alaiddin Malik Ibrahim Syah	678–695 H (1280–1296 M)
10	Sultan Alaiddin Malik Ibrahim Syah	(1296 M)

Pada tahun 553 H, masa pemerintahan Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Malik Syah Johan Berdaulat, terjadi perang saudara yang diakhiri dengan perjanjian *Alue Meuh*. Perlak dibagi dua, yaitu (1) Perlak Baroh, diperintah dinasti Azizah, dan (2) Perlak Tunong, di bawah pemerintahan dinasti Makhdum. Oleh karenanya pada masa itu ada dua sultan yang memerintah di Perlak, yaitu Sultan Alaiddin Sayid Maulana Mahmud Syah Johan Berdaulat, memerintah di Perlak Baroh pada tahun 976–988 M, berkedudukan di Bandar Perlak; serta Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ibrahim Syah Johan Berdaulat, memerintah di Perlak Tunong tahun 976-1012 M, berkedudukan di Bandar Khalifah (Pulungan, 2018: 336).

Zainuddin (1961: 94) menyebutkan bahwa ketatanegaraan atau pemerintahan Perlak masih sederhana, tidak seperti Pasai, Pidie, dan Aceh Besar. Kepala negerinya disebut *rajo* atau *raja*, sedang penguasa di bawahnya disebut *kejruen* dan *penghulu*.

3. Wilayah Kekuasaan

Secara geografis letak Kerajaan Perlak berada di ujung utara Pulau Sumatera, tepatnya di Aceh Timur, dengan pusat kerajaan berada di Bandar Perlak. Nama Bandar Perlak diubah menjadi Bandar Khalifah untuk mengenang rombongan pedagang dari Arab bernama Nakoda Khalifah (Pulungan, 2018: 334; Syahrul 2008: 40). Pada saat sekarang kondisi bekas ibukota Kerajaan Perlak berada di Aceh Timur, berupa lahan seluas lebih kurang 300 hektar, dan telah berubah menjadi sawah yang subur.

4. Masa Kejayaan

Sebelum Kesultanan Perlak berdiri, di Negeri Perlak telah berdiri sebuah kerajaan yang sederhana, bernama Kerajaan Perlak. Raja

yang berkuasa di kerajaan itu bergelar *meurah*, yang bermakna sama dengan "maharaja". Perkembangan Perlak semakin baik ketika dipimpin Pangeran Salman, seorang pangeran yang memiliki darah Kisra Persia. Keturunan Pangeran Salman inilah yang kemudian menikah dengan Muhammad Jafar Shidiq dan menjadi cikal bakal Kesultanan Perlak (Darmawijaya, 2010: 30).

Idhar Al Haq, sebuah naskah Melayu tua karya Abu Ishak Makarani Al Fasy, menyebutkan bahwa sekitar tahun 790 M sebuah kapal layar berlabuh di Bandar Perlak. Kapal tersebut membawa seratus juru dakwah pimpinan Nakhoda Khalifah, yang datang dari Teluk Cambay, Gujarat. Salah seorang juru dakwah, Ali bin Muhammad Jafar Shiddiq, merupakan seorang muslim Syiah yang memberontak terhadap Khalifah Makmun. Dalam pemberontakan itu Ali bin Muhammad Jafar shiddiq menderita kekalahan. Khalifah Makmun tidak memberi hukuman berat kepadanya dan hanya memerintahkan Ali bin Muhammad Jafar Shiddiq berdakwah ke luar negeri Arab. Atas dasar itulah Ali bin Muhammad Jafar Shiddiq ikut dalam rombongan seratus juru dakwah yang datang ke Nusantara. Setelah berlabuh di Bandar Perlak, Ali bin Muhammad Jafar Shiddiq menikah dengan putri istana Perlak. Putra pertama dari pernikahan itu Ali bin Muhammad Jafar Shiddiq, yang kemudian menjadi sultan pertama di Kesultanan Perlak tahun 840–864 M (Darmawijaya, 2010: 31). Setelah menjadi sultan ia diberi gelar Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Azis Syah.

Sebagai kerajaan Islam pertama Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Azis Syah lebih banyak memperhatikan pengaturan organisasi pemerintahan secara kuat (Pulungan, 2018: 335). Ia menikah dengan Khudawi binti Meurah Syahrir Nuwi, keponakan Tansyir Dewi, dan keturunannya kemudian menjadi penguasa Perlak yang berasal dari dinasti Sayid atau Dinasti Aziziyah (Syahrul, 2008: 40).

Sultan kedua, yakni Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Rahim Syah, merupakan keturunan langsung sultan pertama. Ia berkuasa sejak tahun 864 hingga 888 M. Kegiatan pada masa pemerintahannya dititikberatkan pada pembangunan pendidikan Islam dan kemajuan ekonomi. Pada tahun 250 H dibangun sebuah lembaga pendidikan Islam Dayah Bukit Ce Breek (Pulungan, 2018: 335; Syahrul, 2008: 41).

Sultan Abdul Rahim Syah digantikan putranya, Sultan Alaidin Syed Maulana Abbas Syah, yang memerintah sejak tahun 888 hingga 913 M (Darmawijaya, 2010: 31). Pada masa ini pembangunan Perlak tampak dalam berbagai lapangan kehidupan, di antaranya pertanian (lada dan hasil hutan), pertambangan (emas di daerah Alue Meuh), kesenian (ukir-ukiran dari gading gajah dan kayu rapai, seni baca al quran, qasidah, dan sebagainya). Selain itu, untuk peningkatan kemajuan ilmu pengetahuan, pada tahun 899 M didirikan lembaga pendidikan baru Dayah Cot di sebuah dataran Aramia, di sebelah selatan Bandar Perlak (Pulungan, 2018: 335).

Pada masa kekuasaan Sultan Alaiddin Sayid Maulana Abbas Syah aliran Islam Sunni mulai menyebar luas di Perlak, meskipun agama resmi Perlak adalah Islam aliran Syiah. Hal ini dapat dipahami karena pendiri Kerajaan Islam Perlak merupakan cucu Imam Syiah Jafar Shodik. Oleh karena itulah kemudian sering terjadi konflik di antara kedua aliran ini (Syahrul, 2008: 42).

Setelah Sultan Alaiddin Syed Maulana Abbas Syah wafat tidak ada pelantikan sultan baru karena suasana di kesultanan Perlak tidak kondusif. Pada saat itu terjadi perang saudara antara pengikut Ahlus sunnah wal jamaah (sunni) dan pengikut Syiah (Darmawijaya, 2010: 31). Baru dua tahun kemudian Syed Maulana Ali Mughayat Syah dilantik sebagai sultan. Ia hanya berkuasa selama tiga tahun, dari tahun 915 hingga 918 M. Pada akhir masa pemerintahannya terjadi lagi pertikaian antara pengikut Suni dan pengikut Syiah. Dalam pertikaian ini kaum Sunni memperoleh kemenangan, sehingga sultan yang berkuasa di Kesultanan Perlak kemudian berasal dari dinasti Makhdum yang merupakan keturunan bangsawan asli Perlak (Meurah) dan beraliran Ahlus Sunnah atau sunni. Pemerintahan Sayyid atau dinasti Azizah yang beraliran Syiah pun tumbang (Darmawijaya, 2010; Pulungan, 2018: 336).

Berikut tiga sultan setelah Sultan Syed Maulana Ali Mughayat Syah dan peristiwa penting yang dialaminya.

(1) Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Kadir Syah Johan Berdaulat, memerintah tahun 918–922 M. Kegiatan utama pada masa pemerintahannya adalah memperkuat kembali pemerintahan yang selama ini kacau karena peperangan.

(2) Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Amin Syah Johan Berdaulat, memerintah tahun 922–946 M. Sebelum diangkat menjadi sultan ia merupakan seorang pengajar di Dayah Tinggi Cot Kala. Ia berusaha menyatukan kembali pertentangan antara keluarga Makhdum dan Azizah dengan cara, misalnya, mengangkat Sayyid Maulana Abdullah—keturunan Azizah—menjadi *mangkubumi*.

(3) Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Malik Syah Johan Berdaulat, memerintah tahun 946–973 M. Pada masa pemerintahannya kembali terjadi perang saudara antara kaum sunni dan syiah, yang berlangsung selama empat tahun, dan dapat diselesaikan dengan perjanjian *Alue Meuh* pada tanggal 10 Muharram 335 H. Isi perjanjian membagi wilayah Kesultanan Perlak menjadi dua, yaitu Perlak Baroh yang diperintah oleh dinasti Azizah dan Perlak Tunong yang dipemerintah dinasti Makhdum (Darmawijaya, 2010: 32). Perlak bagian pesisir dikuasai oleh kaum syiah, dipimpin oleh Sultan Alaiddin Syed Maulana Syah, yang berkuasa pada tahun 976–988 M; sedang Perlak pedalaman dikuasai oleh kaum sunni, dipimpin oleh Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ibrahim Syah Johan berdaulat, yang memerintah

pada tahun 986–1023 M (Darmawijaya, 2010: 32). Secara sederhana Kerajaan Peurelak dibagi menjadi dua, yaitu Perlak Pesisir dan Perlak Pedalaman (Usmani, 2016: 284).

Pada tahun 986 M kerajaan Buddha Śrîwijaya melakukan penyerangan terhadap Kesultanan Perlak Pesisir. Perang di antara kedua kerajaan ini berlangsung hebat. Dalam perang itu Sultan Perlak Pesisir Alaidin Syed Maulana Mahmud Syah gugur. Kesultanan Perlak secara keseluruhan akhirnya dikuasai oleh Sultan Perlak Pedalaman yang beraliran sunni dengan Sultan Makhdhum Alaiddin Malik Ibrahim Syah Johan Berdaulat sebagai penguasa. Sultan Perlak Pedalaman kemudian memimpin perjuangan rakyat Perlak menentang Śrîwijaya. Perang berakhir pada tahun 1006 M ketika Śrîwijaya mengundurkan diri karena menghadapi Kerajaan Darmawangsa di Pulau Jawa (Darmawijaya, 2010: 31–32; Syamsu, 1996; Usmani, 2016: 284). Setelah perang berakhir Kesultanan Perlak diperintah oleh keturunan Sultan Malik Ibrahim Syah. Selain itu sultan berikutnya berasal dari keturunan Johan Berdaulat (Syamsu, 1996: 16).

Berikut beberapa sultan penting setelah Sultan Malik Ibrahim Syah.

(1) Sultan Makhdum Alaiddin Malik Mansyur Syah Johan Berdaulat (1059–1078 M), melakukan pembinaan daerah-daerah hunian baru yang dibuka selama penyerangan Srîwijaya, seperti daerah Salasari.

(2) Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdullah Syah Johan Berdaulat (1078–1109), memperisteri Syarifah Hazizah untuk menghindari pertikaian antara para *sayyid* dan para *sayyid maulana* dan dari perkawinan itu lahirlah seorang putri, Nurul A'La, yang kelak berperan penting dalam Kesultanan Perlak.

(3) Sultan Makhdum Alaiddin Malik Achmad Syah Johan Berdaulat (1109–1135 M), mengangkat Nurul A'la binti malik Abdullah Shah sebagai kepala urusan keuangan (*baitul mal*), dan sejak itu peran wanita mulai tampak dalam pemerintahan.

(4) Sultan Makhdum Alaiddin Malik Mahmud Syah Johan Berdaulat (1135–1160 M), yang pada masa pemerintahannya ada "gugatan" terhadap peran wanita dalam pemerintahan sehingga mengakibatkan mundurnya putri yang diberi tugas besar di kesultanan.

(5) Sultan Makhdum Alaiddin Malik Usman Syah Johan Berdaulat (1173–1200 M), berusaha meningkatkan syiar Islam, dan berhasil mengislamkan Kerajaan Indra Purba dan Kerajaan Seudu.

(6) Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Jalil Syah Johan Berdaulat (1200–1230 M), mencapai kemajuan dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah Islam (Pulungan, 2018: 337).

5. Kepercayaan

Kepercayaan atau agama yang dianut masyarakat Perlak diketahui dari catatan Marcopolo. Menurut Marcopolo sebagian besar raja yang ada di Pulau Sumatera merupakan orang-orang Islam (Moor), sedangkan beberapa lainnya merupakan orang *pagan*. Di negeri yang dipimpin oleh orang *pagan* terdapat kepercayaan di antara masyarakatnya memakan musuh yang tertangkap. Raja yang menguasai wilayah di terusan sepanjang Aceh hingga Palembang adalah orang Islam (Moor), sedangkan dari Palembang hingga Gamispola dikuasai oleh orang-orang *pagan*. Di pedalaman juga dipimpin oleh orang *pagan* (Pires, 2014: 195). Berdasarkan catatan tersebut diketahui bahwa di Perlak diduga telah ada Islam dan masyarakat di luarnya beragama *pagan* atau sepercayaan setempat. Hal yang sama juga dijumpai di sepanjang pesisir timur Sumatera.

Setelah menjadi sultan di kerajaan Islam, Raja Perlak menjadi tokoh yang membantu syiar Islam di lingkungan kekuasaannya, bahkan beberapa Sultan Perlak membantu kegiatan pendidikan Islam dan penyebaran juru dakwah. Selain aliran Syiah di Perlak juga berkembang ahlus sunnah wal jamaah. Hal ini memperlihatkan hadirnya Islam yang beraneka, meskipun kemudian menjadi pangkal terjadinya perang saudara di dalam lingkungan Kesultanan Perlak.

Dengan demikian proses penyebaran Islam di Perlak, sebagaimana pendapat Tjandrasasmita (1976: 85) tentang perkenalan Islam di Indonesia, diperkirakan datang secara berangsur-angsur dan secara damai. Adapun yang membawa agama itu para pedagang, penguasa dan pemimpin masyarakat, sufi, penyalin, wali, kyai, dan guru. Adapun saluran Islamisasi melalui kegiatan perdagangan dan hubungan politik yang terjadi di Perlak. Pernikahan orang-orang Islam pendatang dengan putri penguasa dan kaum ningrat setempat mempercepat Islamisasi. Di samping itu pembangunan lembaga keagamaan seperti pendidikan Islam atau pesantren dan madrasah menjadi salah satu sarana mempercepat proses Islamisasi pula. Kehadiran penganut tarekat atau mazhab tertentu juga menjadi sarana penyebaran Islam, meskipun konflik agama yang didasarkan perbedaan mazhab juga terjadi dalam kontestasi politik di Perlak. Sudah barangtentu pengislaman juga melalui sarana kebudayaan tradisional, seperti arsitektur, kesusasteraan, dan kesenian.

Dengan demikian masuknya Islam ke Nusantara, sebagaimana kesimpulan Aboebakar Aceh (2018), mula pertama di Aceh dan tidak mungkin di daerah lain. Penyiar Islam pertama di Indonesia tidak hanya para saudagar India dari Gujarat, tetapi juga para mubaligh Islam bangsa Arab. Adapun mazhab pertama yang dipeluk masyarakat Aceh ialah Syiah dan Syafii.

Peta Pantai Lamreh, Aceh Besar, Provinsi Aceh, salah satu pantai yang pernah menjadi saksi kehadiran pedagang asing lewat jalur laut dan munculnya kerajaan Islam awal
Sumber Peta: Google Map

6. Keragaman Masyarakat

Berdasarkan catatan Marcopolo ada dua atau tiga kelompok agama atau kepercayaan masyarakat Perlak, yaitu orang Islam, orang *pagan*, dan orang beragama Hindu-Buddha. Sementara itu masyarakatnya terdiri atas pedagang dan saudagar muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat; juru dakwah atau ulama Islam yang aktif menyebarkan Islam; keluarga bangsawan yang terdiri atas sultan dan kelompok penguasa yang sudah tentu memiliki status sosial tinggi, bangsawan dengan gelar *meurah*; serta petani yang menghasilkan komoditi seperti padi, lada, dan hasil hutan (madu, kamper, kemenyan, dan sebagainya).

Zainuddin (1961: 94) menyebut penduduk negeri Peurelak serumpun dengan penduduk semenanjung Melayu, terutama dari bangsa Semang (bangsa laut), Jakun, dan Lanun yang pindah dari Kedah, Pahang, Perak, dan Kelantan serta mempunyai hubungan darah dengan bangsa Siam, Campa (Kamboja), dan Birma. Hal ini tampak dari letak strategis Perlak yang berseberangan dengan Pulau Penang dan Pulau Penang semula merupakan wilayah Kerajaan Kedah. Meskipun demikian belum dapat dipastikan kapan bangsa-bangsa itu berdatangan atau mengalir ke Perlak. Ada dugaan peristiwa itu terjadi sejak ekspansi Iskandar Zulkarnain dari Junani atau pada masa Raja Surancolo (Culia) menyerang negeri Culan (Gangganegara), Siam, dan Perak (Kelangkiu = Ganggayu) sebagaimana disebut dalam *Sejarah Melayu* karya Abdullah Munchi. Dengan demikian teranglah penduduk Perlak tertua berasal dari Melayu tua.

7. Komoditi Perdagangan

Perlak menghasilkan komoditi menarik bagi pedagang asing, terutama lada. Menurut musafir Arab dan Tionghoa, penanaman

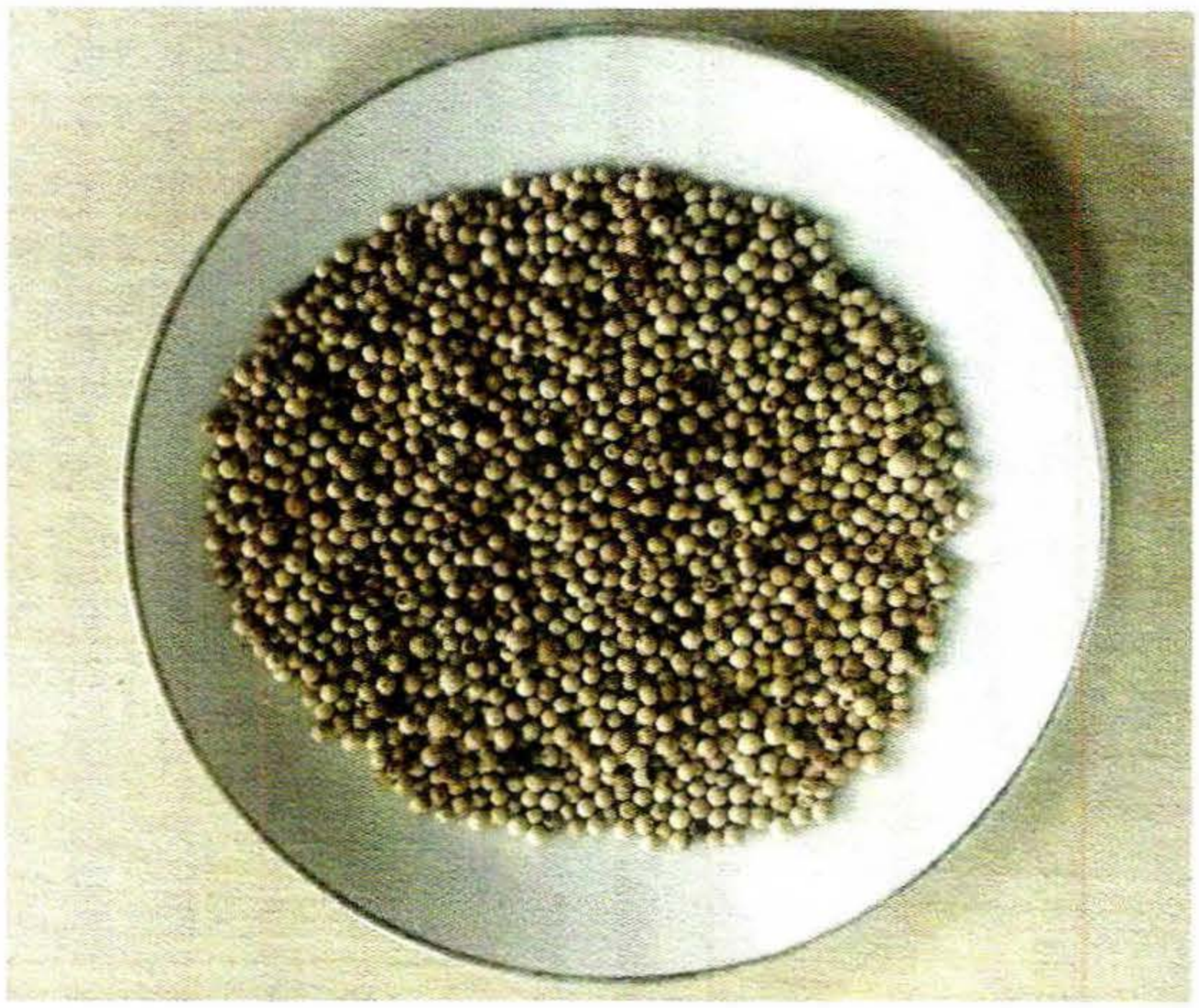

Lada, salah satu jenis komoditi Peurelak.
Sumber: Direktorat Sejarah

lada di Aceh telah dikenal sejak abad ke-9, meliputi daerah Nampoli, Perlak, Lamuri, dan Samudera. Lada Aceh berasal dari Malagasi, yang pada abad ke-7–8 telah mengenal penanaman lada. Hasil lada Malagasi menjadi bahan dagangan oleh pedagang-pedagang Arab dan Persi di sepanjang pantai Asia dan Benua Eropa. Mereka, yang sering berlayar ke pantai timur Sumatera, membawa dagangan lada dan mencoba menanamnya di Aceh. Sementara itu Perlak menjadi bandar utama di pantai timur Sumatera bagian utara untuk ekspor lada. Karena ekspor lada mendatangkan banyak keuntungan, maka pedagang-pedagang asing dari Mesir, Persi, dan Gujarat, yang datang di pelabuhan Perlak dan kemudian menetap di situ ingin menguasai seluruh hasil lada yang semula dikuasai oleh Marah Perlak. Salah seorang pedagang Arab menikah dengan putri Marah Perlak. Dari perkawinan itu lahir Sayid Abdul Aziz. Dengan dukungan para pedagang asing yang menganut agama Islam aliran syiah Sayid Abdul Aziz berhasil merebut kekuasaan Marah Perlak dan kemudian mendirikan Kesultanan Perlak pada tahun 1161 M. Sayid dikukuhkan sebagai Sultan Perlak degan julukan Alaiddin Syah. Kesultanan Perlak yang dipimpin oleh keturunan Sayid Abdul Aziz mendapat dukungan penuh pedagang asing dari Arab, Mesir, Persi, dan Gujarat yang menganut aliran Syiah. Dengan demikian latar belakang perebutan kekuasaan antara dinasti Sayid Aziz dan dinasti Marah adalah perebutan lada yang diekspor melalui Bandar Perlak (Slamet Mulyana, 2005: 134–135).

8. Kesenian

Selain dikenal sebagai kota dan kerajaan Islam, sudah tentu Perlak juga menghasilkan karya-karya seni yang bernafaskan Islam. Bukti-buktinya dapat ditelusuri dari tinggalan arkeologis berupa batu nisan atau makam yang dijumpai di situs-situs makam di Perlak. Berdasarkan kajian terhadap batu nisan yang ada di beberapa situs

kompleks makam Perlak, dijumpai produk seni hias Islam Perlak berupa motif hias dan ukiran batu nisan. Selain itu karya seni lain berupa ukir-ukiran dari gading gajah dan kayu rapai, seni baca al Quran, dan qasidah.

Orang Perlak juga memiliki seni bangunan atau arsitektur. Sumber lokal mengisahkan beberapa kali pembangunan Perlak sebagai sebuah bandar akibat konflik internal, namun kemampuan orang Perlak membangun permukiman baru, termasuk istana dan masjid, kota bandar itu kembali tegak. Keberadaan Perlak sebagai bandar pelabuhan penting pada masa itu menjadi bukti kemampuan arsitektur Perlak, hanya bukti fisik keberadaannya dalam bentuk tinggalan kota yang di dalamnya terdapat istana dan masjid serta bangunan permukiman hingga kini belum dijumpai. Hal ini dapat dimaklumi karena Kerajaan Perlak pernah mengalami beberapa kali konflik dan perang saudara. Pun Perlak mengalami perang dan serangan dari luar Perlak, antara lain Śrîwijaya, sehingga tidak lagi dijumpai bangunan atau bukti-bukti artefak dan struktur bangunan dari masanya. Mungkin juga bangunan-bangunan tersebut telah musnah termakan usia. Hanya saja tinggalan berupa batu nisan dan makam yang dapat menjadi bukti sejarah bahawa Perlak telah menghasilkan karya seni.

Hasjmy (1983: 47) menyimpulkan bahwa Kerajaan Perlak telah berkebudayaan dan bertamaddun, antara lain ilmu pengetahuan telah berkembang dan ada satu pusat ilmu pengetahuan "Dayah Cotkala" di bawah pimpinan ulama besar Teungku Muhammad Amin yang lebih dikenal dengan Teungku Cotkala. Selain itu ada hubungan luar negeri atau hubungan diplomatik antara Peurelak dan Arab, Persia, India, Malaka, dan lain-lain. Demikian pula ada angkatan perang yang teratur; ada kemakmuran dari segi ekonomi yang baik; dan perdapat "partai-partai politik" syiah dan ahlussunnah.

9. Kota dan Penduduk

Perihal gambaran mengenai kota Perlak sebagai ibukota dari kerajaan Islam pada masa lalu diperoleh dari catatan Marcopolo, seorang penjelajah dari Venesia yang pada tahun 1292 Masehi mengunjungi Perlak dan Pasai, dalam perjalanannya pulang dari Tiongkok. Catatan dari Marcopolo menggambarkan ibukota Kerajaan Perlak merupakan sebuah kota amat ramai dan dikunjungi oleh saudagar-saudagar muslimin. Adapun yang dimaksud dengan saudagar-saudagar muslimin adalah orang-orang Arab, Persi, dan India, yang sekaligus melakukan tugas dawah (Saipuddin, 1979: 212). Para saudagar muslimin yang berasal dari berbagai negeri tersebut memperlihatkan bahwa kota Perlak merupakan kota bertaraf internasional. Komoditi yang menarik para saudagar datang ke Perlak, misalnya lada, membuat kota Perlak berkembang dan maju dari segi ekonomi serta kemudian berkembang menjadi ibukota kerajaan yang maju dan dipimpin sejumlah sultan yang berkuasa dari abad ke-9 hingga abad ke-13 M.

Dalam satu riwayat dinyatakan bahwa ibukota Kesultanan Peurelak, Bandar Khalifah, dibangun dan didirikan pada tahun 225 H atau 840 M. Nama kota ini diberikan untuk mengenang nama kepala rombongan pedagang dari Arab bernama Nakoda Khalifah. Sebelumnya kota itu bernama Bandar Perlak, terletak di Aceh Timur, yang kini telah berubah menjadi lahan sawah yang subur. Kemudian nama kota itu berubah menjadi Bandar Khalifah.

Kota Perlak menjadi kota yang strategis dalam jalur perniagaan dan pelayaran dari Arab, India, hingga Tiongkok. Para pemimpin Perlak melihat bahwa penguasaan terhadap kepemimpinan di kota kerajaan Perlak menjadi penting dan akan membuat penguasanya menjadi kaya raya. Oleh karena itu, dalam beberapa periode kepemimpinan, seringkali terjadi konflik internal.

Penduduk kota Perlak, dan juga Pasai, diketahui telah memeluk agama Islam. Oleh karenanya dapat diduga bahwa bangunan tempat ibadah umat Islam untuk shalat Jumat diperkirakan telah berdiri di kota tersebut. Selain itu tempat tinggal sultan atau pemimpin Perlak yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan, dan sering dikenal sebagai keraton atau istana, diduga telah dibangun di Perlak. Demikian pula rumah para penduduk dan tempat tinggal para pendatang atau pedagang diduga telah ada dan berkembang. Sebagai ibukota kerajaan yang sering disinggahi kapal-kapal niaga sudah tentu di Perlak terdapat dermaga atau pelabuhan tempat kapal-kapal bersandar. Di samping itu pasar-pasar tempat para saudagar dan pembeli bertemu dan bertransaksi untuk sejumlah komoditi tentu telah dibangun pula.

Dengan demikian Perlak sebagai ibukota kerajaan diduga telah maju dan memiliki suatu bangunan dan sistem tata kota yang maju pada masanya.

10. Peran Wanita

Peran sosok perempuan dalam lintas sejarah Kesultanan Peurelak dapat dijumpai pada tiga sosok wanita, yaitu Nurul A'La, Ganggang Sari, dan Ratna Keumala (Syahrul, 2008: 3). Mereka masing-masing memiliki peran penting pada masanya dan menoreh sejarah yang perlu diingat pada masa kini.

Nurul Ala adalah puteri Sultan Perlak ke sebelas, Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdullah Syah Johan Berdaulat (1078–1108 M), merupakan *mangkubumi* atau perdana menteri wanita pada masa Sultan Makhdum Alaiddin Malik Ahmad Syah Johan Berdaulat (1108–1134 M). Selain sebagai perdana menteri, Nurul Ala juga menjabat sebagai panglima perang gagah berani. Selain Nurul Ala pada masa yang sama juga terdapat seorang putri yang diangkat sebagai bendahara kerajaan, Nurul Qadimah, yang berperan dalam bidang ekonomi kerajaan.

Untuk mengenang riwayat Nurul Ala masyarakat mengabadikannya dalam bentuk cerita rakyat yang dikenal dengan *Hikayat Putri Nurul Ala*. Adapun kisahnya sebagai berikut:

> Alkisah dahulu ada seorang raja yang berkuasa di Perlak, yang wilayahnya terletak di Blang Perlak, antara Krueng Tuan dan Krueng Seumanah. Setelah lama menikah raja itu belum mempunyai keturunan, sehingga bernazar jika diberi putra ia akan memandikannya di laut dekat Kuala Perlak. Tidak lama kemudian raja dikaruniai seorang putra dan diberi nama Ahmad Branta dan seorang putri yang diberi nama Nurul Ala. Setelah putranya besar raja menunaikan nazarnya memandikan putranya di laut. Sesampai di Kuala Perlak ia berhenti dan membuat rakit, lalu memandikan putranya di atas rakit dengan upacara khusus. Setelah apacara memandikan selesai, tiba-tiba datang ikan besar menerkam dan mendorong putra raja ke tengah laut. Raja dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut terkesima hingga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka pulang dengan membawa duka.
>
> Sesampai di istana, Raja Perlak bertanya kepada ahli nujum perihal anaknya. Ahli nujum memberi jawaban bahwa anaknya masih hidup dan diselamatkan oleh nakhoda kapal dan dibawa ke negeri Jayakarta. Raja Perlak juga diberi saran tidak perlu khawatir karena kelak Nurul Ala, setelah dewasa, akan membawa kakaknya kembali ke Perlak dengan perahu yang terbuat dari pohon perlak yang ditebang di Sungai Peunaron. Mendengar jawaban ahli nujum itu raja dan permaisuri sedikit lega meskipun tetap menyimpan.
>
> Untuk mengingatkan agar Nurul Ala mencari kakaknya, dibuatlah syair khusus untuknya. Inang istana Perlak selalu mendendangkan lagu tersebut untuk Nurul Ala kecil dengan harapan ketika dewasa mengingat isi pesan syair tersebut.

Adapun bunyi syair tersebut sebagai berikut:

Allah hai do – doda idang

Rangkang di blang tameh bangak

Beuridjang rejeuk putroe sedang

Tadjak tebang perlak raja

Allah hai do – doda idang

Tjitjem subang djipho meugisa

Ngon tee rajeuk bungong keumang

Kajee disimpang peugot keu behtera

Djak kutimang bungong meurak

Kejee sibak dileuen astana

Beuridjang rajeuk putih meuprak

Bedjeuet tamat beliong raja

Djak kutimang bungong langsat

Bee djih mangat bungong langa

Beuridjang rajeuk puteh lumat

Bak djeuet tamat keumudeue bechtera

Allah hao do doda idi

Anoe pasi rijeuk tempa

Beuridjang rajeuk tjut patihdi

Gantoe abi adoen ta mita

Allah hai do doda idang

Bungong mantjang rhot meukeuba

Bak ridjang rajeuk bungong keumang

Djak tueng abang didjawabkatera

Djak kutimang bungong sukon

Bak sitalon boh hantomna

Beuridjang rajeuk puteh sabun

Beu ek tapeutron bechtera raja

Bukon sayang loneu simplah

Lam geu kabah soe nguj hana

Bukan sajang lon eu nang mah

Dalam sosah ingat keubanta

Bukan sajang lone u peutoe

Peunoh asue meuih permata

Bukan saying lone u putroe

Da wok geumue ro ie mata

Terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:

Mari kuayun kubuaikan

Rangkang dipadang tiang bangka

Lekaslah besar putri sedang

Pergilah tebang Perlak raja

Mari kubuai dan kudendang

Unggas subang terbang berkisar

Jikalah besar bunga kembang

Kayu disimpang butkan behtera
Kembang merak mari kutimang
Kayu sebatang muka istana
Lekaslah besar putih gemerlang
Sanggup memegang beliung raja
Mari kutimang bunga langsat
Bau yang sedap bunga kenanga
Lekaslah besar putih lumat
Cakap memegang kemudi betera
Allah hai putri maru kubuai
Pasir dipantai riak menimpa
Lekas remaja bunga bolai
Pengganti ayah carilah kekanda
Allah hai putri mari kutimbang
Bunga bacang gugur merata
Lekaslah besar wahai kembang
Jemput abang di jawakatera
Mari kupanglu bunga sukun
Pohon sitaloh buah tak ada
Lekaslah besar putih sabun
Sanggup menurun betera raja
Saya terharu memandang simplah
Tersimpan indah yang pakai tak ada
Alangkah saying bunda dan ayah
Dalam susah mengenang bata
Sedih hatiku melihat peti
Penuh berisi intan permata
Sayang sekali permaisuri
Lalai berurai air mata

Setelah dewasa Nurul Ala mengingat semua pesan yang ada dalam syair. Ia kemudian minta dibuatkan perahu pohon perlak yang tumbuh di Sungai Peunaron. Permintaan itu dikabulkan. Setelah selesai dan saatnya ditarik, perahu tidak beranjak dari tempatnya. Nurul Ala sedih. Pada malam harinya ia bermimpi menarik perahu itu ke laut dengan keponakannya, Nurul Kadimah, dibungkus kain kafan sebagai bantalan perahu, sementara perahu ditarik dengan sehelai rambut keponakannya itu.

Nurul Ala semakin sedih. Nurul Kadimah rela menjadi bantalan perahu demi mencari kerabatnya yang hilang. Setelah semua sepakat, Nurul Kadimah dibungkus kain kafan dan ditempatkan di bawah perahu sebagai bantalan, sedangkan Nurul Ala menarik perahu dengan sehelai rambut keponakannya itu sementara orang-orang mendorong dari belakang. Perahu bergerak dan akhirnya sampai ke laut.

Nurul Ala diiring para pengawal melaju ke Jayakarta. Sesampainya di sana ia diserang dan menderita kekalahan, tetapi ia sempat melontarkan cincin kakaknya hingga terjatuh di depan Raja Jayakarta. Setelah melihat cincin itu Raja Jayakarta tahu bahwa putri cantik itu adiknya. Ia lalu pergi sendiri mengejar adiknya dan setelah bertemu keduanya tinggal bersama. Nurul Ala menerima lamaran Prabu Tapa dengan syarat harus pulang dulu ke Perlak. Nurul Ala pulang diantar Prabu Tapa. Ketika tiba di Perlak Prabu Tapa disuruh tinggal di kampung Tjek Brek, sementara ia tinggal di Paya Meuligoe. Prabu Tapa menagih janji Nurul Ala. Nurul Ala minta tenggat tiga bulan untuk menyiapkan segalanya. Namun selama tiga bulan itu ia menyiapkan ilmu untuk melawan Prabu Tapa. Sementara itu kakaknya tiba di Perlak tetapi tidak lama kemudian mangkat. Mengetahui hal itu Nurul Ala takut dan lari ke simpang Peunaron di Blang Perak. Prabu Tapa marah dan mengejar Nurul Ala yang lari ke Krueng Peunaron. Nurul Ala tiba di Lubok Pancaningan dan meninggal di sana. Prabu Tapa bertambah marah ketika tidak menemukan Nurul Ala dan membunuh setiap orang di kampung Beuringan. Oleh karenanya kemudian orang-orang menyebut kampung itu dengan Kampung Teungku di Bungeh (Zainuddin, 1961: 99–104; Syahrul, 2008: 44–49).

Selain Nurul Ala, wanita Perlak lain yang dapat dikenang adalah Ratna Kemala, putri Sultan Malik Muhammad Amin Syah, yang menikah dengan Raja Malaka Sultan Muhammad Syah (Hasjmy,1983: 100). Menurut *Tarsilah Brunai*, Ratna Kemala berhasil mengislamkan rakyat dan Raja Tumasik (Singapura lama), Raja Kecil Besar Putera Nila Utama, yang kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Syah.[6] Di samping itu terdapat Ganggang Sari, putri Sultan Perlak ke-17 Sultan Makhdum Alaiddin Muhammad Aminsyah, yang dikawinkan dengan Malikus Shaleh. Putri ini berhasil mendorong suaminya menyatukan wilayah Perlak dan Salasari ke dalam kesultanan baru yang diberi nama Samudera Pasai pada tahun 1261 M dan sekaligus menjadi akhir kesultanan Perlak (Syahrul, 2008:3). Kedua perempuan yang disebut terakhir

ini berperan dalam mempererat hubungan dua kerajaan yang bertetangga, Peurelak dan Malaka, Peurelak dan Salasari (Samudera Pasai), melalui perkawinan politik sebagai suatu ciri diplomasi *meubisan* (Hasjmy, 1983: 100).

Jejak dan peran perempuan Kesultanan Islam itu kelak diikuti oleh perempuan-perempuan Aceh pada masa berikutnya, baik di dalam lingkungan Kesultanan Islam Samudera Pasai maupun di dalam lingkungan Kerajaan Islam Aceh Darrusalam, antara lain Laksamana Kemalahayati, Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Syah, Cut Nyak Dien, Cut Nyak Meutia, Teungku Fakinah, serta beberapa perempuan lainnya.[7] Sebagian di anatara mereka dikenal sebagai sosok wanita pahlawan Aceh yang berperan di berbagai lapangan kehidupan, seperti pemerintahan dan pendidikan agama, serta juga turut berjuang menghadapi bangsa asing yang berniat menduduki Aceh.

11. Masa Akhir

Sultan Makhdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Syah II Johan Berdaulat (1267–1293 M) menjadi sultan terakhir Kesultanan Perlak karena tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris kerajaan. Ia memiliki tiga orang putri, yakni Latifah Hanim, Nur Azizah, dan Nur Khatimah (Hasjmy,1993). Setelah sultan wafat, Perlak digabung dengan Kesultanan Samudera Pasai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik al Zahir (1297–1326 M), putra al Malik Al Saleh di Pasai (Darmawijaya, 2010: 34).

Selain Sultan Perlak terakhir tidak memiliki putra sebagai penerus, sedang tiga orang putrinya tidak dapat memiliki hak sebagai pemimpin di kerajaan Islam, Sultan Muhammad Malik al Zahir yang merupakan raja Pasai, putra Sultan Pasai Malikus As Saleh, menikah dengan Ganggang Sari yang berasal dari Perlak. Hal itu menjadi salah satu faktor penggabungan Kerajaan Perlak dengan Kesultanan Samudera Pasai (Pulungan, 2018: 338).

Faktor lain yang turut mendorong runtuhnya kejayaan Kesultanan Perlak adalah seringnya terjadi perang saudara di dalam lingkungan kesultanan yang disebabkan perbedaan paham dinasti Azizah dengan penguasa yang merupakan keturunan bangsawan asli Perlak. Hal ini ditambah dengan perbedaan paham aliran keagamaan yang dianut kedua dinasti, yaitu aliran syiah yang dianut dinasti Azizah dan aliran ahlus sunnah wal jamaah yang dianut oleh dinasti *meurah* atau *makhdum*. Oleh karena itu para pedagang dan pendatang menghindari Perlak dan bergeser ke kota-kota pelabuhan lain di pesisir timur Sumatera yang aman dan maju seperti Pasai.

Adapun Faktor eksternal yang mendorong keruntuhan Kesultanan Perlak adalah bangkitnya Pasai sebagai sebuah kesultanan Islam yang ditopang oleh peningkatan pelabuhan pesisir Pasai. Sultan

Pasai menerapkan strategi ekonomi untuk memajukan negerinya dengan memindahkan ibukota pemerintahan dari Samudera ke pesisir kota pelabuhan Pasai, sehingga Pasai menjadi ramai dan berkembang. Bisa jadi ketersediaan komoditi yang dibutuhkan para pedagang lebih mudah diperoleh di Pasai daripada di Perlak. Catatan Tome Pires menyebutkan barang-barang dagangan yang diproduksi di Sumatera, di antaranya emas dalam jumlah sangat besar, dua jenis kamper yang bisa di makan, merica, sutra, kapur barus dan tanaman obat *lignaloe*. Di samping itu wilayah ini juga menghasilkan madu, lilin, tar belerang, kapas, serta kayu rotan dalam jumlah besar yang kemudian dijadikan alas tidur atau keset. Bahan-bahan ini digunakan seperti sabut atau *esparto* yang berfungsi untuk mengikat (Pires, 2014: 194).

Lebih lanjut Pires menyatakan bahwa wilayah ini juga memproduksi beras dalam jumlah besar, baik beras putih maupun yang masih dalam bentuk gabah; daging dan ikan yang berlimpah, termasuk ikan terubuk (*shad*) yang jumlahnya sama banyak dengan yang ada di Azamor; persediaan minyak yang besar; berbagai jenis anggur termasuk tampoi yang rasanya hampir sama dengan anggur produksi Eropa; buah-buahan yang sangat banyak, termasuk di antaranya durian, buah yang tentu; lebih enak dan lezat dibandingkan buah lainnya (Pires, 2014: 194–195). Walaupun komoditi tersebut barangkali dapat diperoleh di Perlak, namun karena faktor keamananan menjadi pertimbangan para pedagang beralih ke kota lain, yakni Pasai, yang mulai tumbuh dan memberi rasa aman.

(Endnotes)

1 A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1981.

2 Beberapa naskah tua seperti *Kitab Idharul Haqq*, dan *Kitab Tazkirah Thabakat Jumu Sultan As Salathin* yang digunakan oleh Hasjmy untuk memberikan gambaran tentang sejarah dan raja-raja di kerajaan Peurelak digunakan sebagai dasar uraian. Meskipun diakui bahwa hingga kini sumber-sumber tersebut masih menjadi perdebatan para ahli perihal keabsahannya atupun kebenarannya.

3 Selain ketiga teori tersebut, masih ada ahli yang mengemukakan pendapatnya perihal masuknya Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa Islam berasal dari Cina, sehingga memunculkan teori Islam ke-empat, yaitu dari Cina. Lihat Mundzirin Yusuf, dkk, 2006. *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka. Lihat juga tulisan Tan Tan Sen. 2019. "Cheng Ho Penyebar Islam dari China ke Nusantara". Jakarta: Kompas.

4 Sebutan *sayyid* menunjukkan bahwa ia keturunan Ahl al-Bait dan sebutan *syah* menunjukkan keturunan bangsawan Persia yang menganut aliran Syiah. Lihat Ahmad Rofi Usmani. 2016. *Jejak-jejak Islam. Kamus Sejarah dan Peradaban Islam dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Penerbit Bunyan, hlm. 283.

5 Urutan nama sultan yang memerintah di kesultanan Peurelak yang disusun oleh Zainuddin ini sejalan dan cocok dengan pendapat Slamet Mulyana dalam buku *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*. Jakarta: LKis. 2005. hlm.132-133.

6 Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al Sufrii, *Tursilah Brunai*, hlm.84.

7 Lihat Pocut Haslinda Syahrul (2008) *Perempuan Aceh Dalam Lintas Sejarah Abad VII-XXI*. Jakarta: Pelita Hidup Insani; Hasjmy. (1996). *Wanita Aceh sebagai negarawan dan Panglima Perang*. Bulan Bintang.

— 5 —

Kerajaan Barus
(1524-1668 M)

1. Barus sebagai Kota Kuna dan Kota Pelabuhan

Barus termasuk kelompok kota kuna yang terkenal di Asia sejak sekurang-kurangnya abad ke-6 M berkat hasil hutannya, terutama kamper, kemenyan, serta emas. Selain itu nama Barus juga muncul dalam sejarah peradaban Melayu lewat Hamzah Fansuri, seorang penyair sufi terkenal (Guillot, 2017). Selain dikenal sebagai nama kota kuna di Sumatera, Barus dikenal sebagai kerajaan sebagaimana diuraikan Tome Pires dalam catatan perjalanannya. Barus (*Baruez*) merupakan salah satu kerajaan di antara di banyak kerajaan di Sumatera (Tome Pires, 2014: 194). Kerajaan itu juga disebut sebagai kerajaan yang telah Islam (Moor) di antara beberapa kerajaan lain yang masih menganut kepercayaan *pagan* (Pires, 2014:195).

Tome Pires (Pires, 2014: 227), menyebut Kerajaan Barus sebagai sebuah kerajaan yang sangat kaya, terdapat persinggahan bagi emas, sutra, kemenyan, kamper, tanaman obat *lignaloe*, lilin, madu, dan barang dagangan lainnya. Komoditi inilah yang menjadikan Kerajaan Barus lebih makmur dibanding kerajaan lain. Kerajaan ini—yang juga dikenal dengan nama Panchur atau Pansur (*Fansur*)—menjadi ujung tombak perdagangan di Sumatera, bahkan dapat dikatakan kemenyan yang berasal dari Barus, selain dari Tico dan Priaman, berwarna sangat putih dan banyak ditemukan di Sumatera. Orang-orang Gujarat menyebutnya Panchur, begitu juga dengan orang-orang Persia, Arab, Keling, dan Bengal. Meskipun demikian orang Sumatera menyebutnya Barus (*Baruus*), yang merupakan satu nama dengan Panchur atau Pansur (*Fansur.*

Ketiga kerajaan yang disebut Fansur, Tico, dan Pariaman, merupakan kunci menuju negeri Minangkabau. Ketiganya saling berhubungan dan memiliki pantai, sehingga orang-orang Gujarat bisa datang setiap tahun untuk melakukan perdagangan. Semua komoditi dagang diturunkan di tiga kerajaan ini dan menjadi barang dagangan dengan orang-orang Gujarat. Satu, dua, atau tiga kapal datang setiap tahun. Mereka menjual semua jenis pakaian dan mengambil emas, sutra, kemenyan, *lignaloe*, dua jenis kamper—jenis yang bisa dimakan dengan jumlah lebih banyak—lilin, dan madu. Orang-orang Gujarat menaikkan barang-barang ini dan kemudian diberangkatkan ke Sunda dan Kepulauan Maladewa (*Diua*). Kepulauan Maladewa membentang hingga ke seberang Sunda. Pelayaran ditempuh melalui sepanjang wilayah barat Sumatera hingga ke Gamispola, lanjut ke Cannanore, dan dari titik ini mereka menempuh perjalanan lima

hari menuju Kepulauan Maladewa. Pernyataan ini diberikan oleh pedagang yang pernah berlayar dari Maladewa (Pires, 2014: 228). Setelah melakukan perdagangan orang-orang Gujarat pulang dalam keadaan kaya raya. Mereka melakukan jual-beli kapan pun mereka mau. Sementara itu para pelaut mengatakan bahwa jalur dari Baros ke Sunda tidak begitu bersih dan keputusan untuk membersihkan jalur ini hingga ke daratan menjadi tanggung jawab Baros (Pires, 2014:228).

Anthony Reid (1995) menyebut Barus sebagai pelabuhan kapur barus, yang merupakan tempat terbentuknya serikat pedagang Tamil pertama. Barus menjadi salah satu koloni dagang yang bermunculan di sepanjang pesisir Sumatera dan membentuk pangkalan perdagangan, khususnya kapur barus. Selain hasil hutan Sumatera dunia membutuhkan lada dan karet. Barus, menurut Pires (Meilink-rofst, 1962), adalah negara pelabuhan kecil yang ada di pesisir barat Sumatera bersama dengan Priaman (Pariaman), Tikku, Singkel, dan Melabah (Meulaboh) atau Daya.

Barus merupakan kota penting di selatan Batak, yang terkenal di seluruh dunia Timur karena kapur barus yang dihasilkan pohon kamper (*Dryabalanops aromatica*) itu. Nama itu digunakan untuk membedakan kapur yang dihasilkan Barus dengan kapur yang diimpor dari Jepang dan Cina. Pada awalnya Barus merupakan permukiman orang Melayu dan diperintah oleh seorang raja, bendahara, dan delapan penghulu. Raja dan bendahara secara bergiliran berasal dari dua keluarga besar (Marsden, 1966).

Saat ini Barus hanyalah suatu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara; sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang terletak antara kota Sibolga dan Singkel (Hadi, 1995: 9). Sejak marak pemekaran daerah, Kecamatan Barus dimekarkan menjadi Kecamatan Andam Dewi, Kecamatan Barus, dan Kecamatan Barus Utara (Oetomo, 2017: 135).

Walaupun saat ini Barus hanyalah sebuah kecamatan terpencil, namun nama Barus tetap populer akibat panjangnya latar belakang sejarah Barus pada masa lalu. Barus terkenal sebagai tempat yang menghasilkan kapur barus, kamper, dan kemenyan, primadona komoditi yang sangat laku bagi perdagangan di seluruh dunia pada masa itu (Oetomo, 2017: 135). Dalam catatan sejarah, berbagai suku bangsa datang ke Barus untuk secara langsung memperoleh kapur Barus dari tempat asalnya. Aroma kapur barus, kamper, atau kemenyan di beberapa negara digunakan sebagai saran upacara keagamaan. Kamper digunakan juga sebagai bahan pengawet mayat dan sebagai obat-obatan (Oetome, 2017: 135–136). Kamper yang diproduksi di Barus termasuk salah satu dagangan yang dibeli orang Keling

dan diperdagangkan di Malaka (Meilink-Rofs, 1962: 80). Selain itu Barus juga merupakan pendaratan orang Gujarat. Sebagian kecil emas, bahan makanan, dan produk hutan diekspor melewati daratan Barus (Meilink-Rofs,1962: 89).

Sumber-sumber tertulis yang menyebut nama Barus dijumpai dalam tulisan-tulisan bangsa Yunani, Syiriah, Cina, Tamil, Arab, Armenia, Jawa, dan Melayu. Sumber-sumber yang lebih muda didapat dari keterangan bangsa-bangsa Eropa. Meskipun demikian informasinya sangat terbatas, di antaranya hanya menyebut pelabuhan Barus dengan mata dagangan utama berupa kamper. Beberapa data lain menyebut Barus sebagai Pancur. Tidak diketahui secara pasti apakah perubahan nama juga diikuti dengan perpindahan tempat ataupun perbedaan zaman (Guillot, 2008: 31–45; Oetomo, 2017: 136).

Berita tertua mengenai Barus diperoleh dari catatan Claudius Ptolomeus, ahli geografi Yunani pada abad ke-2 SM. Menurut Ptolomeus, kapal-kapal Athena singgah di Barus sepanjang abad ke-4 dan abad ke-3 SM. Begitu pula kapal-kapal Firaun dari Mesir membeli kapur barus atau kamper yang digunakan untuk membuat mummi. (Hadi, 1995: 9; Abdullah & Djaenuderadjat, 2015: 304). Claudius Ptolomeus menulis nama Barosai sebagai negara yang terletak di tepi jalan menuju Cina. Nama itu diperkirakan sama dengan Barus. Peta-peta kuna Yunani meletakkan Barosai pada salah satu pulau dari sebuah himpunan pulau sebelah selatan India—mungkin yang dimaksdukan Indonesia.[1] Peneliti lain, Van Leur, menyebutkan bahwa pada tahun 674 M di pantai barat Sumatera diperkirakan telah ada koloni-koloni Arab.[2] Dugaan tersebut diperkuat oleh pendapat peneliti lain, T.W. Arnold, yang menyebutkan bahwa menurut berita Cina pada tahun 674 M telah ada seorang pembesar Arab yang menjadi kepala daerah permukiman bangsa Arab di Pantai barat Sumatera.[3] Besar kemungkinan yang dimaksud dengan pantai barat Sumatera ialah Barus, mengingat Barus merupakan satu-satunya pelabuhan penting dalam perniagaan pada masa itu berkat hasil ekspornya yang terkenal, kapur barus (Nurhakim, 1979: 10).

Dengan demikian, berdasar sumber-sumber di atas, Barus telah dikenal dunia luar sejak zaman purba (sekitar abad ke-4 SM) hingga abad ke-17 M dengan masa puncak abad ke-4 hingga ke-11 dan memudar sejak abad ke-12 M. Pedagang Cina, khususnya dari Kanton, berlayar ke India, terutama Gujarat, serta ke Persia, Mesir, Arab, Madagaskar, dan lain-lain dengan menggunakan jasa dermaga Barus (Drakard, 1988: 20; Tanjung dalam *Terbit*, 10 Oktober 1991; Arnold, 1913: 367; Somadikarta, 1990: 15–28). Bandar Barus diperkirakan lebih tua dari Malayu Sriwijaya, bahkan jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia (Meuraxa, 1975: 12; Ekajati, 1985: 18).[4] Meskipun demikian Barus baru mencapai kemakmurannya pada abad ke-7 M, tidak lama setelah kerajaan Śrîwijaya berdiri. Sumber Cina menyebut Sriwijaya dan Barus sebagai kerajaan kembar, bahkan I Ching yang berkunjung ke Sumatera pada abad ke-7 mengatakan bahwa kota ini merupakan

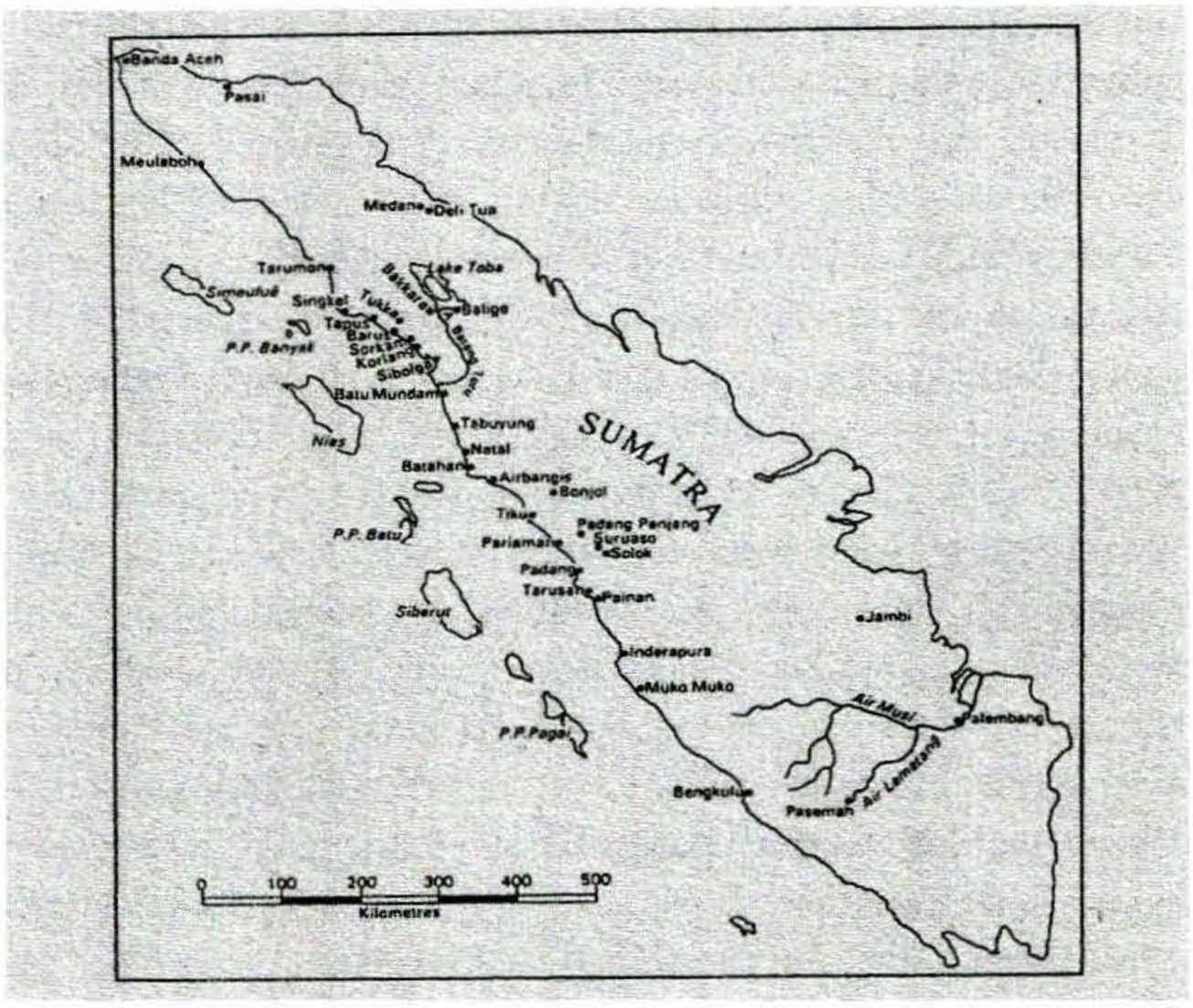

Letak Barus
Sumber: Drakard, 2003

pusat penyebaran aliran *mulasarvastivada*, sebuah mazhab dalam Buddha Mahayana yang banyak diikuti penduduk Śrîwijaya. Pada abad ke-9 M para pedagang Arab dan Persia, kemudian Turki, mulai ramai berdatangan ke Barus untuk memperoleh emas, lada, kapur barus, dan sebagainya. Kapur dan lada yang dihasilkan di daerah ini terkenal tinggi mutunya dan merupakan bahan perniagaan penting (Drakard, 1989; Abdullah & Djaenuderadjat, 2015:305). Sudah pasti para pedagang asing itu tinggal agak lama di Barus karena pelayaran ke negeri asal mereka sangat jauh dan harus pula menunggu musim yang baik untuk melakukan pelayaran kembali. Di antara mereka kemudian tidak sedikit yang menikah dengan perempuan setempat dan melahirkan keturunan dalam jumlah yang besar. Pada akhirnya terbentuklah suatu masyakat Islam yang signifikan dan memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan (Hadi, 2008: 323).

Sebelum dikenal nama Barus, kota ini diberi nama Fansur (Panchur) oleh orang-orang Mandailing dan Batak yang tinggal di sekitarnya. Sebelum memeluk agama Islam, dan kemudian Kristen, penduduk daerah ini dikenal karena kegemarannya terhadap ilmu sihir. Pemimpin mereka memiliki kesaktian dan pandai ilmu sihir. Mereka memeluk kepercayaan syamanisme (Hadi, 2008: 323). Dalam Bahasa Mandailing atau Batak perkataan *pancur* berarti "mata air", dan berdasarkan nama ini orang Arab menyebutnya Fansur. Nama Barus diberikan kemudian oleh orang-orang Melayu yang berduyun-duyun pindah ke tempat ini dari wilayah kerajaan Sriwijaya dan kemudian bercampur dengan penduduk setempat sehingga terbentuklah suku Mandailing yang beragama Islam. Nama Barus diberikan mengikuti nama sungai yang biasa dilalui oleh orang-orang Melayu untuk mencapai tempat ini (Hadi, 2008: 323–324; Abdullah & Djaenuderadjat, 2015: 305).

Bukti-bukti arkeologis yang kemudian ditemukan memperlihatkan bahwa sebelum kerajaan-kerajaan Islam yang awal muncul di Sumatera, seperti Perlak, Pedir, Samudera, dan Aceh, sekitar abad ke-9 dan ke-10 M di Barus terdapat komunitas muslim Nusantara dalam jumlah cukup besar, terdiri atas saudagar-saudagar asing beserta kerabat dan keturunan mereka, ditambah penduduk asli yang bekerja kepada mereka dan mengikuti tuan mereka memeluk agama Islam (Hadi, 2008: 324). *Kakawin Negarakrtagama* karya Mpu Prapanca abad ke-14 menyebut Barus sebagai negeri Malayu yang penting di Sumatera dan yang berhasil dijadikan taklukan Majapahit (Hadi, 1995: 10; Abdullah & Djaenuderadjat, 2015: 305). Melalui karya Prapanca diketahui bahwa kota ini mempunyai hubungan politik dan dagang dengan kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa pada abad-abad sebelumnya. Seperti kota-kota pelabuhan Malayu lain, Barus merupakan pusat perdagangan transito dan tempat pertukaran barang-barang niaga yang dibawa dari negeri Arab, Persia, India, dan Cina (Hadi, 2008: 324).

Braginsky (2003: 77–8) mengkaji Barus melalui *Kitab Seribu Satu Malam* yang berasal dari abad ke-11 M. Pada bagian "Sinbad Pelaut" mengisahkan bahwa Sinbad mendarat di Barus dan kemudian menceritakan tempat ini. Adapun kisahnya sebagai berikut:

> Maka mereka (saudagar-saudagar; VB) bermalam di sebuah tempat yang indah-indah dan selamat, dan aku pun bermalam bersama mereka, dan hatiku terlalu senang sebab aku terbebas dari lembah ular lalu sampai di negeri (yang dihuni) manusia. Dan waktu hari sudah siang kami bangun dan berjalan di gunung yang besar itu, dan melihat ular yang banyak. Dan kami berjalan sehingga sampai di sebuah taman yang besar dan indah pula, maka di taman itu tumbuh pohon-pohon kapur barus, dan setiap satu daripadanya dapat memberi tempat berteduh kepada serratus orang. Maka jika ada orang yang mau mendapat kapur barus, ia pun mengorek lubang di pucuk batang pohon dengan sebuah alat panjang, lalu mengumpulkan apa (butir-butir kristal; AH) yang menetes dari lubang itu, lantas melelehlah air kapur barus dan mengental bagaikan perekat—beginilah air pohon kapur—dan kemudian pohon itu kering sehingga hanya digunakan sebagai kayu api (Hadi, 2008: 324–325).

Seorang Penulis Arab terkenal, Sulayman al-Muhri, yang juga mengunjungi Barus pada awal abad ke-16 menulis dalam bukunya, *Al Umdat al Muhriya fi Dabt al Ulum al-Najamiyah* (1511), bahwa Barus merupakan tujuan utama pelayaran orang-orang Arab, Persia, dan India. Barus merupakan sebuah pelabuhan terkemuka di pantai barat Sumatera. Pada pertengahan abad ke-16 seorang ahli sejarah Turki Sidi Ali Syalabi juga berkunjung ke Barus

dan melaporkan bahwa kota ini merupakan pelabuhan utama di Sumatera (Hadi, 1995: 10).

Sebuah misi dagang Portugis mengunjungi Barus pada akhir abad ke-16 dan di dalam laporannya menyatakan bahwa di kerajaan Barus benzoin putih yang bermutu tinggi didapatkan dalam jumlah besar. Begitu pula kamper yang penting bagi orang-orang Islam, kayu cendana dan gaharu, asam kawak, jahe, cassia, kayu manis, timah, pensil hitam, serta sulfur yang dibawa ke Kairo oleh pedagang-pedagang Turki dan Arab. Emas juga didapatkan di situ dan biasanya dibawa ke Makkah oleh pedagang dari Minangkabau, Siak, Indragiri, Jambi, Kampar, Pedir, dan Lampung (Hadi, 1995: 11).

Sumber Arab berupa laporan Sulayman pada tahun 851 memberitakan bahwa di Barus terdapat pertambangan emas yang dikelola dengan baik dan juga perkebunan barus yang menghasilkan kamper bermutu tinggi dalam jumlah besar (Ferrand, 1913: 36 dalam Hadi, 2008: 326). Pada tahun 1292 Marcopolo berkunjung ke Barus dan menulis bahwa sebagai kerajaan kecil Barus lebih tergantung pada Cina dibanding tergantung pada Śrîwijaya. Ketergantungan pada Cina karena negeri itu mengimpor kamper dalam jumlah besar dan Sriwijaya mengalami kemunduran akibat rongrongan kerajaan-kerajaan Jawa seperti Kediri dan Singasari (Krom, 1931: 339 dalam Hadi, 2008: 326).

Data pertanggalan paling tua terdapat di Lobu Tua, berupa prasasti yang ditulis pada batu, berbahasa Tamil, dan bertanggal. Adapun angka tahun yang tertera pada prasasti tersebut tahun 1010 S (1088 M). Rupanya pada masa itu orang-orang Tamil dari India mendirikan persatuan dagang di Barus dinamakan Ayyavole-Lima Ratus atau Perkumpulan Lima Ratus. Prasasti tersebut menjadi petunjuk bahwa Lobu Tua bisa dianggap sebagai sebuah pelabuhan kuna dari kota Barus. Peran Lobu Tua sebagai pelabuhan kemudian pindah ke Kedai Gadang, lebih kurang 2 km dari Barus sekarang. Di tempat ini banyak ditemukan keramik Cina yang menunjukkan ciri abad ke-14–18 M, berasal dari masa Yuan hingga Ching, yang banyak bercampur dengan pecahan keramik dari Eropa. Pada waktu pelabuhan berada di Kedai Gadang besar kemungkinan terjadi penyerbuan Kerajaan Majapahit terhadap Pasai (1365 M) seperti dikemukakan oleh Prapanca dalam *Kakawin Nagarakrtagama*, yang menyatakan bahwa beberapa daerah di Sumatera merupakan wilayah Kerajaan Majapahit, seperti Samudra, Tamiang, Perlak, Lamuri, dan Barus.[5] Dalam penyerbuan itu daerah Barus sempat diduduki (Nurhakim, 1979: 12).

2. Asal-Usul Kerajaan Barus

Seperti halya kerajaan-kerajaan kuna di Indonesia yang memiliki keterbatasan sumber informasi, Barus atau Kerajaan Barus pun sangat terbatas sumber-sumber yang dapat digunakan sebagai

acuan. Di antara yang sedikit itu terdapat tradisi setempat yang pernah dikumpulkan oleh kapten Inggris David Jones pada tahun 1815 yang datang ke Aceh. Selain itu terdapat catatan asing yang berkaitan dengan kamper sebagai bahan ekspor utama Barus (Guillot, 2017: 32).

Ada dua versi tertulis dari sejarah lisan mengenai awal Barus yang sampai kepada kita, meskipun kedua versi itu berasal dari abad ke-19 M. Versi pertama dikumpulkan dan ditulis oleh Davis Jones. Kapten Inggris itu membuat catatan setelah bertemu pemimpin di Barus sebagai berikut:

> "Menurut tradisi, beginilah pendirian Barus dan ini merupakan sebuah terjemahan harfiah dari cerita yang telah disampaikan kepada saya oleh Tuanku Bahroos. Sebelum Bahroos didirikan, ada seorang raja Ooloo (*hulu*) atau raja di pedalaman yang tinggal di atas bukit Maligie (*Mahligai*) yang juga merupakan nama seluruh negerinya. Salah seorang dari bangsa Se Bunyan (orang gaib) merasa mendapat ilham dari Tuhan dan pergi ke atas bukit Maligie. Di sana dia mengantarkan raja, pengikutnya, dan rakyatnya ke negeri Pansohor (*Pansur*). Pansohore merupakan nama asli/pertama dari Bahroos. Setelah beberapa lama di Pansohore, orang gaib yang membawa mereka ke bukit See Mumpatoo (Si Mampatu?) tempat ia mengajarkan kepada mereka unsur-unsur dasar agama Islam dan tempat mereka disunat. Selama satu musim bersama di See Mumpatoo, mereka mendalami agama Islam dan juga diajarkan Bahasa Pansohore. Dari Pansohorelah berasal orang gaib itu. Dari peristiwa-peristiwa di ataslah berasal perbedaan bahasa, hukum, dan adat yang ada di antara Bahroos dan semua daerah lain di Sumatera. Setelah pengajaran itu, orang gaib mengantar mereka ke tempat mereka diperintahkan untuk mengakui mantan raja mereka sebagai pemimpin" (Guillot, 2017: 32)

Menurut tradisi ini sebelum Barus didirikan di pinggir laut, terdapat sebuah kerajaan di pedalaman bernama Mahligai, yang rajanya tinggal di atas sebuah bukit yang juga bernama Mahligai. Pengislaman penduduknya terjadi di atas bukit Mumpatu oleh seseorang gaib dari Pansur, kerajaan asli Barus, asal-muasal mereka diperintah untuk menerima bahasa serta adatnya. Secara singkat tradisi ini menggambarkan tiga tahap sejarah kotanya: zaman Pansur, zaman Mahligai, dan zaman Barus "sekarang" di pinggir laut (Guillot, 2017: 32–33).

Tradisi kedua dimuat dalam kronik Kerajaan Batak, yang disebut kronik "hulu", ditulis dalam Bahasa Melayu pada tahun

1870-an. Kronik ini menceritakan awal berdiri suatu dinasti raja baru di dataran tinggi Batak oleh Alang Pardoksi. Salah seorang putranya, Guru Marsakot, turun ke Samudera India untuk mencari tempat yang sesuai untuk mendirikan kampung. Adapun kisahnya sebagai berikut:

"Guru Marsakot berjalan ka tepi laut menurutkan hilir batang air ka hilir berjalan dengan rakyatnya laki-laki perempuan. Suda barapa lamanya berjalan maka bertemu satu pincuran dia tinggal sedikit hari di sana dia kasi nama itu tempat Pancur, kemudian dia berjalan di tepi laut maka bertemu dengan orang Ceti (...) dan Hindu pada satu muara kecil. Dalam pada itu maka bertanya Guru Marsakot kepada orang yang di sana, "Suda barapa lama kamu diam disini?" Menjawab orag Ceti, "Belum lama", dan berkata pula Guru Marsakot, "Apa sebab kamu diam bikin tempat disini adapun tanah ini aku punya?". Menjawab itu Ceti "Adapun sebab kami diam disini bukan dengan sengaja melainkan sebab kami punya kapal suda rusak jadi kami keluari disini maksut mahu membikin perahu akan jalan kami kembali ke negeri Keling. Dalam pada itu suda barapa lama kami suda potong kayu disini akan dijadikan perahu itu maka tiap tiap kayu yang kami potong kami mahu bikin jadi perahu tidak boleh sebab semuanya itu kayu suda busu'. Dalam pada itu maka kami tinggal disini jadi kami bikin ini tempat Namanya Air Busu' dangan berapa lamanya kami suda diam disini kami berkebun bermula. Kemudian suda menjadi kampung sebab orang dari lain tempat banyak datang juga kemari dan segala bangsa sampai sekarang/suda menjadi negeri. Sekarang pun kalau batul tuan yang punya ini tanah baiklah sekarang pun kalau tuan suka kami bikin jadi kami punya raja disini" Maka berkata Guru Marsakot katanya, "baiklah akulah menjadi raja di sini."

> Pada masa itu Guru Marsakot dimasyhurkan jadi raja di tanah Pangsur dan maka dia tinggal di Kampung Air Busu' lama dangan berkelamaan itu kampung Air Busu' pun bertambah ramai dalam pada itu maka bersebuahlah adat terpakai dalam negeri itu yaitu adat ceti dengan adat Batak dan adat Aceh dan adat melayu. Kemudian daripada itu suda berapa lamanya kemudian berpindah itu raja ke Lobo Tuha dengan segala rakyatnya. Dalam pada itu suda barapa lamanya maka aramai pula Lobo tuha sampai ke sungai Macu dengan barapa banyak orang kaya-kaya pada masa itu ramai berniaga-berniaga dengan kapal Keling dan Arab dan Aceh. Dangan karunia Allah Taala itu raja pun beroleh anak laki-laki bernama Namora Raja dan Perempuan. Dangan berapa lamanya itu raja pun mati tinggal anaknya menjadi raja pada masa Tuan Namora Raja" (Guillot, 2017; Drakard, 2003).

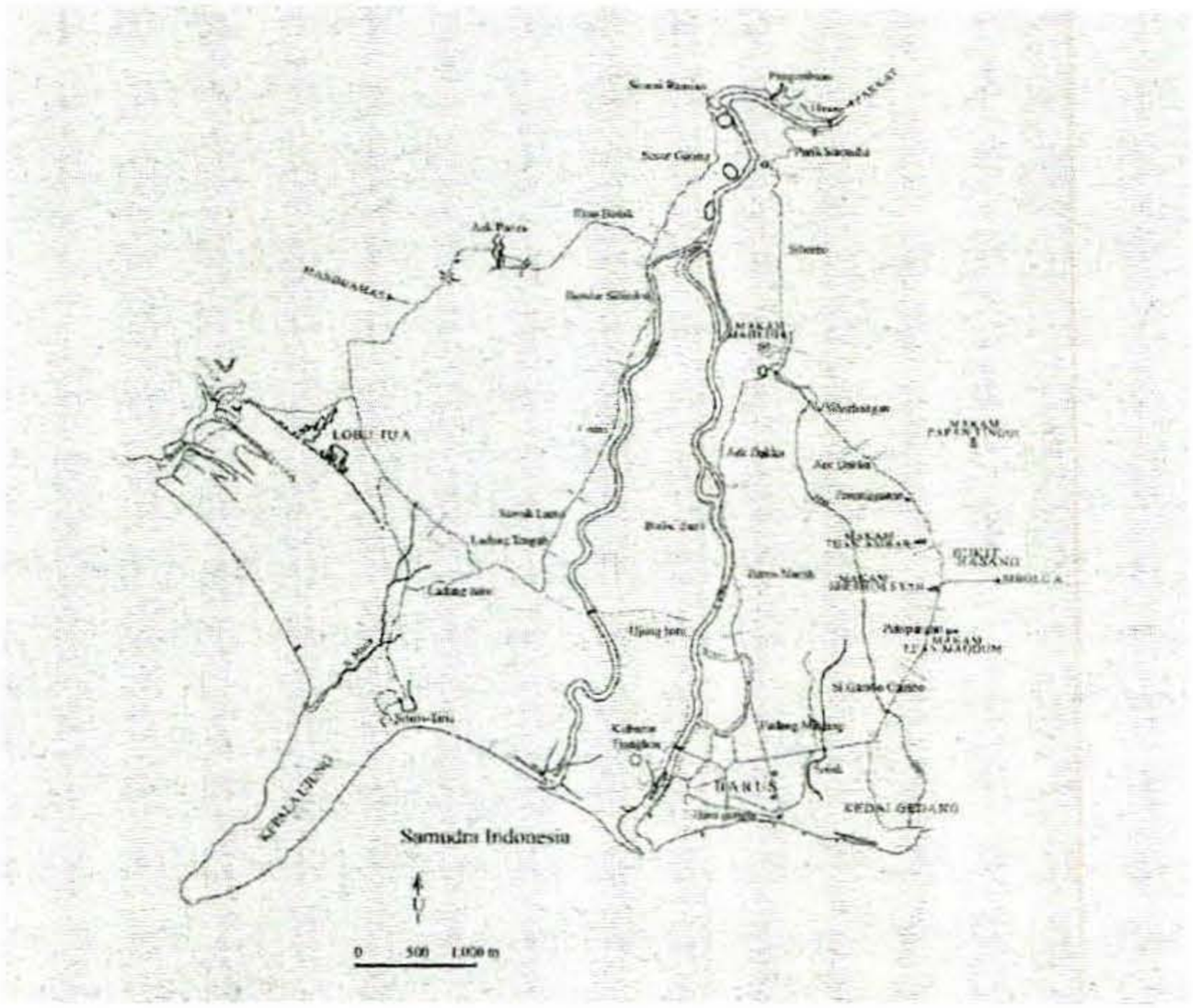

Lokasi Lobu Tua
Sumber: Guillot, 2014

Dari kedua tradisi tersebut diketahui bahwa kota pertama di Barus bernama Pansur, terletak di Lobu Tua sesudah Aek Busu Lama. Kronik Batak mencatat bahwa pembangunan Aek Busuk Lama dan perpindahan ke Lobu Tua terjadi di bawah pemerintahan raja yang sama (Guillot, 2017: 34).

Sumber lain, *Sejarah Melayu*, menyebutkan bahwa Sekh Ismail dari Mekah tiba di Fansur (Barus) sebelum ke Samudera. Ia menyaksikan penduduk Barus baru memeluk agama Islam dan belum bisa membaca Al Quran.[6] Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa para pedagang Arab menamakan kamper yang didapat dari Barus dengan al-kafur. Perjalanan untuk memperoleh barang itu tidak mudah dan hanya dapat dicapai dengan melalui laut. Begitu pula para pedagang Cina mendapatkan barang tersebut dari pantai Barat Sumatera.[7] Dengan demikian pada masa itu pantai barat Sumatera diperkirakan lebih ramai dibandingkan dengan pantai timurnya. Baik sumber Arab maupun sumber Cina menyebut bahwa setidaknya pada abad ke-7 M di pantai Barat Sumtera telah ada permukiman orang Islam (Nurhakim, 1990: 11).

3. Raja-raja yang Memerintah

Asal Keturunan Raja Barus dan *Sejarah Tuanku Batu Badan* memberi informasi mengenai raja-raja Barus. Menurut sumber lokal tersebut secara berurutan raja di Barus adalah Bermula Gelaran, kemudian Raja Tuha, dan diteruskan berturut-turut Raja Kadir, Raja Mualif, Sutan Marah Pangsu, Sutan Marah Sifat, Tuanku Maharaja Bongsu, Tuanku Raja kecil, Sutan Daeng, Sutan Marah Tulang, Sutan Munawar Syah, Sutan Marah Pangkat, Sutan Baginda Raja Adil, Sutan Sailan, Sutan Limba Tuha, Sutan Main Intan, Sutan Agama yang juga bernama Sutan Subum, dan Sutan Marah Tulang yang juga bernama Sutan Nangu (Drakard, 2003: 177–178).

Kisah di atas berbeda dengan cerita rakyat "Putri Andam Dewi". Cerita ini dihidupkan dalam bentuk kesenian *sikambang* dengan bentuk syair. Alkisah pada masa lalu (sekitar abad ke-12) Lobu Tua diperintah raja-raja yang masyhur, antara lain Sutan Raja Muda, Sutan Raja Perabutan, dan Sutan Raja Gambang Patuanam. Pelabuhan yang ada di Lobu Tua diserang Raja Janggi dari Kerajaan Madagaskar karena pinangan Raja Janggi terhadap putri Sutan Raja Muda, Putri Andam Dewi, ditolak. Raja Janggi digambarkan sebagai seekor burung garuda berkepala tujuh. Sutan Raja Muda tewas dalam pertempuran dan kerajaannya hancur. Putri Andam Dewi yang sangat cantik itu bersembunyi, sementara banyak penduduk melarikan diri ke pedalaman, seperti Siborong-borong Toba dan Karo. Putri Andam Dewi ditolong oleh Sutan Raja Gambang Patuanan dan akhirnya keduanya menikah. Menurut keterangan penduduk, saat ini di Lobu Tua masih dapat dijumpai taman dan kolam permandian bekas tempat Putri Andam Dewi mandi dengan para inang pengasuh (Budhisantoso, dkk., 1994/1995: 37–38)

Sumber Eropa tidak ada yang memberi informasi mengenai kerajaan dan raja-raja Barus. Baru sekitar tahun 1668 ada upaya Raja Barus bersama kerajaan-kerajaan lain di pesisir barat Sumatera bersekutu dengan VOC untuk menghadapi hegemoni Aceh. Secara resmi mereka mengadakan persetujuan yang dimaksudkan untuk mengembalikan pantai Barat kepada raja Minangkabau dengan kompeni sebagai wakil Yang Dipertuan. Namun dalam kenyataan kompeni memanfaatkan kesempatan itu untuk menanamkan monopoli dagangnya sendiri atas pelabuhan-pelabuhan pantai barat dan atas ekspor lada. VOC terlibat politik dengan kerajaan-kerajaan pesisir barat. Pegawai-pegawai VOC ditempatkan di Barus pada sisa abad ke-17 dan sesudahnya. Sejak saat itu terdapat keterangan terinci mengenai pemerintah dan struktur sosial pelabuhan itu (Drakard, 2003: 21).

Laporan Belanda abad ke-17 menyebutkan bahwa Barus diperintah oleh dua raja, yaitu Raja di Hulu dan Raja di Hilir. Mereka tinggal di dataran pantai, di perkampungan masing-masing, yang letaknya terpisah sejauh kira-kira satu kilometer. Dokumen Belanda itu menyebutnya Kampung Mudik dan Kampung Hilir. Raja di Hulu disebutkan sebagai keturunan campuran Batak-Melayu, sedangkan Raja di Hilir keturunan Melayu Tarusan, Sumatera barat daya, yang merantau ke Barus. Raja di Hulu mempunyai hubungan khusus dengan Batak Dairi, yang memungut kapur barus di Barus barat laut dan pedalamannya; sedangkan Raja di Hilir mempunyai pengaruh besar atas orang Batak di Pasaribu dan Silindung, yang memungut kemenyan di perbukitan di Barus timur laut serta di pedalaman Sorkam dan Korlang (Drakard, 2003: 22–23)

Dalam perkembangan kemudian timbul persaingan di antara kedua raja dalam hubungannya dengan VOC, sehingga menyulitkan kedudukan VOC terhadap mereka. Demi kepentingan VOC mereka memutuskan bahwa yang paling baik hanya jika salah satu dari

keluarga kerajaan itu tersisihkan. Sebagian tujuan itu tercapai pada tahun 1693 ketika Kompeni dengan resmi mengesahkan kedudukan Raja Barus. Untuk pertama kali Raja Barus diduduki keluarga di Hilir, sedangkan raja keluarga di Hulu menjadi Penghulu. Sebagai akibat perlawanan keluarga Hulu dan orang Batak Dairi pada tahun 1698 Raja di Hulu diberi pengakuan lebih besar dalam peran dan kedudukan, yang diwujudkan dengan pengangkatannya sebagai perantara resmi orang Dairi. Pada abad ke-18 kedua keluarga raja berhasil menyesuaikan diri pada jabatan raja yang mereka duduki secara bergiliran. Pada tahun 1714 ketika Raja Barus meninggal, Raja di Hulu diangkat sebagai Raja Barus yang baru. Untuk menenangkan para pendukung keluarga Raja di Hilir dan menjaga keseimbangan antarkedua keluarga yang bersaing, seorang kemenakan Raja Tua diangkat menjadi bendahara. Sampai tahun 1760 Raja Barus masih bergiliran antara keluarga Raja di Hulu dan keluarga Raja di Hilir. Bila seorang raja dari Hilir menjadi Raja Barus, bendahara diangkat dari keluarga di Hulu dan sebaliknya (Drakard, 2003: 24).

4. Wilayah kekuasaan

Tome Pires menyebutkan Barus berbatasan dengan Tiku di satu sisi dan dengan wilayah Kerajaan Singkel di sisi yang lain, sedang wilayah pedalamannya berada di Negeri Minangkabau. Didepannya, di wilayah lautan, terdapat pulau Nias (*Minhac Barras*) (Pires, 2014: 227).

Dengan demikian secara geografis Barus berada di pesisir barat Sumatera yang sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kecamatan Barus berada pada koordinat $2^{0}02'05''$–$2^{0}09'29''$ Lintang Utara dan $98^{0}25'85''$–$98^{0}26'30''$ Bujur Timur. Luas wilayahnya sekitar 693,93 km^2. Batas wilayah Kecamatan Barus di sebelah utara Kabupaten Tapanuli Utara, di sebelah barat Kabupaten Tapanuli Selatan, di sebelah selatan Samudera Hindia, dan di sebelah timur Kecamatan Sorkam (Budhisantoso, dkk, 1994/1995: 7). Adapun Kota Barus mempunyai luas sekitar 7,2 km^2 atau 1,04 % luas Kecamatan Barus. Barus, yang berstatus sebagai ibukota Kecamatan Barus, terdiri atas lima desa, yaitu Desa Padangmasiang, Desa Kedaigadang, Desa Batugerigis, Desa Pasar Terendam, dan Desa Sigambo-gambo (Budhisantoso, dkk, 1994/1995: 9).

5. Masa Kejayaan

Berdasar sumber-sumber yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Barus sebagai pelabuhan penting yang dikunjungi oleh pedagang dari berbagai negeri. Berangkat dari kegiatan ekonomi secara perlahan dan pasti Barus berkembang menjadi pelabuhan utama di Sumatera. Orang datang untuk mencari barang komoditi utama, terutama kapur barus dan kemenyan. Walaupun kondisi perairan membuat pelabuhan Barus agak sulit didatangi, namun kapur barus

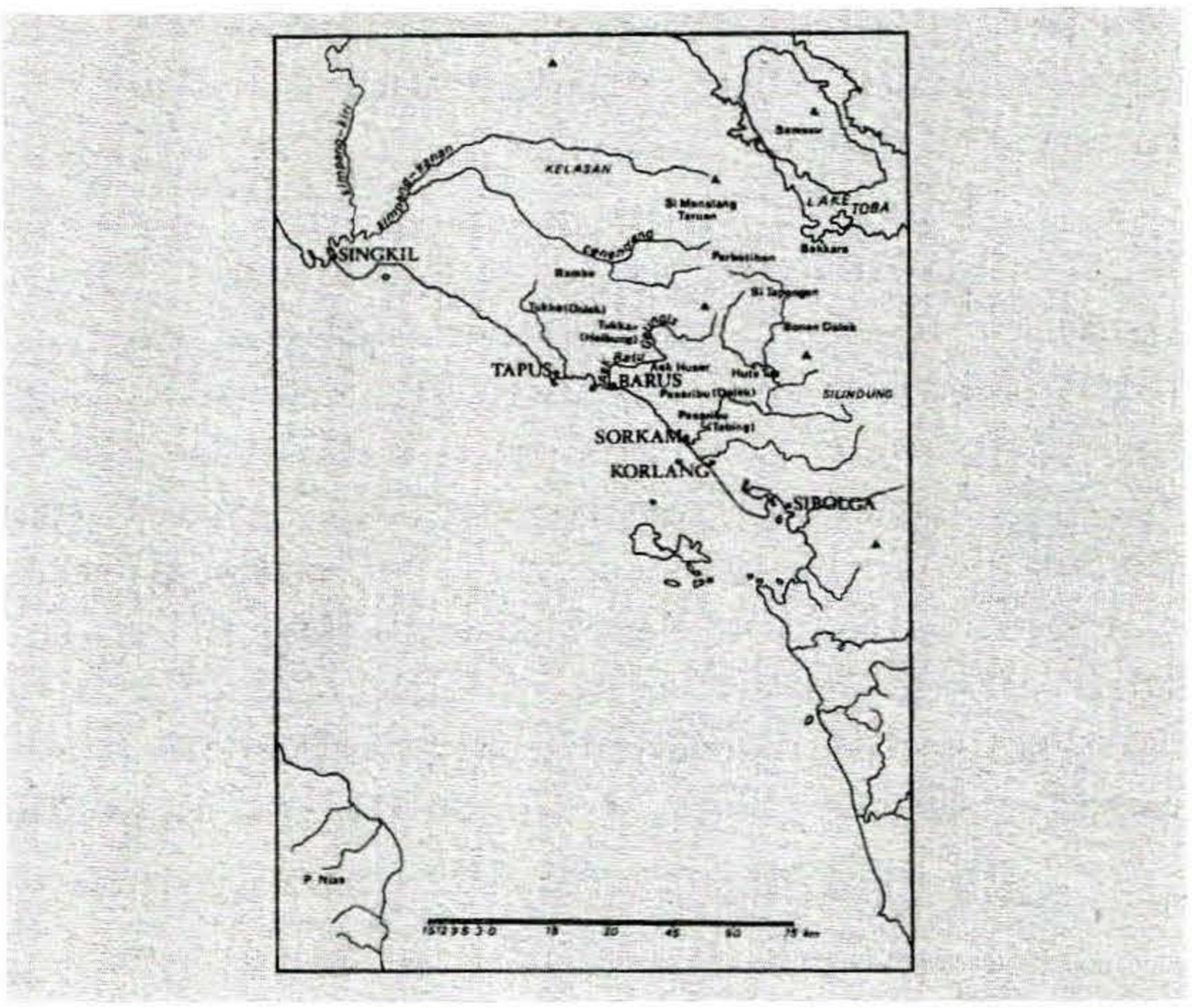

Wilayah kekuasaan kerajaan Barus
Sumber: Drakard, 2003

sangat dibutuhkan para pedagang yang diminati konsumen di Timur Tengah, Mesir, hingga Eropa. Oleh karena itu kapur dari Barus dinilai berkualitas prima, sehingga faktor kesulitan bukan menjadi penghalang para pelaut dan pedagang mendatanginya (Koestoro, 2014: 179).[8] Kegiatan perdagangan di pelabuhan Barus mendorong terjadinya peningkatan ekonomi. Berbagai pedagang dari berbagai negeri berinteraksi membentuk suatu permukiman dan mendorong terbentuknya suatu pemerintahan yang dipimpin oleh raja setempat.

Bukti tentang adanya persinggungan Barus dengan dunia muslim diperoleh melalui catatan-catatan yang bukan catatan dagang. Kira-kira abad ke-16 Barus merupakan pusat budaya dan agama, yang ditunjukkan melalui hubungan antara Barus dan penyair mistik Melayu Hamzah Fansuri (Drakard, 2003: 20–21). Hamzah Fansuri pernah hidup di Barus dan mengenal pelabuhan serta menghabiskan sebagian waktunya di sana. Kapur barus dan nama Barus disebut dalam syair karyanya (Drakard, 2003: 21). Selain itu hubungan Barus dengan Timur Tengah sudah berlangsung cukup lama. Terdapat temuan gelas kaca Timur Tengah dalam kegiatan arkeologis di Barus, yang diketahui berasal dari abad ke-11 hingga abad ke-12. Benda ini merupakan komoditi produk Khurasan, Iran, dan Mesir; meliputi gelas, botol, dan cermin yang digunakan sebagai wadah wewangian dan obat-obatan (Koestoro, 2014: 180).

Barus ternyata menyimpan bukti arkeologis di Lobu Tua, berupa prasasti berbentuk tiang segi enam, ditulis dengan aksara dan bahasa Tamil, berangka tahun 1010 S (1088 M). Prasasti itu kini menjadi koleksi Museum Nasional, Jakarta. Adapun isinya berkenaan dengan serikat dagang Yang Kelima Ratus dari Seribu Arah di Varocu, nama Barus dalam Bahasa Tamil. Serikat dagang itu memutuskan pembayaran pajak oleh golongan/kelompok tertentu serta nasihat untuk bersikap baik hati. Prasasti ini merupakan

petunjuk keberadaan sekelompok Tamil di Barus, Sumatera, sekaligus menjadi petunjuk hubungan antara Barus dan India (Koestoro, 2014: 180).[9]

Selain temuan dari Dinasti Sung (abad ke-10 hingga abad ke-13), ekskavasi di Barus menghasilkan temuan artefaktual dari Timur Dekat, yang memperkuat bukti kegiatan perdagangan besar di Barus. Pada abad ke-12 Abousahl dari Armenia mencatat bahwa di Barus terdapat gereja Nestorian, seperti hampir semua gereja yang ada di Asia pada zaman itu. Catatan ini menunjukkan bahwa Barus berhubungan dengan orang Malabar dan melalui mereka juga berhubungan dengan pusat gereja di Seleucus-Ctesiphon. Barus bukan saja menerima kunjungan pedagang muslim dan Yahudi, melainkan juga orang Kristen aliran Nestorian yang berasal dari Syria dan Persia, mungkin juga dari India, Asia Tengah atau Cina, dan orang Armenia. Mungkin saat itu Barus telah dikunjungi oleh orang Yunani (Koestoro, 2014: 181).

Kemakmuran dan kegiatan keagamaan yang terdapat di Kerajaan Barus pada tahun-tahun sebelum persentuhan dengan Eropa ditunjukkan dengan banyaknya nisan yang dijumpai di Barus (Drakard, 2003: 21). Keberadaan makam-makam tua itu memperkaya informasi keberadaan dan perkembangan Islam di Fansur. Salah satu batu nisan di Batu Badan berupa batu nisan bertulis nama seorang perempuan, Tuhar Amisuri, yang meninggal pada tahun 602 H (1212/1213 M),[10] yang dapat dianggap sebagai makam berangka tahun tertua di Sumatera di samping makam Sultan Malik as Saleh yang berangka tahun 1297 M.

Penggalian di Lobu Tua mengungkapkan bahwa tempat itu pernah menjadi hunian sekurangnya selama dua abad, antara akhir abad ke-9 hingga awal abad ke-12 (Guillot, 2008). Tidak jelas peristiwa yang menyebabkan Lobu Tua ditinggalkan. Boleh jadi berkaitan dengan cerita adanya serangan sekelompok orang Gargasi, sebagaimana cerita yang termuat dalam Kronik Raja Batak dari Barus (Koestoro, 2014: 182).

Demikianlah untuk jangka waktu yang cukup panjang Barus merupakan bandar penting di kawasan pesisir barat Sumatera bagian utara. Penulis Yunani telah menyebutkannya pada periode awal abad Masehi, sedang sumber tertulis Cina dan Arab memberitakan keberadaan Barus pada periode sesudahnya. Pada saat bangsa Portugis dan Belanda datang Barus masih dikenal sebagai bandar yang menonjol sebagai pelabuhan yang ramai dan makmur sebagaimana disampaikan Tome Pires pada awal abad ke-16 (Koestoro, 2014: 183).

Kisah tentang raja-raja yang memerintah Barus pada masa awal hanya dapat ditelusuri melalui sumber setempat, yang tidak dapat dicari pembandingnya dengan sumber asing sebagai pelengkap.

Namun setelah abad ke-17, setelah Kumpeni mengadakan hubungan politik dengan Barus, diperoleh informasi yang agak jelas tentang Kerajaan Barus. Ada berbagai peristiwa yang dicatat dan dilaporkan Belanda, yang terpenting di antaranya adalah pada tahun 1668 raja-raja Barus bergabung dengan kerajaan-kerajaan lain di pesisir barat Sumatera dalam suatu persekutuan dengan VOC untuk melawan hegemoni Aceh di pantai barat Sumatera. Rupanya Barus akhirnya harus bersekutu dengan VOC dan raja-raja pesisir barat Sumatera untuk menghadapi ambisi Sultan Aceh yang ingin menguasai Sumatera.

Kronik setempat (kronik Hulu) mengisahkan asal keturunan Raja Barus. Alang Pardoksi, anak raja di Tanah Toba, meninggalkan kampung halamannya merantau bersama istri dan pengikutnya ke barat dan mendirikan permukiman baru di kampung Tundang, Rambe. Tempat itu berupa sebidang tanah luas yang merentang ke barat sampai Singkel, ke timur sampai perbatasan Pasaribu, dan ke hilir sampai ke tepi laut; termasuk di dalamnya daerah yang kemudian dikenal sebagai Barus. Dalam perkembangan kemudian ia menjadi raja paling berkuasa di antara raja-raja Negeri Batak. Raja Alang Pardoksi memiliki dua anak, Pucara Duan dan Guru Marsakot. Setelah Raja Along Pardoksi meninggal kedua putranya berpisah dan pindah ke arah yang berlainan agar tidak terjadi pertikaian. Pucara Duan pindah ke arah pantai dan menetap di daerah Tuka, yang pada abad ke-19 merupakan pusat penghimpun kapur barus dan menyan dan dari sana dibawa ke Barus. Guru Marsakot pindah ke tepi laut di Lobu Tua. Di tanah baru ini ia berjumpa dengan orang Tamil dan Hindu yang kapalnya terdampar dan kemudian mengangkat Guru Marsakot sebagai raja di Lobu Tua berdasarkan tuntutan Guru Marsakot karena keluarganyalah yang memiliki tanah itu. Permukiman itu berkembang menjadi negeri yang makmur dengan nama Panchur, yang didatangi orang-orang India, Arab, dan Aceh untuk berdagang (Drakard, 2003: 28). Setelah meninggal Guru Marsakot diganti oleh anaknya, Tuan Namura Raja, dan kemudian cucunya, Raja Kadir, yang menjadi raja Islam pertama. Panchur diserang oleh orang Gergasi. Penduduknya lari dan menyeberangi sungai serta membuka permukiman baru di Kuala Barus dan Kota Beriang (Drakard, 2003: 28–29)

Pada bagian lain dikisahkan orang Melayu bernama Sutan Ibrahim yang datang dari Tarusan bersama pengikutnya mendirikan kampung di daerah hilir sungai. Anak dan pengganti Raja Kadir, Sutan Marah Pangsu, menggugat hak orang Melayu menetap di negerinya. Sutan Ibrahim mengangkat sumpah untuk membuktikan bahwa dialah yang menjadi pemiliknya. Sutan Marah Pangsu menerima sumpah itu. Maka didirikan dua permukiman di Barus: yang satu di hulu yang lain di hilir (Hulu dan Hilir) (Drakard, 2003: 29).

Sutan Ibrahim kemudian menikah dengan putri Sutan Marah Pangsu, tetapi setelah Raja di Hulu meninggal Sutan Ibrahim

membunuh semua anak laki-laki Marah Pungsu supaya ia menjadi satu-satunya raja di daerah itu. Yang menjadi raja di Hulu kemudian saudara Marah Pungsu, Sutan Marah Sifat. Ia minta bantuan ke Aceh karena permusuhannya dengan Sutan Ibrahim. Raja Aceh pun menyatakan perang dengan Barus. Dalam perang itu kepala Sutan Ibrahim dipenggal dan dibawa ke Aceh (Drakard, 2003: 29). Raja Aceh sakit akibat perlakuannya kepada Sutan Ibrahim. Maka kepala Sutan Ibrahim dikembalikan ke Barus dan Barus dibebaskan dari keharusan membayar upeti kepada Aceh. Sesudah itu selama beberapa generasi kedua keluarga raja di Barus hidup berdampingan tetapi dalam hubungan yang kurang lancar. Raja di Hulu bernama Sutan Marah Sifat dan anaknya bernama Raja Bongsu. Raja di Hilir Raja Usuf, anak Sutan Ibrahim, yang tewas ketika membalas dendan ke Aceh atas kematian ayahnya. Ia digantikan anaknya, Sutan Alam Syah yang mempunyai dua orang anak, Marah Sutan dan Sutan nan Bagonjong (Drakard, 2003: 29). Selama beberapa waktu keluarga Raja di Hulu memerintah di Barus.

Sementara itu Sutan Bagonjong meninggalkan Barus menjelajahi Pulau Sumatera dan menuju Jawa untuk mencari ilmu. Sekembalinya dari Jawa ia menemukan negeri Panchur, Kampung Lobo Dalam, sedang sekelompok orang Aceh perantauan. Sutan Bagonjong ikut berperang membantu Maharaja Bongsu dan memperoleh kemenangan (Drakard, 2003: 30).

Lama-kelamaan Maharaja Bongsu merasa mendapat tantangan melihat Sutan Bagonjong memupuk wewenang seperti raja. Perang meletus dan rakyat terbelah. Perselisihan dapat dilerai setelah seorang syekh dari Singkel menghadapkan Maharaja Bongsu dan Sutan Bagonjong dalam perang tanding. Perang tak ada yang menang dan tak ada yang kalah. Pada tahun 1054 H (1644 M) kompeni Belanda datang di Barus, begitu juga Raja Minangkabau Daulat (Drakard, 2003: 30). Atas kesepakatan dan himbauan Belanda dan Raja Minangkabau perihal reorganisasi kerajaan disepakati Maharaja Bongsu dinyatakan sebagai Raja Barus; sedang pangeran tertua di Hilir, Marah Sutan, menjadi bendahara. Maharaja Bongsu digantikan anaknya, Raja Kecil; namun karena masih di bawah umur maka bendahara di Hilir Marah Sutan menjadi wali raja. Marah Sutan mempunyai anak bernama Sutan Marah Sihat (Drakard, 2003: 30).

Raja Kecil digantikan Sutan Marah Pangkat. Raja Adil, anak Sutan Marah Pangkat, menjadi raja berikutnya. Ia memperkokoh perjanjian-perjanjian antara Barus dan berbagai daerah Batak di pedalaman. Raja Adil memerintah pada tahun 1213 H (1798 M). Pada tahun 1241 H (1824 M) ia diganti oleh anaknya, Sutan Sailan (Drakard, 2003: 31). Pada masa Sutan Sailan terjadi konflik antara keluarga di Hulu dan keluarga di Hilir yang mengakibatkan meletusnya perang antara keluarga dari Hulu dan dari Hilir serta rakyat Hulu di satu pihak dengan pedagang Aceh dan Melaboh dari Kuala Gadang di pihak lain. Sesudah lama bermusuhan orang

Melaboh meminta pertolongan Tok Ku Raja Uda, orang Aceh dari daerah Tapus, untuk melerai kedua belah pihak. Dalam perundingan ini ditegaskan bahwa Sutan Sailan sebagai Tuanku Raja Barus, sedang Sutan Main Alam dari Hilir sebagai bendahara. Sesudah perdamaian pulih kedua keluarga bergabung dan mendesak mundur pedagang Aceh yang tinggal di Barus Hilir karena semakin lama semakin menyusahkan. Keadaan makin meruncing sehingga timbullah huru hara besar dan mengakibatkan Tuanku Raja Barus minta bantuan bangsa Belanda. Setelah Belanda tiba orang Aceh berhasil dihalau sampai ke Tapus dan Singkel. Setelah peristiwa itu urusan kerajaan di Barus diatur oleh Belanda dengan memberi gaji kepada pemimpin-pemimpin Barus. (Drakard, 2003: 32).

Sutan Sailan digantikan anaknya, Sultan Limba Tua. Raja berikutnya Sutan Marah Tulang (1270 H/1856 M) (Drakard, 2003:32). Setelah Sutan Marah Tulang masih ada beberapa raja yang memimpin di Barus, yaitu Sutan Main Intan, Sutan Subum, dan Sutan Nangu (Drakard, 2003: 177–178).

6. Kosmopolitan Barus

Sumber-sumber tertulis, baik hikayat, *babad*, *tambo*, maupun catatan perjalanan dan berita asing memberi gambaran tentang keragaman penduduk dan agama masyarakat Barus serta para pedagang dari berbagai negeri. Mereka datang ke Barus dari berbagai negeri dengan tujuan memperoleh barang komoditi yang diperlukan pada masa itu dan tersedia di Barus. Tinggalan arkeologis yang berhasil dijumpai melalui kegiatan penggalian arkeologis memperkuat bukti bahwa sejak dahulu Barus merupakan kota yang beragam dan memperlihatkan ciri kosmopolitan.[11]

Sonny Chr. Wibisono, yang mengkaji Barus dari perspektif ekologi manusia dengan menggunakan data arkeologi, data etnohistori, dan data sejarah, melihat permukiman kuna Barus telah ada sejak abad ke-7 M dan dikenal sebagai salah satu tempat perniagaan dan penghasil barang dagangan penting (Wibisono, 1986:307). Sementara itu sumber-sumber setempat menunjukkan adanya permukiman masyarakat India di Aek Busuk, orang Tanah Minangkabau di Hujung Tanah, dan orang Aceh di Lobu Dalam. Kemudian dua permukiman pertama menyatu ke dalam permukiman yang bersifat kosmopolitan, terdiri atas orang-orang Sumatera, seperti orang Batak, orang Melayu, dan orang Aceh. Selain itu terdapat orang India, meliputi Chetti, Kling, Bengali, dan Surati, serta orang Arab (Perret & Surachman, 2015: 564).

Kronik-kronik setempat juga menginformasikan adanya kelompok masyarakat lain sebagai penduduk Barus pada paruh kedua abad ke-18, yaitu Rawa, Kerinci, Mandailing, Angkola, dan Bugis (Drakard, 2003: 166; Perret & Surachman, 2015: 567). Sementara itu masyarakat Tionghoa diduga baru sejak abad ke-17 betul-betul menetap di Barus (Perret & Surachman, 2015: 585).

Makam Mahligai merupakan peninggalan Kerajaan Barus. Kompleks makam ini dikenal sebagai Titik Nol Peradaban Islam Nusantara.
Sumber: Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh

Sesuai dengan pertumbuhannya sebagai pusat perdagangan sebagian para pedagang pendatang menetap di Barus. Ketika kemudian terjadi percampuran berbagai bangsa dan suku bangsa ini lahirlah kelompok masyarakat pantai yang menamakan diri "orang pesisir". Mereka memiliki bahasa dan adat istiadat khas pesisir. Dalam pergaulan sehari-hari mereka menggunakan bahasa pesisir, yang mempunyai unsur-unsur Bahasa Minang, Melayu, dan Batak dengan langgam khas pesisir. Dalam pada itu pemusatan permukiman mereka diperkirakan mengikuti lokasi kegiatan perdagangan. Lobu Tua pernah menjadi pusat kota dan pusat permukiman penduduk karena menjadi pelabuhan, yang dapat dicapai dengan menyusuri Aek Maco. Setelah pelabuhan ini tidak berfungsi, pusat permukiman bergeser ke sekitar pelabuhan baru, Kedaigadang. Berikutnya Muara Aek Batugerigis menjadi pusat pemukiman menggantikan Kedaigadang yang sering dilanda ombak besar. Dalam perkembangan selanjutnya permukiman penduduk tersebar di kiri kanan prasarana transportasi darat dan pada beberapa tempat di pantai (Budhisantoso, dkk., 1994/1995: 34–35).

Sebagai pusat kegiatan perdagangan dan pelabuhan penting di Sumatera yang disinggahi oleh kapal-kapal dagang Arab, Persia, dan Turki, dan sebagai kota yang penduduknya telah menganut agama Islam, sudah pasti Barus memiliki pusat-pusat pendidikan Islam sebagaimana di Pasai sebelumnya dan di Aceh pada abad yang sama. Di negeri Islam lembaga pendidikan berperan penting dalam penyebaran agama Islam serta berperan penting sebagai kegiatan penulisan kitab keagamaan dan sastra. Itulah sebabnya tradisi sastra tulis berkembang di Barus, sehingga tidak mengherankan apabila di sana lahir penulis-penulis terkemuka seperti Hamzah Fansuri dan murid-muridnya (Hadi, 2008: 327)

Berdasarkan temuan makam dan artefak arkeologis lain diketahui bahwa masyarakat Barus umumnya beragama Islam, sekalipun diduga ada juga kehadiran orang yang beragama Hindu dan Yahudi (Perret & Surachman, 2015: 595). Selain itu terdapat sumber asing yang mencatat suatu perkumpulan orang Kristen Nestorian yang berada di Fansur sebelum abad ke-13 M serta mengenai seorang pedagang Yahudi yang meninggal di Fansur pada abad ke-13 M (Perret & Surachman, 2008: 536).

Rusmin Tumanggor (1999: xiv) menyebutkan bahwa di Barus telah lama hidup agama setempat, yaitu *sipele begu* (pembauran animisme, dinamisme, dan politeisme). Kemudian datang pengaruh kosmologi Tionghoa kuna, yang belakangan berwujud agama seperti Taoisme dan Kongfusianisme yang dikembangkan oleh Tsyou dan Kong Fu Tse, yang pada masyarakat Barus berbentuk kepercayaan *Shang Ti* (dapat kesaktian dari Tuhan) dan *Hong* (raja setan). Agama Hindu dan Buddha dari India pun datang, tetapi tidak utuh dan tak bertahan lama. Selanjutnya masuk agama Yahudi, yang jika bukan masa Nabi Musa dengan kitab Taurat setidaknya dari masa Nabi Daud dengan kitab Zabur. Terakhir masuk Islam dan Kristen pembawa ajaran Monoteisme. Kecuali Kristen, semua kepercayaan di atas tergambar pada kosmologi dan *pedukunan* Barus.

Makam-makam yang merupakan tinggalan monumental yang sampai saat ini masih berdiri di Barus berupa batu-batu nisan dari para aulia dan raja-raja beserta keluarganya. Makam-makam tersebut berkelompok dalam beberapa kompleks, di antaranya kompleks makan Mahligai, Papan Tinggi, Tuan Ambar, Tuan Ibrahim Syah, dan kompleks Makam Tuan Maqdum (Oetomo, 2017:1 38) Makam-makam tersebut umumnya makam Islam, yang sekaligus menjadi bukti kehadiran Islam di Barus pada masa itu. Adapun nama-nama penyiar Islam yang dimakamkan di Barus diketahui berasal dari sekitar tahun 44–48 H (665–669 M) atau abad ke-7 M, di antaranya Syaikh Mahmud, Tuan Ambar, Tuan Batu Badan, dan Syaikh Syamsuddin as Sumaterani yang meninggal 12 Rajab 1039 H (1630 M). Sementara itu, menurut Ambary, salah satu batu nisan tertua terdapat dalam kompleks kuburan Batu Badan, bertahun 602 H (1206/7 M), nisan seorang perempuan bernama Maesurah (Fansuri, 1980: 80; Meuraxa, 1973: 64–65; Ambary, 1981:7).

Lukman Nurhakim melakukan kajian terhadap makam-makam kuna di dua desa di Kecamatan Barus, yaitu Desa Pananggahan dan Desa Aekdakka. Ia memperoleh gambaran bahwa secara tradisi pembawa dan penyebar agama Islam di daerah Barus ialah para *auliyah* 44, yang makamnya tersebar di desa Pananggahan. Agama Islam pada masa itu diperkirakan belum berkembang dan baru menjadi sarana persinggungan antara pedagang-pedagang muslim dan penduduk setempat, sehingga belum ada perkampungan muslim yang berarti. Permukiman orang-orang Islam baru ditemukan di sekitar bukit Hasang, sedang di Lobu Tua tidak ditemukan makam-makam kuna walaupun Lobu Tua merupakan bekas bandar lama Barus. Data

pertanggalan yang diperoleh di daerah ini terdapat pada sebuah nisan kubur seorang wanita bernama Amisuri yang meninggal pada tahun 602 H atau 1206/7 M. Tulisan tersebut berada pada bagian kepala nisan (Nurhakim, 1979: 54).

Berdasarkan kajian terhadap motif hias yang dilakukan pada batu nisan di Barus, dijumpai keberadaan motif hias lampu gantung yang memiliki fungsi estetis dan simbolis. Nisan dengan motif hias lentera gantung lebih ditujukan untuk para para aulia, syekh, atau tokoh agama lainnya. Sebuah batu nisan di papan Tinggi dilengkapi motif hias lampu gantung dan memuat pertulisan tokoh yang dimakamkan, yaitu Syekh Mahmud, dengan pertanggalan yang terdapat pada nisan tersebut adalah 829 H/1425–6 M (Kalus, 2008: 303–305; Oetomo, 2017: 149–150).

Kajian terhadap kumpulan batu nisan yang ditemukan memperlihatkan bahwa sejak pertengahan abad ke-14 Barus mengembangkan kesenian makam Islam dari batu tufa, yang indikasi awalnya diwakili oleh sebuah batu nisan bertanggal tua di Barus, yaitu 1397 M. Kesenian ini—yang mulai merosot pada pertengahan abad ke-16—muncul bersama tradisi yang mengunakan batu granit, yang hampir pasti berasal dari luar Barus. Pada pertengahan abad ke-16 satu seni makam jenis Aceh mulai muncul. Kesenian ini berkombinasi dengan tradisi kesenian setempat sebelum punah, yang kemungkinan besar pada tahun 1820-an dan berakhir pada paruh pertama abad ke-20. Tahap ini menunjukkan ditinggalkannya pekuburan kuna karena peniruan tipe-tipe batu nisan yang dahulu diimpor, khususnya jenis batu Aceh, dan mencerminkan perubahan mentalitas (Perret & Surachman, 2015: 657).

7. Komoditi

Meuraxa, dalam buku *Sejarah Masuknya Islam ke Bandar Barus Sumatera Utara*, menyatakan bahwa sejak 6.000 hingga 3.000 tahun yang lalu, pada zaman Firaun, perdagangan antara Barus dan Arab, Mesir, telah terbuka dengan adanya kapur barus yang digunakan untuk memummikan Firaun (Ramses II) (Meuraxa, 1973: 14). Pendapat ini sejalan dengan pendapat Rivet bahwa pedagang Oceania (termasuk Indonesia, khususnya Barus) telah menjelajahi negara-negara lain sejak 6.000 tahun yang lalu.

Pada abad ke-7 M, I Tsing menyebut bandar Barus sebagai *Po lo chi* yang menghasilkan kapur barus dan kemenyan. Kedua jenis barang ini dibeli oleh pedagang Tamil, India Selatan. Menurut informasi dari pedagang Cina ketika itu Barus menjual kapur barus yang paling tinggi mutunya dan paling murni sifatnya (Nur, 2001: 154). Selain kapur barus dan kemenyan, bandar Barus juga menghasilkan damar, rotan, kayu cendana, gading gajah, kulit manis, dan merica. Pedagang Tamil memonopoli kapur barus dan kemenyan.

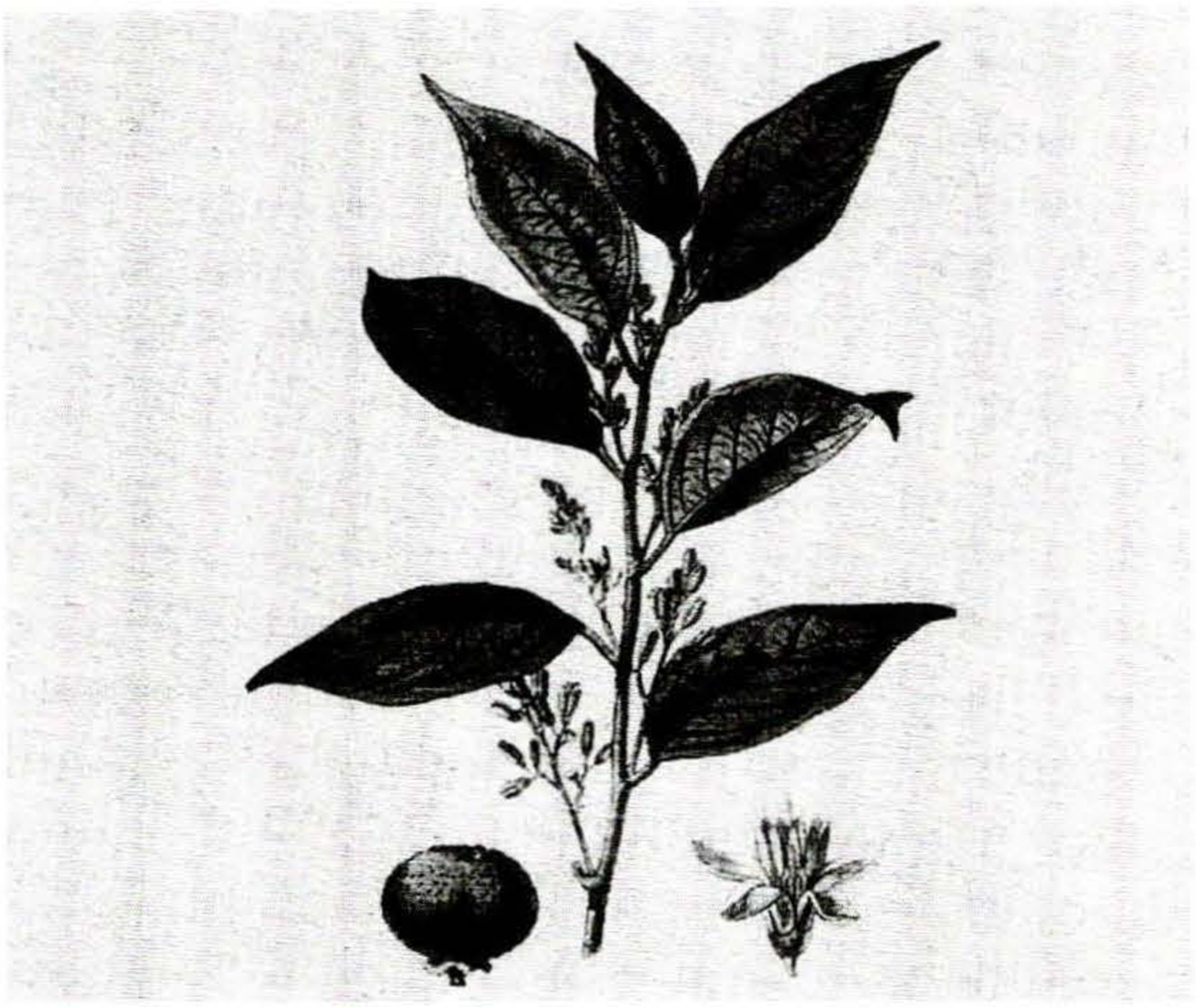

Komoditi di Barus
Sumber: Tony Whitten, 2002

Tumanggor (1999: 109) menyatakan bahwa berdasarkan artefak berupa mantra dan jampi sebagai doa utuk pengobatan tradisional sebagaimana tertulis dalam *pustaha* Batak dan catatan *datu-datu* Barus telah mempunyai hubungan dengan Tiongkok kuna dan Yahudi atau Israel jauh sebelum Kristen dan Islam. Sejumlah penulis bahkan berhipotesis kebiasaan mengawetkan mayat (mummi) yang dahulu banyak dilakukan di Mesir menggunakan bahan yang diperkirakan berasal dari Barus lewat perdagangan, meskipun lal ini masih perlu pembuktian (Ekajati, 1985: 12; Meuraxa 1973: 14; Yamin, 1980: 32). Tumanggor juga menyebutkan bahwa pada abad ke-7 M kapur barus dan kemenyan sudah menjadi komoditi besar-besaran antarpedagang Sumatera (Barus), Cina, India, dan Timur Tengah. Fakta yang memperkuat dugaan ini adalah tertulisnya kapur barus di dalam hadits Rasulullah Muhammad saw dan ayat Alquran. Hadist Rasulullah saw, yang termaktub dalam hadits Ummu Athiyah, Rasulullah saw bersabda ketika putrinya meninggal: Mandikanlah ia tiga atau lima kali atau lebih daripada itu, menurut pendapatmu dengan air dan daun bidara dan pada akhirnya taruhlah "*kaffurun*" (kapur barus) atau sedikit kapur barus. Maka bilamana sudah selesai beritahukan kepadaku. Maka setelah kami selesai, kami memberitahukannya kepada beliau. Maka beliau memberi kepada kami kainnya seraya sabdanya "kumohonlah ini yakni kainnya" (Diriwayatkan oleh Jamaah Ahli Hadits; Lihat Himpunan Putusan Tarjih, terbitan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta, 1974: 237). Di dalam Alquran surat Al-Insan ayat 5 tercantum: "Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan (kelak dalam syurga-ayat 17–18) minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah kapur barus. (Tumanggor, 1999: 116–117). Salman Harun, Guru Besar Sastra Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta, menyatakan bahwa kosa kata "kafuur" merujuk pada kapur barus, menjadi mata dagangan yang hanya dihasilkan di Barus pantai barat Sumatera. Kosa kata

itu terserap ke dalam Bahasa Arab, bahkan ke bahasa lain di dunia, lewat hubungan dagang dan percampuran kebudayaan. Tidak salah bila dikatakan bahwa kata "kapur" merupakan satu-satunya kosa kata Bahasa Indonesia yang terdapat di dalam Al Quran (*Panji Masyarakat*, no. 545, h. 44; Tumanggor, 1999: 117). Hal ini berarti pada zaman Nabi Muhammad saw menyiarkan Islam di Makah dan Medinah kapur barus telah diperdagangkan dan bukan barang baru di pasar Arab. Olah karena itu tidak mustahil sebahaian pedagang Arab sendiri yang mengambil ke Barus dan membawanya ke Arab.

Di antara bentangan hasil sumber daya alam sebagai mata dagangan, kapur barus menduduki tempat yang sangat penting. Kandungan isinya berbeda dengan kapur jenis lain serta menjadi obat berkhasiat yang membuat Sumatera dan Kalimantan termashyur di kalangan tabib Arab (Marsden, 1966). Perdagangan kapur Barus dimonopoli oleh orang-orang Aceh yang bermukim di Singkel. Mereka menjualnya kepada orang Batak, yang selanjutnya dibeli oleh orang-orang Cina dan Eropa (Marsden, 1966).

Marsden menguraikan bahwa "kepala kapur" biasanya dibeli dengan harga 6 dollar Spanyol per pon atau 8 dollar per kati. Di pasar Cina, Kanton, harga kapur barus mencapai 9–12 dollar tiap pon atau 1.200–1.500 dollar per pikul (100 kati) atau 133 dollar tiap 1/3 pon. Bila mutunya baik, harganya dapat mencapai 2.000 dollar; bahkan ada yang mengatakan harga kapur barus bermutu tinggi dapat mencapai di atas 30 dollar per kati. Menurut perkiraan hasil perkebunan Kapur barus di pantai-pantai barat Sumatera tidak lebih dari 50 pikul (Marsden, 1966). Oleh karena itu bandar Barus menjadi satu-satunya kota dagang yang menyediakan kapur barus di Nusantara ketika itu (Nur, 2001: 154).

Tome Pires menyebut Barus pada masanya menjadi pelabuhan yang ramai dan makmur (Drakard, 1988:17; Ambary, dalam Sulaeman, 1981: 6; Tumanggor, 1999: 117–118). Pada abad ke-10–16 M para pedagang Arab semakin banyak yang langsung datang ke Barus, meskipun pada abad ke13–17 perdagangan kapur barus mulai dikuasai oleh suku bangsa dan bangsa-bangsa yang ada di Barus, seperti India, raja-raja Aceh, dan raja-raja Barus. Di Lobu Tua (dekat Fansur), Kecamatan Barus, ditemukan Prasasti beraksara Tamil, berbahasa Hindu, dan bertarikh 1010. Pada tahun 1931 KA Nilakantasastri menerjemahkan prasasti yang berupa piagam tersebut, antara lain menyebutkan sekitar 1.500 orang Tamil dari Cola, Pandya, Malayalam, India selatan, tinggal di Barus sebagai pedagang perantara beserta suatu serikat dagang Tamil (Lombard, 1995; Drakard, 1988: 17; Ambary, 1997: 6).

Sejak abad ke-16 Kerajaan Aceh melakukan penaklukan Barus sehingga pada abad ke-17 Aceh mengusai pusat-pusat perdagangan pantai barat Sumatera. Pada masa itu perdagangan Barus dengan dunia luar, terutama India dan Timur Tengah, relatif lancar karena

ada ikatan religi. Pada abad ke-14–16 secara berangsur-angsur terjadi kemerosotan perdagangan di pantai barat Sumatera (Barus) karena mulai terbukanya kota-kota dagang sepanjang pantai timur Sumatera di sekitar Selat Malaka. Pada abad ke-17 VOC masuk ke Barus dan kemudian memonopoli perdagangan di Barus dan sekitarnya (Tumanggor, 1999: 120).

8. Kesenian

Barus mengenal seorang syekh bernama Hamzah Fansuri yang menghasilkan karya sastra bernapas Islam berupa syair-syair tasawuf dan karya-karya sastra filosofis bercorak Islam. Syekkh Hamzah Fansuri bukan saja sebagai seorang ulama tasawuf dan satrawan terkemuka, tetapi juga seorang perintis dan pembaharu (Hadi, 1995). Karyanya banyak ditulis dalam bahasa Aceh, Melayu, Persia, dan Arab, berisi ilmu tasawuf, fiqih, dan filsafat; sebagian dalam bentuk prosa dan sebagian yang lain dalam bentuk puisi. Hasmy (1983: 196) menyebutnya sebagai seorang penyair terbesar pada abad kehidupannya. Ia belajar di Aceh, India, Persia, dan Arab serta fasih dalam berbagai bahasa, yaitu bahasa Melayu, Jawa, Urdu, Persia, dan Arab. Hamzah Fansuri menguasai ilmu-ilmu fiqih, tasawuf, sejarah, sastra, dan filsafat. Oleh karena itu ia mengajarkan ilmu-ilmunya di beberapa tempat di Aceh dan Barus, terutama di Banda Aceh. Pada ujung akhir hayatnya dia mendirikan *dayah*[12] di daerah tempat kelahirannya di kampung dekat Runding (Singkel) dan di sana pula dia dikuburkan. Ia menganut paham *wihdatul wujud* dan menjadi pengikut tarekat qadiriyah. Paham ini menyatakan bahwa alam merupakan ciptaan dan bagian dari Tuhan itu sendiri. Lawannya, *wihdatus syuhud*, berpendapat bahwa alam yang baru ini sebagai wujud kesaksian adanya Tuhan. Murid dan pengikut Hamzah Fansuri yang terkenal adalah Syekh Syamsuddin As Samathrani. Adapun lawan alirannya adalah Syekh Nurruddin Ar Raniry dan Syekh Abdur Rauf Syiah.

Abdul Hadi W.M. (2008: 360) membahas beberapa syair yang berasal dari Barus dan menarik beberapa simpulan sebagai berikut: Pertama, sejak awal perkembangan agama Islam di Nusantara, Barus tampil sebagai pusat kegiatan sufi dan kemudian tumbuh pada abad ke-16 sebagai salah satu pusat kegiatan penulisan dan penyalinan naskah sastra sufi. Kedua, penulis-penulis sufi di Sumatera Utara dan Aceh, khususnya yang belajar di Barus, tidak sedikit apalagi hanya satu orang.[13] Ketiga, syair bagi penulis sufi sebagai suluk atau sarana untuk melakukan perjalanan kerohanian dari martabat wujud yang rendah ke martabat wujud yang lebih tinggi, atau perjalanan naik mencari "diri hakiki" atau "diri rohani" agar dengan demikian seseorang dapat bersatu dengan asal usul kerohaniannya di alam ketuhanan (*alam al-lahut*). Keempat, melalui apa yang dikemukakan dalam syair-syairnya para penulis sufi menunjukkan bahwa mereka memiliki wawasan estetika sendiri dari sistem sastra yang mereka bangun. Karya sastra bukan sekedar *mimesis* atau tiruan atas kenyataan, dan juga bukan sekedar representasi ide,

melainkan sebagai penggambaran secara simbolik (*qiyas*, ibarat) atas pengalaman kerohanian yang di dalamnya konsep-konsep tasawuf telah dihayati secara batin dan kemudian ditransformasikan ke dalam ungkapan-ungkapan estetik sastra (Hadi, 2008: 360).

Sebagai contoh ketika Hamzah Fansuri memahami wujud Tuhan, yang juga disebut *al-rahman* (Mahapengasih), yang di dalamnya tercakup tujuh sifat-Nya utama, yaitu *aHayy* (Mahahidup), *Ilm* (Mahapengetahuan), *Iradat* (Mahaberkehendak), *Qudrat* (Mahakuasa), *Sami* (Mahamendengar), *Basir* (Mahamelihat), dan *Kalam* (Mahakata). Hamzah Fansuri menuliskannya dalam syair pada bab awal *Asrar al-Arifin* sebagai berikut:

> Aho segala yang menyembah nama
> Yogya diketahui Yang Pertama
> Karena Tuhan kita Yang Sedia Lama
> Dengan ketujuh sifat Bersama-sama
> Tuhan kita yang Empunya Dzat
> Awwalnya Hayy pertama bilang sifat
> Keduanya Ilmu dan rupa ma'lumat
> Ketiga murid akan sekalian Iradat
> Keempat qadir dengan Qudrat-Nya tammam
> Kelimanya sifat bernama Kalam
> Keenamnya Sami dengan Ada-Nya dawwam
> Ketujuhnya Basir akan halal dan haram
> (Hadi, 2008:335)

Valentijn, seorang sarjana Belanda yang berkunjung ke Barus pada tahun 1706, menulis perihal Hamzah Pansur, seorang penyair Melayu yang terkemuka dengan syair dan puisinya yang mengungkapkan kemegahan masa lampau kota Barus. Adapun tulisan Valentijn sebagai berikut:

> "Seorang penyair Melayu, Hamzah Pansur, seorang yang sangat terkemuka di lingkungan orang-orang Melayu oleh karena syair dan puisi-puisinya yang menakjubkan, membuat kita karib lagi dengan kota tempat lahir sang penyair, apabila di dalam puisi-puisinya yang agung itu dia mengangkat naik dari timbunan debu kebesaran dan kemegahan masa lampau kota itu dan mencipta kembali masa-masa gemilang dari kebesarannya (Abdullah & Djaenuderadjat, 2015: 308–309).

Selain karya Syekh Hamzah Fansuri di Barus juga dijumpai karya seni hias atau ukiran pada batu nisan atau makam di situs-situs makam di Barus. Beberapa peneliti, di antaranya Lukman

Nurhakim (1979), mengkaji makam-makam kuna yang berasal dari abad ke-14 hingga abad ke-16 M di dua desa di Kecamatan Barus, yaitu Pananggahan dan Aekdakka. Di desa Pananggahan dijumpai makam kuna komplek-kompleks Tuan Kayu Manang, Tuan Makhdum, Bukit Hasang, Tuan Ambar, Tak Bernama, kaki bukit Papantinggi, dan bukit Papantinggi. Adapun di desa Aekdakka dijumpai kompleks makam Mahligai.

Batu nisan di beberapa situs tersebut memiliki seni hias Islam Barus sebagaimana tercermin dalam hiasan dan ukiran batu nisan. Motif hias batu nisan itu memiliki fungsi estetis dan simbolis. Terdapat beberapa jenis motif, di antaranya motif hias lentera gantung yang lebih ditujukan untuk para tokoh agama atau para aulia, syekh, atau tokoh agama lainnya. Motif itu, misalnya, dijumpai pada batu nisan di Papan Tinggi Syekh Mahmud, berangka tahun 829 H/1426-6 M, dan memuat tulisan tokoh yang dimakamkan (Kalus, 2008: 303–305; Oetomo, 2017: 149–150). Dalam konteks batu nisan di Nusantara, batu nisan di Barus umumnya dimasukkan ke dalam kategori batu nisan Tipe Aceh (Nurhakim,1990).[14] Sementara itu, berdasarkan kajian terbaru mengenai batu nisan di Barus, selain dijumpai batu nisan tipe Aceh di Barus juga terdapat batu nisan jenis setempat atau tipe Barus dan campuran sebagaimana yang dikemukakan oleh Daniel Perret, Heddy Surachman, dan Ludvik Kalus (2015).

Perret, dkk. menyatakan bahwa di Kecamatan Barus terdapat hampir 300 makam Islam yang berasal dari pertengahan abad-ke-14 hingga awal abad ke-20. Hampir semua makam sebelum abad ke-19 mengisi pekuburan Tuan Maqdum, Tuan Ibrahim Syah, Tuan Ambar, Papan Tinggi, dan Mahligai. Semua pekuburan ini terletak di dalam situs permukiman kuna Bukit Hasang dan sekitarnya.[15] Adapun pekuburan yang memiliki makam dari abad ke-19 dan ke-20, ditambah beberapa makam yang lebih lama, terletak di pinggir laut di Desa Kedai Gedang dan Si Gambo-gambo. Ada tiga jenis batu nisan, yaitu batu nisan dari batu tufa, batu dengan bahan dari batu granit berwarna keabuan dengan tekstur yang kasar, dan batu yang berasal dari sejenis batu pasir berwarna kekuningan atau abu-abu bertekstur halus. Kedua jenis batu terakhir merupakan jenis batu yang berasal dari luar Barus. Batu nisan yang berasal dari batu tufa, menurut Daniel, dkk., dianggap sebagai buatan lokal yang dapat dikelompokkan lagi kedalam dua tipe, yaitu batu nisan khas Barus dan batu nisan yang gayanya diilhami dari luar. Kumpulan batu nisan khas Barus menunjukkan kombinasi bentuk dan hiasan yang tidak ditemukan di daerah lain di Nusantara dan dapat dianggap sebagai inovasi lokal. Kumpulan yang kedua diilhami batu nisan granit dan "batu Aceh". Berdasarkan kajian yang mereka lakukan, Daniel, dkk. mengemukakan adanya evolusi seni makam Islam di Barus yang terdiri dari tiga periode. Periode pertama meliputi pertengahan abad ke-14 dan mungkin sebelumnya, ketika Barus mengembangkan satu kesenian makam dari batu tufa. Periode kedua adalah kesenian makam Islam di Barus dimulai pada pertengahan

abad ke-16 dengan kehadiran satu seni makam yang kemungkinan besar berasal dari daerah Banda Aceh sekarang. Periode ketiga bermula pada tahun 1820-an dan berakhir pada paruh pertama abad ke-20 (Daniel, dkk., 2015: 496–497).

Perihal kemampuan Barus dalam seni bangunan atau arsitektur diketahui dari sumber setempat, yang mengisahkan pembangunan Barus sebagai wilayah baru setelah mengalami beberapa kali perpindahan tempat. Budhisantoso, dkk. menyebutkan bahwa kota pelabuhan (bandar) Barus pada abad ke-17 berada di daerah Lobu Tua, sekitar 4–5 km di sebelah utara pelabuhan Barus sekarang. Pelabuhan ini dapat dicapai dengan menyusuri Aek Maco (Aek Batangura) dari pantai. Pada waktu itu pelabuhan Barus dikenal orang dengan nama Kuala Batanguar. Di kota pelabuhan ini terdapat pusat kegiatan perdagangan, terutama kapur barus. Diperkirakan pada abad ke-19 pelabuhan Batanguar di Lobu Tua tidak berfungsi lagi (tidak dapat dilayari) karena adanya pengendapan di Aek Maco. Bekas pelabuhan di Lobu Tua ini diperkirakan berada sekitar 5 km dari Kota Barus sekarang. Selanjutnya pelabuhan dipindahkan ke pantai, sekitar 7 km di sebelah tenggara Lobu Tua, di pantai Desa Kedaigadang. Karena lokasi pelabuhan ini tidak aman dari gangguan gelombang pada musim angin tenggara bulan Mei–Juli, pelabuhan dipindahkan lagi ke tempat yang lebih aman di dekat muara Aek Batugerigis. Muara Aek Batugerigis pada waktu itu berada jauh di daratan, sekitar 200 m dari pantai yang sekarang. Aek Batugerigis juga mengalami pengendapan, bahkan mengalami penyempitan, sehingga pelabuhan pindah lagi ke Bopet (Budhisantoso,1994/1995: 10)

Perpindahan pelabuhan Barus memperlihatkan kemampuan orang Barus dalam membangun pelabuhan yang sudah tentu diikuti dengan pembangunan permukiman penduduk di sekitarnya. Hal ini sekaligus menujukkan keterampilan orang Barus dalam seni bangunan atau pertukangan, selain kemampuan dalam membangun bangunan penting lain, seperti rumah raja (istana), masjid, dan makam-makam Islam. Lebih lanjut Budhisantoso menguraikan bahwa di wilayah Pesisir Tapanuli, dari Singkil hingga Natal, terdapat kesenian khas yang disebut Sikambang, yang berkaitan erat dengan cerita rakyat Sikambang. Cerita ini mengisahkan percintaan antara seseorang pemuda yang berasal dari kalangan rakyat biasa, bernama Sikambang, dan seorang putri raja bernama Puti Intan. Kesenian Sikambang berupa tari dan lagu yang diringi seperangkat instrument gendang dan biola. Pakaian dan dekorasi pelaminan pengantin menggambarkan adanya gabungan unsur kebudayaan asing (Arab, India, Cina dan Mesir) dengan unsur budaya timur (Minang dan Aceh). Kesenian Sikambang biasa dipertunjukkan pada upacara perkawinan dan khitanan. Sikambang yang ditampilkan pada upacara perkawinan menjadi teladan dan pedoman bagi pasangan pengantin dalam hidup berumah tangga kelak (Budhisantoso, 1994/1995: 35).

Tari dalam Kesenian Sikambang antara lain Tari Galombang, yang mempunnyai arti salam. Setelah Tari Galombang biasanya dilanjutkan dengan Randai, semacam silat yang terdapat di pesisir Tapanuli dan sama dengan Randai di Sumatera Barat. Randai semula dibawa ke Barus oleh pedagang Minang dan diterima serta diresapi oleh penduduk Barus dan sekitarnya. Bagian kesenian berikutnya berupa tari muda mudi, yaitu tari Kapri atau Tari Saputangan dan Tari Sikotek. Tari Sikotek berupa tari yang diiringi instrument. Di samping itu disajikan pula alunan senandung Sikambang tanpa tari, berisi nasihat-nasihat, keindahan alam Barus, serta cerita dan imabauan panggilan pulang bagi perantau yang sudah lama meninggalkan daerah asalnya. Senandung yang terakhir ini menandakan bahwa penduduk Barus suka merantau. Hal ini dilukiskan pula dalam bentuk Tari Pulau Pinang, yang disebut pula Tari Payung. Adat perkawinan ini tampak adanya pengaruh ajaran Islam serta mengikutsertakan unsur kebudayaan Minang dan Batak yang mereka sebut "adat semenda" atau disebut "adat Batak Pesisir' (Budhisantoso, 1994/1995: 36). Kesenian ini selalu hadir dalam upacara perkawinana dengan adat *sumando* dan menyebar ke seluruh pantai barat Sumatera Utara, bahkan sampai ke pantai Sumatera Barat dan Pantai Bengkulu. Sementara itu masyarakat Batak dalam berpesta selalu menyertakan kesenian Tortor dan Tuma (Budhisantoso, 1994/1995: 60).

9. Masa Akhir kerajaan

Barus mengalami kemunduran pada abad ke-17 M setelah kesultanan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda (1607–1637 M) memperkecil peran Barus sebagai pusat perdagangan dan kegiatan kebudayaan Melayu. Selain itu pada tahun 1650 M Barus dilanda gempa bumi dan tsunami dahsyat sehingga kegemilangan Barus tenggelam. Pada awal abad ke-18 kota ini menjadi sebuah pekan kecil yang sunyi yang hanya dihuni oleh nelayan-nelayan kecil.

Kemajuan Singkel sebagai pusat administratif regional dan munculnya pelayaran modern mengakibatkan Barus menjadi kurang penting. Begitu juga kewenangan raja-rajanya. Pada tahun 1852 M raja-raja di Barus menandatangani suatu usaha "penghapusan" cap kerajaan. Mereka menjadi pegawai yang digaji Pemerintah Hindia Belanda. Seperti raja-raja setempat lainnya, mereka diperikan hanya sebagai *kuria*, yaitu kepala distrik, di Barus Mudik dan di Barus Hilir (Drakard, 2003: 26).

Uka Tjandrasasmita menyebut penyebab kemajuan dan kemunduran suatu kota, antara lain faktor-faktor ekologi, teknologi, struktur kekuasaan, sistem nilai, dan ekonomi perdagangan.[16] Sementara itu M. Nur mengemukakan beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, yang menyebabkan naik-turun pusat perdagangan dan dunia maritim serta politik bandar Barus. Faktor eksternal di antaranya kian berfungsinya

bandar Sibolga sebagai pusat Keresidenan Tapanuli. Perairan Sibolga lebih tenang daripada Barus sebab dilindungi oleh pulau-pulau kecil di perairan Teluk Tapian Nauli. Selain itu bandar Belawan dan Teluk Bayur berkembang dengan pesat melebihi perkembangan Barus yang semakin pudar. Faktor internal lebih banyak disebabkan oleh kondisi Barus sendiri, seperti pertikaian yang berlarut-larut antara Raja Barus Hilir dan Raja Barus Hulu. Jaringan perdagangan ke pedalaman semakin sepi, sebab terbentuk jaringan baru menuju Sibolga. Setelah kapal dagang tidak lagi membawa barang dagangan ke Barus juga mempengaruhi perdagangan secara langsung (Nur, 2001: 165–166).

Sejak dibuka pada abad ke-19 bandar Sibolga di kawasan selatan Barus itu segera menjadi pusat perdagangan hasil perkebunan, hasil hutan dan barang dagangan lainnya. Hasil perkebunan terdiri atas tembakau, karet, dan kelapa sawit. Oleh karenanya bandar itu menjadi lebih ramai dikunjungi kapal dagang, termasuk sebagian kapal peralihan dari Barus. Sejak itu peran bandar Barus hilang dari jalur pelayaran (Nur, 2001: 166). Sutrisna (2014: 67) mengungkapkan bahwa interaksi yang terjadi antara kawasan pesisir dan pedalaman merupakan hubungan timbal balik dan terus-menerus. Oleh karena itu kuantitas sumber daya komoditi yang menurun dan okupasi menyebabkan kepudaran aktivitas perdagangan di pesisir. Maka, seiring perjalanan waktu, perdagangan internasional di kedua daerah itu telah berlalu.

Adapun surutnya peran Barus sejak abad ke-12, menurut Rusmin Tumanggor, kemungkinan disebabkan mulai berkurangnya hasil hutan, khsusnya kapur barus dan kemenyan di Baru; penanaman kapur barus dan tumbuhan lainnya di berbagai negara Asia lain seperti Cina; penemuan campuran zat-zat lain secara sintetis dan sintesis sebagai pengganti sejumlah fungsi kapur barus; terbentuknya kota-kota baru di Selat Malaka, seperti Pasai dan Peurelak Aceh; semakin menyempitnya wilayah kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang; perang perluasan wilayah kekuasaan antarkerajaan Aceh, Sriwijaya, Malaka, dan Tanah Melayu lainnya; serta munculnya jalur pelayaran baru yang menyebabkan beralihnya jalur perjalanan barang-barang yang dibawa oleh orang Eropa, yang semula berlayar melalui teluk Persi beralih menuju jalur Tanjung Harapan (Zainuddin, 1957: 32; Kruger, 1966: 15; Ambary, 1977: 17; Tumanggor, 1999: 110)

Lambat laun barang dagangan dari sumber daya hutan dan hasil bumi di Barus semakin menipis karena tidak diringi pembumidayaan serta pembaruan pelabuhan menjadi modern. Pedagang-pedagang asing pun meninggalkan Barus menyusul kesibukan perang antarraja-raja Barus—dan terakhir perang merebut kemerdekaan, mata pencaharian masyarakat berubah ke pertaniah sawah dan nelayan penangkap ikan, serta niaga antarkota. (Rusmin, 1999: 120).

Kemunduran Barus tidak berlangsung secara tiba-tiba dan mendadak, namun berlangsung dalam waktu panjang, bahkan berabad-abad. Barus yang pernah menjadi kota pelabuhan terkenal dan ramai dikunjungi pedagang dan pelaut internasional kemudian surut menjadi bandar yang tidak diperhitungkan. Berbagai faktor menjadi penyebabnya. Kemakmuran mengakibatkan Barus menjadi saingan dan incaran bagi kerajaan-kerajaan lain untuk menguasainya. Kerajaan Aceh bahkan berhasil menguasai Barus. Selain itu ada kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Pasai yang pernah jaya dan melihat Barus sebagai kota pelabuhan makmur yang perlu dikuasai. Penguasaan Barus oleh kerajaan lain dan faktor bencana menjadikan Barus makin menurun dan memudar. Persaingan antarkota yang ada di Sumatera dan peralihan pusat kota pelabuhan menjadi faktor lain. Penurunan sumber daya alam yang menyediakan barang komoditi yang dahulu menjadi primadona kian tergerus dan menipis serta orang Barus yang lebih suka merantau menjadikan Barus kian sepi dan sunyi ditinggalkan penduduknya. Konflik berkepanjangan di dalam lingkup internal kerajaan Barus berikut rakyatnya mengakibatkan Barus melemah dan tidak berdaya terhadap cengkeraman kekuasaan asing.

Akhirnya Barus hanya menjadi suatu nama yang pernah dikenang karena kemashyurannya pada masa lalu dengan kapur barusnya dan Hamzah Fansuri yang terkenal di seantero dunia sebagai penyair dan ahli sufi.

(Endnotes)

1 NJ Krom. 1965. *Jaman Hindu*. terjemahan Arief Effendi. hlm. 9–10.

2 J.C. Van Leur. 1960. *Indonesian Trade and Society*. hlm. 91

3 TW Arnold. 1935. The Preaching of Islam. hlm. 363–4.

4 Namun Ambari, dengan mengutip tulisan Wibisono, memaparkan bahwa dari segi pertanggalan tidak lebih tua dari abad ke-9 (Tumanggor, 1999:108).

5 Mohammad Yamin. 1956. *Gajah Mada*. hlm. 50–51.

6 Abdullah ibn Abdulkadir Munsji. 1952. *Sejarah Melayu*. Terjemahan TD Situmorang dkk., hlm.10–11.

7 J.G de Casparis. 1961. *Perkembangan Pengetahuan Indonesia lama*. Terjemahan Raksakusumah. hlm. 14.

8 Lihat Lucas Partanda Koestoro (2014) "Jejak Peninggalan Maritim di Sumatra Utara" dalam Tim Penulis Balai Arkeologi Medan (2014) *Sumatra Utara: Catatan Sejarah dan Arkeologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

9 Keberadaan orang Tamil di Sumatera juga tercermin dari prasasti Cola, India, berangka tahun 1031 M, yang memberitakan penyerangan raja Cola atas Raja Śriwijaya sekitar tahun 1023 1024 M. Demikian pula halnya keberadaan Prasasti Bandar Bapahat di Suroaso, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, beraksara Grantha dan berbahasa Tamil dari masa Raja Adityawarman pertengahan abad ke-14. Lihat Kostoro, *ibid*. 180.

10 Achmad Cholid Sodrie membaca tulisan pada batu nisan ini berupa angka tahun Tuhar Amisuri meninggal, yakni 19 Safar 602 H; sedangkan De Boer membacanya sebagai Tuhan Amarsura yang meninggal pada 19 Safar 972 H. Lihat Koestoro, *ibid*. hlm. 181.

11 Hasil penggalian arkeologis di Barus diterbitkan dalam beberapa publikasi, di antaranya oleh Claude Guillot, dkk. (2017). *Barus Seribu Tahun Yang lalu*; Daniel Perret & Heddy Surachman (peny.) (2015). *Barus Negeri Kamper, Sejarah Abad ke-12 hingga Pertengahan Abad ke-17*; dan Claude Guillot (2014). *Lobu Tua Sejarah Awal Barus*.

12 *Dayah* dapat disamakan dengan sekolah menengah atas atau madrasah Aliyah sekarang. Dayah terdapat hamper terdapat pada tiap-tiap daerah Uleebalang di Aceh. Kadang-kadang ada dayah-dayah yang berpusat pada masjid-mesjid Bersama dengan *rangkang* (tempat murid tinggal). Tetapi kebanyakan dayah berdiri sendiri ditempat luar pekarangan masjid, dengan menyediakan sebuah balai utama sebagai aula yang digunakan menjadi tempat mengajar dan sembahyang berjamaah. (Hasmy, 1983:192).

13 Di antaranya Hasan Fansuri dan Abdul Jamal. Lihat Hadi (2008), *ibid*.

14 Lihat Lukman Nurhadi (1990). "Tinjauan Tipologi Nisan Pada makam Islam Kuna di Indonesia", *Analisa Hasil Penelitian Arkeologi I dan II*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

15 Secara administrasi, saat ini pekuburan tersebut terletak di desa Gabungan Hasang, Penanggahan, dan Aek Dakka di kaki Bukit Barisan (Perret, dkk., 2015).

16 Uka Tjandrasasmita. "Kota Pemukiman Masa Pertumbuhan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia (Penerapan Arkeologis dan Konsep-konsep Ilmu-ilmu Sosial)", makalah *Pertemuan Ilmiah Arkeologi III*. Cilito, 23–28 Mei 1983, hlm. 9–11.

— 6 —

Kerajaan Samudera Pasai
(1267-1521)

1. Proses Awal Berdiri

Kesultanan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam yang terletak di pantai timur ujung utara Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan laut dan Selat Malaka. Kerajaan ini muncul pada pertengahan abad ke-13 M dan berkembang hingga awal abad ke-16 M. Adapun penguasa yang pertama adalah Sultan Malikush Shalih, yang memerintah dari tahun 1261 hingga 1297 M (Abimanyu, 2014:122; Pulungan, 2018: 33). Kerajaan tersebut diyakini berdiri hampir bersamaan dengan kemunculan Kerajaan Majapahit di Jawa bagian timur (Ayatrohaedi, 1993: 3).

Secara administratif pemerintahan sekarang, pusat Kesultanan Samudera Pasai terletak dan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara (Ismail, 1997:7), lokasi tepatnya diperkirakan terletak antara Sungai Jambu (Krueng Jambu Aye) dan Sungai Pasai (Krueng Pasai) dekat pantai Lhokseumawe (Kusmiati, 1980: 477). Meskipun demikian beberapa pakar menyebut letak kerajaan berbeda-beda (Ambary, 1982: 120). Hill (1960: 12), misalnya, mengajukan teori bahwa Kerajaan Samudera Pasai berada di hulu Sungai Peusangan (sekarang di pedalaman Gayo). Hill memberi alasan bahwa Sungai Peusangan pada masa itu merupakan jalur perdagangan penting. Beberapa sumber setempat menyebut pusat kota kerajaan itu mengalami beberapa kali perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang kemudian dikenal sebagai bekas kota Samudera Pasai.

Kehadiran Kesultanan Samudera Pasai diketahui dari sumber-sumber setempat dan sumber asing yang menyebut dan memberitakan kerajaan tersebut dengan nama Samudera, Pasai, atau—kadang-kadang—Samudera Pasai (Ismail, 1997: 3). Selain catatan-catatan sejarah tersebut, bukti kehadiran Kesultanan Samudera Pasai juga didukung oleh tinggalan arkeologis berupa makam para raja yang tersebar di bekas wilayah Kesultanan Samudera Pasai, di dalam kompleks makam di wilayah Kecamatan Samudera, Aceh sekarang.[1] Temuan mata uang emas yang memuat nama-nama sultan yang memerintah memperkuat bukti keberadaan Kesultanan Samudera Pasai. Hasil survei dan ekskavasi yang dilakukan di situs Samudera Pasai menemukan pecahan bata dan pecahan keramik yang berkronologi abad ke-12 hingga abad ke-19 M, memperkuat dugaan pusat kota kerajaan Samudera Pasai berada di Cot Astana (Surachman, 2015:89),

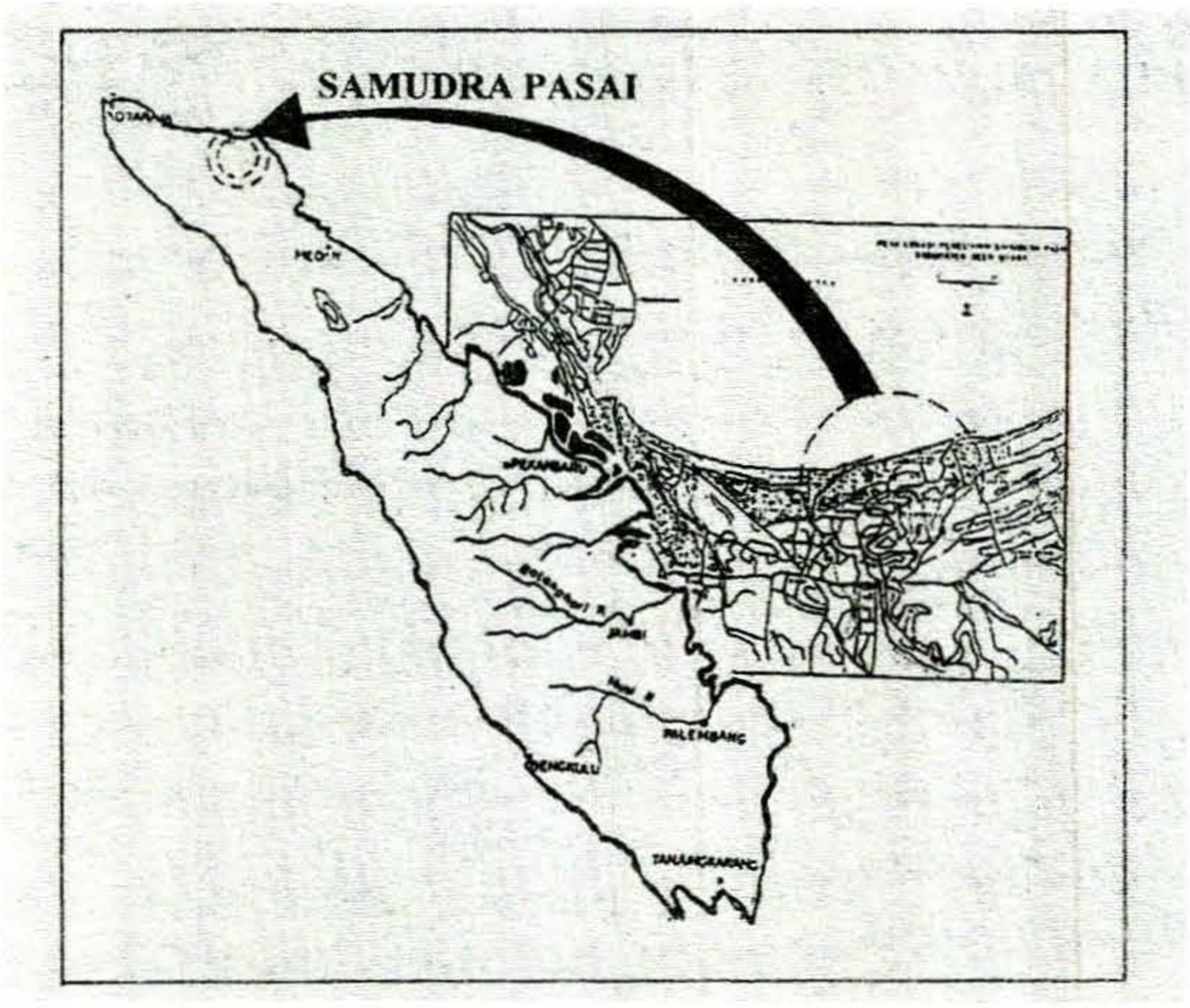

Lokasi Kesultanan Samudera Pasai
Sumber: Ismail, 1997

meskpun hingga kini bukti keberadaan pusat kota yang berupa bangunan keraton atau istana memang belum diperoleh.

Sumber-sumber setempat, seperti *Hikayat Raja raja Pasai*, *Kronika Pasai*, *Sejarah Melayu*, dan *Kakawin Nagarakrtagama* memberi gambaran mengenai asal-usul Kerajaan Samudra Pasai.

Hikayat Raja-raja Pasai menguraikan secara agak lengkap kisah awal berdiri Samudera Pasai. Secara ringkas hikayat tersebut mengisahkan dua orang raja bersaudara. Yang tua bernama Raja Ahmad dan yang muda bernama Raja Muhammad. Mereka masing-masing membangun sebuah negeri di Samalanga dengan membuka lahan hutan untuk mendirikan kota. Ketika membuka dan menebas hutan, Raja Muhammad menemukan seorang anak perempuan dari pokok bambu dan kemudian diberinya nama Putri Betung. Kabar perihal Putri Betung itu sampai ke Raja Ahmad. Sementara itu ketika membuka hutan Raja Ahmad menemukan orang tua yang menunjukkan kepadanya seekor gajah yang setiap Jumat membawa seorang anak lelaki ke tepi sungai untuk memandikannya. Raja Ahmad mengambil anak lelaki itu dan memeliharanya serta memberi nama Meurah Gajah (Tuan Gajah). Setelah dewasa, kedua anak itu dikawinkan. Dari perkawinan tersebut lahirlah dua orang putra. Yang tua bernama Meura Silu dan yang muda bernama Meura Hasum. Kelak Meurah Silu menurunkan para raja di Pasai (Djajadiningrat, 1995: 58).

Pada suatu hari Meura Gajah melihat sehelai rambut Putri Betung berwarna emas. Ia meminta agar rambut itu dicabut, tetapi istrinya mengingatkan bila rambut emas dicabut akan terjadi perceraian di antara mereka. Meura Gajah tetap memaksa agar rambut emas itu dicabut. Ketika rambut emas dicabut keluarlah darah putih dari kepala Putri Betung yang menyebabkan kematiannya.

Akibat peristiwa tersebut terjadilah peperangan antara Raja Muhammad dan Raja Ahmad yang mengakibatkan keduanya tewas. Banyak prajurit dari kedua pihak yang tewas pula. Meura Silu dan Meura Hasum sepakat meninggalkan Samalanga untuk membangun negeri lain. Mereka berjalan sampai ke Beurana (Bireun). Di hulu sungai Meura Silu menemukan cacing gelang-gelang yang kemudian menjelma menjadi emas dan perak. Dengan emas itu ia mengupah orang menangkap kerbau liar untuk dijinakkan. Tindakan itu tidak disukai Meura Hasum, sehingga ia mengusir Meura Silu pergi dari Beurana. Setelah jauh berjalan Meurah Silu tiba di Buluh Talang, ibukota sebuah kerajaan yang diperintah oleh Megat Iskandar. Meurah Silu diperkenankan tinggal. Ia memperkenalkan adu ayam sehingga negeri itu menarik perhatian banyak orang dari negeri lain untuk datang. Megat Iskandar sangat menyukai Meura Silu. Dia bermusyawarah dengan orang-orang besar dan sepakat menobatkan Meura Silu menjadi raja mereka. Saudara Megat Iskandar, Malik al Nasr, tidak setuju. Maka terjadilah perang di antara keduanya dan berakhir dengan kekalahan Malik al Nasr (Abdullah & Djaenuderajat, 2015).

Pada suatu hari, ketika sedang berburu, Marah Silu mendengar anjing pemburunya, si Pasai, menyalak terus di atas sebuah bukit. Marah Silu menyusul dan melihat seekor semut sebesar kucing. Semut itu ditangkap dan dimakannya. Ditempat itulah Marah Silu mendirikan istana. Setelah rakyat bermukim di sekitar istana mereka menamakan tempat itu Samudera, kependekan dari semut raya atau semut besar (Djajadiningrat, 1995: 58–59)

Sementara itu, menjelang wafat, Nabi Muhammad saw mengkhabarkan kepada para sahabatnya bahwa di benua bawah angin kelak akan muncul sebuah negeri yang bernama Samudera. Demikian sabda baginda, "bahwa ada sepeninggalku wafat itu, ada sebuah negeri di bawah angin, Samudera namanya; apabila ada didengar khabar negeri itu, maka kamu suruh sebuah kapal membawa perkakas alat kerajaan dan kamu bawa orang dalam negeri itu masuk agama Islam serta mengucapkan dua kalimat syahadat (Abdullah & Djaenuderajat, 2015: 154).

Ketika Samudera berdiri, segera berita itu sampai ke Mekkah, dan Syarif Mekkah memerintahkan Syekh Ismail, seorang ulama dan faqir terkemuka, berlayar bersama 70 pengikutnya untuk mengislamkan Raja Samudera. Dalam pelayaran ke Samudera mereka singgah di Mangiri. Sultan Mangiri keturunan Abu Bakar Siddiq dan telah turun takhta dan menjadi fakir, kemudian ikut berlayar ke Samudera. Sebelum kapal yang ditumpangi Syekh Ismail tiba di Samudera, Meura Silu bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad saw, yang mengajarinya mengucapkan dua kalimah syahadat dan tatacara shalat. Setelah diislamkan, Meurah Silu diberi gelar Sultan Malik al-Saleh, sedangkan kotanya dinamakan Samudera Dar-as-Salam. Kemudian seluruh rakyat

Samudera berbondong-bondong memeluk Islam (Djajadiningrat, 1995: 58–59; Abdullah & Djaenuderajat, 2015: 66).

Malik al-Saleh mendirikan kota lain. Kota itu dinamainya Pasai, karena tempat itu merupakan tempat dahulu ia berburu dan melihat anjingnya, si Pasai, berlaga dengan seekor pelanduk. Jadi nama kota tersebut mengikuti nama anjing kesayangan sultan yang berhasil menangkap pelanduk ketika negeri itu baru dibuka. Negeri baru Pasai dibangun sebagai kota pelabuhan dagang di Selat Malaka yang lebih strategis daripada kota Samudra (Djajadiningrat, 1995: 58–59; Abdullah & Djaenuderajat, 2015).

Selain *Hikayat Raja Pasai* sumber-sumber asing berupa catatan atau tulisan musyafir yang datang ke Pasai, seperti Marcopolo, Ibn Batutta, dan Tome Pires, serta berita Cina, berita Arab, dan berita Portugis menjadi sumber yang membantu menjelaskan Kesultanan Samudera Pasai. Adapun berita tertua mengenai Samudera Pasai diperoleh dari catatan Cina tahun 1288 M, yang menyatakan bahwa *Lan wu li* (Lamuri) dan *Sawen ta la* (Samudera) mengirim utusan ke negeri Cina. Sebelumnya, sumber Cina abad ke-12 M, mencatat bahwa lada merupakan salah satu komoditi utama Samudera Pasai dan Pidie (Roelofs, 1962: 19). Namun keduanya dikenal sebagai pelabuhan Samudra (Ambary, 1998: 128). Kemudian masih ada sumber Cina tahun 1385 yang menyebutkan bahwa Kerajaan Samudera diperintah oleh sultan kelima, Sultan Malik Ghandhanfar, yang mengirim utusan ke Cina (Ismail, 1993: 3). Yang dimaksud sultan kelima Samudera Pasai adalah Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir Sultan Khaidir yang memerintah tahun 1383–1405 M.

Kesultanan ini, menurut Tome Pires, diperintah oleh seorang raja yang telah Islam (Moor) sebagaimana yang ia nyatakan di dalam laporannya bahwa sebagian besar raja yang ada di Pulau Sumatera merupakan orang-orang Moor, sedangkan beberapa yang lain merupakan orang *pagan*. Di negeri yang dipimpin oleh orang *pagan* terdapat kepercayaan memakan musuh yang tertangkap. Raja yang menguasai wilayah di terusan sepanjang Aceh hingga Palembang adalah orang Moor, sedangkan dari Palembang hingga Gamispola dikuasai oleh orang-orang *pagan*, begitu juga dengan wilayah di pedalaman juga dipimpin oleh orang *pagan* (Pires, 2014:195).

Laporan Marcopolo menyebutkan bahwa pelabuhan Samudera Pasai merupakan pelabuhan *entreport* di Sumatera yang mengadakan hubungan dagang internasional dengan barang-barang yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah, sutra, keramik, dan gading gajah. Sementara itu seorang utusan dari Cina, Cheng Ho, yang melakukan perlawatan ke Samudera Pasai pada abad ke-13 mencatat bahwa lalu lintas perdagangan antara negara-negara Timur dan Barat sangat ramai. Di Samudera Pasai

terdapat barang-barang yang diperlukan oleh negara-negara lain dengan harga murah, sedang transaksi dilakukan dengan mata uang Timah (Surachman, 2015: 74)

Bukti keberadaan raja-raja yang telah Islam dan pernah memerintah di Samudera Pasai dibuktikan dengan keberadaan makam-makam raja-raja yang hingga kini masih dapat dilihat di beberapa tempat di Aceh, di antaranya kompleks makam Malikul Shaleh dan kompleks makam Naina Hisamuddin yang dibangun tidak jauh dari Lampuh kota, kompleks makam Tengku Syarif, kompleks makam 44 (*Peut Ploh Peut*), kompleks makam Tengku Sidi Abdullah, dan kompleks makam Nahrisyah yang dibangun tidak jauh dari Cot Astana. Keberadaan kubur-kubur tersebut secara tidak langsung memberi gambaran tentang pusat ibukota Kerajaan Samudera Pasai. Di luar wilayah yang diduga sebagai pusat kota terdapat kompleks kubur lain yang masih berkaitan dengan masa kesejarahan Kesultanan Samudera Pasai (Surachman, 2015: 78).

Selain itu mata uang emas dari sultan-sultan yang memerintah di Pasai juga menjadi bukti kehadiran kerajaan Islam di ujung Sumatera ini. Pada permukaan mata uang dijumpai nama-nama sultan yang yang meneluarkannya. Di samping memperkuat kehadiran raja-raja Pasai mata uang tersebut sekaligus membuktikan kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah maju dan penting pada masanya; bahkan menurut T. Ibrahim Alfian mata uang emas Kerajaan Pasai merupakan mata uang emas pertama dan dianggap sebagai *deureuham* 'dirham' tertua, yang kemudian ditiru oleh kerajaan Aceh (Sufi, 1997: 93).

Moens dan Slamet Mulyana pernah membahas asal-usul kata "Pasai". Moens berpendapat bahwa kata "Pase" berasal dari istilah "Parsi" yang diucapkan menurut lafal setempat menjadi Pa'se. Pendapat itu didasarkan pada keterangan bahwa sejak abad ke-5 M saudagar Parsi datang berdagang dan bertempat tinggal di daerah itu. Dengan demikian daerah ini bukan baru muncul pada abad ke-13, tetapi sejak zaman Sasanid di Iran (Mansoer, 1963). Sementara itu Slamet Mulyana mengatakan bahwa nama "Pasai" berasal dari kata *tapasai* yang berarti "tepi laut". *Tapa* yang berarti "tepi" masih dikenal pada kata *tapa n uli*, yang menjadi Tapanuli sebagai nama daerah Batak di Sumatera. Kata *tapa* masih banyak dijumpai dalam bahasa-bahasa di Polinesia yang berarti "tepi". Kata *sai/tasi/tasik/tahi* berarti "laut", yang merupakan kosa kata Melayu Polinesia alias Nusantara. Kata *pasai* sinonim dari kata "pantai", asalnya pun sama. Sementara "samudera" berarti "laut". Penyebutan itu kiranya dimaksud sebagai "perlawanan" dari negara pedalaman di hulu Sungai Peusangan yang pernah dibangun oleh Marah Silu (Slamet Mulyana, 2005: 138).

Saipuddin (1979) menyatakan bahwa nama "Pase" diambil dari kata "pasir" menurut logat dan lidah orang Aceh, sesuai dengan

Sultan Ke-	Nama	Tahun Pemerintahan
1	Sultan Malikus Saleh	1267–1297 M
2	Sultan Muhammad Malikul Zahir	1297–1326 M
3	Sultan Mahmud Malikul Zahir	1326–1345 M
4	Sultan Ahmad Malikul Zahir	1345–1383 M
5	Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir Sultan Khaidir	1383–1405 M
6	Sultan Muhammad Said Malikul Zahir	
7	Sultanah Bahiah	
8	Sultan Ahmad Permata	
9	Sultan Khaidir Malikul Zahir	
10	Sultanah Nahrisyah Malikul Zahir	1405–1412 M
11	Sultan Bahrain Syah	
12	Sultan Abu Zaid Malikul Zahir	1412–1455 M
13	Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir	1477–1500 M
14	Sultan Abdullah Malikul Zahir	1501–1513 M
15	Sultan Mahmud Malikul Zahir	1455–1477 M
16	Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir	1513–1524 M

Tabel nama Sultan Samudra Pasai dan tahun pemerintahannya.

letak Kerajaan Pase yang berada di pantai Pulau Sumatera yang *ber-pasir*. Orang-orang Aceh pada umumnya hampir tidak dapat mengucapkan huruf "r" di akhir suatu kata (Hamka, 2016: 174–175). Mereka mengucapkan "pase" untuk "pasir", seperti juga mengucapkan "aye" untuk "air". Pada zaman penjajahan Belanda, orang-orang Aceh tidak sudi menyebut Belanda dengan "Belanda", tetapi si "Kape" untuk maksud "si-Kafir" atau "si-Kapir". Oleh karena itu untuk mengenang tumpah-tumpah darah pantai Aceh yang bersejarah mereka menamakan kerajaan Islam awal di Indonesia dengan sebutan "Kerajaan Pase" sebagai suatu sanjungan dan kebanggaan "nasionalnya" dengan sikap yang amat bersahaja: Kerajaan Pasir dengan lidah Aceh menjadi "Kerajaan Pase".

2. Para Sultan

Hikayat Raja-raja Pasai menceritakan Kerajaan Samudera diperintah oleh Malikus Saleh. Sementara kerajaan Pasai berkembang setelah Samudera berdiri dan diperintah oleh Malikus Zahir (Ismail, 1993: 3). Sultan berikut yang disebutkan dalam *Hikayat Raja Pasai* adalah kedua putra Malikul Zahir, Sultan Malikul Mahmud dan Malikul Mansur (Ismail, 1997: 91). Kedua sultan ini memerintah secara bersamaan di dua wilayah yang berbeda: Sultan Malikul Mahmud memerintah di Kerajaan Pasai, sedangkan Sultan Malikum Mansur memerintah di Kerajaan Samudera (Ismail, 1997: 93).

Dari sumber Cina tahun 1385 diketahui bahwa kerajaan Samudera diperintah oleh Sultan Malik Ghandhanfar yang mengirim utusan ke Cina. Adapun Sultan Pasai yang mengirim utusan ke Cina adalah sultan kelima, yaitu Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir Sultan Khaidir yang memerintah tahun 1383–1405 M.

Makam Malik As Saleh
Sumber: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya

Berdasarkan tinggalan arkeologis berupa mata uang emas diperoleh keterangan tentang sultan-sultan yang pernah mengeluarkan mata uang emas dan pernah memerintah di Kesultanan Samudera Pasai. Secara berturut-turut Sultan Samudera Pasai adalah Sultan Muhammad Malik Zahir (1297–1326), Sultan Mahmud Malik Zahir (1326–1345), Sultan Mansyur Malik az-Zahir (1326–…), Sultan Ahmad Malikul Zahir (1346–1383), Sultan Zainal al Abidin Malik az Zahir (1383–1405), Sultan Sallahd-din (1405–1412 M), Sultan Abu Zaid Malik az Zahir (1412–1455), Sultan Zain al abidin (1477–1500), dan Sultan Abdullah Malikul Zahir (1501–1513) (Tjandrasasmita, 1997: 26).

3. Wilayah Kekuasaan

Wilayah kekuasaan Kesultanan Pasai pada masa kejayaannya terletak di daerah pantai utara Aceh dan diapit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Peusangan dan Sungai Pasai. Sementara itu ada pendapat yang menyatakan bahwa wilayah kerajaan Samudera Pasai lebih luas lagi, ke sebelah selatan sampai dengan muara Sungai Jambu Ayer. Walau bagaimanapun kerajaan ini berada di daerah aliran sungai (DAS) yang hulu-hulunya berasal jauh di pedalaman Dataran Tinggi Gayo (Aceh Tengah) (Ismail, 1997: 7).

Tome Pires menyebutkan bahwa Kerajaan Pasai berbatasan dengan Kerajaan Pirada dan di sisi lain berbatasan dengan Negeri Batak di bawah pemerintahan Raja Tamjano. Wilayah Pasai terbentang di sepanjang pesisir pantai. Perbatasannya di pedalaman bersinggungan dengan wilayah Raja Manicopa (Pires, 2014: 202). Dengan demikian secara geografis dan administratif Kesultanan Samudera Pasai menduduki wilayah pesisir timur dari ujung utara Pulau Sumatera yang kini termasuk ke dalam Provinsi Aceh, membentang sekitar kota Lhokseumawe ke arah utara.

4. Masa Kejayaan

Kerajaan Samudera Pasai mengalami perkembangan dan kemajuan pesat karena didukung oleh lokasi strategis, berada di jalur pelayaran dan perniagaan internasional Selat Malaka yang sudah ada sejak abad-abad pertama Masehi.[2] Selain itu, sejak abad ke-7–8 M, para pedagang muslim dari semenanjung Arabia, Persia (Iran), dan negeri-negeri Timur Tengah lainnya mulai memegang peran penting, turut serta dalam jaringan pelayaran dan perdagangan internasional yang jaraknya lebih jauh, yaitu teluk Aden dan Teluk Persia, melalui Samudera Hindia dan Selat Malaka sampai Laut Cina Selatan. Perkembangan jaringan pelayaran dan perdagangan melalui Selat Malaka tersebut juga didorong oleh perkembangan kekuasaan di Asia barat di bawah Dinasti Ummayah (40–132 H/661–750 M), di Asia Timur di bawah Dinasti Tang (618–907 M), dan Asia Tenggara di bawah Kerajaan Sriwijaya (abad ke-7–14 m). Oleh karena itu sejak abad ke-7–8 M sampai abad ke-11 M di daerah pesisir Selat Malaka dan Cina Selatan tumbuh masyarakat muslim akibat proses Islamisasi. Salah satu di antaranya terdapat di Pasai yang merupakan bandar persinggahan para pedagang dan pelaut dari berbagai negeri. Selain itu Pasai memiliki komoditi lada yang dicari oleh para pembeli dari berbagai negeri, sehingga Pasai tumbuh menjadi kota pelabuhan dan perdagangan yang menarik bagi para pedagang dan pelaut. Pertumbuhan dan perkembangan Pasai juga tidak lepas dari kondisi ekonomi Śrîwijaya yang mulai menurun akibat kebijakannya membuat para pedagang menghindari Sriwijaya dan lebih memilih singgah dan datang ke Pasai. Dampak jatuhnya Hulagukhan di Baghdad pada tahun 1255 M juga membuat para ulama dan pedagang Islam dari Persia, India, dan sekitarnya datang dan singgah di Pasai untuk sekaligus meluaskan ajaran agama Islam ke Nusantara. Pasai menjadi bandar yang semakin banyak dikunjungi oleh para juru dakwah Islam dan setelah rajanya menjadi Islam kerajaan ini tumbuh dan berkembang sebagai pusat pembelajaran Islam yang terhubung dengan tempat dan pusat penyebaran Islam Nusantara dan Asia Tenggara.

Dalam lintasan waktu yang panjang, sekitar 200 tahun, Kesultanan Samudera Pasai mengalami pertumbuhan dan perkembangan hingga kemudian mengalami keruntuhan. Setiap sultan yang memerintah memiliki peran dan sumbangsih masing-masing, dimulai dari sultan pertama Sultan Malik as Salih yang memerintah pada akhir abad ke-13 M hingga sultan terakhir Sultan Zainal Abidin yang memerintah pada awal abad ke-16 M. Berikut peran dan periode masing-masing sultan di kesultanan Samudera Pasai.

Sultan pertama, Sultan Malikus Saleh atau Marah Silu, memerintah tahun 1267 hinga tahun 1289 M. Ia pendiri Kesultanan Samudera Pasai dan membangun negeri Samudera di tepi Sungai Peusangan. Ia juga membangun kota Pasai lebih ke arah muara Sungai Peusangan. Pada awal tahun 1282 M, menurut sumber Cina, diketahui ada kerajaan kecil bernama *Sa-mu-ta-la* (Samudera) yang mengirim

utusan ke Raja Cina. Duta-duta itu disebut dengan nama muslim, yaitu Husein dan Sulaiman (Pulungan, 2018: 341; Maryam, dkk., 2012: 325). Berita itu menunjukkan bahwa Sultan Malik as Saleh mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain. Berdasarkan nama yang disandang dan tertera pada batu nisannya, al-Malikush Shaleh, Hamka (2016: 523) mengatakan bahwa raja itu menerima pengakuan untuk menggunakan gelar "sultan" datang dari Syarif Mekah yang pada waktu itu berada di bawah naungan Kerajaan Mamalik di Mesir. Sebagian gelar yang disandang oleh raja-raja Mamalik Mesir pada waktu itu *Khadimul Haramain* (pelayan dari kedua tanah suci). Adapun gelar Al Malikhus Shaleh adalah gelar yang dipakai oleh pembangun kerajaan Mamalik pertama di Mesir, yaitu al-Malikush Shaleh Ayub. Hal ini memperkuat pendapat telah ada hubungan langsung Samudera Pasai dengan negeri-negeri Arab, terutama Mekah (Hamka, 2016: 523).

Sultan kedua, Sultan Muhammad Malikul Zahir (1297–1326 M), anak Sultan Malikus Saleh. Pada masa pemerintahannya Kerajaan Samudera Pasai mengalami kemajuan pesat. Marcopolo mencatat sultan mengeluarkan mata uang emas dirham untuk memperlancar perdagangan dengan para pedagang dari mancanegara, sehingga perdagangan dengan luar negeri, seperti Parsi, Arab, Eropa, dan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara semakin maju. Sultan juga melakukan perluasan wilayah melalui strategi *meubisan*. Ia menikah dengan putri Sultan Perlak ke-18 Sultan Makhdum Alaiddin Abdul Aziz Syah. Dengan perkawinan tersebut wilayah Perlak disatukan dengan wilayah Samudera Pasai di bawah kekuasaan Sultan Muhammad Malikul Zahir. Selain itu ia juga meluaskan wilayah hingga ke Negeri Merdu atau wilayah Meurah Putih dan Negeri Samalanga (wilayah Meurah Hitam).

Sultan ketiga, Sultan Mahmud Malikul Zahir, anak Sultan Muhammad Malikul Zahir dan cucu sultan Malikus Saleh. Ia memerintah tahun 1326–1345 M. Pada masa pemerintahannya Ibn Batutah datang ke Pasai dan mengisahkan bahwa Sultan Samudera menyambutnya dengan ramah dan bahwa penduduknya beragama Islam mazhab Syafei. Berdasarkan kisah Ibn Battutah diketahui Kerajaan Samudera Pasai merupakan pusat studi agama dan tempat berkumpul para ulama dari berbagai negeri Islam untuk berdiskusi mengenai berbagai masalah keagamaan dan keduniaan. (Pulungan, 2018: 341). Ibnu Battutah juga mengisahkan bahwa sultan sangatlah teguh memegang agama. Mazhab Syafei dipahami secara mendalam dan sultan sanggup bertukar pikiran dengan para ulama. Ketika akan pergi shalat Jumat baginda berjalan kaki dan pulangnya barulah naik kendaraan gajah atau kuda. Baginda suka sekali mengembangkan agama ke negeri-negeri yang berdekatan dan negeri mana pun yang belum memeluk agama Islam. Dengan segala kerendahan hati ia mengingatkan agar sudi membayar upeti kepada kerajaan pada waktu yang ditentukan (Hamka, 2016: 524). Diceritakan pula oleh Ibnu Battuta bahwa di sana ia bertemu dengan dua orang ulama yang berasal dari Syiraz (Irak) dan Isfahan,

Qadi Syarif Amir Sayyid dari Syiraz dan Tajuddin ahli agama dari Isfahan (Irak) (Tjandrasasmita, 2012: 22–23). Ulama yang berasal dari Syiraz diangkat sultan sebagai *qadhi* kerajaan. Sultan juga mempunyai armada kapal dagang yang besar sebagaimana dikisahkan Ibnu Battuta dalam laporan perjalanannya setelah selesai tugasnya di Tiongkok (Hamka, 2016: 524). Selain itu pada tahun 1345 ia bertemu dengan Sultan al Malik al Zahir yang juga telah mengirimkan utusannya ke Delhi dan Cina (Maryam, dkk., 2012: 325). Menurut Ibn Battutta, pada saat itu Bandar Samudera sangat ramai dikunjungi tamu baik untuk berdagang maupun untuk belajar ilmu agama dari para ulama.

Sultan ke-4, Sultan Ahmad Malikul Zahir, memerintah pada tahun 1345 hingga tahun 1383 N. Pada masa ini Ibn Battuta singgah di Pasai ketika sedang menuju ke Negeri Cina. Pada saat itu, menurut Ibn Battuta, sudah banyak alim ulama, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang mengajarkan agama di kerajaan ini. Pada masanya kerajaan diperluas hingga ke Kerajaan Benua. Kerajaan Samudera Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit pada tahun 1345 dan 1350. Serangan itu menyebabkan Sultan Pasai melarikan diri dari ibukota kerajaan.

Sultan ke-5, Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir, memerintah pada tahun 1383 hingga 1405 M. Pada tahun 1378 M Majapahit menyerang Samudera Pasai di bawah pimpinan Patih Nala. Pasukan Majapahit berhasil dipukul mundur oleh Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir setelah ada berita bahwa Raja Majapahit Hayam Wuruk telah meninggal dunia pada tahun 1389 M. Baginda mengutus banyak mubaligh dari kalangan keluarga istana, ulama, dan keturunan *sayid* ke seluruh Nusantara, seperti ke Jawa, Melayu, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sultan menjalin hubungan dengan Cina yang saat itu diperintah oleh Kaisar Ma Hua dengan panglima Cheng Ho.

Nama sultan keenam hingga sultan terakhir, Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir, berikut masa pemerintahannya dapat dilihat pada tabel di atas.

Pada tahun 1521 Samudera diserang oleh Portugis dan menduduki Samudera selama tiga tahun. Kemudian pada tahun 1524 Samudera Pasai dianeksasi oleh Sultan Aceh Ali Mughayat Syah dan untuk selanjutnya kerajaan Samudera Pasai berada di bawah kekuasaan pengaruh kesultanan Aceh yang berpusat di Banda Aceh Darussalam (Pulungan, 2018: 342)

Sebagaimana tampak pada tabel di atas Samudera Pasai pernah diperintah oleh seorang sultanah, yaitu Sultanah Nahrasiyah, yang memegang pucuk pimpinan tahun 1405 hingga 1428 M. Ratu Nahrasiyah merupakan anak Sultan Zainal Abidin Malikudzahir yang mangkat pada tahun 1405 M. Ia memerintah dengan sifat keibuan dan penuh kasih sayang. Harkat dan martabat perempuan

begitu mulia sehingga banyak yang menjadi penyiar agama pada masa pemerintahannya (Adji & Achmad, 2018: 150). Pada zaman pemerintahan Ratu Nahrasiyah berkembang subur paham tharekat wujudiyah yang merupakan percabangan paham syiah. Hal ini terjadi karena ratu mengangkat tokoh terkemuka gerakan tharekat wujudiyah sebagai *mangkubumi* atau perdana menteri. Ia orang yang kejam dan menyuruh bunuh lebih dari 40 orang ulama ahlusunnah, dengan dalih untuk mencegah memperisteri anak kandungnya sendiri. *Mangkubumi* ini kemudian dibunuh oleh Malik Mustafa, suami Ratu Nahrisayh (Hasmy, 1983: 49–50).

Keagungan Sultanah Nahrasiyah tampak dari makamnya yang dibuat dari batu pualam dan penuh dengan ukiran kaligrafi. Snouck Hurgronje (1907) menyatakan bahwa makam Sultanah Nahrasiyah yang berada di situs purbakala Kesultanan Samudera Pasai terbuat dari pualam dengan hiasan ukiran kaligrafi dan merupakan makam terindah di Asia Tenggara (Adji & Achmad, 2018: 150). Menurut Snouck, makam Sultanah Nahrasiyah merupakan duplikat makam Umar ibn Akhmad al-Kazaruni di Cambay, Gujarat-India, yang mangkat pada tahun 734 H atau 1333 M.

Melihat bentuk makamnya yang indah dan istimewa, bisa dipastikan Sultanah Nahrasiyah merupakan perempuan raja terbesar pada zamannya. Di nisannya terdapat nukilan-nukilan huruf Arab yang berisi informasi tentang makam tersebut. Dalam hal ini Ibrahim Alfian menjelaskan bahwa ukiran berbahasa Arab itu bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu bermakna sebagai berikut:

> "Inilah kubur wanita yang bercahaya yang suci, ratu yang terhormat almarhumah yang diampuni dosanya. Nahrasiyah..., putri Sultan Zain al-Abidin putri Sultan Ahmad putra Sultan Muhammad putra Sultan Malikul Saleh. Kepada mereka itu dicurahkan rahmat dan diampuni dosanya. Meninggal dunia dengan rahmat Allah pada hari Senin 17 Zulhijah 832" (Adji & Achmad, 2018: 147–148).

Moquete memperkirakan tanggal pada nisan tersebut bertepatan dengan tanggal 27 September 1428 M. Selain ukiran berbahasa Arab, juga terukir kaligrafi surat Yasin dan ayat Kursi yang termaktub dalam surat al Baqarah dengan indah serta petikan kitab suci Al Quran ayat 18–19 surat Ali Imran. Di samping tertulis ayat 285–286 surat Al Baqarah (Adji & Achmad, 2018: 153). Makam Sultanah Nahrasiyah tampaknya sangat penting bagi rakyatnya, sehingga dibangun dengan begitu monumental, sangat indah, dan mewah, penuh kebesaran dan keindahan sebesar dan seindah masa hidupnya sebagai seorang ratu (Adji & Achmad, 2018: 156).

Samudera Pasai mengalami masa-masa keemasan dan kejayaan dalam bidang ekonomi, politik dan agama. Pada masa jayanya

Samudera Pasai menjadi pusat perniagaan yang penting di kawasan Selat Malaka dan dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri. Sejak abad ke-13 Pasai dan Pidie menjadi pusat perdagangan internasional yang salah satu ekspor utamanya lada. Pedagang-pedagang yang datang dari anak benua India terdiri atas orang-orang Gujarat, Benggala, dan Keling serta pedagang-pedagang dari Pegu, Siam, dan Kedah. Sebagian di antara mereka berdagang di Pasai, sebagian yang lain di Pidie, dan selebihnya melakukan perdagangan di Selat Malaka (Pires, 2014: 144; Alfian, 1999: 2). Hubungan perdagangan antara Pasai dan Jawa pun berkembang pesat. Pedagang-pedagang Jawa di Samudera Pasai mendapat hak-hak istimewa, yakni pembebasan bea cukai impor dan ekspor atas barang-barang yang mereka bawa (Pires, 2014: 239; Alfian, 1999: 2).

Meskipun tidak dapat membuat kapal yang disebut jung, Pasai mampu membeli kapal-kapal jung dari Malaka sebagaimana laporan Tome Pires bahwa Pasai, seperti halnya Pedir, tidak memiliki satu pun jung, tetapi memiliki *lanchara* sebanyak dua, tiga, atau empat untuk jenis kargo. Mereka harus datang dan membeli jung dari Malaka. Para pedagang Pasai membeli jung dari pedagang tempat lain yang datang untuk berdagang. Hal ini mereka tidak membuat jung karena kelangkaan kayu jati di negeri mereka yang dikenal sebagai bahan kuat untuk membuat jung (Pires, 2014: 206).

Mata uang yang digunakan di Pasai dapat diketahui dari berita Tome Pires yang mengisahkan bahwa uang yang digunakan adalah koin-koin kecil seperti *ceitis*. Koin-koin ini terbuat dari timah dengan cap raja yang sedang berkuasa. Ada pula koin-koin kecil emas yang disebut *drama*. Sembilan *drama* bernilai sama dengan 1 *cruzado* dan setiap keping bernilai sama dengan lima ratus lembar uang tunai. Apabila transaksi bernilai lebih tinggi dari *drama*, mereka menggunakan serbuk emas dan perak. Satuan *bahar* yang mereka gunakan untuk merica lebih rendah daripada yang digunakan di Malaka, yakni 5 kati. Jumlah ini lebih rendah 12 *arratei* (Pires, 2014: 205).

Adapun sultan-sultan yang pernah mengeluarkan mata uang emas, berdasarkan bukti artefak dirham emas yang dijumpai, secara berturut turut adalah (1) Sultan Muhammad Malik az-Zahir (1297–1326 M), (2) Sultan Mahmud Malik az-Zahir (1326–1345 M), (3) Sultan Mansyur Malik az-Zahir (1346–1383 M), (4) Sultan Ahmad Malikul Zahir (1346–1383 M), (5) Sultan Zainal al Abidin Malik az Zahir (1383–1405 M), (6) Sultan Sallah ad-din (1405–1412 M), (7) Sultan Nahrisyah (1405–1412 M), (8) Sultan Abu Zaid Malik az Zahir (1412–1455 M), (9) Sultan Zain al Abidin (1477–1500 M), (10) Sultan Abdullah Malikul Zahir (1501–1513 M), dan (11) Sultan Mahmud Malik az-Zahir (1513–1524 M) (Tjandrasasmita, 1997: 26; Pusponegoro, 2009: 23).[3] Nama-nama sultan tersebut, selain terdapat pada mata uang, disebutkan dalam *Sejarah Melayu* dan *Hikayat Raja-raja Pasai*. Meskipun demikian sampai kini nama

Mata uang Pasai
Sumber: Koleksi Amirul Hadi dalam Buku *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia*

Sultan Malik as-Shalih sebagai sultan pertama Samudera Pasai belum terdapat pada mata uang emas dirham. Mata uang emas dirham digunakan secara resmi sebagai alat pembayaran.

Nita Lestari (2014: 100–101) mengemukakan bahwa pada kedua sisi mata uang emas terdapat pola inskripsi berkenaan dengan gelar atau ungkapan nama-nama sultan dan pola jenis *khat*. Terdapat empat jenis pola *khat* yang berbeda di Samudera Pasai, yaitu Riq'ah-Riq'ah, Raihani-Raihani, Farisi-Farisi, dan Kufi-kufi. Sementara itu pada mata uang emas di Aceh hanya dijumpai dua pola saja, yaitu Riq'ah-Riq'ah dan Farisi Farisi. Ukuran garis tengah mata uang emas lebih kurang 10–14 milimeter, berat lebih kurang 0,50–0,60 gram, dan mutu lebih kurang 16–18 karat.

Peraturan pajak dikeluarkan untuk mengatur kegiatan perekonomian. Menurut Tome Pires (2014: 205–206), Pasai berhak atas 1 *maz* dari setiap bahar komoditi dagang yang dikirim ke luar. Pajak pelabuhan juga diterapkan berdasarkan jenis kapal, baik kapal besar maupun jung. Mereka tidak perlu membayar apa pun untuk mendapat bahan makanan, melainkan hanya memberi bingkisan. Untuk komoditi dagang jenis lain yang berasal dari barat, mereka minta 5 *maz* emas.

Ekonomi perdagangan yang menjadi basis hubungan antara Malaka, Cina, dan India saat itu membuat Kerajaan Samudera Pasai menjadi sebuah kerajaan yang terkenal dan berpengaruh di Asia Tenggara, terutama pada abad ke-14 dan abad ke-15 M. Dengan kondisi ini pula Samudera Pasai bisa menyebarkan agama Islam ke wilayah-wilayah lain di Nusantara. Pada abad ke-14 M kerajaan ini menjadi pusat studi Islam. (Pulungan, 2018: 342)

Sebagai kerajaan besar Samudera Pasai juga mengembangkan tradisi kaligrafi dan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas

kreatif di Samudera Pasai berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa Islam untuk menulis karya mereka dalam Bahasa Melayu, yang kemudian disebut aksara Jawi. Salah satu karya tulis yang di tulis dalam Bahasa Melayu klasik adalah *Hikayat Raja-raja Pasai* yang mengisahkan perihal raja-raja Pasai sejak agama Islam bertapak di kerajaan itu dan dianut oleh masyarakatnya sampai dengan kerajaan Pasai di bawah Raja Ahmad porak poranda dikalahkan oleh Majapahit (Alfian, 1999: 9). *Hikayat Raja Pasai* menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Singkel untuk menulis karya-karyanya.

Sejalan dengan itu juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf Arab yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu adalah *Durru Al Manzum* karya Maulana Abu Ishak dan diterjemahkan oleh Makhdum Patakan (Pulungan, 2018: 342–3). *Sejarah Melayu* atau Kitab *Sulalatussalatin* mengisahkan di tanah Arab ada seorang alim bernama Maulana Abu Ishak. Ia sangat paham ilmu tasawuf dan mengarang buku *Durru al Manzum* lalu mengajarkan isi kitab tersebut. Sultan Malaka Mansyur Syah sangat memuliakan Maulana Abu Bakar dan berguru ke padanya. Kemudian sultan mengirim kitab itu ke Pasai untuk diberi arti. Oleh Sultan Pasai tugas ini dibebankan kepada seorang alim bernama Makhdhum Patakan. Setelah diartikan oleh Makhdhum Patakan, hasilnya diantar kembali ke istana Malaka dan Sultan Mansur Syah terlalu sukacita melihat kitab itu sudah diberi makna. Baginda menunjukkan kitab yang dikirim dari Pasai itu kepada Maulana Abu Bakar. Maulana Abu Bakar pun berkenaan hatinya terhadap terjemahan yang dibuat oleh Makhddhum Patakan serta memuji ulama Pasai itu. Dari uraian itu jelas bahwa Bahasa Melayu yang disebut "Bahasa Jawi" di Samudera Pasai sudah maju sehingga mampu digunakan untuk menerjemahkan kitab tasawuf seperti *Durru al Manzum.* (Alfian,1999: 12).

Di samping orang datang berguru ke Pasai ada pula di antara ulama Pasai pergi ke Patani untuk mengembangkan agama Islam di negeri itu sebagaimana diceritakan dalam *Hikayat Patani* (Teeuw & Wyatt, 1970; Alfian, 1999: 12). Pasai tumbuh dan berkembang menjadi pusat pengembangan agama Islam. Orang datang untuk belajar agama Islam dan kemudian mengembangkannya ke sejumlah daerah di Nusantara. Beberapa nama dikenal sebagai pengembang agama Islam dan diketahui pernah singgah atau berasal dari Pasai sebelum menyebarkan Islam di Nusantara dan Asia Tenggara.[4]

Dalam *Hikayat Patani* terdapat cerita tentang pengislaman Raja Patani Paya Tu Naqpa yang dilakukan oleh Syaikh Said dari Pasai karena berhasil menyembuhkan raja tersebut. Setelah masuk Islam raja itu berganti nama menjadi Sultan Ismail Syah Zilullah Fil Alam. Begitu juga ketiga orang putra dan putrinya, Sultan Mudhaffar Syah, Siti Aisyah, dan Sultan Mansur. Pada masa pemerintahan Sultan Mudhaffar Syah datang lagi seorang ulama Pasai, Safiuddin, yang

atas perintah raja ia mendirikan masjid untuk orang-orang muslim di Patani.[5]

Malaka menjadi kerajaan yang bercorak Islam karena amat erat berhubungan dengan Kerajaan Samudera Pasai, lebih-lebih dengan mengadakan hubungan pernikahan antara putra-putri Sultan Pasai dan putra-putri Suoltan Malaka sehingga pada awal abad ke-15 M atau sekitar 1414 M tumbuhlah kerajaan Islam Malaka yang dimulai pemerintahan Paramisora (Tjandrasasmita, 2009: 26).

Bukti bahwa Kerajaan Samudra Pasai merupakan negeri yang maju dan makmur serta tempat berkembang sebuah masyarakat madani dapat dilihat dari tinggalan materi budaya yang cukup banyak. Di bekas tapak kerajaan Samudera Pasai ditemui ratusan keeping uang emas, keremik zaman Dinasti Ming, puluhan makam yang terbuat dari marmer dan batu granit bermutu tinggi, serta beragam corak seni hias dan kaligrafi yang indah dan artistik garapannya masih tampak jelas menghiasi batu-batu nisan yang berumur ratusan tahun (Hadi, 200: 273).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada awal abad ke-16 mungkin merupakan masa puncak Kesultanan Samudera Pasai sebagaimana diuraikan Tome Pires bahwa kerajaan tersebut tengah mengalami berbagai kemajuan di bidang politik-pemerintahan, keagamaan, dan terutama di bidang perekomomian-perdagangan. Dilaporkan pula Kesultanan Pasai selalu mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka, bahkan mengikat hubungan perkawinan. Para pedagang yang hadir di Pasai berasal dari berbagai negeri, seperti Rumi, Turki, Arab, Persia (Iran), Gujarat, Keling, Bengal, Melayu, Jawa, Siam. Kedah, Bruas, dan Pegu (Tjandrasasmita, 2012: 23).

5. Komposisi dan Struktur Masyarakat

Sebagai sebuah kerajaan yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan serta kejayaan sejak abad ke-13 hingga awal abad ke-16 M sudah tentu Kerajaan Samudera Pasai ditopang oleh struktur pemerintahan yang kuat, masyarakat yang kondusif, serta ekonomi yang berkembang dan mendukung sistem pemerintahan. Pasai sebagai suatu pusat pemerintahan sudah tentu memiliki masyarakat dan penduduk kota yang beragam baik ditinjau dari segi struktur sosial masyarakat maupun keragaman kelompok masyarakat. Berdasarkan kajian terhadap *Hikayat Raja Pasai* dan *Sejarah Melayu* serta Sumber Cina, Ayatrohaedi menguraikan dan menggambarkan komposisi dan struktur masyarakat Pasai (Ayatrohaedi, 1977: 4). Tanpa menggunakan data dari Ibn Battuta dan Marcopolo, Ayatrohaedi menggambarkan struktur masyarakat Pasai yang dapat dikelompokkan berdasarkan birokrasi, status sosial, mata pencaharian (ekonomi), dan profesi atau kecendikiaan. Selain itu ada unsur birokrasi yang agak khusus, yaitu tentara.

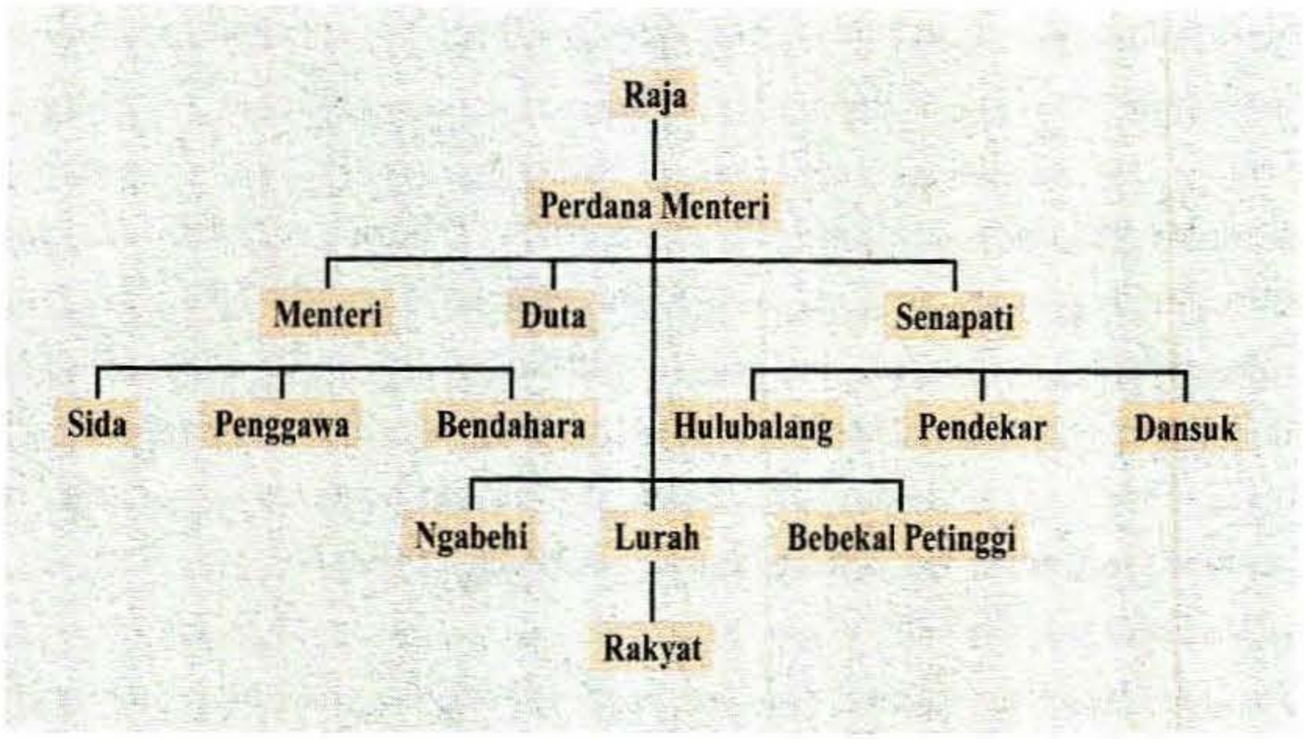

Bagan Struktur Birokrasi Pasai
Sumber: Ayatrohaedi,1997

Secara umum dapat digambarkan masyarakat di Pasai terdiri atas kelompok-kelompok yang menduduki posisi birokrasi tertentu, yaitu raja, perdana menteri, patih, menteri, duta, punggawa (*sida-sida*, *bentara*, *bendahari*), dan orang-orang besar. Di antara para birokrat itu ada yang sebenarnya birokrat "asing" (Majapahit), yaitu *palis*, *temenggung*, *demang*, *ngabehi*, *lurah*, dan *bebekel* petinggi. Di antara mereka terdapat birokrat "militer", yaitu bala tantara atau lasykar dengan pangkat tertinggi senapati atau panglima yang nampaknya membawahi para pendekar, hulubalang, pahlawan, dan pengawal (Ayatrohaedi, 1997: 5).

Berdasarkan status atau kedudukan sosial seseorang diketahui bahwa dalam masyarakat Pasai dikenal orang-orang yang karena pekerjaannya dapat dianggap sebagai "pembantu" atau *punakawan*. Kelompok ini umumnya ditemukan di lingkungan istana, berupa *inang*, pengasuh, dayang-dayang, dan *binti perwara*. Pada umumnya kelompok ini terdiri dari perempuan, kelompok yang juga dapat menghasilkan seseorang dengan kedudukan sebagai permaisuri atau gundik. Kelompok yang tidak berada di lingkungan istana adalah rakyat umum dan orang-orang tua yang dapat berada di mana saja (Ayatrohaedi, 1997: 6).

Dari segi ekonomi, kecenderungan masyarakat Pasai menjadi pedagang dan nelayan lebih banyak dibandingkan, misalnya, menjadi petani atau pemburu. Di antara mereka ada juga yang mempunyai keahlian membuat garam dan minuman keras (tuak). Dalam pada itu kecenderungan masyarakat Pasai memuliakan kehidupan rohani diperlihatkan oleh adanya jabatan guru, pendeta, dan ahli nujum. Sementara itu nakhoda tampaknya cukup berperan, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan kelautan masyarakat Pasai (Ayatrohaedi, 1997: 6).

Berdasarkan jenis kelompok etnik diketahui orang-orang yang berada di lingkungan Samudera Pasai. Tome Pires menyebut bahwa banyak penduduk Pasai (Samudera Pasai) merupakan keturunan orang Bengal. Penduduk Pasai tidak kurang dari 20.000 orang. Kecuali terdapat kelompok-kelompok orang pedagang Bengal, di

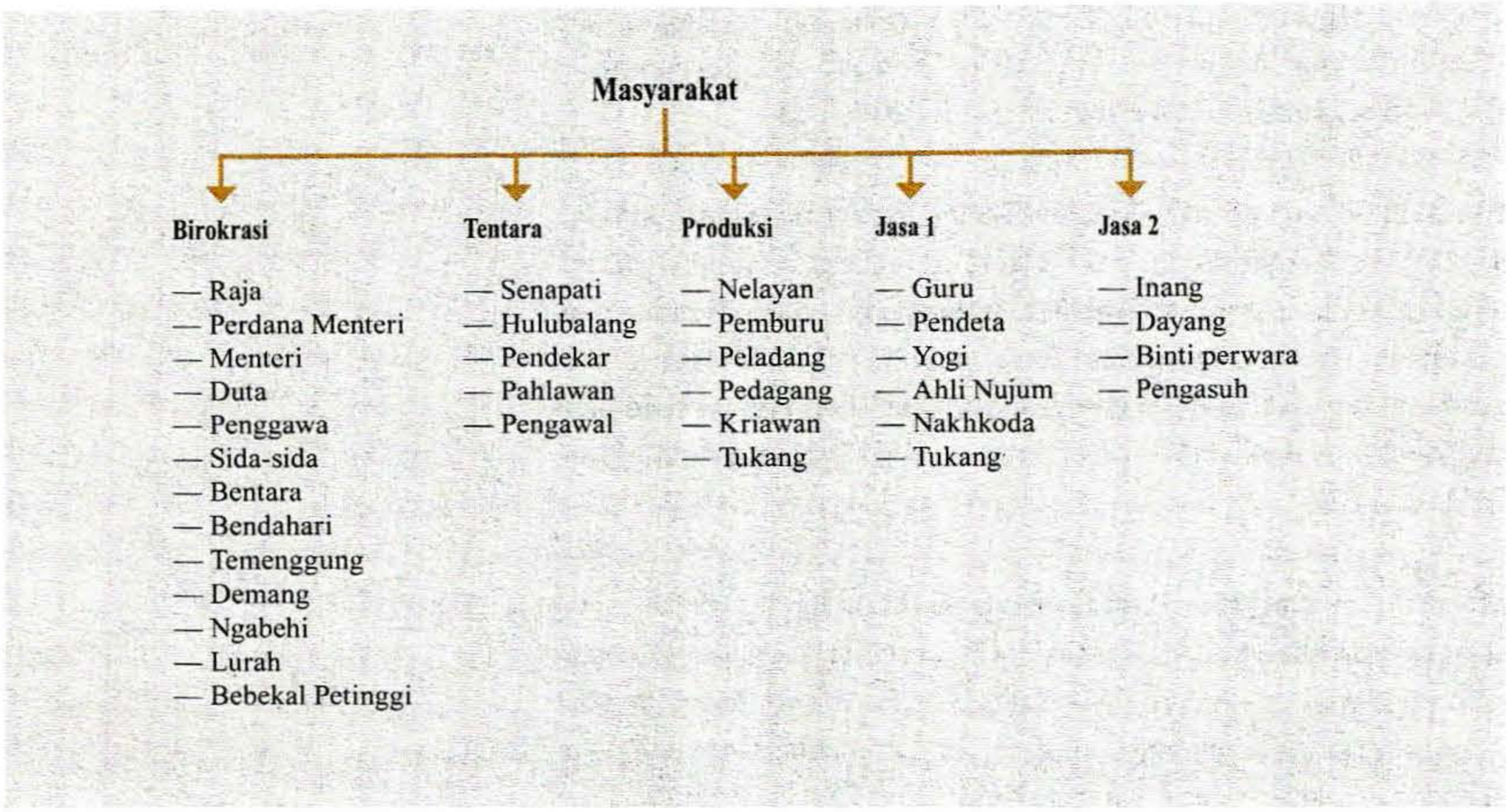

Bagan komposisi masyarakat Pasai
Sumber: Ayatrohaedi, 1997

Pasai juga terdapat kelompok pedagang Turki, Arab, Persi Tamil, dan Melayu. Mereka bekerja untuk pedagang-pedagang dari Gujarat (Uka Tjandrasasmita, 1997: 31) Selain itu para pedagang yang melakukan jual beli di Pasai, menurut Tome Pires, adalah orang-orang Gujarat, Keling, Bengal, Pegu, Siam, Kedah, dan beruas. Mereka menyebar. Ada kelompok-kelompok yang sangat banyak ke Pasai, ke Pedir, dan sisanya ke Malaka. Mereka tidak berdagang dengan Pasai di wilayah timur, melainkan hanya dengan kota-kota yang berpenduduk padat seperti Malaka (Pires, 2014: 205).

Dari uraian dan gambaran di atas, tampak bahwa kota Pasai dipadati oleh orang yang datang untuk berdagang yang berasal dari berbagai negeri. Di Pasai pun terdapat kelompok masyarakat yang beragam pekerjaan, profesi, dan status sosialnya. Pasai memperlihatkan kota yang sangat kosmopolitan dengan keragaman asal dan kedudukan.

Sebagai sebuah kota atau ibukota kesultanan Islam Pasai tentu memiliki ciri-ciri kota Islam. Hourani menyebut tipe kota Islam yang ideal biasanya mencakup beberapa komponen walaupun tidak mutlak ada. Komponen-komponen tersebut antara lain meliputi (1) keberadaan benteng kota atau bangunan pertahanan; (2) adanya kotaraja atau wilayah tertentu yang mencakup tempat tinggal raja, kantor pemerintahan, serta fasilitas bagi kepentingan pasukan pribadi raja (pengawal); (3) adanya kompleks urban di pusat yang terdiri dari masjid-mesjid, sekolah-sekolah keagamaan, pasar, serta permukiman khusus untuk kelompok tukang dan pedagang dan tempat tinggal para bangsawan, kelompok etnis yang tinggal menetap, dan kelompok pemeluk agama minoritas; dan (4) wilayah luar yang disebut daerah pinggiran kota sebagai pemukiman bagi pendatang baru atau pendatang sementara ke kota itu.[6] Komponen-komponen tersebut memang tidak selalu tepat dapat diterapkan pada kota-kota Islam yang muncul di Asia Tenggara, namun berdasarkan

sejumlah laporan dan tulisan tentang kota Islam di Malaka dan Aceh diketahui bahwa struktur kedua kota ini mendekati model yang diutarakan Hourani (Maryam, dkk., 2017: 324).

Ibn Battuta yang pernah singgah di Samudera pada tahun 1345 dan akhir 1346 menguraikan: bahwa kota Samudera berdinding kayu, terletak beberapa mil di sebelah hulu sungai dari permukiman pelabuhan. Sementara Tome Pires memberikan gambaran kota bahwa terdapat sungai yang memasuki kota, diberi pagar batu batu tegak menyerupai *padrao* (Cortesao, 1967; Tjandrasasmita, 1984: 225).

Menurut catatan Ibn Battuta yang berkunjung ke Pasai pada pertengahan abad ke-14, ia harus berjalan sekitar empat mil dengan naik kuda dari pelabuhan—yang disebutnya *sahra*—untuk sampai ke pusat pemerintahan yang cukup besar dan indah serta dilengkapi dengan menara-menara yang terbuat dari kayu. Di pusat kota terdapat tempat tinggal para penguasa dan bangsawan lainnya. Bangunan terpenting adalah istana sultan dan masjid (Ismail, 1997: 37). Ibn Battuta juga menyebutkan bahwa di dalam pagar keliling kota terdapat tempat tinggal para penguasa dan bangsawan lainnya yang dilindungi oleh rakyat di luar pagar. Semua kehidupan komersial kota, para pendatang baru desa, orang-orang asing, para pengrajin, dan segala kegiatan urban lainnya di tempatkan di luar pagar keliling kota. Orang-orang asing seringkali tidak diizinkan menetap dalam jarak tertentu dari istana raja, bahkan adakalanya mereka harus tinggal di luar kota (Reid, 1980: 240–241; Ismail, 1997: 38).

Tome Pires mencatat kota Pasai merupakan ibukota kerajaan Pasai yang sebagian penduduknya menyebut *Camotora* (Sumatra). Kota memiliki penduduk tidak kurang dari 20.000 jiwa. Kota-kota yang lebih besar di Kerajaan Pasai terletak di daerah pedalaman, yang merupakan tempat tinggal para peternak. Kelompok ini seringkali berbenturan kepentingan dengan Pasai karena hasil panen merica, sutra, dan kemenyan. Mereka menyatakan bahwa mereka selalu berhasil mengungguli Pasai. Kota-kota ini menjadi tempat tinggal bagi banyak tokoh penting kerajaan yang dikenal sebagai mandarin serta para prajurit (Pires, 2014: 202–203).

Menurut catatan perjalanan Beaulieu, bangunan yang paling mencolok adalah istana. di sekitar istana terdapat perkampungan, masjid raya, dan pasar. Di sekeliling istana tidak ditemukan adanya benteng-benteng pertahanan (Oetomo & Surachman, 2012: 145).

Nicolaus de Graaf—orang Belanda yang datang ke Aceh pada tahun 1641—dan Dampier yang berasal dari Inggris yang pernah datang pada tahun 1688 menyebutkan selain istana sebagai pusat kekuasaan terdapat juga masjid yang merupakan pusat peribadatan, pasar sebagai pusat perdagangan, dan daerah perkampungan.

Pelaku pasar antara lain pedagang keliling dan pedagang setempat. Pedagang keliling umumnya berasal dari pedagang-pedagang asing yang kadangkala menetap dan membentuk kampung di dalam kota. Rumah-rumah dibangun dengan menggunakan tiang-tiang bambu dengan ketinggian sekitar 120–80 cm (Ismuha, 1998: 33; Oetomo & Surachman, 2012: 145).

Apabila penjelasan Ibn Battuta dianggap benar, maka dapat dikatakan bahwa di tengah kota Pasai sebagai pusat pemerintahan terdapat suatu daerah inti sebagai istana raja. Istana Raja ini dipagar sebagai pembatas yang membedakan kawasan istana dan kawasan pasar tempat kegiatan perdagangan dan kegiatan lainnya berlangsung (Ismail, 1997: 38).

Berdasarkan hasil penggalian arkeologi diperkirakan letak istana Kerajaan Pasai berada di Cot Astana, yang menurut tim peneliti sesuai dengan uraian naskah *Hikayat Raja-raja Pasai*, bahwa Pasai dibangun di atas tanah yang tinggi. Namun, sayangnya, bekas bangunan istana belum dijumpai selain artefak berupa tembikar, keramik, dan fragmen bata bekas bangunan (Surachman, 2015: 84). Meskipun demikian temuan keramik yang tersebar sangat padat, demikian juga temuan lain, seperti tembikar, gelang-gelang kaca, dan bahkan mata uang emas (dirham), menandai kemajuan perekonomian kerajaan Pasai yang lebih banyak mengandalkan sektor perdagangan, terutama ekspor-impor. Sudah barang tentu kebesaran Samudera Pasai tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh sistem pemerintahan yang maju dan pusat-pusat perekonomian yang ditandai dengan adanya pusat administrasi dan pemerintahan (Oetomo & Surachman, 2012: 153).

GF Rouffaer mengatakan bahwa kota Pasai mula-mula terletak di sisi kanan Sungai Pasai, sedang kota Samudera di sebelah kiri Sungai Pasai. Dalam perkembangan kemudian kedua kota itu menjadi satu dan disebut Samudera Pasai. Dengan demikian Kesultanan Samudera Pasai ditopang oleh dua kota utama, yaitu Samudera dan Pasai, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam lintasan waktu. Menurut Kenneth R Hall, pusat kerajaan yang lebih kemudian adalah pusat Kerajaan Pasai, yang berbeda dengan pusat Kerajaan Samudera. Kota Pasai yang disebut sebagai bandar perdagangan merupakan perpindahan dari Samudera yang terletak agak ke dalam. Perpindahan ini diperkirakan terjadi karena adanya serangan dari laut (Ismail, 1997: 35).

6. Komoditi Perdagangan

Tome Pires melaporkan bahwa barang yang dihasilkan di Sumatera pada umumnya emas dalam jumlah yang sangat besar, dua jenis kamper yang bisa dimakan, merica, sutra, kapur barus, dan tanaman obat *lignaloe*. Di samping itu wilayah ini juga menghasilkan madu, lilin, tar belerang, kapas, dan kayu rotan dalam jumlah besar. Bahan-bahan ini digunakan seperti sabut atau *esparto* yang berfungsi untuk

mengikat apa pun yang mereka inginkan (Pires, 2014: 194). Selain itu ada berbagai bahan makanan yang diproduksi di Sumatera, yaitu beras yang diproduksi dalam jumlah besar baik beras putih maupun yang masih dalam bentuk gabah; daging dan ikan yang berlimpah, termasuk ikan terubuk (*shad*) yang jumlahnya sama banyak dengan yang ada di Azamor; persediaan minyak yang besar; berbagai jenis anggur termasuk tampoi, yang rasanya hampir sama dengan anggur yang di produksi Eropa; buah-buahan yang sangat banyak, termasuk di antaranya durian, buah yang tentunya lebih enak dan lezat dibandingkan buah lainnya (Tome Pires, 2014: 194–195).

Barang yang diperdagangkan dan diekspor dari keluar Pasai, menurut Tome Pires, adalah lada, yang setiap tahunnya rata-rata diekspor 8.000 sampai 10.000 bahar, meskipun kualitasnya tidak lebih baik daripada lada Cochin karena lebih besar, lebih cekung, kurang tahan lama, dan tidak mempunyai rasa yang sempurna serta tidak begitu harum. Pasai juga menghasilkan sutra dan kapur barus dan juga terdapat pula berbagai macam barang dagangan hasil pengumpulan dari seluruh negeri (Tjandrasasmita, 1997: 32).

7. Kesenian

Sebagai sebuah kerajaan Islam sudah tentu Kesultanan Samudera Pasai juga mengembangkan seni bernafaskan Islam. Karya-karya tersebut di antaranya seni hias atau kaligrafi Islam yang dapat dijumpai pada makam atau batu nisan sultan atau ulama. Tasrief Adrianto (1999) menemukan enam jenis pola ragam hias batu nisan di 12 kompleks makam di Samudera Pasai, yakni (1) motif hias bingkai, meliputi motif vas, motif lengkung kurawal, motif lengkung mihrab, dan motif panil; (2) motif hias floraristik, yang terdiri atas motif sulur daun dan motif lotus; (3) motif *arabesque* bentuk flora; (4) motif *arabesque* bentuk geometris (*interlance*); (5) motif lampu; dan (6) motif inskripsi. Adapun bahan batu nisannya terdiri atas dua jenis, yaitu batu pualam dan bukan batu pualam. Diduga bahan batu nisan pualam tidak berasal dari daerah Samudera Pasai, namun didatangkan dari luar Samudera Pasai. Dalam konteks batu nisan di Nusantara, batu nisan yang ada di Samudera Pasai umumnya dimasukkan ke dalam kategori batu nisan tipe Aceh, yang berbeda dengan batu nisan tipe Demak-Troloyo (Jawa), batu nisan tipe Bugis-Makassar (Sulawesi), dan batu nisan tipe Ternate (Nurhakim,1990).[7]

Nisan kubur di Pasai cukup banyak dan disebut sebagai nisan kubur tipe Aceh berdasar bentuknya yang menyerupai nisan kubur Sultan Malikus Shaleh dan nisan-nisan kubur sebelum abad ke-17. Ternyata bentuk batu nisan tersebut dijumpai pula pada nisan-nisan kubur raja-raja di Pattani, Malaka, dan Malaysia pada umumnya. Selain itu ada kesamaan jenis batu serta cara penulisan huruf, bahkan cara pengisian ayat-ayat al-Quran dan nuansa kesufian batu nisan di Pattani dan di Aceh, yang memperlihatkan Samudera Pasai berperan penting dalam penyebaran Islam di beberapa tempat di

Asia Tenggara dan menjadi tempat asal seni Islam bersemi dan berkembang serta menyebar di Asia Tenggara.

Makam Sultanah Nahrasiyah, yang terbuat dari batu pualam dan diukir dengan sangat indah ukiran huruf Arab berisi informasi jati diri yang dimakamkan dan ayat-ayat al-Quran yang tertera di makam, memperlihatkan tingginya cita rasa seni masyarakat; bahkan Samudera Pasai dapat dianggap telah mempunyai peradaban sangat tinggi. Keindahan makam itu, menurut Snouck, dianggap sebagai makam terindah di Asia Tenggara.

Hikayat Pattani menyebut bahwa pada masa pemerintahan Muzaffar Syah di Pattani datang seorang ulama dari Pasai, Syekh Safiuddin, yang atas perintah raja mendirikan masjid untuk orang-orang muslim.[8] Informasi ini menunjukkan bahwa ulama Pasai membantu membuat karya seni arsitektur berupa pembangunan masjid. Secara tidak langsung hal ini memperlihatkan bahwa Pasai telah mampu mendirikan masjid di kesultanan Samudera Pasai dan kemudian diminta bantuan pembangunan masjid di luar Pasai.

Kemampuan Pasai membangun masjid, istana, serta bangunan lain, juga dinyatakan oleh Ibn Battuta, bahwa kota Pasai sebagai pusat pemerintahan Pasai cukup besar dan indah serta dilengkapi dengan menara-menara yang terbuat dari kayu. Selain itu di pusat kota terdapat tempat tinggal para penguasa dan bangsawan. Bangunan terpenting di kota adalah istana sultan dan masjid (Ismail, 1997: 37). Hanya, sekali lagi, tinggalan materi fisik masjid dan istana tersebut hingga kini belum ditemukan keberadaan.

8. Peran Wanita

Informasi mengenai peran perempuan di Samudera pasai di dibicarakan beberapa sumber tertulis.[9] Keberadaan beberapa makam sultanah di Samudera Pasai, Aceh, menjadi bukti kehadiran sultanan di kerajaan itu. Di samping itu terdapat beberapa nama perempuan yang berperan dalam lintasan sejarah Samudera Pasai. Mereka itu Sana Cukit, Sultanah Bahiah, Sultanah Nahrasiyah, Putri Cermin, putri Sultan Zainal Abidin, dan Candan Dewi.

Sana Cukit adalah putri Raja Siam yang menikah dengan Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir (1383–1403 M), sultan ke-5 Kesultanan Samudera Pasai. Pernikahan politik antara Siam dan Samudera Pasai ini melahirkan tiga anak, yaitu Sultan Muhammad Said Malikul Zahir, Syekh Jumadil Qubro Tu Ampon Tuan, dan seorang putri. Sebagai duta bangsa, putri Indo Cina ini berhasil merekatkan hubungan antara Siam dan Samudera Pasai. Sementara itu duta agama diperankan putrinya. Sebagaimana dicatat Tome Pires, Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir menikahkan putrinya dengan raja Malaka, Prameswara. Akibat perkawinan itu Raja Malaka berhasil diislamkan, bahkan kemudian mengganti namanya menjadi

Muhammad Syah sekaligus mengislamkan rakyatnya. Sementara itu Syekh Jumadil Kubra Tu Ampon Tuan menjadi duta agama Aceh ke Majapahit dan dikaruniai dua putra, Maulana Ishak dan Ibrahim Asmara Kandi.

Putri Cermin, yang makamnya berada di Leran Gersik, Jawa Timur sekarang, adalah putri Sultan Ahmad Malikul Zahir (1345–1383 M), sultan ke-4 Kesultanan Samudera Pasai. Ia rela berkorban menjadi tawanan demi menyelamatkan rakyatnya saat Majapahit menyerang Samudera Pasai.

Sultanan Bahiah (1405–1411 M), penguasa ke-7 Kesultanan Samudera Pasai, yang memegang tampuk pimpinan sebagai sultanah setelah suaminya, Sultan Muhammad Said Malikul Zahir (1403–1405 M), mangkat karena dibunuh oleh Panglima Nagor Raat Abdul Qadir. Selain Sultanan Bahiah terdapat Sultanah Nahrasiyah (1420–1428 M), sultanah kedua setelah Sultanah Bahiah yang juga neneknya. Nahrasiyah putri Sultan Samudera Pasai Sultan Khaidir Malikul Zahir (815–824 H atau 1412–1420 M), melanjutkan kedudukan ayahnya.

Adapun Candan Dewi, putri Sultanah Bahia, menikah dengan Amir Badaruddin Khan, seorang putra raja India, yang yang menurunkan pendiri dan memerintah Kesultanan Deli Serdang, Sumatera Utara sekarang.

Dalam suatu riwayat Kesultanan Samudera Pasai berakhir tak lama setelah Ratu Nahrasiyah menikah dengan Sultan Aceh ke-7, Sultan Alaidin Husain Syah Abdullah Malik Al Mubin, dan Kerajaan Samudera Pasai disatukan dengan Kerajaan Aceh. Sultanah Ratu Nahrasiyah Rawangsa Khadiju meninggal dan dimakamkan di dekat makam suaminya. Batu nisannya serupa dengan makam Malik Ibrahim di Gresik. Sultanah Nahrasiyah merupakan perempuan muslimah yang besar. Hal ini dibuktikan dengan hiasan makamnya yang sangat istimewa dan tertulis nukilan huruf Arab yang indah.

9. Pusat Penyebaran Islam

Samudera Pasai menjadi kesultanan yang berperan dalam perkembangan Islam di Nusantara. Hal ini tampak dari keberadaan nama-nama besar yang juga merupakan alim ulama pada masa pemerintahan Malik as Saleh, di antaranya Sri Kaya Ghiyasyuddin yang menjabat sebagai perdana menteri, Sayed Ali bin Ali Al Makarany sebagai syekhul Islam, dan Menteri Luar Negeri Bawa Kaya Ali Hisanuddin Al Malabary.

Samudera Pasai juga berperan dalam perkembangan Islam di Jawa dan Sulawesi. Pada tahun 797 H/1395 M Sultan Zainal Abidin Bahiah Syah mengirim dua orang pendakwah ke Jawa, Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishak yang bergelar Syekh Awallul

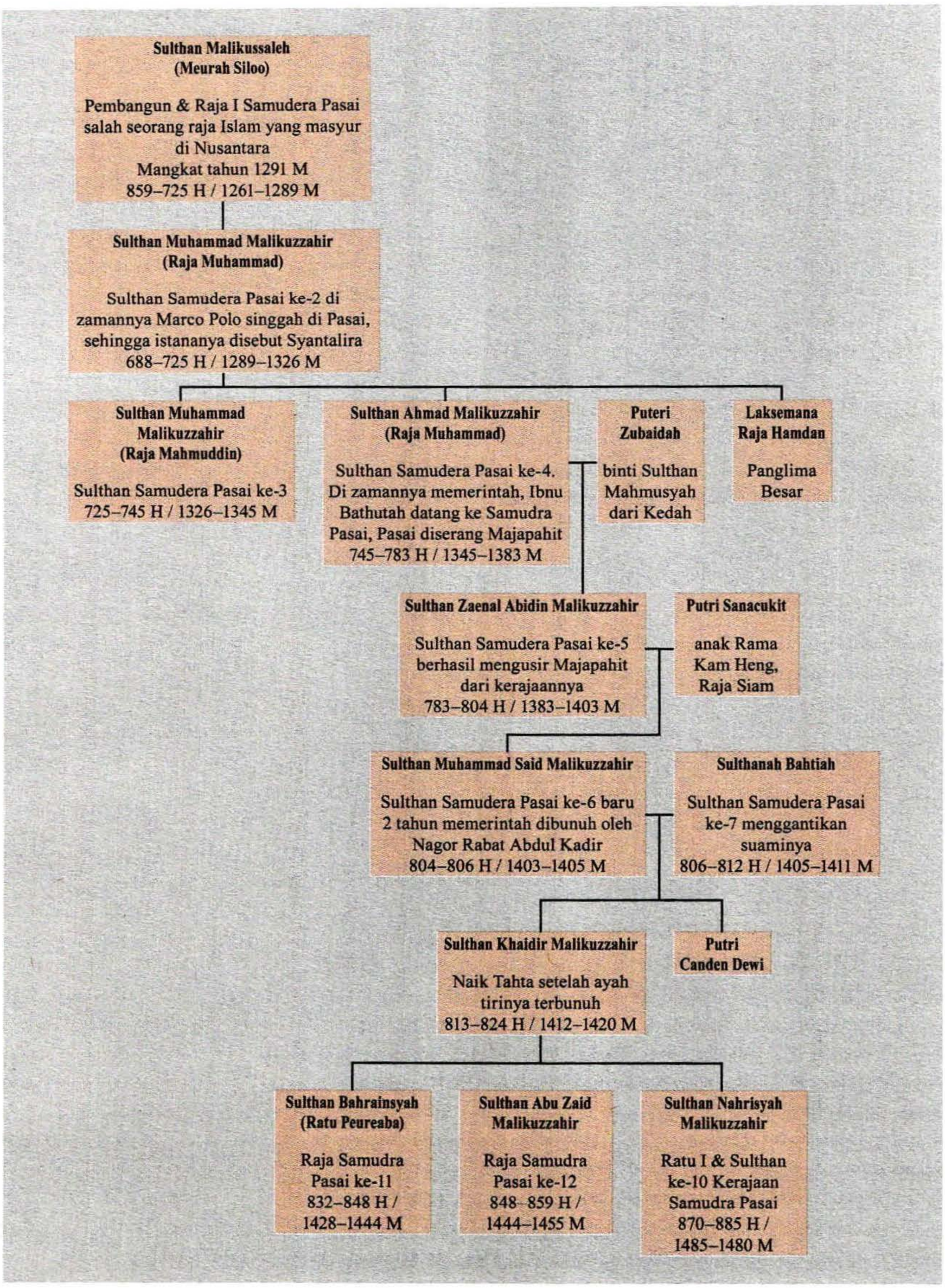

Bagan silsilah Sultanah Nahrasiyah
Sumber: Syahrul, 2008

Islam. Malik Ibrahim merupakan keturunan bersambung dengan Zainal Abidin, salah seorang cucu Ali bin Abi Thalib, dan sepupu Putri Cermin. Pada akhir abad ke-15 M seorang pendakwah Arab Al Syekh Ali Al Qaisar bersama rombongan yang dipimpin Sultan Abdul Jalil bin Sultan Al Qahar bertolak dengan kapal dari Pidi ke Sulawesi dan berhenti di bandar Makassar. Ia berdakwah

Ilustrasi Sulthanah Nahrasiyah
Sumber: Dede Eri Supria, 1994

menyebarkan Islam sehingga Raja Bone kemudian masuk Islam (Syamsu, 1996: 17–18).

10. Masa Akhir

Masa akhir Kerajaan Samudera Pasai terjadi pada masa pemerintahan sultan ke-16 Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir (1513–1524 M). Sebelum kerajaan jatuh, sultan menikahkan putrinya, Ratu Nahrasiyah, dengan Sultan Aceh ke-13 Sultan Alaiddin Riyat Syah al Qahar yang menentang kehadiran Portugis di Haru, Perak, dan Malaka. Kerajaan Samudera Pasai diserang Portugis. Sultan ditawan dan dibawa ke Malaka. Setelah itu, Samudera Pasai digabungkan dengan Aceh, mengingat putri sultan telah menjadi istri Sultan Aceh. Dengan sendirinya Kesultanan Samudera Pasai secara otomatis berada di bawah naungan kekuasaan Kesultanan Aceh.

Surutnya kerajaan Samudera Pasai bisa jadi disebabkan tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya, seperti Kerajaan Aceh, Kerajaan Patani, dan Kerajaan Malaka, yang mendorong beralihnya pusat perdagangan dan pelayaran Selat Malaka dari Pasai. Selain itu terdapat faktor utama dari segi politik, yaitu Kesultanan Samudera Pasai tidak lagi memiliki sultan yang cakap karena sultan yang ada digempur dan ditawan oleh Portugis di Malaka. Faktor dampak ikutan campur tangan Portugis terhadap raja-raja di Pasai mengakibatkan Pasai mengalami kemunduran, surut, dan akhirnya runtuh. Informasi mengenai hal ini diperoleh dari sumber-sumber Portugis sebagaimana disampaikan Darmono Hardjowidjono (1997) dalam *paper*-nya, "Pasai Tahun 1509–1524 M".

Hardjowidjono (1997: 155–156) menyatakan bahwa orang Portugis yang mula-mula menginjakkan kaki di Sumatera, khususnya di Pasai, adalah Diogo Lopez de Sequira, yang mengemban perintah Raja

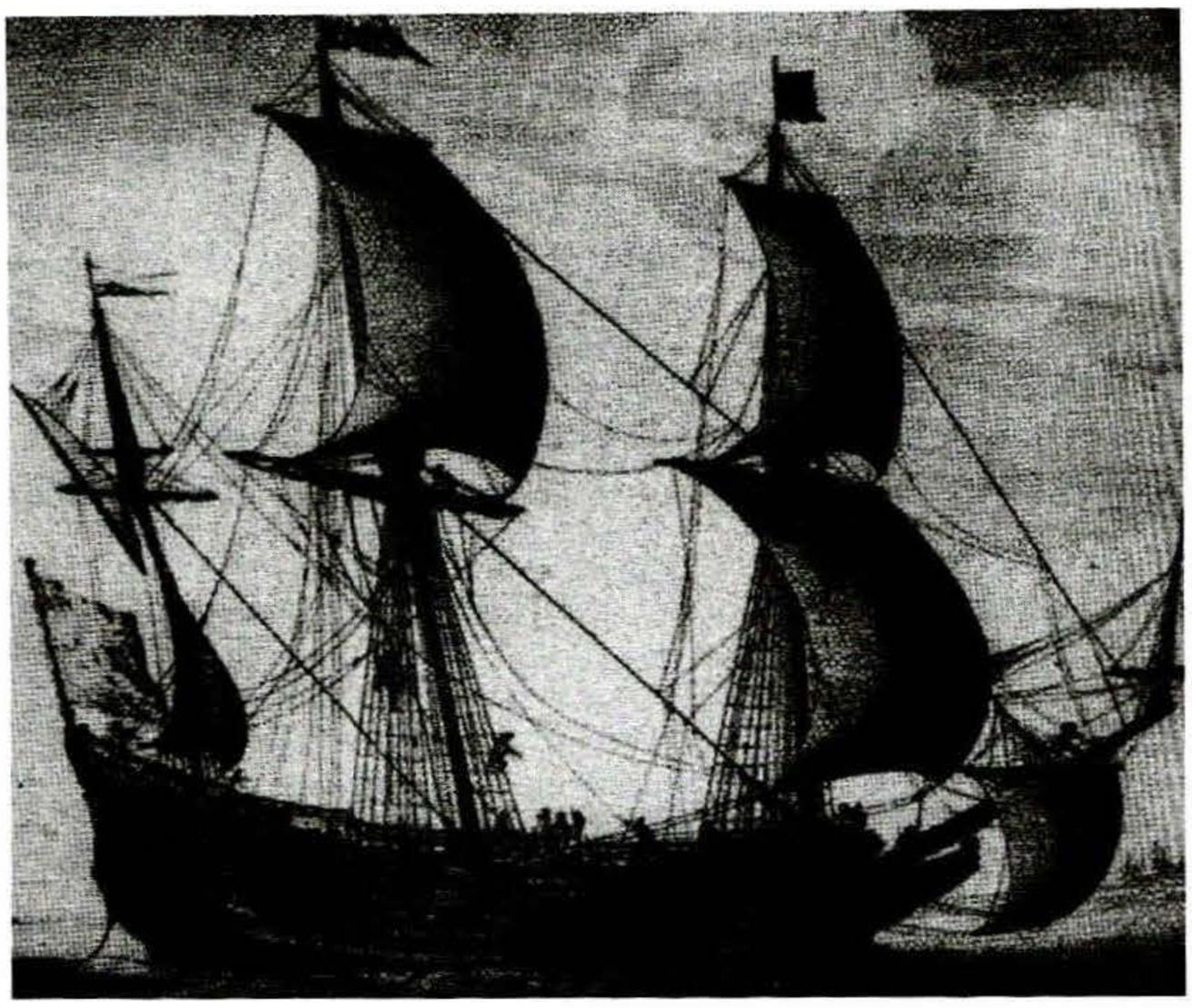

Kapal Portugis
Sumber: Dorleans, 2018

Dom Manuel untuk mencari Pulau Madagascar dan Malaka. Pada bulan September 1509, sebelum tiba di Malaka, ia berlabuh di Pedir yang merupakan kerajaan terpenting di Pulau Sumatera saat itu dan mempunyai banyak *vasal*. Di pelabuhan itu ia bertemu dengan lima jung Bengali dan Pegu. Orang-orang Portugis diterima dengan baik oleh raja, yang menunjukkan persahabatan dan perdamaian dengan Portugal. Raja Pedir juga menghadiahi lada, damar, dan barang-barang dagangan lain, tetapi tidak bisa diterima oleh De Seuquira karena takut akan datang terlambat di tempat tujuan, Malaka. Pedir merupakan pasar yang besar, sehingga wajar kalau kerajaan itu melayani kapal-kapal asing. Sebelum meninggalkan negeri itu Diogo Lopoes de Sequira mendirikan *padrao* untuk menandai perjalannya. Dari Pedir ia menuju Pasai, yang setelah penguasaan Portugis atas Malaka menjadi lebih penting daripada Pedir. Pasai terletak 20 *legua* dari Pedir. Di Pasai orang-orang Portugis juga diterima dengan baik dan diberi izin mendirikan *padrao* (Joel Serrao, 1968 dalam Hardjowidjono, 1997: 156).

Dari Pasai Diogo Lopes de Sequira menuju Malaka dan tiba disitu pada 16 September 1509. Mula-mula Diogo Lopes diterima dengan baik penguasa Malaka Sultan Mahmud, tetapi atas bujukan orang-orang Gujarat dan Jawa akhirnya Sultan Mahmud berbalik memusuhi orang-orang Portugis dengan menangkap dan menawan mereka yang sedang berada di daratan, sedangkan De Sequira berhasil meloloskan diri dan meninggalkan Malaka.

Pada waktu itu yang menjabat wakil raja Portugal di Asia adalah Afonso de Albuquerque yang berpusat di Cochin. Setelah mendengar peristiwa De Sequeira di Malaka, ia membalas dendam, yang dilakukan bersamaan dengan pengiriman ekpedisi II ke Malaka oleh Raja Dom Manuel. Setelah menguasai Goa dan Ormuz, Afonso de Albuquerque berangkat dari Cochin

pada bulan Mei 1511 ke Malaka dengan kekuatan 18 buah kapal dan 800 serdadu Portugis ditambah 400 orang Malabar. Dalam perjalanan itu Afonso de Albuquerque singgah di Pedir dan Pasai. Ketika singgah di Pasai, Afonso de Albuquerque mengutus Joao Viegas, pemimpin pelarian Portugis dari Malaka, mengunjungi raja Pasai dan minta permintaan maaf Sultan Pasai atas kehadiran orang Moor—yang juga pelarian dari Malaka—yang membantu pembunuhan terhadap orang-orang Portugis di Malaka. Orang-orang itu pun diminta menyerahkan diri kepada Afonso de Albuquerque. Atas permintaan itu Raja Pasai menjawab bahwa ia mengetahui ada orang Moor di negerinya namun tidak mengetahui keberadaan mereka lagi. Sultan Pasai berjanji akan mencari dan apabila ditemukan akan segera diserahkan kepada Afonso de Albuquerque. Setelah mengirim pesan itu pada Afonso de Albuquerque, Sultan Pasai menasihati orang Moor, yang ternyata sahbandar Gujarat di Malaka, supaya langsung pergi ke Malaka untuk memberitahu Sultan Malaka mengenai kedatangan Afosonso de Albuquerque. Sebenarnya Afonso de Albuquerque sudah tahu apa yang dilakukan oleh Sultan Pasai, tetapi karena ingin tetap bersahabat dengan raja ia pun meninggalkan Pasai (Baiao, 1923: 52–53 dalam Hardjowidjono, 1997: 157). Setiba di Malaka Afonso de Albuquerque mengadakan kontak dengan Sultan Mahmud melalui surat yang intinya menuntut pelepasan para tawanan Portugis. Dalam hal ini Sultan Mahmud selalu mengulur waktu, sehingga kesabaran Afonso de Albuquerque habis dan melancarkan serangan terhadap Malaka. Malaka jatuh dan Sultan Mahmud melarikan diri meninggalkan Malaka. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1511 M. Pada awal Desember 1511 Afonso de Albuquerque meninggalkan Malaka dengan menumpang kapal Flor de La Mar, yang juga membawa anak-anak, laki-laki, dan perempuan serta benda-benda berharga. Dalam perjalan itu kapal Flor de La Mar kandas di pantai Pedir, tetapi Afonso de Albuquerque berhasil diselamatkan dan tiba di pelabuhan Cochin pada awal Februari 1512 M (Hardjowidjono, 1997:158). Sampai dengan periode ini sumber-sumber Portugis mengenai sejarah Pasai tidak ada yang bertentangan.

Orang Portugis yang mengunjungi Pasai berikutnya adalah Jorge de Albuquerque. Gois menyebutkan bahwa pada tahun 1513 Jorge de Albuquerque berangkat dari Cochin dengan beberapa buah kapal untuk menjabat sebagai penguasa di Malaka. Dalam perjalanannya ia singgah di Pasai dan mendapati raja yang merupakan sahabat Portugis sedang berperang melawan salah satu *vasal* yang memberontak. Jorge de Albuquerque pun membantu raja Pasai dan para pemberontak dapat dikalahkan. banyak di anatara pemberontak tewas. Setelah itu Jorge de Albuquerque meninggalkan Pasai menuju Malaka dan tiba di sana pada bulan Juli tahun 1513 (Hardjowidjono, 1997: 158).

Sementara itu, menurut Luiz, setelah tiba di Malaka perjalanan Jorge de Albuqueque berikutnya adalah ke pelabuhan Pasai

untuk mengusahakan pengembalian takhta kerajaan kepada raja yang sah, yaitu Orpacam, sesuai dengan tugas yang diembannya dari Gubernur Jenderal. Jorge de Albuquerque berlabuh di Pasai dan memberitahukan maksud kedatangannya kepada penguasa kerajaan, tetapi mereka merasa cemas dengan kedatangan raja yang sah (Hardjowidjono, 1997: 159). Sementara itu datang Raja Aru di Pasai disertai angkatan perang yang besar dan juga mengumumkan perang kepada Raja Pasai karena raja yang sah adalah orang tuanya. Mengetahui bahwa tentara Aru datang untuk mengembalikan takhta kerajaan Pasai kepada raja yang sah, Portugis dan tentara Aru bergabung menyerang Pasai. Perang pun berkobar. Dalam pertempuran itu lebih dari 3.000 orang Pasai gugur, sedangkan di pihak Portugis hanya empat orang yang gugur, dan tidak sedikit yang menderita luka. Setelah mengetahui bahwa "sang diktator" telah gugur dalam pertempuran dan dengan sendirinya tidak ada kendala sedikit pun untuk mengembalikan takhta kerajaan kepada raja yang sah, Jorge de Albuquerque beserta armadanya pergi meninggalkan Pasai. Adapun Pasai beserta raja yang telah dikembalikan atas takhtanya menjadi *vasal* Portugal (Hardjowidjono, 1997: 160).

Dalam *Dictionario* disebutkan bahwa tahun 1520 Jorge de Albuquerque dengan bantuan Raja Aru menaklukkan Raja Pasai yang memberontak terhadap Portugal. Di Pasai kemudian didirikan sebuah benteng yang di dalamnya dibangun sebuah kantor dagang untuk urusan barang-barang dagangan negeri itu. Sebagai komandan pertama benteng itu adalah Antonio Miranda de Azevedo, yang pada bulan Mei 1522 digantikan oleh Andre Henriques (*Dictionario*, 1968: 730 dalam Hardjowidjono, 1997: 160)

Di bagian lain Pulau Sumatera, di sebelah barat, terdapat enam buah kerajaan Islam yang mengakui supremasi kerajaan Pedir, termasuk Aceh, dan Daya, tetapi kemudian berganti Aceh menjadi superior pada tahun 1523 M. Ambisi Sultan Aceh untuk menjadi penguasa atas seluruh Pulau Sumatera membawa Aceh menguasai bagian timur laut pulau itu. Sultan Aceh bergerak baik di darat maupun di laut dengan kekuatan besar yang menghasilkan kemenangan demi kemenangan hingga masuk ke Pedir. Setelah Pedir berhasil dikalahkan, dan sejumlah orang Portugis meninggal dalam pertempuran di Pedir, Aceh menuju Pasai dan menaklukkan Pasai dengan berhasil memukul Portugis dari Pasai pada tahun 1523 M (Hardjowidjono, 1997: 161). Sejak tahun 1523 Samudera Pasai tidak lagi muncul sebagai kekuatan politik Islam dan sebagai sebuah kesultanan. Kedudukan tersebut beralih ke Aceh yang bangkit dan menjadi kekuatan Islam yang baru di Sumatera, menguasai jalur utama perdagangan dan pelayaran Selat Malaka.

(Endnotes)

1 Tasrif Adrianto dalam penelitiannya tentang tipologi nisan di Samudera Pasai mengkaji sekitar 197 makam di dalam 12 kompleks makam yang tersebar di enam desa di Kecamatan Samudera. Lihat Tasrief Adrianto, "Tipologi Nisan Pada Kompleks Makam Samudera Pasai (Tinajauan Bentuk, Ragam Hias dan Bahan)". Skripsi. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1999.

2 Armando Cortesao, *The Suma Oriental of Tome Pires an Account of the East, from the Read Sea to Japan (Written in Malacca and India (1512-1515)*; Vol I: Hakluyt Society, 1944 Kraus Reprint Limited Nendeln/ Liechtenstein, 1967: hal. 135–136.

3 Dalam penelitian tentang mata uang emas di Pasai dan Aceh, Nita Lestari dalam karya skripsinya yang berjudul "Mata Uang Emas Kesultanan Samudera Pasai dan Aceh Darusalam, Kajian Numismatik dan Arkeologis", Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2014, mengemukakan bahwa perkembangan mata uang emas Kesultanan Samudera Pada pada masa awal dapat diwakilkan pada mata uang emas yang dikeluarkan oleh Sultan Muhammad Malik az-Zahir (1297–1326 M). Mata uang emas yang mewakili masa kejayaan dikeluarkan oleh Sultan Zain al-Abidin (1383–1405 M), adapun mata uang emas yang mewakili masa akhir adalah mata uang emas yang dikeluarkan Sultan Abd-Allah Malik az-Zahir (1501–1513 M).

4 Uka Tjandrasasmita, "Peranan Samudera Pasai dalam Perkembangan Islam di beberapa daerah Asia Tenggara", *Aceh dalam Retropeksi dan Refleksi Budaya Nusantara*, Jakarta Selatan: INTIM, 1988, hlm. 67–82.

5 A. Teeuw-DK Wyatt, "Hikayat Patani", *Bibliotheka Indonesia KTLV*.5 The Hague: Martinus Nijhoof, 1970, hlm.71–78.

6 A.H Hourani dan S.M. Stern (ed.) "The Islamic City in the Light of Recent Research", dalam *The Islamic City, A Collogium*. Oxford: Bruno Cassiarer, 1970, hlm. 21–23.

7 Lihat Lukman Nurhadi, 1990. "Tinjauan Tipologi Nisan Pada makam Islam Kuno di Indonesia", *Analisa Hasil Penelitian Arkeologi I. Jilid II*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

8 A. Teeuw, D.K. Wyatt, "Hikayat Patani", *Bibliotheka Indonesia* KITLV, 5. The Hague: Martinus Nijhoff, 1970, lm 71–78 (Malay text).

9 Lihat Pocut Haslinda Syahrul (2008) *ibid*; Hasjmy, (1996), *ibid*.

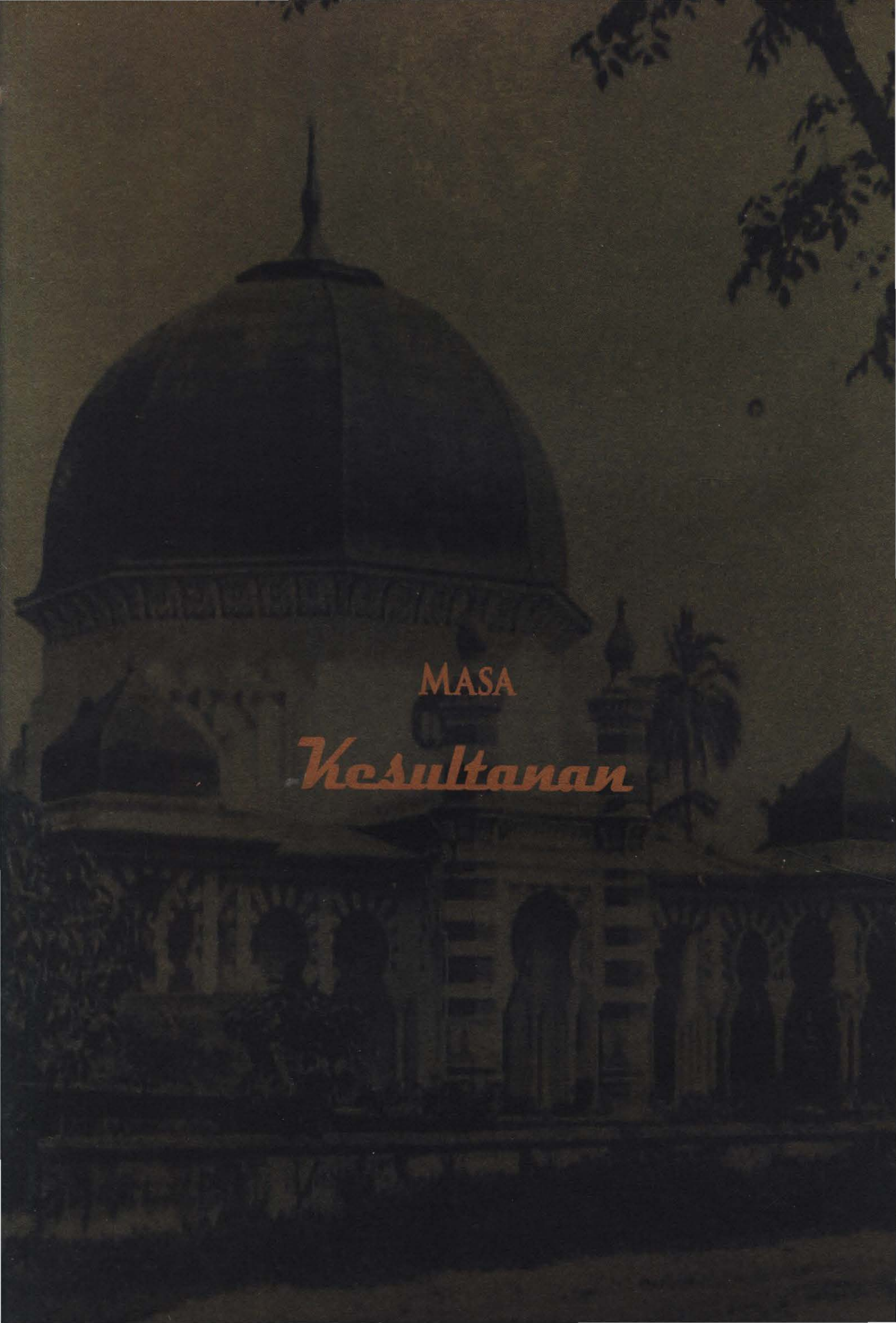
MASA
Kesultanan

— 7 —

Kerajaan Aceh

Penaklukan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511 M menjadi peristiwa sejarah yang sangat penting. Kejayaan kerajaan berskala internasional yang digambarkan Tome Pires (1944 [II]: 287) sebagai didiami berbagai kelompok masyarakat dari berbagai bangsa itu harus berakhir. Meskipun demikian peristiwa tersebut tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Nusantara; justru sebaliknya menciptakan kondisi sosial-politik dan keagamaan yang menjadi titik tolak berlangsungnya proses Islamisasi intensif dengan jangkauan penyebaran yang semakin luas. Perkembangan ini pada gilirannya melahirkan pusat-pusat kekuatan Islam baru di Nusantara.

Sementara itu Aceh merupakan kerajaan terkemuka yang berkembang setelah Malaka jatuh. Meski Johor menjadi pewaris langsung kerajaan Malaka—Sultan Mamud Syah, penguasa terakhir Malaka, memindahkan pusat kekuasaan ke daerah sepanjang Sungai Johor—kesempatan untuk tampil sebagai kerajaan bertaraf internasional dimiliki Aceh. Beberapa alasan politik dan keamanan—Johor berkali-kali mendapat serangan Portugis di Malaka dan Aceh—membuat Johor tidak dapat berkembang seperti halnya Malaka. Begitu pula Johor tidak bisa berperan sebagai pusat budaya Melayu yang diharapkan setara dengan Malaka pada abad ke-14. Peran politik-ekonomi dan budaya tersebut dipegang Kerajaan Aceh. Aceh pada masa kejayaannya abad ke-16 dan abad ke-17 M menjadi tonggak lahirnya peradaban yang secara inheren menjadi bagian dari "alam Melayu" (Andaya, 2008: 108). Pengakuan silsilah yang berasal dari Iskandar Zulkarnain, misalnya, yang menjadi salah satu pilar jati diri politik Melayu, ditemukan dalam naskah-naskah yang berasal dari Kerajaan Aceh. Sementara Kerajaan Johor baru pada abad ke-19 mencapai kejayaan seperti Malaka dan Aceh setelah melibatkan VOC di Batavia.

Setelah peristiwa tahun 1511 M para pedagang muslim yang sebelumnya datang dan tinggal di Malaka berpindah dan tinggal di Aceh, dan—seperti halnya dalam kasus Samudera Pasai dan Malaka—mendorong Aceh menjadi pusat perdagangan terpenting dalam jaringan perdagangan Asia. Ali Mughayat Shah (1514–1530 M) merupakan raja pertama yang meletakkan dasar bagi perkembangan Aceh sebagai sebuah kerajaan Islam yang kuat pada abad ke-17 (Lombard, 1986: 49; Ricklefs, 1998: 48).

Alfonso de Albuquerque memimpin penaklukan Portugis atas Malaka pada tahun 1511.
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

1. Konsolidasi Kekuasaan

Sebagaimana kerajaan lain di Nusantara usaha merunut asal-usul kerajaan Aceh tidak didukung data yang memadai. Sumber lokal *Hikayat Aceh* (Iskandar, 1959: 31), misalnya, mencatat bahwa Kerajaan Aceh pada awal pertumbuhannya sekitar akhir abad ke-14 hanya sebuah kerajaan kecil dan berpusat di satu daerah pedalaman yang disebut sebagai Darul Kamal. Keberadaan Aceh mulai mengemuka setelah bersatu dengan Kerajaan Lamuri di Mahkota Alam, yang terletak tidak jauh dari Darul Kamal, sebagaimana disebut sumber-sumber sejarah Eropa, Arab, dan Cina. Sumber-sumber itu juga menyebutkan Aceh telah berkembang sebagai pusat perniagaan di bagian utara Sumatera dan disinggahi para pedagang dari mancanegara, termasuk negara-negara muslim (Lombard, 1986: 40–42). Penyatuan dua kerajaan tersebut terjadi melalui perkawinan putra Munawwar Syah dari Lamuri dengan putri penguasa Aceh Inayat Syah. Sejak saat itu dua kerajaan yang bersatu itu dipimpin Sultan Syamsuddin, putra Munawwar Syah, dan kemudian dilanjutkan Sultan Ali Mughayat Syah (meninggal tahun 1530 M), cucu Munawwar Syah, yang juga dinikahkan dengan putri Inayat Syah yang lain (Iskandar, 1959: 31–32; Lombard, 1986: 47).

Meski keturunan Raja Lamuri namun Ali Mughayat Syah lebih memilih nama Aceh untuk kerajaan hasil proses penyatuan tersebut. Di bawah kepemimpinanya Kerajaan Aceh berkembang dan menggunakan nama Darussalam di belakangnya, yang digunakan bahkan hingga kini. Oleh karena itu Ali Mughayat Syah dianggap sebagai peletak dasar Kerajaan Aceh yang sesungguhnya, yang membuat kerajaan tersebut memasuki era baru sebagai kekuatan politik-ekonomi bagian utara Sumatera menyusul keterlibatannya secara langsung dalam perdagangan maritim internasional (Lombard, 1986: 49; Hadi, 2004: 13). Usaha Ali Mughayat Syah

secara tidak langsung diuntungkan oleh keadaan Malaka yang ketika itu ditaklukkan Portugis. Sejak Portugis menaklukkan Malaka para pedagang muslim mancanegara yang sebelumnya melakukan kegiatan perdagangan di Malaka beralih ke Aceh. Di samping menghindari kebijakan Portugis yang tidak bersahabat dengan pola perdagangan bebas, para pedagang muslim juga dapat memperoleh barang-barang dagangan di Aceh.

Sejak berkuasa pada tahun 1514 M Ali Mughayat Shah memperluas wilayah kekuasaan, tidak hanya sebatas lembah Sungai Aceh—yang kemudian dikenal dengan nama Aceh Besar—tetapi menjangkau beberapa wilayah lain di sekitarnya yang kaya berbagai komoditi yang dicari para pedagang mancanegara. Pada tahun 1520 M ia menaklukkan Daya di ujung barat Aceh, kemudian Pidie dan Pasai di bagian timur masing-masing pada tahun 1521 M dan tahun 1524 M (Ricklefs, 1998: 48–49).

Catatan perjalanan Duarte Barbosa (1921) memberi gambaran mengenai Pidie. Ia mencatat bahwa Pidie terletak di selat yang berseberangan dengan Malaka dan sangat kaya sumber-sumber mineral. Lada, sutra putih, benzoin, dan emas merupakan hasil utama Pidie, yang membuatnya terkenal sampai ke India sebagai pemasok utama lada di pasar internasional (Barbosa, 1921 [II]: 181). Gambaran yang sama juga ditemukan dalam catatan perjalanan pedagang-pengembara Arab, antara lain Sulaiman bin Ahmad al-Mahri. Ia menggambarkan Pidie sebagai pelabuhan terpenting di pantai timur Sumatera yang menghasilkan lada (Tibbets, 1970: 223). Oleh karena itu Portugis di Malaka berusaha—dan disambut dengan baik—menjalin persahabatan dengan Pidie sebelum kemudian diserang dan dikuasai Aceh.

Gambaran relatif serupa juga berlaku untuk Pasai, wilayah lain yang dikuasai Aceh pada masa Ali Mughayat Syah. Dengan komoditi yang relatif sama dengan Pidie—yakni lada, sutra, dan benzoin—Pasai berkembang menjadi kerajaan (bernama Samudera Pasai) yang didatangi banyak pedagang dari berbagai negara, antara lain Arabia, Turki, Iran, Gujarat, Semenanjung Malaya, Jawa, dan Siam (Pires, 1944 [I]: 142). *Hikayat Raja-Raja Pasai* memperkuat gambaran Samudera Pasai sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Hal ini tampak dalam kisahan tentang Syekh Islamail, yang digambarkan sebagai seorang Syekh Mekkah yang mengunjungi Samudera Pasai untuk menyebarkan Islam. Setelah tinggal beberapa waktu di Samudera Pasai syekh tersebut menyatakan niatnya untuk kembali ke Mekkah. Sultan, demikian teks menggambarkan, mengumpulkan berbagai hadiah yang dipilih dari barang-barang dagangan utama andalan Kerajaan Samudera Pasai, seperti kamper, merica, kapur barus, cengkeh, dan pala (Hill, 1960: 120).

Sejak abad ke-13 M Samudera Pasai berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan dan keagamaan di Nusantara yang menarik

baik para pedagang maupun para ulama asing berkunjung. Catatan perjalanan Tome Pires menggambarkan bahwa Samudera Pasai berkembang menjadi kerajaan kaya dan makmur, yang dipadati pedagang dari berbagai negara muslim (Moor) dan China guna melakukan transaksi perdagangan dalam jumlah besar (Pires, 1944 [I]: 142). Para pedagang muslim Asia Selatan yang mendominasi jaringan perdagangan, antara India dan China, menjadikan Samudera Pasai sebagai salah satu pusat kegiatan dagang mereka di kawasan Melayu Nusantara (Hall, 1985: 21; Schrieke, 1955 [2]: 16). Pada saat yang sama Samudera Pasai menjadi pusat dinamika Islam di Nusantara. Seorang pengembara asal Maroko, Ibnu Battutah, mencatat bahwa Raja Samudera Pasai Malik al-Zahir mendirikan pusat pembelajaran Islam di lingkungan istana. Ibnu Battutah juga mencatat bahwa sang sultan adalah "seorang yang mulia dan paling dermawan dari raja-raja yang ada, bermazhab Syafi'i, pecinta para ahli fikih yang datang ke pusat pembelajarannya untuk membaca al-Qur'an dan diskusi keagamaan" (Gibb, 1994 [IV]: 876–877).

Dengan keadaan demikian penguasan atas wilayah-wilayah tersebut—yakni Daya, Pidie, dan Pasai—menjadi sangat strategis bagi perkembangan Kerajaan Aceh. Daerah-daerah tersebut penting di bidang ekonomi perdagangan karena menjadi pemasok kebutuhan para pedagang internasional yang datang, sehingga penguasaan wilayah tersebut pada gilirannya sangat penting secara politik bagi upaya konsolidasi kekuatan politik oleh para penguasa Kerajaan Aceh. Hal yang terakhir ini terutama berlangsung pada masa kekuasaan Raja Aceh berikutnya, Sultan Alaudin Ri'ayat Syah al-Kahar (± 1537/9–1571 M), yang membawa kerajaan tampil sebagai pemegang kontrol politik dan ekonomi utama di kawasan barat Nusantara. Ia dikenal sebagai "salah satu dari prajurit-prajurit Aceh yang terbesar" (Ricklefs, 1998: 49) dan banyak melakukan operasi militer sehingga harus berhadapan dengan kekuatan Kerajaan Johor dan Portugis di Malaka.

Tidak lama setelah naik takhta—setelah mengudeta saudaranya, Salahuddin (1530–1537/9 M) yang gagal menyerang Malaka—pada tahun 1539 M Alauddin al-Kahar berusaha menguasai daerah Aru yang menjadi titik pertikaian dengan Johor. Namun serangan itu berhasil digagalkan pihak Johor, yang kemudian menguasai Aru selama dua puluh empat tahun kemudian. Baru pada tahun 1560-an, Sultan Alauddin al-Kahar berhasil menaklukkan Johor. Pada tahun 1564 dan 1565 M ia menguasai Johor dan membawa serta Sultan Aalauddin Ri'ayath Syah I ke Aceh dan membunuhnya. Penaklukkan Aceh atas Johor terus berlangsung. Pada tahun 1570 M Aceh mengirim pasukan ke Johor untuk membantu penguasa Johor—anak raja yang dibunuh di Aceh—yang tengah menghadapi konflik intenal kerajaan. Bersama dengan serangan ke Johor, Alauddin al-Kahar juga melakukan serangan ke Portugis di Malaka. Pada tahun 1547 M ia menyerang Malaka, tetapi mengalami kegagalan. Hal yang sama juga terjadi pada serangan berikutnya pada pada 1568 M (Ricklefs, 1998: 49). Demikianlah melalui serangkaian

serangan, meski tidak semuanya berhasil, Sultan Alauddin al-Kahar meletakkan landasan kokoh bagi perkembangan Aceh sebagai kerajaan penting di bagian barat Nusantara.

Kerajaan Aceh membangun mitos politik sebagai legitimasi kultural kekuasaan. Sebagaimana umumnya kerajaan yang baru berdiri, keabsahan untuk seorang raja bertakhta di istana menjadi isu utama. Isu tersebut tidak hanya mengacu pada kemampuan raja bersangkutan dalam membangun kehidupan ekonomi dan politik nyata, tetapi juga dalam merumuskan aura sakral yang bersifat pribadi sehingga tampil sebagai seorang pemimpin yang secara sosio-kultural *legitimate* duduk di singgasana. Legitimasi itu dibangun dengan merujuk budaya politik Melayu yang berkembang menjadi suatu sistem budaya dominan, sejalan dengan pertumbuhan bahasa Melayu sebagai *lingua franca* yang secara umum berlaku dalam pergaulan antarelit kerajaan dan sebagai ekpresi keagamaan (Burhanudin, 2017: 171–172). Raja-raja Aceh menyatakan diri sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain, mengikuti silsilah raja dalam budaya politik Melayu sebagaimana dipaparkan teks klasik *Sejarah Melayu* (Winstedt, 1938).

Meski ditulis lebih kemudian, dan dipersembahkan untuk Raja Aceh terbesar Iskandar Muda pada abad ke-17 (1607–1636 M), *Hikayat Aceh* menjadi teks Kerajaan Aceh yang mengedepankan keabsahan silsilah sultan-sultan Aceh sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain (Iskandar, 1959: 7). *Hikayat Aceh* memang tidak seperti *Sejarah Melayu* yang menuturkan silsilah secara rinci dan menempatkannya secara sangat sentral dalam pembahasan teks. Meskipun demikian apa yang diketengahkan *Hikayat Aceh* memiliki makna penting dalam konteks politik kerajaan. Seperti telah ditunjukkan di atas, raja-raja Aceh berasal dari dua kerajaan berbeda, Lamuri dan Aceh, yang masing-masing berpusat di Mahkota Alam dan Darul Kamal. Meski tidak pernah menjadi sumber persoalan serius dalam suksesi kepemimpinan, perbedaan asal-usul tersebut tetap menjadi masalah dan jati diri raja yang berkuasa (Hadi, 2014: 75–76). Dalam konteks tersebut pengakuan silsilah sebagai keturunan Iskandar Zulkarnain bermakna sangat penting, terutama untuk mengatasi perbedaan garis keturunan raja.

2. Iskandar Muda dan Kejayaan Aceh

"Maka, pada zaman kita sekarang inipun,
ada jua dijadikan Allah ta'ala dua orang raja
yang amat besar dalam alam dunia ini;
maka yang daripada pihak maghrib, kitalah Raja yang besar,
dan daripada pihak masyrik itu,
Seri Sultan Perkasa Alam Raja yang besar".

Pernyataan di atas—berasal dari *Hikayat Aceh* (Iskandar, 1958), sebagaimana dikutip Lombard (1986: 222)—merupakan pengakuan masyarakat Aceh terhadap besarnya peran dan posisi Iskandar Muda dalam sejarah Kerajaan Aceh. Ia diakui sebagai seorang sultan yang berperan sangat besar bagi kejayaan Aceh, baik di bidang ekonomi perdagangan, politik, maupun keagamaan. Meski didukung banyak faktor, apa yang berlangsung di Aceh sehingga tampil sebagai kerajaan terkemuka di bagian barat Nusantara tidak bisa dipahami tanpa mengaitkannya dengan sosok Iskandar Muda.

Tanggal lahir Iskandar Muda tidak diketahui dengan pasti. Dengan mengacu pada *Hikayat Aceh* dan sumber Eropa, Lombard (1982: 226)—sumber yang akan banyak dirujuk dalam bab ini—memberi informasi bahwa Iskandar Muda lahir pada tahun 1583 M, sehingga dapat diasumsikan bahwa ia naik takhta pada umur 24 tahun dan meninggal pada 1636 M saat berumur 54 tahun. *Hikayat Aceh* (Iskandar, 1958: 30) menyebut ibunya berasal dari keturunan Inayat Syah, Raja Darul Kamal, melalui Sultan Alaudin Ri'ayat Syah, Raja Aceh yang berkuasa pada tahun 1589–1604 M. Sementara dari pihak ayah ia keturunan Munawar Syah dari Mahkota Alam melalui Sultan Mansur dan Ali Mughayat Syah, pendiri kerajaan Aceh (DasGupta, 1962: 24–25).

Iskandar Muda naik takhta ketika Aceh tampil sebagai kerajaan penting di bagian barat Nusantara. Di tangan para pendahulunya, terutama Alauddin Ria'yat Syah al-, Aceh mengalami konsolidasi yang kokoh sebagai kerajaan yang menarik para pedagang mancanegara untuk berkunjung. Kegiatan perniagaan itu menjadi sumber pendapatan utama bagi kerajaan untuk bisa berkembang menjadi kekuatan politik yang besar. Hal ini didukung dengan kontrol Aceh atas wilayah-wilayah yang kaya komoditi perdagangan internasional. Kondisi inilah yang diwarisi Iskandar Muda saat mulai berkuasa pada tahun 1607. Pada saat yang sama Iskandar Muda menyaksikkan Portugis di Malaka sebagai kekuatan penting dalam jaringan perdagangan Asia dan dominan secara politik, terutama di kawasan barat Nusantara. Di samping itu beberapa kali Portugis menjadi sasaran serangan Aceh pada masa raja-raja pendahulunya. Hal-hal itu mendorong Iskandar Muda menempuh kebijakan politik ekspansionis seraya memberlakukan kebijakan otoriter untuk urusan dalam negeri.

Setelah berhasil memperteguh dan memperkokoh politik di dalam kerajaan Iskandar Muda melakukan perluasan kekuasaan ke beberapa wilayah di Sumatera dan di Semenanjung Malaka. Perluasan kekuasaan itu mencapai puncaknya dengan penguasaan wilayah sangat luas. Ambisi Iskandar Muda didukung keberhasilannya membangun kekuatan militer. Ia memiliki angkatan laut dengan kapal-kapal besar berdaya angkut 600–800 orang, pasukan kavaleri dengan kuda-kuda Persia, satuan pasukan gajah, serta satuan artileri dan infantri dengan jumlah sangat

memadai (Ricklefs, 1998: 51; Lombard, 1986: 112–119). Oleh karena itu pada masa kepemimpinannya Aceh tampil sebagai satu-satunya adidaya di wilayah barat Nusantara.

Deli berhasil ditaklukkan pada tahun 1612 M dan kemudian Aru pada tahun 1613 M. Kedua daerah tersebut sangat penting secara ekonomis karena menghasilkan lada dan rempah-rempah. Sasaran berikutnya adalah Sumatera Barat yang terkenal sebagai penghasil emas dan hasil bumi. Di sini Aceh berhasil menguasai Tiku, Pariaman, dan Bengkulu antara tahun 1607 dan tahun 1612 M (DasGupta, 1962: 91). Ekspansi Aceh berhadapan dengan kekuatan Kerajan Johor yang juga memiliki kepentingan untuk menguasai jalur pedagangan di bagian selatan Sumatera. Oleh karena itu sasaran Aceh berikutnya adalah Kerajaan Johor yang sangat potensial menjadi saingan atas supremasi Aceh di bagian barat Nusantara. Aceh pun melakukan serangan militer ke Johor, sehingga hubungan di antara keduanya terus-menerus berada dalam suasana konflik. Sedini tahun 1613 M, ketika berada di bawah kekuasaan Alauddin al-Kahar, Aceh melakukan serangan ke Johor dan berhasil menguasai kerajaan tersebut. Ibukota kerajaan Johor dihancurkan dan penguasanya, Sultan Alaudin Ri'ayat Shah II (1597–1613 M), ditawan bersama keluarganya di Kerajaan Aceh (DasGupta, 1962: 91; Ricklefs, 1998: 51).

Serangan Aceh atas Johor juga dilandasi tujuan untuk menghancurkan kekuatan dagang Belanda (VOC) yang diizinkan penguasa Johor mendirikan kantor dagang mereka di ibukota kerajaan, Batu Sawar. Karena itu, sekelompok pedagang VOC termasuk yang ditawan dan dibawa ke Aceh. Bagi Iskandar Muda, Johor tidak hanya mewakili negeri-negeri Melayu, tetapi yang tepenting adalah persekutuannya dengan kekuatan dagang asing (VOC) yang tengah berkembang sebagai satu kekuatan ekonomi besar di Nusantara. Oleh karena itu, setelah berhasil menaklukkan Johor, Iskandar Muda segera membangun kembali kota tersebut dan menempatkan seorang wakil Raja Aceh untuk membela kepentingan Aceh di daerah terdepan yang sarat dengan ancaman (Lombard, 1986: 122–23).

Namun demikian Iskandar Muda tidak berhasil menguasai Kerajaan Johor selamanya. Tidak lama setelah penaklukan pada tahun 1613 M Johor berhasil merebut kembali kemerdekaan dan bahkan mampu memukul mundur pasukan Aceh. Kemenangan itu disebabkan persekutuan yang dibangun Johor dengan VOC di Batavia. Johor dapat dengan cepat bangkit berkat dukungan setia Orang Laut, bahkan juga membangun persekutuan dengan kerajaan-kerajaan lain di Sumatera dan Semenanjung Melayu, yaitu Pahang, Jambi, Indragiri, Kampar, dan Siak. Di bawah pimpinan penguasa Johor kerajaan-kerajaan tersebut membentuk kekuatan politik dan militer yang senantiasa menjadi ancaman bagi Kerajaan Aceh (Ricklefs, 1998: 51).

Meskipun demikian serangan militer Kerajaan Aceh terus berlanjut secara agresif. Pada tahun 1614 M, setelah berhasil mengalahkan armada Portugis di Bintan, Iskandar Muda kembali mengarahkan ekspansinya ke Kerajaan Johor serta kerajaan-kerajaan lain yang membentuk aliansi kekuatan anti-Aceh. Serangan ke Johor dilakukan pada tahun 1617 M dan selanjutnya berturut-turut Pahang (1616 M), Kedah (1619 M), dan Nias (1624 M). Khusus serangan ke Pahang, Iskandar Muda melakukannya sebagaimana yang dilakukan terhadap Johor. Ia membawa putra penguasa Pahang, Raja Sulung, yang saat itu baru berumur tujuh tahun, ke istana Aceh. Selain dibesarkan di lingkungan istana dan dinikahkan dengan anaknya, Putri Sri Alam Permaisuri, di akhir hayat Iskandar Muda mengangkat Raja Sulung sebagai penerusnya di kerajaan Aceh dengan gelar Sultan Iskandar Tsani (Lombard, 1986: 24).

Johor dan Pahang merupakan dua titik strategis sekaligus dua persimpangan jalan perniagaan yang harus diawasi dan bukan untuk dirusak. Oleh karena itu serangan ke Pahang dimaksudkan sebagai bagian dari usaha melemahkan kedudukan Portugis di Malaka. Pasukan Aceh merusak ujung utara jalur yang melintasi Semenanjung Malaka dan digunakan Portugis-Malaka untuk berniaga dengan Teluk Siam sejak perjalanan melalui laut menjadi lebih berbahaya. Sementara itu serangan atas Kedah dilakukan untuk kepentingan penguasaan daerah penghasil lada yang mutunya menyaingi lada Sumatera. Sejalan dengan kebijakan hegemoni kekuasaan, Aceh mempertahankan kontrol terhadap wilayah-wilayah tersebut secara efektif. Oleh karena itu pada tahun 1630 dan 1635 M Aceh melancarkan serangan besar-besaran guna mempertahankan kontrol terhadap Kerajaan Pahang, yang—kendati sudah ditaklukan pada tahun 1617 M—tetap mempertahankan kekuasaannya (Lombard, 1986: 123–125).

Selain Johor dan VOC di Batavia, Portugis di Malaka merupakan tantangan terbesar bagi Aceh dalam membangun kejayaan politik-ekonomi dan militer di wilayah barat Nusantara. Oleh karena itu Iskandar Muda dua kali menyerang pusat kekuasaan Portugis di Malaka, yakni tahun 1615 dan tahun 1629 M. Serangan dilakukan secara besar-besaran dengan mengerahkan beberapa ratus kapal dan sekitar 19.000 orang prajurit, namun Aceh menderita kekalahan besar setelah Portugis mendapat bantuan dari Goa yang membuat jumlah tentara dan peralatan perang tidak seimbang. Semua kapal dan prajurit Aceh, bahkan pemimpin pasukan—sri maharaja dan laksamana—terbunuh. Akibat kekalahan itu kekuatan militer Aceh mulai mengalami kemunduran dan tidak ada lagi pengerahan kekuatan militer dengan ukuran besar, kecuali yang dilakukan untuk menumpas pemberontakan di Pahang. Sejak peristiwa itu hubungan Aceh dan Portugis terputus selama hampir sepuluh tahun. Johor pun terbebas dari serangan Aceh dan mulai menegakkan kembali pengaruhnya di Semenanjung Malaka berikut kawasan Selat Malaka bagian selatan (Lombard, 1986: 120–131; Ricklefs, 1998: 51–52).

Kerajaan Aceh menerima bantuan militer dari Turki Usmani, berupa senjata berikut instruktur yang mengajar cara penggunaannya. Hal itu menunjukkan bahwa Kerajaan Aceh telah menjalin kerja sama yang erat dengan Turki Usmani, termasuk bantuan militer dalam serangan ke Portugis di Malaka. Pada tahun 1652 M tercatat Kerajaan Aceh mengirim utusan ke Turki Usmani untuk meminta bantuan meriam, yang kemudian dibalas dengan pengiriman 500 orang Turki beserta sejumlah besar senapan dan peluru (Reid, 1993: 222; Tjandrasasmita, 2012 [III]: 78).

Demikianlah Iskandar Muda berhasil mengembangkan kekuatan militer sehingga mampu mempertahakan kontrol politik atas wilayah kekuasaannya yang sangat luas. Dengan kekuatan militer pula Iskandar Muda menerapkan kebijakan yang terpusat dan otoriter untuk berbagai aspek kehidupan di dalam kerajaan. Hal ini tampak terutama dalam bidang perdagangan.

3. Perdagangan dan Politik

Tidak diragukan lagi bahwa perdagangan—bersama dengan konversi keagamaan—sejak awal memang menjadi bagian dinamika politik Kerajaan Aceh. Perniagaan yang melibatkan pedagang dari negara-negara muslim menjadi pangkal utama bagi pertumbuhan dan perkembangan kerajaan. Oleh karena itu keterlibatan pihak kerajaan—baik keluarga raja maupun pejabat politik di istana—dalam kegiatan perdagangan tidak dapat dihindari. Ketiadaan gaji atau pendapatan tetap dari kerajaan menjadi faktor bagi suburnya praktik tersebut. Kegiatan itu dalam sejarah Melayu-Nusantara dapat dijumpai, misalnya, di Kerajaan Malaka pada abad ke-14 M dengan para elit politik mengatur lalu-lintas dagang. Teks *Sejarah Melayu* menuturkan bahwa Bendahara Sri Maharaja selalu terlibat usaha perniagaan dan tidak pernah sekalipun mengalami kegagalan (Winstedt, 1938: 184). Sementara itu *Undang-Undang Malaka* memang membuka kemungkinan demikian meski dengan aturan bahwa transaksi mereka (dalam konteks ini syahbandar) hanya terbatas pada produk timah, salah satu komoditi yang dicari pedagang internasional, dan tidak melebihi 112,5 reals (Fang, 1976: 171).

Pola keterlibatan pihak kerajaan dalam kegiatan perdagangan mulai berubah, terutama sejak masa Iskandar Muda. Peraturan, yang mendorong lahirnya elit ekonomi (*orang kaya*) tidak lagi berlaku. Sebaliknya Iskandar Muda dan elit politik di kerajaan pada umumnya menjadi pelaku ekonomi utama yang sangat menentukan. Hal ini tampak, misalnya, dari aturan yang termaktub dalam teks *Adat Atjeh* yang berisi sejumlah aturan tentang perdagangan. Teks tersebut menyebut sebagai berikut:

> "Pada hari Jum'at tanggal 14 Rabiul Awwal 1047 H (1635 M) kira-kira pukul 12 siang, pada suatu saat yang baik dalam pemerintahan Paduka Sri Sultan Iskandar Muda—

semoga Tuhan melindunginya—telah dikeluarkan pengumuman ini mengenai semua kapal yang datang berdagang di Aceh Dar us-Salam. Pengumuman itu sebagai berikut: kapal-kapal Inggris, Prancis, Belanda, Portugis, Spanyol, Keling, Pegu dan yang lain-lain hendaknya mengetahui bahwa jika berdagang di pelabuhan lain yang bukan Aceh Dar us-Salam tanpa ada izin Sultan—semoga Tuhan melindunginya—, mereka membuat pelanggaran dan akan kena hukuman yang disebabkan ketidakpatuhan pada undang-undang yang telah diumumkan" (dikutip dari Lombard, 1986: 136).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Iskandar Muda menerapkan pengawasan sangat ketat terhadap perniagaan. Istilah "izin Sultan" menjadi praktik monopoli yang dipaksakan sultan terhadap para pedagang. Semua pelabuhan yang dikuasai Aceh harus mengatur transaksi dagang sesuai dengan kebijakan kerajaan Aceh. Semua pedagang yang hendak membeli barang di daerah-daerah taklukan diharuskan singgah lebih dulu di Aceh untuk mendapat surat pas. Surat pas inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan bagi pihak kerajaan melakukan intervensi dalam menentukan kegiatan dan transaksi dagang.

Sejumlah aturan berkenaan dengan bea cukai memberi kewenangan pihak kerajaan memungut berbagai macam bea cukai terhadap kapal-kapal dagang yang singgah di Aceh, yang jenisnya semakin banyak pada abad ke-17 M. Sangat mungkin kewajiban membayar bea cukai ini muncul pada masa Iskandar Muda, karena pada masa sebelumnya sama sekali tidak dikenal sistem bea cukai. Yang ada bea *chappe* (cap), sejenis pajak yang dibayarkan kepada kerajaan yang ditentukan berdasar berat barang (Lombard, 1986: 137, 259). Dengan sistem bea cukai, dan dengan jenis yang semakin beragam, maka usaha menarik dana bagi kerjaan semakin bertambah. *Adat Atjeh* menyebut setidaknya terdapat tujuh jenis pungutan yang ditetapkan pihak kerajaan terhadap para pedagang, antara lain biaya cap, biaya kain, langgar, dan iuran pendaftaran (Lombard, 1986: 138). Oleh karena itu banyak pedagang dan penjelajah Eropa yang singgah di Aceh pada zaman Iskandar Muda mengeluhkan tingginya tarif yang harus mereka bayar. Bea tinggi terutama berlaku untuk orang-orang Kristen, terutama orang Belanda dan orang Inggris. Mereka diwajibkan membayar tujuh persen dari barang dagangan yang diturunkan ke darat. Selain itu masih ada lagi iuran lain, sehingga jumlahnya menjadi 10 persen. Sementara itu untuk orang-orang muslim tidak diwajibkan membayar bea keluar, tetapi mereka juga diperlakukan sangat keras ketika memasukkan barang dagangan. Mereka harus membayar dengan emas atas barang dagangan mereka berdasar taksiran petugas bea cukai dengan harga 50 persen lebih tinggi dari harga sebenarnya. Oleh karena itu sesungguhnya kondisi mereka tidak lebih baik orang-orang Kristen (Lombard, 1986: 138).

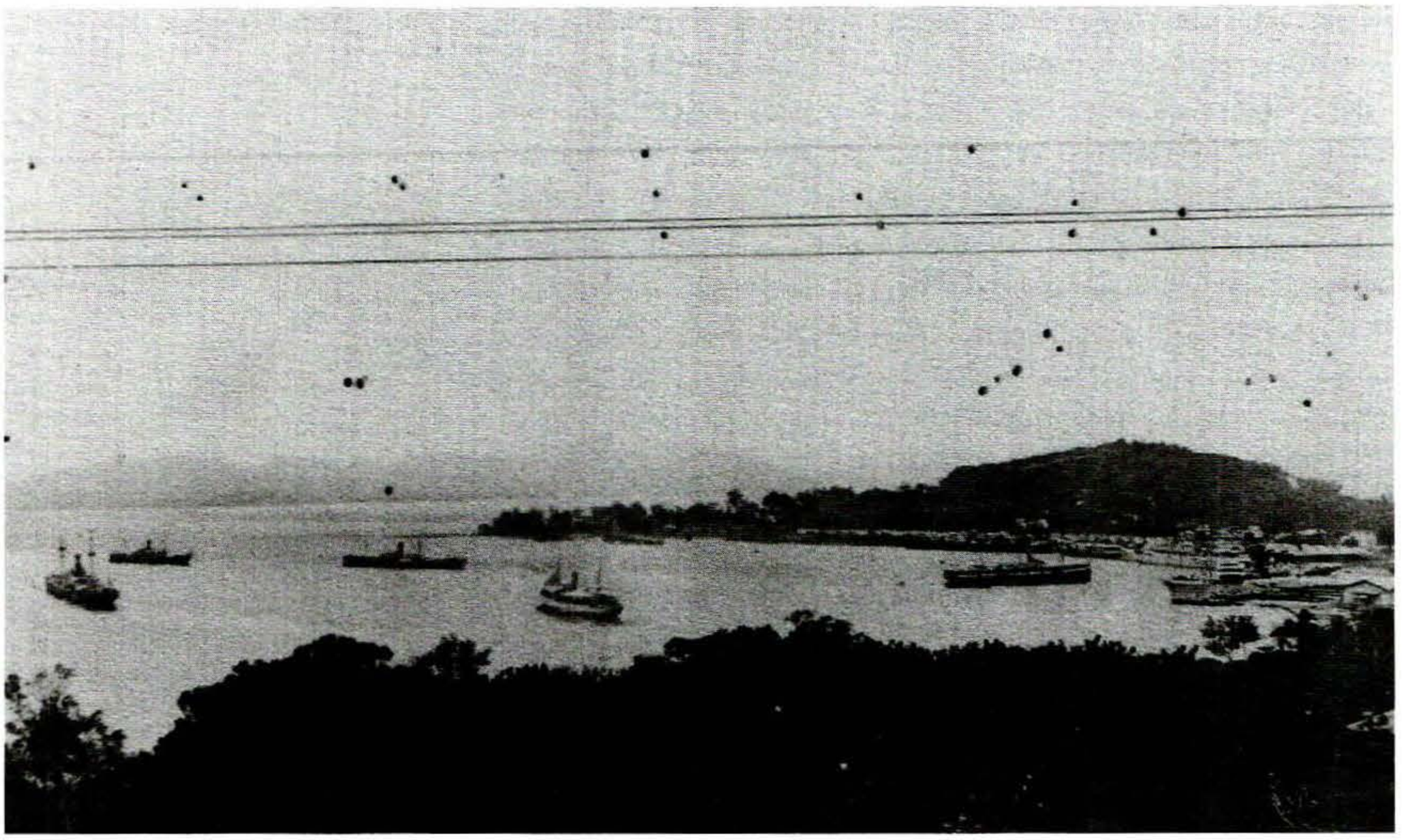

Suasana kesibukan di pelabuhan Sabang
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Raja tidak hanya memungut bea cukai, tetapi juga melakukan monopoli perdagangan. Raja digambarkan sebagai "pedagang yang pertama dan yang utama di seluruh kerajaan", yang berusaha memperoleh keuntungan sebanyak yang bisa didapat untuk kepentingan dirinya dan bukan untuk kepentingan langsung rakyatnya. Untuk hal itu raja meminta seluruh pegawai pelabuhan menyimpan barang dagangan di gudang dan akan dikeluarkan sesuai penjualan atau pembelian yang diadakan oleh raja atau perantaranya dengan para pedagang asing (Lombard, 1986: 139). Terkait hal itu tidak berlebihan jika pengembara asal Prancis mencatat bahwa raja mengendalikan hampir seluruh perdagangan dan mengambil keuntungan yang besar dari transaksi dengan pedagang asing. Barang dagangan yang dia terima dari wilayah taklukan dijual dengan harga lebih tinggi sekiar 50 persen dari harga yang berlaku di pasar (Beaulieu, 1764 [II]: 756; Lombard, 1986: 139).

Dalam konteks itu penjualan lada menjadi satu contoh menarik dari praktik monopoli sebagaimana dikabarkan John Davis. Ia pengembara asal Inggris dan pekerja di kapal Cornelis de Houtman asal Belanda yang singgah di Aceh pada tahun 1599 M. Ia sekaligus memperoleh tugas memata-matai perjalanan dagang mereka. Setibanya di Inggris Davis mengabarkan bahwa di Aceh lada diperjualbelikan dengan harga 4 real sebahar. Atas dasar itu banyak pedagang Inggris membiayai pelayaran ke Aceh di bawah pimpinan Sir James Lancaster. Setibanya di Aceh pada tahun 1602 M Lancaster sangat kaget, ternyata harga lada sudah naik menjadi 20 real, bahkan setelah pergi beberapa waktu ke Malaka dan kembali ke Aceh harga sudah naik menjadi 27 sampai 30 real. Harga di atas naik menjadi 54 real saat Bealieu singgah di Aceh pada tahun 1620 M (Lombard, 1986: 139–140).

Keadaan tersebut berkait erat dengan kebijakan monopoli raja. Tingginya permintaan pasar terhadap lada menjadi alasan pihak kerajaan menahan barang dan menaikkan harga sesuai kemauan sendiri agar memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Dalam hal ini raja tampil lebih sebagai pelaku usaha, sebagai pedagang, dan bukan penguasa yang membuat aturan perniagaan. Keadaan ini merupakan bukti apa yang disebut sebagai "*royal absolutism*": raja—dengan legitimasi agama—memiliki kekuasaan mutlak di bidang politik dan ekonomi. Sultan Iskandar Muda merupakan tokoh yang secara bersamaan menjalankan kekuasaan di dua bidang tersebut. Ia orang yang paling berkuasa di Kerajaan Aceh sekaligus pedagang terkemuka.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, kebijakan Sultan Iskandar Muda dianggap tidak ramah terhadap perkembangan perdagangan bebas yang menjadi akar kelahiran sistem ekonomi kapitalis di Eropa (Kathirithamby-Wells, 1993: 125). Keadaan yang berlangsung pada masa Kerajaan Malaka, yakni "percepatan dagang/ekonomi, monetisasi jual beli, pertumbuhan kota, akumulasi kapital, dan spesialisasi fungsi" (Reid, 1993: 2), tidak memperoleh tempat di Kerajaan Aceh di bawah Iskandar Muda. Hal yang berlangsung terjadi justru sebaliknya, yakni meletakkan sistem ekonomi berada langsung di bawah monopoli kerajaan. Akibat kebijakan itu harga barang dagangan tidak lagi ditentukan oleh pasar, tetapi oleh raja.

Masa kekuasaan Iskandar Muda merupakan periode puncak ketika pihak penguasa tampil dengan kekuasaan mutlak, yang sudah dimulai sejak masa Alauddin Ri'ayat Syah Sayyid al-Mukammil (1589–1604 M). Al-Mukammil mulai menerapkan kebijakan terpusat yang mengakhiri dominasi *orang kaya* dalam politik di Kerajaan Aceh. Dengan demikian ia meletakkan landasan kokoh bagi proses menuju ke arah model pemerintahan yang absolut (Reid, 1975: 48; Ricklefs, 1998: 50). Proses itu mencapai puncaknya di tangan Iskandar Muda, yang menjadikan keraton sebagai pemegang satu-satunya kekuasaan nyata. Dengan dukungan kekuatan militer yang besar (Lombard, 1986: 112–121), Iskandar Muda menerapkan kebijakan yang tidak hanya ekspansionis—dengan penaklukan atas sejumah wilayah di Sumatera dan Semenanjung—tetapi juga melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap semua aspek serta dinamika kehidupan sosial-politik dan ekonomi (Ricklefs, 1998: 51-52; Reid, 1975: 49).

Al-Mukammil dan, terutama, Iskandar Muda tidak hanya menolak dominasi *orang kaya* dalam dunia politik dan ekonomi, tetapi bahkan menghancurkan keberadaan mereka. Ia konsisten dengan sistem pemerintahan absolut, sehingga semua hal yang dapat merongrong kekuasaan menjadi target kebijakan kerajaan. Al-Mukammail melakukan sejumlah langkah untuk menegakkan supremasi raja terhadap *orang kaya*. Sebelumnya *orang kaya* bisa menaikturunkan raja sesuai kehendak mereka, tetapi raja baru (al-Mukammil) bertekad tidak mau menjadi bayang-bayang atau bahkan mainan

orang kaya. Ia menegakkan hukum dan aturan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian di lingkungan kerajaan. Ia bahkan diberitakan membunuh sejumlah *orang kaya* terkemuka dalam sebuah pesta yang khusus diadakan untuk mengumpulkan mereka. Untuk menghindari *orang kaya* naik kembali ke pentas kekuasaan, ia menghancurkan rumah-rumah mereka serta merampas senjata dan perabotan rumah mereka. Pihak kerajaan pun melarang mereka membangun rumah bergaya mewah dengan dilengakapi senjata dan parit pengaman (Beaulieu, 1764 [II]: 736; Reid, 1975: 48–49).

Kekuasaan raja atas *orang kaya* semakin menguat pada masa Iskandar Muda. Ia melakukan pengawasan sangat ketat baik di bidang politik maupun ekonomi. Akibat kebijakan itu Kerajaan Aceh abad ke-17 tidak hanya kehilangan *orang kaya* sebagai kekuatan ekonomi yang juga tampil di pentas politik, tetapi juga simbol-simbol kemewahan mereka berupa harta tidak bergerak karena diambil dan menjadi kekayaan raja. Peran-peran yang sebelumnya dipegang *orang kaya* kini diganti dengan campur tangan raja. Tidak ada transaksi ekonomi yang tidak melewati izin raja. Sumber-sumber Inggris dan Belanda awal (Reid, 1975: 49) mencatat adanya praktik-praktik autokrasi, yakni raja tampil sebagai pemegang monopoli perdagangan yang dominan sehingga tidak menyediakan ruang bagi tumbuhnya pedagang Aceh. Kebijakan Iskadar Muda tersebut tidak hanya mengakhiri keberadaan *orang kaya*, tetapi sekaligus menjadi awal pertumbuhan apa yang disebut sebagai "*royal absolutism*" (Kathirithamby-Wells, 1993: 125).

4. Hubungan Diplomatik dengan Turki Usmani

Pada zaman keemasannya Aceh tampil sebagai pusat kekuasaan politik sekaligus sebagai pusat lahirnya peradaban Islam di Nusantara. Melalui kemajuan perdagangan, jalinan hubungan dengan dunia Islam berlangsung intensif, sehingga melahirkan "internasionalisasi" kerajaan sebagai bagian dari domain Islam (*dar al-Islam*) dan sekaligus intensifikasi keislaman dengan nilai-nilai agama semakin menyatu ke dalam sistem sosial-politik dan budaya masyarakat.

Kondisi inilah yang menjadi landasan bagi lahirnya pemikiran Islam di Aceh, termasuk di bidang politik, dan berperan sebagai rahim kelahiran pemikiran Islam di Nusantara, termasuk dunia Melayu. Sebagian besar naskah cendekia dan pemikiran politik di Kerajaan Aceh berbahasa Melayu dan oleh karenanya menegaskan peran kerajaan tersebut dalam proses perkembangan alam Melayu. Sementara itu hubungan intensif kerajaan Aceh dengan Kekhalifahan Turki Usmani berpengaruh pada dunia keislaman Aceh.

Kekhalifahan Turki Usmani memang memiliki kedudukan penting dalam dinamika politik di dunia Melayu. Meski Arab—khususnya Mekkah—disebut sebagai asal seorang ulama yang memperkenalkan Islam ke negeri "di bawah angin" sebagaimana dikisahkan *Hikayat*

Raja-Raja Pasai (Hill, 1960: 56–57) dan *Sejarah Melayu* (Winstedt, 1938: 83), namun Turki Usmani diakui sebagai pusat kekuasaan Islam. Kerajaan-kerajaan di Melayu-Nusantara menjalin kerjasama politik, militer, dan perdagangan dengan Turki Usmani. Dalam konteks ini Aceh merupakan Kerajaan Nusantara terdepan dalam membangun persekutuan kekuatan dengan kesultanan itu. Kondisi geo-politik mendorong Kerajaan Aceh melakukan kerjasama politik-militer dengan Turki Usmani. Pilihan itu sangat tepat dan strategis karena Aceh harus berhadapan dengan Portugis yang berkuasa di Malaka. Bagi Aceh, Portugis-Malaka merupakan persoalan yang dapat menghambat Aceh menjadi kerajaan terkemuka di bagian barat Nusantara. Di pihak lain Turki Usmani, yang menjadi kekuatan Islam terdepan di Timur Tengah, berkepentingan dengan jalur perdagangan rempah di Lautan India.

Turki Usmani berkembang menjadi kekhalifahan Islam paling kuat di Timur Tengah dan wilayah Laut Tengah setelah menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 M. Sebelumnya, pada tahun 1516 M, Turki Usmani menaklukkan Kerajaan Mamluk di Mesir dan pada tahun 1517 M menaklukkan Syria berikut wilayah kekuasaannya di Hijaz. Penaklukan-penaklukan itu membuat Turki Usmani memiliki kontrol atas Laut Merah, yang merupakan jalur pelayaran utama perdagangan dari Laut India ke Laut Tengah. Tidak lama setelah itu, atas rekomendasi Gubernur Jeddah Selman Reis († 1528 M), Turki Usmani mulai terlibat dalam perdagangan di Lautan India dan Afrika. Selman Reis sangat memahami kondisi dan dinamika perdagangan di Lautan India. Oleh karena itu ia mendorong Turki Usmani terlibat lebih jauh untuk menghalau kegiatan Portugis di sana, termasuk di "negeri bawah angin" (*Tahtu'l-Rih*) (Peacock dan Gallop, 2015: 8; Azra, 1994: 51).

Sejak abad ke-16 M, seiring kemunduran pedagang Arab, keterlibatan Turki Usmani mulai terasa secara politik dan militer di kawasan Lautan India. Meski sulit menentukan jumlah orang dan volume perdagangan, tetapi informasi kehadiran berikut ancaman Portugis di Lautan India disadari oleh para komandan militer Dinasti Usmani. Para pedagang Usmani (Rumi) di Pasai, seperti dicatat Tome Pires (1944 [II]: 142), sangat mungkin menjadi sumber informasi tentang Portugis. Informasi juga diperoleh dari awak kapal muslim yang diblokade Portugis saat menuju Jeddah (Peacock dan Gallop, 2015: 8). Dengan demikian persaingan antara Turki Usmani dan Portugis untuk menguasai jalur perdagangan rempah di Lautan India telah tumbuh sebelum hubungan diplomatik Turki Usmani-Aceh terjalin secara resmi, yang baru berlangsung pada tahun 1537 atau tahun 1538 M. Laporan Selman Reis menjadi bukti kuat perhatian dan kekhawatiran Turki Usmani terhadap kondisi di Lautan India.

> [Portugis] juga menguasai pelabuhan [Pasai] di pulau besar yang disebut Syamatirah [Sumatera] ... terletak setelah pulau Ceylon yang telah disebutkan terdahulu. Dikatakan, mereka (yaitu Portugis) mempunyai

200 orang kafir di sana [Pasai]. Dengan 200 orang kafir mereka juga meguasai pelabuhan Malaka yang berhadapan dengan Sumatera... Kelihatanya seluruh rempah-rempah datang dari pulau ini. Sekarang rempah-rempah tersebut jatuh ke tangan Portugis. Dulu, sebelum Portugis menguasai pelabuhan-pelabuhan itu... [kita] mendapat banyak penghasilan dari rempah-rempah [yang diperdagangkan] di Mesir, juga banyak barang-barang tersedia. Dikatakan bahwa Portugis yang terkutuk itu menguasai pelabuhan-pelabuhan yang disebutkan tadi hanya dengan 200 orang. Karena itu, ketika kapal-kapal kita telah siap dan, Insya Allah, bergerak melawan mereka, maka kehancuran total mereka tidak terelakkan lagi, karena satu benteng tidak mampu menyokong yang lain, dan mereka tidak dapat membentuk perlawanan yang bersatu (Ozbaran, 1978: 84 dikutip dari Azra, 1994: 51).

Keberhasilan Usmani menguasai wilayah yang luas memperkuat citranya sebagai garda terdepan dalam membela ortodoksi Sunni. Citra tersebut semakin kuat ketika Sultan Selim I (1512–1520 M) menggunakan gelar Khalifah dan "Pelayan Tanah Suci" (*Khadim al-Haramayn*). Oleh karena itu para Sultan Usmani mengambil langkah-langkah penting untuk menjamin keamanan perjalanan ibadah haji, termasuk mereka yang berasal dari kawasan Nusantara. Mereka bisa langsung menuju Mekkah tanpa hambatan berarti. Pada tahun 1538 M Sultan Saulaima I (1520–1566 N) melepas armada tangguh di bawah pimpinan Gubernur Mesir Khadim Sulaiman Pasha untuk membebaskan semua pelabuhan yang dikuasai Portugis dan karenanya mengamankan pelayaran haji ke Jeddah (Azra, 1994: 49). Dengan demikian Dinasti Usmani memberi dukungan bagi keselamatan dan pertumbuhan perjalanan haji ke Mekkah, yang kemudian menciptakan jaringan cendekia-keagamaan.

Dalam konteks itulah terjalin hubungan diplomatik kerajaan Aceh—dan Nusantara pada umumnya—dengan Dinasti Usmani. Seorang petualang Portugis Mendes Pinto († 1583 M) mencatat kedatangan armada militer Turki Usmani dari Laut Merah pada tahun 1537/1538 M untuk membantu Sultan Aceh Alaudin Ri'ayat Syah al-Kahar membangun kekuatan militer. Sekitar 160 tentara Turki, sejumlah orang Abbissinia dan Gujarat, serta 200 tentara bayaran dari Malabar membentuk angkatan bersenjata Kerajaan Aceh, yang kemudian digunakan Sultan al-Kahar untuk menaklukkan wilayah di Batak di pedalaman Sumatera bagian utara pada tahun 1539 M. Catatan Mendes Pinto juga menyebutkan armada Aceh di bawah komando seorang Turki, Hamid Khan, yang juga keponakan Pasha Usmani di Kairo (Azra, 1994: 51–52; Catz, 1989: 21–27).

Bersamaan dengan itu, sekitar tahun 1560-an M, Sultan Alauddin al-Kahar mengirim utusan ke Istanbul dengan tugas memperoleh senjata api dan amunisi untuk menghadapi Portugis-Malaka. Utusan Aceh sampai di Istanbul setelah mengalami petaka di Laut Merah karena kapal mereka dihadang Portugis. Meskipun gagal mempersembahkan hadiah berupa emas, permata, dan rempah-rempah duta Aceh itu berhasil mendapat bantuan militer Turki. Aceh menerima kedatangan utusan Turki, seorang ahli membuat senjata, sehingga atas bantuannya banyak meriam berukuran besar dibuat di Aceh. Salah satu meriam yang paling terkenal bernama "Lada Secupak". Oleh karena itu pada masa kejayaannya Aceh memiliki seribu dua ratus meriam, delapan ratus di antaranya berukuran besar (Reid, 1993: 222; Lombard, 1996 [II]: 209; Azra 1994: 53; Tjandrasasmita, 2012 [III]: 78).

Meski serangan ke Portugis-Malaka selalu mengalami kegagalan, namun hubungan diplomatik Aceh-Usmani berlanjut pada masa kepemimpinan Kerajaan Aceh berikutnya. Sultan Masnsur Shah (1577–1588 M), misalnya, memperbarui hubungan diplomatik dan militer tersebut. Hal serupa juga dilakukan penguasa Aceh berikutnya, Sultan Alauddin Ri'ayat Shah (1588–1604 M). Dengan mengacu pada sumber-sumber Aceh, Azra (1994: 54–55) berpendapat bahwa hubungan dengan Turki Usmani belanjut pada masa kejayaan Aceh di bawah Sultan Iskandar Muda (1607–1636 M), yang berhasil membangun Aceh menjadi kerajaan terkemuka di belahan barat Nusantara.

Dengan kondisi demikian tidak mengherankan jika Aceh tampil sebagai salah satu pusat Islam di Nusantara dengan budaya Turki menjadi salah satu unsur penting. Hubungan diplomasi dan keagamaan dengan Turki Usmani memberi kontribusi penting bagi Aceh untuk menjalin hubungan dengan pusat-pusat Islam di Timur Tengah, India, Anatolia, dan Persia. Aspek budaya inilah yang menjadi substansi utama hubungan Aceh dengan dunia muslim menggantikan hubungan politik resmi, khususnya dengan Turki Usmani yang berakhir sejak akhir abad ke-16 M. Dilihat dari konteks perkembangan kerajaan Aceh, justru pada periode inilah Islam dan Turki Usmani mewarnai perkembangan budaya Melayu Kerajaan Aceh.

5. Turki Usmani (dan Islam) di Alam Melayu

Dalam ranah peradaban, unsur-unsur yang terkait dengan Turki Usmani berperan penting, namun tidak dapat dilihat secara kasatmata. Sebagai pemegang kekuasaan politik Islam terkemuka, Turki Usmani tampil lebih mewakili dan menghadirkan wajah Islam secara umum. Naskah-naskah keagamaan merupakan salah satu bukti penting perkembangan peradaban Melayu Islam, di samping tentu saja unsur-unsur kelembagaan dan praktikal serta material.

Kajian Braginsky (2015: 263–292) mengidentifikasi sejumlah tema terkait Turki dan Turki Usmani pada naskah-naskah yang sudah lama dikenal dalam peradaban Melayu, yakni *Hikayat Iskandar Zulkarnain*, *Hikayat Amir Hamzah*, dan *Hikayat Muhammad Hanafiyah*. Ketiga teks tersebut termasuk kitab paling awal dalam tradisi sastra Islam Melayu—menggantikan epos-epos Hindu—yang disadur dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pada abad ke-14 M di Kerajaan Samudera Pasai bersumber tradisi Islam Persia dan India (Iskandar, 1995: 127–128). *Hikayat Muhammad Hanafiyah*, misalnya, mengisahkan tokoh utama, Muhammad Hanafiyah, yang melakukan pengembaraan dan penaklukan atas daerah yang didiami masyarakat suku Turki. Salah satu episodenya menceritakan Muhammad Hanafiyah berperang selama tiga belas tahun melawan Khalifah Umayyah Yazid untuk membalas kematian Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad. Ia dibantu kelompok Turki, yakni Tughan Turk (penguasa Tabriz) dan saudaranya, Mughan Turk. Mereka menjadi sekutu utama Muhammad Hanafiyah dan berada di baris terdepan dalam perang melawan suku Zanzibarian (Janggi). Perang itu juga dilakukan untuk alasan menaklukkan dan mengajak mereka memeluk agama Islam (Braginsky, 2015: 269–270).

Kisah yang hampir sama ditemukan dalam *Hikayat Amir Hamzah*, khususnya pada episode Zubin, seorang raja Turkistan. Ia digambarkan sebagai orang yang perkasa dan sekutu Nushirwan. Zubin berkuasa di kota Kaus dengan rakyatnya yang disebut Turki atau Mongol. Dalam suatu waktu Zubin diperdaya Behtek, salah seorang wakil Nushirwan, untuk membunuh Amir Hamzah. Ia dijanjikan imbalan dapat mempersunting anak Nushirwan yang memang dicintai Zubin. Meski sempat terluka Hamzah kembali sehat dan siap berperang. Maka, dalam upaya penguasaan Kaus, saudara Zubin (Ghar Turki dan Tar Turki) menyerang Hamzah, tetapi dikalahkan Hamzah dan ia diminta masuk Islam sehingga akhinya menjadi teman dan bahkan sekutu Hamzah (Braginsky, 2015: 271).

Gambaran tentang Turki semakin kuat pada abad ke-16 M. Berkat kontak intensif dengan Turki Usmani dan dunia muslim secara umum, elemen Turki tampak nyata dalam karya-karya sastra dan budaya Melayu meskipun tidak selalu ditulis di Kerajaan Aceh. Kedah merupakan salah satu "wilayah sastra" yang menyerap unsur Turki Usmani, yang disebut dengan istilah "Rum". Unsur Turki terwujud dalam teks historiografi lokal *Hikayat Merong Mahawangsa*, yang menyatakan bahwa Raja Rum (Turki Usmani) merupakan salah satu keturunan penguasa dinasti Kedah, di samping dinasti-dinasti lain yang berkuasa di Siam, Patani, dan Perak (Azra, 1994: 46; Saleh, 1991). Hal serupa juga ditemukan dalam tradisi masyarakat Gayo di bagian barat daya Sumatera. Di sini Raja Rum dipercaya sebagai nenek moyang orang Gayo, yang disebut "Genali" atau "Kawe Tepat". Putra penguasa Rum digambarkan "turun dari ujung Aceh", sebutan untuk Gayo yang secara geografis memang relatif jauh dari Banda Aceh, dan saudaranya (putra bungsu) yang turun di

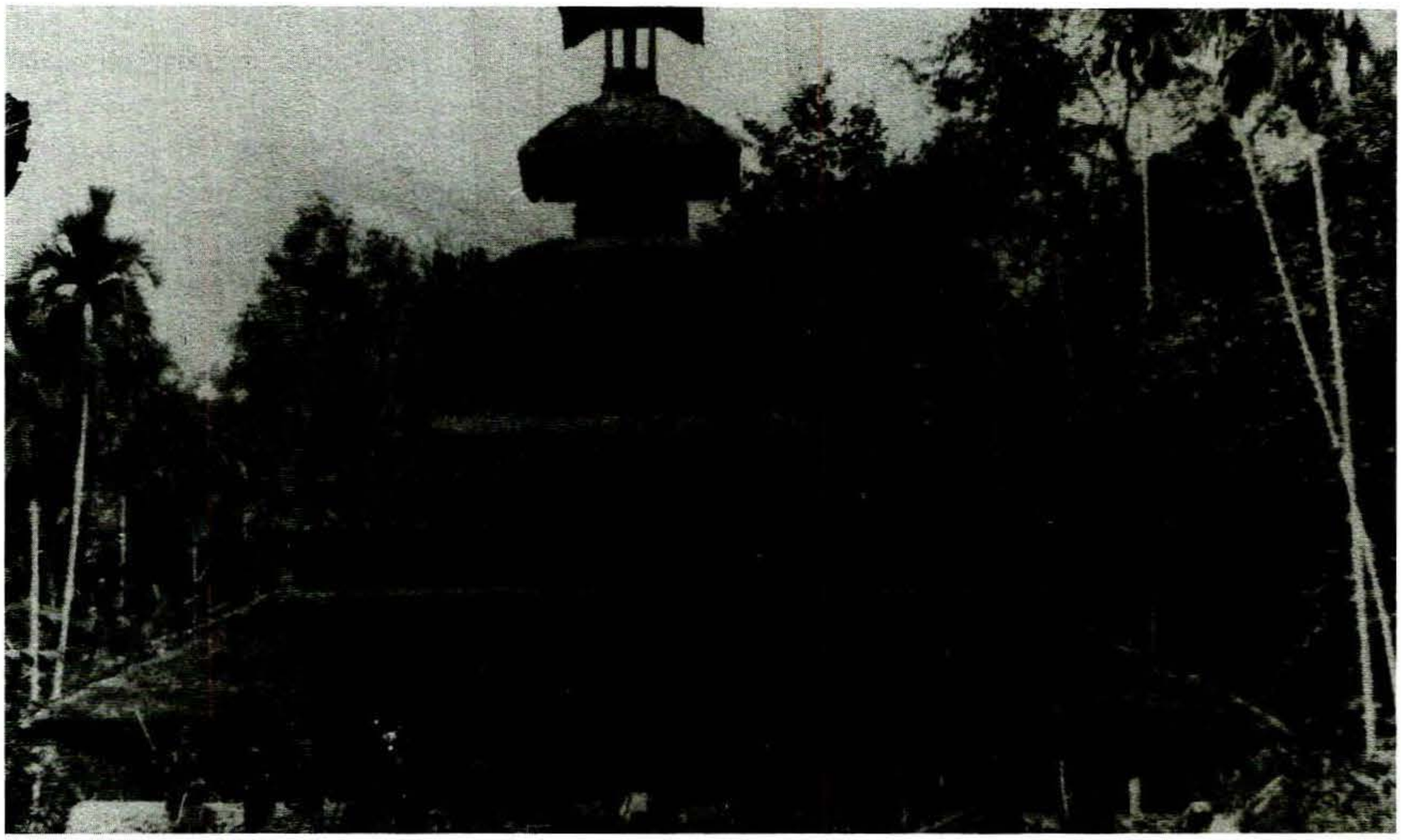

Bangunan Masjid Raya Aceh
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Aceh dan kemudian melahirkan masyarakat Gayo. Orang Gayo juga percaya bahwa Rum—tepatnya "kata sepakat Jumhur dari Rum"—memiliki kedudukan penting dalam sistem otoritas keagamaan setelah firman Tuhan dan hadis Nabi (Azra, 1994: 46–47; Bowen, 1991: 221–222 dan 252).

Signifikansi tema Turki seperti tertuang dalam karya-karya sastra di atas terletak pada fakta bahwa pengakuan tersebut terkait erat dengan isu politik-keagamaan, yakni sebagai pemberi keabsahan agama atas realitas politik kerajaan. Hal ini sejalan dengan makna sosiologis-politik teks-teks yang memberi tempat bagi cerita tentang Turki. *Hikayat Iskandar Zulkarnain*, *Hikayat Amir Hamzah*, dan *Hikayat Muhammad Hanafiyah* lahir dalam kondisi ketika legitimasi politik menjadi satu isu sangat sentral menyusul perubahan-perubahan yang terjadi bersama dengan proses Islamisasi. Untuk konteks abad ke-16 M tema tentang Turki juga terkait dengan fakta sejarah bahwa Dinasti Usmani merupakan pemegang kontrol politik dunia Islam setelah Dinasti Abbasiyah. Posisi ini semakin menguat setelah Dinasti Usmani (sejak 1517 M) menjadi pelayan Tanah Suci (Braginsky, 2015: 268). Oleh karena itu dapat dipahami jika Turki menjadi tema penting dalam tradisi politik di Melayu-Nusantara pra-kolonial.

Bagi Aceh, gambaran dan citra Turki terdapat dalam sastra sejarah karya seorang ulama besar Nuruddun al-Raniri, *Bustan as-Salatin*. Karya ini ditulis sebagai sebuah "ensiklopedi sejarah dunia" (Winstedt, 1969: 90), yang memberi bukti tentang cara seorang ulama neo-sufi berhadapan dengan isu-isu politik di kerajaan. *Bustan as-Salatin* (selanjutnya disebut *Bustan*) ditulis sekitar tahun 1630-an M dan dipersembahkan kepada pelindungnya, Iskandar

Tsani. Dalam pengantarnya (MS Melayu Raffles no. 8: 4) al-Raniri menulis bahwa Iskandar Tsani menugaskannya untuk "menyusun sebuah buku (kitab) dalam bahasa Melayu (Jawi) terkait perbuatan warga di... bumi... menghubungkan perbuatan para raja di masa-masa awal dan kemudian" (Grinter, 1979: 10).

Kitab *Bustan* terdiri atas tujuh buku, yang bermula dari penciptaan dunia, kemudian berlanjut dengan sejarah para nabi, para rasul Tuhan, dan para raja dari masa pra-Islam. Kisahan dilanjutkan dengan periode Islam dari masa Nabi Muhammad sampai kerajaan-kerajaan Islam di India. Buku kedua memuat sejarah Islam di Asia Tenggara, berpusat pada Kerajaan Malaka dan Pahang, diikuti Aceh. Keempat buku berikutnya (buku ketiga sampai keenam) berisi panduan politik dan nasihat bagi para raja, yang didasarkan pada kisah-kisah yang berkaitan dengan perilaku para khalifah dan raja pada masa lalu. *Bustan* mengikuti *Nasihat al-Muluk* karya al-Gazali, yang sangat menekankan pentingnya para raja mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini. Buku terakhir, buku ketujuh, berkaitan dengan prestasi ilmiah dalam bidang firasat, anatomi, dan kedokteran (Grinter, 1979: 12–37; Steenbrink, 1994: 183–203).

Tema yang terkait Turki dalam *Bustan*, menurut Braginsky (2015: 282–287), berkaitan dengan asal-usul mereka yang berasal dari Yajuj dan Majuj. Mereka terperangkap di luar tembok yang dibangun Iskandar Zulkarnain; terdiri dari tiga suku, yakni Maisik, Nasik, dan Taris. Mereka beragama Zoroaster dan tinggal di tepi Sungai Amu Daya (Jaihun). Isu lain terkait Turki muncul pada bagian Khalifah Abbasiyah, tahun 836 hingga 892 H, ketika Khalifah al-Ma'sum memindahkan pusat administrasi pemerintahan dari Baghdad ke Samarra. Al-Ma'sum membangun pasukan pengawal yang terdiri dari para budak Turki dan menjadikan mereka sebagai kekuatan militer yang dapat diandalkan. Hal ini tampak pada narasi tentang perang melawan Armenia dan Bizantium. Tentara Turki digambarkan memiliki kekuatan sebagai penakluk yang unggul. *Bustan* mencatat beberapa orang pemimpin pasukan Turki yang terkenal, antara lain Bugha al-Kabir, Bugha al-Saghir, dan Musa ibn Bugha al-Kabir. Namun demikian *Bustan* juga menarasikan peristiwa historis yang dramatis, yakni tentara pengawal Turki dianggap bertanggungjawab dalam pembunuhan tiga orang Khalifah Abbasiyah: al-Musta'in (862–869 H), al-Mu'tazz (866–869 H), dan al-Muhtadi (869–870 H).

Memang mengherankan bahwa *Bustan* tidak memberi tempat untuk Turki Usmani; padahal ketika kitab ini ditulis pada awal abad ke-17 M dunia muslim tengah menyaksikan Turki Usmani sebagai pemegang kontrol politik secara dominan. Turki Usmani hanya disebut berkaitan dengan usaha Sultan Aceh Alauddin al-Kahar yang mengirm utusan ke Istanbul. *Bustan* justru memberi tempat pada kerajaan-kerajaan Islam di India dan Asia Selatan, yang secara umum dipimpin oleh orang-orang keturunan Turki, seperti Sultan Shihab al-Din Muhammad (1203–1206 H) hingga sultan Mughal

terbesar Aurangzeb (1658–1707 M), serta beberapa orang Turki yang menjadi perdana menteri, seperti orang yang bernama Ayyaz yang setia mengabdi untuk Sutan Mahmud (997–1030 M) dari Dinasti Ghaznawiyah.

6. Ulama di Kerajaan

Kehadiran Turki, baik dalam bentuk perseorangan—yakni orang-orang Turki yang datang ke Aceh—maupun cerita dan tema dalam sastra tradisional, merupakan bukti kuatnya arus Islam internasional dalam peradaban Melayu di Aceh. Turki memang bukan satu-satunya. Pusat kekuatan Islam lain, yakni Arab, Persia, dan India, juga mewarnai perkembangan Islam dan muslim di dunia Melayu. Banyak ulama tampil dalam peta kecendekiaan Islam Melayu setelah berkunjung ke negara-negara muslim yang secara tradisional dianggap sebagai pusat Islam, yakni Mekkah dan Madinah. Ibrahim al-Kurani (1614–1690 M), seorang ulama neo-Sufi terkemuka di Mekkah, merupakan salah satu contoh. Fathurahman (2015: 294–297) menyebutkan bahwa ia ulama asal Kurdi, Turki, yang menjadi guru ulama Nusantara. Karier kecendekiaannya berkembang setelah ia tinggal di Mekkah.

Kedudukan penting Turki tidak hanya terbatas pada kehadiran orang dan tema Turki dalam naskah tradisional, tetapi juga penguatan anggapan bahwa Aceh dan Melayu secara umum telah menjadi bagian dari dunia Islam. Hubungan dengan Turki harus dibaca dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari jaringan dunia Islam yang berpusat di Mekkah dan Madinah. Dua kota suci ini hadir dalam pikiran penduduk Nusantara sebelum mereka memeluk Islam sebagai dampak perdagangan internasional yang membawa Nusantara ke dalam kontak dengan Timur Tengah (Braddell, 1857: 237–77). Sumber-sumber Arab menyebutkan dua surat-menyurat antara raja kerajaan pra-Islam Śrîwijaya, Sri Indrawarman, dan Hhalifah Dinasti Umayyah, Umar bin Abd al-Aziz (717–720 H). Fatimi (1963: 121–140) menyebutkan bahwa dua surat tersebut memberi bukti kuat tentang kontak awal antara Nusantara dan Timur Tengah. Di dalam surat-surat itu Raja Śrîwijaya menyapa Abd al-Aziz sebagai "Raja Arab" seraya menyatakan dirinya sebagai "Raja Nusantara" (*the King of al-Hind*). Sapaan itu menunjukkan fakta bahwa Raja Śrîwijaya telah akrab dengan Arab.

Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam pada abad ke-13 M mengakibatkan hubungan dengan Timur Tengah menjadi semakin mapan. Kehadiran ulama dari Timur Tengah dan dunia Islam, khususnya Mekkah, merupakan peristiwa penting dalam memperkenalkan Islam ke Nusantara. Sumber-sumber lokal mengasalkan Islamisasi Nusantara pada datangnya ulama dari Mekkah. *Hikayat Raja-Raja Pasai*, sebagai contoh, menggambarkan kedatangan seorang ulama dari Mekkah, Syekh Ismail, ke Kerajaan Samudera Pasai untuk menyebarkan Islam

(Hill, 1960: 120). Dalam hal Malaka, Tome Pires melaporkan peran penting ulama (*mullah*) dari negeri-negeri Arab, Persia, dan Bengal, yang tidak hanya memperkenalkan Islam ke Samudera Pasai, tetapi juga pengilaman Raja Malaka Iskandar Shah (Pires, 1944: II, 241–2).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut tidaklah mengejutkan jika sejumlah penduduk Samudera Pasai pada abad ke-13 M mengaku mengenal Arab (Reid, 1993: 133). Mekkah memiliki kedudukan penting dalam cakrawala pemikiran mereka. Hubungan Mekkah-Nusantara berlangsung di dalam ranah kerajaan sehingga membangun watak Islam Nusantara berorientasi-raja. Sikap masyarakat tentang Mekkah dan dunia Islam pada umumnya dirumuskan dalam kerangka meningkatkan budaya politik yang berorientasi pada raja. Dua teks Melayu yang telah disebutkan sebelumnya, sebagai contoh, mengindikasikan gagasan Mekkah yang ada pada waktu itu. Islamisasi Nusantara dengan ulama Mekkah memiliki signifikansi politik: para raja yang masuk Islam memiliki legitimasi religius untuk mengatur penduduk yang baru memeluk Islam di kerajaan-kerajaan mereka.

Pada abad ke-17 M hubungan kerajaan Aceh dengan Timur Tengah menjadi lebih kuat. Hubungan itu dibuktikan dengan terbentuknya jaringan ulama, yang kemudian membuat Mekkah berperan penting dalam diskursus intelektual di Nusantara. Azra (1992 dan 2004) membuktikan bahwa Mekkah berperan penting di wilayah itu. Ulama-ulama terkenal pada periode tersebut, antara lain al-Raniri († 1608 M), Abdurrauf al-Sinkili (1615–1693 M), dan Yusuf al-Maqassari (1627–1699 M), belajar di Mekkah. Mereka membentuk "lingkaran komunitas Jawi" (*ashab al-jawiyyin*) dengan ulama Mekkah sebagai pengajar mereka dan kemudian bertanggung jawab dalam menyemaikan pemikiran neo-sufisme Islam yang berkembang di Mekkah masa itu ke Nusantara. Meskipun demikian ulama-ulama tersebut menjadikan kerajaan sebagai tempat untuk melancarkan misi pembaruan mereka. Al-Raniri dan al-Sinkili berkarier di kerajaan Aceh, sementara al-Maqassari, yang lahir di Sulawesi Selatan membangun kariernya di Kerajaan Banten, Jawa Barat.

Al-Raniri merupakan ulama pertama dalam jaringan Timur Tengah pada abad ke-17 M. Ia lahir di Ranir, sebuah kota pelabuhan tua di pantai Gujarat. Setelah memperoleh pendidikan di kota kelahirannya ia melanjutkan pendidikannya di Mekkah dan Hadramaut. Di sana ia bergabung dengan lingkaran komunitas Jawi, yang menumbuhkan kebanggaannya sebagai keturunan Melayu (ibu al-Raniri orang Melayu). Hubungan kemelayuan diperkuat oleh jaringan keluarga Hadraminya, lebih tepatnya Aidarusiyyah di Tarim, yang mendirikan tarekat sufi Aidarusiyyah di India. Salah satu gurunya yang terkenal, Abu Hafs Umar bin Abd Allah Ba Shaiban al-Tarimi al-Hadrami († 1656 M), mengarahkan al-Raniri berkecimpung di lingkungan

pergaulan sufisme dan memiliki hubungan dengan Nusantara. Ba Shaiban termasuk keluarga Aidarus dan salah seorang sarjana yang berperan penting dalam menyalurkan ide-ide keagamaan dari Timur Tengah ke Nusantara (Azra, 2004: 54–8).

Melalui hubungan intelektual dan keluarga, ditambah dengan pengalamannya dalam lingkaran komunitas Jawi di Mekkah, al-Raniri sudah dikenal di Aceh sebelum kedatangannya ke sana. Apa lagi ia memiliki hubungan dekat dengan bangsawan Aceh yang tengah berkuasa. Ia termasuk keluarga Aidarus, sarjana yang melakukan perjalanan untuk mengajar umat Islam di kerajaan tersebut.[1] Meskipun tahun kedatangannya tidak tercatat, ia datang ke Aceh untuk mengabdikan kecendekiaannya di kerajaan itu. Oleh karena itu setelah tinggal beberapa lama di Pahang, Semenanjung Melayu, al-Raniri ke Aceh dan memulai kehidupan baru sebagai seorang ulama. Sementara itu Kerajaan Aceh mendirikan *syaikhul Islam* sebagai kantor bagi ulama, selain *kadi*. Al-Raniri mengepalai *syaikhul Islam* sekitar tahun 1637 M di bawah pemerintahan Raja Iskandar Tsani (1637–41 M). Di kantor *syaikhul Islam* inilah awal kecendekiaan al-Raniri bermula. Dia menjalankan misinya memperbarui pemikiran sufi *wahdatul wujud* dan menggantinya dengan sufisme berorientasi-syariah, neo-sufisme. Al-Raniri menulis sebagian besar karya-karyanya ketika menjabat di *syaikhul Islam*, yang secara keseluruhan tidak kurang dari dua puluh sembilan karya (Voorhoeve, 1955: 152–61), yang membuatnya memperoleh kedudukan penting dalam sejarah intelektual Islam di Nusantara.

Karya-karya al-Raniri terutama memuat tema teologis dan sufisme. Hal ini tentu terkait dengan lingkungan intelektual Kerajaan Aceh sebelum ia menjadi *syaikhul Islam* ketika sufi *wujudiyah* berkuasa. Dalam konteks inilah al-Raniri terlibat dalam upaya meng-*counter* sufi *wujudiyah* serta menuduhnya sebagai tarekat yang mengusung politeisme dan bahkan bidah. Dengan dukungan Raja Aceh al-Raniri meminta para pengikut *wujudiyah* mengubah pikiran dan bertobat kepada Tuhan atas bid'ah dan keingkaran mereka. Kelompok tersebut menolak pesan al-Raniri, sehingga mereka dibunuh dan buku-buku mereka dibakar atas perintah raja (Azra, 2004: 63–64).[2]

Peristiwa dramatis itu menjadi penanda bagi pembaruan al-Raniri. Ia menjadi terkenal karena kritik kerasnya, selain sejumlah karya polemisnya, tentang sufi *wujudiyah*. al-Raniri kemudian harus berhadapan dengan seorang ulama Minangkabau Saiful Rijal, yang kembali ke Aceh dari pengasingannya setelah dituduh mengikuti sufisme *wujudiyah* yang bid'ah. Sebagaimana dikemukakan Ito (1978: 489–91), Saiful Rijal kembali ke Aceh dari Surat, India, melawan pembaruan neo-sufisme al-Raniri dalam suatu perdebatan tanpa akhir yang melibatkan penguasa Aceh. Raja Aceh yang baru naik, Tajul Alam Safiatuddin Shah (1641–1675 M), cenderung mendukung Saiful Rijal, yang merebut simpati orang Aceh karena kecerdasan dan kesalehannya. Saiful Rijal kemudian dipanggil ke istana, bergabung dengan lingkaran kerajaan yang berkuasa,

sementara al-Raniri dipaksa meninggalkan Aceh menuju tanah kelahirannya, Ranir.

Meski hidup di pengasingan al-Raniri terus menulis untuk para pembaca dan teman Melayu-nya. Pesan keagamaannya berkembang di tangan seorang ulama Melayu berikutnya, Abdurrauf al-Sinkili (1615–1693 M). Belajar dari pengalaman al-Raniri, al-Sinkili berpendirian kompromis dengan sufi *wujudiyah*. Ia menerima beberapa gagasan dasar *wujudiyah*, tetapi dalam rumusan baru di bawah napas neo-sufisme. Al-Sinkili meminta fatwa gurunya di Hijaz, ulama neo-sufi terkemuka Ibrahim al-Kurani (1614–1690 M).[3] Tampaknya al-Kurani tidak setuju cara al-Raniri melancarkan pembaruan dan mendukung sikap al-Sinkili yang toleran. Karena sikapnya yang kompromis al-Sinkili diundang Tajul Alam Safiatuddin ke kerajaan sekembalinya dari Hijaz sekitar tahun 1661 M. Ia diangkat sebagai hakim agung kerajaan, *Kadi Malikul Adil*. Kedudukan ini membuat al-Sinkili masuk ke jantung kehidupan kecendekiaan Nusantara.

Al-Sinkili lahir dan memperoleh pendidikan pertama di Sinkel, sebuah daerah di wilyah pesisir Aceh yang dikenal sebagai pusat pembelajaran Islam (Drakard, 1989: 54–5). Ia kemudian ke Timur Tengah pada tahun 1642 M untuk belajar Islam. Setelah belajar di beberapa negeri Islam di sepanjang jalur haji, al-Sinkili akhirnya tinggal dengan ulama Hijaz (Azra, 2004: 72–77) dan berkerkenalan dengan *ashab al-jawiyyin*. Hal inilah yang membuatnya dapat membangun jaringan langsung dengan ulama terkemuka pada abad ke-17 M, khususnya al-Kurani dan Ahmad al-Qushashi (1538–1661 M), yang memiliki pengaruh kuat dalam membangun pengetahuannya.

Bertolak di lembaga *Kadi Malikul Adil*, al-Sinkili mulai tampil di pentas intelektual Nusantara. Ia menulis sekitar dua puluh dua karya (kitab) yang membahas berbagai bidang ilmu pengetahuan Islam[4] dan dengan caranya sendiri menyuarakan pembaruan neo-sufisme yang dasarnya telah diletakkan oleh al-Raniri. Fathurohman (1999: 76–83) menyebutkan bahwa ajaran-ajaran mistik al-Sinkili secara kuat menekankan penerapan syariah untuk mencapai mistik dalam realitas (*haqiqa* dan *ma'rifa*). Seperti al-Kurani ia menganjurkan praktik-praktik ritual Islam (ibadah), khususnya zikir (mengingat Tuhan), menjadi fondasi untuk mencapai kesatuan spiritual dengan Tuhan. Dengan garis pemikiran mistik tersebut al-Sinkili menegaskan bahwa "intuisi mistik dan kebenaran ortodoksi" pada waktu yang bersamaan membangun titik perbedaan dengan garis pemikiran al-Raniri (Johns, 1955: 56). Ia menyampaikan pesan neo-sufinya dengan cara yang hampir sama dengan sufi *wujudiyah*.

Selain dikenal melalui karya-karyanya al-Sinkili juga dikenal luas sebagai pemimpin tarekat sufi Syattariyah di Nusantara. Al-

Qushashi, gurunya, mengangkat al-Sinkili sebagai khalifah tarekat ini ketika ia telah selesai belajar apa yang disebut ilmu kebatinan (*'ilm al-batin*), yang memberinya *ijaza* untuk menyebarkan tarekat ini ke "negeri di bawah angin". Lewat tarekat ini al-Sinkili memiliki kesempatan membangun jaringan di Nusantara. Burhanudin dari Ulakan di Sumatera Barat merupakan salah seorang muridnya yang terkenal.[5] Setelah belajar pada al-Sinkili selama beberapa tahun Burhanudin mendirikan *surau*, sebuah lembaga pendidikan sufi di Ulakan, yang menjadi pusat pengislaman di Minangkabau, Sumatera Barat (Azra, 1990: 64–85; Fathurohman, 2003). Dari *surau* Ulakan pula Islam yang berorientasi syariah tumbuh dan semakin luas di wilayah tersebut serta memberi pijakan bagi ulama Padri untuk melancarkan gerakan pembaruan pada abad ke-19 M (Dobbin, 1983). Murid terkenal al-Sinkili yang lain adalah Abdul Muhyi dari Pamijahan, Jawa Barat. Ia belajar pada al-Sinkili di Aceh sebelum berangkat ke Mekkah untuk berhaji. Seperti Burhanudin Abdul Muhyi juga terlibat dalam penyebaran tarekat Syattariyah di Pamijahan, tempat ia menjadi ulama sufi terkemuka dan dihormati sebagai orang suci sampai hari ini (Christomy, 2001: 55–82; Rinkes, 1996: 1–14).

Atas kegiatan al-Raniri dan al-Sinkili jaringan ulama Timur Tengah berperan membuat Islam di "negeri bawah angin" makin berpadu dengan pusat Islam. Pembaruan neo-sufisme yang berpusat Mekkah muncul sebagai diskursus intelektual Islam penting di Nusantara pada abad ke-17 M. Misi pembaruan mereka berkembang di bawah ulama lainnya, yakni Yusuf al-Maqassari. Al-Maqassari lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, dan memperoleh pendidikan awal di Makassar. Ia berangkat ke Aceh dan kemudian ke Ranir untuk belajar pada al-Raniri yang pada waktu itu telah diasingkan. Dari Ranir al-Maqassari melanjutkan pelajaran ke sejumlah ulama di negeri-negeri Timur Tengah, temasuk al-Kurani di Madinah. Dalam kaitan inilah al-Maqassari, seperti al-Sinkili, membangun jaringan luas di Timur Tengah (Azra, 2004: 87–94). Ia menangkap kecenderungan pemikiran Islam neo-sufisme. Ia membincangkan ilmu yang dikemukakan baik oleh al-Raniri maupun al-Sinkili, yakni rekonsiliasi sufisme dan syariah, melalui karya-karyanya.[6]

Seperti halnya al-Raniri dan al-Sinkili di Aceh al-Maqassari juga memiliki karier kecendekiaan di Kerajaan Banten, Jawa Barat. Dapat dipastikan ia datang ke Banten dalam perjalanan pulang ke Makassar dari Arab. Hubungan dekatnya dengan Raja Banten Sultan Ageng Tirtayasa (1651–1683 M), bahkan sebelum berangkat belajar ke Arab, menjadi alasan kuat bagi al-Maqassari di balik keputusannya menetap di Banten. Pernikahannya dengan anak perempuan sultan memperkuat ikatan tersebut. Ia kemudian menjadi anggota utama "dewan penasihat" Sultan, yang memungkinkannya terlibat dalam persoalan-persoalan agama dan politik kerajaan. Al-Maqassari harus menghadapi situasi politik Nusantara yang berubah. VOC Belanda mulai mencengkeram

kerajaan-kerajaan Nusantara, termasuk Banten. Akibatnya, keterlibatan politik al-Maqassari lebih jauh dibanding al-Raniri dan al-Sinkili dan membawa Banten ke dalam perang melawan Belanda.

Hal penting yang dicatat adalah pengalaman para ulama di atas membuktikan hubungan kuat yang terbangun antara ulama dan raja-raja di Nusantara sebelum masa penjajahan. Kerajaan menjadi pusat ulama membangun karier dalam bidang sosio-religius dan politik. Sementara itu para raja mengangkat ulama sebagai pejabat di lembaga agama kerajaan, sebagai penasihat dan hakim, yang berperan dalam memperkuat unsur Islam kerajaan. Oleh karena itu politik kerajaan semakin dipengaruhi Islam sejalan dengan makin meningkatnya jaringan dengan Timur Tengah. Pengaruh Islam yang paling besar dalam politik kerajaan dapat dilihat melalui gagasan-gagasan politik.

7. Bahasa Melayu dan Tulisan Jawi

Kerajaan Aceh juga berperan penting dalam pengembangan bahasa Melayu dan aksara Jawi. Aceh menyaksikan perkembangan yang disebut "pemapanan bahasa Melayu" sebagai bahasa yang umum digunakan secara luas di Nusantara (*lingua franca*) dan penggunaan aksara Jawi. Perkembangan tersebut meliputi masalah kebahasaan dan penulisan naskah, yang memberi bukti bahwa Aceh dengan kondisi politik stabil dan perdagangan maju memberi sumbangan bagi perkembangan bahasa dan kebudayaan Melayu. Perkembangan dan pemapanan bahasa Melayu tersebut menjadi kesatuan dengan perkembangan Islam. Sejalan dengan kedudukan Aceh pada abad ke-16 dan 17 M sebagai pusat Islam terkemuka di Nusantara, kegiatan kecendekiaan menyangkut bahasa dan naskah terkait erat dengan kontekstualiasi dan diseminasi Islam di kerajaan Aceh dan Melayu-Indonesia secara umum.

> Kalakian maka pada Hijrah sembilan ratus sembilan puluh tahun datang dua orang pendeta dari Mekah, seorang bernama Syaikh Abul-Khair bin Syaikh Ibnu Hajar. Ialah yang mengarang kitab yang bernama Saif al-Qati' pada perkataan a'yan thabitah dan mengajarkan ilmu fiqih dalam negeri Aceh Darussalam. Kedua Syaikh Muhammad Yamani, ialah yang sangat tahu pada ilmu usul. Maka kedua syaikh itupun berbahas akan masa'ilah a'yan thabitah. Maka terhentilah bahas itu, seorang pun tiada dapat memutuskan dia. Hatta maka kedua syaikh itupun berlayarlah.
>
> Kemudian dari itu maka datang pula seorang pendeta dari benua Gujarat, bernama Syaikh Muhammad Jilani ibn Hassan ibn Muhammad, Hamid nama kaumnya, Quraisy bangsanya, Ranir nama negerinya, Syafi'i

> madzhabnya. Syaikh itulah yang mengajarkan ilmu mantiq ma'ani dan ilmu bayan badi', dan ilmu usul, dan ilmu fiqah dalam negeri Aceh Darusaalam. Maka segala talibul-ilmipun hendak belajar ilmu tasawuf. Maka syaikh itupun bertangguh hingga sekali lagi ia datang. Hatta maka syaikh itupun berlayar ke Mekah.

Kutipan di atas, yang diambil dari *Bustan as-Salatin* karangan Nuruddin al-Raniri (Iskandar, 1966: 33–4), menghadirkan suasana kerajaan Aceh yang kosmopolit—khususnya dari sisi keagamaan—sekaligus penggunaan bahasa Melayu yang semakin mapan sebagai sarana ekspresi intelektual keagamaan serta di bidang sosial dan diplomasi-politik. Kutipan di atas menunjukkan pengunaan bahasa Melayu yang semakin "asli Melayu"—dengan unsur-unsur arkhais pra-klasik semakin berkurang—dan tampilnya *genre* baru dalam tradisi penulisan naskah di dunia Melayu yang disebut "sastra kitab". Kitab *Bustan as-Salatin* menjadi salah satu di antara sastra kitab tersebut.

Istilah "sastra kitab"—pertama kali digunakan oleh Hooykaas (1951: 144) dan kemudian Brakel (1979: 6)—mengacu pada hikayat yang bercorak keislaman atau hasil saduran Arab/Parsi, yang berbeda dengan sastra rekaan (fiksi) dan sastra sejarah yang berkembang di dunia Melayu. Secara lebih khusus "sastra kitab" merujuk pada karya yang berisi ajaran agama Islam, mulai dari tasawuf, fiqih, teologi, hingga sejarah Islam, yang ditulis ulama Aceh terkemuka pada abad ke-16 dan 17 M, yakni Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri, dan Abdul Ra'uf as-Sinkili. Karya-karya ini di Aceh biasa disebut dengan "kitab Jawoe" (kitab yang ditulis dalam aksara Jawi berbahasa Melayu) atau "kitab Jawi". Sastra kitab membawa corak kebahasaan khusus dan mewujud diri menjadi *lingua franca* Islam di kepulauan Nusantara (Abdullah, 2012 [III]: 244).

Dilihat dari segi bahasa sastra kitab tampak luas dan memiliki kadar intelektual tinggi. Upaya untuk tidak menggunakan kosakata Arab tampak kuat, meski masih terdapat unsur Arabisme pada kalimat, seperti penggunaan "adalah", "yakni", "dan" sebagai pendukung kata atau frasa. Hamzah Fansuri sangat menekankan aspek ini. Terkait kedudukannya sebagai guru tarekat ia menghendaki tulisannya dipahami murid-muridnya secara tepat. Oleh karena itu ia sengaja menulis dalam bahasa Melayu (bahasa Jawi) dan tidak dalam bahasa Arab atau Persia. "Supaya segala hamba Allah yang tiada tahu akan bahasa Arab dan bahasa Farisi supaya dapat memicarakan dia", demikian tulisnya pada pembukaan salah satu karyanya, *Syarabu l-'Asyiqin* (*Minuman Segala Orang yang Berahi*) (Abdullah, 2012 [III]: 244; Al-Attas, 1970: 297).

Pernyataan yang sama juga terdapat dalam karya Syamsuddin as-Sumatrani, *Mir'at al-Mukmin* (1601 M), "... karena tiada mereka

itu tahu akan bahasa Arab dan Parsi, tetapi tiada diketahui mereka itu melainkan bahasa Pasai juga...". Begitu juga alasan yang dikemukakannya dalam bahasa Melayu Pasai karena banyak orang tidak tahu bahasa Arab dan Parsi (Abdullah, 2012 [III]: 244). Dengan demikian, seperti halnya Hamzah Fansuri, ada usaha untuk menulis kitab dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh khalayak pembacanya di Aceh dan Nusantara pada umumnya yang menggunakan bahasa Melayu.

Bahasa Melayu yang digunakan Hamzah Fanzuri dinilai lebih murni, paling tidak jauh dari penggunaan bahasa Arab yang berlebihan. Bahasa Arab hanya digunakan lebih pada istilah-istilah keagamaan yang memang sulit dicari padanannya dalam bahasa Melayu. Di samping itu aspek lain kontribusi Hamzah Fansuri adalah kepeloporannya dalam sastra sufi Melayu. Banyak pengamat mengakui ia menggunakan bahasa yang sangat kreatif dalam puisinya. Penggunaan kata-kata Arab memang menonjol, tetapi terintegrasi dengan baik ke dalam struktur puisinya. Istilah tasawuf dan istilah keagamaan berperan untuk kepentingan persajakan dan irama serta menjadikan puisinya padat, sehingga untuk dapat memahaminya dengan baik dibutuhkan pengetahuan tasawuf (Abdullah, 2012 [III]: 245).

Sementara untuk karya-karya ar-Raniri, sejauh menyangkut aspek kebahasaan, pada dasarnya tidak berbeda dengan karya Hamzah Fansuri. Ar-Raniri memiliki kemampuan setara dengan Hamzah Fansuri dalam hal penggunaan bahasa Melayu. Kutipan *Bustan as-Salatin* di atas membuktikan hal itu. Bahasa Melayu ar-Raniri menampakkan kapasitas pengetahuannya yang sangat tinggi menyangkut doktrin dan sejarah Islam. Pilihan katanya murni Melayu, meski tetap menggunakan berapa kata Arab.

Hal penting lain yang berkait karya ar-Raniri adalah pengunaan terjemahan untuk setiap kalimat yang ditulis dalam bahasa Arab. Karyanya yang berisi penolakan terhadap tarekat wujudiyah Hamzah Fansuri, *Hujjatu s-Siddiq li daf'i l-Zindiq*, hampir merupakan terjemahan Arab–Melayu dari paragraf ke paragraf.

> *Fa 'allaftu wa tarjamtu hadzihi l-risalata bi l-jawiyyati min kutubi l-shufiyyati wa ghayrihim.* Maka kuta'lifkan dan kujawikan risalah ini daripada segala kitab ahlu l-shufi dan lain daripada mereka itu.
>
> *Wa sammaytuha hujjata l-shiddiqi li daf'i l-zindiqi.* Maka kunamai akan risalah ini: *Hujjatu l-Shiddiqi li daf'i l-Zindiqi,* artinya : dalil segala 'arif pada menolakkan i'tiqad segala zindiq. Maka kusebutkan dalam risalah ini i'tiqad dan mazhab empat ta'ifah, yaitu: Mutakallimin dan Ahlu l-Shufi dan Hukama' Falasifah dan Wujudiyyah yang mulhid pada menyatakan wujud Allah dengan 'alam itu berlainankah atau bersuatu

> seperti yang akan tersebut kenyataannya (Al-Attas, 1966: 81–2; Abdullah, 2012 [III]: 248).

Memang banyak sastra kitab dengan pola terjemahan demikian, di samping terjemahan antarbaris, yakni terjemahan bahasa Melayu ditulis di bawah kata-kata Arab. Model ini membentuk ciri khas sistem narasi (cara penguraian) dalam sastra kitab. Karya awal Syamsuddin as-Sumatrani, yang dikenal sangat produktif menulis—meski hanya sedikit yang sampai kepada kita—juga menggunakan pola terjemahan antarbaris. Ia menggunakan bahasa Melayu Pasai seperti yang digunakan Nuruddin ar-Raniri. Pola terjemahan tersebut dapat dilihat antara lain dalam *Mir'atu l-Muhaqqiqin*. Ia menurunkan kalimat dari bahasa aslinya, bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu secara antarbaris. Untuk istilah tasawuf yang dianggap baku tetap menggunkan bahasa Arab dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu (Abdullah, 2012 [III]: 249).

Hal serupa juga terlihat pada karya Abdul Ra'uf Singkel, yang bernama lengkap Abdul-Ra'uf bin 'Ali al-Jawi al-Fansuri as-Singkili. Tokoh moderat ini mengerjakan tafsir Quran dalam bahasa Melayu dengan sistem terjemahan antarbaris dan menulis sebuah risalah berjudul *Mir'at at-Tullab fi Tashi l-Ma'rifat Ahkam asy-Syar'iyyah li l-Malik al-Wahhab* (*Cermin bagi Mereka yang Menuntut Ilmu Fikih pada Memudahkan Mengenal Segala Hukum Syara' Allah*). Risalah tersebut ditulis atas permintaan Sultanah Tajul 'Alam Shafiyatuddin Syah. Dengan bantuan saudaranya Abdul Ra'uf Singkel menulis risalah tersebut dalam bahasa Melayu Pasai karena ia tidak begitu fasih berbahasa Melayu setelah lama tinggal di Arab (Abdullah, 2012 [III]: 249).

Karya-karya intelektual para ulama menunjukkan bahwa pada abad ke-16 dan 17 M bahasa Melayu telah berkembang sedemikian rupa sebagai bahasa yang mapan pada ranah sosial, diplomasi-politik, perdagangan, dan intelektual-keagamaan. Sastra kitab merupakan bukti penggunaan bahasa Melayu di bidang yang disebut terakhir. Para ulama di atas merasa perlu menerjemahkan karya-karya mereka ke dalam bahasa Melayu, sehingga bisa dibaca lebih luas oleh kaum muslim di Aceh dan di Nusantara pada umumnya. Hal ini menegaskan bahasa Melayu sedemikian mapan sebagai *lingua franca* di Nusantara.

Tentu saja sejumlah sejumlah kosa kata Arab tetap digunakan dalam sastra kitab. Hal tersebut tidak mengagetkan untuk konteks sosial-politik saat itu. Menyusun kalimat yang kearab-araban dan memasukkan kata-kata pinjaman bahasa Arab ke dalam kalimat bahasa Melayu menunjukkan tingkat kecendekiaan penulis, bahwa mereka ulama yang memiliki kualifikasi memadai di bidang keagamaan. Pola inilah yang disebut Van Ronkel (1977: 11–13; Abdullah, 2012 [III]: 250) sebagai "Arabisme", seperti halnya penggunaan kosa kata bahasa Inggris dewasa ini. Arabisme tampak, misalnya, pada judul sastra kitab yang selalu menggunakan bahasa

Arab, meski ada terjemahannya dalam bahasa Melayu. Begitu juga sejumlah kata yang sudah baku dalam bahasa Arab—seperti *ahlu l-shufi, mutakallimin, hukama', falasifah, wujudiyyah,* dan *mulhid*—masih muncul di sana-sini dan dibiarkan tanpa terjemahan dalam bahasa Melayu.

Meski demikian kosa kata Arab yang diserap diarahkan untuk mendukung tingkat keilmuan tertentu. Kosakata tersebut diintegrasikan ke dalam bahasa Melayu sehingga pada gilirannya berkembang menjadi kosakata Melayu. Arabisme dalam konteks ini merupakan ekspresi selera umum yang berkembang dan diorientasikan untuk memperkaya bahasa Melayu dengan istilah-istilah baru untuk penyebaran ilmu-ilmu Islam di Nusantara.

Sejalan dengan proses memperkokoh dan mempertegas bahasa Melayu sebagai *lingua franca* di Nusantara aksara Jawi juga mengalami perkembangan penting. Aksara Jawi disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Melayu baik dari segi fonem, ejaan, penggantian tanda baca, maupun penciptaan huruf saksi yang diterapkan pada suku pertama dan suku kedua (Tjandrasasmita, 2009: 292). Proses inilah yang disebut penyisteman ejaan Jawi, yang semakin tegas dan mapan sebagai huruf dan ejaan bahasa Melayu. Pada abad ke-16 dan 17 M penyisteman ejaan bisa dijelaskan melalui fakta bawa aksara Jawi pada karya sastra dari periode tersebut memperlihatkan kombinasi sistem tulisan Arab dengan pemvokalan secara abjad (*alif, wau*, dan *ya*), berbeda dengan sistem sebelumnya yang menerapkan pemvokalan secara baris (Musa, 1999: 36).

Di samping sastra kitab dan terjemahan, yang sebagian besar mengacu pada perkembangan di Kerajaan Aceh, sangat menarik untuk melihat apa yang terjadi di Nusantara bagian timur di Kerajaan Ternate. Blagden (1930: 87–100) menemukan dua surat yang dibuat oleh penguasa Kerajaan Ternate untuk Raja Portugal. Keduanya tersimpan di Arsip Lisbon, Spanyol, masing-masing bertahun 1521 dan 1522 M dan dibuat atas nama Sultan Abu Hayat, penguasa Kerajaan Ternate saat itu. Surat tersebut merupakan naskah beraksara Jawi paling tua yang bisa ditemukan sejauh ini.

Musa (1999: 41–42) menyebutkan bahwa surat raja Ternate itu memperlihatkan perbedaan dan bahkan pekembangan lebih lanjut penggunaan corak bahasa Melayu berikut aksara Jawi dari segi ejaan dan sistem pemvokalan jika dibanding dengan corak bahasa dan tulisan sebelumnya, khususnya seperti terdapat dalam prasasti Trengganu. Dalam surat Raja Ternate itu tampak bahwa sistem pemvokalan ejaan Jawi meletakkan abjad vokal pada suku kata awal dan tengah yang terbuka dan jarang menzahirkan abjad vokal pada suku kata akhir terbuka. Di samping itu surat tersebut mebuktikkan sebaran bahasa Melayu berikut aksara Jawi ke berbagai wilayah Nusantara di luar Sumatera. Berikut kutipan salah satu surat Raja Ternate sebagaimana dikutip Musa (1999: 47).

Alhamdulil-Lahi Rabbil-'alamin

Ya Aziz Ya Ghaffar

Ini surat kasih Sultan Abu Hayat, surat datang kepada ayahanda Sultan Pertukal [Portugal] (di) dunia alam ialah yang besar. Keri (peri?) mengatakan hal negeri sangkalah (Jawa = sangkala =keceakaan?) sanakdah (seanak-anda?), Sultan Bayan Sirullah meninggalkan negeri Ternate. Sekalianlah ha negeri Ternate sekarang. Raja Castile datang dua buah kapal mengantarkan senjatanya dan hartanya dan memelihara akan bandar Raja Tidore (iaitu) bandar raja Castile sebenarnyalah. Sultan Pertukal memelihara akan Sultan Ternate dari kerana bandar Sultan Ternate (ialah) bandar Sultan Pertukal. Sekarang ini raj Castile memberi raja Tidore bedil empat puluh buah, gandi (=arquebuses=crossbow?) tujuh puluh gandi. Janji tuan ini akan datang ke Tidore sebuah kapal berlayar bulan Muharram sebuah kapak tinggal, nantikan kapal dua puluh buah, tahun lagikan datang. Adapun anakanda Sultan Abu Hayat tiada harap lain harap inilah Sultan Pertukal. Sebenarnyalah Sultan Pertukal memelihara anakanda pi(h)atu lagi kanak-kanak, sebenarnyalah memelihara negeri Ternate. Cenderamata anakanda tiada sepertinya. Wassalam bil-khair.

Musa (1999: 50) membuat perbadingan dengan naskah terjemahan, *Aqa'id*, karya al-Nafasi. Surat Raja Ternate ditulis tujuhpuluh tahun sebelum *Aqa'id* (1590). Dari sudut geografis surat Raja Ternate dibuat di timur bagian Nusantara, jauh dari pusat Kerajaan Aceh yang berada di ujung barat pulau Sumatera. Namun demikian, dari sudut pandang bahasa, keduanya memperlihatkan persamaan. Dua naskah tersebut sama-sama menggunakan sistem pemvokalan secara abjad pada suku kata terbuka pertama dan tengah serta penggunaan sistem vokal secara baris tanpa abjad vokal dalam suku kata terbuka pada akhir kata dan dalam suku kata tertutup.

Kedua naskah tersebut menunjukkan bukti hubungan dan jaringan kuat antarmasyarakat muslim di berbagai wilayah Nusantara. Selain faktor agama mereka terhubungkan melalui bahasa Melayu dan aksara Jawi berikut aspek-aspek budaya yang berkembang di Nusantara sejalan dengan proses pengslaman. Dalam hal aksara ditemukan fakta bahwa aksara bercorak Jawi juga berkembang di wilayah-wilayah lain di Nusantara. Di Jawa, termasuk Jawa Barat yang berbahasa Sunda, aksara Arab juga digunakan untuk ekspresi dan sistem ejaan bahasa Jawa dan Sunda, yang disebut aksara *pegon*. Banyak karya berbahasa Jawa dan Sunda ditulis dengan aksara Arab (*pegon*) sebagaimana dapat ditelusuri dalam berbagai katalog naskah (Tjandrasasmita, 2009: 293; Behren, 1999; Ekajati, 1990).

8. Iskandar Tsani dan Awal Kemunduran

Meski diketahui memiliki seorang anak laki-laki, bernama Sultan Muda, Iskandar Muda tidak mengikuti tradisi kerajaan pada umumnya yang menjadikan garis keturunan sebagai dasar pilihan pengganti. Bisa jadi karena alasan etika dan moralitas—ia dituduh terlibat dalam suatu komplotan, yang sayang tidak diketahui secara rinci (Lombard, 1986: 236)—Iskandar Muda lebih memilih menantunya, Iskandar Tsani, sebagai pengganti.

Raja Bungsu (sebutan utuk Iskandar Tsani muda) lahir sebagai putra Raja Pahang, dibawa ke Aceh saat masih anak-anak sekitar 7 tahun menyusul penaklukan Pahang oleh Iskandar Muda pada 1618 M. Ia kemudian tumbuh di lingkungan istana Kerajaan Aceh. *Bustan as-Salatin* (Iskandar, [ed.] 1966: 38) menuturkan ia tidak hanya sangat disenangi sang raja, tetapi juga diarahkan untuk kelak menjadi penggantinya. Pada saat memasuki usia remaja ia dinikahkan dengan putri raja, Putri Sri Alam Permaisuri, dan diberi gelar Sultan Husain. Hal itu berarti Iskandar Muda telah memilih Sultan Husain sebagai penerusnya. Saat mendekati ajal—menurut sumber Belanda empat belas hari sebelum meninggal (DasGupta, 1962: 179)—Iskandar Muda memanggil semua pemuka kerajaan dan menyatakan secara resmi bahwa menantunya akan meneruskan kepemimpinan Kerajaan Aceh. Sejak saat itu, akhir Desember 1636 M, Aceh berada di bawah kepemimpinan seorang raja berusia sekitar 25 atau 26 tahun dengan gelar Sultan Iskandar Tsani.

Jika dibandingkan dengan Iskandar Muda raja baru dikenal dengan sikap dan kebijakan yang lebih longgar. Sikap itu terutama berlaku untuk para pedagang Eropa, tepatnya para pedagang Inggris yang kembali berkunjung ke Aceh sekitar tiga bulan setelah Iskandar Tsani berkuasa (April 1647). "Courteen's Association" tidak mewakili lembaga dagang resmi kerajaan, EIC (English East India Company), bahkan pesaingnnya, tetapi raja menyambutnya dengan baik. Iskandar Tsani juga membebaskan mereka dari kewajiban membayar pajak, yang sebelumnya diberlakukan secara keras oleh Iskandar Muda, berikut fasilitas lain yang mendukung usaha mereka mencari lada untuk dijual ke Cina (DasGupta, 1962: 180–181).

Sikap demikian kemudian membuat gaya kepemimpinan Iskandar Tsani tidak sesuai untuk konteks politik kawasan di belahan barat Nusantara yang tengah berubah. Sejak tahun 1630-an M peta politik dan ekonomi wilayah yang berada di bawah pengawasan Aceh muncul kekukatan baru, yakni Dutch Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), yang sangat menentukan jaringan perniagaan dan pada akhirnya juga hubungan politik antarkerajaan. Setelah membangun markas di Batavia pada tahun 1619 M VOC menjelma menjadi kekuatan raksasa yang mempengaruhi kehidupan ekonomi di Asia Tenggara, yang berhasil "mengacaukan organisasi sistem

perdagangan Asia". VOC mencapai keberhasilan melampaui Portugis berkat dukungan teknologi militer maju, dukungan keuangan kuat, dan organisasi yang rapi (Ricklefs, 2001: 27).

VOC tidak hanya menghendaki Inggris keluar dari Aceh, tetapi juga berusaha mencari mitra untuk mengusir Portugis di Malaka. VOC lahir di tengah kuatnya sentimen anti-Spanyol dan Portugis di Belanda. Oleh karena itu VOC mendapat misi tambahan. Di samping monopoli perdagangan rempah-rempah, VOC juga diharapkan dapat menghancurkan orang Portugis di Asia (Leirissa, 2012 [4]: 32). Mengetahui keadaan itu Iskandar Tsani meminta bantuan Gubernur VOC di Batavia, Van Diemen, yang segera menanggapi dengan mengirim Jochum Reolofsen van Deutecom sebagai utusan khusus untuk Aceh (DasGupta, 1962: 185–184).

Namun demikian hubungan dengan VOC justru menjadi ujian berat bagi Iskandar Tsani. VOC melakukan tekanan terhadap kebijakan perniagaan Aceh. Di samping itu VOC memaksa Iskandar Tsani membebaskan bea pajak, baik impor maupun ekspor, kapal dagang maskapai Belanda dan menghapus sejumlah keistiewaan perdagangan lada di pantai Barat Sumatera yang berada di bawah kekuasaan Aceh sejak Iskandar Muda (DasGupta, 1962: 184; Kathirithamby-Wells, 1969: 458–459). Iskandar Tsani pun harus membebaskan kapal Belanda berlayar di wilayah perdagangan Aceh, termasuk membawa hasil lada dari bagian barat Sumatera ke Aceh. Tekanan-tekanan itu menyebabkan kerugian besar di pihak Aceh (DasGupta, 1962: 184).

Sementara itu sikap lemah dan kaku Iskandar Tsani di bidang politik membuat Aceh semakin terisolasi dari arus kekuasan yang terpusat pada VOC. Raja menolak membantu VOC mengusir Portugis di Malaka, kecuali maskapai dagang Belanda itu memutus hubungan dengan Johor, musuh utama yang saat itu sudah menguasai Pahang, tanah leluhurnya. Sebaliknya VOC justru menggandeng Johor sebagai sekutu dalam menyerang Portugis di Malaka. Johor sudah terbukti menjadi sekutu baik VOC, antara lain membantu menyerang kapal Portugis pada tahun 1639 M. Pada tanggal 14 Januari 1641 dengan bantuan Johor VOC berhasil mengusir Portugis di Malaka (Andaya, 1975: 26). Satu bulan kemudian, pada bulan Februari 1641, Iskandar Tsani meninggal dunia. Aceh telah membuka kesempatan kepada VOC untuk memperluas kekuasaan ekonomi mereka di bagian barat Nusantara. Sementara sekutunya, Kerajaan Johor, mulai memasuki masa kemakmuran, yang kemudian berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi dan politik strategis dalam jaringan dagang internasional (Andaya, 1975: 55–78).

Penting dicatat bahwa istilah "awal kemunduran" pada masa kekuasaan Iskandar Tsani lebih tepat untuk menggambarkan dinamika ekonomi dan politik. Di bidang intelektual keagamaan,

masa Iskandar Tsani justru menyaksikan munculnya lapisan baru pemikiran Islam, disebut neo-Sufisme, di atas pemikiran lama yang dikenal sebagai sufisme heterodoks sebagaimana muncul dalam konsep sufi wahadtul wujud. Nuruddin al-Raniri, ulama Nusantara abad ke-17 M, hidup pada masa Iskandar Tsani. Di bawah naungan sultan ini al-Raniri menduduki jabatan sebagai Syaikhul Islam, di samping menulis berbagai karya keagamaan. Hal yang sama juga terjadi pada penguasa Aceh berikutnya, istri Iskandar Tsani yang juga putri Iskandar Muda, gelar Sultan Tajul Alam Syafiyatuddin (1641–1675 M). Di tengah persoalan ekonomi-politik Kerajaan Aceh memiliki seorang ulama dengan jarinan keilmuan sangat kuat di Nusantara, Abdurrauf Singkel. Dengan demikian, meski sulit dipahami, istilah kemunduran lebih banyak mengacu pada aspek ekonomi dan politik, yang kemudian berpengaruh pada dinamika keagamaan.

Sejak masa Iskandar Tsani pantai barat Sumatera secara perlahan dikuasai VOC Belanda. Proses ini semakin kuat ketika Kerajaan Aceh berada di bawah kepemimpinan Ratu Syafiyatuddin. VOC sangat berkepentingan menguasai wilayah tersebut sebagai bagian misi utama untuk mencari keuntungan ekonomi di wilayah penghasil komoditi yang sangat laku di pasar internasional. Dengan menguasai Malaka, VOC memiliki pijakan kokoh untuk melakukan perluasan kekuasaan atas wilayah-wilayah strategis di bagian barat Nusantara, yang salah satu di antaranya pantai barat Sumatera. Itulah sebabnya VOC mencampuri perdagangan di wilayah tersebut (Kathirithamby-Wells, 1969: 473).

Langkah VOC menjadi semakin kuat karena Ratu Syafiyatuddin tidak sekuat para pendahulunya dalam menangani masalah. Hal ini terjadi akibat kehadiran kembali *orang kaya* yang pernah disingkirkan oleh Iskandar Muda. Mereka muncul kembali dan memiliki kedudukan kuat dalam peta politik Aceh. Pada pemerintahan Safiyyatuddin dilaporkan bahwa *orang kaya* membentuk organisasi kuat yang menentukan keputusan-keputusan politik kerajaan (Reid, 1988: 639–641; Burhanudin, 2017: 234). Mereka mengubah konstitusi menjadi aristokrasi atau oligarki, dengan urusan negara dikontrol oleh segelintir *orang kaya* (Marsden, 2013 [1811]: 543). Selain itu terdapat perdebatan keagamaan terkait naiknya perempuan sebagai pemimpin Kerajaan Aceh. Meski berhasil diatasi dengan melibatkan ulama Aceh saat itu (Hadi, 2004: 83), perdebaan tersebut sedikit banyak membuat kewenangan politik sang ratu tidak sepenuhnya diterima elit politik Aceh, terutama *orang kaya*. Mereka menjadi satu kekuatan sosial-politik yang kerapkali membuat ratu tidak dapat menjalankan kekuasaannya secara penuh.

Dinamika internal Kerajaan Aceh untuk daerah pantai barat Sumatera membuat sang ratu harus bersikap kompromi terhadap taktik agresif Belanda. Sejumlah kebijakan dan perundingan dengan VOC, termasuk dengan kantor pusatnya di Batavia, ditempuh

untuk mempertahankan kekuasan Aceh di daerah penghasil lada dan emas tersebut, rermasuk pembicaraan perdagangan timah di Perak, Semenanjung Malaka. Setelah melalui proses panjang dan rumit Aceh akhirnya harus melepaskan kekuasaannya di pantai Barat Sumatera. Penguasa setempat, terutama Pariaman, Tiku, Salida, dan Painan, menunjukkan perlawanan terhadap Aceh, tentu saja atas hasutan Belanda. Mereka memilih berada di bawah lindungan VOC melalui kesepakatan yang disebut Perjanjian Painan pada tahun 1663 M (Kathirithamby-Wells, 1969: 466–479). Sejak saat itu VOC menjadi kekuatan utama dalam jaringan perniagaan di Nusantara dan di Asia pada umumnya, sementara Aceh semakin mengalami kemunduran.

Naiknya *orang kaya* dalam pentas politik Aceh bahkan berujung pada terciptanya kondisi politik yang mengancam keutuhan kerajaan. Keadaan ini berlangsung pada masa pemerintahan tiga raja perempuan setelah kematian Ratu Syafiyatuddin pada tahun 1675 M. Mereka memahkotai para ratu, tetapi tanpa kewenangan dalam urusan kerajaan. Dengan demikian *orang kaya* inilah sebenarnya yang menguasai Kerajaan Aceh, baik dalam politik maupun ekonomi. Keadaan ini diperparah dengan kembalinya *uleebalang* dalam pentas politik Kerajaan Aceh. Setelah sebelumnya memegang kekuasaan di wilayah pedalaman *uleebalang* tampil kembali untuk mendapatkan kekuasaan politik di kerajaan yang semakin berada dalam genggaman *orang kaya*.

Pada awal kemunduran kerajaan *ulubalang* bergerak menjadi penguasa di pedalaman. Hal itu berkaitan dengan "penyebaran [sistem] feodal" dalam kekuasaan politik di Aceh (Ito dan Reid, 1985: 197–212). Pada mulanya Iskandar Muda memberikan negeri-negeri taklukan kepada *uleebalang* yang saling bermusuhan, yang diangkat untuk kepentingan serangan—meskipun gagal—terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1629 M[7] dan untuk menggantikan elit-elit dagang yang kuat (*orang kaya*) di Kerajaan Aceh. Di tangan para penggantinya kekuasaan *uleebalang* menjadi warisan yang turun-temurun. Oleh karenanya *uleebalang* muncul sebagai panglima perang dan kepala wilayah tanah-tanah kerajaan yang diberikan secara tetap (Ito dan Reid, 1985: 201–202). *Uleebalang* perlahan-lahan menjadi pemilik kekuasaan nyata di daerah pertanian di pedalaman Aceh, yang membuat mereka muncul sebagai kekuatan yang berpengaruh dalam ranah politik Aceh.

Keadaan ini terjadi pada saat Aceh di bawah kekuasaan raja perempuan. Meningkatnya ketergantungan pada hasil pertanian ketika perdagangan mulai berkurang membuat *uleebalang* diuntungkan dan muncul dalam politik Aceh *vis a vis orang kaya*. Aceh mengalami instabilitas politik dan kemunduran perdagangan, sehingga kedudukan kerajaan sebagai kekuatan politik mulai runtuh. Proses keruntuhan ini dipercepat oleh penyerbuan Belanda.

9. Perang Melawan Belanda: Akhir Kerajaan

Perang Aceh (1873–sekitar 1910 M) merupakan perang terlama yang dialami Belanda di Nusantara dan tentu saja dengan jumlah pasukan dan dana terbesar yang pernah dikerahkan. Perang Aceh juga dianggap sebagai representasi paling jelas ancaman Islam terhadap pemerintah kolonial Belanda (Laffan, 2003: 39–43). Hal yang disebut terakhir terkait dengan fakta bahwa ulama, tepatnya ulama *dayah*, memainkan peran utama dalam perjuangan melawan Belanda. Mereka tampil sebagai arsitek perang, yang menyerukan semangat jihad, dan mengajak masyarakat Aceh melakukan perang suci melawan kolonial Belanda (Alfian, 1987: 152–170).

Perang Aceh terjadi akibat serangan Belanda ke tanah rencong yang dilakukan sebagai bentuk *pax Neerlandica* setelah politik dan hukum internasional—tepatnya Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824—memberi ruang pada Belanda untuk menguasai Aceh. Satu tahun berikutnya, 1825 M, Inggris menyerahkan Sibolga dan Natal kepada Belanda, sehingga menggenapi kekuasaan Belanda atas daerah-daerah di Sumatera yang sebelumnya menjadi taklukan Kerajaan Aceh (Reid, 1969: 11–13). Agitasi Belanda dilanjutkan setelah berhasil membuat Kerajaan Siak di bagian timur Sumatera tunduk di bawah kedaulatan Hindia Belanda melalui Perjanjian Siak pada tahun 1858 M. Hal ini berarti bahwa kerajaan-kerajaan kecil di wilayah perbatasan Siak, seperti Asahan dan Deli, berhadapan langsung dengan Belanda sebagai pelindung kekuasaan di tanah Siak; padahal kerajaan-kerajaan kecil tersebut secara tradisional berada di bawah Kerajaan Aceh (Reid, 1969: 25–35).

Berbagai usaha diplomatik dilakukan Aceh untuk menghindari serangan Belanda, seperti meminta dukungan dan perlindungan politik dari Turki Usmani pada tahun 1872 M (Kadi, 2015: 155–163)[8] melalui utusan khusus kerajaan Aceh 'Abd al-Rahman b. Muhammad al-Zahir Ba'alawi. Aceh juga mengutus Panglima Tibang Muhammad menjalin hubungan dengan konsulat Amerika Serikat dan Italia di Singapura (van't Veer, 1985: 28). Usaha-usaha diplomasi itu berakhir dengan tangan kosong. Dalam keadaan seperti itu Belanda menyusun rencana untuk menyerang Aceh. Setelah melalui proses komunikasi pedahuluan yang meminta Aceh tunduk kepada Belanda ditolak oleh Sultan, Belanda menyatakan perang. Pernyataan tersebut secara resmi dikeluarkan pada tanggal 26 Maret 1873 oleh Komisaris Pemerintah Hindia Belanda untuk Aceh F.N. Nieuwenhuijzen (Sufi, 2012 [4]: 560–561; van't Veer, 1985: 33–34).

Dengan kekuatan 3.360 pasukan serangan dilakukan pada tanggal 5 April 1873 di bawah komando Mayor Jenderal J.H.R. Köhler. VOC mendaratkan pasukannya di Pantai Ceureuman, sekitar 5 km dari ibukota kerajaan di Banda Aceh Darussalam. Namun serangan tersebut mengalami kegagalan. Dalam pertempuran memperebutkan Masjid Baiturrahman pada tanggal 14 April 1873 pasukan Aceh di

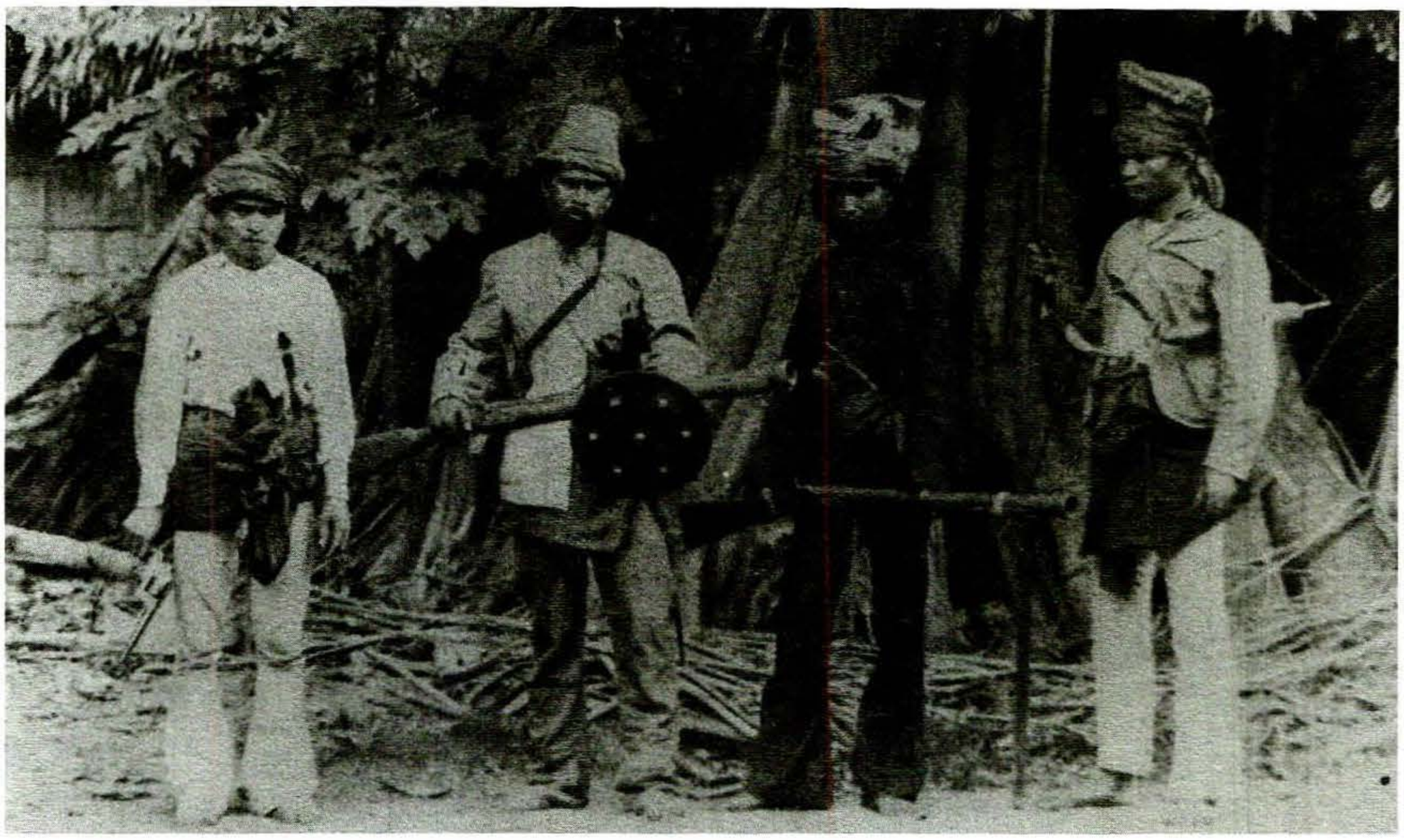

Pasukan Aceh
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

bawah pimpinan Teuku Imeum Lueng Bata berhasil menandingi kekuatan tentara Belanda, bahkan menewaskan Mayor Jenderal Köhler. Belanda terpaksa mundur ke pantai dan pada tanggal 29 April 1873, setelah mendapat izin dari Batavia, seluruh pasukan kembali ke Jawa (van't Veer, 1985: 35–37; Sufi, 2012 [4]: 564; Reid, 1969: 296).

Serangan Belanda berikutnya terjadi pada tanggal 9 Desember 1873 di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. van Swieten dengan kekuatan dua kali lebih besar dari serangan pertama. Meski menghadapi semangat perlawanan rakyat Aceh yang sama, dan dalam jumlah besar setelah mendapat bantuan pasukan dari berbagai daerah *uleebalang*, Belanda berhasil menaklukkan kerajaan. Mesjid Raya Baiturrahman yang dipertahankan dengan gigih oleh rakyat Aceh berhasil direbut pada tanggal 6 Januari 1874 dan kemudian dibakar. Berikutnya istana (*dalam*) diduduki setelah sebelumnya dikosongkan oleh Sultan Aceh sejak 15 Januari 1874.[9] Daerah-daerah di luar kontrol langsung kerajaan di Aceh Besar, dan berada di bawah kekuasaan *uleebalang*, menjadi kubu perlawanan rakyat Aceh. Oleh karena itu setelah van Swieten kembali ke Batavia pada 16 April 1874 penggantinya, Kolonel (kemudian naik menjadi Jenderal) J.L.J.H. Pel, sibuk menghadapi serangan laskar Aceh dari daerah-daerah *uleebalang* yang kemudian menjadi inti Perang Aceh berikutnya (van't Veer, 1985: 73–778; Sufi 2012 [4]: 565).

Sejak tahujn 1847 M Belanda mengarahkan operasi militernya ke daerah Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Meski telah berhasil memaksa para *uleebalang* di daerah-daerah tersebut tunduk kepada kekuasaan Belanda, perlawanan rakyat Aceh terus berlangsung, sehingga perjanjian dengan

uleebalang tidak bermakna secara politik. Mereka konsisten dengan perjuangan mengusir *kaphee Beulanda*. Dalam hal ini Teungku Tjik di Tiro sangat berjasa meningkatkan semangat perang rakyat Aceh. Dengan demikian Perang Aceh melibatkan *uleebalang* dan kaum ulama (*teungku*). Teungku Tjik di Tiro berasal dari pusat keagamaan di Pidie, tempat orang-orang Aceh mengirim anak-anak mereka belajar Islam sejak dulu. Teungku Tjik di Tiro bersama para ulama lain memberi pembenaran Islam dalam Perang Aceh. Istilah *syahid* mulai dikenalkan bagi mereka yang gugur di medan perang, seraya memaknai Perang Aceh sebagai *prang sabi*, yakni perang di jalan Allah (van't Veer, 1985: 91–92; Alfian, 1987).

Unsur Islam dalam Perang Aceh memang semakin kuat karena daerah-daerah yang menjadi sasaran operasi militer Belanda berupa pusat-pusat keagamaan yang sangat dihormati masyarakat Aceh. Sejak diangkat sebagai gubernur militer di Aceh pada tahun 1877 M Jenderal K. van der Heijden mengerahkan serangan besar-besaran di Samalanga, daerah pantai timur laut yang sejak tahun 1876 M mengirim pejuang gerilya ke Aceh Besar. Pada tahun 1880 M ekspedisi kedua dilakukan di Batee Iliek, pusat pendidikan dan kerokhanian Islam seperti halnya Tiro di Pidie. Perlawanan rakyat sangat kuat sehingga van der Heijden harus kehilangan satu matanya. Bersamaan dengan itu van der Heijden juga melakukan serangan ke pusat kekuatan Habib 'Abd al-Rahman, yang sejak tahun 1878 M pasukannya memasuki Mukim XXV yang sudah dikuasai Belanda dan mengepung Krueng Raba, pos Belanda terpenting di pesisir barat. Dengan dibantu satuan militer (*kolone*) yang kuat van der Heijden berhasil membebaskan Krueng Raba, kemudian ke markas Habib 'Abd al-Rahman di Montasik. Dari sana ia melakukan pengejaran terhadap pasukan Habib 'Abd al-Rahman di Mukim XXII dan XXVI (van't Veer, 1985: 93–94).

Van der Heijden berhasil. Pemberontakan di Samalanga berhenti setelah ekpedisi tahun 1880 M. Begitu juga halnya dengan pasukan Habib 'Abd al-Rahman; bahkan tokoh yang pernah diangkat sebagai utusan khusus kerajaan Aceh ke Turki dan Timur Tengah ini menyerah kepada Belanda pada bulan Agustus 1878. Ia diizinkan berangkat dan tinggal di Mekkah dan mendapat "uang tahunan" sebanyak sepuluhribu ringgit Spanyol (van't Veer, 1985: 94). Serangan van der Heijden tidak berhenti di situ. Dari bulan Maret hingga bulan Agustus 1879 Belanda melakukan pengejaran dan bahkan penghukuman yang sangat keras kepada rakyat Aceh di daerah Aceh Besar hingga ke Inderapuri yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Tokoh-tokoh Aceh yang menjadi pemimpin pemberontakan, antara lain Teungku Tjik di Tiro, Panglima Polim, dan Imam Lueng Bata, terpaksa menyingkir ke pedalaman Pidie (van't Veer, 1985: 96).

Pada tahun 1880-an M Perang Aceh memasuki satu tahap baru. Pada tahun 1885 M Belanda mulai menerapkan kebijakan pertahanan yang disebut "Stelsel Konsentrasi". Kebijakan ini dibuat untuk

menghindari jatuhnya korban yang lebih besar seraya menerapkan strategi bertahan dengan membangun benteng-benteng dan bukan menyerang seperti masa sebelumnya (Sufi, 2012 [4]: 567). Sementara itu rakyat Aceh tetap berjuang mengusir *kaphee Beulanda*. Tercatat tiga orang ulama tampil di medan peranng dengan pengaruh sangat besar, yakni Teungku Tjik di Tiro, Teungku Kutakarang, dan Habib Samalanga, ulama di tiga daerah yang sudah lama dikenal sebagai pusat pembelajaran Islam terkemuka di Aceh (van't Veer, 1985: 144–145). Perang selanjutnya dalam bentuk perang gerilya, yang sering merepotkan tentara Belanda.

Oleh karena itu timbul pemikiran untuk mengevaluasi Stelses Konsentrasi seraya menekankan perlunya serangan militer secara besar-besaran terhadap rakyat Aceh. Kebijakan itu secara efektif mulai berlaku ketika Jenderal van Heutsz menjadi Gubernur Militer di Aceh (1898–1904 M). Atas nasihat Snouk Hurgronje—tokoh di balik kebijakan Islam pemerintah kolonial Belanda—sejak tahun 1898 M van Heutsz melakukan gerakan ofensif pertama-tama ke sejumlah daerah yang menjadi benteng perlawanan rakyat Aceh. Dibantu korps elit Marsose, van Heutsz berhasil menguasai daerah pedalaman Aceh Besar dan kemudian Pidie. Di daerah Pidie van Heutsz juga berhasil menguasai Keumala, yang sejak 1884 menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Aceh. Kemudian operasi militer diarahkan ke Aceh Barat. Pada tahun 1899 M satu demi satu daerah berhasil dilumpuhkan. Teuku Umar, yang sebelumnya sempat memihak kepada Belanda, gugur dalam peperangan di Aceh Barat.

Serangan besar-besaran van Heutsz terus berlanjut. Pada tahun 1900 M daerah-daerah di perbatasan Pidie dan Aceh utara, yakni Meureudu, Samalanga, dan Peusangan, sepenuhnya dikuasai Belanda. Sasaran berikutnya menangkap Sultan. Sejak Keumala dikuasai Belanda, Sultan Muhammad Daud Syah berpindah-pindah hingga sampai ke Gayo. Akibat tekanan Belanda terus-menerus, termasuk menangkap istrinya, Pocut Murong, pada bulan Januari 1903 sultan terpaksa menyerah. Pada tahun 1907 M ia dibuang ke Ambon, kemudian dipindahkan ke Batavia pada tahun 1918, dan meninggal di sana pada tanggal 6 Februari 1939 (Sufi, 2012 [4]: 568–569).

Penyerahan diri Sultan tidak serta merta mengakhiri perlawanan rakyat Aceh. Di pesisir barat, Tjoet Njak Dien terus berjuang hingga tahun 1906 M, sementara di Pidie keturunan ulama kharismatik Tjik di Tiro tidak berhenti melawan kafir Belanda. Hal serupa dilakukan keluarga Tjoet Njak Meutia di pesisir utara Aceh dan banyak tokoh lain terus melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu periode 1899 sampai 1909 disebut sebagai masa "sepuluh tahun yang berdarah" dalam sejarah Aceh (van't Veer, 1985: 217–223). Namun, bagaimanapun, penyerahan diri sultan secara resmi menjadi akhir Kerajaan Aceh.

(Endnotes)

1 Azra (2004: 58) menyebut sejumlah sarjana 'Aidarus yang melakukan perjalanan ke Nusantara, seperti 'Abd al-Rahman b. Mustafa al-'Aidarus († 1780 M), yang kemungkinan besar melakukan kontak dengan Husain b. Abu Bakar al-'Aidarus dari Batavia († 1798 M), seorang sarjana sufi terkemuka lainnya dari keluarga 'Aidarus di Nusantara. Nama lain yang juga penting disebut adalah Muhammad Jilani b. Hasan Muhammad al-Humaidi, paman al-Raniri, yang pernah melakukan kunjungan singkat ke Aceh sebagai seorang guru.

2 Untuk pembahasan mengenai peristiwa dramatis ini, lihat juga Daudy (1983: 41) dan Hasymi (1983: 109). Tuduhan Al-Raniri terhadap para pengikut *wujūdiyya* dapat ditemukan dalam karyanya *Tibyan fi Ma'rifa al-Adyan* (Voorhoeve, 1955: 5).

3 Permintaan fatwa ini dapat ditemukan dalam sebuah naskah di Perpustakaan Universitas Leiden (Cod. Or. 2467 [5660], fols 12-31). Lihat Azra (2004: 64–5) dan Voorhoeve (1951: 365–8).

4 Untuk studi tentang karya-karya kecendekiaan dan pemikiran al-Sinkili lihat, misalnya, Rinkes (1909); Riddle (1990) dan Harun (1998) mengenai karyanya *Tafsīr Tarjumān al-Mustafīd*. Voorhoeve (1952) mengenai karyanya *Bayān Tajallī*, dan Fathurahman (1999) mengenai sufismenya dalam karyanya *Tanbīh al-Mashi*.

5 Selain dari Nusantara, al-Sinkili juga mempunyai murid dari Semenanjung Malaya. Ia Abdul Malik ('Abd al-Mālik b. 'Abd al-Allāh, 1678–1736), juga dikenal sebagai Tok Pulau Manis di Trengganu. Muridnya yang lain, yang hampir dipastikan berasal dari Turki, Baba Dawud (Dāwūd al-Jāwī al-Fansūrī b. Ismā'īl b. Aghā 'Alī al-Rūmī), dilaporkan memberikan sejumlah tambahan terhadap karya al-Sinkili *Tarjumān al-Mustafīd*. Lihat Azra (2004: 86).

6 Untuk menyebut beberapa contoh, studi-studi tentang al-Maqassari adalah Abu Hamid (1990), Tudjimah (1987), Massiara (1983), Lubis (1996), dan Feener (1999: 112-31).

7 Sistem penyebaran kekuasaan di Aceh oleh Iskandar Muda dilakukan di berbagai tingkatan: di tingkatan pertama dia membuat *sagi*; federasi tingkat kedua *uleebalang* (Melayu: *hulubalang*); dan satuan yang lebih kecil, *mukim*, di bawah *uleebalang*. Selain itu ia mengangkat ulama menjadi pemimpin yang bertanggung jawab di *mukim*, yang kemudian dikenal sebagai *imam* (Ito dan, Reid 1985: 203); untuk pembahasan yang lebih rinci mengenai sistem kekuasaan Aceh pada abad ke-19 M, lihat Snouck Hurgronje (1906, 1: 88). Pembahasan tentang *imam* akan dibahas kemudian.

8 Lhat pula Goksoy (2015: 175–197); juga Hadi, Peacock, dan Gallop (2011: 163–181). Penting dijelaskan bahwa Habib Abd al-Rahman al-Zahir berkedudukan, dengan persetujuan elit politik kerajaan, sebagai Pemangku Sultan dan sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri, karena sang sultan saat itu masih berusia empat belas tahun (Sufi, 2012 [4]: 557; Reid, 1972: 36–59).

9 Saat van Swieten berhasil menguasai istana, para pemimpin Aceh mengangkat Tuanku Daud Syah yang masih muda sebagai sultan baru dengan Tuanku Hasyim Banta Muda sebagai pemangku Sultan. Bersamaan dengan itu pusat pemerintahan dipindahkan ke Inderapuri (sekitar 25 km arah tenggara ibukota lama), masih dalam daerah Aceh besar (Sufi, 2012 [4]: 565).

— 8 —

Kerajaan Riau-Johor

Kerajaan Riau-Johor, yang juga disebut Riau-Johor-Lingga, adalah pewaris Kerajaan Malaka pada abad ke-14 M. Sultan Mahmud Syah, Raja Malaka terakhir, menyelamatkan diri ke Batam—yang biasa disebut Bintan—setelah kerajaannya jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 M. Batam, terletak di Riau-Lingga, akhirnya menjadi pusat kerajaan yang dibangun Sultan Mahmud pada tahun 1513 M dengan dukungan penuh dari "Orang Laut", yakni kelompok orang Melayu yang menetap di laut dan menjadi pengikut setia Raja Malaka. Namun karena berkali-kali diserang Portugis, Sultan Mahmud kemudian memindahkan pusat kerajaan ke Kampar, di pantai timur Sumatera. Ia meninggal pada tahun 1528 M dan digantikan anaknya, Sultan Alauddin Ri'ayat Syah (1528–1564 M), yang meneruskan upaya membangun kerajaan. Antara tahun 1530 dan 1536 M ia berhasil mendirikan kekuasaan di hulu Sungai Johor, sehingga oleh karena itu ia tercatat sebagai raja pertama dinasti Malaka yang membangun kerajaan Johor.

Alauddin Ri'ayat Syah tidak seberuntung Ali Mughayat Syah di Aceh. Ia mendirikan Johor di atas puing-puing Kerajaan Malaka dan bukan penyatuan dua kerajaan. Selain itu serangan bertubi-tubi Portugis membuat Johor tidak dapat dikonsolidasikan secara efektif. Di samping itu Johor dihadapkan pada Aceh dengan kebijakan ekspansionisnya, dan bahkan hegemonik, yang mencapai puncaknya pada masa kekuasaan Iskandar Muda (1607–1636 M). Beberapa kali Aceh melakukan serangan dan bahkan sempat menaklukkan Johor, sehingga penguasa Johor tidak dapat mengembangkan diri. Hal itu berakibat Johor lama berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Aceh.

Kerajaan Johor baru berkembang ketika peta politik dan ekonomi di bagian barat Nusantara mulai berubah pada awal abad ke-17 M. Kemunduran Kerajaan Aceh, yang mulai terjadi di bawah Iskandar Tsani (636–1641 M) dan kemudian semakin merosot pada masa Ratu Tajul Alam Syafiyatuddin (1641–1675 M), menjadi faktor yang menentukan bagi perberkembangan Johor. Selain terbebas dari hegemoni dan gangguan Aceh, Johor menjalin kemitraan strategis dengan Perusahaan Dagang Belanda di Batavia (VOC, Vereenigde Oost-Indische Compagnie). Pada periode itu kondisi politik Nusantara ditandai kehadiran VOC yang sangat berpengaruh dalam jaringan perniagaan, termasuk perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.

Riau dengan kesibukan lalulintas sungainya
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Pada abad ke-17 M VOC memperluas kekuasaan ekonomi di belahan barat Nusantara. Dalam kerangka itu penaklukan Malaka dari Portugis menjadi satu agenda utama. VOC kemudian menjalin kerjasama dengan Kerajaan Johor, yang saat itu menjadi kekuatan politik dan bertahan di tengah hegemoni Aceh. Kerjasama dengan VOC, bagi Johor, menjadi kesempatan yang sangat strategis untuk membangun kekuatan ekonomi dan politik kerajaan. Demikianlah, persekutuan VOC dengan Johor berhasil mengusir Portugis dari Malaka pada tahun 1641 M dan mengantarkan VOC menjadi satu-satunya perusahaan dagang Eropa di Nusantara, sedang bagi Johor persekutuan itu menjadi peristiwa sejarah sangat penting yang mengantarkannya meraih kemajuan pesat di bidang ekonomi dan politik.

1. Aliansi dengan VOC: Basis Perkembangan Johor

Hubungan Johor-VOC sebenarnya sudah berlangsung sedini tahun 1602 M. Pada tahun itu Admiral Jacob Heemskerck datang ke Batu Sawar dan menawarkan batuan ke Johor untuk menyerang pihak-pihak yang menghambat kerajaan tersebut menjadi kekuatan politik penting di belahan barat Nusantara, yakni Portugis di Malaka dan Aceh di Sumatera. Penguasa Johor saat itu, Sultan Alauddin Ri'ayat Syah III (1597–1615 M), menyadari nilai strategis kerjasama dengan kekuatan ekonomi-politik baru Eropa yang tengah berkibar di Nusantara dan karenanya ia segera menanggapi dengan mulai menjalin hubungan politik intensif dengan VOC (Andaya, 1975: 26).

Meski tidak segera melahirkan serangan militer bersama, jalinan persahabatan Johor dengan VOC terpelihara baik. Baru pada tahun 1639 M, saat Johor berada di bawah kepemimpinan Abdul

Jalil Ri'ayat Syah (1623–1677 M), kedua belah pihak melakukan satu langkah penting. Laksamana Kerajaan Johor, yang diberi kekuasaan penuh oleh sultan untuk berhubungan dengan Belanda, menandatangani perjanjian tertulis dengan seorang pejabat VOC di Patani, Philip Lucasz, yang menyatakan bahwa Johor bersungguh-sungguh membantu VOC merebut Malaka. Sebagai balasan, Belanda setuju membantu Raja Johor membangun benteng di Batu Sawar dan beberapa tempat lain, lengkap dengan perlengkapan perang, dalam rangka melindungi Johor dari gangguan Portugis dan Aceh (Andaya, 1975: 26).

Dari situlah persejutuan Johor-VOC memasuki tahap sangat penting dalam agenda politik mereka, yakni penaklukan Malaka. Operasi militer dilakukan dengan memblokade Malaka pada awal Agustus 1640 M, sekitar satu tahun setelah penandatanganan perjanjian. Angkatan perang Johor sangat berjasa dalam pengangkutan logistik, pembangunan artileri dan parit, dan mencegah musuh melarikan diri ke hutan sekitar. Angkatan perang Johor juga terlibat langsung dalam peperangan, yang sedianya—berdasarkan perjanjian—hanya berada di garis belakang. Sangat mungkin hal itu didorong oleh hasrat menebus rasa malu ketika Malaka ditaklukkan Portugis pada tahun 1511 M. Kerajaan Johor, sebagai pewaris langsung kerajaan Malaka, mengerahkan pasukan dalam jumlah besar, mencapai sekitar 1.200 orang, di bawah pimpinan Sri Bija di Raja, putra tertua laksamana (Andaya, 1975: 26–7). Pasukan Johor menjadi kekuatan yang sangat kontributif bagi tercapainya misi penaklukan. Pada tanggal 14 Januari 1641, setelah 130 tahun berada di tangan Portugis, Malaka resmi dikuasai VOC atas bantuan Kerajaan Johor.

Persekutuan dengan VOC inilah yang menjadi titik tolak perkembangan Johor meraih kemajuan di bidang ekonomi perdagangan dan selanjutnya kekuatan politik di wilayah barat Nusantara. Perjanjian yang ditandatangai VOC dan Johor pada tahun 1639 M, yang kemudian diperbaharui pada tahun 1642 M, memberi landasan kokoh bagi Johor untuk melakukan langkah-langkah penting bagi pengembangan ekonomi dan politik pada abad ke-17 dan awal abad ke-18 M. Perjanjian tersebut memberi keistimewaan kepada elit politik Johor dan *Orang kaya* untuk menjalankan bisnis mereka sebagai wujud ungkapan terima kasih atas jasa mereka yang besar dalam penaklukan Malaka. Bangsawan dan *orang kaya* bebas menjalin hubungan dagang dengan berbagai daerah di Nusantara. Kapal dagang Johor dan kapal asing yang memiliki identitas (cap) penguasa dan *orang kaya* dijamin bebas dari gangguan patroli Belanda di sekitar Selat Malaka. Selain itu perjanjian tahun 1639 dan tahun 1642 M juga memberi jaminan perlindungan keamanan bagi Kerajaan Johor dari serangan Aceh, musuh utama Johor saat itu (Andaya, 1975: 56).

Sementara itu Aceh sepeninggal Iskandar Muda pada tahun 1637 M mulai mengalami kemunduran, terutama di bidang ekonomi dan politik. Perkembangan ini berdampak bagi terciptanya

kondisi politik yang aman dan stabil di pantai timur Sumatera dan Semenanjung. Oleh karena itu perjanjian VOC-Johor bisa berjalan efektif. Saat itu relatif tidak ada kekuatan politik berarti yang dapat mengganggu stabilitas politik regional. VOC, yang didorong kepentingan penguasaan daerah penghasil komoditi perdagangan dan keseimbangan politik regional, senantiasa berusaha menekan Aceh agar tidak bangkit seperti pada masa Iskandar Muda.[1] Baik VOC maupun Johor diuntungkan oleh perkembangan yang terjadi setelah penaklukan Malaka pada tahun 1641 M. Kebijakan VOC melakukan monopoli atas sejumah mata dagangan terus berlangsung, sementara pada saat yang sama Kerajaan Johor mendapat kemerdekaan dalam menjalankan kebijakan politik dan ekonomi. Kondisi seperti itu menguntungkan Johor melebihi perjanjian tahun 1639 dan tahun 1642 M. Johor diakui sebagai sekutu setia tidak hanya oleh VOC di Malaka, tetapi juga bagi VOC di Batavia. Selain memiliki akses langsung ke Batavia, kerajaan ini dalam banyak hal merebut simpati Batavia lebih dari yang diberikan kepada wakil resminya di Malaka (Andaya, 1975: 58).

Keistimewaan itu dapat dilihat, misalnya, pada saat utusan khusus VOC di Malaka Jan Jansz Menie. Sesuai dengan perjanjian yang ditandatangai Sultan Abdul Jalil,[2] ia menolak permintaan izin penguasa Johor bagi kapalnya berlayar melewati Selat Malaka, namun Gubernur Jenderal VOC di Batavia Antonio van Diemen justru bersikap sebaliknya. Ia memberi izin kapal penguasa Johor bisa berlayar sebanyak limapuluh kali menuju Patani, Siam, Kamboja, dan dareah pantai Jawa sebagai bentuk apresiasi janji Johor akan mengirim lima buah sekoci, dayung, dan pagar ke Malaka. Selain itu Antonio van Diemen juga menolak arahan Malaka agar Belanda mencegah orang-orang Jawa dan Bantam mengunjungi Makam Tauhid di ibukota kerajaan Johor (Andaya, 1975: 62). Peristiwa itu menunjukkan Johor memiliki posisi penting dan menentukan hubungan kuasa dengan Belanda-VOC, yang memang membutuhkan sekutu setia untuk kelancaran kontrol ekonomi dan politik di bagian barat Nusantara.

Dalam perkembangan kemudian hubungan Johor-VOC mengalami pasang surut. Ada kalanya Johor sering dinilai VOC terlalu percaya diri, bahkan melupakan bantuan besar VOC terhadap kemajuan ekonomi yang diraihnya sejak pertengahan abad ke-17 M. Johor merasa menjadi satu-satunya pemegang kekuaan politik terkemuka di belahan barat Nusantara dan Semenanjung setelah Aceh mengalami kemunduran. Di samping itu ada jaminan perlindungan VOC dari serangan kerajaan lain, termasuk persekutuan Palembang-Mataram. Oleh karena itu Johor merasa berhak menduduki Pahang dan selanjutnya berusaha menguasai Perak dan Deli, yang sebelumnya dikuasai Aceh sejak 1620-an m. Hal ini ditegaskan dalam surat penguasa Johor ke Batavia pada tanggal 5 Mei 1644, yang di dalamnya menyebut "Raja Johor yang berkuasa di tanah Johor dan Pahang" (Andaya, 1975: 65). VOC tidak senang terhadap sikap itu. Surat Gubernur Jenderal VOC di Batavia kepada Gubernur

van Vliet di Malaka tertanggal 2 Mei 1644 menilai Johor sebagai "Melayu sombong yang sudah demikian keras kepala dan angkuh akibat kemakmuran yang tidak biasa" (Andaya, 1975: 65).

Kerajaan Johor berkembang sebagai kekuatan ekonomi dan politik penting di belahan barat Nusantara dan Semenanjung sejak pertengahan abad ke-17 berkat dukungan VOC. Sultan Abdul Jalil Ria'ayat Shah, penguasa Johor saat itu, berhasil membawa Johor mencapai kemajuan ekonomi. Kerajaan Johor, dengan ibukota Batu Sawar, menjadi pusat perniagaan internasional dengan banyak pedagang mancanegara berkunjung dan melakukan kegiatan perdagangan. Hal ini tampak, misalnya, dari permintaan izin Sultan Abdul Jalil pada tahun 1646 M atas kapal dagang Koromandel yang akan berlabuh di Batu Sawar untuk melewati Malaka tanpa membayar tarif tol (Andaya, 1971: 68). Meski ditolak, karena kapal dagang Koromandel tetap diwajibkan membayar tarif tol di Malaka, hal ini menjadi bukti bahwa Johor menarik minat para pedagang internasional menyusul terciptanya stabilitas politik regional di Nusantara.

Sultan Abdul Jalil belajar banyak dari pengalaman atas peristiwa tersebut. Ia menyadari perlunya menjalin hubungan baik dengan pihak VOC di Malaka yang menjadi kekuatan strategis untuk menciptakan keamanan di wilayah tersebut. Ia juga mengetahui bahwa VOC tidak melihat ada ancaman dengan kedatangan pedagang asing di pelabuhan Johor sejauh mereka membayar tarif tol di Malaka. Johor pun mengikuti aturan itu. Baru pada paruh kedua abad ke-17 ketika Johor sudah semakin kuat memegang kontrol atas timah di Siak, Selangor, Kelang, dan Sungai Ujong, kesepakatan dengan VOC berubah. Berbekal pengalaman menjalin hubungan dengan maskapai dagang Belanda di Malaka, Johor mampu mengambil keuntungan dari transaksi dagang di pelabuhan dan tidak menentang VOC yang memberlakukan sistem perjanjian (Andaya, 1971: 68).

Demikianlah, kedatangan pedagang mancanegara ke Johor terus tumbuh. Pedagang muslim India dalam jumah besar mulai terlibat dalam arus perdagangan ini dengan membawa pakaian yang sangat laku untuk ditukar dengan produk Melayu-Nusantara. Sebuah kapal dagang Inggris dari Surat, dengan memuat kargo pakaian dalam jumlah relatif besar, datang di pelabuhan Johor pada tahun 1647 M. Kendati tidak melakukan transaksi dagang dalam jumlah besar, kapal Inggris tersebut kembali lagi ke Johor pada tahun berikutnya dengan muatan lebih banyak. Mereka mengajukan izin membangun pos dagang tetap di Johor dengan bebas pajak. Meski sempat dizinkan membangun gudang namun keinginan pedagang Inggris menetap secara permanen di Johor ditolak dengan alasan tidak memberikan keistimewaan selain kepada VOC. Pedagang Ingggris itu pada tahun 1648 M memberi kesaksian besarnya pedagang Gujarat di antara pedagang internasional yang melakukan transaksi dagang di Johor (Andaya, 1971: 69).

Sultan Abdul Jalil melihat peluang besar menjalin hubungan dagang langsung dengan India. Pada tahun 1649 M, setelah mendapat izin VOC di Batavia, Ia mengirim kapal dagang ke Koromandel dengan sedikit muatan. Setelah berdagang di pantai Koromandel dan Bengal kapal kembali ke Johor dengan muatan barang dagangan utama dari India, yakni kain dalam berbagai jenis dalam jumlah sangat besar. Pola perdagangan langsung dengan India jelas sangat menguntungkan Johor. Oleh karena itu Sultan Abdul Jalil kembali mengajukan izin mengirim kapal dagang ke Koromandel dan Bengal, India. Izin sempat ditolak, namun VOC mengizinkan kapal Johor kembali berlayar langsung ke India tanpa harus berhenti dan membayar tol di Malaka (Andaya, 1971: 69).

Selain India Sultan Abdul Jalil juga merintis jalinan dengan Cina yang juga merupakan pilar penting dalam jaringan perdagangan Asia. Atas izin Batavia ia mengirim kapal dagang ke Taiwan pada tahun 1654 dan 1655 M. Kedua kapal itu gagal mencapai Taiwan karena menabrak karang dan tenggelam, tetapi barang dagangan dan awak kapal selamat dan jatuh ke tangan orang Mansuria. Meski demikian pihak Cina mengakui pentingnya Johor dalam arus perdagangan yang melibatkan pedagang mancanegara. Kapal Cina tercatat sering berlabuh di Johor sejak tahun 1657 M dan terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Johor saat itu tengah berkembang sebagai pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi para pedagang, khususnya dari India, Cina, dan Eropa. Sultan Abdul Jalil kemudian menjalin hubungan dengan kerajaan di wilayah timur Nusantara, yakni Kerajaan Goa di Makassar. Kerajaan itu juga menjadi pilar penting dalam jaringan perdagangan Asia (Andaya, 1971: 70–71). Sebagaimana diketahui Kerajaan Goa memegang peran sangat penting dalam perdagangan rempah-rempah di belahan timur Nusantara, khususnya Ternate, Tidore, dan Banda. Usaha itu tidak sepenuhnya berhasil karena intervensi VOC. Meskipun demikian upaya Sultan Abdul Jalil itu memiliki arti penting untuk memperkuat perkembangan Johor sebagai pusat perdagangan internasional, karena rempah-rempah yang dicari para pedagang mancanegara juga tersedia di Johor.

Sulan Abdul Jalil berhasil menjalin hubungan diplomasi dengan pedagang asing, termasuk pedagang Eropa. Pada tahun 1659 M sebuah kapal cepat Spanyol di bawah komando Kapten Joan der Geese (Juan de Jesus) meledak dalam perjalanan dari Canton ke Manila dan akhirnya berlabuh di Johor. Kapten Spanyol itu menjual emas dan perak Manila untuk ditukar dengan barang-barang lain di Johor. Ia sangat terkesan dengan keadaan Johor yang kondusif untuk transaksi dagang. Oleh karena itu, sesuai janjinya, ia mengunjungi Johor setiap tahun; bahkan sempat menjadi utusan Sultan Abdul Jalil pada tahun 1662 M untuk menangani suatu sengketa dengan Belanda (Andaya, 1971: 71–72). Selain itu, dengan dukungan Orang Laut, Sultan Abdul Jalil sangat responsif untuk menciptakan keamaan dan menyediakan prasarana yang memadai

bagi kelancaran transaksi perdagangan. Hal itu sangat penting untuk mendorong peningkatan volume dagang di Johor, sehingga menambah pemasukan cukup besar bagi kerajaan.

Peningkatan volume perdagangan bisa dilihat, antara lain, dari fakta bahwa kerajaan Johor sejak sekitar tahun 1660-an M memperluas kegiatan dagang tidak hanya di Batu Sawar, ibukota kerajaan, tetapi juga di Bengkalis dan Inderagiri. Bengkalis menjadi tempat berlabuh kapal-kapal internasional sekaligus berfungsi sebagai saluran berbagai produk dari daerah pedalaman Minangkabau ke pasar internasional. Di samping untuk mendapat harga jual yang lebih baik, orang Minangkabau menghindari pantai barat yang dikuasi Belanda dan lebih memilih membawa barang dagangannya, khusunya timah dan emas, ke pantai timur melalui jalur sungai yang bermuara di Selat Malaka. Dalam alur lalu lintas perdagangan Bengkalis berperan sangat penting sebagai pelabuhan penampung sebelum kemudian dibawa ke Indragiri. Di dua pelabuhan ini transaksi dagang dengan pedagang muslim India (Moor) dalam jumlah besar. Mereka menjadi pelaku utama bisnis timah dan perak dari Minangkabau. Barang dagangan dari Aceh juga dihimpun di pelabuhan Bengkalis, di samping Batu Sawar, untuk kemudian dijual kepada para pedagang Cina. Barang-barang itu berasal dari daerah taklukan Johor, seperti Muar, Kelang, Sungai Ujong, dan Rembau (Andaya, 1971: 76–77).

Perkembangan perdagangan di Johor juga tercermin dari tingginya angka permintaan surat izin berlayar ke VOC di Malaka untuk kapal-kapal dagang milik, atau yang didukung oleh, elit politik dan ekonomi Kerajaan Johor yang menerima keistimewaan dari VOC, yakni raja, perdana menteri, dan *orang kaya*. Pada tahun 1664 M, misalnya, Belanda menerima permintaan izin berlayar dari raja muda dan laksamana untuk transaksi bisnis timah di Perak, bahkan sampai ke Deli. Di penghujung tahun yang sama laksamana juga mengajukan izin mengirim empat kapal dagangnya ke Teluk Siam. Peningkatan jumlah kapal Johor juga tampak di Jambi. Pada tahun 1666 M permintaan izin berlayar diajukan raja muda untuk kapal yang disponsorinya yang akan berangkat ke Koromandel. Sementara itu Sultan Abdul Jalil mengajukan izin untuk kapalnya menuju ke Porto Novo, Masulipatam, dan Pulicat (Andaya, 1971: 77–78).

Data-data di atas menunjukkan bahwa persekutuan dengan VOC mengantarkan Kerajaan Johor berkembang, baik di bidang ekonomi maupun bidang politik. Johor pada tahun 1600-an M tampil sebagai kerajaan terkemuka di belahan barat Nusantara dan di wilayah Semenanjung.

2. Perang dengan Jambi dan Serangan Raja Kecik

Kemajuan Johor bertahan hingga Johor menghadapi tragedi politik akibat serangan Jambi. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1667 M Johor dan Jambi terlibat konflik yang semakin

meningkat. Pertikaian itu mencapai puncak ketika angkatan perang Jambi di bawah pimpinan Pangeran Dipati Anum menyerang dan menghancurkan ibukota Johor pada bulan April 1673 (Andaya, 1971: 81–102). Namun tidak lama kemudian Laksamana Tun Abdul Jamil membangun kembali Johor dengan memindahkan pusat kerajaan ke Riau. Laksamana mengembalikan kejayaan Johor yang diraihnya sejak beberapa dasawarsa terakhir, antara lain dengan menarik jaringan perdagangan Johor ke Riau (Andaya, 1971: 105–106). Sejak tahun 1673 M Johor memasuki periode baru, disebut Riau-Johor, dengan kemajuan ekonomi tetap tinggi. Riau menjadi pusat baru dinamika perdagangan dan politik.

Pada penghujung abad ke-17 dan awal abad ke-18 M Johor mengalami perubahan yang menentukan konstelasi politik kerajaan dan peta politik di bagian barat Nusantara secara umum. Perubahan tersebut terkait dengan tampilnya Raja Kecik dari Minangkabau dan pengaruh masyarakat Bugis di kerajaan yang melahirkan konfigurasi baru dalam tradisi bina negara (*statecraft*) di Riau-Johor.

Raja Kecik merupakan tokoh penting yang berperan sangat menentukan peta politik Melayu-Nusantara pada awal abad ke-18. Ia pemimpin kharismatik dari kekuatan politik baru dunia Melayu yang menantang—dan akhirnya berhasil mengalahkan—Kerajaan Johor di bawah pimpinan bendahara gelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah (1699–1720 M), yang saat itu tengah berkembang sebagai adidaya politik di bagian barat Nusantara dan Semenanjung. Raja Kecik muncul sebagai satu-satunya anak Sultan Mahmud Syah II—yang meninggal pada tahun 1699 M karena dibunuh bendahara yang kemudian menggantikannya sebagai raja—dan merasa sebagai pewaris sah takhta Kerajaan Riau-Johor. Berbeda dengan bendahara yang tengah berkuasa, Raja Kecik memiliki garis keturunan langsung penguasa Melayu di Riau-Johor yang dapat dilacak hinga penguasa Kerajaan Malaka. Dengan posisi demikian perlawanan Raja Kecik didukung sebagian orang Melayu, Minangkabau, serta orang asli dan Orang Laut, sehingga berhasil menebus kematian ayahnya dengan menguasai Kerajaan Riau-Johor.

Cerita tentang Raja Kecik terekam ke dalam sumber-smber tradisional Melayu, tentu saja dengan corak penekanan pada unsur-unsur mitologis. *Hikayat Siak* (Hashim, 1992) dan *Tuhfat al-Nafis* (Ali Haji, 1982) merupakan dua teks sumber Melayu terkait cerita tokoh ini. Lepas dari berbagai perbedaan di banyak aspek detail, kedua teks tersebut menceritakan bahwa Raja Kecik adalah anak Sultan Mahmud melalui proses gaib yang melibatkan seorang istri selir bernama Encik Apong, putri Laksamana Johor. Ia dikisahkan menelan air mani Sultan Mahmud dan mengandung bayi keturunan Raja Melayu itu. Tak berapa lama kemudian ia dibunuh Bendahara Riau-Johor.

Nama Raja Kecik masuk catatan VOC dalam surat yang diterima VOC dari Raja Pagarruyung terkait serangan orang Bugis-Makassar ke Bengkalis dan di bagian barat Nusantara pada tahun 1717 M (Andaya, 1995: 119–130). Mereka mengganggu jalur perdagangan sehingga Puteri Jamilan berkirim surat ke VOC. Dua surat pertama, yang tiba di Malaka pada bulan Agustus dan Oktober 1717, meminta VOC membuka kembali jalur perdagangan di wilayah tersebut. Dalam surat ketiga yang tiba di Malaka pada bulan Desember 1717 menyebutkan Raja Pagarruyung mengirim putra Sultan Mahmud, melalui Bengkalis, untuk membalas kematian ayahnya, gelar Marhum Mangkat di-Julang (Sultan Mahmud Syah), yang meninggal pada 1699 M. Surat tersebut menekankan agar Raja Kecik memperoleh senjata dan amunisi (Barnard, 1998: 92; Andaya, 1971: 277–279). Selain itu beberapa bulan kemudian VOC di Malaka menerima laporan dari utusannya yang mencatat banyak kapal berlabuh di Bengkalis dengan membawa orang Minangkabau yang bersiap membalas kematian Sultan Mahmud (Barnard, 1998: 92–93).

Demikianlah, Bengkalis menyediakan dukungan yang diperlukan Raja Kecik untuk tujuan tersebut. Selain orang Minangkabau, Raja Kecik yang menyebut diri sebagai putra raja keturunan Malaka juga memperoleh dukungan orang Melayu dan Orang Laut. Para bangsawan Johor saat itu pun mulai berbelok mendukung Raja Kecik dan membiarkan Sultan Johor sendirian (Andaya, 1971: 283–284). Begitu pula Orang Laut di bawah pimpinan Raja Negara Selat mengalihkan kesetian dari penguasa Johor kepada Raja Kecik. Mereka menyatakan kesetiaan dan dukungan dan segera datang ke Bengkalis setelah mengetahui Raja Kecik akan menyerang Johor (Andaya, 1971: 294). Di Bengkalis Raja Kecik didekati orang Bugis-Makassar yang telah berkembang sebagai kekuatan sosial-politik di bagian barat Nusantara dan Semenanjung Melayu sejak abad ke-17 M. Tiga pimpinan masyarakat Bugus di sekitar Selat Malaka—Daeng Parani, Daeng Cellak, dan Daeng Manompo—bertemu Raja Kecik guna membicarakan rencana serangan ke Johor. Daeng Parani mengajukan penawaran bahwa masyarakat Bugis akan bergabung dengan Raja Kecik dan jika berhasil mengalahkan Johor ia minta dianugerahi gelar dan posisi sebagai Yang Dipertuan Muda (Raja Muda). Raja Kecik setuju.

Ternyata Raja Kecik menyerang Johor tanpa menunggu orang Bugis yang tengah pergi ke Langat untuk mengerahkan tenaga dan mengambil senjata (Andaya, 1971: 294). Dari Bengkalis Raja Kecik bergerak ke Johor menduduki ibukota kerajaan. Dengan keris Sapurjaba di tangan dan empat hulubalang di sekelilingnya, Raja Kecik berhasil menguasai ibukota dan istana tanpa perlawanan. Bangsawan Johor, khususnya bendahara dan laksamana serta *orang kaya*, pergi meninggalkan istana (Andaya, 1971: 296; Tavares 1935: 110–156).

Sejak bulan Maret 1718 Raja Kecik secara resmi menjadi penguasa Johor, meneruskan garis kepemimpinan ayahnya yang dibunuh pada tahun 1699 M. Keberhasilan itu terkait erat dengan kemampuan Raja Kecik, geneologi, dan kharisma dari budaya politik Minangkabau yang berhasil menghimpun berbagai kekuatan sosial-politik di Selat Malaka dan di Semenanjung—khususnya orang Minangkabau, Melayu, dan Orang Laut—untuk bergerak bersama melawan Johor (Barnard, 1998: 112–113).

Namun demikian keberhasilan menguasai Johor tidak membuat Raja Kecik menjadi penguasa penuh dengan membangun rejim politik baru di atas rejim bendahara yang membunuh ayahnya. Ikatan budaya Minangabau dan pantai timur Sumatera tampak sangat kuat, bahkan melampaui hasrat politik yang sedianya bisa dilakukan di Johor. Pada pertengahan tahun 1718 M, beberapa bulan setelah menguasai Johor, Raja Kecik bermasud kembali ke Bengkalis dan membangun persekutuan dengan VOC di Malaka. Keputusan ini menjadi pertanyaan besar, khususnya bagi Orang Laut. Mereka bahkan tidak hanya meminta Raja Kecik tetap tinggal di Riau, tetapi juga mempertanyakan daulat dan kharismanya memimpin Johor. Lebih jauh, seperti dinyatakan dalam *Tuhfat al-Nafis*, statusnya sebagai putra Sultan Mahmud Syah juga mulai dipertanyakan. Meskipun demikian keinginan meninggalkan Riau tetap kuat dan tampak sudah menjadi keputusan akhir Raja Kecik. Ia mengangkat kembali mantan penguasa Johor Sultan Abdul Jalil pada posisi lamanya sebagai bendahara. Hal itu dilakukan untuk mempertahankan posisinya seraya tetap membangun kekuatan politik di pantai timur Sumatera. Untuk memperkuat hubungan dengan bendahara ia juga bersedia menikahi anaknya, Teungku Tengah (Barnard, 1998: 115).

Namun rencana pernikahannya dengan Teungku Tengah menjadi akar persoalan yang berakibat pada kepemimpinanya di Johor. Ia membatalkan menikahi Teungku Tengah, tetapi meminang adiknya, Teungku Kamariah. Sebagaimana diceritakan *Hikayat Siak* (Hashim, 1992: 128–129) dan *Tuhfat al-Nafis* (Ali Haji, 1982: 57–58), saat tiba di tempat kediaman Bendahara Abdul Jalil Raja Kecik melihat kedua putri bendahara. Ia berubah pikiran dan meminang Teungku Kamariah. Ia mengambil kembali cincin tunangan dari jari tangan Teungku Tengah dan dipindahkan ke jari tangan Teungku Kamariah. Sikap Raja Kecik membuat Teungku Tengah terhina. Dengan dibantu saudaranya, Sulaiman, ia mendatangi orang Bugis untuk membalas rasa sakit hati kepada Raja Kecik. Ia bersedia menikah dengan salah seorang pemimpin Bugis dan membantunya memperoleh kedudukan penting di dalam kerajaan asal mereka dapat mengusir Raja Kecik dari Johor.

Peristiwa itu membuka kesempatan bagi orang Bugis yang telah berkembang sebagai kekuatan sosial-politik menentukan di barat Nusantara dan Semenanjung untuk bersekutu dengan keluarga Bendahara Kerajaan Johor. Sebagai masyarakat pengelana, Bugis

perlu memiliki tempat berlabuh yang bukan hanya sebagai tempat tinggal bagi kelompok, melainkan juga menjadi bagian dari politik. Maka persekutuan dengan elit kerajaan menjadi hal yang sangat penting (Andaya, 1995: 119–138).

Melalui Teungku Tengah dan Sulaiman orang Bugis-Makassar di bawah pimpinan Daeng Marewa bersepakat dengan keluarga Bendahara Kerajaan Johor untuk mengusir Raja Kecik dari Kerajaan Johor. Oleh karena itu ketika kembali ke Siak tidak lama setelah menguasai Johor, Raja Kecik harus berhadapan dengan pasukan Bugis yang sudah menguasai Bengkalis dan Pulau Gontong yang menjadi salah satu pusat diaspora Minangkabau. Perang antara pasukan Raja Kecik dan Bugis-Makassar tidak bisa dihindari. Setelah berperang selama tiga hari keduanya sepakat mengembalikan Sultan Abdul Jalil Syah, yang saat itu berada di Trengganu, kembali menjadi Sultan Johor (Andaya, 1971: 309–312).

Perang berlanjut beberapa tahun kemudian. Pada tahun 1719 M Raja Kecik kembali ke Riau-Johor dan, dengan dukungan Orang Laut, kembali berkuasa di sana setelah Riau-Johor ditinggalkan Sultan Abdul Jalil ke Trengganu dan Pahang, sementara orang Bugis di bawah Daeng Marewa dan Daeng Manompo berada di Selangor dan Kelang. Pada bulan Desember tahun 1719 Raja Kecik mengirim surat ke VOC di Malaka meminta agar para pedagang Cina dan Malabar dibiarkan ke Riau (Andaya, 1971: 317). Sekitar satu tahun kemudian Daeng Marewa membangun kekuatan untuk mengambil kembali Riau-Johor dari tangan Raja Kecik. Dipicu serangan Raja Kecik ke Linggi dan pembunuhan atas Sultan Abdul Jalil pada penghujung tahun 1721, perang antara pasukan Bugis di bawah pimpinan Daeng Marewa dan Daeng Manompo dengan pasukan Raja Kecik berlangsung sengit, berawal di Linggi dan berlanjut ke Riau. Setelah sepuluh hari berperang, dan digambarkan sebagai perang habis-habisan, pasukan Bugis berhasil mengalahkan pasukan Raja Kecik. Cuaca Riau yang tidak bersahabat memang menguntungkan pasukan Bugis. Sejak saat itu Riau secara resmi jatuh ke tangan pasukan Bugis (Andaya, 1971: 322–323).

Riau kembali menjadi pusat Kerajaan Riau-Johor di bawah Raja Sulaiman, putra Sultan Abdul Jalil (Marhum Mangkat di Kuala Pahang), sebagai Sultan Johor dan Enche Abas sebagai bendahara. Pada awal tahun 1722 M, melalui rangkaian upacara kerajaan, Raja Sulaiman resmi diangkat sebagai penguasa Johor, Riau, Pahang, dan daerah taklukannya dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Tidak lama setelah itu, sesuai perjanjian dengan orang Bugis, Sultan Sulaiman mengangkat Daeng Marewa sebagai Yang Dipertuan Muda (Raja Muda), yang menandai persekutuan Bugis-Melayu di Kerajaan Johor, sehingga Johor berada di bawah pimpinan Sultan dan Yang Dipertuan Muda, masing-masing mewakili Melayu dan Bugis. Dinamika Riau-Johor pun diwarnai

hubungan yang terjalin antara Sultan Melayu dan Yang Dipertuan Muda Bugis. Sementara itu Raja Kecik mendirikan kerajaan di hulu Sungai Siak dengan pusat Buantan, yang kemudian dikenal dengan Kerajaan Siak.

3. Sumpah Setia Bugis-Melayu dalam Dinamika Politik Kerajaan

Pola hubungan Sultan-Yang Dipertuan Muda sangat menentukan dinamika politik Riau-Johor yang pada gilirannya juga menentukan perkembangan (dan juga kemunduran) ekonomi kerajaan. Hal itu menjadi isu utama dalam pemikiran politik di kerajaan Riau-Johor pada abad ke-19 M. Hubungan harmonis antara Sultan Melayu dan Yang Dipertuan Muda Bugis merupakan satu prasyarat penting bagi kebangkitan Riau-Johor. Atas dasar itu beberapa hal penting terkait dualisme kekuasaan tersebut dirumuskan dalam sumpah setia suku Bugis atas Sultan Melayu sebagaimana dinyatakan dalam kutian berkut.

> "Maka tiada berapa lamanya, maka Kelana Jaya Putera serta segala saudaranya serta segala menteri hulubalangnya berkehendaklah menggantikan Raja Sulaiman itu akan kerajaan paduka ayahanda baginda Sultan Abdul Jalil, yang mangkat di Kuala Pahang itu. Maka dilantiknya Raja Sulaiman itu bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah. Maka berhimpunlah segala Bugis dan Melayu pada masa opu-opu melantik Raja Sulaiman, betapa adat raja besar berlantik. Ada yang berteriak mentauliahkan kerajaan itu, yaitu Kelana Jaya Putera, padahal ialah berteriak sambil berdiri sambil mengunus halamangnya katanya, 'Barang tahu kiranya segala anak Bugis dan Melayu, maka adalah hari ini Raja Sulaiman bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah menjadi Raja Yang Dipertuan Besar memerintahkan negeri Johor dan Riau dan Pahang dengan segala takluk daerahnya!' Maka menjawab segala khalayah daripada orang besar-besar dan kecil-kecil, katanya 'Daulat, bertambah daulat' (Ali Haji, 1982: 82).

Kutipan *Tuhfat al-Nafis* di atas menggambarkan peristiwa sangat penting hubungan Bugis-Melayu. Raja Sulaiman dinobatkan sebagai Sultan Riau-Johor pada tahun 1721 M tidak lama setelah *opu-opu* Bugis berhasil mengusir Raja Kecik ke Buantan, yang kemudian mendirikan Kerajaan Siak yang otonom dari Riau-Johor. Pada hari yang sama, sesuai perjanjian dengan Bugis, Sultan Sulaiman minta salah seorang di anatara lima *opu* Bugis yang membantu mengusir Raja Kecik bersedia mendampinginya sebagai Yang Dipertuan Muda atau Raja Muda. Setelah mengadakan pertemuan, mereka sepakat Daeng Marewa, bergelar Kelana Jaya Putera, diangkat sebagai Yang Dipertuan Muda. *Tuhfat al-Nafis* selanjutnya

menggambarkan prosesi pelantikan Daeng Marewah sebagai Yang Dipertuan Muda sebagai berikut:

> "Syahdan kata sahibul hikayat apabila sudahlah selesai bermusyawarah Sultan Sulaiman dengan Kelana Jaya Putera serta opu-opu sekalian, maka putuslah Kelana Jaya Putera menjadi Yang Dipertuan Muda dan Opu Daeng Cellak telah tentulah didudukkan dengan Tengku Mandak. Syahdan apabila sudah bersatulah paham segala raja-raja itu, maka Sultan Sulaiman pun memulai pekerjaan melantik Yang Dipertuan Muda serta menikahkan Opu Daeng Cellak. Syahdan apabila sampai waktu yang baik maka Sultan Sulaiman pun melantiklah Opu Kelana Jaya Putera menjadi Yang Dipertuan Muda, memerintahkan kerajaan Johor dan Pahang dan Riau dengan segala takluk daerahnya, atas perintahan yang mutlak. Maka kelakuan melantik itu betapa adat istiadat melantik Yang Dipertuan Muda, yaitu dipakaikan pakaian kerajaan, diarak berkeliling kota. Kemudian barulah dibawa naik ke atas Balai. Maka mengaruklah Yang Dipertuan Muda di hadapan Yang Dipertuan Besar, demikian bunyi aruk itu jika dimelayukan daripada bahasa Bugis, 'Yakinlah Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah, akulah Yang Dipertuan Muda yang memerintahkan kerajaanmu. Barang yang tiada suka engkau membujur di hadapanmu aku lintangkan, dan barang yang tiada suka melintang di hadapanmu aku bujurkan. Barang yang semak di hadapanmu, aku cucikkan' demikianlah bunyi aruk itu" (Ali Haji 1982: 84-5).

Sejak itu orang Bugis menjadi bagian tidak terpisahkan dari orang Melayu di Riau-Johor, baik secara politik maupun sosial, bahkan ikatan kekeluargaan. Daeng Marewah mewakili suku Bugis bersumpah selalu setia dan menjaga Sultan Melayu untuk terus berkuasa dan berdaulat di tanah Melayu. Selain itu, bersamaan dengan pelantikan Daeng Marewah, Sultan Sulaiman juga meresmikan pernikahan Daeng Cellak dengan Tengku Mandak. Pernikahan ini kemudian melahirkan keturunan campuran Bugis dengan Melayu, disebut Bugis Peranakan, yang tampil sebagai elit politik dan budaya Kerajaan Riau-Johor. Mereka berjasa dalam perkembangan politik dan budaya Melayu serta kebangkitan Islam yang sejak awal menjadi bagian bagian dunia Melayu (Burhanudin, 2001). Dalam teks lain yang ditulis Raja Ali Haji, *Silsilah Melayu dan Bugis*, hubungan antara Yang Dipertuan Muda dan Sultan Melayu digambarkan sebagai hubungan perkawinan: Sultan sebagai istri yang harus dijaga dan dirawat oleh Yang Dipertuan Muda sebagai suami (Ali Haji, 1973: 67).

Opu-opu Bugis yang sebelumnya memang telah memegang kontrol penuh di sejumlah wilayah di sekitar Selat Malaka—terutama di Linggi, Selangor, dan Kelang—kini memiliki kekuasaan resmi di kerajaan pewaris Kerajaan Malaka pada abad ke-14 M. Kekuasaan Bugis semakin meningkat menjelang "perkawinan" dengan Melayu. Pada tahun 1720 M jumlah mereka di Semenanjung Malaka mencapai sekitar 3.000 orang, jauh dibanding tahun 1700 M yang berjumlah hanya ratusan (Andaya, 1995: 200). Persoalan politik di Riau-Johor akibat serangan Raja Kecik menjadi titik masuk untuk memperoleh kekuasaan sebagai Yang Dipertuan Muda. Hal itu sangat mungkin didukung watak perantau yang lebih terbiasa dengan kalkulasi rasional untuk bisa bertahan dan akhirnya berkuasa. Itulah sebabnya orang Bugis mampu menjadikan kesepakatan dengan Sultan Melayu sebagai modal sosial untuk berkembang menjadi kekuatan politik dalam perjalanan kekuasaan di Riau-Johor.

Hal ini berbeda dengan Sultan Melayu yang sering digambarkan sebagai raja yang hanya berkuasa secara *de jure* lewat serangkaian ritual yang bersifat simbolis. Di balik gelar kebesaran raja (sebagai Yang Dipertuan dan bayangan Allah di bumi) dan unsur kesakralan dalam konsep daulat (Burhanudin, 2001: 23–26), kekuasaan raja dalam tradisi Melayu dipahami identik dengan keberadaannya di singgasana, sebagai prasyarat eksistensi sebuah kerajaan, yang diartikan Milner (1982) sebagai "kondisi memiliki raja". Kondisi raja demikian itu ditemukan dalam pengamatan pejabat Inggris di Malaka pada abad ke-19 M, yakni sistem kekuasaan hanya bersifat *de jure* tanpa memiliki kekuasaan nyata secara administratif (Roff, 1967: 14–5). Kondisi inilah yang kemudian melahirkan dualisme kepemimpinan di Riau-Johor. Pernyataan kebesaran Sultan Melayu sering berhadapan dengan Yang Dipertuan Muda Bugis yang lebih terlatih baik dalam menggalang kekuatan maupun menangani dinamika politik dan ekonomi. Sementara itu, menyadari potensi dominasi Bugis, Sultan Melayu juga kerapkali berusaha melakukan sejumlah langkah politik untuk memperkuat kekuasaan sebagai Sultan Riau-Johor. Hal ini pula yang mewarnai pola hubungan kekuasaan Sultan Melayu dan Yang Dipertuan Muda Bugis sepanjang sejarah Kerajaan Riau-Johor.

Dalam kaitan itu penyerangan atas Siak masa Sultan Sulaiman dan Yang Dipertuan Muda Daeng Cellak menjadi contoh. Sebagaimana termaktub dalam *Tuhfat al-Nafis* (Ali Haji, 1982: 127), Sultan Melayu dan Yang Dipertuan Muda Bugis berbeda pandangan terkait serangan terhadap Siak. Siak, bagi Johor, merupakan musuh utama yang selalu mengganggu kewibawaan kekuasaan Melayu Malaka. Khusus bagi Sultan Sulaiman Siak selalu mengingatkannya pada serangan Raja Kecik terhadap Kerajaan Riau-Johor tahun 1718 M dan pembunuhan atas ayahnya, Sultan Abdul Jalil, pada tahun 1722 M. Oleh karena itu penyerangan terhadap Siak menjadi rencana penting Sultan Sulaiman selama berkuasa. Yang lebih penting, sebagaimana terbaca pada kutipan di atas, keputusan menyerang dan mengusai Kerajaan Siak juga memiliki kepentingan politik

tersendiri, yakni sebagai upaya Sultan Sulaiman membangun kekuatan politik sebagai Sultan Melayu lepas dari dominasi Yang Dipertuan Muda Bugis.

Sejak berkuasa pada tahun 1722 M baru pada 1745 M Sultan Sulaiman akan melaksanakan rencana menguasai Siak. Hal ini terkait dengan kedatangan seorang utusan VOC di Malaka, Claas de Wind, untuk membicarakan kembali perjanjian dan persahabatan VOC-Johor yang sudah berlangsung lama. Persahabatan itu sudah berlangsung sejak tahun 1640 M ketika Johor membantu VOC menyerang Portugis di Malaka dan kemudian menguasai kota dagang tersebut setahun kemudian. Rencana itu penting bagi Sultan Sulaiman yang saat itu berusia 45 tahun dan telah memerintah Riau-Johor dalam waktu yang lama untuk menunjukkan kekuasaannya.[3] Oleh karena itu kedatangan utusan VOC tersebut tidak hanya disambut dengan hangat, tetapi juga—seperti diuangkapkan dalam surat Sultan Sulaiman ke VOC di Malaka—menjadi sumber kekuatan yang dapat membantu terkait musuh-musuh di sekeliling yang seolah mengatur Johor (Vos, 1993: 73–4).

Sementara itu, pada tahun yang sama, Yang Dipertuan Muda Daeng Cellak meninggal dunia secara mendadak. Hal itu menjadi kesempatan bagi Sultan Sulaiman melakukan konsolidasi kekuasaan. Daeng Cellak merupakan Yang Dipertuan Muda Bugis dengan kekuasaan politik dan ekonomi besar. Ia bersama *opu-opu* Bugis lain menguasai daerah penghasil timah di Semenanjung, yakni Selangor, Kelang, dan Linggi (Vos, 1993: 75). Selain itu ia juga sangat berpengaruh di Riau-Johor seiring jasanya memajukan ekonomi. *Tuhfat al-Nafis* antara lain mencatat ia membangun perkebunan gambir yang laku di pasar internasional.[4] Oleh arena itu kematiannya yang mendadak membuat Sultan Sulaiman menjadi penguasa tunggal di Riau-Johor; setidaknya untuk sementara waktu.

Sultan Sulaiman kemudian memperkuat barisan Melayu untuk memperkuat kedudukan. Ia mengangkat Sultan Mansur Syah dari Trengganu (1741–1793 M) sebagai "Raja Muda" dan mempercayakan banyak hal terkait penanganan masalah politik dan administrasi kekuasaan kepadanya. Ia tidak memperyakannya kepada Yang Dipertuan Muda Bugis yang baru diangkatnya, Daeng Kamboja, yang kebetulan tinggal di Selangor (Vos, 1993: 77), pengganti Daeng Cellak. Sultan Mansur memang sudah lama menjalin hubungan dengan Sultan Sulaiman sesuai dengan posisi Trengganu yang berada di bawah kekuasaan Riau-Johor. Ia bahkan dinikahkan dengan putri Sultan Sulaiman. Selama limabelas tahun (1745–1760 M) ia tinggal di Riau-Johor dan menjadi orang kepercayaan Sultan Sulaiman sebagai "Raja Muda", sehingga ia dianggap bertanggungjawab atas kesalahpahaman dan pertentangan antara Bugis dan Melayu (Ali Haji, 1982: 125). Selain itu, masih dalam rangka memperkuat barisan Melayu, pada tahun 1748 M Sultan Sulaiman mengangkat Raja Indera Bungsu, seorang tokoh berpengaruh dari suku Melayu, sebagai bendahara, posisi yang sejajar dengan perdana menteri

(Vos, 1993: 82–3). Hal itu dimaksudkan untuk memperkuat posisi tawar politik Sultan Sulaiman terhadap posisi Yang Dipertuan Muda Bugis yang sudah berlangsung lama.

Dengan kekuatan politik tersebut Sultan Sulaiman semakin kokoh atas rencana menyerang Siak. Untuk urusan itu Sultan Sulaiman sejak awal memang tidak melibatkan Yang Dipertuan Muda Bugis. Ia memilih mendekati VOC di Malaka dan memintanya membantu menyerang Siak, yang disebut akan mendjadi hadiah untuk VOC. VOC memang mengakui nilai strategis Siak bagi perdagangan di Malaka, meski sejumlah pertanyaan dan keraguan muncul terkait efektivitas dan manfaat penyerangan. Siak, sejak masa Raja Kecik, sudah terbebas dari Riau-Johor dan menjalin hubungan baik dengan, serta menguntungkan bagi, VOC (Barnard, 1998: 142; Vos, 1993: 75–6). Hal itu sempat membuat hubungan Sultan Sulaiman dengan Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja tidak baik.

Setahun kemudian, pada tahun 1760 M, tampak perubahan sikap VOC. VOC beresikap netral dan karenanya bisa mendamaikan Yang Dipertuan Muda Bugis dengan Sultan Melayu. Perubahan sikap tersebut sampai ke Sultan Sulaiman melalu Arij Vebrugge, utusan VOC ke istana Riau-Johor. Melalui suratnya ke Malaka, Sultan Sulaiman menulis memahami posisi VOC. Ia juga mencatat bahwa Daeng Kamboja, melalui Raja Haji, keponakannya, telah menyampaikan pesan persahabatan. Meski tetap berada di Linggi Daeng Kamboja mengikuti proses perdamaian Bugis dengan Melayu. Di bawah prakarsa Raja Haji—yang sempat diperlakukan tidak ramah oleh Sultan Sulaiman saat datang ke Riau (Ali Haji, 1982: 148)—janji sumpah setia Bugis-Melayu dihidupkan kembali. Sultan Sulaiman menerima pernyataan sumpah setia tersebut dengan dihadiri Sultan Selangor, saudara Raja Haji, dan bangsawan Riau-Johor (Datuk Bendahara, Temenggung, dan Raja Indera Bungsu (Ali Haji, 1982: 149; Vos, 1993: 113). *Tuhfat al-Nafis* mencatat Sultan Sulaiman bertitah sebagaimana kutipan berikut:

> Barang tahu kiranya antara kedua pihak, sebelah suku-suku Melayu dan sebelah suku-suku Bugis, adalah kita menetapkan sumpah setia antara Bugis dengan Melayu, seperti setia Marhum Sungai Baharu, yang diperpegang hingga sampai kepada anak cucu cicitnya. Barangsiapa mungkir seperti yang telah tersebut itu, dibinasakan Allah dan dikutuk-Nya tiada sebelum dunia akhirat. Setelah itu maka titah baginda, 'Hari inilah kita serahkan perintah bicara, panjang pendeknya, kecil besarnya, kepada Raja Muda'. Maka Bugis-Bugis pun menerimalah. Maka titah baginda, baca do'a. Maka lalulah membaca do'a. Maka habislah segala perkara Bugis dengan Melayu pulang sediakala (Ali Haji 1982: 149).

Segera setelah itu Sultan Sulaiman mengirim Raja Selangor, Raja Haji, dan Raja di Baruh, putranya, untuk membawa Yang Dipertuan Muda dari Lingga ke Riau. Sikap ini diambil sebagai wujud rekonsiliasi Bugis-Melayu yang sudah diucapkan di depan elit-elit politik baik dari Bugis maupun dari Melayu, dan dengan demikian dimulai kembali hubungan yang sudah terjalin sejak awal berkuasa: Yang Dipertuan Muda Bugis dan Sultan Melayu sama-sama berada di istana untuk memimpin kerajaan Riau-Johor.

Sultan Sulaiman meninggal dunia pada 20 Agustus 1760 ketika menanti kedatangan Daeng Kamboja dari Linggi. Tidak lama setelah itu, sekitar bulan Januari 1761, putranya, Raja di Buruh, yang saat itu tengah berada di Selangor, sakit dan akhirnya "mangkat pula" (Ali Haji, 1982: 151–2; Vos, 1993: 114). Peristiwa itu mengakhiri kekuatan dan supremasi Melayu yang dibangun Sultan Sulaiman. Ketika Daeng Kamboja kembali ke Riau, sekitar bulan Februari 1761, peta politik Kerajaan Riau-Johor berubah. Ia menjadi "orang nomor satu" di Riau-Johor, karena yang diangkat sebagai sultan pengganti Sultan Sulaiman adalah Raja Ahmad, putra tertua Raja di Buruh, yang masih berusia delapan tahun (Ali Haji, 1982: 152). Hal itu membuat Daeng Kamboja berkuasa penuh di Riau-Johor. Kekuasaan itu semakin besar ketika Daeng Kamboja bertanggungjawab membayar seluruh hutang perang Sultan Sulaiman kepada VOC, yang saat datang menagih ke istana Riau para bangsawan Melayu (khususnya bendahara) tidak berdaya sama sekali (Ali Haji, 1982: 156–7).[5] Sejak itu Riau-Johor semakin berada di bawah kekuasaan Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja. Ia tidak hanya bertanggungjawab membangun ekonomi kerajaan, tetapi juga mengatasi masalah politik, termasuk mengurus Sultan Ahmad dan kemudian Sultan Mahmud yang masih kecil, yang naik takhta menggantikan kakaknya yang meninggal (Ali Haji, 1982: 159–60).[6]

Tuhfat al-Nafis menyebut Daeng Kamboja memang fokus bekerja untuk kemajuan Riau-Johor, khususnya bidang ekonomi-perdagangan. Sebagai "orang nomor satu", dan berbekal kepemimpinan yang kuat, Daeng Kamboja berhasil menciptakan suasana sangat kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ia mengerahkan sumber daya yang ada untuk memajukan perdagangan. *Tuhfat al-Nafis* menggambarkan apa yang dilakukan Daeng Kamboja di Riau-Johor sebagai berikut:

> Alkisah maka tersebut perkataan Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja di dalam negeri Riau. Maka tiada lain pekerjaannya melainkan membesarkan perniagaan. Maka datanglah beberapa perahu dagang dari jauh-jauh, dari Benggal dan dari Cina datang pula wangkang-wangkang kepala hijau dan kepala merah, berpuluh-puluh buah, dan dari Siam, apalagi perahu-perahu Bugis dan Jawa berasak-asaklah di dalam Sungai Riau dari kuala sampai

ke kampung Cina. Maka berpalulah dagangan Cina dengan dagangan Jawa, demikian lagi berpalu dagangan Jawa dengan dagangan Riau, seperti gambir, dan sudagar-sudagar Cina dan Bugis pun banyaklah kaya-kaya di dalam negeri. Adapun Yang Dipertuan Muda selalulah ia menyuruh pulang-pergi ke Malaka karena itu waktu itu sudah berdamai dan bersahabat antara Yang Dipertuan Muda dengan Holanda, dan di dalam Riau pun beraturlah orang besar-besarnya daripada Syahbandar dan mata-mata melayani segala dagang-dagang itu serta memeliharakan orang-orang dagang (Ali Haji 1982: 164).

Di samping itu kemajuan ekonomi Riau juga bisa dilihat dari catatan kesaksian pedagang asal Inggris yang berkunjung ke Riau pada tahun 1769 M. Sebagaimana dikutip Vos (1993: 121), pedagang tersebut merinci sejumlah barang dagangan yang terkenal di pasar internasional sebagai barang asal Asia Tenggara. Ia juga menyaksikan bagaimana emas dan dollar beredar dalam jumlah besar. Ia bahkan sempat menjual sepuluhribu dollar untuk barang-barang seharga dengan nilai uang itu dan segera mendapatkan kembali uangnya di hari berikut. Ia juga mencatat bahwa Riau merupakan kota yang nyaman untuk berdagang dan karena itu dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari berbagai negeri di Nusantara, Asia Tenggara (Siam dan Kamboja), dan Cina.

Kesaksian itu sekaligus memberi bukti kehadiran pedagang Inggris di Selat Malaka, yang luput dari penggambaran Raja Ali Haji dalam *Tuhfat al-Nafis*. Kajian komprehensif Vost (1993: 123–5) membuktikan bahwa pedagang Inggris dari India tampil sebagai faktor penting yang mendorong pertumbuhan perniagaan di Riau. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan jumlah pedagang asal Inggris berikut kapal-kapal dagang mereka di Selat Malaka dari 1760 hingga 1780 M. Bersama pedagang Bugis dengan jaringan perniagaan yang kuat di Nusantara (terutama Borneo, Sulawesi, dan kawasan Melayu) dan Cina dengan kapal mereka yang aktif di Asia Tenggara, para pedagang Inggris membentuk jaringan perdagangan di Riau dengan barang dagangan lada dan timah yang disalurkan di luar sistem niaga VOC (Koh, 2007: 76; Lewis 1995: 81–2).

Perniagaan Riau-Johor di bawah kekuasaan Yang Dipertuan Muda Daeng Kamboja sejak 1761 M maju pesat berikut jumlah pemasukan yang diperkirakan mencapai 100.000 dollar Spanyol setiap tahun, khususnya dari tarif pajak sebesar lima persen atas barang impor dan ekspor (Vos, 1993: 121). Dengan kemajuan itu pula Daeng Kamboja berhasil membawa orang Bugis kembali pada posisi dominan dalam peta politik di Riau-Johor dan Selat Malaka. Hal tersebut menjadi modal yang sangat efektif bagi kejayaan Bugis atas Melayu, yang tampak tidak pernah berhenti bertikai, meski dalam kasus-kasus kecil hanya muncul sesaat dan berhasil ditangani (Ali Haji, 1982: 164–74).[7] Daeng Kamboja menjadikan Riau-Johor stabil dan aman

secara politik, sehingga menjadi tempat subur bagi para pedagang mancanegara berkunjung dan sekaligus juga berniaga.

4. Raja Haji dan Perlawanan terhadap VOC

Setelah memegang kontrol penuh atas Riau-Johor selama sepuluh tahun Daeng Kamboja meninggal dunia pada 1777 M. Kedudukannya digantikan Raja Haji, keponakan dan sekaligus menjadi wakil (*kelana*) Daeng Kamboja selama berkuasa. Sebagai seorang *kelana*, Raja Haji lama berkecimpung dalam urusan politik di Riau-Johor. Proses perdamaian Bugis-Melayu masa Sultan Sulaiman, misalnya, melibatkan Raja Haji. Ia dipercaya Daeng Kamboja mengunjungi Riau terlebih dahulu dan selanjutnya meyakinkan Sultan Sulaiman agar bersedia kembali ke sumpah setia Bugis-Melayu. Dalam hal ini ia berhasil. Raja Haji juga yang kemudian diminta Sultan Sulaiman menjemput Daeng Kamboja di Linggi untuk kembali memimpin Riau-Johor sebagai Yang Dipertuan Muda. Begitu pula Raja Haji sering diminta Daeng Kamboja sebagai duta Riau-Johor untuk beberapa kerajaan, termasuk menyelesaikan masalah terkait hubungan politik Riau dengan kerajaan di sekitar Selat Malaka.[8]

Oleh karena itu naiknya Raja Haji sebagai Yang Dipertuan Muda memiliki makna khusus dalam keberlanjutan kepemimpinan Bugis di Riau-Johor. Di samping meneruskan apa yang sudah dilakukan pedahulunya, Raja Haji mempertahankan semangat keadidayaan Bugis di Riau-Johor yang ditanamkan kembali oleh Daeng Kamboja. Meski demikian Raja Haji lebih tepat disebut sebagai pencipta keseimbangan baru dalam hubungan Bugis-Melayu. Sultan Mahmud diperkirakan sudah berusia tujuh belas tahun ketika Raja Haji diangkat sebagai Yang Dipertuan Muda sehingga memiliki pengalaman sebagai sultan selama sepuluh tahun. Sultan Mahmud dianggap mulai berpengaruh dalam peta hubungan politik di Riau-Johor, meski masih di bawah senioritas Raja Haji. *Tuhfat al-Nafis* mencatat Sultan Mahmud memegang peran penting dalam pengangkatan Raja Haji sebagai Yang Dipertuan Muda (Ali Haji, 1982: 196).

Terlepas persoalan hubungan Bugis-Melayu, Raja Haji mewarisi kemajuan yang dicapai Daeng Kamboja. Seperti pendahulunya ia juga fokus pada pembangunan ekonomi kerajaan. Ia berusaha menjadikan suasana politik stabil secara sehingga kondusif bagi perniagaan. *Tuhfat al-Nafis* menggambarkan keadaan Kerajaan Riau-Johor masa Raja Haji tidak berbeda dengan masa kekuasaan Daeng Kamboja sebagai berikut:

> Syahdan kata sahibul hikayat adalah pada masa Yang Dipertuan Muda Raja Haji ini makin ramai Riau, serta dengan makmurnya serta banyaklah orang-orang negeri Riau kaya-kaya. Syahdan baginda Yang Dipertuan Besar dan Yang Dipertuan Muda pun banyaklah mendapat hasil-hasil dari cukai-cukai. Syahdan segala penjajab

> perang pun beraturlah di pelabuhan serta cukup obat pelurunya serta panglima-panglimanya, tiga puluh tahun, tiga puluh naik ke darat. Syahdan demikianlah di dalam beberapa tahun bersuka-sukaan karena negeri aman dan makmur, dan segala makanan pun murah dan segala orang-orang dagang pun banyaklah dapat untung karena terlalu ramai orang-orangnya (Ali Haji 1982: 197).

Kemajuan Riau-Johor juga bisa dibaca dari catatan perjalanan para pedagang yang berkunjung ke Riau dan Selat Malaka. Mereka, misalnya, mencatat bahwa Riau sebelum jatuh di bawah kontrol Belanda pada tahun 1784 M merupakan pusat kegiatan para pedagang asing yang berlabuh untuk melakukan transaksi dagang dalam jumlah besar. Tidak terlalu berlebihan memperkirakan nilai dagang di Riau mencapai ribuan gulden Belanda. Volume perdagangan tersebut meningkat tajam pada tahun 1779–80 M pada masa kepemimpinan Raja Haji sehingga menarik perhatian dan rasa tidak senang di pihak Belanda dan Inggris (Vos, 1993: 121).

Raja Haji telah berkecimpung dalam masalah politik sejak awal jabatannya sebagai *kelana* Daeng Kamboja, termasuk dalam kaitan hubungan Bugis dengan VOC yang sempat berperang. Bisa jadi Raja Haji memiliki ketidaksenangan terhadap VOC dan bisa jadi pula VOC telah memiliki catatan khusus terhadap Raja Haji. VOC Malaka sejak awal melihat pengangkatan Raja Haji sebagai Yang Dipertuan Muda akan berdampak tidak baik terhadap keberadaan maskapai dagang Belanda tersebut. Gubernur P.G. de Bruijn bahkan menggambarkan Raja Haji sebagai "seorang pengembara bandit" yang sangat potensial mengancam kepentingan bisnis VOC di Malaka. Sementara itu Raja Haji juga meningkatkan kekuatan melalui jaringan kuasa yang diprakarsainya dengan suku Bugis di sekitar Selat Malaka, khusunya Raja Selangor yang sekaligus keponakannya.[9] Raja Haji juga tercatat melakukan diplomasi tidak bersahabat dengan VOC saat de Bruijn mengeluh dalam suratnya tidak lama setelah Raja Haji diangkat sebagai Yang Dipertuan Muda mengenai upaya Riau menghindari pengakuan hak monopoli VOC (Vos, 1993: 127; Koh, 2007: 76).[10]

Hubungan tidak bersahabat Raja Haji dengan VOC memuncak saat keduanya terlibat dalam pertikaian tekait kapal dagang Inggris The Betsy. Hal ini bermula dari kedatangan kapal The Betsy di perairan Riau pada tahun 1782 M dengan muatan opium dalam jumlah sangat besar. Mengetahui hal itu, ditambah rumor tentang rencana serangan Inggris ke Malaka, VOC di Malaka berencana menguasai kapal tersebut. Apa yang sering disebut sebagai masalah Betsy (*the 'Betsy' affair*) ini terjadi di tengah gejolak Perang Belanda-Inggris IV (1780–1784). Belanda bertambah khawatir atas kemugkinan penguasaan Inggris atas wilayah Belanda (VOC) di Nusantara, termasuk persekutuan Inggris dengan penguasa setempat, khususnya Bugis di Riau dan Selangor. Kekhawatiran tersebut bertambah

karena kapal The Betsy milik swasta yang disewa maskapai dagang Inggris EIC (English East India Company) untuk menjual opium. Operasi penguasaan The Betsy dilakukan pada bulan Februari 1782 M atas prakarsa VOC di Malaka. Pada awal Maret bulan berikutnya pelaksana lapangan, Barbaron dan Siedenburg, berhasil menguasai kapal setelah sebelumnya mendapat izin dari penguasa Riau yang konon dijanjikan sepertiga dari rampasan isi kapal kepada Raja Haji. Sehari setelah itu mereka kembali ke Malaka dan membagi rampasan di antara mereka sendiri, sementara Raja Haji tidak mendapat bagian sama sekali (Vos, 1993: 129–38; Koh, 2007: 77–8; Natscher 1870: 170).

Peristiwa itu juga dicatat *Tuhfat al-Nafis*. Meski terdapat sejumlah perbedaan dengan data-data dan hasil kajian para sarjana yang menjadi rujukan, teks tersebut memberi tekanan pada fakta bahwa VOC melanggar janji persahabatan dengan Riau-Johor. Berikut kutipan *Tuhfat al-Nafis* terkait peristiwa itu.

> ... Adalah Yang Dipertuan Muda Raja Haji itu ada perjanjian dengan kompeni Holanda, musuh Holanda musuh Raja Haji. Adapun jika ada pekerjaan tangkap menangkap rampas merampas musuhnya itu ada bahagian di dalam itu antara keduanya.Kemudian datanglah satu kapal musuh Holanda itu masuk ke dalam Riau berlabuh di Pulau Bayan. Maka Yang Dipertuan Muda Raja Haji pun memberi tahu ke Malaka. Maka datanglah satu kapal dari Malaka maka diperangilah kapal musuh itu oleh Holanda. Maka diambilnya kapal itu dengan segala muatannya dibawa ke Malaka. Maka apabila sampai di Malaka, jadilah kapal itu hukum rampasan kepada Holanda jalan seperti adat permusuhan. Maka tiba-tiba tiada Raja Haji itu mendapat bahagian di situ konon (Ali Haji 1982: 201-2).

Masalah ini bukan semata-mata soal harta rampasan bagi Raja Haji. Tindakan VOC jelas merusak wibawa politiknya, yakni membiarkan VOC merampas kapal asing di lingkungan Kerajaan Riau-Johor tanpa sedikit pun berusaha menahan atau menghentikannya. Hal itu semakin menjadi masalah mengingat pertentangan yang tidak pernah berhenti antara Bugis dan Melayu di Riau-Johor. Perang Bugis dengan VOC pun tidak bisa dihindari setelah usaha perundingan gagal. Pada Juni 1783 M angkatan perang VOC di bawah komando Kapten Toger Abo memasuki perairan Riau. Perang berlangsung sekitar satu tahun. Selama perang pasukan Bugis di bawah pimpinan Raja Haji sempat unggul, menyusul keberhasilan Raja Haji mendapat dukungan Bugis di Selangor dan Minangkabau di Rembau. Namun tidak lama setelah itu VOC mendapat bantuan tambahan pasukan berjumlah besar dari negara Belanda berupa kapal perang serta alat persenjataan lengkap dengan dalih mengamankan kekayaan Belanda dari serangan Inggris. Pada

bulan Juni 1784 pasukan Belanda mendarat di Teluk Ketapang dan menghancurkan benteng pertahanan terakhir Bugis. Raja Haji terbunuh dalam perang tersebut (Vos, 1993: 147–63; Ali Haji, 1982: 203–09; Koh, 2007: 78–81).

Kematian Raja Haji tidak hanya menandai kekalahan Bugis, tetapi juga menjadi awal penguasaan Riau dan Selangor secara langsung oleh maskapai dagang Belanda. Peristiwa tersebut sekaligus bermakna bahwa upaya membangun kejayaan Bugis atas suku Melayu terputus sesaat dan menemukan bentuk baru di bawah kekuasaan Sultan Mahmud. Ia berinisiatif membangun kembali kerajaan Riau-Johor dengan jalinan pola hubungan baru baik dengan VOC maupun dengan Bugis.

5. Sultan Mahmud: Keseimbangan Baru Hubungan Bugis-Melayu

Sepeninggal Raja Haji kepemimpinan Riau-Johor sepenuhnya berada di tangan Sultan Mahmud. Yang Dipertuan Muda baru Raja Ali Memang sempat terpilih setelah melalui perdebatan dua kelompok elit Bugis dan Melayu serta Raja Tua Bugis yang berpihak ke suku Melayu.[11] Namun karena kerasnya pertentangan dua kelompok tersebut, terutama terkait siapa yang berhak menjadi Yang Dipertuan Muda, Raja Ali berserta sebagian Bugis tidak lama setelah itu meninggalkan Riau menuju Mempawah dan Sukadana. Maka tinggal Sultan Mahmud yang bertanggungjawab menghadapai VOC yang baru saja memenangkan perang dengan Bugis, meski secara resmi dinyatakan mewakili kerajaan Riau-Johor. Laksamana J.P. van Braam ditunjuk mewakili pihak VOC berunding terkait perjanjian setelah perang dengan Riau-Johor yang kemudian dipercayakan kepada Raja Tua menyusul kepergian Raja Ali.

Pada tanggal 1 November 1784 naskah perjanjian ditandatangani dengan Sultan Mahmud (kembali) dinyatakan sebagai Raja Johor, Pahang, dan Riau serta daerah taklukannya setelah Bugis kalah perang. Riau menjadi "keuntungan Belanda", orang-orang Melayu boleh tinggal di Riau, orang Cina yang membantu Bugis tetap dibolehkan tinggal di Riau dengan membayar 20.000 dollar Spanyol, dan semua belanja untuk keperluan perang ditanggung oleh raja. Selain itu disepakati bahwa semua alat perang (benteng, senjata, dan peluru) diserahkan kepada kapten komando. Begitu juga dengan harta benda peninggalan Bugis yang sudah meninggalkan Riau diserahkan kepa Kapten Komando.[12]

Perjanjian tersebut kemudian dibuat lebih rinci dan ditandatangani pada tanggal 26 November. Dalam perjanjian itu dikatakan bahwa sultan dan semua bangsawan Melayu Riau "mengakukan bahwa dia orang punya untung" karena negeri Belanda bersama VOC berhasil membuat mereka "terlepas daripada fitnah angkara dan hianatnya Bugis". Oleh karena itu kerajaan dan segala daerah taklukannya yang

jatuh ke tangan VOC dikembalikan kepada Sultan Mahmud dengan syarat bahwa sultan dan segala pagawainya mematuhi perjanjian tersebut. Untuk masalah kerajaan Sultan Mahmud berada di bawah koordinasi yang disebut Dewan Pemerintah (Raad van Regeeringh), yang terdiri atas bangsawan Melayu, yakni raja tua, bendahara, temenggung, dan Raja Indra Bungsu. Mereka, Sultan dan Dewan Pemerintah, harus tunduk dan setia kepada VOC. Orang-orang Bugis harus diusir dari kerajaan, kecuali mereka yang sudah beristri dan memiliki anak (Bugis peranakan). Kapal-kapal Eropa berikut awaknya dilarang berada di dalam wilayah kesultanan. Perjanjian itu juga membatasi gerak kapal yang menuju ke dan keluar dari Riau. Mereka harus seizin VOC di Malaka. Pergantian kekuasaan di kerajaan, khususnya pengangkatan sultan, harus mendapat izin Gubernur Jenderal VOC di Batavia.[13]

Perjanjian tersebut menghapus banyak kewenangan sultan dan diambil oleh VOC. Meskipun Sultan Mahmud tetap disebut sebagai "Raja Johor, Pahang, dan Riau", isi perjanjian jelas menunjukkan bahwa Riau ditempatkan di bawah kontrol langsung VOC (Koh, 2007: 92–4). Cengkeraman VOC semakin jelas ketika VOC menempatkan seorang Residen di Riau, David Rushde, pada bulan Juni 1785 sebagai wakil resmi VOC yang berkedudukan di Tanjung Pinang (Netscher, 1870: 203–4). Namun, alih-alih membincangkan kepentingan VOC di Riau, David Rushde justru memperbesar masalah dan ketegangan VOC dengan Sultan Mahmud. Ia bukan saja bersikap tidak sopan "dengan perintahnya yang keras" (Ali Haji, 1982: 220), tetapi juga senantiasa tidak menghargai raja tua yang dianggap berpengaruh buruk terhadap sultan. Setiap hendak melakukan sesuatu ia langsung berbicara dengan sultan dan dengan gaya yang "bersalah-salahan maksudnya dan berlain-lainan pikirannya" (Ali Haji, 1982: 220). Sultan Mahmud mengeluh atas sikap Rushde, sebagaimana terungkap dalam suratnya ke EIC, bahwa ia merasa dirinya telah dijajah oleh Residen (Vos, 1993: 181).

Sultan Mahmud dan Raja Indera Bungsu kemudian minta bantuan Ilanun di Sulu dan Tempassuk, sebagai koloni Ilanun di barat daya Kalimantan, dengan mengirim surat kepada Raja Tempassuk.[14] Raja Tempassuk pun setuju membantu Sultan Riau. Maka ia mengirim Ilanun di bawah pimpinan Raja Ismail menyerang VOC di Riau. Pasukan VOC di Riau berhasil dikalahkan. Residen Rushde dan beberapa orang stafnya berhasil kabur ke Malaka (Ali Haji, 1982: 220–1; Vos, 1993: 182–3). Berbeda dengan orang-orang Bugis tahun 1720-an, Ilanun tidak tertarik menetap di Riau dan hanya mengambil harta rampasan perang. Oleh karena itu tidak lama setelah berhasil mengalahkan VOC Raja Ilanun pulang ke Sulu dan Tempassuk. Hanya dua orang pemimpin pasukan, Tok Lukus dan Tok Akus, datang "memperhambakan diri mereka kepada baginda Sultan Mahmud" (Ali Haji, 1982: 221). Dengan mempertimbangkan keadaan di Riau, serta khawatir serangan balik VOC, Sultan Mahmud memutuskan meninggalkan Riau. Setelah bermusyawarah dengan menteri-menterinya ia bertitah "Tiada saya terhemat di

dalam negeri Riau sebab Holanda-Holanda itu tentu datang semula ia melanggar negeri Riau padahal di dalam negeri kekuatannya sudah tidak ada lagi. Jikalau begitu, baiklah saya pindah ke Lingga." (Ali Haji, 1982: 221).

Sultan Mahmud bersama Raja Indera Bungsu serta "segala orang-orang Melayu dan peranakan Bugis" dengan lebih kurang dua ratus perahu berangkat ke Lingga. Sementara itu datuk bendahara berlayar ke Pahang dengan lebih kurang seratus limapuluh perahu. Sebagian yang lain pergi ke Trengganu. Selain itu, sebagian yang lain lagi, termasuk Engku Muda, memilih ke Bulang, yang kemudian sebagian menjadi perompak (Koh, 2007: 98; Ali Haji, 1982: 221–2). Sejak sat itu Riau hampir tidak berpenghuni, kecuali orang-orang Cina yang bekerja di ladang gambir dan lada milik orang Melayu dan Bugis. Kondisi inilah yang ditemukan van Braam saat berkunjung ke Rau (Ali Haji, 1982: 222).

Kepindahan Sultan Mahmud ke Lingga bermakna penting bagi kedudukan sang sultan dan hubungan Riau-Johor dengan VOC. Lingga menjadi pusat kekuasaan bagi Sultan Mahmud membangun kekuatan ekonomi dan politik, yang kemudian terbukti efektif menjadi satu landasan baru bagi pola hubungan Riau-VOC. Ia kembali ke pola hubungan yang sudah lama terjalin sebelum peristiwa 1784 M. Pentingnya periode Lingga dapat dijelaskan melalui fakta bahwa Sultan Mahmud selama di pengasingan berhasil menjalin hubungan dengan berbagai kelompok sosial yang mendukung penguasaan ekonomi dalam niaga maritim di Nusantara dan akhirnya mendukung kekuasaan politik. Setelah gagal membangun kembali hubungan dengan VOC, yang ditempuh melalui bantuan mediasi oleh Raja Selangor dan Sutan Trengganu serta Bendahara Pahang,[15] akhirnya pada tahun 1788 M Sultan Mahmud memutuskan kembali ke Lingga. Bersama orang Melayu dan peranakan Bugis ia menetap di sana sambil mencari kehidupan baru (Ali Haji, 1982: 229). Sultan Mahmud menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat yang dikenal sebagai bajak laut, yakni Orang Laut Melayu, suku Bugis peranakan, dan Ilanun. Mereka menjadi pengikut Sultan Mahmud dan sama-sama mencari kehidupan di laut, bahkan beroperasi hingga ke Riau sehingga "kesusahan atas segala orang yang berniaga karena perompak-perompak seperti anak ayam umpamanya" (Ali Haji, 1982: 222 dan 230; Koh, 2007: 152).

Kekuatan ekonomi Sultan Mahmud di Lingga semakin besar dengan penemuan sumber timah di Singkep. Sultan Mahmud kemudian "menyuruh akan orang-orang Melayu dan peranakan Bugis mengerjakan timah-timah di situ serta masing-masing punya bagian" (Ali Haji, 1982: 229). Sebagaimana diketahui, timah merupakan salah satu komoditi yang dicari para pedagang internasional, termasuk VOC (Vos, 1993). Dengan penemuan Singkep para pedagang, teristimewa Inggris, berdatangan untuk membeli, bahkan ikut membiayai industri timah di Singkep. Begitu

pula pedagang-pedagang dari wilayah timur Nusantara berdatangan di Lingga dengan perahu-perahu mereka yang bermuatan beras dan kapal-kapal Cina (Ali Haji, 1982: 229–30). Semua itu membantu pertumbuhan Lingga menjadi pusat perdagangan baru di bawah Sultan Mahmud. Proses ini semakin kuat dengan kemampuan sang sultan mentransformasikan bajak laut menjadi satu kekuatan kohesif. Hal ini tentu terkait dengan pribadi Sultan Mahmud yang dianggap sebagai raja agung dan raja sejati bangsa Melayu, putra Raja Johor yang sangat dihormati (Vos, 1993: 193). Mereka inilah yang menjadi kekuatan ekonomi Lingga. Dalam hal ini Raja Haji Ali menulis dalam *Tuhfat al-Nafis* sebagai berikut:

> Maka di dalam hal itu perompak-perompak pun banyak juga karena baginda itu belum berdamai dengan kompeni Holanda. Maka kompeni Ingggris pun selalu juga membawa obat bedil dan peluruh dan meriam dan senapang berpalu dengan timah dan lainnya. Maka besarlah perompak seketika itu. Adalah kepalanya Panglima Rahman namanya hingga merompaklah ia ke tanah Bangka lalu ke Jawa. Maka banyaklah orang-orang Bangka dan Jawa ditawannya dibawanya ke Lingga dijadikan isi negeri Lingga. Lama-lama sukalah orang-orang Bangka itu diam di Lingga memperbuat kebun dan dusun tiadalah ia mau balik ke Bangka lagi. Terkadang-kadang datanglah sanak-sanak saudaranya dari Bangka dengan suka hatinya sendiri memperhambakan dirinya di bawah perintah baginda Sultan Mahmud. Maka jadilah ramai di dalam negeri Lingga itu. Syahdan kata sahibul hikayat adalah pekerjaan rompak-merompak itu mana-mana dagang yang hendak masuk ke negeri Lingga tiadalah dirompaknya. Syahdan maka duduklah baginda di dalam negeri lingga membuat istana di hulu serta kota paritnya (Ali Haji 1982: 230).

Pada saat yang sama Sultan Mahmud juga berbuat hal serupa untuk keluarga Yang Dipertuan Muda Bugis. Hal itu dilakukan dalam rangka mendamaikan dua suku yang sangat berpengaruh bagi perkembangan politik di Riau-Johor. Ia menikahi Engku Puteri dan menyerahkan Pulau Penyengat kepada keluarga Bugis. Sultan Mahmud bersama raja-raja lain menuju Riau. Sesudah beberapa lama berada di di Riau pada tahun 1804 M Sultan Mahmud dinikahkan oleh Raja Ali dengan Raja Hamida atau Engku Puteri (Ali Haji, 1982: 245).

Sebagaimana tertulis dalam *Tuhfat al-Nafis* Sultan Mahmud menyuruh Punggawa Bakak yang tinggal di Pulau Penyengat untuk membersihkan pulau tersebut yang dihuni sekitar empat sampai lima keluarga. Di bawah pengawasan Enci Kaluk, Sultan Mahmud membangun istana di Pulau Penyengat "dengan kota

paritnya dan mesjid balaiurungnya". Setelah selesai membangun istana Sultan Mahmud membawa istrinya, Engku Puteri, ke istana Pulau Penyengat "dengan orang baiknya dan anak-anak raja sertanya" (Ali Haji, 1982: 254). Sultan Mahmud pun menyerahkan Pulau Penyengat kepada Engku Puteri, "saya buatkan jadi miliklah kepada Raja Hamidah", bersama seluruh keluarga anak Raja Haji, serta berikut semua "hasil-hasilnya", dan "tiadalah saya (Sultan Mahmud) campur lagi barang suatunya". Sementara itu Lingga menjadi bagian anaknya (Tengku Abdul Rahman) dan "janganlah Raja Hamidah adik beradik campuri lagi daripada pihak hasil-hasilnya dan kerajatnya" (Ali Haji, 1982: 255).

Penyerahan Pulau Penyengat kepada keluarga Bugis yang diwakili oleh Engku Puteri menjadi peristiwa penting terkait hubungan Bugis dengan Melayu. Pulau Penyengat Bugis menjadi domain tersendiri sebagai penguasa Riau yang terpisah dari suku Melayu yang berada di Lingga sebagai domain kekuasaan mereka. Dalam banyak hal pembagian domain kekuasaan Bugis dan Melayu berhasil mengatasi pertikaian. Baik Sultan Melayu maupun Yang Dipertuan Muda Bugis sama-sama bekerja untuk kemajuan wilayah masing-masing, sehingga baik Lingga maupun Riau sama-sama mengalami perkembangan secara ekonomi-politik dan budaya (Ali Haji, 1982: 255).[16]

Sultan Mahmud berhasil memecahkan persoalan serius dalam dinamika politik Riau-Johor, yakni pertikaian dalam hubungan Bugis dan Melayu. Sultan Mahmud menggunakan strategi tradisional untuk memperkuat terciptanya perdamaian dan keteraturan di Riau, yaitu menikahi Engku Puteri dan disusul penyerahan Pulau Penyengat kepada keluarga Bugis. Sebagaimana dikatakan Koh (2007: 201), perkawinan itu tidak hanya menegaskan kembali sumpah setia keluarga Raja Johor dan *opu-opu* Bugis pada tahun 1720-an M, tetapi juga menjadikan Yang Dipertuan Muda Bugis pada dasarnya merupakan bagian keluarga Sultan Mahmud meskipun tinggal dan memerintah di Riau. Oleh karena itu sejak akhir abad ke-18 M istilah "suku Bugis" dan "suku Melayu" tidak lagi bisa dipahami secara sederhana. Perkawinan di antara mereka mengaburkan pembagian kedua kelompok tersebut ke dalam kategori etnis sesederhana seperti sebelumnya.

Dengan langkah di atas Sultan Mahmud berhasil membuat keseimbangan baru hubungan Bugis-Melayu. Di tengah ketiadaan kekuatan Eropa untuk sementara Sultan Mahmud mampu membuat budaya dan kebijaksanaan dunia Melayu bekerja secara efektif dalam proses sosial-politik untuk mengakhiri konflik serta menciptakan perdamaian dan keteraturan di Riau-Johor. Kondisi inilah yang mendasari tumbuhnya pemikiran Islam dan budaya Melayu yang berkembang di Riau pada abad ke-19 M dengan pusat Penyengat.

6. Pulau Penyengat: Pusat Cendekia Islam dan Budaya Melayu

> Dan suka ia [Raja Ja'far] akan ulama serta kuat menuntut ilmu seperti membaca kitab yang bahasa Melayu seperti *Usul al-Din* dan kitab *Mir'at al-Tullab* kepada gurunya ulama yang besar pada masa itu, yaitu Haji Abdul Wahab. Serta suka mendengar hikayat raja-raja di sebelah atas angin. Dan suka ia akan orang baik-baik bacaannya pada mengaji al-Qur'an, jikalau datang qari yang pandai mengaji al-Qur'an maka dipegangnyalah dua tiga bulan. Maka mengajilah ia serta disuruhkannya anaknya dan pegawai-pegawainya mengaji, apabila khatam diberinyalah qari itu uang beratus-ratus ringgit (Ali Haji, 1982: 267).

Kutipan di atas merupakan gambaran *Tuhfat al-Nafis* tentang keadaan Penyengat pada masa Raja Ja'far menjadi Yang Dipertuan Muda Riau-Johor (1806–1832 M). Yang Dipertuan Muda Raja Ja'far melakukan banyak hal penting untuk menyatukan kekuasaan politik dan perkembangan ekonomi. Ia, misalnya, menjalin hubungan dengan sejumlah pihak, termasuk dengan Belanda di Malaka untuk melatih angkatan perangnya yang berjumlah kecil dan juga untuk kepentingan perdagangan. Teks *Tuhfat al-Nafis* menggambarkan suasana Riau-Johor di bawah kepemimpinan Raja Ja'far sebagai pusat perniagaan yang ramai di kunjungi pedagang, "masuk perahu-perahu dagang dari Cina … Siam dan perahu-perahu Jawa dan kapal-kapal Bugis pun terlalu banyak … dan tuan-tuan sayyid pun banyaklah datang" (Ali Haji, 1982: 260).

Selain itu *Tuhfat al-Nafis* juga menggambarkan Raja Ja'far dalam nuansa keagamaan sebagai penguasa yang "baik perangainya dan suka mengasihi anak saudaranya dan sahabat handainya, apalagi tuan sayid yang dari Arab dan tuan sayid peranakan serta hormat yang tua-tua dengan pergi ziarah ke rumahnya terkadang minta musyawarah daripadanya" (Ali Haji, 1982: 267). Teks tersebut juga memberi perhatian atas orientasi cendekia dan keagamaan Raja Ja'far yang dinilai mendorong kehidupan dan dinamika keislaman di Penyengat dan di Riau-Johor. Dukungan itu antara lain mengundang ahli agama Islam ke Riau-Johor untuk memberi pelajaran berbagai ilmu Islam bagi masyarakat Penyengat, teristimewa anggota keluarga kerajaan yang memang sangat tertarik belajar agama.

Raja Ja'far berhasil membangun Penyengat sebagai pusat pemerintahan dan sekaligus pusat budaya. Usaha tersebut berlanjut setelah ia meninggal pada tahun 1831 M dan digantikan anaknya, Yang Dipertuan Muda Raja Abdul Rahman (1831–1844 m). Tidak banyak yang diketahui orientasi cendekia-keagamaan Raja Abdul Rahman. Ia mulai membangun mesjid sebagai penanda penting Pulau Penyengat. Letak mesjid sengaja dipilih di titik yang bisa dilhat dari Tanjung Pinang yang saat itu menjadi pos kekuasaan Belanda.

Hal itu dimaknai sebagai ekspresi religiusitas Raja Abdul Rahman dan sikapnya yang kurang bersahabat dengan pemerintahan kafir di bumi Melayu (Matheson, 1989: 160).

Sepeninggal Raja Abdul Rahman kedudukan Yang Dipertuan Muda dipegang saudaranya, Yang Dipertuan Muda Raja Ali (1844–1857 M). Selain menyelesaikan pembangunan mesjid, Raja Ali juga dikenal dengan dedikasinya yang besar dalam pengembangan Penyengat sebagai pusat peradaban Islam dan Melayu di Nusantara. Sebagaimana disebut dalam *Tuhfat al-Nafis*, Raja Ali digambarkan sebagai "mengadakan beberapa perkara yang indah-indah mendatangkan nama kerajaan yang elok dan agama yang teguh". Teks tersebut juga mengisahkan bahwa Penyengat sering dikunjungi banyak ulama, termasuk Sayyid Abdullah Bahrain, mendorong pegawai kerajaan belajar Islam dengan membaca kitab dan memperbaiki bacaan al-Qur'an, dan memerintahkan kaum perempuan berkerudung. Selain itu Raja Ali juga melarang judi dan menyabung serta menerapkan hukuman keras kepada pelaku kriminal. Pada masa pemerintahan Raja Ali tarekat Naqsabandiyah berkembang di Penyengat (Ali Haji, 1982: 341–342, 359; Mathseon, 1989: 160).

Demikianlah Penyengat di bawah Yang Dipertuan Muda Raja Ali berkembang sebagai pusat kehidupan keagamaan dengan kemajuan luar biasa. Ia meletakkan landasan kokoh bagi proses perkembangan lebih lanjut di tangan para penggantinya, terutama Yang Dipertuan Muda Raja Muhammad Yusuf (1857–1899 M). Selain mengundang para ulama dari berbagai negara Islam dan aktif dalam tarekat Naqsabandiyah, sebagaimana dilakukan para pendahulunya, Raja Muhammad Yusuf juga memberi perhatian khusus pembangunan perpustakaan. Ia menyediakan dana dalam jumlah besar untuk membeli buku dari berbagai negara, yakni Mesir, Mekah, dan India, yang saat itu (di penghujung abad ke-19) menjadi pusat kegiatan penerbitan karya-karya cendekia muslim (Matheson, 1989: 162; Palawa, 2003: 108–109; Burhanudin, 2007: 81–84).

Perkembangan Penyengat menjadi rumah bagi lahirnya seorang tokoh terkemuka dalam sejarah Melayu modern dan berjasa besar dalam kebangkitan cendekia Islam dan budaya Melayu di Penyengat. Dialah Raja Ali Haji, putra Raja Haji Ahmad dan cucu Raja Haji Fisabilillah, Yang Dipertuan Muda Bugis keempat. Ia lahir di Selangor. Tidak lama setelah lahir pada tahun 1808 M Raja Ali Haji dibawa pindah oleh ayahnya ke Penyengat mengikuti saudaranya, Raja Ja'far (Yang Dipertuan Muda Bugis kelima) dan Raja Hamidah atau Engku Puteri. Mereka mendiami istana baru di Pulau Penyengat yang baru selesai dibangun Sultan Mahmud sebagai persembahan khusus untuk istrinya. Di pulau inilah Raja Haji Ali tumbuh sebagai bagian bangsawan Bugis di Kerajaan Riau. Ia pun menyaksikan dinamika kehidupan sosial-politik dan cendekia-keagamaan yang berlangsung.

Raja Ali Haji menyaksikan dan berkecimpung langsung dalam suasana kosmopolit Penyengat dan Riau-Johor dengan banyak ulama dari berbagai negara muslim dan wilayah lain di Nusantara datang dan mengajar serta melakukan berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan kerajaan. *Tuhfat al-Nafis*, sebagai bukti kesaksian Raja Ali Haji, tertulis bahwa para ulama mancanegara, antara lain dari Mekah, Madinah, Bahrian, dan Mesir, datang dan tinggal di Panyengat. Mereka menjadi guru untuk pegawai kerajaan dan masyarakat muslim. Begitu pula halnya dengan ulama Nusantara. Mereka meramaikan kegiatan belajar-mengajar Islam di Penyengat, di samping tugasnya untuk masalah keagamaan di kerajaan. Hal ini tercermin, misalnya, dari pengalaman Haji Hamim, seorang ulama dari Banjarmasin. Pada masa kekuasaan Yang Dipertuan Muda Raja Ali ia diangkat sebagai penasihat raja yang berusaha menciptakan "agama yang teguh" di Kerajaan Riau. Hal yang sama juga dilakukan Yang Dipertuan Muda beriktunya, Raja Abdul Rahman. Ia menerima kehadiran beberapa orang ulama asal Bugis, yakni Kiyai Barenjang, Haji Shihabuddin, dan Haji Abu Bakar (Palawa, 2003: 107–108).

Kutipan *Tuhfat al-Nafis* mengenai orientasi keagamaan Raja Ja'far di atas menyebut kitab *Mir'at al-Tullab* yang sering dibaca Raja Ja'far. Sebagaimana diketahui kitab tersebut karangan seorang ulama terkemuka Aceh pada abad ke-17 Abdurrauf Singkel (1615–1693) dan diakui sebagai salah satu kitab Jawi generasi awal yang membahas masalah jurisprudensi Islam. Kitab ini ditulis atas permintaan penguasa Aceh Tajul Alam Safiatuddin, patronnya yang sekitar tahun 1661 M mengangkat Abdurrauf Singkel sebagai Kadi Malikul Adil Kerajaan Aceh. Kitab *Mir'at al-Tullab* menjadi pegangan utama dalam memutuskan masalah hukum kerajaan (Azra, 2004: 72–77; van Bruinessen, 1995: 113). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Kerajaan Riau telah menjadi bagian dinamika dan perkembangan Islam di Nusantara. Banyak ulama dengan kitab mereka yang digunakan bangsawan kerajaan Riau.

Raja Ali Haji, dan masyarakat terpelajar di Penyengat pada umumnya, menggunakan kitab-kitab standar sebagai materi pembelajaran Islam. Selain karya-karya yang telah disebut di atas beberapa karya penting dicatat, yakni *Bidayah al-Hidayah*, *Minhaj al-Abidin*, dan *Ihya Ulum al-Din* karya al-Ghazali (w.1111) yang dipergunakan sekitar tahun 1830-an; *Umm al-Barahin* karya al-Sanusi, *Jawahir al Tawhid* dan *Ithaf al-Murid* karya Ibrahim bin Ibrahim bin Hasan al-Laqani yang masing-masing digunakan tahun 1830-an dan tahun 1850-an; *Kitab al-Masadir* karya al-Zawzani, *al-'Awamil al-Mi'a* karya al-Jurjuni, *al-alfiyah fi al-Nawh* karya Ibn Malik (w. 1274), dan *al-Muqaddimah al-Jurmiyah* karya al-Jurrum yang digunakan tahun 1830-an; *Sirr al-Suluk illa Khidmat al-Malik al-Muluk* karya Syeikh Kasim Halabi dan *Bustan al-Arifin* karya Nasr Bin Muhammad al-Samarkandi yang digunakan tahun 1850-an; serta *Fath al-Wahab* karya Zakariyah Yahya al-Ansari. (Palawa, 2003: 108; Sham, 1987: 266–268).

Suasana keagamaan inilah yang menjadi landasan utama pembentukan pengetahuan dan orientasi cendekia Raja Ali Haji. Dia sangat akrab dengan tradisi cendekia Islam di Nusantara dan juga dunia Islam pada umumnya. Dengan berbekal pengetahuan yang diperoleh di Penyengat—di samping pengalamannya sebagai bangsawan Riau—Raja Ali Haji tampil sebagai cendekia yang berbicara untuk kepentingan kebangkitan Melayu dengan Islam sebagai esensi dan pilar utama. Dalam sejarah Melayu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Islam menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pembentukan kerajaan dan pada gilirannya perumusan sistem politik dan budaya Melayu. Sementara itu ulama menjadi kelompok sosial yang terlibat dalam kehidupan istana. Sebagai penasihat para raja, ulama berperan memperkuat implementasi ajaran Islam. Oleh karena itu sangat beralasan jika Raja Ali Haji merumuskan gerakan bagi kebangkitan budaya Melayu dengan meletakkan Islam pada posisi sentral. Islam menjadi faktor utama pendorong aktivitas dan kreativitas cendekia dan sekaligus mengangkat kebudayaan Melayu. Seorang budayawan Melayu Riau kontemporer Hasan Junus (1988: 10) berujar bahwa Islam merupakan prasyarat mutlak bagi kebangkitan budaya Melayu, sehingga tanpa unsur Islam Melayu "tidak lebih dari sebuah kebudayaan periferi yang tidak memperlihatkan mutu cendekia mengesankan".

Raja Ali Haji tampil sebagai seorang cendekia yang berakar kuat dalam pembelajaran Islam dan tradisi sastra Melayu. Di bawah bimbingan ayahnya, Raja Haji Ahmad, Raja Ali Haji memiliki hasrat besar dan usaha sungguh-sungguh untuk merekonstruksi sejarah Johor-Riau dan Kerajaan Melayu serta memahaminya dengan baik sesuai dengan tuntutan kondisi sosiologis dan politik yang dihadapinya pada abad ke-19. Hal itu menjadi landasan penting bagi corak pemikiran Raja Ali Haji. Ia meletakkan masa lalu kerajaannya sebagai unsur penting dari kerja kebudayaan yang dibuatnya sejalan perannya sebagai cendekia terdepan di Penyengat dan Kerajaan Riau pada umumnya. Corak pemikirannya terwujud dengan jelas dalam dua karya utamanya, yakni *Tuhfat al-Nafis* yang dan *Thamarat al-Muhimmat*. Dua karya ini mengungkap rumusan pemikiran dan juga sikap Raja Ali Haji terkait isu sosial-politik dan kebudayaan di kerajaan.

7. Penyengat di Pergantian Abad

Pengalaman Raja Ali Haji membawa Riau-Lingga memasuki dunia modern. Hal ini bisa dijelaskan melalui fakta bahwa karya Raja Ali Haji merupakan kitab pertama yang masuk dalam dunia percetakan. Pada mulanya karya-karya tersebut dicetak melalui majalah Belanda yang terbit di Batavia, kemudian di Penyengat dan di Lingga. *Syair Sultan Abdul Muluk* merupakan karya pertama yang diterbitkan di Batavia pada tahun 1847 M oleh Roorda van Eysinga, seorang hakim yang bertugas di Hindia Belanda dan hidup sezaman dengan Raja Ali Haji. Awalnya Roorda mengirim surat kepada Raja Ali Haji, yang segera dibalas dengan menyatakan bahwa ia menulis

syair itu dari sebuah karya prosa berjudul *Hikayat Sultan Abdul Muluk*. Karya tersebut dikirim kepada Roorda van Eysinga sebagai balasan hadiah *Hikayat Seri Rama* kepadanya (Shams, 1997: 41–2).

Karya lain yang juga diterbitkan dalam bentuk cetak adalah *Gurindam Dua Belas* dan diterbitkan oleh E. Netscher dalam majalah *TBG* (1854) dengan judul "De Twaalf Spreukgedichten, Een Maleisch gedicht door Radja Ali Hadji van Riouw, uitgegeven en van de vertaling en aanteekening voorzien". Teks ini dicetak dengan aksara Jawi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda (Shams, 1997: 42). Beberapa waktu kemudian para sarjana mendasarkan kajiannya pada edisi ini dengan menerbitkan kembali dalam bentuk edisi Rumi.

Penerbitan karya-karya Raja Ali sangat berpengaruh pada dunia penulisan di kalangan cendekia Melayu Riau. Gaya penulisan berikut pemikiran Raja Ali merambah semangat modern yang mulai muncul di Riau, khususnya di Penyengat. Sebagai "bapak cendekia" Melayu Riau, Raja Ali Haji menjadi sumber inspirasi bagi generasi cendekia berikutnya dan proses tersebut didukung oleh teknologi cetak, sehingga karya-karyanya bisa diakses secara lebih mudah. Salah satu cendekia Melayu Riau, Raja Ali Kelana, banyak dipengaruhi pemikiran Raja Ali Haji dalam.

Tidak diketahui kapan Raja Ali Kelana lahir, namun secara umum ia tumbuh dan berkarier di Penyengat akhir abad ke-19 M hingga dasawarsa pertama abad ke-20 M masa pemerintahan Yang Dipertuan Muda Raja Muhammad Yusuf (1857–1899 M) dan berlanjut masa Sultan Abdul Rahman (1844–1911 M). Pada rentang waktu itu ia menjalani proses pendidikan di Penyengat yang sudah menjadi pusat pembelajaran dan peradaban Islam di Riau-Lingga. Ia menjadi *kelana* (wakil) kedua penguasa tersebut, yang membuatnya terlibat dalam dinamika sosial-politik Kerajaan Riau-Lingga. Melalui jaringan dengan tokoh pembaruan Islam di Asia Tenggara ia tampil sebagai salah seorang tokoh "cendekia-aktivis" yang berada di balik gerakan budaya dan politik Melayu Riau-Lingga pada pergantian abad ke-19 ke abad ke-20. Jabatan itu berlangsung hingga tahun 1913 M ketika pemerintah kolonial Belanda menghapus Kerajaan Riau-Lingga. Ia kemudian mengabdi di Kerajaan Johor, Malaysia, dan meninggal di sana pada tahun 1925.

Pada masa Raja Ali Kelana tumbuh, yang diperkirakan sekitar tahun 1850-an hingga tahun 1860-an M, Penyengat berada di tengah perkembangan penting terkait perannya sebagai pusat pembelajaran Islam. Sejak pembangunan Mesjid Sultan Riau diselesaikan oleh Yang Dipertuan Muda Raja Ali (1844–1857 M), usaha untuk menarik para ulama dari Nusantara dan mancanegara terus dilakukan dan semakin berkembang pada masa kekuasaan Raja Muhammad Yusuf. Pada masa inilah Penyengat menyaksikkan

peredaran kitab-kitab baku yang dikenal di dunia muslim. Kitab *Ihya 'Ulum al-Din* karangan Al-Ghazali merupakan salah satu contoh. Kitab ini menjadi salah satu sumber Raja Ali Haji ketika menulis *Tsamarah al-Muhimmah*. Bisa dipastikan pula bahwa kitab al-Ghazali yang lain, *Bidayah al-Hidayah* dan *Minhaj al-Abidin*, juga beredar di Penyengat dan bahkan dipelajari oleh Raja Abdullah sebelum berangkat ke Mekkah (Sham, 1997: 36).[17]

Suasana demikian itulah yang melatarbelakangi lahirnya elit politik dan budaya Riau, termasuk Raja Ali Kelana. Sebagai bagian elit keluarga Yang Dipertuan Muda Bugis, Raja Ali Kelana melalui proses pendidikan yang berpusat di Mesjid Penyengat berikut kehadiran ulama yang sengaja diundang penguasa kerajaan untuk memberikan pembelajaran Islam (Ali Haji, 1982: 341–342). Oleh karena itu sangat mugkin Raja Ali Kelana mengkaji kitab-kitab berbahasa Arab di samping kitab-kitab karangan para ulama Nusantara, temasuk *Mir'at al-Tullab* yang ditulis ulama Aceh Abdurrauf Singkel (Ali Haji, 1982: 267; Sham, 1997: 37).

Raja Ali Kelana merupakan salah seorang yang secara langsung mengikuti proses kecendekiaan Raja Ali Haji dan karya-karyanya. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa karya Raja Ali Haji *Tuhfat al-Nafis* dan *Kitab Pengetahuan Bahasa*—di samping karya lain yang berbentuk syair—menjadi sumber pengetahuan dan karya Raja Ali Kelana, meski dalam format dan model yang berbeda, yakni *Pohon Perhimpunan* dan *Bukhiatul Aini fi Huruf fil Ma'ani*. Karya pertama merupakan catatan perjalanan ke Pulau Tujuh, sedang karya kedua berupa pelajaran tata bahasa Melayu. Dua karya itu, teristimewa *Pohon Pengetahuan*, sangat penting dalam perkembangan kecendekiaan Raja Ali Kelana.

Pohon Perhimpunan—dengan judul lengkap *Pohon Perhimpunan Pada Menyatakan Peri Pejalanan*—ditulis sebagai hasil kunjungan Raja Ali Kelana dalam kedudukannya sebagai *kelana* (wakil) Yang Dipertuan Muda Riau-Lingga Raja Muhammad Yusuf di wilayah yang saat ini menjadi bagian Kabupaten Natuna dan Anambas, Kepulauan Riau. Teks yang ditulis pada tahun 1313 H (1896 M) ini kemudian dicetak Matba'ah al-Riauwiyah di Pulau Penyengat pada tahun 1315 H (1898 M). Bagian pendahuluan menyebutkan "dengan perintah itu (Yang Dipertuan Muda) bagi hamba memeriksa dan mensiasati hal ihwal di Pulau Tujuh di sebelah Laut Cina yang di bawah kuasa dan naungan Kerajaan Lingga-Riau serta daerah takluk sekalian". Raja Ali Kelana juga mencatat bahwa "ini pada mengatakan dan menghimpunkan tiap-tiap satu hari yang adalah hamba di dalamnya serta menyatakan segala hal ihwal yang didapati sepanjang perjalanan itu daripada awal pergi dan kembalinya" (Ali Kelana, 1898: 2).

Pohon Perhimpunan memang dibuat menyerupai *diary* (catatan harian) Raja Ali Kelana selama bertugas di Pulau Tujuh. Catatan

perjalanan dibagi menjadi limabelas bagian, dengan setiap bagian menyebutkan tempat dan waktu keberangkatan (hari, tanggal, dan bulan). Pada Perjalanan Pertama, misalnya, ditulis di Pelabuhan Tanjung Pinang hari Rabu 6 Ramadhan 1313 H, bertepatan dengan 19 Februari 1896. Pola yang sama berlaku pada bagian perjalanan berikutnya hingga Perjalanan Kelimabelas, yang ditulis di Tambalan pada tanggal 21 Ramadhan H, yang bertepatan dengan tanggal 4 Maret. Ia juga mencatat waktu (jam) dimulai perjalanan di setiap tempat setelah beristirahat selama semalam. Cara penyajian catatan perjalanan ini memperlihatkan pola baru penulisan yang lebih memperhatikan baik aspek-aspek "keakuan" (penyebutan nama penulis bahkan dengan fotonya), kepekaan atas suasana lingkungan sosial-politik dan budaya yang ditemukan (termasuk disajikan dengan foto), maupun persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sekitar. Dengan demikian, meski ditulis seorang elit politik Kerajaan Riau-Lingga, *Pohon Perhimpunan* jauh dari pola penulisan sastra keraton yang dikenal sangat berorientasi raja.

Adapun *Bukhiatul Aini fi Huruf fil Ma'ani* berisi tata bahasa, lebih tepatnya tentang huruf atau bunyi. Sesuai denggan subjudulnya, "Cita-cita bagi yang Berkehendak Mengenal Huruf-huruf yang Patut", karya ini membicarakan makna setiap huruf. Raja Ali Kelana membahas pergeseran bunyi dan akibat pergeseran tersebut terhadap makna setiap huruf (Hamidy, 1981: 27–28). Di samping kedua karya di atas Raja Ali Kelana juga menulis *Percakapan Si Bakhil*, yang berisi pembahasan etika keislaman, terutama pengaruh negatif sifat dan perilaku bakhil dalam kehidupan masyarakat (Hamidy, 1981: 28).

Selain sebagai *kelana*, Raja Ali Kelana juga tampil sebagai tokoh penting di balik gerakan politik dan budaya Melayu di Kerajaan Riau-Lingga. Ia merupakan salah seorang yang memprakarsai lahirnya Rusydiyah Club pada tahun 1892 M, dan beberapa lembaga lain terkait, yang menjadi wadah kelembagaan gerakan budaya dan politik Melayu Riau pada masa itu. Banyak karya cendekia-keagamaan lahir pada masa itu dengan semangat baru yang bersumber dari modernisme, yang menandai kebangkitan apa yang sering disebut sebagai "kepengarangan Melayu Riau". Raja Ali Kelana mendorong elit politik dan juga cendekia Melayu Riau terlibat secara intensif menjawab tantangan baru menyusul perubahan sosial-politik dan budaya seiring proses modernisasi yang diperkenalkan pemerintah kolonial.

Rusydiyah Club, sebagaimana dikatakan Hamidy (1983: 27), tidak bisa dipahami sepenuhnya sebagaimana organisasi yang kita kenal dewasa ini. Data-data yang ada sangat tidak memadai untuk memberi gambaran utuh terkait bentuk resmi lembaga tersebut. Pada awalnya Rusydiyah Club berakar pada Ahli Musyawarah keluarga Kerajaan Riau-Lingga, teristimewa keluarga Yang Dipertuan Muda yang berpusat di Pulau Penyengat. Baru beberapa tahun kemudian, seiring terbentuknya kelas terpelajar di Riau-

Lingga, Rusydiyah Club tampil sebagai pusat gerakan politik dan cendekia-keagamaan. Dari beberapa kegiatannya, Rusydiyah Club dapat dianggap sebagai sebuah lembaga kebudayaan dan berfungsi sebagai sebuah "kelompok penekan". Dalam *Taman Penghiburan* (1313 H/1896 M), terbitan Mathba'at al-Riauwiyah, terdapat nama-nama pengelola dan anggota perhimpunan. Raja Ali Kelana dan Raja Khalid al-Khaitami atau Raja Khitam Khalid berada pada posisi terpenting di samping Sayyid Syaikh al-Hadi. Pengaruh perhimpunan ini memacu kemunculan jurnal *al-Imam* pada tahun 1906 M di Singapura. Tengku Usman, putra Sultan Abdul Rahman dan menantu Raja Ali Kelana yang baru pulang belajar di Mesir, berpidato di Rusydiyah Club, mengkritik pemerintah Hindia-Belanda dan ayahandanya. Pidato ini kemudian dimuat dalam jurnal *al-Imam* (17 November 1906) di Singapura.

Munculnya kelas terpelajar di Riau sebagian besar melalui sekolah-sekolah agama yang ada pada saat itu. Dari lembaga pendidikan inilah mereka kemudian memperluas ilmu pengetahuan melalui bahasa Melayu dan bahasa Arab. Selain itu sebagian dari mereka memperdalam ilmu kepada guru-guru yang diundang dari berbagai daerah dan negara muslim. Tidak sedikit di antara mereka melanjutkan pendidikan ke Kairo, Mesir, dan Mekkah. Pengalaman belajar melalui kitab-kitab berbahasa Arab berikut pengembaran membuat mereka menjadi orang berpengaruh saat kembali ke daerah asal (Hamidy, 1983: 28).

Keanggotaan Rusydiyah Club terdiri dari Lid Muda (anggota yunior) dan Lid Rusydiah (anggota senior). Salah satu persyaratan agar anggota Lid Muda (anggota persiapan) dapat menjadi anggota Lid Rusydiah (anggota penuh) harus dapat melahirkan karya tulis yang dinilai layak. Sistem keanggotaan semacam ini memberi dorongan di kalangan anggota muda untuk melahirkan karya dan pada gilirannya melahirkan sejumlah pengarang di Melayu-Riau (Shams, 1983). Jumlah anggota organisasi ini tidak diketahu dengan pasti, tetapi kalau dilihat dari jumlah pengarang yang ada di kawasan Melayu Riau saat itu meliputi 70 orang (33 orang lelaki dan 4 orang wanita) dengan jati diri Melayu-Riau dan 33 orang berasal dari luar Riau. Dengan demikian dapat diperkiran jumlah anggota Rusydiah Club sejak didirikannya hingga tahun 1913 lebih kurang 100 orang.

Dalam ranah politik Rusydiyah Club berfungsi semacam penasihat dan pembantu Sultan dan Yang Dipertuan Muda Riau. Fungsi ini terutama dalam bentuk pengambilan keputusan dan tindakan yang menyangkut keselamatan kerajaan. Sudah tentu tidak semua anggota perkumpulan dapat ambil bagian dalam fungsi tersebut. Keterbatasan ini sebagian disebabkan oleh keahlian para anggota Rusydiyah Club yang berbeda, sedang sebagian lain dibatasi oleh jarak hubungan dengan para penguasa kerajaan: hubungan langsung digunakan sebagai ukuran dapat atau tidak dapat dipercaya oleh pihak kerajaan. Untuk memudahkan kontak semacam itu tentu diperlukan jarak yang relatif pendek dengan istana. Jika demikian

halnya, maka sangat beralasan bahwa kantor Rusydiyah Club terletak hanya beberapa meter dari istana Yang Dipertuan Muda di Pulau Penyengat (Hamidy, 1983: 28).

Kegiatan Rusydiyah Club di bidang politik agak tersembunyi, yang hanya dapat diketahui secara samar-samar, karena kegiatan itu merupakan kegiatan rahasia agar tidak diketahui pihak Belanda. Para anggotanya, termasuk buah karyanya, besar kemungkinan dirahasiakan demi keselamatan, dan terutama demi keberhasilan perjuangan mereka menentang Belanda. Inilah salah satu faktor mengapa tidak ada keterangan dan bukti memadai tentang perkumpulan tersebut. Sementara itu pihak kerajaan menyerahkan urusan ketatanegaraan kepada tenaga ahli Rusydiyah Club. Oleh karena itu sangat mungkin *Kanun Kerajaan Riau* dan *Undang-Undang Polisi Kerajaan Riau* dikerjakan oleh para ahli Rusydiyah Club (Hamidy, 1983: 29)

Di pihak lain kegiatan di bidang keagamaan juga menjadi konsentrasi Rusydiyah Club. Hal ini tentu tidak mengherankan. Sebagian besar orang-orang terkemuka di Riau pada zaman itu, dan juga di daerah lain, merupakan ulama terkemuka. Catatan lepas Rusydiyah Club menunjukkan bahwa perkumpulan ini menyelenggaraan diskusi tentang isu Islam di rumah-rumah para anggotanya. Kegiatan berupa kontak langsung kaum cendikiawan dengan masyarakat, karena setiap diskusi keislaman mengundang anggota masyarakat (Hamidy, 1983: 30). Untuk memenuhi kepentingan kegiatan ini Rusydiyah Club menerbitkan kitab *Khutbah Jumat* untuk Kerajaan Riau. Begitupun kitab-kitab lain, di antaranya *Risalat al-Fawaid al-Wafiat fi Syarh Ma'ana al-Tahiyat* dan *Kafiat al-Zikr 'ala Tariqah al-Naqsabandiyah*. Beberapa kitab karangan Said Abdullah Zawawi, seorang ulama sahabat Snouck Hurgronje saat di Mekkah, bahkan diterjemahkan Rusydiyah Club untuk memperluas cakrawala pemikiran Islam (Sham, 1997: 47).

Dalam bidang kebudayaan Rusydiyah Cub mengutamakan kegiatan dalam bidang bahasa dan sastra. Dalam hal ini perkumpulan tersebut memberi sumbangan sangat besar bagi pembinaan bahasa dan sastra Melayu. Mereka memiliki hubungan dengan tokoh sebelumnya, yakni Raja Ali Haji. Bait-bait *Gurindam Dua Belas* menjadi semboyan dan catatan harian kaum cendikiawan Rusydiyah Club. Dari perspektif ini kaum cendikiawan Riau menghargai dan meneruskan usaha yang telah dilakukan Raja Ali Haji dalam bidang bahasa dan sastra. Mereka sangat menghormati generasi cendekia Riau sebelumnya, sebagaimana disarankan salah satu bait *Gurindam Dua Belas*, bahwa kehormatan terutama bukan dalam bentuk lahiriah melainkan dalam hakikatnya (Hamidy, 1983: 30; Sham, 1997: 42–3).

Pada tahun 1894 M Pulau Peyengat menyaksikan berdirinya suatu percetakan yang berperan penting dalam perkembangan program

dan usaha sosial-cendekia Rusydiyah Club dan cendekia Melayu Riau pada umumnya. Memang dunia percetakan (lithografi) bukan sesuatu yang baru bagi kaum cendekia Penyengat. Mereka mengetahui bahwa karya-karya Raja Ali Haji sudah dicetak oleh percetakan Belanda di Batavia hampir limapuluh tahun sebelumnya. Oleh karena itu percetakan yang berdiri pada tahun 1894 M itu merupakan langkah penting yang diambil kaum cendekia Riau dalam Rusydiyah Club sebagai upaya memperkuat laju gerakan budaya Melayu. Hal itu sejalan dengan tantangan baru yang muncul di tengah perubahan menyusul perubahan sosial-politik dan budaya modern yang didorong pihak kolonial.

Percetakan itu bernama Mathba't al-Riauwiyah, atau sering disebut Mathba'at al-Ahmadiyah, khusus digunakan untuk kepentingan kerajaan. Sudah barang tentu percetakan itu telah berperan penting dalam pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk bahasa dan sastra yang banyak diminati anggota Rusydiyah Club. Berkat percetakan tersebut karya kaum cendekia Melayu Riau dengan mudah dapat diterbitkan dan dengan demikian semua hasil perenungan, pemikiran, dan cita-cita mereka dapat mencapai masyarakat luas. Rusydiyah Club juga mendorong kreativitas anggotanya melahirkan karya dalam bentuk karangan, dalam bidang apa pun, sesuai dengan minat dan keahlian masing-masing. Dorongan tersebut tampaknya berhasil. Beberapa anggota melahirkan karya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.

Sebelum Percetakan Mathba't al-Riauwiyah berdiri di Kerajaan Riau-Lingga telah berdiri percetakan kerajaan yang dikenal dengan nama Rumah Cap Kerajaan, yang di Singapura dikenal dengan nama Straits Printing Office. Percetakan ini didirikan di Daik, Lingga, ketika wilayah itu menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau-Lingga. Tidak diketahui kapan Rumah Cap Kerajaan berdiri, tetapi besar kemungkinan pada tahun 1885 M atau dalam rentang waktu antara tahun 1850 dan tahun 1890 M (Hamidy, 1983: 68).

Di samping percetakan juga berdiri perpustakaan, dengan nama Kutub Khanah Yamtuan Ahmadi. Perpustakaan tersebut lahir atas prakarsa Raja Muhammad Yusuf, Yang Dipertuan Muda Riau kesepuluh (1858–1899 M). Setelah Raja Muhammad Yusuf meninggal perpustakaan itu dikenal dengan nama Kutub Khanah Marhum (Junus, 1988: 147). Koleksi perpustakaan tersebut sangat lengkap—bahkan bisa jadi yang terbesar di Riau-Johor pada masa itu—terdiri atas buku-buku berbahasa Melayu dan buku-buku bebahasa Arab. Buku berbahasa Arab khusus dipesan Yang Dipertuan Muda dari Kairo, Mesir, dan India, yang meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan dalam Islam: fikih, tafsir, tasawuf, dan filsafat, termasuk kitab *al-Qanun* karangan Ibnu Sina (Matheson, 1988: 162; Hamidy, 1983: 28).

Raja Muhammad Yusuf membelanjakan tidak kurang dari sepuluh ribu gulden untuk membeli buku. Buku-buku tersebut bisa dinikmati kaum cendekia Riau yang mengerti bahasa Arab, bahkan masih digunakan murid sekolah Arab al-Mu'allimin al-'Arabiyah di Penyengat (Sham, 1997: 46). Kini sisa-sisa koleksi perpustakaan tersebut berjumlah sekitar 45 kitab, tersimpan di Mesjid Raya Penyengat. Perpustakaan itu memberi peluang kaum cendekia Riau menambah ilmu pengetahuan, sehingga melahirkan karya-karya bermutu. Selain itu, karena sebagian besar koleksi perpustakaan tentang agama Islam, maka tumbuh kecenderungan pengarang Riau melahirkan karya-karya keagamaan, di samping karya-karya bahasa dan sastra.

8. Akhir Kerajaan

Pada dasawarsa pertama abad ke-20, sejalan dengan cengkeraman Belanda di Kerajaan Riau-Lingga, kelompok cendekia Rusydiyah Club menjadi *pressure group* (kelompok penekan) mengadapi kebijakan-kebijakan pemeritahan kolonial. Akhirnya Rusydiah Club terlibat langsung dalam dunia politik praktis. Pada tahun 1902, misalnya, Rusydiyah Club mengusulkan agar kerajaan membentuk pasukan suka rela, yang diawali dengan pembentukan korp musik. Belakangan kegiatan itu dilarang oleh pemerintahan Hindia Belanda. Di samping itu Rusydiyah Club melakukan pertemuan-pertemuan rahasia guna menanggapi perkembangan politik pada saat.[18]

Sikap politik Rusydiyah Club semakin menguat ketika Belanda semakin jauh mencampuri urusan dalam kerajaan, di antaranya terkait posisi Yang Dipertuan Muda. Sepeninggal Raja Muhammad Yusuf pada tahun 1899 M Pemerintah Belanda tidak mengangkat penggantinya. Jabatan tesebut digabung dengan kesultanan, yang diduduki Abdul Rahman Mu'azzam Syah (1899–1911 m). Jabatan Yang Dipertuan Muda yang sedianya dipegang Raja Ali Kelana tertutup. Belanda justru menerapkan kebijakan yang mengarah pada penghancuran Riau-Johor. Pada tahun 1911 M Sultan Riau-Lingga dimakzulkan dengan alasan Kontrak Politik 1905. Dua tahun kemudian, yakni tahun 1913, Belanda secara resmi membubarkan Kerajaan Riau-Lingga. Maka sejak itu Kerajaan Riau-Lingga terhapus dari peta bumi politik Nusantara.

Sebagai catatan, sejak perjanjian pertama antara pihak Belanda (VOC) dan Kerajaan Riau-Lingga pada tahun 1784 M hingga menjadi penguasa kolonial, pihak Belanda menuduh pihak Kerajaan Riau-Lingga senantiasa berusaha menyingkirkan kekuatan Belanda dengan berbagai cara. Riau-Lingga dianggap selalu mengingkari janji yang tertera dalam Kontrak Politik. Pelanggaran ini ditegaskan kembali oleh pihak Belanda terhadap kerajaan Riau-Lingga. Dengan alasan tersebut Belanda perlu mengambil kebijakan membubarkan Kerajaan Riau-Lingga (Hamidy, 1983: 71).

Sementara itu, pada saat yang sama, pihak Kerajaan Riau-Lingga mencari bantuan internasional. Pada tahun 1904–1905 M Kerajaan Melayu Riau mengirim Raja Ali Kelana menemui Sultan Istanbul (Turki), namun upaya itu tidak berhasil. Selanjutnya pada tahun 1905 M pihak Kerajaan Riau-Lingga menemui konsul Jepang di Singapura. Upaya diplomasi ini diteruskan pada tahun 1912 dan kemudian pada 1913 M dengan mengirim Raja Khalid Hitam ke Jepang untuk menemui Maharaja Jepang guna minta bantuan menghadapi Belanda. Upaya ini pun gagal. Raja Khalid Hitam bahkan terbunuh secara misterius di Jepang pada tanggal 11 Maret 1914, yang diduga kuat dilakukan oleh mata-mata Belanda (Hamidy, 1983: 29; Andaya, 1977: 153–4).

Pada awal dasawarsa kedua abad ke-20 kegiatan persuratan cendekia Melayu-Riau mulai tidak terorganisir. Kegiatan intelektual yang semula bersifat kelembangaan bergeser menjadi kegiatan sporadis perorangan. Seiring dengan itu Kerajaan Melayu Riau semakin lemah, hingga akhiranya pada 1 Maret 1913 pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan keputusan membubarkan Kerajaan Melayu Riau dari peta Nusantara. Dalam keadaan seperti itu sultan dan pembesar kerajaan meninggalkan Riau menuju ke Johor dan Singapura.

(Endnotes)

1 Sumber-sumber Belanda mencatat bahwa dua kerajaan ini (Johor dan Aceh) dibiarkan dalam kondisi dan perkembangan masing-masing: yang satu (Johor) terus bergerak maju sementara yang lain (Aceh) dalam keadaan menurun, bahkan VOC berusaha menghalangi kemungkinan terjalinnya hubungan erat dan kerjasama antardua kerajaan tersebut, termasuk rumor yang beredar bahwa penguasa Johor Sultan Abdul Jalil Ri'ayat Shah dikabarkan akan menikah dengan ratu Aceh. Lihat *Dagh-Register 1640–41*: 7 September 1641, *pp.* 423–424; lihat pula Andaya (1975: 60).

2 Dalam perjanjian sebelumnya disepakati bahwa "semua kapal Johor yang berlayar di barat Malaka harus berhenti di kota Malaka guna memperoleh izin berlayar, tetapi barang muatannya tidak harus diperiksa dan dibongkar, dijual atau membayar tarif tol. Semua kapal Johor tidak melewati Malaka tidak diwajibkan izin, tetapi untuk kapal yang berlayar ke Jambi, Jawa, Pahang, Patani, Ligor, Siam, Kamboja, dan Kochin China dan tempat lain yang jauh menjadi kebijakan Gubernur Jenderal VOC di Batavia" (Andaya, 1975: 61–2).

3 Kedatangan VOC Claas de Wind juga disebut dalam teks *Peringatan Sejarah Negeri Johor*, dengan menekankan bahwa saat kedatangan utusan VOC tersebut pada 1158 H (1745 M), Sultan Sulaiman telah memasuki usia 45 tahun dan berkuasa selama 24 tahun (Kratz, 1973: 43). Hal ini menunjukkan fakta bahwa Sultan Sulaiman saat itu telah berkuasa penuh di Riau-Johor dan siap melakukan langkah politik strategis, termasuk menyerang kerajaan Siak sebagai musuh utamanya, dan sekaligus menunjukkan kekuasaan politiknya di hadapan Yang Dipertuan Muda Bugis di Riau-Johor.

4 Berikut adalah kutipan dari *Tuhfat al-Nafis* terkait apa yang dilakukan Daeng Cellak: "Syahdan pada masa inilah Yang Dipertuan Muda Opu Daeng Cellak menyuruh penggawa Tarum dan Penghulu … mengambil benih gambir di sebelah tanah Pulau Perca dibawa ke Riau memulai bertanam gambir. Maka bertanamlah segala Bugis-Bugis dan Melayu membuat beberapa ratus lading gambir. Adalah kuli memasaknya yaitu segala Cina yang dating dari negeri Cina. Maka apabila jadilah gambir itu makin ramailah negeri Johor karena segala dagang-dagang itu berpalu-palu dagangannya itu dengan gambir. Maka Sultan Sulaiman serta Yang Dipertuan Muda pun banyaklah dapat hasilnya adanya" (Ali Haji 1982: 122).

5 Teks *Tuhfat al-Nafis* menggambarkan susana ketika elit Melayu Riau-Johor memohon kepada Daeng Kamboja untuk membayar hutang Sultan Sulaiman kepada VOC sebagai berikut: "Syahdan apabila Datuk Bendahara mendengar kata Kapten Kapal [VOC] itu kesesakanlah ia, sebab tiada dapat hendak musyawarah lagi dan Raja Kecik Trengganu pun sudah balik ke Trengganu, karena ia punya honar sampai jadi demikian ini. Maka berkata pula Bendahara kepada Yang Dipertuan Muda, Allah! Allah! Janganlah abang kenangkan saya semua ini, melainkan abang pandang sajalah kepada intan gemala kita, yang piatu itu dari pada waris amanah pertaruhan marhum kepada abang serta saya semua ini. Adapun Johor dan Riau serta segala takluk daerahnya dipulangkan kepada abang dan abanglah yang memerintahnya serta kaum abang selama-lamanya dengan mufakat serta tulus ikhlas, relalah saya semualah kepada abang adik beradik, anak beranak" (Ali Haji 1982: 157).

6 Dalam *Tuhfat al-Nafis* diceritakan bahwa Sultan Ahmad meninggal tidak lama setelah Daeng Kamboja membayar hutang Sultan Salaiman kepada VOC. Daeng Kamboja segera mengangkat saudaranya Raja Mahmud menjadi Sultan Riau-Johor, yang disepakati baik oleh elit Melayu maupun Bugis. Kejadian ini berlangsung di tahun yang sama, 1761.

7 *Tuhfat al-Nafis* mencatat bahwa bahwa Temenggung dan Bendahara di kerajaan Riau-Johor adalah pihak Melayu yang selalu berbuat onar, dengan mengirim surat kepada Raja Trengganu bahwa Bugis akan membunuh dan menghapus suku Melayu di Riau. Selain itu teks tersebut juga menyebut adanya ancaman yang terus hidup dari Siak di bawah

Raja Ismail dan Raja Trengganu untuk menyerang Riau. Hanya saja, demikian *Tuhfat al-Nafis*, semua fitnah dan ancaman tersebut kalah dengan keberhasilannya membangun negeri, sebagaiman dikatakan Daeng Kamboja "Jika kalau begitu sekali ini aku perbuatlah mana-mana yang jadi kebajikan kepada aku, tiada aku hiraukan lagi dan tiada lagi aku perdulikan jika benci marahnya aku perbuat juga seperti kehendakku" (Ali Haji 1982: 168).

8 Beberapa masa menjelang pengangkatannya sebagai Yang Dipertuan Muda, Raja Haji yang tinggal di Selangor terlibat dalam perang melawan Kedah. Ia berhasil menaklukkan Kedah di bawah Riau-Johor. Selanjutnya Raja Haji memimpin misi persahabatan dengan Pangeran Adiwijaya di Mempawah, Kalimantan, putra Opu Daeng Menambun. Selain untuk mempererat hubungan sesama Bugis, kunjungan ke Mempawah dilakukan dalam rangka membantu Pangeran Syarif Abdul Rahman bin Sayyid Syarif Husin al-Kadri di Pontianak yang diperangi oleh Panembahan Sanggau saat dia hendak berniaga ke Sengkadau. Masih terkait dengan hubungan etnis Bugis, yakni Pangeran Syarif Abdul Rahman berisitri Opu Daeng Manambun, Raja Raja Haji membantu memerangi Panembahan Sanggau. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Raja Haji mengangkat Pangeran Syarif Abdul Rahman sebagai Sultan Pontianak. Ia tengah berada di Pontianak saat Daeng Kamboja meninggal (Ali Haji, 1982: 184–195).

9 Raja Haji, bersama Sultan Ibrahim di Selangor, juga dikabarkan mengirim utusan khusus ke Bone di Sulawesi untuk menjalin persahabatan dan saling membantu jika diperlukan. Hal ini tentu saja menarik perhatian VOC, yang berasumsi bahwa Raja Haji tengah membuat aliansi kekuatan yang melibatkan Bugis di Sulawesi dan yang di Melayu. Lihat Koh (2007: 77).

10 Dalam surat balasannya ke Malaka tertanggal 4 Maret 1779 Raja Haji mengakui berlangsungnya perdagangan terlarang atas sejumlah barang (opium, timah, lada, dan cengkeh, dan kacang) yang telah berlangsung lama. Hingga saat itu barang-barang terlarang tersebut masih terus didatangkan dari wilayah pendudukan maskapai dagang, sehingga VOC tampak menerima dan menyetujui terjadinya proses perdagangan tersebut. Jika tidak, tindakan serius pasti dibuat VOC untuk menyetop perdagangan terlarang itu. Sebaliknya VOC membiarkan pedagang Eropa dan dan pedagang setempat mengeskpor barang-barang yang dilarang VOC dan membawanya ke Riau. Lihat Vos (1993: 127).

11 Dalam *Tuhfat al-Nafis*, kelompok Melayu (bendahara, temenggung, dan Raja Indra Bungsu) ditambah Raja Tua menghendaki Raja Ja'far yang masih "belum remaja" menjadi Yang Dipetuan Muda dengan alasan "anak-anak menerima apa yang dikehendaki mereka itu". Sementara kelompok Bugis (Raja Ali dan Raja Abdul Samad) mendatangi Sultan Mahmud untuk bertanya siapa yang patut menjadi Yang Dipertuan Muda. Maka jawab Sultan Mahmud, "Siapa lagi yang lain dari pada Raja Ali yang patutnya karena Raja Ali pada masa ini terlebih tua dari yang lainnya" (Ali Haji, 1982: 214–5).

12 Lihat ANRI (1970: 1–10); Netscher (1870: 196–7), dan Koh (2007: 86–7).

13 Lihat ANRI (1970: 12–30) untuk penjelasan detail perjanjian ini dan Koh (2007: 87–8). Lihat juga Ali Haji (1982: 216–7).

14 Ilanun merupakan kelompok etnis di Kesultanan Sulu yang memegang kekuatan ekonomi tetapi tidak pernah berkembang menjadi kekuatan politiik yang berarti. Awalnya mereka tinggal di pedalaman Mindanau, tetapi setelah Gunung Merapi pada tahun 1765 mereka tinggal di berbagai tempat di sekitar perairan Sulu sebagai perompak. Lihat Vos (1993: 182, catatan 60).

15 Setelah beberapa bulan tinggal di Lingga, Sutan Mahmud berusaha membangun kembali hubungan dengan VOC. Dia emintan bantuan Bendahara Pahang mengirim surat ke Malaka berisi permohonan rekonsiliasi dengan VOC. Raja Ibrahim Selangor dan Sultan Mansyur

Trengganu pun menjadi penghubung Sultan Mahmud dan Gubernur Malaka, namun gagal. VOC, melalui Gubernur van Braam, menolak berhubungan kembali dengan Sultan Mahmud, seraya menyebutnya sebagai penghianat, tidak setia, dan tidak tahu berterimakasih. Lihat Vos (1993: 191–2), Ali Haji (1982: 227–8), dan Netscher (1870: 222).

16 *Tuhfat al-Nafis* menggambarkan perkembangan Lingga dan Riau sebagai berikut: "Syahdan apabila sudah selesai baginda menetapkan negeri Riau itu, maka baginda pun berangkatlah ke negeri Lingga, membetulkan negeri Lingga pula serta mengeluarkan hasil daripada timah-timah pulau Singkep, diaturkan bahagian makanan orang besar-besar dan orang baik-baik yang di dalam Lingga. Maka ramailah negeri Lingga dengan masuk beberapa perahu dari Jawa dan wangkang-wangkang dari Cina dan dari Siam dan lain-lainnya. Syahdan adapun negeri Riau itu, yaitu Yang Dipertuan Muda Raja Alilah memerintahkannya sebagaimana adat pemerintahan Yang Dipertuan Muda. Maka membuatlah ia istana di Pulau Bayan dan duduklah ia menuntut ilmu berbuat ibadah. Adalah gurunya itu satu orang Mandura namanya Shaykh Abdul Ghafur, adalah tarekatnya Khalwatiyyah. Maka bersama-sama ia berbuat ibadah dengan Shaykh Abdul Ghafur itu serta meramaikan negeri Riau dengan perdagangan adanya" (Ali Haji, 1982: 255).

17 Kitab lain yang juga diacu Raja Ali Haji dalam *Tsamarah al-Muhimmah* adalah kitab *Fath al-Wahhab* karya Zakaria Yahya Ansari dan *Fath al-Muin*. Lihat juga Sham (1997: 37).

18 Misalnya, pertemuan rahasia pada 10 Pebruari 1904 di kediaman Raja Ali Kelana guna membahasa tekanan-takanan pihak Belanda yang semakin genjar, seperti rencana Belanda ingin menghapus kerajaan Melayu-Riau sekaligus menjadikan tempat strategis sebagai basis untuk membendung pengaruh Inggris di Singapura. Pada pertemuan berikutnya, 15 Pebruari 1904 Rusyidah Club membahas situasi politik internasional, sebagaimana dicatat oleh Encik Abdullah dalam Buku Hariannya, yaitu kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia. Berikutanya, organisaisi ini menerbitkan brosur yang mengulas kemenangan Jepang atas Rusia sebagai kemenangan bangsa Asia atas bangsa Barat, dan persistiwa itu sangat mempengaruhi kesadaran politik bangsa untuk merebut kemerdekaannya dari bangsa-bangsa Barat.

— 9 —

Kesultanan Palembang

Palembang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan Islam di Nusantara, yang jejaknya bisa dilacak sejak abad ke-7 M ketika masih menjadi ibukota kerajaan Śrîwijaya. Pada masa itu Palembang telah disinggahi para pedagang muslim dari mancanegara bersama para pedagang Cina dan India untuk mencari hasil alam yang laku di pasar internasional. Selain letaknya yang strategis dalam jaringan perdagangan Asia, sikap penguasa Śrîwijaya yang ramah kepada para pedagang dan masyarakat internasional mendukung perkembangan Palembang sebagai kota pelabuhan yang ramai dan kosmopolit (Wolters, 1970: 250). Di samping itu kota-dagang tersebut juga didukung ketersediaan pasokan barang-barang dagangan dari wilayah pedalaman melalui jalur sungai. Palembang dikenal sebagai penghasil beras, kapas, lilin, gambir, lada, emas, dan berbagai mata dagangan lain (Pires, 1944 [I]: 155–156).

Śrîwijaya dikenal baik di kalangan dunia Arab dan Persia, yang disebut dengan istilah Zabaj atau Zabag. Banyak pedagang muslim dari Arab dan Persia yang singgah dan tinggal di Zabaj serta membangun kelompok sosial yang penting dalam gerak perdagangan maritim. Zabaj atau Zabag di Nusantara terkait dalam peta perniagaan dari India di selatan dengan Cina sebagai gerbang menuju dunia Arab dan Persia (Wade, 2011: 387–8). Dalam suasana demikian Islam mulai dikenal di Palembang, terutama di kota pelabuhan yang menjadi pusat permukiman kelompok pedagang internasional. Penguasa Śrîwijaya konsisten dengan sikap ramah kepada pedagang mancanegera, sehingga mengizinkan pedagang muslim menjalankan ajaran agama mereka (Rahim, 1998: 50).

Meski secara resmi menganut agama Budha, dan bahkan menjadi pusat pembejaran agama tersbut (Utomo, 2012: 84–85), Śrîwijaya terbuka pada kehadiran agama lain, khususnya pedagang muslim Arab dan Persia. Mereka menjadi bagian dari kelompok pedagang yang berkunjung, bahkan bermukim, untuk urusan perniagaan. Oleh karena itu jejak-jejak kehadiran muslim masa awal di Nusantara sebagian terkait dengan Śrîwijaya sebagai pusat kegiatan perniagaan internasional. Meski tidak dapat dijelaskan dalam kerangka pengislaman, para pedagang tersebut setidaknya telah menjadikan wilayah barat Nusantara ini mulai akrab dengan masyarakat dan budaya Islam.

Dalam kaitan perdagangan Arab, Persia, Śrîwijaya, dan Cina terdapat istilah *po-ssu*. Wolters (1967: 130–133) menyebutkan bahwa istilah

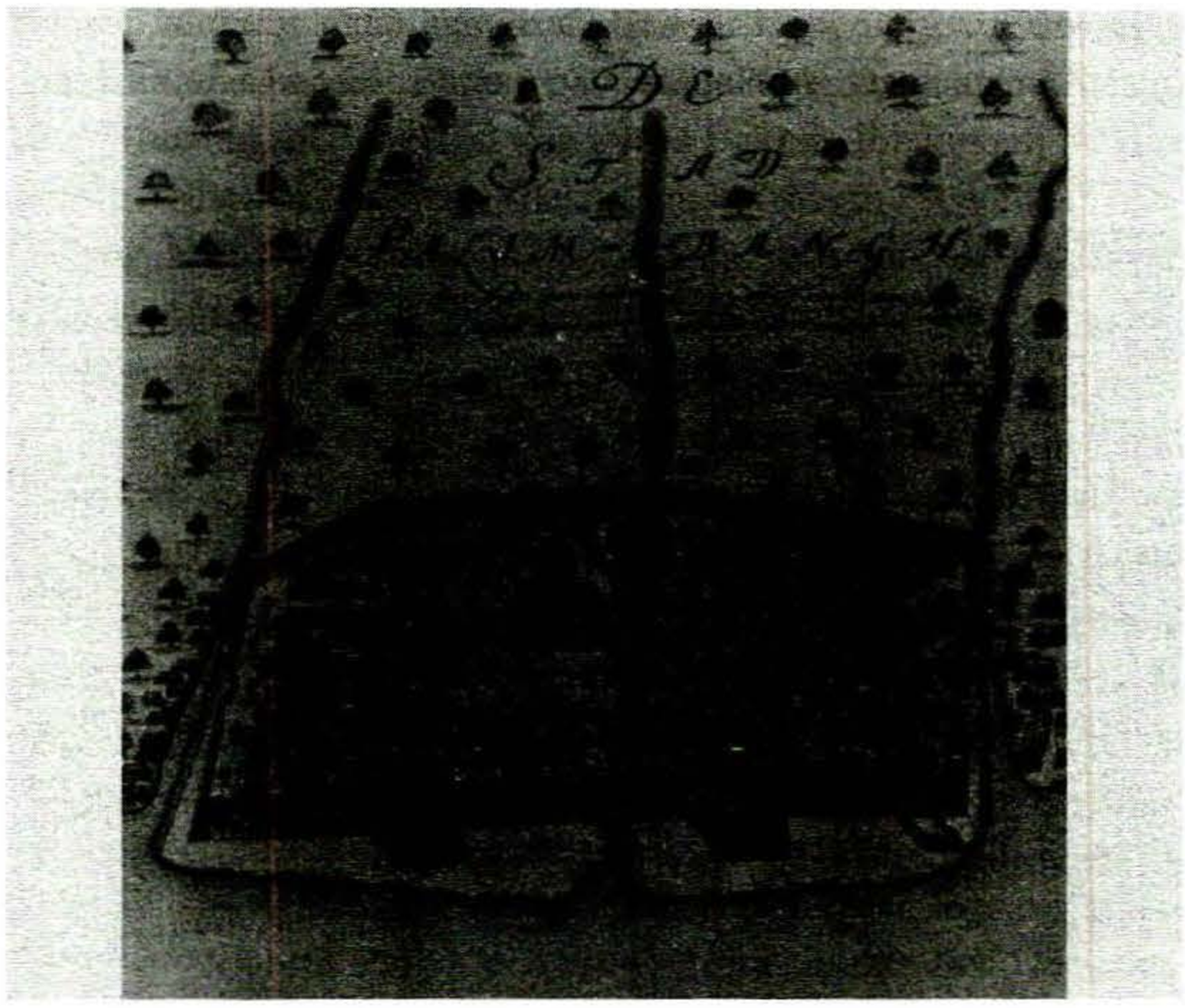

Gambaran Palembang dari atas
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

po-ssu muncul dalam teks Cina *Kuang chou chi* dan *Nan chou chi.* Istilah itu merujuk pada produk kacang-kacangan yang berasal dari Persia. Produk tersebut dibawa ke Cina melalui pelabuhan Śrîwijaya, sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa *po-ssu* berasal dari Nusantara. Hal itu menjadi bukti yang mempertegas bahwa Śrîwijaya menjadi tempat transaksi perdagangan antara pedagang Persia, Arab, dan Cina.

Sementara itu pengetahuan Śrîwijaya tentang Arab dan Persia dapat dilihat dari surat penguasa Sriwijaya, disebut maharaja, ke khalifah di Timur Tengah. Fatimi (1963: 121–40) dan Azra (1994: 41–44) menyebutkan bahwa Maharaja Śrîwijaya berikim surat ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai bentuk jalinan hubungan yang menjadi kebijakan Śrîwijaya dengan dunia luar. Dalam surat tersebut ada sebutan "raja diraja" (*malik al-amlak*) dari kerajaan kepulauan (Raja al-Hind), sementara Maharaja Śrîwijaya menyebut sejumlah mata dagangan Śrîwijaya dan Nusantara pada umumnya, yakni bumbu wewangian, pala, dan kapur barus. Surat tersebut menegaskan pengetahuan penguasa Śrîwijaya tentang bangsa Arab dan Persia serta keinginan melakukan hubungan diplomatik.

Di samping itu terdapat kesaksian orang dari Timur Tengah sebagaimana terekam dalam kitab *al-Aja'ib al-Hind.* Kitab yang ditulis Buzurg bin Shahriyar al-Ramhurmuzi sekitar tahun 390 H atau tahun 1000 M tersebut mencatat informasi kehadiran para pedagang muslim dari Arab dan Persia dan adanya penduduk Zabaj yang sudah beragama Islam. Diberitakan bahwa setiap orang muslim, baik pedagang Arab dan Persia maupun penduduk setempat, diharuskan "bersila" saat mereka menghadap sang raja (Azra, 1994: 27), suatu kebiasaan yang sangat dekat dengan tradisi kaum muslim. Informasi ini mempertegas bahwa Śrîwijaya (Palembang) telah menjadi pusat kegiatan perniagaan masyarakat muslim internasional

dan masyarakat lain. Di samping itu penduduk setempat juga mulai berkenalan dengan Islam.

1. Perlindungan Demak-Mataram dan Gerak Pengislaman

Perkembangan Islam seperti itu, yang terbatas dalam kelompok pedagang muslim Arab dan Persia, terus berlangsung dalam sejarah Palembang. Sampai abad ke-13 M ketika Śrîwijaya ditaklukkan Majapahit belum ada berita terkait dinamika keagamaan yang menunjukkan laju proses pengislaman. Islamisasi baru mulai berlangsung pada akhir kekuasaan Majapahit. Adipati Palembang Aria Damar, atau Dilah, diberitakan telah memeluk Islam. Meski sebagai wakil kerajaan Jawa yang beragama Hindu-Budha, Aria Damar bersentuhan dengan suasana muslim seiring semakin besarnya jumlah pedagang dan ulama Arab yang bermukim di Palembang. Van den Berg (1989: 67) mencatat Palembang pada abad ke-13 M menjadi kota tujuan utama gelombang kedua migrasi orang Arab setelah Aceh.

Suasana Islam di Palembang juga dapat dijelaskan dari perannya mengantarkan Pangeran Jimbun, nama kecil Raden Patah—pendiri Kerajaan Demak—memasuki pendidikan dan kehidupan Islami. Sumber-sumber Jawa menuturkan bahwa Raden Patah merupakan anak Prabu Brawijaya dari Majapahit dari seorang wanita asal Cina. Saat tengah mengandung putri Cina itu diserahkan kepada seorang anak emasnya yang menjadi adipati di Palembang. Di kota itulah Raden Patah lahir dan tumbuh. Setelah berumur dua puluh tahun ia dikirim ke Jawa untuk memperdalam agama Islam kepada Sunan Ampel (de Graaf dan Pigeaud, 2003: 42; Pires, 1944 [I]: 183–184). Kisah ini memberi kesan kuat bahwa Palembang saat itu sudah berkembang sebagai pusat Islam, yang berjasa membentuk keislaman Raden Patah.

Laju perkembangan Islam semakin kuat setelah Palembang berada di bawah bagian Demak menyusul jatuhnya Majapahit (± 1527 M). Sejak saat itu Palembang menjadi bagian kerajaan Islam dan karenanya sejumlah aspek keislaman mulai tampak. Hal ini bisa dilihat, misalnya, dari munculnya anggapan yang mengaitkan penguasa Palembang dengan seorang tokoh Islam yang merebut kotaraja kafir Majapahit. Palembang mengirim bantuan adikodrati yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan raja kafir (de Graaf dan Pigeaud, 2003: 226). Meski sulit dipahami, cerita tersebut memberi kesan bahwa Palembang mengunjukkan diri bersaudara dengan dinasti Islam Demak. Atas dasar itu Palembang dikisahkan terlibat dalam pertempuran laut Jepara, yang sangat mungkin di bawah pimpinan Patih Unus, dengan Portugis di Malaka pada tahun 1512 M (de Graaf dan Pigeaud, 2003: 226).

Namun demikian hubungan Palembang-Demak menimbulkan persoalan politik-keagaman sepeninggal Sultan Trenggana, Raja Demak terbesar, pada tahun 1546 M. Citra Islam Palembang

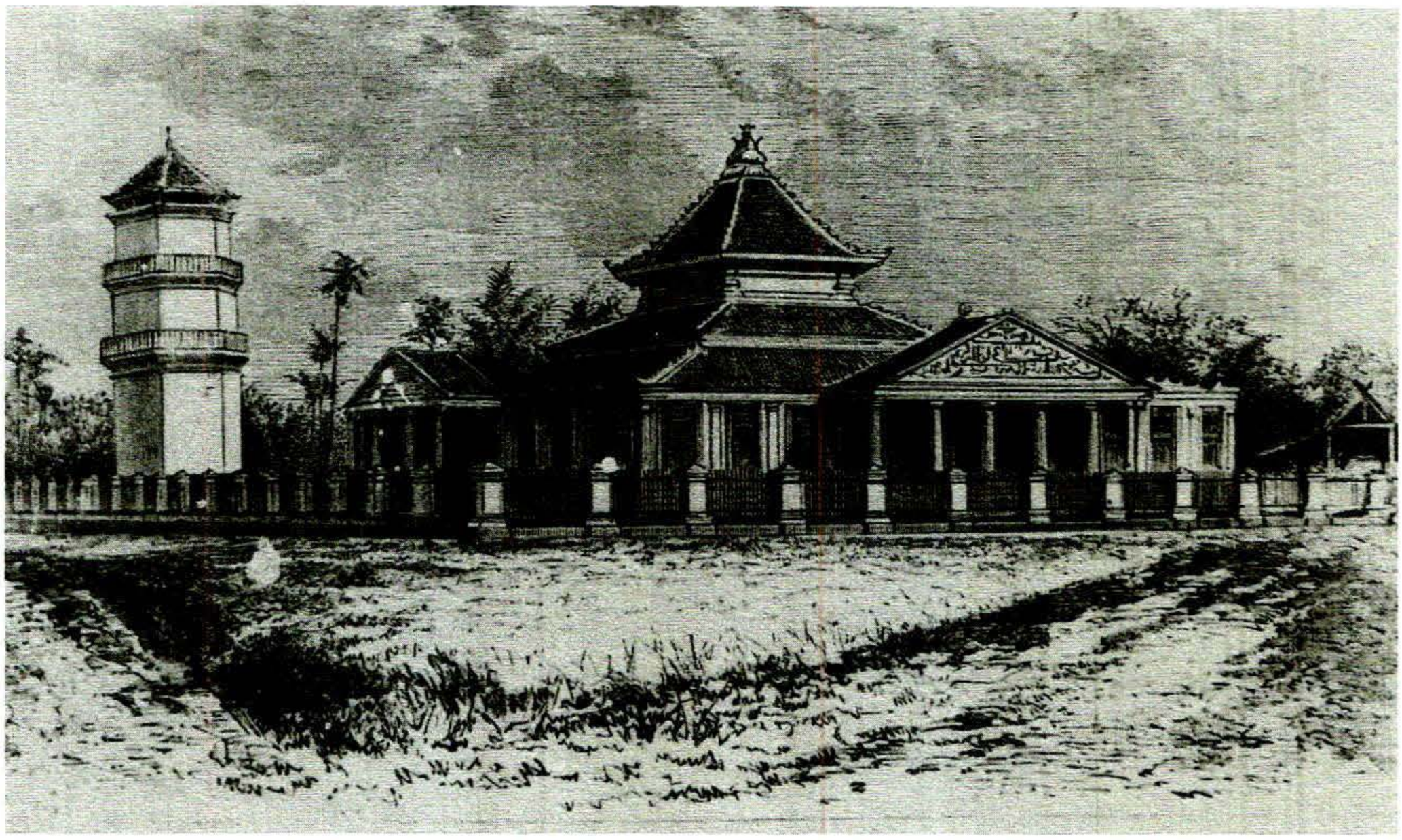

Masjid Palembang
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

sempat dipertanyakan dan mengaitkannya dengan Kerajaan Banten. Hal ini bermula dari kehadiran seorang pangeran Jawa dari Surabaya pada pertengahan abad ke-16 M yang membangun dinasti Jawa yang baru di Palembang, Ki Gedeng Sura. Ia seorang keturunan dinasti Demak dari sisi Jipang, yang diusir dari kerajaan oeh Sultan Pajang. Ki Gedeng Sura sempat berkuasa di Palembang, menggantikan keturunan Aria Damar yang luput dari catatan sejarah, tetapi tidak berlangsung lama karena meninggal saat dalam perjalanan ke Jawa. Ia digantikan anaknya, Ki Gedeng Sura II, yang memerintah antara tahun 1572 dan tahun 1589 M (de Graaf dan Pigeaud, 2003: 227).

Pada masa Ki Gedeng Sura—yang kemudian menjadi nama raja-raja dinasti Jawa di Palembang—berkuasa Palembang diserang Banten. *Sejarah Banten* (Djajadiningrat, 1983: 39) menyebut bahwa pada tahun 1592 M Sultan Molana Muhammad, atas bujukan Pangeran Mas dari Demak yang sedang dalam pengasingan di Banten, melakukan serangan ke Palembang. Pangeran Mas menyebut Raja Palembang orang kafir, sehingga atas dasar itu serangan tersebut—yang menewaskan Sultan Molana Muhammad—dibenarkan secara agama dan bahkan merupakan amal ibadah. Terlepas dari konflik internal keluarga Raja Demak, Pangeran Mas dari Pajang, dan Gedeng Sura dari Jipang, istilah "orang kafir" untuk penguasa Banten jelas memiliki makna sosiologis untuk konteks Palembang saat itu. Meski penguasanya sudah beragama Islam, bahkan sejak Aria Damar, citra non-Islam masih mewarnai gambaran tentang Palembang. Agama Islam di Palembang belum sepenuhnya menggantikan kekafiran, terutama di pedalaman (de Graaf dan Pigeaud, 2003: 229). Oleh karenanya serangan itu disebut sebagai "ekspedisi Islamisasi Banten ke Palembang" (Rahim, 1998: 51),

yang dilakukan sejalan dengan penaklukan kerajaan tersebut agar mengakui kekuasan (*overlordship*) Banten.

Meskipun berhasil digagalkan, serangan Banten pada tahun 1592 M mendorong penguasa Palembang mencari pelindung baru. Dalam hal ini Sultan Agung dari Mataram menjadi pilihan sebagai pelindung. Ketika itu Mataram berkembang menjadi kerajaan terkemuka di Jawa menyusul berakhirnya kerajaan Demak dan Pajang. Setelah berdiri kokoh Mataram menerapkan kebijakan hegemonik dengan cara menaklukkan hampir seluruh wilayah Jawa, terutama pantai utara dan bagian timur. Kerajaan-kerajaan itu, khususnya Giri-Gresik dan Surabaya, dipimpin para ulama Islam. Kebijakan perluasan wilayah berlangsung efektif ketika kerajaan di bawah Sultan Agung (1613–1646 M). Ia raja terbesar dalam sejarah Mataram, yang berkuasa menyusul meninggalnya raja kedua Mataram Seda ing Krapyak yang telah memulai upaya mengukuhkan dan memperluas kekuasaan wilayah Kerajaan Mataram (Ricklefs, 1998: 66–67; de Graaf, 1989).

Bagi Raja Palembang Pangeran Mangkurat Seda ing Rejek (1643–1659 M), persekutuan dengan Mataram menjadi pilihan sangat strategis yang dapat memberi perlindungan dari serangan Banten dan kerajaan lain di Sumatera. Mataram sangat disegani, sehingga membuat Palembang relatif bebas dari gangguan kerajaan lain, terutama Jambi. Berkat hubungan dengan Mataram Palembang sangat berpengaruh dalam peta politik di kawasan sekitar. Meski tidak langsung terkait dengan Palembang, besarnya makna strategis bersekutu dengan Mataram bisa dilihat dari pengalaman kerajaan Jambi yang juga berada di bawah perlindungan Mataram. Dalam konflik Jambi-Johor pada tahun 1660-an M, misalnya, Raja Johor Sultan Abdul Jalil Ri'ayat Syah (1623–1677 M) khawatir Mataram membantu Jambi sehingga minta bantuan VOC khusus untuk hal ini (Andaya, 1975: 86).

Demikianlah Palembang dengan kedudukan yang strategis sejak zaman Śrîwijaya telah menerima kedatangan pedagang muslim, yang kemudian membentuk satu *enclave* tersendiri di tengah masyarakat yang masih terikat dengan agama pra-Islam. Pengislaman terus tumbuh ketika Palembang berada di bawah "pertuanan" (*overlordship*) kerajaan-kerajaan Islam Jawa, mulai dari Demak, Pajang, dan kemudian Mataram. Sistem pertuanan menjadi satu ciri penting perkembangan politik Palembang (Abdullah, 1987: 208), yang sedikit banyak juga berpengaruh pada perkembangan sosial-politik dan keagamaan. Selain ketidakstabilan politik, karena masalah internal kerajaan sering membuka intervensi pihak luar, para penguasa Palembang juga tidak memiliki ruang lebar dan memadai untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Termasuk dalam hal ini pelembagaan Islam dalam struktur kekuasaan kerajaan. Hingga perkembangannya pada abad awal ke-17 M, Islam tidak memiliki pengaruh nyata keterkaitan dan sistem politik di Palembang. Baru ketika

Palembang secara resmi menjadi kesultanan Islam secara perlahan menjadi bagian struktur kekuasaan kerajaan.

2. VOC dan Konsolidasi Kekuasaan Kerajaan

Palembang mulai menjadi kesultanan ketika Ki Mas Endi Pangeran Ario Kesumo naik takhta menggantikan kakaknya, Pangeran Seda ing Rejek, yang mundur ke Indralaya ketika Palembang diserang VOC pada tahun 1659 M. Pangeran Seda ing Rejek memutuskan tidak terlibat dalam dunia politik dan tinggal di Indralaya hingga meninggal pada tahun 1662 M. Ki Mas Endi menggunakan gelar baru yang umum digunakan di kerajaan Islam lain di Nusantara, yakni sultan, menjadi Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Iman. Ia berkuasa hingga tahun 1706 M. Sejak itu pula semua penguasa Palembang bergelar sultan, yang menunjukkan kelembagaan Islam semakin menyatu di dalam kehidupan politik kerajaan.

Dinamika sosial-politik Palembang sejak abad ke-17 M—seperti halnya Riau-Johor—tidak dapat dipahami tanpa kaitan dengan maskapai dagang Belanda di Nusantara, VOC. Maskapai itu sudah ada di Palembang sejak tahun 1616 M. Sejak tahun 1640-an M Palembang berada di bawah perlindungan VOC, menggantikan Mataram yang dinilai tidak lagi efektif seiring perubahan peta politik dan ekonomi di belahan barat Nusantara. Dengan bantuan Riau-Johor pada tahun 1641 M VOC berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis. Pendudukan atas Malaka mengantarkan VOC menjadi kekuatan politik utama di kawasan tersebut. Peristiwa itu bertepatan dengan kemunduran Aceh sepeninggal Iskandar Tsani yang meninggal pada tahun 1641 M dan pada saat yang sama Mataram juga mulai mengalami kemunduran di tengah bayang-bayang kekuasaan VOC sepeninggal Sultan Agung pada tahun 1646 M.

Dalam kondisi demikian maka keputusan Palembang mendekat ke VOC menjadi satu pilihan politik strategis. Hal itu pula yang mewarnai proses Sultan Abdurrahman naik ke singgasana dan sekaligus Palembang beralih menjadi kesultanan. Peristiwa itu bermula dari perselisihan Palembang dengan VOC menyusul tindakan kasar maskapai dagang Belanda tersebut untuk mendapatkan lada di perairan Sungai Musi. Tindakan itu merupakan tanggapan VOC atas keputusan Raja Palembang yang menaikkan harga lada lebih tinggi dari harga yang disepakati dalam perjanjian VOC-Palembang tahun 1642 M. Keadaan itu diperparah ketika Belanda mengirim armada dan merampas kapal bermuatan lada yang berlabuh di Sungai Musi. Tindakan Belanda tersebut melahirkan ketidaksenangan di kalangan elit politik Palembang, sehingga pada tahun 1657 M terjadi penangkapan atas dua kapal Belanda. Batavia mengirim armada dalam jumlah besar dan pada tahun 1659 M menyerang Palembang, sehingga menimbulkan kerusakan di tengah kota, termasuk istana (*dalem*) kerajaan.

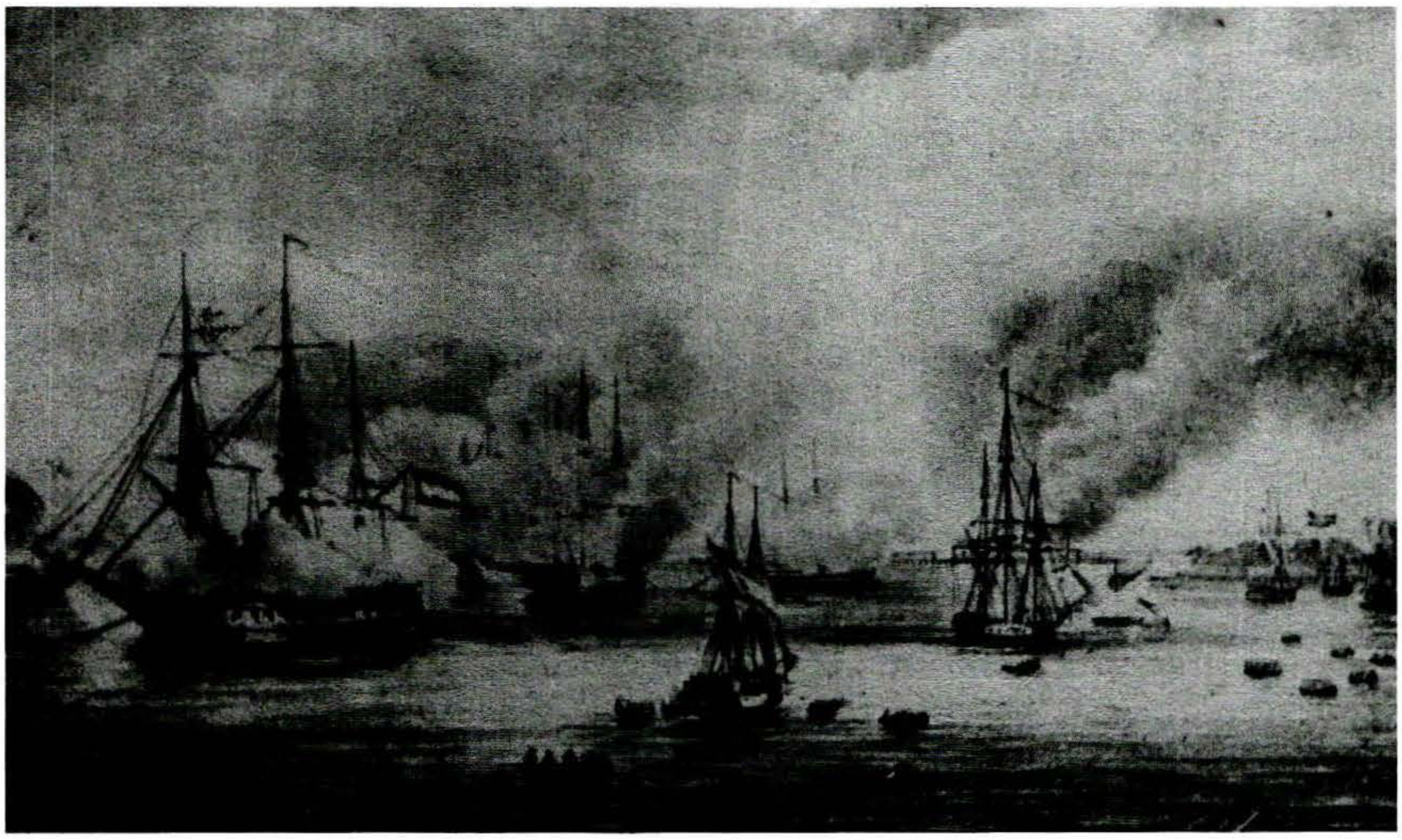

Pelayaran orang Eropa ke Palembang
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Kondisi inilah yang membuat Pangeran Seda ing Rejek mundur ke Indralaya dan menyerahkan Palembang kepada adiknya, Sultan Abdurrahman (Heers, 1907 [I]: 380–386; Rahim, 1998: 74).

Hal yang menarik adalah bahwa Abdurrahman yang baru naik takhta alih-alih membalas serangan VOC justru semakin menunjukkan kemitraan dan bahkan tunduk pada maskapai dagang di Malaka yang kemudian menjadi pelindungnya. Sikap Sultan Abdurrahman dapat dilihat, misalnya, dari perjanjian yang ditandatangani tidak lama setelah naik takhta pada tanggal 29 Juni 1662 sebagai pembaruan atas perjanjian tahun 1642. Perjanjian baru tersebut memuat sejumlah kesepakatan yang menjamin VOC dapat dengan leluasa memaksakan hak monopi atas perdagangan lada dengan harga 4,5 real setiap pikul, membangun pos di Palembang, dan banyak hal lain yang menguntungkan pihak VOC (Heers, 1931 [II]: 209–212; Rahim, 1998: 75). Dalam konteks ini istilah "pertuanan" kembali memperoleh dasar pembenaran dalam sejarah Palembang. Perjanjian tersebut, dan perjanjian berikutnya yang disahkan pada masa kekuasaan sultan-sultan Palembang kemudian, diterima sebagai wujud "kebaikan" VOC terhadap Palembang sebagai *vassal*-nya; padahal perjanjian tersebut menempatkan kesultanan Palembang semakin berada dalam genggaman VOC.

Meski harus menghadapi beberapa kelemahan struktural sejumlah langkah dilakukan untuk memperkokoh kekuasaan. Salah satu di antaranya adalah pembangunan pusat kekuasaan. Sultan Abdurrahman, yang berkuasa di atas puing-puing kehancuran setelah serangan VOC pada tahun 1659 M, memindahkan pusat kerajaan dari Kuto Giwang—yang dibangun pada masa kekuasaan Ki Gede Sura (Faille, 1971: 13)—ke Beringin Janggut. Ia mendirikan

Keraton Kuto Lamo di tempat itu (Santun, 2011: 3–4). Berdasarkan cerita masyarakat setempat J.L. Sevenhoven, komisaris Pemerintah Belanda di Palembang pada awal abad ke-19 M, memberi gambaran tentang keraton baru tersebut. Ia menulis bahwa bangunan keraton berbetuk persegi panjang, "dengan lebar 77 dan dalam 49 dekameter (*roede*), dikelilingi oleh tembok batu yang kuat dan yang tingginya 30 kaki serta lebarnya 6 atau 7 kaki. ... di dalamnya berbagai tembok yang serupa dan hampir sama tingginya, dengan pintu-pintu gerbang yang kuat; sehingga ini dapat juga dipergunakan untuk pertahanan jika tembok pertama dapat ditembus." (Sevenhoven, 2015 [1971]: 5).

Kota Palembang, pusat kekuasaan kesultanan, dibelah oleh Sungai Musi yang memanjang ke pedalaman dan dapat dilayari kapal-kapal besar. Ibukota terletak tidak jauh dari Sungai Ogan dan Sungai Komering yang kemudian menyatu dengan Sungai Musi. Kedua sungai itu menjadi "satelit" Sungai Musi, yang menjadi jalan masuk ke daerah-daerah pedalaman, sekaligus berfungsi untuk pengawasan sehingga tidak satu pun kapal datang dari atau menuju ke sana tanpa diketahui ibukota kesultanan (Sevenhoven, 2015 [1971]: 4). Dengan corak tofografis demikian Palembang temasuk jenis kota *waterfront*: hampir seluruh isi kota menghadap ke air dengan anak-anak sungai besar dan kecil (Santun, 2011: 4).

Sungai menjadi sarana angkutan utama, terutama untuk perdagangan. Catatan Sevenhoven (2015 [1971]: 7–11) mengatakan bahwa di perairan kota Palembang ada sepuluh atau duabelas kapal layar dan berturut-turut di belakangnya beberapa *wangkang* Cina (sejenis jung, berukuran kecil) serta kapal-kapal pribumi berbagai ukuran dan perlengkapan. Ratusan perahu atau sampan sederhana membuat lalu lintas di perairan semakin ramai. Selain untuk mengangkut orang, kapal dan perahu juga dijadikan toko terapung yang penuh dengan berbagai barang dagangan, antara lain kain linen, cita, bahan pakaian pribumi dan bahan-bahan sutra, serta berbagai jenis makanan. Di samping itu terdapat *pancalang*, jenis perahu yang digunakan untuk angkutan elit politik, sultan, atau wakilnya, berikut anggota keluarga mereka. Sungai sangat penting dalam kehidupan masyarakat Palembang sehingga kota tersebut disebut sebagai Venesia dari Timur (*de Venetie van het Oosten*) (Santun, 2011: 25).

Selain untuk sarana angkutan dan kegiatan perdagangan sungai juga menjadi dasar pengaturan tempat tinggal penduduk. Penguasa membuat sistem kependudukan berdasarkan ruang air karena penduduk mendirikan rumah di tepian anak Sungai Musi yang mengaliri kota Palembang (Santun 2011: 31). Begitu juga ruang air digunakan sebagai landasan pengaturan penduduk asing yang menetap di kota Palembang. Mereka yang termasuk dalam kategori "non-pribumi", yakni orang-orang Cina, Arab, Eropa, dan Melayu lain selain Palembang, tidak diizinkan bertempat tinggal di daratan, kecuali mereka yang sangat berjasa kepada istana. Kelompok

terakhir ini meliputi para pedagang Melayu kaya yang seringkali menyumbang keuangan kerajaan (Santun, 2011: 31; Faille, 1971: 36). Kebijakan ini berlangsung hingga tahun 1820-an M. Catatan Sevenhoven (2015 [1971]: 7, 15–16) menyebutkan bahwa kelompok-kelompok tersebut tinggal di atas rumah rakit yang mengapung di air. Pengaturan untuk orang Cina sengaja diberlakukan demikian sebagai mekanisme pengawasan pengusa Palembang karena mereka "selalu dapat dikuasai dengan hanya membakar rakit-rakit itu". Sevenhoven (2015 [1971]: 16–17) lebih lanjut mencatat bahwa di Palembang tidak ada bangunan dari batu, kecuali keraton, masjid besar, dan makam raja-raja berikut keluarganya.

Bersamaan dengan itu wilayah kekuasaan kerajaan juga menjadi perhatian penguasa Palembang. Sejak masa Sultan Abdurrahman Palembang memiliki wilayah sebelah timur dan timur laut yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Selat Karimata, di sebelah utara dan barat laut dengan Kerajaan Jambi, di sebelah barat dan selatan dengan wilayah Bengkulu, dan sebelah tenggara dengan Lampung. Wilayah inilah yang pada abad ke-19 M menjadi wilayah Keresidenan Palembang. Sementara itu wilayah yang kini menjadi Bangka-Belitung sejak tahun 1615 M berada di bawah kekuasaan Palembang. Hal itu terjadi terkait dengan perkawinan politik Sultan Abdurrahman dengan janda penguasa Bangka, daerah yang sangat kaya timah. Dengan demikian sampai abad ke-19 M wilayah Kesultanan Palembang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, sebagian Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Bangka-Belitung sekarang (Wargadalem, 2017: 1–2).

Aspek berikutnya dari proses konsolidasi kekuasaan Palembang berkaitan dengan masalah keagamaan. Salah satu hal penting adalah penggunaan gelar sultan, yang kemudian menjadi gelar yang digunakan Raja Palembang berikutnya. Dalam tradisi politik Islam di Nusantara, khususnya di dunia Melayu, gelar sultan digunakan sebagai bagian dari gelar kebesaran lain yang sudah melembaga, seperti *zil Allah fi al-'alam* atau 'bayangan Allah di bumi' (Lewis, 1988: 51–53; Hitti, 1967: 317). Gelar-gelar tersebut digunakan untuk mempertegas kebesaran dan kemuliaan raja dengan perangkat ketuhanan, yang dirumuskan dalam konsep daulat dengan memberi berbagai hak dan keistimewaan serta menjadikannya berada di atas masyarakat (Burhanudin, 2001: 24–25). Oleh karena itu bisa dipahami jika Sultan Abdurrahman diakui sebagai peletak dasar Palembang sebagai kesultanan, yang bermakna bahwa Islam telah menjadi bagian penting dari pengaturan politik di kerajaan.

Hingga abad ke-19 M Palembang memiliki pengadilan khusus yang menyangkut masalah keagamaan, yang disebut "angherang nata agama" atau penghulu. Peradilan tersebut berada sejajar dengan peradilan lain di bawah "tumenggung karta negara" yang mengadili perkara pidana. Lepas dari fungsinya yang dianggap tidak berjalan sesuai tujuan ketika lembaga tersebut dibentuk—bahwa peradilan keagamaan "dapat dibeli dengan uang" dan peradilan pidana

"hampir tidak mempunyai wibawa" (Sevenhoven, 2015 [1971]: 52)—keberadaan kedua lembaga hukum tersebut, khususnya penghulu, merupakan wujud awal dari upaya penerapan hukum dan ajaran Islam di Palembang.

Dalam hal budaya Palembang mewarisi dua budaya utama di Nusantara, yakni Melayu dan Jawa. Palembang memiliki kedudukan penting sebagai tempat turunnya keturunan Raja Iskandar Zulkarnain, nenek moyang raja-raja Melayu. *Sejarah Melayu* mengisahkan hal itu melalui cerita ketika suatu waktu terdengar di seluruh negeri bahwa keturunan Raja Iskandar Zulkarnain sekarang ada di kota Palembang. Mereka turun dari langit melalui Bukit Siguntang Mahameru (Winstedt, 1938: 54–55). Sementara dalam tradisi Jawa Palembang mempunyai kedudukan penting sebagai tempat kelahiran Raden Patah, raja kerajaan Islam Jawa pertama, Demak. Ia putra Raja Majapahit Prabu Brawijaya (de Graaf dan Pigeaud, 1985: 247).

Dengan demikian Palembang sebagai bagian kerajaan Melayu mengidentifikasi diri mereka (raja-raja Palembang) sebagai anak cucu Raja Iskandar Zulkarain, sementara sebagai bagian dari Jawa dinyatakan melalui Malik Ibrahim yang turun ke "bawah angin" bersama dengan saudaranya, Maulana Ishak. Hal itulah yang diceritakan dalam sebuah teks tentang silsilah Raja Palembang, *Asal Raja-Raja Palembang* (Rahim, 1998: 6). Atas dasar itu Palembang kerapkali disebut sebagai Kerajaan Melayu-Jawa. Palembang pernah menjadi pusat Kerajaan Srîwijaya dan menjadi pusat lahirnya raja-raja Melayu. Pada saat yang sama Palembang juga menjadi bagian penting dari dinamika politik Jawa, mulai dari munculnya Kerajaan Demak, keruntuhan Majapahit, hingga Kerajaan Mataram.

Proses konsolidasi kekuasaan Palembang berlangsung ketika berada di bawah VOC. Akibat persekutuan dengan VOC justru membuat Palembang harus mengakui hak monopoli maskapai dagang tersebut, khususnya dalam perdagangan lada. Di sisi lain VOC berhasil menciptakan suasana politik yang stabil di Palembang. Dalam keadaan seperti itu Palembang berhasil melakukan konsolidasi internal, baik menyagkut bidang politik maupun keagamaan dan budaya. Meski sempat berselisih dengan Jambi, Palembang berhasil memasuki masa kejayaan pada pertengahan abad ke-18 M.

3. Perdagangan Lada dan Persaingan dengan Jambi

Satu tahap penting sejarah Palembang terjadi ketika kerajaan tersebut terlibat dalam persaingan dengan "saudaranya", Kerajaan Jambi. Persaingan, dan bahkan perselisihan, tersebut sangat terkait dengan perkembangan ekonomi dan sosial-politik masing-masing kerajaan. Meski terjadi perkawinan di antara keluarga kerajaan sebagai cara yang efektif untuk menjalin persahabatan dan menciptakan perdamaian, tampaknya hal itu tidak dapat berlaku secara umum. Dalam suasana tertentu, khususnya akibat kehadiran VOC dalam perdagangan di Nusantara, perselisihan

dan konflik—bahkan perang terbuka—tidak bisa dihindari. Meski bisa diatasi, dengan melibatkan VOC dan tentu saja harus dibayar mahal, hal itu menjadi unsur penting dalam perkembangan dua kerajaan tersebut.

Naiknya Sultan Abdurrahman sebagai Raja Palembang melibatkan Jambi. Jambi ingin menjadi kerajaan terkemuka di bagian tenggara Sumatera, sementara Palembang senantiasa menjadi saingan utama. Maka pertikaian VOC dengan Palembang menjadi kesempatan untuk membuat Palembang lemah baik secara politik maupun ekonomi. Oleh karena itu ketika mengetahui VOC akan menyerang Palembang, penguasa dan elit politik Jambi membantu dengan menyediakan informasi penting terkait peta kekuatan dan sistem pertahanan Palembang. Berkat informasi yang diberikan Jambi serangan VOC dengan tepat membidik titik-titik strategis pertahanan Palembang. Pada tahun 1659 M Palembang jatuh dan Pangeran Seda Ing Rejek terpaksa mundur dari takhta kerajaan (Andaya, 1993: 69).

Serangan dan penguasaan VOC atas Palembang sangat menguntungkan Jambi. Jambi menerima kepindahan warga Palembang yang sangat dibutuhkan untuk penanaman lada. Di samping itu Jambi memperoleh kedudukan penting di mata VOC dan karena jasanya permintaan untuk mendapatkan barang-barang berharga, termasuk senjata, dan hasil rampasan dari Palembang dikabulkan. Dengan posisi sebagai sekutu VOC Jambi ikut menentukan naiknya penguasa Palembang setelah Pangeran Seda Ing Rejek, yakni Sultan Abdurrahman. Sultan Palembang bersedia menandatangani kontrak baru dengan VOC pada tahun 1662 M (Andaya, 1993: 69–70) pun antara lain atas nasihat Raja Jambi.

Ketika permintaan lada dan merica meningkat pada akhir abad ke-17 M, penguasaan atas wilayah hulu sebagai pusat penanaman hasil bumi tersebut menjadi perhatian utama baik Palembang maupun Jambi. Penduduk dalam jumlah besar, termasuk dengan membeli budak, menjadi cara penting dua kerajaan tersebut. Besarya jumlah penduduk yang siap bekerja dan berjuang untuk raja menjadi salah satu pijakan kekuatan dan kebesaran kerajaan (Andaya, 1993: 95). Seperti halnya Jambi elit kerajaan Palembang berusaha membeli budak dari Sulawesi yang dinilai lebih kuat dan karenanya lebih bermanfaat daripada budak dari wilayah lain, seperti Solor atau Timor. Sedini tahun 1660-an M budak diangkut kapal-kapal Bugis dan Makassar untuk dijual di Palembang. Pada 1670-an M Sultan Abdurrahman mengirim utusan ke Buton dan Makassar dengan tugas membeli budak dari Sulawesi. Mereka dipekerjakan sebagai tenaga kasar di daerah hulu untuk membuka lahan pertanian. Di Komering jumlah mereka sangat besar, sehingga membentuk kelompok khusus dengan budaya tersendiri sebagai budak (Andaya, 1993: 96–97).

Hubungan dengan Makassar juga terjalin melalui para pangeran dan elit politik Bugis yang mengungsi ke Palembang dan Jambi menyusul kekalahan Gowa-Tallo dalam perang melawan VOC pada tahun 1669 M (Andaya, 1981: 208–227). Bugis hadir di keraton kedua kerajaan tersebut dalam jumlah besar dan secara perlahan menjadi kekuatan penting yang ikut menentukan dinamika politik. Hubungan Jambi dengan Bugis-Makassar bahkan sangat kuat. Pangeran Adipati Anum (kemudian bergelar Sultan Anum Ingalaga), berdarah Makassar dari pihak ibu, pada tahun 1663 M mengirim utusan ke Gowa untuk menjalin persahabatan. Ia sendiri tertarik pada gadis Bugis, bekas budak, yang dikenal dengan nama To Ayo, dan kemudian dijadikan sebagai selir. Perkawinan itu dilakukan dengan menceraikan permaisuri, putri raja Palembang melalui "perkawinan politik" pada tahun 1670 M untuk meredakan pertentangan Jambi-Palembang (Andaya, 1993: 102–103). Selain itu, pada tahun 1678 M, Pangeran Anum juga menikahi Karaeng Fatimah, putri seorang raja di Makassar yang dimakzulkan, dan sempat menikah dengan Raja Banten. Karena berasal dari keturunan bangsawan Karaeng Fatimah diberi kedudukan istimewa di keraton sebagai Ratu Mas. Dengan kedudukan tersebut Karaeng Fatimah mengundang orang Makassar ke Jambi, terutama melalui Daeng Mangika, saudaranya, yang datang ke Jambi pada tahun 1679 M. Daeng Mangika disambut sangat baik oleh Sultang Ingalaga dan diberi kedudukan layaknya seorang raja (Andaya, 1993: 104–05).

Namun demikian keberadaan masyarakat Bugis bukan tidak tanpa masalah secara politik. Mereka justru membuat pertikaian Palembang-Jambi semakin serius dan berpotensi melahirkan perang terbuka. Seiring perluasan lahan pertanian lada di daerah hulu, dua kerajaan tersebut bertikai di wilayah perbatasan. Ulu Tembesi, daerah penghasil lada terbesar bagi Jambi, terletak di sepanjang Sungai Tembesi dan melewati perbatasan Jambi-Palembang. Namun Ulu Tembesi lebih dekat dari Palembang, sekitar delapan hari perjalanan darat waktu itu, dibanding dari Jambi yang memakan waktu duabelas hari. Konflik bermula ketika pada tahun 1640-an M beberapa daerah di Ulu Tembesi memberontak melawan Jambi, yang menyatakan sebagai wilayahnya selama hampir dua dasawarsa sebelumnya (pada 1631 M) sebagai mas kawin pernikahan Pangeran Ratu dari Palembang dengan Pangeran Gede dari Jambi. Pada tahun 1655 M penduduk dari tujuh desa di wilayah perbatasan tersebut bahkan berusaha memperoleh perlindungan dari Palembang (Andaya, 1993: 102).

Sejumlah upaya dilakukan untuk menghindari terjadinya perang terbuka. Perkawinan Adipati Anum dari Jambi dengan putri Raja Palembang diselenggarakan pada tahun 1670 M. Namun demikian perkawinan itu gagal karena Adipati Anum lebih memilih To Ayo dari suku Bugis yang berada di Jambi. Sultan Agung sengaja datang ke Palembang khusus untuk masalah perkawinan yang gagal tersebut. Ia minta persahabatan kedua

kerajaan harus dipertahankan, paling tidak selama ia masih hidup. Maka, perkawinan keluarga penguasa dua kerajaan kembali dilaksanakan. Putri Raja Palembang akan dinikahkan dengan putra Sultan Agung dari ibu berbeda. Jumlah mas kawin pun ditambah dua kali lipat. Meski perkawinan tersebut kembali gagal karena Adipati Anum tidak mengizinkan mantan istrinya menikah dengan sudaranya lain ibu, senioritas Sultan Agung sangat berpengaruh sehingga kedua kerajaan itu tidak terlibat perang terbuka. Sebagai catatan, Raja Palembang Sultan Abdurrahman tidak dapat melupakan bantuan raja Jambi saat dia naik takhta pada tahun 1622 M (Andaya, 1993: 103–104).

Upaya perdamaian Sultan Agung dirusak oleh Adipati Anum yang mengangkat Karaeng Fatimah sebagai istrinya seraya memberinya gelar terhormat, Ratu Mas. Hubungan dua kerajaan itu memburuk. terlebih setelah Sultan Agung meninggal dunia. Sultan Abdurrahman menyatakan secara terbuka niatnya untuk menyerang Jambi sebagai balas dendam atas perlakuan Sultan Ingalaga yang menceraikan anak Sultan Abdurrahman secara tidak hormat. Sikap Sultan Abdurrahman juga dipicu pembunuhan tragis utusan Palembang oleh pasukan Jambi. Suasana menjadi semakin memburuk dengan kehadiran Daeng Mangika di Palembang bersama dengan ratusan pengikut Bugis-Makassar. Setelah berseteru dengan Ingalaga, yang menuduhnya membantu pihak musuh saat Jambi diserang Johor pada bulan Mei dan Juni 1679, Daeng Mangika mengalihkan kesetiaan ke Palembang. Oleh karena itu saat pasukan Palembang bentrok dengan pasukan Jambi di sepanjang perbatasan di hilir Sungai Sungsang, dan saat armada kapal *orang laut* Jambi dan Johor menyerang Sungsang, Daeng Mangika datang dengan seribu pasukan yang siap membantu Palembang. Ia bahkan bersama Pangeran Aria (putra Sultan Abdurrahman) pada bulan Oktober 1679 berhasil menghimpun pasukan tambahan sebanyak tigaribu orang dan lebih dari limapuluh kapal. Setiap hari semakin banyak orang Bugis-Makassar dari Banten datang di Palembang. Pada akhir tahun 1680 M sekitar delapanpuluh kapal perang Palembang dan Makassar di bawah pimpinan Daeng Mangika dan Pangeran Aria menyerang Jambi. Pasukan yang lain masuk ke wilayah pedalaman untuk menyerang Jambi dari daerah hulu (Andaya, 1993: 106).

Menyadari kondisi kritis akibat rencana serangan Palembang, Sultan Ingalaga mencari bantuan ke VOC. Namun maskapai dagang Belanda itu bersikap netral. Pihak berikutnya yang mungkin menjadi sekutu adalah Johor, meski sebelumnya terlibat perang dengan kerajaan itu. Johor bersedia membantu Jambi dalam perang menghadapi Palembang. Lebih dari limapuluh kapal dengan senjata lengkap dikirim ke Jambi. Pada bulan Mei 1681 Johor menambah seratus kapal dengan duaribu orang pasukan, sehingga melebihi jumlah kekuatan pasukan Palembang dan Makassar. Sultan Ingalaga pun berhasil mengalahkan pasukan Palembang. Daeng Mangika bersama para pemimpin perang serta

sekitar tujuhribu orang pasukan Palembang-Makassar terluka (Andaya, 1993: 106–107).

Dalam keadaan demikian Sultan Abdurrahman meminta VOC menengahi pertikaian Palembang dengan Jambi-Johor. Berbeda saat Jambi minta bantuan, VOC bersedia membantu mengakhiri perang. Pada tahun 1681 M Batavia mengirim pasukan di bawah komando Francois Tack dengan tugas mengakhiri pertikaian Palembang dengan Jambi-Johor. Bantuan itu dengan imbalan kontrak baru VOC dan Palembang, yang tentu saja menguntungkan VOC. Sultan Abdurrahman menerima kontrak baru tersebut dan menandatanganinya pada bulan September 1681. Kontrak baru, antara lain, memperluas hak monopoli VOC atas opium, kain Jawa, dan tekstil India. Selain itu kontrak baru juga mengalihkan jurisdiksi atas pedagang asing, termasuk pedagang Cina, menjadi berada di tangan VOC. Sultan Abdurrahman diwajibkan membayar biaya ekspedisi sebesar 22.500 gulden (Andaya, 1993: 107).

Sebagai balasan atas ketundukan Abdurrahman, ditambah kemampuan Palembang menghasilkan lada dalam jumlah besar, Belanda lebih berpihak pada Palembang. Menyusul kontrak di atas VOC meminta sepuluh desa yang diperebutkan menjadi teritori Palembang. Begitu juga mereka yang ditahan Jambi akibat perang harus dikembalikan ke Palembang. Sultan Ingalaga diharuskan memberi sejumlah kompensasi kepada Palembang. Keputusan VOC ini jelas membuat Jambi kecewa. Di balik sikapnya yang netral VOC jelas menunjukkan sikap keberpihakan pada pihak yang lebih memberi keuntungan ekonomi, yakni produksi lada (Andaya, 1993: 107).

Atas kebijakan VOC tersebut Raja Jambi kembali menyerang Palembang. Dengan bantuan senjata dari Siam—Jambi menyatakan diri sebagai *vassal* Siam yang dilambangkan dengan mengirim bunga emas dan perak—pada awal tahun 1682 M Jambi siap menyerang Palembang. Pada bulan April 1683 pasukan Jambi di bawah pimpinan Sultan Ingalaga menyerang dan membunuh *orang laut* di perkampungan Sungsang di permukaan Sungai Musi. Pasukan kelompok lain menangkap dan membunuh sejumlah orang yang tengah bertanam padi di sepanjang tepian sungai di bagian hulu. Perang juga pecah di wilayah pedalaman, di Rawa-Tembesi, tempat kedua belah pihak berusaha memperoleh pengakuan dan pengaruh. Kembali Sultan Abdurrahman meminta VOC turun tangan. Pada bulan Juli 1683 VOC mengirim pasukan. Dengan melibatkan seorang komisioner Willem Hartsinck VOC berhasil memaksa Sultan Ingalaga dan Sultan Abdurrahman menandatangani perjanjian damai yang dibuat Belanda; tentu saja disertai pengamanan kontrak VOC-Palembang tahun 1681 (Andaya, 1993: 108).

4. Menuju Kejayaan

Meskipun harus berbenturan dengan saudara sendiri, konflik dengan Jambi bermakna penting bagi Palembang, yakni kerajaan tersebut semakin tegas bersekutu dengan VOC. Terlepas dari fakta bahwa kontrak yang ditandatanganinya lebih menguntungkan maskapai dagang tersebut, keputusan yang diambil Sultan Abdurrahman membawa perkembangan positif bagi Palembang. VOC membantu Palembang stabil secara politik, bebas dari ancaman kerajaan-kerajaan lain, dan dengan demikian maju secara ekonomi. Meski kebijakan monopoli VOC, termasuk penutupan sejumlah jalur dagang laut (*mare clausum*), kerap menimbulkan rasa kecewa dan tidak puas tetapi Sultan Abdurrahman tetap pada pendirian menjalin hubungan dengan VOC. Upaya VOC penyelesaian konflik, yang banyak menguntungkan Palembang, menjadi salah satu alasan kuat di balik kebijakan itu. Sementara bagi VOC, hubungan dengan Palembang juga menguntungkan secara ekonomi. Loji VOC di Sungai Aor, yang berseberangan dengan istana raja, semakin luas dan komunitas VOC—terdiri kebanyakan dari orang Cina dan Kristen peranakan Portugis-Melayu—tumbuh di wilayah sekitar (Andaya, 1993: 114–115). Hal itu menandakan suasana yang kondusif bagi perkembangan ekonomi kerajaan.

Langkah yang diambil Sultan Abdurrahman berkenaan dengan masalah stabilitas politik sangat berdasar. Persaingan dengan Jambi terkait daerah Trembesi terus berlangsung. Begitu juga *orang laut* Jambi dan Johor terus menyerang buda-budak di wilayah perairan Palembang, yang membuat Pangeran Aria, putra kedua Sultan Abdurrahman, terlibat dalam perang dengan mengikutkan *orang laut* Palembang, di samping orang-orang Melayu, Minangkabau, dan Makassar. Selain itu Jambi menjalin pesekutuan dengan Siam dan Johor, sehingga menjadi kekuatan tambahan yang mengancam Palembang. Kerajaan lain yang juga menjadi ancaman bagi Palembang adalah Banten di Jawa. Keinginan menguasai daerah penghasil lada di sepanjang Sungai Tulang Bawang di Lampung menjadi sumber perselisihan dan bahkan pertikaian (Andaya, 1993: 115).

Di samping perlindungan VOC, hal yang juga sangat penting adalah kemampuan Sultan Abdurrahman mengelola masalah sosial-politik dan ekonomi kerajaan. Meskipun harus mengahadapi sejumlah aturan ketat yang ditetapkan VOC, ia berhasil menjadikan Palembang pada abad ke-17 M mencapai perkembangan. Hal ini sangat terkait dengan hubungan baik Sultan Abdurrahman dengan pejabat VOC, terutama perwakilannya di Palembang. Sultan Abdurrahman berhasil meyakinkan VOC tentang perlunya menanggalkan sejumlah aturan yang menghambat transaksi perdagangan di Palembang oleh pedagang-pedagang Nusantara. Keberhasilan itu didukung kedudukan Palembang sebagai penghasil lada terbaik, sementara persediaan dari Jambi semakin berkurang. Pada tahun 1685 M, VOC mengakhiri monopolinya dalam perdagangan tekstil

pribumi dan kapal-kapal setempat diperbolehkan membawa kain dari Makassar ke Jawa. Konsesi lain adalah penduduk Palembang diizinkan membawa lada langsung ke Batavia, sementara orang Cina diberi akses ke pasar Palembang. Sultan Abdurrahman diizinkan membeli budak di Batavia untuk keperluan penanaman lada di hulu (Andaya, 1993: 118).

Kebijakan ini membuat Palembang semakin terlibat aktif dalam jaringan perniagaan di Nusantara. Banyak mata dagangan Palembang selain lada, antara lain kacang, pinang, gambir, rotan, lilin, damar, dan barang kerajinan tangan (seperti pot tanah liat dan tikar), menjadi barang dagangan yang banyak dijual di Batavia. Permintaan terhadap barang-barang tersebut semakin meningkat pada tahun 1689 dan 1700 M, sehingga berdampak sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi Palembang. Hal itu juga didukung persediaan hasil hutan yang memadai, terutama damar dan rotan, yang membuat ekonomi Palembang berkembang sedemikian rupa. Banyak hasil kerajinan tangan masyarakat dari hasil hutan menjadi komoditi yang dibawa dan dipasarkan di Batavia dengan jumlah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dengan demikian sektor perdagangan juga menambah pemasukan kesultanan (Andaya, 1993: 118–120).

Di atas itu semua kesultanan mendapat pemasukan yang signifikan dari praktik perdagangan illegal yang marak di Palembang. Kontrak monopoli yang diterapkan VOC dengan prinsip laut tertutup tidak bisa mengubah dan menghilangkan sama sekali praktik perdagangan yang sudah berlangsung lama di masyarakat Palembang. Mereka menjalin transaksi perdagangan dengan berbagai pihak di luar VOC, khususnya dengan Inggris dan Portugis yang masih berusaha mendapat barang dagangan di Palembang. Pada tahun 1689 M tercatat adanya perbedaan besar antara jumlah hasil panen lada dengan jumlah hitungan residen. Dari delapanpuluhribu pikul yang dihasilkan, tetapi data yang masuk ke VOC hanya setengahnya, dan setengahnya lagi dijual secara "illegal" ke pihak-pihak lain, baik pedagang Eropa maupun pedagang Nusantara. Perdagangan tersebut bukan tidak diketahui penguasa kesultanan. Mereka justru memperoleh keuntungan dengan melindungi praktik dagang yang biasa disebut penyelundupan itu karena dilakukan mereka yang bersedia membayar harga lebih tinggi dari harga yang ditetapkan VOC (Andaya, 1993: 120–121). Selain dengan pedagang Inggris di Bengkulu dan pedagang Nusantara di Kedah dan Aceh, perdagangan lada dalam jumlah besar dilakukan dengan pedagang Cina. Hal ini terkait dengan permintaan lada yang tetap tinggi di negeri tirai bambu tersebut (Andaya, 1993: 122–123).

Sumber pemasukan lain bagi kesultanan adalah biaya *toll* yang dibebankan kepada setiap perahu dan patroli di sepanjang pantai yang dilakukan *orang laut* yang setia kepada sultan. Biaya *toll* jauh lebih tinggi di sungai-sungai penting dalam jaringan perdagangan lada. Semua itu menghasilkan dana yang tidak sedikit bagi sultan,

sehingga atas dasar itu Palembang menjadi salah satu kesultanan yang sangat kaya di bagian barat Nusantara pada abad ke-18 M. Palembang juga memiliki sumber penghasilan lain selain lada, yakni timah di Bangka-Belitung yang menjadi bagian dari wilayah kekuasan Palembang. Penguasaan itu terjadi atas dasar hubungan perkawinan: pengusa Bangka-Belitung, Urata, menikah dengan putri Sultan Palembang, kemungkinan Sultan Abdurrahman. Dengan demikian Palembang menjadi tuan dari Bangka-Belitung (Wargadalem, 2107: 2). Pada abad ke-18 M, seiring meningkatnya permintaan pasar internasional atas timah, Bangka-Belitung menjadi sangat penting bagi perdagangan dan kekuatan politik Kesultanan Palembang. Lada dan timah mengantarkan Palembang mencapai kejayaan.

5. Kejayaan Kesultanan

Sultan Mahmud Badaruddin I (1724–1757 M) dan Sultan Muhammad Bahauddin I (1774–1803 M) merupakan dua sultan yang dianggap membawa Kesultanan Palembang ke zaman gemilang. Pernyataan ini tidak berlebihan karena pada masa keduanya banyak pencapaian luar biasa yang mampu membawa Kesultanan Palembang sebagai salah satu kesultanan yang kokoh, kuat, dan berpengaruh di wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaka. Kota Palembang disulap menjadi kota modern bertaraf internasional. Perkampungan serta jalan-jalan dibenahi, dan beberapa bangunan monumental terkenal (hingga saat ini) didirikan (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 37–38).

Keberhasilan dua sultan itu tidak bisa dilepaskan dari kemampuan mereka memacu roda perekonomian. Lada dan timah yang merupakan komoditi primadona kala itu menjadi penjelas penting di balik keberhasilan mereka membawa Palembang mencapai kejayaan. Di tengah revolusi industri Eropa, penguasaan Palembang atas wilayah-wilayah yang menghasilkan lada dan timah menarik perhatian dunia internasional, karena kedua mata dagangan tersebut menjadi bahan mentah sangat penting di Eropa untuk menggerakkan kegiatan industri.

Perkawinan politik leluhur mereka, Sultan Abdurrahman, dengan salah satu putri penguasa Bangka pun membawa kemujuran bagi Palembang sekitar abad ke-17 M. Perkawinan itu semakin memperluas wilayah kekuasaan Palembang di Semenanjung Malaka. Daerah-daerah produktif yang sebelumnya dimiliki oleh Bangka kemudian diwariskan ke Kesultanan Palembang (Andaya, 1993: 184). Banyak daerah tambang timah di Bangka yang dengan sendirinya menjadi milik Kesultanan Palembang. "Warisan" itu membawa keberuntungan bagi Kesultanan Palembang di masa depan.

5.1 Perdagangan Lada dan Timah

Kejayaan dapat diraih apabila sebuah kerajaan dapat menguasai perniagaan. Hal inilah yang diperlihatkan oleh Kesultanan Palembang di kisaran abad ke-17 sampai ke-18 M. Gempita kegiatan perdagangan di pelabuhan kesultanan dapat dilihat, misalnya, pada laporan Sevenhoven (1971: 11–21) dan Faille (1971: 11). Setiap hari, baik siang maupun malam, aneka jenis perahu berlalu-lalang dengan muatan barang dagangan, dari pedagang eceran hingga pedagang besar, dari berbagai belahan dunia, seperti Cina, Arab, dan Eropa. Memang perdagangan bukan satu-satunya sumber pendapatan Kesultanan Palembang. *Fexo*, sumbangan pedagang kaya yang mendapat kedudukan istimewa dari sultan, pun turut menyumbang kas kesultanan (Nawiyanto dan Endrayadi, 2016: 77). Meskipun demikian perdagangan menjadi penopang utama kemakmuran kesultanan dan masyarakat kala itu.

Monopoli menjadi pola yang jelas dalam sistem perniagaan yang diterapkan Kesultanan Palembang untuk menjaga stabiltas harga dan pasokan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Dalam kaitan dengan wilayah pedalaman, misalnya, hubungan perdagangan istana dengan kepala-kepala daerah di pedalaman diwujudkan dalam pola kewajiban *tiban-tukon*. Istilah itu berarti sultan mengirim barang dari Palembang yang dibutuhkan di wilayah pedalaman, seperti garam, kain, dan barang-barang lain dengan harga yang telah ditetapkan. Barang-barang ini ditukar dengan hasil bumi wilayah pedalaman, misalnya lada, damar, kapas, dan beras (Rahiem, 1998: 278–79).

Sudah tentu sultan tidak menjalankan dan mengatur sendiri kegiatan perdagangan tersebut. Ia menunjuk syahbandar untuk mengurus segala kegiatan yang berkait dengan kelancaran perniagaan di pelabuhan. Wewenang syahbandar meliputi beberapa urusan, seperti memberi izin keluar masuk kapal-kapal di pelabuhan, menjaga keamanan para pedagang dari gangguan para penjahat, serta memajukan pelayaran dan perdagangan. Syahbandar pun diberi wewenang untuk mengadili pedagang-pedagang yang kedapatan melakukan pelanggaran dan kecurangan di pelabuhan. Dengan wewenang ini syahbandar berkewajiban menanggung semua biaya perbekalan istana dan berbagai keperluan lain sultan (Marsden, 2018: 332).

Ada banyak barang yang diperdagangkan di pelabuhan Palembang. Laporan seorang pegawai Inggris menyebutkan bahwa Kesultanan Palembang kerap memperdagangkan damar merah, rotan, gambir, gading gajah, tanduk kerbau, sarang burung, dan beberapa hasil hutan lainnya (Marsden, 2018: 333). Kesultanan Palembang juga terkenal maju dalam penjualan produk-produk pertukangan (Faille, 1971:35). Para perajin di Palembang mampu menghasilkan beragam barang perhiasan, rangka dan batang keris, bahkan perlengkapan senjata seperti senapan dan meriam sekaligus amunisinya

(Wargadalem, 2017). Mereka juga handal dalam mengolah emas dan tembaga dan mampu membuat berbagai perlengkapan rumah tangga, seperti kotak sirih, kotak rokok, dan sarung keris.

Selain itu pelabuhan Palembang juga sering menerima barang dari luar, seperti benang emas, panci, obat-obatan, teh, hingga barang pecah-belah. Barang-barang ini umumnya datang dari wilayah Asia Tenggara, Cina, Arab, dan India. Meskipun demikian dari semua barang yang diperjualbelikan di pelabuhan Kesultanan Palembang timah dan lada merupakan komoditi kunci yang mampu menaikkan secara drastis laju perekonomian kesultanan. Dari segi jumlah dan nilai, kedua barang dagangan itu bahkan sangat menonjol bila dibandingkan dengan komoditi lainnya. Berbagai daerah di Palembang memang terkenal dengan hasil ladanya. Mulai dari dataran tinggi hingga pinggiran aliran Sungai Musi dapat ditemukan tanaman lada dengan mudah. Hal ini dimungkinkan karena menanam lada sudah menjadi kebiasaan masyarakat Palembang sejak awal (Marsden, 2018: 334). Apalagi ketika Kesultanan Palembang muncul pada abad ke-17 M masyarakat diharuskan membudiyakan tanaman lada karena lada menjadi komoditi internasional (Hanafiah, 1995).

Pada tahun 1662 M, misalnya, harga lada di pasar Eropa mencapai angka fantastis (Hanafiah, 1995). Harga ini meroket seiring perjalanan waktu dan lonjakan permintaan lada di Eropa. Tentu saja hal ini menambah pemasukan kas Kesultanan Palembang. Apalagi sultan sering membeli lada dari rakyat dengan harga murah lalu dijual kembali dengan harga mahal kepada pihak VOC (Faille, 1971: 49–50). Keinginan VOC menguasai pasar Eropa pun mendorong mereka melakukan kontrak dengan pihak Kesultanan Palembang pada tahun 1622 M. Kontrak tersebut berisi kesepakatan pihak kesultanan harus menyetorkan lada sebanyak 2.000 pikul ke VOC di Batavia per tahun (Hanafiah, 1995: 65). Oleh karena itu pada tahun 1661 M Belanda berhasil menjual setidaknya 116 ribu karung lada di pasar Eropa, yang dikumpulkan dari berbagai tempat, mulai dari Palembang, Banten, Aceh, Jambi, hingga beberapa tempat lainnya (van Leur, 1955: 171). Kerjasama ini pun berlangsung lama. Sebagai gambaran, pada tahun 1773 M Kesultanan Palembang tercatat masih menjual lada sebanyak 6.721 pikul kepada pihak VOC. Jumlah penjualan lada turun menjadi 4.141 pikul pada tahun 1774 M, namun meningkat kembali menjadi 6.105 pikul pada tahun 1775 M (Hanafiah, 1989: 112).

Ada kecenderungan naik-turun penjualan lada antara Kesultanan Palembang dan pihak VOC pada masa Pemerintahan Sultan Badaruddin I. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor iklim sudah pasti mempengaruhi jumlah lada yang dapat dipanen. Kedua, faktor ketidakseriusan pihak kesultanan memenuhi kontraknya terhadap VOC. Faktor ini ikut ditentukan oleh tingkat harga lada di "pasar gelap".

Sebagai dagangan primadona lada diperebutkan oleh pedagang-pedagang asing lain yang berminat mengumpulkan lada untuk dijual di pasar Eropa ataupun Asia. Berdasarkan kontrak tahun 1776 M Palembang wajib menyetor 20.000 pikul lada (Hanafiah, 1995). Namun karena harga di "pasar gelap" lebih tinggi membuat pihak kesultanan tidak terlalu serius memperhatikan kontrak perdagangan lada yang dilakukannya dengan VOC. Akibatnya pada tahun1780-an M perimbangan penjualan lada kepada VOC lebih kurang hanya sepertiga dari hasil lada Palembang. Perimbangan ini terus menurun pada tahun-tahun berikutnya sehingga VOC mendesak pihak kesultanan agar melakukan pembaharuan kontrak perdagangan lada. Meskipun demikian upaya yang dilakukan VOC untuk meningkatkan perolehan lada dari Palembang ini rupanya tidak berhasil. Pada tahun 1788 M VOC hanya mendapat lada sebanyak 2.000 pikul, sedangkan pada saat yang sama penjualan lada dari Palembang ke Makao diperkirakan mencapai 20.000 pikul per tahun (Hanafiah, 1989: 114–115).

Bagaimanapun penjualan lada kepada para pedagang di luar VOC dianggap jauh lebih menguntungkan bagi Kesultanan Palembang. Harga yang mereka peroleh jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga monopoli yang ditetapkan VOC. Sesuai hukum pasar sudah pasti Kesultanan Palembang menjual barang dagangannya ke penawar dengan harga paling tinggi. Dari sekian banyak negara, tercatat Cina dan Inggris merupakan negara yang berani membeli lada Palembang dengan harga mahal (Andaya, 1993: 43–45).

Dari Palembang lada diangkut dengan kapal-kapal milik Palembang ataupun milik Riau. Riau merupakan jalur penting penjualan lada yang dikuasai pedagang-pedagang Bugis karena belum berada di bawah monopoli VOC. Di sini berlaku pola perdagangan bebas. Para pedagang Inggris, pedagang Cina, dan pedagang setempat berkumpul untuk menjalin hubungan dagang yang saling menguntungkan. Dari sini lada kemudian diekspor ke Cina (Hanafiah, 1989: 116). Sebagian lada yang berasal dari Palembang diangkut melalui jalur darat oleh orang-orang Cina ataupun orang-orang Palembang ke Krui yang terletak di perbatasan Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu (Andaya, 1993: 120–124). Di tempat inilah pasar "gelap" Kesultanan Palembang dengan pedagang kecil ataupun pedagang besar terjadi secara besar-besaran.

Timah juga merupakan komoditi yang mampu menambah kas Kesultanan Palembang. Selayaknya Palembang berterima kasih kepada Pulau Bangka, sebab pulau ini merupakan salah satu wilayah pemasok timah terbesar di Asia (Hanafiah, 1989: 111). Meski penambangan sudah digenjot pada masa Badaruddin I, pada masa Bahauddin I penambangan dilakukan semakin intensif, terutama di Sungai Buluh, Tempilang, Biat, Bunut, Bendul, Rambat, Panji, Layang, Sungai Liat, Cengal, Pangkal Pinang, Kobar, Balar, dan Tobali (Andaya, 1993: 189–90).

Tabel Penjualan Timah Kesultanan Palembang kepada VOC, 1750–1790 M
Sumber: Djohan Hanafiah, *Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*, h. 112

Periode	Volume (dalam pikul)
1750-1760	15.000
1760-1770	22.000
1770-1780	18.000
1780-1790	15.000

Untuk keperluan intensifikasi penambangan, Bahaudin I bahkan mengambil pekerja tambang dari Siam dan menyediakan sarana tempat tinggal bagi mereka. Pengawasan terhadap para penambang dilakukan dengan menempatkan *demang* di wilayah penambangan (Supriyanto, 2013: 52). Untuk memberantas penyelundupan timah dan berbagai gangguan keamanan lainnya di wilayah ini sultan menempatkan beberapa orang menterinya untuk melakukan pengawasan (Andaya, 1993: 221).

Banyaknya kebutuhan untuk kegiatan industri di Negeri Belanda dan negara-negara Eropa lain membuat jumlah penjualan timah Kesultanan Palembang relatif tinggi. Hal ini pula yang membuat pihak Belanda tergoda untuk melakukan monopoli atas timah milik Kesultanan Palembang. Bujuk rayu Belanda seringkali dilakukan untuk mendapatkan hak monopoli timah dari sultan. Hal ini sudah berlangsung semenjak tahun 1722 M ketika VOC masih mewakili urusan-urusan Belanda di Hindia Timur. Tercatat jumlah penjualan timah Kesultanan Palembang kepada VOC pada periode 1730–1740 M mencapai rata-rata 20.000 pikul per tahun (Hanafiah, 1989: 111).

Upaya VOC pun membuahkan hasil. Melalui kontrak yang ditandatangani pada tahun 1776 M VOC mengharuskan sultan Palembang menyerahkan 30.000 pikul timah setiap tahun dengan harga 13,5 ringgit/pikul (Wargadalem, 2009). Namun demikian dalam kenyataannya Sultan Palembang tidak menyukai monopoli VOC tersebut sehingga kontrak tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Meskipun produksi timah Bangka diperkirakan antara 50.000 dan 60.000 pikul, tetapi pasokan timah kepada VOC tidak pernah menyentuh besaran 30.000 pikul. Sama halnya dengan lada, pihak Kesultanan Palembang melakukan praktik "gelap" untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Jumlah timah yang diselundupkan terhitung cukup besar, yakni lebih atau setidaknya sama dengan timah yang diminta oleh VOC (Hanafiah, 1989: 112).

Selain Belanda orang-orang Cina pun membutuhkan timah untuk diproses menjadi bahan pelapis kotak teh dan peralatan upacara keagamaan (Supriyanto, 2013: 53–54). Kanton merupakan pasar

besar bagi timah dari Bangka. Menurut informasi perwakilan VOC di Kanton jumlah pengiriman timah dengan jung-jung dari Palembang ke Kanton mencapai 20.000 pikul pada tahun 1767 M dan 20.000 pikul pada tahun 1772 M. Sebanyak 30.000 pikul timah dikirim orang-orang Palembang ke Riau pada tahun 1783 M. Kapal-kapal Inggris juga dilaporkan memuat timah dari Pulau Bangka, setidaknya 19.800 pikul pada tahun 1789 M (Hanafiah, 1989: 113).

5.2 Badaruddin I: Pemersatu Keluarga Kesultanan Palembang

Pembenahan Palembang pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I mulai dapat dirasakan. Selain perbaikan kampung dan jalan banyak bangunan megah didirikan, misalnya bangunan Kuto Lamo, pembangunan awal Kuto Besak, dan Mesjid Agung Palembang.

Pada masa ini pula terjadi kontrak antara VOC dan Kesultanan Palembang yang memberi hak monopoli atas lada dan timah yang dimiliki Kesultanan Palembang. Kontrak itu menandakan bahwa Kesultanan Palembang harus menyetor lada dan timah sesuai perjanjian setiap tahun dan peluang para pedagang non-Belanda, khususnya Inggris dan Portugis, tertutup untuk terlibat dalam perdagangan komoditi tersebut. Namun pada kenyataannya Kesultanan Palembang "membandel" dan malah melakukan perdagangan dengan bangsa lain.

Ada hal penting yang dapat dibaca dari kontrak monopoli untuk VOC tersebut. Bukan hanya sekedar memberi keleluasaan VOC dalam memperdagangkan lada dan timah Palembang, tetapi kontrak tersebut juga merupakan upaya taktis Badaruddin I untuk melonggarkan tekanan dari VOC. Selain itu, dengan menjadikan VOC sebagai pembeli tetap lada dan timah milik Palembang, Kesultanan Palembang tidak perlu pusing mencari pembeli dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian Badaruddin I memiliki lebih banyak kesempatan untuk mempersatukan keluarga kesultanan yang sebetulnya sedang terpecah-belah akibat perebutan takhta-kuasa pada masa-masa sebelum dirinya naik menjadi sultan (Hanafiah, 1989: 2).

Ketika gonjang-ganjing siapa yang akan mewarisi estafet kekuasaan mulai berhembus, terutama setelah kematian tidak wajar Pangeran Purbaya yang seharusnya menjadi sultan, Kesultanan Palembang memasuki masa ketidakpastian (Andaya, 1993). Ada dua pangeran yang berhak menjadi sultan. Salah satunya di antaranya Jaya Wikrama, nama Badaruddin I sebelum menjadi sultan. Ternyata takhta ayahnya, Sultan Muhammad Manshur, justru jatuh pada adiknya, Pangeran Sri Teruna. Hal itu menyebabkan Pangeran Jaya Wikrama terusir dari Palembang.

Pangeran Jaya Wikrama pun melanglang buana hingga sampai ke Kerajaan Siam. Di sana ia berhasil menyusun kekuatan untuk merebut Palembang. Serbuan militer yang dilakukannya berhasil mengalahkan pasukan Palembang dan mengantarkan Pangeran Jaya Wikrama ke takhta Kesultanan Palembang pada tahun 1724 M dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin I. Namun saat berkuasa, alih-alih egois dengan kekuasaannya, Badaruddin I berusaha menjaga keharmonisan keluarga istana dengan mengangkat sultan sebelumnya, Sri Teruna, sebagai penasihat kesultanan.

Kedudukan Pangeran Jaya Wikrama sebagai sultan direstui Pangeran Adipati Mangkubumi, kakak tertuanya yang memutuskan tinggal di Jambi. Hubungan keluarga yang relatif harmonis memungkinkan Sultan Mahmud Badaruddin I mempunyai kesempatan yang baik untuk menjalankan modernisasi Kesultanan Palembang Darussalam sehingga wilayah ibukota tampil sebagai sebuah kota modern (Andaya, 1993).

Karena karisma dan jasanya yang besar dalam menyatukan keluarga kerajaan Badaruddin I sering dianggap sebagai pahlawan. Makamnya paling sering diziarahi semenjak kematiannya pada tahun 1757 M. Buku-buku tentang dirinya paling banyak ditemukan. Selain itu ia semakin terkenal setelah kematiannya karena merupakan penguasa yang berhasil meletakkan dasar bagi kemajuan Kesultanan Palembang pada masa itu, terutama bidang politik yang berdampak pada kemajuan perekonomian Kesultanan Palembang.

Kedudukan Kesultanan Palembang sebagai pusat politik menjadi lebih kuat tatkala diperintah Sultan Muhammad Bahauddin I. Selama memegang tampuk kekuasaan Bahauddin I berhasil membangun armada laut yang kuat untuk mengamankan perdagangan maritim di Selat Malaka. Ia juga berhasil mengukuhkan tonggak-tonggak kekuasaan Kesultanan Palembang atas Bangka dan Belitung.

Selain itu tidak sedikit benteng pertahanan yang didirikan Bahauddin I. Muntok dan pembangunan lanjutan Kuto Besak merupakan contoh. Pembangunan Benteng Kuto Besak dimulai pada tahun 1780 M dan selesai pada tahun 1797 M. Letak benteng strategis karena berada di kawasan yang dikelilingi sungai, mulai dari Sungai Musi di bagian selatan, Sungai Sekanak di bagian barat, Sungai Tengkuruk di bagian timur, hingga Sungai Kapuran di bagian utara. Benteng Kuto Besak semakin kukuh karena diperkuat dengan parit lebar di sekelilingnya.

Benteng Kuto Besak tersusun dari batu bata dengan menggunakan batu kapur yang didatangkan dari pedalaman Sungai Ogan sebagai perekat. Luas bangunan terbilang fantastis pada masanya: 290 m x 180 m, dengan ketebalan 5 kaki dan ketinggian dari tanah antara 22 dan 24 kaki. Di dindingnya dibangun tempat pengintaian dan lobang

tembak yang dilengkapi senjata meriam di atasnya dengan jumlah tidak kurang dari 129 buah dari berbagai ukuran. Di sepanjang tembok tepian Sungai Musi dipasang pula meriam sebanyak 120 buah (Hanafiah, 1989: 6–12).

Capaian lain yang diperoleh Bahauddin I adalah penyelesaian sengketa perbatasan dengan Lampung berikut kerawanan yang sering terjadi di wilayah lalu lintas perdagangan dan penanaman lada. Karena jaminan keamanan berhasil disediakan oleh Bahauddin I, maka kekayaan dan kemakmuran kesultanan semakin bertambah. Kegiatan perniagaan pun semakin ramai. Pedagang dari berbagai wilayah, baik pedagang setempat maupun mancanegara, hilir-mudik melakukan perdagangan di Pelabuhan Palembang dengan rasa aman.

Kesultanan Palembang di bawah kekuasaan Bahauddin I menjadi pusat sastra agama Islam terkemuka di Nusantara. Hal ini terjadi berkat pengembangan syiar agama Islam menggunakan media sastra Melayu. Kemerosotan Aceh menjadi faktor tambahan mengapa peran keagamaan, terutama yang terkait dengan sastra, berpindah ke Kesultanan Palembang (Hanafiah, 1989: 110). Syeikh Abdussomad al-Palimbani merupakan salah satu ulama besar Nusantara yang giat mengembangkan Islam pada masa pemerintahan Bahauddin I.

6. Perkembangan Intelektual-Keagamaan

Sejalan dengan kemajuan ekonomi dan stabilitas politik kehidupan intelektual-keagamaan tumbuh di Palembang. Sejumlah ulama tampil dengan karya-karya mereka di berbagai bidang ilmu Islam, sehingga Palembang hadir dalam peta perkembangan intelektual Islam di Nusantara abad ke-18 M. Palembang menggantikan kedudukan Aceh abad sebelumya, yang menurun akibat konflik internal dan kemudian perang melawan Belanda. Dua orang sultan telah berjasa dalam perkembangan intelektual-keagamaan ini, yakni Sultan Najmuddin (1757–1774 M) dan putranya, Sultan Bahauddin (1774–1804 M). Berpangkal pada Masjid Agung yang dibangun pada tahun 1740 M kedua sultan tersebut memberi pengayoman kepada para ulama dan cendekiawan untuk melahirkan karya-karya keagamaan. Selain itu sultan menarik para ulama Arab untuk menetap di Palembang. Oleh karenanya masyarakat Arab, terutama yang berasal dari Hadramawt, berdatangan ke Palembang. Pada abad ke-17 dan 18 M mencapai jumlah signifikan. Beberapa ulama Arab bahkan berhasil menduduki jabatan penting di kerajaan. Pada tahun 1754–1755 M, misalnya, Sayyid Aydarus diberitakan menikah dengan saudara perempuan Sultan Mahmud, sehingga menjadi bagian lingkaran elit Kerajaan Palembang (Quzwain, 1985: 8; Azra 1994: 244).

Sementara itu Abdussamad al-Palimbani merupakan ulama yang memiliki karya-karya penting untuk dibahas. Quzwain (1985: 22–31) menyebut delapan karya (kitab) yang bisa dinisbahkan

kepada al-Palimbani, yang terkenal di antaranya adalah *Hidayat al-Salikin fi Suluk Maslak alMuttaqin*. Ditulis dalam bahasa Melayu di Mekah dan selesai pada tahun 1788 M, karya ini merupakan adaptasi karya al-Ghazali, *Bidayat al-Hidayah*. Karya yang lain adalah *Sair al-Salikin ila 'ibadat Rabb al-'Alamin*, yang juga didasarkan pada karya al-Ghazali, *Lubab Ihya 'Ulum al-Din*. Karya ini ditulis dalam bahasa Melayu dan diselesaikan di tanah suci Mekkah sekitar sepuluh tahun setelah kitab yang disebut pertama (lihat juga Iskandar, 1996: 450–452). Al-Palimbani mewarisi tradisi kecendekiaan neo-sufisme, sehingga karya-karyanya berusaha menegaskan perlunya rekonsiliasi antara sufisme dan syariah. Atas dasar itu pula ia banyak menggubah karya-kara al-Ghazali, tokoh utama di balik usaha rekonsiliasi dua mazhab pemikiran Islam tesebut.

Ulama lain dapat disebut Syihabuddin bin Abdullah Muhammad. Karyanya antara lain *Syarh yang Latif atas Mukhtasar Jawharut Tauhid*, berupa terjemahan bahasa Melayu atas ulasan mengenai *Jawhar al-Tauhid* karya Ibrahim al-Laqani. Karya lainnya adalah *Risalah*, yang banyak bersumber pada kitab *Risalah fi al-Tawhid* karya Walli Raslan al-Dimisyqi. Kemas Fachruddin merupakan ulama lain yang memberi sumbangan dalam penulisan karya-karya keagamaan (sastra kitab). Ia juga telah menerjemahkan dan menggubah sejumlah kitab berbahasa Arab ke dalan bahasa Melayu, yakni *Fath al-Rahman* oleh Zakariya al-Anshari, *Futuh al-Sya'm* (terjemahan dari *Mukhtasar Futuh al-Sya'm* karangan Abu Ismail al-Basri, dan *Tuhfat al-Zaman* (terjemahan dari *Tuhfat al-Zaman fi Dzarf al-Yaman* karangan Ibn Syaddad al-Himyari) (Drewes, 1977: 219–225; Rahim 1998: 93-95).

Demikianlah Palembang berperan penting dalam perkembangan Islam di Indonesia pada abad ke-18 M. Palembang melahirkan banyak ulama terkemuka pada abad tersebut berikut karya-karya mereka yang sangat berpengaruh dalam menentukan wacana kecendekiaan dan sosial Islam Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa karya-karya keagamaan ulama Palembang yang telah disebut di atas—dan juga karya ulama Banjar di kalimantan—telah mengalami cetak uang berkali-kali. Dengan demikian, karya-karya keagamaan tersebut menjadi sumber bacaaan dan pada gilirannya menjadi sumber pembentukan pengetahuan dan sikap keagamaan muslim. Mereka yang membaca karya-karya tersebut tidak hanya Muslim di Melayu, tetapi juga di wilayah lain dan kelompok lain (Arab) yang hidup di Palembang dan di Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu karya-karya ulama Palembang memperkuat persebaran penggunaan bahasa Melayu di Nusantara secara lebih luas.

Seperti kesultanan lain Palembang berperan sebagai pusat kegiatan keilmuan di samping politik dan ekonomi. Namun demikian jika dibandingkan dengan Aceh, misalnya, Palembang tidak menunjukkan jalinan hubungan antara sultan dan ulama, seperti

antara Syamsuddin As-Sumatrani dan Sultan Iskandar Mudah atau Syekh Nuruddin Ar-Raniri dengan Sultan Iskandar Tsani di Kesultanan Aceh. Di samping itu Sultan Palembang tidak pernah didampingi oleh ulama yang kuat sebagaimana Syekh Yusuf yang selalu mendampingi Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten (Rahim, 1998: 99–100; Tjandrasasmita, 1967). Oleh karena itu Palembang tidak pernah berperan sebagai penyebar Islam sebagaimana dilakukan oleh Kerajaan Banten, Gowa/Tallo, dan Ternate. Sebaliknya juga tidak seperti Mataram sesudah Sultan Agung, para ulama Palembang tidak tampil sebagai *counter elite*, yang sesekali bertindak sebagai pengkritik keras terhadap kekuasaan (Abdullah, 1987: 210–211).

Begitu pula di Palembang tidak terjadi pertentangan sengit yang menimbulkan pertumpahan darah antara *fukaha* (yang diwakili Ar-Raniri) dan kaum *wahdatul wujud* (yang diwakili pengikut Syamsuddin As-Sumatrani dan Hamzah Fansuri) seperti di Aceh. Kitab *Sayrus al-Salikin* karya Abdussamad al-Palimbani berusaha memadukan inti ajaran *wahdat al-wujud* Ibn Arabi dengan prinsip-prinsip ajaran Al-Ghazali. Kedua ajaran tokoh sufi tersebut tidak dianggap sebagai dua aliran tasawuf yang berbeda dan mustahil disesuikan, tetapi sebagai ajaran yang saling melengkapi. Dalam kitabnya itu bahkan Abdussamad al-Palimbani menganjurkan para penuntut tasawauf yang sudah mencapai tingkat tertinggi membaca kitab-kitab karangan Syamsuddin As-Sumatrani, 'Abdul Karim Al-Jilli, dan Ibn 'Arabi kepada (Rahim, 1998: 95–96; Quwazin, 1985: 141–142).

Kesultanan Palembang, seperti dicatat Stenbrink (1984: 186), menjadikan keraton sebagai pusat kegiatan sastra dan ilmu agama. Hal ini berlainan dengan kebiasaan di Jawa yang menjadikan kegiatan keagamaan berpusat di pesantren. Belum ditemukan hubungan keraton dengan Mesjid Agung dalam kaitan tersebut. Boleh jadi ada semacam pembagian perhatian di antara keduanya: keraton lebih memperhatikan aspek sastra keagamaan dan tasawuf, sedangkan Mesjid Agung pada aspek peribadatan dan fikih. Keduanya berjalan dengan sasaran yang berbeda sehingga tidak terjadi konflik. Apalagi pangherang penghulu nata agama dan khatib imam, serta khatib-khatib yang lain diangkat oleh sultan. Boleh jadi karena berlangsung di keraton, dan pesantren bukan sebagai pusat sastra dan pengembangan ilmu agama Islam, maka pengembangan sastra dan ilmu agama Islam di Palembang kurang berakar seperti di Jawa (Rahim, 1998: 96–97).

Di samping karya-karya keagamaan, yang juga disebut "sastra kitab" oleh para ulama, Kerajaan Palembang juga menjadi rumah bagi tumbuhnya karya-karya sastra jenis lain. Salah satu di antaranya yang bekembang adalah karya sastra sejarah yang ditulis para pujangga keraton. *Hikayat Palembang*, yang ditulis oleh Kiai Rangga Setyanandita Ahmad bin Kiai Ngabehi Mastung sekitar tahun 1831–1832 M, sebagai salah satu contoh. Teks

dimulai dengan paparan Kerajaan Palembang masa kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin I yang naik takhta pada tahun 1723 M, kemudian pembangunan Kota Lama pada tahun 1737 M, dan sebelas tahun kemudian (1748 M) berdiri mesjid istana. Setelah itu teks menceritakan pergantian kekuasaan oleh Sultan Ahmad Najamuddin, setelah Sultan Mahmud Badaruddin I meninggal dunia, dan berlanjut hingga Sultan Muhammad Bahauddin naik ke singgasana. Raja ini memindahkan istana ke Kota Besar. Ia meninggal dan digantikan Sultan Mahmud Badaruddin II. Teks juga mencatat peristiwa pembunuhan terhadap orang Belanda pada tahun 1811 M dan ekspedisi orang Inggris di bawah pimpinan Gillespie pada tahun 1812 M di samping ekspedisi Belanda di bawah pimpinan H.M. de Kock. *Hikayat Palembang* berakhir dengan riwayat Sultan Ahmad Najamuddin yang dibuang ke Banda (Iskandar, 1995: 462).

Tigas teks sastra sejarah (hikayat) berikut juga penting dicatat, yakni *Carita Negeri Palembang*, *Carita daripada Aturan Raja-raja di dalam Negeri Palembang*, dan *Hikayat Mahmud Badaruddin*. Ketiga teks tersebut ditulis Pangeran Tumenggung Karta Menggala, seorang keturunan keluarga kerajaan. Menurut Iskandar (1996: 462–461), pangeran ini keturunan langsung Sultan Muhammad Mansur (1706–1714 M) dan melalui nenek dari pihak ayahnya ia memiliki garis keturunan dari Sultan Mahmud Badaruddin I (1724–1757), sultan yang membawa Palembang mencapai kejayaan. Sesudah kesultanan dihapus ia memegang beberapa jabatan di pemerintahan kolonial Belanda. Penulisan ketiga naskah di atas atas permintaan A.H.W. Baron de Kock, pejabat komisaris di Palembang (1824–1847) (Drewes 1977: 228). Dilihat dari judulnya ketiga teks di atas jelas membicarakan hal-hal penting berkait dengan sejarah dan tata-kelola politik yang dilaksanakan oleh raja-raja Palembang, terutama Sultan Mahmud Badaruddin yang diakui sebagai raja dan sekaligus pahlawan yang melindungi masyarakat Palembang (Andaya, 1993: 203–210). Di samping itu terdapat *Sila-sila Raja-raja di dalam Negeri Palembang* karya Demang Muhiddin, yang ditulis sekitar tahun 1861–1862 M. Sebagian besar teks berbicara asal-usul dan Raja Palembang, yang merupakan perpaduan Jawa dengan Melayu-Sumatra (Iskandar, 1995: 462–63).

Selain berbentuk hikyat, tema-tema yang terkait dengan sejarah juga diwujudkan dalam bentuk syair, yang disebut "syair sejarah". *Syair Perang Mengkasar* yang juga disebut *Syair Speelman* karya Encik Amin, ditulis di Makassar tidak lama setelah perang berakhir, merupakan contoh. Seperti tampak dari judulnya, syair ini bercerita tentang perang kerajaan Gowa-Tallo Makassar dengan VOC-Belanda di bawah pimpinan laksamana C. Speelman pada tahun 1668–1689 M. Enci Amin merupakan peranakan Melayu-Makassar yang pernah menjadi jurutulis Raja Gowa-Tallo Sultan Hasanuddin. Oleh karena itu bahasa syair ini ada pengaruh bahasa Bugis dan Makassar, begitu juga bahasa Minangkabau (Iskandar 1995: 463).

Dalam tradisi sastra Palembang, dan Melayu pada umumnya, *Syair Perang Mengkasar* dianggap penting. Syair tersebut bukan hanya yang pertama untuk bidang non-keagamaan—yang pada masa sebelumnya syair hanya digunakan untuk menjeaskan ajaran sufisme oleh Hamah Fansuri—tetapi juga berpengaruh dalam penggunaan syair untuk penulisan sejarah. Sejarah yang ditulis dalam bentuk syair berbeda dengan yang ditulis dalam bentuk hikayat, yakni berupa perstiwa tertentu yang khusus dengan durasi waktu pendek. *Syair Hemop* atau *Syair Kompeni Welanda Berperang dengan Cina* oleh Abdur-Rahman, misalnya, mengisahkan perang antara Belanda di bawah pimpina Van Imhoff dan orang Cina di Batavia pada tahun 1740 M. Abdur-Rahman merupakan seorang jurnalis yang pernah tinggal lama di Batavia (Iskandar, 1995: 464). Beberapa syair diilhami oleh karya Encik Amin, yakni *Syair Perang Siak* oleh Encik Abdullah, *Syair Ikatan Raja ke Laut* oleh Raja Culan, dan *Syair Perang Kaliwungu* oleh Abdul-Kadir (Iskandar, 1995: 464).

Sultan Mahmud Badaruddin II (1804–1821 M) merupakan tokoh penting dalam perkembangan sastra. Selain digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas, organisator yang rapi, dan diplomat serta ahli strategi yang mumpuni (Woelders,1975: 3), ia juga dikenal sebagai orang yang berminat pada dunia keilmuan. Sevenhoven (1971 [2015]: 40) mencatat ia memiliki perpustakaan yang besar; suatu pengecualian dari masyarakat Palembang pada umumnya yang tidak bisa baca-tulis. Meski pengguna perpustakaan ini kebanyakan orang Arab, keberadaannya memberi bukti bahwa Sultan Badaruddin memiliki minat dan perhatian yang tinggi dalam bidang keilmuan. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Sultan Badaruddin merupakan satu dari sejumlah nama yang mendorong penulisan naskah-naskah di istana Kesultanan Palembang. Ia tercatat menulis empat karya, yakni *Hikayat Martalaya*, *Syair Perang Menteng*, *Syair Sinyor Kista*, dan *Syair Burung Nuri*. *Hikayat Martalaya* merupakan karya yang terkenal dan berpengaruh dalam tradisi sastra di Palembang, teristimewa cerita kepahlawanan para pejuang Palembang, yang juga terdapat dalam *Syair Perang Menteng*. *Syair Sinyor Kista* ditulis saat ia masih berkuasa, sebagaimana bisa dilihat dari ungkapan bahwa "Sultan Badaruddin mengarang cerita masa di Palembang lagi bertahta, akan menjadi penglipur cinta" (Drewes, 1977: 225–226). Adapun *Syair Burung Nuri* mengisahkan percintaan antara burung nuri dan burung simbangan, termasuk syair perlambangan yang memang sangat populer dalam tradisi sastra di Palembang. Di samping itu ia juga mengarang *Pantun Sultan Badaruddin*, yang ditulis dalam bentuk pantun sebagai pelipur hati saat hidup di pengasingan di Ternate, Maluku Utara (Iskandar, 1996: 514–516).

Demikianlah, jelas bahwa kegiatan intelektual-keagamaan di Palembang berkembang sedemikian rupa sebagaimana tampak melalui karya keagamaan dan karya sastra yang dihasilkannya. Selain para ulama tidak sedikit karya yang dinisbahkan pemiliknya kepada sultan dan elit politik Palembang, antara lain Sultan

Mahmud Badaruddin II, Sultan Ratu Ahmad Najamuddin, Sultan Muhammad Bahauddin, Pangeran Jayakrama, dan Pangeran Arya Muhammad Zainuddin. Kitab-kitab tersebut disimpan dalam perpustakaan istana, sehingga pada waktu Sultan Muhammad Badaruddin II dikalahkan Inggris banyak yang dirampas armada Kolonel Gillespie dan dibawa ke Inggris (1812 M). Pada waktu Sultan Mahmud Badaruddin II dikalahkan Belanda dan dibuang ke Ternate (1822 M) pun seluruh koleksi istana dirampas dan dibawa ke Batavia (Iskandar, 1986: 67). Naskah-naskah tersebut merupakan sisa naskah dan kitab yang sempat diselamatkan ketika Inggris menduduki keraton. Oleh Belanda naskah-naskah itu kemudian dikirim ke Departermen Dalam Negeri di Batavia pada tanggal 13 Juni 1822 (Rahim 1998: 98).

Koleksi yang dirampas oleh serdadu Inggris tinggal sebagian kecil saja yang masih ditemukan di British Libraries London serta terdaftar dalam kode naskah Raffles dan Marden (10 naskah). Menurut catatan dalam salah satu naskah Marsden, naskah itu dibawa dari Palembang pada tanggal 28 April 1812, kemungkinan besar sebagai barang rampasan dari keraton Pelambang ketika Inggris menduduki Palembang. Hal itu serupa dengan naskah-naskah lain yang diperoleh dengan jalan yang sama (Drewes, 1977: 199; Iskandar, 1986: 67). Boleh jadi naskah yang diidentifikasikan sebagai naskah keraton Palembang yang terdapat di Binliotheque Nationale Paris dan di perpustakaan Leningrad (Rusia) merupakan sebagian yang dibeli dari rampasan tersebut.

Masih untung dari sekian banyak koleksi perpustakaan keraton Palembang kini masih dapat ditemukan di berbagai perpustakaan dan museum terkenal di beberapa negara, seperti Inggris, Belanda, Prancis, Rusia, dan Indonesia (Jakarta). Koleksi perpustakaan keraton Palembang yang masih dapat ditemukan saat ini, menurut catatan Drewes (1977) dan Iskandar (1986), berjumlah 100 judul. Di antaranya 43 judul membahas masalah tauhid, ilmu kalam, dan tasawuf; akhlaq sebanyak 33 buah, tujuh judul membicarakan Quran dan Hadis, sedang tiga judul membahas fikih. Di samping itu terdapat naskah Melayu dan Jawa. Naskah dalam bahasa Jawa berisi cerita yang berkaitan dengan wayang, berjumlah 13 naskah. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Jawa berpengaruh di keraton Palembang, sebagaimana juga bahasa keraton yang mirip bahasa Jawa *krama inggil*. Naskah Melayu meliputi hikayat, syair, pantun, dan silsilah (Rahim, 1998: 98–99). Dengan demikian, kehadiran pemerintah kolonial Belanda tidak hanya menhapus Kesulatanan Palembang, tetapi sekaligus menghancurkan pusat studi Islam dan sastra dunia Melayu di Palembang.

7. Institusi Hukum Islam

Di samping perkembangan kecendekiaan aspek keagamaan lain yang menandai kejayaan Kesultanan Palembang adalah lembaga dan penerapan hukum Islam. Seperti telah disebut sebelumnya,

Palembang memiliki pengadilan khusus untuk masalahh-masalah di bawah penghulu, mengikuti sistem hukum di kerajaan Jawa. Meski tidak diketahui secara pasti kapan lembaga kepenghuluan mulai berdiri, perjanjian VOC-Palembang sedini tahun 1642 M sudah menyebut adanya pejabat tinggi agama (*opperpriester*) (Rahim, 1998: 101), yang bisa dimaknai sama dengan penghulu. Hal ini dilihat bahwa sumber hukum yang diakui di Kesultanan Palembang adalah *Undang-Undang Simbur Cahaya*. Kitab itu ditulis pada masa kekuasaan Pengeran Sedo Ing Kenayan saat perjanjian dengan VOC 1642 M ditandatangani. Ratu Sinuhun, istri Sedo Ing Kenayan, disebut sebagai penyususun undang-undang tersebut. Di samping itu Sultan Abdurrahman diakui berperan penting dalam proses pengukuhan Palembang sebagai sebuah kesultanan (Andaya, 1993: 112).

Sejak pertengahan abad ke-18 M, ketika Palembang memasuki kejayaan, lembaga hukum ini juga mengalami proses penguatan kelembagaan secara struktural dalam sistem hukum dan administrasi kesultanan. Rahim (1998: 102–4) mengemukakan bahwa susunan pejabat agama di Kesultanan Palembang menempatkan pangherang penghulu nata agama sebagai jabatan tertinggi bidang keagamaan, setara dengan patih untuk bidang non-keagamaan. Di bawah pangherang penghulu ada khatib penghulu yang menjadi pembantu dan anggota mahkamah syari'ah. Di bawahnya lagi ada khatib imam yang menjadi imam Masjid Agung dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengajian. Sementara untuk tugas keagamaan di tingkat kampung, ada jabatan yang disebut khatib (lihat juga Sevenhoven 2015 [1971]: 29). Khusus di daerah hulu terdapat pejabat agama yang bernama lebai penghulu, yang ada pada setiap marga dan berkedudukan sebagai wakil Pangeran Penghulu Nata Agama. Ia dibantu oleh khatib di setiap dusun.

Pangherang penghulu nata agama sejajar dengan patih, sehingga memiliki kedudukan sangat penting di bawah sultan. Dalam setiap upacara kesultanan (*seba*) pangherang penghulu senantiasa duduk di sebelah kanan sultan, sedang patih duduk di sebelah kiri sultan. Pangherang penghulu mengemban tugas sultan di bidang keagamaan, yang bertujuan mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan rohani umat Islam, di samping menyelesaikan berbagai persoalan terkait agama di antara umat Islam. Oleh karena itu tugas pangherang penghulu, bersama jabatan lain di bawahnya, meliputi banyak aspek kehidupan keagamaan, yang memang senantiasa terjadi di tengah masyarakat. Sultan hampir secara mutlak menyerahkan tugas-tugas bidang agama kepada pangeran penghulu.

Rahim (1998: 107–113) menjelaskan tugas pangherang penghulu meliputi sejumlah bidang keagamaan sebagai berikut: (1) Bidang ibadah, meliputi memimpin masjid (antara lain mengatur dan memimpin peribadatan, kegiatan pengajian, perayaan di hari-hari besar Islam, dan mengurus keuangan masjid) serta menjadi juru doa. Tugas sebagai juru doa mengacu pada kegiatan doa

sebagai bagian dari peribadatan dan juga kegiatan yang berkait daur kehidupan, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian. (2) Bidang kekeluargaan, meliputi mengurus dan mencatat perkawinan (sebagaimana dilakukan penghulu di Indonesia masa kini) dan menyelesaikan perselisihan dalam keluarga, meliputi perselisihan suami-isteri dengan tuntutan perceraian serta perselisihan harta warisan. Dalam hal ini penghulu bertindak sebagai hakim yang memutus perkara dan karenanya kerapkali disebut kadi yang berdasar ajaran Islam. (3) Bidang kemasyarakatan, antara lain (a) memberikan fatwa, yakni ketetapan hukum (meski tidak mengikat) tentang suatu masalah terkait dengan agama, yang diminta oleh sultan atau masyarakat, dan yang menjadi perdebatan umum di tengah masyarakat; (b) menyelenggarkan pendidikan dan pengajaran agama, mulai dari mengenal aksara Arab hingga membaca dan mengaji kitab, dengan jumlah pelajar terbatas hingga mayarakat luas; (c) menjadi juru rembuk (*musyawir*), yakni menjadi pihak yang mendamaikan jika terjadi perselisihan antara berbagai pihak; (d) mengumpulkan dan membagikan zakat (amil zakat), terutama zakat fitrah yang diberikan setahun sekali pada akhir bulan puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri; (e) memelihara harta wakaf, yakni memastikan bahwa harta waaf (dapat berupa tanah, rumah ibadah, sekolah, dan lain-lain) digunakan sesuai dengan tujuan yang mewakafkan dan juga untuk kepentingan orang banyak; (f) mengurus penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, menguburkan, hingga membaca doa pengajian yang diadakan beberapa (biasanya tujuh) malam setelah kematian; (g) memelihara pekuburan dan tempa keramat; dan (h) menyembelihkan hewan, terutama untuk keperluan selamatan yang diadakan oleh masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kesultanan Palembang telah memiliki sistem hukum yang sudah mapan dan mengambil banyak aspek hukum dari dunia muslim. Dalam banyak segi Palembang sama dengan kesultanan lain di Nusantara, teristimewa Jawa, yang menjadikan lembaga hukum sebagai aspek penting dari struktur politik kesultanan (Hisyam, 2001), sehingga kerap dilihat secara keliru sebagai satu-satunya tanda dari pengaruh Islam (Gullick, 1972: 139). Lembaga dan praktik hukum berakar kuat di tengah masyarakat Palembang, sehingga ketika Belanda menghapus kesultanan pada tahun 1825 M lembaga hukum kepenghuluan tetap dipertahankan sebagai bagian sistem hukum yang diberlakukan pemerintah kolonial. Upaya pengaturan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat dilakukan Belanda secara efektif dengan mengacu pada aturan hukum yang sudah berjalan sejak masa kesultanan, seperti yang terlembaga dalam kepenghuluan.

Belanda justru memperkuat lembaga hukum dengan sejumlah aturan baru dan menambah tugas penghulu sesuai prinsip reformasi hukum yang dibuatnya sejak pertengahan abad ke-19 M. Keputusan tertanggal 20 April 1832, misalnya, Belanda menjadikan jabatan pangherang penghulu menjadi *hoofdpenghulu* (penghulu kepala) di tingkat Residen Palembang, diikuti khatib

penghulu, khatib imam, modin, bilal, dan lebai untuk daerah *uluan*. Meski jajaran jabatan tersebut dalam banyak hal sama dengan masa kesultanan, namun lembaga kepenghuluan tersebut berbeda secara administratif. *Hoofdpenghulu* diwajibkan membuat laporan secara berkala kepada residen. Begitu pula khatib penghulu di ibukota Palembang diharuskan membuat catatan setiap ada orang kawin dan melaporkannya ke *hoofdpenghulu*. Hal yang sama berlaku untuk semua jabatan lain dari lembaga penghulu. Belanda menerapkan kebijakan khusus yang memotong jalur pengaruh *hoofdpenghulu* untuk daerah uluan, yang hanya berkuasa di ibukota Palembang. Belanda menciptakan jabatan baru di *uluan*, yakni *hoofdpenghulu* di tiap-tiap satuan daerah yang kemudian menjadi distrik dan bertanggungjawab langsung ke residen (Rahim, 1998: 123–125). Ini jelas berbeda dari jabatan pangherang penghulu masa kesultanan, yang berkuasa di daerah ibukota dan di daerah *uluan*.

Dengan keharusan membuat laporan berkala secara bertingkat ke pejabat Belanda yang berujung di Residen, para pejabat kepenghuluan berubah dari abdi sultan menjadi pegawai pemerintah Belanda (*ambtenaar*). Mereka yang menduduki jabatan pada lembaga hukum harus memiliki kemampuan baca tulis, selain tentu saja menguasai kitab-kitab hukum Islam. Di samping itu mereka juga harus mengemban tugas baru, di samping tugas-tugas lama. Tugas-tugas baru tersebut meliputi (1) menjadi penasihat pada *landraad* (pengadilan negeri), yakni penghulu menjadi penasihat untuk orang muslim yang tengah berperkara di *landraad*; (2) membantu penarikan pajak (*belasting*), terutama di daerah *uluan* yang menyulitkan Belanda menarik pajak; (3) membantu pencatatan penduduk, baik yang lahir maupun yang meninggal, sehingga Belanda memiliki data kependudukan secara tepat karena masyarakat umumnya datang ke penghulu saat terjadinya peristiwa penting dalam kehidupan mereka; dan (4) mengawasi pendidikan agama, yakni penghulu mengawasi apa yang berlangsung di lembaga pendidikan Islam, misalnya jumlah murid, daftar guru, dan kurikulum yang digunakan, yang kemudian menjadi pokok utama Ordonansi Guru pada awal abad ke-20 M (Rahim, 1998: 126–128).

Begitu pula pemerintah kolonial Belanda menata ulang beberapa bagian *Undang-Undang Simbur Cahaya* sesuai dengan kebutuhan kolonial, sehingga berubah menjadi undang-undang adat. Undang-undang tersebut terdiri atas enam bab: bab 1 tentang adat bujang-gadis dan perkawinan, bab 2 tentang aturan marga, bab 3 tentang aturan berladang, bab 4 aturan kaum, bab 5 terkait dengan adat perhukuman, dan bab 6 berupa aturan pajak. Penggunaan kembali judul yang sama, *Undang-Undang Simbur Cahaya*, bermakna politik: pemerintah kolonial berusaha meyakinkan masyarakat Palembang bahwa aturan yang berlaku masih mengikuti aturan masa kesultanan (Rahim, 1998: 116). Dengan demikian pemerintah kolonial berharap bahwa kekuasaannya memperoleh pengakuan

sosial-keagamaan dalam masyarakat. Pengakuan itu sangat dibutuhkan di tengah gerakan perlawanan yang berkembang, termasuk di daerah-daerah lain di Nusantara.

8. Kemunduran

Awal kemunduran Palembang dinisbahkan pada masa kekuasaan Sultan Ratu Mahmud Badaruddin II (1804–1821 M). Meski mewarisi keberhasilan penguasa sebelumnya, Sultan Mahmud Bahauddin (1776–1804 M), namun dinamika politik berlangsung dengan melibatkan berbagai kekuatan Eropa yang saling bersaing, sehingga membuat Sultan Badaruddin II tidak mampu mempertahankan kedudukan Kerajaan Palembang sebagai *vassal* satu kekuatan politik tertentu yang dominan.

Sultan Mahmud Bahauddin—dengan pondasi yang dibangun sultan-sultan sebelumnya, teristimewa Sultan Mahmud Badaruddin I (1724–1757 M)—membawa kemajuan perekonomian Kesultanan Palembang, yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Kejatuhan VOC di penghujung abad ke-18 M semakin memberi keuntungan bagi sang sultan, sebab praktik monopoli VOC mulai lenyap dari tanah Melayu dan kemudian melahirkan semangat perdagangan bebas. Sementara Perdagangan bebas berdampak positif menambah pundi-pundi uang Kesultanan Palembang. Ekspor gelap yang dilakukan oleh kesultanan ke Makau di Tiongkok mencapai angka yang fantastis, yakni 20.000 pikul lada (satu pikul setara dengan 61,76 kg) dan 27.655 pikul timah per tahun (Wargadalem, 2017: 5). Hal ini berbanding terbalik ketika Palembang masih menjadi mitra niaga VOC yang hanya mampu menjual 5.000 pikul lada dan timah per tahun (Hanafiah, 1995).

Masa-masa indah perdagangan Kesultanan Palembang tersebut berlangsung sampai Sultan Mahmud Bahauddin menyerahkan estafet kekuasaan ke tangan putra mahkota, Raden Hasan Pangeran Ratu yang saat naik takhta bergelar Sultan Ratu Mahmud Badaruddin II (Veth, 1869: 657; Woelders, 1975: 75–85). Sama seperti ayahnya, Sultan Badaruddin II juga memaksimalkan dua komoditi unggulan Palembang: lada dan timah. Kedua mata dagangan ini membawa Kesultanan Palembang mencapai puncak kejayaan. Keuntungan dari hasil penjualan komoditi tersebut bahkan membuat Palembang mampu membangun keraton yang besar dan kokoh, mesjid yang dikatakan paling indah di Hindia Timur, benteng-benteng, dan kuburan keluarga sultan yang disebut Kawah Tengkurep (Faille, 1971: 52).

Namun demikian kekayaan alam Palembang, terutama lada dan timah, juga menjadi incaran bangsa-bangsa Barat yang bersaing di Hindia Timur. Belanda dan Inggris menjadi dua negara kolonialis besar yang berupaya mendapat akses untuk

memperdagangkan (baca: memonopoli) kedua komoditi tersebut. Pertanyaannya, mengapa kedua negara tersebut bersaing secara ketat untuk mendapatkan lada dan timah?

Selain terkait dengan mata dagangan yang sedang menjadi primadona, persaingan di antara keduanya tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik dalam konteks Eropa, yakni perang antara Prancis bersama sekutunya (Belanda dan Spanyol) dan negara-negara penganut monarki, seperti Inggris, Austria, dan Prussia. Perang meletus setelah revolusi Prancis dan menggerakkan Prancis menyerang Inggris. Di tengah persaingan tersebut Prancis ternyata berhasil menduduki Belanda dan kemudian mendirikan Republik Bataf di negeri kincir angin itu pada tahiun 1795–1806 M. Pendudukan tersebut praktis membuat tanah koloni di Asia Tenggara, termasuk Palembang, jatuh ke tangan Prancis; bahkan seorang Belanda bernama Herman Willem Daendels harus mendengar perintah Prancis untuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1804 M.

Belanda yang semakin lemah tidak memiliki kekuatan memadai untuk melawan Prancis. Akhirnya para penguasa Belanda memutuskan untuk melarikan diri ke Inggris. Mereka minta bantuan Inggris dan akhirnya kedua negara bersepakat dengan mengeluarkan traktat yang disebut Anglo-Dutch Treaty of 1814. Traktat itu lebih kurang berisi koloni-koloni Belanda di Hindia Timur diserahkan kepada Inggris agar tidak jatuh ke tangan Prancis. Inggris pun kemudian memblokade Pulau Jawa. Daendels digantikan Thomas Stamford Raffles. Jawa beserta tanah-tanah koloni Belanda lainnya menjadi aman dari rongrongan Prancis. Meskipun demikian Raffles ingin lebih dari itu. Ia sadar bahwa peluang tersebut merupakan momentum penting bagi Inggris untuk mengambil alih wilayah-wilayah koloni Belanda ke tangan Inggris.

Dalam konteks itu Raffles melakukan pendekatan terhadap raja-raja Melayu, termasuk Sultan Mahmud Badaruddin II dari Kesultanan Palembang. Salah satu tawaran Raffles adalah dukungan untuk mengusir Belanda dari tanah mereka (Hanafiah, 1989). Gayung bersambut. Tawaran Raffles diterima oleh Sultan Badaruddin II. Belanda yang sudah sejak awal ada di Palembang dan mendirikan loji-lojinya pada titik tertentu meresahkan Sultan Badaruddin II. Ia ingin sekali mengusir Belanda dari Palembang. Oleh karena itu tawaran Inggris lewat Raffles merupakan salah satu jawaban. Dengan bantuan Inggris sultan akhirnya berhasil menghancurkan loji-loji belanda, melucuti para penghuninya, dan bahkan sebagian besar penghuninya dibunuh (Wurtzburg, 1949).

Pasca pengusiran Belanda, Inggris menagih janji Kesultanan Palembang yang sedianya memberi jalan untuk menggantikan posisi Belanda di Palembang dengan mendirikan benteng (Wurtzburg, 1949). Namun kesalahpahaman tampaknya terjadi antara Sultan

Badaruddin II dan Inggris. Inggris geram karena menganggap Badaruddin II menolak keinginan inggris. Palembang berusaha memberi penjelasan, tetapi kesalahpahaman telah membuat kawasan milik Kesultanan Palembang dihantui oleh ekspedisi Inggris pada tahun 1812 M. Ekspedisi itu menjadi awal pertikaian multi-dimensi yang diderita Kesultanan Palembang. Selain itu konsekuensi dari tindakan itu juga membawa Kesultanan Palembang pada kemelut berkepanjangan yang melibatkan dua negara besar, yaitu Belanda dan Inggris. Atmosfir perang di Eropa serasa hadir di negeri yang dijuluki Venesia dari Timur (Nas, 1995) itu.

Keadaan diperparah dengan perselisihan di lingkup kesultanan yang terjadi antara Badaruddin II dan adiknya, Pangeran Adipati atau Najamuddin II, yang juga menghendaki takhta kekuasaan. Pertikaian inilah yang kelak menjadi pintu masuk Belanda dan Inggris bermain secara "cantik" dalam mendapatkan lada dan timah yang dimiliki Kesultanan Palembang.

Meski gagal mendapatkan agenda politiknya di Palembang, termasuk hubungan yang memburuk dengan Sultan Badaruddin II, Inggris tetap mencari cara untuk mendapatkan akses ke komoditi milik Kesultanan Palembang. Inggris melihat celah dalam pertikaian kakak-beradik Badaruddin II dengan Najamuddin II. Ternyata naiknya Badaruddin II menjadi sultan memantik kecemburuan adiknya. Selain itu ramalan tentang sultan baru yang bukan merupakan anak pertama dan terakhir menjadi salah satu narasi yang dikembangkan oleh Najamuddin II dalam menyatukan kekuatan pendukungnya, sekalipun tidak begitu berhasil (Woelders, 1975). Najamuddin II bukan satu-satunya anak tengah dalam trah Kesultanan Palembang. Masih ada adiknya, Pangeran Adipati, yang mempunyai peluang sama dengan Najamuddin II bila mengacu pada ramalan tersebut. Meskipun demikian hasrat politik Najamuddin II lebih besar dibanding si adik, dan pada perkembangan selanjutnya adik-adik Badaruddin II dan Najamuddin II bahkan meminta bantuan Inggris untuk meredakan kekisruhan (Wargadalem, 2017).

Ekspedisi Inggris tahun 1812 M memang tidak mampu merangkul semua wilayah Kesultanan Palembang. Meskipun demikian satu wilayah penting bernama Pulau Bangka sudah berada di bawah pengaruh Inggris. Di sini persekutuan antara Inggris dan Najamuddin II terbentuk karena kedua belak pihak merasa punya musuh bersama. Mereka sepakat menggulingkan Sultan Badaruddin II dari takhta. Najamuddin II pun akhirnya menjadi sultan baru Kesultanan Palembang. Kekuasaan yang didapat dengan bantuan asing ternyata tidak disukai sebagian besar rakyat, terutama para pendukung Baharuddin II.

Naiknya Najamuddin II akibat campur tangan Inggris membawa konsekuensi sangat besar. Kesultanan Palembang bergejolak dan masyarakat terpecah menjadi dua pihak yang saling bermusuhan.

Inggris terus menyulut pertikaian dan berusaha menangkap Badaruddin II. Berulangkali Badaruddin II menerima gempuran dari Inggris dan berulang kali pula ia harus mundur dan bertahan. Meskipun demikian upaya Inggris menangkap Badaruddin II tidak pernah berhasil. Upaya tersebut bahkan membuat rakyat semakin simpati pada Badaruddin II. Kekuatan Badaruddin II pun justru semakin kuat. Inggris tentu khawatir, sebab bisa saja Badaruddin II balik mengusir Inggris dari Palembang. Apalagi Najamuddin II sebagai "sultan boneka" gagal menyatukan kekuatan rakyat Palembang.

Inggris tidak tinggal diam. Jalur perundingan pun diupayakan. Pada tanggal 27 Juni 1813 pihak Inggris diwakili Mayor Robison menemui Badaruddin II di Muara Rawas. Inggris membuka percakapan dengan menanyakan sikap Badaruddin II terhadap ekspedisi Inggris tahun 1812 M. Robison ingin memastikan mengapa ekspedisi Inggris mendapat perlakuan yang mengerikan. Ternyata jawaban Badaruddin II membuat Inggris kaget. Sultan Badaruddin II sedari awal ingin menerima Inggris, sebagaimana dirinya menerima Belanda. Ia menolak Inggris karena utusannya yang dikirim ke ekspedisi Inggris 1812 ditawan dan tidak pernah kembali. Inggris terkejut mendengar hal itu dan mengklarifikasi bahwa tidak pernah ada upaya menawan utusan Badaruddin II. Kecurigaan mereka pun langsung mengarah pada Najamuddin II, yang tampaknya memboikot perundingan antara Kesultanan Palembang dan Inggris pada tahun 1812 M. Badaruddin II pun sepakat menyerahkan adiknya beserta dua pejabat dekatnya ke tangan Inggris asal keselamatan mereka dijamin (Wargadalem, 2017).

Badaruddin II kembali berkuasa, namun kedudukannya tidak sama seperti sebelumnya. Ia harus menyerahkan Pulau Bangka-Belitung dan wilayah-wilayah penghasil lada dan timah ke tangan Inggris. Kekuasaannya harus ditebus dengan harga yang amat mahal. Badaruddin II semakin tidak berdaya menghadapi berbagai ketentuan Inggris atas wilayahnya. Sementara itu, sesuai tujuan utama Inggris di Kesultanan Palembang, perhatian mereka lebih tertuju pada Pulau Bangka yang kaya timah. Wilayah Palembang daratan kurang mendapat perhatian. Karena fokus Inggris menjamin keamanan semua wilayah Palembang, maka keamanan Kesultanan Palembang jauh lebih baik.

Inggris berkuasa setidaknya selama empat tahun sampai bulan November 1816. Tentu saja pihak Inggris di Palembang tidak sepakat untuk melepaskan wilayah ini ke tangan Belanda sesuai dengan traktat antara Inggris dan Belanda. Namun elit dan bangsawan di Inggris sudah mengambil keputusan meski tanpa minta pertimbangan orang-orang Inggris yang bertugas di Hindia Timur. Palembang kembali ke tangan Belanda. Akan tetapi selama sekitar satu setengah tahun di tangan Belanda keadaan di kesultanan tidak kunjung membaik. Kekacauan terjadi di mana-mana.

Para pemimpin yang dikirim pemerintah pusat di Batavia tidak mampu meredakan berbagai ketegangan di Palembang. Kepergian Inggris dari Plembang membuat pertentangan antara dua saudara di Palembang semakin tampak. Pertentangan melibatkan para pendukung masing-masing, sehingga sering terjadi pergolakan. Belanda gagal menjadi penengah. Akhirnya Pemerintah pusat di Batavia mengirim Komisaris Muntinghe. Setibanya di Palembang Muntinghe menyodorkan konsep pembagian kekuasaan antara Sultan Najamuddin II dan Badaruddin II serta pemerintah Belanda.

Najamuddin II tidak setuju dengan keputusan Belanda. Ia minta kepada Inggris di Bengkulu. Raffles, sebagai wakil Inggris di Bengkulu, memenuhi permintaan tersebut dan mengirim pasukan di bawah pimpinan Kapten Salmond. Kehadiran pasukan Inggris membuat persoalan semakin melebar. Sejak saat itu pertikaian di Kesultanan Palembang tidak hanya antara dua bersaudara atau antara Sultan Najamuddin II dan Belanda, tetapi Belanda dan Inggris juga terlibat di dalamnya. Akibat keterlibatan Inggris di Kesultanan Palembang menyebabkan Sultan Najamuddin II dan para pengikutnya dibuang ke Pulau Jawa, sementara itu pasukan Inggris harus berhadapan dengan kekuatan Belanda yang merasa lebih berhak atas Palembang sesuai dengan Traktat 1814. Dua kekuatan Eropa saling berhadapan secara langsung baik di ibukota kesultanan Palembang maupun di *uluan* (Rawas). Keadaan inilah yang kelak menyebabkan perang beruntun antara Kesultanan Palembang dan Belanda (Wargadalem, 2017; Woelders, 1975).

9. Perang dan Keruntuhan Kesultanan

Hanya dalam rentang satu tahun terjadi dua kali perang di Tanah Palembang. Bulan Juni dan Oktober 1819 pasukan Palembang dengan serdadu Belanda bersiteru. Perang pertama disebabkan Sultan Badaruddin II bermaksud melepaskan diri dari cengkeraman Belanda yang diwakili Muntinghe dan aparatnya. Sementara perang kedua dipicu keinginan pemerintah Belanda membalas kekalahan mereka pada perang pertama. Nahasnya dalam dua kali perang Belanda tidak pernah menang. Hal ini memberi pelajaran berharga bagi Belanda bahwa Palembang bukan musuh yang mudah ditaklukkan. Kekalahan ini diperparah dengan kesulitan mengatasi perlawanan rakyat Pulau Bangka, baik setelah perang pertama maupun setelah perang kedua.

Sebaliknya di kubu Kesultanan Palembang kedua perang ini memberi rasa percaya diri serta meningkatkan semangat dan moral rakyat. Hal itu menandakan bahwa mereka mampu melepaskan diri dari pengaruh Belanda. Kemenangan Kesultanan Palembang melawan Belanda juga memberi semangat baru. Mereka melanjutkan perang dan menggempur Belanda yang bermarkas di Pulau Bangka-Belitung. Hal tersebut dilakukan karena Belanda menutup jalur Palembang utuk melewati perairan sekitar. Berbagai cara ditempuh oleh rakyat Kesultanan Palembang untuk memperkecil dampak

negatif blokade yang dilakukan armada dan pasukan Belanda. Masalah tersebut menjadi penting bagi kesultanan Palembang karena untuk masuk ke kawasan kesultanan, selain melewati Bangka-Belitung, hanya bisa dilakukan melalui muara Sungai Musi yang dikenal dengan nama Sunsang. Dengan menutup Sunsang berarti "membunuh" Palembang. Perekonomian Palembang semakin mundur sebab sumber-sumber ekonomi dimonopoli oleh Belanda (Soetadji dan Hanafiah, 1996). Oleh sebab itu usaha-usaha yang ditempuh untuk tetap bertahan merupakan suatu hal yang penting bagi Palembang.

Belanda berusaha membalas kekalahan di Palembang. Dua kekalahan dalam dua kali perang merupakan pukulan berat yang harus ditanggung pihak Belanda. Berbagai persiapan dilakukan untuk membalas kekalahan terhadap Kesultanan Palembang pada tahun 1819 M. Pimpinan dipegang langsung Jenderal Mayor H.M. de Kock, yang sebelumnya hanya bertindak dari balik layar. Persiapan militer pada waktu itu terdiri dari armada besar dan kekuatan tempur yang kuat. Sementara itu pihak Kesultanan Palembang juga melakukan hal yang sama, sebab cepat atau lambat pasti pihak Belanda akan melancarkan serangan. Ternyata Kesultanan Palembang tidak mampu menghentikan serangan dahsyat yang dilancarkan oleh Belanda (Hanafiah, 1986). Pada perang tahun 1821 M Palembang harus mengakui kekalahan. Sultan Badaruddin II dan pengikutnya dibuang ke Ternate dan menjadi orang "buangan" sampai akhir hayatnya.

Berakhirnya perang antara Kesultanan Palembang dan Belanda (Juni 1821) menjadikan separuh wilayah Kesultanan Palembang berada di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan kolonial atas Palembang diletakkan oleh J.J. van Sevenhoven selaku penasihat Residen Belanda di Palembang. Kebijakan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan langsung atas Palembang yang sifatnya sangat pragmatis. Sebab, dalam sistem ini setiap daerah Palembang yang berhasil dikuasai Belanda harus diserahkan pengendaliannya kepada komandan militer, sedang para penguasa pribumi harus bekerja sama, suka atau tidak suka. Para penguasa pribumi berfungsi sebagai pendamping komandan militer Belanda dalam menjalankan roda pemerintahan, misalnya Residen Militer Kota Palembang J.C. Rinjst menjalankan pemerintahan kolonial didampingi Pangeran Kramajaya atau Najamuddin III, menantu Sultan Mahmud Badaruddin II, yang beperan sebagai perdana menteri. Dengan kekuasaan politik semu, keberadaan pendamping pribumi menjadi penting bagi Belanda untuk meningkatkan keterpercayaan kekuasaannya di mata penduduk pribumi Palembang (Hanafiah, 1986).

Pemerintah Kolonial Belanda membagi bekas wilayah Kesultanan Palembang Darussalam menjadi dua bagian, yakni Keresidenan Palembang dan Karesidenan Bangka-Belitung (Supriyanto, 2013: 42). Pembentukan Keresidenan Palembang dilakukan pada tanggal

1 Juni 1824. Karesidenan ini dibatasi mulai dari laut melewati Sungai Mesuji sampai Matawolu dengan garis berkelak-kelok hingga mata air Danau Seroja. Garis tersebut berlanjut melalui Gunung Pungkau, Bukit Mandah, dan Pematang Tigaman menuju Bukit Pasagi (Supriyanto, 2013: 44).

Secara administratif Keresidenan Palembang dibagi menjadi beberapa *afdeling* yang masing-masing dipimpin oleh asisten residen. Secara terinci wilayah Keresidenan Palembang terdiri dari empat afdeling, yakni 1) Daerah Ibukota Palembang; 2) Afdeling Palembang Ilir, dengan Sekayu sebagai ibukota; 3) Afdeling Palembang Ulu dengan Lahat sebagai ibukota; dan 4) Afdeling Ogan Ulu dan Komerin, dengan ibukota Baturaja (Supriyanto, 2013: 44–45). Wilayah *afdeling* dibagi-bagi menjadi beberapa *onderafdeling*, yakni wilayah administratif yang dikepalai oleh seorang *kontrolir*. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, seorang kontrolir dibantu oleh beberapa demang atau kepala distrik, asisten demang, mantri polisi, mantri pajak, dan mantri kesehatan (Supriyanto, 2013: 45). Pemberlakuan administrasi kolonial menandai penyatuan wilayah dan rakyat Palembang dalam kekuasaan imperialis Belanda.

Kekuasaan yang telah terbagi-bagi itu pada bulan Agustus 1823 sepenuhnya dikendalikan pihak Belanda, kecuali untuk bagian peradilan Agama Islam. Seiring berjalannya waktu pemimpin terakhir Kesultanan Palembang, Sultan Najamuddin III, mulai melemah kedudukannya terhadap Belanda. Belanda pun semakin menjadi-jadi dengan membuat berbagai kebijakan yang merugikan rakyat. Tentu saja pergolakan tidak dapat dibendung. Masyarakat Palembang kerap terlibat dalam pergolakan, terutama di daerah *uluan*, yang dipicu oleh pembuangan Sultan Badaruddin II dan peralihan kekuasaan kepada pihak Belanda. Pergolakan yang marak terjadi menyebabkan Belanda mengirim pasukan untuk menghancurkan perlawanan-perlawanan tersebut.

Di ibukota Palembang juga terjadi berbagai pergolakan antara Sultan Najamuddin III, dibantu Susuhunan Husin Dhaiauddin, dengan Belanda, yang berpuncak pada penyerangan benteng milik Belanda. Pergolakan itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh Belanda. Setelah kejadian itu susuhunan dibuang ke Batavia, sedangkan Najamuddin III lari ke *uluan* dan mulai melakukan penggalangan kekuatan dari awal. Sultan dan pengikutnya gagal merebut kembali karena tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kekalahan ini berujung pada pembuangan Sultan Najamuddin III dengan pengikutnya pada tahun 1825 M. Peristiwa itu menjadi penanda hilangnya Kesultanan Palembang di Nusantara. Sejak itu Palembang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda.

— 10 —

Kesultanan Jambi

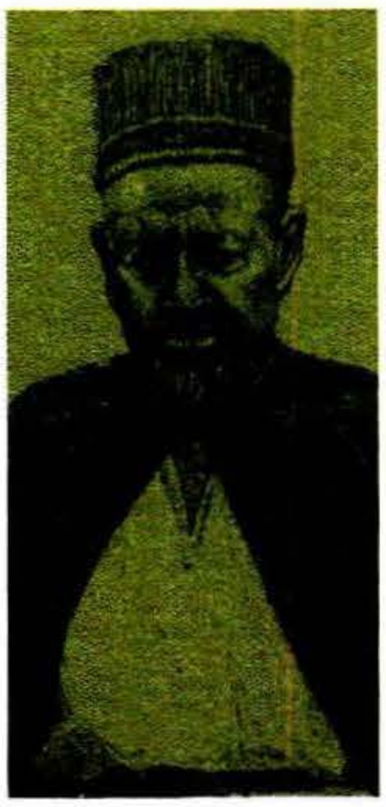

Jambi merupakan kesultanan di Sumatera yang memiliki hubungan historis-politik dekat dengan Palembang. Selain hubungan perkawinan antarelit politik dua kesultanan hubungan dekat Jambi-Palembang juga dapat dilihat dari sisi pemahaman atas sejarah, terutama masa pra-Islam. Apa yang selama ini terjadi di, dan menjadi bagian dari, Palembang juga terjadi dalam sejarah Jambi. Rekonstruksi sejarah Jambi dalam beberapa aspek tertentu sama dengan Palembang. Tasman (2016: 3) berpendapat bahwa nama-nama yang selama ini diidentifikasi berbagai sumber sejarah sebagai Palembang ternyata berada di Jambi. Sebagai contoh ia menyebut bahwa Tupo, Thu-po, Tchu-po, Ch-po berada di Muaro Tebo; Zabaq, Djaba, Djawa, atau Jawa adalah Muaro Sabak; dan Fo-ts'i, San-Fo-ts'i, Fo-che, atau Che-li-fo-che adalah Muaro Tembesi. Pandangan ini berdasarkan alasan yang mengacu pada sejumlah kajian sejarah dan arkeologi terkait Śrîwijaya, bahwa Palembang merupakan salah satu dari pusat kerajaan maritim terbesar di bagian barat Nusantara tersebut. Sementara itu Jambi merupakan satu wilayah yang diyakini pernah menjadi ibukota Śrîwijaya.

Terlepas dari masalah yang berkait dengan Śrîwijaya dapat dikatakan bawa Jambi mengalami perkembangan sebagai pusat perdagangan dan politik dalam waktu yang relatif sama dengan Palembang. Sejak abad ke-7 M, dengan dikaitkan dengan kebesaran Kerajaan Śrîwijaya, Jambi berkembang sebagai kota dagang yang dikunjungi para pedagang dari berbagai negera, antara lain Cina, Persia, Arab, dan India (Lombard, 1916 [2]: 13–17). Hal itu terjadi karena Jambi didukung kekayaan alam yang menghasilkan hasil bumi yang laku di pasar internasional, terutama rempah-rempah. Di samping itu letak Jambi strategis dalam jaringan perdagangan Asia. Jambi terletak di pantai timur Sumatera dan menghadap langsung ke Laut Cina Selatan yang berperan sebagai penghubung antara "negeri-negeri di atas angin" dan keajaan-kerajaan Nusantara (Lapian, 1992: 143; Chatib, 2011: 35–36).

Dengan keadaan demikian masyarakat Jambi sangat mungkin sudah akrab dengan Islam dan masyarakat muslim yang menjadi bagian masyarakat internasional yang singgah di Jambi. Jambi berkembang sebagai kerajaan otonom menyusul berakhirnya Śrîwijaya pada abad ke-13 M. Beberapa pelabuhan dagang di Jambi, yakni Tungkal, Muara Sabak, Muara Kumpeh, dan ibukota Jambi, tumbuh menjadi pusat perdagangan. Kapal-kapal samudera berlabuh dan para pedagang mancanegara melakukan jual-beli dengan pedagang setempat yang membawa hasil bumi menggunakan kapal berukuran

lebih kecil yang bisa berlayar menyusuri sungai-sungai di Jambi (Chatib, 2011: 36; Reid, 1999: 99–100). Proses itu didukung fakta bahwa sejak abad ke-13 M perdagangan berkelindan dengan proses pengislaman, yang berlangsung semakin intensif dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam.

Dinamika perdagangan juga terjadi di Jawa, yang sejak abad ke-13 M mengalami "kebangkitan" perdagangan bebas. Kapal-kapal dari Jepara, misalnya, berlayar dengan muatan sampai dua ton barang dagangan melewati Jambi, Palembang, Inderagiri, dan pelabuhan-pelabuhan lain di Sumatera (Schrieke, 1955: 21). Hal ini tentu mendorong perkembangan ekonomi di Jambi. Perkembangan di Jawa memberi dampak positif bagi Jambi terkait dengan kedudukan politiknya sebagai *vassal* Majapahit, yang pada abad ke-14 M berkembang menjadi kerajaan besar di Nusantara. Oleh karena itu Jambi tumbuh sebagai pusat perdagangan dengan kekuasaan politik yang otonom dan menjalani proses pengislaman. Proses tersebut berlangsung hingga abad ke-15 M ketika Jambi menjadi kesultanan.

1. Islamisasi dan Pembentukan Kesultanan

Orang Jambi sudah lama mengenal Islam dan kaum muslim seiring pertumbuhan Jambi sebagai pusat niaga. Meskipun demikian historiografi lokal mengaitkan kedatangan Islam di Jambi dengan kedatangan seorang muslim dari Istanbul, Turki, bernama Datuk Paduka Berhala atau Ahmad Barus II sebagaimana disebut dalam *Ini Sejarah Kerajaan Jambi* (*ISKN*). Teks tersebut ditulis Ngabehi Sutho Dilogo,[1] seorang bangsawan Kerajaan Jambi, pada akhir abad ke-19 M. Sebagai naskah kerajaan, teks ini berisi pengislaman dengan bentuk kisahan sebagaiman teks-teks Melayu pada ummnya.[2] Teks itu juga memuat silsilah raja-raja Jambi dan masalah lain yang terkait dengan kerajaan (Chatib, 2011: 39–40).

Merujuk *ISKN*, kehadiran Datuk Paduka Berhala terjadi pada masa kekuasaan Putri Selaras Pinang Masak (1460–1480 M), seorang putri asal Pagaruyung yang didaulat sebagai Raja Jambi. Datuk Paduka Berhala menikah dengan sang ratu dan memiliki empat orang anak, yang kemudian menjadi raja-raja Jambi berikutnya. Teks juga menyatakan bahwa kehadiran Datuk Paduka Berhala menjadi penanda awal perkembangan Islam di Jambi, "bahwa adalah awal Islam negeri Jambi zaman Datuk Paduka Berhala menjadi raja dengan istrinya bernama Tuan Putri Selaras Pinang Masak yang bernegeri di Tanjung Jabung" (Chatib, 2011: 42). Dalam silsilah raja-raja Jambi, pasangan Putri Selaras Pinang dan Datuk Paduka Berhala memang diakui sebagai asal-usul keturunan raja-raja Jambi dan sekaligus peletak dasar Islam di kerajaan tersebut.

Proses pengislaman berlangsung semakin intensif di tangan penguasa berikutnya, Orang Kayo Hitam (1500–1515 M). Pada masa inilah syari'at Islam mulai dilaksanakan. "Itulah awal Islam ini Jambi mengucap dua kalimat syahadat, sembahyang lima waktu,

puasa sebulan Ramadhan, dan zakat fitrah, baharulah berukun Islam yang lima", demikian *ISKN* sebagaimana dikutip Muzakir (2012: 33–34), yang memberitakan dinamika keislaman. Secara perlahan parktik keislaman menggantikan sistem hukum yang disebut "adat jumhur", terutama di kalangan masyarakat pedalaman (*ulu*). Dalam ungkapan setempat, adat jumhur dirumuskan dalam pernyataan: "adat bersendi alur, alur bersendi patut, patut bersendi kebenaran". Sementara penduduk pesisir (*ilir*) cenderung mengikuti ajaran Islam, yang disebut "*teliti*" (Chotib, 2010: 168).

Orang Kayo Hitam melihat banyak ketidaksesuaian antara adat jumhur dan ajaran Islam. Oleh karena itu ia berinisiatif mengumpulkan para *datuk*, tokoh agama, dan para raja Melayu tetangga Kerajaan Jambi untuk membahas pertentangan antara adat dan ajaran Islam. Sebagian besar raja yang diundang tidak hadir. Beberapa di antaranya hanya mengirim utusuan. Satu-satunya raja yang hadir adalah Raja Pagaruyung Sultan Bakilap Alam. Rapat yang mungkin merupakan rapat adat pertama tersebut diadakan di Bukit Siguntang, Tebo. Pertemuan itu melahirkan beberapa ketetapan baru: (1) Jambi merupakan kerajaan Islam Melayu Jambi, (2) adat dipadu dengan *syara'*, (2) hukum dasar kerajaan Islam adat *nan* empat, (4) hukum adat sembilan pucuk, (5) berbahasa Melayu, tulisan Arab Melayu Jambi, dan (6) dasar negara pucuk adat rumput *teliti* (Chotib, 2010: 172).

Hal di atas menunjukkan bukti bahwa Orang Kayo Hitam berusaha menerapkan Islam dalam kehidupan sosial-politik di Jambi. Ia kemudian memerintahkan penyalinan Al-Quran untuk disebarkan ke seluruh Jambi. Di samping itu Kerajaan Jambi kembali mengadakan rapat adat yang berlangsung di Kerinci. Pertemuan tersebut menetapkan beberapa keputusan, yakni (1) *titian keras tango batu* (Al-Quran), (2) *cermin gedangdak kabur* (Al-Quran), (3) *lantak dalam dak goyah* (Hadis), (4) *kato mufakat* (musyawarah), dan (5) *dak lapuk dek hujan, dak lekang dek paneh* (hukum yang abadi) (Chotib, 2010: 174–177). Pada pertemuan ini pula ungkapan "adat bersendi *syara'*, *syara'* bersendi kitabullah" mulai dikenal dalam masyarakat Jambi. Meskipun adat tetap mendominasi, terutama di kawasan hulu, Orang Kayo Hitam berhasil menanamkan pondasi keislaman yang kuat di Jambi, yang terus tumbuh di tangan penerusnya, Pangeran Rantau Kapas (1515–1540 MK). Seperti ayahnya, ia memiliki perhatian terhadap persoalan hukum di Jambi.

Apa yang dilakukan Orang Kayo Hitam berada pada suasana sosial-politik dan keagamaan di Nusantara yang mendukung proses pengislaman di tengah perkembangan ekonomi perdagangan dan pertumbuhan kerajaan Islam. Di ujung utara Sumatera Aceh tumbuh menjadi kekuatan politik dan perdagangan, menggantikan Samudera Pasai dan Pidie. Di belahan timur Johor-Riau secara perlahan tampil sebagai penerus Kerajaan Malaka yang sejak tahun 1511 M dikuasai Portugis. Bersamaan dengan itu kerajaan tetangga Jambi, Palembang, juga tengah mengalami perkembangan

Lukisan Sultan Jambi dalam buku Nederlansch-Indie Lanschappen en Volkstypen tahun 1883.
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

yang sama. Dengan demikian Jambi berada di tengah arus sosial-politik dan keagamaan dengan konsolidasi kekuasaan menjadi satu masalah utama. Tome Pires, yang mengunjungi Nusantara pada tahun 1512–1515 M ketika Jambi berada di bawah kekuasaan Orang Kayo Hitam, mencatat bahwa Jambi saat itu sudah memiliki wilayah kekuasaan yang tegas, meliputi Kuala Tungkal dan berhadapan dengan Pulau Berhala tempat makam Datuk Paduka Berhala. Di bagian lain Jambi berbatasan dengan Palembang dan Minangkabau (Pires, 1944 [2]: 154).

Islamisasi dan konsolidasi politik di Jambi sedikit banyak terkait dengan tanah Jawa. Hal ini berkaitan dengan kedudukan Jambi, seperti juga Palembang, yang berada di bawah perlindungan kerajaan Jawa Majapahit dan kemudian Demak. Kerajaan Jawa Demak yang menjadi pelindung Jambi pada masa kekuasaan Pati Unus (1518–1521 M) dan kemudian Sultan Trenggana (1521–1546 M). Dua penguasa ini, terutama yang kedua, terkenal dengan kebijakan ekspansionis. Sebagai contoh Demak terlibat dalam pembentukan Kerajaan Banten dan Kerajaan Cirebon atau pengislaman seorang raja dari suatu kerajaan setelah dibantu secara politik (Banjarmasin). Hal ini juga dicatat Tome Pires, bahwa saat itu Jambi tengah berada di bawah pengawasan Raja Demak, yang secara tidak tepat disebutnya Pate Rodim atau Raden Patah (Pires, 1944 [2]: 154).

Pengaruh Demak, atau Jawa pada umumnya, terhadap Jambi dapat dilihat antara lain dari bukti bahwa Jawa menjadi pusat pendidikan untuk calon penguasa Palembang. Pengalama Orang Kayo Hitam menjadi contoh. Ia memiliki dua orang istri, Putri Mayang Mangurai dan seorang putri dari Jawa. Dari istri kedua ia memperoleh anak bernama Pangeran Hilang di Air. Orang Kayo Hitam menyuruh Pangeran Hilang di Air ke Jawa untuk belajar agama Islam. Sekembali dari Jawa, Pangeran Hilang di Air mendapat gelar

Pangeran Mangkuugamo. Selain Orang kayo Hitam, Pangeran Hilang di Air merupakan salah seorang yang paling berperan dalam merumuskan dasar hukum adat di Jambi. Setelah Orang Kayo Hitam meninggal dunia pada tahun 1515 M Pangeran Hilang di Air diangkat menjadi Raja Jambi bergelar Pangeran Rantau Kapas. Atas dasar itu dapat dipahami jika Jambi banyak menyerap tradisi politik Jawa, seperti pemakaian nama dan gelar untuk elit politik Jambi, seperti Pangeran Ratu dan Dipati Anom (Andaya, 1978: 86–88).

Posisi Jawa sebagai pelindung berlanjut ketika Jambi sudah menjadi kesultanan pada tahun 1610-an M, yang ditandai dengan naiknya Pangeran Kedak menjadi raja dan bergelar Sultan Abdul Kahar (1615–1643 M). Ia raja pertama Jambi yang menggunakan gelar sultan dan oleh karena itu dapat dikatakan sebagai mulainya Jambi menjadi kesultanan. Dalam konteks Jawa, hal ini sezaman dengan kerajaan Mataram pada masa kekuasaan raja terbesarnya, Sultan Agung (1613–1646 M). Meski sempat menyatakan "tidak pernah mau tunduk ke Mataram", Jambi pada akhirnya menjadi *vassal* kerajaan terbesar di tanah Jawa itu. Pada tahun 1642 M Jambi berusaha menghindari ancaman Mataram yang akan membantu Palembang menyerang Jambi. Namun sejak 1650-an M Sultan Abddul Kahar tidak hanya menyatakan tunduk, tetapi juga mengirim upeti dan bahkan hadir secara teratur di keraton Mataram (Andaya, 1993: 65).

Andaya (1993: 65–67) menyebut tiga alasan penting mengapa Jambi, sebagaimana halnya Palembang, setia di bawah perlindungan Mataram. Pertama, kekhawatiran kedua kesultanan itu terhadap ancaman kebijakan ekspansionis Sultan Agung dengan jumlah pasukan yang sangat besar. Meski sudah menjalin kerjasama dengan Belanda dan Inggris, Jambi merasa perlu memberi perlakukan khusus terhadap Mataram. Pasukan maskapai dagang Eropa itu belum bisa meyakinkan Jambi, dan juga Palembang, dapat menjamin keamanan kesultanan dari ancaman Mataram. Oleh karena itu pengakuan atas perlindungan Mataram merupakan langkah diplomatis Jambi untuk menjalin persahabatan dengan Mataram. Kedua, ketergantungan Jambi terhadap beras dari Jawa menjadi alasan atas sikap politik Jambi, dan juga Palembang, untuk tetap berada di bawah perlindungan Mataram. Ketiga, terkait dengan supremasi budaya Jawa. Jambi, mengikuti Palembang, melihat budaya Jawa, khususnya bahasa dan busana, sebagai sesuatu yang sangat menarik. Oleh karena itu para bangsawan kesultanan mengeluarkan sejenis anjuran kepada masyarakat di wilayah pedalaman untuk menanggalkan pakaian Melayu dan mengganti dengan baju bergaya Jawa jika hendak ke istana. Itu pula sebabnya penggunaan gelar Jawa oleh bangswan Kesultanan Palembang merupakan pemandangan umum. Di samping itu pergelaran budaya Jawa—seperti wayang, tari, dan gamelan—kerapkali diselenggarkan di istana Kesultanan Jambi. Dengan perkembangan itu semua Tome Pires (1944 [2]: 154) menggambarkan orang Jambi, dan juga Palembang, lebih mirip orang Jawa daripada orang Melayu.

Dengan demikian, jika merujuk pada *ISKJ*, dapat dikatakan bahwa Kesultanan Jambi menyerap dua budaya sebagai unsur penting dalam kehidupan sosial-politik dan budaya istana. Melayu (Minangkabau) diakui memegang kedudukan sangat penting sebagai asal-usul keturunan raja-raja Jambi dan sekaligus menjadi dasar keislaman kesultanan Jambi. Seperti halnya Palembang, budaya Melayu di Jambi diserap bersamaan dengan budaya Jawa, khususnya dalam kehidupan istana kesultanan. Hal ini tentu saja terkait dengan konteks sosio-grafis Sumatera, hubungan dan posisi politik Jambi yang berada di bawah lindungan Śrîwijaya dan kemudian kerajaan-kerajaan Jawa (dari Majapahit hingga Mataram). Pola hubungan demikian berlangsung hingga Jambi tampil sebagai kesultanan dengan kemjuan ekonomi perdagangan. Dalam hal ini maskapai dagang Belanda, VOC, menjadi pelindung kesultanan Jambi berikutnya.

2. Dari Kurun Perniagaan sampai Awal Imperialisme

Di tengah kurun perniagaan, perdagangan menjadi kunci utama bagi siapa saja yang ingin menguasai perekenomian. Untuk kawasan perairan Melayu, Kesultanan Jambi merupakan salah satu kesultanan, selain Palembang dan Johor, yang turut meramaikan kegiatan perdagangan di kawasan tersebut. Sekitar abad ke-16 M setelah kesultanan Jambi lahir, para pemimpin barunya pun memanfaatkan jaringan perdagangan di kawasan tersebut.

Perkembangan pada masa itu sangat bertalian erat dengan munculnya produk dan mitra baru dalam perniagaan. Sekitar pertengahan tahun 1550-an M hingga akhir abad ke-17 kesultanan Jambi melakukan perdagangan lada yang menguntungkan dengan banyak pihak. Diawali dengan bangsa Portugis sejak tahun 1615 M Kesultanan Jambi juga berdagang dengan perusahaan dagang Inggris dan Hindia Timur Belanda, serta orang-orang Cina, Melayu, Makassar, dan Jawa.

Dengan melakukan praktik monopoli perdagangan beserta bea ekspor, Sultan Jambi saat itu secara perlahan mengisi kas negaranya. Seiring berjalannya waktu Kesultanan Jambi, bersama kesultanan terdekatnya, seperti Palembang dan Johor, berubah menjadi salah satu kesultanan yang kaya di tanah Sumatera (Andaya, 1993, 48–49). Hal ini tampak dari ramainya kegiatan perdagangan di pelabuhan milik Kesultanan Jambi. Pada tahun 1616 M pelabuhan kesultanan Jambi bahkan dapat bersaing secara ketat dengan Pelabuhan Aceh, pelabuhan terkaya di tanah Sumatera saat itu. Dari kegiatan perniagaan itu sultan setidaknya dapat meraup keuntungan hingga 30–35 % dari penjualan lada secara internasional (Andaya, 1993b: 99).

Belanda, sebagai pemain asing utama di Sumatera, menjadi kunci penting dalam perkembangan Kesultanan Jambi di kemudian hari. Hubungan mereka pertama kali terjadi ketika Jambi masih di bawah

kepemimpinan Sultan Abdul Kahar (1615–1643 M). Ia merupakan raja pertama Jambi yang memakai gelar "sultan" sekaligus menjadi orang yang menetapkan secara resmi perubahan penyebutan Kerajaan Jambi menjadi Kesultanan Jambi (Tiderman & Sigar, 1938: 12). Pada tahun 1615 M Sultan Abdul Kahar menerima dua kapal, Wapen Amsterdam dan de Middelburg, rombongan Belanda di bawah komando Abraham Strek (Marsden, 1966). Dua kapal tersebut merupakan rombongan Belanda yang mencetak sejarah karena mereka adalah rombongan pertama yang menginjakkan kaki di tanah Jambi.

Kontak pertama mereka melahirkan hubungan yang baik. Setahun berikutnya Strek mendapat izin dari Sultan Abdul Kahar mendirikan kantor dagang VOC di Muarah Kumpeh. Umur kantor dagang ini tidak lama. Belanda kesulitan memperoleh hasil hutan dan lada dari Jambi karena sebagian masyarakat menolak menjualnya kepada Belanda. Akibatnya kantor terpaksa ditutup pada tahun 1625 M karena perannya tidak terlalu nyata bagi pendapatan VOC (Djambi, 1917-1940).

Pada tahun 1636 M Belanda datang kembali untuk membuka kantor dagang di Jambi. Tampaknya Belanda masih tertarik memperoleh komoditi dari daerah tersebut. Selain itu Belanda juga memanfaatkan celah perselisihan yang terjadi antara Sultan Jambi dan Sultan Johor yang memperebutkan Negeri Tungkal. Belanda (VOC) berjanji membantu Jambil, sehingga VOC mendapat izin mendirikan kantor dagangnya untuk kali kedua. Kantor dagang itu dipimpin Hendrik van Gont sampai tahun 1642 M.

Pada tahun 1643 M Depati Anom naik takhta dengan gelar Sultan Abdul Jalil. Ia naik takhta ketika Jambi dan Johor sedang bersiteru. Keadaan itu mendorong Sultan Abdul Jalil terpaksa minta bantuan pada Belanda. Sebagai imbalan, Kesultanan Jambi terpaksa mengadakan perjanjian dengan Belanda, sekalipun isi perjanjian tidak menguntungkan pihak Jambi. Jambi harus rela memberikan hak monopoli dagang kepada VOC. Selain itu perjanjian juga memberikan hak kepada VOC untuk "mengontrol" pemerintahan Kesultanan Jambi dan memberi saran. Anries Dogart Ploeg, kepala kantor VOC di Jambi saat itu, menjadi orang pertama yang mencapuri urusan ekonomi dan pemerintahan di Kesultanan Jambi.

Pertikaian antara Jambi dan Johor tidak berhenti. Perang tidak dapat lagi dielakkan. Pada tahun 1667 M akhirnya Jambi mendapat bantuan dari VOC untuk menangkis serangan Kesultanan Johor. Jambi berhasil bertahan dari gempuran Johor, sehingga Johor mengakhiri serangan. VOC meminta imbalan kepada sultan yang saat itu berkuasa, yakni Sultan Abdul Mahji, yang kerap disebut Sultan Sri Ingalogo (1665–1690 M). Tuntutan VOC tidak dikabulkan oleh sultan sehingga menimbulkan ketegangan.

Sybrand Swart, kepala kantor VOC di Jambi saat itu, menjadi korban ketegangan itu.

Jambi sempat mengalami masa keemasan, sekalipun harus berbagi bersama VOC. Akhirnya Jambi harus merasakan keadaan keuangan yang pahit. Pada tahun 1680-an M, setelah berperang dengan Johor dan menghadapi pergolakan di dalam istana, Jambi harus kehilangan kedudukan sebagai pelabuhan lada utama di pesisir timur Sumatera. Berbagai persoalan terkait perniagaan, seperti utang dan penyelundupan, menimbulkan ketegangan antara para produsen dan perantara, atau antara daerah *ulu* dan daerah *ilir*. Keadaan keluarga sultan, wakil warga *ilir* dan dekat dengan pedagang asing, mulai terpuruk. Hal ini berdampak pada turunnya keuntungan yang didapat kantor dagan VOC di Jambi (Jacobs, 2000).

Di tengah situasi perekonomian yang carut-marut VOC melakukan campur tangan politik lebih dalam. Hal itu berdampak Kesultanan Jambi terbelah dua, menjadi *ulu* dan *ilir* (Vos, 1993: 56). Peristiwa ini menjadi penanda berakhirnya kegemilangan Kesultanan Jambi. Keterbelahan dua kawasan Jambi pun dimanfaatkan oleh Belanda untuk menangkap Sultan Sri Ingalogo dan mengasingkannya ke Pulau Banda pada tahun 1690 M. Belanda bahkan mengangkat Depati Raden Cakra Negara menjadi Sultan Jambi dengan gelar Kiai Gedeh sebagai "sultan boneka". Langkah Belanda itu bertentangan dengan wasiat ayah Raden Tyulip yang menjadi sultan selanjutnya. Ia bersama Kiai Singa Patih dikucilkan oleh Belanda dan terusir sampai ke daerah *ulu* di Muara Tebo. Di sana, dengan bantuan Raja Pagaruyung, mereka mendirikan pemerintahan baru sebagai ungkapan kekecewaan terhadap keputusan Belanda. Raden Tyulip berkedudukan di Mangunjayo dengan gelar Sunan Sri Maharaja Batu, biasa disebut dengan Sunan Suto Ingalogo, sedang Kiai Singa Patih berkedudukan di Bukit Serpeh, Marga Sumai, dengan gelar Sunan Abdurrahman. Perpecahan tersebut berlangsung lama sampai akhirnya bisa kembali didamaikan beberapa dasawarsa kemudian.

Sekitar tahun 1720-an M kesultanan Jambi kembali bersatu, namun tidak bersama dengan kejayaan keuangan yang lama mereka nantikan. Hal itu terjadi karena harga lada di pasar dunia jatuh. Kecenderungan perdagangan dunia saat itu kapas dan padi, sehingga rakyat Jambi, terutama yang tinggal di daerah dataran tinggi, ikut menanam kapas dan padi. Kendati demikian kesultanan hanya mampu meraup untung sedikit. Apalagi setelah pasokan emas dari Minangkabau terhenti karena para penambangnya lebih memilih menjual emasnya kepada pedagang yang berani membeli dengan harga tinggi. Langkah Minangkabau itu juga membawa kedudukan Minangkabau semakin lebih tinggi dari Kesultanan Jambi dan bahkan berhasil mengambil alih wilayah *ulu*. Tahun 1700-an M menjadi tahun-tahun terburuk bagi Kesultanan Jambi. Pundi-pundi sultan

kosong, sampai pusaka istana harus dijadikan agunan (Locher-Scholten, 2008: 45). Jambi harus rela menjadi negara *vassal* Raja Minangkabau di Pagaruyung (Andaya, 1993b: 119).

Sebagaimana wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara Kesultanan Jambi pun sering menghadapi intrik di dalam kesultanan. Sesudah bersatu pada tahun 1720 M, pertikaian internal pun kembali terjadi. Perang saudara makin mengikis kekuasaan sultan sesudah tahun 1800 M. Pada tahun 1811 M, misalnya, penduduk ibukota dipimpin para saudagar Arab dan suku Raja Empat Puluh bangkit melawan Sultan Mohildin yang sedang berkuasa. Peristiwa itu terjadi karena perlakuan istri sultan terhadap beberapa anak perempuan keluarga kaya.[3] Mohildin meminta pada saudaranya yang pernah menuntut takhta agar melindungi keluarganya. Saudara Mohildin setuju asalkan anaknya, Raden Tabun, dipermaklumkan sebagai *pangeran ratu* (putra mahkota) setelah sultan mangkat. Mohildin setuju dan menyatakan janji, tetapi sebelum janji digenapi musuh-musuh politiknya sudah meletakkan senjata terlebih dahulu. Oleh karena itu bantuan yang diminta Mohildin kepada saudaranya menjadi gugur dan ia kembali bertakhta.

Meskipun demikian pergolakan di dalam Kesultanan Jambi terus berlanjut. Beberapa pertempuran pecah pada tahun 1817–1818 M yang melibatkan Mohildin dengan sepupunya yang lain. Pertikaian berlangsung menurut kebiasaan Melayu: pihak yang bertikai saling menembakkan meriam dari balik benteng sehingga hanya menimbulkan sedikit kerusakan. Perang demikian tidak menimbulkan korban jiwa yang besar sebab tujuannya hanya sebagai ajang unjuk gigi senjata dan benteng siapa yang paling kuat. Dalam pertempuran tersebut Mohildin kalah dan memutuskan tidak akan menetap di Jambi untuk beberapa waktu walaupun sepupunya itu tewas tak lama kemudian tanpa kabar jelas (Anderson, 1971: 404; Reid, 1982: 1). Pada tahun 1820 M sultan mengontrol daerah Hulu Tembesi, sementara pangeran ratu menghabiskan sebagian besar waktunya di Palembang, sehingga kekuasaannya di kawasan pegunungan sangat tidak berpengaruh.[4]

Ketegangan internal seakan tidak pernah berhenti. Kali ini terjadi akibat kesalahpahaman antara Facharuddin, putra Mohildin, dan Raden Tabun. Facharuddin menunjuk saudaranya sebagai *pangeran ratu*. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan kubu Raden Tabun, yang sebelumnya sudah dijanjikan Mohildin sebagai *pangeran ratu*. Keputusan Facharuddin melanggar janji ayahnya, yang dengan sendirinya menciptakan musuh di kemudian hari. Apalagi Raden Tabun merupakan saudagar kaya dan sanggup menggalang dukungan penduduk daerah makmur di wilayah utara Jambi. Secara adat memang kekuasaan Raden Tabun tidak sah, tetapi secara *de facto* kekuasaan Raden Tabun tidak terbantahkan.

"Perkawinan politik" menjadi jalan keluar dari persoalan ini. Solusi seperti ini lazim dipraktikkan di seluruh kawasan Nusantara, yang merupakan cara tercepat dan pantas untuk mendamaikan dua kubu yang berseteru, di samping melakukan persekutuan politik. Pernikahan di lingkugan kerajaan pada saat itu jarang sekali melibatkan ikatan emosional di dalamnya. Pernikahan yang telah terjalin pun tidak serta merta menyelaraskan hubungan antara kerabat dan besan. Kemungkinan saling tikung pun sangat mungkin terjadi. Sama halnya dengan yang terjadi antara Sultan Facharuddin dan Raden Tabun. Mereka saling menikahi saudari satu sama lain. Keuntungan yang diperoleh Raden Tabun adalah istrinya mendapat gelar tertinggi, yakni *ratu agung*, sehingga apabila kelak Raden Tabun memiliki anak lelaki akan menjadi *pangeran ratu*. Sayang upaya perdamaian itu buyar, sebab sikap istri terdahulu mereka tidak rela kehilangan peluang mendapat keistimewaan sebagai *ratu agung*.[5] Itu sebabnya janji Mohildin yang diingkari oleh anaknya menjadi bara yang siap membakar hubungan yang sudah tegang. Keadaan ini berlangsung setidaknya hingga tahun 1840-an M.

Selama pelarian Sultan Facharuddin tidak pernah dinobatkan menggunakan ketentuan adat Jambi dan baru pada tahun 1833 M ia mendiami Keraton Jambi. Sebelumnya ia kerap menetap di dataran tinggi padat penghuni, kadang-kadang di Muara Tebo dan kadang-kadang di Sarolangun, Tembesi Hulu. Sementara dataran rendah yang tidak begitu menguntungkan secara politik diserahkan kepada Raden Tabun.[6] Dengan demikian Facharuddin kehilangan pendapatan dari perdagangan, sebab bea perdagangan hasil hutan harus diserahkan kepada anak raja (gelar kebangsawanan Jambi) di daerah tempat dia menetap.[7]

Pada tahun 1834 M kedudukan Raden Tabun semakin kuat, lebih kuat dari Sultan Facharuddin (Boers, 1850: 463–470). Kendali atas perdagangan garam tidak lagi dipegang oleh Facharuddin, walaupun ia masih menerima sebagian pendapatan dari perdagangan ini. Hal yang sama juga berlaku dalam perdagangan candu, yang terkenal di kalangan penambang dan pendulang emas di daerah Limun (Anderson, 1982: 1).

Perdagagan di Jambi sebetulnya tidak begitu mendatangkan banyak hasil. Pada akhir abad ke-18 M lada dari Jambi bahkan dianggap bermutu rendah (Marsden, 1966: 144). Para pedagang Nusantara (orang-orang Jawa dan Makassar) serta orang-orang Cina dan Eropa tidak lagi berlabuh di Jambi pada awal abad ke-19 M. Ikatan perniagaan dengan negeri tetangga Palembang pun mulai diabaikan. Titik terendah Jambi adalah ketika hasil perdagangan ekspor-impor mereka hanya sebesar 0,5 % dari seluruh perdagangan yang dilakukan Kesultanan Palembang. Satu-satunya cara kesultanan ini bertahan adalah dengan menjual emas kepada Singapura. Itu pun lewat persaingan yang ketat dengan orang-orang Pagaruyung dan Palembang.

3. Perjumpaan dengan Pemerintah Hindia Belanda: Kontrak dan Berkurangnya Kedaulatan Kesultanan (1830–1858 M)

Pada bulan Agustus dan Oktober 1829 Residen Palembang F. C. E. Praetorius yang baru saja memangku jabatan mengirim utusan untuk menghadap Sultan Facharuddin. Utusan itu, yang sesungguhnya masih kerabat istana Jambi, menyampaikan pesan agar Sultan Facharuddin dapat membantu Belanda melacak kapal mereka yang dibajak di perairan Jambi. Selain itu sultan juga "dinasihati"—dengan kalimat yang disusun secara hati-hati—agar mengusir semua perompak dari wilayahnya.[8] Letak dan keadaan geografis yang penuh dengan rawa, bagi Praetorius, menjadikan Jambi sebagai tempat perlindungan (*safe haven*) yang sempurna bagi para perompak.

Residen Praetorius sebetulnya tidak terlalu yakin pada kemampuan Sultan Facharuddin memenuhi permintaannya. Di samping tidak tinggal di ibukota, sultan bahkan terlibat dalam perang melawan kaum Paderi di wilayah Minangkabau dengan mendukung Sultan Pagaruyung. Di samping itu di ibukota Jambi juga terjadi perebutan kekuasaan antara para saudagar Arab, wakil sultan, dan Pangeran Kasim (saudagar kaya dan anggota suku Kraton). Karena tidak ingin mengambil resiko tinggi dengan menyerahkan tugas penting kepada sultan yang "lemah", Praetorius mengajukan usul kepada atasannya di Batavia supaya dirinya yang diberi tugas memimpin pasukan melawan para perompak. Bagi Praetorius usulan itu lebih masuk akal mengingat kemampuan tempur Belanda jauh lebih baik daripada Jambi. Oleh karena pihak Belanda lemah dalam penguasaan daerah Jambi, usulan tersebut dinilai mahal di mata pimpinan Praetorius.

Pada tahun 1829 M Batavia justru memerintahkan Praetorius memperbarui kontrak dengan Sultan Jambi. Isi kontrak tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga mencakup klausul-klausul tersurat yang berisi pemberantasan perompakan di perairan Jambi. Meskipun rencana tersebut sempat terputus karena ada pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1830 M, Dewan Penasihat Hindia Timur tetap menyatakan bahwa kekuasaan kolonial harus mengupayakan kontrak baru dengan Jambi (Locher-Scholten, 2008: 67). Gubernur Jenderal baru Johannes van Den Bosch (1830–1834 M) menyetujui saran dewan penasihat.

Penguasa kolonial sangat cermat menyiapkan penandatangan kontrak baru. Untuk mendapat kepercayaan sekaligus menghindari kecurigaan Sultan Facharuddin, Belanda—melalui Residen Praetorius—bahkan sering memberi hadiah sebelum tanggal penandatanganan kontrak. Belanda ingin mengawali kontrak dengan membangun hubungan baik. Belanda minta saran sultan tentang cara membersihkan perompakan, mengingat mereka sendiri tidak punya sumber daya yang mumpuni. Praetorius bahkan mendesak sejawatnya di Bangka untuk mencegah tersebarnya

rumor ekspedisi yang dapat mengganggu upaya diplomatik,[9] sebab ada rumor ekspedisi kapal Belanda telanjur tersebar di Palembang dan khawatir diketahui oleh Kesultanan Jambi.

Jambi memang tidak mampu membendung kekuatan para perompak. Hal ini bisa terjadi karena Jambi sering mengalami pertikaian internal yang tidak berkesudahan. Kegagalan itu juga dapat dilihat bagaimana Sultan Facharuddin minta bantuan Belanda pada bulan April dan mengulanginya pada bulan Oktober 1830. Ia mengatakan bahwa ia tidak cukup kuat menghentikan para perompak yang berada di wilayahnya sendirian (Locher-Scholten, 2008: 76). Hal itu mendorong Van den Bosch minta keterangan kepada residen-residen Palembang, Bangka, dan Bantam tentang para perompak, dan menanyakan kedaulatan Jambi atas wilayahnya. Jawaban tiba pada tahun 1831 M, tetapi pada tahun itu tidak ada tindakan apa pun terhadap informasi tersebut.[10] Dalam urusan menilai situasi dan membuat keputusan, birokrasi Hindia Timur memang terkenal lambat.

Baru pada tahun 1832 M ekspedisi pembersihan dan perjanjian penandatanganan kontrak dilaksanakan. Pada bulan Januari 1832 Facharuddin kembali minta bantuan membasmi perompak, sedang pemerintah kolonial menanggapinya dengan memberangkatkan ekspedisi ke pesisir Sumatera pada awal bulan Maret 1832. Van den Bosch mengatakan bahwa pemenuhan permintaan Jambi sejalan dengan kebijakan perluasan pengaruh Belanda atas Sumatera.[11] Selain itu Belanda juga berkepentingan membersihkan jalur dagang di tempat mereka melakukan perniagaan.

Pada bulan Mei 1832, tak lama setelah keputusan awal mengirimkan ekspedisi penumpasan perompak, Residen Praetorius menerima perintah resmi dari Batavia untuk membuat kontrak baru. Kontrak itu harus ditandatangani setelah ekspedisi tiba.[12] Kali ini residen sendiri yang mengambil prakarsa. Dalam suratnya kepada Facharuddin, untuk pertama kalinya Praetorius menyebut kontrak secara tersurat. Hal ini berbeda dengan sebelumnya ketika Praetorius berbasa-basi sebelum membuat perjanjian dengan Facharuddin. Oleh karena perjanjian itu sangat penting bagi Belanda, Praetorius mengusulkan pertemuan antara dirinya dan Facharuddin di Rawas, perbatasan Jambi dengan Palembang, untuk membicarakan kontrak. Hal itu ditempuh untuk menghindari pembelotan atau gangguan yang mungkin disebabkan pihak Kesultanan Jambi dan para perompak.

Hingga menjelang akhir tahun 1832 M janji pertemuan di Rawas belum juga terjadi. Pesan Facharuddin ke Praetorius bahkan tidak ditanggapi, namun ia tidak membiarkannya begitu saja. Pada akhir tahun 1832 M ia mengulangi permintaan menemui residen. Praetorius menolak undangan tersebut. Sifat angkuh Praetorius mulai terlihat. Hal ini mungkin karena kedudukannya yang sangat menginginkan promosi jabatan dan berharap bisa memperlihatkan

keberhasilan kepada penguasa kolonial di Batavia, yang dalam hal ini suatu aksi militer untuk menumpas perompak dan mungkin juga Jambi (Locher-Scholten, 2008: 80). Praetorius juga khawatir bahwa pertemuan dengan Facharuddin berakibat penundaan rencana ekspedisi yang sudah dijadwalkan. Sebab, bagi Praetorius, perundingan tanpa membawa kekuatan militer sama saja dengan bunuh diri. Oleh karena itu dalam surat balasan yang dikirim kepada Facharuddin, Praetorius mengatakan bahwa ia sedang dilanda kesibukan.

Pada bulan April 1833 Facharuddin bersikeras bertemu dengan residen. Pertemuan itu sangat penting baginya untuk menstabilkan situasi Jambi, baik dari sisi politik maupun sisi ekonomi. Praetorius membalas dan bersedia bertemu di Rawas sesuai perjanjian awal. Pada bulan Juni Facharuddin memberitahu residen bahwa ia sedang menuju Rawas. Tanpa menunggu jawaban ia tiba di tujuan dengan dua ratus pengiring, termasuk sejumlah perempuan, anak-anak, dan beberapa pembesar Palembang. Rawas merupakan wilayah perbatasan berbukit-bukit, tetapi baik kedaulatan Kesultanan Jambi maupun Kesultanan Palembang tidak pernah ditetapkan secara tegas, sehingga daerah ini menjadi semacam daerah tak bertuan.[13]

Ketika berita Facharuddin akan tiba di Rawas sampai ke residen, pihak Belanda menjadi gempar. Pada tanggal 30 Juni 1883 residen menunjukkan reaksi bertahan. Ia mengirim pembesar Palembang beserta pengawal bersenjata setempat untuk memastikan maksud sultan, sementara ia minta bantuan kepada Residen Bangka dan Batavia. Praetorius khawatir ketika ia tidak mendengar jawaban dari Batavia selama enam pekan.

Pada awal Juli 1833 Praetorius menerima pemberitahuan bahwa regu pendahuluan pasukan Jambi sudah bergerak mencapai jarak satu setengah hari mendayung dari ibukota. Pertahanan Palembang disiagakan. Residen menyeru warga. Beberapa ribu orang, termasuk sepuluh orang Eropa, mengangkat senjata (Locher-Scholten, 2008: 82). Ia mengeluarkan ultimatum bahwa Facharuddin boleh datang ke Palembang dengan seratus orang pengikutnya dan harus memulangkan sisanya ke Jambi. Jika permintaan tidak memenuhi, Facharuddin akan didesak mundur dengan kekerasan.

Meskipun Facharuddin sudah mengatakan bahwa kedatangnnya dengan maksud perdamaian, residen tidak menggubris. Praetorius beranggapan kedatangan Jambi dengan berbagai maksud, mengingat tidak lagi datang dengan 100 pasukan tetapi dengan 2.000 pasukan. Facharuddin mendesak pertemuan sampai ia masuk ke wilayah kekuasaan Belanda di Palembang. Belanda tidak menerima dan perang tidak terelakkan. Perang bermula pada pertengahan bulan Juli 1833. Tentara Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Mechiels memasuki Sarolangun Jambi dan menutup jalur sungai serta memaksa pasukan Facharuddin kembali ke Jambi. Pasukan

Jambi didesak mundur dari Palembang pada tanggal 16 Agustus 1833. Facharuddin sampai harus menyelam di sungai dan melawan arus demi menyelamatkan nyawanya saat kapal yang ditumpanginya hancur.[14] Pasukan Facharuddin dipukul mundur oleh tentara Belanda hingga ke Sungai Baung, Limbur Tembesi.

Jambi akhirnya mengakui kekalahan. Pada tanggal 14 November 1833 Sultan Facharuddin menandatangani perjanjian dengan Belanda di Sungai Baung. Perjanjian berisi pernyataan Negeri Jambi dikuasai dan dilindungi oleh Negeri Belanda, serta Negeri Belanda mempunyai hak untuk membangtun kekuatan di daerah Jambi di mana perlu. Alih-alih terpukul, Facharuddin justru menganggap perjanjian itu sangat positif dan dengan sangat senang menyerahkan urusan para perompak kepada penguasa kolonial (Boers, 1850: 463–70).

Perjanjian Sungai Baung dianggap belum sempurna oleh Residen Palembang Practorius dan dianggap belum menjamin kekuasaan Belanda di Jambi (Boers, 1840). Untuk itu pada tanggal 15 Desember 1834 Sultan Facharuddin, Sultan Keramat, Pangeran Ratu Kertaningrat, dan beberapa bangsawan Jambi dipaksa menandatangani surat perjanjian 14 November 1833 yang berisi (1) pemerintah Belanda memungut cukai dari segala pemasukan dan pengeluaran barang; (2) pemerintah Belanda berhak memonopoli penjualan garam; (3) pemerintah Belanda tidak memungut selain cukai; (4) pemerintah Belanda tidak akan campur tangan dalam urusan tata negara dalam negeri dan tidak akan mengganggu adat istiadat dalam negeri, kecuali dalam hal penggelapan cukai yang berhak dipungut oleh pemerintah Belanda; dan (5) sultan dan *pangeran ratu* mendapatkan uang tahunan sebesar 8.000 gulden.

Meski demikian Belanda sangat berhati-hati menjalankan kedaulatannya. Hal yang berkait dengan praktik monopoli kekuasaan dan hak-hak kedaulatan dilaksanan secara lunak dan penuh kehati-hatian. Di sisi lain Sultan Facharuddin pun jarang memperlihatkan rasa tunduk pada tekanan Belanda. Ia justru bersikap layaknya orang yang suka membantu sekutunya yang kuat, dengan harapan mendapat semacam imbalan di kemudian hari. Ia memanfaatkan kehadiran Belanda di Jambi untuk memenuhi keinginan utamanya: memperkuat keuangan dan kedudukan politik di Kesultanan Jambi. Pada akhir tahun 1833 M, misalnya, ia berusaha memperoleh dua puluh peti candu dari penguasa kolonial yang ingin ia tukar dengan emas. Perdagangan emas dan candu di wilayahnya akan memperkuat kekuasaannya atas.[15] Namun permintaan itu ditolak.

Pada tahun 1836 M Sultan Facharuddin mencoba lagi peruntungannya dalam perdagangan emas. Ia menawarkan kepada pemerintah kolonial hak mengelola tambang emas di wilayahnya dengan imbalan sepertiga bagian untuknya. Tawaran itu diajukan karena ia tidak mempunyai pengaruh apa pun atas tambang

emas di wilayah tersebut. Dewan Hindia Timur menganggap tawaran sultan beresiko tinggi, sebab berkaitan dengan operasi pertambangan milik negara.

Sultan Facharuddin juga berupaya memperkukuh diri dalam perdagangan garam, sekalipun ia tidak begitu berhasil pada pengalaman masa lampau. Pada tahun 1837 M, misalnya, ia minta persetujuan perdagangan bebas atas monopoli perdagangan garam di Jambi. Batavia langsung menolak permintaan itu karena berarti makin menyusutkan bea ekspor-impor yang sudah kecil.[16] Ternyata apa pun harapan Sultan Facharuddin atas kehadiran Belanda tidak meningkatkan perdagangan, apalagi politik. Penguasa kolonial bahkan tidak tampak memperhatikannya ketika ia berusaha mewujudkan peningkatan perdagangan dan politik (Locher-Scholten, 2008: 98).

Pada tahun 1839 M kedudukan Facharuddin semakin terdesak ketika perpecahan di lingkungan istana semakin meruncing. Pangeran Adipati Raden Tabun menawarkan diri berada langsung di bawah penguasa Batavia. Tawaran itu sebagai ungkapan kekesalan karena ia tidak memperoleh bagian apa-apa dari tunjangan tahunan yang dibayar Belanda. Di samping itu Facharuddin memperlakukan tidak hormat kepada istrinya, saudara perempuan Tabun. Ia kemudian mundur ke wilayahnya, di daerah hulu Sungai Batang Hari, dan memutus segala hubungan dengan Jambi. Di sana ia berkuasa sampai tahun 1845 M (Locher-Scholten, 2008: 93–98).

Sultan Facharuddin sangat berharap Belanda dapat memperkuat kedudukannya, tetapi ia kecewa. Pemberontakan di kesultanannya kembali terjadi dan tidak jelas melibatkan dirinya atau tidak. Ia pun putus asa. Belanda berpaling darinya dan justru menaruh kepercayaan pada *pangeran ratu*. Boers, yang mencurigai Facharuddin, lebih suka mendudukkan *pangeran ratu* yang dianggap mempunyai posisi lebih kuat. Ia mendukungnya dari sebuah pos Belanda di ibukota Jambi. Urusan Jambi yang pada awalnya begitu menggairahkan kemudian menjadi ruwet ketika para elite Jambi mendukung pemberontakan di Rawas, bahkan sebagian menjadi pemimpin.[17]

Hal itu tidak mengenakkan Batavia karena Batavia baru saja berunding dengan penguasa Indragiri. Jika sejawatnya, Sultan Jambi, diganti pasti menimbulkan kesan sangat buruk bagi Indragiri. [18] Namun, bagaimanapun, Belanda ingin memperkuat kedudukan *pangeran ratu* sekukuh mungkin. Oleh karena itu ia diberi pembayaran di muka sebesar dua ribu gulden sebagaimana diminta pada tahun 1840 M. Sebetulnya konsesi itu kecil karena yang diminta lima kali dari jumlah tersebut. Penguasa kolonial juga menolak tawaran Raden Tabun bagi Belanda melakukan pendudukan berdasar anggapan Belanda akan lebih baik jika

mendukung *pangeran ratu* di Jambi. Batavia merasa sangat lega karena tawaran itu tidak diulangi.[19] Dalam beberapa dasawarsa kemudian Belanda sering menentang pernyataan bahwa Jambi merupakan negara berdaulat dan mempertahankan haknya sendiri dengan sangat gigih atas kedaulatan Belanda.

Sejak tahun 1836 sampai awal tahun 1840 M Belanda benar-benar tidak menaruh minat pada Jambi. Hal itu diungkapkan oleh Pemerintah Hindia Timur di Batavia. Kementerian di Deen Haag juga tidak pernah menanggapi secara resmi laporan tahun 1834 M tentang penandatanganan kontrak dengan Kesultanan Jambi. Meskipun demikian keadaan berubah pada tahun1840-an dan tahun 1850-an M ketika Pemerintah Inggris dan Amerika menaruh minat terhadap Sumatera pada umumnya dan Jambi khususnya (Locher-Scholten, 2008: 101).

Pada periode itu Jambi berada di tengah diplomasi penting. Baik Inggris maupun Amerika hanya mencari keuntungan perdagangan semata dan bukan pereluasan wilayah. Kedua negara ini berhasil mendapat konsesi Belanda. Inggris berhasil Belanda membatasi ekspansinya di Sumatera dan mendapat izin membuka benteng kecil di Muara Kompeh sekalipun masih menampung satu garnisun Belanda. Adapun Amerika Serikat memperoleh hak perwakilan konsulat untuk mempertahankan kepentingan perdagangannya di Hindia Timur. Walalupun hanya kekuatan kecil di Eropa sejak tahun 1839 M, tetapi pemerintah Belanda mampu mempertahankan ruang untuk menjalankan kebijakan independennya. Ia tidak tunduk pada tuntutan Inggris untuk memperbarui kontrak perdagangan; bahkan secara internal mereka mendefinisikan ulang kekuatannya secara lebih tepat.

Posisi Jambi benar-benar tidak menguntungkan karena menjadi wilayah yang diperebutkan tiga negara sekaligus: Belanda, Inggris, dan Amerika, sehingga Jambi sulit berkembang. Namun demikian kemunculan Taha Saifuddin sebagai sultan baru yang mengubah jalur sejarah Jambi.

4. Pahlawan bagi Kesultanan Jambi: Sultan Taha Saifuddin (1858-1900)

Pada bulan Oktober 1855 tampil sultan baru bernama Taha Saifuddin menggantikan sultan sebelumnya yang meninggal pada tanggal 18 Agustus 1855. Ia seorang penguasa yang ternyata menjadi musuh utama pemerintah kolonial di Jambi selama hampir empatpuluh tahun. Sultan Taha melaporkan kepada penguasa kolonial bahwa dirinya sudah dinobatkan menjadi sultan yang baru. Sebagaimana pendahulunya, ia hanya sekadar melaporkan jabatan barunya kepada Belanda. Pihak Belanda pun tidak diundang secara resmi dan Sultan Taha menganggap bahwa penobatannya bukanlah peristiwa besar.

Hal itu membuat pihak Belanda geram, sebab sejak tahun 1850 M Belanda memberlakukan aturan bahwa setiap pemimpin baru suatu daerah harus melakukan yang lebih daripada sekadar memberi laporan. Mereka harus mengakui secara tegas bahwa daerah kekuasaannya merupakan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda yang mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah-wilayah di Hindia Timur. Belanda menginginkan Sultan Taha melakukan sumpah setia dan membuat kontrak baru dengan Belanda.

Draft kontrak baru dibuat pertama kali oleh residen setempat untuk diusulkan ke Batavia. Baru kemudian pihak kesultanan dapat melihat hal mana yang kurang bisa disepakati. Dalam konteks ini Sultan Taha membentuk suatu dewan yang ditugasi membaca kontrak dan memberi tahu sultan bagian mana yang dianggap kontroversial dan merugikan Kesultanan Jambi. Menurut Sultan Taha memang banyak pasal yang merugikan pihak Jambi (Locher-Scholten, 2008: 139–145). Beberapa pasal yang merugikan antara lain Jambi akan menjadi bagian Hindia Timur Belanda (Pasal 1), Jambi membantu Belanda mendirikan benteng di wilayah Jambi (Pasal 4), serta perkapalan dan administrasi perdagangan harus diawasi oleh pemerintah Hindia Belanda (Pasal 29). Di samping itu masih ada beberapa pasal lain yang merugikan Jambi.

Banyak pasal ditentang Sultan Taha. Ia tidak ingin Belanda membatasi kekuasaan sultan, apalagi yang berkaitan dengan suksesi pemerintahan dan administrasi perdagangan. Ia bersikeras mempertahankan kontrak lama yang dilakukan antara Kesultanan Jambi dan Belanda pada tahun 1834 M. Sultan Taha berpendapat bahwa Kesultanan Jambil belum pernah sekalipun melanggar peraturan tersebut, sehingga tidak ada masalah untuk tetap menggunakan aturan lama. Akibatnya perundingan tentang kontrak baru menemui jalan buntu.

Pada bulan Desember 1857 Dewan Hindia Timur Belanda merekomendasikan agar Batavia melakukan perundingan kedua dengan Jambi. *Draft* kontrak diperbaiki. Walaupun enggan mengubah pasal-pasal tentang kedaulatan, hubungan luar negeri, dan yurisdiksi menyangkut warga Eropa, tetapi Belanda bersedia merevisi pasal-pasal yang berkaitan dengan suksesi turun-temurun dengan harapan sultan melunak dan mau menandatangani perjanjian (Locher-Scholten, 2008: 142; Abdullah, 1984: 13–29). Pasal yang berkaitan dengan pembuatan benteng tanpa izin pemerintah Hindia Belanda pun dicoret karena Jambi tidak pernah punya pengalaman membangun benteng. Pasal ini pun dianggap tidak penting.

Gubernur jenderal bergegas mengirim surat kepada Sultan Jambi karena yakin bahwa kontrak baru akan disetujui. Optimisme itu bertolak pada pengalaman sebelumnya, yakni Sultan Jambi tunduk pada kontrak apabila ada kenaikan tunjangan tahunan: dari 8.000 menjadi 15.000 gulden setiap tahun. Surat itu diawali dengan

pujian dan kata-kata manis tentang sultan (Locher-Scholten, 2008: 142) pada awal paragraf. Baru pada paragraf-paragraf selanjutnya motif Belanda mulai terbaca. Tertulis bahwa penolakan sultan atas usulan-usulan klausul dalam kontrak baru dianggap sebagai niat jahat sultan terhadap pemerintah Hindia Belanda.

Pertemuan pun dilangsungkan. Meskipun demikian selama dua kali pertemuan Sultan Taha tidak pernah menampakkan diri. Utusan Belanda selalu disambut oleh *pangeran ratu* sehingga pembicaraan mengenai kontrak tidak pernah terjadi. Sultan Taha sengaja melakukan hal ini dan menjadikannya sebagai taktik untuk menghindari paksaan Belanda. Sampai beberapa tahun kemudian taktik itu menjadi ciri khas Sultan Taha Saifuddin. Selain untuk mengulur waktu, kesempatan itu juga digunakannya untuk minta bantuan Turki Utsmani, tetapi bantuan dari Turki Ustmani tidak kunjung tiba karena kekhalifahan tersebut tengah sibuk menghadapi persoalan sendiri.

Melihat pihak Belanda mulai geram Sultan Taha melakukan manuver. Ia kembali membuat perjanjian ke titik awal karena ingin mempertahankan kontrak tahun 1834. Meski demikian pihak Belanda tidak patah arang. Mereka bertemu kembali pada bulan Juni 1858, tetapi tidak ada kesepakatan yang terjadi. Sultan Taha tidak mau bermusuhan dengan pihak Belanda, namun di sisi lain ia juga tetap ingin mempertahankan kontrak lama yang ditandatangani oleh ayahnya. Meskipun demikian ia siap berperang sekiranya Belanda tidak setuju dengan keputusan itu (Locher-Scholten, 2008). Sultan Taha tidak melihat manfaat perundingan penandatangan kontrak baru untuk menggantikan kontrak lama. Langkah ini mendapat dukungan para bangsawan Jambi. Dukungan kepada Sultan Taha semakin kuat. Istana bersatu dan Kesultanan Jambi lahir sebagai kesultanan kuat yang sudah pasti sulit dikalahkan; sekalipun oleh Belanda.

Penolakan untuk kedua kalinya membuat penguasa kolonial di Batavia kehilangan kesabaran. Penolakan itu dibaca Belanda sebagai bentuk ketidaksetiaan Jambi kepada Hindia Belanda. Cara yang dilakukan sultan Taha dianggap tidak pantas, tidak layak, dan bahkan tidak terhormat sama sekali. Belanda mengambil berinisiatif agar kontrak ini segera ditandatangani. Pada bulan Juli 1858 ekspedisi militer pun dikirim dan residen di Jambi diperintahkan untuk membangun benteng di sana. Sultan Taha merupakan musuh utama Belanda yang harus disingkirkan, sebab mengganggu kekuasaan Hindia Belanda di Jambi, yang pada gilirannya berpengaruh pada kawasan lain di Sumatera secara umum.

Ekspedisi militer yang dikirim Belanda termasuk besar pada saat itu. Apalagi kekuatan Jambi yang tidak begitu besar, terutama bila dibandingkan dengan Kesultanan Palembang dan Kesultanan Johor. Setidaknya ada empat kompi prajurit infanteri, satu detasemen

artileri, satu detasemen zeni, dua ratus kuli, empat kapal uap, dan kapal-kapal pribadi yang digunakan untuk mengangkut pasukan. Peristiwa ini merupakan kesempatan bagi Belanda untuk menampilkan kekuatan dengan harapan Kesultanan Jambi takut dan tunduk sebelum berperang. Sultan Taha bahkan diultimatum untuk segera menyerah dan mau melakukan perundingan dalam batas waktu empatpuluh delapan jam.

Empatpuluh delapan jam kemudian Sultan Taha pun bersedia melakukan perundingan. Juru runding dari Belanda boleh berunding, namun tidak di keraton dan mereka tidak diperkenankan bertemu dengan sultan. Perundingan akhirnya dilaksanakan di kediaman Pangeran Surio Nata Krama. Sang pangeran menjelaskan bahwa sultan hanya mau menerima duabelas pasal, termasuk llima yang sebelumnya dianggap tidak bisa diterima, seperti larangan membuat perjanjian dengan negara asing (Pasal 7), ketentuan yang mengatur hak warga Eropa dan Cina di Jambi (Pasal 12, 20), pelaksanaan vaksin cacar sapi (Pasal 21), dan pengawasan penguasa kolonial atas perkapalan dan administrasi perdagangan (Pasal 29).

Perundingan berlangsung hingga keesokan harinya. Keesokan harinya pula Sultan Taha mengirim delegasi baru dengan pesan bahwa ia bisa menerima pasal lain yang belum dibicarakan sebelumnya.[20] Alih-alih membuat kontrak baru, ia menginginkan revisi klausul-klausul yang telah disepakati pada perundingan-perundingan sebelumnya cukup dituangkan ke dalam kontrak 1834.[21] Belanda membaca gelagat tersebut sebagai upaya Sultan Taha mengulur waktu. Oleh karena itu pada tanggal 5 September 1858 akhirnya Belanda bergerak dan ekspedisi militer berlangsung di bawah pimpinan Mayor Van Langen.[22]

Pada dini hari tanggal 6 September 1858 pasukan Belanda mendarat diam-diam. Meskipun demikian hal tersebut sudah diperkirakan oleh Sultan Taha. Oleh karena itu Kesultanan Jambi memberikan perlawanan sengit kepada Belanda. Mereka menggunakan benteng, perkampungan, dan rumah-rumah yang diperkuat untuk mempersulit Belanda mencapai keraton Jambi. Posisi kraton yang dikelilingi oleh rawa bahkan membuat pasukan Belanda kebingungan mencari jalan masuk yang aman.

Setidaknya butuh waktu selama tiga jam buat pasukan Belanda bisa merangsek masuk ke dalam keraton. Namun sesampainya di keraton Sultan Taha dan para pengawalnya sudah kabur ke perbatasan di dataran tinggi. Sultan Taha menyingkir dari keraton ke daerah *uluan* Jambi. Meskipun dengan perlawanan sengit kekuasaan Sultan Taha harus jatuh ke tangan Belanda. Sultan Taha dimakzulkan sebagai Sultan Jambi dan Belanda menobatkan Raden Ahmad (*prabumanja*) sebagai Sultan Jambi dengan gelar Sultan Ahmad Nazaruddin pada tanggal 2 November 1858.

Sultan Ahmad Nazaruddin dan sultan-sultan kemudian yang diangkat Belanda di mata rakyat Jambi disebut "sultan bayangan". Sultan yang diangkat secara resmi oleh Gubernemen Belanda memang memiliki derajat kesultanan, tetapi tidak penuh berkuasa atau dapat disamakan keadaannya dengan "sultan boneka". Sebaliknya Sultan Taha Saifuddin dianggap sebagai sultan yang sah oleh seluruh rakyat Jambi, sebab Sultan Taha memiliki perlengkapan kesultanan (*rijkssierenden*) secara lengkap, di antaranya keris pusaka "Siginjei" sebagai tanda kekuasaan dan kebesaran sultan.

Sultan Ahmad Nazaruddin akhirnya membuat kesepakatan dengan Belanda yang dikenal dengan nama Perjanjian Desember 1858. Isinya antara lain sebagai berikut:

(1) Mengingat isi surat-surat perjanjian yang dulu dan karena alasan kemenangan yang didapat oleh Belanda terhadap Sultan Negeri Jambi, maka Jambi adalah sebagian dari jajahan Belanda di Hindia Timur dan dengan ini negeri Jambi berada di bawah kekuasaan negeri Belanda.

(2) Negeri Jambi hanya dipinjamkan kepada Sultan Jambi yang harus bersikap menurut dan setia serta hormat terhadap Pemerintah Belanda.

(3) Pemerintah Belanda berhak memungut cukai pengangkutan barang masuk dan ke luar Negeri Jambi.

(4) Kepada sultan dan pangeran ratu diberikan uang tahunan sejumlah 10.000 gulden, jumlah bisa naik jika penghasilan cukai pengangkutan barang bertambah.

(5) Segala perjanjian tersebut dalam surat perjanjian 15 Desember 1834 tetap berlaku, jika tidak berlawanan dengan isi surat perjanjian ini.

(6) Sultan dan pangeran ratu harus mengirim utusan untuk menghormati Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, jika dianggap perlu oleh Pemerintah Belanda.

(7) Batas-batas negeri Jambi akan ditetapkan oleh Pemerintah Belanda.

Meski Sultan Taha sudah tidak lagi memegang tampuk kekuasaan, namun ia masih menjadi tokoh penting di balik layar dalam sistem kekuasaan di Kesultanan Jambi. Ia sering menggalang kekuatan dan mencari dukungan para bangsawan yang tidak setuju cara Belanda menguasai Jambi. Sebagian rakyat pun masih banyak yang mendukung Taha, walaupun pada perkembangan selanjutnya banyak juga yang membelot dan membuat Taha tertangkap.

Jatuhnya Sultan Taha membuat gairah politik dan daya tawar Kesultanan Jambi atas Belanda semakin melemah. Selain itu perekonomian kesultanan ini pun semakin memburuk sehingga tidak begitu mampu menambah devisa Belanda. Oleh karena itu beberapa dasawarsa kemudian kepentingan Belanda pada kesultanan ini terbatas pada penelitian ilmiah. Residen J. A. W.

van Ophuijsen (1861–1863 M dan 1867–1870 M) merupakan satu-satunya pejabat Palembang yang mengunjungi Jambi pada tahun 1860-an karena terdorong oleh rasa ingin tahu akademis. Dari kunjugannya pada Desember 1861, 1867, dan 1869, ia menghimpun sejumlah naskah berkenaan dengan adat dan budaya rakyat, yang kelak ia sumbangkan kepada Universitas Leiden.

Pada 1870-an M Jambi menjadi tujuan ekspedisi ilmiah pertama Perhimpunan Geografi Belanda yang baru dibentuk, sebuah ekspedisi yang mempengaruhi perluasan kekuasaan Belanda. Meskipun demikian kesarjanaan tidak selalu seiring jalan dengan imperialisme. Pada tahun 1860-an M pemerintah kolonial berkepentingan memulihkan kepercayaan diri Jambi yang hancur oleh aksi militer. Couperus menempuh upaya dengan penobatan khidmat sultan baru. Para penggantinya menganut garis kebijakan yang sama.

Pada tahun 1890-an M terjadi perubahan hubugan Batavia dengan Jambi, seperti halnya dengan daerah-daerah swapraja lain di luar Jawa. Kebutuhan pemasukan keuangan pemerintah kolonial yang semakin meningkat, peningkatan usaha partikelir, dan kebangkitan kembali kepercayaan diri kolonial menghasilkan kekuatan baru Belanda *vis-à-vis* para penguasa lokal.

Ketika minyak ditemukan pada tahun-tahun terakhir abad ke-19 pemerintah kolonial menekankan kerjasama dan akhirnya memaksakannya dengan cara-cara militer. Orang-orang Jambi tidak mampu mempertahankan politik tradisional mereka. Dalam situasi baru ini Belanda melihat watak sesungguhnya sikap para penguasa setempat secara lebih jelas, sekalipun Jambi hampir tidak pernah memberi keuntungan secara nyata kepada pemerintah kolonial.

5. Pecinan: Pusat Dinamika Islam

Meski sudah menjadi kesultanan, Jambi tidak menunjukkan bukti memadai bagaimana kesultanan menyerap Islam ke dalam struktur pemerintahan, seperti halnya Palembang dengan lembaga penghulu. Begitu juga istana Jambi tidak pernah dikenal sebagai pelindung ulama, seperti dalam kasus Aceh para ulama menulis karya-karya untuk dipersembahkan kepada sultan sebagai pengayom. Namun demikian tidak berarti aspek Islam sama sekali tidak hadir di Jambi. Andaya (1993: 67) memberi beberapa informasi bagaimana Mataram di Jawa menjadi salah satu sumber tumbuhnya tradisi keislaman di Jambi. Sebagai contoh, praktik poligami dalam perkawinan di Mataram diikuti bangsawan Jambi. Informasi berikutnya berkaitan dengan pengalaman Sultan Taha di tengah perjuangannya melawan Belanda. Diberitakan bahwa ia beberapa kali mengirim utusan, kemungkinan besar untuk meminta bantuan, ke Kekhalifahan Turki Usmani, baik melalui dutanya di Singapura maupun

langsung ke Turki. Salah seorang yang diutus adalah Syekh 'Abd al-Majid, seorang ulama Jambi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam pada awal abad ke-20 M.

Dinamika keislaman yang paling menonjol di Jambi terdapat di seberang istana dan kota, yang dikenal dengan sebutan Pecinan, sering pula disebut Sekoja, singakatan dari Seberang Kota Jambi. Tempat itu disebut Pecinan karena terdapat banyak keturunan pedagang asal Cina yang bermukim di sana. Diperkirakan mereka mulai menempati kawasan tersebut sejak abad ke-18 M. Hal itu didukung bukti arkeologis berupa temuan bejana porselen asal Dinasti Ming di Sekoja (Bakar, 1992: 88). Para pedagang Cina bisa dipastikan sudah banyak mengunjungi Jambi pada abad ke-16 M, bahkan mungkin lebih awal. Pada awal abad ke-17 M di Kuamang (sekarang termasuk Kabupaten Muaro Bungo) dan Tembesi (sekarang termasuk Kabupaten Batang Hari) sudah terdapat pedagang Cina yang menetap. Mereka mendiami daerah itu karena terdapat tanaman lada (Kian, 2015: 151). Memang tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pedagang Cina yang tinggal di Pecinan saat itu, tetapi dapat diasumsikan bahwa jumlah mereka banyak sehingga muncul istilah Pecinan.

Secara historis-sosiologis nama Pecinan tidak asing dalam sejarah Indonesia. Nama tersebut digunakan merujuk pada kampung para pedagang Cina yang tinggal di Nusantara, termasuk di Batavia dan daerah lain di Jawa. Sejak pemberontakan Cina di Batavia pada tahun 1740 M VOC memberlakukan kebijakan mengontrol orang Cina dengan cara mewajibkan mereka tinggal di satu tempat yang disebut Pecinan (Onghokam, 2017: 139–140). Dalam Perkembangannya tidak sedikit pedagang Cina menikah dengan penduduk setempat. Keadaan seperti itu menciptakan akulturasi budaya antara Cina dan Nusantara, bahkan tidak sedikit di antara mereka menjadi muslim, yang kemudian disebut Cina Peranakan karena sudah bercampur dengan penduduk setempat. Jumlah orang Cina muslim cukup banyak, sehingga diperlukan dua orang pemimpin untuk orang Cina di Batavia (Onghokam, 2017: 133).

Meskipun tulisan Onghokham tentang Cina lebih terpusat di Jawa, tetapi pola itu juga berlaku di Sumatera, khususnya Jambi. Masyarakat Cina menetap di beberapa tempat di Jambi, seperti Koamang dan Tembesi. Namun karena letaknya di pedalaman, tempat tersebut tidak diidentifikasikan sebagai kampung orang Cina. Kampung Cina justru berada di seberang pusat pemerintahan Kesultanan Jambi, pusat dinamika sosial-politik dan ekonomi. Sekitar paruh pertama abad ke-18 M kampung ini dipimpin oleh seorang Cina muslim, Sin Tai, yang diberi gelar *datuk gebi*. Ia seorang saudagar Cina kaya yang diangkat menjadi *gebi*, setara kepala kampung atau lurah. Dengan pengangkatan seorang Cina muslim sebagai pemimpin

sangat mungkin terdapat banyak orang Cina yang beragama Islam sebagaimana diungkapkan Onghokham di atas. Sin Tai, oleh masyarakat Pecinan dipanggil Datuk Sin Tai, merupakan seorang Cina muslim yang datang ke Jambi pada tahun 1676 M. Ia memiliki kemampuan diplomasi sehingga dapat mendekati Sultan Jambi. Ia menjadi penghubung antara pedagang Cina dan sultan dalam urusan niaga. Karena kepiawaiannya itu ia menjadi seorang Cina muslim yang kaya dan berpengaruh di Jambi (Agus, 2012: 23).

Meski disebut Pecinan tempat itu tidak hanya didiami orang Cina. Terdapat pula orang Arab yang tinggal di sana. Orang Arab diperkirakan mulai mendiami Pecinan sejak abad ke-18 M. Habib Husin bin Ahmad Baragbah, misalnya, datang ke Jambi pada tahun 1716 M. Catatan lain menyebut Habib Husin bin Ahmad Baragbah datang ke Jambi jauh lebih awal, pada tahun 1615 M, dan meninggal pada tahun 1625 M, hampir satu abad lebih awal (Noor, 2017: 6). Habib Husin memang bukan ulama pertama yang datang ke Jambi. Sebelumnya Jambi telah kedatangan seorang ulama asal Surat pada tahun 1687 M, namun ia tidak ada dalam ingatan masyarakat Jambi, sementara itu nama Habib Husin bin Ahmad Baragbah mendapat tempat istimewa dalam ingatan masyarakat Pecinan dan makamnya masih diziarahi sampai sekarang.

Habib Husin lahir pada tahun 1683 M di kota Tarim. Pendidikan Islam pertamanya didapat dari ayahnya yang mengajarinya Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam. Ia kemudian berguru kepada 'Abd Allah bin Alwi al-Haddad († 1720 M), Habib Zain al-'Abidin bin Mustafa al-Idrus, Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi († 1733), Habib 'Abd Allah bin Ahmad Bilfaqih, Syekh Muhammad bin 'Abd Allah Bajamal, dan Syekh Ahmad bin 'Abd Allah Basyarahil. Ia berkelana ke pusat-pusat ilmu di Yaman, seperti kota Siwan, Sibam, Taris, Zilak, dan Sihir (Agus, 2012: 30). Setelah menuntut ilmu dari satu kota ke kota lain Habib Husin melakukan perjalanan dakwah ke timur. Bersama saudaranya, Habib Zain bin Ahmad Baragbah, ia tiba di India pada tahun 1710 M. Dari India kemudian mereka berlayar ke Malaka dan Johor. Di sana mereka mempelajari bahasa Melayu. Mereka melanjutkan perjalanan ke Palembang dan setelah beberapa tahun di Palembang mereka ke Jambi pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Mansyur Joyo Ingologo, 1706–1714 M (Agus 2012: 31). Habib Husin memiliki pengaruh besar di Palembang. Ia dinikahkan dengan putri seorang pembesar.

Pada tahun 1716 M Habib Husin tiba di Pecinan Jambi. Kedatangannya mengisi kekosongan ahli agama untuk mengajarkan Islam kepada masyarakat Jambi. Oleh karena itu ia berhasil menancapkan pengaruh yang besar kepada kaum muslim Jambi. Ia orang yang paling berperan atas perkembangan Islam di Pecinan, yang kelak menjadi salah satu tujuan pendidikan ilmu

Islam dari kawasan Melayu lain seperti Palembang dan daerah-daerah di Semenanjung Malaka. Seperti di Palembang, Habib Husin kembali menikah dengan Nyai Resik, putri Datuk Sin Tai. Dari pernikahan itu ia memperoleh beberapa orang anak yang kelak menggantikan kedudukannya sebagai pengajar agama Islam di Pecinan. Habib Husin meninggal dan dimakamkan di kampung Arab Melayu pada tahun 1760 M (Agus, 2012: 56).

Kedatangan orang Arab ke Jambi semakin banyak pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 M. Sebagian besar di antara mereka bermarga al-Jufri. Beberapa di antaranya mendapat kepercayaan sultan, bahkan ada yang menikah dengan keluarga sultan seperti Sayid Hasan al-Jufri. Sayid Idrus al-Jufri, anak Sayid Hasan al-Jufri, menjadi orang Arab yang paling berpengaruh di Pecinan. Ia memiliki sejumlah tanah perkebunan yang luas di kawasan Jambi. Jaringan perniagaannya hingga ke luar negeri. Ketika Sultan Taha mengutus orangnya ke Turki, jaringan al-Jufri-lah yang membantu mereka selama di Turki. Pengaruh al-Jufri masuk ke Istana Jambi berkat ayahnya. Ia bahkan mendapat gelar Pangeran Wiro Kusumo dan menjadi orang kepercayaan Sultan Taha ketika bersembunyi di pedalaman selama perang melawan Belanda (Locher-Scholten, 2008: 139).

Habib Husin bukan satu-satunya ulama di Jambi. Terdapat sejumlah nama lain yang diakui sebagai ulama Jambi, antara lain H. Ishak bin H. Karim († 1700), Kemas H. Muhammad Zain bin Kemas H. 'Abd Ar-Rauf al-Jambi Asy-Syafi'i al-Asy'ari An-Naqsyabandi († 1815), Pangeran Penghulu Noto Agomo Magatsari († 1852), Syekh Muhammad Syafi'i Bafadhal, Sayid Alwi al-Baithi, al-Qadhi 'Abd al-Ghani bin Haji 'Abd al-Wahhab († 1888), dan Syekh Abdul Madjid bin Haji Muhammad Yusuf Keramat († 1893). Sebagian besar di antara mereka tinggal di Pecinan. Pada akhir abad ke-19 M muncul penduduk asli sebagai pendidik agama Islam, bahkan beberapa di antara mereka menghasilkan karya dan mengajar di Mekah. Oleh karena itu tidak berlebihan jika Pecinan disebut sebagai pusat kajian Islam di Jambi. Muslim Jambi tidak hanya mempelajari Islam dari ulama pendatang seperti Habib Husin, bahkan penduduk asli mulai menggantikan peran mereka. Selain itu mereka tidak hanya berguru kepada ulama-ulama yang datang ke Jambi, tetapi juga belajar ke tempat lain, seperti Palembang yang Islam-nya telah berkembang pesat. Beberapa ulama Pecinan melanjutkan pendidikan ke Mekah, seperti Ketib Mas'ud († 1889). Ia salah seorang pelopor jaringan ulama Jambi (Muzakir, 2012: 75).

Ketib Mas'ud bernama asli Haji Muhammad Mas'ud. Kemungkinan gelar "khatib" diberikan oleh Sultan Jambi sebagai tokoh agama. Hingga sekarang jabatan khatib masih ditemukan dalam hierarki "pegawai syarak" di Jambi. Khatib berada di bawah pimpinan seorang hakim dan imam, tetapi di atas bilal. Model jabatan yang seperti ini sudah berlaku sejak

masa kesultanan. Mereka merupakan salah satu perangkat dalam pembuatan undang-undang adat bersama para tokoh adat (Dimyati, 1987: 47). Kata "khatib" disebut "ketib" oleh masyarakat Pecinan karena dialek.

Selain Ketib Mas'ud nama lain yang berperan dalam keilmuan Islam di Pecinan adalah Abu Bakar al-Jambi. Ia menyalin beberapa kitab, seperti *Mukhtasar* karya Kemas Fakhr Ad-Din dari Palembang pada tahun 1883 M dan *Tanbih al-Ghafilin* pada tahun 1873 M. Di dalam salinan yang dilakukan Abu Bakar al-Jambi tertulis bahwa ia menyelesaikan kitab *Tanbih al-Ghafilin* milik 'Abd al-Ghani kemudian diturunkan kepada anaknya 'Abd Ghaffar (Muzakir, 2012: 58). Kegiatan penulisan Abu Bakar al-Jambi dilakukan di dalam mesjid Kampung Tengah. Mesjid dan surau, seperti di daerah mana pun di Nusantara, merupakan tempat utama pendidikan Islam sebelum pesantren dan madrasah dikenal masyarakat, terlebih daerah Minangkabau, Jambi, dan Palembang.

6. Syekh Abdul Majid: Profil Seorang Ulama Jambi

Di antara sejumlah ulama Jambi yang telah disebut, Syekh Abdul Majid memiliki keistimewaan. Lahir di Pecinan pada tahun 1850 M, Syekh Abdul Majid berasal dari keluarga terpandang di wilayah yang menjadi pusat dinamika Islam di Jambi. Muhammad Yusuf, ayah Abdul Majid, dikenal sebagai saudagar kaya yang taat beragama, seorang haji yang memiliki perhatian terhadap kehidupan keagamaan di Pecinan. Selain Ketib Mas'ud dan Abdul Ghani, saat masih kecil Abdul Majid juga berguru pada ayahnya. Abdul Majid segera diakui sebagai seorang ulama pemuda yang berpengaruh di Pecinan. Pada usia 20-an ia diberitakan telah menjadi guru agama (ustaz) untuk generasi muda muslim Pecinan. Ayahnya mendukung dengan mendirikan langgar yang digunakan sebagai tempat belajar-mengajar oleh Abdul Majid (Fadhil, 2009: 70).

Sebagaimana elit Muslim Nusantara pada umumnya pada akhir abad ke-19 M, Abdul Majid melanjutkan studi tentang Islam ke Mekkah. Kedatangan Abdul Majid di Tanah Suci sekitar tahun 1870-an M saat masih berumur 20 tahunan; umur yang umum bagi muslim Nusantara dan Asia Tenggara pada umumnya pergi haji ke Mekkah dan sekaligus belajar Islam. Mereka membentuk apa yang kemudian dikenal dengan "Jawa" atau "komunitas Jawi" di Mekkah (Snouck Hurgronje, 1931). Sebagaimana komunitas Jawi umumnya, setiba di kota Mekkah Abdul Majid berkenalan dan sangat mungkin bergabung dengan kelompok Melayu dari komunitas Jawi, di antaranya yang paling terkenal Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Bersama Syekh Ahmad Khatib, Syekh 'Abd al-Majid juga beguru kepada Syekh Bakri Dimyati Syatha, ulama asal Mesir yang sekaligus pengarang *I'anat Ath-Thalibin.* Selain Syekh Ahmad Khatib, Abdul Majid juga belajar pada Syekh Ali bin 'Abd Allah al-Banjari, cicit Syekh Arsyad al-Banjari, dan sejumlah ulama Nusantara lainnya.

Syekh Bakri Syatha mengajar kitab *Fath al-Mu'in* di Masjid al-Haram. Selama mengajar kitab tersebut para muridnya mencatat komentar-komentar yang dilontarkannya untuk menambah keterangan yang lebih rinci. Pada suatu ketika seseorang mengusulkan untuk mengumpulkan catatan tersebut. Kumpulan catatan tersebut kemudian menjadi kitab *I'anat Ath-Thalibin.* Barangkali dari sinilah berkembang pengakuan bahwa Abdul Majid termasuk dalam penulisan kitab tersebut, tetapi tidak ditemukan informasi lebih lanjut mengenai pernyataan tersebut. Selain Syekh Bakri Syatha, ulama lain yang menjadi guru Abdul Majid adalah Syekh Umar bin Muhammad bin Mahmud Syatha al-Makki Asy-Syafi'i († 1912 M) dan Syekh 'Utsman bin Muhammad Syatha al-Makki Asy-Syafi'i († 1878 M). Juga perlu disebut dalam konteks ini sejumlah ulama lain, yakni Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan († 1886), Yahya al-Qalyubi, dan Syekh Muhammad Salih Kurdi.[23]

Setelah beberapa tahun menjadi murid guru-gurunya Abdul Majid memperoleh kesempatan mengajar di salah satu tempat di serambi Masjid al-Haram. Seperti telah disinggung di atas, pengelompokan asal daerah dan suku bangsa mewarnai kehidupan kecendekiaan kelompok Jawi di Mekkah saat itu. Oleh karena itu murid Abdul Majid sebagian besar terdiri atas pelajar asal Jambi dan Minangkabau. Khusus bagi para pelajar asal Jambi, mereka tidak mungkin melewatkan belajar kepada Abdul Majid, sehingga ia dijuluki *syaikh al-masyaikh al-jambi* 'guru para guru Jambi'. Selain karena keilmuannya Abdul Majid juga dikenal karena kedermawanannya. Seperti telah disinggung di atas, dia berasal dari keluarga kaya di Pecinan. Ayahnya, Muhammad Yusuf, adalah seorang haji yang sangat disegani. Begitu pula beberapa anggota keluarganya yang lain. Mereka kerapkali membantu para pelajar Jambi yang sedang kesusahan. Jadi, selain sebagai guru, Abdul Majid juga dihormati karena sering membantu secara ekonomi.

Setelah beberapa tahun berkarier di Mekah, Syekh Abdul Majid kembali ke Jambi. Tidak diketahui kapan ia menginjakkan kakinya kembali di tanah kelahirannya. Hal yang pasti adalah bahwa ia sudah berada di Pecinan saat Ketib Mas'ud, gurunya sebelum belajar ke Mekkah dan terus mengajar di Langgar Putih, meninggal dunia pada tahun 1889 M. Abdul Majid yang kemudian menggantikan kedudukannya sebagai guru di langgar tersebut. Pada masa inilah Abdul Majid menjadi guru dari sejumlah calon ulama dan pemimpin muslim Jambi pada awal abad ke-20 M, antara lain Abdul Shomad—yang kemudian menjadi Hoofd Penghulu Jambi, Guru Ahmad bin Abdul Syakur, Guru Utsman bin Ali, Guru Kemas Muhammad Soleh, dan Sayid Alwi bin Syihab. Melalui bidang masing-masing mereka menjadi tokoh terkemuka dalam proses perkembangan Islam di Jambi.

Kehadiran Abdul Majid di Jambi terjadi ketika perseteruan antara Sultan Taha dan Belanda kian memuncak. Belanda mencurigai setiap perkumpulan, apalagi dilakukan oleh seorang yang pernah

berhaji dan tinggal di Mekkah. Pengajian Abdul Majid pun tidak lepas dari kecurigaan Belanda. Oleh karenanya Abdul Majid memindahkan pengajiannya ke pinggir Danau Teluk,[24] kawasan yang sepi penduduk ketika itu, dan diberi nama Ma'had 'Ali. Disebut demikian karena Ma'had 'Ali mejadi pengajian khusus untuk murid-murid senior yang sudah mengetahui dasar ilmu Islam. Meskipun memindahkan tempat pengajiannya, Abdul Majid tetap mengajar di Langgar Putih.

Tidak diketahui secara pasti apakah Abdul Majid terlibat dalam perang melawan Belanda, kecuali bahwa ia pernah menjadi utusan Kesultanan Jambi ketika minta bantuan ke Khalifah Turki Usmani. Besar kemungkinan hal itu mengacu pada kejadian tahun 1903/1904 M ketika ia menjadi anggota rombongan yang diutus ke Singapura untuk menemui perwakilan Turki Usmani di Asia Tenggara. Selain itu tidak ada informasi terkait kegiatan Abdul Majid yang berkaitan dengan perjuangan melawan Belanda. Ia justru diberitakan kembali ke Mekkah dan meninggal di sana pada tahun 1915 m (Muzakir, 2012: 85; Agus, 2012: 39).

Selama hidup Syekh Abdul Majid patut disebut sebagai pejuang atas lahirnya ulama di Jambi. Murid-murid Syekh Abduk Majid mewarnai perkembangan Islam di Jambi bersama lembaga pendidikan yang didirikannya. Syekh Abdul Majid beranggapan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar. Pendidikan merupakan cara ampuh untuk melawan Belanda yang sangat dibenci oleh rakyat Jambi. Jika semua orang Jambi sudah terdidik, maka dengan sendirinya akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Demikianlah, Pecinan berkembang sebagai pusat dinamika Islam di Jambi. Beberapa ulama tampil dengan karya-karya mereka di berbagai bidang ilmu Islam. Satu hal yang mungkin luput dari kajian ini, dan juga kajian lain tentang sejarah Jambi, terkait dengan hubungan antara dinamika kecendekiaan dan politik kesultanan yang tengah berperang di bawah pemerintahan Sultan Taha Saifuddin dengan pihak kolonial Belanda. Bisa jadi perasaan anti-kolonial tumbuh sejalan dengan meningkatnya gairah keagamaan yang dinyatakan dengan dinamika intelektual Islam di Pecinan.

7. Perang Gerilya dan Runtuhnya Kesultanan Jambi (1901–1970)

Di tengah kekosongan kekuasaan Kesultanan Jambi tidak dapat berbuat banyak terhadap Belanda. Baru setelah Sultan Ahmad Nazaruddin naik takhta perjanjian dibuat kembali antara Belanda dan Jambi. Perjanjian dilaksanakan di antara kedua belah pihak sampai beberapa tahun kemudian. Meskipun demikian, secara garis besar, perjanjian ini merupakan tambahan dan pelengkap atas perjanjian yang telah dilakukan pada Desember 1858. Perjanjian dilakukan beberapa kali perubahan. Perjanjian pertama pada 1880

berisi Sultan Ahmad Nazaruddin Jambi memberi hak monopoli candu dan untuk itu sultan menerima uang tebusan sebesar 4.000 gulden setiap tahun (Beslissing, 1904). Perjanjian 22 Mei 1882 antara Sultan Ratu Muhammad Mahiluddin, atau biasa juga disebut Sultan Mahmud Mahiddin (1881–1885), berisi antara lain 1) bangsa Timur Asing harus memperoleh izin Gubernur Jenderal lebih dahulu untuk tinggal di Negeri Jambi; 2) semua bangsa Timur Asing dilindungi pengadilan Pemerintah Belanda; 3) kepada mereka tidak diizinkan menjual atau menyewakan tanah tanpa sepengetahuan penguasa Belanda; 4) Pemerintah Belanda berhak menguasai hasil pertambangan; 5) uang tahunan pengganti pemungutan cukai sebesar 10.000 gulden per tahun dinaikkan menjadi 12.000 gulden per tahun (Muttalib, 1977).

Mahidin meninggal pada tanggal 10 April 1885. Pada bulan Juli 1885 Pangeran Ratu Cakranegara dinobatkan oleh Belanda menjadi Sultan Jambi dengan gelar Sultan Ahmad Zainuddin. Segera setelah menjadi sultan, Sultan Ahmad Zainuddin mengangkat putra ketiga Sultan Taha Saifuddin yang masih berumur empat tahun menjadi *pangeran ratu* dengan gelar Pangeran Anom Kesumoyuda. Namun karena masih terlalu muda Raden Abdur Rahman, putra Sultan Mahmud Mahiddin, dan Pangeran Aria Jayakusumah, Putra Sultan Ahmad Nazaruddin, diangkat sebagai kuasa Pangeran Anom Kusumoyuda.

Selain itu Pangeran Aria Jayakusumah juga digantikan oleh Pangeran Marta Jayakusumah, putra Sultan Abdur Rahman Nazaruddin. Sehubungan dengan itu pula keris "Siginjei" yang dipegang oleh Sultan Taha kemudian diserahkan kepada Sultan Ahmad Zainuddin. Hal ini meyakinkan Belanda bahwa Sultan Taha mengakui Sultan Ahmad Zainuddin dan dengan sendirinya rakyat Jambi pun mengakui Sultan Ahmad Zainuddin sebagai satu-satunya Sultan Jambi (Muttalib, 1980, 26–37). Belanda puas dengan pemberian keris Siginjei kepada Ahmad Zainuddin mengingat keris tersebut merupakan pusaka suci, yang dianggap masyarakat Jambi sebagai simbol pemegang kekuasaan. Belanda kemudian memaksakan perjanjian kepada Sultan Ahmad Zainuddin yang dikenal sebagai Perjanjian 28 Mei 1888. Perjanjian ini antara lain berisi sebagai berikut:

(1) Penetapan tanah-tanah kepunyaan Pemerintah Belanda di sekitar Kota Jambi, Muara Sabak, Muara Kumpeh, Simpang, dan Kuala Tungkal.

(2) Pemerintah Belanda akan membayar uang tahunan kepada sultan dan tidak akan mengganggu urusan kesultanan selama sultan menepati perjanjian.

(3) Memantapkan hubungan antara Pemerintah Belanda dan Kesultanan Jambi.

(4) Menetapkan bagian Negeri Jambi di mana Kerinci tertuang sebagai sebagian Negeri Jambi.

(5) Sultan harus sering mengunjungi ibukota Jambi untuk memberikan kesan kepada warga bahwa dirinya merupakan pemimpin yang berbeda dengan sultan-sultan lainnya.

Setelah perjanjian ketiga tersebut kedudukan para anak raja Jambi mulai terbelah. Mereka yang tidak mendukung Belanda mendapat perlakuan buruk dan merugikan. Hal ini membuat Pangeran Marta Jayakusumah harus lengser dari jabatannya dan digantikan oleh Pangeran Natamenggala pada tanggal 1 November 1890. Sementara itu di daerah *uluan* Pangeran Diponegoro dan Pangeran Husin tidak mau mematuhi peraturan yang telah disepakati oleh pusat. Mereka tetap memungut cukai pengangkutan barang masuk serta membangun penjualan garam di Muara Tembesi. Hal ini membuat jengkel Belanda.

Ancaman dan teguran Belanda kepada Pangeran Diponegoro dan Pangeran Husin tidak dihiraukan. Mereka tetap melakukan pemungutan cukai. Penjualan garam tidak dihentikan, hanya dipindahkan ke tempat lain di Muara Tabur dan Muara Sekamis. Di samping itu perlawanan Sultan Taha Saifuddin dan para pengikutnya terus meningkat. Pada tahun 1891 Kontrolir Van Laar terbunuh dan pada tahun 1895 terbunuh pula komandan militer yang merangkap wakil Belanda di Jambi. Perlawanan Sultan Taha dan pengikut-pengikutnya mengakibatkan Belanda melakukan tekanan politik kepada Sultan Ahmad Zainuddin yang berakibat pada dimakzulkannya sang sultan pada bulan Desember 1899 dengan mendapat bantuan 4.000 gulden setahun. Tidak adanya kesepakatan di antara para bangsawan Jambi tentang pengganti Sultan Ahmad Zainuddin yang dapat diangkat Belanda, akhirnya pemerintahan Kesultanan Jambi menjadi kosong dan dipegang oleh pihak Belanda.

Pada awal tahun 1900 Belanda melakukan persiapan penyerangan. Keputusan kontak senjata itu tidak diduga. Belanda mengumpulkan informasi mengenai pedalaman Jambi. Pada Bulan September 1900 mereka menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari situasi di Muara Tembesi. Dua bulan berselang sebuah kapal uap dengan persenjataan lengkap dikirim untuk menjelajahi basin Batang Hari, Muara Jujuhan, hingga anak-anak sungainya yang paling utara. Belanda juga memasang kabel telepon dan telegraf antara Jambi dan Palembang agar mudah melakukan koordinasi di saat-saat genting (Velds, 1909: 28–33).

Rencana Belanda di atas diketahui oleh Taha. Namun ia tidak langsung menentang Belanda. Ia membiarkan Belanda melakukan misi ekspedisi pegenalan daerah Muara Tembesi. Langkah itu ditempuh untuk menghindari segala macam resiko. Di kubu Belanda pun diperingatkan bahwa para perwira yang melakukan ekspedisi tidak mengganggu masyarakat setempat. Hal itu menunjukkan bahwa Belanda juga tidak ingin menempuh kontak bersenjata. Pada bulan Maret 1901 ekspedisi Belanda guna mempelajari wilayah

pedalaman Jambi semakin melaju kencang, tetapi pada Mei 1901 ekspedisi menjadi agak terhambat. Perubahan iklim menjadi alasan utama mengapa capaian ekspedisi agak berkurang. Selain itu ada peristiwa lain yang menimbulkan gesekan antara pihak Kesultanan Jambi dan Belanda, yakni ada pencuri buronan dari Palembang yang bersembunyi di Jambi sehingga Belanda menggunakan upaya yang tidak begitu disenangi rakyat dan peristiwa sebuah patroli pengenalan medan ditembaki di tepi Tembesi Hulu. Dua peristiwa itu memicu peristiwa lain seperti serangan sekelompok orang Jambi pada Belanda di sekitaran Surulangun, Rawas, pada awal bulan Juni 1901. Peristiwa itu sebetulnya mendorong keinginan menyerang Taha, namun Belanda mengurungkan niat karena ada masalah yang lebih genting di wilayah lain di Hindia Timur.

Insiden kecil tersebut meluas hingga ke seluruh Jambi. Sama seperti di Aceh, Belanda harus menempuh kontak senjata melawan masyarakat setempat yang handal dalam taktik perang gerilya. Percikan-percikan kecil di banyak wilayah Jambi tidak bisa dilepaskan dari struktur pemerintahan cair yang dianut oleh Kesultanan Jambi. Insiden terjadi di sekitar kekuasaan penguasa daerah, sehingga sekalipun pemerintah pusat dapat dikendalikan Belanda bukan berarti juga berlaku di tingkat wilayah.

Para pemimpin wilayah mengandalkan beragam taktik untuk membakar semangat masyarakat berperang. Seruan "perang sabil" hingga ancaman ketika menarik para pejuang, mereka berpindah dari satu daerah ke daerah lain, karena efektif membakar semangat. Sekalipun kalah dalam segi persenjataan, masyarakat Jambi dapat memukul balik tentara Belanda. Bermodal senapan sederhana yang tidak mengandalkan magasin, *lila* (semacam meriam), kelewang, dan tombak mereka menyerang pertahanan dari tempat yang tidak pernah diduga tentara Belanda. Meski demikian teknologi memang berkata sebaliknya. Meskipun kewalahan, pihak Belanda lebih sedikit kehilangan prajurit daripada pihak Jambi. Hal ini dapat dilihat pada setiap bentrokan. Belanda biasanya kehilangan paling banyak tiga prajurit, sementara Jambi hingga dua puluh korban jiwa.

Tidak seperti di Aceh yang membuat Belanda menelan kerugian besar, Belanda di Jambi jauh lebih siap berperang meskipun masyarakat menggunakan taktik perang gerilya. Belanda secara perlahan-lahan memindahkan markasnya ke desa yang telah ditinggalkan. Dari desa yang telah ditinggal itu pula Belanda mendapatkan pasokan makanan untuk bertahan hidup. Sementara penduduk setempat harus lari ke hutan untuk menyelamatkan nyawa. Selama perang setidaknya Belanda berhasil mendirikan delapan markas yang tersebar di sepanjang sungai-sungai besar di Jambi pada akhir tahun 1902.

Karena khawatir mendapat penyergapan pada malam hari Belanda melakukan jaga malam di setiap markas yang mereka

miliki. Apalagi saat aliran sungai sedang tinggi, yang membuat suasana di markas tidak nyaman bagi tentara Belanda. Selain itu kenaikan debit air juga diikuti dengan menjangkitnya penyakit beriberi, malaria, dan kolera, sehingga banyak tentara terjangkit penyakit-penyakit tersebut. Karena tidak ingin mengambil resiko lebih jauh, Belanda menarik tentara selama enam bulan sampai debit air sungai kembali normal. Situasi ini berjalan hingga pertengahan tahun 1903 M.

Pada tahun 1904 M, ketika sisa-sisa terakhir perlawanan rakyat Jambi dapat disingkirkan, batalion pasukan professional yang terdiri dari orang-orang Eropa diganti oleh serdadu Ambon dan Sunda. Mereka dipilih karena dianggap lebih cocok melakukan patroli jarak jauh. Selain itu mereka, terutama serdadu Ambon, dianggap memiliki penciuman tajam, gesit, dan tidak membutuhkan banyak makanan (Velds, 1901: 121; Muttalib, 1977).

Tidak seperti di Aceh, Belanda di Jambi tidak mengerahkan kekuatan militer besar (Stuvenga, 1949; 18). Sesuai diktum Clausewitz, perang dilakukan hanya karena Belanda tidak mempunyai pilihan lain. Belanda menempuh cara perpaduan tindakan militer keras sekaligus perundingan dengan bangsawan. Dengan cara demikian langkah Belanda cenderung mulus, apalagi bila dibandingkan dengan pengalaman Belandan di Aceh. Tidak sedikit warga Jambi bekerjasama dengan Belanda menumpas serangan gerilya di berbagai tempat. Banyak orang Jambi menawarkan diri menjadi pemandu bagi tentara Belanda untuk menemukan tempat persembunyian para pemimpin yang melakukan perlawanan. Di samping itu beberapa masyarakat Jambi turut melakukan patroli secara sukarela hanya untuk mendapat perlindungan dari Belanda. Beberapa pemimpin kelompok perlawanan bahkan tertangkap karena bocoran masyarakat Jambi yang bersekutu dengan Belanda. Beberapa nama yang tertangkap adalah Tumenggung Puspo Ali dari Merangin dan Taha Saifuddin.

Belanda terus menggeser ekspansi militernya ke daerah-daerah di luar Jambi seperti Kerinci. Hal ini dilakukan karena Kerinci pernah membantu perjuangan kelompok perlawanan yang menentang Belanda. Sekalipun pada tahun 1902 orang-orang Kerinci sudah berhenti memasok bantuan, tetapi Belanda tidak ingin mengambil resiko. Menumpas segala potensi perlawanan jauh lebih baik daripada muncul perlawanan di kemudian hari. Ketelitian Belanda menjalankan misinya tampak dari ekspansi ke beberapa daerah merdeka yang ada di bagian utara Jambi.

Tahun 1904 Belanda "menghabisi" kedaulatan Kesultanan Jambi. Taha Saifuddin yang menjadi garda depan perlawanan masyarakat Jambi terhadap Belanda akhirnya ditangkap setelah

dikhianati oleh orang Jambi. Tanggal 21 April 1904 tempat persembunyiannya di Sungai Besar, anak sungai Batang Hari, diketahui. Dua hari kemudian sebuah patroli dikirim untuk menangkapnya. Setelah berjalan kaki dan benyelidik selama tiga hari, satu regu yang terdiri atas seorang perwira dan sembilan prajurit menemukan jejak persembunyian Taha. Orang Jambi yang menjadi pemandu tampaknya mengalami pertentangan batin. Ia sempat berusaha mengalihkan perhatian regu pelacak pada detik-detik akhir penangkapan Taha (Locher-Scholten, 2008: 272).

Pada pagi hari tanggal 26 April 1904 seorang opsir polisi setempat, yakni orang luar Jambi yang menyamar dengan pakaian Jambi untuk misi pengenalan medan di kawasan Jambi, menemukan tempat persembunyian Taha. Pasukan patrol pun mengepungnya dan menyerangnya dari dua sisi. Pada perang tersebut setidaknya tiga orang Jambi meninggal, termasuk Taha (Velds, 1909, 127). Wajahnya dikenali oleh salah seorang kepala dusun setempat dan kemudian dimakamkan di sebuah daerah bernama Muara Tebo (Muttalib, 1977: 67).

Kematian Taha Saifuddin menjadi pukulan telak bagi masyarakat Jambi yang masih melakukan perlawanan. Tersiarnya kabar tentang kematian Taha meruntuhkan moral dan semangat mereka. Para pemimpin Jambi yang mendukung Taha pun satu per satu menyerahkan diri (Adatrechtgegevens, 1932: 266). Semua pembesar Jambi yang menyerah diperintahkan menetap di kawasan Pecinan di ibukota Jambi. Gerak-gerik mereka diawasi oleh demang dan mereka harus tunduk kepadanya. Meskipun sempat ada orang Turki Utsmani yang dianggap sebagai utusan Khalifah, tetapi tidak membawa perubahan keadaan.

Setelah ekspedisi militer Belanda berakhir, pemerintahan sipil kembali diberlakukan oleh Belanda. Kesultanan Jambi yang sudah jatuh ke bawah bendera Belanda, mau tidak mau menuruti segala perjanjian yang mereka lakukan.

(Endnotes)

1 Terdapat teks lain yang juga ditulis Ngabehi Sutho Dilogo. *Undang-undang Piagam Penecahan Jambi*, dengan isi hampir sama dengan *Ini Sejarah Kerajaan Jambi*. Dalam pembahasan ini, dua teks tersebut akan diacu karena memuat informasi yang saling melengkapi, sebagaimana dibahas Chatib*at* (2011: 40–42).

2 Dalam teks-teks Melayu terkenal semisal *Hikayat Raja-Raja Pasai* (Hill, 1960) dan *Sejarah Melayu* (Winstedt, 1938), proses Islamisasi di dunia Melayu dikaitkan dengan kedatangan seorang ulama dari dunia muslim (Arab, Persia, dan Turki). Karena itu naskah *Ini Sejarah Kerajaan Jambi* mengadopsi pola cerita yang sama dengan teks Melayu yang sudah dikenal.

3 Laporan Darpa Wiguna, tanpa tahun, koleksi De Kock. Istri Sultan Mohildin diduga memperbudak bahkan membunuh gadis-gadis dari kota kerena terbakar cemburu melihat ketidaksetiaan suaminya.

4 Komandan ekspedisi Palembang kepada gubernur jenderal, 22 Juli 1821, no. 26, ANRI, Algemeene Secretarie, *gouvernementsbesluit*, 21 Agustus 1821.

5 Ibid.

6 Residen Palembang kepada gubernur jenderal, 10 Februari 1835, no. 43, ANRI, Algemeene Secretarie, *gouvernements besluit*, 25 Agustus 1835, no.9; Residen Palembang kepada gubernu rjenderal, 10 Oktober 1837, no. 76, ANRI, catatan Karesidenan Palembang 70.15; laporan Darpa Wiguna, NA, koleksi De Kock.

7 Residen Palembang kepada gubernur jenderal, 16 Desember 1852, M24, NA, Koleksi, vb. 15 Februari 1853, no. 26.

8 Residen Palembang kepada komisaris jenderal, 4 Oktober 1829, no. 97; Residen Palembang kepadaResiden Bangka, 19 November 1829, no. 123, ANRI, catatan Karesidenan Palembang 45.4.

9 Residen Palembang kepada komisaris jenderal, 3 April 1830, no, 72 dan 29 April 1830, no. 89; Residen Palembang kepada Residen Bangka, 23 April 1830, no. 77, ANRI, catatan Karesidenan Palembang, 45.5.

10 Lihat laporan dalam NA, Koleksi, jilid "Zeeroverij in Nerderlandsch-Oost-Indië 1831-1835", no. 4168.

11 *Gouvernementsbesluit*, 5 Maret 1832, no. 3, ANRI, AlgemeeneSecretarie.

12 KomisarisjenderalkepadaResiden Palembang, 18 Mei 1832, no. 902, rahasia, NA, koleksi Van den Bosch, 234.

13 Residen Palembang kepada komisaris jenderal, 30 April 1830, no. 89, ANRI, catatan Karesidenan Palembang, 45.5.

14 Asisten residen kepada Residen Palembang, 17 Agustus 1833, no. 20, ANRI, Algemeene Secretarie, *gouvernements besluit*, 20 September 1834, no. 4.

15 Michiels kepada gubernur jenderal ad interim, 8 Januari 1834, no. 11, ANRI, Algemeene Secretarie, *gouvernements besluit*, 20 September 1834, no. 4.

16 *Besluit*, 11 Oktober 1837, no. 28, ANRI, Algemeene Secretarie.

17 Panglima tentar akepada gubernur jenderal, 6 September 1836, 6 September 1838, no. 6, ANRI, Algemeene Secretarie, *gouvernements*

besluit, 17 Oktober 1838, no. 7; Residen Palembang kepada gubernur jenderal, 18 Oktober 1838, ANRI, Algemeene Secretarie, *gouvernements besluit*, 13 Januari 1838, no. 16.

18 Panglima tentara kepada gubernur jenderal, 6 September 1838, no. 6, ANRI, Algemeene Secretarie, *gouvernements besluit*, 13 Januari 1839, no. 7.

19 Laporan singkat Karesidenan Palembang untuk tahun 1840, KITLV, koleksi De Kock, 290.

20 Residen Palembang kepada gubernur jenderal, 14 Juni 1858, NA, Koleksi, vb. 6 Oktober 1858, no. 366 rahasia.

21 *Ibid.*

22 Dewan Hindia Timur Belanda, 2 Juli 1858, no. 34, NA, Koleksi 6 Oktober 1858, no. 366 rahasia.

23 Informasi tentang ulama-ulama yang menjadi guru Abdul Majid di Mekkah, juga murid-muridnya ketika sudah diakui sebagai ulama, terdapat dalam sebuah naskah Sanad Fiqh Guru Abdul Qadir bin Guru Ibrahim bin Guru Abdul Majid Jambi (tanpa penerbit dan tahun terbit).

24 Danau Teluk adalah sebuah danau yang berada di Pecinan, Jambi. Letak danau ini sedikit jauh dari pinggiran Sungai Batanghari yang ramai penduduk. Sekarang Danau Teluk menjadi salah satu kecamatan di daerah Pecinan. Tempat Abdul Majid mengajar kemudian menjadi Pesantren Ma'had 'Ali As'ad yang didirikan oleh cucunya, Guru Abdul Qadir.

— 11 —

Kerajaan Pagaruyung

Kerajaan Pagaruyung merupakan nama kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Sumatera Barat. Umurnya termasuk lama karena sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha hingga merebaknya ajaran Islam di Nusantara. Menurut beberapa sumber kerajaan ini merupakan bagian Kerajaan Malayapura yang diperintah Adityawarman (Rasyid, 2008). Meskipun demikian tidak diketahui dengan pasti kapan kerajaan ini berdiri karena keterbatasan sumber yang dapat menjelaskannya. Temuan arkeologis, seperti Prasasti Batusangkar, menyebutkan bahwa Adityawarman pernah menjadi raja di Pagaruyung (Shar, 2013). Ia memilih wilayah pedalaman Minangkabau sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Pagaruyung.

Bersamaan dengan gelombang kedatangan orang-orang Islam ke Nusantara mulai terjadi terjadi penyesuaian kerajaan Hindu-Buddha ke Islam. Kerajaan Pagaruyung merupakan salah satu kerajaan yang tidak terhindarkan dari gejala tersebut. Setidaknya sekitar abad ke-16 M diperkirakan sudah ada musafir dan ahli agama yang singgah ke wilayah Aceh dan Malaka menyebarkan Islam ke daerah Pagaruyung. Syeikh Burhanuddin Ulakan merupakan orang yang dianggap pertama kali menyebarkan Islam di Pagaruyung. Ia murid ulama Aceh ternama, Syeikh Abdurrauf Singkil atau Tengku Syiah Kuala. Ditinjau dari situasi geografisnya, penyebaran Islam yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin sangat mungkin terjadi.

Pada abad ke-17 M, menurut *Tambo Adat Minangkabau*, Sultan Alif merupakan Raja Pagaruyung yang pertama kali memeluk Islam (Shar, 2013). Meskipun demikian masuknya Islam ke Pagaruyung tidak serta merta meruntuhkan nilai-nilai adat masyarakat. Perlu waktu lama bagi Pagaruyung menjadi seperti Minangkabau sebagaimana diketahui saat ini. Kerajaan itu mulai mengalami titik balik setelah terjadi perang saudara antara kaum Padri (atau Padari) dan orang-orang yang masih menginginkan pemerintahan sesuai dengan adat istiadat sebelumnya.

Perang yang melibatkan dua kelompok masyarakat itu terjadi cukup lama, terhitung sejak tahun 1803 sampai 1838 M. Pemicu utamanya adalah penolakan sebagian masyarakat terhadap aturan yang dibuat oleh para pembaharu Padri. Pada saat itu masih banyak masyarakat yang melakukan kebiasaan lama sekalipun bertentangan dengan ajaran Islam, seperti perjudian, minuman keras, madat, dan tidak melaksanakan kewajiban dalam Islam.

1. Kemunculan, Masuknya Islam, dan Persoalan Regional

Kerajaan Pagaruyung meliputi wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Provinsi Sumatera Barat. Nama kerajaan ini merujuk pada nama pohon nibung atau ruyung (Shar, 2013). Sementara itu pendapat lain merujuk inskripsi Cap Mohor Sultan Tangkal Alam Bagagar dari Pagaruyung (Rasyid, 2008).

Pengaruh Hindu-Buddha masuk ke wilayah itu diperkirakan sudah terjadi pada abad ke-13 M ketika wilayah ini dikunjungi ekspedisi Pamalayu Kertanagara pada masa pemerintahan Adityawarman dan kemudian Ananggawarman. Kekuasaan Adityawarman diperkirakan cukup kuat menguasai wilayah tersebut dan sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan gelar "maharajadiraja" yang disandang oleh Adityawarman seperti yang terpahat pada bagian belakang Arca Amoghapasa (Rasyid, 2008). Pada awalnya Adityawarman dikirim dari Tanah Jawa untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera dan bertakhta sebagai *uparaja* 'raja bawahan' Majapahit. Meskipun demikian prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh raja ini belum ada satu pun yang menyebut hal penting mengenai hubungan antara Kerajaan Pagaruyung dan Majapahit.

Prasasti Batusangkar menyebut Ananggawarman sebagai *yuvaraja* 'raja muda' melakukan upacara ajaran Tantris agama Buddha yang disebut dengan *hevajra*, sebuah upacara peralihan kekuasaan dari Adityawarman kepada dirinya. Beberapa kawasan di pedalaman Sumatera, bahkan hingga sekarang, masih dipengaruhi agama Hindu dan Buddha (Abdullah, Chaniago, dan Budhisantoso, 1984). Hal ini dapat dilihat, misalnya, pada situs-situs bersejarah yang masih ada, seperti percandian Padangroco, percandian Padanglawas, dan kawasan percandian Muara Takus. Keberadaan gugusan candi-candi tersebut menguatkan hipotesis bahwa sangat mungkin wilayah-wilayah tersebut masih termasuk ke dalam wilayah taklukan Adityawarman.

Sebelum nama Kerajaan Pagaruyung dikenal orang wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Adityawarman disebut sebagai Kerajaan Malayapura. Tidak diketahui secara pasti mengapa Pagaruyung muncul sebagai nama kerajaan di tanah Melayu. Dalam *Tambo Pagaruyung* yang "dijaga" secara turun-temurun oleh masyarakat Minangkabau pun tidak ditemukan petunjuk khas yang mengatakan bahwa Adityawarman merupakan pendiri kerajaan ini (Shar 2013). Meski demikian bahwa ia pernah menjadi raja, tepatnya *tuhan suwarasa*, memang suatu fakta yang tidak terbantahkan, setidaknya menurut Prasasti Batusangkar.

Prasasti yang dipahatkan oleh Adityawarman pada bagian belakang Arca Amoghapasa menyebutkan bahwa pada tahun 1347 M Adityawarman memproklamirkan diri sebagai raja Malayapura (Shar, 2013). Adityawarman merupakan putra Adwayawarman

sebagaimana terpahat pada Prasasti Kuburajo dan anak Dara Jingga, putri Kerajaan Dharmasraya, sebagaimana disebut dalam *Pararaton*. Sebelum menjadi Raja Pagaruyung ia bersama Gajah Mada menaklukkan Bali dan Palembang. Lalu, pada masa pemerintahannya, kemungkinan pusat pemerintahannya dipindahkan ke daerah pedalaman Minangkabau.

Prasasti Suruaso, yang beraksara Melayu, menyebutkan bahwa Adityawarman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi taman Nandana Sri Surawasa yang kaya padi, yang dibuat oleh pamannya, Akarendrawarman, raja sebelumnya. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa adat Minangkabau, yakni pewarisan dari *mamak* 'paman' kepada *kamanakan* 'kemenakan', telah terjadi pada masa tersebut. Sementara pada sisi lain pada saluran irigasi tersebut juga terdapat prasasti, beraksara Nagari atau Tamil, sehingga mengisyaratkan adanya sekelompok masyarakat dari India selatan dalam jumlah signifikan di daerah tersebut (Rasyid, 2008).

Sepeninggal Adityawarman Majapahit mengirim ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan ini pada tahun 1409 M (Shar, 2013). Legenda Minangkabau mencatat pertempuran dahsyat Pagaruyung dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusuk. Konon daerah tersebut dinamakan demikian karena banyak mayat yang bergelimpangan membusuk. Pagaruyung memenangkan pertempuran dengan tentara Majapahit. Meskipun demikian bukan berarti serangan Majapahit pada tahun 1409–1411 M tidak ada artinya. Justru sebaliknya, serangan itu membuat lemah pengaruh Kerajaan Pagaruyung terhadap *rantau dalam* 'daerah jajahan'. Sejak serangan terakhir Majapahit tidak diketahui siapa yang menjadi penganti Ananggawarman dan tidak diketahui siapa yang menjadi Raja Pagaruyung.

Perkembangan agama Islam setelah akhir abad ke-14 M sedikit banyak memberi pengaruh, terutama pada hal-hal yang berkait dengan sistem patrialineal, dan memberikan fenomena relatif baru pada masyarakat pedalaman Minangkabau (Zakariya, 2006). Pada awal abad ke-16 M, *Suma Oriental*—yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515 M—mencatat dari tiga raja Minangkabau hanya satu orang menjadi muslim sejak 15 tahun sebelumnya (Pires, 1967). Meski demikian penyebaran pengaruh Islam secara meluas di Pagaruyung baru mulai terjadi sekitar abad ke-16 M. Penduduk Minangkabau belajar Islam bercorak sufistik melalui para musafir dan guru agama yang singgah atau datang dari Aceh dan Malaka. Hal ini juga yang menyebabkan Islam diterima dengan mudah di Minangkabau, sebab kecenderungan keagamaan sufisme yang majemuk membuat masyarakat Minangkabau tetap nyaman menjalankan praktik adat sekalipun memeluk agama Islam. Sampai sekarang pun lokalitas Minang duduk bersanding dengan Islam (Abdullah, 2011).

Ada satu tokoh kenamaan yang membuat Islam berkembang di Pagaruyung. Ia bernama Syeikh Burhanuddin Ulakan, salah satu murid ulama Syeikh Abdurrauf Singkil (Tengku Syiah Kuala) dari Aceh. Ia bahkan dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan agama Islam di Pagaruyung. Pada abad ke-17 M, meskipun tidak mengganti nama Kerajaan Pagaruyung menjadi Kesultanan Pagaruyung, Islam mulai terasa dalam sistem pemerintahan kerajaan ini. Hal itu bisa dilihat dari jabatan-jabatan baru yang muncul dan penggunaan istilah sultan untuk menyebut penguasa Kerajaan Pagaruyung. *Tambo Adat Minangkabau* menyebutkan bahwa raja Islam bernama Sultan Alif (Shar, 2013).

Penambahan tata nama jabatan bernafaskan Islam dalam sistem pemerintahan Kerajaan Pagaruyung dapat dilihat dari, misalnya, *tuan kadi* dan beberapa istilah lain yang berkaitan dengan Islam. Penamaan Negari Sumpur Kudus yang mengandung kata "kudus" berasal dari kata *quduus* 'suci' sebagai tempat kedudukan Rajo Ibadat dan Limo Kaum yang mengandung kata *qaum* jelas merupakan pengaruh bahasa Arab, bahasa pengantar dalam agama Islam. Selain itu dalam perangkat adat juga muncul istilah imam, katik (khatib), bila (bilal), malin (mu'alim) yang merupakan pengganti istilah-istilah yang berbau Hindu dan Buddha yang digunakan sebelumnya, misalnya istilah *pandito* 'pendeta'.

Memasuki awal abad ke-17 M kerajaan ini terpaksa mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh dan mengakui kekuasaan para gubernur Aceh yang ditunjuk untuk daerah pesisir pantai barat Sumatera. Namun demikian sekitar tahun 1665 M orang Minang di pesisir pantai barat bangkit dan memberontak terhadap Gubernur Aceh. Surat penguasa Minangkabau yang menyebut diri Raja Pagaruyung mengajukan permohonan bantuan kepada VOC, dan VOC mengambil kesempatan sekaligus untuk menghentikan monopoli Aceh atas emas dan lada (C. E. Dobbin, 2018).

VOC, melalui Residen Padang Jacob Pits—yang daerah kekuasaannya meliputi Kotawan di selatan sampai ke Barus di utara Padang—mengirimkan surat tertanggal 9 Oktober 1668 yang ditujukan kepada Sultan Ahmadsyah, Iskandar Zulkarnain, penguasa Minangkabau yang kaya emas. Surat itu berisi pemberitahuan bahwa VOC telah menguasai kawasan pantai pesisir barat sehingga perdagangan emas dapat dialirkan kembali di pesisir. Menurut catatan Belanda, Sultan Ahmadsyah meninggal dunia pada tahun 1674 M dan digantikan anaknya, Sultan Indermasyah (C. E. Dobbin, 2018).

Setelah VOC berhasil mengusir Kesultanan Aceh dari pesisir Sumatera Barat tahun 1666 M, pengaruh Aceh di Pagaruyung melemah. Hubungan antara daerah-daerah rantau dan pesisir dengan pusat Kerajaan Pagaruyung erat kembali. Saat itu Pagaruyung merupakan salah satu pusat perdagangan di Pulau

Sumatera karena emas. Hal tersebut menarik perhatian Belanda dan Inggris untuk menjalin hubungan dengan Pagaruyung. Terdapat catatan bahwa pada tahun 1684 M seorang Portugis bernama Tomas Dias melakukan kunjungan ke Pagaruyung atas perintah Gubernur Jenderal Belanda di Malaka (Boelhouwer, 1841).

Sekitar tahun 1750 M Kerajaan Pagaruyung mulai tidak menyukai keberadaan VOC di Padang dan pernah berusaha membujuk Inggris di Bengkulu mengusir Belanda. Permintaan itu tidak ditanggapi pihak Inggris. Namun pada tahun 1781 M Ingris berhasil menguasai Padang untuk sementara waktu dan waktu itu datang utusan dari Pagaruyung memberi ucapan selamat atas keberhasilan Inggris mengusir Belanda dari Padang. Marsden (2018) menyebutkan bahwa Tanah Minangkabau sejak lama dianggap kaya emas dan saat itu kekuasaan Raja Minangkabau disebut sudah terbagi atas Raja Suruaso dan Raja Sungai Tarab dengan kekuasaan yang sama.

Sebelumnya, pada tahun 1732 M, residen VOC di Padang mencatat bahwa ada seorang ratu bernama Yang Dipertuan Puti Jamilan mengirim tombak dan pedang berbahan emas sebagai tanda pengukuhan dirinya menjadi penguasa bumi emas. Ketika kemudian berhasil mencapai pedalaman Minangkabau pihak Belanda dan Inggris tidak pernah menemukan cadangan emas yang signifikan di kawasan tersebut.

Sebagai akibat pertikaian antara Inggris dan Prancis dalam Perang Napoleon, Inggris memerangi Belanda karena Belanda berada di pihak Prancia. Inggris kembali menguasai pantai barat Sumatera Barat tahun 1795 sampai dengan tahun 1819 M.

2. Alam Minangkabau di Kerajaan Pagaruyung: *Darek* dan Rantau, Adat dan Nagari

Memahami Pagaruyung berarti memahami kebudayaan Minangkabau. Kedua hal itu tidak bisa dipisahkan karena bertalian sangat erat satu sama lain dalam perkembangan kerajaan Pagaruyung. *Tambo Pagaruyung* menyebutkan bahwa daerah yang berada di bawah lingkup Kerajaan Pagaruyung disebut "alam Minangkabau" (Abdullah, Chaniago, dan Budhisantoso, 1984; Shar, 2013). Di dalam *tambo* itu tertulis bahwa alam tersebut terbagi menjadi dua, yakni daerah *darek* (daerah pedalaman Minangkabau) dan *rantau* (daerah perbatasan sepanjang pantai barat dan timur Sumatera bagian tengah) (Abdullah, 1967).

Darek merupakan asal dan pusat kebudayaan Minangkabau, merupakan daerah yang subur tempat nenek moyang orang Minangkabau pada mulanya menetap, dan di sana pula lahir sistem adat matrilineal Minangkabau. Sementara *rantau* merupakan "jalan" bagi orang-orang *darek* bila sedang mengalami persoalan kelebihan penduduk, perasaan tidak puas, atau memenuhi keinginan. Sepanjang

sejarah Minangkabau, masyarakatnya menyaksikan hubungan yang berkelindan antara *darek* dan *rantau*. *Darek* memperoleh kekayaan dan pembaharuan dari *rantau*, sementara *darek* melengkapi *rantau* sebagai satu kesatuan alam Minangkabau. Hal ini berarti, dalam hubungan timbal balik, *darek* dan *rantau* bukan sekedar pemanis bagi satu sama lain.

Darek, sebagai daerah yang menjadi inti Kerajaan Pagaruyung, terbagi atas atas tiga *luhak* (*luhak nan tigo*), yaitu Luhak Tak nan Data (belakangan menjadi Luhak Tanah Data), Luhak Agam, dan Luhak Limopuluah (Shar, 2013). Sementara itu pada setiap *nagari* pada kawasan *luhak* diperintah oleh penghulu yang mengepalai masing-masing suku yang berdiam dalam *nagari* tersebut. Penghulu dipilih oleh anggota suku dan warga *nagari* untuk memimpin dan mengendalikan pemerintahan *nagari* bersangkutan. Keputusan pemerintahan diambil melalui kesepakatan para penghulu di "balai adat" setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu. Di wilayah inti Kerajaan Pagaruyung, Raja Pagaruyung tetap dihormati walau hanya bertindak sebagai penengah dan penentu batas wilayah (Abdullah, Chaniago, dan Budhisantoso, 1984).

Sebelum kerajaan Pagaruyung berdiri masyarakat Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi. Lembaga ini menjadi sarana menyelesaikan persoalan yang terjadi di berbagai *nagari* dan *luhak*. Muswayarah menjadi cara yang ditempuh untuk mencapai kesepatakan. Dilihat dari keberlanjutan sejarah, Kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi semata bagi masyarakat setempat, sebab adat relatif sudah kompleks pada saat itu dibanding beberapa wilayah lain di Nusantara.

Secara geografis Tomé Pires (1967) menyebut setidaknya Tanah Minangkabau meliputi dataran tinggi di pedalaman Sumatera tempat rajanya tinggal, termasuk wilayah pantai timur Arcat (antara Aru dan Rokan) ke Jambi, dan kota-kota pelabuhan pantai barat Panchur (Barus), Tiku, dan Pariaman. Catatan tersebut juga menyatakan bahwa Indragiri, Siak, dan Arcat masih merupakan bagian dari Tanah Minangkabau dengan Teluk Kuantan sebagai pelabuhan utama Kerajaan Minangkabau. Namun belakangan daerah-daerah *rantau*, seperti Siak, Kampar, dan , kemudian lepas dan ditaklukkan Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh. Wiyayah politik Kerajaan Pagaruyung merupakan wilayah tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya kebudayaan Minangkabau.

Pengaruh Kerajaan Pagaruyung melingkupi hampir seluruh Pulau Sumatera (Marsden, 2018). Beberapa kerajaan lain di luar Sumatera juga mengakui kedaulatan Pagaruyung, walaupun bukan dalam hubungan pemberian upeti. Paling tidak ada 62 hingga 75 kerajaan kecil di Nusantara yang menginduk pada Pagaruyung, yang tersebar di Filipina, Brunei, Thailand, Malaysia, serta di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Hubungan tersebut

dibedakan berdasarkan gradasi hubungan, yakni *sapiah balahan* (garis keturunan perempuan), *kuduang karatan* (garis keturunan laki-laki), *kapak radai*, serta *timbang pacahan* yang merupakan keturunan kerajaan.

Raja-raja Pagaruyung, berdasarkan cerita adat Minangkabau dan beberapa prasasti yang ditemukan, merupakan keturunan Raja Kerajaan Dharmmaśraya Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa. Adityawarman, pendiri Kerajaan Pagaruyung dan senapati Majapahit, merupakan satu di antara keturunan Tribhuwanaraja dari ibu Dara Jingga. Kerajaan Pagaruyung pernah diperintah oleh beberapa dinasti, tetapi kebenaran nama-nama rajanya banyak yang tidak dapat dibuktikan karena hanya berdasarkan legenda (bahasa Minang: *tambo*) adat Minangkabau. Prasasti Suruaso menyebut nama raja Pagaruyung namun selang 300 tahun kemudian siapa yang menjadi raja di kerajaan itu seperti hilang ditelan angin dan baru muncul kembali pada awal abad ke-17 M tetapi kemudian berakhir pada masa Perang Padri (Rasyid, 2008).

Pada mulanya Adityawarman menyusun sistem pemerintahannya mirip dengan sistem pemerintahan yang ada di Majapahit, tetapi kemudian disesuaikan dengan sifat dan struktur kekuasaan kerajaan sebelumnya (Dharmmaśraya dan Śrîwijaya) yang pernah ada pada masyarakat setempat (Marsden, 2018; Shar, 2013). Ibukota diperintah secara langsung oleh raja, sementara daerah pendukung tetap diperintah oleh datuk setempat.

Setelah Islam masuk "raja alam" yang berkedudukan di Pagaruyung melaksanakan tugas pemerintahan dengan bantuan dua orang pembantu utama (wakil raja), yaitu *raja adat* yang berkedudukan di Buo dan *raja ibadat* yang berkedudukan di Sumpur Kudus. Mereka bertiga disebut *rajo tigo selo*, yang berarti 'tiga orang raja yang "bersila" atau bertakhta'. *Raja adat* memutuskan masalah-masalah adat, sedangkan *raja ibadat* mengurus masalah-masalah agama. Jika memutuskan suatu masalah ketiganya harus bermufakat. Pun mereka harus bermusyawarah dengan *basa ampek balai* 'empat orang besar'. Bila ada masalah yang tidak selesai barulah dibawa ke Raja Pagaruyung. Istilah lain yang digunakan untuk mereka dalam bahasa Minang adalah *tigo tungku sajarangan*. Pergantian raja di Minangkabau menggunakan sistem patrilineal, berbeda dengan sistem waris dan kekerabatan suku yang tetap pada sistem matrilineal (Abdullah, Chaniago, dan Budhisantoso, 1984).

Selain raja adat dan raja ibadat, raja alam juga dibantu oleh para pembesar yang disebut *basa ampek balai*, yang berarti 'empat menteri utama'. Mereka adalah *bandaro* yang berkedudukan di Sungai Tarab, *makhudum* yang berkedudukan di Sumanik, *indomo* yang berkedudukan di Suruaso, dan *tuan gadang* yang berkedudukan di Batipuh. Belakangan pengaruh Islam menempatkan *tuan kadi*, yang berkedudukan di Padang Ganting, masuk ke dalam *basa*

ampek balai, menggeser kedudukan *tuan gadang* di Batipuh yang kemudian bertugas menjaga syariah Islam.

Kerajaan Pagaruyung membawahi lebih dari 500 *nagari* yang merupakan satuan wilayah pemerintahan otonom (Abdullah 1967). *Nagari-nagari* menjadi dasar kerajaan dan mempunyai kewenangan yang luas dalam memerintah. Suatu *nagari* mempunyai kekayaan dan pengadilan adat sendiri. Beberapa buah *nagari* kadang-kadang membentuk persekutuan. Kepala persekutuan diambil dari kaum penghulu, dan sering diberi gelar "raja", yang bertindak sebagai wakil Raja Pagaruyung.

Dalam pembentukan suatu *nagari* sejak dahulu telah dikenal dalam pepatah "*dari taratak manjadi dusun, dari dusun manjadi koto, dari koto manjadi nagari, nagari ba panghulu*" (Abdullah, Chaniago, dan Budhisantoso, 1984). Dengan demikian sistem administrasi pemerintahan di Minangkabau dimulai dari struktur terendah, disebut dengan *taratak*, kemudian meningkat menjadi dusun, *dusun* kemudian berkembang menjadi *koto*, dan *koto* berkembang menjadi *nagari*. Biasanya setiap nagari yang dibentuk paling sedikit terdiri atas empat suku yang mendiami wilayah bersangkutan.

Raja Pagaruyung mengendalikan daerah *rantau* secara langsung. Ia dapat membuat peraturan dan memungut pajak di sana. *Rantau* merupakan suatu wilayah yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. *Rantau* juga berfungsi sebagai tempat mencari kehidupan dan kawasan perdagangan. *Rantau* di Minangkabau dikenal dengan *rantau nan duo*, terbagi atas *rantau di hilia* (kawasan pesisir timur) dan *rantau di mudiak* (kawasan pesisir barat).

Masing-masing *luhak* memiliki wilayah *rantau* sendiri. Penduduk Tanah Datar me-*rantau* ke arah barat dan tenggara, penduduk Agam me-*rantau* ke arah utara dan barat, sedangkan penduduk Limopuluah me-*rantau* ke daerah Riau daratan sekarang, yaitu Rantau Kampar, Rokan, dan Kuantan. Selain itu terdapat daerah perbatasan wilayah *luhak* dan *rantau* yang disebut sebagai *ujuang darek kapalo rantau*. Kekuasaan penghulu di daerah *rantau*, seperti di Pasaman, sering berpindah kepada raja-raja kecil yang memerintah turun-temurun. Raja di Inderapura menggunakan gelar sultan, sementara di tempat lain menggunakan gelar "yang dipertuan besar" (Shar, 2013).

Selain ketiga daerah *rantau* di atas terdapat daerah *rantau* yang terletak di wilayah Semenanjung Malaka (sekarang Malaysia). Beberapa *rantau* wilayah ini membentuk *nagari*, kemudian masyarakatnya membentuk satu kesatuan (semacam *luhak*), dan pada masa awal pembentukan minta kepada Yang Dipertuan Pagaruyung agar dikirim "raja" sebagai pemimpin atau pemersatu mereka. Kawasan tersebut dikenal sebagai Negeri Sembilan. *Nagari-nagari* tersebut adalah Jelai, Jelebu, Johol, Klang, Naning, Pasir Besar, Rembau, Segamat, dan Sungai Ujong (Rasyid, 2008).

Fungsi Raja Pagaruyung bukan sebagai penguasa dengan kekuasaan nyata, tetapi lebih merupakan "lembaga suci" yang menjaga ketertiban hubungan *nagari-nagari*. Kelompok penguasa *nagari* bukan wakil raja, tetapi wakil pendukuk *nagari* bersangkutan. Dari sudut pandang sejarah pembentukan, *nagari* merupakan kumpulan "suku", paling sedikit empat suku. Kalau belum cukup empat suku adat belum berhak mendirikan *nagari* dan tempat-tempat itu tetap dinamai dusun atau kampung. Dusun harus takluk atau bertali ke *nagari* lain yang menjadi asal-usul dusun bersangkutan atau yang menjadi pusat yang berkait adat. Dalam undang-undang adat *nagari*[1] dsebutkan bahwa suatu *nagari* harus mempunyai jalan yang dapat ditempuh orang untuk keluar masuk *nagari*, harus ada sumber air minum untuk mandi dan sebagainya.

Balai yang sering disebut "balai adat" adalah semacam "dewan penghulu" yang bersidang untuk menjatuhkan hukuman dan memecahkan masalah masyarakat yang berkait adat. Mesjid adalah tempat *anak nagari* melaksanakan shalat Jumat di bawah pimpinan khatib, imam, dan bilal (Abdullah, 2009)"number-of-pages":"295","source":"Google Books","event-place":"Singapore" ,"abstract":"The driving force of Minangkabau history arises from the struggle to build a balanced social order on a convergence of seemingly contradictory social and cultural aspects. From the time when Islam was conceived as a pillar of the Minangkabau world, the history of Minangkabau has been dominated by an effort to attain an acceptable equilibrium between the doctrine of a universal religion and the wisdom and ideals of the pre-existing pillar, the indigenous element or adat. The idea that Islam is an inseparable part of Minangkabau has generated constant internal struggle. A traditional notion that ideas which came from the outside world (the rantau, sedangkan gelanggang adalah suatu tanah lapang yang menjadi tempat berkumpul *anak nagari* pada waktu pagi dan sore untuk menghilangkan hati yang rusuh dan/atau beramah tamah, tempat anak-anak dan pemuda bermain, tempat orang tua bercerita sambil mengajar anak muda, dan tempat mengadakan berbagai permainan.

Sistem pemerintahan di Minangkabau bukan suatu pemerintahan yang terpusat dan otoriter, tetapi dibangun dengan sistem *nagari-nagari* yang setara dan terbuka. Kekuatan pemerintahan terletak pada musyawarah mufakat sehingga menciptakan keseimbangan (Abdullah, Chaniago, dan Budhisantoso, 1984). Setelah Islam datang pengaruhnya pun masuk ke sistem *nagari*. Suatu wilayah disebut nagari kalau memiliki jalan, sawah besar, rumah *gadang*, lumbung padi, dan mesjid. Adanya persyaratan mesjid membuat kedudukan Islam makin kuat dalam sistem adat (Abdullah, 1966), namun akulturasi Islam tidak berjalan mudah. Masih banyak adat istiadat yang bertentangan dengan Islam tetap hidup. Para ulama tarekat memang memberi kelonggaran terhadap kebiasaan setempat. Adat kebiasan yang "buruk" masih ditemui. Hamka (1963) menyebut tingkah laku umat masih bercampur

aduk. Pergumulan antara adat dan ulama terus berlanjut hingga memunculkan gerakan Paderi.

Bila disederhanakan dua wilayah ini dapat ditafsirkan dalam dua pengertian. Pertama, sebagai uraian sistem sosial. Pemerintahan di *darek nagari* sebagai kesatuan teritorial diatur atas dasar kesukuan. Karena aparatnya suku, maka seperti halnya dengan suku *nagari* pun diperintah oleh penghulu. *Nagari* tidak mengenal pemerintahan di luar pemerintahan suku. *Rantau* merupakan tempat menetap pendatang dari *darek* dan umumnya berupa daerah perdagangan. Corak kehidupan serta terbukanya terhadap pengaruh dari luar menyebabkan kehidupan di *rantau* bersifat individual. Biasanya pendatang membawa nama suku serta sistem kehidupan bersuku *nagari* asalnya, tetapi watak individual di *rantau* sulit diatur dengan sistem seperti di *nagari*. Pemerintahan yang sesuai untuk kondisi tersebut adalah pemerintahan dengan sistem warga negara individual pula. Dua sifat kehidupan yang berbeda dan menghasilkan sistem pemerintahan yang cocok untuk masing-masing wilayah itulah yang melahirkan pepatah "*nagari bapanghulu rantau barajo*" di atas. Kedua, dua wilayah ini menjadi lambang. Artinya bahwa terhadap *nagari* dan *darek* raja adalah lambang, sedangkan di *rantau* raja berkuasa. Namun demikian tidaklah berarti bahwa antara *nagari-nagari* dan Pagaruyung tak ada hubungan. Secara konseptual hubungan itu jelas dan kelihatan dalam bidang peradilan. Dikatakan bahwa seandainya seseorang tidak puas dengan putusan-putusan penghulu di *nagari*, ia bisa naik banding ke *rapek saluhak*. Bila masih belum puas ia naik ke *bendahara* di Sungai Tarab, kemudian kepada *rajo adat*, dan bila belukm puas juga kata putus akan bisa didapatkan dari Yang Dipertuan pagaruyung.

3. Kebangkitan Islam, Perang Padri, dan Kehadiran Belanda

Meskipun Islam sudah lama masuk ke Minangkabau, tetapi tidak serta merta dapat menghilangkan tradisi lama yang sudah mengakar. Sama halnya seperti di Jawa, proses akulturasi antara adat dan agama berlangsung dalam bentangan waktu yang tidak singkat (C. E. Dobbin, 1977). Walau sudah banyak orang Pagaruyung memeluk Islam, tetapi praktik judi, sabung ayam, mengunyah sirih, dan minum tuak masih terus dijalani. Selain itu, pewarisan berdasar garis perempuan, atau dikenal matrilineal, dalam kebudayaan Minangkabau juga tidak berhenti; padahal garis pewarisan dalam Islam cenderung patrilineal (Abdullah, 1966).

Melihat banyak hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, setidaknya versi Wahhabisme, Haji Miskin yang baru saja pulang dari Mekkah pada tahun 1803 M tidak tahan. Terbiasa dengan pola kehidupan keagamaan di Mekkah membuatnya "gegar budaya" setibanya di kampung halamannya di salah satu *nagari*, Pandai Sikat. Baginya hampir semua adat yang dijalankan masyarakat Minangkabau haram dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Awalnya Haji Miskin melarang praktik judi sabung ayam. Ia pun mendapat

dukungan dari seorang penghulu bernama Kuncir gelar Datuk Batuah (Putuhena, 2007). Namun larangan tersebut tak digubris oleh masyarakat.

Tidak menyerah melakukan reformasi Islam, senafas dengan semangat pembaharuan Islam model Muhammad b. Abdul Wahhab di Arab Saudi, Haji Miskin nekat membakar sebuah balai yang sering digunakan untuk sabung ayam (Putuhena, 2007). Tentu saja tindakan itu memicu kegeraman dan kemarahan kelompok adat dan membuat Haji Miskin dikejar. Beruntung ia berhasil menyelamatkan diri ke Kota Lawas dan mendapat perlindungan Tuanku Mensiangan yang dikenal dengan Tuanku Pasaman, yang kelak menjadi panglima kaum Padri, sebutan untuk sekelompok masyarakat pendukung penegakan syariat Islam di ranah Minangkabau. Penolakan kaum adat terhadap gerakan syariatisasi pun semakin gencar dan mengakibatkan perpecahan semakin melebar. Di pihak Haji Miskin, sebagai seorang lulusan Mekkah dan pelopor gerakan syariatisasi Islam di Minangkabau bersama Haji Sumanik dan Haji Piobang, dukungan dari masyarakat yang mendukung upayanya pun menjadi besar. Apalagi setelah Haji Miskin bertemu Tuanku nan Renceh di Kamang.

Persekutuan untuk melawan kaum adat terbentuk. Setidaknya ada delapan ulama, yakni Tuanku nan Renceh, Tuanku Lubuk Aur, Tuanku Berapi, Tuanku Padang Lawas, Tuanku Padang Luar, Tuanku Galung, Tuanku Biaro, dan Tuanku Kapau, bergabung dalam barisan Haji Miskin. Para *tuanku* yang memiliki kedudukan penting di tengah masyarakat itu sering dijuluki sebagai "Harimau nan Salapan".

Harimau Nan Salapan datang ke istana Pagaruyung bertemu Sultan Arifin Muningsyah dan kaum adat untuk berunding. Upaya perundingan merupakan usulan Tuanku nan Tuo yang menyarankan agar upaya pemurnian ajaran Islam dilakukan dengan cara damai dan tanpa kekerasan. Sebab, baginya, kekerasan hanya akan selalu memunculkan kekerasan yang baru. Dalam perundingan tersebut kelompok reformis Islam meminta kelompok adat menjauhi kebiasaan yang berlawanan dengan syariat Islam (Abdullah, Chaniago, dan Budhisantoso, 1984). Perundingan berjalan alot dan tidak menemui kata sepakat. Akhirnya Harimau nan Salapan memilih bersikap keras. Perpecahan antarkeduanya pun menjadi tidak terelakkan.

3.1 Tiga Babak Perang Padri

Untuk memudahkan memahami peristiwa Perang Padri yang terjadi pada tahun 1803–1838 M tampaknya harus membaginya menjadi beberapa babakan. Paling tidak ada tiga babak penting dalam salah satu perang saudara terbesar di Nusantara ini. Ketiga babak tersebut sebagai berikut:

Babak pertama, terjadi pertempuran sporadis antara kekuatan reformis Islam dan kelompok tradisionalis adat sepanjang tahun 1803–1821 M. Dengan semangat jihad yang membara dalam menegakkan syariat Islam, kelompok reformis—yang disebut sebagai kelompok Padri—mulai melakukan pembakaran dan perusakan di ruang umum terhadap praktik upacara dan lambang adat di Tanah Minangkabau, terutama yang dianggap menyimpang dari ajaran agama Islam. Banyak *rumah gadang* di rusak dan beberapa pemimpin adat terbunuh karena menolak gelombang syariatisasi.

Gempuran bertubi dari kaum Padri membuat kaum adat mulai kewalahan. Kekalahan demi kekalahan diderita kaum adat di berbagai *nagari*. Sultan Arifin Muningsyah, Raja Pagaruyung saat itu, pun melarikan diri. Keadaan menjadi sangat kacau bagi kaum adat. Mereka pun berunding untuk mencari jalan keluar. Akhirnya didapat jalan keluar, yaitu minta bantuan Belanda, sekalipun beberapa pembesar adat tidak setuju sepenuhnya dengan cara ini.

Sultan Tangkal Alam Bagagar memimpin kaum adat berunding dengan Belanda. Meskipun awalnya Sultan Tangkal Alam Bagagar tidak berhak mengatasnamakan Kerajaan Pagaruyung, tetapi mereka tetap memaksa untuk menandatangani perjanjian. Karena perjanjian itu Belanda menganggap Kerajaan Pagaruyung menyerah ke Pemerintah Hindia Belanda. Waktu itu Padang dipimpin oleh Residen James du Puy. Atas saran Residen Padang, Sultan Tangkal Alam Bagagar diangkat oleh Belanda menjadi Residen Tanah Datar. Kesempatan persekutuan terlalu sayang untuk dilewatkan. Belanda sangat tertarik pada Minangkabau karena cocok ditanami kopi, yang merupakan salah satu komoditi perdagangan bagi Belanda di Eropa (C. E. Dobbin, 2018; Lange, 1854).

Babak kedua, terjadi antara tahun 1821 akhir hingga tahun 1833 M ketika Belanda mulai ikut campur tangan. Perang yang awalnya hanya sporadis menjadi lebih terpusat pada kekuatan-kekuatan utama. Pada tanggal 4 Maret 1822 pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raaff berhasil memukul mundur Kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Belanda Kemudian membangun benteng pertahanan di Batusangkar dengan nama Fort Van der Capellen, sedangkan Kaum Padri menyusun kekuatan dan bertahan di Lintau (Kathirithamby-Wells, 1986).

Pada tanggal 10 Juni 1822 pergerakan pasukan Raaff di Tanjung Alam dihadang oleh kaum Padri, tetapi pasukan Belanda dapat terus melaju ke Luhak Agam. Pada tanggal 14 Agustus 1822 dalam pertempuran di Baso, Kapten Goffinet menderita luka berat kemudian meninggal dunia pada tanggal 5 September 1822. Pada bulan September 1822 pasukan Belanda terpaksa kembali ke Batusangkar karena terus tertekan oleh serangan kaum Padri yang dipimpin Tuanku Nan Renceh.

Persekutuan Belanda dengan kaum adat tidak beruntung, sehingga pada bulan April 1823 Belanda menambah kekuatan. Raaff menyerang Lintau, tetapi perlawanan kaum Padri terlalu gigih, sehingga Belanda terpaksa kembali ke Batu Sangkar. Pada tanggal 16 April 1823 Belanda terpaksa mundur kembali ke Batusangkar. Pada tahun 1824 Yang Dipertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah kembali ke Pagaruyung atas permintaan Letnan Kolonel Raaff (Teitler, 2004).

Pada bulan September 1824 pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Frans Laemlin berhasil menguasai beberapa kawasan di Luhak Agam. Beberapa wilayah yang menjadi kubu utama kekuatan kelompok Padri, seperti Koto Tuo dan Ampang Gadang, dilumpuhkan dengan kekuatan militer. Wilayah selanjutnya yang dikuasai oleh Belanda dan kaum adat adalah Biaro dan Kapau. Sepak terjang Laemlin terbilang luar biasa pada Perang Padri. Dalam waktu yang singkat ia berhasil membuat kelompok Padri kelimpungan. Karena luka-luka yang dideritanya, pada bulan Desember 1824 Laemlin meninggal dunia di Padang (Teitler, 2004).

Setelah kalah dari Belanda kaum Padri menyusun dan mengevaluasi kembali kekuatannya di Lintau. Kaum Padri menghalau serangan Raaff di Tanjung Alam dan Luhak Agam. Lalu di Baso kaum Padri berhasil membuat Kapten Goffinet terluka parah hingga meninggal. Dipimpin Tuanku Nan Renceh kaum Padri berhasil menekan Belanda hingga kembali ke Batusangkar (Kathirithamby-Wells, 1986).

Karena tidak mudah menghadapi kaum Padri di samping sudah mengeluarkan dana yang sangat banyak untuk membiayai perang di Eropa dan Perang Dipanagara, Belanda menempuh cara lain dengan berunding. Dengan nama Perjanjian Masang Belanda mengajak Tuanku Imam Bonjol[2] melakukan gencatan senjata.[3]

Setelah Perang Dipanagara berakhir dan kekuatan Belanda di Jawa pulih, Pemerintah Hindia Belanda kembali mencoba menundukkan kaum Padri yang didasari keinginan penguasaan penanaman kopi yang sedang meluas di kawasan pedalaman Minangkabau (*darek*). Sampai abad ke-19 M kopi merupakan salah satu hasi bumi andalan Belanda di Eropa. Christine Dobbin (1977: 2018) menyebutnya lebih dari perang dagang, tetapi seiring dengan dinamika perubahan sosial masyarakat Minangkabau dalam liku-liku perdagangan di pedalaman dan pesisir pantai barat atau pantai timur, sementara pada satu sisi Belanda ingin memonopoli.

Pada awal bulan Agustus 1831 Lintau berhasil ditaklukkan dan menjadikan Luhak Tanah Datar berada dalam kendali Belanda. Meskipun demikian Tuanku Lintau tetap melakukan perlawanan dari Luhak Limo Puluah. Pada tahun 1831–1832 M Letnan Kolonel Elout memperkuat serangan terhadap kaum Padri. Ia mendapat

bantuan kekuatan dari pasukan Sentot Prawirodirdjo, salah seorang panglima pasukan Pangeran Dipanagara yang membelot dan berdinas pada Pemerintah Hindia Belanda setelah usai perang Jawa. Namun kehadiran Sentot dianggap Elout sebagai duri dalam daging, sebab Sentot yang ditempatkan di Lintau menimbulkan masalah baru. Beberapa dokumen resmi Belanda membuktikan kesalahan Sentot melakukan persekongkolan dengan kaum Padri. Akirnya Sentot bersama pasukannya dipulangkan ke Jawa.

Setibanya di Jawa Sentot juga tidak berhasil menghilangkan kecurigaan Belanda. Selain itu Belanda tidak ingin Sentot tetap berada di Jawa, sehingga mengirimnya kembali ke Sumatera. Ternyata hal itu hanya siasat Belanda untuk menyingkirkan Sentot selamanya. Di tengah perjalanan Sentot diturunkan dan ditahan di Bengkulu. Ia dibiarkan mati sebagai orang buangan. Adapun pasukannya dibubarkan dan kemudian ditarik kembali menjadi tentara Belanda.

Pada bulan Juli 1832 Batavia mengirim pasukan infantri dalam jumlah besar di bawah pimpinan Letnan Kolonel Ferdinand P. Vermeulen Krieger untuk mempercepat penyelesaian perang. Pada bulan Oktober 1832 Luhak Limo Puluah telah berada dalam kekuasaan Belanda bersamaan dengan meninggalnya Tuanku Lintau (Zakariya, 2006). Kaum Padri melakukan konsolidasi dan berkubu di Kamang, tetapi seluruh kekuatan kaum Padri di Luhak Agam juga dapat ditaklukkan Belanda setelah Kamang jatuh pada akhir tahun 1832. Kaum Padri terpaksa mundur dari kawasan *luhak* dan bertahan di Bonjol.

Pasukan Belanda melakukan penyisiran pada beberapa kawasan yang masih menjadi kubu kaum Padri. Pada tanggal 11 Januari 1833 pasukan Belanda mencoba membangun kubu pertahanan di Padang Mantinggi, tetapi sebelum dapat memperkuat kedudukan kubu pertahanan tersebut diserang. Tercatat ada sekitar 139 orang tentara Eropa serta ratusan tentara pribumi terbunuh (Hadler, 2008). Sultan Tangkal Alam Bagagar yang sebelumnya ditunjuk Belanda sebagai Residen Tanah Datar ditangkap pasukan Letnan Kolonel Elout pada tanggal 2 Mei 1833 di Batusangkar atas tuduhan pengkhianatan. Walau dalam catatan Belanda Sultan Tangkal Alam Bagagar menyangkal keterlibatannya dalam penyerangan beberapa pos Belanda, tetapi pemerintah Hindia Belanda tidak mau mengambil risiko dan menolak laporan para perwiranya. Belanda mengasingkannya ke Batavia. Kedudukan Residen Tanah Datar diberikan kepada Tuan Gadang di Batipuh (Amran, 1981).

Periode ketiga, antara tahun 1833 dan tahun 1838 M. Kaum Padri bersatu dengan kaum adat melawan Belanda. Muncul kesepakatan antara kaum adat dan kaum Padri (Abdullah, 1966). Pengkhianatan Sultan Tangkal Alam Bagagar terhadap Belanda menjadi pemicu yang melahirkan persatuan dua kaum yang awalnya berselisih.

Kesepakatan tercapai di antara mereka bahwa Belanda merupakan musuh bersama yang harus diusir dari Tanah Minangkabau, sehingga Perang Padri yang awalnya perang saudara berubah menjadi perlawanan dan perang melawan penjajah. Keterlibatan Belanda yang awalnya dianggap kaum adat dapat melahirkan jalan keluar ternyata malah membuat keadaan semakin kacau dan ruwet. Bagi kaum adat ternyata Belanda masuk terlalu jauh persoalan di Tanah Minangkabau, terutama yang berkaitan dengan kopi. Oleh karena itu daripada menghadapi dua musuh, yaitu Kaum Padri dan Belanda, kaum adat memilih bersatu dengan kaum Padri. Selain itu periode ketiga dalam Perang Padri juga menjadi penanda sejarah persatuan orang Minang dan orang Mandailing.

Kini Belanda bukan hanya menghadapi kaum Padri tetapi secara keseluruhan masyarakat Minangkabau. Peperangan ini pun semakin bertambah lama dan membuat Belanda perlu mengeluarkan biaya lebih banyak. Mundur dari perang bukan pilihan Belanda mengingat banyaknya uang yang telah dikeluarkan setidaknya selama satu dasawarsa. Sementara itu tujuan utama Belanda menguasai lahan kopi di Minangkabau agar kas dapat diselamatkan. Meskipun demikain karena perang berlangsung terlalu lama Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch meninjau lapangan pada tanggal 23 Agustus 1833, tertama dari sisi persiapan militer (Boelhouwer, 1841).

Setibanya di Padang ia melakukan perundingan dengan Komisaris Pesisir Barat Sumatera Mayor Jenderal Riesz dan Letnan Kolonel Elout untuk mencari cara menaklukkan segera Benteng Bonjol, pusat perlawanan pasukan Padri. Riesz dan Elout menerangkan bahwa belum saatnya Belanda melakukan serangan umum terhadap Benteng Bonjol, sebab kesetiaan kaum adat di Luhak Agam masih disangsikan dan mereka sangat mungkin akan menyerang pasukan Belanda dari belakang. Van den Bosch bersikeras segera menaklukkan Benteng Bonjol paling lambat tanggal 10 September 1833. Kedua opsir tersebut meminta masa tangguh enam hari, sehingga Bonjol diharapkan jatuh pada tanggal 16 September 1833.

Upaya Belanda mengalami kegagalan. Taktik serangan gerilya yang diterapkan kaum Padri berhasil memperlambat gerak laju serangan Belanda ke benteng Bonjol. Dalam beberapa perlawanan bahkan hampir semua perlengkapan perang pasukan Belanda, seperti meriam beserta perbekalannya, dapat diambil alih. Perlengkapan perang yang tersisa dari pasukan Belanda adalah senjata dan pakaian yang melekat di tangan dan badan mereka. Pada tanggal 21 September 1833, sebelum digantikan oleh Jean Chrétien Baud, Van den Bosch membuat laporan bahwa penyerangan ke Bonjol gagal dan sedang diusahakan konsolidasi guna penyerangan selanjutnya.

Untuk meredam tekanan, ditambah kedudukan Belanda semakin melemah, pada tanggal 25 Oktober 1833 Pemerintah Hindia

Belanda mengeluarkan pengumuman bernama "Plakat Panjang", berisi pernyataan bahwa kedatangan Belanda ke Minangkabau tidaklah bermaksud menguasai negeri tersebut. Tujuan Belanda ke wilayah itu hanya untuk berdagang, menjaga keamanan, dan penduduk Minangkabau tetap diperintah oleh para penghulu mereka. Dalam Plakat Panjang bahkan masyarakat Minangkabau tidak diwajibkan membayar pajak kepada pihak Hindia Belanda. Belanda berdalih bahwa untuk menjaga keamanan, membuat jalan, membuka sekolah, dan sebagainya memerlukan biaya. Oleh karena itu penduduk diwajibkan menanam kopi dan mesti menjualnya kepada Belanda.

Mulai dari perjajian itu sampai tahun 1834 M Belanda hanya memusatkan perhatian pada pembuatan jalan dan jembatan yang mengarah ke Bonjol. Ribuan tenaga kerja paksa dikerahkan untuk menyelesaikannya. Dengan pertambahan sarana jalan menuju Benteng Bonjol Belanda akan mudah mengerahkan pasukan pada suatu saat. Selain itu pihak Belanda juga berusaha menanamkan pengaruh pada beberapa kawasan yang dekat dengan kubu pertahanannya. Dengan demiakian persatuan adat dan Padri diurai sedikit demi sedikit.

Pada tanggal 16 April 1835 Belanda memutuskan kembali mengadakan serangan besar-besaran untuk menaklukkan Bonjol dan sekitarnya. Operasi militer dimulai pada tanggal 21 April 1835 dipimpin oleh Letnan Kolonel Bauer. Ia membagi pasukannya menjadi dua kekuatan, masing-masing bergerak dari Matur dan Bamban menuju Masang. Meski sarana jalan sudah disiapkan, tetapi Pasukan Belanda kesulitan mencapai Benteng Bonjol. Pasukan mesti menyeberangi sungai yang saat itu tengah dilanda banjir. Di samping itu mereka harus masuk ke dalam hutan rimba serta menapaki gunung dan lembah untuk dapat mencapai kubu pertahanan Imam Bonjol.

Pada tanggal 23 April 1835 gerak pasukan Belanda berhasil mencapai tepi Batang Gantiang, kemudian menyeberanginya dan bersatu di Batusari. Dari sini hanya ada satu jalan sempit menuju Sipisang, daerah yang masih dikuasai oleh kaum Padri. Di Sipisang pecah pertempuran antara pasukan Belanda dan kaum Padri. Pertempuran sengit berlangsung selama tiga hari tiga malam tanpa henti. Korban yang berjatuhan di dua kubu tak terbilang. Karena kalah jumlah, akhirnya kaum Padri terpaksa mengundurkan diri ke hutan-hutan sekitar. Sipisang jatuh. Moral dan semangat pasukan Belanda meningkat. Daerah ini kemudian dijadikan kubu pertahanan sementara sambil menunggu pembuatan jembatan baru menuju Bonjol (Hadler, 2013).

Gerak laju pasukan Belanda ke Bonjol sangat lamban. Hampir sebulan waktu yang diperlukan untuk dapat mendekati daerah Alahan Panjang. Padang Lawas sebagai garda terdepan pertahanan

Padri di Alahan Panjang akhirnya jatuh pada tanggal 8 Juni 1835 (Amran, 1981). Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 1835 pasukan Belanda bergerak menuju sebelah timur Batang Alahan Panjang dan membuat kubu pertahanan di sana. Sementara itu pasukan kaum Padri tetap bersiaga di seberang. Pada tengah malam tanggal 16 Juni 1835 pasukan Belanda berhasil mendekati Bonjol dalam jarak kira-kira 250 langkah. Mereka mencoba membuat kubu pertahanan. Dengan menggunakan *houwitser*, mortir, dan meriam, pasukan Belanda menembaki Benteng Bonjol.

Kaum Padri tidak tinggal diam dan membalas dengan menembakkan meriam dari Bukit Tajadi. Karena posisi yang kurang menguntungkan terjadi banyak korban di pihak Belanda. Pada tanggal 17 Juni 1835 datang bala bantuan. Setidaknya tercatat 2.000 orang pasukan yang dikirim oleh Residen Francis di Padang. Orang Bugis turut diturunkan dalam pasukan tambahan tersebut sebagai prajurit garda depan untuk menghadapi masyarakat Minangkabau yang terpusat di Benteng Bonjol. Pada tanggal 21 Juni 1835 dengan kekuatan besar pasukan Belanda melakukan gerak maju menuju sasaran akhir, yaitu Benteng Bonjol di Bukit Tajadi (Amran, 1981).

Belanda menggunakan taktik lain untuk melemahkan kekuatan Imam Bonjol dengan menutup jalur masuk peralatan perang dan perbekalan hidup. Hal ini dilakukan Belanda karena melihat kekukuhan Benteng Bonjol yang sulit ditembus meski dengan kekuatan besar. Ternyata blokade pun menemui kegagalan; justru kubu pertahanan pasukan Belanda dan bahan perbekalannya diserang oleh pasukan kaum Padri secara gerilya.

Sulitnya menembus Benteng Bonjol ditinjau dari perspektif geografis karena letak Benteng Bonjol cukup strategis dan sulit diserang dari luar. Benteng Bonjol berdiri di atas bukit yang hampir tegak lurus ke atas, bernama Bukit Tajadi. Tidak begitu jauh dari benteng mengalir Batang Alahan Panjang, sungai di tengah lembah dengan aliran yang deras dan berliku-liku dari utara ke selatan. Benteng berbentuk segi empat panjang. Tiga sisinya dikelilingi oleh dinding pertahanan dua lapis setinggi lebih kurang 3 m. Di antara kedua lapis dinding dibuat parit dalam dengan lebar 4 m. Dinding luar terdiri atas batu-batu besar dengan teknik pembuatan hampir sama dengan benteng-benteng di Eropa. Di atasnya ditanami bambu berduri panjang yang ditanam sangat rapat sehingga kaum Padri dapat mengamati bahkan menembakkan meriam pada pasukan Belanda (Boelhouwer, 1841). Semak belukar dan hutan yang sangat lebat di sekitar Bonjol menjadikan kubu pertahanan kaum Padri tidak mudah dilihat oleh pasukan Belanda. Keadaan inilah yang dimanfaatkan dengan baik oleh kaum Padri untuk membangun kubu pertahanan strategis, sekaligus menjadi markas utama Tuanku Imam Bonjol (Teitler, 2004).

Sampai awal bulan September 1835 pasukan Belanda belum berhasil menguasai Bukit Tajadi. Malah pada tanggal 5 September 1835 kaum Padri keluar dari kubu pertahanan dan melakukan penyerbuan mendadak ke kubu-kubu pertahahan Belanda yang di sekitar Bukit Tajadi. Setelah serangan tersebut pasukan kaum Padri segera kembali masuk ke dalam benteng Bonjol. Pada tangga 19 September 1835 pasukan Belanda menyerang dari arah Luhak Limo Puluah dan Padang Bubus, tetapi gagal, bahkan menimbulkan banyak kerugian. Letnan Kolonel Bauer, salah seorang komandan pasukan Belanda, menderita sakit dan terpaksa dikirim ke Bukittinggi. Kedudukannya digantikan oleh Mayor Prager.

Blokade yang berlarut-larut dan keberanian kaum Padri menjadi contoh bagi masyarakat Minangkabau yang awalnya ragu melawan Belanda. Gambaran dari semangat jihad, terutama, kaum Padri menularkan semangat mengusir Belanda, sehingga pada tanggal 11 Desember 1835 rakyat Simpang dan Alahan Mati mengangkat senjata dan menyerang kubu-kubu pertahanan Belanda. Pasukan Belanda kewalahan mengatasinya, namun akhirnya dapat diatasi setelah datang bantuan serdadu Madura yang berdinas pada pasukan Belanda.

Pada tanggal 3 Desember 1836, setelah hampir setahun mengepung Bonjol, pasukan Belanda melakukan serangan besar-besaran terhadap benteng Bonjol sebagai usaha terakhir penaklukan Bonjol. Serangan dahsyat itu mampu menjebol sebagian benteng Bonjol, sehingga pasukan Belanda dapat masuk menyerbu dan berhasil membunuh beberapa keluarga Tuanku Imam Bonjol. Dengan kegigihan dan semangat juang yang tinggi kaum Padri kembali berhasil memporak-porandakan musuh hingga Belanda terusir dan terpaksa kembali keluar dari benteng. Banyak sekali korban jiwa masing-masing pihak.

Kegagalan penaklukan Bonjol memukul Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, yang saat itu dipegang oleh Dominique Jacques de Eerens. Mereka perlu mengirim seorang panglima perang andal, Mayor Jenderal Cochius, pada tahun 1837. Cochius merupakan seorang perwira tinggi Belanda yang memiliki keahlian dalam strategi perang Benteng Stelsel. Ia diperintah Batavia untuk memimpin langsung serangan besar-besaran ke Benteng Bonjol (Teitler, 2004). Hal itu berarti Belanda semakin serius memenangkan pertempuran.

Dengan dipimpin oleh jenderal dan beberapa perwira Belanda mengepung Bonjol dengan ketat dari segala jurusan selama sekitar enam bulan (16 Maret–17 Agustus 1837) (Abdullah, Chaniago, and Budhisantoso, 1984). Pasukan gabungan itu sebagian besar terdiri atas berbagai suku di Nusantara, seperti Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Setidaknya tercatat ada 148 perwira Eropa, 36 perwira pribumi, 1.103 tentara Eropa, 4.130 tentara pribumi, termasuk di

dalamnya *Sumenapsche hulptroepen hieronder begrepen* (pasukan pembantu Sumenep, Madura). Dalam daftar nama para perwira pasukan Belanda tersebut di antaranya Mayor Jendral Cochius, Letnan Kolonel Bauer, Mayor Sous, Mayor Prager, Kapten MacLean, Letnan Satu van der Tak, dan Pembantu Letnan Satu Steinmetz. Juga terdapat nama orang-orang Nusantara, seperti Kapiten Noto Prawiro, Indlandsche Luitenant Prawiro di Logo, Karto Wongso, Wiro Redjo, Prawiro Sentiko, Prawiro Brotto, dan Merto Poero.

Pasukan dari Batavia terus didatangkan seolah tanpa henti. Pada tanggal 20 Juli 1837, misalnya, sejumlah orang Eropa dan pasukan Sepoy—serdadu dari Afrika, seperti Ghana dan Mali, yang ditugaskan sebagai tentara Belanda—tiba dengan Kapal Perle di Padang. Pasukan tersebut terdiri atas 1 *sergeant* 'sesan', 4 *korporaal* 'kopral', dan 112 *flankeurs* dipimpin Kapitein Sinninghe.

Hujan peluru meriam pasukan artileri serta gempuran serangan pasukan infantri dan kavaleri terus berdatangan selama setidaknya enam bulan. Situasi baru dapat dikendalikan oleh Belanda pada tanggal 3 Agustus 1837. Letnan Kolonel Michiels, sebagai komandan lapangan terdepan, sedikit demi sedikit mulai menguasai keadaan. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1837 Bukit Tajadi jatuh dan pada tanggal 16 Agustus 1837 benteng Bonjol dapat ditaklukkan secara keseluruhan.

Meski demikian Tuanku Imam Bonjol dapat menyelematkan diri dari gempuran Belanda dan menuju ke daerah Marapak bersama beberapa pengikutnya. Dalam pelarian dan persembunyiannya ia mencoba mengadakan konsolidasi terhadap seluruh pasukannya yang bercerai-berai dan lemah. Karena telah lebih tiga tahun bertempur secara terus-menerus ternyata hanya sedikit saja yang tinggal dan masih siap bertempur kembali. Trauma dan kelelahan barangkali menjadi alasan paling masuk akal mengapa pasukan Imam Bonjol mulai kehilangan semangat berperang.

Karena tidak ingin mendesak para pengikutnya yang telah kehilangan semangat juang, Tuanku Imam Bonjol pun menyerah kepada Belanda pada bulan Oktober 1837 (Molhuysen, 1911). Meskipun demikian ia mengajukan syarat kepada Belanda agar anaknya yang ikut bertempur, Naali Sutan Chaniago, dibebaskan dari hukuman dan diangkat sebagai pejabat kolonial Belanda (Hadler, 2008). Belanda sepakat dengan persyaratan yang diajukan oleh Imam Bonjol. Ia pun dibuang ke Cianjur pada tanggal 23 Januari 1838, pada akhir tahun 1838 dipindahkan ke Ambon, pada tanggal 19 Januari 1839 dipindahkan ke Lotta, Minahasa, dekat Manado. Sampai akhir hayatnya ia harus mengalami masa pembuangan paling tidak selama 27 tahun. Akhirnya pada tanggal 8 November 1864 Tuanku Imam Bonjol meninggal dunia. Ia dimakamkan di tempat pengasingannya terakhir.

Tuanku Imam Bonjol menulis autobiografi yang dinamakan *Naskah Tuanku Imam Bonjol*, antara lain berisi penyesalannya atas kekejaman kaum Paderi terhadap kaum adat (Hadler, 2013). Tulisan tersebut merupakan karya autobiografi pertama dalam bahasa Melayu, disimpan oleh keturunan Imam Bonjol, serta dipublikasikan tahun 1925 di Berkeley dan tahun 2004 di Padang (Hadler, 2013).

Meskipun Imam Bonjol berhasil ditangkap, tetapi perang masih berlanjut sampai akhirnya benteng terakhir kaum Padri di Dalu-Dalu (Rokan Hulu)—yang waktu itu dipimpin oleh Tuanku Tambusai—jatuh pada tanggal 28 Desember 1838 (Amran, 1981). Jatuhnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur, bahkan ia bersama sisa-sisa pengikutnya pindah ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaka. Perang dianggap selesai. Akhir Perang Padri menjadi tahapan penting dalam Kerajaan Pagaruyung, sebab pasca kekalahan itu Pagaruyung ditetapkan menjadi bagian dari Pax Netherlandica dan menjadikan wilayah Padangse Bovenlanden berada di bawah pengawasan Pemerintah Hindia Belanda secara penuh.

4. *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*: Restorasi Minangkabau dan Resistensi Kolonialisme

Pada akhir babak kedua Perang Padri, perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda. Oleh sebab itu Belanda, melalui residennya di Padang, mengajak pemimpin kaum Padri yang waktu itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat "Perjanjian Masang" pada tanggal 15 November 1825 (Amran, 1981). Hal ini agaknya dapat dipahami karena pada saat bersamaan Pemerintah Hindia Belanda kehabisan dana menghadapi perang di Eropa dan parang Jawa, Perang Diponegoro.

Selama masa gencatan senjata, Tuanku Imam Bonjol mencoba memulihkan kekuatan dan mencoba merangkul kembali kaum adat. Akhirnya lahir kesepakatan yang dikenal dengan nama "Plakat Puncak Pato" di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, yang terwujud sebagai kesepakatan bersama *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yang berarti adat (Minangkabau) berlandaskan pada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Qur'an (Amran, 1981).

Ungkapan "adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah" muncul di tengah masyarakat Minangkabau sejak zaman Padri, sejak pertemuan perdamaian antara kaum adat dan kaum Padri di Bukit Marapalam. Dahulu adat Minangkabau dituding pihak Padri sebagai adat jahilliyah, sebab waktu itu di banyak *nagari* masyarakatnya banyak yang minum tuak, minum kilang, sabung ayam, makan barang yang dianggap haram, berpusaka kepada keponakan, dan berbagai perbuatan maksiat lainnya. Pada saat itu orang Padri sangat

kaku menjalankan hukum syariat Islam. Orang makan sirih ataupun merokok akan didenda seketika itu juga, bahkan seorang perempuan yang masih keluarga dekat Tuanku Nan Renceh dihukum mati karena dianggap telah melanggar ajaran agama Islam. Bagi kaum Padri, hukum syariat Islam adalah hukum yang paling benar untuk dijalankan orang-orang Minangkabau, sebab syariat Islam adalah "adat yang sebenar adat" karena berasal dari kitabullah. Sementara itu, menurut kaum adat, apa yang dimaksud dengan "adat yang sebenar adat" di Minangkabau adalah sesuatu yang sudah kodrat tanpa campur tangan siapa pun. Contoh dalam pengertian kaum adat, misalnya, manusia lahir dengan kaki, ikan dapat berenang, dan salju dingin.

Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua macam penafsiran mengenai konsep "adat yang sebenar adat", yakni (1) menurut kaum Padri, adalah suatu ketetapan mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam dan ketetapan ini lahir ketika tiga haji dari Mekkah datang kembali ke tanah Minang; (2) menurut kaum adat, adalah sebuah ketetapan yang berasal sejak sebelum nenek moyang Minangkabau ada dan dibakukan jauh sebelum Perang Padri.

Artikel Sutan Maharajo mengulas "adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah" secara lengkap. Dalam *Adatrechtbundels XXXV: Sumatra—Serie H Het Minangkabausche Gebied No. 66—* Artikelen Van Datoek Soetan Maharadja in de Oetoesan Melajoe (1911 – 1913) halaman 309 antara lain tertulis sebagai berikut:

> "Pada masa 'berhitam berputih' di Alam Minangkabau ini, oleh Padri hendak dibunuh sekalian adat, akan diganti dengan syarak saja hingga orang makan sirih dan orang merokok pun didenda oleh Padri. Masa itulah adat Minangkabau dinamakan "Adat Jahiliyah" oleh orang Padri menghidupkan hukum syaraknya yang dinamakannya "Adat Islamiyah" dengan dikatakannya itulah "Adat Yang Sebenar Adat" keluar dari Kitabullah.

Padahal yang "Adat Sebenar Adat" sebenarnya yang dijadikan Allah; adat ikan beradai, adat gajah berbelalai, adat api panas dan selanjutnya, bukannya aturan Padri yang dikatakannya keluar dari Kitabullah itu, karena hukum syarak itu ikhtilaf (berbeda, perselisihan paham) beberapa mazhab. Begitupun ulama yang dalam satu mazhab pun bersalah-salahan pula, sedang dalam kitab karangan Imam Syafei sendiri ada yang berkaul kadim ada yang berkaul jaded, yakni bersalahan fatwa Imam Syafei semasa di Bagdad dengan fatwa yang kemudian semasa di Mesir.

Adapun Adat Minangkabau yang dikatakan Adat bersendi syarak itu, syarak bersendi Kitabullah melainkan untuk Undang Nan Sepucuk Yang Takluk Kepada Hukum namanya. Dan yang mengatakan

adat jahiliyah dan Islamiyah, melainkan Padri, bukanlah kata itu datangnya dari kata pusaka dari ninik yang berdua ..."

Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa konseps "adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah" lahir pada masa Perang Padri. Di dalam *adatrechtbundels* inilah ditemukan publikasi pertama mengenai "adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah" yang berasal dari masa Perang Padri. Tulisan Datoek Sutan jelas menentang apa yang berkembang di tengah masyarakat bahwa istilah tersebut berasal dari perkataan *datuk nan berdua*: datuk perpatih nan sabatang dan datuk ketumangguangan.

Kelahiran konsepsi hidup itu juga menjadi pemersatu masyarakat Minang yang sedang terbelah. Baik penghulu sebagai pemimpin kaum adat maupun ulama sebagai pemimpin kaum Padri akhirnya bersatu di bawah panji tersebut. Kaum adat menerima ajaran Islam syariat sepenuh hati, asalkan kaum Padri tidak melarang praktik-praktik adat yang sebetulnya tidak bertentangan dengan Islam. Permintaan ini disetujui oleh kaum Padri. Hal itu, misalnya, juga disampaikan oleh Datoek Sutan dalam *Adatrechtbundels* berikut:

> "Untuk memelihara persatuan dalam nagari, diusahakan oleh orang pandai-pandai dan terkemuka mencari air nan janih sayak nan landai guna terwujudnya perdamaian antara Penghulu dan Alim Ulama. Nan di atas ke bawah-bawah nan di bawah ke atas-atas, masing-masing surut salangkah. Kaum adat meninggalkan pamainan yang bertentangan dengan agama seperti manyabung, berjudi dan sebagainya. Dan Alim Ulama membenarkan pula ketentuan adat yang tidak berlawanan dengan agama seperti melarang perkawinan sepasukuan dan lain-lain, sehingga dapatlah kata sepakat: "Bulat boleh digolongkan picak boleh dilayangkan"."

Kesepakatan membuat ikrar persatuan tersebut terjadi di atas Bukit Marapalam (antara Lintau dan Tanjung Sungayang). Pertemuan itu merupakan tonggak penting dalam sejarah Pagaruyung, terutama sejarah Minangkabau. Kehadiran para penghulu, ulama, dan beberapa pembesar terkemuka di Luhak nan Tigo Lareh nan Duo menjadi saksi. Dalam pertemuan itu bahkan diadakan upacara adat yang dibalut dengan nuansa agama Islam sebagaimana dikutip berikut:

> "Dibantai kerbau, dagingnya dilapah darahnya dikacau, tanduk ditanamkan, ditapung batu dilicak pinang, diikat dengan Alfatihah dan dibacakan doa selamat. Dalam pertemuan besar itulah diikrarkan bersama-sama dan menjunjung tinggi kebulatan yang telah dibuat oleh orang-orang pandai dan para terkemuka, yaitu: Penghulu rajo dalam nagari, kato badanga, pangaja baturuik, manjua jauh manggantung tinggi; Alim Ulama suluh

bendang dalam nagari, air nan janih sayak nan lancar
tempat batanyo di Panghulu."

Dalam pelaksanaannya ulama dan penghulu saling bekerja sama satu sama lain memelihara kestabilan lembaga sosial dan lembaga adat. Peran ulama memberi fatwa, sementara penghulu memberi perintah. Hal itu, misalnya, dapat ditemukan dalam bentuk ibadah keseharian. Praktik ibadah, seperti zakat, puasa, dan berbagai sunnah rasul lain, diberikan keabsahan keagamaannya oleh ulama lewat fatwa-fatwa yang mereka keluarkan. Fatwa-fatwa tersebut kemudian diedarkan ke para penghulu yang menjadi pemimpin (*rajo*) di *nagari* mereka masing-masing.

Melihat hal tersebut jelas keduanya tidak saling berbenturan satu sama lain. Oleh karena itu siapa pun yang melanggar persekutuan antara kedua belak pihak akan mendapatkan keburukan baik di dunia maupun di akhirat: "*Siapa yang melanggar kebulatan ini dimakan biso kawi di atas dunia, ke atas indak bapucuk, ke bawah indak baurat, di tangah dilarik kumbang, di akhirat dimakan kutuk kalam Allah.*" Kesepakatan ini juga menandakan bahwa hubungan adat dan agama pasca perdamaian bagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang Minang menyebutnya *adat bapaneh syarak balindung*, yang berarti 'adat adalah tubuh dan syarak adalah jiwa di Alam Minangkabau'.

Pada akhir abad ke-19 kerja sama antara penghulu dan ulama masih terjadi. Bila sebuah perkara akan dihakimi, para penghulu akan berkonsultasi terlebih dahulu pada ulama sebelum menelurkan putusan hukum. Kunjungan penghulu ke ulama disebut *Bamuti*. Agaknya praktik ini berasal dari kata "bermufti", yang berarti 'minta nasihat dan bermusyawarah tentang hukum'. Praktik ini merupakan salah satu hasil perdamaian masyarakat Pagaruyung dalam menjembatani adat dan agama. Praktik ini terjadi di setiap *nagari* di Minangkabau sampai ada peraturan baru oleh Belanda, sampai perkara ini diadili oleh Tuangku Lareh, kemudian *Magistraad*, dan kemudian *Landraad*.

5. Keruntuhan Kerajaan Pagaruyung

Sekalipun kedudukan Raja Pagaruyung masih tetap dihormati, tetapi kekuasaannya sudah sangat lemah menjelang Perang Padri. Daerah-daerah pesisir barat jatuh ke dalam pengaruh Aceh; sedangkan Inderapura, di pesisir selatan, menjadi kerajaan merdeka meskipun secara resmi masih tunduk pada Raja Pagaruyung. Keberadaan Pagaruyung menjadi sangat problematis, di satu sisi banyak wilayah kekuasaan Pagaruyung yang jatuh ke tangan Aceh dan di sisi lain banyak masyarakat yang menolak segala peraturan yang dibuat oleh Raja Pagaruyung.

Setelah pasukan Belanda berhasil memukul mundur kaum Padri dari wilayah Pagaruyung, pemerintah Hindia Belanda mengambil

alih kekuasaan Pagaruyung dan menempatkan raja sebagai bawahannya. Sementara Sultan Tangkal Alam Bagagar Syah pada sisi lain ingin diakui sebagai Raja Pagaruyung, tetapi pemerintah Hindia Belanda dari awal membatasi kewenangannya dan hanya mengangkatnya sebagai *Regent* Tanah Datar.

Kemungkinan karena kebijakan tersebut menimbulkan dorongan pada Sultan Tangkal Alam Bagagar mulai memikirkan bagaimana mengusir Belanda dari negerinya. Oleh karenanya Sultan Tangkal Alam Bagagar Syah pindah haluan dan berunding dengan kaum Padri untuk menyingkirkan Belanda secara bersama-sama. Walaupun sudah melakukan penggalangan kekuatan, tetapi upaya tersebut gagal dan ia harus menerima hukum buang ke Batavia dengan tuduhan pengkhianatan terhadap perjanjian.

Pada masa awal Perang Padri, setelah Pagaruyung jatuh ke tangan kaum Padri, kawasan Batipuh masih menjadi pusat Kerajaan Pagaruyung yang terutama terdiri atas kaum adat. Selain itu ada beberapa kaum adat di Luhak Tanah Datar yang berhasil bertahan terhadap serangan kaum Padri sehingga masih dapat dikatakan sebagai bagian dari Kerajaan Pagaruyung. Datuk Pamuncak, yang waktu itu menyandang gelar Tuan Gadang di Batipuh, bekerja sama dengan Pemerintah Hindia Belanda memerangi kaum Padri. Setelah Sultan Tangkal Alam Bagagar tangkap atas tuduhan pengkhianatan oleh Kolonel Elout, Datuk Pamuncak Tuan Gadang di Batipuh diangkat menjadi *Regent* oleh Belanda.

Pasca Perang Padri berakhir Tuan Gadang di Batipuh tidak puas dengan kedudukan *regent* dan minta pemerintah Hindia Belanda memberikan kedudukan yang lebih tinggi. Ia merasa pantas menggantikan Sultan Tangkal Alam Bagagar sebagai Raja Pagaruyung yang baru. Permintaan itu ditolak Belanda. Hal itu menjadi salah satu faktor pendorong pemberontakan pecah di Batipuh tahun 1841.

Perubahan administrasi Pemerintah Hindia Belanda di Minangkabau serta penolakan permintaan Tuan Gadang diakui sebagai raja di Minangkabau mendorong rakyat Batipuh bersama Tuan Gadang melakukan perlawanan bersenjata pada tanggal 22 Februari 1841. Awalnya pasukan Tuan Gadang menyerang pos garnisun tentara Belanda di Padangpanjang. Pengaruh perlawanan rakyat Batipuh cepat menyebar ke kawasan lain, menebarkan huru-hara pada kawasan Fort de Kock dan Fort Van der Capellen (Rasyid, 2008). Dampak serangan itu berupa terbunuhnya beberapa pejabat Eropa dan masyarakat pribumi. Perlawanan itu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan *cultuurstelsel* di Minangkabau. Belanda memaksakan kebijakan tersebut karena menganggap berhasil mendatangkan keuntungan setelah diterapkan di Jawa. Perlawanan itu memang mengganggu Belanda, pun demikian cepat diredam. Tuan Gadang berhasil ditawan dan diasingkan ke Batavia. Setelah pemberontakan

Batipuh berakhir kedudukan Tuan Gadang tidak dapat lagi diisi oleh penghulu yang ada di Batipuh, sebab Belanda menerapkan sistem adat Minangkabau bahwa pewarisan takhta dilakukan dengan prinsip-prinsip sistem matrilineal. Oleh karena itu kedudukan Tuan Gadang akan turun kepada kemenakan, sebagaimana kebiasaan yang terjadi di alam Minangkabau (Abdullah, Chaniago, dan Budhisantoso, 1984).

Kematian sultan Bagagar Syah selaku sultan terakhir dalam pengasingan di Batavia menimbulkan persoalan baru sekalipun tidak begitu penting pada kedudukan politik Kerajaan Pagaruyung di mata Hindia Belanda. Setiap kemenakan menyatakan diri paling pantas menduduki takhta Pagaruyung. Masalah itu bahkan berlangsung sampai lama. Tercatat, misalnya, pada tahun 2009 Muchdan Bakri yang mengaku sebagai pewaris sah kerajaan hadir dalam upacara penobatan Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, Muhriz ibni Munawir di Istana Besar Seri Menanti, Kuala Pilah. Ia menyatakan bahwa ketika diasingkan ke Batavia, Bagagar Syah datang membawa anak pertamanya, Sultan Mangun Tuah. Berdasarkan silsilah tersebut, menurutnya, Sultan Mangun Tuah mempunyai enam orang anak dan merupakan cucu anak pertama Sultan Mangun Tuah yang bernama Raja Sabaruddin. Ia menyatakan sebagai pewaris sah terhadap pemerintahan Raja Alam Minangkabau terakhir dan menyatakan sedang menjejaki cucu Sultan Jamin (anak Sultan Mangun Tuah) yang dipercaya berada di Batu Kikir, Kuala Pilah.

Terlepas dari hal tersebut, pasca kejatuhan di pertengahan episode Perang Padri, pengaruh dan kemuliaan Kerajaan Pagaruyung tetap tinggi, terutama di kalangan masyarakat Minangkabau yang berada di *rantau*. Salah satu ahli waris Kerajaan Pagaruyung diundang menjadi penguasa di Kuantan. Begitu juga sewaktu bertugas di Semenanjung Malaka, Raffles berjumpa dengan kerabat Pagaruyung yang berada di Negeri Sembilan. Raffles bermaksud mengangkat Yang Dipertuan Ali Alamsyah yang dianggapnya masih keturunan langsung raja Minangkabau sebagai raja di bawah perlindungan Inggris.

(Endnotes)

1 Suatu nagari harus memiliki syarat: satu berlabuh punya jalan //kedua bertapian//ketiga berbalai// keempat bermesjid// kelima bergelanggang.

2 Dalam catatan Hadler, Tuanku Imam Bonjol anak kampung lembah Alahan Panjang, ujung utara dataran tinggi Minangkabau, yang lahir pada tahun 1772. Nama aslinya Muhamad Sahab dan sewaktu muda dipanggil Peto Syarif. Ia murid ayahnya sendiri, Khatib Bayanudin, dan bergabung dengan surau ayahnya sebagai seorang guru. Sebagai anggota muda kaum ulama pada akhir 1790-an, Bonjol mendampingi patronnya ke pusat pembaruan Islam pimpinan Tuanku nan Tuo, seorang reformis moderat tetapi dikelilingi oleh kalangan yang bersikap keras mendesakkan penerapan hukum Islam yang lebih ketat.

3 Selama gencatan senjata, kubu Padri bergerak menyusun strategi. Tuanku Imam Bonjol memulihkan pasukan dan merangkul kaum adat. Akhirnya, lahirlah konsensus bersama, sebagaimana akan dijelaskan pada bagian setelah ini, yang berusaha menegakkan ajaran Islam dan Al-Quran di tanah Minangkabau. Bahasa Padangnya bernama "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah."

— 12 —

Kerajaan Inderapura

Kerajaan Inderapura merupakan salah satu dari sejumlah kerajaan di Sumatera yang berawal dari daerah *rantau* yang menjadi bagian dari alam Minangkabau. Seperti halnya Bengkulu, Painan, Padang, dan Pariaman di garis pantai bagian barat Sumatera, serta Siak, Indragiri, dan Jambi di pantai timur Sumatera, Indrapura bekedudukan sebagai pintu masuk ke arah Pagaruyung. Kedudukan Inderapura berubah pada awal abad ke-16 M sejalan terbentuknya peta perniagaan baru setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 M. Para pedagang muslim dari Arab dan Persia serta India mengubah jalur perjalanan mereka melalui pantai barat Sumatera. Sejak saat itu Inderapura menjadi bagian dalam arus perdagangan jarak jauh, seperti halnya daerah *rantau* lain di sepanjang pantai. Bersamaan dengan itu Inderapura tumbuh menjadi suatu kerajaan otonom. Lada yang dihasilkan Inderapura, yang disalurkan melalui Tiku, Pariaman, dan Selabar, menjadi sumber perkembangan ekonomi dan akhirnya sumber kekuasaan politik.

Pada awal abad ke-16 M Inderapura telah ramai disinggahi para pedagang Muslim asal Gujarat yang mencari lada; padahal, sekitar setengah abad sebelumnya lada tidak termasuk barang dagangan yang dapat mereka peroleh dalam perjalanan mereka dari Singkil ke Jawa (Kathirithamby-Wells, 1976: 66–67). Dengan demikian, seperti halnya kerajaan di dunia Melayu, perubahan Inderapura menjadi kerajaan otonom berlangsung seiring dengan pertumbuhannya sebagai pusat kegiatan ekonomi yang ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai negara. Bersamaan dengan itu pula agama Islam tumbuh menjadi keyakinan masyarakat dan bangsawan kerajaan. Sejak saat itu Inderapura menjadi kesultanan di pantai barat Sumatera dengan tetap berpegang teguh pada budaya Minangkabau.[1] Dalam hal ini Inderapura memang beruntung jika dibanding daerah *rantau* lain di pantai barat Sumatera, yang meliputi Pinan, Padang, dan Pariaman, serta menjadi sasaran perluasan dan kemudian dominasi kekuasaan Aceh (Kathirithamby-Wells, 1969). Inderapura relatif terbebas dari perkembangan itu dan secara leluasa bisa melakukan konsolidasi kekuasaan menjadi sebuah kesultanan.

Peralihan menjadi kesultanan memiliki arti penting secara sosio-historis. Yang diketahui hingga kini sebagai Inderapura mengacu pada periode ketika wilayah itu menjadi kerajaan Islam atau kesultanan yang terletak di wilayah Sumatera Barat sekarang, tepatnya di Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada masa itu wilayah Inderapura tergolong luas. Sebelah utara berbatasan dengan Sikilang Air Bangis-Batang Toru (Batak), sebelah barat berbatasan dengan laut yang dikenal dengan *ombak nan badabua* (Samudera Indonesia atau Samudera Hindia), sebelah timur berbatasan dengan Durian Ditakuk Rajo, *Nibuang Balantak Basi*, lingkaran Tanjung Samalindu (Jambi), sedangkan selatan berbatasan dengan Taratak Air Hitam Muara Ketaun (Asnan, 2013: 16–17).

Gambaran tentang Inderapura berbeda ketika menyangkut masa konial. Pada masa itu Inderapura masuk ke dalam kesatuan wilayah kekuasaan ekonomi dan politik administratif bagian Sumatera, juga disebut *Sumatra's Weskust* atau *de Weskust van Sumatera* (Mansoer, 170: 1; Asnan, 2007: 21). Wilayah ini membentang sepanjang 620 km dari Singkel di Utara hingga Inderapura di Selatan. Pada masa itu wilayah Kesultanan Inderapura secara bertahap dipersempit oleh penguasa, baik oleh Belanda maupun Inggris. Puncaknya terjadi ketika Belanda mengubah jabatan sultan menjadi *regen*. Semisal di daerah Muko-Muko, mulanya wilayah ini masuk ke dalam daerah Kesultanan Inderapura di bagian selatan. Pada zaman penjajahan Muko-Muko dilepas secara paksa oleh Inggris dan semenjak itu Inderapura masuk ke dalam *afdeling* (departemen) Painan. Terakhir Inderapura tergabung ke dalam *afdeling* Balai Selasa (Asnan, 2013: 16–17; Amran, 1982: 234).

Kesultanan Inderapra harus berakhir akibat intervensi kolonialisme yang semakin kuat di wilayah tersebut. Saat ini Inderapura hanya wilayah kecil di Kecamatan Pancung Soal di Pesisir Selatan. Secara geografis sebelah utara berbatasan dengan Linggo Sari Baganti, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Basa Ampek Balai-Tapan, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Lunang Silaut. Wilayah Inderapura berupa dataran rendah dan dekat dengan pantai. Di sana juga terdapat dua sungai besar yang bermuara ke Samudera Hindia, sebagai saksi sejarah bawa Inderapura pernah dikunjungi para pedagang baik dari Nusantara maupun mancanegara.

1. Perkembangan Awal

Tapak Kesultanan Inderapura terletak di wilayah pesisir barat Sumatera, di perbatasan Sumatera Barat dan Bengkulu sekarang. Pusat kerajaannya berada di muara Sungai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Aliran Sungai Inderapura bermuara ke laut, yang juga merupakan pertemuan muara Sungai Muara Sakai dan Muara Bantaian. Pertemuan kedua muara ini disebut *muaro gadang*, yang konon pada masa sebelum Masehi menjadi pelabuhan Samudera Pesisir Barat, yang juga bisa disebut Samudera Pura. Wilayah ini menjadi bagian dari Kerajaan Air Pura. Berdasarkan sumber tradisi lisan yang berkembang di masyarakat, Kerajaan Air Pura merupakan cikal bakal Kerajaan Inderapura

yang didirikan oleh Sultan Muhammad Syah pada abad ke-9 M. Ia anak bungsu Sultan Maharaja Diraja, putra Iskandar Zulkarnain, yang berkedudukan di wilayah Kerajaan Air Pura (Asnan, 2013: 61).

Tidak diketahui secara pasti mengapa nama penguasa pertama kerajaan Inderapura menggunakan gelar sultan: Sultan Muhammad Syah. Sebagaimana diketahui gelar sultan digunakan ketika raja sudah beralih menjadi muslim dan kerajaan secara perlahan menyerap unsur-unsur Islam dan disebut kesultanan. Oleh karena itu kajian belakangan melihat bahwa Islam telah berkembang saat masih sebagai Kerajaan Aria Pura, yang kemudian berubah menjadi Kerajaan Melayu Aria Pura pada abad ke-12 di bawah pemerintahan Sultan Zatullah (Imaduddin, 2004: 13). Pendapat ini berbeda dengan pandangan sejumlah kalangan yang mengaitkan perkembangan Islam di Aria Pura dengan peralihannya menjadi Kesultanan Inderapura. Peralihan itu terjadi pada awal abad ke-16 M pada masa pemerintahan sultan ke-11 kerajaan Aira Pura, yakni Sultan Sakelab Dunia gelar Sultan Iskandar Johan Berdaulat Syah (Yunus, 2002: 84).

Sementara itu naskah *Manuskrip Inderapura* menuturkan bahwa perubahan nama Aria Pura menjadi Inderapura terjadi pada masa pemerintahan Sultan Inayat Syah (1357 M), tetapi tidak dijelaskan apakah perubahan tersebut sekaligus menjadi kesultanan. Kutipan berikut diambil dari *Manuskrip Inderapura* sebagaimana dikutip dari Asnan (2013: 62–63):

> "Maka pada suatu malam maka datanglah ninikhanda almarhum Sultan Muhammad Syah di dalam mimpi mengatakan tatkala hamba menjinjing *melatih (?) iko* negeri, puro emas hamba jatuh masuk [...] selama tidak dapat. Kiranya buah jatuh masuk air kiranya disambar anak dewa2 [...] dalam puro hamba itu ada sebuah *batu maniko (?)* dari ayah hamba Sultan Maharaja Diraja dari Sultan Syamsul Bahri kurang terbawa martabatnya oleh hamba, maka puro hamba itu disambar oleh peri disuruh oleh Sultan di lautan *nan* bernama Indrapara, kalau *cucung* (cucu, pen.) hendak menukar nama negeri tukarlah dengan nama peri itu. Maka Sultan bangun pagi2 maka dipanggil Sultan besar dan nanti menerangkan mimpi maka ditukarlah nama negeri Taluk Airpuro dengan Indrapara, yaitu nama peri yang memberi puro Sultan Muhammad Syah tatkala menjinjing *melatih (?)*itu negeri."

Terlepas dari perbedaan pandangan di atas, hal yang sangat penting untuk dicatat adalah Inderapura merupakan bagian tidak terpisahkan dari alam Minangkabau. Sistem budaya yang berlaku dalam masyarakat bersumber dari budaya Minangkabau. Hal itu bisa dilihat setidaknya dari dua hal. Pertama, dari stratifikasi sosial. Yang

ditemukan di Inderapura tidak bisa dilihat terpisah dari stratifikasi sosial yang berlaku di Minangkabau, misalnya dalam sistem suku yang mendasari kehidupan keseharian masyarakat. Masing-masing suku dikepalai oleh seorang kepala suku bergerlar *rang kayo*. Dalam setiap suku mereka mengelompokkan diri sesuai dengan jalur garis kekerabatan. Stratifikasi sosial masyarakat Inderapura dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu enam penghulu di Hulu, kelompok suku Panai, dan Sikumbang. Tanda khususnya berupa kain *ikek* (*dester*) berwarna merah, yang berarti membangun *nagari* dan menjaga stabilitas keamanan dari segala macam gangguan dan ancaman (Asnan, 2013: 30; Yunus, 2002: 152). Sementara enam penghulu di Hilir terdiri atas kelompok suku Caniago, menggunakan tanda kebanggaan kain *ikek* warna hitam, yang berarti sekalipun mengepul asap kapal perang di laut untuk menyerang negeri adat istiadat dan anak kemenakan tetap dipertahankan. Adapun delapan penghulu yang terdapat di tengah kelompok suku Melayu memiliki tanda kebanggaan kain *ikek* warna kuning, bermakna bahwa mereka mencari penyelesaian yang terjadi antara anak kemenekan. Jumlah mereka terdiri dari dua puluh penghulu, yang juga dikenal dengan "*menteri nan duo puluah*" (Asnan, 2013: 30; Yunus, 2002: 152).

Kedua, hubungan dekat Inderapura dengan Minangkabau juga dapat dilihat dari sitem pemerintahan yang diterapkan. Raja atau sultan merupakan pimpinan politik tertinggi. Di samping sebagai administrator politik ia juga berkewajiban mengatur pelaksanaan sistem adat-istiadat nagari dan pemutus akhir setiap persoalan adat yang muncul. Kaum raja atau sultan dan kaum penghulu yang dua puluh berkewajiban memegang teguh aturan adat yang sudah disepakati bersama. Mereka secara bersama memikul tanggungjawab terhadap kelangsungan hidup *nagari*. Dengan ungkapan lain sistem adat yang dijalankan di Inderapura, khususnya di daerah pantai, adalah adat *koto piliang* (*datuak katumangguangan*). Artinya, pucuk adat yang paling tinggi adalah raja atau sultan (*rajo*). Ia memberikan keputusan akhir jika dalam mufakat antarsuku dan antarpenghulu tidak dapat menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan adat. Semua unsur adat di Inderapura harus menaati keputusan raja (Asnan, 2013: 31).

2. Hubungan dengan Aceh: Tantangan dan Peluang untuk Konsolidasi Inderapura

Seperti telah disinggung sebelumnya, Kesultanan Aceh menjadi faktor penting atas perkembangan Inderapura, sementara Inderapura tidak lepas dari gerakan ekspansionis Aceh ke wilayah tersebut untuk menguasai lada dan emas yang laku di pasar internasional. Saat itu Aceh tengah tumbuh menjadi kerajaan menyusul jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 M dan pantai barat Sumatera kembali menjadi jalur utama lalu-lintas perniagaan Asia di Nusantara. Ditambah mata dagangan yang dihasilkan dan yang dicari para pedagang dari mancanegara, pantai barat Sumatera menjadi sangat strategis secara ekonomi dan politik. Dalam

kerangka inilah Aceh menjadikan Inderapura sebagai salah satu sasaran utama kebijakan ekspansi wilayah kekuasaannya. Hal ini bermula pada masa Sultan Alauddin al-Kahar (± 1537/9–1571 M). Alauddin al-Kahar dikenal sebagai "salah satu dari prajurit-prajurit Aceh yang terbesar" (Ricklefs, 2001: 49). Ia melakukan berbagai serangan, khususnya terhadap Kerajaan Johor, Portugis di Malaka, dan pantai barat Sumatera.

Di wilayah pantai barat Sumatera ekspansi Alauddin al-Kahar hanya sampai di daerah Pariaman. Di sana ia mengangkat seorang wakil dengan gelar Sultan Mughal untuk mengontrol daerah berikut hasil pertaniannya (Kathirithamby-Wells, 1969: 457). Sementara itu ia menerapkan kebijakan bersahabat dengan Inderapura. Selain letaknya yang jauh ke selatan sehingga mensyaratkan pengerahan pasukan yang sangat besar, perannya yang kian penting sebagai penghasil lada yang dipasarkan di Tiku dan Pariaman menjadi pertimbangan kebijakan Aceh. Hubungan Aceh-Inderapura bahkan kemudian dipererat dengan ikatan perkawinan. Sri Alam Firmansyah dari keluarga Sultan Maughal di Pariaman dan saudara Sultan Aceh Ali Ria'yat Syah (1568–1575 M) menikah dengan Raja Dewi, putri Sultan Munawar Syah (Raja Mamulia) dari Inderapura (Kathirithamby-Wells, 1976: 67).

Kedudukan strategis Inderapura di bidang ekonomi membuatnya berpengaruh dalam kehidupan istana di Kutaraja Aceh. Seorang hulubalang asal Inderapura ikut dalam persekutuan membunuh putra Ali Ria'yat Syah yang masih balita, sehingga melapangkan jalan bagi Sri Alam Firman Syah naik takhta pada tahun 1576 M sebagai Sultan Sri Alam. Masalah persekongkolan segera menjadi skandal politik sehingga kekuasaan Sri Alam Firman Syah hanya bertahan tiga tahun dan—ditambah sejumlah faktor lain yang membuatnya semakin tersudut,[2]—ia akhirnya disingkirkan dari takhta kerajaan pada tahun 1579 M. Meski demikian masalah penting untuk dicatat adalah naiknya Sri Alam Firman Syah merupakan wujud pentingnya kedudukan Inderapura dalam peta politik di Aceh. Pengaruh Inderapura di Kesultanan Aceh terus bertahan. Pada tahun 1586 sampai tahun 1588 M salah seorang yang masih berkaitan dengan Raja Dewi, Raja Bujang, memerintah dengan gelar Sultan Ali Ri'ayat Syah II sebelum akhirnya terbunuh oleh intrik ulama Aceh (Kathirithamby-Wells, 1976: 67–68).

Pola kebijakan Aceh terhadap Inderapura dan pantai barat Sumatera pada umumnya berubah di tangan Sultan Iskandar Muda (1607–1636 M). Motif penguasaan sumber ekonomi seperti Alauddin al-Kahar—ditambah perasaan anti-Portugis di Malaka—menjadi landasan kuat di balik ekspansi wilayah kekuasaan. Selain itu sejak sultan pendahulunya, Sultan Alauddin Ria'yat Syah al-Mukammil (1588–1604 M), menerapkan kebijakan yang menekankan keadidayaan raja atas *orang kaya*, yang sebelumnya sangat berpengaruh dalam proses politik di Kesultanan Aceh. Proses itu semakin menguat pada masa kekuasaan Iskandar

Muda. Ia melakukan kontrol sangat ketat baik di bidang politik maupun ekonomi. Oleh karena itu abad ke-17 Kerajaan Aceh menghapus *orang kaya* sebagai kekuatan eknomi di pentas politik berikut lambang-lambang kemewahan mereka berupa harta tidak bergerak, yang kesemuanya diambil dan menjadi kekayaan raja. Peran yang sebelumnya dipegang *orang kaya* pun diganti oleh kekuasaan raja. Tidak ada transaksi ekonomi tanpa melewati izin raja. Dengan menyebut sumber Inggris dan Belanda, Reid (1975: 49) mencatat adanya praktik-praktik autokrasi dengan raja tampil sebagai pemegang utama monopoli perdagangan, sehingga tidak menyediakan ruang bagi tumbuhnya pedagang Aceh.

Tidak lama setelah naik takhta Sultan Iskandar Muda segera melakukan penaklukan sejumlah wikayah, salah satu yang terpenting adalah pantai barat Sumatera. Penguasaan wilayah ini didasarkan pada pertimbangan ekonomi, yakni kemampuan menyediakan barang dagangan yang diperlukan Aceh untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Saat itu lada dicari pedagang Cina dan Gujarat dan bahkan kian dicari setelah orang Inggris dan Belanda masuk ke pasar Asia pada awal abad ke-17 M. Oleh karena itu pertama-tama Sultan Iskandar Muda menaklukkan Pahang (1618 M), Perak (1620 M), dan Kedah (1619 M), serta Langkawi untuk menguasai daerah penghasil lada di Semenanjung Malaka. Bersamaan dengan itu ia mengarahkan komoditi tersebut ke Kota Raja sehingga ia bisa menjualnya ke pedagang asing. Namun demikian tingkat kesuburan lahan menurun akibat gerakan militer Iskandar Muda. Wilayah di Semenanjung Malaka hanya menghasilkan lada dalam jumlah yang tidak memadai. Hal yang sama juga berlaku untuk daerah Pidie dan Pasai. Jumlah lada yang dihasilkan jauh di bawah target. Dalam keadaan demikian pantai barat Sumatera menjadi andalan Aceh menghasilkan lada dalam jumlah besar (Kathirithamby-Wells, 1969: 458–459; Lombard, 1986: 87–89).

Setelah berhasil menguasai daerah penghasil lada di pantai barat Sumatera Iskandar Muda segera mengambil sejumlah langkah untuk menjamin kepentingan ekomononominya. Konsisten dengan kebijakan sentralistik di bidang politik dan monopolistik di bidang ekonomi—yang disebut oleh Reid (1975) dengan istilah *royal absolutism*—Iskandar Muda pada tahun 1615 M menempatkan wakil Kerajaan Aceh di pusat produksi dan ekspor utama lada, yakni Tiku, Pariaman, dan Salida. Wakil kerajaan tersebut disebut dengan "panglima" dan bertindak sebagai gubernur untuk dan atas nama raja yang menjamin ketersediaan lada dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi monopolistik dengan baik.[3] Jika diperlukan bahkan seorang panglima dapat betindak sangat keras terhadap kemungkinan pembelotan dan pemberontakan melawan Sultan di Aceh (Kathirithamby-Wells, 1969: 460).

Dalam keadaan demikian Inderapura berada di awah ancaman kebijakan ekonomi dan politik Aceh. Aceh tidak hanya memperluas

kekuasaan di pantai barat Sumatera semakin jauh ke wilayah selatan—pada tahun 1620 M pengaruh Aceh sudah melampaui Tabing dan Kota Tengah—tetapi juga berusaha memperkuat cengkeramannya atas monopoli penjualan lada di pantai barat Sumatera melalui panglima di Tiku dan Pariaman. Hal terakhir inilah yang mengancam Kerajaan Inderapura, yang terbiasa menjual ladanya di pelabuhan di daerah utara, di Tiku dan Pariaman. Oleh karena itu, sebagai jawaban atas kebijakan Aceh, Inderapura mengembangkan bandarnya di aerah selatan, di Silebar, yang memang sudah lama digunakan untuk mengekspor lada lewat Banten.[4] Pada tahun1620-an M, sejalan peningkatan arus kedatangan pedagang Inggris dan Belanda ke Banten dan Silebar, Inderapura semakin intensif mengalihkan ekspor lada melalui pelabuhan di selatan (Kathirithamby-Wells, 1976: 68).

Selain itu Inderapura juga menerima pedagang Belanda yang berusaha membeli lada lagsung di derah penghasil. Hal itu dilakukan setelah Kapten van der Goes pada tahun 1624 M berhasil membuat kesepakatan dengan Raja Inderapura, Raja Besar, untuk melakukan pembelian langsung meski transaksi dilakukan di laut untuk menghindari terjangkit penyakit. Dalam hal ini Inderapura menolak membayar cukai pada panglima Aceh, terutama jual-beli dengan Belanda, dengan alasan mereka melakukan penjualan di laut bukan di pelabuhan. Penolakan itu memancing kemarahan penguasa Aceh. Pada tahun 1626 M Iskandar Muda diberitakan akan memperluas kontrol Aceh hingga ke Silebar, tetapi hal itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, sikap Inderapura yang menolak membayar cukai ke Aceh berlangsung hingga penguasa berikutnya, Raja Puti, sehingga membuat marah Iskandar Muda. Maka pada tahun 1633 M ia mengerahkan armadanya menyerang Inderapura. Raja Puti bersama bangsawan Inderapura dibunuh dan banyak penduduk setempat diangkut ke Kota Raja Aceh, termasuk lada dalam jumlah besar diambil sebagai rampasan (Kathirithamby-Wells, 1976: 68–69).

Sejak kejadian itu control Aceh atas Inderapura sangat ketat, seperti halnya di Tiku dan Pariaman. Seorang panglima, bernama Posandapura, ditempatkan di kerajaan tersebut. Meski demikian keadaan mulai berubah dengan berakhirnya kekuasaan Iskandar Muda dan digantikan Iskandar Tsani (1636–1641 M) dan kemudian dilanjutkan istrinya yang sekaligus putri Iskandar Muda, bergelar Sultan Tajul Alam Syafiyatuddin (1641–1675 M). Di bawah pemerintahan dua penguasa terakhir ini Aceh mengalami kemunduran dan oleh karena itu kontrol atas pantai barat Sumatera menurun. Yang terjadi kemudian adalah tekanan Belanda (VOC) terhadap kebijakan perniagaan Kesultanan Aceh. Atas permintaan VOC Iskandar Tsani membebaskan kapal dagang maskapai Belanda tersebut dari kewajiban membayar bea pajak, baik impor maupun ekspor, dan sejumlah keistiewaan dalam perdagangan lada di pantai Barat Sumatera yang sejak Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh (DasGupta, 1962: 184; Kathirithamby-

Wells, 1969: 458–459). Iskandar Tsani mengizinkan kapal Belanda bebas berlayar di wilayah perdagangan Aceh, termasuk membawa hasil lada dari barat Sumatera ke Aceh (DasGupta, 1962: 184).

Keadaan inilah yang kemudian dimanfaatkan Inderapura untuk bangkit kembali. Salah seorang bangsawan Inderapura yang selamat dari penyerangan tahun 1633 M, Muzaffar Syah, secara perlahan berhasil membangun kekuatan dan akhirnya menjadi Raja Inderapura. Di bawah kekuasaannya Inderapura berhasil melakukan konsolidasi kekuasaan menjadi kerajaan yang berdaulat.

3. Konsolidasi Kekuasaan dan Sistem Politik

Setelah Aceh mengalami kemunduran kontrol atas wilayah pantai barat Sumatera berada di tangan VOC yang sebelumnya sudah dibebaskan oleh Iskadar Tsani dan kemudian Tajul Alam Syafiyatuddin. Maka perkembangan Inderapura selanjutnya terkait dengan sikap VOC. Dalam hal ini Johan Groenewegen, Residen Aceh tahun 1659 M, memiliki peran khusus bertanggungjawab merumuskan sikap VOC atas pantai barat Sumatera, termasuk Inderapura. Berbeda dengan Aceh pada masa Iskandar Muda yang menekankan cengkeraman politik dan monopoli perdagangan, kebijakan VOC di tangan Johan Groenewegen meminimalisasi intervensi urusan kerajaan. Ia bahkkan mendorong proses penguatan kekuasaan setempat yang kohesif, yang sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan eksternal tetapi juga menciptakan suasana yang kondusif bagi perdagangan (Kathirithamby-Wells, 1976: 71).

Kebijakan VOC selanjutnya diwujudkan dalam perjanjian politik dan kerja sama dengan Kerajaan Inderapura, yang dicapai dengan penandatanganan perjanjian pada bulan Agustus 1660. Perjanjian itu berisi klausul-klausul yang sama dengan perjanjian Belanda-Aceh tahun 1659, meliputi bea yang harus dibayar dan kewajiban-kewajiban lain. Perjanjian itu disetujui dan disaksikan wakil Aceh, meski belakangan Inderapura gagal memenuhi kewajiban membayar bea cukai untuk Aceh. Oleh karena itu perjanjian lebih berfungsi sebagai sarana Inderapura menjalin hubungan diplomatik dengan Belanda dan sekaligus bermakna bahwa dominasi Aceh di pantai barat Sumatera, khususnya Inderapura, telah berakhir (Kathirithamby-Wells, 1976: 71–72).

Keadaan itu dimanfaatkan Muzaffar Syah untuk mengonsolidasikan kekuasaan. Ia tidak hanya mengembangkan kehidupan ekonomi kerajaan dengan penanaman lada sebagai sumber keuangan kerajaan, tetapi juga merumuskan sejumlah aturan terkait pengelolaan kekuasaan di dalam kerajaan. Banyak unsur peradaban dunia diserap dalam proses perumusan sistem politik, yang berkembang dan berubah dari satu masa ke masa. Kerajaan Inderapura mengalami perkembangan sistem politik, yang dapat dibagi ke dalam tiga tahap. Tahap pertama, Inderapura menggunakan sistem kerajaan lama

yang berlangsung dari abad ke-9 hingga abad ke-15 M, tahap kedua berlangsung pada masa kesultanan abad ke-16 hingga abad ke-19 M, sedangkan tahap ketiga menggunakan sistem pemerintahan ke-*regent*-an yang berlaku sejak abad ke-19 hingga abad ke-20 M.

Tahap pertama adalah tahap ketika Inderapura masih menggunakan sistem kerajaan dengan agama resmi belum Islam. Pada dasarnya sistem kerajaan sama dengan sistem kesultanan. Istilah "kesultanan" di Indonesia dimaksudkan untuk kerajaan dengan agama resmi Islam. Istilah "sultan" juga sama dengan "raja", yakni penguasa yang memerintah di daerah bersangkutan. Istilah sultan sudah digunakan sejak abad ke-12 M, yang saat itu Inderapura diperintah oleh Sultan Zatullah Syah sebagaimana tercantum dalam *Manuskrip Inderapura*. Gelar sultan menjadi baku sejak pemerintahan Sultan Iskandar Johan Berdaulatsyah pada awal abad ke-16 M. Ia juga memiliki gelar Sultan Sakelab Dunia. Penggunaan gelar sultan bertujuan untuk mendapat pengakuan kesultanan Islam yang sedang berjaya saat itu, yakni kekhalifahan Turki Usmani.

Istilah "khalifah" sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw, yang berarti jabatan tertinggi dalam pemerintahan, baik dalam urusan agama maupun urusan politik, sedangkan istilah "sultan" diperkenalkan pada masa Dinasti Abbasiyah, Bagdad. Pada masa itu sultan merupakan orang yang memimpin lembaga pemerintahan di luar wilayah pusat, Bagdad. Oleh karena luas wilayah pemerintahan Bani Abbasiyah maka urusan politik diserahkan kepada sultan. Saat KekhalifahanTurki Usmani berkuasa, istilah kesultanan digunakan oleh kerajaan Islam di Indonesia, termasuk Inderapura. Oleh karenanya istilah kesultanan digunakan Inderapura agar mendapat pengesahan dan pengakuan dari kekhalifahan Istanbul, Turki (Ali, 1997: 267–271).

Pemerintahan Kesultanan Inderapura menggunakan sistem yang sama dengan apa yang kini disebut kabinet parlementer. Kekuasaan tertinggi berada di tangan sultan yang dibantu *mangku* dengan sebutan *pemangku rajo*. Di bawahnya ada *mangkabumi* yang berfungsi sebagai perdana menteri. *Mangkabumi* dibantu dewan menteri berjumlah 20 orang, yang disebut *penghulu nan duo puluah*. Jumlah dewan menteri 20 orang bersifat mutlak, yang didasarkan pada 20 sifat wajib Allah. Jumlah tidak bisa diubah walaupun sultan sebagai poros pemerintahan sedang dalam masa pergantian. Ketetapan ini juga berlaku di dalam sumpah. Apabila sumpah dilanggar, maka si pelanggar harus siap diberi sanksi berdasarkan hukum yang bersumber pada Al-Quran (Asnan, 2013: 69–71).

Penghulu nan duo puluah terdiri atas gabungan berbagai pihak. Pihak pertama diisi oleh delapan orang di tengah, atau disebut pihak *nan salapan*. Pihak kedua dan ketiga diisi oleh enam orang di hulu dan hilir, yang disebut pihak *nan baranam*. Sebutan ini memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. Pihak *nan salapan*, atau

biasa disebut *basa nan salapan* 'besar yang delapan' merupakan kelompok yang paling dekat dengan lingkaran kekuasaan sultan. Mereka bertugas mengatur urusan internal kerajaan, sedangkan pihak *nan baranan*, disebut dengan *manti nan duobaleh* 'menteri yang duabelas', berwenang mengurus berbagai aspek di lingkungan masyarakat. Perbedaan ketiga pihak tampak pada tempat duduk dan busana yang dikenakan masing-masing ketika sedang berlangsung suatu kegiatan istana. Pihak *nan salapan* berada di tengah dan mengenakan ikat destar berwarna kuning, pihak *nan baranan* yang berada di hulu menggunakan ikat destar berwarna merah, sedangkan pihak *nan baranan* yang berada di hilir memakai ikat destar berwarna hitam (Asnan, 2013: 70).

Di samping dewan menteri 20, *mangkubumi* dibantu oleh lembaga tinggi penghulu (*rangkayo*). Dewan Menteri 20 dibantu tiga lembaga, yakni (1) panglima, yang membawahi barisan lembaga *panggagho* (*punggawa/dubalang*), (2) lembaga orang tua, dan (3) lembaga ulama (syekh dan atau labai). *Rangkayo* membawahi struktur lembaga imam-*katik* (khatib). Imam khatib bersama syekh atau *labai* membawahi dan mengurus lembaga kaum (suku-kampung), dan lembaga kaum mengurus lembaga *paruik/jurai* (anak kamanakan/rakyat).

Atas dasar penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa sistem birokrasi Inderapura dipengaruhi prinsip-prinsip Islam. Hal ini pula yang menjadi substansi ucapan sultan terakhir Inderapura, Sultan Muhammad Syah, saat dinaikkan ke kapal yang akan membawanya ke Batavia di bawah pengawalan pasukan Belanda. Berikut ucapanya tentang Kesultanan Inderapura, dikutip dari Adnan (2013: 71).

> Raja Inderapura adalah raja syarak patah tumbuh hilang berganti, hilang raja berganti raja. Beredar raja dengan syarak, berdestar syahid fisabilillah, bersatu sultan dengan rakyat, beredar sultan dengan adat, beredar sanak kemenakan dengan adat pusaka. Mengitari bumi se-petalo langit, ke bawah dalam, ke awan tinggi, pergi satu tumbuh seribu, sebanyak pasir di tepi laut, hati bagai segara air laut kan ganti tintanya, air tawar kan ganti gencunya, kan pembuat riwayat tanah alam, untuk diingat-ingatkan di kala sekarang, di kala nanti, karena syarak punya bersama, Allah Ta'ala menjadikannya.

Selain memiliki eksekutif Inderapura juga memiliki legislatif, yang disebut *Pucuk Adat*. *Pucuk Adat* terdiri atas para penghulu dan saudagar yang mewakili lembaga *Balai Kerapatan Adat Nagari* (sejenis Dewan Perwakilan Rakyat). *Pucuk Adat* bertugas membuat keputusan berdasarkan musyawarah para wakil. Walaupun demikian keputusan akhir tetap di tangan sultan, yang juga didasarkan pada hasil pertimbangan lembaga musyawarah serta pertimbangan kebiasaan tradisional (alur) demi kebaikan bersama (patut).

Sultan memegang kekuasaan kehakiman. Rakyat Inderapura percaya bahwa sultan merupakan sosok yang penuh wibawa serta mampu berlaku adil sesuai dengan ketentuan agama. Sultan Inderapura yang paling dikenal alim, taat beribadah, berkharisma, dan berlaku adil pada rakyat adalah Sultan Mohammad Arifin Syah gelar Sulthan Muhammadsyah (1840–1860 M) dan Sultan Mohammad Bakhi gelar Sultan Firmansyah, raja terakhir di Inderapura (1860–1891 M). Karena kewibawaannya yang tinggi rakyat pun memberi gelar kepada keduanya. Sultan Mohammad Arifin Syah yang dikenal kesalehan dan ketaatan dalam beribadah diberi gelar *Tuanku Sembah*, yang berarti 'Tuanku yang Disembah'. Adapun Sultan Mohammad Bakhi yang dikenal kedekatannya dengan rakyat diberi gelar *Tuanku Balindung*, yang berarti 'Tuanku Tempat Berlindung'.

Selain kekuasaan yudikatif sultan juga memiliki wewenang dalam urusan kerja sama dengan pihak di luar kerajaan. Berbagai kerja sama antara lain bidang politik, ekonomi, dan perdagangan. Kebesaran Kesultanan Inderapura sebagai pemegang kunci pembuka rahasia urat tunggang perjalanan sejarah raja-raja Kerajaan Melayu Nusantara, Śrîwijaya, Dharmmaśraya, Pariangan, Minangkabau, Pagaruyung, dan Aceh. Berikut tabel struktur dan mekanisme pemerintah Kesultanan Inderapura, dikutip dar Asnan (2013: 80).

Struktur dan Mekanisme Pemerintah Kesultanan Inderapura

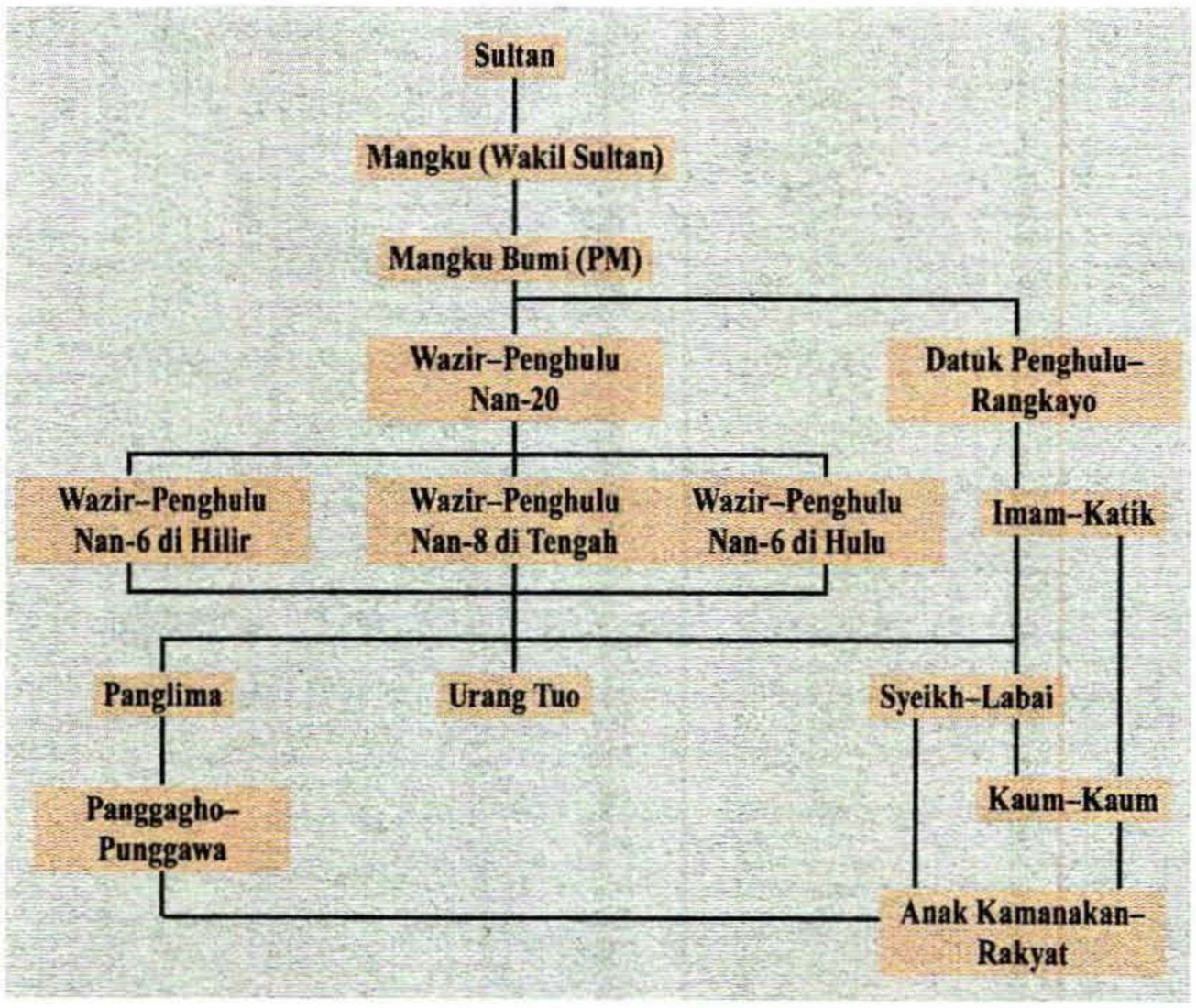

Pada pertengahan abad ke-16 M Inderapura melakukan konsolidasi wilayah, likuidasi pusat kekuasaan, serta memperkuat wilayah perbatasan. Dalam hal likuidasi, pusat kekuasaan dipindahkan dari Pasir Ganting ke Pelokan Hilir. Raja-raja yang mendiami istana baru ini Sultan Mandaro Putih (makamnya berada di Pelokan Mudik); Sultan Marah Muhammad Ali Akbar Sultan Muhammadsyah; Inayatsyah (1640 M); dan Sultan Sulaiman († 1675, makamnya di hutan). Berdasar keterangan lain raja-raja sebelumnya adalah Sultan

Baridinsyah (1520 M); Dang Tuanku (1520–1524 M), beristri Puti Bungsu yang makamnya di Bukit Selasih, Batang Kapas; dan Usmansyah Sultan Firmansyah, dan lainnya (Asnan, 2013: 76).

Sejak tahun 1513 hingga tahun 1695 M Inderapura mengalami pergantian sultan 33 kali. Pemilihan sultan melalui beberapa tahapan, meliputi syarat dan kriteria calon sultan, kampanye calon, pemilihan sultan, dan pelantikan sultan. Syarat dan kriteria untuk menjadi sultan terbagi ke dalam beberapa hal, yakni memiliki garis matrilineal (ibu) dan berjenis kelamin laki-laki. Berbeda dengan tradisi di Kerajaan Timur-Tengah yang pada umumnya garis keturunan berasal dari ayah (patrilineal), budaya matrilineal yang berlaku di Sumatera Barat diterapkan di Inderapura. Apabila syarat matrilineal tidak terpenuhi, maka calon sultan diambil dari calon yang berasal dari Kerajaan Pagaruyung, Kerajaan Sapiah Balahan, atau Kuduang Karatan lain di Tanah Melayu. Apabila dari ranah-ranah tersebut tidak ada calon laki-laki, calon sultan bisa diambil dari kalangan perempuan yang ditetapkan terlebih dulu dari musyawarah/mufakat (Asnan, dkk. 2013: 77).

Berlakunya garis keturunan matrilineal sudah berlangsung sejak awal Kerajaan Inderapura berdiri. Sultan Khairullah (Cindua Mato), misalnya, setelah meninggal digantikan oleh anaknya, Tuanku Berdarah Putih. Ia anak hasil perkawinan Cindua Mato dengan seorang Putri Inderapura, Tuanku Rajo Tuo. Kisah ini termaktub dalam *Manuskrip Inderapura*, yang dikutip dari Asnan (2013: 78), sebagai berikut:

> "Setelah berpulang Sri Sultan Inayah Syah maka Sultan diganti oleh (anaknya-pen) Sultan Muhammad Syah zaman Sultan penghulu2 yaitu (Penghulu-pen) Besar yang Salapan, Manti yang Duabelas… diberi berpakaian *securing gunting (?)* ikek kata orang kiri karena penghulu2 dari Sungai Limau dan dari Dusun Tapan dan dari negeri Padang Nunang sekali setahun datang ke Indrapuro menjunjung daulat yaitu nobat namanya."
>
> Pergantian kekuasaan terjadi apabila sultan mangkat (meninggal), kudeta, atau terbunuh. Sultan Inderapura yang terbunuh misalnya Sultan Sulaiman. Ia dibunuh oleh rakyatnya, dan kemudian digantikan Sultan Mazafarsyah asal Sungai Paku.

Tahapan kedua pemilihan sultan adalah kampanye calon. Yang dimaksud "kampanye" adalah melihat perilaku calon sultan dalam pergaulan, baik di lingkungan istana maupun dalam masyarakat. Apabila raja meninggal atau mengundurkan diri maka istana langsung mengumumkan calon sultan sebagai penerus. Sebagai contoh ketika Sultan Alin mengundurkan diri dengan alasan tak suka disembah rakyat. Sultan pun digantikan oleh saudaranya, Sultan Tunggal Alam Kadim yang bergelar Sultan Syah.

Setelah kampanye, kemudian diadakan pemilihan. Pada umumnya pemilihan dilaksanakan secara mufakat, atau sultan telah ditetapkan oleh istana. Sultan baru dinobatkan dan dilantik oleh istana begitu sultan lama meninggal (Asnan, 2013: 79).

4. Islam dalam Kesultanan Inderapura

Sumatera merupakan wilayah yang strategis untuk kegiatan perniagaan. Samudera Hindia menjadi faktor penting bagi para pedagang dari berbagai negara untuk mendatangi Sumatera sebagai sarana pelayaran. Faktor lain yang menjadikan Sumatera menarik pedagang datang adalah adanya hasil bumi lada dan sumber daya alam emas. Oleh karenanya Sumatera dalam bahasa Sanskerta disebut *Swarnadwipa*, yang berarti "pulau emas".

Masuknya Islam ke Sumatera berkait dengan kedatangan pedagang Arab pada abad ke-9 M. Islam disyiarkan oleh pedagang dari Arab dan Gujarat. Naskah *Muballigul Islam* (*MI*), yang ditulis oleh Imam Maulana Abdul Manaf, menceritakan banyaknya pedagang Arab di pesisir barat Sumatera. Naskah ini juga berkisah tentang seorang pengelana Arab yang terdampar di pesisir barat Sumatera, yang kemudian menetap sekaligus menyebarkan ajaran Islam di sana. Kutipan berikut berasal dari *MI*, yang dikutip dari Asnan (2013: 59–80):

> "... kira-kira dalam tahun 580 Hijriah terpisahlah seorang Arab yang karam dalam perjalanannya atau pelayarannya untuk berniaga ke negeri timur ini. Dia terdampar dekat muara sungai Arau yang waktu itu belum dihuni oleh manusia, malahan yang ada hanya padang lalang dan duri di sela-sela oleh rawa-rawa. Di seberang sungai itu agak menjorok ke laut dan dinamai orang gunung Monyet, di situ banyak kera dan monyet. Setelah lepas lelahnya berjalan-jalanlah dia menengok kalau-kalau ada kampung orang yang dekat di situ. Di dalam dia berpikir-pikir di manalah kampung yang dihuni manusia, maka hanyutlah beberapa dahan kayu yang baharu dipancung orang. Melihat dahan-dahan kayu yang hanyut itu yakinlah hatinya bahwa di udik sungai itu pasti ada kampung orang, maka dibulatkannyalah hatinya hendak memudiki batang air itu dengan susah payah, sebab melalui belukar yang berduri-duri. Akhirnya bertemulah olehnya beberapa buah *dangau* [=pondok, pen.] dekat batang durian besar di pinggir sungai itu, maka pergilah orang Arab itu menemui orang *dangau* yang di bawah batang durian itu.
>
> Setelah beberapa bulan Sayyid Abdullah tingga di situ yang siangnya membantu orang *dangau* tempat dia tinggal itu bekerja tani, maka diberinyalah orang *dangau*

itu penerangan agama Islam. Akhirnya terpahamlah oleh orang *dangau* itu akan penerangan Sayyid Abdullah, hingga seisi *dangau* itu memeluk agama Islam. Oleh orang *dangau* itu disampaikannya pula kepada kawan-kawannya pada *dangau* yang lain bahwa orang Arab itu membawa agama baru, agama yang benar bernama agama Islam. Oleh karena orang *dangau* tempat tinggal Sayyid Abdullah yang menjadi kepala pada dusun itu, dia yang menganjurkan memasuki agama Islam kepada seluruh penduduk dusun, maka memeluk Islamlah seluruh penduduk dusun itu." (Naskah *MI*, hlm. 76, Buku hlm. 58–59)

Kutipan di atas menjadi gambaran bahwa orang Arab menjadi penyebar agama Islam di wilayah pantai barat Sumatera, tak terkecuali Inderapura. Penerapan unsur lain Islam di Inderapura adalah penggunaan istilah sultan selaku raja dan wazir selaku perdana menteri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sistem pemerintahan Inderapura yang pertama adalah sistem kerajaan. Seiring berjalannya waktu Inderapura mengubah sistem dari kerajaan menjadi kesultanan dengan alasan ingin mendapatkan pengakuan dari Kekhalifahan Turki Usmani. Demikian pun Dewan Menteri yang berjumlah 20 orang merupakan penerapan Islam dalam sistem pemerintahan. Jumlah 20 terilhami 20 sifat wajib Allah swt sebagai Tuhan bagi umat Islam.

Ajaran Islam dilaksanakan lewat kebijakan dan sistem pemerintahan, mulai dari tata cara pemerintahan, hukum, adat istiadat, hingga pewaris kerajaan. Sebagaimana telah dikutipkan di atas, Sultan sebagai kepala pemerintahan harus menjadi seorang yang berpegang teguh dengan ajaran hukum Islam. Kain destar sebagai lambang *syahid fi sabilillah* mengartikan bahwa sultan harus berjuang di jalan Allah dengan cara melebur diri bersama masyarakat. Sultan mesti bertindak sesuai dengan adat yang tertulis dalam undang-undang. Sultan harus menjalani kehidupan damai, aman, tenteram, dan sejahtera. Apabila sultan hilang, tradisi tetap akan tumbuh lagi generasi yang lebih banyak tentunya.

Ajaran Islam juga mengatur tata kehidupan masyarakat. Sultan dan wakil rakyat harus berpedoman pada sumpah setelah pengukuhan sebagai lembaga eksekutif. Naskah *MIP* menuliskan sumpah tersebut sebagai berikut:

> "Raja atau sultan pegang kuat kunci adat, wazir atau penghulu pegang kuat peti adat, isinya sama-sama dijaga sultan, seboleh-bolehnya, sehabis-habisnya, kuat menguatkan segala adat, wazir penghulu-penghulunya sampai ke tanah tigo lurah. Dan penghulu-penghulu mesti pegang teguh adat dan persusunan sultan, persusunan nagari sama-sama dikuatkan yang telah

> disusun oleh nenek moyang. Segala sesuatu yang akan diperbuat diambil dengan kato ber-iyo. Sultan menjadi syarat, penghulu menjadi sifat, tidak bercerai keduanya. Nagari sama-sama diperintah, kaum sama-sama dijaga, sama-sama mencari jalan kebaikan dan keuntungan" (Asnan, 2013: 97).

Usai mengucapkan sumpah mereka membaca surat Yasin, Alfatihah, dan doa. Doa dibaca oleh orang *"siak"* dari Lunang, yakni Malin Sutan. Barangsiapa melanggar sumpah ini akan dikutuk Allah, rasul, dimakan kalimat Allah, dan dimakan *biso kawi* alam Minangkabau.

Sultan Inderapura melaksanakan perintah membangun mesjid di setiap *nagari* di wilayah kesultanan. Mesjid menjadi pusat keagamaan, tempat bertemu sultan dengan rakyat, dan menjadi tempat beribadah bagi masyarakat Inderapura. Kesultanan Inderapura juga memiliki mushaf Alquran yang ditulis oleh penulis kaligrafi istana. Sampai saat ini mushaf tersebut masih tersimpan di rumah pewaris sah Kesultanan Inderapura. Di samping itu Kesultanan Inderapura juga menyelenggarakan peribadatan. Sultan menugaskan imam dan khatib sebagai tempat sultan dan masyarakat bisa mendiskusikan perihal apa pun berkait urusan agama. Para imam dan khatib ditempatkan di setiap *nagari* dalam wilayah Kesultanan Inderapura. Hari-hari raya, seperti Idulfitri dan Iduladha, dilakyanakan dan dirayakan di Inderapura. Dalam suasana demikian sultan bersama para pejabat menyelenggarakan silaturahmi dan membaur dengan masyarakat. Mereka juga mengadakan takbir akbar, mulai dari malam hingga menjelang pagi disertai alat pengiring untuk memeriahkan suasana.

5. Inderapura dalam Jaringan Perdagangan

Kontak perdagangan yang terjadi di kawasan barat Sumatera terdiri atas tiga pihak, yakni (1) perdagangan antarpedagang sesama kota di pesisir barat Sumatera, (2) perdagangan antara pedagang kota di pesisir dan daerah pedalaman, dan (3) perdagangan pesisir dengan dunia luar; yang dimaksud dunia luar adalah pihak yang berasal dari luar Sumatera, baik nusantara maupun pedagang internasional.

Sejarah mencatat perdagangan di bagian barat Sumatera cenderung diisi oleh pihak luar. Pedagang yang berasal dari Arab dan India menjadi pihak pertama yang menjalin hubungan perdagangan. Barang seperti kapur barus dan kemenyan menjadi komoditi paling dicari di kawasan Sumatera. Kedua barang ini dipergunakan untuk berbagai upacara kepercayaan dan kehidupan sehari-hari bangsa Arab dan India, sehingga mempunyai nilai jual tinggi untuk diperjualbelikan di daerah asal. Kegiatan perdagangan kemudian berkembang hingga kedatangan bangsa Eropa. Saat itu kawasan barat Sumatera juga menjalin hubungan dengan Pulau Jawa. Dari sana gerbang masuk ke wilayah

Sumatera menjadi terbuka. Mata dagangan dari bagian barat Sumatera dan Pulau Jawa adalah emas dan kuda.

Pihak luar yang juga menjalin hubungan dagang dengan pesisir barat Sumatera adalah Aceh. Saat itu Aceh tumbuh menjadi pusat politik dan ekonomi terpenting di bagian utara Sumatera sekaligus di pesisir barat Sumatera. Pada masa ini kegiatan perdagangan berpusat di Kutaraja, ibukota Kerajaan Aceh. Aceh pun memonopoli semua perdagangan yang masuk ke wilayah barat Sumatera. Semua komoditi perdagangan yang dihasilkan pantai barat Sumatera harus dibawa ke Kutaraja.

Pola perdagangan dengan sistem terpusat dan monopoli dilanjutkan oleh Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC). Pada abad ke-17 dan abad ke-18 M VOC berhasil menjelajahi sebagian besar kawasan barat Sumatera. Mereka menjadikan Pulau Cingkuak dan Padang sebagai pusat pengumpulan berbagai barang dagangan. Padang juga menjadi pusat kegiatan perkapalan dan pelayaran di bagian barat Sumatera. Mereka membangun pelabuhan terbesar dan terlengkap sebagai persinggahan kapal-kapal Belanda untuk melakukan kontak perdagangan, baik ke arah Sumatera maupun ke Belanda.

Selain pihak luar, jaringan perdagangan juga melibatkan kota yang berada di pesisir barat Sumatera dengan kawasan yang ada di bagian daratan/pedalaman Sumatera. Kegiatan niaga di Kota Barus dan Singkel, umpamanya, berkembang pesat karena ada hubungan dagang dengan kawasan Batak pedalaman. Para pedagang dari Batak berperan memasok berbagai barang untuk diperjualbelikan dengan pihak luar. Sebagai contoh kapur barus dan kemenyan berasal dari pedagang Batak. Untuk melakukan hubungan dagang kedua pihak menggunakan sungai sebagai jalur pengiriman barang. Sungai yang digunakan meliputi Sungai Singkel (yang di hulu terdiri atas Sungai Simpang Kiri dan Sungai Simpang Kanan) dan Aek Batu Grigis (yang di hulu terdiri atas Aek Arion dan Aek Sirahar).

Hubungan dengan daerah pedalaman juga ramai di kota Natal. Barang dagangan dibawa oleh pedagang yang berasal dari daerah pedalaman Natal (daerah Mandailing). Barang yang diperjualbelikan berupa emas, gula, dan kopi. Selain menggunakan sungai sebagai jalur distribusi, pedagang juga memanfaatkan jalan setapak.

Jalinan perdagangan dengan daerah pedalaman juga terjadi di kota bandar Air Bangis, Sasak, Tiku, Pariaman, Koto Tangah, Padang, dan Inderapura. Daerah pedalaman Ophir, Talu, dan Rao memasok berbagai jenis barang dagangan ke kota bandar Air Bangis. Kota bandar Sasak dipasok oleh daerah pedalaman Ladang Panjang, Bonjol, dan Lubuk Sikaping. Kota bandar Tiku dipasok oleh daerah pedalaman Maninjau dan Agam. Adapun daerah pedalaman yang memasok kota bandar Pariaman, Koto Tangah, dan Padang adalah daerah pedalaman Tanah Datar dan Solok.

Berbeda dengan kawasan di utara (Singkel, Barus, dan Natal), hubungan antara Air Bangis, Sasak, Tiku, Pariaman, Koto Tangah, dan Padang dengan daerah pedalaman lebih bertumpu pada jalan setapak. Saat Belanda memperluas kekuasaan hingga ke wilayah pedalaman Sumatera, mereka mengubah jalan setapak menjadi jalan raya dengan tujuan agar perdagangan dapat dilalukan dengan kendaraan bermotor dan bukan hanya dengan pedati (Asnan, 2013: 37–39)

Perdagangan di kawasan barat Sumatera memang dipengaruhi faktor alam. Secara geografis wilayah ini dilintasi garis khatulistiwa, sehingga berpengaruh pada pergerakan arus laut dan arah angin. Pergerakan arus laut dan arah angin memiliki dua pola. Pola pertama arus laut bergerak dari tenggara menuju barat laut pada bulan Desember, Januari, dan Februari. Pola kedua arus laut bergerak dari barat laut ke tenggara terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Arah angin yang bergerak dari barat laut ke tenggara terjadi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan arah angin yang bergerak dari tenggara menuju barat laut terjadi pada Juli dan Agustus. Pergerakan angin dan arus laut yang searah ini menjadikan arus perdagangan di Sumatera, termasuk Inderapura, diramaikan oleh pedagang Asia dan Eropa (Asnan, 2013: 42–44).

Inderapura memanfaatkan keadaan tersebut. Kerajaan ini memiliki kekayaan sumber daya alam berupa emas dan hasil bumi lada hitam. Emas Inderapura diperoleh dari kawasan sungai dan hasil penambangan di kawasan Kerinci. Pasokan emas di Inderapura memang tidak terlalu banyak, namun masih dapat diandalkan karena harganya mahal. Jual-beli emas menjadi perdagangan yang bergengsi karena bernilai tinggi (Asnan, 2013: 45–46)

Awalnya emas Inderapura dijual kepada para saudagar yang berasal dari Pulau Jawa. Saudagar Jawa dan Cina yang berangkat dari Banten menjadi pembeli utama emas Inderapura. Tujuan mereka sebenarnya bukan hanya Inderapura, tetapi juga mencari emas lain yang ada di Sumatera, baik di wilayah barat maupun di wilayah selatan. Walaupun demikian para saudagar tersebut membeli emas dengan jumlah yang relatif sedikit. Pola perdagangan emas ini kemudian menjalar hingga kawasan selatan Sumatera.

Pasokan emas yang ada di Inderapura pun menarik perhatian pedagang Eropa. Saat Portugis menduduki Malaka pada tahun 1518 M mereka mengirim armada ke kawasan barat Sumatera dalam rangka mencari emas, namun mereka hanya mendapat emas dengan jumlah relatif sedikit. Begitu juga dengan Prancis. Pada tahun 1529 M mereka juga mengirim armada untuk mencari emas. Prancis berhasil mendapat emas dari Inderapura.

Lada hitam memang tumbuh di kawasan barat Sumatera, mulai dari utara Pasaman (kawasan sekitar Sungai Masang dan Batang

Pasaman) hingga daerah sekitar Bayang dan Inderapura di selatan. Daerah yang paling cocok untuk lada adalah wilayah yang berada di tepi sungai. Dalam hal ini Inderapura yang memiliki banyak sungai pun menanam dan memasok lada hitam. Sama seperti emas, lada yang dihasilkan Inderapura hanya sedikit. Lada memang menjadi mata dagangan yang dicari sejak abad ke-16 hingga abad ke-18 M. Semula lada dicari oleh para pedagang dari India dan China, namun kemudian permintaan lada juga datang dari saudagar Eropa. Lada menjadi barang utama dalam perdagangan, jauh sebelum permintaan hasil bumi seperti gula, kopi, dan teh.

Jual-beli lada menggunakan satuan bahar. Besaran satuan bahar berubah dari waktu ke waktu. Sebelum tahun 1667 satu bahar setara dengan tiga pikul karung, setara dengan 375 pon, setara dengan 150 kati Barus, 200 kati Melayu, dan 300 kati China. Setelah tahun 1667 satu bahar setara dengan tiga pikul, setara dengan 375 pon, setara dengan 165 kati Barus, setara dengan 220 kati Melayu, setara dengan 330 kati China, dan setara dengan 412 ½ pon (Asnan, 2013: 49–50).

Pada awalnya kegiatan perdagangan di Inderapura berlangsung dengan sistem perdagangan bebas. Hal ini terbukti ketika kapal Prancis berlabuh di pantai Inderapura dan diizinkan melakukan jual beli. Para saudagar dari Banten (baik saudagar Jawa atau China) serta saudagar dari negeri-negeri di bagian selatan dapat datang dan bertransaksi dengan leluasa di Inderapura.

Pola transaksi di Inderapura berubah saat Aceh menduduki kerajaan tersebut. Aceh mengalihkan semua jual-beli ke Kutaraja, ibukota Kerajaan Aceh. Saat itu Aceh memang menjadi penguasa kawasan barat pantai Sumatera, sehingga semua perdagangan dikontrol dan dimonopoli oleh Aceh. Dari sinilah konflik di Kerajaan Inderapura dimulai.

6. Inderapura dalam Pusaran Konflik

Pada awal abad ke-17 Inderapura mengalami masa kejayaan. Faktor utama kejayaan Inderapura ditentukan oleh pelabuhannya yang menjadi pusat perdagangan dunia. Selain itu Inderapura juga menjadi pusat pemberangkatan haji di wilayah pantai barat Sumatera. Hal ini terjadi karena saat Portugis menguasai jalur pelayaran di Selat Malaka, Belanda mengalihkan perjalanannya ke pantai barat Sumatera. Malaka yang pada awalnya merupakan jalur embarkasi haji, saat itu ditutup dan dialihkan melalui pantai barat Sumatera. Semua kegiatan pelayaran, baik perdagangan maupun pemberangkatan haji ke Mekkah, dialihkan melalui Samudera Hindia. Perubahan tersebut mengukuhkan jati diri Inderapura sebagai raja syara di samping Tapan (Basa 4 Balai), Raja Adat, dan Lunang sebagai Raja Batin (Asnan, 2013: 82).

Pada tahun 1550 M Sultan Usmansyah dengan gelar Sultan Firmansyah memperkuat kekuasaan wilayah Inderapura. Pada masa itu banyak wilayah Inderapura mengalami sengketa wilayah. Inderapura kemudian menetapkan batas wilayah. Sebelah utara dengan Airbangis-Batang Toru (Batak), di sebelah selatan ada Taratak Air Hitam Muara Ketaun, di timur ada *Durian Ditakuak Rajo, nibuang balantak mudik lingkaran Tanjung Simeledu* (Sepadan Jambi), dan di barat laut berupa *saleba ombak badebu* (seluas deburan ombak di pantai barat). Dengan cakupan wilayah tersebut Inderpura seolah menjadi penguasa di wilayah pantai barat Sumatera; padahal semula Inderapura dianggap sebagai kerajaan *sapiah* yang merupakan bagian Kerajaan Pagaruyung. Hal ini pun mengilhami kerajaan *sapiah* lain yang ada di Minangkabau.

Kesultanan Inderapura juga memperkuat pemerintahan melalui kerjasama dengan wilayah lain di Sumatera Barat dengan mengadakan perkawinan antarketurunan kerajaan. Kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan hubungan kekerabatan, terutama geopolitik. Sebagai contoh pada tahun 1566 M berlangsung perkawinan Puti Ambar Sarifah (saudara sebapak dengan Sultan Usmansyah gelar Sultan Firmansyah) dengan Raja Banten Sultan Hasanuddin. Puti Ambar Syarifah kemudian diboyong ke Serang.

Dengan batas wilayah yang jelas, hubungan perkawinan antaranak raja, serta pelabuhan sebagai pusat perdagangan dan pemberangkatan haji maka Inderapura pun mencapai masa kejayaan pada tahun 1600-an M. Sayangnya mulai terjadi pertikaian saat Belanda masuk ke Inderapura pada tanggal 20 Maret 1602 dengan tujuan mematahkan dominasi Aceh dan Inggris. Saat itu Aceh dan Inggris memang menjadi penguasa perdagangan di wilayah Inderapura. Belanda berhasil menyingkirkan Inggris yang sudah melakukan monopoli perdagangan lada selama dua tahun. Sejak saat itu pula Inggris dilarang melakukan kegiatan perdagangan di Inderapura.

Sementara itu Aceh melawan dengan menempatkan wakilnya di Inderapura pada tahun 1625 hingga tahun 1635 M. Namun demikian usaha Aceh sia-sia karena terjebak dalam pertikaian kepentingan antara Belanda dan Inggris untuk menguasai perdagangan lada. Pada tahun 1632 M pengaruh Aceh di Inderapura melemah. Hal itu dimanfaatkan Belanda untuk menguasai perdagangan lada.

Belanda kemudian melakukan kebijakan monopoli perdagangan lada. Pada tahun 1644 M Belanda mengeluarkan maklumat untuk memungut pajak lada. Setiap 1.200 bahar lada harus dikeluarkan satu bahar sebagai pajak, yang semula antara 300 dan 330 kati. Meskipun demikian Aceh tetap melakukan perdagangan ilegal dan menolak membayar pajak kepada Belanda. Sikap Aceh mendorong Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada tahun 1656 M. Kapal-kapal Inggris dan Aceh yang berlabuh di Inderapura hancur lebur ditembaki pasukan Belanda. Pada tahun 1659 M Sultan Aceh

Ratu Taj ul-Alam dan VOC Belanda mengadakan perjanjian damai. Aceh harus membayar denda 50 ribu real kepada Belanda. Sejak saat itu Belanda menjadi penguasa di kawasan barat pantai Sumatera (Asnan, 2013: 85–87)

Pada tahun 1660 M giliran Inderapura masuk ke meja perundingan damai di Sungai Bungin (Batangkapas). Perundingan membahas perdagangan lada di Inderapura. Meskipun demikian Aceh dan Inggris masih bisa melakukan perdagangan gelap melalui Pelabuhan Inderapura. Pada tahun 1602 M Belanda membangun loji VOC untuk memperkuat jaringan perdagangan. Loji VOC dibangun di Pulau Cingkuk, yang kemudian disebut sebagai Sandiwara Batangkape atau bersandiwara dengan Belanda dan Aceh.

Inderapura kembali menjalankan aksi lewat Perjanjian Painan (*Painansch Contract*) yang ditandatangani pada tanggal 6 Juli 1663. Perjanjian tersebut berisi ajakan Inderapura kepada Belanda mengusir Aceh di wilayah Inderapura, Tiku, dan Padang. Atas izin Raja Inderapura Muhammadsyah pada tahun 1664 M Belanda mendirikan loji VOC di Inderapura (Asnan, 2013: 87–88)

Akibat pertikaian perdagangan lada ancaman terhadap Inderapura justru semakin tinggi. Perselisihan itu memancing wilayah-wilayah *nagari* bawahan Inderapura memberontak. Pada tahun 1682 M rakyat Air Haji memberontak, yang kemudian dikenal dengan nama Perang Air Haji dan Inderapura. Pertikaian diawali perselisihan batas wilayah dan bermuara pada monopoli lada. Perseteruan meningkat ketika muncul kembali pertikaian antara Inggris dan Belanda yang sebelumnya mereda. Pada bulan Juni 1684 Inggris mendirikan loji di Inderapura, yang secara tidak langsung menghadap ke loji VOC. Meskipun demikian Belanda menahan diri dan tidak terpancing sikap Inggris.

Pada tahun 1985 M Belanda mengajukan perundingan atas usul Pariaman. Namun usulan itu justru menyulut kemarahan Belanda karena mengetahui Raja Ibrahim (bekas penghulu Pariaman tahun 1976) ternyata sudah pergi ke Inderapura dan melakukan hubungan dagang dengan Inggris. Belanda pun melancarkan adu domba kepada rakyat Inderapura dengan tujuan agar mereka ikut memerangi Inggris. Oleh karena itu kemudian terjadi perang saudara antara rakyat yang memihak Belanda melawan rakyat yang memihak Inggris.

Untuk menyelesaikan pertikaian diadakanlah perundingan antara Raja Minangkabau Sultan Abdul Jalil Saruaso dan pihak Inderapura. Perundingan menghasilkan keputusan bahwa Belanda wajib meminta izin kepada Inggris untuk perdagangan lada di Inderapura. Keputusan itu membuat Belanda marah besar. Belanda kemudian melancarkan serangan untuk memusnahkan semua lada di Inderapura. Tindakan itu mengakibatkan perekonomian

Inderapura lumpuh, sebab laut dan lada menjadi unsur utama perkonomian Inderapura. Sementara itu perseteruan Inggis dengan Belanda tetap berlangsung karena British East India Company (EIC) berhasil mendirikan pusat perdagangan lada yang baru di wilayah Selebar (Bengkulu) yang saat itu masih menjadi wilayah Kesultanan Inderapura. Selain di Bengkulu, Inggris juga mendirikan Kantor Perwakilan *Settlement* di Majunto dan Taluk. Belanda tidak tinggal diam. Mereka menghasut Sultan Banten agar sebagian Selebar diserahkan kepada Inderapura. Namun hasutan ini tak berpengaruh karena hubungan Inderapura dengan Banten sudah baik sejak adanya perkawinan antarpihak kerajaan.

Belanda melancarkan aksi dengan cara menghasut rakyat Inderapura agar kembali memerangi Inggris. Hasutan pun berhasil. Mereka menyerang kantor Inggris pada bulan Agustus 1687. Korban banyak berjatuhan, terutama di pihak Inggris. Peralatan perang mereka, seperti meriam, dirampas oleh rakyat Inderapura. Inggris membalas dengan mengirim bala bantuan lima kapal dari Eropa. Selain itu rakyat Inderapura juga menyerang kekuasaan Sri Ahmadsyah, calon Raja Pagaruyung yang sebelumnya memihak kepada Inggris.

7. Kesultanan Berakhir

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa kontrol Aceh atas wilayah pantai barat Sumatera semakin lemah di bawah pengganti Iskandar Muda, Sultan Iskandar Tsani, dan terus melemah di bawah pemerintahan Ratu Tajul Alam Syafiatuddin Syah. Pada masa itu pengaruh Aceh di Inderapura digantikan Belanda (VOC). Meski sempat memberi ruang bagi konsolidasi kekuasaan di bawah Muzaffar Syah, tetapi muncul pertikaian di dalam istana yang mengundang campur tangan VOC.

Dominasi VOC bermula ketika Sultan Muhammad Syah, yang diangkat Muzaffar Syah sebagai sultan melalui sistem patrilineal, meminta bantuan Belanda untuk memadamkan pemberontakan Raja Adil di Inderapura. Pemberontakan tersebut terjadi pada tahun 1662 M atas dasar tuntutan Raja Adil—anak tertua saudara perempuan Muzaffar Syah—yang merasa lebih berhak atas takhta kerajaan berdasarkan sistem matrilineal. Sultan Muhammamd Syah bersama keluarga dan kerabatnya menjalin hubungan dengan Belanda di Salida untuk menghadapi pemberontakan tersebut. Mansur Syah, putra tertua Sultan Muhammamd Syah, dikirim ke Batavia untuk menandatangani perjanjian yang disepakati tahun 1663 M yang memberi hak monopoli pembelian lada dan hak pengerjaan tambang emas di Inderapura kepada VOC. Pada bulan Oktober 1663 pemerintahan Inderapura kembali pulih dan Sultan Inderapura mengakui Raja Adil sebagai wakilnya yang berkedudukan di Manjuto (Kathirithamby-Wells, 1976: 74).

Pada tahun 1691 M pemerintahan Sultan Muhammad Syah berakhir dan digantikan anaknya, Sultan Mansur Syah (1691–1696 M).

Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan sultan baru semakin memuncak. Mereka menolak kebijakan atas cukai yang tinggi serta dominasi monopoli VOC. Pada tahun 1696 Sultan Mansur Syah meninggal dunia dan digantikan oleh Raja Pesisir. Oleh karena sultan baru berumur 6 tahun pemerintahannya berada di bawah perwalian neneknya dan dua puluh orang menteri (Kathirthamby-Wells, 1976: 79). Dalam keadaan demikian Inderapura semakin lemah menghapai berbagai persoalan politik yang melibatkan kekuatan Belanda dan Inggris. Gerakan membebaskan diri dari Inderapura pun terus bermunculan. Dengan bantuan Inggris, daerah-daerah yang semula masuk ke dalam wilayah kesultanan Inderapura, seperti Mukomuko, Banta, Seblat, dan Ketaun (wilayah Anak Sungai) lepas. Mereka memproklamirkan kemerdekaan dan mendirikan kesultanan baru bernama Kerajaan Anak Sungai dengan Sultan Gelomatsyah sebagai penguasa. Sultan Inderapura tidak dapat membendung arus perpecahan tersebut (Asnan, 2013: 91–92). Sejak saat itu keberadaan Kesultanan Inderapura terus menurun di bawah cengkeraman Belanda.

(Endnotes)

1 Nama Inderapura terdapat dalam beberapa wilayah di Sumatera. Di Provinsi Riau sekarang, contohnya, terdapat nama Sri Siak Inderapura. Nama Inderapura juga terdapat di wilayah Sumatera Utara. Selain itu di Provinsi Aceh juga ada daerah yang bernama Indrapuri, bahkan Negeri Pahang di Malaysia dulu memiliki wilayah bernama Inderapura.

2 Selain itu Sri Alam Firman Syah juga dikenal sebagai administrator yang lemah dan menyuaki adu ayam yang dibenci ulama. Belum lagi istrinya, Raja Dewi, dinilai tidak cakap duduk sebagai istri raja. Akibatnya sejumlah kelompok sosial di Kerajaan Aceh, termasuk kaum ulama, menghendaki ia turun dari kedudukannya sebagai Sultan Aceh. Lihat Kathirithaby-Wells (1976: 67–68), juga Zainuddin (1961: 399), serta Iskandar (1958: 96).

3 Dalam hal ini raja menetapkan 15% dari komoditi yang diproduksi (lada dan emas) sebagai upeti untuk Iskandar Muda. Sisanya dijual tetapi dengan harga yang ditentuan oleh Sultan (Kathirithamy-Wells, 1969: 460).

4 Penting dicatat bahwa bandar Inderapura tidak bisa berfungsi efektif untuk transaksi penjualan lada karena sangat kotor dan tidak sehat, menjadi sarang penyakit yang bias menjangkiti mereka yang datang, lebih-lebih pedagang Eropa dan Asia Barat (Kathirithamby-Wells, 1976: 65).

— 13 —

Kesultanan Deli

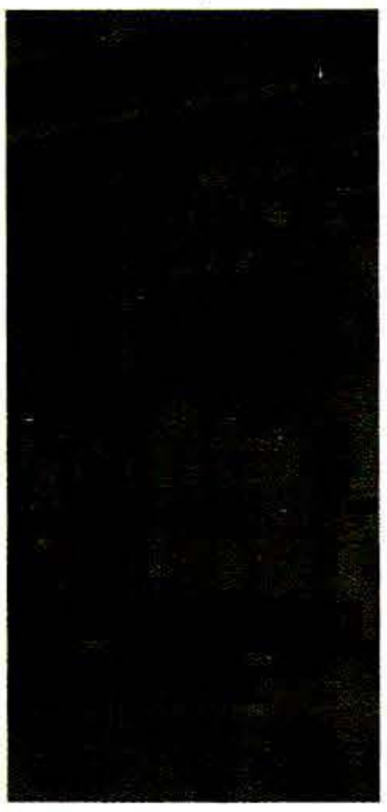

Kesultanan Deli merupakan satu di antara beberapa kesultanan Melayu di pantai timur Sumatera, yang kini menjadi wilayah Sumatera Utara, yakni Serdang, Langkat, dan Asahan. Semua kesultanan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, baik dari silsilah keluarga raja maupun dinamika sosial-politik dan budaya. Kesultanan Deli sejak berdiri pada abad ke-17 M tumbuh menjadi ikon perjalanan masyarakat Sumatera Timur, yang berperan penting bagi proses pertumbuhan dan perkembangan pilar-pilar utama budaya Melayu, yang disebut juga "peradaban Sumatera Timur" (Husny, 1978). Meski di bawah bayang-bayang kekuatan Kesultanan Aceh, dan kemudian Kesultanan Siak, yang berlanjut kolonialisme Belanda, Deli berperan dalam perkembangan sosial-politik dan ekonomi di Sumatera Timur.

Keberhasilan Deli sebagai ikon budaya Melayu tidak terlepas dari kemampuan para penguasa kesultanan ini menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok sosial yang beragam, seraya tetap berpegang pada nilai-nilai budaya yang diwarisinya sejak Kerajaan Malaka abad ke-15 M. Selain dengan Aceh dan Siak, Kesultanan Deli juga berhubungan baik—meski tetap ada pergolakan—dengan suku Batak (Karo dan Simalungun). Hubungan tersebut menjadi kekuatan utama dalam menghasilkan barang yang dijual di pasar internasional, termasuk dalam bingkai kontrak dengan kolonial Belanda. Oleh karena itu Kesultanan Deli berjasa membuat kebudayaan Melayu menjadi kebudayaan utama di pelabuhan-pelabuhan pesisir Sumatera Timur dan pada saat yang sama berlangsung proses pengislaman masyarakat di wilayah tersebut.

1. Asal-Usul

Berdasarkan tradisi tutur Melayu, asal-usul Kesultanan Deli terkait dengan cerita seorang tokoh yang disebut Gotjah Pahlawan. Ia anak raja muslim asal Hindustan Deli Akbar bernama Muhammad Deri Khan, atau Tuanku Muhammad Deli, yang datang ke Aceh setelah kapalnya karam di perairan Pasai, Aceh. Setelah mengabdi kepada Raja Aceh Sultan Alauddin Mansyur Syah (1579–1586 M) dan berjasa ikut menciptakan keamanan di kerajaan, ia diangkat menjadi panglima dengan gelar Lebai Hitam. Ia juga dinikahkan dengan seorang putri Pasai. Dari perkawinan inilah lahir Gotjah Pahlawan, yang berarti 'seorang yang gagah perkasa' (Husny, 1978: 60–62).[1]

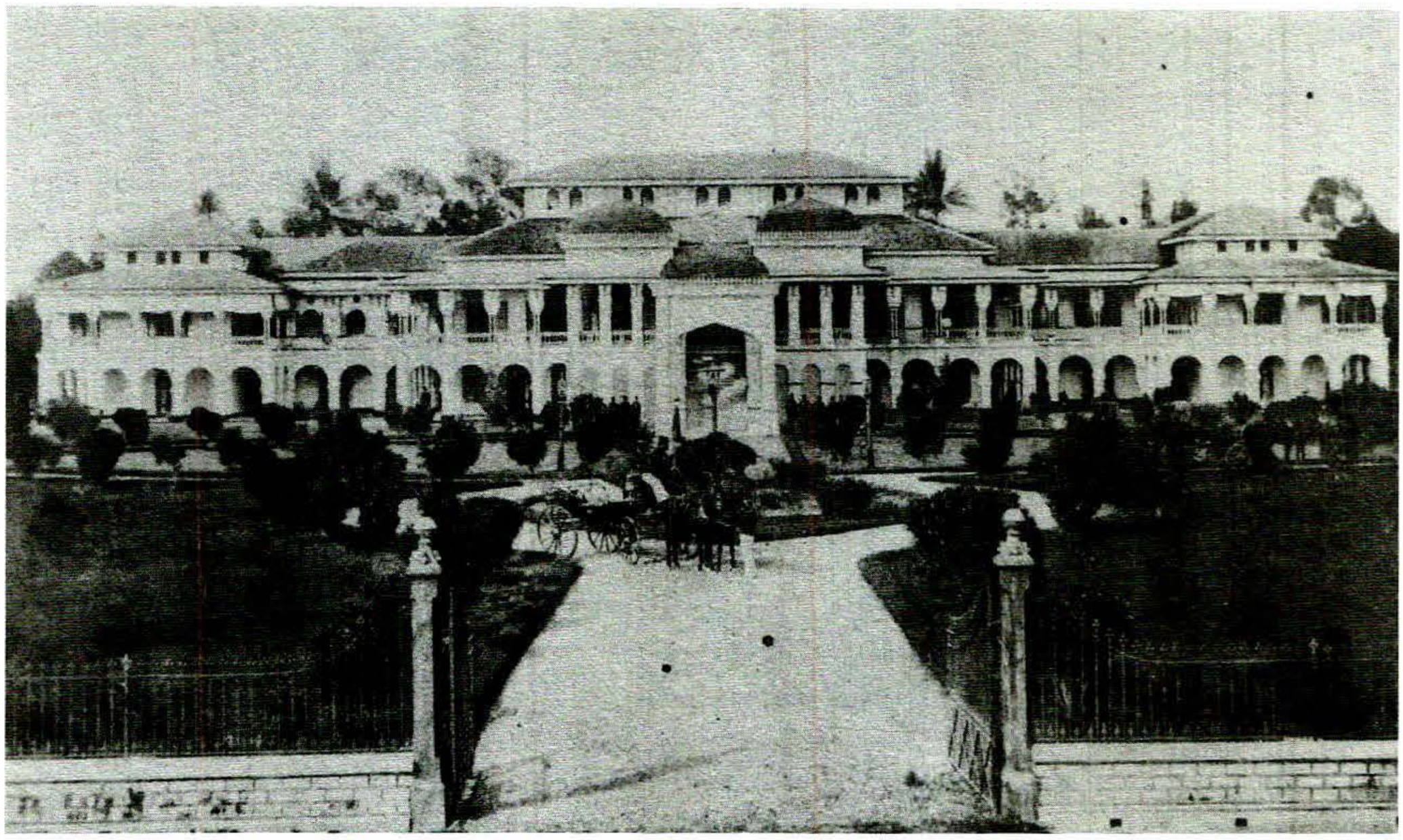

Istana Sultan Deli
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sejak saat itu keluarga Deri Khan menjadi bagian dari lingkaran elit Kerajaan Aceh. Karier politik Gotjah Pahlawan semakin kukuh pada masa kekuasaan raja Aceh terbesar Sultan Iskandar Muda (1607–1636 M). Gotjah Pahlawan mengikuti jejak ayahnya mengabdi dan kemudian mendapat kepercayaan Iskandar Muda. Pada tahun 1612 M ia diberi tugas menaklukkan kerajaan di belahan timur Sumatera, yakni Kerajaan Haru dengan ibukota di Kota Tua.[2] Tugas itu tentu saja merupakan bagian dari kebijakan ekspansionis Iskandar Muda. Serangan juga dilakukan karena Kerajaan Haru mencoba bangkit kembali setelah memperoleh bantuan senjata dari Portugis di Malaka, musuh utama Kerajaan Aceh. Selain itu Iskandar Muda melanjutkan kebijakan Sultan Aceh sebelumnya, Sultan Alaudin Ri'ayat Syah al-Kahar (± 1537/9–1571 M), yang menyerang Haru pada tahun 1564 M (Husny, 1978: 64).

Gotjah Pahlawan berhasil mengalahkan Kerajaan Haru setelah beberapa kali penyerangan. Ibukota Kota Tua dihancurkan. Di atas puing ibukota Kerajaan Haru inilah Gotjah Pahlawan membangun kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Deli. Sultan Iskandar Muda menunjuk Gotjah Pahlawan sebagai Wakil Sultan Aceh yang berkuasa penuh di wilayah bekas Kerajaan Haru. Bersamaan dengan itu, sebagai tanda kekuasaan dan kebesaran (*regalia*), Sultan Iskandar Muda menganugerahkan gelar "Seri Paduka" dan "Panglima Deli" kepada Gotjah Pahlawan serta memberinya sebilah keris bernama "Keris Rajawali", sebuah pedang bernama "Bawar", dan sebuah gong besar (Husny, 1978: 71–72). Sejak itu, tahun 1612 M, Deli hadir sebagai suatu wilayah politik dan hukum di Sumatera Timur dengan Gotjah Pahlawan sebagai penguasa mewakili Sultan Aceh.

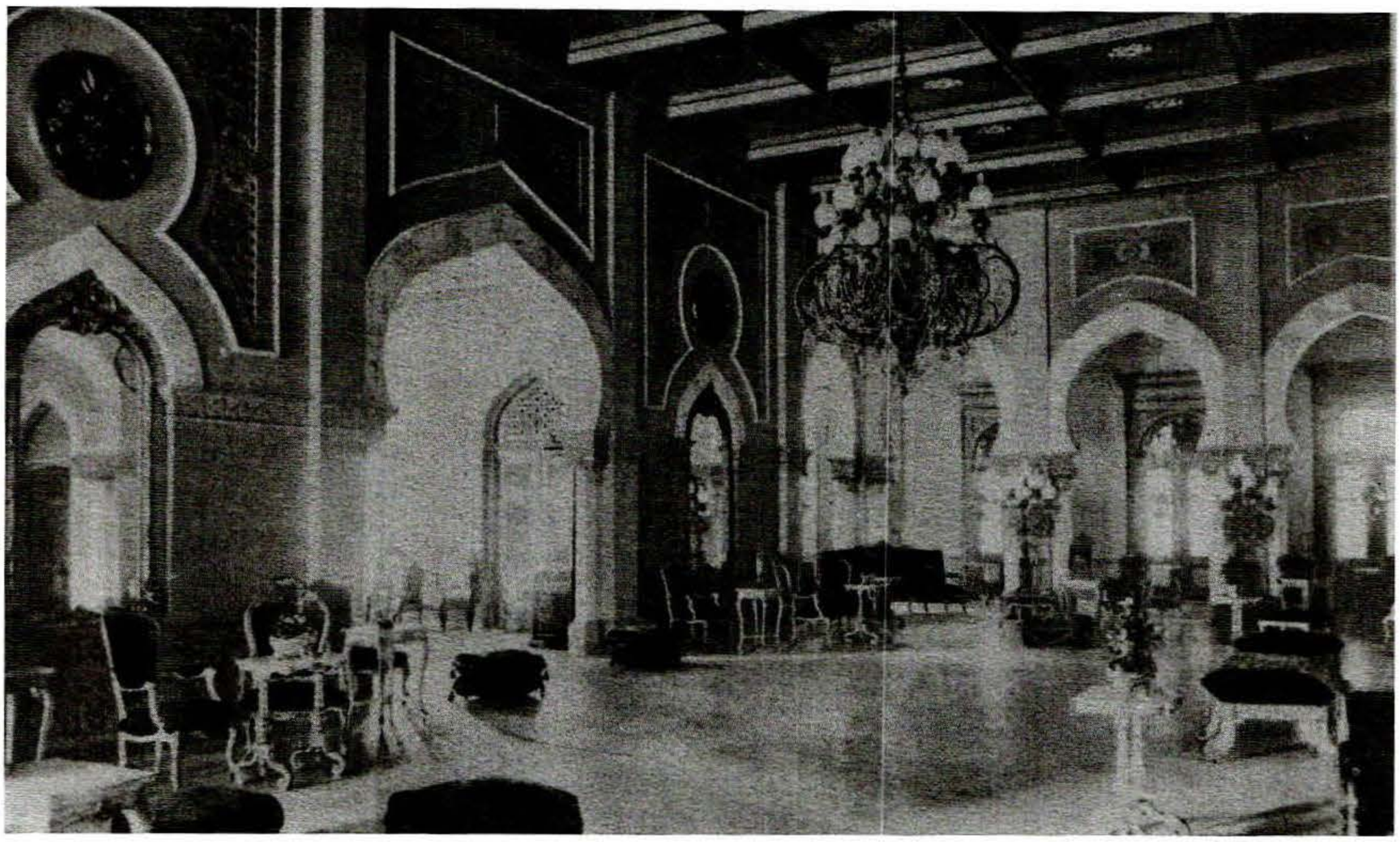

Ruang dalam Istana Sultan Deli
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Tidak lama setelah itu Gotjah Pahlawan membangun pusat kekuasaan baru bernama Deli Tua, terletak kira-kira 20 km dari tepi pantai Selat Malaka. Daerah pedalaman sengaja dipilih sebagai pusat kekuasaan karena letaknya strategis dari sisi keamanan. Deli Tua tidak dapat dijangkau dengan kapal besar, sehingga relatif aman dari serangan musuh secara tiba-tiba (Husny, 1978: 73). Selain itu ada alasan lain yang kemudian terbukti sangat berpengaruh bagi perkembangan kerajaan, yakni Deli Tua dan daerah sekitar sangat subur untuk pertanian. Dua batang sungai yang mengalir di wilayah tersebut, yakni Sungai Deli dan Hulu Deli, meningkatkan kesuburan tanah Deli. Pada masa kolonial Belanda, daerah tersebut menjadi perkebunan tembakau yang sangat terkenal dan menjadi inti kehidupan ekonomi kerajaan (Reid, 2011: 64–70; Langenberg, 1977).

Gotjah Pahlawan diakui sebagai pendiri Kesultanan Deli dan sekaligus asal keturunan raja-raja Deli. Tentu saja Gotjah Pahlawan melakukannya dalam kedudukannya sebagai Wakil Sultan Aceh yang berkuasa penuh di Tanah Deli. Oleh karena itu di tengah upaya besarnya membangun Kerajaan Deli ia tetap terlibat dalam sejumlah misi untuk Sultan Iskandar Muda. Pada tahun 1613 M, misalnya, ia terlibat dalam penyerangan terhadap Kerajaan Johor, yang berhasil mengalahkan kerajaan tersebut dan membawa Sultan Johor Alauddin Ria'ayat Syah II (1597–1613 M) bersama anggota keluarga dan beberapa bangsawan Johor ke Aceh. Gotjah Pahlawan juga diberitakan ikut serta dalam serangan ke Pahang pada tahun 1617 M. Sebagaimana diketahui, usai serangan Pahang pasukan Aceh membawa penguasa Pahang, Sultan Ahamad, bersama anaknya yang kemudian dinikahkan dengan putri Iskandar Muda, Sri Alam Permaisuri, yang kelak diangkat sebagai Sultan Aceh

dengan gelar Iskandar Tsani (Lombard, 1986: 123–124). Sementara itu Gotjah Pahlawan diberitakan dinikahkan dengan seorang putri asal Pahang yang dibawa ke Aceh, Putri Khairiah. Atas jasanya dalam penyerangan tersebut ia diberi gelar Orang Kaya Laksamana Muda (Husny, 1978: 75).

Kesultanan Deli di bawah Kesultanan Aceh memiliki makna sangat strategis bagi Gotjah Pahlawan dan juga bagi perkembangan Kesultanan Deli. Aceh saat itu merupakan pusat kekuatan politik Islam terkemuka di Nusantara, dengan wilayah kekuasaan di Sumatera dan di Semenanjung Malaya. Oleh karena itu pembentukan Deli sebagai kesultanan berjalan mulus tanpa hambatan berarti dari kekuatan politik lain, khususnya di Sumatera. Gotjah Pahlawan dengan leluasa melakukan sejumlah langkah konsolidasi, baik di bidang politik maupun bidang sosial-budaya. Apa yang berlaku di Kesultanan Aceh banyak yang diacu dalam proses konsolidasi, selain tentu saja kontak dengan masyarakat dan budaya Deli dan Sumatera Timur pada umumnya.

2. Proses Konsolidasi

Pada saat Gotjah Pahlawan melakukan sejumah langkah konsolidasi kekuasaan, Tanah Deli mengenal empat wilayah (disebut *urung*) dengan status otonom dan setiap *urung* di bawah *datuk urung*. Keempat wilayah hukum itu meliputi Dua Belas Kota (Hamparan Perak), Senembah, Pecut Sungai Lalang atau Sukapiring, dan Sunggal. Sistem pemerintahan di keempat wilayah tersebut masih sangat sederhana, berbentuk kesukuan dan dipimpin oleh kepala suku, yang dikenal dengan sebutan *sibayak* atau raja-raja kecil. *Urung* Sunggal merupakan *urung* terkuat di antara empat wilayah tersebut, baik dari sisi luas wilayah kekuasaan maupun pengaruh politik (Husny, 1978: 79; Pelly, 1986: 12).

Gotjah Pahlawan melakukan pendekatan yang disebut politik asimilasi. Ia menjadikan dirinya sebagai *datuk tunggal* atau *ulon janji*, sedang empat *urung* tetap berkuasa atas wilayah masing-masing tetapi mengakui kedudukan Gotjah Pahlawan sebagai *datuk tunggal* dengan kewenangan lebih tinggi dari semua *urung*. Keempat *urung* bahkan mengucapkan sumpah setia kepada Gotjah Pahlawan. Kekuasaan baru itu kemudian dirumuskan dalam struktur yang mapan, yakni keempat kepala suku membentuk satu jabatan yang disebut *lembaga datuk berempat*, yang berfungsi sebagai dewan penasihat untuk pemerintahan Gotjah Pahlawan. Dalam perkembangannya mereka disebut "orang-orang besar" (Erman, 2011: 49).

Dalam kerangka politik asimilasi itu Gotjah Pahlawan menjalin hubungan perkawinan dengan keluarga keempat kepala suku tersebut, yang secara tradisional terbukti efektif menciptakan jaringan dan mempererat hubungan sosial-politik di antara mereka. Pertama kali Gotjah Pahlawan menikahi putri Raja Senembah

pada tahun 1622 M dan kemudian antara tahun 1622 dan tahun 1623 M menikahi putri Raja Sungai Lalang Percut. Untuk wilayah Sunggal ia menikahi adik raja, bernama Putri Nan Buluan, pada tahun 1632 M. Hal serupa dilakukan pada putri Raja Dua Belas Kota atau Hamparan Perak (Erman, 2011: 49–50; Husny 1978: 80). Dengan demikian Gotjah Pahlawan menjadikan semua kepala suku di Tanah Deli sebagai bagian dari keluarganya. Begitu pula Gotjah Pahlawan secara resmi menjadi bagian kehidupan keluarga semua kepala suku. Ikatan keluarga ini berfungsi sangat efektif bagi keberlangsungan pola hubungan kepemimpinan baru di atas pola kesukuan yang telah lama berlaku.

Gotjah Pahlawan juga melakukan langkah konsolidasi di bidang budaya dan agama. Ia memperkenalkan nilai baru yang berasal dari budaya Melayu dan Islam, yang tengah berkembang sebagai wacana umum dalam sistem budaya di banyak wilayah di Nusantara. Lagi-lagi Aceh menjadi rujukan utama. Sebagaimana diketahui kesultanan tersebut pada abad ke-17 M menjadi pusat perkembangan Islam dan budaya Melayu. Bahasa Melayu dan aksara Jawi, misalnya, berkembang sedemikian rupa sebagai sarana komunikasi yang mapan, sebagai *lingua franca*; tidak hanya dalam kehidupan politik dan ekonomi, tetapi juga bahasa ekspresi keislaman. Ulama terkemuka Nusantara pada abad ke-16 dan abad ke-17 berpangkal di Kesultanan Aceh. Mereka menulis karya-karyanya dalam bahasa Melayu dan aksara Jawi (Burhanudin, 2017: 171–180). Dalam konteks itu Gotjah Pahlawan menjadikan Melayu dan Islam sebagai sistem budaya dan wacana intelektual-keagamaan di Deli, yang dirumuskan dalam ungkapan "Aceh serambi Mekkah, Deli serambi Aceh" (Pelly, 1986: 41).

Melayu dan Islam berkembang sedemikian rupa. Keduanya identik dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal itu dirumuskan dalam ungkapan yang terkenal, "masuk Islam berarti masuk Melayu". Identitas Islam yang melekat pada Melayu memberi corak khas pada "konsep etnis" suku Melayu di Sumatera Timur. Suku-suku yang sebelumnya tinggal di pedalaman, seperti suku Karo, Simalungun, dan Dairi Selatan, berarti telah "masuk Islam" jika mereka pindah ke wilayah pesisir. Begitu pula sebaliknya. Jika mereka memeluk Islam, meski masih bermukim di pedalaman, mereka disebut "masuk Melayu". Lebih dari itu, mereka mengganti nama, menanggalkan marga, dan hidup menurut adat Melayu (Pelly, 1986: 42).

Ada manfaat tertentu yang bisa diperoleh saat mereka beralih menjadi muslim dan Melayu sekaligus. Salah satu yang terpenting adalah status sosial mereka meningkat dan tidak lagi dianggap sebagai "orang asing" atau "*penompang*". Mereka juga berhak memiliki tanah garapan serta tanah adat, dapat ikut serta dalam upacara sosial-keagamaan di masyarakat, dan dapat mengunjungi istana saat perayaan adat dan agama. Tegasnya, mereka diakui sebagai "orang asli" dengan segala hak dan kewajibannya, bahkan seorang *sibayak* (penghulu kepala) suku Karo atau Simalungun

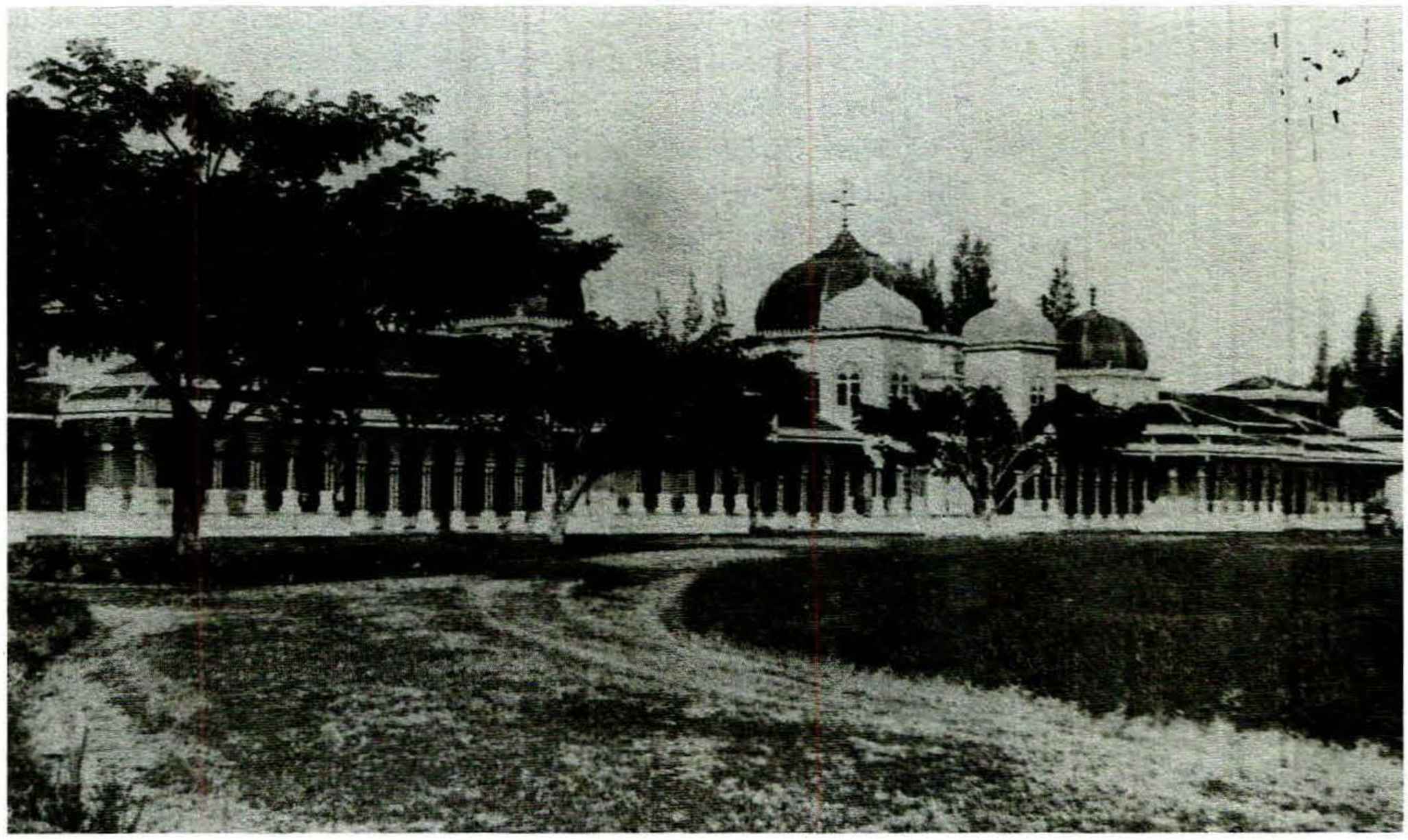

Masjid Agung di Medan
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

yang masuk Islam akan diberi kedudukan sejajar dengan datuk-datuk Melayu. Bersama dengan itu mereka yang sudah menjadi Melayu didorong untuk melangsungkan pernikahan, yang disebut "tukar anak panah", yakni sama-sama mempertukarkan anak laki-laki antara Melayu pendatang dan Melayu asli atau antara *sibayak* dan datuk. Dari sinilah timbul adat "tiga tungku sejarangan" yang kemudian melembaga dalam struktur masyarakat desa di Sumatera Timur (Pelly, 1986: 43).

Demikianlah, bermula dari dataran pantai Islam dan budaya Melayu berkembang dan secara perlahan menjadi budaya dominan di Kesultanan Deli. Bangsawan dan masyarakat sama-sama menggunkana bahasa Melayu sebagai sarana komunikasi dan secara bersamaan memegang prinsip-prinsip ajaran Islam dengan kuat. Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan Husny (1978: 82), Deli kemudian menjadi titik tolak suatu proses yang sekarang ini disebut dengan istilah "Indonesianiasi", baik secara budaya, bangsa, maupun bahasa.

Seperti halnya Aceh, apa yang dilakukan Gotjah Pahlawan memiliki makna strategis dalam konteks Deli. Sejalan dengan perkembangan sosial dan ekonomi kerajaan, yang pada waktu itu Deli sudah menjadi rumah bagi berbagai kelompok masyarakat di Nusantara, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Islam sudah dipeluk sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu adat Karo, yang menjadi inti adat masyarakat tradisional Deli, secara perlahan berada di bawah sistem budaya Melayu dan Islam yang berkembang semakin dominan dan diterima oleh semua kelompok sosial yang beragam.

Begitu pula budaya Melayu dan Islam menjadi pilihan Gotjah Pahlawan untuk membangun kekuasaan politik di tanah Deli. Sebagai Wakil Sultan Aceh yang berdaulat di Tanah Deli jelas secara budaya ia "orang asing". Aceh bukan saja berlainan budaya dengan Deli, pun Aceh pernah menyerang orang Karo untuk tujuan pengislaman. Gotjah Pahlawan berdarah Aceh (baca: Pasai) dari pihak ibu dan tumbuh di lingkungan istana Aceh. Sebagai Wakil Sultan Aceh di Deli ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa yang memiliki tanah adalah persekutuan hukum masyarakat adat yang berpegang pada adat Karo. Atas dasar itu budaya Melayu dan Islam menjadi pilihan untuk membuat berbagai kelompok masyarakat di Deli yang beragam disatukan oleh nilai-nilai budaya Melayu dan Islam yang melampaui jati diri daerah.

Apa yang dilakukan Gotjah Pahlawan tampak berjalan secara efektif. Ia berhasil membangun kesultanan yang berdiri kukuh di Tanah Deli dengan wilayah kekuasaan yang relatif jelas dan dengan sistem politik dan budaya yang mapan, yang melingkupi keragaman masyarakat Deli. Melalui perkawinan dengan Nang Buluan dari Sunggal, disusul penyerahan daerah pesisir (antara Kuala Percut dan Kuala Belawan), Gotjah Pahlawan secara perlahan membangun beberapa daerah, antara lain Kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Berayan, Kota Jawa, Kota Rengas, Percut, dan Sigara-gara (Pelly, 1986: 15; Sinar, 1983: 21). Daerah-daerah tersebut menambah tiga wilayah hukum yang telah disebut di atas, yakni Dua Belas Kota (Hamparan Perak), Senembah, dan Pecut Sungai Lalang atau Sukapiring.

Sementara itu terkait dengan sistem dan budaya politik, Kesultanan Deli menyerap pola yang sudah berkembang di dunia Melayu: sultan berada di puncak kekuasaan tertinggi, disusul menteri utama atau datuk bendahara paduka seri maharaja. Jabatan bendahara sangat penting, yakni sebagai perdana menteri yang berkuasa penuh dan merangkap sebagai kepala pemerintahan harian serta kepala orang-orang besar kerajaan (Sinar, 1971: 233). Pola hubungan sultan dengan bendahara bersifat saling menguntungkan dan karenanya saling bergantung satu sama lain. Di bawah bendahara ada jabatan temenggung, yang bertugas menciptakan keamanan di kerajaan, dan laksamana sebagai panglima angkatan laut dan sekaligus angkatan perang. Jabatan penting lain adalah syahbandar, yang bertugas menarik cukai dan mengurus keuangan kerajaan. Sultan mengangkat seorang ulama untuk jabatan imam paduka tuan atau mufti, yang berwenang mewakili sultan dalam urusan syari'at Islam, termasuk sebagai penasihat tertinggi agama Islam di kerajaan (Pelly, 1986: 19–20).

Semua jabatan di atas berada di lingkaran tertinggi yang langsung di bawah sultan. Di bawah itu masih banyak jabatan lain. Kesultanan Deli sejak masa Gotjah Pahlawan dilengkapi aparat kerajaan yang sudah dikenal di kerajaan-kerajaan Melayu di Nusantara. Termasuk dalam hal ini konsep tentang sultan sebagai orang suci, yang

dirumuskan dalam istilah "bayang-bayang Tuhan di muka bumi" dan "*ulil amri*", yakni sebagai kepala dan pelindung agama Islam (Pelly, 1986: 25–26). Konsepsi tentang raja demikian berakar kuat dalam tradisi politik Melayu sejak Kerajaan Malaka abad ke-15 M, yang diambil dari pemikiran dan praktik politik di dunia muslim (Burhanudin, 2001: 23–29).

3. Perubahan Menjelang Masa Kolonial

Upaya konsolidasi yang dilakukan Gotjah Pahlawan harus menghadapi tantangan baru menyusul perubahan politik di Nusantara abad ke-17 M. Sultan Aceh Iskandar Muda, meninggal dunia dan digantikan menantunya, Iskandar Tsani (1637–1641 M). Naiknya Iskandar Tsani ke takhta bukan sekadar pergantian kekuasaan, tetapi sekaligus berarti berlakunya corak baru, yang secara kebetulan menjadi awal kemunduran Aceh. Kemunduran semakin tampak pada masa kepemimpinan Ratu Sultan Tajul Alam Syafiyatuddin (1641–1675 M). Perubahan politik di Aceh mulai berpengaruh di Deli bahkan sejak kepemimpinan putra Gotjah Pahlawan, Panglima Perunggit, yang mulai berkuasa setelah ayahnya meninggal pada tahun 1653 M.

Panglima Perunggit sudah lama berkecimpung dalam politik Kesultanan Deli, jauh sebelum berkuasa secara resmi. Pada saat ayahnya masih berkuasa, ia membantu urusan pemerintahan dengan berkedudukan di Kampung Medan Deli. Tempat itu terletak di pertemuan Sungai Deli dengan Sungai Babura dan sangat strategis untuk mengawasi lalu-lintas pedagangan yang masuk dari laut atau yang keluar dari pedalaman. Panglima Perunggit bertugas khusus dalam masalah keamanan dan keuangan kesultanan dari uang bea-cukai. Oleh karena itu saat ia berkuasa pusat pemerintahan dipindahkan ke Medan Deli, kota yang telah dibangunnya (Husny, 1978: 92–93; Erman, 2011: 50).

Meski demikian Panglima Perunggit menyaksikan perubahan politik di belahan barat Nusantara. Di tengah Aceh yang terus mundur sepeninggal Iskandar Muda, maskapai dagang Belanda, Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), semakin berkembang sebagai satu kekuatan politik dan ekonomi utama di Nusantara. Pada tahun 1641 M, tidak lama setelah Iskandar Tsani meninggal, VOC merayakan keberhasilannya merebut Malaka dari tangan Portugis. Dengan dibantu kerajaan Johor-Riau, VOC secara resmi menduduki wilayah yang sejak lama memegang kedudukan strategis dalam jaringan perniagaan Asia (Andaya, 1975: 26–27). Dalam keadaan demikian Panglima Perunggit mempertimbangkan kembali kedudukan Deli yang hingga saat itu berada di bawah perlindungan Aceh, yang dalam banyak hal menyerupai pola hubungan *vassal* dengan *lord* (tuan). Oleh karena itu ketika Aceh dianggap sudah tidak bisa bertindak sebagai tuan, maka mencari tuan baru sangat masuk akal.

Pada tahun 1669 M Panglima Perunggit mengumumkan bahwa Kesultanan Deli tidak lagi berada di bawah Kesultanan Aceh yang saat itu dipimpin Sultan Tajul Alam Syafiyatuddin. Pada saat yang sama ia menjalin hubungan dengan VOC di Malaka. Beberapa langkah yang menunjukkan perubahan orientasi pertuanan mulai dilakukan. Ia diberitakan membangun pasukan berkuda sebagai ganti pasukan gajah. Pasukan berkuda dibentuk sebagai hasil lawatannya ke tanah Jawa dan juga setelah memperhatikan pasukan berkuda Belanda yang hilir mudik menjaga keamanan kota Batavia. Ia juga disebut pernah melawat ke Malaka, meski tidak diketahui apa hasil lawatan itu (Husny, 1978: 94; Erman, 2011: 50).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa VOC menjadi tuan baru bagi Deli, sementara Pangima Perunggit penguasa yang memberi corak baru dalam kekuasaan Deli setelah sebelumnya menjadi Wakil Sultan Aceh. Keadaan itu tetap berlangsung pada masa pemerintahan berikutnya setelah Panglima Perunggit meninggal dunia pada 1700 M. Panglima Paderap naik takhta, yang juga menggunakan gelar Panglima Deli. Di tangan Panglima Paderap pusat pemerintahan Deli dipindahkan ke Pulau Brayan, sekitar 5 km ke hilir Medan Deli. Ia bersama istrinya, anak orang kaya Sunggal, membangun daerah tersebut ketika ayahnya masih berkuasa sebagai Sultan Deli (Husny, 1978: 95).

Di tengah perubahan itu Kesultanan Deli mengalami pepecahan internal, yang disulut perebutan kekuasaan setelah Panglima Paderap meninggal dunia pada tahujn 1720 M. Tuanku Umar Johan Alamsyah gelar Kejeruan Junjongan, putra keempat Panglima Paderap dari permaisuri, berebut takhta dengan Tuanku Panglima Pasutan, putra kedua Panglima Paderap. Tuanku Umar Johan Alamsyah merasa lebih berhak atas takhta kerajaan karena keturunan dari permasuri. Dalam perebutan kekuasaan yang memuncak pada tahun 1722 M Tuanku Panglima Pasutan berhasil mengusir Tuanku Umar Johan Alamsyah ke luar istana. Bersama ibunya, Tuanku Puan Sampali, ia berlindung ke daerah lain hingga tiba di suatu tempat yang kemudian bernama Kampung Besar (Serdang). Pada saat Tuanku Panglima Pasutan mengukuhkan diri sebagai Sultan Deli yang baru, Tuanku Umar Johan Alamsyah secara perlahan membangun kekuasaan yang terpisah dari Kesultanan Deli. Dengan dibantu dua orang Raja Batak Karo, yakni Raja Urung Sunggal dan Raja Urung Senembah, kemudian juga Raja Urung Batak Timur yang menguasai wilayah Serdang bagian Hulu di Tanjong Marawa dan seorang pembesarAceh bernama Kejeruan Lumu, Tuanku Umar Johan Alamsyah akhirnya mengumumkan berdirinya Kesultanan Serdang pada tahun 1723 M (Erman, 2011: 53–54).[3]

Krisis internal mengakibatkan Kesultanan Deli semakin jatuh dalam bayang-bayang kekuasaan kesultanan lain yang tertarik menjadi "tuan". Selain Aceh yang memang sejak masa Iskandar Muda bertindak sebagai pelindung Deli, dan dipertahankan hingga masa kekuasaan Tajul Alam Syafiyatuddin, Kesultanan Siak Sri

Inderapura berhasrat menguasai Deli. Di samping itu VOC di Malaka juga memiliki keinginan menguasai Kesultanan Deli. Kekayaan sumber daya alam Tanah Deli, antara lain minyak wangi, kayu cendana, kapur barus, dan lilin, menjadi alasan penting di balik usaha menguasai Deli (Erman, 2011: 54).

Sultan Tajul Alam Syafiyatuddin di Aceh, misalnya, memperbaharui perjanjian dengan Deli ketika berada di bawah kekuasaan Panglima Perunggit. Husny (1978: 94) menyebut beberapa hal disepakati sebagai langkah kompromi Aceh terhadap upaya dan keinginan Deli membebaskan diri dari Kesultanan Aceh. Hal-hal tersebut meliputi (1) Deli merupakan kerajaan otonom penuh dengan lingkungan batas daerah Sungai Mencirim di utara dan Sungai Padang di selatan; (2) Deli mengakui kedaulatan dan perlindungan Aceh atas kerajaan Deli; (3) Raja Deli Panglima Perunggit menjadi wakil dan berkuasa penuh dari Sultan Aceh di wilayah Sumatera Timur dengan gelar Kejuruan Padang; (4) Kerajaan Deli tiap tahun mengantarkan bunga Mas ke Sultan Aceh; dan (5) bila diserang pihak musuh, Aceh akan segera memberi bantuan. Demikianlah sampai masa kekuasaan Panglima Gandar Wahid (± 1761–1814 M) pengiriman bunga Mas ke Aceh terus dilakukan, meskipun sejak pemerintahan Panglima Perunggit sudah menyatakan merdeka dari Kesultanan Aceh.

Sementara itu Kerajaan Siak berusaha memperlihatkan kekuatannya di Deli dan Sumatera Timur pada umumnya. Antara tahun 1761 dan tahun 1780 M Kerajaan Siak menyerang Deli dan kerajaan-kerajaan lain di wilayah tersebut, yakni Asahan, Serdang, Senembah, Sunggal, Langkat, dan Tamiang. Beberapa dasawarsa kemudian, sejak tahun 1814 M, Siak bahkan memperteguh kekuasaannya atas Deli dengan memberi gelar lagsung kepada sultan yang sedang berkuasa. Hal itu terjadi setelah Panglima Gandar Wahid meninggal dunia. Pegganti dan sekaligus putranya, Tuanku Amal, diangkat langsung oleh Sultan Siak sebagai Sultan Deli dengan gelar Sultan Amaluddin Magedar Alam pada tahun 1814 M.[4] Sultan Siak juga memberi kewenangan kepada Sultan Deli untuk melantik atau mengangkat secara resmi penguasa-penguasa lain di Sumatera Timur. Mereka adalah Sultan Seri Ahmad Datuk Hamparan Perak dengan gelar Datuk Panglima Setia Raja Wazir XII Kota dan Tuanku Nobatsyah sebagai Pangeran Mangku Negara Raja Muda Negeri Langkat (Husny, 1978: 100–101). Wewenang tersebut diberikan sebagai wujud pengakuan Siak atas kedudukan penting Deli di antara kesultanan-kesultanan lain di Sumatera Timur.

Aceh melakukan hal yang sama menghadapi sikap agresif Siak. Aceh berusaha menguasai kembali Deli. Pada tahun 1825 M Aceh unjuk kekuatan dengan mengirim 200 tongkang angkatan laut di bawah pimpinan Panglima Pangeran Husin. Bersama dengan itu Aceh meminta raja-raja di Sumatera Timur membuat pengakuan atas kedaulatan Aceh dan pada saat yang sama Sultan Aceh mengakui raja-raja di wilayah tersebut berkuasa secara otonom. Khusus untuk kesultanan Deli, perjanjian yang telah disepakati

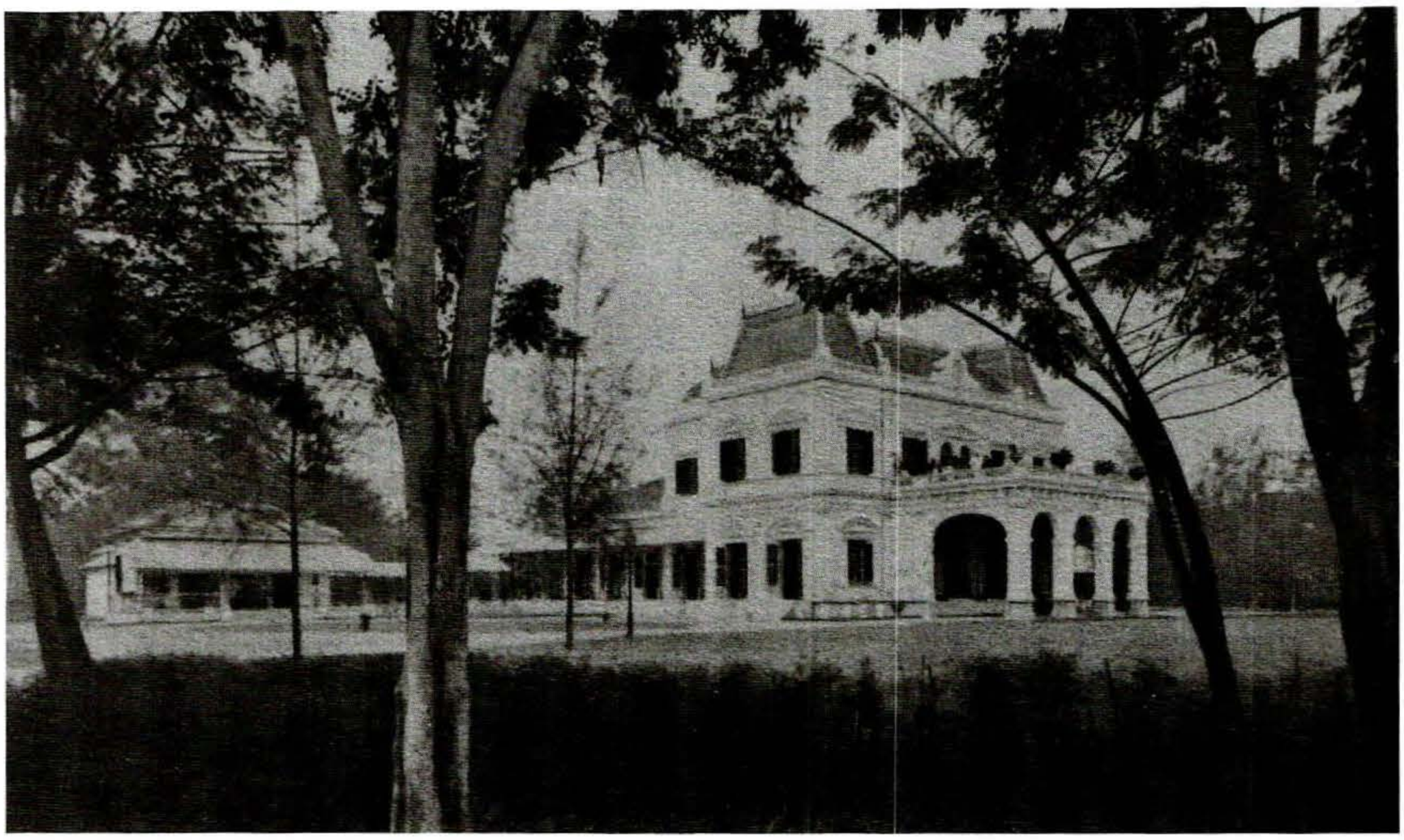

Rumah Residen Medan
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

diperbaharui kembali. Pada awal kekuasaan Sultan Mansur Syah, yang juga dikenal dengan Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Syah (1857–1870 M), Aceh mengukuhkan Sultan Deli Sultan Osman Perkasa Alam (1850–1858 M) sebagai Wakil Sultan Aceh di Tanah Deli, Serambi Aceh, dengan mendapat "cap sembilan" dan "bawar" sebagai *regalia* (Husny, 1978: 101).

Sultan Deli mengakui dua kekuatan politik utama di bagian barat Nusantara saat itu, sebagai langkah diplomatis untuk menghindari kedudukan sebagai korban perebutan kekuasaan dua kekuatan politik tersebut, sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan "beraja ke Aceh, bertuan ke Siak". Dengan cara demikian Kesultanan Deli mengirim bunga Mas dan upeti lain ke Aceh dan Siak. Di tengah kekuatan Aceh yang semakin mundur dan mengalami perpecahan, Siak memang potensial berkuasa di Sumatera Timur. Pernyataan kekuasaan Siak inilah yang kemudian dimanfaatkan Belanda untuk masuk dan berkuasa di wilayah tersebut.

4. Di Bawah Kekuasaan Kolonial

Belanda (VOC) sejak awal menjadikan wilyah barat Nusantara sebagai sasaran utama misinya menguasai jaringan perdagangan di Asia. Penguasaan atas Malaka pada tahun 1641 M dari Portugis merupakan tahap yang menentukan atas upayanya membangun kekuatan di kawasan tersebut. Traktat Siak tahun 1858 menjadi tonggak penting untuk wilayah Sumatera Timur. Melaui perjanjian yang ditandatangai pada tanggal 1 Februari 1858 itu Kesultanan Siak menerima perlindungan kolonial dan mengakui kekuasaan pemerintah Hindia Belanda atas wilayah raja-raja yang berkuasa secara otonom di Sumatera Timur.[5] Begitu pula dengan Traktat

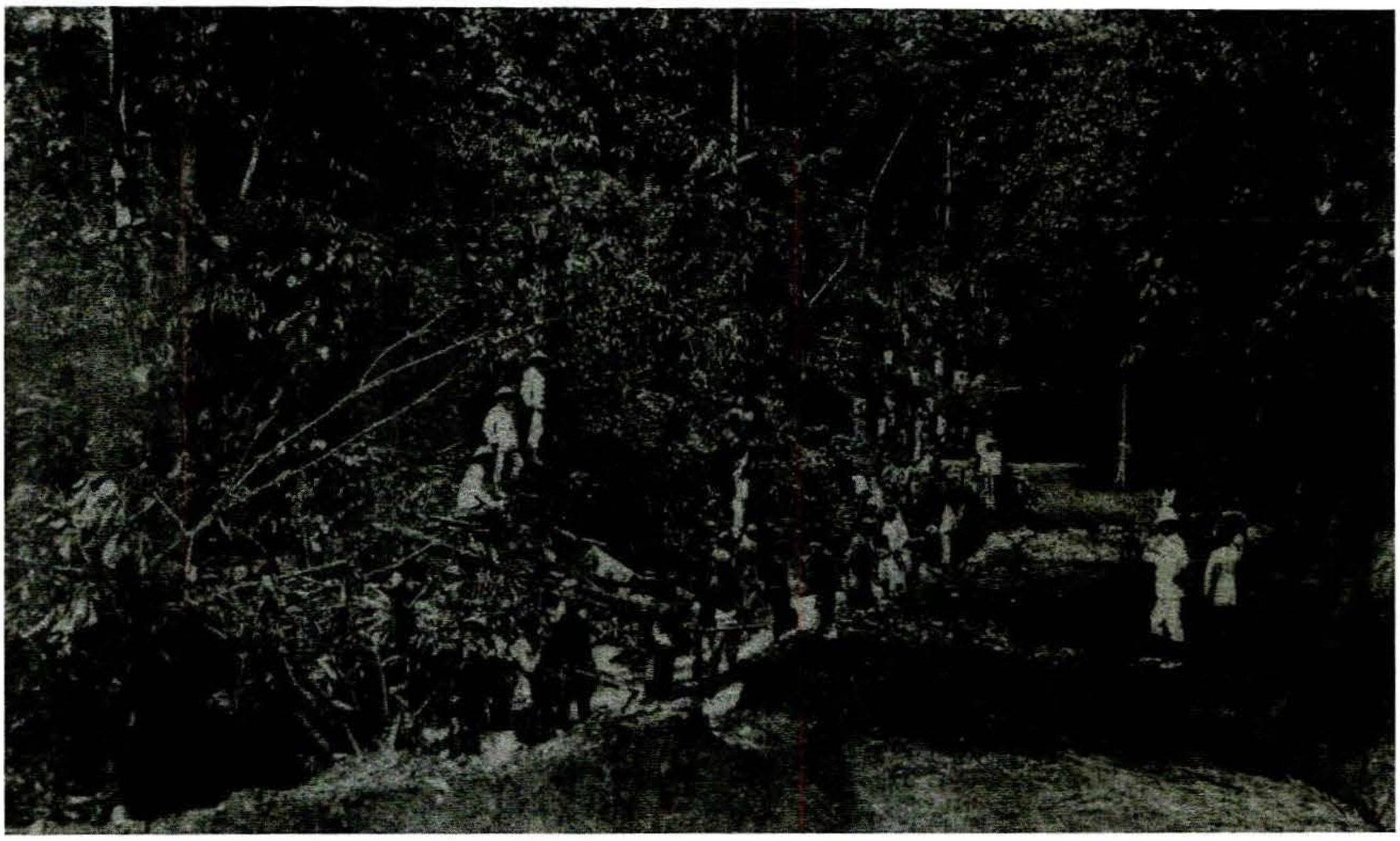

Pembuatan jalan baru untuk mendukung pembukaan lahan.
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

tersebut Belanda sama sekali tidak mengakui kekuasaan Aceh di Sumatera Timur yang telah ada jauh sebelum Siak menanamkan pengaruh pada awal abad ke-19 M. Pengakuan kekuasaan Siak atas wilayah tersebut menjadi dasar Belanda melakukan tekanan ke wilayah tersebut, yang terbukti sangat menguntungkan secara ekonomi. Oleh karena itu Traktat Siak sering dilihat sebagai wujud sikap Belanda mengisolasi Aceh, yang kemudian menaklukan Serambi Mekah itu melalui perang.

Untuk mewujudkan kekuasaannya di Sumatera Timur Belanda melakukan sejumlah langkah diplomasi. Setelah mengirim Raja Burhanuddin, keturunan Kerajaan Pagarryung, untuk memperoleh data terkait keadaan sosial-politik di wilayah tersebut, Belanda mengirim Residen Riau Elisa Netscher untuk mengikat perjanjian dengan raja-raja kawasan Sumatera Timur. Netscher menggunakan kapal perang Rainer Claasen dan pada tanggal 5 Agustus 1862 tiba di sana dan kemudian berhasil menundukkan Panai, Bilah, dan Kota Pinang. Dari sana ia ke Serdang yang masih setia kepada Aceh. Setelah berunding dengan Sultan Serdang—yang datang dengan kapal Lancang berbendera Aceh, menunjukkan kesetiaanya "beraja ke Aceh"—Netscher berhasil memaksa Sultan Serdang menandatangani perjanjian (*verklaring*) dengan pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 16 Agustus 1862. Isi perjanjian tersebut antara lain penyerahan wilayah Denai, Perbaungan, Bedagai, dan Padang. Berikutnya Deli dan Langkat yang berhasil dikuasai melalui perjanjian yang isinya tidak berbeda dengan perjanjian atas Serdang, yang ditandatangai masing-masing pada tanggal 21 dan 22 Agustus 1862 (Erman, 2011: 57; Husny, 1978: 110).

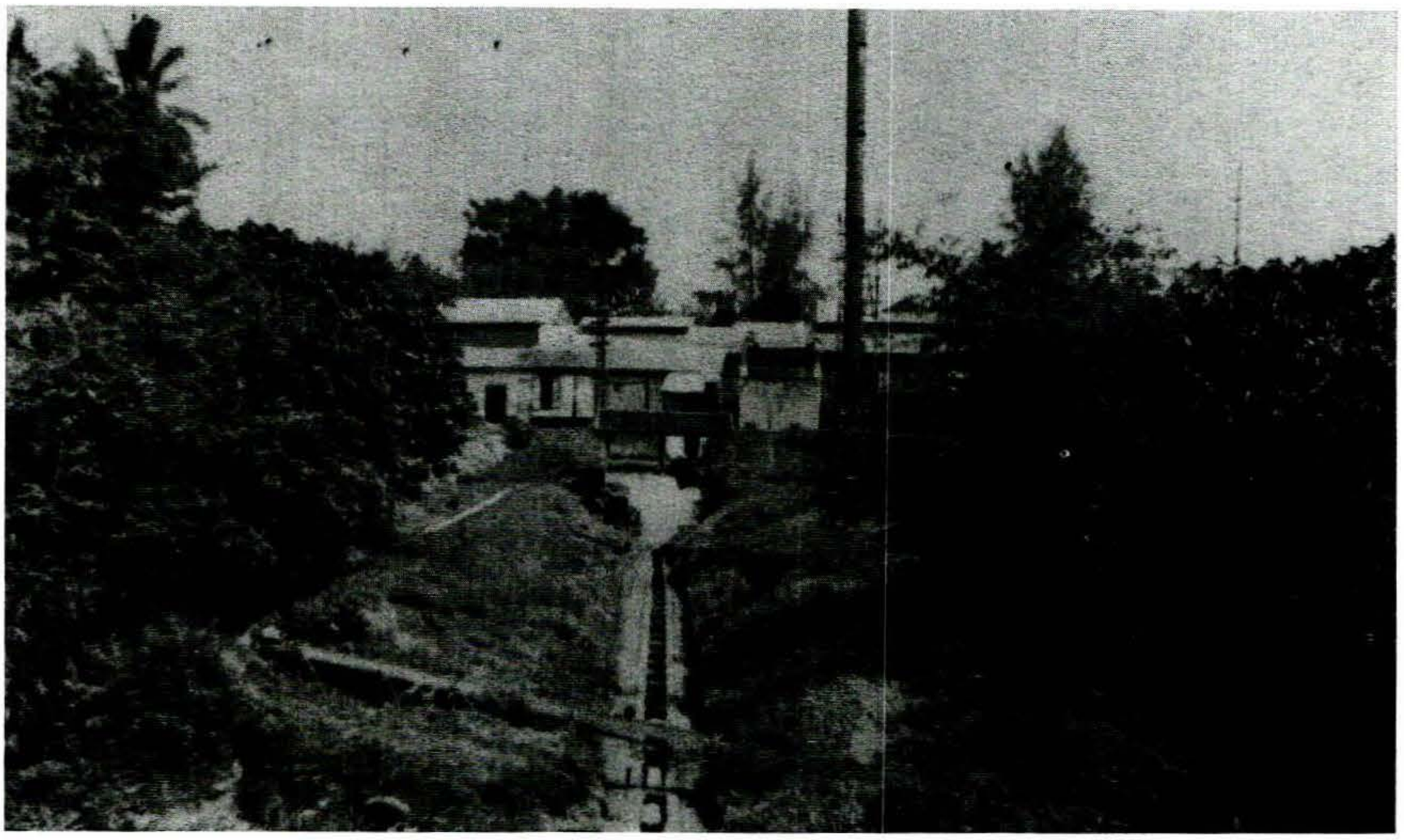

Listrik Sentral.
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Wilayah terakhir yang dikuasai Belanda adalah Asahan, yang sejak awal—pada saat Raja Burhanuddin di sana—secara tegas menyatakan tidak menerima perlindungan Belanda atas Sumatera Timur. Oleh karena itu pada tahun 1865 M Belanda menundukkan Asahan bersama dengan kerajaan-kerajaan kecil lain melalui ekspedisi dengan kekuatan lebih besar. Dengan demikian, melalui perjanjian yang seringkali disertai paksaan, sejak tahun 1865 M Belanda sudah menguasai wilayah Sumatera Timur sepenuhnya; bukan sekedar perjanjian dengan Siak. Untuk pengawasan yang lebih efektif pada tahun 1873 Belanda menjadikan Sumatera Timur dan Siak sebagai keresidenan tersendiri, di luar Keresidenen Riau dengan pusatnya di Bengkalis. Beberapa tahun kemudian ibukota dipindah ke Labuhan dan akhirnya ke Medan (Erman, 2011: 58).

Perjanjian politik antara Sultan Deli dan Belanda, yang bermakna bahwa pihak pertama tunduk kepada pihak kedua, terjadi pada bulan Agustus 1862 masa pemerintahan Sultan Mahmud Perkasa Alamsyah (1861–1873 M). Perjanjian tersebut memaksa Sultan Deli mengakui kedaulatan Belanda dan pada saat yang sama sultan memerintah secara otonom, tidak lagi berada di bawah kesultanan baik Aceh maupun Siak, serta memiliki hak-hak khusus atas tanah dan adat. Deli termasuk kesultanan awal yang menerima Belanda sebagai tuan atau pelindung, mengikuti langkah Siak yang terlebih dahulu tunduk pada kekuasaan Belanda. Dalam perundingan dengan Residen Netscher, Sultan Deli menyatakan bahwa Siak tidak pernah menjadi pelindung Deli. Ia bahkan menyebut kedudukannya sebagai Wakil Sultan Aceh di Sumatera Timur (Husny, 1978: 114–115). Dengan demikian, bagi Sultan Deli, keputusan

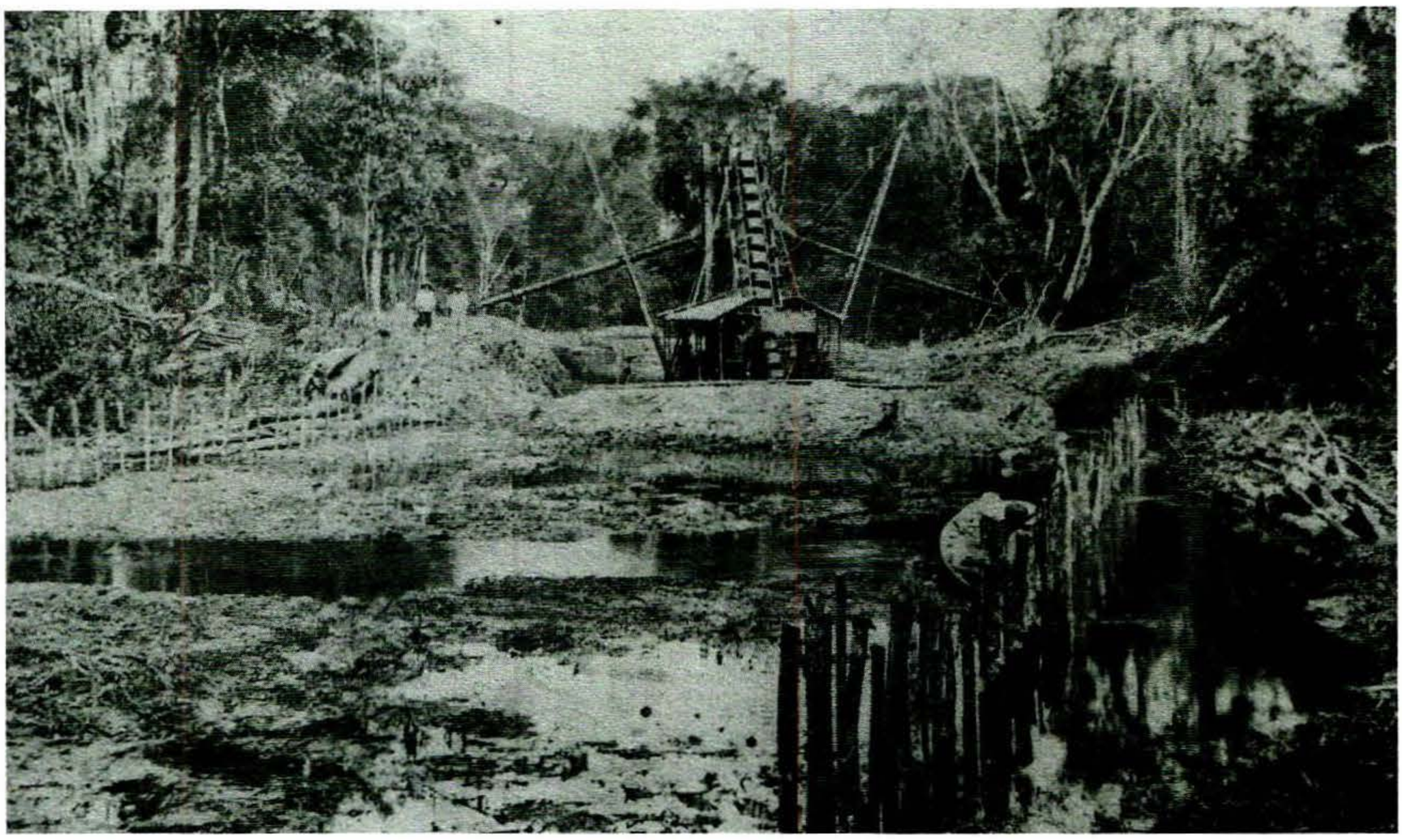

Pembangunan kanal.
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

menerima kedaulatan Belanda merupakan pilihan terbaik yang tersedia waktu itu. Peta politik yang berkembang menempatkan Belanda pada kedudukan utama di Nusantara.

Perubahan penting yang dialami Deli, dan Sumatera Timur pada umumnya, setelah berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda adalah pembukaan lahan perkebunan oleh perusahaan swasta Eropa. Pada tahun 1863 M, atas jasa seorang Arab Said Abdullah Basagih, Nienhuys mulai menanam modal dengan membuka perkebunan tembakau setelah mendapat konsesi tanah seluas 4.000 bahu di dekat Sungai Deli dari Sultan Deli Mahmud Perkasa Alamsyah. Dua tahun kemudian, tahun 1865 M, usaha perkebunan Nienhuys menunjukkan hasil yang baik. Pasar Eropa menyambut temabakau dari Tanah Deli dengan baik. Atas dasar itu ia memperluas perkebunannya dengan meminta tambahan konsesi tanah kepada Sultan Deli. Sultan mengizinkan menggunakan tanah di Kampung Klumpang seluas 2.000 bahu. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1868 M, konsesi tanah diberikan lagi di daerah antara Sungai Deli dan Percut hingga Deli Tua (Ratna, 2012 [4]: 540; Husny, 1978: 133).

Pembukaan lahan perkebunan terus berjalan, bahkan semakin intensif. Hal ini terjadi karena tidak lama setelah berkuasa secara resmi di Tanah Deli, pada tahun 1870 M pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan baru di bidang ekonomi, disebut Sistem Ekonomi Liberal, yang membuka kesempatan bagi perusahaan Eropa menanamkan modal di Hindia Belanda. Akibatnya, permintaan konsesi tanah semakin meningkat, yang sangat terasa pada masa kekuasaan Sultan Deli berikutnya, Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Alamsyah (1873–1924 M). Meski tidak didukung data statistik yang memadai, banyak perusahaan sudah berdiri

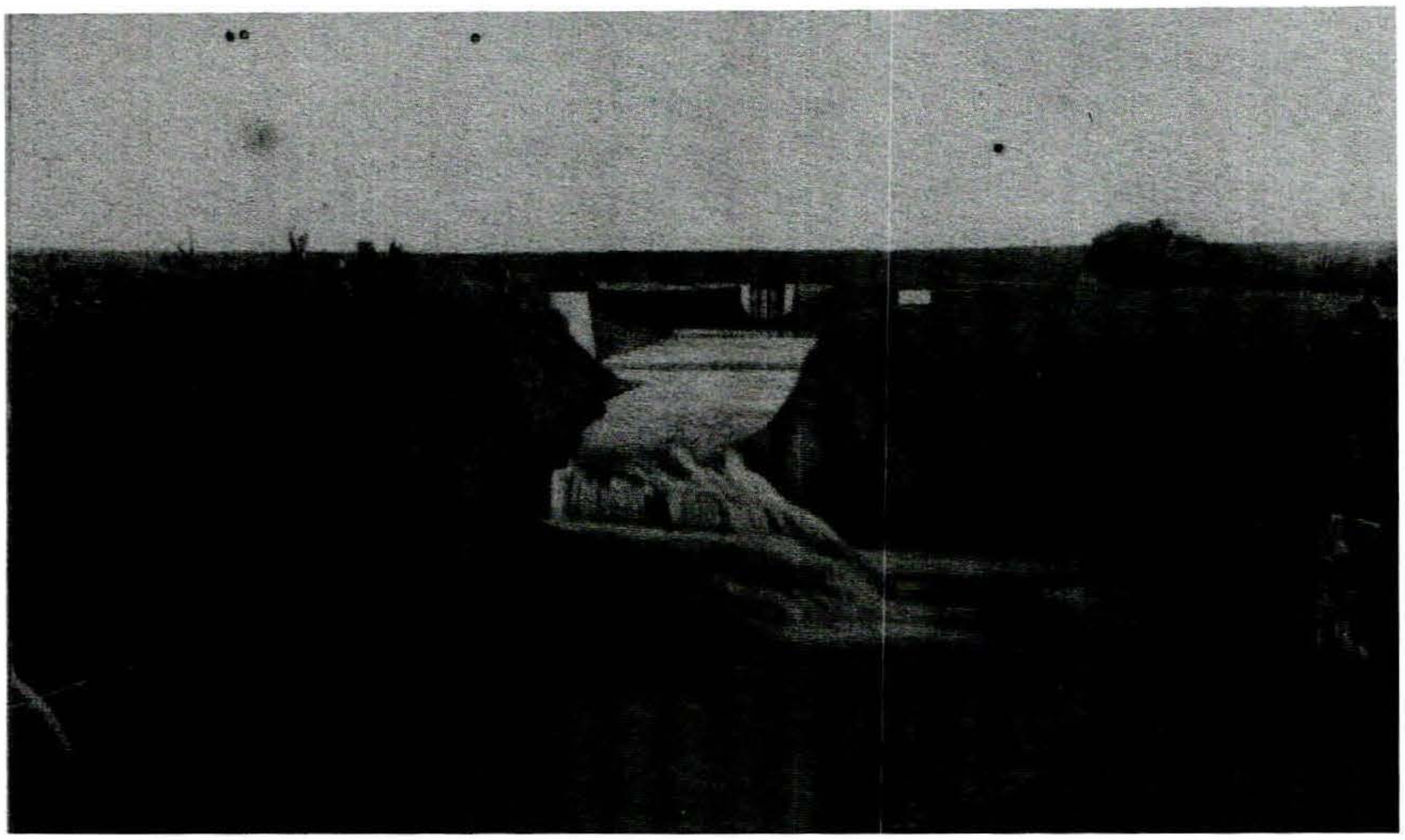

Saluran irigasi
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

pada 1870-an yang begerak dalam perkebunan tembakau, kelapa, karet, pala, kopi, teh, dan lada. Pada awal 1870-an, sebagaiman dicatat Ratna (2012 [4]: 540), perusahaan-perusahaan yang berdiri di Deli meliputi Enterprice, Arendsburg, Polonia, Amplas, Tanjung Morawa, dan Perseverance.

Pembukaan lahan oleh perusahaan Belanda bukan tidak menimbulkan masalah. Datuk Sunggal, sebagai pemimpin kesatuan wilayah utama dengan pengaruh yang besar di Kesultanan Deli, merasa dirugikan dengan konsesi tanah untuk perusahaan perkebunan. Ia menganggap Sultan Deli melanggar aturan tentang tanah dalam masyarakat Karo, karena tanah merupakan milik kesatuan masyarakat adat yang perlu dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan *datuk urung* atau penghulu kampung sebelum disewakan kepada pengusaha asing. Selain itu Sultan Deli juga dinilai telah memberi kebebasan para pengusaha untuk menentukan tanah-tanah yang mau digarap, sehingga membuka kesempatan bagi mereka mengambil tanah subur yang sedianya menjadi lahan pertanian rakyat (Ratna, 2012 [4]: 540; Mahadi, 1975: 81). Dengan asumsi bahwa tanah-tanah tersebut milik sultan, sebagaimana halnya sultan sendiri menyatakan demikian (Pelzer, 1985: 91), maka proses pembukaan lahan untuk perkebunan berlangsung tanpa mempertimbangkan adat masyarakat Karo di Sunggal. Sementara masyarakat Karo semakin terdesak dari tanah adat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Atas dasar itu, dan diperkuat monopoli penjualan candu, masyarakat *datu urung* Sunggal di bawah pimpinan Datuk Kecil (Mahini) dan dibantu Datuk Jalil dan Sulung Barat melakukan perlawanan terhadap pihak perkebunan dan pemerintah kolonial Belanda serta Sultan Deli. Gerakan yang mereka sebut dengan "Perang Sunggal" itu berlangsung pada tahun 1872 M (Ratna, 2012 [4]: 541–543).

Di penghujung tahun 1872 M Perang Sunggal berhasil ditumpas. Maka pembukaan lahan untuk perkebunan terus berlangsung di Tanah Deli, yang disertai dengan kedatangan orang baru dalam kehidupan masyarakat di Tanah Deli. Selain orang-orang Eropa (Belanda) yang menjadi pimpinan perusahaan perkebunan,[6]. mereka yang datang ke Deli adalah para buruh perkebunan, baik dari wilayah lain di Indonesia, terutama Jawa, maupun dari negara lain, terutama Cina. Demikianlah, dalam pembukaan lahan Deli yang meluas pada tahun 1870-an M banyak kuli Cina dipekerjakan, yang diperoleh melalui *broker* di Singapura dan Penang. Sejak tahun 1888 M terdapat sekitar 7.000 orang Cina yang didatangkan langsung dari negeri asal mereka oleh pemilik perkebunan tembakau di Deli. Jumlah mereka terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yakni sekitar setengah juta orang pada 1930-an. Di samping orang Cina, pekerja asal Jawa ikut membanjiri buruh migran di Deli. Mereka umumnya dipekerjakan di perkebunan-perkebunan selain tembakau, yakni kopi sejak 1890-an dan kemudian (setelah 1900) perkebunan karet, teh, dan kelapa sawit. Jumlah pekerja Jawa meningkat menjadi 25.224 pada tahun 1900 dari hanya 1.771 orang pada tahun 1884. Pada tahun 1916 jumlah tersebut meningkat menjadi 150.392 orang dan 212.400 orang pada tahun 1920. Meski sempat turun pada tahun 1925, yakni 168.400 orang, jumlah pekerja asal Jawa kembali naik pada tahun 1929 mencapai 239.281 orang (Reid, 2011: 58–59).

Keberadaan perusahaan perkebunan berikut tenaga kerjanya menjadi awal proses perubahan sosial di Tanah Deli. Medan menjadi kota yang didatangi para perantau dari berbagai pelosok negeri di Indonesia, sebagai "negeri dollar", yang berpengaruh besar dalam kehidupan sosial dan politik di wilayah tersebut. Mereka umumnya bekerja sebagai juru tulis, guru sekolah (Islam dan umum), perajin, pemilik dan penjaga toko, dan pekerja lain di sektor jasa. Oleh karena itu pada awal abad ke-20 Medan tumbuh menjadi kota dengan jumlah penduduk yang besar, meningkat dari 45.200 orang pada sensus tahun 1920 menjadi 76.600 pada tahun 1930, dan 479.100 pada tahun 1961 (Reid, 2011: 89). Medan juga berkembang sebagai kota dengan budaya Melayu-Islam dan bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar, yang menjadi sarana integrasi sosial dari berbagai suku-bangsa yang hadir dan lahirnya generasi baru, yang oleh Hamka (1966: 5) disebut "anak Deli": mereka menjadi orang baru dengan sikap yang bebas dan berbahasa Melayu lancar, relatif terlepas dari akar tradisi mereka, dan menjadi satu generasi dengan karakter "Indonesia".

5. Sultan dan Pengusaha Perkebunan

Aspek penting perubahan menyusul kehadiran perusahaan asing adalah tumbuhnya praktik penyewaan tanah oleh sultan kepada pengusaha perkebunan. Hubungan sultan dengan pengusaha perkebunan menjadi unsur penting dari dinamika kesultanan pada

masa kolonial. Perjanjian dengan Belanda pada tahun 1862 M berisi, antara lain, sultan dijamin dapat menjalankan kekuasaan hukum berdasarkan bentuk aristokrasi Melayu atas berbagai bidang di kesultanan, salah satunya adalah tanah. Oleh karena itu sultan menyatakan bahwa ia merupakan penguasa sekaligus pemilik tanah di wilayah kesultanan. Pernyataan itu pula yang menjadi pegangan pengusaha perkebunan ketika mereka akan membuka lahan untuk perusahaan yang bergerak, terutama, di bidang tembakau. Mereka mendekati sultan dan elit kesultanan untuk memperoleh izin penggunaan tanah.

Dalam hal terakhir inilah hubungan sultan dengan pengusaha berkembang menjadi praktik pemberian upeti atau yang dikenal juga dengan "persen tanah" oleh pengusaha kepada sultan. Hal itu dilakukan pengusaha agar dapat memperoleh harga sewa sangat murah tetapi dengan kualitas tanah yang subur. Sultan memberi konsesi tanah tersebut karena mendapat upeti dalam jumlah besar, di samping karena pengusaha tesebut juga memperoleh izin dari pemegang kekuasaan tertinggi di Tanah Deli dan Sumatera Timur secara umum, Hindia Belanda. Dengan demikian baik sultan maupun pengusaha merasa saling diuntungkan dan sangat nyaman dengan praktik pemberian upeti tersebut. Jumlah dana yang dikeluarkan pengusaha perkebunan kepada sultan sebagai pribadi dari setiap konsesi tanah, sebagai dana upeti atau "persen tanah", digambarkan "lebih murah daripada membayar pajak kepada pemerintah modern" (Reid, 2011: 64). Oleh karena itu praktik pemberian upeti menjadi pola yang umum yang berlaku dalam hubungan sultan dengan pengusaha.

Pada tahun 1870-an M praktik pemberian upeti memang memiliki dasar resmi. Model konsesi tahun 1870-an yang mengatur penyewaan tanah dengan tidak melibatkan pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda mungkin dipengaruhi semangat liberal yang menjadi pola kehidupan ekonomi di tanah jajahan. Para pengusaha yang mengikat kontrak konsesi tanah dengan pihak sultan tidak perlu minta izin dari gubernur jenderal. Baru pada tahun 1892 M, sebagai tanggapan atas sejumlah persoalan yang terjadi—termasuk kasus Perang Sunggal—pemerintah kolonial memberlakukan aturan bahwa kontrak dianggap berlaku setelah disahkan oleh gubernur jenderal (Husny, 1978: 135). Hubungan sultan-pengusaha pada tahun 1870-an merupakan transaksi ekonomi yang bebas dari intervensi pemerintah, sehingga usaha melindungi kaum pribumi belum menjadi perhatian. Satu-satunya prinsp yang menjadi dasar kerjasama ekonomi mereka adalah kesepakatan kedua belah pihak antara sultan dan pengusaha untuk sama-sama saling memberi keuntungan.

Meskipun harga sewa tanah (*erfpacht*) pada awal abad ke-20 dinilai rendah oleh pemerintah, dapat dipastikan bahwa jumlah uang yang masuk ke kas pribadi sultan sangat besar. Hal ini dapat dilihat, misalnya, keengganan mereka keluar dari praktik upeti.

Labuan Deli pada tahun 1876
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Ketika dalam satu perdebatan soal harga sewa tanah pada 1930-an jawatan pertanian gubernurmen menaksir f25 per hektar per tahun merupakan harga yang pantas dibayar untuk sewa tanah yang begitu subur, organisasi persatuan pengusaha perkebunan membujuk Sultan Deli untuk menerima sewa tahunan sejumlah f3.5 per hektar. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari harga sebelumnya yang hanya f1.42 per hektar per tahun. Di tengah usaha pemerintah kolonial mengurangi pemasukan ke kantung sultan sebagai pribadi para pengusaha tembakau justru membiayai perjalanan pesiar Sultan Deli dan Sultan Langkat ke Eropa, masing-masing sebesar f85.000. Mereka menganggap itu sebagai pengeluaran yang umum dilakukan oleh perusahaan tembakau selama bertahun-tahun kepada para sultan (Reid, 2011: 65).

Keinginan untuk tetap melakukan praktik upeti juga terjadi ketika pemerintah kolonial memberlakukan pemisahan kantor perbendaharaan negeri (*landschapskas*) setiap *statelet* (kesultanan) dengan penghasilan pribadi penguasa (sultan). Dengan jumlah dana sangat besar yang dibelanjakan kepada para sultan, para pengusaha tidak mudah tunduk pada aturan yang ditetapkan pemerintah kolonial. Oleh karena itu meski diberlakukan aturan pemisahan dana, sebagian besar royalti perusahaan perkebunan di Deli tetap mengalir ke kantung sultan dan para bangsawan. Pada tahun 1915 persentase yang menjadi pemasukan pribadi sultan mencapai 39,25% dari pendapatan Kesultanan Deli, yang dibayar dalam bentuk gaji resmi ditambah bagian royalti yang menjadi hak mereka. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada 1931Sultan Deli Sultan Amaluddin memiliki pendapatan pribadi sebesar f184.568 setiap tahun (Reid, 2011: 65–66).

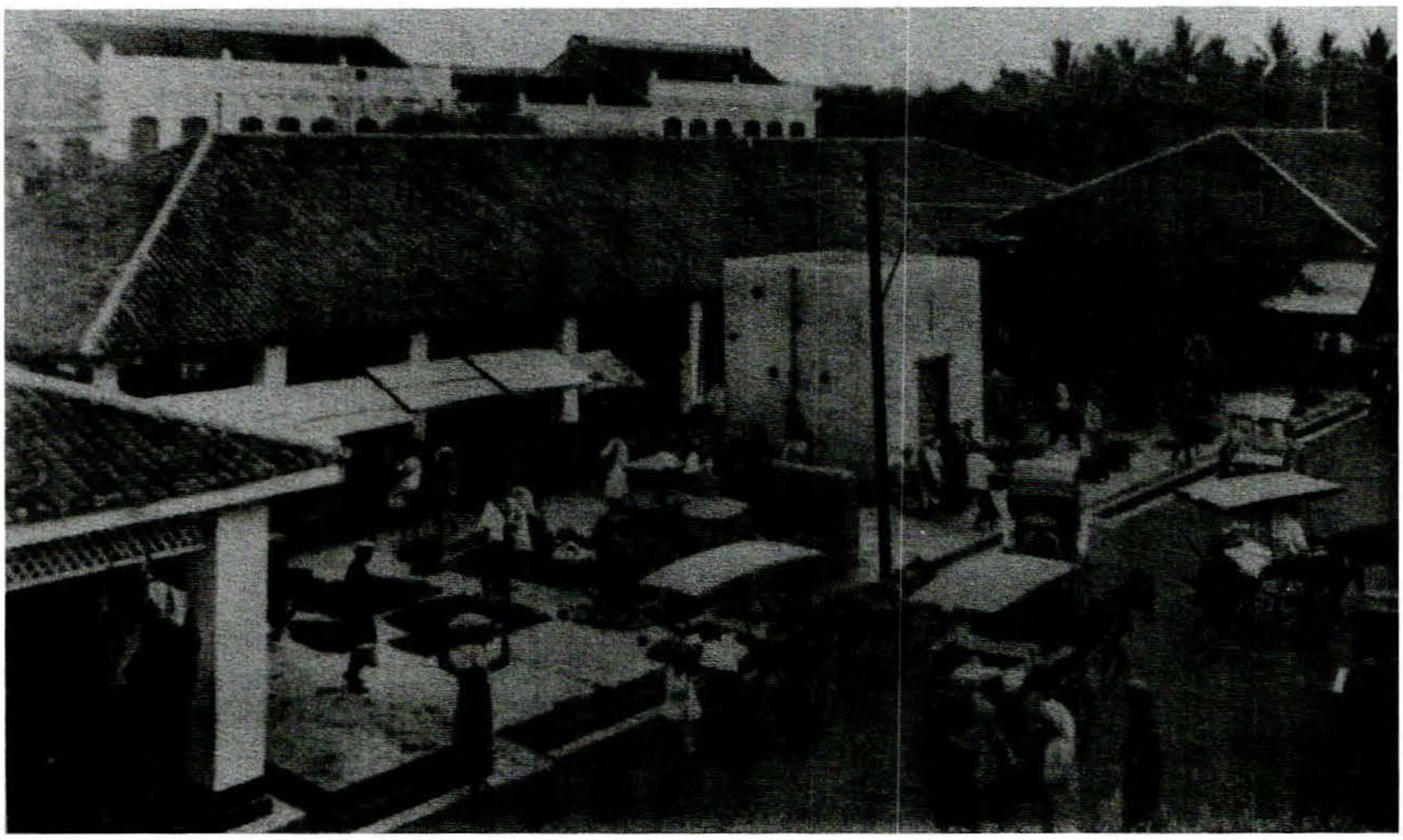

Suasana pasar di Kota Medan
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Dengan kekayaan yang melimpah tersebut Sultan Deli memiliki gaya hidup sangat mewah. Istana megah, mobil-mobil mewah, dan kuda-kuda pacu merupakan beberapa bagian dari kemewahan sultan di samping wisata perjalanan ke Eropa. Pada saat bersamaan pemasukan dari perusahaan perkebunan juga mengantarkan mereka menjadi sultan dengan nama dan sumbangan yang besar bagi kesultanan. Sultan Makmun al-Rasyid Perkasa Alamsyah menjadi salah satu contoh. Sejak bekuasa pada tahun 1873 M ia langsung terlibat dalam usaha perkebunan, khususnya tembakau. Saat itu sudah terdapat 44 perusahaan tembakau yang berusaha di Deli dengan hasil panen setahun mencapai 125.000 pak, yang membuat Deli sebagai salah satu penghasil tembakau terbesar di dunia (Erman, 2011: 60). Sultan Makmun dipastikan menjadi bagian dari pola upeti pengusaha perkebunan.

Namun demikian dengan kekayaan yang melimpah tersebut Sultan Makmun al-Rasyid juga melakuan banyak hal untuk kemajuan kesultanan. Dalam bidang sosial-ekonomi, antara lain, ia sedapat mungkin mempertahankan hak-hak tanah dan lembaga adat. Ia juga melakukan penataan kaum pekerja yang berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Para pekerja perkebunan yang telah habis kontraknya dan tidak pulang kembali ke Jawa, misalnya, ditampung di "kampung-kampung koloni" atau tinggal di kampong Melayu. Nama-nama kampong, seperti kampong Banjar, kampong Bantan, kampong Jawa, kampong Mandailing, dan kampong baru timbul di berbagai tempat. Pada tahun 1886 M ia juga mendirikan *Plaatselijk Fond* (Negeriraad) di kota Medan yang mengurus berbagai kepentingan kota. Sejumlah dana yang biasa diterima sultan, seperti sewa toko dan perumahan di atas tanah *erfpacht*, diserahkan melalui lembaga tersebut sebagai

Jalan utama di Kota Medan
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

sumber dana *Plaatselijk Fond* untuk keperluan pembiayaan jalan, parit, penerangan jalan, dan sebagainya. Demikian juga pajak kendaraan yang dahulu dikutip sultan kemudian diserahkan kepada *Plaatselijk Fond* (Husny, 1978: 160–161).

Pada tahun 1891–1893 M kota Medan diperluas dengan tanah yang diserahkan oleh pihak perkebunan asing atas persetujuan dan melalui sultan. Pada tanggal 30 Nopember 1918 Sultan Makmun al-Rasyid kembali menghibahkan sekitar 200 ha tanah yang terletak di perbatasan kota Medan kepada *Gemeente* Medan, perubahan dari *Plaatselijk Fonds*. *Gemeente* Medan didirikan secara resmi oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 1 April 1909. Untuk memperindah kota Medan Sultan Makmunal-Rasyid mendirikan Istana Maimun (1888 M), Mesjid Raya (1907 M), Istana Puri di Jalan Raja (sayang sekarang sudah tidak ada), Kantor Kerapatan (1906 M) yang sekarang menjadi Kantor Bupati Deli/Serdang, dan taman kolam Tengku Khalijah yang kini bernama Taman Sari Deli (Husny, 1978: 161–162). Dengan demikian Sultan Makmu al-Rasyid membangun Deli dan kota Medan dan membawa kesultanan mencapai kejayaannya.

6. Perubahan Politik dan Berakhirnya Kesultanan

Kesultanan Deli mengalami perubahan sejak pendudukan Jepang di Sumatera Timur pada tanggal 12 Maret 1942, hanya empat hari setelah Belanda menyerah di Jawa, dan berlangsung hingga setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Segera setelah Jepang berkuasa di Sumatera Timur kekuasaan otonom kesultanan-kesultanan Melayu tidak lagi berfungsi. Berbeda dengan Belanda, Jepang ingin memerintah

rakyat Deli dan Sumatera Timur secara langsung demi memperoleh dukungan untuk menghadapi serangan balasan dari Sekutu. Rakyat Sumatera Timur, terutama yang bukan Melayu, menyambut kedatangan Jepang. Didorong rasa anti-sultan, mereka—sebagian besar petani asal suku Karo—menyambut kedatangan tentara Jepang di Pangkalan Brandan dengan slogan "hapuskan raja-raja" (Reid dan Saya, 1976: 124).

Pemerintah militer Jepang di Sumatera Timur menerapkan sejumlah kebijakan yang kemudian mengakibatkan perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat di wilayah tersebut, yang dapat dijelaskan melalui tiga aspek, yakni kebijakan politik dan pemerintahan, hubungannya dengan Islam, serta perkebunan dan hak atas tanah. Terkait politik dan pemerintahannya di Indonesia, Jepang berusaha mengakomodasi tiga kekuatan elit, yaitu (1) nasionalis sekuler, (2) pemimpin-pemimpin Islam, dan (3) birokrat tradisional (*pamong-praja* di Jawa, *kerajaan* di Sumatera Timur, *penghulu* di Sumatera Barat, dan *uleebalang* di Aceh). Kebijakan itu dilakukan Jepang untuk memperoleh dukungan dalam melaksanakan kebijakan politik mereka, terutama dalam menghadapi perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. Namun demikian kebijakan politik Jepang itu memantik benih-benih konflik yang telah ada sejak zaman kolonial Belanda, di antaranya *pergerakan* (pemimpin politik nasionalis dan Islam) melawan *kerajaan* (bangsawan). Kebijakan seperti itu merupakan akibat politik "pecah dan kuasai" untuk melemahkan pengaruh pemimpin Indonesia. Dengan demikian segala perjanjian dan bentuk kontrak politik yang pernah ditandatangani antara kesultanan dan Belanda dihapus, dibatalkan, dan tidak diakui oleh Jepang (Erman, 2011: 64–65).

Sementara yang berkait dengan hak atas tanah, Jepang berpegang pada prinsip bahwa seluruh tanah di kawasan pendudukan dinyatakan berada di bawah kekuasaan kekaisaran Jepang. Pengelolaan perkebunan di Sumatera Timur ditempatkan di bawah kekuasaan *shu chokan* (gubernur keresidenan). Akibatnya semua kontrak antara sultan, perusahaan perkebunan, dan pemerintahan Belanda dibatalkan. Maka ketika mengalami kekurangan makanan akibat boikot Sekutu, Jepang memerintahkan tanah-tanah perkebunan tembakau dan tanah kosong ditanami padi, jagung, dan tanaman makanan pokok lain. Kebijakan Jepang tersebut membuka kesempatan para pendatang mengerjakan tanah kosong perkebunan. Maka para pendatang dari berbagai suku mulai mendatangi tanah-tanah perkebunan dan membuka hutan. Mereka mengerjakan tanah kosong yang semula dikuasai perkebunan, tetapi dianggap tanah adat oleh orang Melayu. Orang Jawa pekerja perkebunan atau yang sudah tidak bekerja dapat membuka tanah. Demikian pula orang Batak Toba, Simalungun, dan Mandailing, sekalipun tidak dalam jumlah banyak, mengalir ke tanah kosong perkebunan. Sesudah itu para pendatang berlomba-lomba membangun rumah di atas tanah perkebunan sebagai tempat tinggal permanen. Para pendatang, yang dapat disebut "pemukim liar", beranggapan bahwa segala

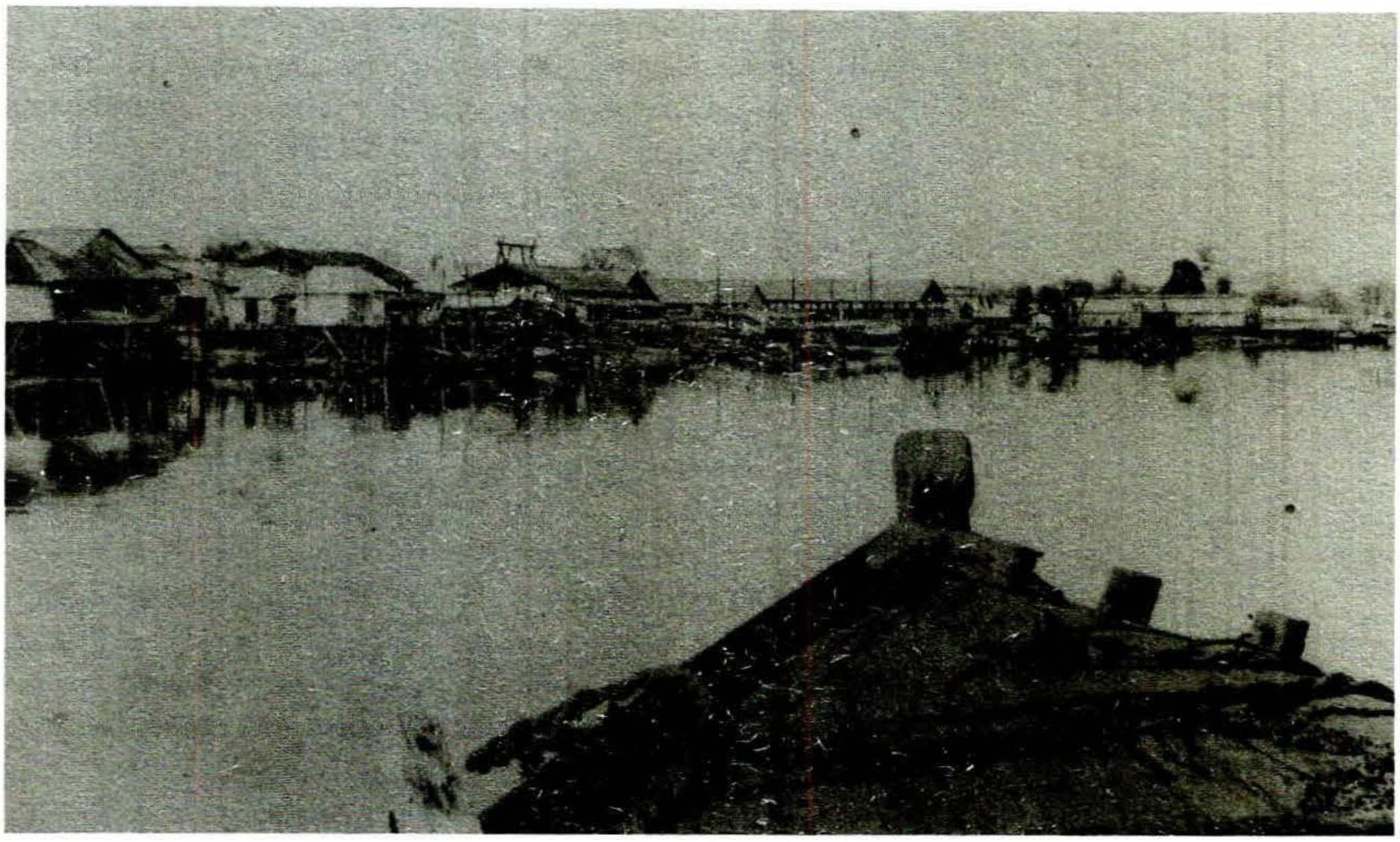

Pangkalan Brandan
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

bentuk diskriminasi lama masa Belanda yang menghalangi mereka memperoleh tanah dianggap sudah berakhir (Erman, 2011: 64–65).

Bagi kesultanan Deli, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Sultan Amaluddin al-Sani Perkasa Alamsyah, mengalami masa pendudukan Jepang sebagai pukulan yang semakin berat. Sultan tidak dapat lagi menguasai wilayah dan penduduk sebagaimana berlaku pada zaman Belanda. Sultan juga tidak dapat melindungi tanah adat yang menjadi kewajibannya, sehingga para pendatang dengan leluasa menggarap tanah tersebut. Oleh karena itu ketika Indonesia merdeka, Deli termasuk kesultanan yang tidak segera menyatakan bergabung dengan pemerintah Indonesia. Saat tentara Sekutu (Inggris) dan Belanda (NICA) datang pada tahun 1948 sebagian besar bangsawan Melayu, sultan-sultan Deli, Langkat, dan Asahan bersikap ragu-ragu dan bermuka dua antara bergabung dengan Republik Indonesia atau tetap sebagai kerajaan di bawah perlindungan Belanda yang kembali ke Indonesia (Erman, 2011: 66–68).

Dengan demikian kemerdekaan Indonesia, dalam konteks Sumatera Timur, menciptakan konflik antara masyarakat umum dan kesultanan. Di satu sisi kedudukan rakyat, partai politik, dan tentara semakin kuat mengisi kemerdekaan. Mereka melihat kesultanan, di sisi lain, sebagai perwujudan kekuasaan tradisional yang sangat dekat dengan Belanda. Didorong harapan kemerdekaan dan semangat revolusi, terutama sayap kiri, sebagian besar masyarakat berpandangan bahwa kesultanan berada pada posisi berseberangan walaupun pernyataan resmi mereka pada tanggal 2 Januari 1946 mengatakan kesultanan tidak anti-republik.[7] Pernyataan tersebut bahkan dianggap muslihat belaka. Keyakinan itu diperkuat sikap

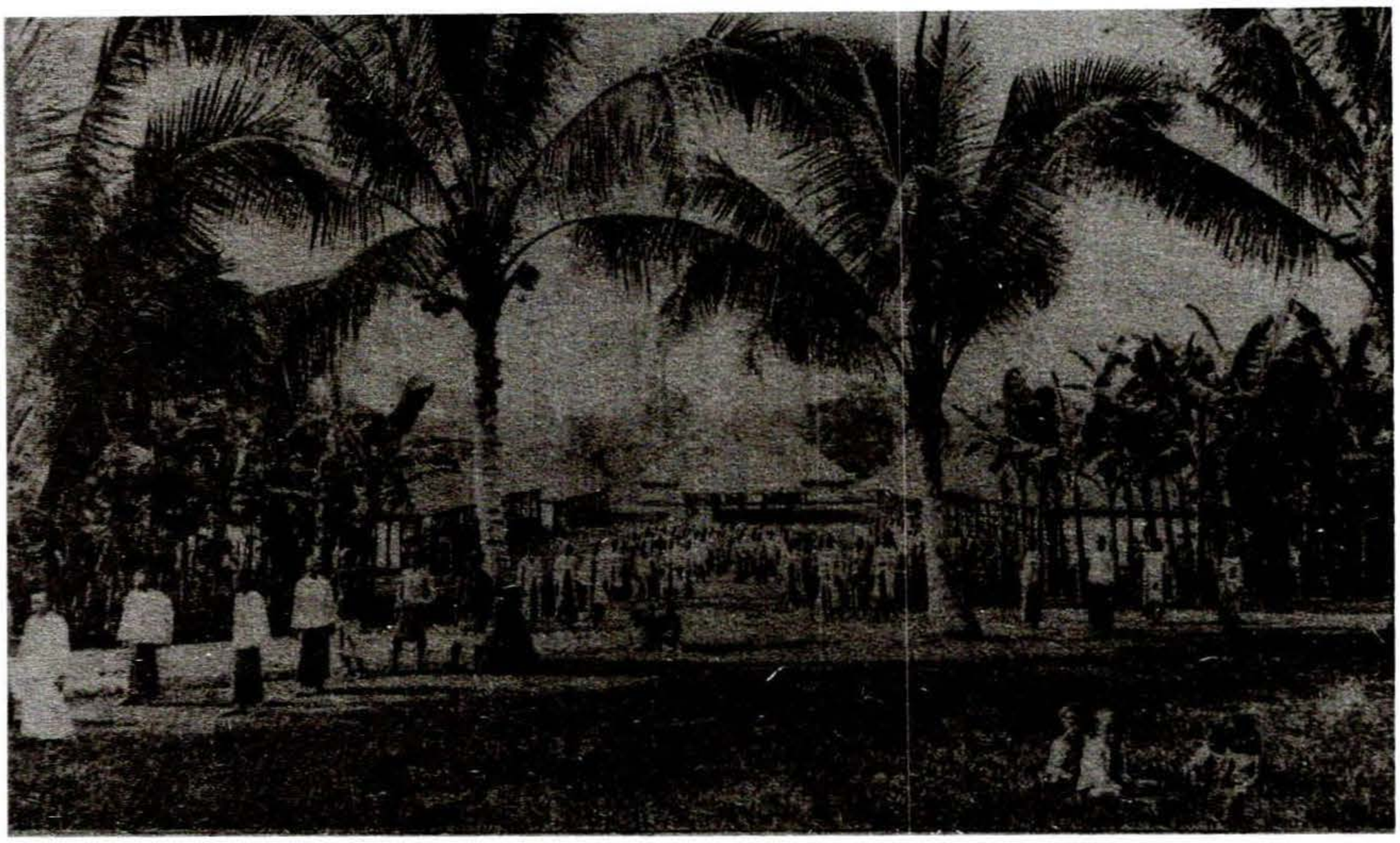

Perumahan tetap orang Jawa di wilayah Kerajaan Deli
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

kesultanan terhadap republik. Dalam penobatan Sultan Deli pada tahun 1945 Sultan Osman al-Sani Perkasa Alamsyah (1945–1967 M) pihak Istana mengundang seorang pejabat tinggi Belanda dan seorang Mayor Inggris, yang dimaknai oleh rakyat, terutama kaum kiri, sebagai usaha memperoleh kekuatan secara hukum dari Belanda dalam pendudukan Sekutu. Sikap itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap revolusi Indonesia dan rakyat dihimbau tidak mempercayai sultan seraya mencetuskan "revolusi sosial" di Sumatera Timur (Erman, 2011: 68–69; Said, 1977: 156).

Sejak saat itu revolusi sosial menjadi wacana umum yang berkembang kuat di Sumatera Timur. Di bawah tekanan kelompok berhaluan kiri wacana tersebut semakin menguat, sehingga membuat Wakil Gubernur Dr. Amir, mengumumkan "revolusi sosial" pada tanggal 5 Maret 1946. Ia mengeluarkan pernyataan tersebut saat Gubernur Sumatera T. Moh. Hasan sedang berada di Sumatera Barat. Namun gerakan itu bukan sekedar melakukan penghapusan wilayah otonom sebagai tujuan utama gerakan, tetapi yang terjadi justru pembunuhan dan perampasan harta milik kesultanan. Revolusi yang berlangsung selama dua minggu tersebut memakan korban, terutama keluarga sultan-sultan Melayu, dan istana-istana (terutama Langkat dan Asahan) dirampok dan dibakar. Penyair Tengku Amir Hamzah termasuk sebagai korban yang dipancung di Kuala Begumit (Erman, 2011: 69–70).

Setelah tragedi Revolusi Sosial 1946 berakhir, keluarga dan ahli waris Kesultanan Deli menempati Istana Maimoon sebagai tempat tinggal, satu-satunya istana yang tersisa karena pada saat terjadi revolusi dijaga ketat tentara Sekutu. Sementara itu organisasi Islam

melakukan konsolidasi. Organisasi Islam Al-Jam'iyatul Washliyah, yang sebagian besar anggotanya kelompok etnis Mandailing, melakukan kerjasama mengggalang kekuatan dengan organisasi Islam modern Muhammadiyah yang didukung masyarakat Minangkabau. Pada tanggal 21 Mei 1947, sebulan sebelum militer Belanda mengumumkan agresi pertama untuk menguasai seluruh kota besar di Sumatera Timur, para ulama Al-Washliyah dan Muhammadiyah bersama faksi-faksi Islam lain menyelenggarakan konferensi ulama di Tebing Tinggi. Perhatian konferensi terpusat pada kedudukan sultan-sultan Melayu sebagai *uli al-amri* (pelindung umat Islam) di Sumatera Timur dan kemungkinan kesultanan-kesultanan tersebut mendirikan negara terpisah dengan perlindungan Belanda. Konferensi mengeluarkan *fatwa* bahwa pemerintah Republik Indonesia merupakan satu-satunya pemerintah yang disahkan oleh rakyat. Oleh karena itu kesultanan-kesultanan Melayu telah *ma'zul* (tamat) dan tidak lagi diakui sebagai *uli al-amri.* Akibatnya semua *kadi*, *imam*, dan pegawai-pegawai tinggi Islam lain yang ditunjuk oleh sultan dianggap tidak sah oleh umat Islam republikan (Pelly, 1994: 201–203; Erman, 2011: 70–71).

Demikianlah pengalaman revolusi sosial tersebut mendorong bangsawan Melayu menjauhkan diri dari republik dan mencari perlindungan Belanda yang berhasil menduduki kembali sebagian besar Sumatera Timur dalam agresi militer dan berusaha mengembalikan kekuasaannya. Oleh karena itu dapat dipahami apabila Negara Sumatera Timur (NST) yang didirikan kemudian dianggap oleh sebagian orang Melayu sebagai perlindungan politik terhadap kelangsungan kepentingan orang Melayu. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember 1947 Belanda membentuk NST dan diproklamirkan di Medan pada tanggal 29 Januari 1948. Dr. Mansoer, seorang bangsawan Melayu bekas pengurus Comite Daerah Istimewa Sumatera Timur (DIST) yang dibentuk setelah Belanda menguasai Sumatera Timur pasca revolusi sosial, dilantik sebagai Wali Negara NST. Komposisi elit NST bukan saja diisi oleh orang Belanda, melainkan juga sebagian kecil elit tradisional (bangsawan Melayu, Simalungun, dan Karo). Mereka memang mengharapkan NST berfungsi mengembalikan kembali kejayaan masa lalu mereka sebagaimana sebelum perang dan pecahnya revolusi sosial (Langenberg, 1982: 17; Erman, 2011: 71–72).

Meskipun demikian kaum republikan, terutama kaum pendatang di Sumatera Timur yang menganggap tidak adanya perbedaan bagi penguasaan tanah, semakin menentang keras dan menginginkan pembubaran NST. Meski sempat berkuasa dengan bergabung dalam RIS (Republik Indonesia Serikat) pada tahun 1949 NST akhirnya dibubarkan pada tanggal 13 Agstus 1950 menyusul penyerahan kedaulatan pada tahun 1950 dengan Indonesia kembali ke dalam sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh elit NST sepakat berintegrasi ke dalam republik. Maka sejak saat itu Kesultanan Deli berakhir sebagai satu kekuatan politik.

(Endnotes)

1 Bandingkan dengan pedapat lain, seperti dikemukakan Luckman Sinar (2007), yang melihat Gotjah Pahlawan adalah Tuanku Muhammad Deli atau Muhammad Daik. Kedua nama tersebut orang yang sama, bukan bapak-anak sebagaimana diketengahkan Husny seperti dikutip di atas. Berdasarkan kajiannya terhadap *Hikayat Deli*, Luckman Sinar menuturkan bahwa Muhammad Daik putra seorang raja India yang terdampar saat kapalnya tenggelam di dekat kuala Pasai saat merantau ke Nusantara. Kemudian ia pergi ke Aceh dan mengabdikan diri untuk raja Aceh hingga kemudian berpangkat sebagai Gotjah Pahlawan untuk mengepalai orang-orang besar Aceh dan raja-raja taklukan Aceh. Lihat juga Erman (2011: 47).

2 Tidak banyak informasi tentang Kerajaan Haru kecuali nama kerajaan tersebut muncul dalam sumber Cina, bahwa Kerajaan Haru mengirim utusan ke Cina pada tahun 1282 M pada masa pemerintahan Kubilai Khan (Erman, 2011: 45; lihat juga Sinar, 1977).

3 Penting pula ditambahkan bahwa putra ketiga Panglima Paderap, Tuanku Tawar (Arifin) Kejeruan Santun, yang membangun kekuasaan di Denai, menggabungkan wilayahnya menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Serdang. Sementara putra pertama Panglima Paderap, Tuanku Jalaluddin gelar Kejuruan Metar, dikesampingkan dari calon pemangku takhta Kesultanan Deli karena cacat mata (Erman, 2011: 54).

4 Selain penguasa Deli, Sultan Siak juga melantik Raja Denai dengan gelar Raja Graha al-Wasikubillah Kurnia Siak (1829 M) dan Raja Sebajadi dengan gelar Kejuruan Santun Serbajadi (Husny, 1978: 100–101).

5 Wilayah raja-raja yang dinyatakan termasuk dalam kekuasaan Siak dan kemudian, melalui Traktat Siak, menjadi wilayah kekuasaan Belanda meliputi Tanah Putih, Bangko, Kubu, Panai, Bilah, Kualuh, Asahan, Batubara, Bedagai, Padang, Serdang, Percut, Perbaungan, Deli, Langkat, dan Tamiang. Lihat Husny (1978: 106–107).

6 Barisan pimpinan (*manager*) perkebunan tembakau hampir semuanya orang Belanda, sementara perkebunan-perkebunan lain (karet, teh, dan kelapa sawit), yang dibuka pada awal abad ke-20, banyak yang mempekerjakan orang-orang Inggris, Amerika, Prancis, dan Swiss, dalam jumlah yang sama dengan orang-orang Belanda (Reid, 2011: 54).

7 Berbagai kesultanan Melayu pada tanggal 2 Januari 1946 mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak anti-republik. Pernyataan itu disampaikan dalam satu pertemuan dengan Wakil Gubernur Dr. Amir dan beberapa kesultanan Melayu. Satu-satunya sultan yang menghadiri pertemuan adalah Sultan Langkat, sedang kesultanan lain diwakili oleh utusan. Selain terkesan tidak sungguh-sungguh, banyak yang berkeyakinan bahwa pernyataan itu dikeluarkan oleh kesultanan-kesultanan Melayu karena tersebarnya berita tentang bencana yang menimpa para bangsawan Aceh dalam "Perang Tjumbok" atau konflik bersenjata yang memakan korban tidak sedikit di kalangan bangsawan Aceh (Erman, 2011: 68; Said, 1973: 170).

— 14 —

Kesultanan Serdang

Selain Kesultanan Deli, di pantai timur Sumatera berdiri Kesultanan Serdang, yang memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Deli. Selain berasal dari keturunan raja yang sama, Serdang menerapkan kebijakan politik dan budaya yang relatif tidak berbeda dengan Deli. Keduanya sama-sama bersandar pada budaya Melayu. Satu perbedaan yang sangat kelihatan terkait dengan sikap politik pada awal Indonesia merdeka. Berbeda dengan Deli (Sultan Osman al-Sani Perkasa Alamsyah, 1945–1967 M) yang bersikap sangat hati-hati, bahkan ragu-ragu, seraya berharap dukungan pihak Sekutu, Kesultanan Serdang dengan tegas mengakui dan menyatakan dukungannya terhadap Republik Indonesia (Reid, 2011: 242).

Terlepas dari perbedaan itu, yang memang hanya sementara,[1] Kesultanan Serdang sama-sama memberi sumbangan penting bagi perkembangan apa yang kemudian disebut sebagai "Peradaban Sumatera Timur" (Husny, 1978). Meski berawal dari perpecahan dengan saudaranya yang menjadi Sultan Deli, penguasa Kesultanan Serdang tetap mengaku berasal dari keturunan raja yang sama. Begitu pula Kesultanan Serdang, seperti halnya Kesultanan Deli, sama-sama melalui proses politik di bawah perlindungan Kesultanan Aceh dan kemudian Kesultanan Siak, dan selanjutnya kolonialis Belanda. Di samping itu Kesultanan Serdang berperan dalam menyerap unsur-unsur Islam dalam struktur politik kesultanan dan perkembangan Islam pada umumnya di wilayah Sumatera timur.

1. Berawal dari Pertikaian

Pembentukan Kesultanan Serdang bermula dari perselisihan dan pertikaian internal di Kesultanan Deli pada tahun 1720 M ketika penguasa Deli ketiga, Panglima Paderap (berkuasa sejak 1700 M) meninggal dunia pada tahun 1720 M. Deli mengalami perebutan kekuasaan di antara putra Panglima Paderap. Tuanku Umar Johan Alamsyah, putra keempat dari pernikahannya dengan permaisuri, berebut takhta dengan putra kedua Panglima Paderap, Tuanku Panglima Pasutan. Sebagai satu-satunya keturunan permasuri, Tuanku Umar Johan Alamsyah merasa lebih berhak atas takhta kerajaan. Dalam perebutan kekuasaan yang memuncak pada 1722 Tuanku Panglima Pasutan berhasil mengusir Tuanku Umar Johan Alamsyah ke luar istana. Bersama ibunya, Tuanku Puan Sampali, ia terpaksa berlindung ke daerah lain hingga sampai pada suatu tempat yang kemudian bernama Kampung Besar (Serdang).

Di saat Tuanku Panglima Pasutan mengukuhkan diri sebagai Sultan Deli yang baru, Tuanku Umar Johan Alamsyah secara perlahan membangun kekuasaan yang terpisah dari Kesultanan Deli. Setelah dibantu dua orang Raja Batak Karo, yakni Raja Urung Sunggal dan Raja Urung Senembah, serta kemudian juga Raja Urung Batak Timur yang menguasai wilayah Serdang bagian Hulu di Tanjong Marawa dan seorang pembesar Aceh bernama Kejeruan Lumu, Tuanku Umar Johan Alamsyah mengumumkan berdirinya kesultanan Serdang pada Tahun 1723 M. Sementara itu putra ketiga Panglima Paderap, Tuanku Tawar (Arifin) Kejeruan Santun, mendirikan kekuasaan di Denai dan kemudian menggabungkan wilayahnya menjadi bagian dari Kesultanan Serdang (Erman, 2011: 53–54).[2]

Meskipun demikian dalam merumuskan jati diri kerajaan, Serdang mengikuti Deli. Tokoh utama dalam pembentukan Kesultanan Deli, Gotjah Pahlawan, juga merupakan asal-usul keturunan Sultan Serdang. Ia juga dinyatakan sebagai peletak dasar Kesultanan Serdang (Pelly, 1986: 13–14). Serdang juga mengakui berada di bawah perlindungan Kesultanann Aceh, tempat Gotjah Pahlawan berasal dan sekaligus sebagai abdi Sultan Iskandar Muda. Tidak lama setelah menyatakan diri sebagai kesultanan, Serdang terlibat pertikaian dengan Deli memperebutkan daerah Denai dan Percut (Pelly, 1986: 16). Sekalipun demikian Serdang tidak takut pada serangan Deli karena keduanya menjalin hubungan politik dengan kesultanan yang sama sebagai pelindung.

2. Kesultanan Berdaulat

Serdang merupakan "pecahan" Deli. Setelah menyatakan diri sebagai sebuah kesultanan, Serdang secara perlahan melakukan konsolidasi. Dalam konteks wilayah kekuasaan, sejak awal Serdang berkuasa atas daerah-daerah Lubuk Pakam, Batangkuis, Percut, dan Sungai Tuan. Wilayah kekuasaan Serdang semakin meluas pada tahun 1820 M karena bertambah dengan wilayah-wilayah Perbaungan, Dolok, Siantar, Tanjung Morawa, Senembah, Padang, Bedagai, Denai, dan Serbajadi (Pelly, 1986: 17). Dengan wilayah yang jelas dan dikuasai secara penuh, Serdang memiliki kedudukan yang sejajar dengan Deli. Luas wilayah kesultanan Serdang relatif berimbang dengan luas wilayah Kesultanan Deli.

Datuk Senembah berjasa besar membuat Serdang sejak masa awal memiliki wilayah kekuasaan luas karena sejumlah wilayah Kesultanan Serdang merupakan pemberian Datuk Senembah. Hal ini terkait dengan kedudukan Senembah (termasuk Senembah Deli) sebagai satu satuan politik paling besar, dan dengan wilayah luas, yang bergabung dengan Kesultanan Serdang. Namun akibat pertikaian berkepanjangan di antara bangsawannya Senembah melemah, sehingga wilayah kekuasaannya secara perlahan jatuh di bawah kekuasaan Sultan Serdang. Daerah-daerah tersebut meliputi, antara lain, Tanjung Morawa dan Lubuk Pakam. Adapun penggabungan Perbaungan ke dalam kekuasaan Serdang karena

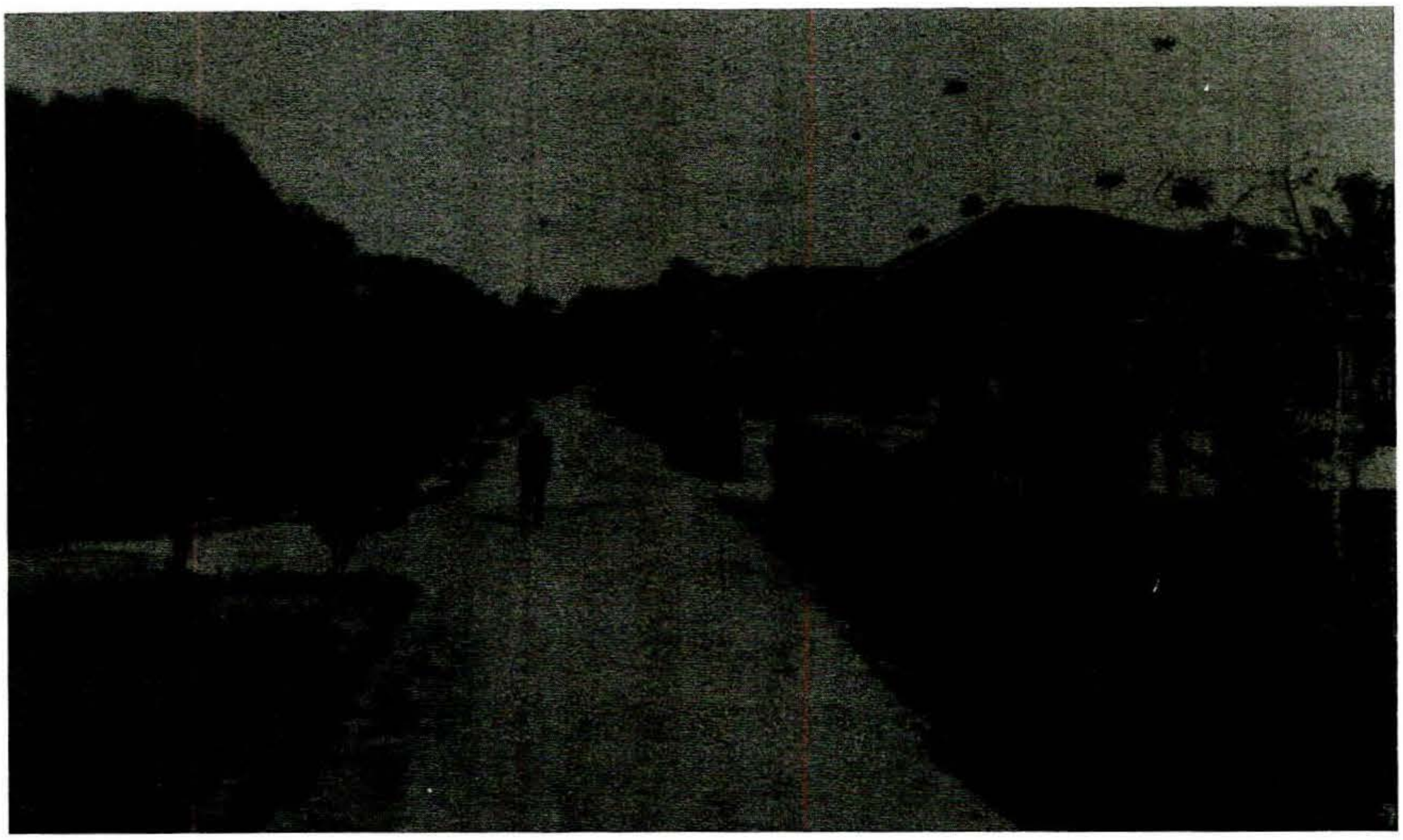

Istana Sultan Serdang
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sultan Serdang Tuanku Johan Pahlawan Alamsyah (1767–1817 M) menikahi Tuanku Puan Seri Alam, saudara Raja Perbaungan (Pelly, 1986: 16–17; Sinar 1971: 95).

Untuk mengukuhkan kekuasaannya Tuanku Johan juga membentuk sistem kekuasaan yang memberi tempat kaum elit politik, disebut "orang besar", menjadi lembaga dalam struktur kerajaan. Lembaga tersebut bernama Lembaga Orang Besar Berempat, yang berkedudukan penting dalam dinamika politik Kerajaan Serdang. Keempat orang besar tersebut adalah (1) Pangeran Muda di Sungai Tuan; (2) Datok Maha Menteri berwilayah di Arasbaku; (3) Datok Paduka Raja yang wilayahnya di Batang Kuis, keturunan Kejeruan Lumu; dan (4) Sri Maharaja berwilayah di Ramunia (Sinar, 2007: 56). Keempat orang besar ini bergelar "wazir sultan", suatu gelar yang tidak hanya berkait dengan kedudukan sosial terhormat, tetapi juga pengaruh politik yang besar.

Kebijakan yang diambil Tuanku Johan mendirikan Lembaga Orang Besar Berempat merupakan pilihan politik yang tepat mengingat keempat orang besar tersebut memberi dukungan penting dalam pembentukan Kesultanan Serdang. Sebagaimana halnya di kerajaan Deli, langkah tersebut menjadi mekanisme efektif untuk membuat kerajaan tetap utuh. Dalam hal ini Tuanku Johan berhasil dan berjasa membangun Serdang sebagai kerajaan berdaulat, baik dari gangguan pihak luar yang ingin menguasai wilayah Serdang maupun dari kemungkinan pertikaian di dalam keluarga kerajaan. Di samping itu Tuanku Johan Alamsyah juga meletakkan landasan bagi berlakunya dasar-dasar budaya Melayu. Ia berusaha menerapkan sejumlah ajaran Islam dengan memasukkkannya ke dalam praktik adat seraya mengacu pada makna filosofis ungkapan yang sangat

terkenal dalam budaya Melayu: "Adat Melayu bersendikan hukum syara' dan syara' bersendikan kitabullah". Oleh karena itu pada masa pemerintahan Tuanku Johan Alamsyah di Kerajaan Serdang berlaku peraturan adat-istiadat kerajaan yang meliputi (1) adat sebenar adat, yakni adat sesuai hukum alam seperti api itu panas, air itu dingin, siang-malam, lelaki-perempaun, dan sebagainya; (2) adat yang diadatkan, yakni adat yang lahir berdasarkan kesepakatan antara raja dan para orang besar di kerajaan; (3) adat yang teradat, yakni adat yang terbentuk melalui proses sosiologis karena masyarakat terus-menerus melaksanakan sehingga menjadi adat (*rasm*), dan kemudian diakui menjadi hukum adat dengan sanksi; dan (4) adat-istiadat; yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di istana raja (Sinar, 2007: 56; Azizi, 2013: 37).

Proses konsolidasi kekuasaan Kesultanan Serdang juga berlangsung di tangan penguasa berikutnya, Tuanku Sultan Thaf Sinar Basarshah (1817–1850 M). Di samping melanjutkan kebijakan sultan pendahulunya menjunjung tinggi adat Melayu bersendikan Islam, Sultan Thaf Sinar juga melakukan sejumlah langkah untuk kemajuan Serdang. Sebagaimana kesultanan lain di Sumatera timur, Serdang saat itu tengah berada di bawah perebutan kekuasaan dua kekuatan politik besar di bagian barat Nusantara, yakni Kesultanan Aceh dan Kesultanan Siak. Siak memanfaatkan kondisi Aceh yang tengah mengalami kemunduran dengan menyatakan kekuasaannya atas kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut. Serdang di bawah Sultan Thaf Sinar pun mengakui kekuasaan Siak sebagai pelindung meski tidak seperti kesultanan Deli yang diberikewenangan melantik atau mengangkat secara resmi penguasa-penguasa lain di Sumatera timur (Husny, 1978: 100–101). Serdang menerima pemberian cap dari Siak, yang berarti mengakui berada di bawah naungan Siak (Pelly, 1986: 76).

Begitu pula hal yang sama dilakukan ketika Aceh mengambil langkah politik dan militer untuk menghadang sikap agresif Siak. Seperti halnya Deli yang menerima sebagai Wakil Sultan Aceh dengan cap sembilan dan *bawar* sebagai tanda kebesaran kerajaan, Serdang juga mengikuti langkah tersebut. Meskipun juga menerima cap sembilan, tetapi Serdang tidak seistimewa Deli yang mendapat gelar Wazir Sultan Aceh, yang setara dengan "orang besar" (Husny, 1978: 101). Pun seperti Sultan Deli, Sultan Serdang bersikap mengakui dua kekuatan politik utama di bagian barat Nusantara, Aceh dan Siak. Hal itu dilakukan sebagai langkah diplomatis untuk menghindar sebagai korban perebutan kekuasaan dua kekuatan politik tersebut, yang diungkapkan dalam pernyataan "Beraja ke Aceh, Bertuan ke Siak". Dengan cara demikian, kesultanan Serdang bisa leluasa berkembang menjadi kekuatan politik di Sumatera timur, yang sejajar dengan kesultanan-kesultanan lain.

Sementara itu Serdang dan kesultanan lain di Sumatera timur juga harus berhadapan dengan kekuatan Barat. Selain Belanda yang sudah lama berkedudukan di Malaka sejak masih berbentuk

kongsi dagang Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), juga ada Inggris yang berpangkalan di Pulau Penang dan menunjukkan minat untuk bermitra dengan kesultanan-kesultanan di wilayah pantai timur sumatera. Bagi Inggris, wilayah tersebut kaya barang dagangan yang laku di pasar internasional. Sementara itu perdagangan antara Inggris di Penang dan kesultanan-kesultanan di Sumatera timur memang telah berlangsung, meliputi lada, kapur barus, hasil hutan, tembakau, dan banyak hasil bumi lain (Husny, 1978: 102).

Pada tahun 1823 Inggris mengirim John Anderson berkunjung ke Sumatera. Kerajaan-kerajaan di Sumatera timur, termasuk Kerajaan Serdang, memang menjadi titik perhatian utama Anderson. Hasil kunjungan tersebut kemudian ditulis dalam bentuk buku yang terbit dengan judul *Mission to the East Coast of Sumatera in 1823* ([1826], 1971). Buku ini menjadi salah satu sumber penting terkait sejarah Sumatera timur pada tahun 1920-an M dan karenanya banyak dirujuk dalam bab ini.

Anderson tiba di Serdang pada tanggal 28 Januari 1823 dan melihat kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan Inggris di Penang. Saat masuk Kuala Serdang ia bertemu dengan sebuah kapal besar yang hendak berangkat ke Penang. Sesampai di kampung Klambir ia juga disambut kepala daerah bernama Tuanku Usman, yang pernah ia temui di Penang beberapa tahun lalu. Tidak lama setelah itu, ketika membuat surat persembahan untuk Sultan Serdang Sultan Thaf Sinar Basar Syah—saat itu tengah berada di perkebunan lada di wilayah hulu—ia kembali berpapasan dengan perahu-perahu besar bermuatan lada yang hendak berangkat ke Penang (Anderson, 1971: 156). Semua informasi menunjukkan bahwa Serdang telah menjalin hubungan ekonomi dengan Inggris di Semenanjung Malaka.

Aspek lain yang menarik perhatian Anderson adalah jenis barang dalam lalu-lintas perdagangan atau impor-ekspor. Tidak banyak berbeda dengan Deli, perdagangan di Serdang berkembang pesat. Karena Sungai Deli tertutup, kapal pengangkut lada melewati Sungai Serdang. Jumlah ekspor lada ke Penang dan Malaka mencapai sekitar 8.000 pikul pada tahun 1822 M, suatu jumlah yang besar. Wilayah pantai Kerajaan Serdang menjadi pusat kegiatan ekonomi, menjadi tempat berniaga orang Batak dari *nagari* Dolok dan orang Alas dari Singkel di pantai barat Sumatera dengan membawa kapur barus, emas, dan lain sebagainya. Sementara barang impor berupa kain buatan Eropa sangat diminati di Serdang. Permintaan terhadap berang tersebut, terutama kain-kain untuk tengkuluk, terus bertambah (Anderson, 1971: 156; Sinar, 2007: 170).

Profil sultan yang berkuasa, yang berada di balik perkembangan ekonomi Serdang, juga menjadi catatan Anderson. Terhadap lalu-lintas barang dalam perdagangan, sultan menarik pajak melalui syahbandar sebagai menteri bea cukai kerajaan. Pemungutan pajak

berlaku tidak hanya untuk barang-barang impor-ekspor, tetapi juga kapal dan perahu yang bersandar di pelabuhan kerajaan (Anderson, 1971: 156). Dengan demikian Serdang mendapat pemasukan yang banyak dari perdagangan ini, sehingga bisa berkembang menjadi kerajaan penting di pantai timur Sumatera. Anderson juga mencatat bahwa pemasukan dari pajak tersebut tidak seluruhnya untuk kerajaan kerajaan. Ada sebagian menjadi milik pribadi sultan dan karenanya digunakan untuk kepentingan sultan. Meski sulit dipastikan, Sultan Serdang dikatakan mendapat penghasilan sekitar 1.200 dollar setahun, lebih kecil dari Sultan Deli yang mencapai sekitar 4.000 dollar dan Sultan Langkat sekitar 3.000 dollar (Anderson, 1971: 156; Pelly, 1986: 32). Anderson juga mencatat bahwa Sultan Thaf Sinar Basar Syah sekaligus menjadi pedagang ulung dan memiliki perahu dagang sendiri yang mengangkut muatan ke Penang dan tempat-tempat lain. Kemungkinan jumlah pendapatan sultan tersebut di atas juga didukung kegiatan dagang di sela-sela tugas kerajaan. Catatan lain tentang sultan adalah bahwa ia seorang pendiam, sederhana, lembut, dan bijaksana serta seorang yang sangat gemar belajar, terutama terkait hal yang berhubungan dengan Eropa dan India (Anderson, 1971: 156).

Di atas itu semua hal yang sangat penting dari misi Anderson adalah bahwa ia berhasil meyakinkan Sultan Serdang dan sultan kerajaan-kerajaan di Sumatera timur, yang meliputi Deli, Langkat, dan Asahan, untuk menjalin hubungan perdagangan dengan Penang seraya membuat pernyataan tidak akan berniaga dengan Belanda. Hal itu bisa dilihat antara lain dalam surat Sultan Serdang Sultan Thaf Sinar Basar Syah kepada Gubernur Inggris di Pulau Penang, W.E. Philips, bertanggal 18 Jumadilawal 1238 H atau 1823 M. Dalam surat tersebut dikatakan bahwa Sultan, menyebut dirinya "Beta", menyambut dengan penuh gembira inisiatif persahabatan dan kerjasama perdagangan antara Inggris di Penang melalui agennya, John Anderson. Selanjutnya tertulis "Beta sangat berbesar hati meletakkan dasar persahabatan dengan paduka sahabat Beta, dan memandang perlu bertambahnya perdagangan antara negeri Beta dengan Pulau Penang, dan Beta tidak merasa perlu lagi untuk mengadakan perjanjian atau hubungan-hubungan lainnya dengan negeri-negeri lain" (Anderson, 1971b: 156; seperti dikutip Sinar, 2007: 179).

Demikianlah Serdang dan kerajaan-kerajaan lain di Sumatera timur menjadi mitra dagang Inggris di Penang. Kerjasama ekonomi ini terus berlanjut meski sudah ditandatangani Perjanjian London pada tahun 1824 M, yang salah satu isinya membagi wilayah jajahan Inggris dan Belanda di Nusantara. Inggris berkuasa di Semenanjung Malaya, sedang Belanda di Sumatera. Oleh karena disibukkan Perang Jawa (1825–1830 M) dan Perang Paderi di Sumatera Barat (1832–1838 M) pemerintah koloni Belanda tidak segera melakukan langkah untuk menguasai Sumatera timur. Kondisi inilah yang dimanfaatkan Inggris untuk tidak hanya melakukan kerjasama ekonomi, tetapi juga berusaha menahan penetrasi Belanda ke wilayah tersebut.

Sultan Thaf Sinar Basar Syah meninggal pada tahun 1851 M dan digantikan Sultan Basyaruddin Syaiful Alam Syah (1851–1881 M). Sultan baru ini berkuasa di tengah kondisi politik ketika Serdang dan Sumatera timur menjadi sasaran kebijakan pasifikasi Belanda di pulau Sumatera yang berujung pada penguasaan penuh Belanda atas kerajaan yang kaya hasil bumi tersebut.

3. Sultan Basyaruddin dan Kolonisasi Belanda

Perjanjian Siak tahun 1858 M menjadi kunci masuknya Belanda ke Sumatera timur. Dalam Perjanjian tersebut Siak mengaku berada di bawah pemerintah kolonial yang berpusat di Batavia. Di samping itu seluruh kerajaan taklukannya di Sumatera timur dengan sendirinya menjadi bagian Hinda Belanda. Atas dasar Perjanjian Siak tersebut Belanda melakukan sejumlah langkah untuk memperoleh pengakuan sebagai penguasa di wilayah yang kini menjadi Sumatera Utara. Setelah mengetahui keadaan sosial-politik di kerajaan-kerajaan Sumatera timur, yang diperoleh dari hasil misi pendahuluan oleh Raja Burhanudin asal keturunan Pagaruyung di Sumatera Barat, Belanda kemudian mengirim Elisa Netscher, Residen Belanda di Riau, untuk bertemu para raja dan membuat perjanjian dengan mereka yang berisi pengakuan atas kedaulatan Belanda.

Netscher mengawali misinya di Sumatera timur di Panai, Bilah, dan Kota Pinang pada tanggal 5 Agustus 1862. Dalam beberapa hari ia berhasil memaksa penguasa di wilayah tersebut menandatangani persetujuan di bawah kekuasaan Belanda. Kemudian ia ke Serdang dan tiba di Kuala Serdang pada tanggal 12 Agustus 1862. Keesokannya, dengan dijemput Asisten Residen, Sultan Serdang datang dengan menggunakan kapal Lancang berbendera Aceh bersama beberapa "orang besar"-nya, yang menunjukkan bahwa ia Wazir Sultan Aceh. Sultan Serdang Sultan Basyaruddin menemui Netscher dan mengadakan pembicaraan di atas kapal perang Reiner Claasen. Di bawah tekanan politik Belanda sultan bersedia menanda-tangani naskah perjanjian yang disiapkan Netscher pada tanggal 16 Agustus 1862, yang menyatakan Serdang berada di bawah kekuasaan Belanda. Sultan Serdang memanfaatkan peristiwa tersebut dengan memasukkan wilayah-wilayah yang masih berstatus sengketa dengan Deli ke dalam perjanjian sebagai daerah taklukan Serdang yang juga harus tunduk kepada Belanda. Daerah-daerah tersebut meliputi Percut, Denani, Perbaungan, Bedagai, dan Padang. Netscher menyetujui permintaan Sultan Basyaruddin (Erman, 2011: 57; Sinar, 2007: 187).

Atas perjanjian tersebut Sultan Serdang diakui dan disahkan Pemerintah Belanda sebagai raja di daerah Serdang dengan gelar sultan. Berikut ini bunyi surat perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 16 Agustus 1862, yang berisi Naskah Pengesahan dan Pernyataan, sebagaimana dikutip Husny (1978: 110–112).

Naskah Pernyataan:

"Oleh karena telah ternyata bagi Tuan Residen Riau dengan daerah takluknya, bahwa negeri Serdang beserta wilayah rantau takluknya, Percut, Denai, Perbaungan, Bedagai dan Padang, adalah sebagian dari kerajaan Siak Sri Indrapura beserta daerah takluknya, diperintah oleh seorang raja yang dibenarkan hukum dengan gelar Sultan Basyaruddin dan keadaan ini seharusnya disyahkan; dan karena pada hari ini Sultan telah membuat pernyataan dan telah diambil sumpahnya sesuai dengan naskah yang diberikannya setangan pada Tuan Residen tersebut di atas, sebagai wakil mutlak dari Gubernemen Hindia Belanda, pemerintah Agung atas Kerajaan Siak Sri Indrapura telah berkenan mengesahkan Sultan Basyaruddin sebagai raja negeri Serdang beserta wilayah rantau takluknya sebagaimana dengan ini dilaksanakan. Sebagai pembuktian maka naskah pengsahan ini diperbuat dan ditandatangani oleh Tuan Residen Riau dengan daerah takluknya pada hari ini tanggal 16 Agustus 1862.

Pernyataan:

Saya yang bertandatangan di bawah ini Sultan Basaruddin berikrar dengan sesungguhnya:

Pasal 1: Mengakui Sultan Siak Sri Indrapura sebagai Raja saya, di bawah kekuasaan Penguasa Agung atas Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Pasa 2: Menjaga ketenteraman dan perdamaian dalam negeri saya dan dengan neger-negeri yang berhampiran.

Pasal 3: Melindungi dan memajukan perdagangan dan pertanian.

Pasal 4: Dengan segala kuasa mencegah perdagangan budak-budak.

Pasal 5: Tidak akan memberikan tempat persembunyian kepada rakyat Gubernemen yang telah melakukan kejahatan.

Pasal 6: Tidak akan menerima surat-surat hadiah-hadiah atas penyiar-penyiar agama dari negara-negara asing ataupun dari raja-rajanya ataupun dari perwakilannya ataupun dari utusannya, tanpa sepengetahuan atau izin dari Tuan Residen Riau dengan daerah takluknya.

Pasal 7: Tidak membenarkan orang Eropa, tanpa sepengetahuan dan izin itu tinggal berdiam dalam negeri kerajaan saya.

> Demikianlah pernyataan ini saya perbuat atas sumpah,
> dan sebagai pembuktiannya naskah saya tandatangani
> hari ini tanggal 16 Agustus 1862.

Perjanjian Serdang-Belanda di atas memang cenderung bermasalah terkait pernyataan Sultan Serdang atas sejumah wilayah sebagai *rantau* taklukannya: Percut, Denai, Perbaungan, Bedagai, dan Padang; padahal saat perjanjian tersebut ditandatangani daerah-daerah itu masih berdiri otonom. Para raja yang berkuasa bukan saja menolak sebagai *rantau* taklukkan Serdang, tetapi juga merasa tidak dilibatkan sama sekali dalam proses perjanjian dengan pihak Belanda. Hal inilah yang kemudian melahirkan pertentangan dan pertikaian antara Serdang dan Deli, yang menyatakan sebagian daerah tersebut sebagai wilayahnya. Persoalan wilayah baru selesai pada tahun 1886 M ketika pemerintah Belanda menyatakan dalam kontrak yang diperbaharui, bahwa wilayah Serdang meliputi Serdang, Perbaungan, Senembah, Denai, Sena/Serbajadi, dan Dusun Batak Timur. Sementara wilayah yang ditentukan pada tahun 1907 M meliputi Deli, Hamparan Perak, Sunggal, Sukapiring, Senembah, Percut, Deli (Petumbak), dan Sungai Tan (Husny, 1978: 114).

Perjanjian yang dibuat Belanda dengan kerajaan-kerajaan di Sumatera timur belum sepenuhnya efektif. Sejumlah kerajaan, khususnya Serdang dan Asahan, masih menjalin hubungan dengan Aceh dan Inggris di Penang. Hal ini berkait dengan kenyataan bahwa tidak lama setelah kunjungan Netscher ke Sumatera timur Aceh di bawah Sultan Ibrahim Mansur Syah (1857–1870 M) pada tahun 1863 M bereaksi dengan mengirim pasukan ke Sumatera timur. Pasukan Aceh di bawah pimpinan Tuanku Hasyim Banta Muda diberi tugas membebaskan daerah-daerah Teumiyang, Langkat, Deli, dan Serdang dari gangguan Belanda dan juga pihak-pihak yang membantu Belanda. Sultan Ibrahim kemudian mengirim pasukan tambahaan di bawah pimpinan Ulubalang Meureudu Teuku Muda Tjoet Latif untuk membantu tugas Tuanku Hasyim (Sufi, 2012 [4]: 555). Meski gagal berlabuh di Langkat dan Deli, pasukan Aceh mendapat sambutan meriah di Serdang dan Asahan. Kehadiran pasukan Aceh membuat beberapa kerajaan di Sumatera timur menyatakan sikap tetap setia kepada Aceh, bahkan perjanjian sekutu Aceh-Tamiang-Serdang-Batubara-Asahan terbentuk untuk membendung agresi Belanda (Sinar, 2007: 190).

Sementara itu, masih pada tahun 1863 M, Sultan Asahan menemui Gubernur Inggris di Singapura untuk berunding dengan Sultan Aceh seraya mengharapkan bantuan Aceh dan Inggris di Sumatera timur dari kolonisasi Belanda (Husny, 1978: 118). Sultan Asahan juga menolak surat yang disampaikan utusan Netscher yang meminta dirinya, dan juga Sultan Serdang, menjelaskan keberadaan armada Aceh di pelabuhan Asahan dan Serdang. Sultan Serdang bahkan mengusir utusan Netscher yang mempertanyakan sikap Serdang atas kasus "perampokan" yang dilakukan seorang warga Serdang asal Bugis. Meski sultan sudah menjawab tidak bisa berbuat apa-

apa, Belanda tetap meminta penjelasan Sultan Serdang sehingga kemudian menjadi persoalan serius karena pemerintah Inggris di London mengirim nota protes kepada pemerintah Belanda di Den Haag pada tanggal 30 Maret 1863 atas pelanggaran Belanda terhadap kedaulatan Serdang (Sinar, 2007: 195). Suasana ini, selain persoalan yang terkait dengan Aceh, membuat Belanda melancarkan serangan militer penuh di Sumatera timur.

Demikianlah di bawah operasi "Expeditie tegen Serdang en Asahan" pada awal September 1865 Belanda mengerahkan pasukan dalam jumlah besar berikut peralatan milier lengkap untuk menundukkan raja-raja Melayu di Sumatera timur yang tidak mengakui Belanda sebagai tuan dan pelindung. Sesuai dengan nama operasi, Kerajaan Serdang dan Kerajaan Asahan menjadi sasaran utama, karena cenderung melahirkan gerakan yang sama di Sumatera timur. Kasus Deli menjadi pertimbangan Belanda. Raja Zainal Abidin, paman Sultan Deli, menentang sikap sultan yang lebih memihak Belanda, sehingga ia bergabung dalam gerakan perlawanan Serdang (Sinar, 2007: 196). Setelah berhasil menundukkan Batubara dan Asahan, pasukan Belanda memburu Sultan Basyaruddin yang membangun kekuatan militer untuk menentang Belanda di Serdang.

Tiba pada tanggal 1 Oktober 1865 pasukan Belanda menyerang Serdang. Sultan Basyaruddin bertahan di markasnya di Masjid Raya Rantau Panjang. Sedianya ia melawan pasukan Belanda, namun melihat jumlah pasukan yang besar dengan peralatan militer modern akhirnya ia memutuskan menghindari perang dengan mengungsi ke pedalaman. Pasukan Belanda berhasil mengejar rombongan sultan bersama Tengku Pangeran Raja Muda dan Tengku Musa, dan pada tanggal 3 Oktober 1865 menghentikan perlawanan mereka. Rombongan sultan, termasuk Datuk Laksemana Putra Jaya selaku Wakil Sultan Serdang di Batubara, ditangkap (Sinar, 2007: 199). Sejak itu perlawanan Serdang terhadap Belanda berakhir dan Sultan Basyaruddin berdamai dengan meminta maaf kepada Belanda atas perbuatannya. Dengan demikian Serdang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda.

4. Berdamai dengan Belanda

Tahun 1865 M menjadi peristiwa bersejarah bagi Kesultanan Serdang. Tahun tersebut tidak hanya menandai perubahan sikap Sultan Basyaruddin terhadap Belanda, tetapi sekaligus menjadi awal berlakunya kebijakan politik Serdang yang berdamai dengan politik kolonial Belanda yang dilaksanakan oleh penguasa Serdang berikutnya, Tuanku Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah (1881–1946 M). Ia lahir pada tahun 1866 dan didaulat menjadi Sultan Serdang pada tahun 1881 M saat masih berusia 15 tahun dan tidak lama setelah ayahnya, Sultan Basyaruddin meninggal dunia pada tanggal 21 Pebruari 1881. Karena masih di bawah umur, maka Orang Besar Serdang mengangkat pamannya, T. Mustafa (raja muda), sebagai Wali Sultan. Sejak saat itu Sultan Sulaiman di

bawah bimbingan Raja Muda T. Mustafa sebagai Sultan Serdang, meskipun pemerintah Belanda baru mengakui secara resmi enam tahun kemudian, tanggal 29 Januari 1887 (Sinar, 2007: 364–365).

Keterlambatan Belanda memberi pengakuan resmi tentu bukan tanpa alasan. Belanda melakukan sejumlah kebijakan yang membatasi wewenang sultan dan sekaligus mulai campur tangan masalah internal kesultanan. Sebagai contoh, pada tahun 1822 M Belanda memaksa agar sebagian wilayah Senembah diserahkan ke Deli Patumbak bersama dengan daerah Sungai Tuan. Sebagai imbalannya, Belanda menyerahkan kembali Denai ke Serdang (Sinar, 2007: 215). Pada tahun 1889, misalnya, Belanda menangkap kurir Sultan Aceh, Teuku Muda Mohd. Said, yang dikirim untuk membangkitkan semangat perlawanan menentang kekuasaan Belanda (Sinar, 2007: 365).

Ketika itu Serdang memiliki sumber kekuatan baru yang membuatnya mampu berkembang menjadi salah satu kesultanan terdepan di Sumatera timur bersama Deli, Langkat, dan Asahan. Reid (2011: 64) bahkan menyebut Serdang termasuk kesultanan yang kaya, di samping Deli dan Langkat, pada masa kolonial Belanda. Kekayaan itu berkaitan dengan penyewaan tanah untuk perkebunan yang sejak tahun 1870 berkembang sedemikian intensif di Sumatera timur. Didukung kebijakan Sistem Ekonomi Libral, pemerintah kolonial mendorong para pengusaha Eropa menanamkan modalnya dalam industri perkebunan di Sumatera timur dan Hindia Belanda pada umumnya.

Perkebunan yang berkembang di Serdang kopi, terutama jenis kopi Liberia. Pada tahun 1880 M, ketika industri tembakau di Deli masih belum pasti, hasil bumi lain banyak dicari, salah satunya kopi. Oleh karena itu ada beberapa perusahaan yang membuka perkebunan kopi, di samping tembakau, di Serdang. Di Sumatera timur, tembakau dan kopi terkait satu sama lain. Penanaman kopi dalam skala besar dilakukan di tanah-tanah yang semula ditanami tembakau tetapi tidak berhasil baik. Perkebunan Tanah Abang di Serdang merupakan salah satu contoh. Tanah seluas 4.000 bahu itu pada tahun 1885 M menjadi hak guna perusahaan asal Inggris, J.P. Tolson and A.D. Smith, dan kemudian pada tahun 1888 M dialihkan ke Anglo Dutch Tobbaco Coy yang berpusat di London dan ditanami tembakau. Tanaman tersebut ternyata gagal dan perusahaan menderita kerugian besar. Pada tahun 1891 M Tanah Abang dikembalikan ke sultan dan dibiarkan beberapa lama terlantar. Baru pada tahun 1893 M orang Italia bernama A. de Geovanni memanfaatkan tanah tersebut menjadi perkebunan kopi. Ia menanam kopi di sebagian Tanah Abang sampai tahun 1895 M, yang kemudian dialihkan ke perusahaan H.J.W. Westenberg (Sinar, 2007: 316).

Sejak saat itu kopi menjadi industri perkebunan utama di Serdang. Harga kopi yang tinggi di pasar Asia dan pasar internasional

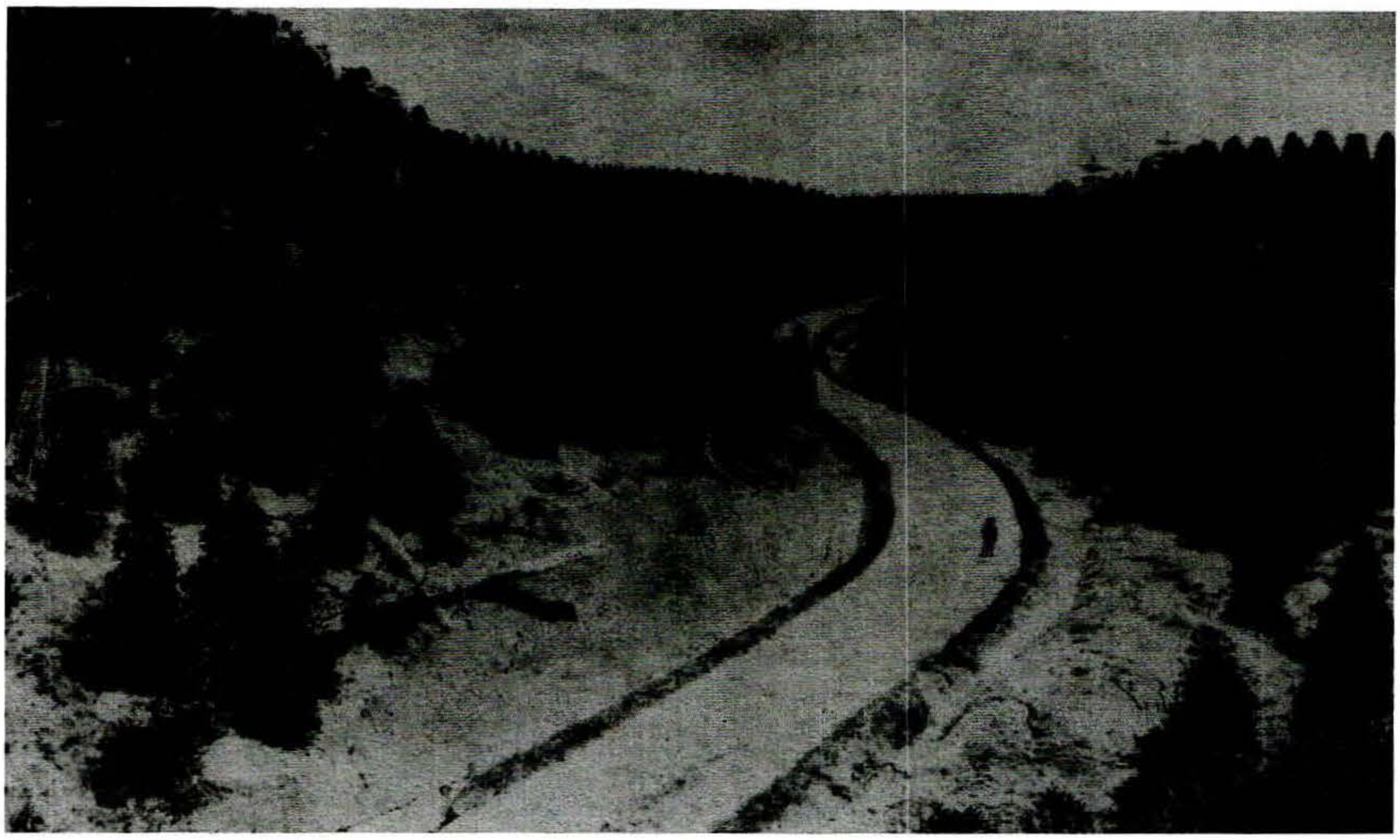

Jalan utama di Serdang menuju kebun kopi
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

membuat banyak perusahaan menanamkan modal untuk perkebunan kopi. Pada tahun 1897 M di Serdang terdapat tujuh perkebunan kopi yang tesebar di sejumlah daerah dan meluas hingga ke Batubara dan Padang Bedagai. Pengusaha yang menanamkam modalnya tidak hanya dari Belanda, tetapi juga dari negara Eropa lain, yakni Perancis, Swiss, Jerman, dan Inggris. Setahun kemudian, yakni tahun 1898 M, jumlah perkebunan kopi di Serdang meningkat tajam menjadi 26, ditambah enam di Asahan, empat di Langkat, empat di Batubara, dan dua di Padang Bedagai (Sinar, 2007: 317). Dengan demikian Serdang membuat Sumatera timur semakin ramai dikunjungi para pengusaha dari berbagai negara di dunia yang menanamkan modal untuk perkebunan kopi. Kopi Serdang menjadi hasil bumi utama Sumatera timur, di samping tembakau, yang dijual di pasar internasional. Seperti halnya tembakau Deli, kopi Liberia Serdang juga dikenal memiliki mutu sangat tinggi.

Kehadiran perkebunan kopi mendorong lahirnya praktik penyewaan tanah secara besar-besaran oleh perusahaan-perusahaan asing. Mereka menggunakan tanah yang luas dan subur, sehingga dapat menghasilkan komoditi bermutu baik sehingga laku di pasar internasional. Dalam hal sewa tanah inilah Sultan Serdang, dan kerajaan lain di Sumatera timur, memiliki peran dan kedudukan strategis. Sistem politik kerajaan menentukan sultan merupakan penguasa sekaligus pemilik tanah di wilayahnya dengan segala keistimewaan yang dimiliki. Termasuk dalam hal ini pemberian sewa atau konsesi tanah ke pihak perusahaan. Pada masa kolonial hubungan sultan dengan pengusaha perkebunan menjadi unsur penting dalam dinamika kesultanan. Meski sultan tunduk di bawah Belanda sesuai perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1862, tetapi sultan dijamin dapat menjalankan kekuasaan hukum

berdasarkan aristokrasi Melayu atas berbagai bidang, yang salah satunya berkait dengan tanah. Oleh karena itu pernyataan sultan tentang penguasaan atas tanah memiliki legitimasi kultural. Klaim itu pula yang menjadi pegangan pengusaha perkebunan ketika akan membuka lahan untuk perusahaan mereka. Mereka mendekati sultan dan elit kesultanan agar dapat memperoleh izin menggunakan tanah untuk lahan perkebunan.

Hubungan sultan dengan pengusaha kemudian berkembang menjadi praktik pemberian upeti atau yang dikenal dengan istilah "persen tanah" oleh pengusaha kepada sultan. Hal itu dilakukan pengusaha agar memperoleh harga sewa sangat murah dengan kualitas tanah yang subur, sementara bagi sultan praktik ini jelas menjadi sumber keuangan bagi kesultanan dan akhirnya sebagian untuk kepentingan pribadi sultan. Dana "persen tanah" sangat besar untuk konteks Sumatera timur pada akhir abad ke-19 M, meski tetap lebih murah dari dana yang harus dikeluarkan untuk pajak (Reid, 2011: 64). Praktik pemberian "persen tanah" tetap berlangsung di tengah upaya pemerintah kolonial menaikkan harga sewa tanah dan mengurangi dana yang masuk ke kantong pribadi sultan. Baik pengusaha pekebunan maupun sultan merasa sangat diuntungkan dengan praktik tersebut. Pada tahun 1915 M, misalnya, 51,9 % uang kesultanan masuk ke kantong sultan dan elit sukunya dalam bentuk gaji resmi dan bagian besar royalti yang menjadi hak mereka. Jumlah persentase ini yang terbesar dibanding Deli yang mencapai 39,2 persen dan Langkat 37,9 persen. Dengan persentase pembagian dana ini, Sultan Sulaiman pada tahun 1931 M memiliki pendapatan pribadi sebesar f103.346 setahun, meski lebih kecil dari Deli yang berjumlah f184.568 dan Langkat dengan angka penghasilan tertinggi sebesar f472.094 (Reid, 2011: 65–66).

Dengan jumlah kekayaan di atas, Sultan Sulaiman pada tahun 1894 M membangun keraton dan istana di Perbaungan, yakni Keraton Kota Galuh dan Mesjid Raya. Beberapa tahun kemudian, yakni tahun 1896 M, Sultan membangun istana baru di Kota Galuh, yang jauh lebih mewah dari istana lama. Selain itu Sultan juga mendirikan kedai, pasar, dan pertokoan tidak jauh dari bangunan pusat kerajaan. Dengan demikian kompleks keraton berdekatan dengan prasarana umum, baik ekonomi maupun keagamaan, sehingga menjadi kota kecil yang mandiri di Simpang Tiga Perbaungan. Di samping itu di bagian depan keraton terdapat gedung khusus untuk anggota dewan kerajaan. Sebagai catatan, keraton baru tampaknya dibangun Sultan Sulaiman sebagai tandingan dari ibukota Kerajaan Serdang yang dibangun Belanda di Lubuk Pakam (Sinar, 2007: 365, 376–377). Apa yang dilakukan Sultan Sulaiman memang umum dilakukan sultan di kerajaan lain di Sumatera timur, tertutama Deli dan Langkat. Dengan dana melimpah dari pengusaha perkebunan mereka membangun istana megah dengan fasilitas yang sangat lengkap. Khusus untuk kasus Serdang, pembangunan istana baru juga memiliki makna politik sebagai wujud kemandirian dan juga rasa tidak begitu bersahabat dengan pemerintah kolonial.

Selain itu Sultan Sulaiman juga membangun sejumlah prasarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1903 ia membangun saluran irigasi seperti sistem subak di Bali, lengkap dengan administrasi dan polisinya, yang sangat bermanfat bagi pertanian padi di Serdang. Saluran irigasi yang dinamakan Bendang ini merupakan kelanjutan proyek sebelumnya pada tahun 1892 ketika Sultan Sulaiman membuka persawahan di Rantau Panjang. Dampak proyek ini berupa hasil padi melimpah di Serdang, sehingga kerajaan ini dikenal sebagai lumbung padi. Sultan Sulaiman juga membuat Serdang Kanal dengan meluruskan aliran Sungai Serdang untuk mengeringkan air bah dan rawa-rawa. Serdang Kanal selesai dan diresmikan pada tanggal 8 Juni 1936 (Sinar, 2007: 377, 380).

Sultan Sulaiman membuat langkah strategis di bidang sosial untuk mempererat hubungan masyarakat, khususnya antara kaum pendatang dan masyarakat setempat. Atas permintaan dan kerjasama dengan dr. Sutomo, tokoh Budi Utomo dan dokter Kerajaan Serdang, Sultan Sulaiman menampung buruh perkebunan asal Jawa yang habis masa kontraknya atau lari dari perkebunan. Pada tahun 1919 sultan menyediakan tanah kosong, sekitar 100 hektar, di daerah yang kini merupakan bagian Kecamatan Galang, sebagai tempat tinggal dan lahan pertanian mereka. Dengan demikian mereka menjadi rakyat Sultan Serdang, bahkan sebagian di anatara mereka diangkat menjadi penghulu kerajaan. Begitu juga sultan memberi tanah garapan untuk kaum pendatang dari daerah lain, seperti Sumatera Barat, Tapanuli Selatan, dan Kalimantan. Mereka diberi status dan hak yang sama dengan penduduk asli Melayu, sehingga mereka hidup sebagai warga Serdang (Sinar, 2007: 380).

Sultan Sulaiman, seperti halnya Sultan Makmun al-Rasyid dari Deli dan Sultan Mahmud dari Langkat, berjasa besar dalam perkembangan kerajaan dan pada gilirannya pembangunan di wilayah Sumatera timur. Dengan dana melimpah dari ekonomi perkebunan, khususnya tembakau dan kopi serta (di Langkat) minyak—termasuk juga dana dari "persen tanah"—para sultan ini membangun kerajaan dan masyarakatnya di tengah arus perubahan dan modernisasi pada awal abad ke-20 M. Aspek penting lain yang menjadi perhatian sultan adalah pembangunan di bidang agama. Ia mendirikan lembaga khusus di istana untuk urusan Islam, yakni Majlis Syar'i Kerajaan.

5. Majlis Syar'i Kerajaan

Majlis Syar'i termasuk karya besar Sultan Sulaiman. Majlis ini didirikan berangkat dari pandangan tentang tiga fungsi sultan di Kerajaan Serdang, yakni (1) kepala adat, (2) kepala pemerintahan, dan (3) *ulil amri* (penguasa agama). Dalam kedudukannya sebagai *ulil amri* sultan mengangkat para kadi yang bertugas untuk melaksanakan syari'at Islam di dalam masyarakat. Begitu juga sultan mengangkat para imam dan *nazir-nazir* mesjid kerajaan dengan kedudukan lebih rendah dari kadi.

Pada tahun 1932 M, kedudukan pejabat-pejabat agama di Serdang dilembagakan ke dalam "Majelis Syar'i". Majelis ini dibentuk di tingkat pusat kerajaan dengan tugas utama melaksanakan peran sultan sebagai *ulil amri*. Oleh karena itu sejak berdirinya Majelis Syar'i kewajiban sultan di bidang yang terkait agama sepenuhnya diserahkan kepada majelis, walaupun gelar *ulil amri* masih tetap digunakan sultan. Sebagai *ulil amri*, maka seluruh anggota majlis ini—seperti halnya ketika masih dipegang raja—disumpah untuk memerintah berdasarkan Al-Quran dan hadist.

Majelis Syar'i dipimpin oleh seorang ketua, bergelar syaikhul Islam, dengan kedudukan dan fungsi lebih luas daripada *mufti* atau *imam paduka tuan*. *Imam paduka tuan* merupakan jabatan dengan kedudukan pribadi sebagai penasihat sultan dalam masalah agama, tetapi tidak dilembagakan. Majelis Syar'i sebagai badan resmi kerajaan mempunyai garis perintah ke bawah, ke kampong/desa-desa. Fungsi majelis meliputi tugas-tugas (1) mengkoordinir dakwah Islamiyah, (2) menetapkan hari puasa (Ramadhan), Idulfitri, dan jadwal puasa/imsyakiah, (3) mengatur pengumpulan dan pembagian zakat/fitrah, (4) mengurus masalah nikah/rujuk, termasuk mengangkat atau memberhentikan para kadi kerajaan, (5) bertanggungjawab terhadap masjid-mesjid kerajaan, termasuk menetapkan dan jika perlu memberhentikan *nazir* dan imam-imam masjid, (6) mengatur perayaan-perayaan agama dan kerajaan, (7) mengkoordinir pendidikan dan pengajaran agama, termasuk menguji guru-guru, mengeluarkan beslit pengangkatan dan pemberhentiannya, dan (8) membawahi Mahkamah Syariah (Pelly, 1986: 48–49).

Melihat peran dan fungsi Majlis Syar'i jelas dalam struktur pemerintahan Kerajaan Serdang memiliki lembaga yang menangani masalah agama secara rinci dan tertata di bawah sultan. Hal ini berbeda ketika pengurusan masalah keagamaan berada di tangan *mufti* atau *imam paduka tuan*. Kedudukan *mufti* atau imam dalam struktur pemerintahan kesultanan setingkat dengan kedudukan para tumenggung dan setingkat lebih rendah dari *wazir* atau datuk (menteri) di Deli dan Langkat. Dengan dibentuknya Majelis Syar'i kedudukan Ketua Majelus Syar'i menjadi setingkat dengan *wazir* (menteri) dan dengan demikian kedudukannya lebih tinggi dari *mufti* atau *imam paduka tuan*. Hal ini berarti kedudukan Ketua Majelis Syar'i berada langsung di bawah sultan sebagai "kawan raja bermusyawarah" (Pelly, 1986: 49).

Kerajaan Serdang dengan Majlis Syar'i ini memiliki perhatian yang besar dalam masalah keislaman, lebih dari kerajaan-kerajaan lain di Sumatera timur. Dengan bentuk kelembagaan, bukan bersifat pribadi seperti *mufti*, maka urusan keagamaan menjadi bagian dari struktur resmi kerajaan; urusan keislaman menjadi bagian dari birokrasi kerajaan. Lembaga ini dipegang oleh para ulama sehingga memiliki akses dan fasilitas strategis untuk ikut terlibat dalam masalah sosial-keagamaan. Dengan demikian kontrol kerajaan

atas praktik keagamaan menjadi sangat intensif. Selain memiliki hubungan dengan lembaga keagamaan lebih rendah sampai tingkat desa atau kampong, keberadaan Majlis Syar'i mengindikasikan bahwa Sultan Serdang memiliki hubungan dekat dengan ulama.

Majelis Syar'i pertama kali dipimpin Tengku Fachruddin (1927–1937 M). Ia seorang ulama terkemuka di Serdang dan di Sumatera timur pada umumnya. Ia mendapat pendidikan agama di Langkat (Madrasah Mahmudiyah) di bawah bimbingan H. Muhammad Nur (berasal dari Minangkabau). Setelah Tengku Fachruddin meninggal, sultan akan mengangkat Haji Abdul Majid Abdullah (seorang tokoh Permi yang mempunyai pendidikan agama di Minangkabau) sebagai Ketua Majelis Syar'i, tetapi rencana itu ditentang pemerintah kolonial Belanda. Sultan terpaksa membatalkannya dan untuk sementara waktu kedudukan Ketua Majelis Syar'i dijabat langsung oleh sultan. Baru pada tahun 1939 M sultan meletakkan jabatan serta mengangkat Tengku H. Yafizham yang baru pulang dari Kairo sebagai Ketua Majelis Syar'i (Pelly, 1986: 49–50; Jafizham, 1975:84).

Hubungan dekat Kerajaan Serdang dengan kaum ulama bisa dilihat dari keterlibatan sultan dalam dinamika keislaman menyusul perdebatan kaum muda, yang disuarakan Muhammadiyah, dan kaum tua yang diwakili para ulama di Sumatera timur. Sebagai tanggapan atas perbedaan pandangan kaum muda dengan kaum tua, sejumlah pertemuan diselenggarkan di kalangan kaum tua, salah satunya diadakan atas naungan dan inisiatif Sultan Serdang, pada tangga 5 dan 12 Februari 1928, bertempat di Istana Sri Paduka Tuanku Sultan Kerajaan Serdang. Hadir dalam pertemuan tersebut ulama-ulama Serdang, antara lain Syekh H. Zainudin (*mufti* Serdang) dan Teungku Fachruddin (Ketua Majlis Syar'i), serta ulama-ulama Deli, semisal Syekh H. Hasan Maksum (*imam paduka tuan*), Muhammad Syarif (*kadi* Labuhan), Syekh M. Junus (pemimpin maktab Islamiyah Tapanuli), dan Tuan Muhammad Syafi'i (kadi Tebing Tinggi). Sementara ulama Langkat diwakili Teungku Zainuddin (*mufti* Langkat), Syekh Abdullah Afifuddin (pemimpin Madrasah Mahmudiyah), dan Syekh Abdurrahim (pemimpin Madrasah Mahmudiyah) (Pelly, 1986: 60–61).

Pertemuan kaum ulama tersebut merupakan bagian dari serangkaian pertemuan yang sengaja diadakan untuk menghimpun jaringan ulama sehingga menjadi mekanisme efektif untuk menggalang kekuatan untuk menanggapi kaum muda dalam bentuk organisasi modern. Dari pertemuan-pertemuan inilah kemudian pada tanggal 30 November 1930 terbentuk wadah ulama kaum tua, bernama Al-Wasliyah, yang berkembang menjadi organisasi Islam terkemuka di Sumatera timur. Dalam konteks ini, Kerajaan Serdang dan kerajaan-kerajaan lain di Sumatera timur terlibat aktif sebagai bagian dari gerakann kaum ulama di wilayah tersebut.

6. Berakhirnya Kesultanan

Salah satu peristiwa penting dalam sejarah kerajaan di Sumatera timur adalah rapat raksasa pada tanggal 6 Oktober 1945 di Esplanade Medan—kini Lapangan Medeka—yang dihadiri elit politik Sumatera timur. Dalam acara tersebut, yang kebetulan bersamaan dengan upacara adat peresmian Sultan Usman sebagai Raja Deli, Gubernur Hasan membuat pengumuman tentang kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamirkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Sultan Serdang segera mengambil sikap mendukung Negara Republik Indonesia. Sikap ini berbeda dengan sikap sultan-sultan lain yang masih menunggu perkembangan dan memperlihatkan kecendrungan berpihak pada Belanda yang hadir kembali di Indonesia melalui barisan tentara sekutu.

Tidak lama setelah itu Sultan Serdang mengirim telegram ke Jakarta melalui T.M. Hasan berbunyi, "Harap sampaikan kepada Presiden N.R.I. bahwa kerajaan Serdang dengan seluruh daerah taklukkannya hanyalah mengakui kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia dan dengan segala kekuatan akan mendukung Republik". Sultan Serdang juga menaikkan bendera Merah Putih di istana dan di kantor-kantor kerajaan serta menganjurkan penduduk melakukan hal yang sama. Hal itu digagas Putra Mahkota Teungku Rajih Anwar, putra tertua Sultan Sulaiman, setelah melangsungkan pembicaraan dengan orang-orang besar terkait dinamika politik setelah proklamasi dan sikap Kerajaan Serdang menghadapi perkembangan tersebut. Saat itu Sultan Sulaiman sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga Putra Mahkota Rajih dipercaya memegang kontrol pemerintahan, termasuk menghadiri pertemuan-pertemuan dengan elit politik Sumatera timur (Sinar, 2007: 478–479; 505–506).

Sikap Serdang yang segera mendukung Republik bisa dijelaskan dan tidak terlalu mengagetkan. Serdang, dalam sejarahnya, berusaha memertahankan kemandirian dan tidak sepenuhnya tunduk pada Belanda seperti dilakukan Sultan Deli dan Sultan Langkat. Semangat perlawanan terhadap kolonial yang ditanamkan oleh Sultan Basyaruddin hidup dalam pemikiran dan sikap raja-raja Serdang berikutnya. Oleh karena itu ketika mendengar kemerdekaan Indonesia Kesultanan Serdang sama sekali tidak melihat Belanda sebagai pertimbangan bagi masa depan kerajaan. Dalam hal ini sikap Sultan Serdang dalam banyak hal sama dengan Sultan Syarif Kasim di Siak Sri Indrapura (1915–1949 M), yang digambarkan berperan sebagai "Sultan Republik". Ia tidak hanya menyampaikan pernyataan pro-Republik di depan umum, seperti pada pertemuan di Medan pada bulan November 1945, tetapi juga ikut memberi sumbangan dana sebesar Rp 20.000,00 bagi pergerakan (Reid, 2011: 305). Ia pun bersikap tegas anti-Belanda. Di harian *Soeloeh Merdeka*, sebagaimana dikutip Reid (2011: 306), ia berujar, "Dasar kedaulatan rakyat ... sebenarnya menambah kebesaran daerah-daerah kesultanan dan bukan memperkecilnya

sebagai dugaan beberapa golongan. Dalam zaman penjajahan Belanda dan pembelengguan Jepang, kedudukan sultan-sultan dan raja-raja tidak lebih dari seorang 'nyai' di dalam suatu rumah tangga, bukan sebagai nyonya rumah".

Dengan demikian sikap Kerajaan Serdang berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain di Sumatera timur—khususnya Deli, Langkat, dan Asahan—yang tidak segera menyatakan bergabung dengan Indonesia yang sudah merdeka, sebaliknya mereka sangat menyambut kedatangan kembali tentara Sekutu (Inggris) dan Belanda (NICA). Seraya bersikap ragu-ragu untuk bergabung dengan Republik Indonesia, para sultan kerajaan-kerajaan tersebut masih berharap bahwa sistem politik yang mendukung keberadaan kerajaan tetap berlaku di bawah perlindungan Belanda (Erman, 2011: 66–68).

Sikap politik Sultan Serdang ternyata tidak dapat sepenuhnya membebaskan kerajaan tersebut dari citra sebagai perwujudan kekuasaan tradisional yang tidak hanya sangat akrab dengan Belanda, tetapi juga anti-Republik Indonesia. Ia dikaitkan dengan pola kehidupan feodal. Oleh karena itu sikap politik para sultan—termasuk Sultan Serdang—terlepas dari perbedaan satu sama lain membuat mereka harus berhadapan dengan arus massa yang sangat kuat anti-penjajahan, anti-feodal, dan menghendaki mereka pergi dari bumi Sumatera timur. Harian *Berjoeang*, yang berhaluan kiri menulis, "Kita tidak mau kembali ke zaman feodal. Kita tidak mau tahu tentang pemerintahan seri baginda itu. Yang kita mau adalah kedaulatan hanya berada di tangan rakyat" (Reid, 2011: 306).

Dalam konteks Sumatera timur, dengan potensi pertentangan sosial sangat kuat karena kehadiran kelompok kiri berhaluan keras dan diperkuat jumlah buruh yang besar dalam industri perkebunan, keberadaan kekuatan poltik tradisional kerajaan menjadi sasaran gerakan massa berhaluan kiri. Sikap politik para sultan dan bangsawan, lagi-lagi terlepas dari perbedaan di antara satu kerajaan dan kerajaan lain, dianggap sebagai pengkhianatan terhadap revolusi, sebagaimana disuarakan oleh sayap kiri dari barisan gerakan massa, yang berkembang menjadi wacana umum di Sumatera timur. Akibatnya, pernyataan terbuka yang dibuat para sultan pada tanggal 2 Januari 1967, bahwa mereka tidak anti-Republik, dianggap muslihat belaka. Masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai sultan seraya mencetuskan "revolusi sosial" di Sumatera timur (Erman, 2011: 68–69; Said, 1977: 156).

Demikianlah gerakan massa dengan terma revolusi sosial berlangsung di Sumatera timur pada tahun 1946. Namun gerakan itu bukan sekedar melakukan penghapusan wilayah otonom sebagai tujuan utama gerakan sebagaimana dimaksudkan elit politik yang mencetuskannya, tentu atas desakan kelompok berhaluan kiri.

Yang terjadi justru pembunuhan dan perampasan harta milik kesultanan. Istana Serdang dijarah dan seluruh penghuninya diusir dan digiring ke stasiun untuk dibawa ke Siantar, kecuali Sultan Sulaiman yang sudah uzur dan sakit-sakitan. Tengku Suri Darwisyah bersama istrinya dan Encik Zarah serta seorang pembantu diperkenankan tinggal di istana permaisuri. Pada tanggal 30 Oktober 1946 Sultan Sulaiman meninggal dunia. Sejak saat itu Serdang sebagai sebuah kesultanan berikut kekuasaannya yang berdiri pada tahun 1723 M berakhir.

(Endnotes)

1 Tidak lama berselang, pada pertengahan Desember 1945, Sultan Osman harus dirawat di rumah sakit selama seminggu, "bukan karena sakit, tetapi supaya bebas sejenak dari merah-putih yang membuat hidupnya tidak tertahankan". Dalam keadaan demikian, para datuk Kesultanan Deli menggunakan ketidakhadiran sultan sebagai kesempatan menyatakan dukungan secara resmi terhadap Republik Indonesia (Reid, 2011: 242).

2 Perebutan takhta Kerajaan Deli sejak awal tidak melibatkan putra pertama Panglima Paderap, Tuanku Jalaluddin Gelar Kejuruan Metar, karena cacat mata sehingga dianggap tidak layak dipertimbanngkan sebagai raja (Erman, 2011: 54).

— 15 —

Kesultanan Langkat

Selain Deli dan Serdang, kesultanan berikutnya yang mewarnai dinamika sosial-politik dan budaya di Sumatera timur adalah Langkat. Dengan sejumlah perbedaan di sejumah aspek, Kesultanan Langkat kerapkali dilihat sebagai satu kesultanan yang memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang (Pelly, 1986). Di samping hubungan keluarga dan sistem budaya politik—sama-sama menyerap budaya Melayu dalam sistem pemerintahannya—ketiga kesultanan itu mengalami perjalanan sejarah yang relatif sama. Selain harus behadapan dengan dua kekuatan besar di Pulau Sumatera abad ke-17 dan abad ke-18 M, yakni Aceh dan Siak, ketiganya sejak abad ke-19 M sama-sama berada di bawah kolonialisme. Meskipun demikian, karena didukung tanah yang subur untuk pertanian, Deli-Serdang-Langkat pada masa kolonial berkembang secara ekonomi, yang oleh Reid (2011: 64–70) disebut sebagai "kesultanan kaya".

1. Awal Berdiri

Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang bertalian erat dengan nama tokoh Gotjah Pahlawan,[1] tetapi tidak demikian halnya dengan Kesultanan Langkat. Sekalipun sering dianggap "setali tiga uang", namun bagaimanapun ketiganya merupakan kesultanan yang berbeda, baik secara politis maupun secara geografis. Menurut catatan yang disimpan oleh Kesultanan Langkat, para pendiri kesultanan ini lebih senang bila dikaitkan dengan sosok Dewa Syahdan (1500–1580 M) sebagai leluhur, yang datang dari arah pantai yang berbatasan dengan Kerajaan Aceh. Catatan ini secara geografis tampak masuk akal. Anggapan itu semakin kuat ketika ada penjelasan bahwa Dewa Syahdan sempat menetap di daerah Langkat cukup lama; bahkan ia dianggap sebagai pendiri Kerajaan Haru Delitua yang letaknya tidak jauh dari Kesultanan Langkat di kemudian hari.

Konon setelah Dewa Syahdan memiliki keturunan dan beranak-pinak, masyarakat yang dibangunnya tumbuh semakin besar dan tumbuh menjadi Kerajaan Haru Delitua._Sekitar tahun 1568 M seorang pemimpin perang dari kerajaan ini pergi ke daerah yang belakangan disebut sebagai Langkat dan mendirikan kerajaan di sana, sehingga tahun 1568 M tersebut dianggap sebagai tonggak awal sebelum kelahiran Kesultanan Langkat.

Secara geografis wilayah yang kelak disebut sebagai Kesultanan Langkat cukup rumit dijelaskan karena sering tertukar dengan

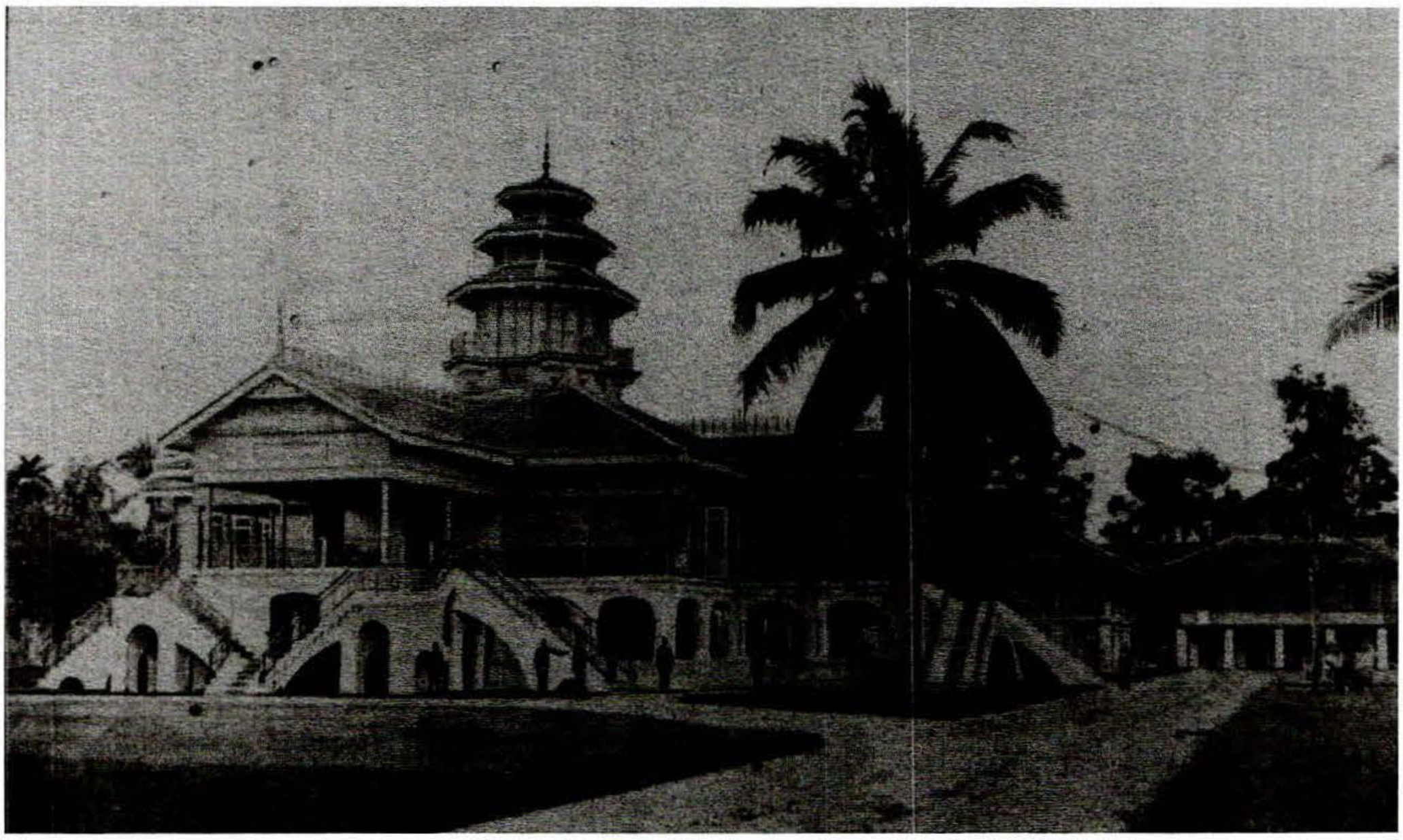

Istana Sultan Langkat
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

wilayah Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang. Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa kesultanan ini di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Aceh Timur, di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Deli dan Serdang, dan di bagian barat berbatasan dengan Aceh Tengah serta Alas. Dalam kenyataan sering terjadi pergeseran wilayah kekuasaan antara Langkat, Deli, dan Serdang. Penetapan wilayah Kesultanan Langkat[2] bahkan baru dilakukan pada tanggal 20 Juni 1905 oleh Sultan Abdul Azis Abdul Jalil Rahmatsyah.

Pada abad ke-17 M, Raja Kahar, cicit Dewa Syahdan, mendirikan Kerajaan Langkat,[3] di antara Stabat dan Kampung Inai (Kota Dalam) (Reid, 2014). Raja Kahar digantikan oleh putranya, Badiulzaman, dengan gelar Sutan Bendahara. Sutan Bendahara mempunyai empat orang putra, yakni Kejeruan Tuah Hitam, Raja Wan Jabar, Syahban, dan Indra Bungsu (Pelly, 1986). Sutan Bendahara memberi kekuasaan pada keempat anaknya di kawasan utama kerajaan di Kota Dalam, namun mereka tetap mengakui kekuasaan Sutan Bendahara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tuah Hitam, putra tertua, menggantikan ayahnya memerintah di Kota Dalam bersama Indra Bungsu. Raja Wan Jabar memilih Selesai sebagai tempat kedudukannya, sedang Syahban menetap di Punggai (Sinar, 1978).

Keadaan terjaga sampai setidaknya menjelang Kejeruan Tuah Hitam meninggal. Setelah itu Langkat mulai menghadapi kemelut baik sebab dari luar mapun sebab dari dalam. Dari sisi internal, pertikaian terjadi antara Nobatsyah, putra Kejeruan Tuah Hitam, dan Raja Ahmad, putra Indra Bungsu. Mereka bertikai siapa yang paling berhak meneruskan takhta. Perseteruan dimenangkan Raja

Ahmad, yang kemudian menjadi raja selanjutnya. Dari sisi eksternal, Kerajaan Langkat harus berhadapan dengan Kesultanan Aceh dan perlawanan kerajaan-kerajaan kecil bawahan seperti Stabat (Reid, 2019). Persoalan datang silih berganti sehingga keadaan Kerajaan Langkat penuh dengan ketidakpastian dan secara politik tidak stabil.

Takhta Langkat kosong sepeninggal Kejeruan Muda Ahmad. Tidak lama kemudian kerabat Muda Ahmad, Kejeruan Stabat, pun meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya, Sutan Muhammad Syeh atau lebih dikenal sebagai Matsyekh. Rupanya Matsyekh menginginkan takhta Langkat untuk membalik posisi kekuasaan pusat yang sudah lama dipegang oleh keturunan Tuah Hitam dan Indra Bungsu. Selain itu Stabat memiliki misi khsus agar Langkat tidak berada di bawah kekuasaan Siak yang tengah melakukan perluasan kekuasaan di Sumatera timur.

Kesultanan Siak pun bertindak cepat. Tengku "Ngah" Musa, anak Ahmad, yang mendapat pendidikan lama di Kesultanan Siak diperintahkan mengisi takhta yang kosong. Hal ini dimaksudkan untuk memotong upaya Matsyekh yang meminta Musa untuk mengawini saudari perempuannya. Musa sempat menikah dengan adik perempuan Matsyekh, namun tidak lama kemudian perempuan itu meninggal. Alih-alih mendapat gelar *kejeruan muda*, ia justru dianugerahi gelar *sutan bendahara* oleh Matsyekh dan sekutunya, tetapi kemudian Musa sadar bahwa ia berada dalam kendali Matsyekh. Oleh karena itu permintaan Kesultanan Siak segera dipenuhinya.

Setelah memegang tampuk kekuasaan di Kesultanan Langkat Musa diberi gelar Tuanku Sultan Haji Musa al-Khalid al-Mahadiah Muazzam Shah oleh Kesultanan Siak. Oleh karena itu Langkat beserta kerajaan-kerajaan kecil bawahannya sepakat berada di bawah bendera Kesultanan Siak. Meski demikian Sultan Musa termasuk salah satu sultan yang berhasil memberi dukungan terhadap kemajuan Kesultanan Langkat. Terlepas adanya masalah dengan kerajaan sekitar, ia berhasil membuat Langkat sebagai salah satu kesultanan di Sumatera timur yang sangat berperan dalam perdagangan dan keagamaan. Sedemikian heroiknya Sultan Musa hingga kini orang Langkat menganggapnya sebagai pembangun daerah Langkat (Husin, 2013).

2. Di Tengah Pusaran Konflik

Supremasi Siak atas Langkat, juga Deli dan Serdang, pada dasarnya sudah lama berlangsung, hingga kekuatan Aceh mulai menurun di bawah kepemimpinan sultanah. Perlawanan yang dilakukan ketiga kesultanan itu cenderung sporadis dan kurang konsisten. Pada tahun 1815 M, misalnya, Serdang diserang oleh Siak karena berupaya menjadi kerajaan mandiri. Pada tahun 1823 M Kejeruan Tuah Hitam dari Langkat bergabung dengan Deli untuk kembali merebut pemerintahan dari Siak. Usaha ini dilanjutkan Nobatsyah,

anak Kejeruan Tuah Hitam, dengan dukungan Kesultanan Deli (Anderson, 1971: 245). Semua upaya tersebut gagal karena kuatnya angkatan perang Kesultanan Siak. Setidaknya sampai tahun 1827 M Siak merasa berhak atas ketiga kesultanan tersebut, sehingga sering memaksa ketiganya mengirim bala tentara atau persenjataan bilamana Siak sedang menghadapi perang (Kroesen, 1971: 155).

Sikap politik Siak seiring dengan perubahan peta politik di belahan barat Nusantara. Traktat London 1824 memberikan kebebasan Belanda untuk mengembangkan kekuasaannya ke seluruh wilayah Pulau Sumatera. Meskipun demikian J. Van Den Bosch, baik ketika menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1830–1833 M) maupun ketika menjadi Menteri Kolonial Belanda (1832–1839 M), sangat berhati-hati melakukan manuver di Sumatera timur. Keterlibatan Pemerintah Hindia Belanda dalam dua perang, yakni Perang Diponegoro (1825–1830 M) dan Perang Padri (1832–1838 M), menjadi alasan Belanda lamban menguasai wilayah ini. Keadaan ini sempat dimanfaatkan Inggris untuk menahan tekanan Belanda ke daerah Sumatera timur, namun—sebagaimana diketahui—Inggris akhirnya harus pergi dari Sumatera. Belanda pun melakukan persiapan untuk menguasai wilayah Sumatera timur. Belanda geram ketika salah seorang pejabat Inggris, Adam Wilson, campur tangan dalam perebutan mahkota Kerajaan Siak.

Tindakan Siak mengundang kemarahan Kesultanan Aceh sehingga mendorong Aceh merebut ketiga kesultanan ini dari tangan Siak. Pada tahun 1854 M Aceh yang sudah menggalang kekuatan bersiap menyerang Langkat dengan kekuatan besar. Setidaknya 200 armada perahu perang dipimpin Panglima Husin, putra Sultan Aceh Mansur Syah, dikirim untuk menyerbu Langkat. Armada itu dimaksudkan untuk memulihkan kekuasaan Aceh atas kerajaan-kerajaan di kawasan Sumatera timur, tak terkecuali Langkat. Upaya Aceh itu juga dapat dibaca sebagai penolakan atas kebijakan Belanda yang mencoba memperkuat kedudukan Siak di Sumatera timur.

Kehadiran Panglima Husin jelas sebagai ajang pamer kekuatan. Langkah ini efektif untuk menakut-nakuti kerajaan-kerajaan di sumatera timur. Aceh berhasil mendapatkan pengakuan kembali tanpa melakukan perang yang berarti. Tidak ada kerajaan di Sumatera timur yang mau mengambil resiko. Yang menarik, pengakuan tersebut tidak dilakukan dengan berat hati, karena mereka juga tidak ingin Belanda menguasai wilayah bagian barat Aceh (Reid, 2019). Sultan Langkat Sultan Musa dianugerahi gelar "Pangeran Indera Diraja Amir Pahlawan Aceh" oleh Aceh dan diberi stempel resmi (stempel *sikurieng*) Kesultanan Aceh (Sinar, 2011).

Perebutan kembali wilayah Sumatera timur yang dilakukan Aceh membuat Pemerintah Hindia Belanda di Batavia geram, sebab upaya awal untuk menguasai wilayah Sumatera timur untuk membendung

kegiatan perdagangan Inggris terancam gagal. Belanda menekan Sultan Siak agar membuat perjanjian politik secepatnya dengan kesultanan lain yang berkepentingan dengan wilayah Sumatera timur. Lewat perjanjian tersebut Belanda berencana mendapatkan wilayah Stabat hingga Tamiang karena ada berita tambang minyak di wilayah itu.

Belanda menguasai Kesultanan Siak. Sultan mengakui kedaulatan Belanda atas Siak dan daerah-daerah yang berada di bawah naungan Siak, seperti Langkat, Deli, Serdang, dan Asahan. Perjanjian yang ditandatangani Sultan Siak tanggal 10 Februari 1858 itu menyatakan bahwa Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk semua daerah taklukannya, berada di bawah "perlindungan" dan "kekuasaan" Belanda. Yang dimaksud dengan daerah taklukkan (*vassal*) adalah kerajaan-kerajaan Melayu yang membentang dari Tamiang sampai Asahan, termasuk Kesultanan Langkat. Sesudah pengakuan Siak, kerajaan-kerajaan di Sumatera timur, terutama Langkat, terombang-ambing. Langkat yang awalnya berada di bawah naungan Kesultanan Aceh terpaksa mengakui Kesultanan Siak sebagai kerajaan pelindungnya; padahal hubungan Aceh dengan Langkat sangat erat.

Meski diterima dengan setengah hati, perlindungan Belanda membantu Langkat melawan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di internal kesultanan. Sultan Musa mulai berhasil menancapkan tonggak untuk mengukuhkan wilayah Kesultanan Langkat, meski tidak mudah. Sampai tahun 1860-an M pun Sultan Langkat masih sibuk menghadapi kekuatan raja-raja kecil di Langkat, seperti Stabat, Selesai, dan Tamiang. Perlawanan ini dapat dinilai sebagai sikap membangkang pada kekuasaan Langkat.

Tentu saja Aceh tidak tinggal diam. Sultan Ibrahim Mansyur Syah mengatur persiapan untuk mengatasi persoalan di Sumatera timur. Sultan mengirim Tuanku Hasyim, yang sering disebut Tuanku Rayeuk, untuk menelisik keadaan. Selain muda dan cakap dalam berperang, Hasyim menguasai medan. Nama Tuanku Hasyim juga sangat masyhur dalam melawan serangan Belanda di Aceh. Pun Tuanku Hasyim ditunjuk menjadi Wakil Sultan Aceh di wilayah-wilayah Sumatera timur di bawah kedaulatan Kesultanan Aceh, seperti Kerajaan Tamiang, Kesultanan Langkat, Kesultanan Deli, dan Kesultanan Serdang. Sultan Aceh juga menaruh wakilnya di Asahan. Penguasa Asahan Sultan Ahmad Syah ditugasi mengawasi daerah Asahan, Panai, Bilah, Kota Pinang, Kualih, dan Batubara.

Sementara itu Seruwai, wilayah di bawah Langkat, diperintah Panglima Deli dari Besitang. Setelah meninggal ia digantikan anaknya, Raja Bendahara. Raja Bendahara tidak ingin takluk pada siapa pun, baik Kejeruan Karang maupun Sultan Langkat. Ketika itulah Langkat mencoba menguasai Seruwai dan menjatuhkan Raja Bendahara. Langkat bahkan bekerjasama dengan Kejeruan Karang

menyerang Raja Bendahara. Seruwai dijepit dari Pulau Kampai. Akhirnya Raja Bendahara dapat ditaklukkan. Ia ditangkap beserta anak laki-lakinya dan dibawa ke Langkat. Adik Raja Bendahara, Sutan Suman, diangkat sebagai sultan.

Tidak berapa lama menjadi raja Sutan Suman meninggal. Ia digantikan anaknya, Sutan Muda. Penunjukan Sutan Muda tentu saja atas kebijakan Kesultanan Langkat. Tidak lama kemudian Raja Bendahara meninggal dunia dalam tahanan di Langkat. Hal itu berarti pengaruh Raja Bendahara sudah ditumpas habis. Dengan demikian Kesultanan Langkat berharap kedudukannya aman di Seruwai, karena yang tersisa adalah orang-orang yang dapat dikendalikan.

Peristiwa di Langkat tidak dapat dibiarkan begitu saja oleh Tuanku Hasyim. Meskipun demikian ia menggunakan cara sebagaimana lazim berlaku di Nusantara. Ia melakukan perkawinan politik dengan memperistri putri Sultan Langkat, Tengku Ubang (Sinar, 2001). Perkawinan itu sekaligus berhasil memutus campur tangan Siak atas Langkat, sehingga Tuanku Hasyim berharap dapat dengan mudah menancapkan pengaruhnya kepada Sultan Musa. Ternyata kepentingan dan ambisi Sultan Musa yang menghendaki Langkat otonom dan mandiri jauh lebih kuat. Tuanku Hasyim menyadari hal itu dan mengetahui ada kemungkinan sewaktu-waktu mertuanya minta bantuan kepada Kesultanan Siak. Oleh karena itu ia minta Sutan Muhammad Syekh dari Kejeruan Stabat untuk mempengaruhi Sultan Langkat agar tidak minta bantuan kepada Siak yang merupakan sekutu Belanda.

Siasat Tuanku Hasyim berhasil. Langkat mau mendengarkan Aceh. Peristiwa tahun 1860 M dapat menjadi contoh. Saat itu Sultan Musa bahkan membuat perjanjian dengan Bahorok untuk menghentikan perseteruan. Hal itu tentu saja merupakan suatu keanehan, bahwa sultan mau membuat perjanjian dengan kepala daerah taklukannya. Dalam perjanjian itu cap Sultan Aceh digunakan di atas cap Sultan Langkat, yang menandakan bahwa kedudukan Langkat berada di bawah kekuasaan Aceh. Selain itu perundingan antara Langkat dan Bahorok ditengarai Langkat bertindak atas suruhan Aceh dan bukan dengan kehendak sendiri. Bagaimanapun perjanjian dengan wilayah taklukan merendahkan derajat Kesultanan Langkat karena dianggap sejajar dengan Kejeruan Bahorok. Siasat seperti ini pernah digunakan Aceh ketika dahulu Kejeruan Muda Ahmad memberikan kemerdekaan kepada Kejuruan Bahorok, bahwa Aceh membuat daerah ini sebagai perisai terhadap rencana-rencana yang membahayakan Aceh di kemudian hari. Kini saatnya Aceh menuai benih yang ditanamnya dahulu.

Selain peristiwa Bahorok, Stabat juga membuat Kesultanan Langkat kelimpungan karena Stabat membuat perjanjian dengan Wakil Sultan Aceh di Tamiang. Kedudukan Langkat yang juga di bawah

Aceh tentu saja membuat Langkat mengurungkan niat menggempur Stabat. Bila penyerbuan tetap dilaksanakan, Sultan Langkat dapat dianggap sebagai pemberontak di mata Kesultanan Aceh. Meski demikian Stabat pun terus diawasi secara ketat oleh Tuanku Hasyim. Ia bahkan menetap di Pulau Kampai agar pengaruhnya di Langkat tidak mudah digoyang.

Kerajaan kecil seperti Selesai pun tidak mau ketinggalan dan mulai menahan perahu-perahu dagang milik Kesultanan Langkat dan menyita barang bawaannya apabila Pangeran Langkat tidak mau memberi beberapa konsesi yang diinginkannya. Kerajaan Selesai agaknya diilhami oleh pengalaman Bahorok ketika Kesultanan Langkat tidak dapat berbuat banyak dan malah melakukan perundingan agar tidak mengangkat senjata satu sama lain.

Akhirnya setelah tersudut seperti itu dan kedudukannya sangat lemah Pangeran Langkat terpaksa minta bantuan Kesultanan Siak. Berkat bantuan tersebut Sultan Musa mendapat daerah Sungai Bingai. Daerah ini dipilih sultan untuk memperkuat posisi Langkat di sekitar perairan yang relatif padat. Ia pun mengangkat seseorang yang dipercaya untuk memimpin distrik tersebut. Orang itu dari Sunggal dan dianugrahi gelar bendahara. Sayangnya bendahara ini berselisih dengan Sultan Musa sehingga kemudian ditangkap (Sinar, 1996: 28). Sebagai pengganti Kepala Distrik Sei Bingai, Sultan Musa mengangkat Tengku Maharaja. Tengku Maharaja dianggap orang yang cocok untuk mengamankan Sungai Bingai karena ia pemimpin laskar. Selain itu Sultan Musa melakukan konsep kepemimpinan dwi-tunggal. Ia mengangkat Datuk Berempat sebagai pendamping Tengku Maharaja.

Sultan Musa didukung penuh oleh Kejuruan Besitang. Besitang, yang berada di kawasan Lepan, merupakan daerah baru karena lahir pada awal pemerintahan Sultan Musa. Konon pada waktu itu seorang pemuka suku Alas dan beberapa anak buahnya datang ke Langkat. Rupanya pemuka suku Alas itu minta bantuan Sultan Langkat untuk memenangkan perselisihan di daerah Tanah Alas. Sultan pun menyanggupi permintaan itu dan akhirnya suku Alas menjadi salah satu kekuatan paling setia mendukung Langkat. Keberadaan suku Alas di Lepan juga menjadi garda depan Langkat dalam menangkis serangan yang dilakukan Aceh.

Konflik internal yang berkepanjangan mendorong campur tangan pihak Kesultanan Deli. Sultan Deli saat itu, Usman Perkasa Alam, berhasil menancapkan kekuasaannya di Langkat di bawah Sultan Musa. Ikatan pertama kedua kesultanan ini ditandai oleh ikatan perkawinan antara Sultan Musa dan anak Datuk Hamparan Perak, wilayah taklukan Kesultanan Deli. Lewat pernikahan tersebut, Sultan Musa semakin mudah minta bantuan pada Deli manakala Langkat dilanda konflik internal. Langkah tersebut diambil karena perlindungan Siak seperti ketika Sultan Musa berhasil merebut

pemerintahan Langkat ternyata mustahil karena Siak sedang menghadapi masalahnya sendiri; bahkan Siak tidak mampu menjaga pengaruhnya di Sumatera timur, terutama Langkat. Itulah yang mendorong Sultan Musa berpaling ke Deli serta mengaku berada di bawah kekuasaan Deli. Sejak saat itu gelar Sutan Bendahara yang diberikan oleh Siak sebagai gelar pertama yang disandang oleh Sultan Musa ditanggalkan dan ditukar dengan gelar dari Deli: Pangeran Mangnegara Raja Muda Negeri Langkat.

Perlindungan Deli terhadap Langkat berhasil memperkecil pergolakan di Langkat, terutama dari Kejeruan Stabat yang menjadi salah satu kerajaan kecil terkuat yang memberontak terhadap Kesultanan Langkat. Pemberontakan Stabat disebabkan Muhammad Syeh atau Matsyeh menginginkan takhta Langkat. Keinginan Kejeruan Stabat melunak karena Langkat berlindung pada Deli, sementara Matsyeh menikah dengan saudara perempuan Sultan Deli. Pertikaian antarmereka pun terhindar dari perang.

3. Sultan Musa dan Kekuasaan Belanda

Hak kesultanan Deli atas Langkat terputus oleh isi Acte Van Erkenning tahun 1862 yang ditandatangani Sultan Mahmud Perkasa Alamsyah (1858–1873 M), saat belum menjadi sultan. Perjanjian tersebut tidak menyebutkan batas kekuasaan Kesultanan Deli dan daerah taklukannya sehingga Deli tidak dapat menuntut haknya atas Langkat. Hal itu diperkuat oleh sikap Sultan Musa (Sultan Haji Musa al-Khalid al-MahadiahMuazzam Shah, 1840–1893 M) yang sengaja datang ke Bengkalis untuk bertemu dengan Arnold, Asisten Residen Riau saat itu. Sultan Musa membawa serta mandat Raja Bendahara Tamiang, Datuk Batubara, Sultan Basyaruddin Syaiful Alamsyah Serdang, Orang Kaya Setia Raja Hamparan Perak Deli, Raja Sulaiman Putra Setia Raja, Raja Indra Muda, dan Datuk Kampung Besar. Pangeran Langkat beserta para raja kecil tersebut minta perlindungan Belanda untuk menyelenggarakan pemerintah kesultanan beserta rakyat mereka. Mereka juga ingin lepas dari Deli dan Aceh (Schadee, 1918: 85). Sejak saat itu Kesultanan Langkat resmi berada di bawah kekuasaan Belanda.

Residen saat itu, Netscher. juga tidak menemui hambatan yang berarti dalam mengajukan permohonan ke Batavia untuk Langkat. Dalam waktu singkat akhirnya Langkat mengakui Siak dan sama-sama bernaung di bawah kekuasaan Belanda (Pelzer, 1985: 11). Di pihak lain, pada permulaan bulan Februari 1862, Netscher mendapat laporan bahwa Kesultanan Aceh kembali mengirim ekspedisi ke Sumatera timur. Deli dan Langkat yang sudah berada di bawah kekuasaan Belanda menolak ekspedisi tersebut. Sementara itu Serdang dan Asahan yang berada di bawah pengaruh Aceh menerimanya. Hal itu membuat Netscher geram dan mengirim surat peringatan kepada penguasa Serdang dan Asahan. Surat peringatan itu ditolak oleh Serdang dengan

alasan bahwa Serdang dan Asahan berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Pun Serdang dan Asahan tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Inggris (Pelly, 1986; Sinar, 1986; Sinar dan Syaifuddin, 2007). Oleh karenanya Belanda memutuskan untuk melakukan tindakan tegas.

Pada tanggal 25 Agustus 1862 Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengirim pasukan ke Sumatera timur untuk menguasai wilayah itu sepenuhnya ke dalam kekuasaan Belanda. Setidaknya ada tujuh kapal perang dengan 1.400 marinir yang diturunkan oleh Belanda (Anderson, 1971). Pasukan itu memaksa Sultan Serdang dan Sultan Asahan menandatangani pengakuan takluk kepada Belanda. Sultan Asahan menyingkir ke pedalaman dan penggantinya dipilih oleh Belanda. Sepupu Sultan Asahan kemudian dilantik menjadi sultan. Pada akhir ekspedisi tahun 1865 Netscher mengumumkan bahwa kerajaan-kerajaan di pesisir Sumatera timur, dari Tamiang sampai ke Siak, sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Belanda (Pelzer, 1985: 12; Sinar, 2007: 45).

Sekitar tahun 1865 M, dengan bantuan Belanda, Sultan Musa dengan mudah menguasai daerah-daerah yang tidak mau tunduk ke Langkat, antara lain Stabat dan Pulau Kampai. Dengan demikian wilayah kekuasaan Langkat meluas sampai ke Stabat, Pulau Kampai, Bahorok, dan Selesai. Belanda pun mengakui Sultan Musa sebagai penguasa Langkat, Pulau Kampai, dan Tamiang yang resmi. Pengakuan tersebut memberi peluang bagi Sultan Musa bergerak lebih leluasa dalam rangka mempersatukan seluruh wilayah *urung* di bawah Kesultanan Langkat. Meski demikian Sultan Musa tetap mempertahankan gelar yang disematkan oleh Aceh, sembari "beraja" ke Siak di bawah kedaulatan Belanda. Sistem pemerintahan Sultan Musa mengikut adat lembaga di Kesultanan Siak. Beberapa istilah lembaga seperti "datuk berempat" dibentuk untuk mememecahkan masalah secara musyawarah. Langkat juga menggunakan gelar "tengku maharaja". Yang pertama kali dianugerahi gelar tersebut sekaligus menjadi ketua dewan adalah kemenakan Sultan Musa. Di kemudian hari pejabat tengku maharaja berperan penting karena orang yang diberi gelar tersebut adalah orang kepercayaan Sultan Musa. Mereka ditempatkan di setiap distrik yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Langkat dan berperan menyerupai "raja muda". Mereka menjadi pintu pertama bagi siapa saja yang ingin menemui Sultan Musa.

Pada tahun 1878 M, atas tekanan Belanda, Raja Musa menyerahkan hak atas daerah yang terletak di sebelah kanan Sungai Tamiang kepada Pemerintah Belanda. Pada tahun 1881 M Langkat dibagi menjadi dua *onder afdeling*, yakni Langkat Hulu yang berpusat di Binjei dan Langkat Hilir yang berpusat di Tanjung Pura. Karena kedudukan Pangkalan Beranda sebagai

daerah minyak semakin penting, sultan menambah satu lagi *luhak*, yaitu Luhak Teluk Haru. Wilayahnya diambil dari Luhak Langkat Hilir, yang meliputi Besitang, Pulau Kampai, Pangkalan Beranda, dan Lepan (McKinnon dan Sinar, 1981).

Dengan demikian sejak tahun 1884 M kekuasaan Belanda di Langkat semakin efektif dan pada tahun 1887 M Belanda menganugerahi gelar baru kepada Sultan Musa: Sultan Al-Haji Musa Almahadiah Muazzam Syah. Berbarengan dengan itu ditetapkan pula putranya yang ketiga, Tengku Montel alias Tengku Abdul Aziz, sebagai penggantinya apabila Sultan Musa ingin mengakhiri kekuasaan atau meninggal dunia.

Kesultanan Langkat merupakan salah satu kesultanan yang berkedudukan *lange politiek contract*, yang berarti kesultanan ini mempunyai perjanjian politik sebagaimana tercantum di dalam berbagai pasal yang menentukan hak dan kekuasaan diserahkan kepada Pemerintah Hindia Belanda, tetapi sebagian besar wewenang tetap berada dalam kekuasaan sultan. Kedudukan ini berlainan dengan kerajaan-kerajaan kecil, yang di Aceh disebut *uleebalang*. Mereka diikat Belanda dengan *korte verklaring*, yang sangat membatasi hak dan kekuasaan mereka (Reid, 2017). Hal itu juga tercermin dalam kontrak dan pembagian hasil minyak yang dibuat oleh perusahaan minyak asing, seperti di daerah Perlak (Jacq-Hergoualc'h, 2002).

Berdasar peristiwa dan keadaan di atas tampaknya Sultan Musa orang yang sangat bijak dan cerdas. Hal itu tampak dari bagaimana Sultan Musa melihat tiga kekuatan penakluk besar yang ingin menguasai Langkat di bawah kontrolnya, yaitu Siak, Aceh, dan Belanda. Sultan Musa tentu tidak ingin Langkat menjadi rebutan dan membuat Langkat menjadi rusuh. Langkat pernah berada di bawah Aceh, kemudian direbut Siak, kembali di bawah Aceh, dan kemudian di bawah Siak kembali. Keadaan itu diperparah setelah ada penemuan sumber minyak di Langkat.

Kesultanan Langkat yang ingin bebas dan mandiri jelas tidak beruntung karena banyak faktor. Langkat berada di bawah tiga cengkeraman kekuasaan sekaligus, yakni Aceh, Belanda, dan Siak. Langkat di bawah pemerintahan Sultan Musa berulangkali bergejolak sekalipun tidak dapat dimungkiri bahwa ekonomi dan peradaban Islam maju. Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pergolakan tersebut, yakni (1) adanya perebutan takhta antara Tengku Ngah dan Sutan Matsyekh, (2) beberapa raja kecil di sekitar Langkat yang melawan karena hendak mempertahankan kedudukan otonom, dan (3) adanya pergulatan antara Aceh dan Siak.

Keinginan kuat Sultan Musa atas kedaulatan yang otonom mendorongnya menjalin kerjasama dengan Belanda. Setidaknya

ada empat keuntungan didapat dari Langkat setelah meminta bantuan Belandan, yakni (1) kedaulatan Kesultanan Langkat diakui oleh Belanda; (2) Langkat dan Belanda terikat kerjasama, khususnya di bidang ekonomi; (3) Langkat memiliki derajat yang sama dengan Siak dan Aceh; serta (4) Langkat tidak perlu menyetor pajak atau upeti kepada siapa pun.

Siasat Sultan Musa memang tepat. Dengan kebijakan itu penertiban dan pemulihan keamanan mudah dilaksanakan sehingga pembangunan dapat dimulai, meskipun harga yang harus dibayar atas perjanjian dengan Belanda adalah Sultan Langkat di bawah kedaulatan Belanda. Namun dengan perjanjian itu Tengku Musa diakui Pemerintah Belanda sebagai Raja Langkat, Pulau Kampai, dan Tamiang. Agaknya Sultan Musa berupaya mengambil pilihan dengan kerugian paling kecil demi kemajuan dan ketenteraman Kesultanan Langkat. Sebagaimana disinggung di atas, pengakuan itu terjadi pada tahun 1869 M dan setelah pengakuan itu perjanjian dengan Belanda diperluas kembali. Sultan Musa merasa sudah tiba waktunya untuk menegakkan kewibawaan. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar Raja Langkat dan ingin semua wilayah Langkat secara utuh berada di bawah kekuasaannya. Apalagi letak dan kedudukan Langkat di muara sungai sehingga sultan yang kuat menjadi suatu keharusan agar bisa menguasai arus perdagangan.

Setelah melalui usaha yang cukup panjang Sultan Musa berhasil mengangkat kembali kewibawaan Langkat. Ia memerintah sampai dengan tahun 1892 M serta berhasil menaklukkan dan mempersatukan para kejeruan, seperti Bingei, Stabat, Selesai, dan Bahorok, yang semula berdiri sendiri-sendiri. Oleh para pewarisnya Sultan Musa dikenal sebagai pembangun Kesultanan Langkat.

4. Kegiatan Perniagaan

Kesultanan Langkat terletak di sebelah barat Selat Malaka yang ramai dengan hingar-bingar lalu-lintas perniagaan internasional. Dengan kedudukan itu Langkat, bersama Deli dan Serdang, menjadi salah satu kesultanan penting di kawasan tersebut. Daerah-daerah pantai dan pelabuhan di kesultanan ini menjadi tumpuan utama perekonomian untuk mengisi kas kesultanan. Kegiatan ekspor-impor menjadi kegiatan keseharian yang tampak di pelabuhan Langkat. Selain itu barang yang diperdagangkan dengan mudah dilayarkan menuju wilayah-wilayah lain di luar Sumatera timur, terutama ke daerah yang ramai kegiatan perdagangannya seperti Penang atau Malaka (Jacq-Hergoualc'h, 2002).

Untaian sungai yang berada di Langkat membantu dan berperan sebagai jalur pelayaran dari daerah pedalaman (hulu) ke pelabuhan (hilir) (Husny, 1978: 8–10). Hasil perkebunan dan pertanian, terutama tembakau, membawa Kesultanan Langkat terkenal di dunia internasional. Langkat semakin diuntungkan berkat naiknya permintaan tembakau di Eropa.

Catatan John Anderson, yang berkunjung ke wilayah Sumatera timur, khususnya ke Deli, Serdang, dan Langkat, menggambarkan kemakmuran ketiga kesultanan tersebut, setidaknya untuk ukuran zaman itu. Tercatat bahwa hasil lada yang diekspor sampai ke Penang dan Malaka mencapai 26.000 pikul dari Deli, 8.000 pikul dari Serdang, dan 20.000 dari Langkat (satu pikul = 61,76 kg) (McKinnon dan Sinar, 1976; Sinar 2005). Di samping tembakau, barang-barang ekspor lain yang dihasilkan oleh ketiga kerajaan tersebut antara lain cengkih, lada, gading gajah, gambir, rotan, padi, dan lilin. Sementara untuk barang-barang impor yang masuk ke pelabuhan ketiga kesultanan tersebut antara lain garam, candu, kain cita Eropa, permadani, kain songket, dan batu bara (Anderson, 1971).

Sama halnya dengan wilayah lain di Nusantara, syahbandar di pelabuhan Kesultanan Langkat berperan penting. Selain sebagai pengawas transaksi yang terjadi di pelabuhan, syahbandar juga berperan sebagai menteri bea cukai kerajaan yang bertugas memungut pajak atas barang-barang ekspor dan impor. Pemungutan pajak tidak hanya berlaku untuk barang eskpor dan impor, tetapi juga terhadap semua kapal atau perahu yang bersandar di perariran kesultanan (Anderson, 1971; 295). Dari berbagai hasil cukai, pajak, dan perdagangan inilah sebagian besar sumber pemasukan utama Kesultanan Langkat pada abad ke-18 M.

Anderson (Anderson, 1971: 303) mencatat uang yang diterima Kesultanan Langkat selama satu tahun mencapai 30.000 gulden. Tentu tidak seluruh penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan kearjaan. Ada sebagian cukai yang juga masuk ke kantong pribadi sultan. Selain itu ada tambahan pemasukan yang diperoleh dari denda, biaya pengadilan, dan upeti dari daerah taklukan, yakni kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Kesultanan Langkat. Berbagai pemasukan itu digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan kesultanan.

Memasuki abad ke-19 M pemasukan Kesultanan Langkat semakin meningkat seiring dengan penanaman modal asing ke Sumatera timur. Sultan memberi konsesi tanah untuk perkebunan kepada pihak asing dengan ikatan perjanjian ganti-rugi. Konsesi seperti itu juga berlaku di sektor perniagaan. Selain itu penemuan tambang minyak merupakan anugerah lain bagi Kesultanan Langkat. Berkat sumur-sumur minyak tersebut kesultanan dapat menambah pemasukan melalui pemberian izin kepada pihak asing untuk mengelola sumur tersebut. Penulis dan pelawat Belanda Jan Huygen Van Linschoten mencatat soal minyak tanah di Langkat dalam *Itinerario*. Catatan yang beredar sejak abad ke-17 M itu menyatakan adanya sumur minyak tanah di daerah Langkat Hilir (Husin, 2013: 63).

Dalam laporan resmi Kolonial Verslag 1880 terdapat catatan bahwa Sultan Langkat memberi izin kepada orang Belanda, Aeilko Zijlker

Yohanes Groninger, untuk mengelola sumur minyak di wilayah kekuasaannya pada tahun 1883 M. Konsesi tersebut berada di daerah Lepan dengan luasan 500 bau. Di kemudian hari sumur minyak itu dikenal dengan nama Telaga Said. Tidak begitu jelas mengapa "Said" digunakan untuk menamai sumur minyak tersebut. Ada beberapa versi dalam beberapa sumber mengenai nama "Said". Meskipun demikian besar kemungkinan penggunaan nama ini berkaitan dengan nama seorang penduduk setempat bersuku Melayu yang terkenal sebelum ladang minyak itu ditemukan dan/ atau dikelola serta kecil kemungkinan "Said" merupakan nama pendatang dari daerah lain (Schadee, 1918).

Konsesi yang diberikan oleh Sultan Langkat, dengan persetujuan Residen Sumatera Timur, kepada Zijlker hanya berlaku untuk lima tahun. Masa berlaku konsesi minyak sama dengan konsesi perkebunan tembakau di daerah itu. Masa lima tahun digunakan untuk melihat apakah pengelolaan tambang minyak berhasil di kemudian hari atau tidak. Bila berhasil izin akan diperpanjang, sementara kalau gagal izin tidak akan dilanjutkan.

Alih-alih berjalan mulus, Zijlker menemui banyak persoalan dalam mengelola tambang minyak. Selain harus membayar sewa tanah kepada Sultan Langkat, ia pusing atas keterbatasan prasarana yang dapat menghubungkan tambang minyak dengan pelabuhan. Jalan yang masih seadanya menghambat penyaluran dari produsen ke konsumen. Bila musim hujan jalan semakin sulit dilalui, karena jalanan menjadi kubangan lumpur dan sering dilanda banjir (Pelly, 1986). Keadaan itu dapat terjadi karena pengelolaaan tambang minyak Zijlker merupakan kegiatan paling awal yang pernah dilakukan, sehingga sangat wajar apabila prasarana dari tambang minyak ke pelabuhan tidak memadai.

Tantangan lain datang dari buruh-buruh tambang yang didatangkan dari Jawa. Letak tambang yang terpencil mengakibatkan wilayah tambang mudah terjangkit banyak penyakit. Terbukti banyak buruh yang meninggal karena nyamuk malaria. Selain itu daerah belantara mengakibatkan buruh mudah terkena demam dan flu berkepanjangan.

Beruntung di tengah tantangan tersebut Zijlker mendapatkan kabar menyenangkan. Pada tahun 1883 M tersebut sekelompok pencari tambang minyak menemukan sumur minyak baru, yang kemudian diberi nama Telaga Tunggal karena memang hanya satu-satunya dan memiliki wilayah yang cukup luas. Mutu minyak yang dihasilkan oleh sumur ini pun tergolong sangat baik. Berkat "telaga" ini Zijlker lolos dari himpitan hutang, terutama hutang kepada Sultan Langkat dan Pemerintah Hindia Belanda yang meminjamkan beberapa alat tambang. Meskipun demikian nasib sial kembali menerkam Zijlker. Pada akhir tahun 1888 M Tegala Tunggal terbakar sebelum kontrak habis. Ia kembali harus minta bantuan pemerintah Hindia Belanda,

karena pengeboran minyak dalam sumur tersebut belum maksimal. Zijlker butuh modal besar. Beruntung pula Pemerintah Hindia Belanda membantunya dengan meminjami peralatan bor dan ahli-ahli dalam bidang pengeboran (Reid, 2017).

Meski demikian pada tahun pertama kontrak keduanya Zijlker masih belum bisa melunasi hutang-hutangnya. Kewajibannya terhadap Sultan Langkat pun tidak dapat dipenuhinya. Pada akhir tahun Sultan Langkat memberi keringanan dengan menghilangkan sementara pajak tanah yang seharunsya dibayar (Reid, 2015). Walaupun minyak sudah bisa didapat, tetapi masih banyak sarana yang belum tersedia, yakni pabrik penyaringan minyak, tangki penyimpanan, dan jaringan pipa dari sumur ke pabrik. Sarana dan prasarana itu membuat Zijlker harus mengeluarkan modal besar.

Zijlker berhasil mengumpulkan modal dari para tuan tanah Eropa yang tertarik pada bisnis minyak. Bersama maskapai besar dari negara Belanda, pada tanggal 16 Juni 1890 Zijlker membentuk perusahaan baru dengan nama Koninklijke Nederlansche Maatschappij Tot Exploitatie Van Petroleum Bronnen In Nederlandsche Indie. Modal pertama perusahaan ini mencapai angka 1.300.000 gulden (kira-kira 10 milyar rupiah dalam konversi tahun 2019). Sejak itu berdirilah pabrik penyulingan, pipa-pipa, tangki-tangki, serta kapal tanker. Segala sesuatu tampak berjalan lancar karena tambang minyak itu mendapat perlindungan langsung dari Raja Belanda (Husin, 2013). Sekitar bulan Juli 1890 perusahaan itu sudah memiliki ahli pembukuan, bernama Gideonso, dan asistennya, bernama Stutterheim. Dari notula yang mereka buat pada tahun awal perusahaan tersebut masih harus menghadapi kesulitan.

Pada akhir tahun 1891 M perusahaan itu menunjuk Kessler ke pangkalan pusat minyak di Belanda. Kessler berhasil membawa perusahaan minyak tersebut ke puncak keemasan. Pada tanggal 1 Maret 1892 pabrik mulai memproduksi banyak minyak dan dalam beberapa bulan kemudian hasilnya sudah mulai dijual dan bersaing di pasar bebas dunia dengan minyak Amerika, Rusia, dan Cina. Minyak Langkat mula-mula dijual di dalam blik atau kaleng.

Tidak lama di antaranya ladang minyak kembali menghadapi masalah. Dimulai pada bulan Januari 1893 ladang diserang oleh rakyat setempat. Mereka hendak menghancurkan tambang minyak Pangkalan Berandan. Pihak Belanda menghadapinya dengan membentuk ekspedisi bernama Temiang Expeditie. Pertempuran antara rakyat setempat dan Belanda berlangsung sengit, berlangsung hingga enam bulan, dan Belanda menderita kekalahan.

Setahun kemudian kesulitan sedikit demi sedikit dapat diatasi dan produksi mulai meningkat, namun kembali muncul berita yang mengejutkan. Pada bulan Juni 1898, ketika sedang berpesta

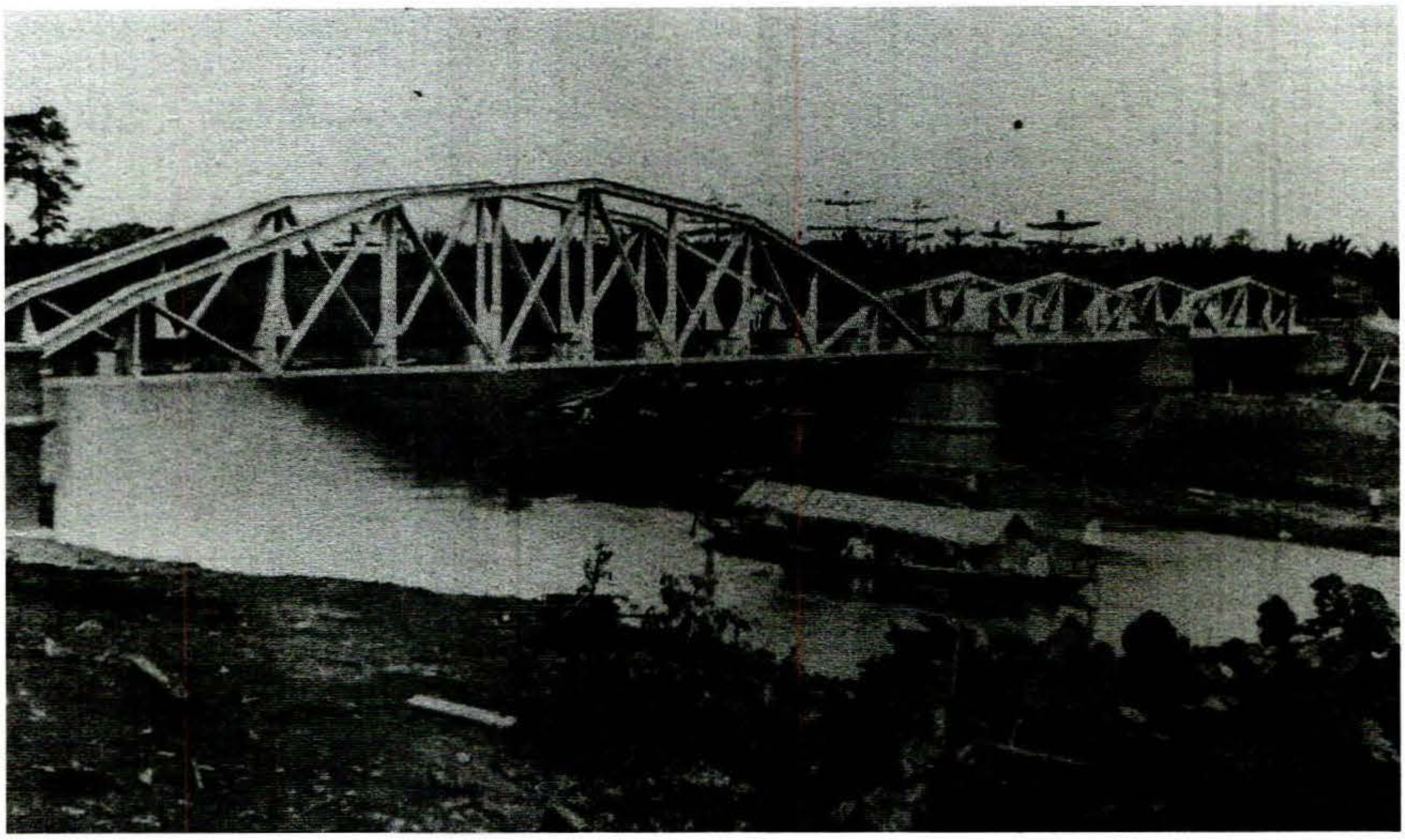

Jembatan Kereta Api di Langkat, salah satu wujud pembangunan Langkat setelah keberhasilannya di bidang perdagangan. Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

meresmikan nama tanker baru "Sultan van Langkat", datang khabar bahwa produksi di sumur Telaga Said—yang menjadi andalan utama produksi—menunjukkan tanda-tanda akan habis, bahkan dari sumur tersebut keluar air asin. Karena eskploitasi berlebihan gejala serupa juga terjadi di Besitang. Produksi pun turun drastis. Pada tahun 1899–1900-an M Belanda melakukan pencarian sumur-sumur minyak baru di sekitar Langkat. Sementara itu Pangkalan Berandan menjadi pusat administrasi.

Berkat tembakau, karet, dan minyak Kesultanan Langkat menjadi makmur. Dari minyak, Langkat menerima 479.103 gulden dan dari hasil minyak tersebut Sultan Langkat memperoleh pembagian royalti dengan sistem sebagai berikut:

- Dari konsesi minyak Nederlandsch Indie Aardolie Maatschappij (NIAM) dan konsesi minyak di sekitar Teluk Haru kesultanan dan Sultan Langkat memperoleh royalti sebesar satu sen per liter.
- Dari konsesi minyak Batavia Petroleum Maatschappij (BPM) royalti untuk Sultan Langkat sebesar 0,5 sen per liter dan 0,5 sen per liter untuk Pembesar Kerajaan Langkat.

Dari hasil konsesi itulah Sultan Langkat membangun kerajaannya. Perencanaan pembangunan disiapkan mulai dari pembangunan pendidikan, kesehatan, pertanian, dan prasarana seperti jalan, jembatan, dan parit. Sultan juga menata perangkat Kaula Swapraja Langkat dan membantu rakyat yang memerlukan secara langsung. Lembaga perguruan pendidikan didirikan. Demikian juga pembangunan maktab pengajian dan sekolah di tempat yang memerlukan. Mesjid dan surau yang belum mendapat aliran listrik

diberi minyak kerosin secara cuma-cuma. Rumah sakit besar dibangun di Tanjung Pura, Binjai, dan Pangkalan Berandan diikuti pembangunan rumah sakit kecil di beberapa tempat lain.

5. Dinamika Keagamaan

Perkembangan Islam di Kesultanan Langkat bisa dikatakan cukup pesat. Perkembangan tersebut mempunyai talian erat dengan Kesultanan Aceh dan Kesultanan Siak, sehingga Kesultanan Langkat mewarisi akar-akar keislaman cukup kuat dibandingkan dengan kerajaan di sekitarnya. Upaya penguatan Islam dalam sendi-sendi masyarakat dimulai sejak Sultan Musa berkuasa. Perubahan nama Kerajaan Langkat menjadi Kesultanan Langkat juga terjadi di masa kepemimpinannya. Sebagai seorang yang dididik dan dibesarkan di istana Kesultanan Siak, pengetahuannya mengenai Islam terbilang mumpuni.

Sultan Musa sering mendatangkan ulama dari Siak dan Minangkabau, misalnya Syekh Haji Abdul Wahab Rokan Al-Kalidy Naksabandiyah. Ia berasal dari Rantai Sibunang Sakti, Negeri Tinggi Rokan Tengah, Riau. Seperti tercantum pada akhir namanya, Syekh Wahab merupakan tokoh Tarekat Naksabandiyah. Ia mulai mengajar di Langkat pada tahun 1870 M dan Sultan Langkat memberi tanah di Sei Batang Serangan untuk dijadikan perkampungan tarekat sekaligus pusat pengajaran Islam. Perkampungan itu didirikan pada tahun 1883 M dengan nama Babussalam, yang kemudian menjadi pusat perguruan Tarekat Naksabandiyah di Nusantara.

Sultan Langkat mendukung perkampungan Tarekat Naksabandiyah, yang terbukti dari bantuan rutin Sultan Musa kepada perkampungan ini (Tanjung, 2017). Meski demikian perkampungan itu tidak hanya bergantung pada sokongan dana dari sultan. Perkampungan itu berupaya mandiri dengan mengembangkan pertanian dan peternakan, yang hasilnya dijual atau digunakan sendiri. Usaha itu dikerjakan secara gotong-royong dengan semua warga kampung dan dipimpin langsung oleh Syekh Wahab. Selain belajar dan mengajar, kebersamaan dan kerja keras menjadi prinsip yang ditekankan oleh Syekh Wahab di kampung itu. Mereka yang tidak menjalankan prinsip tersebut dipersilakan meninggalkan perkampungan.

Dalam waktu yang relatif singkat Perkampungan Naksabandiyah menjadi salah satu desa termaju di Kesultanan Langkat, bahkan sering menjadi percontohan bagi desa-desa lain (Tanjung, 2017: 318). Dalam segi tata letak dan tata ruang desa perkampungan itu menjadi salah satu desa yang memiliki kompleksitas ruang tersendiri. Hal itu dapat dilihat dari letak komplek perguruan yang berada di tengah kampung, yang sekaligus menyiratkan sebagai pusat peradaban desa. Di dalam perguruan terdapat beberapa bangunan yang digunakan sebagai tempat pertemuan banyak

orang, seperti madrasah, rumah *suluk*, dan mesjid, di samping kediaman pribadi Tuan Syekh. Sarana umum pun dapat dikatakan lengkap untuk zamannya, misalnya sumur bor, jamban umum, dan percetakan kecil. Perumahan penduduk di luar dan mengelilingi komplek perguruan; sementara tanah pertanian, seperti kebun limau, nilam, sayur-sayuran, dan lada ada di lingkaran paling luar. Tidak jauh dari areal pertanian dan perkebunan terdapat peternakan lembu dan tambak ikan.

Sultan Langkat sangat menghormati Syekh Wahab, shingga perkampungan Babussalam bahkan diberikan hak otonomi secara luas sehingga dapat membuat undang-undang serta tata kehidupan sendiri yang terpisah dari Kesultanan Langkat (Ratna, 1990). Perkara pelanggaran di luar pembunuhan, misalnya, diadili sendiri oleh Syekh Wahab. Mereka juga mengenal dewan warga perkampungan, yang disebut sebagai *babul funun*, yang merupakan lembaga musyawarah desa (Pelly, 1986). Lembaga ini menetapkan ketentuan bahwa seluruh warga perkampungan yang sudah berumur 15 tahun diwajibkan mengikuti "*suluk*" (praktek Tarekat Naksabandiyah), yakni tahapan lebih lanjut setelah seseorang mengenyam pendidikan dasar tarekat. Mempelajari *suluk* bagi warga perkampungan tidak memerlukan banyak syarat dibanding para pendatang, sebab para pendatang dari luar Babussalam hanya boleh sekedar mempelajari tarekat dan kemudian pulang ke tempat masing-masing. Kelak apabila mereka mempunyai waktu boleh kembali lagi dan langsung mengambil *suluk* tanpa harus mempelajari tarikat lagi. Oleh karena itu warga Babussalam dapatsegera melakukan penyelarasan ilmu tarekat daripada warga lain.

Perguruan Babussalam telah mencetak banyak lulusan. Para alumninya kemudian menyebarluaskan ajaran Tarekat Naksabandiyah ke banyak daerah. Sebagian di antara mereka bahkan berhasil mendirikan peruguran tarekat di tempat tinggal masing-masing, sehingga kemudian muncul beberapa perguruan tarekat yang dapat dikatakan seperti cabang Babussalam. Cabang-cabang perguruan itu, misalnya, terdapat di Riau, Kuala Simpang, Tapanuli Selatan, Gunung Selamat, Air Bangis, Medan, Perak, Penang, Pekan Baru, Air Tapah, dan Bagan Siapi-api. Para alumni pun sering berkumpul setiap tahun pada tanggal 21 Jumadil Akhir di Babussalam, semacam reuni antaralumni dan tokoh-tokoh tarekat. Peristiwa reuni kemudian dilembagakan menjadi acara haul Syekh Wahab sesudah meninggal.

Terdapat dua sebab Tarekat Naksabandiyah berkembang begitu cepat. Pertama, ada kewajiban yang terpundak pada setiap pribadi pengikut *suluk* untuk menyebarkan tarekat kepada masyarakat, paling tidak kepada anak dan keturunannya. Kedua, adanya kebebasan yang diberikan Syekh Wahab kepada alumni untuk membuka cabang di tempat masing-masing dengan persyaratan ringan.

Selain Babussalam sebagai pusat penyebaran ajaran Islam, Sultan Musa juga berperan penting. Ia memperoleh gelar Sultan Al-Haj Musa Naksabandi Muazzam Syah karena pada masa tuanya—setelah menyerahkan kerajaan kepada putranya, Tengku A. Aziz—lebih banyak bermukim di Babussalam mengerjakan *suluk* dan menjadi murid setia Syeh Wahab sampai ia meninggal. Selain itu istri Sultan Musa mendirikan pengajian untuk perempuan di Tanjung Pura. Pengajian itu dinamai pengajian "maslurah", sesuai dengan nama permaisuri sultan. Dari pengajian ini kemudian berdiri Madrasah Masluriyah pada tahun 1912 M. Sultan Aziz meneruskan usaha ibunya. Ia mendirikan perguruan Mahmudiyah pada tahun 1918 M. Nama Mahmudiyah diambil dari nama anaknya, Mahmud, yang kemudian menggantikannya dan menjadi Sultan Langkat yang terakhir.

Perguruan Mahmudiyah berkembang sejak guru-guru yang disekolahkan sultan ke Kairo pulang dan memimpin perguruan itu. Dua orang alumni Al-Azhar, Syekh Afiuddin dan Syekh Abdurrahim, menjadi ulama terkenal di Sumatera Utara. Pada masa jaya peruguruan Mahmudiyah, sekitar tahun 1930-an M, jumlah pelajarnya mencapai lebih dari 2.000 orang. Pelajar-pelajar ini berasal dari berbagai daerah, seperti Aceh, Tapanuli, Riau, dan Malaysia. Pelajaran yang diberikan terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu (1) Tingkat Madrasah Dasar, (2) Madrasah Menengah Pertama, dan (3) Madrasah Menengah Atas. Kurikulum yang digunakan menggabungkan kurikulum pendidikan agama dan sekoleh umum.

Komplek Perguruan Mahmudiyah terletak di belakang Mesjid Raya Sultan, merupakan bangunan permanen bertingkat dua, terdiri atas bangunan tempat belajar murid-murid putra, bangunan tempat belajar murid-murid putri (Madrasah Masluriyah), asrama pelajar, dan perumahan untuk para guru. Ada ulama dari luar yang didatangkan sebagai tenaga pengajar, misalnya ulama dari Banten dan Minangkabau. Semua ulama yang didatangkan bermazhab Syafi'i. Salah satu tokoh yang berperan penting perannya adalah H. Muhammad Nur, murid Syekh Ahmad Chatib al-Minangkabawi, ulama dari Minangkabau dan bermazhab Syafi'i yang terkenal di Mekah sekitar awal abad ke-20 M.

Sultan sangat mendukung pengembangan pendidikan Islam di Langkat sehingga seluruh pembiayaan peruguran ditanggung oleh sultan dan oleh karena itu tidak ada pungutan (uang sekolah) yang ditarik dari murid atau dari masyarakat Langkat yang ingin belajar.

6. Kesultanan Berakhir

Seperti halnya kesultanan lain di Sumatera timur, Deli dan Serdang, Langkat mengalami perubahan besar ketika Jepang mendaratkan pasukannya di wilayah tersebut pada bulan Maret

1942. Sejumlah kebijakan baru diterapkan pemerintah pedudukan, salah satu yang terpenting adalah penghapusan otonomi yang diberikan Belanda kepada kerajaan-kerajaan di Sumatera timur. Jepang ingin memerintah rakyat Langkat dan Sumatera timur secara langsung demi memperoleh dukungan untuk menghadapi serangan Sekutu.

Kebijakan politik Jepang sangat merugikan Langkat. Bagi Kesultanan Langkat, yang saat itu di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Abdul Jalil Rakhmat Syah (1927–1948), masa pendudukan Jepang merupakan pukulan yang sangat berat. Kedatangan Jepang membuat Sultan tidak dapat lagi menguasai wilayah dan penduduk sebagaimana dinikmati pada zaman Belanda. Sultan juga tidak dapat melindungi tanah adat yang menjadi kewajibannya, sehingga para pendatang dengan leluasa menggarapnya. Keadaan itu tidak hanya melahirkan perasaan anti-Jepang, tetapi juga rasa rindu terhadap kekuasaan Belanda yang mewarnai kehidupan sosial-politik para sultan di Sumatera timur, termasuk Kesultanan Langkat, bahkan setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh arena itu Langkat termasuk kesultanan yang tidak segera menyatakan bergabung dengan Pemerintah Indonesia. Berbeda dengan Deli dan Asahan, Langkat menyambut kedatangan kembali tentara Sekutu (Inggris) dan Belanda (NICA) pada tahun 1948. Langkat ragu-ragu bergabung dengan Republik Indonesia, bahkan sultan masih berharap sistem politik yang mendukung keberadaan kerajaan tetap berlaku di bawah perlindungan Belanda (Erman, 2011: 66–68). Sikap politik sultan, juga sikap bangsawan Melayu di Sumatera timur umumnya, membuat mereka berhadapan dengan massa yang sangat kuat, yang anti-penjajahan dan mengendaki mereka pergi dari bumi Indonesia. Oleh karena itu kesultanan dilihat sebagai wujud kekuasaan tradisional yang tidak hanya dekat dengan Belanda, tetapi juga anti-Republik Indonesia.

Sementara itu di Sumatera timur pertentangan sosial sangat kuat karena keberadaan buruh yang berjumlah besar, sehingga suasana itu menciptakan pertikaian tajam antara masyarakat umum dan kesultanan. Sikap politik para sultan dan bangsawan dianggap mengkhianati revolusi dan berkembang menjadi wacana umum di Sumatera timur. Akibatnya, pernyataan terbuka yang dibuat para sultan pada tanggal 2 Januari 1967, bahwa mereka tidak anti-Republik, dianggap muslihat belaka. Masyarakat dihimbau untuk tidak mempercayai sultan, seraya mencetuskan "revolusi sosial" di Sumatera timur (Erman, 2011: 68–69; Said, 1977: 156).

Demikianlah gerakan massa dengan terma revolusi sosial berlangsung di Sumatera timur pada tahun 1946, namun gerakan itu tidak menghapus wilayah-wilayah otonom sebagai tujuan utama gerakan yang dimaksudkan elit politik pencetusnya. Yang justru terjadi adalah pembunuhan dan perampasan harta milik kesultanan. Revolusi berlangsung selama dua minggu dan

memakan korban terutama keluarga sultan-sultan Melayu dan istana (Langkat dan Asahan) dirampok dan dibakar. Penyair Tengku Amir Hamzah termasuk alah satu korban, yang dipancung di Kuala Begumit. Istana Kesultanan Langkat, Darul Aman, dibakar dan tidak sedikit anggota keluarga sultan dibunuh. Sultan Mahmud Abdul Jalil Rakhmat Syah berhasil lolos dan diasingkan ke Batang Sarangan hingga tahun 1947. Ia meninggal setahun kemudian dan sejak itu pula Kesultanan Langkat kehilangan kekuasaan politiknya. Langkat sebagai sebuah kesultanan yang berdaulat secara politik berakhir pada tahun 1948.

(Endnotes)

1 Gotjah Pahlawan merupakan tokoh legendaris yang dianggap sebagai nenek moyang orang Deli dan Serdang. Tokoh ini dibahas pada bab tentang Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang.

2 Kesultanan Langkat mengeluarkan Surat Peraturan Negeri Langkat yang membagi daerah Langkat menjadi tiga *luhak*: Luhak Langkat Hilir, Luhak Langkat Hulu, dan Luhak Langkat Haru. Masing-masing luhak dibagi atas beberapa distrik. Di Luhak Langkat Hilir terdapat sembilan distrik, Luhak Langkat Hulu lima distrik, dan Luhak Langkat Haru lima distrik, sehingga secara kesultanan di Kesultanan Langkat ada 19 distrik. Sebelum surat peraturan tersebut dikeluarkan, jumlah distrik tidak bisa dihitung karena adanya perseteruan dengan Kesultanan Deli, Kesultanan Serdang, dan beberapa kerajaan kecil di Langkat.

3 Tidak diketahui secara pasti apakah sebelumnya kerajaan ini sudah berdiri atau belum, karena tidak ada catatan pasti. Catatan terakhir menunjukkan bahwa Kahar merupakan pendiri kerajaan ini.

— 16 —

Kesultanan Asahan

Kesultanan Asahan merupakan salah satu kerajaan di wilayah Sumatera Utara sekarang selain Deli, Serdang, dan Langkat. Kesultanan Asahan merupakan kesultanan kecil yang berdiri pada tahun 1630 M di wilayah yang sekarang menjadi Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Kesultanan ini ditundukkan Belanda pada tahun 1865 M dan kemudian bergabung menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1946.

Awalnya Kesultanan Asahan merupakan kerajaan taklukan Kesultanan Aceh Darussalam. Saat itu Sultan Iskandar Muda, pemegang tampuk pemerintahan Aceh, menyerbu Kerajaan Aru di Deli pada tahun 1612 M. Dalam perjalanan ia beserta pasukannya berhenti di sebuah sungai untuk beristirahat. Ia menyusuri sungai tersebut hingga tiba di suatu tanjung yang sangat indah, yang merupakan pertemuan antara Sungai Asahan dan Sungai Silau. Wilayah dekat sungai itulah yang kemudian menjadi Kesultanan Asahan (Sinar, 2007). Sultan Iskandar Muda menunjuk Raja Abdul Jalil sebagai sultan pertama dan dengan demikian Asahan berada di bawah bendera kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam (Bustamam, 2003: 39). Sultan Abdul Jalil dilantik sebagai Sultan Asahan dengan gelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah.

Sultan-sultan Asahan berikutnya adalah Sultan Saidisyah, Sultan Muhammad Rumsyah, Sultan Abdul Jalil Syah II, Sultan Dewa Syah (1756–1805 M), dan Sultan Musa Syah (1805–1808 M). Setelah Sultan Asahan ke-7 Sultan Muhammad Ali Syah (1808–1813 M) meninggal, terjadi perebutan kekuasaan di antara anaknya, Raja Hussein, dengan keponakannya, Raja Muhammad Ishak. Sebagai penyelesaian Raja Muhammad Ishak diangkat menjadi Yang Dipertuan Negeri Kualuh yang merupakan bagian wilayah Asahan, sedang Raja Hussein diangkat menjadi Sultan Asahan dengan gelar Sultan Muhammad Hussein Syah. Di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Hussein Syah (1813–1854 M) dan anaknya, Sultan Ahmad Syah, Asahan menjadi kerajaan yang disegani di daerah antara Serdang dan Siak dan berpengaruh besar di Batu Bara, Bilah, dan Panai.

Ketika kekuasaan Aceh Darussalam mulai meredup, Kesultanan Asahan melepaskan diri dan menjadi kerajaan mandiri pada

abad ke-19 M. Begitu lepas dari Kesultanan Aceh, yakni pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Shah, Kesultanan Asahan mendapat ancaman dari Kesultanan Siak Sri Inderapura yang berpusat di Riau.

1. Muncul dan Berkembangnya Kesultanan

Sultan Iskandar Muda terkesima pada pemandangan di sekitar tanjung dekat Sungai Asahan dan Sungai Silau. Ia memerintahkan para pengawalnya membangun tempat peristirahatan berupa balai. Tanjung tersebut kemudian dikenal dengan nama Tanjung Balai dan kelak menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Asahan (Sinar, 2007).

Saat pembangunan balai berlangsung ada seorang hulubalang datang (Husny, 1978). Beberapa sumber menyebutnya juga seorang dukun (Bustamam, 2003; Sinar, 2007) yang berasal dari Suku Karo bernama Bayak Lingga Haro-Haro. Salah seorang pengawal Sultan Iskandar Muda bertanya kepada si dukun mengenai penguasa tempat yang sedang mereka bangun. Pengawal itu tidak ingin pendirian balai melahirkan dampak buruk bagi pasukan Aceh yang akan melakukan penyerbuan (Schadee, 1918). Bayak Lingga mengatakan bahwa penguasa tempat itu adalah Raja Margolang. Sultan Iskandar Muda kemudian menyuruh salah seorang pengawalnya menemui Raja Margolang untuk meminta daerah Tanjung Balai. Utusan Sultan Iskandar Muda berangkat dengan membawa pasukan bersenjata lengkap. Raja Margolang terkejut dan mengizinkan Sultan Iskandar Muda menguasai Tanjung Balai demi menghindari hal yang tidak diinginkannya. Sejak saat itulah daerah Asahan berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam (Sinar, 2007). Perkembangan selanjutnya balai itu berkembang menjadi perkampungan sekaligus pusat perdagangan yang mempertemukan para pedagang dari Aceh dan Malaka.

Silsilah sultan pertama Asahan Abdul Jalil dapat ditelusuri dari garis keturunan raja sekitar Tanjung Balai. Batara Sinomba, Raja Pinang Awan, atau sering dikenal dengan nama Kota Pinang, yang dianggap sebagai leluhur Abdul Jalil dari garis keturunan ibu. Batara Sinomba mempunyai dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan bernama Siti Onggu—beberapa sumber menyebutnya Siti Ungu Selendang Bulan (Sinar 2001, 2007)—atau dikenal dengan nama Putri Berinai. Batara Sinomba kawin lagi dengan seorang hamba dan mempunyai seorang anak laki-laki. Batara Sinomba terpengaruh hasutan untuk menjadikan putra hasil perkawinan dengan istri keduanya sebagai Raja Pinang Awan. Selain ia juga diminta mengusir istri pertamanya dari istana.

Pada waktu yang bersamaan Sultan Aceh beserta bala tentaranya sedang berada di sekitar Kerajaan Kota Pinang. Gahara, istri pertama Batara Sinomba, meminta bantuan Sultan Aceh. Bila sultan bersedia membantu, Gahara menawarkan putrinya, Siti Onggu,

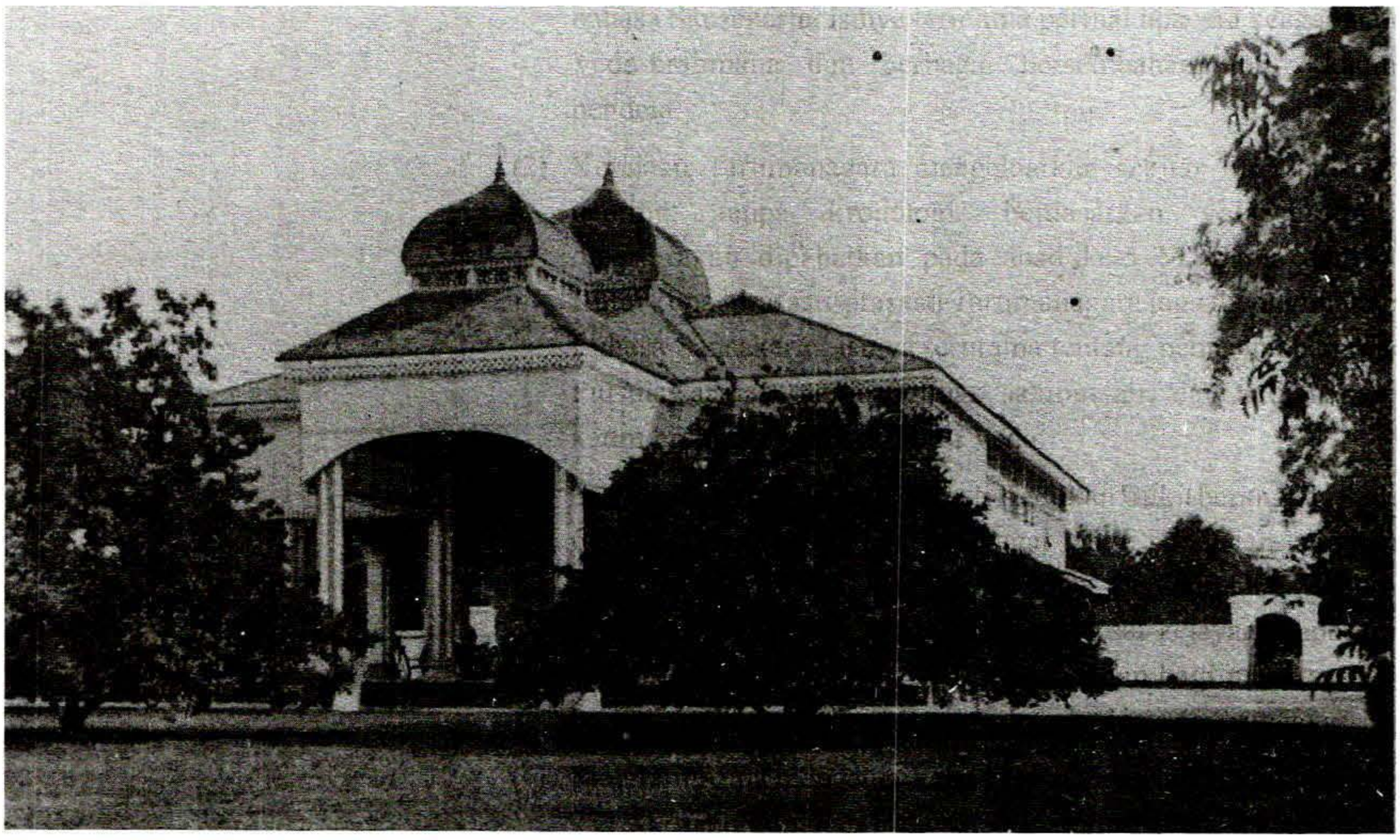

Istana Sultan Asahan
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

untuk disunting. Sultan Aceh menyetujui permintaan Gahara lalu mengirim pasukan yang dipimpin Raja Muda Pidie. Pasukan Aceh membunuh Batara Sinomba didekat sebuah pohon Jambu dan mengangkat kedua orang putra raja dari Gahara sebagai raja di sana. Adapun Siti Onggu dibawa ke Aceh untuk diperistri Sultan Aceh (Bustamam, 2003).

Kedua kakak Siti Onggu merindukan adiknya setelah lama berpisah. Mereka mengunjungi Tanjung Balai yang menjadi pos komando Kesultanan Aceh di Tanah Deli dan minta tolong kepada Bayak Lengga Haro-Haro agar mau menemani mereka menghadap Sultan Aceh. Mereka tiba di Aceh dan mengetahui bahwa adiknya sedang hamil besar. Keduanya memohon kepada Sultan Aceh agar dapat membawa pulang adik mereka ke Kerajaan Kota Pinang. Permintaan mereka dipenuhi dengan syarat bila anak yang dikandung Siti Onggu lahir laki-laki harus dijadikan Raja di Asahan dengan Tanjung Balai sebagai pusat pemerintahan (Marpaung, Silalahi, dan Marpaung, 2011). Setelah anak pertama lahir Sultan Aceh menalak Siti Onggu dan meminta Bayak Lengga Haro-Haro kelak menggantikannya sebagai suami. Anak pertama Siti Onggu kelak menjadi Sultan Asahan pertama dengan bergelar Sultan Abdul Jalil (Marhom Tangkahan Sitarak). Beberapa benda pusaka Aceh, seperti *bawar*, *jorong* (tepak sirih), dan *lela* (Si Juang nan Hilang) menjadi simbol bahwa Kesultanan Asahan berada di bawah kendali Aceh. Selain itu beberapa jabatan penting di Kesultanan Asahan pun ditunjuk oleh Aceh.

Bayak Lingga mendapat gelar Raja Bolon setelah masuk Islam dan menikah dengan Siti Onggu. Raja Bolon menikah lagi dengan putri Raja Si Margolang Pardembanan. Dari perkawinan dengan

Siti Onggu lahir Abdul Karimi, sementara perkawinannya dengan putri Margolang melahirkan Abdul Samat dan Abdul Kahar. Abdul Karim diberi gelar bangsawan Bahu Kanan atau Haru Dalam, sedang Abdul Samat dan Abdul Kahar masing-masing diberi gelar Bahu Kiri dan Haru Luar. Ketiga anak Raja Bolon itu sering disebut sebagai "Datuk Muda" (Husny, 1978).

Raja Simargolang yang mengizinkan Raja Bolon menyunting anaknya memanfaatkan kesempatan. Ia merebut Asahan dan menunjuk Abdul Samat sebagai Raja Kota Bayu dan Abdul Kahar sebaga Raja Tanjung Pati di Sirantau. Abdul Jalil mengungsi ke dekat Silau Meraja yang berada di bawah Kuasa Tengku Ambang dari Pagaruyung, kerajaan yang masih menjadi sekutu Kesultanan Aceh Darussalam. Di sana Abdul Jalil membangun kekuatan dan meminta bantuan Kesultanan Aceh Darussalam. Setelah merasa cukup kekuatan Abdul Jalil menggempur Raja Simargolang dan memaksanya tunduk di bawah kekuasaannya (Sinar, Zein, dan Rozanna, 2012). Perjanjian antara Abdul Jalil dan Raja Simargolang terjadi di sebuah tempat bernama "Padang Marjanji Aceh". Sampai beberapa tahun kemudian tidak muncul pertikaian dengan kerajaan sekitar. Tampaknya dukungan Aceh terhadap Abdul Jalil memiliki pengaruh bagi ketenteraman kekuasaan Sultan Abdul Jalil. Ia dinobatkan menjadi Sultan Asahan I sejak tahun 1630 M.

Meskipun berdaulat di daerah sekitar, Kesultanan Asahan merupakan kerajaan kecil yang menjadi bawahan Kesultanan Aceh. Oleh Karena itu dengan sendirinya struktur kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan Aceh. Meskipun demikian kekuasaan tertinggi Asahan tetap berada di tangan Sultan Abdul Jalil. Ia diberi gelar dari Aceh Yang Dipertuan Besar/Sri Paduka Raja. Jabatan di bawah sultan adalah Yang Dipertuan Muda (Husny, 1978). Istilah Yang Dipertuan menunjukkan bahwa gelar tersebut merupakan gelar pemberian yang menggambarkan wewenang berada di bawah Kesultanan Aceh. Sementara itu pemerintahan di daerah Batubara dan kawasan yang lebih kecil dijalankan oleh *datuk*.

Para penguasa setelah Abdul Jalil pun menggunakan gelar seperti Abdul Jalil. Adapun nama-nama sultan yang pernah berkuasa di Asahan beserta nama asli dan tahun kekuasaannya—sepanjang terdapat data—sebagai berikut:

(1) Sultan Syaidi Syah (Marhom Simpang Toba)

(2) Sultan Raja Mohamad Rumsyah (Marhom Sei Banitan/ Marhom Gagap)

(3) Sultan Abdul Jalil Syah II (Marhom Sei Raja) (1760–1765 M)

(4) Sultan Raja Dewa Syah (Marhom Pasir Putih) († 1805 M)

(5) Sultan Raja Musa (Marhom Rantau Panjang) († 1808 M)

(6) Sultan Raja Ali (Marhom Sirantau) († 1813 M)

(7) Sultan Raja Husin SyahI (Marhom Kampong Mesjid)

(8) Sultan Ahmad Syah (1853–1865 M; 1866–1888 M)

(9) Sultan Mohamad Husin Syah († 7 Juli 1915)

(10) Sultan Saibunabdul Jalilrahmat Syah, dihapuskan ketika Revolusi Sosial 3 Maret 1946

Sultan Abdul Jalil Syah II menikah dengan putri Bendahara (Encik Samidah) dan menetap di Sei Banitan. Ia mempunyai tiga orang anak laki-laki, yakni Abd Jalil Syah, Raja Paduka, dan Raja Kecil Besar. Sultan ke-4, Raja Dewa Syah, menikah dengan putri pedagang Cina Melaka dan memperoleh anak Raja Musa dan Raja Ali. Ia menikah lagi dengan Incek Jauh, juga dari Melaka, memperoleh anak Raja Laut.

Sultan Abdul Jalil Syah, yang membantu Raja Alam Siak, kemudian berbalik melawan VOC Belanda pada tahun 1763 M (Schadee, 1918). Yamtuam Riau, atau Raja Haji, menikah dengan putri Sultan Asahan dengan mas kawin kapal "Bulang Linggi", yang kemudian menjadi kapal komando Raja Haji ketika menyerang VOC tahun 1756 M di Melaka. Penduduk Batubara mendukung pasukan Raja Haji menyerang VOC di Melaka dan pada tanggal 4 Februari 1857 membakar pinggiran benteng VOC Melaka.

Sultan Abdul Jalil Syah menikah dengan Incek Selamah, putri Bendahara, dan memiliki seorang anak yang kelaki yang kemudian menjadi sultan ke-5. Dengan bantuan kerajaan di Tanah Jawa terjadilah perdamaian dengan Kerajaan Buntu Panei yang waktu itu sangat kuat (kemudian menjadi bagian Asahan) (Ratna, 1990). Pada saat itu Kerajaan Haboko dan Gunung menjadi tantangan terbesar bagi Kesultanan Asahan, namun kemudian menjadi bagian Asahan.

Sultan Raja Musa memerintah Kesultanan Asahan dalam waktu relatif singkat. Anak yang lahir dari putri bendahara, Incek Fatimah, menjadi sultan dengan nama Raja Mohamad Ishak. Sebelumnya, takhta kekuasaan Asahan diduduki oleh adiknya, Raja Ali, yang menikah dengan Tengku Puan (asal Selangor) yang melahirkan Raja Husin dan Tengku Siti.

Setelah Sultan Raja Ali mangkat tahun 1813 M terjadi perang saudara. Tengku Tua, kakak Tengku Puan, bersama Tengku Biung Kecil, mengangkat Raja Husin sebagai sultan, tetapi Bendahara Megat Gunung mendukung Raja Ishak yang dianggap berhak mewarisi takhta Asahan. Sultan Husin menikah dengan putri Tengku Tua dan putri Raja Trus Buntu Panei._Sultan Husin kawin dengan Tengku Sulong Panai dan mempunyai anak Sultan Ahmad Syah Tengku Pangeran Besar Muda dan Tengku Adil serta anak-anak perempuan, yakni Tengku Tengah (kawin dengan Yamtuan Kualuh), Tengku Sonet (kawin dengan Sutan Panai), Tengku Kecil (kawin dengan Pangeran Deli), dan dari perkawinannya dengan anak Tuan Trus lahir anak perempuan, Tengku Sulong Toba, yang kawin dengan Sayed Damat Pulau Pinang. Kemudian dari

istri lain lahir Raja Mohd Syarif dan Raja M Bakir (Sinar, 2007). Setelah meninggal pada tahun 1813 M terjadilah perang saudara di Asahan. Ketika anak Sultan Raja Ali, yakni Raja Husin, naik takhta ditentang oleh Raja Mohamad Ishak, anak Sultan Raja Musa, yang didukung oleh pamannya, Bendahara Megat Gunung. Pada masa inilah, yakni tahun 1823 M, utusan Inggris dari Pulau Pinang John Anderson menemui Sultan di Asahan.

2. Catatan Anderson: Perekonomian dan Kekayaan Asahan

Tidak banyak catatan yang memperlihatkan kegiatan perekonomian di Kesultanan Asahan. Pun tidak banyak sumber yang memberi gambaran bagaimana keadaan Asahan di tengah perhelatan ekonomi dunia. Satu catatan penting yang memperlihatkan bagaimana roda perekonomian berputar di Asahan ditemukan pada catatan John Anderson (Anderson, 1971) dalam *Mission to the East Coast of Sumatra* sebagai berikut:

Pada tanggal 26 Februari 1823 Anderson diperintah Gubernur Penang untuk menggali informasi tentang Asahan. Perjalanan dimulai dengan menyusuri Sungai Asahan di mulai dari Kampung Balai. Daerah ini merupakan rawa-rawa berdataran rendah dan terdapat kumpulan beberapa pondok yang berada di muara sungai. Bila air laut pasang kampung itu sudah pasti tergenang air, sehingga sering ditinggalkan oleh penduduknya. Mereka pindah ke daerah yang lebih tinggi dan sekaligus menanam segala macam bahan makanan di sana.

Meskipun daerah rawa tersebut tidak begitu cocok ditinggali, namun warga tetap bertahan. Hal itu karena ketika Raja Siak menaklukkannya, sang raja memerintahkan masyarakat agar tetap bertahan tinggal di rawa-rawa tersebut. Sultan Siak berkepentingan agar daerah tersebut tidak diambil alih para perompak. Bila perompak berhasil menempati daerah tersebut, maka kegiatan perdagangan yang melewati Sungai Asahan berpotensi dijarah dan berdampak pada perekonomian Siak lesu karena pedagang enggan melewati jalur tersebut. Sebagian besar penduduk yang menempati kampung tersebut orang Melayu. Suku lain yang banyak ditemui adalah orang Batak, sedang sisanya orang-orang Cina yang tampak sedang sakit dan sengsara karena mereka senang madat dan berjudi sampai uang habis.

Ketika Anderson mendatangi kampung tersebut sebagian besar penduduknya sedang tinggal ke dataran yang lebih tinggi, sehingga kampung terkesan seperti kampung yang ditinggalkan. Orang-orang sedang sibuk menanam padi. Mereka tidak ingin tertinggal musim panen, karena pada musim panen perahu-perahu Batubara, dan kadangkala dari tempat lain, berdatangan membeli padi. Selain padi, desa itu juga terkenal dengan ladanya. Dalam satu tahun setidaknya desa ini sanggup mengekspor satu *koyan* lada bermutu baik. Oleh karena itu lada Asahan termasuk yang dicari oleh orang-orang Eropa.

Selain padi dan lada, Anderson juga menemukan hasil kerajinan berupa tikar yang bersih dan bermutu baik. Anderson bahkan membeli beberapa lembar tikar untuk dibawa ke tempat asalnya.

Andeson juga menemukan sebuah rumah khusus yang sangat mewah untuk menerima tamu. Setidaknya, saat ia sampai ke kediaman Raja Muda, Anderson disambut tidak kurang dari tujuh tembakan kehormatan. Bersama dengan syahbandar Anderson diterima oleh Raja Muda Asahan untuk membicarakan kepentingannya mendatangi Asahan. Ia juga melihat bahwa kerajaan yang dianggapnya elok tersebut sering bertikai. Banyak meriam dan benteng mengelilingi rumah Raja Muda. Hal ini ditangkap oleh Anderson sebagai pelindung dari serangan-serangan yang mungkin datang dari negeri-negeri lain di sekitar. Anderson menyayangkannya, mengingat tidak ada artinya bagi kerajaan-kerajaan kecil tersebut berselisih satu sama lain karena tidak mendatangkan keuntungan.

Pada tanggal 2 Maret 1823 Anderson mengikuti Raja Muda berkeliling Asahan. Di perjalanan ia melihat kekayaan hasil bumi Asahan. Ia melihat Raja Muda memetik sirih, gambir, serta buah kelapa sebagaimana halnya memetik daun di jalanan. Di pinggir sungai ia juga menemukan banyak tanaman yang kelihatannya siap panen beberapa bulan ke depan, seperti tembakau, tebu, sirih, enau, dan berbagai macam buah-buahan, yang tentu tidak dapat ditemukan di negara asalnya. Selain itu pemandangan menunjukkan bermacam komoditi yang diperdangangkan oleh Asahan.

Pada tanggal 3 Maret 1823 Anderson kembali berlayar. Pelayarannya kembali memberi gambaran bagaimana tanah Asahan sangat cocok untuk mengembangkan lada. Ia melihat bahwa di sisi sungai-sungai Asahan terdapat lahan dan tanah yang cocok untuk menanam lada. Selain itu ia juga mencatat ada desa bernama Dunan yang menghasilkan buah durian dalam jumlah besar. Pada saat itu durian memang bukan barang dagangan mahal, namun setidaknya catatan Anderson memberi petunjuk bahwa Asahan juga punya potensi untuk memasarkan durian setidaknya pasar nasional.

Anderson juga menunjukkan bahwa banyak penduduk Asahan memelihara kuda poni, kerbau, kambing, dan beberapa ternak lain. Ada juga perburuan gajah yang diambil gadingnya dan dijual di pasar. Pada saat Raja Muda mengunjungi sebuah desa, Anderson melihat ada seorang penduduk desa yang menghadiahi Raja Muda gading gajah besar dan bagus. Asahan juga terkenal dengan pedangnya yang bentuknya sangat elok. Salah satu keistimewaan pedang Asahan karena gagangnya terbuat dari gading gajah.

Ketika melewati desa dengan penduduk orang-orang Batak, ia melihat beberapa perahu penuh garam. Dari sini dapat dilihat bahwa setidaknya garam juga menjadi dagangan yang masuk ke pasar

Asahan. Selain itu ada kain yang dijual oleh penduduk Asahan. Kain-kain tersebut biasanya dipakai untuk membungkus pedang bergagang gading.

Catatan Anderson juga memperlihatkan bahwa orang Asahan sering menukar babi, padi, dan barang-barang lain dengan beberapa buah barang kecil buatan Inggris, sebab orang-orang Asahan senang dengan barang-barang yang datang dari luar. Anderson bahkan memberikan selembar kain merah kas Inggris pada salah satu petinggi di Kampung Toba. Bagi orang-orang setempat, terutama yang senang berhubungan dengan orang dari luar, barang-barang dari luar dinilai lebih "berbudaya". Seorang Raja Bunto Panai bahkan lebih senang berbahasa Melayu dan bergaul dengan orang-orang asing yang datang, karena dengan demikian dirinya dianggap lebih berbudaya.

Dari catatan Anderson di atas dapat dilihat bahwa Asahan memiliki banyak hasil bumi yang dapat diperdagangkan, sehingga tidak mustahil Kesultanan Asahan mencapai keberhasilan pada satu titik waktu. Masa pemerintahan Sultan Husin dianggap sebagai masa perkembangan dan perluasan pengaruh Asahan, baik dari segi ekonomi maupun dari segi politik. Ia memperluas persekutuan dengan mengawini putri Raja Tuan Terus dari Buntu Panei, sehingga negeri itu menjadi negeri taklukan. Ketika Kerajaan Siak menyerang Asahan pada tahun 1845 M Sultan Husin memilih jalan perundingan sehingga terjadi perdamaian dengan Siak. Sebagai imbalannya Asahan wajib memberi sekitar 100 gantang padi (senilai $1.000 pada waktu itu). Pada tahun tahun 1848 M Asahan membantu Sutan Panai yang mengungsi ke Asahan karena diserang Kotapinang. Pengaruh Asahan ke Batubara meningkat, sementara Sultan Husin menghapus gelar dan jabatan Laksamana, Temenggung, dan beberapa yang lain. Beberapa tahun kemudian Sultan Husin turun takhta karena tua (1853 M) dan meninggal pada tahun 1854 M.

Dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Husin terjadi persaingan antara Belanda, Inggris, dan Aceh di Asahan. Belanda dan Inggris bersaing untuk memperluas wilayah jajahan dan perdagangan di pesisir timur Sumatera, sementara Aceh bersikeras mempertahankan kedaulatannya di Asahan. Oleh karena itu meskipun mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan putra Sultan Ahmad Syah keadaan Asahan tidak menentu. Berdasarkan Kontrak Siak-Belanda tanggal 1 Februari 1858 Siak minta bantuan Belanda untuk menertibkan negeri-negeri yang dianggap jajahannya dari rongrongan Aceh, yaitu wilayah dari Temiang sampai ke Pasir Ayam Denak (Rokan).

Belanda pun menuntut agar negeri-negeri di pesisir timur, termasuk Asahan, berada di bawah kendali Belanda; sebab berdasarkan

perjanjian tersebut Siak diserahkan kepada Belanda termasuk daerah taklukannya, seperti Asahan, Batubara, Serdang, Deli, Langkat dan Tamiang. Sejarah mencatat bahwa hak Siak atas kerajaan-kerajaan tersebut berdasarkan penaklukan tahun 1791 M, tetapi pada kenyataannya kekuasaan Siak hanya sebatas nama dan tidak diakui oleh banyak pihak, termasuk wilayah-wilayah yang pernah ditaklukkan. Hal itu tampak dari beberapa kerjasama ataupun persekutuan di balik layar antarkerajaan tersebut dengan Kesultanan Aceh Darussalam untuk mengatasi persoalan internal.

3. Agresi Militer Belanda dan Runtuhnya Kesultanan

Kesultanan Siak Sri Inderapura ingin menguasai daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai Aceh Darussalam, termasuk Asahan. Kesultanan Siak kemudian minta bantuan Belanda menguasai wilayah Asahan. Belanda pun mengirim utusan ke Kesultanan Asahan dan meminta Sultan Ahmad Syah tunduk pada Kesultanan Siak (Husny, 1978). Permintaan tersebut ditolak dan utusan Belanda diusir dengan tidak hormat, sebab, menurut adat Siak, derjat Sultan Asahan lebih tinggi dari Sultan Deli, Sultan Langkat, dan Sultan Serdang. Ia tidak mau disamakan, bahkan, menurut Sultan Ahmad Syah, kedudukan Asahan setara dengan Raja Muda Siak karena sudah lepas dari Kesultanan Aceh Darussalam.

Elisa Netscher, Residen Riau saat itu, tentu saja kesal. Ia sudah menyuruh seorang pembesar Minangkabau, Raja Burhanuddin, untuk menelesik keadaan di kawasan Sumatera timur. Sebagaimana disinggung di atas, Raja Burhanuddin melaporkan kepada Netscher bahwa tidak ada kerajaan yang mau mengakui kedaulatan Siak. Deli, Serdang, dan Langkat masih di bawah pengaruh Aceh, tetapi bersedia menerima perlindungan Belanda. Hanya Asahan dan negeri-negeri di bawah pengaruhnya, seperti Batubara, Panai, dan Bilah, yang tidak mau berhubungan dengan Siak dan Belanda. Pada bulan Agustus 1862, Netscher dan Pembantu Residen Belanda di Siak Arnold mengunjungi negeri-negeri tersebut dengan diiringi para pembesar Siak. Walaupun mengalami beberapa kesulitan, Netscher berhasil menundukkan Panai, Bilah, Kota Pinang, Serdang, Deli, dan Langkat di bawah kekuasaan Belanda. Sementara itu Asahan, yang saat itu berada di bawah pemerintahan Sultan Ahmad Syah, menolak menemui Netscher di kapal perangnya. Ia hanya mengirimkan utusan menemui residen Belanda itu. Netscher juga menolak bertemu dengan sultan di pantai, karena di Pelabuhan Asahan bersandar beberapa kapal Inggris dan bendera Inggris berkibar di beberapa gudang di pantai itu. Netscher meninggalkan Asahan menuju Bengkalis walaupun kemudian ia mendapat penjelasan dari Sultan Ahmad tentang kehadiran kapal dan bendera Inggris tersebut (Alfian, Pelly, dan Ratna, 1986).

Yang dilakukan Inggris dengan menambatkan kapal-kapalnya di pelabuhan Asahan merupakan bentuk ketidaksenangannya

terhadap Belanda. Tindakan Belanda yang sewenang-wenang di Asahan mengganggu kegiatan para pedagang Inggris di Pulau Pinang. Apalagi Pelabuhan Asahan berperan penting menghubungkan Pulau Pinang dengan kegiatan perdagangan internasional dan negeri-negeri di kawasan Sumatera timur.

Selain itu kedatangan Inggris di Asahan juga berkat langkah cepat Sultan Asahan dan Raja Muda Asahan yang memberitahu gubernur negeri-negeri selat, Kolonel Cavenagh, perihal niat Belanda itu. Major Man, Resident Konselor di Pulau Pinang, kemudian dikirim ke Deli, Serdang, dan Langkat untuk mengawasi keadaan. Selain Inggris Aceh juga menentang Belanda. Aceh tidak senang terhadap Belanda karena mencampuri urusannya di daerah Sumatera timur. Apalagi Belanda menggunakan Siak, yang juga musuh Aceh, sebagai pion dalam penguasaan Sumatera timur. Bagaimanapun, dari kacamata Aceh, seluruh pesisir timur Sumatera sampai Panai dan Bilah merupakan daerah taklukannya. Oleh karena itu Aceh mengirim angkatan perang ke Tamiang, Langkat, Deli, Serdang, Batubara, dan Asahan. Angkatan perang Aceh disambut dengan baik di Asahan dan Serdang.

Belanda tentu tidak tinggal diam dengan langkah Inggris dan Aceh. Belanda semakin geram dengan tindakan Asahan dan merencanakan serangan ke wilayah Tanjung Balai. Sebuah ekspedisi militer besar dikirim oleh Batavia yang dinamai *Expeditie tegen Serdang en Asahan* (Schadee, 1918). Mereka mendarat di Kampung Boga, Batubara, pada tanggal 10 September 1865. Kampung Boga merupakan salah satu wilayah Kesultanan Asahan. Setelah menduduki kampung tersebut, Belanda menduduki Lima Laras dan membuat Datuk Laksamana Lima Laras mundur dan meminta perlindungan ke Serdang. Penguasaanya atas dua wilayah itu membuat Belanda menguasai daerah Batubara seutuhnya. Batubara merupakan salah satu daerah penting yang menopang kegiatan Kesultanan Asahan. Dari Batubara mereka bergerak ke pusat pemerintahan Kesultanan Asahan di Tanjung Balai. Pertempuran antara Belanda dan Asahan terpencar dan terjadi di beberapa daerah, karena Belanda juga mengirim angkatan perang untuk menyerang beberapa daerah selain Asahan, seperti Serdang dan Tamiang. Saat pasukan Belanda tiba di Asahan Sultan Ahmad Syah dan adik-adiknya, Tengku Muhammad Adil dan Tengku Pengeran Besar Muda, mundur ke daerah pedalaman.

Pada tanggal 20 September 1965 Sirantau dikuasai Belanda dan membuat rombongan Sultan Ahmad Syah masuk ke pedalaman. Sultan kemudian melakukan pertemuan dengan raja-raja Batak di Huta Buru untuk menyusun strategi gerilya melawan Belanda. Akibat serangan gerilya dan sabotase di kota Tanjung Balai, Residen Netscher mengundang Sultan Ahmad Syah, Pangeran Adil, dan Tengku Pangeran Besar Muda yang bermarkas di kampong Sarang Alang agar mau berunding di kapal perang Dassoon. Sepanjang pengalaman menghadapi perang gerilya Belanda

tidak pernah berhasil. Pihak Asahan menolak perundingan dan menyerahkan panglima perlawanan gerilya kepada Pak Netek, salah seorang ahli perang gerilya di kawasan Huta Buru (Ratna, 1990). Alih-alih menyerah, perang gerilya dan sabotase rakyat di Asahan, khususnya di Tanjung Balai, makin menjadi-jadi. Para Pedagang Cina pun bahkan membantu Asahan bertahan dari gempuran Belanda. Hal ini terjadi karena sultan pernah memiliki istri berdarah Cina, bahkan ibu Raja Muda Naamatullah adalah seorang Cina (Sinar, 2007), sehingga hubungan orang-orang Cina dengan raja-raja Asahan sangat erat.

Menurut kisah Netscher pada tanggal 29 Oktober 1865 rombongan Sultan Ahmad Syah, Pangeran Adil, dan Tengku Pangeran Besar Muda tiba di atas kapal dan bersedia berunding dengan Netscher. Pada jam 4 sore itu juga dua kapal perang Belanda dipanggil merapat. Karena ultimatum menyerah tidak dipenuhi maka pada tanggal 30 September 1865 Belanda mengumumkan pemecatan Sultan Ahmad Syah dari takhta Kesultanan Asahan dan menyerahkan pimpinan sementara kepada Raja Muda Naamatullah, putra Raja Ishak. Karena tidak tahan menghadapi perlawanan gerilya orang Asahan, Raja Muda Naamatullah dicopot oleh Belanda dan dijadikan Raja (Yang Dipertuan) Kualuh-Leidong. Perlawanan rakyat melemah. Hilangnya semangat perjuangan menjadi alasan. Apalagi satu demi satu pemimpin perlawanan ditangkap Belanda. Seiring melemahnya serangan gerilya, tertangkap pula Sultan Ahmad Syah dan saudaranya, Pangeran Muda. Mereka dibuang ke Ambon berdasarkan keputusan Kerapatan Siak pada tanggal 7 Oktober 1867. Pemerintahan Asahan dipegang Kontrolir Van den Bor (Schadee, 1918).

Kepada Gubernur Jenderal di Batavia Netscher melaporkan dalam suratnya tertanggal 18 Oktober 1865 dengan: "Sultan Ahmad Syah berwajah menarik dan nampak pintar, meskipun mukanya penuh dengan kecurigaan dan ketakutan. Demikian juga dengan adiknya, Tengku Adil, yang juga menampilkan raut wajah seperti kakanya. Tetapi lain halnya dengan Tengku Pangeran Besar Muda, yang bertabiat kurang ajar dan bermuka garang. Bahkan ia mengambil sikap tidak peduli dan sering menantang. Ia juga tidak mau berusaha agar berpakaian sempurna sehingga lebih tampak sebagai orang Batak yang biadab (*onbeschaafden Batakker*) daripada sebagai seorang bangsawan Melayu yang sering berinteraksi dengan orang-orang Eropa (Sinar, 2007). Ia bersandar di pintu dengan tangan melintang, seolah-olah sedang menonton satu pertunjukan yang tidak berapa menarik perhatiannya. Muka dan sikapnya cocoklah dengan tingkah lakunya yang kurang ajar ketika menerima utusan saya pada bulan Desember 1864. Kepada Sultan Ahmad Syah, saya beri tahukan keputusan pemerintahan Hindia Belanda untuk memecat dirinya karena pernah menghina Pemerintah Hindia Belanda. Sementara dengan jaminan Raja Muda ia boleh tinggal asal jangan bertindak macam-macam. Kepada Tengku Adil, saya peringatkan jangan mendengarkan

hasutan orang dan harus berkelakuan baik jangan sedikit pun salah langkah. Saya lalu berpaling kepada Tengku Pangeran Muda, dan menyatakan bahwa dialah yang jadi biang keladi semua nasib buruk dari saudara-saudaranya dan dialah yang jadi perantara dengan orang Inggris dan orang Cina di Penang dan yang mengobarkan kebencian terhadap Belanda, malahan bertindak kurang ajar terhadap utusan saya, seorang turunan bangsawan Minangkabau (Raja Burhanuddin) yang lebih tinggi asalnya dari dia sendiri (Raja-raja Asahan berasal dari Batak: *van Batakschen oorsprong*)." (Husny, 1978; Sinar, Zein, dan Rozanna, 2012).

Masih dalam surat Netscher, Pangeran Muda juga terbukti menghina Pemerintahan Hindia Belanda dan berani menantangnya. Oleh sebab itu, Netscher tidak merasa berwenang memutuskan nasibnya, tetapi ia hanya menonton kejadian dan tidak perduli sama sekali. Sambil tersenyum ia hanya menjawab bahwa ia tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan itu (Sinar, Zein, and Rozanna, 2012). Ia pun tidak berupaya minta izin bertemu dengan keluarganya sebelum dibuang (Sinar, 2007). Bagi Netscher, Pangeran Muda merupakan sosok manusia yang begitu kasar, pemberani, sekaligus sangat berbahaya. Semua perbuatannya menunjukkan bahwa ia musuh Pemerintah Hindia Belanda yang gigih dan harus disingkirkan (Schadee, 1918).

Berdasarkan surat Netscher tersebut akhirnya Batavia menangkap Tengku Pangeran Besar Muda dan membawanya ke Batavia dengan kapal perang Delfzijl pada tanggal 30 Oktober 1865. Ia dijatuhi hukuman pembuangan ke Ambon, karena tertangkap basah bersekutu mengadakan gerakan bawah tanah terhadap Belanda di Tanjung Balai (Alfian, Pelly, dan Ratna, 1986; Husny, 1978). Sejak saat itu Asahan diperintah langsung oleh Kontelir Belanda. Sementara Raja Muda Naamatullah diam-diam membiarkan gerakan yang membuat api perlawanan menyala (Schadee, 1918).

Perlawanan rakyat terhadap Belanda berkobar. Kontelir Belanda membujuk raja-raja Batak di Hulu Asahan agar mematuhi adat lama "Asahan bertali ke Hulu" dengan enam dus cermin kaca, ditambah enam helai tengkuluk, enam kain putih halus dan pedang berukir, 25 ikat kepala kain batik, empat potong kain merah, empat kodi kain beludru biru dan hijau, serta dua peti gelas. Belanda ingin menjadikan Raja Burhanuddin sebagai raja Asahan, tetapi batal karena rakyat menolak.

Mula-mula Belanda mengirim ekspedisi dipimpin Raja Muda Naamatullah yang direncanakan Belanda sebagai pengganti Sultan Asahan, tetapi lasykarnya diobrak abrik rakyat Bandar Pulau, Buntu Pane, dan Pasir Mandogei, sehingga terpaksa tentara Belanda sendiri turun tangan. Oleh karena merasa Raja Muda Naamatullah tidak pernah berhasil memerintah di Asahan, pada tahun 1868 M Belanda mencopotnya dari Asahan dan

memindahkannya ke Kualuh dan Leidong. Asahan diperintah suatu Dewan Kerajaan terdiri dari Empat Orang Besar Asahan.

Pemerintahan Belanda di Asahan dipimpin seorang kontroler, yang diperkuat dengan *gouverments besluit* tanggal 30 September 1867 Nomor 2 tentang pembentukan Afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai dan wilayah pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu *Onder Afdeling* Batubara, *Onder Afdeling* Asahan, dan *Onder Afdeling* Labuhan Batu. Netscher mengangkat Tengku Naamal Yang Dipertuan Negeri Kualuh menjadi pemangku Sultan Asahan dan melantik seorang kontrolir dari Belanda sebagai penasihat (Sinar, 2007). Sultan Ahmad Syah menyerah, namun orang Batak di pedalaman meneruskan perjuangan menentang Belanda. Pada tahun itu juga Sultan Ahmad Syah diasingkan Belanda ke Riau bersama adiknya, Tengku Muhammad Adil (Sinar, Zein, dan Rozanna, 2012).

Pada tahun 1868 Tengku Naamal dilantik menjadi Pemangku Sultan karena kaum Batak tidak mau mendukungng pemerintah dan menuntut kepulangan Sultan Ahmad Syah. Perjuangan secara gerilya diteruskan hingga tahun 1879 dan 1883. Ternyata anggota dewan pun bersekutu menculik Kontrolir Belanda yang duduk sebagai ketuanya (Husny, 1978). Keamanan di Asahan tidak pernah pulih dan memuncak pada tahun 1879 M ketika penduduk Hulu Asahan dibantu orang-orang Simelungun dari Nadolok menyerang pos polisi Belanda.

Pada bulan Januari 1883 orang-orang Nadolok menyerang pos Belanda di Si Alang Kelong, dekat Bandar Pulau. Ketika bantuan militer dari Tanjungbalai datang gerilyawan Nadolok sudah menyingkir. Sulit bagı Belanda mengejarnya karena wilayah yang sukar dilalui. Kekuatan tentara di pos Bandar Pulau ditambah satu detasemen, yaitu 25 orang polisi bersenjata, dan lima pos pengintaian dibangun di sekitar Bandar Manis (Kualuh). Oleh karena keamanan Asahan tidak pulih dan berbagai tuntutan rakyat agar sultan dikembalikan, maka mau tak mau Belanda mengembalikan Sultan Ahmad Syah dan keluarganya ke Asahan pada tahun 1886. Namun pengembalian sultan diikuti syarat cukup berat, yakni tidak boleh campur tangan mengenai politik. Sultan AhmadSyah kemudian menandatangani perjanjian politik dengan Belanda (*akte van verband*) pada tanggal 25 Maret 1886 di Bengkalis dan kembali memerintah Asahan pada tanggal 25 Maret 1886 sampai meninggal pada tanggal 27 Juni 1888, tetapi sebelumnya datuk-datuk di Batubara sudah terlebih dahulu mengikat perjanjian dengan Belanda pada 1884 (Husny, 1978).

Karena Sultan Ahmad Syah tidak mempunyai keturunan, keponakannya, Tengku Ngah bin Tengku Pangeran Adil, menggantikan takhta. Pada 6 Oktober 1888 Tengku Ngah Tanjung ditabalkan menjadi Sultan Asahan ke-10 dengan gelar Sultan

Muhammad Hussein Rahmat Syah II. Pelantikan ini didasarkan pada wasiat pamannya, Sultan Ahmad Syah. Residen Belanda, G. Scherer juga memberi persetujuan terhadap pelantikan ini. Daerah-daerah Maranti, Suana, dan Parduaan dalam wilayah Habinsaran menyatakan tunduk kepada Sultan Asahan dengan mengikat Perjanjian Patik. Peristiwa itu disaksikan kontelir Belanda di Asahan. Sultan Muhammad Hussein II kemudian melakukan sejumlah langkah untuk memajukan Asahan, seperti menawari kongsi dagang Eropa membuka perusahaan di Asahan dengan harapan dapat memberi peluang pekerjaan bagi penduduknya.

Pada tahun 1900 M kerusuhan kembali muncul di Hulu Kualuh. Seorang Melayu bernama Guru Ali mengaku menjadi utusan resmi Si Singamangaraja XI dan menghasut rakyat agar memberontak (Sinar, 2007). Pasukan militer dikirim dan Guru Ali serta beberapa pengikutnya dapat ditangkap. Pada tahun 1902 M seorang bernama Si Tangkol, juga mengaku utusan Si Singamangaraja, menyebarkan ajaran Parmalim, yang mengakibat jalan antara Asahan dan Tanah Toba tidak aman buat Belanda. Belanda memasang perangkap dan menangkap Si Tangkol ketika berada di Bandar Pulau pada bulan November 1902. Pada tahun 1905 M Sungai Silau Tua ditetapkan sebagai batas antara Asahan dan Kabupaten Simalungun yang baru dibentuk. Hulu sungai *negen* Aek Bontar dan Silo Bosar diaku Asahan, tetapi Belanda memasukkannya menjadı bahagian kerajaan Tanah Jawa (Simelungun). Para suku memprotes, maka Belanda menekan sultan agar membuat surat resmi mematuhi keputusan Residen Belanda.

Dalam kontrak yang baru, tahun 1907, Belanda mengurangi banyak wilayah Hulu Asahan yang tidak didiami suku Melayu. Hanya *negen* Buntu Pane, Gunung, dan Haboko saja yang diakui Belanda masuk wilayah Asahan. Negeri Silo Jawa, Ujung Sipinggan, dan Tangga Bongbongan, misalnya, dicabut dari Asahan. Sultan tetntu saja protes keras. Pada tahun 1908 M Residen Sumatera Timur dan Residen Tapanuli membentuk komisi bersama untuk membicarakan soal itu mengingat daerah Habinsaran sudah dapat dikuasai Belanda. Akhirnya diputuskan bahwa Silo Jawa dan Ujung Sipinggan merupakan wilayah Kesultanan Asahan, tetapi Aek Bontar dan Silo Bosar dimasukkan ke dalam kerajaan Tanah Jawa (Simelungun) dan Tangga Bongbongan dimasukkan ke Habinsaran (Tapanuli) (Sinar, Zein, dan Rozanna, 2012). Begitu juga negeri-negeri di Hulu Kualuh yang dihuni suku Nadolok, yang menentang berada di bawah Raja Kualuh, dimasukkan ke Habinsaran (Tapanuli). Hal itu sesuai dengan Beslit Gubernemen tanggal 27 September 1913 No. 24, yang secara definitif menetapkan garis perbatasan Kerajaan Asahan, Simelungun, dan Batubara.

Pada tanggal 7 Juni 1915 Sultan Hussein meninggal dalam usia 53 tahun. Sebelumnya Sultan Muhammad Hussein II mengangkat Tengku Alang Yahya sebagai Bendahara dan mengangkat anak sulungnya, Tengku Amir, sebagai Tengku Besar Asahan atau

calon Sultan. Karena Tengku Amir meninggal pada tahun 1913 M, maka putra yang lain, Tengku Saibun, diangkat sebagai pengganti. Pada tanggal 15 Juni 1933 Tengku Saibun dilantik menjadi Sultan Asahan ke-11 dengan gelar Sultan Saibun Abdul Jalil Rahmat Syah di Istana Kota Raja Indra Sakti, Tanjung Balai. Berhubung belum cukup umur, Tengku Saibun "dipangku" Tengku Alang Yahya dengan gelar Tengku Regent Negeri Asahan. Istri Tengku Saibun, Tengku Nurul Asikin binti Tengku Al Haji Rahmad Bedagai, dilantik sebagai Tengku Suri (Tengku Permaisuri) Negeri Asahan pada tanggal 17 Juni 1933.

4. Perkembangan Islam

Pengaruh kebudayaan Islam di Kesultanan Asahan sangat kuat. Karena itu kehidupan keagamaan berkembang cukup baik, bahkan ada seorang ulama terkenal yang lahir dari Asahan, yaitu Syeikh Abdul Hamid. Ia lahir pada tahun 1880 M dan meninggal pada tanggal 18 Februari 1951. Datuk, nenek, dan ayahnya berasal dari Talu, Minangkabau. Ia belajar agama di Mekkah, karena itu ia sangat disegani oleh para ulama zaman itu (Sinar, 2007).

Murid-murid Syekh Abdul Hamid inilah yang kelak mendirikan organisasi Jamiyyatul Washliyyah, suatu organisasi yang bertolak pada aliran sunni dan mazhab Syafi'i. Dalam banyak hal, organisasi ini memiliki persamaan dengan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) yang didirikan oleh para ulama Minangkabau. Persamaan itu karena para ulama dua organisasi tersebut bersahabat baik sejak menuntut ilmu di Mekkah. Pandangan para tokoh agama itu sangat berbeda dengan paham reformis yang dibawa oleh para ulama muda Minangkabau, seperti Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, sehingga sering terjadi polemik di antara para pengikut kedua paham tersebut.

Sekitar tahun 1916 di Asahan berdiri suatu sekolah yang disebut Madrasah Ulumul Arabiyyah. Sebagai direktur pertama ditunjuk Syekh Abdul Hamid. Madrasah Ulumul Arabiyah kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang penting di Asahan, bahkan termasuk di antara madrasah yang terkenal di Sumatera Utara, sebanding dengan Madrasah Islam Stabat, Langkat, Madrasah Islam Binjai, dan Madrasah al-Hasaniyah Medan. Di antara ulama terkenal lulusan sekolah Asahan ini adalah Syeikh Muhammad Arsyad Thalib Lubis (1908–1972).

5. Asahan dalam Konteks Republik Indonesia

Pendudukan Jepang di Indonesia sejak Maret 1942 hingga 1945 mengakibatkan keadaan carut-marut. Pada tanggal 13 Maret 1942 Pemerintahan Belanda ditundukkan Jepang. Pemerintahan fasis Jepang yang dipimpin T. Jamada mengganti nama struktur pemerintahan menjadi Asahan Bunsyu dan bawahannya Fuku Bunsyu Batubara. Pemerintahan pendudukan Jepang berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945 dan tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan

Indonesia diproklamirkan. Tiga hari setelah bom jatuh di Hiroshima, Soekarno meproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Di saat yang sama pemerintah Republik Indonesia (RI) diumumkan dengan Soekarno sebagai Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden. Dengan demikian dimulailah revolusi republik di seluruh wilayah Indonesia.

Sesuai dengan Ketatanegaraan Republik Indonesia (RI), berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945, Komite Nasional Indonesia wilayah Asahan dibentuk pada bulan September 1945. Pada saat itu pemerintahan Jepang sudah tidak ada, tetapi pemerintahan kesultanan dan pemerintahan Fuku Bunsyu di Batubara masih tetap ada.

Revolusi di Sumatera bermula pada bulan Oktober 1945, pada saat tentara sekutu tiba di Sumatera untuk melucuti tentara Jepang. Pada saat itu perang beralih pada golongan tradisional (tengku dan raja) yang selama ini dianggap oleh golongan petani sebagai pro Belanda dan pro kolonial. Kebencian rakyat semakin meluap karena kebanyakan raja tidak memberi dukungan kepada pergerakan pro republik (kecuali Sultan Siak), ditambah pula bahwa raja-raja itu telah menghubungi Belanda dengan harapan dapat memulihkan kembali kedudukan mereka.

Pergerakan anti kaum bangsawan kian merebak, sementata pemimpin republik tidak berkuasa menahannya. Saat itu beberapa pemimpin politik oportunis, dua di antaranya Karim Marah Sutan dan Luat Siregar dari Partai Komunis Indonesia, menggunakan pergerakan anti kaum bangsawan untuk memperkuat landasan kekuatan politik mereka. Untuk mencapai tujuan itu mereka membangkitkan sentimen rakyat sampai akhirnya tercetus Revolusi Sosial. Raja dan keluarganya dibunuh secara kejam dan hartanya dirampas. Selain para bangsawan, para perusuh juga membunuh kalangan profesional yang berpendidikan Barat, terutama yang hidup bergaya hidup Barat. Sebagian besar keluarga Sultan Asahan dibunuh, namun Sultan Saibun selamat dan menyerahkan diri kepada Pemerintah Republik Indonesia di Pematang Siantar. Ia meninggal di Medan pada tanggal 6 April 1980.

Sejak 15 Maret 1946 berlaku struktur pemerintahan RI di Asahan. Wilayah Asahan dipimpin oleh Abdullah Eteng sebagai Kepala Wilayah dan Sori Harahap sebagai Wakil Kepala Wilayah. Asahan kemudian dibagi menjadi lima kewedanaan, yaitu (1) Kewedanaan Tanjung Balai, (2) Kewedanaan Kisaran, (3) Kewedanaan Batubara Utara, (4) Kewedanaan Batubara Selatan, dan (5) Kewedanaan Bandar Pulau. Setiap tanggal 15 Maret diperingati sebagai "Hari Jadi Kabupaten Asahan".

— 17 —

Kerajaan Pelalawan

1. Gambaran Umum

Pelalawan merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di Provinsi Riau. Daerah ini memiliki dua ciri khas. Pertama, sejak awal daerah ini merupakan kediaman orang asli Petalangan yang menjalankan *adat perpatih* atau sistem *matrilineal clan* (persukuan matrilineal). Mereka hidup di bawah sistem per*batin*an, yaitu suatu sistem pemerintahan asli proto Melayu sebelum kedatangan sistem Kerajaan Hindu dan Kerajaan Islam. Kedua, setelah kedatangan Hindu sampai sekarang daerah ini mengalami pergantian berbagai rezim dengan berbagai sistem pemerintahan.

Daerah Pelalawan dan masyarakat orang asli Petalangan pernah berada di bawah berbagai kekuasaan politik besar, mulai dari Kerajaan Pagaruyung (terutama pada zaman pemerintahan Adityawaran, 1347–1476 M), Kerajaan Malaka (di zaman Sultan Mansyursyah, 1456–1477 M), Kerajaan Johor (kelanjutan Malaka sejak sekitar 1511 M), Kerajaan Pelalawan-Siak (1789–1946 M), dan terakhir Republik Indonesia (RI) (1946).

Sebelum tahun 1980 daerah Pelalawan masih berupa hutan belantara, rawa-rawa, dan permukaan tanah datar. Daerah ini menjadi daerah penyesuaian dari dataran tinggi ke dataran rendah. Pelalawan diapit lereng timur Pegunungan Bukit Barisan dan rawa-pantai Selat Malaka. Di sebelah barat berupa lereng pegunungan Bukit Barisan dengan ditandai puncak tertinggi Gunung Bukit Situnggal dengan ketinggian 176 m di atas permukaan laut (dpl) dan ke barat lagi Kecamatan Kuantan Hilir, serta di sebelah selatan Kecamatan Peranab dan Kecamatan Rengat (Kabupaten Indragiri Hulu), yang juga merupakan daerah dataran rendah rawa-rawa.

Sejak tahun 1970-an beberapa hutan di wilayah itu menjadi hutan produksi yang dikuasai oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (*forest concessionaire*), antara lain PT Inhutani IV dengan luas tanah 57.873 ha, PT Hutani Sola Lestari dengan tanah 45.990 ha, PT Nanjak Makmur yang memiliki luas tanah 48.370 ha, dan PT Siak Raya Timber yang memiliki luas tanah sebesar 38.560 ha. Pada tahun 1990-an sebagian besar hutan tersebut telah berubah menjadi ladang sawit yang dikendalikan oleh berbagai kalangan, baik pengusaha maupun petani daerah sekitar. Sekarang daerah ini sangat terkenal sebagai "penghasil" asap pembakaran hutan, yang kepekatannya menjadi ancaman kesehatan bagi penduduk Riau, bahkan dampaknya merembet hingga ke wilayah Malaysia dan Singapura.

Sebagian hutan di tempat tertentu di Kecamatan Ukui menjadi kawasan Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 255/Menhut-II/2004 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 663/MENHUT-II/2009. Pada masa kini, di sebagian daerah Taman Nasional Tesso Nilo, sering terjadi perselisihan antara penduduk dan Pemerintah RI mengenai kepemilikan tanah hutan tersebut. Pemerintah berpendapat seluruh tanah hutan Taman Nasional Tesso Nilo di bawah kekuasaan negara sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan di atas. Di pihak lain penduduk asli berpendapat bahwa sebagian tanah hutan itu milik adat mereka. Beberapa penduduk asli, terutama para *ninik-mamak* dan *batin* yang memegang kekuasaan tradisional atas tanah adat, menjual sebagian tanah hutan kepada pendatang. Para pendatang terdiri dari warga yang berasal dari Sumatera Utara dan sebagian kecil orang Jawa bekas transmigran. Mereka menggarap tanah tersebut menjadi ladang kelapa sawit, sedangkan penduduk asli membuka hutan sebagai ladang tradisional dan sebagian dijadikan ladang sawit yang digarap oleh para penduduk.

Selain itu sungai berperan penting sebagai sarana pergerakan dan angkutan sejak zaman dulu. Aliran sungai masih sebagai jalur angkutan digunakan hingga tahun 1980-an. Berdasar peta Kabupaten Pelalawan, daerah yang ditempati orang asli Petalangan berupa wilayah yang berada di bagian selatan Sungai Kampar, dari Langgam di barat sampai ke Teluk Meranti di timur.[1] Sungai Kampar dengan ratusan anak sungainya sudah lama dikenal oleh para pedagang asing untuk mencari hasil hutan dan hasil tambang emas dan perak. Pada abad ke-7 M diberitakan bahwa Kerajaan Śrîwijaya yang berpusat di Palembang membangun sebuah candi Buddha di Muara Takus di hulu Sungai Kampar. Kerajaan-kerajaan zaman dulu menggunakan sungai sebagai sumber pendapatan lewat pembayaran pajak atas barang yang keluar masuk melalui sungai tersebut. Oleh karenanya banyak kerajaan Melayu berdiri di wilayah yang dialiri oleh sungai.[2]

Sampai tahun 1980 jalur angkutan di daerah ini masih menggunakan sungai. Sungai terbesar adalah Sungai Kampar. Di Pelalawan sungai ini memecah ke dalam berpuluh-puluh, bahkan ratusan, anak sungai yang berhulu di bahagian timur pegunungan Bukit Barisan, di kawasan kecamatan-kecamatan Kampar Kiri, Kuantan Hilir, Baserah, Cerenti, dan Peranab. Seseorang yang hendak pergi dari Desa Betung ke wilayah Pekanbaru, misalnya, harus menggunakan perahu selama 12 jam, sedangkan untuk mencapai wilayah Desa Pelalawan orang harus menempuh selama sehari semalam. Pada tahun 1981 serikat minyak PT Stanvac Indonesia membangun jalan darat untuk keperluan sendiri, dari Lirik di Kecamatan Rengat (Indragiri Hulu) di selatan sampai ke Buatan di tepi Sungai Siak di utara. Jalan ini terbuat dari tanah keras, licin oleh serpihan minyak, sehingga tidak dapat dilalui oleh kendaraan umum, terutama pada musim hujan.

Pada tahun 1990 "jalan minyak" PT Stanvac Indonesia menjadi bagian Jalan Raya Lintas Sumatera, namun keadaannya masih berupa jalan batu. Pada masa itu perjalanan dari Pekanbaru hingga ke Desa Betung di Pangkalan Kuras memerlukan waktu selama dua hari dua malam dengan kendaraan umum.[3] Bagaimanapun, dengan dimulainya otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 2000, jalan Jalan Lintas Sumatera sudah makin baik dan ramai dilalui kendaraan umum. Sejak saat itu sedikit demi sedikit jalur angkutan dan komunikasi mengalami peningkatan. Jalan aspal dan jaringan komunikasi sudah mencapai desa-desa di seluruh Kabupaten Pelalawan. Jalan berturap ini membuat desa-desa di Kabupaten Pelalawan yang dilaluinya, terutama desa Ukui, Pangkalan Lesung, Sorek, dan Kerinci berkembang pesat menjadi kota-kota kecil yang meriah, menarik banyak pendatang baru dari luar untuk membuka usaha, terutama Orang Minangkabau, Batak, dan Jawa.

2. Pasang Surut Kerajaan

Kesultanan Pelalawan merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam di Nusantara yang berpusat di wilayah Provinsi Riau sekarang. Kesultanan tersebut merupakan gabungan kerajaan-kerajaan yang berkembang sejak abad ke-14 di wilayah pantai timur Sumatera. Sebelum terbentuk kerajaan wilayah itu lebih dikenal dengan sebutan wilayah *pebatinan kuang oso tigo pulou* (perbatinan 29), yang didiami orang asli Petalangan, salah satu ke-*andiko*-an di bawah *andiko nan 44* yang berpusat di Muara Takus dan Mahat. Wilayah ini menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di Sumatera Barat (Ali Akbar, 2006: 36),[4] yang disebut dengan nama *pintu rajo*, berpusat di Langgam, dan dipimpin Rajo Bilang Bongsu. Daerah kekuasaannya meliputi Langgam, Pangkalan Kuras yang dipimpin oleh Monti Rajo, dan daerah-daerah pebatinan lain sampai ke Kampar Hilir (diperkirakan sampai ke Muaratolam dan ke Teluk Meranti).[5]

Selain Kerajaan Pagaruyung, terdapat kerajaan lain di dekat Pelalawan, yakni Kerajaan Gunung Sahilan. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Kampar, agak sebelah hulu Langgam. Mulanya Kerajaan Gunung Sahilan merupakan salah satu kerajaan kecil (*rantau*) di bawah naungan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di Batusangkar. Kerajaan Gunung Sahilan berhasil melepaskan diri dari Pagaruyung dan berdiri sendiri setelah kejayaan Pagaruyung memudar. Perluasan pengaruh politik Pagaruyung sampai ke daerah *andiko nan 44* (Pelalawan) kemungkinan besar berlangsung pada zaman Raja Adityawarman tahun 1347–1376 M. Pengaruh politik Pagaruyung menyusut setelah Adityawarman meninggal karena tidak mempunyai raja pengganti yang sebanding dengan Adityawarman.

Kerajaan lain yang juga berdiri di wilayah itu adalah Kerajaan Pakantua, terletak di wilayah Pematang Tuo, sekarang masuk di wilayah Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan.

Kerajaan itu merupakan kerajaan Hindu. Raja pertama bernama Maharaja Indera, penguasa di Temasik (Singapura). Setelah Temasik dikalahkan Majapahit pada akhir abad ke-14 ia mendirikan Kerajaan Pakantua di wilayah Sumatera. Maharaja Indera berkuasa mulai tahun 1380 hingga tahun 1420 M. Ia berhasil membangun peninggalan berupa Candi Hyang di Bukit Tuo, sekarang menjadi wilayah Pematang Buluh atau Pematang Lubuk Emas. Candi itu merupakan wujud rasa syukur sang raja.

Pada abad ke-15 M Kesultanan Malaka menaklukkan Pelalawan. Ketika itu Kampar (Pelalawan) berada di bawah perintahan Maharaja Jaya dengan Mangkubumi Tun Demang dan berpusat di Pekan Tua. Kerajaan itu sebelumnya berada di bawah lindungan Pagaruyung di Minangkabau. *Sulalatus Salatin* mengatakan bahwa pada suatu masa dalam periode pemerintahan Sultan Mansur Syah di Malaka (1458–1477 M) memerintahkan penaklukan Kampar, daerah yang sekarang dikenal dengan nama Pelalawan, sebab Kerajaan Pelalawan tak sedikit pun tunduk kepada Kerajaan Malaka.[6]

Wilayah itu diambil alih dan menjadi daerah jajahan Kesultanan Malaka. Tampaknya saat itu Pagaruyung sudah mulai meredup karena tidak ada tindakan atas penyerangan Kampar yang menjadi wilayah kekuasaannya, apalagi menyerang balik Kerajaan Malaka; sementara Kerajaan Malaka sedang dalam puncak kejayaan.

Setelah menaklukkan Kampar Raja Malaka menobatkan Raja Menawar, anak Sultan Alauddin Riayat Syah I, cucu Sultan Mansur Syah,[7] sebagai penguasa baru. Raja Menawar juga adik lain ibu Raja Malaka, Sultan Mahmud Syah (1488–1511 M). Selepas Raja Menawar mangkat, Sultan Mahmud Syah menobatkan Raja Abdullah sebagai raja Kampar menggantikan ayahnya. Kejadian itu menandakan betapa luas pengaruh kuasa Kesultanan Malaka pada masa itu.[8]

Menjelang akhir masa pemerintahannya Sultan Mahmud mengangkat anaknya, Raja Ahmad, sebagai Sultan Malaka dengan gelar Sultan Ahmad Syah. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Syah inilah Malaka diserang dan dikalahkan Portugis (1511 M). Sultan Mahmud Syah dan Sultan Ahmad Syah menyelamatkan diri dengan berpindah-pindah ke berbagai tempat, seperti Pagoh, Hulu Muar, Penarikan, Pahang, Johor, hingga ke Bintan. Di Bintan Sultan Mahmud Syah dan Sultan Ahmad Syah tinggal agak lama.[9] Tidak berapa lama setelah itu Bintan pun diserang Portugis. Sultan Mahmud Syah menyelamatkan diri ke Kampar (Pelalawan).

Di sisi lain Raja Kampar Raja Abdullah membelot dari Malaka dan bergabung ke Portugis. Ia merasa sebagai pewaris Kerajaan Malaka dan seharusnya menjadi sultan. Ia mendatangi dan meminta bantuan Portugis agar mau mengembalikan seluruh jajahan Malaka, tetapi yang berlaku sebaliknya. Bukannya memperoleh Malaka, Raja

Abdullah malah ditangkap Portugis dan dibuang ke Goa.[10] Oleh karena itu ketika Sultan Mahmud Syah sampai ke Kampar, negeri itu berada dalam kekosongan kekuasaan. "Maka bersemayamlah baginda di Kampar," sampai datang masanya ia dan istrinya meninggal di negeri itu, sehingga mendapat gelar Sultan Mahmud Syah Mangkat di Kampar.[11] Bendahara menobatkan putra Sultan Mahmud Syah, Sultan Alauddin Riayat Syah III, sebagai penerus dinasti Malaka. Sultan ini tidak lama bermukim di Kampar dan memilih pindah ke Semenanjung dan membangun kerajaan baru di Johor dengan bantuan Sultan Pahang. Sejak itu tidak terdengar lagi hubungan antara Kampar (Pelalawan) dan Malaka (Johor).

Akhirnya orang asli Petalangan merasa bahwa mereka tidak lagi mempunyai kuasa besar sebagai pelindung. Oleh sebab itu disuruhlah Tiga Orang Besar Petalangan ke Johor untuk meminta bantuan kepada raja. Mereka bertiga ialah Batin Muncak Rantau sebagai wakil Laras Batang Nilo, Raja Bilang Bungsu sebagai wakil Laras Sungai Kampar, dan Patih Jambuano sebagai wakil Tanah Daratan. Pada tahun 1558 M datanglah utusan Raja Johor, Wan Abdul Rahman gelar Datuk Maharajo Dindo, ke Kampar. Ia yang kemudian menjadi Raja Kampar. Kerajaan tersebut berubah nama menjadi Kerajaan Pelalawan dan berpusat di desa Pelalawan. Raja baru itu juga membangun beberapa benteng yang kuat dengan dilengkapi banyak meriam yang ditempatkan di wilayah-wilayah Mempusun, Tanjung Pembunuh, dan Sungai Naga Melingkar. Benteng terdepan di muara Sungai Kampar dipimpin Datuk Laksemana Sri Amar Wangsa di Sangar.[12] Pada masa inilah orang-orang dari Kerajaan Johor mulai berdatangan. Mereka membangun beberapa kampung di tepi Sungai Siak, dekat pusat Kerajaan Pelalawan, dengan tujuan mendukung Kerajaan Pelalawan baru.

Pada tahun 1797 M Kesultanan Pelalawan bertikai dengan Kesultanan Siak Sri Inderapura (Effendy, 2005). Kesultanan Siak menyatakan diri sebagai pewaris Kesultanan Johor, sehingga memerintahkan Kesultanan Pelalawan tunduk pada kekuasaannya. Keinginan Kesultanan Siak ditolak oleh Sultan Pelalawan Maharaja Lela II, sehingga pecah perang antardua kerajaan itu. Setidaknya ada dua kali penyerangan yang dilakukan Kesultanan Siak ke Kesultanan Pelalawan, yaitu pada tahun 1797 dan tahun 1810 M. Serangan pada tahun 1797 dilakukan melalui Sungai Rasau dan Sungai Kampar. Pasukan Pelalawan berhasil memukul mundur armada perang Kesultanan Siak Sri Inderapura. Adapun serangan tahun 1810 M dipimpin oleh Syarif Abdurrahman Fakhruddin. Penyerangan ini dilakukan melalui dua arah, yakni jalur darat dari arah hulu Sungai Rasau dan jalur dari muara Sungai Kampar. Dalam serangan itu Kesultanan Siak Sri Inderapura mendapat dukungan pemerintah kolonial Belanda dan berbuah kemenangan. Satu persatu pasukan Kesultanan Pelalawan menyerah hingga akhirnya kerajaan itu berhasil ditaklukan.

Dengan demikian Kerajaan Pelalawan yang diperintah dinasti Melaka-Johor digantikan oleh Pelalawan yang diperintah oleh dinasti Siak. Raja pertama Kerajaan Pelalawan-Siak ini adik Sultan Siak, Tengku Sayed Abdurrakhman, yang memerintah tahun 1798 hingga tahun 1822 M. Setelah itu Kerajaan Pelalawan-Siak diperintah oleh keturunan Tengku Sayed Abdurrakhman, yang secara berturut-turut Tengku Sayed Hasjim (1822–1828 M), Tengku Sayed Ismail (1828–1844 M), Tengku Sayed Hamid (1844–1866 M), Tengku Sayed Jaafar (1866–1872 M), Tengku Sayed Abubakar (1872–1886 M), Sayed Ali Tengku Sontol (1886–1892 M), Tengku Sayed Hasjim II (1892–1930 M), Tengku Sayed Osman (1925–1940 M), dan terakhir Tengku Sayed Harun (1940–1946 M).[13]

Raja terakhir Kerajaan Pelalawan, Tengku Sayed Harun, lahir pada tahun 1911 dan meninggal pada tahun 1959 dalam usia 48 tahun. Sebelumnya ia menjadi Putra Mahkota. Ia satu-satunya putra istri kedua Sultan Syarif Hasyim II. Sultan Sayed Harun sekolah di HIS Siak Inderapura, kemudian melanjutkan pendidikan ke Kantor Resident Sumatera Utara, Medan. Sebelum diangkat menjadi Raja Pelalawan, ia sempat magang selama dua tahun di Kantor Controleur Selat Panjang. Pengangkatannya sebagai sultan tidak serta merta setelah ayahnya meninggal, karena saat itu ia masih sangat muda dan belum mampu memangku pemerintahan. Oleh sebab itu Sultan Syarif Hasyim menyerahkan kekuasaan kepada Tengku Said Osman sebagai pangeran yang bertugas sebagai pelaksana harian pemerintahan Kerajaan Pelalawan. Ketika itu Sultan Hasyim II sudah berusia lanjut dan mulai uzur.

Setelah Tengku Sayed Harun Putera Sulung sudah dewasa, Tengku Pangeran menyerahkan mahkota kerajaan kepada Tengku Sayed Harun. Pada tanggal 24 Januari 1940 Tengku Sayed Harun dilantik menjadi sultan di Istana Sayap Pelalawan oleh Datuk Engku Raja Lela Putra. Pelantikan itu disaksikan oleh Orang-Orang Besar Kerajaan Pelalawan, antara lain Datuk Kampar Samar Diraja Encik Endut dan seluruh pebatinan dan penghulu serta rakyat Kerajaan Pelalawan. Upacara penobatannya menjadi Tengku Besar di Kerajaan Pelalawan dihadiri orang-orang penting, seperti Asisten Residen Bengkalis, Controleur Selat Panjang, wazir-wazir Pelalawan, Datuk Laksemana E. M. Kasim dan Datuk Serapung E. Bujang, dan raja-raja kerajaan lain di Riau, antara lain Sultan Siak, raja-raja dari Rokan, Sultan Riau, dan beberapa raja Melayu lain.

Sultan Sayed Harun terkenal sederhana, mudah membaur dengan masyarakat, dan juga dermawan. Istananya selalu terbuka untuk semua orang dan selalu siap menerima siapa pun ketika ingin menghadap. Oleh karena itu istana tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan petinggi kerajaan, namun juga menjadi tempat untuk rakyat berkumpul. Makan dan minum selalu tersedia di dapur umum yang terletak di bagian belakang istana. Wilayah Kerajaan Pelalawan pada masa itu dibagi menjadi empat kecamatan dan 29 desa. Empat kecamatan itu adalah Kecamatan Langgam,

Kecamatan Bunut, Kecamatan Pangakalan Kuras (sekarang Desa Kesuma), dan Kecamatan Serapung (Penyalai).

Masa pemerintahan Sultan Syayed Harun merupakan masa yang bersamaan dengan transisi penjajahan di Indonesia, dari Belanda ke Jepang. Riau pun termasuk daerah yang dikuasai oleh Jepang. Jepang saat itu membekukan semua kerajaan, termasuk kerajaan Pelalawan. Sejak itu Kerajaan Pelalawan hampir tidak berfungsi. Sultan dan Orang Besar kerajaan hampir tidak memiliki hak dan kedaulatan, tetapi diajak bekerja sama dan harus setia kepada Jepang. Selain itu mereka juga diminta agar jangan sekali-sekali melawan dan menentang. Jepang tidak segan-segan menangkap dan menghukum jika mereka melakukan pelangggaran. Hal ini dapat terlihat pada raja-raja yang ditangkap Jepang, di antaranya Raja Kepenuhan, Raja Rokan IV Koto, dan Raja Kunto Darussalam. Sebagian meninggal akibat kekejaman Jepang dan sebagian yang lain dibebaskan setelah Jepang kalah atas Sekutu.[14]

Jepang menguasai ekonomi di wilayah Kerajaan Pelalawan. Sebelumnya, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, karet sebagai hasil bumi boleh diekspor. Pada saat Jepang berkuasa, karet yang saat itu menjadi penghasilan utama tidak boleh diekspor. Oleh karena itu banyak penduduk mengalihkan pertanian lain seperti padi.

Rupanya Jepang mempunyai cara menerapkan kebijakan ekonomi. Pemerintah Jepang mengerahkan penduduk Pelalawan agar menanam padi, jagung, kacang kedelai, kacang hijau, kapas, dan tanaman lain. Setelah panen rakyat tidak dapat menikmati hasilnya secara penuh. Ada ketentuan dari pemerintah pendudukan bahwa 60–70 % hasil panen diserahkan kepada Jepang. Jika tidak patuh, mereka yang melanggar akan dianggap anti Jepang.[15] Siapa pun yang berurusan dengan Jepang akan selalu mendapat hukuman pukul, tinju, atau tendang. Mereka yang tidak memiliki persediaan uang, terpaksa memakai celana dari karung goni; bahkan ada juga yang memakai kulit terap.[16]

Jepang juga melakukan sistem kerja paksa, yang dikenal dengan *romusha*. Sistem ini mewajibkan para pemuda menjadi tenaga kerja yang dikerahkan Tentara Jepang. Mereka harus melaksanakan tugas seperti membuat jalur kereta api dan bekerja di tambang emas. Apabila sultan tidak mau mengerahkan para pemuda menjadi tenaga kerja paksa, tentara Jepang tidak segan-segan melakukan kekerasan. Demikian pula persenjataan yang dimiliki kerajaan-kerajaan di Indonesia sangat tidak menunjang untuk melakukan perlawanan. Kalaupun mau melawan, dapat diibaratkan sebagai sikap menantang arus.

Sultan Sayed Harun dikenal sebagai raja yang anti Jepang. Hal ini dapat dilihat bagaimana ketegasannya menolak permintaan Jepang agar memperkerjakan rakyat Pelalawan sebagai *romusha*. Sultan

Sayed Harun melakukan berbagai upaya melindungi rakyatnya agar terhindar dari Jepang. Berikut beberapa upaya yang dilakukan oleh Sultan Sayed Harun.

(1) Ketika Pemerintah Jepang mewajibkan seluruh rakyat menyerahkan padi (yang disebut "padi cabut") atau bahan makanan lain untuk militer Jepang, Sultan Sayed Harun memberi tahu rakyatnya menyembunyikan padi agar tidak diketahui Jepang.

(2) Jepang menerapkan sistem setiap *onderafdeeling* disebut *gun* yang dikepalai oleh *gun cho*. Sistem ini menjadikan setiap wilayah di Indonesia memiliki perwakilan untuk menampung pendapat rakyat dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Jepang. Atas inisiatif Sultan Sayed Harun yang waktu itu duduk sebagai anggota perwakilan rakyat model Jepang, Pelalwan dijadikan *gun* sendiri yang akhirnya ia sebagai *gun cho*-nya. Dengan cara ini Sultan Sayed Harun dapat membendung pengaruh Jepang memasuki Kerajaan Pelalawan.

(3) Anak-anak gadis yang tinggal di Pelalawan dianjurkan menumpang kepada keluarga lain yang tinggal di wilayah atau kampung yang lebih aman agar mereka aman dari gangguan Jepang.

Kebijakan anti Jepang Sultan Sayed Harun menyebabkannya masuk ke dalam daftar orang-orang yang wajib dibunuh oleh Jepang. Beruntung sebelum Sultan Sayed Harun Harun dieksekusi, Jepang sudah kalah oleh pasukan Sekutu. Indonesia pun menyerukan merdeka dari Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945. Bersamaan dengan itu Sultan Sayed Harun menyerahkan kekuasaanya kepada Pemerintah RI. Berita itu disampaikan oleh T.S. Sagaf Osman dan Mohd. Tol yang baru tiba dari Pekanbaru tanggal 29 Agustus 1945.

Pada malam harinya Sultan Sayed Harun bersama Cik Agus, Orang-Orang Besar Kerajaan Pelalawan, serta pemuka masyarakat, terutama Pemuda Pelalawan, mengadakan pertemuan untuk menyikapi berita Kemerdekaan Indonesia. Hasil dari pertemuan itu adalah menyambut dengan sepenuhnya Kemerdekaan Indonesia dan menyatakan tekad bulat untuk sehidup semati dalam mempertahankan kemerdekaan. Keputusan itu selanjutnya diberitakan kepada seluruh rakyat Pelalawan dengan mengirim utusan ke setiap kecamatan sampai kampung-kampung, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh pemuda-pemuda Pelalawan. Ikrar dan kebulatan tekad itu diulang-ulang dalam berbagai pertemuan penting, antara lain tanggal 28 Oktober 1945 dan tanggal 29 November 1946, di kota Pelalawan. Pelalawan bahkan meletakkan batu pertama pembangunan Tugu Kemerdekaan di kota Pelalawan.[17] Berakhirnya Kerajaan Pelalawan pada masa Sultan Sayed Harun menandai berakhirnya sistem pemerintahan kerajaan yang ada di Pelalawan. Pemerintah RI mengubah wilayah Kerajaan Pelalawan-Siak menjadi wilayah Kewedanaan

Pelalawan, yang bersama dengan kewedanaan-kewedanaan Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kampar berada di bawah lingkup Kabupaten Kampar.

3. Daftar Raja Pelalawan

Periode pemerintahan di Pelalawan dibagi menjadi dua, yaitu periode pra-Islam dan masa Islam. Pada era pra Islam kerajaan ini bernama Pekantua, sementara pada ada Islam ada tiga kali pergantian nama, dari Pekantua Kampar, kemudian Tanjung Negeri, dan terakhir Pelalawan. Kerajaan ini eksis dari tahun 1380 M hingga tahun 1945. Daftar raja-raja yang pernah memerintah Pelalawan sebagai berikut

Kerajaan Pekantua (1380–1505 M)

- Maharaja Indera (1380–1420 M)
- Maharaja Pura (1420–1445 M)
- Maharaja Laka (1445–1460 M)
- Maharaja Sysya (1460–1480 M)
- Maharaja Jaya (1480–1505 M)

Kerajaan Pekantua Kampar (1505–1675 M)

- Munawar Syah (1505–1511 M)
- Raja Abdullah (1511–1515 M)
- Sultan Mahmud Syah I (1526–1528 M)
- Raja Ali/Sultan Alauddin Riayat Syah II (1528–1530 M)
- Tun Perkasa/ Raja Muda Tun Perkasa (1530–1551 M)
- Tun Hitam (1551–1575 M)
- Tun Megat (1575–1590 M)
- Raja Abdurrahman/Maharaja Dinda (1590–1630 M)
- Maharaja Lela I/Maharaja Lela Utama (1630–1650 M)
- Maharaja Lela Bangsawan (1650–1675 M)

Kerajaan Tanjung Negeri (1675–1725 M)

- Maharaja Lela Utama (1675–1686 M)
- Maharaja Wangsa Jaya (1686–1691 M)
- Maharaja Muda Lela (1691–1720 M)
- Maharaja Dinda II (1720–1725 M)

Kerajaan Pelalawan (1725–1946 M)

- Maharaja Dinda II/Maharaja Dinda Perkasa/Maharaja Lela Dipati (1725–1750 M)
- Maharaja Lela Bungsu (1750–1775 M)
- Maharaja Lela II (1775–1798 M)

- Sayid Abdurrahman/Syarif Abdurrahman Fakhruddin (1798–1822 M)
- Syarif Hasyim (1822–1828 M)
- Syarif Ismail (1828–1844 M)
- Syarif Hamid (1844–1866 M)
- Syarif Jafar (1866–1872 M)
- Syarif Abubakar (1872–1886 M)
- Tengku Sontol Said Ali (1886–1892 M)
- Syarif Hasyim II (1892–1930 M)
- Tengku Sayid Osman/Pemangku Sultan (1930–1940 M)
- Sayed Harun/Tengku Sayid Harun (1940–1946 M)

4. Strata Sosial

Pada masa paling awal, sebelum masuk pengaruh sistem politik dan pemerintahan Hindu dan Islam, masyarakat orang asli Petalangan berada di bawah kekuasaan 29 *batin* (*pebatinan kuang oso tigo pulou*). Setiap *batin* memerintah daerah hutan tanah ulayat sendiri tanpa hubungan politik dengan *batin* yang lain. Dalam sejarah sistem politik dan pemeritahan yang berlaku belum pernah ada seorang *batin* yang muncul sebagai penguasa tertinggi dengan menaklukkan dan membawahi *batin-batin* yang lain. Johnson dan Early (1987) menyebut masyarakat seperti ini dengan nama *pre-state societies* dan sistem pemerintahannya berupa *chiefdom*.

4.1 Pebatinan

Pebatinan adalah satu daerah yang luas, yang disebut "hutan tanah ulayat", dan dipimpin oleh seorang *batin*. Penduduk tinggal secara berpencar di pondok semi-permanen di ladang di dalam sebuah hutan tanah ulayat. Biasanya pengelompokan penduduk terdiri atas tiga hingga lima keluarga pondok yang ladangnya berdekatan. Pada suatu masa sekitar tahun 1930-an, setelah diperkenalkan tanaman karet (getah), beberapa penduduk mulai membangun ikatan yang lebih besar berupa dusun, tetapi tetap berulang-alik antara dusun dan ladang. Dalam setiap hutan tanah ulayat terdapat sekitar dua hingga tiga dusun yang dihuni oleh penduduk beberapa suku. Sebuah dusun dilingkupi oleh tanah dusun, yakni tempat penduduk bertanam pokok buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman-tanaman lain yang diperlukan sehari-hari penduduk kampung. Di luar dusun ada hutan sekunder yang dijadikan sebagai tanah peladangan. Di luar itu ada tanah hutan primer, yang terdiri dari *rimba simpanan, rimba larangan,* dan *rimba kepungan sialang.*

Untuk membuka hutan yang akan dijadikan ladang masyarakat Petalangan harus minta izin kebenaran dari *batin*. *Batin* berhak memungut cukai atas setiap warga *pebatinan*, yang disebut *pancungalas* (*pancung aleh*), yang dikenakan pada setiap usaha untuk memanfaatkan tanah hutan dan mengambil hasil hutan,

seperti membuka hutan untuk berladang, mengambil madu dari pokok sialang, dan mengumpulkan hasil-hasil hutan yang lain. Setiap sehabis panen, misalnya, setiap keluarga yang mengusahakan ladang harus menyerahkan kepada *batin* sepuluh gantang padi/ beras. Pada zaman kerajaan Pelalawan-Siak, *batin* mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sebagian hasil panen padi kepada raja. Demikian pun setiap orang yang mengambil madu lebah, satu bagian madu harus diserahkan untuk *batin*.

Seorang Batin dipilih dan diangkat dari suku tertentu secara turun-temurun atau dari anak-kemenakan keturunan *batin* terdahulu dengan beberapa ketentuan, di antaranya sebagai berikut:

(1) Sepesukuan dengan *batin* terdahulu.

(2) Anak kemenakan dari garis keturunan *batin*.

(3) Berumur di atas 20 tahun.

(4) Pandai dan cakap dalam berunding dengan menggunakan norma adat.

Sebagai pucuk adat pesukuan *batin* memiliki kewajiban dan tugas terhadap masyarakat sukunya dan hutan tanah ulayat di bawah kekuasaannya, antara lain sebagai berikut:

(1) Menjaga tanah ulayat dari penyerobotan *batin* lain, pihak kerajaan, dan pihak swasta.

(2) Menyelesaikan masalah yang muncul dalam suku; dalam hal ini *batin* akan turun tangan serta menyelesaikan masalah persukuannya apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh *tetiapan*.

(3) Melantik *ketiapan*, atau ketua suku, yang bertugas membantu *batin* mengurus anggota suku.

(4) Memberi sesembahan kepada raja setiap tahun dalam bentuk satu ekor ayam dan beberapa puluh kilogram beras.

Batin memegang kekuasaan sebagai pucuk adat pesukuan. Oleh karena itu *batin* memiliki beberapa kebesaran dan hak atas hutan tanah ulayat sebagai berikut:

(1) Mendapat *cukai pancung ale* (*sukatan*) dari masyarakat yang membuka hutan (membuat ladang) di atas *tanah ulayat* (tanah kekuasaan) *batin*. Besaran *sukatan* yang harus dibayar satu kepala keluarga pembuat ladang di atas tanah ulayat adalah sepuluh gantang setiap habis menuai.

(2) Jika *batin* hendak membuka hutan atau ladang, maka setiap *ketiapan* dalam suku-suku yang berada di bawah *batin* bersangkutan harus menyuruh seluruh warga suku membantu segala macam pekerjaan *batin* di perladangan secara bergantian. Dalam hal pekerjaan perladangan, *batin* tidak ikut bekerja. *Batin* hanya mengawasi dan memberi makan warga selama mengerjakan ladang tersebut.

(3) Menguasai hutan tanah ulayat.

(4) Mendapat bagian dari pengumpulan hasil hutan oleh warga penduduk *pebatinan*.

4.2 Kampung

Kampung merupakan gejala baru dalam sistem pertempatan orang Petalangan. Sebelumnya mereka tinggal di *pondok basolai* di ladang, berpindah-pindah sejalan dengan perpindahan ladang. Belum ada maklumat yang maktamad tentang kapan orang asli Petalangan tinggal menetap di kampung. Pada masa awal tinggal di kampung mereka masih berulang-alik antara *ujung* (ladang) dan *puun* (kampung). Kemungkinan besar perpindahan hidup menetap di kampung baru dimulai pada zaman kerajaan Pelalawan-Siak, terutama zaman pemerintahan Sultan Said Jaafar (1865 M), karena pada masa inilah pihak kerajaan mulai membuat penataan terhadap kehidupan sosial-politik masyarakat Petalangan. Pada saat itu Belanda mulai masuk ke daerah Pelalawan khususnya dan Riau pada umumnya.

Sebuah kampung dipimpin oleh seorang kepala kampung yang disebut *penghulu*. Dalam sebuah kampung tinggal penduduk dari beberapa suku. *Penghulu* kampung lazimnya berasal dari suku yang sama dengan *batin*. *Penghulu* kampung bertanggung jawab atas keamanan dan kedamaian kehidupan masyarakat dalam kampung bersangkutan. Pada masa kini kampung sudah berubah menjadi desa dan pemimpinnya disebut Pak Wali.

Pada awal perpindahan dari pola menetap di ladang ke pola menetap di kampung, di wilayah Pebatinan Monti Rajo terdapat dua kampung, yaitu Talau dan Betung. Keduanya terletak di sebelah kanan Sungai Peragian. Di kedua kampung ini tinggal anggota dari enam suku orang Petalangan, yakni suku Piliang,[18] Mandailing, Penyabungan, Pelabi, Lubuk, dan Pematan.

4.3 Ketiapan

Sebuah *pebatinan* terdiri atas dua hingga tiga kampung, yang dihuni oleh orang-orang dari beberapa suku. Suku adalah kelompok kekerabatan yang paling besar, yang anggotanya saling merasa bersaudara karena berasal dari keturunan dari seorang nenek (*matrilineal clan*). Tidak boleh ada perkawinan antaranggota warga satu suku. Bila terjadi perkawinan antarwarga satu suku, tetapi hal demikian jarang sekali terjadi, kedua belah pihak dikenakan denda adat. Setiap suku dipimpin oleh seorang *ketiapan*, yang bertanggung jawab mengurus kesejahteraan dan kedamaian hidup dalam suku. *Ketiapan* berfungsi mewakili warga sukunya ketika berhubungan dengan *batin*.

Apabila suatu suku memiliki sangat banyak anggota dan tersebar dalam beberapa wilayah *pebatinan*, suku tersebut dapat memilih

lebih dari satu *ketiapan*, sebab *ketiapan* hanya menjadi ketua suku dalam satu *ketiapan* tertentu saja. Pengangkatan lebih dari satu *ketiapan* berguna untuk memudahkan mengatur dan menyelesaikan permasalahan anak-kemenakan (warga suku) dalam satu *pebatinan*. *Ketiapan* tidak memiliki hak dan kekuasaan terhadap hutan tanah ulayat. Ia hanya mengurus masalah sosial anggota suku yang dipimpinnya saja. Berikut beberapa syarat menjadi seorang *ketiapan*.

(1) Berumur di atas 20 tahun.
(2) Pandai berunding dengan berpandu pada norma adat.
(3) Dipercaya dan dipilih oleh warga sukunya.

Ketiapan juga dikenal dengan sebutan *mamak suku*. Seseorang yang diangkat sebagai *mamak* akan lebih dipandang dan disegani dalam suku bersangkutan, karena ia berperan sebagai perunding dalam urusan pernikahan dan menjadi penengah dalam berbagai masalah pesukuan. Setelah diangkat menjadi *mamak suku* istrinya pun turut memperoleh kebesarannya, terutama dalam urusan pernikahan. Dalam urusan pernikahan warga suku (di *umah olat*), istri seorang *mamak* mempunyai kedudukan tinggi. Ia tidak boleh diperintah. Ia mempunyai tempat khusus di dalam rumah, yang dalam istilah adat Petalangan disebut *di tanah mamak saiku, di umah mamak duo*, yang berarti "dalam kehidupan di luar suku yang paling dihormati dan mendapat perlakukan istimewa adalah *mamak* laki-laki, tetapi di dalam rumah pesta pernikahan selain *mamak*, istri *mamak* pun mendapat kedudukan yang istimewa". Jika di dalam rumah pernikahan istri *mamak* diperintah oleh seseorang, maka yang memerintah akan didenda berupa seekor ayam dan segantang beras.

Sebagai pembantu *batin*, *ketiapan* memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

(1) Membantu tugas *batin* dalam menjaga kedamaian dalam kelompok suku (menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan *anak-kemenakan*, masalah rumah tangga, masalah muda-mudi, dan masalah hubungan dengan warga suku-suku lain).
(2) Menggantikan tugas *batin* dalam urusan tertentu, misalnya menggantikan *batin* pada suatu acara perjumpaan umum.
(3) Menjadi *mamak* dalam urusan perkawinan (dalam hal perundingan perkawinan).
(4) Menetapkan kadar denda (denda uang) apabila berlaku suatu permasalahan dan perselisihan antara dua belah pihak.
(5) Memungut *pancung ale* (*sukatan*) dari warga suku untuk diserahkan kepada *batin*.
(6) Mengatur *anak-kemenakan* mengikuti norma adat yang telah ditetapkan oleh *batin* dan adat.
(7) Memerhatikan dan mencatat seluruh anak-kemenakan dalam suku di wilayah kekuasaan *batin*.

Seorang *ketiapan* mempunyai beberapa hak istimewa, antara lain sebagai berikut:

(1) Apabila *ketiapan* membuka ladang di hutan tanah ulayat *pebatin*, *ketiapan* bersangkutan tidak perlu membayar *sukatan*.

(2) Menerima sebagian dari *sukatan* warga untuk *batin*, namun kadar *sukatan* yang diterimanya tergantung kepada keikhlasan *batin*.

(3) Menerima sebagian dari hasil hutan tanah ulayat yang diberikan kepada *batin*, misalnya madu sialang.

4.4 Tuo Anak Jantan

Sebuah suku dibagi ke dalam beberapa kelompok *matrilineal* yang lebih kecil, yang masing-masing diketuai oleh seorang *tuo anak jantan*. Kelompok ini tampaknya tidak punya nama khusus ataupun sebutan,[19] tetapi untuk memudahkan sebut saja kelompok ini degan nama "subsuku". Kelompok itu terdiri atas rumpun keluarga *matrilineal* tiga hingga empat generasi. Di bawah kelompok ini tidak ada lagi kelompok yang bersifat keturunan (*affinity*). *Tuo anak jantan* merupakan seorang laki-laki yang dipilih dan ditunjuk untuk memimpin satu subsuku dalam suatu suku (satu keluarga dari tiga generasi). Sebagai contoh, seorang induk (ibu) mempunyai empat orang anak perempuan kakak beradik. Dari empat orang kakak beradik ini lahir 15 orang anak. Maka untuk satu keluarga tiga generasi ini ditunjuk seorang *tuo anak jantan*, yang berfungsi sebagai *mamak* pemimpin kelompok. Kedudukan *tuo anak jantan* berada di bawah *ketiapan*. *Tuo anak jantan* adalah saudara laki-laki yang paling berwibawa dari sang induk (ibu), dengan tugas menyelesaikan masalah-masalah yang melibatkan kelompok subsuku tiga generasi bersangkutan, yakni sebagai berikut:

- Menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku antara warga satu kelompok subsuku. Jika *tuo anak jantan* tidak dapat menyelesaikan masalah dalam keluarganya, masalah tersebut diserahkan kepada *ketiapan*.
- Mengatur dan memrundingkan masalah keluarga, khususnya masalah perkawinan anak-kemenakan.

Tuo anak jantan tidak berhubungan langsung dengan *batin* dan hanya berhubungan dengan *ketiapan*. Ia juga mempunyai hak (kebesaran), seperti lebih dihormati dan terpandang dari warga biasa. Jika keputusan yang dibuat *tuo anak jantan* dilanggar, si pelanggar didenda menurut norma adat dalam kadar dua gantang beras dan dua ekor ayam. Denda ini akan dimakan bersama oleh warga suku.

Selain itu istri *tuo anak jantan* juga mendapat kebesaran. Dalam suatu acara kenduri pernikahan ia mempunyai tempat duduk khusus di dalam rumah. Ia tidak boleh diperintah dan hanya akan bekerja atas kemauannya sendiri. Jika di dalam rumah pernikahan

ia diperintah begitu saja, yang memerintah mendapat hukuman seekor ayam dan segantang beras.

4.5 Ninik Mamak

Tuo anak jantan, *ketiapan*, beserta pemimpin lain dalam sebuah suku, seperti Monti dan Dubalang, disebut *ninik mamak* suku tersebut. Setiap *ninik mamak* dipilih melalui musyawarah anggota keluarga. *Ninik mamak* berperan menyelesaikan sengketa dalam sukunya. Oleh sebab itu *ninik mamak* diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang norma adat. Bila ada perselisihan di antara orang-orang dari dua suku atau lebih, maka *ninik mamak* masing-masing suku bertemu dan berunding untuk memecahkan masalah tersebut.

4.6 Tuo Urang Sumondo

Seorang laki-laki disebut *urang sumondo* oleh keluarga matrilineal istrinya. Keluarga matrilineal istrinya, khususnya para *ninik mamak*, disebut *tompat manyumondo* oleh *urang sumondo*. Setelah menikah *urang sumondo* tinggal bersama kelurga di rumah istrinya. Rumah ini diwarisi oleh si istri dari ibunya dan berdiri di atas tanah milik suku. Kedudukan sosial *urang sumondo* di rumah istrinya sangat lemah. Hak dan kuasanya di rumah istrinya hanyalah *lantai sakoping* dan *atap semangkawan*,[20] lambang yang menyatakan begitu lemah kedudukan seorang *urang sumondo* di rumah istrinya. Kuasanya di dalam rumah istrinya hanyalah sebatas bilik tempat ia dan istrinya tinggal.

Dalam keluarga istri atau dalam rumah istri kedudukan *tuo sumondo* ibarat *abu di ateh tunggul* atau dalam istilah adat Petalangan lebih dikenal *Saai manimo sumondo saai sangketo tumbuh, saai rang sumondo poi saai sangketo sudah*, yang berarti "jika terjadi perselisihan dalam keluarga istri, maka *tuo sumondo* mempunyai tanggung jawab menyelesaikannya serta bertanggung jawab terhadap kehidupan si perempuan dan anaknya; tetapi jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga si istri dapat mengusir *urang sumondo* (suami) dan permasalahan selesai".

Para *urang sumando* dari kelompok subsuku, yang dipimpin oleh *tuo anak jantan*, menyebut satu sama lain sebagai *pamoyan*. *Pamoyan* yang paling dekat adalah para *urang sumondo* yang menikah dengan perempuan-perempuan adik-beradik. Salah seorang *urang sumondo* dari kelompok *pamoyan* dekat diangkat menjadi *tuo urang sumondo*, yang bertanggung jawab menjaga kesejahteraan dan kedamaian hidup dalam kelompok keluarga para *pamoyan* dekat tersebut.

Kedudukan *tuo sumondo* di bawah *tuo anak jantan*. *Tuo sumondo* adalah orang yang ditunjuk menjadi ketua atau orang yang dianggap pandai berunding dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga

istri. Sebagai contoh, dalam satu keluarga induk terdapat lima orang anak perempuan yang semuanya telah menikah (bersuami) dengan lelaki dari berbagai suku. Dari kelima orang suami ini dipilih satu orang yang dianggap paling berwibawa dan paling mampu sebagai penengah dalam menyelesaikan masalah dan perselisihan lain yang terjadi di antara adik-beradik istri. Orang yang dipilih itu disebut *tuo sumondo.*

Tuo sumondo bertanggung jawab menyelesaikan masalah kecil dan besar yang terjadi dalam keluarga istrinya dan adik-beradik perempuan istrinya sebelum masalah dan perselisihan dibawa ke *tuo anak jantan.* Selain itu *tuo sumondo* juga mempunyai kewajiban mengerjakan ladang istrinya. *Tuo sumondo* tidak berhubungan langsung dengan *batin.* Dalam menyelesaikan masalah, ia dapat berhubungan dengan *tuo anak jantan* dan *ketiapan.*

4.7 Penghulu

Di atas telah disebutkan bahwa *penghulu* merupakan gelar yang diberikan untuk kepala kampung, tetapi gelar *penghulu* tidak hanya sebatas itu. Terkadang *penghulu* juga merujuk kepada jabatan ketua suku, bahkan pada jabatan yang setingkat dengan *batin.* Oleh karena itu perlu penyelidikan lebih mendalam pada masa yang akan datang tentang makna gelar *penghulu* ini.

5. Hukum Adat Petalangan

Dalam sistem pemerintahan tradisional Petalangan, setiap pejabat pemerintahan, yakni *batin, ketiapan, tuo anak jantan,* dan *tuo sumondo* mempunyai kekuatan dalam menjalankan adat dalam lingkup kekuasaan masing-masing. Mereka masing-masing mempunyai hak dan kuasa untuk menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang berbuat salah. Bagaimanapun mereka tidak dapat menjatuhkan hukuman secara semena-mena, karena setiap aturan dan hukuman dalam kehidupan masyarakat Petalangan telah tersebut dalam *tombo* Petalangan. Hukum yang berlaku adalah hukum adat karena hukum adat mempunyai kedudukan paling tinggi untuk menyelesaikan permasalahan dan perselisihan.

Istilah Petalangan tentang kadar hukum adat adalah *sekocit-kocit adat, segodang-godang adat,* yang berarti "hukuman adat yang paling ringan adalah *sudah sirih sapaminangan,* atau duduk berdamai dengan memakai sirih dan pinang disertai bermaaf-maafan". Hukuman adat yang paling berat ialah membayar denda seekor kambing. Kadar hukuman yang dijatuhkan oleh pemegang tampuk adat tergantung pada jenis dan berat masalah. Penyelesaian masalah yang berlaku dalam masyarakat Petalangan harus berawal dari peringkat pemerintahan paling rendah, yaitu kelompok yang dipimpin oleh seorang *tuo sumondo.* Jika pada peringkat ini tidak didapatkan penyelesaian, maka masalah akan dibawa kepada *tuo anak jantan.* Kalau belum selesai, masalah dibawa kepada *ketiapan.*

Kalau belum selesai juga, masalah dibawa ke *batin*. Hukuman yang dijatuhkan tidak dapat ditawar-tawar.

Setiap hukuman denda yang dijatuhkan kepada seseorang yang bersalah haruslah dibayar. Denda boleh berupa beras, ayam, kambing, dan lainnya. Selain itu sanksi yang telah dibayarkan akan dimakan bersama di rumah pihak yang menang. Kadar hukuman adat yang dijatuhkan oleh setiap pelaksana hukum berbeda-beda. Kadar hukuman tersebut tercantum dalam tabel di bawah ini.

No.	Kedudukan	Hukuman yang di Jatuhkan	
		Hukum Paling Rendah	Hukum Paling Tinggi
1.	Batin	-	Beras 20 gantang, Kambing seekor, uang 25
2.	*Ketiapan*	Beras satu gantang, ayam seekor	Beras empat gantang, ayam empat ekor
3.	Istri *Ketiapan*	-	Beras segantang, ayam seekor
4.	*Tuo Anak Jantan*	Beras satu gantang, ayam seekor	Beras tiga gantang, ayam tiga ekor
5.	Istri *Tuo Anak Jantan*	-	Beras segantang, ayam seekor
6.	*Tuo Sumodo*	*Sudah Sirih Sapaminangan*	Beras dua gantang, ayam dua ekor

Kadar Hukuman Mengikut Peringkat Fungsionaris.

6. Masa Republik Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1946 Raja Pelalawan terakhir, Tengku Sayed Harun, menyerahkan kerajaannya kepada pemerintah RI. Oleh pemerintah RI, wilayah Kerajaan Pelalawan-Siak diubah menjadi wilayah Kewedanaan Pelalawan, yang bersama dengan kewedanaan-kewedanaan Rokan Hulu, Rokan Hilir, dan Kampar, berada di bawah lingkup pentadbiran Kabupaten Kampar.

Dalam pada itu kedatuan diubah menjadi kecamatan dan para datuk menjadi camat. Kedatuan yang dipimpin Datuk Laksamana Mangku Diraja berubah menjadi Kecamatan Pangkalan Kuras, yang mulanya berpusat di Pangkalan Pasir kemudian pindah ke Desa Sorek Satu, Kedatuan Datuk Engku Raja Lela Putera menjadi Kecamatan Langgam yang berpusat di Desa Langgam, Kedatuan Datuk Kampar Samar Diraja menjadi Kecamatan Bunut yang berpusat di Desa Bunut, Kedatuan Datuk Seri Bandar Setia Diraja menjadi Kecamatan Kuala Kampar berpusat di Teluk Meranti. Wilayah 29 *Pebatinan* diubah menjadi 29 kampung, dan para *batin* menjadi kepala kampung dengan panggilan Pak Wali.

Pada tahun 1999, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, Kewedanaan Pelalawan diubah menjadi Kabupaten Pelalawan di bawah Provinsi Riau. Kecamatan dalam lingkup Pelalawan pun dipecah-pecah. Kecamatan Pangkalan Kuras dipecah tiga menjadi Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Ukui, dan Kecamatan Pangkalan Lesung; Kecamatan Bunut dipecah

tiga menjadi Kecamatan Bunut, Kecamatan Bandar Petalangan, dan Kecamatan Pelalawan; Kecamatan Langgam dipecah tiga menjadi Kecamatan Langgam, Kecamatan Pengakalan Kerinci, dan Kecamatan Bandar Sikijang; Kecamatan Kuala Kampar dipecah tiga menjadi Kecamatan Kuala Kampar, KecamatanTeluk Meranti, dan Kecamatan Kerumutan. Kampung diubah menjadi desa dan kepala kampung menjadi kepala desa, namun tetap dipanggil Pak Wali. Saat ini Kabupaten Pelalawan terdiri atas 12 kecamatan, yang bagi lagi ke dalam 106 desa dan 12 kelurahan (BPS Kabupaten Pelalawan, 2010). Kelurahan adalah desa pusat di kecamatan.

No.	Desa/Kelurahan	Luas Km²	RT	RW	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Penduduk		
						Lelaki	Perempuan	Total
Desa Asli								
1.	*Sorek Satu*	8	29	9	2.713	6.060	5.173	11.233
2.	*Sorek Dua*	115	11	5	617	1.211	965	2.176
3.	*Dundangan*	81.6	12	6	652	1.882	1.678	3.560
4.	*Terantang Manuk*	105.53	13	5	689	1.221	1.088	2.309
5.	*Palas*	*95*	*9*	*4*	*365*	*875*	*802*	1.659
6.	*Kemang*	*95*	*12*	*4*	*547*	*1.115*	*1.062*	2.177
7.	*Betung*	*50*	*8*	*3*	*282*	*693*	*665*	1.358
8.	*Kesuma*	*100*	*26*	*4*	*1.125*	*3.120*	*2.632*	5.752
9.	*Talau*	*83*	*6*	*3*	*224*	*1.012*	*887*	1.899
10.	*Tanjung Beringin*	*17*	*7*	*2*	*332*	*615*	*562*	1.177
DESA EX-TRANSMIGRASI								
11.	*Surya Indah*	*11.97*	*18*	*4*	*465*	*904*	*821*	1.725
12.	*Beringin Indah*	*12.5*	*20*	*4*	*350*	*802*	*714*	1.516
13.	*Sialang Indah*	*17.63*	*18*	*6*	*· 609*	*1.126*	*1.066*	2.192
14.	*Meranti*	*10.46*	*14*	*4*	*370*	*696*	*575*	1.271
15.	*Harapan Jaya*	*13.52*	*16*	*4*	*327*	*620*	*601*	1.221
16.	*Batang Kulim*	*16.8*	*19*	*6*	*818*	*1.566*	*1.524*	3.090
17.	*Sido Mukti*	*6.78*	*14*	*4*	*356*	*792*	*762*	1.554
Jumlah		847.37	252	77	10.841	24.290	21.575	45.865

Penduduk Kecamatan Pangkalan Kuras (2013)[21]

(Endnotes)

1 Salah satu cerita rakyat menyebutkan bahwa daerah orang Petalangan sampai ke Dayun di utara (Siak).

2 J. M.Gullick. *Sistem Politik Bumiputera Tanah Melayu Barat* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1978).

3 Pada masa kini untuk jarak yang sama diperlukan waktu sekitar tiga hingga empat jam saja naik kendaraan umum dari Pekanbaru ke Sorek Satu selama 3 jam. sambung dengan becak motor atau ojek sekitar 30 menit.

4 Ke-*Andiko*-an *Langgam* pernah dikenal dengan nama *Ranah Tanjung Bunga* yang dipimpin oleh Unggeh Bomban. Selain itu pada suatu masa dibuat perjanjian antara Kerajaan Pagar Ruyung dan Kerajaan Malaka (1400–1511) tentang daerah perbatasan mereka di Sungai Kampar. Daerah yang disetujui itu bernama Rantau Sigalang; ke hilir di bawah Malaka dan ke hulu di bawah Pagaruyung.

5 Ali Akbar DT. Pangeran,*Islam danAdatAndiko 44 Melayu Riau* (Pekanbaru: Lamr Riau, 2006), hlm. 38–39 dan hlm. 46–47.

6 A. Samad Ahmad, *Sulalatus Salatin* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2013), hlm. 148 dan Mohammad Yusoff Hashim, *Kesultanan Melayu Melaka* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1989) hlm. 61.

7 Mohammad Yusoff Hashim, *Kesultanan Melayu Melaka*, hlm. 39.

8 Mohammad Yusoff Hashim, *Kesultanan Melayu Melaka*, hlm. 51.

9 A. Samad Ahmad, *Sulalatus Salatin*, hlm. 271.

10 A. Samad Ahmad, *Sulalatus Salatin*, hlm. 277.

11 A. Samad Ahmad, *Sulalatus Salatin*, hlm. 288.

12 Dja'afar M., T.S, *Sedjarah Hutan Tanah*, (Kuala Napuh, naskah ketik yang difoto kopi oleh Monti Ajo A. Munir BS, 1959), hlm. 3 dan Tenas Effendy, *Banjir Darah di Mempusun*, (Pelalawan: Lembaga Adat Melayu, 2005, hlm. 36.

13 Tenas Effendy, *Banjir Darah di Mempusun*, hlm. 124–25.

14 Ahmad Yusuf, dkk., *Sejarah Kerajaan Pelalawan*, (Pekanbaru: Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 1995), hlm. 107.

15 Ahmad Yusuf, dkk., *Sejarah Kerajaan Pelalawan*, hlm. 107.

16 Ahmad Yusuf, dkk., *Sejarah Kerajaan Pelalawan*, hlm. 107.

17 Tenas Effendy dan Fakhrunnas MA. Jabbar, *Selayang Pandang Bandara Khusus "Sultan Syarief Haroen Setia Negara" dan Sejarah Perjuangan Rakyat Pelalawan (Dalam Mempertahankan Kemerdekaan RI)*, (Kerinci: Public Relations-SLS PT Riaupulp dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, 2003), hlm.18–19.

18 Suku Piliang terbagi ke dalam tiga subsuku, yakni Piliang Soni, Piliang Godang, dan Piliang Kocit.

19 Dalam masyarakat Minangkabau, Kampar, dan Kuantan, kelompok di bawah suku disebut *kaum* atau *payung*, atau nama lain yang sejenis.

20 *Lantai sekeping papan* dan *atap satu mengkawan daun nipah* atau daun

enau. *Mengkawan* berarti 'sepelapah daun nipah yang dikatkan ke sepotong kayu panjang'.

21 *Laporan Kependudukan. Kecamatan Pangkalan Kuras. Agustus 2013.*

— 18 —

Kesultanan Indragiri

1. Pendahuluan

Kesultanan Indragiri merupakan salah satu kerajaan Islam di Indonesia yang berada di Provinsi Riau. Awal mula berdirinya Kesultanan Indragiri berkait dengan Kerajaan Kerintang. Nama "keritang" berasal dari istilah *akar itang* yang diucapkan dengan lafal *keritang*. *Itang* merupakan nama sejenis tumbuhan yang terdapat di sepanjang anak Sungai Gangsal bagian hulu yang menjalar di sepanjang tebing-tebing sungai. Sungai Gangsal berfungsi mengaliri wilayah Kota Baru, ibukota Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sekarang. Ada yang menyebut nama "keritang" sama dengan istilah "kitang", yang berarti sejenis siput yang hidup di hulu Sungai Gangsal.[1]

Ada beberapa sumber yang membahas makna nama kerajaan tersebut. Berdasarkan catatan *Kakawin Nagarakrtagama* karya Mpu Prapanca, Indragiri disebut juga dengan nama Keritang. Letak Kerajaan Keritang sama dengan wilayah kekuasaan Kesultanan Indragiri. Dengan demikian dapat diperkirakan bahwa Kerajaan Keritang merupakan awal mula berdirinya Kesultanan Indragiri.

Nama Indragiri menjadi perhatian ahli sejarah yang berasal dari Eropa. Richard James Wilkinson (1867–1941) mencantumkan lema Indragiri dalam kamusnya, *A Malay-English Dictionary*, terbitan tahun 1932. Dalam kamus itu Richard menulis bahwa Indragiri adalah *"Indra's Mountain an East Coast Sumatra Sultane on a river of the same name"*, yang bisa diartikan sebagai "Gunung Tempat Dewa Indra: Suatu Kesultanan di Pesisir Timur Sumatera dekat sungai yang bernama sama (nama kerajaan dan sungai sama, yaitu Indragiri)". Nama Indragiri juga tertulis sebagai lema dalam kamus susunan Hillebrads Cornelius Klinker (1829–1923), *Niew Malaeisch-Nederlandsch Woordenboek–Met Arabisch Karakter*, terbitan tahun 1892. Dalam kamus itu tertulis bahwa nama Indragiri diartikan sebagai nama sebuah kerajaan di pantai timur Pulau Sumatera dan nama sungai yang mengaliri kerajaan itu.[2] Ada pula yang mengatakan bahwa Indragiri berasal dari Bahasa Sanskerta, *Indra* 'mahligai' dan *giri* 'kedudukan yang tinggi' atau 'negeri', dan jika digabungkan maka nama Indragiri memiliki arti 'kerajaan negeri mahligai'.

2. Perkembangan

Dalam perjalanan sejarahnya, Kesultanan Indragiri terbagi ke dalam tiga periode. Periode pertama menjadi awal mula berdirinya Kesultanan Indragiri. Periode kedua terjadi ketika kolonial masuk ke Nusantara. Adapun periode ketiga terjadi saat Indragiri menjadi bagian Republik Indonesia (RI) pascakemerdekaan.

2.1 Periode pertama: dari Keritang ke Indragiri

Seperti dijelaskan sebelumnya, Kesultanan Indragiri bermula dari Kerajaan Keritang, yang berdiri sejak Kerajaan Śrîwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, mulai mundur. Kemunduran Kerajaan Śrîwijaya pada akhir abad ke-13 terjadi sejak serangan Kerajaan Cola (India) yang menyerbu dari utara dan kemudian Kerajaan Majapahit (Jawa) dari sebelah timur. Dalam catatan perjalanan Marcopolo yang ditulis pada 1292 nama Śrîwijaya sudah tidak disebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa itu Kerajaan Śrîwijaya sudah mulai pecah. Salah satu pecahan Kerajaan Sriwijaya adalah Kerajaan Keritang yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Indragiri.

Raja pertama Keritang adalah Raja Kecik Mambang, yang juga dikenal dengan nama Raja Merlang (1298–1337 M). Raja berikutnya Raja Nara Singa I (1337–1400 M), dan Raja Merlang II (1400–1473) sebagai Raja Keritang ketiga. Pada masa berikutnya pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah kerajaan ini. Raja berikutnya bernama Raja Nara Singa II (1473–1508 M), yang memeluk agama Islam. Raja Nara Singa II, selaku Raja Keritang yang keempat, menjadi Sultan Indragiri pertama dengan nama Maulana Paduka Sri Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan (1508–1532 M).

Kerajaan Keritang sempat menjadi wilayah taklukan Kerajaan Majapahit. Wilayah kerajaan ini kemudian diberikan kepada Kesultanan Malaka sebagai hadiah pernikahan antara Sultan Mansyur Syah dan salah seorang putri Kerajaan Majapahit. Seiring dengan masuknya Islam ke Nusantara, Kerajaan Keritang pun beralih pada Kesultanan Malaka. Saat Kerajaan Keritang masih di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit berlaku kebijakan bahwa Raja Merlang harus tinggal di tengah lingkungan masyarakat, namun setelah peralihan kekuasaan kepada Kesultanan Malaka Raja Merlang tidak diperbolehkan menetap di Keritang. Ia dipindahtugaskan di wilayah pusat Kerajaan Malaka. Kebijakan itu untuk memudahkan pengawasan Kerajaan Keritang.

Dominasi Malaka terhadap Keritang semakin kuat ketika Raja Merlang dikawinkan dengan Putri Bakal, anak perempuan Sultan Mansyur Syah. Berkat ikatan perkawinan itu kedudukan Kerajaan Malaka di Kerajaan Keritang semakin kukuh. Selain itu Malaka juga berharap agar Raja Merlang betah tinggal di Malaka. Dari perkawinan dengan Putri Malaka Raja Merlang memperoleh

anak laki-laki yang diberi nama Nara Singa (1337–1400 M) dan dibesarkan di lingkungan Kesultanan Malaka. Ketika Kesultanan Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah I (1448–1511 M), Raja Nara Singa diambil menantu oleh sultan. Nara Singa dinobatkan sebagai Raja Keritang, tetapi ia tetap tidak diperbolehkan tinggal di Keritang. Demikian pula yang terjadi kepada raja-raja penerus takhta Kerajaan Keritang selanjutnya, yakni Raja Merlang II hingga kemudian Raja Nara Singa II (1473–1508 M).

Selama keluarga Kerajaan Keritang berada di Malaka kebijakan pemerintahan dijalankan oleh Datuk Patih, Datuk Temenggung Kuning, serta beberapa pejabat lain. Meski pemerintahan Kerajaan Keritang mampu berjalan, namun seringkali terjadi perselisihan antara Datuk Patih dan Datuk Temenggung Kuning. Masalah terpelik yang terjadi di antara kedua menteri itu mengenai dualisme agama. Apabila ada orang yang berada di bawah kuasa Datuk Patih memeluk Islam, orang tersebut dipersilakan pindah ke daerah yang dipimpin Datuk Temenggung Kuning. Akibatnya, semakin lama orang-orang yang berada di bawah kekuasaan Datuk Patih kian berkurang karena semakin banyak rakyat Keritang yang memilih memeluk agama Islam.

Pertikaian internal di dalam kerajaan, ditambah dengan perlakuan tidak adil orang-orang Malaka terhadap rakyat Keritang, membuat Raja Nara Singa II resah dan ingin kembali ke kerajaannya. Dengan alasan mencari hiburan bersama istri, Raja Nara Singa II akhirnya diperbolehkan ke Keritang. Raja Nara Singa II tidak menyia-nyiakan kesempatan dan segera menyusun rencana dengan para pengikutnya. Ketika sudah berhasil meninggalkan Malaka, terdengarlah kabar bahwa Raja Nara Singa II dapat melepaskan diri dari Malaka.[3]

Selanjutnya Raja Nara Singa II bersama dengan para pengikutnya memindahkan pusat kerajaan dari Keritang ke Pekantua, yang wilayahnya tidak jauh dari Sungai Indragiri. Perpindahan kekuasaan ini disebabkan adanya kepercayaan bahwa suatu tempat yang telah ditinggalkan maka tempat tersebut tidak baik sebagai pusat pemerintahan.[4] Setelah memindahkan pusat pemerintahannya, Raja Nara Singa II dinobatkan menjadi raja di Pekantua dan sekaligus menjadi penanda berdirinya Kesultanan Indragiri. Sebagai sultan pertama Kesultanan Indragiri, ia bergelar Maulana Paduka Sri Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan. Gelar ini memiliki arti bahwa unsur Islam sudah masuk dan menyebarkan pengaruhnya di Indragiri dan wilayah sekitarnya.

Ibukota kerajaan dipindahkan lagi ke wilayah Mudoyan, yang juga dikenal dengan nama Kota Lama, terletak di sebelah hulu Pekantua, lebih kurang 50 km melalui jalur darat. Pemindahan pusat pemerintahan Kesultanan Indragiri disebabkan Pekantua masih kurang aman. Selain itu wilayah ini juga bisa menjadi

sasaran serangan Portugis dan ancaman gerombolan perompak. Belum diketahui waktu pemindahan tersebut, namun pasti paling lambat pada tahun 1532, sebab pada tahun tersebut Maulana Paduka Sri Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan atau Raja Nara Singa II meninggal dunia dan dimakamkan di Kota Lama.[5]

Pemindahan pusat pemerintahan Kerajaan Indragiri masih terjadi. Pada tahun 1765 M pusat pemerintahan dipindah ke wilayah Raja Pura atau Japura. Kemudian pada 5 Januari 1815 M, pada masa pemerintahan Sultan Indragiri ke-15 Sultan Ibrahim (1784–1845 M), ibukota Indragiri dipindahkan ke Rengat. Beberapa peneliti menduga perpindahan ini terjadi karena adanya tekanan dari kolonial Belanda. Selain itu pemindahan ibukota Kesultanan Indragiri dari Japura ke Rengat juga terjadi karena pihak kerajaan memiliki biaya lebih untuk membangun istana yang lebih megah.[6]

Sultan pertama Kesultanan Indragiri, Alauddin Iskandar Syah Johan, berkuasa sampai akhir hayatnya (1532 M). Takhta Kesultanan Indragiri dilanjutkan oleh Sultan Usuluddin Hasansyah (1532–1557 M). Sultan Ahmad gelar Sultan Mohammadsyah (1557–1599 M) menjadi sultan yang ke-3, dan kemudian dilanjutkan Sultan Jamaluddin Kramatsyah (1599–1658 M). Pada masa pemerintahan Sultan Jamaluddin Kramatsyah inilah imperialis Eropa datang dan lantas menanamkan pengaruhnya di Indragiri.

2.2 Periode kedua: masuknya imperialis Eropa

Pada tahun 1602 M kapal milik bangsa Belanda yang dipimpin Nahkoda Heemskerck berlabuh di Johor dengan tujuan awal berdagang. Pada saat itu Kesultanan Johor-Riau sedang menghadapi sejumlah peperangan, antara lain dengan Portugis, Kerajaan Aceh, serta Patani. Kedatangan Belanda terjadi kerja sama antara Kesultanan Johor-Riau dan Belanda, dengan maksud Kesultanan Johor-Riau mampu menaklukkan musuh-musuhnya.

Sebagai strategi untuk memperluas pengaruh dan jaringan niaganya di Selat Melaka, kompeni Belanda mendirikan loji di Indragiri pada tahun 1615. Sultan Jamaluddin Kramatsyah (1599–1658 M) mengizinkan kegiatan perdagangan Belanda di wilayahnya dengan harapan bisa meningkatkan pemasukan lewat perdagangan di Indragiri. Harapan Sultan Jamaluddin Kramatsyah tidak berjalan baik. Pelaku perdagangan bukan hanya melibatkan Belanda dan Indragiri, melainkan masih ada persaingan lain dari beberapa pihak, seperti pedagang-pedagang Cina, Portugis, dan Inggris. Sementara itu Belanda kurang mampu berkonsentrasi menangani perdagangannya di Indragiri karena sedang memusatkan perhatian untuk Batavia, bahkan kantor dagang atau loji Belanda di Indragiri terpaksa ditutup pada tahun 1622 M.

Karena kerja sama dengan Belanda tidak berlanjut, Kerajaan Indragiri mengalihkan kerja sama dengan Minangkabau, namun hubungan itu menimbulkan masalah dengan Kesultanan Aceh Darussalam, karena hasil lada dan emas dari Minangkabau yang sebelumnya dibawa ke Padang, Tiku Pariaman, dan Bandar Sepuluh yang berada di bawah pengaruh Aceh, menjadi berkurang. Karena merasa tersaingi dalam jalinan perdagangan, pada tahun 1623 M Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Indragiri dan Johor.[7] Selain itu Kerajaan Aceh juga menyerbu wilayah lain yang dianggap merugikan perdagangannya, yakni Aru, Pahang, Kedah, dan Perak, yang dilakukan dalam waktu berdekatan.[8]

Tujuan utama penyerbuan Kesultanan Aceh Darussalam ke Indragiri adalah untuk memutus hubungan perdagangan lada antara Kesultanan Indragiri dan Minangkabau. Tujuan itu tercapai pada tahun 1624 M. Sejak tahun itu kiriman lada dari Minangkabau ke Indragiri menurun tajam. Daerah-daerah yang tunduk di bawah Sultan Iskandar Muda (1607–1636 M) dituntut memberi upeti sebesar 15 % dari produksi emas dan lada, sedangkan sisanya harus dijual sesuai harga yang ditetapkan Aceh.[9]

Akibat kebijakan yang diterapkan Kesultanan Aceh, Kesultanan Indragiri mencoba menjalin hubungan kembali dengan Belanda. Pada tahun 1641 M Sultan Jamaluddin Kramatsyah mengirim surat kepada Antonio van Diemen, Gubenur Jenderal Belanda di Batavia. Dalam suratnya Sultan Jamaluddin Kramatsyah meminta Belanda agar membuka kembali kantor dagang di wilayah Kesultanan Indragiri. Setelah beberapa kali berusaha keinginan Sultan Jamaluddin Kramatsyah terpenuhi lewat kedatangan utusan Belanda Joan van Wesenhage dari Batavia ke wilayah Indragiri.

Selanjutnya pada masa pemerintahan Sultan Jamaluddin Sulemansyah (1658–1699 M), Sultan Indragiri ke-5, tercapai kesepakatan perdagangan antara Belanda dan Indragiri. Perjanjian yang ditandatangani oleh Sultan Jamaluddin Sulemansyah dan Joan van Wesenhage tersebut dikenal dengan nama *Renovatie van het Contract van 27 October 1664*.[10] Isi perjanjian itu antara lain (1) Belanda diberi hak monopoli dalam perdagangan lada, dan (2) bea murah bagi barang-barang milik Belanda yang masuk dan keluar dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Indragiri.

Berdasarkan perjanjian tersebut Belanda diperbolehkan membangun kembali kantor dagangnya di wilayah Indragiri di Kuala Cenaku, namun pada tahun 1679 M kantor dagang itu diserang oleh seratus orang dari Banten. Pasukan ini berada di bawah pimpinan Pangeran Arja Suria dan Ratu Bagus Abdul Kadir. Kantor dagang Belanda di Indragiri kembali ditutup.

Hubungan antara Belanda dan Kesultanan Indragiri pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda mengalami pasang surut,

sebab kerugian lebih sering diderita oleh pihak Kesultanan Indragiri. Sebagai contoh, ketika Kesultanan Indragiri di bawah pimpinan Sultan Ibrahim (1784–1815) Belanda campur tangan urusan internal kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah dari Hilir hingga Japura.

Pada masa kepemimpinan Sultan Indragiri terakhir, Mahmudsyah (1912–1963 M), Kedudukan Kesultanan Indragiri sebagai kerajaan yang berdaulat makin terjepit. Sultan tidak mampu berbuat banyak menghadapi tekanan Belanda. Di samping itu Belanda juga melarang rakyat Indragiri mengadakan rapat atau berkumpul lebih dari tiga orang, kecuali acara dakwah agama, namun dakwah itu pun tetap diawasi secara ketat oleh pihak Belanda. Apabila isi ceramah dalam dakwah dianggap terlalu berani, orang-orang yang terkait dengan acara dakwah itu akan ditangkap dan diproses menurut hukum yang diberlakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda.[11]

2.3 Periode ketiga: Indragiri bergabung dengan RI

Saat Indonesia menyatakan kemerdekaan melalui Proklamasi 17 Agustus 1945 Sultan Mahmudsyah belum berani mengambil sikap karena tentara Jepang masih banyak yang berkeliaran di wilayah kekuasannya. Sultan memilih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan menunggu reaksi rakyat Indragiri. Akan tetapi para pemuda Indragiri bersikap dan berani menyebarkan informasi mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada rakyat. Sultan pun mendengar bahwa para pemuda mengadakan pertemuan secara rahasia untuk membicarakan hal tersebut.[12]

Para pemuda Indragiri menghadap Sultan Mahmudsyah untuk menanyakan sikap sultan terhadap kemerdekaan Indonesia. Sultan menjawab tegas bahwa Kesultanan Indragiri sangat mendukung proklamasi kemerdekaan dan merestui gerakan para pemuda. Sultan Mahmudsyah juga menyatakan bahwa Kesultanan Indragiri siap bergabung dengan Indonesia. Sultan Mahmudsyah berucap, "Kerajaan Indragiri sudah berakhir dan kini sudah pemerintahan Indonesia, jadi apa-apa yang tuan perbuat saya sangat mendukung."[13] Dengan demikian jelas sudah bahwa Kesultanan Indragiri di bawah pimpinan Sultan Mahmudsyah berkomitmen terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

3. Raja-raja Kesultanan Indragiri

Berikut daftar raja/sultan yang pernah berkuasa di Kerajaan Keritang/Kesultanan Indragiri berdasarkan *Sejarah Kesultanan Indragiri* (1994), karya Ahmad Yusuf, Umar Amin, Noer Muhammad, dan Isjoni Ishaq.

(1) Raja Kecik Mambang atau Raja Merlang (1298–1337), Raja Keritang ke-1.

(2) Raja Nara Singa I (1337–1400), Raja Keritang ke-2.

(3) Raja Merlang II (1400–1473), Raja Keritang ke-3.

(4) Raja Nara Singa II (1473–1508), Raja Keritang ke-4, yang kemudian mendirikan Kesultanan Indragiri, dan dengan demikian menjadi Sultan Indragiri ke-1 dengan gelar Sultan Iskandar Alauddin Syah (1508–1532).

(5) Sultan Usuluddin Hasansyah (1532–1557), Sultan Indragiri ke-2.

(6) Raja Ahmad bergelar Sultan Mohammadsyah (1557–1599), Sultan Indragiri ke-3.

(7) Raja Jamaluddin bergelar Sultan Jamaluddin Kramatsyah (1599–1658), Sultan Indragiri ke-4.

(8) Sultan Jamaluddin Sulemansyah (1658–1669), Sultan Indragiri ke-5.

(9) Sultan Jamaluddin Mudoyatsyah (1669–1676), Sultan Indragiri ke-6.

(10) Sultan Usuludin Ahmadsyah (1676–1687), Sultan Indragiri ke-7.

(11) Sultan Abdul Jalil Syah (1687–1700), Sultan Indragiri ke-8.

(12) Sultan Mansursyah (1700–1704), Sultan Indragiri ke-9.

(13) Sultan Mohammadsyah (1704–1707), Sultan Indragiri ke-10.

(14) Sultan Musyaffarsyah (1707–1715), Sultan Indragiri ke-11.

(15) Raja Ali Mangkubumi Indragiri bergelar Sultan Zainal Abidin Indragiri (1715–1735), Sultan Indragiri ke-12.

(16) Raja Hasan bergelar Sultan Hasan Salahuddinsyah (1735–1765), Sultan Indragiri ke-13.

(17) Raja Kecil Besar bergelar Sultan Sunan (1765–1784), Sultan Indragiri ke-14.

(18) Sultan Ibrahim (1784–1815), Sultan Indragiri ke-15.

(19) Raja Mun (1815–1827), Sultan Indragiri ke-16.

(20) Raja Umar bergelar Sultan Berjanggut Kramat (1827–1838), Sultan Indragiri ke-17.

(21) Raja Said bergelar Sultan Sultan Said Mudoyatsyah (1838–1876), Sultan Indragiri ke-18.

(22) Raja Ismail bergelar Sultan Ismailsyah (1876–1877), Sultan Indragiri ke-19.

(23) Tengku Husin bergelar Sultan Husinsyah (1877–1883), Sultan Indragiri ke-20.

(24) Tengku Isa bergelar Sultan Isa Mudoyatsyah (1887–1903), Sultan Indragiri ke-21.

(25) Tengku Mahmud bergelar Sultan Mahmudsyah (1912–1963), Sultan Indragiri ke-22.

4. Wilayah Kekuasaan

Raja Nara Singa II atau Maulana Paduka Sri Sultan Iskandar Syah Johan menunjuk sejumlah pejabat untuk mewakilinya di beberapa

daerah Kesultanan Indragiri. Salah seorang pejabat terdekat sultan, Datuk Patih, dianugerahi gelar sebagai Raja di Padang, yang membawahi daerah pedalaman dan sejumlah tempat di pesisir sungai selain Sungai Indragiri. Seorang pejabat lainnya, Datuk Temenggung Kuning, diangkat menjadi Raja di Rantau yang menguasai tempat-tempat di sepanjang tepi Sungai Indragiri dan sungai-sungai besar lain, seperti desa-desa di sebelah hilir Batu Sawar dan di sepanjang tepi Batang Kuantan.

Pada masa pemerintahan Sultan Hasan Salahuddinsyah (1735–1765) terdapat pembagian kekuasaan Kesultanan Indragiri[14] sebagai berikut:

(1) Daerah Cenaku, terdiri atas tiga daerah *pebatinan*, meliputi Pungkil, Pulau Serojan, dan Sanglap.

(2) Daerah Gangsal, terdiri dari Nan Tua Riye Belimbing, Riye Tanjung, dan Pemuncak di Rantau Langsat.

(3) Daerah Tiga Balai, terdiri dari Dian Cacar, Parit, dan Perigi.

(4) Daerah Batin nan Enam Suku, meliputi Igal, Mandah, Pelanduk, Bantaian, Pulau Palas, serta Batang Tuaka.

(5) Daerah Kuantan, mencakup Cerenti Tanah Kerajaan, Ujung Tanah Minangkabau, dan Kerajaan Tua Gadis.

Pada tanggal 27 September 1938 disepakati *Tractaat van Vrindchaap* (perjanjian perdamaian dan persahabatan) antara Kesultanan Indragiri dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Perjanjian ini menghasilkan keputusan bahwa Kesultanan Indragiri menjadi *zelfbestuur* (semacam daerah otonomi). Selain itu terdapat seorang *controlleur* (pengawas dari pemerintah kolonial) yang bertugas di wilayah Indragiri Hilir untuk membawahi enam daerah yang berupa wilayah keamiran sebagai berikut:

(1) Amir Tembilahan di Tembilahan.

(2) Amir Batang Tuaka di Sungai Luar.

(3) Amir Tempuling di Sungai Salak.

(4) Amir Mandah dan Gaung di Khairiah Mandah.

(5) Amir Enok di Enok.

(6) Amir Reteh di Kota Baru.

Sejak tanggal 31 Maret 1942 tentara Jepang masuk Indragiri melalui Singapura, terus ke Rengat. Pada tanggal 2 April 1942 Jepang menerima penyerahan tanpa syarat dari pihak Belanda atas Indragiri. Pada masa pendudukan Jepang Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang *Cun Cho* yang berkedudukan di Tembilahan dengan membawahi lima*Ku Cho*, yaitu:

(1) *Ku Cho* Tembilahan dan Tempuling di Tembilahan

(2) *Ku Cho* Sungai Luar

(3) *Ku Cho* Enok

(4) *Ku Cho* Reteh

(5) *Ku Cho* Mandah

Sebelum tentara Jepang mendarat di Indragiri dikumandangkan lagu Indonesia Raya yang dipelopori oleh Ibnu Abbas. Pemerintahan Jepang di Indragiri bertahan sampai bulan Oktober 1945, yakni lebih kurang selama 3,5 tahun.

Pada awal kemerdekaan Indonesia wilayah Indragiri (Hulu & Hilir) masih menjadi satu kabupaten. Indragiri terdiri atas tiga kawedanan sebagai berikut:

(1) Kawedanan Kuantan Singingi beribu kota Teluk Kuantan.

(2) Kawedanan Indragiri Hulu beribu kota Rengat.

(3) Kawedanan Indragiri Hilir beribu kota Tembilahan

Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 49 Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Riau terhitung tanggal 20 November 1965.

5. Sistem Pemerintahan Kesultanan Indragiri

Pemerintahan Indragiri memiliki sistem khas, yang dibangun oleh orang-orang Melayu secara turun-temurun. Model pemerintahan yang berlaku di dalam Kesultanan Indragiri yang bercirikan Islam memperkuat pertumbuhan dan perkembangan budaya Melayu. Upacara-upacara keagamaan di Indragiri tidak dapat dilepaskan dari Islam dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.[15]

Sistem pemerintahan di Kesultanan Indragiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Indragiri Raja Nara Singa II atau Maulana Paduka Sri Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan menjalankan pemerintahan dengan didampingi Bendahara Kerajaan Tun Ali gelar Raja di Balai.[16] Posisi bendahara kerajaan pada masa itu merupaka jabatan sangat terhormat karena hanya orang terdekat dan yang paling dipercaya sultan sajalah yang dapat mendudukiya.

Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan memiliki sejumlah hamba setia, antara lain Datuk Patih dan Datuk Temenggung Kuning serta beberapa orang lainnya. Selama Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan berada di Melaka, karena tidak diperkenankan tinggal di Indragiri oleh Sultan Melaka, pemerintahan Keritang dijalankan oleh kedua hamba setia tersebut.

Sistem pemerintahan yang mulai terkonsep sejak masa pemerintahan Sultan Alauddin Iskandar Syah Johan ditingkatkan

dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Kesultanan pada masa Sultan Hasan Salahuddinsyah (1735–1765). Undang-Undang Kesultanan Indragiri meliputi Undang-Undang Adat Kerajaan Indragiri, Pengadilan Adat Kerajaan, Panji-Panji Raja, serta Kerajaan, yang isinya mengatur ha-hal sebagai berikut.[17]

(1) Struktur Pemerintahan Berdasarkan Lembaga Undang-Undang Adat, terdiri dari Beraja nan Bedua, meliputi Yang Dipertuan Besar Sultan, Yang Dipertuan Muda, dan Berdatuk nan Berdua, yang meliputi Datuk Temenggung dan Datuk Bendahara.

(2) Menteri nan Delapan, yaitu menteri-menteri Kesultanan Indragiri atau sebagai pembantu Datuk Bendahara, berjumlah delapan orang, antara lain Sri Paduka, Bentara, Bentara Luar, Bentara Dalam, Majalela, Panglima Dalam, Sida-Sida, dan Panglima Muda.

(3) Tiga Datuk d Rantau, meliputi Orang Kaya Setia Kumara di Lala, Orang Kaya Setia Perkasa di Kelayang, serta Orang Kaya Setia Perdana di Kota Baru.

(4) Penghulu nan Tiga Lorong, terdiri atas Yang Tua Raja Mahkota, di Batu Ginjal, Kampung Hilir; Lela di Raja, di Batu Ginjal, Kampung Hilir; Dana Lela, di Pematang.

(5) Kepala Pucuk Rantau, mencakup Tun Tahir di Lubuk Ramo, Datuk Bendahara di sebelah kanan, dan Datuk Temenggung di sebelah kiri

Selain itu juga terdapat Peradilan Adat Kesultanan Indragiri yang mengurusi hukum pidana dan hukum perdata. Peradilan Adat meliputi dua mahkamah. Pertama, Mahkamah Besar, dengan anggota yang terdiri atas Yang dipertuan Muda, Datuk Bendahara, dan beberapa anggota lain yang dipilih oleh sultan. Setiap Keputusan Mahkamah Besar disampaikan oleh Datuk Bendahara kepada Sultan Indragiri. Kedua, Mahkamah Kecil, yang mencakup wilayah di desa-desa di bawah kendali seorang penghulu. Mahkamah Kecil kemudian dikepalai oleh amir atau camat pada masa sekarang. Di samping itu ada pula Hukum Pidana Adat yang dipimpin Raja dan Orang Banyak, serta Hukum Perdata mengenai hukum *salo* (damai), pengaduan tentang kerugian, dan batas putusan Penghulu.[18]

(Endnotes)

1 Ahmad Yusuf & Umar Amin, et. al., *Sejarah Kesultanan Indragiri* (Pekanbaru: Pemerintah Daerah Provinsi Riau, 1994), hlm. 19.

2 Hasan Junus & Zuarman, et.al., *Kerajaan Indragiri* (Pekanbaru: Unri Press, 2003), hlm.13.

3 Ahmad Yusuf & Umar Amin, et. al., *Sejarah Kesultanan Indragiri*, hlm. 19.

4 Sartono Kartodirjo, et.al., *Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III* (Jakarta: PT Grafitas, 1975) hlm. 153.

5 Ahmad Yusuf & Umar Amin, et. al., *Sejarah Kesultanan Indragiri*, holm. 75.

6 Muchtar Lufti, ed., *Sejarah Riau* (Pekan Baru: Universitas Riau, 1977), hlm. 261.

7 Jamalako Sultan, *Sejarah Indragiri dan Kuantan*, Manuskrip (Teluk Kuantan: tanpa penerbit, tanpa tahun), h.17.

8 Sanusi Pane, *Sejarah Indonesia, Jilid I* (Jakarta: Balai Pustaka, 1965), hlm. 185.

9 Djuharsono,*Perlawanan Indonesia terhadap Penetrasi Politik Barat; Modul Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1985), h. 152.

10 Muchtar Lufti, ed., *Sejarah Riau*, h. 217.

11 Ahmad Yusuf & Umar Amin, et. al., *Sejarah Kesultanan Indragiri*, hlm. 126.

12 Wasmad Rads, *17 Agustus 1945 di Kota Rengat* (Manuskrip, tanpa penerbit, 1950), hlm. 7.

13 Ahmad Yusuf & Umar Amin, et. al., *Sejarah Kesultanan Indragiri*, hlm. 173.

14 Ahmad Yusuf & Umar Amin, et. al., *Sejarah Kesultanan Indragiri*, hlm. 86–87.

15 Isjoni & Zulkarnain (eds.), *Mengembalikan Kejayaan Melayu di Indragiri* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), hlm. x.

16 Ahmad Yusuf & Umar Amin, et. al., *Sejarah Kesultanan Indragiri*, hlm. 19.

17 Muchtar Lufti, ed., *Sejarah Riau*, hlm. 83 dan "Undang-Undang Indragiri"dalam Tengku Arief, *Rakit Kulim Menjemput Raja ke Melaka* (Jakarta: Library of Congress Office, 1991).

18 Ahmad Yusuf & Umar Amin, et. al., *Sejarah Kesultanan Indragiri*, hlm. 87–88.

— 19 —

Kesultanan Siak

Sumatera bagian timur merupakan wilayah yang subur dan kaya sumber daya alam dan karenanya berperan penting dalam kegiatan perdangangan di sekitar Selat Malaka. Selain itu wilayah ini juga menjadi penghubung jalur perdagangan antara Malaka dan wilayah pedalaman Minangkabau yang kaya emas dan kopi. Berbagai masyarakat yang ada di wilayah ini pada dasarnya menjadi wilayah *vasal* Johor. Masyarakat mulai membentuk kesatuan politik yang mandiri di sepanjang Sungai Siak, yang dipelopori oleh seorang tokoh karismatik bernama Raja Kecik, yang dipercaya masih memiliki garis keturunan Sultan Johor. Kesatuan politik yang terdiri atas berbagai suku dan kebudayaan itu tampil sebagai kesatuan yang kokoh dengan menganut prinsip yang dikenal sebagai "kacu"[1] (Barnard, 2003).

Hikayat Siak (Hashim, 1982) menceritakan bahwa Raja Kecik merupakan pewaris takhta Kesultanan Johor. Atas dasar itu, dan dengan bantuan raja Pagaruyung berikut masyarakat Minangkabau di wilayah sekitar Kesultanan Johor, ia mengalahkan Sultan Johor yang berkuasa kala itu dalam perebutan kekuasaan. Meskipun demikian kekuasaan Raja Kecik sangat singkat. Persekutuan bangsawan Johor dengan Bugis membuatnya harus keluar dari istana Johor dan kemudian menyingkir ke Siak. Di sepanjang Sungai Siak inilah Raja Kecik, yang juga bernama Sultan Abdul Jalil Syah, mendirikan kesultanan dengan nama Siak Sri Indrapura.

Selama beberapa abad kemudian Raja Kecik, keturunannya, beserta para pengikutnya berupaya menguasai jaringan perdagangan di Selat Malaka. Selain itu ia memperkukuh hubungan dengan kelompok masyarakat sekitar lewat perkawinan dan perdagangan, dan seringkali dengan peperang dan penjarahan, hingga membangun mitos mengenai kedigdayaan Siak. Pada akhir abad ke-18 M, ia berhasil menciptakan kekuatan baru di Sumatera, meskipun pada saat bersamaan harus berhadapan dengan kekuatan Barat, terutama Inggris di Singapura dan Penang.

Pada masa itu Siak menjadi pusat penyebaran dakwah dan syiar Islam. Campuran kebudayaan Melayu dan Islam—meskipun melunturkan corak budaya Melayu dan cenderung menampilkan dominasi Islam—berdampak pada peradaban, kebudayaan, dan adat yang berkembang di kemudian hari (Milner, 1982). Pelaksnaan hukum yang ada di Siak, misalnya, sangat khas dengan nuansa keislaman, bahkan ada kabar bahwa orang yang pandai pengetahuan Islamnya dikenal dengan sebutan Orang Siak (Luthfi, 1991).

Nama Kesultanan Siak Sri Inderapura memiliki arti tersendiri. Kata "Sri Inderapura" berasal dari bahasa bahasa Sanskerta, yang dapat diartikan sebagai 'pusat kota raja yang taat beragama'. Kata "Siak" diambil dari nama sungai tempat kesultanan itu berada, sementara kata "sri" berarti 'bercahaya' dan indera—kadangkala indra—dapat diartikan sebagai 'raja', sedang kata "pura" dapat berarti 'kota' atau 'kerajaan'. Penamaan ini, pada titik tertentu, mencerminkan corak Islamisasi kesultanan tersebut. Hal itu tidak mengherankan mengingat pendiri kesultanan ini berasal dari Johor.

Menurut catatan Tomé Pires, yang ditulis pada tahun 1513–1515 M, Siak merupakan kawasan yang berada di antara Arcat dan Indragiri. Kawasan itu disebut oleh Pires sebagai "kawasan pelabuhan raja Minangkabau" (Pires, 1944), yang kemudian menjadi *vasal* Malaka sebelum ditaklukan Portugis. Sejak Malaka jatuh ke tangan VOC, Kesultanan Johor menyatakan bahwa Siak menjadi bagian dari wilayah kedaulatannya. Hal ini berlangsung hingga kedatangan Raja Kecik yang kemudian mendirikan Kesultanan Siak (Andaya, 1972).

1. Raja Kecik dan Kerajaan Siak

Dalam silsilah Kesultanan Johor sosok Raja Kecik merupakan putra Sultan Mahmud II dari selir Encik Pong (Andaya, 2010). Pong putri seorang laksmana di Kesultanan Johor, orang terbaik yang dimiliki oleh Sultan Mahmud. Namun, sebagaimana ditulis *Hikayat Siak*, Sultan Johor melakukan perbuatan yang membuat istana gempar dan Laksmana Megat Sri Rama menghabisi nyawa sultan.

Tampuk pimpinan Johor pindah ke tangan Datuk Bendahara Tun Hebab. Ia diberi gelar Abdul Jalil Syah IV. Sementara Encik Pong, selir sultan, melarikan diri ke Temasek, yang sekarang disebut sebagai Singapura. Ia melarikan diri karena khawatir dibunuh kelompok yang sedang berkuasa, karena ia tengah mengandung anak Sultan Mahmud II. Kandungan yang ada di rahimnya itu kelak merebut kekuasaan Johor yang sedang dipegang oleh Abdul Jalil.

Tak lama setelah sampai di Temasek Encik Pong melahirkan bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Raja Kecik (catatan lain menyebutnya Raja Kechil, tetapi dalam tulisan ini selanjutnya akan menggunakan nama Raja Kecik). Supaya anak ini aman dari pantauan Johor, ayah Encik Pong membawa Raja Kecik ke pemimpin kaum pelaut[2] di Temasek. Dari sini Raja Kecik bertemu dengan Temeggung Muar, seorang yang sangat berpengaruh di Temasek. Ia pun mendapat perhatian istimewa dari Temenggung Muar.

Menginjak umur tujuh tahun Raja Kecik diajak Temenggung Muar kembali ke Kesultanan Johor. Di Johor ada cerita yang membuat posisi Raja Kecik terkesan sakti. *Hikayat Siak* menceritakan Raja Kecik sedang bermain dengan teman-teman sebayanya di sekitar

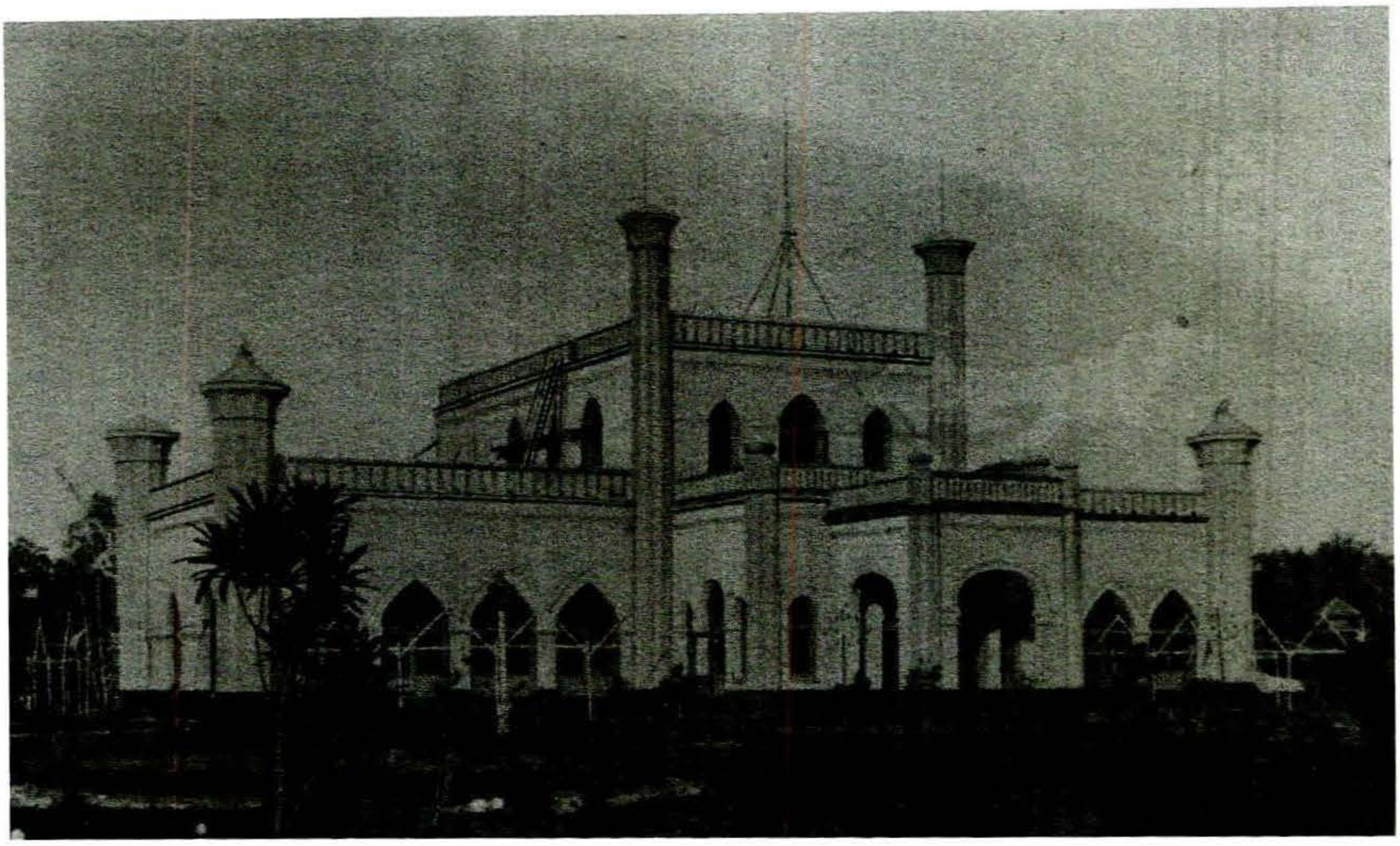

Istana Kesultanan Siak
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

makam Sultan Mahmud II. Mereka tidak sengaja mengunyah tanaman beracun yang tumbuh di sekitar makam. Teman-teman Raja Kecik sakit. Sementara Raja Kecik selamat dan sehat-sehat saja. Penggalan cerita di hikayat ini setidaknya dapat dimaknai bahwa Raja Kecik merupakan orang yang mewarisi takhta Kesultanan Johor yang resmi. Penggalan kisah mengenai Raja Kecik yang tidak apa-apa setelah ikut makan tanaman beracun di pemakaman Sultan Mahmud dimaknai bahwa ia mendapat kesaktian dari ayahnya.

Kekebalannya terhadap racun pun terdengar oleh kakeknya dan pelaut handal di Johor, Nakhoda Malin. Malin terperangah saat Laksmana menceritakan kisah Raja Kecik kepadanya. Akhirnya Raja Kecik diajak Malin ke Pagaruyung, sebab Malin ingin menceritakan kehebatan Raja Kecik kepada Yam Tuan Sakti, penguasa Pagaruyung kala itu sekaligus rekan baik sang nakhoda. Setelah berlayar menyusuri Sungai Batanghari dan tiba di Pagaruyung, Raja Kecik dipertemukan dengan Tuan Sakti. Penguasa Pagaruyung itu takjub dengan cerita Malin dan ingin mengangkat Raja Kecik sebagai anaknya.

Raja Kecik pun dibawa ke istana Pagaruyung. Putri Jamilan, permaisuri Kerajaan Pagaruyung, sangat senang mengasuh anak yatim asal Johor itu. Tidak terasa enam tahun berlalu bagi Raja Kecik tinggal di Pagaruyung. Sudah saatnya Raja Kecik merantau dan mempelajari dunia luar, sehingga pada umurnya yang ke-13 ia berkelana mencari ilmu dan pengalaman mengenai adat istiadat bangsa Melayu, terutama di Palembang yang bersekutu dengan Pagaruyung. Setelah mendapat cukup pengetahuan tentang ke-Melayu-an, Raja Kecik pulang ke Pagaruyung. Setibanya di Pagaruyung ibu suri meminta Raja Kecik pergi ke Johor untuk

menyelidiki masa lalunya. Raja Kecik diminta Putri Jamilan untuk memperkirakan kekuatan Sultan Johor Abdul Jalil.

Beberapa episode kisah di atas barangkali terdengar aneh, namun sebagai sebuah upaya mencari legitimasi tidak ada yang salah dengan cerita tentang kesaktian seorang anak kecil yang kebal racun. Upaya itu bahkan semakin meneguhkan kedudukan Raja Kecik sebagai penguasa Siak yang kuat. Sebagai seorang tokoh, wawasannya mengenai Melayu dibentuk lewat proses pembelajaran yang panjang. Sementara darah Sultan Abdul Hamid II yang mengalir dalam dirinya menjadikan citra dirinya semakin kuat di masyarakat, sehingga memori mengenai kehebatan Raja Kecik di mata orang-orang Siak mengakar sampai sekarang. Pun, secara historis, apa yang tertuang dalam *Hikayat Siak* tersebut masih bisa dilacak kebenarannya. Fakta bahwa Putri Jamilan memerintahkan Raja Kecik ke Johor tampaknya tidak bisa dimungkiri. Tujuan utama Putri Jamilan adalah Raja Kecik dapat membalas dendam kematian ayahnya yang di kudeta. Untuk itu Putri Jamilan membuat rencana. Pagaruyung yang akan mengantarkan surat resmi ke Istana Johor menjadi "kuda troya" yang berisi Raja Kecik, sehingga rombongan Pagaruyung tidak dicurigai Johor.

Setelah berhasil masuk ke pusat pertahanan Johor, Raja Kecik langsung masuk ke istana. Ia menangkap dan mengeksekusi para pelaku yang dianggap membunuh Sultan Mahmud. Persentase keberhasilan serangan ini semakin besar ketika Putri Jamilan minta dukungan persenjataan dari VOC. Selain itu orang-orang Bugis juga dilibatkan dengan imbalan jabatan dan kedudukan tinggi di Johor ketika Raja Kecik berhasil menggulingkan kekuasaan Abdul Jalil. Ternyata sampai tiba waktunya para pelaut Bugis tidak kunjung tiba (Andaya, 1972). Walaupun ada beberapa rencana yang gagal, serangan itu tetap saja berhasil. Pada tahun 1717 M Raja Kecik berhasil merebut singgasana Johor dari Abdul Jalil Syah IV sekaligus membalas dendam atas kematian ayahnya. Sebagai penguasa baru Johor ia bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah I.

Syair Perang Siak menyebut bahwa Raja Kecik didaulat menjadi penguasa Siak atas mufakat masyarakat di Bengkalis dengan tujuan melepaskan Siak dari cengkeraman Kesultanan Johor (Goudie, 1996). Sementara itu *Hikayat Siak* menyebut Raja Kecik dengan "sang pengelana pewaris Sultan Johor yang kalah dalam perebutan kekuasaan" (Barnard, 2016). Korespondensi Sultan Indermasyah Yang Dipertuan Pagaruyung dengan Gubernur Jenderal Belanda di Melaka waktu itu menyebutkan bahwa Sultan Abdul Jalil merupakan saudaranya yang diutus untuk urusan dagang dengan pihak VOC (Barnard, 2001b). Kemudian dalam surat Sultan Abdul Jalil yang ditujukan kepada pihak Belanda, menyebut dirinya sebagai Raja Kecik dari Pagaruyung, akan menuntut balas atas kematian Sultan Johor (Effendy and Effendy, 1973).

Pada tahun 1718 M Sultan Abdul Jalil berhasil menguasai Kesultanan Johor sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai Sultan Johor dengan gelar Yang Dipertuan Besar Johor (Andaya, 1972), namun pada tahun 1722 M terjadi pemberontakan yang dipimpin Raja Sulaiman, anak Abdul Jalil Syah IV, yang menuntut hak atas takhta Johor. Atas bantuan pasukan bayaran dari Bugis, Raja Sulaiman kemudian berhasil merebut takhta Johor dan mengukuhkan dirinya menjadi penguasa Johor. Sementara Sultan Abdul Jalil pindah ke Bintan dan pada tahun 1723 M membangun pusat pemerintahan baru di sehiliran Sungai Siak dengan nama Siak Sri Inderapura (Khairiah, 2015). Sementara pusat pemerintahan Johor yang sebelumnya berada di sekitar muara Sungai Johor ditinggalkan begitu saja dan menjadi *status quo* dari masing-masing penguasa yang bertikai. Meskipun demikian pernyataan Raja Kecik sebagai pewaris sah takhta Johor diakui oleh Orang Laut. Orang Laut merupakan kelompok masyarakat yang bermukim di kawasan Kepulauan Riau, yang membentang dari timur Sumatera sampai ke Laut Tiongkok Selatan. Kesetiaan mereka bertahan hingga runtuhnya Kesultanan Siak (Djoko Damono, Kusumawijaya, and Noszlopy, 2007; Effendy and Effendy, 1973).

Dengan menyatakan diri sebagai pewaris Malaka pada tahun 1724–1726 M Sultan Abdul Jalil melakukan perluasan wilayah, dimulai dengan memasukkan Rokan ke dalam wilayah Kesultanan Siak kemudian membangun pertahanan armada laut di Bintan (Barnard, 2003). Pada tahun 1728 M, atas perintah Raja Sulaiman, Yang Dipertuan Muda bersama pasukan Bugisnya mengusir Raja Kecik keluar dari Kepulauan Riau. Raja Sulaiman kemudian menjadikan Bintan sebagai pusat pemerintahannya. Atas keberhasilannya itu Yang Dipertuan Muda diberi kedudukan di Pulau Penyengat (Barnard, 2003).

Sementara itu Raja Kecik terpaksa melepaskan kekuasaannya atas Kepulauan Riau dan membangun kekuatan baru di kawasan sepanjang pesisir timur Sumatera. Antara tahun 1740 dan tahun 1745 M Raja Kecik bangkit dan menaklukan beberapa kawasan di Semenanjung Malaka (Andaya, 1972). Karena mendapat ancaman dari Siak, dan di saat yang bersamaan orang-orang Bugis juga meminta balas jasa, maka Raja Sulaiman minta bantuan Belanda di Malaka. Dalam perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1746 M itu Johor menjanjikan akan memberikan Bengkalis kepada Belanda. Perjanjian itu kemudian ditanggapi VOC dengan mendirikan gudang di kawasan tersebut (Andaya, 1975).

Pada tahun 1723 M Raja Kecik mendirikan kesultanan di Buantan di pinggiran Sungai Siak. Wilayah ini dipilih untuk memenuhi tuntutan para pendukungnya yang tidak memiliki "rumah" karena dianggap bukan sebagai penduduk kerajaan yang sudah ada seperti Pagaruyung atau Johor. Sebagian di antara mereka adalah orang Minangkabau. Pada saat itulah terbentuk apa yang dinamakan sebagai "*kacu*" oleh Raja Kecik untuk mempersatukan orang-orang

Melayu di Siak yang tersingkir dari pusaran kerajaan-kerajaan besar. Namun demikian, secara budaya, Siak masih dapat dikatakan sebagai masyarakat yang memlaksanakan kebudayaan Melayu. Bahasa dan adat istiadat masyarakat setempat menggunakan gaya Melayu.

Raja Kecik memperluas daerah kekuasaannya dan merebut Rokan Tanah Putih, Bangka, dan Kubu. Pada tahun 1724 dan tahun 1726 M Siak menyerang orang-orang Bugis di Kedah, tetapi Kedah tidak berhasil ditaklukan. Raja Kecik dikaruniai dua orang putra, yakni Tengku Alamuddin dan Tengku Buang. Pada masa tuanya ia melihat kedua anaknya saling berebut hak sebagai penerus takhta. Pertikaian berubah menjadi perang terbuka. Tengku Buang menang dan menjadi penguasa baru Siak. Tak lama kemudian Raja Kecik meninggal pada tahun 1746 M lantaran sakit. Kemungkinan besar Raja Kecik sakit dan kemudian meninggal karena kelakukan dua anaknya yang memperebutkan kekuasaan, alih-alih bersatu melawan Johor.

Sepeninggal Raja Kecik klaim atas Johor memudar. Pengantinya, Sultan Mahmud, lebih memusatkan perhatian pada penguatan kedudukannya di pesisir timur Sumatera serta daerah *vassal* di Kedah dan kawasan pantai timur Semenanjung Malaka. Pada tahun 1761 M Sultan Siak membuat perjanjian dengan pihak Belanda dalam urusan perdagangan dan hak atas kedaulatan wilayahnya serta bantuan persenjataan (Andaya, 1975). Setelah Raja Mahmud meninggal muncul dualisme kekuasaan. Raja Muhammad Ali yang lebih disukai Belanda kemudian menjadi Sultan Siak; sementara sepupunya, Raja Ismail, yang tidak disukai Belanda, menjadi Raja Laut yang menguasai perairan timur Sumatera sampai ke Laut Tiongkok Selatan dan membangun kekuatan di gugusan Pulau Tujuh (Djoko Damono, Kusumawijaya, dan Noszlopy, 2007).

Sekitar tahun 1767 M Raja Ismail menjadi "kembaran" Raja Kecik. Dengan dukungan Orang Laut ia menunjukkan dominasinya di kawasan perairan timur Sumatera, dimulai dengan mengontrol perdagangan timah di Pulau Bangka dan kemudian menaklukkan Mempawah di Kalimantan Barat. Sebelumnya, Raja Ismail membantu Terengganu menaklukkan Kelantan. Hubungan itu diperkuat dengan ikatan perkawinan antara Raja Ismail dan saudara perempuan Sultan Terengganu. Pengaruh Raja Ismail di kawasan Melayu sangat kuat, mulai dari Terengganu, Jambi, hingga Palembang. Laporan Belanda menyebutkan bahwa Palembang membayar 3.000 ringgit kepada Raja Ismail agar jalur pelayarannya aman dari gangguan. Sementara *Hikayat Siak* menceritakan kemeriahan sambutan yang diterima Raja Ismail sewaktu datang ke Palembang (Noegraha, 2002).

Perluasan wilayah kekuasaan Kesultanan Siak mencapai titik puncak pada masa pemerintahan Sultan Syarif Ali Abdul Jalil

Baalawi. Pada saat itu wilayah Kesultanan Siak melingkupi 12 wilayah kekuasaan, yang meliputi Kotapinang Pagarawan, Batubara Bedagai, Kualuh, Panai, Bilah, Asahan, Serdang, Deli, Langkat, dan Temiang yang berbatasan dengan Aceh, serta wilayah taklukan Sambas di Kalimantan. Wilayah kekuasaan Kesultanan Siak setidaknya mengalami tiga tahap perubahan sejak didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rakhmat Syah pada tahun 1723 M hingga sultan terakhir Sultan Syarif Kasim II. Pada saat pemerintahan Sultan Abdul Jalil Syah, daerah kekuasaa Siak meliputi *Perbatinan* Senapelan, *Perbatinan* Gasip, *Perbatinan* Sejaleh, *Perbatinan* Perawang, *Perbatinan* Sakai, *Perbatinan* Petalang, *Perbatinan* Tebing Tinggi, *Perbatinan* Senggoro, *Perbatinan* Merbau, *Perbatinan* Rangsang, *Kepenghuluan* Siak Kecil, *Kepenghuluan* Siak Besar, *Kepenghuluan* Rempah, dan *Kepenghuluan* Betung.

2. Sistem Pemerintahan

Sultan Abdul Jalil Rakhmat Syah sebagai pendiri Kesultanan Siak merumuskan landasan sistem pemerintahan di Kesultanan Siak, yang mengatur bahwa sultan memiliki Dewan Kesultanan sebagai pembantu sultan yang berfungsi sebagai pelaksana dan penasihat sultan. Dewan Kesultanan terdiri atas (1) Datuk Tanah Datar dengan gelar Sri Paduka Raja, (2) Datuk Lima Puluh dengan gelar Sri Bejuangsa, (3) Datuk Pesisir dengan gelar Sri Dewa Raja, dan (4) Datuk Kampar dengan gelar Maharaja Sri Wangsa. Selain keempat datuk tersebut ada kedudukan lain namun tidak begitu penting, seperti Datuk Bintara Kanan dan Bintara Kiri yang bertugas dalam pengaturan tata pemerintahan, hukum, dan undang-undang kesultanan. Sementara itu jabatan lain yang kurang begitu diperhatikan adalah Datuk Laksmana yang bertugas mengatur segala urusan yang berkaitan dengan kelautan dan Panglima yang bertugas mengatur hal-hal yang terkait dengan wilayah daratan.

Kesultanan Siak juga mengatur sistem pemerintahan yang ada di daerah. Pemerintahan yang berada di daerah-daerah diatur dan dipimpin oleh para kepala suku yang mempunyai gelar *penghulu*, *orang kaya*, dan *batin*. Tingkatan ketiga jabatan tersebut sama, hanya saja *penghulu* tidak memiliki tanah ulayat. *Penghulu* memiliki pembantu dalam menjalankan tugasnya, yaitu (1) *sangko penghulu* (wakil penghulu), (2) *malim penghulu* (pembantu urusan agama), dan *lelo penghulu* (pembantu urusan adat). Adapun *batin* dan *orang kaya* adalah orang yang mengepalai suku asli (contoh: *Perbatinan* Sakai). Jabatan ini dimiliki secara turun-temurun. Mereka Memiliki tanah ulayat. Dalam bertugas mereka dibantu oleh (1) *tongkat* (pembantu dalam urusan yang menyangkut kewajiban terhadap sultan), (2) *monti* (pembantu urusan adat), dan *antan-antan* (pembantu yang dapat mewakilkan seorang *tongkat* atau *monti* jika keduanya sedang berhalangan).

Sistem pemerintahan yang dirancang oleh Sultan Abdul Jalil Rakhmat Syah bertahan hingga masa pemerintahan Sultan Syarif

Hasim Abdul Jalil Syarifuddin. Sultan Syarif Hasim Abdul Jalil Syarifuddin mengubah sistem pemerintahan dan merumuskan landasan sistem pemerintahan *monarchy* konstitusional. Sistem pemerintahan ini diawali dengan disusunnya dan diberlakukannya Al Qawa'id atau Babul Qawa'id (Konstitusi Tertulis Kesultanan Siak). Perubahan sistem pemerintahan juga terjadi di dalam lembaga kesultanan. Dalam menjalankan pemerintahan sultan dibantu oleh pejabat yang memimpin lembaga kesultanan baik di pusat maupun di daerah, terdiri dari jabatan sebagai berikut:

(1) Dewan Menteri, bertugas memilih dan mengangkat seorang sultan dan membantu sultan merumuskan hukum peraturan dan undang-undang.

(2) Hakim Kerapatan Tinggi, bertugas dalam setiap pengadilan umum dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat Siak.

(3) Hakim Polisi Kepala Pemerintahan, dalam tingkat Provinsi sebagai wakil sultan.

(4) Hakim Syariah, ada dua, yaitu kadi Siak dan imam jajahan. Kadi Siak bertugas menangani pengadilan tentang harta pusaka dan warisan serta dalam masalah hukum adat, sedang imam jajahan bertugas sebagai pembantu Kadi Siak

Tingkatan pemerintahan paling bawah bertugas sebagai pemimpin pemerintahan dan mengatur kehidupan bermasyarakat, beragama, dan bernegara di dalam suku-suku masing-masing. Hakim Kepala Suku berada di bawah naungan Hakim Polisi. Sistem pemerintahan ini sempat diubah oleh Belanda. Sultan memerintah tanpa didampingi oleh Dewan Menteri karena dewan tersebut dihapus dan wilayah Kesultanan Siak dipersempit, yang awalnya memiliki 10 provinsi menjadi hanya lima distrik.

Sistem pemerintahan di atas bertahan hingga pemerintahan Sultan Syarif Kasim Sani Abdul Jalil Syarifuddin, atau yang dikenal juga sebagai Sultan Kasim II, yang mengumumkan bahwa Kesultanan Siak Sri Indrapura menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1946.

3. Ekspansi di Sumatera Timur

Sejak menjadi raja Siak Tengku Buwang bergelar Sultan Mahmud Abdul Jalil Syah. Untuk mengakhiri perselisihan dengan saudara kandungnya ia mengangkat anak Tengku Alamuddin sebagai panglima. Empat tahun kemudian pusat pemerintahan dipindahkannya ke Mempura, yang terletak lebih ke pedalaman.

Kesultanan Siak mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, yang ditunjang kegiatan perdagangan internasional di Selat Malaka, dan pada gilirannya memajukan perekonomian di sekitar Sungai Siak. Sungai tersebut merupakan sungai terdalam se-Nusantara pada zaman kesultanan. Dengan kedalaman hingga 30 m, kapal-

kapal besar dapat berlalu sehingga memudahkan laju distribusi barang dari Selat Malaka ke pedalaman atau sebaliknya. Akan tetapi kondisinya sekarang mengalami pendangkalan hingga kedalaman hanya sekitar 18 m.

Sementara itu Kompeni juga mengukuhkan pengaruhnya di negeri-negeri Melayu Sumatera. Pada tahun 1752 M Sultan Mahmud Abdul Jalil Syah menjalin hubungan dengan Belanda dengan mengizinkan mendirikan benteng di sekitar Pulau Guntung. Namun akhirnya Kompeni merusak perekonomian Sungai Siak dengan monopoli, bahkan berani memungut pajak dari para pedagang yang melintasi perairan Siak.

Satu bulan lamanya Sultan Mahmud Abdul Jalil Syah menggempur benteng Kompeni di Pulau Guntung. Upayanya menemui kendala karena persenjataan Belanda jauh lebih unggul. Kesepakatan damai akhirnya disetujui antara kedua belah pihak pada tahun 1760 M. Hingga ujung pemerintahannya Sultan Mahmud Abdul Jalil Syah tidak mampu mengusir Belanda dari wilayah Siak, namun ia mewariskan semangat perlawanan kepada anaknya, Tengku Ismail. Sosok yang kemudian menjadi raja Siak ini diingatkan agar tidak pernah memancing timbulnya perang saudara dan setia berjuang melawan penjajahan Belanda. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1760 M Tengku Ismail naik takhta dengan gelar Sultan Ismail Abdul Jalil Syah. Kompeni Belanda tidak menyukai raja baru itu dan karenanya mencampuri urusan internal Siak. Belanda memperalat Tengku Alamuddin yang berkeinginan merebut takhta Siak dari keponakannya, Sultan Ismail.

Peran Sungai Siak sebagai bagian kawasan inti kerajaan berpengaruh besar terhadap kemajuan perekonomian Siak Sri Inderapura. Sungai Siak menjadi tempat pengumpulan berbagai barang dagangan, mulai kapur barus, benzoar, timah, hingga emas. Sementara itu pada saat bersamaan rakyat Siak juga menjadi eksportir kayu utama di Selat Malaka serta menjadi salah satu kawasan industri kayu untuk pembuatan kapal dan bangunan. Pada tahun 1775 M Belanda mengizinkan kapal-kapal Siak mendapat akses langsung pada sumber beras dan garam di Pulau Jawa tanpa harus membayar kompensasi kepada VOC, namun dengan syarat Belanda diberi akses langsung pada sumber kayu di Siak, yang mereka sebut sebagai kawasan "hutan hujan yang tidak berujung".

Bila rencana penggulingan kekuasaan berhasil, Belanda kembali dapat mendirikan benteng di Pulau Guntung. Rencana itu memang berhasil. Sultan Ismail memilih menyerah terhadap pamannya demi menghindari perang saudara. Ia pun pergi ke Pelalawan dan kemudian Langkat. Setibanya di Siantan, Sultan Ismail menggalang dukungan dari orang-orang laut sehingga dapat mengendalikan perdagangan timah di Bangka. Sultan Ismail berhasil merebut kembali takhta dari Tengku Alamuddin pada tahun 1779 M.

Kesultanan Siak Sri Inderapura mengambil keuntungan atas pengawasan perdagangan melalui Selat Melaka serta kemampuan mengendalikan para perompak di kawasan tersebut. Kemajuan perekonomian Siak terlihat dari catatan Belanda yang menyebutkan bahwa pada tahun 1783 M ada sekitar 171 kapal dagang dari Siak menuju Malaka (Effendy and Effendy, 1973). Siak menjadi kawasan segitiga perdagangan antara Belanda di Malaka, Inggris di Pulau Pinang, dan Siak. Di sisi lain kejayaan Siak menimbulkan kecemburuan pada keturunan Yang Dipertuan Muda, terutama setelah kehilangan kekuasaan atas kawasan Kepulauan Riau. Sikap ketidaksukaan dan permusuhan terhadap Sultan Siak terbaca dalam *Tuhfat al-Nafis* yang diuraikan dalam cerita yang menggambarkan Sultan Siak sebagai "orang yang rakus akan kekayaan dunia" (Effendy and Effendy, 1973).

Pemerintahan Sultan Ismail hanya berjalan selama dua tahun. Takhta Siak diberikan kepada putranya, Yahya Abdul Jalil Muzzafar Syah. Sultan Yahya memindahkan ibukota ke Mempura. Intrik politik kembali terjadi untuk menjatuhkan kekuasaan Sultan Yahya. Akibatnya Raja Siak itu sakit keras dan meninggal pada tahun 1784 M. Tampuk Kesultanan Siak jatuh pada Tengku Udo alias Syarif Ali. Pada masa inilah berlangsung perubahan nama kerajaan menjadi Kesultanan Siak Sri Inderapura. Ia juga mendirikan istana di Koto Tinggi, memperkuat militer, dan berupaya menyatukan raja-raja Melayu di pesisir timur Pulau Sumatera. Sebanyak 12 negeri berhasil disatukan dalam satu persekutuan.

Dominasi Kesultanan Siak terhadap wilayah pesisir pantai timur Sumatera dan Semenanjung Malaya sangat nyata dan berhasil menggantikan pengaruh Johor atas penguasaan jalur perdagangan. Selain itu Kesultanan Siak juga menjadi pemegang kunci ke dataran tinggi Minangkabau melalui tiga sungai utama, yaitu Siak, Kampar, dan Kuantan, yang sebelumnya menjadi kunci bagi kejayaan Malaka. Namun demikian kemajuan perekonomian Siak memudar seiring dengan munculnya gejolak di pedalaman Minangkabau yang dikenal dengan Perang Padri (Dobbin, 1977).

Pada abad ke-18 M Kesultanan Siak menjadi kekuatan utama di pesisir timur Sumatera. Pada tahun 1780 M Kesultanan Siak menaklukkan Langkat dan menjadikan wilayah tersebut dalam pengawasannya, termasuk Deli dan Serdang (Alfian, Pelly, dan Ratna, 1986; Sinar, 1980). Di bawah ikatan perjanjian kerja sama dengan VOC pada tahun 1784 M Kesultanan Siak membantu VOC menyerang dan menundukkan Selangor. Sebelumnya mereka bekerja sama memadamkan pemberontakan Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat.

Orang-orang Melayu kemudian ikut berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perdagangan di Melayu sudah melalui perjalanan panjang dengan dimulai dari Melaka hingga akhirnya sampai ke

Siak. Pada awalnya di wilayah Siak terdapat syahbandar-syahbandar yang bertugas memungut cukai untuk kapal yang disebut sebagai "tebusan wang kapal". Pada masa itu upeti tersebut diberikan kepada kesultanan yang berkuasa, yaitu Kesultanan Melaka.

Setelah Siak menjadi kesultanan pada masa pemerintahan Sultan Alamuddin Sayah, pusat pemerintahan dipindahkan ke Senapelan. Pemindahan pusat pemerintahan dimaksudkan untuk membuka pusat perdagangan baru yang lebih dekat dengan daerah-daerah penghasil barang dagangan. Oleh karena itu kemudian dibuka pekan di bandar Senapelan yang disebut Bandar Pekan, yang akhirnya berubah lagi menjadi Pekanbaru.

Pemindahan pusat pemerintahan dan perluasan pusat perdagangan tersebut membuka lebar jalur perdagangan antara Senapelan dan daerah-daerah penghasil lada, gambir, dan hasil hutan lainnya. Perdagangan yang telah dirintis sebelumnya juga dikembangkan dan dipelihara. Selain itu daerah-daerah taklukan wajib membayar upeti kepada Siak. Langkah lain yang dilakukan dalam proses pengurusan upeti dagang adalah dengan cara mengangkat saudara-saudara sultan menjadi penguasa di daerah yang telah ditaklukkan.

4. Di Bawah Kekuasaan Belanda

Sepanjang abad ke-18 M Kesultanan Siak menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh di perairan Selat Malaka. Sejak tahun 1780 M kerajaan itu berhasil menaklukkan Langkat, Deli, dan Serdang. Meskipun demikian campur tangan Belanda berimbas besar pada goncangan politik di lingkungan istana. Kadangkala raja-raja setempat mesti berkompromi agar tetap berhasil mengonsolidasikan eksistensi negerinya.

Siak menganggap Belanda sebagai sekutu untuk menaklukkan beberapa daerah. Sebagai contoh, pada tahun 1784 M kesultanan ini menjalin kerja sama dengan Kompeni agar dapat menundukkan Selangor dan pemberontakan Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat. Akan tetapi dampak buruk atas ikatan perjanjian dengan Kompeni dirasakan Siak. Satu per satu wilayah taklukan lepas kendali, semisal Deli, Asahan, Langkat, dan Indragiri. Kompeni bahkan berada di belakang pengukuhan kembali Yang Dipertuan Muda di Pulau Penyengat serta membantu pembentukan Kesultanan Lingga.

Khairiah, dalam *Menelusuri Jejak Arkeologi di Siak* (2014), mengungkapkan kerugian yang diderita Kesultanan Siak akibat politik Belanda di Sumatera. Wilayah kerajaan Islam ini menjadi kian menyempit, terutama setelah Belanda mendirikan Residentie Riouw di Tanjung Pinang. Ketika pada 1840 Melaka jatuh ke tangan Inggris, Sultan Siak terpaksa membuat kesepakatan. Sejak tanggal 1 Februari 1858, berdasarkan perjanjian yang mengikat,

Belanda menganggap Kesultanan Siak sebagai bagian dari Hindia Belanda. Dengan demikian para Sultan Siak kemudian kehilangan kedaulatan. Kesultanan itu dilarang membuat kesepakatan dengan bangsa-bangsa asing tanpa persetujuan Belanda. Belanda juga mendirikan pos militer di Bengkalis untuk mengawasi para pemimpin Siak dan keluarga mereka. Perjanjian 26 Juli 1873 memaksa Kesultanan Siak harus menyerahkan wilayah Bengkalis kepada Residen Belanda di Riau.

Perluasan kolonialisasi Belanda di kawasan timur Pulau Sumatera tidak berhasil dihadang Kesultanan Siak, dimulai dengan lepasnya Kesultanan Deli, Kesultanan Asahan, Kesultanan Langkat, dan kemudian muncul Inderagiri sebagai kekuasaan mandiri (Bustamam, 2003). Begitu juga Johor. Seorang sultan keturunan Tumenggung Johor kembali menduduki takhta dalam perlindungan Inggris di Singapura. Sementara itu Belanda memulihkan kedudukan Yang Dipertuan Muda di Pulau Penyengat dan mendirikan Kesultanan Lingga. Selain itu Belanda juga mempersempit wilayah kedaulatan Siak dengan mendirikan *Residentie Riouw* yang merupakan bagian dari pemerintahan Hindia Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang (Barnard, 2003; Effendy and Effendy, 1973).

Penguasaan Inggris atas Selat Melaka mendorong Sultan Siak pada tahun 1840 M menerima tawaran perjanjian baru mengganti perjanjian yang telah dibuat pada tahun 1819 M. Perjanjian itu mempersempit wilayah Kesultanan Siak dan Kesultanan Siak terjepit di antara wilayah kerajaan kecil lain yang mendapat perlindungan dari Inggris. Demikian juga Belanda menjadikan Siak sebagai salah satu bagian pemerintahan Hindia Belanda setelah memaksa Sultan Siak menandatangani perjanjian pada 1 Februari 1858 (Husny, 1978). Dari perjanjian tersebut Siak kehilangan kedaulatannya, setiap pengangkatan raja baru mesti mendapat persetujuan Belanda. Belanda mendirikan pos militer di Bengkalis untuk pengawasan. Luas wilayah kekuasaan Kesultanan Siak mengalami penyusutan wilayah luar biasa pada tahun 1858 M akibat penandatanganan Traktat Siak. Perjanjian itu diwakili dua orang, yaitu Residen Riau J.F. Niewenhuyzen dan Sultan Syarif Ismail Abdul Jalil Syarifuddin, yang berisi (1) Belanda mengakui hak otonomi Siak atas daerah Siak asli dan (2) Siak menyerahkan daerah jajahan Deli, Serdang, Langkat, dan Asahan kepada pemerintah kolonial Belanda.

Perubahan peta politik atas penguasaan jalur Selat Malaka, adanya pertikaian internal, serta persaingan dengan Inggris dan Belanda melemahkan pengaruh Kesultanan Siak atas wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya. Tarik ulur kepentingan kekuatan asing terlihat pada Perjanjian Sumatera antara pihak Inggris dan Belanda, yang menjadikan Siak berada pada keadaan dilematis dan berada dalam posisi tawar lemah (Djoko Damono, Kusumawijaya, dan Noszlopy, 2007). Berdasarkan perjanjian 26 Juli 1873 pemerintah Hindia Belanda memaksa Sultan Siak menyerahkan wilayah Bengkalis kepada Residen Riau (Effendy

and Effendy, 1973). Meskipun demikian Kesultanan Siak masih bertahan sampai kemerdekaan Indonesia, walau pada masa pendudukan Jepang sebagian besar kekuatan militer Kesultanan Siak sudah tidak berarti lagi (Safwan, 2014).

5. Dinamika Islam

Ajaran Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam tradisi yang berlaku di dataran Melayu, khususnya di Kerajaan Siak. Masuknya Islam di Kerajaan Siak merupakan campur tangan sultan, terutama dalam masalah keagamaan. Dalam kesultanan Melayu sultan berfungsi sebagai pemimpin di ranah politik sekaligus mengembangkan ajaran Islam di wilayah kekuasaannya. Sebagaimana tertulis dalam *Tajussalatin*, raja harus mengikuti hukum Allah dan hukum Rasul (Luthfi, 1991: 129–130). Di Kerajaan Siak, sultan yang berperan dalam pengembangan Islam adalah Sultan Said Syarif Ali (1784–1810 M). Ayahnya, Said Syarif Usman, berasal dari Arab dan menikah dengan anak Sultan Siak ketiga Sultan Alamuddin, Tengku Embung Badariyah. Perkawinan antara Syarif Usman dan pihak keluarga sultan mendorong Islam berkembang di Siak. Bagi orang Minangkabau, istilah Siak bahkan dikaitkan dengan orang yang memiliki pengetahuan tentang Islam dan menjalankan ajarannya.

Sultan Siak, sebagaiman sultan di dunia Melayu, dianggap sebagai "bayangan Allah di muka bumi". Sebagai penguasa wilayah dan pemuka agama tertinggi, Sultan Siak bertugas mengatur masalah keagamaan dan melaksanakannya di masyarakat. Sultan, jika tidak terlalu mendalami masalah keagamaan, dapat membentuk lembaga keagamaan. Lembaga ini yang kemudian bertindak sebagai pengatur dan pembuat kebijakan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan Islam atas nama sultan. Lembaga yang menaungi masalah agama di Siak disebut *kadhi* dan *imam*. Kadhi bertugas di wilayah ibukota pemerintahan, sedangkan imam bertugas di daerah dan biasa disebut sebagai "imam jajahan". Para imam jajahan dikepalai oleh seorang "kepala imam jajahan" atau disebut juga "imam jajahan daerah Siak Inderapura". Selain menangani masalah keagamaan, kadhi dan imam memiliki kekuasaan yudikatif dalam hukum yang berkaitan dengan agama Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya, segala keputusan imam jajahan yang dapat dibanding tidak dimintakan banding kepada kepala imam jajahan, tetapi kepada kadhi sultan di Siak.

Selain menangani masalah agama Sultan Siak juga berfungsi sebagai wali. Dalam ajaran Islam, wali berperan sebagai sebuah lembaga yang mengatur masalah pemberian kuasa dalam melaksanakan tindakan hukum untuk kepentingan orang-orang yang berada di bawah perwalian. Sultan Siak juga berhak mengurus kepentingan anak-anak di bawah umur selama mereka tidak memiliki wali. Sultan juga menangani para wanita yang akan melaksanakan pernikahan tetapi tidak memiliki wali. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahzab

Syafii, bahwa setiap perempuan yang akan melakukan pernikahan harus memiliki wali. Apabila perempuan itu tidak memiliki wali, maka sultan bisa bertindak sebagai wali perempuan tersebut (Luthfi, 1991: 131–132).

Simbol agama Kerajaan Siak juga terdapat dalam lambang kerajaan, terdiri atas dua kata yang bertaut dengan nama Nabi Muhammad, ditulis dengan aksara Arab Melayu. Nama nabi berada dalam sebuah lingkaran bulan sabit dengan posisi bintang di tengah sebagai tempat penyangga lambang tersebut. Posisi nama Nabi Muhammad yang bertindihan atau bertangkup kemudian disebut "Muhammad Bertangkup". Di atas Muhammad Bertangkup diletakkan mahkota Kesultanan Siak. Di bagian bawah terdapat kalimat berbunyi *Al-Mustanjid bi-Allah*, yang berarti "yang meminta pertolongan Allah". Kalimat ini menjadi lambang bahwa Islam merupakan acuan atau dasar kerajaan tersebut.

Pelaksanaan hukum dan adat bagi orang Melayu merupakan suatu keharusan dan wajib dilaksanakan. Dalam pandangan orang Melayu, yang dimaksud dengan istilah hukum identik dengan hukum Islam berdasarkan Alquran. Kepercayaan ini tertuang dalam pepatah Melay sebagai berikut:

> Adat bersendi hukum,
>
> Hukum bersendi Kitabullah,
>
> Kuat adat, tak gadoh hukum,
>
> Kuat hukum, tak gadoh adat,
>
> Ibu hukum mufakat,
>
> Ibu adat mufakat (Luthfi, 1991: 134).

Dalam pandangan ini segala aturan yang berlaku selain hukum Islam disebut dengan adat. Hanya aturan yang berdasarkan Alquran saja yang bisa disebut dengan hukum. Di lain pihak antara hukum dan adat tidak boleh terjadi pertentangan. Orang Melayu memandang adat mereka sebagai bagian dari pelaksanaan hukum Islam, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Masyarakat Melayu cenderung menganggap adat sebagai sarana melaksanakan ketentuan berdasarkan hukum Islam.

Tradisi hukum yang dipengaruhi oleh landasan agama Islam di Kesultanan Siak tampak lewat pelaksanaan zakat. Sultan selaku pemegang kekuasaan sekaligus pemimpin tertinggi bidang agama juga berperan sebagai wadah dalam menampung dan mengendalikan seluruh dana yang berasal dari lembaga keagamaan di Siak. Dapat dikatakan bahwa sultan pemegang dan penguasa dari kekayaan Baitul Mal, sebuah lembaga keagamaan yang menghimpun perbendaharaan yang berasal dari dana keagamaan, seperti zakat dan dana-dana lain yang tujuannya

untuk membiayai kegiatan-kegiatan keagamaan. Sultan pun berhak memilih orang-orang yang mengurus lembaga tersebut sebagaimana dinyatakan Kadhi Sultan Siak dalam suratnya nomor 223/19 tanggal 10 Juni 1936 yang ditujukan kepada Sultan Siak:

> ...Adapun kekuasaan amil zakat itu adalah sultan. Siapa-siapa yang diangkat oleh Sri Paduka yang Maha Mulia Tuanku Sultan jadi amil, mestilah hak baginya menerima zakat serta membahagikan kepada mustahaknya. Tambahan pula, menurut adat-istiadat Kerajaan Siak yang telah turun-menurutn, orang-orang yang menjadi amil zakat ialah kadhi atau imam-imam atau khatib-khatib yang di dalam lingkungan wilayah Kerajaan Siak (Luthfi 1991: 134).

Pengelolaan sumber dana keagamaan diatur secara ketat oleh Sultan Siak dan berlaku sebagai hukum kerajaan. Sultan pun turut memberi ketentuan kepada para pemimpin daerah yang berada di wilayah kerajaannya untuk menerapkan aturan tersebut. Ketentuan-ketentuan yang diatur sultan sebagai berikut:

> Kita ta'rifkan kepada wakil kita, hendaklah wakil kita ingat akan memperhatikan hamba raajat kita jang engkar kepada hoekoem Allah dan hoekoemkan, tetapi nasihatkan terlebih dahoeloe dan kepada raajat hendaklah dipertahoekan, kemoedian djika engkar djoega mereka itoe hendaklah dihoekoemkan, seperti jang teratoer di bawah ini:
>
> (1) Dihoekoem seorang jang tiada mahoe menjerahkan zakatnja sekali-kali kepada 'amel dan diserahkannja kepada moestahak jang lain dengan tiada seidzin 'amel, dengan hoekoem ta'zir jang pertengahan diserahkan kepada Kerapatan Onderdistrict.
>
> (2) Dihoekoem seorang jang tiada menjerahkan sebahagian zakatnja kepada 'amel dan sebahagiannja diserahkannja kepada moestahak jang lain dengan tiada seidzin 'amel dengan hoekoeman ta'zir ringan diserahkan kepada Kerapatan Onderdistrict.
>
> (3) Dihoekoem seorang jang melarikan zakatnja kelain tempat dengan tiada seidzin 'amel dengan hoekoem ta'zir jang berat diserahkan kepada Kerapatan District.
>
> (4) Dihoekoem seorang jang engkar menjerahkan zakatnja kepada 'amel sekali-sekali dengan hoekoeman ta'zir jang berat diserahkan kepada Kerapatan District.

(5) Dihoekoem seorang jang menjemboenjikan zakatnja jang telah wadjib atas dengan hoekoeman ta'zir jang berat diserahkan kepada Kerapatan District.

(6) Dihoekoem seorang jang engkar tiada mahoe sekali-sekali berzakat dengan hoekoeman had boleh diboenoeh dan dirampas sebanjak zakatnya diserahkan kepada Kerapatan Tinggi.

(7) Dihoekoem seorang jang tiada mahoe sekali-sekali menerangkan bahagian poesaka kepada Hakim Sjari'at dengan hoekoeman ta'zir jang berat diserahkan kepada Kerapatan Tinggi karena ada padanja doea kesalahan pertama salah kepada Allah kedoea salah kepada Amir.

(8) Dihoekoem seorang jang berbahagi poesaka dengan djalan berdamai serta tida diterangkannja kepada Hakim Sjari'at dengan hoekoeman ta'zir ringan diserahkan kepada Kerapatan District karena kesalahan melanggar Amir (Luthfi, 1991: 136–138).

Selain sebagai penguasa dan pemuka agama tertinggi di wilayah Kerajaan Siak, rakyat juga menganggap sultan sebagai pelindung dalam segala sepek kehidupan. Segala keputusan yang sudah ditentukan sultan harus dipatuhi dan dilaksanakan rakyat. Dalam tradisi Melayu membantah sultan berarti dosa besar dan dilarang bagi siapa pun. Mereka beranggapan bahwa ketika rakyat berada dalam kuasa kerajaan, maka rakyat harus terbuka untuk segera menyampaikan masalah-masalah kepada sultan. Pengaduan masyarakat kebanyakan berupa permintaan untuk menegur kepala agama di daerah masing-masing, bahkan kalau perlu diganti. Seperti masalah zakat yang sudah disebut di atas, sultan juga berhak menanggapi masalah sosial lain, seperti perbuatan zina dan menyuruh pelaku tersebut untuk segera mengawinkan sang perempuan.

Sultan juga melakukan kontrol perkembangan agama di daerah kekuasaan kerajaan. Ia berhak mengeluarkan izin terhadap guru atau ulama mengajarkan agama. Salah satu contoh kasus yang ditangani sultan yakni ketika ia memberi izin kepada Haji Muhammad Nasruddin untuk mengajarkan tarikat Naqsabandiyah di wilayah Siak. Dari sana sultan dapat mengetahui apakah perkembangan ajaran ini menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum Islam yang sudah berlaku di wilayah tersebut. Demikian pun para ulama. Mereka di bawah pengawasan sultan. Seperti disebutkan di atas, kekuasaan sultan berhak mengawasi dan menindak orang-orang yang menyebarkan ajaran agama Islam baru. Ulama lebih berperan pada tugas yang sifatnya hanya rutin ataupun seremonial.

Akibat kebijakan ini perkembangan agama di wilayah Siak menjadi lebih lambat, karena ajaran dan gerakan pembaruan Islam sangat sulit masuk. Sultan harus mempertimbangkan terlebih dahulu apabila ada seseorang pemuka agama yang ingin menyebarkan ajaran agama di wilayahnya. Sistem yang mengatur kehidupan beragama menyebabkan tidak ada ulama besar di wilayah tersebut. Peran ulama sudah cukup dianggap sebagai orang yang melaksanakan ketentuan dan perintah sultan. Di sisi lain tradisi Siak juga dipengaruhi oleh keberadaan ulama yang berada di lingkaran terdekat sultan.

6. Syarif Kasim II dan Kemerdekaan Indonesia

Bertolak belakang dengan abad ke-18 M, Kesultanan Siak mengalami penurunan pengaruh sepanjang abad ke-19 M. Wilayah-wilayah yang dahulu dikendalikan, satu per satu lepas dan menjadi negeri yang mandiri. Hal itu terutama karena kuatnya pengaruh Belanda dan Inggris di sekitar Selat Malaka. Belanda berambisi menguasai seluruh Nusantara, sehingga membuat kerajaan-kerajaan sebagai bawahan.

Bagaimanapun, Kesultanan Siak bertahan sampai abad ke-20 M. Pada kurun waktu ini tumbuh kesadaran nasionalisme di tengah masyarakat, khususnya kaum terpelajar. Di lingkungan istana Siak pun sudah tumbuh kesadaran pentingnya pendidikan. Memang, pada umumnya orang Siak gemar merantau, termasuk dalam soal mencari ilmu pengetahuan. Sejak awal abad ke-20 tidak sedikit anak-anak bangsawan yang menempuh pendidikan berhaluan Barat tanpa meninggalkan ilmu-ilmu agama. Sebagai contoh Tengku Sulong Sayid Qasim, yang kelak menjadi raja Siak terakhir, belajar agama Islam di Siak dan Batavia, terutama kepada Sayyid Husein al-Aidit. Ia juga mengikuti saran pemerintah kolonial sehingga menerima pengajaran hukum dan tata negara modern dari orientalis Snouck Hurgronje. Dengan keluasan pemikiran, sultan Siak tidak menganggap perbedaan pergerakan nasionalisme dengan perjuangan menegakkan kedaulatan di negeri sendiri. Oleh karena itu ketika berkuasa Tengku Sulong tidak ragu menegaskan peleburan kerajaannya ke dalam bingkai Republik Indonesia, bahkan ia ikut menyumbang harta dalam jumlah besar kepada negara yang baru lahir itu.

Sedari masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Sultan Syarif Kasim II sudah menempatkan diri sebagai penentang kaum penjajah. Lahir di Siak Sri Inderapura, Riau, pada 1 Desember 1893, ia memperlihatkan perlawanan terhadap Belanda dengan cara yang elegan dan cerdas. Sultan Syarif Kasim II sadar bahwa melawan Belanda lewat fisik atau menentang dengan frontal sama saja bunuh diri. Apalagi Kesultanan Siak Sri Inderapura masih terikat perjanjian yang ditanda tangani pendahulunya pada masa lampau.

Jauh sebelumnya, Sultan Said Ismail (1827–1864 M), kakek buyut Sultan Syarif Kasim II, terpaksa menandatangani Traktat Siak yang isinya sangat menguntungkan Belanda (Djoko Damono, Kusumawijaya, dan Noszlopy, 2007). Traktat Siak merupakan konsekuensi yang dilakukan Sultan Said Ismail karena meminta bantuan Belanda mengusir Inggris pada pertengahan abad ke-19. Terbelenggu oleh Traktat Siak tidak lantas membuat Sultan Syarif Kasim II, yang bertakhta sejak tanggal 3 Maret 1915, takluk sepenuhnya kepada bangsa kolonial. Sebaliknya, ia dengan cerdik memaksimalkan perannya agar rakyat Siak Sri Inderapura tidak tertinggal jauh dalam menyongsong zaman modern pada masa pergerakan nasional itu. Ia memang sosok yang berpikiran modern. Sejak usia belia, tepatnya tahun 1904, ia dikirim ke Batavia untuk memperdalam ilmu hukum agama dan ilmu pemerintahan. Ia salah satu murid Profesor Snouck Hurgronje, orientalis yang menjadi penasihat pemerintah kolonial. Oleh karena itu setelah dinobatkan menjadi sultan ia menggalakkan pembangunan di wilayahnya. Ia juga berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia rakyat Siak Sri Inderapura melalui pendidikan demi mengejar ketertinggalan dari orang-orang Belanda.

Sultan Syarif Kasim II mendirikan sekolah dasar untuk mengimbangi Hollandsche Inlandsche School (HIS) milik Belanda yang hanya menerima murid dari kalangan tertentu. Ia ingin agar seluruh anak dari berbagai lapisan masyarakat bisa mengenyam pendidikan yang baik. Sekolah dasar pertama di Riau itu menggunakan kurikulum yang memadukan unsur agama (Islam) dan nasionalisme, termasuk mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan umum. Maka berdirilah Madrasah Taufiqiyah al Hasyimiah pada tahun 1917 (Samin, 2002).

Di samping itu permaisuri, Sarifah Latifah, mendirikan sekolah khusus untuk perempuan pertama di Riau (Wilaela, 2015). Sekolah yang bernama Latifah School tersebut diresmikan pada tahun 1926. Sayangnya Sarifah Latifah keburu meninggal. Perjuangannya dilanjutkan oleh permaisuri kedua, Tengku Maharatu. Selain mengelola Latifah School, ia juga mendirikan asrama putri, taman kanak-kanak, serta menggagas sekolah perempuan lain bernama Madrasyahtul Nisak (Djoko Damono, Kusumawijaya, dan Noszlopy, 2007).

Secara diam-diam Sultan Syarif Kasim II terus menentang Belanda. Salah satu di antaranya memberi dukungan kepada "pemberontakan" Si Koyan pada tahun 1931 yang dilancarkan oleh mereka yang tidak sudi dijadikan pekerja paksa (Tenas & Nahar Efendi, 1972: 53). Bantuan dana juga diberikan secara *klandestin* oleh Sultan Syarif Kasim II untuk memperkuat benteng-benteng pertahanan rakyat, memberi sarana pelatihan kemiliteran kepada kaum pemuda, hingga menentang kebijakan romusha oleh pemerintahan pendudukan Jepang pada 1942.

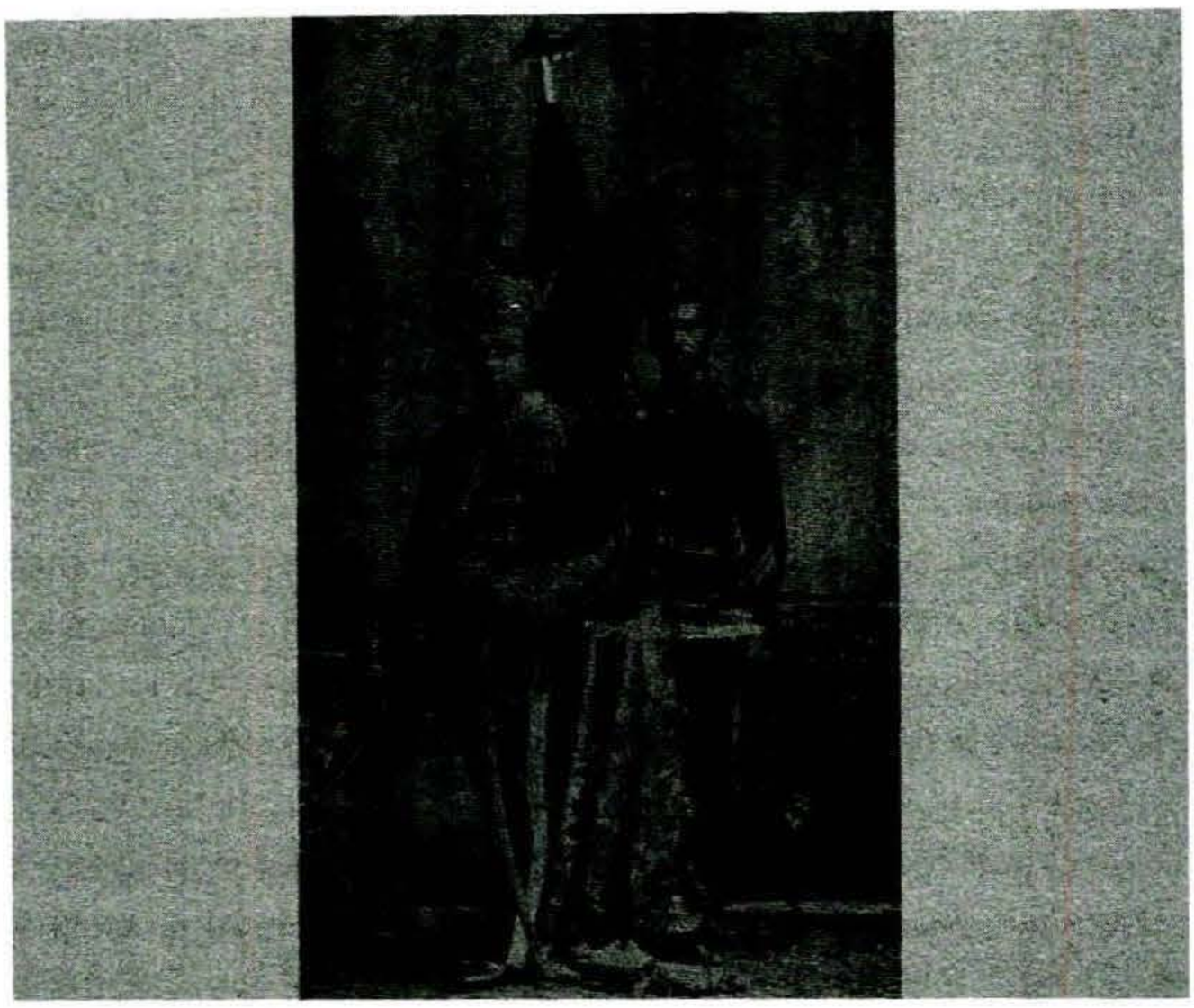

Sultan Syarif Kasim II
Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Beberapa pekan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Sultan Syarif Kasim II mengirim kawat kepada Presiden Sukarno. Kawat tertanggal 28 November 1945 itu menyatakan bahwa Kesultanan Siak Sri Inderapura berdiri teguh di belakang Republik Indonesia. Mardanas Safwan, dalam *Sultan Syarif Kasim II: Riwayat Hidup dan Perjuangannya 1893–1968* (2014), menyebutkan kawat tersebut dikirim bersama dengan kesediaan sultan menyumbangkan uang sebesar 13 juta gulden untuk mendukung berdirinya republik. Ia melakukannya tanpa pamrih demi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebulan sebelumnya, Oktober 1945, Sultan Syarif Kasim II memprakarsai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Barisan Pemuda Republik di Siak Sri Inderapura (Riau). Pembentukan badan-badan perjuangan itu disertai rapat umum yang digelar di lapangan istana dengan mengibarkan bendera Merah Putih. Dalam rapat besar itu, Sultan Syarif Kasim II bersama segenap rakyat Siak Sri Inderapura dan tokoh-tokoh Riau mengucapkan ikrar setia untuk mempertahankan kemerdekaan RI sampai titik darah penghabisan (GN-PPNK, 2006: 3). Keputusan tersebut ternyata membuat Belanda, yang datang kembali ke Indonesia bersama pasukan Sekutu tak lama setelah kemerdekaan Indonesia, berang dan melayangkan ancaman terhadap sang sultan.

Karena ancaman itu Sultan Syarif Kasim II terpaksa diungsikan ke Aceh. Sebelum pergi, sultan menyerahkan istana beserta nyaris seluruh kekayaan Kesultanan Siak Sri Inderapura, termasuk mahkota raja, kepada pemerintah RI. Di Serambi Mekah, Sultan Syarif Kasim II bergabung dengan kaum pejuang dan dipercaya sebagai penasihat pemerintah Karesidenan Aceh. Sultan tetap menyuarakan dukungannya terhadap RI dari Aceh, termasuk dengan membujuk raja-raja di kawasan Sumatera untuk berpihak kepada republik.

(Endnotes)

1 *Kacu*, secara literal, berarti campuran yang terdiri atas berbagai kelompok masyarakat di kawasan timur Sumatera. Istilah ini digunakan oleh Raja Kecik sebagai alat pemersatu. Ia berupaya membangun jati diri baru dengan memperkenalkan jargon "Kita orang Melayu, tetapi kita juga orang *kacukan*", sebagaimana tertuang dalam *Hikayat Hang Tuah*.

2 Kaum pelaut pada saat itu memiliki status sosial yang kuat karena dianggap sebagai pemberani yang mampu menaklukkan lautan. Salah satu contohnya orang-orang dari Bugis yang disegani karena sering menjelajahi lautan.

Penutup

Rentang waktu selama 1400 tahun (Seribu Empat Ratus tahun) dari abad ke 7 sampai dengan awal abad ke-20, bukanlah suatu masa yang singkat. Sepanjang waktu 14 abad lamanya berbagai kerajaan Nusantara yang muncul, jatuh-bangun silih berganti Di Pulau Sumatera. Kerajaan-kerajaan tersebut pada dasarnya adalah negara negara berdaulat yang memiliki hak teritorial yang dijaga dan dipertahankan. Mereka memiliki rakyat, struktur kekuasaan dan sistem pemerintahan yang terstruktur, memiliki sumber daya alam, potensi sosial-ekonomi, kebudayaan, sistem kepercayaan, dan banyak lagi. Karena itulah tidak mengherankan jika sepanjang 1400 Tahun lamanya dinamika kerajaan-kerajaan Nusantara tersebut penuh dengan kisah tentang upaya kerajaan-kerajaan tersebut bangkit dan mempertahankan diri demi menjaga eksistensi dan keberlangsungan hidupnya dalam sejarah. Sepanjang tujuh abad pertama dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-14 ada tiga Kerajaan Nusantara yang berdiri di Sumatera sekitar abad ke-7 MU LAI YOU, SRIWIJAYA DAN PAINAN: Kerajaan Mu Lai You, lokasi tempat berdirinya oleh para arkeolog disebut berada di tepi Sungai Batang Hari di hilir, para arkeolog menyebut bahwa lokasinya berada di tepian sungai Batang Hari hilir yang letaknya di wilayah Jambi. Walau disebut berdiri seiring dengan berdirinya kerajaan Sriwijaya, namun, oleh para arkeolog disepakati bahwa sesungguhnya kerajaan Mu Lai You sudah berdiri lebih awal dibanding dengan kerajaan Sriwijaya. Hal ini diketahui dari berbagai sumber yang menyebutkan bahwa kerajaan Mu Lai You kemudian hilang dari pemberitaan dan catatan setelah muncul dan berkembangnya kerajaan Sriwijaya.

KEDATUAN SRIWIJAYA, yang lebih populer dikenal dengan nama Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan Nusantara yang tumbuh antara dua kerajaan kuno lainnya yakni Kerajaan Kutai kuno dan Taruma Nagara atau sebelum berkembangnya kerajaan Mataram Kuno. Keberadaan kerajaan Sriwijaya tidak dapat disangkal kebesarannya karena bukti-bukti arkeologis dan peninggalan sejarahnya sangat banyak. Karena itu tidak berlebih-lebihan jika dikatakan bahwa Sriwijaya adalah sebuah puncak keberasaran Nusantara sepanjang abad ke-7 sampai dengan awal abad ke-12, selama lebih kurang 6 abad lamanya.

KERAJAAN PAINAN, adalah sebuah kerajaan yang muncul setelah kedatuan Sriwijaya mengalami kemunduran, kerajaan ini terletak di Sumatera Utara sekarang. Sebenarnya tidak banyak informasi yang dapat diperoleh untuk dijadikan dasar dalam mengidentifikasi Kerajaan Painan. Salah satu sumber yang memberitakan tentang PAINAN, hanya menyebut tentang adanya pemberitaan dari Prasasti Tanjore yang dikeluarkan oleh Rajendra I Penguasa Cholamandala di Koromandel, India Selatan. Selepas kejayaan kerajaan Hindu-Budha di pulau Sumatera, era baru pun mewarnai perjalanan sejarah Pulau Sumatera dengan munculnya kerajaan-kerajaan bernuansa Islam. Yang ditandai dengan munculnya Kerajaan Peurlak atau Kerajaan Perlak (840–1292).

Kerajaan Perlak disebut sebagai sebuah kerajaan Islam yang sangat penting di Sumatera pada zamannya. Disebut penting karena sumber-sumber asing yang memberitakan tentang Peurlak sangat banyak. Perlak diketahui pemberitaannya dari berbagai sumber-sumber Cina dan juga diperoleh dari catatan perjalanan Marco Polo ke timur dan menyinggahi Peurlak. Catatan dan pemberitaan tentang PERLAK disebut secara khusus, bahwa Kerajaan Perlak masih memiliki sentuhan langsung dengan era kejayaan kejayaan Sriwijaya. Bahkan disebut bahwa terjadi gesekan antara keduanya PERLAK yang Islam dan SRIWIJAYA bercirikan BUDHA. Ketegangan dan perang antara keduanya yang kemudian berakhir, seiring dengan menyusutnya kekuatan Sriwijaya yang ketika itu dalam persiapan menghadapi ekspansi kerajaan Darmawangsa dari pulau Jawa. Sementara di pihak PEURLAK terjadi pula gesekan intern yang menyebabkan terjadinya konflik. Antara dua pemahaman Islam, antara pengikut Ahlusunnah waljamaah (sunni) dan pengikut Syiah, yang berakhir dengan kemenangan kelompok sunni yang kemudian menabalkan kekuasaan Dinasti Makdum yang disebut sebagai bangasawan asli Perlak (Meurah). Walau demikian gesekan antara kelompok sunni dan syiah tidak langsung padam dan serta merta berakhir. Berbagai upaya damai dilakukan oleh keduanya. Misalnya pada zaman kekuasaan Sultan Makdum Alaiddin Malik, terjadi upaya perdamaian dengan mengangkat keturunan Azisah yang bernama Sayyid Maulana Abdullah menjadi Mangkubumi Kerajaan Peurlak. Namun pengangkatan itu tidak berhasil meredakan konflik antara keduanya, hingga akhirnya terjadi pembagian wilayah kekuasaan dengan cara membagi kerajaan Peurlak menjadi dua daerah kerajaan, yakni Peurlak Pedalaman yang dikuasai oleh penganut Sunni yang diperintah oleh Dinasti Makhdum dan Peurlak Pesisir yang diperintah oleh dinasti Azizah. Pembagian kekuasaan atas wilayah pedalaman dan pesisir ini kemudian berakhir setelah Sriwijaya tahun 986 melakukan penyerangan ke kerajaan Peurlak Pesisir yang menyebabkan wafatnya Sultan Peurlak Pesisir, Alaidin Syech Maulana Mahmud Syah. Peristiwa wafatnya Sultan Peurlak Pesisir ini sangat penting artinya bagi perjalanan sejarah Peurlak kemudian karena dengan wafatnya sultan Peurlak Pesisir maka berakhir pula pembagian wilayah kerajaan Peurlak dan sejak itu seluruh wilayah Peurlak berada di bawah kekuasaan sultan Peurlak Pedalaman yang beraliran Sunni, Sultan Malik Ibrahim Syah Johan Berdaulat. Walau disebut bahwa perang saudara dan serangan Sriwijaya sangat bertubi-tubi menerpa kerajaan Peurlak, tetapi tidak disebut sebagai penyebab utama runtuhnya kerajaan Peurlak. Karena yang sesungguhnya menjadi faktor utama keruntuhan Peurlak ialah karena sultan Peurlak yang terakhir tidak memiliki pewaris. Tiga orang anak yang dimilikinya semua putri (wanita) disebut tidak memiliki hak sebagai pemimpin dalam kerajaan Islam, sehingga akhirnya kerajaan Peurlak menggabungkan diri secara damai menjadi bagian dari kekuasaan kerajaan Pasai, hal ini terjadi karena Sultan Muhammad Malik Al Zahir, Sultan Pasai adalah suami Putri Ganggang Sari salah seorang Putri dari Peurlak. Selain itu disebutkan pula bahwa faktor utama keruntuhan Kerajaan Peurlak adalah karena para pedagang lebih

memilih Pasai yang lebih aman sebagai tempat berusaha karena Pasai dianggap lebih aman dan stabil dibanding Peurlak yang rawan konflik dan tidak adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi para pendatang dan dunia usaha. Selepas keruntuhan Peurlak, Tome Pires menuliskan dalam catatannya tentang tumbuhnya dua kerajaan Islam di Sumatera yang memengang peranan penting yakni Samudra dan Pasai. Keduanya menggabungkan diri menjadi satu kerajaan yang kemudian dikenal dalam sejarah sebagai kerajaan Samudra Pasai, berdiri dari abad ke-13 hingga abad ke-16. Peurlak, Samudra-Pasai, adalah tiga kerajaan Islam Awal di Nusantara yang sangat penting artinya bagi perkembangan sejarah Islam di Nusantara kemudian. Masih bersentuhan dengan Samudra-Pasai, Tome Pires menyebut dalam catatannya tentang sebuah kota yang disebutnya sangat penting di Sumatera, yakni Barusz atau Barus yang oleh orang Gujarat lebih dikenal dengan nama Panchur. Barus sesungguhnya termasuk sebuah kota yang amat tua di Asia. Yang sudah dikenal sejak abad ke-6 masehi karena hasil utama Barus adalah kamper, kemenyan dan emas. Ketiga komoditas ini merupakan daya tarik Barus untuk dikunjungi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Selain itu Barus juga dikenal sebagai penghasil sutra, lilin, tanaman obat, madu dan banyak lagi. Masa kejayaan Barus sangat panjang dan tercatat dalam berbagai sumber, setidaknya dari abad ke-7 sampai dengan di abad ke-17. Walau demikian beberapa sumber mengatakan bahwa sesungguhnya Barus sudah mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-14, seiring dengan merosotnya lalu lintas perdagangan di Pantai Barat Sumatera, yakni dengan munculnya kota-kota dagang yang baru di Pantai Timur Sumatera atau sekitar selat Malaka. Kemunduran seperti ini adalah hal yang biasa dalam sejarah yang sarat dengan kisah-kisah tentang jatuh-bangun, timbul-tenggelamnya kerajaan-kerajaan di Nusantara silih berganti. Perlu juga dicatat di sini bahwa salah satu keistimewaan Barus bukan hanya komoditasnya yang bertaraf internasional atau karena pelabuhan dagangnya yang ramai, lebih dari itu Barus dikenal sebagai pusat kebudayaan Islam nusantara di zamannya. Dari Baruslah karya-karya sastra berupa syair-syair Tasawuf berbahasa Melayu, Arab, Persia berasal dan mengalir ke seluruh penjuru Nusantara ketika itu. Pujangga sufi yang amat masyur namanya hingga kini syekh Hamzah al Fansur bermukim di Barus.

SYAIR HAMZAH FANSURI

Hamzah Fansuri Di Negeri Melayu

Tempat Kapur Di Dalam Kayu

Asalnya Manikam Tiada Layu

Dengan Ilmu Dunia Manakan Payu

Hamzah Syahrun Nawi Terlalu Hapus

Seperti Kayu Sekelian Hangus

Asalnya Laut Tiada Berarus

Menjadi Kapur Di Dalam Barus

Pada abad ke-17 Barus mengalami kemunduran, terutama karena 3 (tiga) hal: Pertama: Pindahnya rute perdagangan ke selat Malaka Dua: Diperkecilnya peran Barus oleh Sultan Iskandar Muda 1607-1637 yang tidak lagi sebagi kota dan bandar dagang utama dan juga tidak lagi menjadi pusat kebudayaan Islam Ketiga: Barus mengalami gempa bumi tsunami yang amat dahsyat hingga menenggelamkan Barus secara fisik, hingga pada akhir abad ke-18 Barus hanya sebuah perkampungan masyarakat pesisir dengan sebuah pasar sederhana yang menjadi tempat aktivitas jual beli nelayan-nelayan kecil. Selepas keruntuhan Barus, pusat-pusat kekuasaan dan perdagangan di Nusantara bertumbuh dengan pesat di berbagai daerah yang pada akhirnya berkembang dan meningkat menjadi kerajaan-kerajaan penting di Nusantara khususnya yang berdiri di Sumatera, era ini dapat disebut sebagai zaman kesultanan-kesultanan Islam Nusantara. Ada 13 (tiga belas) Kerajaan utama yang muncul saling berganti mengambil peran selepas abad ke-16 terutama selepas kejatuhan Malaka dari Portugis tahun 1511. Walau demikian perlu dijelaskan bahwa ke 13 kerajaan dimaksud tidak berarti baru berdiri setelah jatuhnya Malaka. Jauh sebelum Malaka jatuh kerajaan–kerajaan tersebut sudah berdiri dengan peranan yang sangat terbatas. Barulah setelah Malaka jatuh, kerajaan kerajaan tersebut serentak muncul ke atas permukaan sejarah dan membagi habis peran Malaka dalam berbagai kegiatan dan aktivitas. Fase kebangkitan ke 13 kerajaan Nusantara disebut juga sebagai fase kebangkitan kesultanan-kesultanan Islam Nusantara, meliputi Aceh, (Johor, Riau, Pahang dan Lingga), Palembang, Jambi, Pagaruyung, Indrapura, Deli, Serdang, Pelalawan, Indragiri, dan Siak. Seperti yang dikatakan juga oleh William Masden dalam bukunya *History of Sumatera*, Edisi III tahun 1966. Selepas kejatuhan Malaka oleh Portugis tahun 1511 sebenarnya Johor bangkit menggantikan peran politik Malaka walau realitasnya tidak serta merta semua peran Malaka dapat diambil alih oleh Johor. Serangan Portugis yang tidak henti-hentinya atas Johor yang disusul dengan bangkit dan berkembangnya Aceh sebagai sebuah kekuatan baru di kawasan pantai timur Sumatera dan di sepanjang selat Malaka yang mulai membayang-bayangi dan menjadi ancaman atas Johor. Hingga pada akhirnya kekuasaan Kesultanan Aceh menjelma menjadi sebuah kerajaan yang amat disegani di seantero pulau Sumatera sejak kekuasaan Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1530), dan mencapai puncaknya pada zaman kekuasaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Sejak Kekuasaan Sultan Iskandar muda di Aceh, dapat dikatakan bahwa hampir seluruh Sumatera berada di bawah pengawasan/kekuasaan Kesultanan Aceh karena itu tidak berlebih-lebihan jika disebutkan bahwa hampir semua kerajaan nusantara khususnya yang berdiri di Pulau Sumatera berada di bawah bayang-bayang kesultanan Aceh. Karena itu tidaklah mengherankan jika keempat kekuasaan utama di nusantara ketika itu, secara langsung berhadapan satu dengan lainnya sebagai saingan. Antara Aceh melawan Johor, Johor dibantu Belanda melawan Portugis dan Portugis berhadapan dengan Aceh. Persaingan antara keempat kekuasaan itu kemudian melibatkan kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya silih berganti jatuh bangun dalam panggung sejarah Nusantara di Pulau Sumatera.

Kerjasama/hubungan antar kekuasaan/kerajaan-kerajaan Nusantara dalam mempertahankan eksistensinya menjadi sangat menarik karena melalui kontak dan kerja sama itu akan tampak dinamika, jatuh bangun, timbul tenggelamnya kerajaan-kerajaan khususnya di Pulau Sumatera sepanjang sejarah, seiring dengan timbulnya kota-kota dagang baru, dan datangnya pedagang-pedagang mancanegara mendirikan komunitas-komunitas dagang mereka di berbagai kerajaan-kerajaan Islam Nusantara

Hubungan Palembang–Demak, gesekan antara Palembang–Banten (1592) kerjasama Palembang–Mataram (1643–1659), konflik VOC–Palembang (1659), persaingan Jambi–Palembang yang sesungguhnya melibatkan banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya tidak hanya antara Jambi yang berhadapan langsung dengan Palembang tetapi juga ada Makassar, ada Johor dan ada VOC yang turut mengambil bagian dalam konflik antara Jambi–Palembang.

Walaupun pada dasarnya semua Kerajaan Nusantara khususnya yang berdiri di Sumatera masing-masing adalah sebuah negara, tapi secara khusus tidak berlaku untuk Kerajaan Riau–Johor–Pahang dan Lingga karena keeempat Kerajaan tersebut, tidak bisa dilihat dari konsep negara sekarang Indonesia–Malaysia (Johor dan Pahang) tetapi dalam konteks negara–negara Kerajaan Nusantara dengan batas teritorialnya terdiri atas 4 (empat) negara Riau, Johor, Pahang, dan Lingga, akan tetapi dari struktur kekuasaan keempat Kerajaan tersebut, bernaung di bawah payung kekuasaan yang sama dalam arti keempat wilayah Kerajaan tersebut diperintah oleh satu orang Raja, dengan demikian ikatan kekerabatan antara penguasa menjadi sangat penting, demikian juga antara Kesultanan Deli, Kesultanan Langkat, Serdang, Asahan, sekalipun terpisah antara satu dengan lainnya namun dari ikatan kekerabatan terkait antara satu dengan yang lainnya. Realitas ini menunjukan bahwa kerajaan-kerajaan yang berdiri di Sumatera yang meliputi 19 Kerajaan/Kesultanan itu dari abad ke-7–14, kemudian dari abad ke-14–20 sesungguhnya sangat terkait antara satu dengan yang lainnya, baik ikatan politik maupun ikatan kekerabatan.

Penegasan tentang ikatan kekerabatan dalam bentuk silsilah menjadi sangat penting artinya terutama dalam 10 tahun terakhir kian merebaknya sebuah gejala baru dengan lahirnya Kerajaan–Kerajaan baru dan munculnya klaim dan sengketa ahli waris kerajaan-kerajaan Sumatera, dalam hubungan itulah buku Sejarah Kerajaan-Kerajaan Nusantara di Sumatera ini sangat penting untuk dibaca.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik. (1984). "Responses to Colonial Powers: The Jambi Experience in Comparative Perspective." Prisma: The Indonesian Indicator 33: 13-29.

---------. (1966). "Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau." Indonesia (2): 1–24.

---------. (1967). "Minangkabau 1900-1927: Preliminary Studies in Social Development." MA Thesis. Cornell University.

---------. (2009). Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933). Singapore: Equinox Publishing.

---------. (2011). "From the Education of Historian to the Study of Minangkabau Local History." In Decentring and Diversifying Southeast Asian Studies: Perspectives from the Region, ed. Goh Beng Lan. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 81–104.

Abdullah, Taufik, J.R. Chaniago, and S. Budhisantoso. (1984). Sejarah Sosial Daerah Sumatra Barat. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Abdullah, T & Djaenuderajat. (2015). Sejarah Kebudayaan Indonesia. Jilid 1. Jakarta : Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya. Direktorat Jendral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Abimanyu, S. (2014). Kearifan Raja-raja Nusantara Sejarah dan Biografinya. Yogyakarta : Laksana.

Aceh, Aboebakar.(1967). Sekitar masuknya Islam di Indonesia.

Adatrechtbundels XXXV: Sumatra—Serie H Het Minangkabausche Gebied No. 66—Artikelen Van Datoek Soetan Maharadja in de Oetoesan Melajoe (1911 – 1913).

Adatrechtgegevens. (1932). "Adatrechtgegevens uit Sarolangoen (1905)." Adatrechtbundel 30: 262-97.

Adji, Krishna Bayu; Achmad, Sri wintanala. (2018). Perempuan-perempuan Tangguh Penguasa Jawa. Yogyakarta : Araska.

Adrianto, Tasrief. (1999). Tipologi Nisan Pada Kompleks makam Samudera Pasai (Tinajauan bentuk, ragam Hias dan bahan). Skripsi. Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok.

Ahmad, A. Samad. (2013). Sulalatus Salatin. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ajis, A.A. (2017). "Ramni-Ilamuridesam: Kerajaan Aceh Pra-Samudera Pasai", Berkala Arkeologi Sangkhala. Vol.20. No.2. hal.79-87.

Akbar DT. Pangeran, Ali, (2006). Islam dan Adat Andiko 44 Melayu Riau. Pekanbaru: Lamr Riau.

Alfian, T. Ibrahim, Usman R. Pelly, and Ratna. (1986). Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli dan Serdang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Alfian, T.I. (1973). Kronika Pasai Sebuah Tinjauan Sejarah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ambary, H.M.(1998). Menemukan Peradaban Arkeologi dan Islam di Indonesia. Jakarta : Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

---------. (2002). " Penulisan Sejarah Islam Indonesia : Pendekatan Arkeologi Sejarah" dalam 25 Tahun Kerjasama Pusat penelitian Arkeologi dan Ecole Francaise d'Extreme-Orient. Jakarta : Pusat penelitian Arkeologi dan Ecole Francaise d'Extreme-Orient bekerjasama dengan Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Hal. 215-225.

Ambary, Hasan Muarif. (1981). Notes on research on sites from the srivijaya period (Dalam Sulaeman et.al (ed) Studies on srivijaya" Jakarta : National Research Centre of Archaeology)

Amran, Rusli. (1981). Sumatra Barat hingga Plakat Panjang. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Andaya, Barbara W dan Leonard Y. Andaya. (1991). A History of Malaysia. London: MacMillan.

Andaya, Barbara Watson. (1993)a "Cash Cropping and Upstream-Downstream Tension: The Case of Jambi in the Seventeenth and Eighteenth Centuries," dalam A. Reid (ed), Southeast Asia in the Early Modern Age: Trade, Power, and Belief, h. 91-122. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press.

---------. (1993)b. To Lives as Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Honolulu: University of Hawaii Press.

Andaya, Leonard Y. (1972). "Raja Kechil and The Minangkabau Conquest of Johor in 1718." Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 45(2): 51–75.

---------. (1975). The Kingdom of Johor, 1641-1728: A Study of Economic and Political Development in the Straits of Malacca. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

---------. (2010). Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka. Singapore: NUS Press.

Anderson, J. (1971). Mission to the East Coast of Sumatra in 1823. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Arief, Tengku. (1991). Rakit Kulim Menjemput Raja ke Melaka. Jakarta: Library of Congress Office.

Arnold, T.W. (1981). The Preaching of Islam. Jakarta

Azhari, Icwan, dkk. (2013). Kesultanan Serdang: Perkembangan Islam pada Masa Pemerintahan Sulaiman Shariful Alamsyah. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Azra, A. (peny.).(1989). Perspektif Islam di Asia Tenggara. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Azwar, P. H.M.D. (2011). Sulatus Salatin Sejarah Melayu. Jakarta : Pelita Hidup Insani.

Barnard, Timothy P. (2001)a. "Rules for Rulers: Obscure Texts, Authority, and Policing in Two Malay States." Journal of Southeast Asian Studies 32(2).

---------. (2001)b. "Texts, Raja Ismail and Violence: Siak and the Transformation of Malay Identity in the Eighteenth Century." Journal of Southeast Asian Studies 32(3).

---------. (2003). Multiple Centres of Authority: Society and Environment in Siak and Eastern Sumatra, 1674-1827. Leiden: KITLV Press.

---------. (2016). Contesting Malayness: Malay Identity Across Boundaries. Singapore: NUS Press.

Bernet Kempers, A.J. & R. Soekmono, (1954). Tjandi Kalasan dan Sari. Djakarta: Dinas Purbakala Republik Indonesia & Penerbitan dan Balai Buku Indonesia

Bernet Kempers, A.J., (1959). Ancient Indonesian Art. Amsterdam: C.P.J. van der Peet.

Beslissing. (1904). "De beslissing in zake Djambi." Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nerdelandsch-Indië 69.

Boelhouwer, J. C. (1841). Herinneringen van Mijn Verblijf op Sumatra's Westkust, Gedurende de Jaren 1831-1834. 's Gravenhage: De Erven Doorman. http://books.google.com/books?id=rUlSAAAAcAAJ (July 22, 2019).

Boers, J. W. (1840). "Oud volksgebruik in het Rijk van Jambi." Tijdschrifts van Neerland's Indië 3(1).

---------. (1850). "Bezoek ter hoofdplaatse van het Djambische rijk op Sumatra in 1834, door den toenmaligen resident van Palembang." Tijdschrift van Nerdelandsch-Indië 12(2).

Borschberg, Peter.(2004). Iberians in the Singapore-Melaka Area and Adjacent Regions (16th to 18th Century). Wiesbaden: Harrassowitz.

Budhisantoso, dkk. (1994). Studi Pertumbuhan dan Pemudaran Kota Pelabuhan : Kasus Barus dan Sibolga. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Burhanuddin, J. (2012). Ulama dan kekuasaan Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia. Jakarta: Mizan.

----------. (2017). Islam dalam Arus Sejarah Indonesia. Jakarta: Kencana.

Bustamam, Ferry. (2003). Bunga Rampai Kesultanan Asahan. Medan: F. Bustamam. http://books.google.com/books?id=B8FwAAAAMAAJ (July 21, 2019).

Chatib, Adrianus dkk. (2011). Kesultanan Jambi dalam Konteks Sejarah Nusantara. Jakarta: Kementerian Agama dan IAIN Jambi.

Coedes, George, (2010). Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha. Penerjemah Winarsih Partaningrat Arifin. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

----------. (2014). Kedatian Sriwijaya. Edisi Kedia. Jakarta: Komunitas Bambu.

Damono, Sapardi Djoko, Marco Kusumawijaya, and Laura Noszlopy. (2007). Siak Sri Indrapura. Jakarta: Lontar Foundation.

Darmawijaya. (2010). Kesultanan Islam Nusantara. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

De Casparis, J.G., (1992). "Kerajaan Malayu dan Adityawarman", dalam prosiding Seminar Sejarah Malayu Kuno, Jambi, 7–8 Desember. Diselenggarakan atas kerjasama Pemda Tingkat I Provinsi Jambi dengan Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jambi. Halaman 233–256.

Dja'afar M., T.S. (1959). Sedjarah Hutan Tanah. Kuala Napuh, naskah ketik yang difotokopi oleh Monti Ajo A. Munir BS.

Djafar, Hasan. (2010). Kompleks Percandian Batujaya: Rekonstruksi Sejarah Kebudayaan Daerah Pantai Utara Jawa Barat. Bandung: Kiblat Buku Utama, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, dll.

----------. (2010). Kompleks Percandian Batujaya: Rekonstruksi Sejarah Kebudayaan Daerah Pantai Utara Jawa Barat. Bandung: Kiblat Buku Utama.

Djajadiningrat, H. (1995). "Tradisi Lokal dan Studi Sejarah", dalam Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar. Editor: Soedjatmoko, Mohammad Ali, G.J. Resink, G.Mct. Kahin. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Djambi. (1917-1940). "Djambi" dalam Encyclopaedia van Nederlandsch-Indië 1: 108-14. Leiden: Brill.

Djuharsono. (1985). Perlawanan Indonesia terhadap Penetrasi Politik Barat; Modul Sejarah Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka.

Dobbin, Christine E. (1977). "Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise of the Padri Movement, 1784-1830." Indonesia (23).

----------. (2018). Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra. London: Routledge.

Drakard, J. (2003). Sejarah Raja-raja Barus. Dua naskah dari Barus. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama – Ecole Francaise d'Extreme-Orient.

Effendy, Tenas dan Fakhrunnas MA. Jabbar. (2003). Selayang Pandang Bandara Khusus "Sultan Syarief Haroen Setia Negara" dan Sejarah Perjuangan Rakyat Pelalawan (Dalam Mempertahankan Kemerdekaan RI). Kerinci: Public Relations-SLS PT Riaupulp dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Effendy, Tenas, and Nahar Effendy. (1973). Lintasan sejarah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Pekanbaru: Badan Pembina Kesenian Daerah Propinsi Riau.

Effendy, Tenas. (2005). Banjir Darah di Mempusun. Pelalawan: Lembaga Adat Melayu.

Erman, Erwiza [ed.] (2011). Sejarah Sosial Kesultanan Melayu Deli. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Fachruddin, Fuad Mohd. (1985). Perkembangan Kebudayaan Islam. Jakarta : Bulan Bintang.

Gosh, A. (2006). Nalanda. New Delhi: The Director General Archaeological Survey of India.

Goudie, Donald J. (1996). Syair Perang Siak: A Court Poem Presenting the State Policy of a Minangkabau Malay Royal Family in Exile. Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society.

Groeneveldt, W.P. (2009). Nusantara dalam Catatan Tionghoa. Depok: Komunitas Bambu.

Guillot, G. (2014). Lobu Tua Sejarah Awal Barus. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia-Ecole Francaise d'Extreme-Orient-Pusat Arkeologi Nasional.

Guillot, G. dkk. (2017). Barus Seribu Tahun yang lalu. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia- Ecole Francaise d'Extreme-Orient-Association Archipel- Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional-Forum Jakarta-Paris.

Gullick, J. M. (1978). Sistem Politik Bumiputera Tanah Melayu Barat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hadi W.M, A.(2008). "Penulis-penulis Wujudiah Madzab Barus" dalam Dari Hitu ke Barus. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.

Hadi, A. (1995). Hamzah Fansuri Risalah Tasawuf dan Puisi-puisinya. Bandung : Mizan.

Hadi, Abdul. (2000). Islam Cakrawala Estetik dan Budaya. Jakarta : Pustaka Firdaus.

Hadler, Jeffrey. (2013). Muslims and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia through Jihad and Colonialism. Ithaca, N.Y: Cornell University Press. https://doi.org/10.7591/9780801461606 (July 22, 2019).

----------. (2008). "A Historiography of Violence and the Secular State in Indonesia: Tuanku Imam Bondjol and the Uses of History." Journal of Asian Studies 67(3): 971–1010.

Halimi, Ahmad Jelani. (2008). Sejarah dan Tamadun Bangsa Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publication.

----------. (2015). "Perhubungan Perkapalan dan Perdagangan Nusantara-China sejak Zaman Awal", dalam Nazarudin Zainun dan Nasha Roziadi Khwa (Editor), Perdagangan Dunia Melayu-China hingga Kurun ke-16 Masihi: Satu Tinjauan Sejarah dan Arkeologi. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia Press. Halaman 28–38.

Hall, D.G. E. (1950). Sejarah Asia Tenggara. Surabaya : Usaha Nasional.

----------. (1988). Sejarah Asia Tenggara. Surabaya: Usaha Nasional.

Hamka, B. (2016). Sejarah Umat Islam Pra kenabian hingga Islam Nusantara. Jakarta : Gema Insani.

----------. (1963). Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi. Jakarta: Firma Tekad.

Hanafiah, Djohan. (1989). Kuto Besak: Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan. Jakarta: Haji Masagung.

----------. (1995). Melayu-Jawa: citra budaya dan sejarah Palembang. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hardjowardojo, R. Pitono. (1965). Pararaton. Djakarta: Bhratara.

----------. (1966). Adityawarman. Sebuah Studi tentang Tokoh Nasional dari Abad IV. Djakarta: Bhratara.

Hardjowidjono, W. (1997). Pasai Tahun 1509-1524". Zuhdi, S (peny.) Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra. Kumpulan Makalah Diskusi. Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Hashim, Mohammad Yusoff. (1989). Kesultanan Melayu Melaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hasmy, A. (1983). Kebudayaan Aceh dalam Sejarah. Jakarta : Benua.

Husin, Djohar Arifin. (2013). Sejarah Kesultanan Langkat. Medan: Yayasan Bangun Langkat Sejahtera.

Husny, Tengku H. M. Lah. (1978). Lintasan Sejarah: Peradaban dan Budaya Penduduk Melayu-Pesisir Deli Sumatra Timur, 1612-1950. Jakarta: Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah.

Ibrahim, H. (1994). Data Tekstual pada makam Islam di kecamatan Samudera Aceh Utara: hubungannya dengan kerajaan Samudera Pasai. Tesis. Program Pascasarjana Arkeologi FIB UI. Depok.

Irfan, Nia Kurnia Sholihat, (1983). Kerajaan Śrîwijaya,: Pusat Pemerintahan dan Perkembangannya. Jakarta: Girimukti Pasaka.

Isjoni & Zulkarnain (eds.). (2007). Mengembalikan Kejayaan Melayu di Indragiri. Pekanbaru: Alaf Riau.

Ismail, M.G. (1977). Pasai dalam perjalanan Sejarah: abad ke-13 sampai awal abad ke 16. Jakarta : Depdikbud, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

Ittihadiyah, Himayatulah., dkk (2011). Islam Indonesia Dalam Studi Sejarah, Sosial, dan Budaya (Teori dan Penerapan). Yogyakarta : Pusat kajian Sejarah dan Budaya islam Jurusan SKI Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogayakrta.

Jacq-Hergoualc'h, Micheal. (2002). The Malay Peninsula: Crossroads of the Maritime Silk-Road (100 Bc-1300 Ad). Leiden: Brill.

Jones, R. (1987). Hikayat Raja Pasai. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti SDN. BHD.

Jordan, Michael, (2004). Dictionary of God and Goddesses (Second edition). New York: Facts on File Library of Religion and Mythology.

Junus, Hasan & Zuarman, et.al. (2003). Kerajaan Indragiri. Pekanbaru: Unri Press.

Kahin, Audrey, Taufik Abdullah, Azmi, and Zulfahmi. (2005). Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatra Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Kartodirjo, Sartono, et.al. (1975). Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III. Jakarta: PT Grafitas.

Kathirithamby-Wells, J. (1986). "The Origin of the Term Padri: Some Historical Evidence." Indonesia 14(41): 3–9.

Khairiah. (2015). "Menelusuri Jejak Arkeologi Di Siak." Sosial Budaya 11(1).

Kusmiati, T. N. (1977). Catatan Sementara tentang mata uang Samudera Pasai. Cibulan: Proyek Penelitian & Peninggalan Purbakala, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Lange, Hendrik Merkus. (1854). Het Nederlandsch Oost-Indisch leger ter westkust van Sumatra (1819-1845). Deel 1 Deel 1. 's Hertogenbosch: Muller.

Lestari, Nita (2014) Mata Uang Emas Kesultanan Samudera Pasai dan Aceh Darusalam, Kajian Numismatik dan Arkeologis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2014

Leur, J. C. van. (1955). Indonesian Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History. Bandung: van Hoeve.

Liebert, Gosta, (1976). Iconographic Dictionary of the Indian Religions: Hinduism-Buddhism-Jainism. Studies in South Asian Culture. Edited for the Institute of South Asian Archaeology University of Amsterdam by J.E.van Lohuizen-De Leeuw Volume V. Leiden: E.J. Brill.

Locher-Scholten, E.(2008). Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda. Jakarta: Banana & KITLV.

---------. (2010). Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830-1907. Ithaca, N.Y: Cornell University Press.

Lufti, Muchtar, ed. (1977). Sejarah Riau. Pekan Baru: Universitas Riau.

Luthfi, Amir (1991). Hukum dan Perubahan Struktur Kekuasaan: Pelaksanaan Hukum Islam dalam Kesultanan Melayu Siak, 1901-1942. Pekanbaru: Susqa Press. http://books.google.com/books?id=iSWXAAAAMAAJ (July 28, 2019).

Marpaung, Watni, Chandra Silalahi, and Rosma Marpaung. (2011). Mutiara Kota Kerang Tanjungbalai, Asahan: Mengungkap Sejarah Asal Usul Nama, Kesultanan, Adat Istiadat, Tradisi, Makanan Daerah, Kesenian, Pendidikan, dan Sosial Budaya. Medan: CV. Jabal Rahmat.

Marsden, W. (1966). History of Sumatra. The third editions. Kualalumpur : Oxford University.

---------. (2018). The History of Sumatra: Containing an Account of the Native Inhabitants, Natural Productions, and Ancient Political State. California: Creative Media Partners, LLC

Maryam, Siti., dkk (2012). Sejarah Peradaban Islam: dari Masa Klasik Hingga Modern. Yogyakarta : Fak. Adab.

McKinnon, E. Edwards, and Tengku Luckman Sinar. (1976). Kota Cina: An Important Early Trading Site on the East Coast of Sumatra. Medan.

---------. (1981). "A Note on Pulau Kompei in Aru Bay, Northeastern Sumatra." Indonesia (32).

Meilink-Roelofsz, M.A.P. (1962). Asian Trade and European Influence: In the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630. Denhaag: Martinus Nijhoff.

Meuraxa, Dada (1963) Sejarah Masuknya Islam ke Bandar Barus Sumatera Utara. Medan : Penerbit sastrawan (Bahan seminar masuknya islam di Indonesia 1973. Terbitan Penyelenggara UISU Medan.

Milner, Anthony Crothers, E. Edwards McKinnon, and Tengku Luckman Sinar. (1978). A Note on Aru and Kota Cina. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Milner, Anthony Crothers. (1982). Kerajaan Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule. Tucson, Arizona: University of Arizona Press.

Moens, J.L., (1974). Buddhisme di Jawa dan Sumatra dalam Masa Kejayaannya Terakhir. Jakarta: Bharata.

Molhuysen, P.C, P.J Blok, L Knappert, and K.H Kossmann. (1911). Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. Leiden: Sijthoff.

Mulia, Rumbi, (1980). "The Ancient Kingdom of Panai and The Ruins of Padang Lawas (North Sumatera)". Bulletin of the Researcah Centre of Archaeology of Indonesia No. 14. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Mulyana, S. (1981). Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi. Jakarta: yayasan Idayu.

---------. (2005). Runtuhnya kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya negara-negara Islam di Nusantara. Yogyakarta: LKiS.

Munandar, Agus Aris, (2010). Gajah Mada: Biografi Politik. Depok: Komunitas Bambu.

Muttalib, J. A. (1977). "Jambi 1900-1916: From War to Rebelion." Disertasi Ph.D. Universitas Columbia.

---------. (1980). "Suatu Tinjauan Mengenai Beberapa Gerakan Sosial di Jambi pada Perempatan Pertama Abad ke 20." Prisma: The Indonesian Indicator 8: 26-37.

Nasution, Harun (1980). Sejarah Ringkas Islam. Jakarta : IAIN Jakarta.

Nawiyanto and Eko Crys Endrayadi. (2016). Kesultanan Palembang Darussalam: Sejarah Dan Budayanya. Jember: Tarutama Nusantara.

Noegraha, Nindya. (2002). Hikayat Iskandar Zulkarnain & syair Raja Siak: Dari Naskah W113 & W273. Jakarta: Perpustakaan National Republik Indonesia.

Nur, M (2001) " Barus : Bandar Tua di Bagian barat Nusantara " dalam Arung Samudera Persembahan Memperingati Sembilan Windu A.B. Lapian (penyunting Edi Sedyawati, Susanto Zuhdi). Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya. Lembaga Penelitian Uniersitas Indonesia. Depok.

Nurhadi Lukman (1990) Tinjauan Tipologi Nisan Pada makam Islam Kuno di Indonesia", Analisa Hasil Penelitian Arkeologi I. Jilid II. Jakarta : Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

---------. (1979) Makam Kuno di daerah Barus. Sumbangan Data Arkeologi Islam. Skripsi. Fakultas Sastra UI.

Oetomo, R.W. (2017). "Motif Hias Nisan: Latar belakang Pembuatan Hiasan Lampu Gantung Pada Nisan Barus". Berkala Arkeologi Sangkhala. Vol.20.N0.2 hal.135-151.

Oetomo, R.W., Heddy Surachman (2012). "Sisa Stuktur Bangunan di Samudera Pasai (Tinjauan Konstruksi dan Fungsinya)". Berkala Arkeologi Sangkhala. Vol.15.N0.1 hal.142-154.

Pane, Sanusi. (1965). Sejarah Indonesia, Jilid I. Jakarta: Balai Pustaka.

Panitia Seminar Sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia, (1963). Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia. Medan.

Pelly, Usman at.al. (1986). Sejarah Pertumbuhan Pemerintahan Kesultanan Langkat, Deli dan Serdang. Jakarta. Depdikbud.

Pelzer, Karl J. (1985). Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatra Timur, 1863-1947. Jakarta: Sinar Harapan.

Perret, D & Surachman, H. (2008). Kajian Awal Situs Bukit Hasang, Barus, Sumatra Utara. Kumpulan Makalah Pertemuan Ilmiah Arkeologi ke-IX Kediri 23-28 Juli 2002. Jakarta : Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. hl.534-540.

---------. (peny.). (2015). Barus Negeri Kamper. Sejarah Abad ke 12 hingga pertengahan abad ke-17. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia- Ecole Francaise d'Extreme-Orient

Pigeaud, Theodore G.Th., (1960—1962). Java in The 14th Century: A Study in Cultural History. The Nagara-Kertagama By Rakawi Prapanca of Majapahit, 1365 A.D. Volume 1–V. The Hague: Martinus Nijhoff.

Pires, Tomé. (1967). Suma Oriental. Nendeln/Lichtenstein: Kraus.

---------. (2014). Suma Oriental Perjalanan dari Laut Merah ke Cina & Buku Farncissco Rodrigues. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Poerbatjaraka, R.M.Ng., (1975). Calon Arang si Janda dari Girah. Jakarta: Balai Pustaka.

Poesponegoro, Marwati Djoened; Nugroho Notosusanto. (2009). Sejarah Nasional Indonesia III-cet-3-Edisi Pemutakhiran. Jakarta: Balai Pustaka.

Pulungan, H.J. S (2018). Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Amzah.

Putuhena, M. Shaleh. (2007). Historiografi Haji Indonesia. Yogyakarta: LKiS.

Rads, Wasmad. (1950). 17 Agustus 1945 di Kota Rengat. Manuskrip: Tanpa Penerbit.

Rahiem, Husni. (1998). Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang. Jakarta: Logos.

Ramelan, Wiwin Djuwita Sudjana (Penyunting), (2014). Candi Indonesia. Seri Sumatera, Kalimantan, Bali, Sumbawa. Jakarta: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Dit.Jen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Rasyid, Fachrul. (2008). Dari Pagaruyung sampai Semenanjung: Refleksi Sejarah Minangkabau. Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya, UPTD Museum "Aditiyawarman."

Ratna. (1990). "Birokrasi Kerajaan Melayu Sumatera Timur di abad XIX." Disertasi. Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada.

---------. (2012). "Sumatera Utara Bergolak (1872-1904)", dalam Taufik Abdullah dan A.B. Lapian (ed.). Indonesia dalam Arus Sejarah, Vol. 4: Kolonisasi dan Perlawanan. Jakarta: Ichtiar Baroe.

Reid, Anthony. (1982). Europe and Southeast Asia: The Military Balance. Occasional Papers 16. Townsville, Queensland" Centre for Southeast Asian Studies.

---------. (1995). Witnesses to Sumatra. A Travellers Anthology. New York : oxford University Press, 1995.

----------. (2005). An Indonesian Frontier. Acehnese & Other Histories of Sumtra. Singapore : Singapore University Press.

----------. (2007). Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga akhir Kerajaan Aceh abad ke 19. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

----------. (2011). Sumatera: Revolusi Sosial dan Elit Tradisional. Jakarta: Komunitas Bambu.

----------. (2014). The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra. Singapore: NUS Press. http://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctv1qv3jz (June 27, 2019).

----------. (2015). A History of Southeast Asia: Critical Crossroads. New Jersey: John Wiley & Sons.

----------. (2017). The Contest for North Sumatra: Aceh, the Netherlands, and Britain, 1858-1898. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

----------. (2019). Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra. Singapore: NUS PRESS.

Ricklefs, M.C. (1993). Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Roo de la Faille, P. (1971). Dari Zaman Kesultanan Palembang. Vol. 8. Djakarta: Bhratara.

Safwan, Mardanas. (2004). Sultan Mahmud Badaruddin II, 1767-1852: Riwayat Hidup dan Perjuangannya. Jakarta: Mutiara Sumber Widya

----------. (2014). Sultan Syarif Kasim II: Riwayat Hidup dan Perjuangannya (1893-1968). Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Said, Mohammad. (1984). Aceh Sepanjang Abad. Jilid 1. Medan: Waspada.

Saipuddin. (1979). Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta : Penerbit Al Ma'arif.

Samin, Suwardi M. (2002). Sultan Syarif Kasim II: Pahlawan Nasional dari Riau. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau. http://books.google.com/books?id=vp5xAAAAMAAJ (July 28, 2019).

Schadee, W.H.M. (1918). Geschiedenis van Sumatra's Oostkust. Amsterdam: Oostkust van Sumatra-Instituut.

Schnitger, F.M., 1964. Forgotten Kingdoms in Sumatra. Leiden: E.J. Brill.

Sedyawati, Edi & Hasan Djafar (Editor jilid), (2009). Indonesia dalam Arus Sejarah 2: Kerajaan Hindu-Buddha. Jakarta: PT.Ichitar Baru van Hoeve.

Sevenhoven, J. L. van. (1971). Lukisan tentang Ibukota Palembang. Palembang: Bhratara.

Shar, Ridjaluddin. (2013). Maharaja Diraja Adityawarman: Penguasa Belahan Barat Imperium Majapahit: Mengungkap Tambo Minangkabau. Depok: Themis Books.

Sinar, Tengku Luckman, and Wan Syaifuddin. (2007). Kronik Mahkota Kesultanan Serdang. Medan: Yandira Agung.

Sinar, Tengku Luckman, Thyrhaya Zein, and Mira Rozanna. (2012). Kesultanan Melayu di Sumatera Timur dalam catatan Tuanku Luckman Sinar Basyarsah II. Medan: Mitra.

Sinar, Tengku Luckman. (1980). Deli (East Sumatra) in the "Daghregister" of the V.O.C. in the 17th Century. IAHA Conference.

Sinar, Tengku Luckman. (1986). Sari Sejarah Serdang. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

---------. (1996). Perang Sunggal, 1872-1895. Medan: Datuk Tan Gembak.

---------. (2001). "The Malays of the Eastcoast of Sumatra."

---------. (2005). The History of Medan in the Olden Times. Lermbaga Penelitian dan Pengembangan Seni Budaya Melayu.

---------. (2007). Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur. Medan.

---------. (2011). Sejarah Medan Tempo Doeloe. Medan: Sinar Budaya Group.

Sri Handari, Dedah Rufaedah, (2005). Prasasti dan Raja-raja Nusantara. Jakarta: Museum Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Stuvenga, C. J. M. (1999). "Op de grens van twee werelden: De expeditie naar Djambi, 1901-1907." Jurusan Sejarah, Universitas Leiden. Tidak diterbitkan.

Sufi, R. (1993). "Mata uang Kerajaan-kerajaan di Aceh". Zuhdi, S (peny.) Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra. Kumpulan Makalah Diskusi. Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional

Suhadi, Machi. (1990). "Silsilah Adityawarman", dalam Saraswati: Esai-esai Arkeologi. Kalpataru Majalah Arkeologi. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. No.9: 218–239.

---------. (2009). "Kerajaan Panai", dalam Sedyawati, Edi & Hasan Djafar (Editor jilid), 2009. Indonesia dalam Arus Sejarah 2: Kerajaan Hindu-Buddha. Jakarta: PT.Ichitar Baru van Hoeve. Halaman 137–148.

Suleiman, Satyawati. (1981). Sculptures of Ancient Sumatra. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala.

---------. (1985). "Peninggalan-peninggalan Purbakala di Padang Lawas", dalam Amerta 2. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Halaman 23–37.

Suleiman, Satyawati, dkk, (1983). Berita Penelitian Arkeologi No.4: Survei Sumatera Utara. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.

Sultan, Jamalako. (Tanpa Tahun). Sejarah Indragiri dan Kuantan. Manuskrip. Teluk Kuantan: Tanpa Penerbit.

Sumadio, Bambang (Editor Jilid), (1984). Sejarah Nasional Indonesia II: Jaman Kuno. Jakarta: Balai Pustaka.

Supriyanto. (2013). Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang, 1824-1864. Jogjakarta: Ombak.

Surachman, H.(2015), "Morfologi Kota Samudera Pasai", Aceh dalam Perspektif Sejarah dan Arkeologi. Tim Penulis. Medan : Cakra Press – Balai Arkeologi Medan.

Susetyo, Sukawati, (2010). "Kepurbakalaan Padang Lawas, Sumatera Utara: Tinjauan Gaya Seni Bangun, Seni Arca dan Latar Keagamaan". Tesis Magister Humaniora (S2), Bidang Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI), Depok.

Syahrul, P. H. (2008). Perempuan Aceh dalam Lintas Sejarah dari abad VIII-XXI. Jakarta : Pelita Hidup Insani.

---------. (2008). Silsilah Raja-raja Islam di Aceh dan hubungannya dengan Raja raja Islam di Nusantara. Jakarta : Pelita Hidup Insani.

Syamsu, H.M. (1996.) Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan sekitarnya. Jakarta: Lentera.

Syukri, Ibrahim (1985). The History of Malay Kingdom of Patani. Athens: Center for International Studies-Ohio University.

Takakusu, J., (2014). Kiriman Catatan Praktik Buddhadharma dari Lautan Selatan (Nanhai Ji Gui Neifa Zhuan) Oleh Yi Jing (I-Tsing). Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tanjung, Muaz. (2017). "Pertumbuhan Lembaga Pendidikan Islam di Kerajaan Langkat Pada Tahun 1912-1942." Jurnal Lektur Keagamaan 15(2): 318.

Teitler, G. (2004). Het Einde van de Padrie Oorlog: Het Beleg en de Vermeestering van Bonjol 1834-1837. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw.

Tidelman, J dan P. L. F. Sigar. (1938). Djambi. Amsterdam: Koloniaal Institut.

Tim Penulis Balai Arkeologi Medan.(2014). Sumatra Utara : Catatan Sejarah dan Arkeologi. Yogyakarta : Penerbit Ombak.

Tjandrasasmita, Uka (1976). "Masuknya islam ke Indonesia dan Pertumbuhan Kota-kota Pesisir Bercorak Islam", Bulletin Yaperna. Jakarta: Yayasan Perpustakaan Nasional.

----------. (1983). Kota pemukiman Masa Pertumbuhan Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia (penerapan Arkeologis dan Konsep-konsep ilmu-ilmu Sosial). Makalah dalam Pertemuan Ilmiah Arkeologi III, Ciloto 23-28 Mei 1983, hlm.9-11.

----------. (1984). Arkeologi Islam di Nusantara. Jakarta : KGP Press.

----------. (1984). Sejarah Nasional Indonesia. Jilid. 3. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

----------. (2012). The Growth and Development of Muslim Cities in Indonesia From The 13 th-18th century. Century for Research and Development on Religius Literature and Heritage Ministry of Religious Affairs.

Tumanggor, Rusmin. (1999). Sistem Kepercayaan dan Pengobatan : Studi Penggunaan Ramuan Tradisional Dalam Pengobatan Masyarakat Barus Suku Bangsa Batak Tapanuli Tengah Sumatera Utara. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Utomo, Bambang Budi, (2007). Prasasti-prasasti Sumatra. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Badan Pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Velds, G. J. (1909). "De onderwerping van Djambi, 1901-1907: Beknopte geschiedenis naar officiëele gegevens." Indisch Militair Tijdschrift, Extra-bijlage 24.

Vlekke, B.H.M. (1961). Nusantara: A History of Indonesia. Brussels: Manteau

Wargadalem, Farida Ratu. (2009). "Perekonomian Kesultanan Palembang." Jurnal Sejarah Lontar 6(1):12–20.

---------. (2017). Kesultanan Palembang Dalam Pusaran Konflik, 1804-1825. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) & Ecole Française d'Extrême-Orient.

Wheatley, P., (1961). The Golden Khersonese: Studies in the historical geography of the Malay Peninsula before A.D.1500. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Wibisono, Sonny Chr. (1986). Permukiman Kuno di Barus: Model Ekologi Manusia. Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV. Cipanas, 3-9 Maret 1986. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Dep dik bud.

Widiatmoko, Agus, (2015). Situs Muarajambi Sebagai Mahavihara Abad ke-7–12 Masehi. Disertasi Program Pascasarjana Arkeologi (S3), Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok.

Wilaela. (2015). "Sultanah Latifah School Di Kerajaan Siak (1927-1945)." Sosial Budaya 11(1).

Yusuf, Ahmad & Umar Amin, et, al. (1994). Sejarah Kesultanan Indragiri. Pekanbaru: Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Yusuf, Ahmad. dkk. (1995). Sejarah Kerajaan Pelalawan. Pekanbaru: Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Yusuf, M. dkk. (2006). Sejarah Peradaban Islam di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit Pustaka.

Zainuddin, H.M..(1961). Tarich Atjeh dan Nusantara. Kutaraja: Pustaka Iskandar Muda.

Zakariya, Hafiz. (2006). "Islamic Reform in Colonial Malaya: Shaykh Tahir Jalaluddin and Sayyid Shaykh al-Hadi." Ph.D Dissertation. University of California.

Zuhdi, S. (peny.). (1993). Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra. Kumpulan Makalah Diskusi. Jakarta : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

INDEKS

A

'Abdul Karim Al-Jilli 278

Abu Hafs Umar bin Abd Allah Ba Shaiban al-Tarimi al-Hadrami 193

Aceh 1–3, 37, 39, 82, 89–90, 92–95, 97–98, 102–104, 106, 111, 118, 120–121, 123, 127–130, 132, 134–135, 137–141, 143, 146–149, 152, 155, 160, 162–164, 166, 169, 173–210, 212–215, 218, 240, 243, 249, 255, 258, 268, 271, 276–278, 297, 312, 321–322, 326, 328–329, 331, 348, 352, 355–359, 362, 367, 369–372, 375–387, 395, 400–401, 403, 406, 408–410, 420–428, 430, 435, 437, 441–444, 448–450, 480–481, 494, 506, 512

Acte Van Erkenning 427

Adat Atjeh 181–182

Adipati Anum 264–265

Ahimsa 66, 86

Alahan Panjang 341–342

al-Aja'ib al-Hind 254

Alam Minangkabau 2, 330–331, 333, 346, 348, 350, 352, 354, 366

Al-Gazali 191

Ali Haji 219, 221, 223–243, 246–247

al-Imam 245

al-Jambi, Abu Bakar 316

Al-Jam'iyatul Washliyah 398

al-Kurani, Ibrahim 192, 195

al-Mukammil, Alauddin Ri'ayat Syah Sayyid 184

al-Palimbani, Abdussomad 276

al-Qushashi, Ahmad 195

Al-Raniri 190–191, 193–198, 205

al-Raniri, Nuruddin 198, 205

Amoghapasa 20–21, 36–39, 41–45, 83, 327

Anglo-Dutch Treaty 286

Arab 35, 67–68, 89, 91–96, 98–99, 102–106, 114, 116–119, 121–122, 126–127, 129–130, 133–135, 138, 146, 151, 153, 156–157, 159, 165, 174–175, 185–186, 192–193, 196, 198–202, 238, 243, 245, 247–248, 253–255, 260, 270–271, 276–277, 280, 283, 292, 294, 300, 302, 314–315, 329, 336, 352, 364–366, 388, 500–501, 511

Asahan 2, 207, 375, 384, 387, 396–397, 405, 408–411, 417, 424, 427–428, 438–439, 441–456, 494, 498–499, 513

ashab al-jawiyyin 193, 195

Asia Tenggara 17, 50, 56, 62, 65, 68–70, 84, 87, 89–90, 150–151, 153, 155–156, 159, 163, 191, 203, 229, 242, 271, 286, 300, 316, 318

Asia Timur 89–90, 150, 359

as-Sinkili, Abdul Ra'uf 198

as-Sumatrani, Syamsuddin 198, 200, 278

B

b. Abdul Wahhab, Muhammad 336

Badaruddin I, Mahmud 269, 274–275, 279, 285

Badaruddin II, Mahmud 279–281, 285–286, 290

Bangka 39, 57, 64–65, 74, 78, 85–87, 108, 236, 261, 269, 272–275, 287–290, 302–304, 493, 496

Banjarmasin 240, 295

Batak Toba 395

Batavia 173, 179–180, 203–205, 208, 210, 212, 217, 234, 241, 247, 258, 266, 268, 271, 280–281, 289, 291, 302–304, 306–309, 311–313, 339, 343–344, 349, 354, 361, 372, 383, 406, 423, 427, 434, 450–452, 480–481, 504–505

Batavia Petroleum Maatschappij (BPM) 434

Battutah, Ibnu 151, 176

Bauddha 9, 11, 15, 18, 21, 23, 25, 29, 32–34, 40–41, 61–63, 72, 74

Belitung 29, 39, 65, 261, 275, 288–290

Bengkulu 39, 139, 179, 261, 268, 272, 289, 330, 339, 352, 355, 372

Berhala 90, 293, 295

Berita 7, 15, 17, 19, 32, 34–36, 39, 41, 44–45, 49, 59–60, 62–64, 69–70, 82–86, 89–90, 92, 94, 116, 145–146, 151–152, 154, 255, 304, 424, 433, 464

Bhairawapaksa 10, 41, 43, 49

Bidayah al-Hidayah 240, 243

Borneo 229

Brunei 87, 331

Budaya 9, 91, 94–95, 125, 130, 138, 149, 157, 173, 177, 185, 188–189, 193, 202, 221, 224, 237–239, 241–244, 247, 253, 262–263, 281, 296–297, 312–313, 335, 352, 354, 363, 375, 378–381, 390, 400, 402–403, 420, 485, 488, 493

Buddha Hinayana 22, 25, 64, 66, 86

Buddha Mahayana 7–11, 14, 17, 19, 23, 25, 32, 34–35, 47, 49, 55, 64–67, 70, 72–73, 84–87, 117

Buddhadharma 18, 55, 64, 79

Budi Utomo 413

Bugis 2–4, 129, 162, 219–240, 243, 263–265, 272, 279, 342–343, 408, 488, 491–493

Bukit Siguntang Mahameru 262

Bukti 17–18, 25, 34, 65, 68–69, 89–91, 94, 104–105, 118, 125–126, 129, 131, 143, 147, 154, 157, 163, 184, 186, 188, 190, 192, 197, 200, 202, 216, 229, 240, 246, 270, 280, 294–295, 312–313, 505

Bustan al-Arifin 240

C

Caitya 17, 22–23, 25, 29, 34, 42, 61

Catatan 17, 24, 44, 50, 55–56, 60, 62–63, 70, 80, 84–85, 89–90, 102–103, 105, 112, 114–116, 120, 125–126, 129, 133, 143, 146, 160, 175–176, 187, 220, 229, 231, 243–244, 246, 248, 256, 260–261, 265, 281, 284, 314, 317, 329–331, 339, 404–405, 412, 420, 431, 446–448, 477–478, 489, 497, 509–510

Cerita 26, 90, 107, 120, 123, 126, 138–139, 156, 190, 192, 219, 255, 260, 262, 280–281, 332, 375, 489–491, 497

Chatra 10

China 176, 369

Chola 7–8, 35, 63, 78, 80–82

Cholamandala 7–8, 17, 63, 69–70, 80–82, 509

Cina 17, 19, 22, 24, 33–35, 39, 44–45, 50, 55–56, 58–64, 68–70, 80–84, 89–91, 93–94, 115–116, 118–119, 122, 126, 132–134, 138, 146, 148, 150–152, 155, 157, 163, 174, 203, 217–218, 222, 228–229, 233, 235–236, 238, 243, 253–255, 260–261, 266–268, 270–273, 280, 292, 297, 301, 310–311, 314, 357, 368, 390, 433, 445–446, 451–452, 480, 510

Cultuurstelsel 349

D

Daeng 3, 122, 220, 222–231, 264–265

Darek 2, 330–331, 333, 335, 338

Dharmasraya 46, 328

Datuk 2, 227, 235, 293–295, 313–315, 332, 336, 347, 349, 362, 378, 380–381, 384, 389, 401, 409, 414, 426–428, 444, 450, 453, 455, 461–462, 473, 479, 484–486, 489, 494

de Houtman, Cornelis 183

de Kock, A.H.W. Baron 279

Deli 2, 164, 179, 207, 215, 218, 375–398, 400–406, 408–417, 420–423, 425–427, 430–431, 437–438, 441, 443, 445, 449–451, 497–499, 512–513

Demak 85, 162, 255–257, 262, 295, 513

Dinasti 3, 35, 44, 58, 61–62, 65, 72–73, 84, 87, 89–90, 96–100, 104, 114, 121, 126, 186–187, 189–190, 192, 150, 157, 212, 255–256, 313, 332, 360, 461–462, 510

Dinasti Ming 44, 84, 157, 313

Dirham (Emas) 95

Dokumen 53, 89, 123, 339

Dutch Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 203

Dwarapala 9, 11

E

Ekonomi 90, 99, 105–106, 112, 117, 124–125, 139, 147, 150, 153, 155, 157–158, 173–174, 176–181, 184–185, 203–206, 212–216, 218–219, 223, 226, 228–230, 235–238, 255, 258, 262–263, 266–268, 272, 277, 290, 293–294, 297–298, 304, 313, 317, 352–353, 355–357, 359, 365, 367, 375, 377, 379–380, 382, 386,

388, 391, 393, 404–405, 410, 412–413, 420, 429–430, 446, 448, 463, 509

English East India Company (EIC) 203, 232

Expeditie tegen Serdang en Asahan 409, 450

F

Fachruddin, Kemas 277

Fansuri, Hamzah 114, 125, 130, 135–136, 141, 198–199, 278, 511

Fort de Kock 349

G

Gajah Mada 42, 328

Gotjah Pahlawan 375–382, 401, 420

Gowa-Tallo 264, 279

Gresik 90, 164, 257

Gujarat 91, 93, 99, 102–104, 114–116, 153–154, 157, 159, 167–168, 175, 187, 193, 197, 216, 352, 357, 364, 511

Gurindam Dua Belas 242, 246

H

Haji 80, 187, 195, 219, 221, 223–243, 246–247, 315–317, 335–336, 346, 369–371, 415, 422, 427, 429, 435, 445, 455, 497–498, 503

Halal 90, 136

Hatta, Moh. 197–198, 456

Heemskerck, Admiral Jacob 213

Hijaz 186, 195

Hijriah 91–92, 364

Hikayat 89–90, 94, 107, 129, 144, 146, 148, 154, 156–157, 161, 163, 174–175, 177–178, 185, 189–190, 192, 198, 219, 221, 224, 230, 236, 238, 242, 278–281, 488–491, 493

Hindu 3, 6, 8–9, 14–15, 25, 35, 51, 63–66, 71–74, 79, 85–87, 103, 118, 121, 127, 131, 134, 189, 255, 326–327, 329, 457, 460, 466, 509

Hindu-saiwa 25, 51, 63, 65–66, 72, 78

Hollandsche Inlandsche School (HIS) 505

Hurgronje, Snouck 91, 153, 246, 316, 504–505

I

Imam Bonjol 4, 341–345

Imigrasi 89

India 7–8, 12, 19, 22–23, 34–35, 50, 56, 61–63, 68–71, 80, 82, 84–85, 89, 91, 93, 96, 102, 105–106, 116, 118–119, 121, 126–127, 129, 131–135, 138, 150, 153, 154–155, 164, 175–176, 186, 188–189, 191–194, 203, 216–218, 229, 232, 239, 247, 253, 266, 271, 292, 314, 328, 352, 366, 369, 372, 405, 478, 509

Indonesia 7–8, 11, 14, 18, 24–25, 37, 50, 52, 55, 70–72, 74, 77, 87, 89–92, 102, 108, 116, 119, 132, 134, 148, 155, 174, 183, 190, 197, 208, 213, 254, 256, 259, 277, 281, 283, 295, 313, 353, 360, 376–377, 380, 385–387, 389–390, 392–398, 400, 402, 416, 421, 434, 438, 441, 443, 455–459, 463–464, 473, 477–478, 482, 485, 490, 495, 500, 504, 506, 513

Indragiri 119, 179, 218, 306, 331, 352, 457–458, 477–486, 489, 498, 512

Iskandar Johan Berdaulat Syah 354

Iskandar Muda 139, 177–182, 184–185, 188, 203–206, 212, 214–215, 356–359, 372, 376–377, 382–383, 401, 441–442, 481, 512

Iskandar Tsani 180, 191, 194, 203–205, 212, 258, 278, 358–359, 372, 378, 382

Iskandar Zulkarnain 103, 173, 177, 189–191, 262, 329, 354

Istanbul 188, 191, 249, 293, 360

J

Jambi 3, 8, 19–23, 29, 35, 39–40, 49, 53, 57, 60, 65, 71, 74, 78, 82–83, 119, 179, 218–219, 257, 261–267, 271, 275, 292–323, 331, 352–353, 370, 493, 509, 512–513

Jawi 156, 191, 193–194, 197–198, 200–202, 240, 242, 316–317, 379

jaya siddhayatra 59–60

K

Kadi 195, 207, 240, 283, 329, 332, 398, 413–415, 495

Kadi Malikul Adil 195, 240

Kafir 148, 187, 210, 239, 255–256

Kairo 119, 187, 245, 247, 415, 437

Kaisar 44–45, 62–63, 69–70, 80–81, 84, 89, 152

Kalah (Kedah) 90

Kalimantan 134, 152, 234, 277, 413, 493–494

Kamboja 45, 58, 67–68, 70, 87, 103, 215, 226–231

Kapur barus 44, 112, 115–118, 123–125, 127, 132–134, 138, 140, 154, 161–162, 175, 366–367, 384, 404, 496

Karaeng Fatimah 264–265

Kebudayaan 18, 47–48, 59, 69, 90, 97, 102, 134, 138–139, 155, 197, 241, 246, 330–331, 335, 375, 455, 488, 493, 509, 511–512

Kedah 56, 65, 71, 73, 81–82, 85, 90, 103, 155, 157, 159, 165, 180, 189, 268, 357, 481, 493

Kedatuan 50, 53, 64, 87, 473, 509

Kekuasaan 2–3, 7, 17–19, 21, 36–37, 39, 41, 43, 49, 52, 54, 57–59, 63–64, 67–68, 71–72, 74, 80–81, 83, 86–87, 89, 93, 96, 98, 100, 104, 124–125, 139–141, 149–152, 160, 166, 173–180, 184–186, 188, 204–208, 212–214, 223, 225–226, 228–230, 233–235, 237–238, 240, 242, 255, 257–262, 269, 274–276, 278–279, 282, 285, 287, 289–291, 293, 295–296, 300, 302, 304–305, 308–312, 318–319, 321, 327, 329–330, 332–334, 339, 348–349, 352–353, 356–363, 368, 370, 372, 376–378, 381–388, 391, 394–396, 400–403, 406–407, 409–411, 416–417, 421–425, 427–429, 438–439, 441–442, 444–445, 449, 457–459, 461–462, 466–467, 469, 472, 477–479, 481, 483–484, 488–489, 491, 493–494, 496–503, 509–510, 512–513

Kepulauan 45, 70, 89–90, 114–115, 198, 243, 254, 492, 497

Kepulauan Riau 243, 492, 497

Kerajaan 2–4, 6–8, 17–19, 21–22, 24, 35–36, 38–39, 45, 49–53, 55–56, 58–61, 63–80, 82–96, 98–106, 111, 114, 116–120, 123–130, 134, 139–141, 143–152, 155–157, 160–167, 169, 173–198, 201–210, 212–225, 228, 230, 233–234, 238–249, 253–259, 261–265, 267, 270, 275–276, 278–279, 282, 285, 292–296, 301, 326–332, 337, 348–350, 352–363, 365, 367–370, 372–373, 375–377, 380–384, 387, 395–397, 400–404, 406–409, 411–417, 420–424, 426–429, 431, 434–435, 437–438, 441–445, 447–449, 453–454, 457–465, 467–468, 473, 477–482, 484–486, 489–490, 492–493, 496–504, 509–513

Kerajaan Hindu 118, 326, 457, 460, 509

Kerajaan Islam 39, 89, 92, 94, 96, 99–100, 103–105, 111, 118, 143, 147–148, 157, 162, 169, 173, 191–192, 212, 255, 258, 262, 293–294, 352, 360, 457, 477, 498, 510–511, 513

Kesultanan 1–4, 39, 85, 89, 92–93, 96–102, 104, 106, 110–111, 139, 143–144, 146–147, 149–150, 152–153, 157, 159, 161–164, 166, 169, 172, 186, 234, 248, 253, 258–261, 268–293, 296–305, 307–313, 316, 318–323, 329, 331, 352–356, 358, 360–362, 364–366, 370, 372–373, 375, 377–385, 387, 389–398, 400–404, 409–412, 414, 416, 418, 420–431, 434–435, 437–439, 441–446, 448–451, 454–456, 459–461, 477–486, 488–495, 497–501, 504, 506, 512–513

Keuh (Timah) 95

Khanfu (Canton) 89

Khmer 61–62, 67–68, 82

Ki Mas Endi Pangeran Ario Kesumo 258

Kisah 1, 3, 14, 68, 87, 89–90, 123, 126, 144, 151, 189, 191, 255, 363, 451, 490–491, 509, 511

Kitab 20, 22, 34, 36, 40, 56, 58, 61, 65, 89, 92, 95, 118, 130–131, 153, 156, 189, 191, 195, 197–201, 238–241, 243, 245–248, 254, 276–278, 281–284, 316–317, 346

Kitab Jawi 198, 240

Kitab Jawoe 198

Kitab Nagarakrtagama 8, 17, 39–40, 42, 119, 144, 477

Kitab Pararaton 20, 36, 40, 65

Kitab Pengetahuan Bahasa 243

Komunitas 2, 91–92, 118, 193–194, 267, 316, 513

Krodha 66

Kronik 90, 120–122, 126–127, 129

Ksetra 14, 18, 53, 55, 60

Ksetrajna 14, 43

Kuamang 313

Kubu 208, 289, 300–301, 320, 338–339, 341–343, 493

Kupang (Perak) 95

Kutaraja 97, 356, 367, 369

L

Labuhanbatu 441

Lampung 36, 39, 57–58, 77–78, 85, 119, 261, 267, 272, 276

Lamuri 104, 119, 146, 174, 177

Lancaster, Sir James 183

Langkat 2, 375, 384, 386, 392, 396–397, 405, 408, 410–417, 420–441, 449–450, 455, 494, 496–499, 513

Laut Cina Selatan 150, 261, 292

Lautan India 186

Leran 90, 164

Lid Rusydiah 245

Lingga 51, 212, 228, 235–237, 241–245, 247–249, 442–443, 498–499, 512–513

M

Madinah 192, 196, 240

Madrasah 316, 415, 436–437, 455, 505

Mahaksetra 14, 18

Maharaja 16–17, 44, 67–68, 82–83, 99, 122, 128, 180–181, 249, 254, 299, 354, 381, 402, 426, 428, 460–461, 465, 494

Mahavihara 8

Mahkota Alam 174, 177–178

Majapahit 7–8, 17, 36, 38–40, 42, 45, 49, 65, 69, 72, 75, 77, 83–85, 118–119, 141, 143, 152, 156, 158, 164–165, 255, 262, 293, 295, 297, 327–328, 332, 460, 478

Majlis Syar'i Kerajaan 413

Makam 94–97, 104–105, 126, 130–132, 136–138, 143, 147, 149, 153, 157, 162–164, 215, 261, 295, 490

Makassar 162, 165, 196, 217, 220, 222, 263–268, 279, 297, 301, 513

Malaka 35–36, 39, 60, 73, 80–82, 89–90, 94, 105, 110–111, 116, 135, 140, 143, 146, 150, 154–157, 159–160, 162–163, 166–169, 173–176, 178, 180–181, 183–184, 186–188, 191, 193, 204–206, 212–222, 225–227, 229–232, 234, 238, 250–252, 255, 258–259, 275, 294, 314–315, 326, 328, 330–331, 345, 350, 352, 355–357, 368–369, 375–377, 382–385, 403–404, 430–431, 442, 457, 460–461, 478–479, 488–489, 492–493, 495–498, 504, 511–512

Malayu 7–8, 17, 19–24, 33–39, 41–42, 45, 49, 53, 56, 62, 82–83, 116, 118

Malayupura 7, 19, 21–22, 35–43, 45, 49, 82

Mandala 19, 22–23, 34–36, 56–57, 60, 64, 68–70

Mandapa 7, 9–13, 17, 22, 24, 26–29, 31, 34, 46, 48

Marcopolo 89–91, 93–94, 102–103, 105, 119, 146, 151, 157, 478

Maroko 93, 176

Marsden 90–91, 115, 134, 205, 270–271, 281, 298, 301, 330–332

Masa Lalu 27, 74, 94, 105, 191, 115, 123, 141, 241, 398

Masehi 105, 126, 150, 353, 511

Masjid Baiturrahman 207

Mata Uang 94–95, 143, 147, 149, 151, 154–155, 161

Mataram 51, 61, 64–66, 69, 71–73, 76, 87, 215, 255, 257–258, 262, 278, 296–297, 312, 509, 513

Matba'ah al-Riauwiyah 243

Mathba'at al-Ahmadiyah 247

Medan 47–48, 209–210, 321, 323, 380, 382–383, 385, 387, 390, 393–394, 398, 416, 424, 436, 455–456, 462

Melayu 3, 17, 20, 39, 49–51, 61, 64–65, 69–71, 74, 78, 80, 85, 89–91, 99, 103, 114–117, 120–123, 125, 127, 129–130, 135–136, 139–140, 144, 147, 152–154, 156–157, 159, 173, 176–177, 179, 181, 185–186, 188–195, 197–202, 212, 216, 219–230, 232–239, 241–247, 249, 260–262, 267, 276–277, 279–281, 285–286, 293–294, 296–297, 300, 314–316, 327–

328, 345, 352, 354–355, 362–363, 369, 375, 379–382, 390–391, 393–398, 400, 402–403, 409, 412–413, 420, 424, 432, 438–439, 446, 448, 451, 454, 457–458, 462, 485, 488, 490–491, 493, 496–497, 500–501, 503, 511

Mempawah 233, 493

Menapo 24–25

Menetap 37, 41, 89, 91, 93, 104, 127, 129–130, 159–161, 196, 212, 216, 234–235, 260, 276, 300–301, 313, 323, 330, 335, 364, 420–421, 426, 445, 468, 478

Menganut 49, 90, 104, 114, 130, 135, 253, 312, 488

Minangkabau 1–2, 4, 53, 60, 114, 119, 123–124, 128–129, 194, 196, 218–222, 232, 267, 279, 295, 297, 299–300, 302, 316–317, 326–338, 340–343, 345–350, 352, 354–355, 362, 366, 370–371, 398, 415, 435, 437, 449, 452, 455, 459–460, 481, 484, 488–489, 492, 497, 500

Mubaligh 92, 102, 152

Muhammad 90–91, 96–100, 105, 110–111, 133–134, 144–145, 148–149, 151, 153–154, 163–165, 189–191, 197, 207, 210, 239–240, 242–243, 247–248, 256, 269, 274–275, 277, 279, 281, 314–317, 319, 336, 354, 360–363, 372, 375, 415, 422, 425, 427, 437, 441, 448, 450, 453, 454–455, 482, 493, 501, 503, 510

Muharram 202

Muhyi, Abdul 196

Muko-Muko 353

Musafir 19, 50, 60, 89–90, 103, 326, 328

N

Najamuddin, Ahmad 279, 281

Najmuddin 276

Nalanda 3, 8, 22–23, 34, 61–62, 65, 70, 84

Naqsabandiyah 239, 246, 503

Nasihat al-Muluk 191

Naskah 4, 34, 67, 89, 99, 135, 161, 173, 185, 188–189, 192, 197–198, 201–202, 233, 279–281, 293, 312, 345, 354, 364–365, 406–408

Nederlandsche Indie 433

Negeri Bawah Angin 186, 196

Netscher, Elisa 386, 406, 449

Niaga 7, 17, 68, 70, 95, 106, 118, 140, 229, 235, 285, 293, 314, 367

Nisan 90–91, 95, 104–105, 126, 131–132, 136–137, 153, 157, 162

Nusantara 3, 18, 39, 45, 49–50, 63, 65, 68–69, 75, 78, 80, 82, 87, 89, 91–92, 94, 99, 102, 118, 130, 134–135, 137, 147, 150, 152, 155–156, 162, 164–165, 173–181, 185–188, 190, 192–207, 212–221, 229, 231, 235–236, 239–243, 248–249, 253–254, 258, 261–262, 267–269, 276–277, 283, 285, 291–295, 301, 313, 316, 326, 331, 336, 343–344, 353, 355, 362, 366, 378–382, 385, 388, 403, 405, 423, 425, 431, 435, 459, 478, 495, 504, 509, 511–513

O

Orang Kaya Laksamana Muda 378

P

Padri 196, 326, 332, 335–343, 345–350, 423, 497

Pagarruyung 40–41, 220

Pahang 103, 179–180, 191, 194, 203–204, 215, 222–224, 233–235, 357, 377–378, 460–461, 481, 512–513

Painan 206, 352–353, 371, 509

Palembang 3, 8, 23, 39, 52–53, 57, 61, 71–72, 74, 78, 82–86, 102, 140, 146, 215, 253–297, 300–305, 309, 312, 314–316, 320–321, 328, 458, 478, 490, 493, 512–513

Panai 3, 7–8, 14, 17–18, 81–82, 355, 386, 406, 424, 441, 445, 448–450, 494

Pane 9, 14, 17–18, 82, 452, 454

Pangeran Diponegoro 320

Pantheon 7, 66

Para Ahli 3, 8, 19, 52, 91, 176, 246

Pararaton 20, 36–37, 40, 65, 328

Pariaman 114–115, 179, 206, 331, 352, 356–358, 367–368, 371, 481

Pasai 39, 89–91, 97–98, 105–106, 110–112, 119, 130, 140–141, 143–169, 173, 175–176, 186–187, 189, 192–193, 199–200, 294, 357, 375, 381, 510–511

Pasaman 47–48, 333, 336, 368–369

Patani 49, 156–157, 166, 189, 214–215, 480

Pecinan 312–318, 323

Pedagang 3, 58, 69, 83, 89–93, 96, 98, 102–104, 106, 111–112, 115–117, 119, 122, 124–126, 128–132, 134, 139–141, 150–151, 154, 157–159, 161, 173–176, 178–179, 181–186, 203, 216–218, 222, 229–231, 235–236, 238, 253–255, 257, 261, 266–268, 270, 272, 274, 276, 292, 299, 301, 313–314, 352–353, 357–358, 364, 366–369, 405, 442, 445–446, 450–451, 458, 480, 496, 510–511, 513

Pelabuhan 7, 39, 69, 84, 90–91, 95, 104–106, 111–112, 114–116, 118–119, 123–126, 130, 134, 138, 140–141, 146, 150, 155, 160, 167–168, 175, 182–183, 186–187, 193, 216, 218, 231, 244, 253–254, 270–271, 276, 292–293, 297, 299, 331, 353, 358, 367, 370–371, 375, 405, 408, 430–432, 449–450, 489, 511

Pelayaran 22, 59, 68–69, 82, 84, 90, 94, 106, 114, 117–118, 139–140, 183, 186–187, 145, 150, 166, 169, 259, 270, 364, 367, 369, 430

Pemberontakan 57–58, 78, 89, 99, 180, 209, 306, 313, 349, 357, 372, 424, 427, 492, 497–498, 505

Pemukiman 14, 130, 159

Penghulu 2, 98, 115, 124, 261–262, 278, 282–284, 312, 315, 317, 331, 333–336, 341, 347–348, 350, 355, 360–363, 365–366, 371, 379, 389, 395, 413, 462, 468, 472, 486, 494

Penghulu Nata Agama 278, 282

Penulis 16, 90, 118, 126, 130, 133, 135, 200, 244, 366, 431

Penyengat 4, 236–244, 246–248, 492, 497–499

Penyiar 92, 102, 131, 153, 407

Perak 24–25, 31–32, 58, 69, 95, 103, 110, 145, 154, 166, 189, 206, 215, 217–218, 266, 357, 378–379, 381, 384, 408, 426–427, 436, 458 481

Perang Aceh 1, 207–209, 450

Perang Padri 332, 335–336, 338, 340, 345–350, 423, 497

Perbatasan 82, 127, 207, 210, 264–265, 272, 276, 303–304, 310, 330, 333, 353, 362, 394, 454

Perdagangan 35, 73, 82, 89–91, 94, 102–103, 114–115, 118, 125–126, 130, 132–135, 138–140, 143, 146–147, 150–151, 154–155, 157, 160–161, 166, 169, 173–176, 178, 181, 183–186, 192, 197, 200, 204–206, 214–220, 227–229, 231, 236, 238, 253–254, 259–260, 262, 267–270, 272, 274–276, 285, 292–294, 297, 299, 301–302, 305–308, 310, 329, 333, 335, 337–338, 352, 357–359, 362, 366–372, 385, 404–405, 407, 422, 424, 430–431, 434, 442, 446, 448, 450, 480–481, 488, 493, 495–498, 511–512

Perjalanan 3, 23, 42, 52, 54, 56, 59–60, 69, 89–90, 95, 114, 122, 129, 135, 140, 160, 168, 175–176, 180, 183, 187, 194, 196, 217, 225, 231, 243–244, 256, 264, 271, 314, 339, 352, 362, 375, 392–393, 420, 441, 446–447, 459, 478, 497, 509–510

Persia 89–91, 93, 99, 103, 105, 114, 116–118, 126, 130, 135, 150, 157, 178, 188–189, 192–193, 198, 253–255, 292, 352, 511

Pesisir 90, 92–93, 100–102, 111–112, 115, 123–124, 126–127, 130, 138–140, 149–150, 195, 209–210, 294, 299, 303, 329, 333, 338, 340, 348, 352–353, 364, 366–367, 373, 375, 379, 381, 428, 448, 450, 477, 484, 492–494, 497, 510, 512

Petani 89, 103, 158, 395, 456–457

Peurelak 89, 93–94, 97–98, 101, 103–106, 111, 140

Pires, Tome 102, 112, 114–115, 124, 126, 134, 146, 149, 154–155, 157–163, 173, 175–176, 186, 193, 253, 255, 295–296, 328, 331, 489, 511

Plakat Panjang 341

Politik 2, 50, 66, 82, 87, 90, 96, 102, 105, 111, 118, 123, 127, 139, 153, 157, 163, 166, 169, 173–174, 176–181, 184–186, 188, 190–191, 193, 196–198, 200, 203–207, 209, 212–216, 218–231, 235–239, 241–248, 255, 257–258, 260–264, 267, 269, 275–277, 279–280, 283–287, 290, 292–297, 299, 301, 304–306, 311–313, 318, 320, 331, 350, 352–353, 355–357, 359–360, 362, 367, 373, 375–376, 378–379, 381–382, 385–388, 390, 394–396, 398, 400–403, 406, 409, 411–412, 416–417, 420, 422–425, 429, 438–439, 448, 453, 456–457, 459, 466, 468, 488, 497–500, 512–513

Prawirodirdjo, Sentot 339

Q

Qurays 93, 96

R

Raden Patah 85, 255, 262, 295

Raffles, Thomas Stamford 286

Raja Adat 332, 369

Raja Ali Haji 224, 229, 239–243, 246–247

Raja Haji Fisabilillah 239, 497–498

Raja Kecik 218–223, 225, 227, 478, 482, 488–493

Raja Urung Senembah 383, 401

Rempah-rempah 146, 175, 179, 187–188, 204, 217, 292

Riau-Johor 212, 219, 222–233, 235–238, 240, 247–248, 258

Riau-Lingga 212, 241–245, 247–249

Rusydiyah Club 244–248

Rute 512

S

Sailendra 71–73, 87

Sailendrawangsa 72–73

Salida 206, 357, 372

Samalanga 144–145, 151, 209–210

Samudera Hindia 124, 150, 353, 364, 369

Samudera Pasai 39, 69, 89, 91, 110–111, 143–144, 146–147, 149–158, 161–166, 173, 175–176, 189, 192–193, 294

Sansekerta 23, 44, 50–51, 56, 58–59, 63–64, 69, 78–80, 82

Seda ing Krapyak 257

Sejarah Banten 256

Sejarah Melayu 39, 85, 89–90, 103, 122, 144, 154, 156–157, 177, 181, 186, 239, 241, 262

Sejarah 1, 4, 7–8, 18–19, 22, 36, 39, 49–50, 53, 58, 62, 65, 74, 77, 83–85, 89–92, 103–106, 114–115, 118, 120, 122, 129, 132, 135, 143–144, 149, 154–157, 163, 168, 173–174, 177–178, 181, 186, 190–191, 194, 198–199, 210, 213, 225, 239, 241, 250, 253, 255–257, 259, 262, 278–280, 292–293, 298, 307, 313, 318, 331, 334, 340, 347, 353, 362, 366, 404, 416, 420, 449, 466, 477, 482, 509–513

Sejarawan 67, 89

Selat Malaka 7, 35–36, 39, 60, 73, 80–82, 89–90, 94, 135, 140, 143, 146, 150, 154, 166, 169, 180, 214–215, 218, 220–221, 225, 229–231, 275, 369, 377, 430, 457, 488, 495–496, 498–499, 504, 511–512

Selat 7, 35–36, 39, 60, 68, 73, 80–82, 87, 89–90, 94, 135, 140, 146, 150, 154, 166, 169, 175, 180, 214–215, 218, 220–221, 225, 229–231, 261, 275, 369, 377, 430, 450, 457, 462, 480, 488, 495–499, 504, 511–512

Semenanjung 3, 7, 17, 39, 49, 57, 61, 63, 65, 69–70, 81–83, 90, 103, 150, 175, 178–180, 184, 194, 206, 215–216, 218–221, 225–226, 269, 315, 333, 345, 350, 357, 378, 404–405, 461, 492–493, 497

Senembah 378, 381, 383–384, 401, 408, 410

Serdang 2, 164, 375, 383–384, 386, 394, 400–418, 420–422, 424, 427–428, 430–431, 437, 441, 449–450, 494, 497–499, 512–513

Siak Sri Inderapura 384, 442, 449, 461, 489, 492, 496–497, 504–506

Simalungun 375, 379, 395, 398

Singapura 87, 110, 207, 245, 247, 249, 301, 312, 318, 390, 408, 457, 460, 484, 488–489, 499

Soekarno 456

Speelman, C. 279

Sriwijaya 3, 7–8, 17, 33, 35–36, 78, 84–87, 116–117, 119, 140–141, 150, 254, 478, 509–510

Stempel 44–45, 84, 94–95, 423

Stupa 9–11, 13–14, 17, 22–23, 26–29, 31, 34, 38–39, 46, 62, 74, 87

Sufisme 193–196, 205, 277, 280, 328

Suku 1, 93, 115, 117, 130, 134, 189, 191, 201–202, 223–224, 226–227, 231, 233, 235–237, 264, 300, 302, 317, 331–335, 343, 355, 361, 375, 378–379, 390, 395, 426, 442, 446, 454, 466–472, 484, 488, 494–495

Sulawesi 3, 152, 162, 164–165, 193, 196, 229, 263

Sultan Ageng Tirtayasa 196, 278

Sultan Agung 257–258, 264–265, 278, 296

Sultanah Tajul 'Alam Shafiyatuddin Syah 200

Suma Oriental 328

Sumatera 3, 7, 12–13, 17–23, 35–37, 39–40, 43–45, 48–49, 57, 61, 63, 65, 70–71, 73, 75, 78, 82–83, 85, 89–94, 98, 102, 104, 111–112, 143, 146–149, 161–162, 164, 166–167, 169, 174–175, 178–180, 184, 186–187, 189, 196, 201–202, 204–207, 114–116, 118–120, 122–124, 126–130, 132–135, 139, 141, 212–213, 215, 221, 257, 261, 263, 269, 272, 292–294,, 297, 299, 303, 307, 309, 313, 326–327, 329–331, 339–340, 352–353, 355–359, 363–370, 375–376, 378–380, 384–388, 391, 394–398, 400, 403–406, 408–417, 420, 422–424, 427–428, 430–432, 437–438, 441, 448–450, 454–456, 458–460, 462, 477–478, 488, 492–493, 495–499, 506, 509–513

Sumatera Barat 20–22, 35, 39–40, 43, 49, 71, 83, 123, 139, 179, 196, 326–327, 329–330, 352–353, 363, 370, 395, 397, 405–406, 413, 459

Sumber 8, 10–13, 19–21, 27, 29–33, 36–37, 44–45, 47–49, 63, 67–69, 72, 89–97, 103–105, 116–117, 119, 122, 124–126, 129–131, 133–134, 138, 140–141, 143–144, 146, 148–150, 155, 157–159, 163, 165–168, 174–175, 177–178, 183, 185–186, 188, 190, 192, 203, 208, 213, 219, 226, 228, 235, 242–243, 254–256, 259, 267–270, 273, 277, 282, 290, 292, 295, 302, 312, 326, 334, 352–353, 356–357, 359, 364, 368, 376, 380, 384–387, 389, 392, 394, 396, 402, 404, 410, 411–412, 421, 429, 431–432, 434, 442–443, 446, 448, 458, 477, 488, 490, 496, 502, 505–506, 509–511

Sunggal 378–379, 381, 383–384, 389–391, 401, 408, 426

Sunni 100–101, 187, 455, 510

Suwarnabhumi 22, 41, 44, 69, 80

Suwarnadwipa 34, 62, 70, 84

Syah, Abdul Jalil Ri'ayat 214, 257

Syahbandar 181, 229, 270, 381, 404, 431, 447, 498

Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi 316

Syiah 97, 99–100, 102, 104–105, 111, 135, 153, 326, 329, 510

T

Tanah Datar 18, 333, 337–339, 345, 349, 367, 457, 494

Tanjung Pinang 234, 238, 244, 498–499

Tasawuf 135–136, 156, 198–200, 247, 278, 281, 511

Teori 91–92, 143

Ternate 162, 201–202, 217, 278, 280–281, 290

Tertua 3–4, 89, 94, 103, 116, 126, 128, 131, 146–147, 214, 228, 372, 416, 421

Teuku Imeum Lueng Bata 208

Teuku Umar 1, 210

Teungku Tjik di Tiro 209–210

Tiku 124, 179, 206, 331, 352, 356–358, 367–368, 371, 481

Timah 95, 119, 147, 154, 181, 206, 216, 218, 226, 229, 235–236, 261, 269–274, 285–288, 493, 496

Timur Tengah 125, 133–134, 150, 186, 188, 192–197, 209, 254

Tinggalan Materi 89, 157, 163

Tinggalan 9, 12, 17, 27, 32, 89, 94, 104–105, 129, 131, 143, 149, 157, 163

Tjoet Njak Meutia 210

Tokoh 21, 37–39, 41, 60, 62, 66, 71, 73, 83, 90, 102, 132, 137, 153, 160, 184, 189, 200, 209–210, 219, 226, 239, 242, 244, 246, 255, 277–278, 280, 294, 311, 315–317, 329, 375, 401, 413, 415, 420, 435–437, 455, 488, 491, 506

Tradisi 2, 42, 56, 59, 62, 84–85, 90–91, 94, 115, 120, 122, 130–132, 189–190, 198, 203, 219, 225, 241, 254, 261–262, 277, 280, 296, 312, 335, 363, 365, 375, 382, 390, 500–501, 503–504

Trengganu 201, 222, 226, 235

Tri Ratna 54–55

Tuhfat al-Nafis 219, 221, 223, 225–230, 232, 236, 238–241, 243, 497

Tulang Bawang 267

Turki Usmani 181, 185–189, 191, 207, 312, 318, 360, 365

Ulama 1, 103, 105, 135, 145, 150–153, 156, 162–164, 176, 185, 190, 192–198, 200, 205, 207, 209–210, 238–243, 246, 255, 257, 276–278, 280, 312–318, 326, 329, 334–336, 346–348, 356, 361, 379, 381, 398, 414–415, 435, 437, 455, 503–504

Uleebalang 206, 208–209, 395, 429

V

van Diemen, Antonio 215, 481

van Eysinga, Roorda 241–242

Veda 51, 63–65, 86

Vedi 33

W

Wajralepa 11, 62

Wajrayana 9, 15, 23, 66

Z

Zabag 67–68, 253

Zabaj 253–254

RIWAYAT HIDUP EDITOR DAN PENULIS

Prof. Dr. Taufik Abdullah

Taufik Abdullah adalah guru besar di bidang ilmu sejarah. Lahir di Bukittinggi pada 3 Januari 1936. Menyelesaikan pendidikan sarjananya di Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada pada 1961; kemudian ia melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Universitas Cornell, Ithaca, Amerika Serikat, yang diselesaikannya pada tahun 1967 dengan tesis berjudul *"Minangkabau1900-1927: Preliminary Studies in Social Development"*. Di Universitas yang sama ia memperoleh gelar doktor pada tahun 1970, dengan disertasi berjudul *"School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra"*, yang diterbitkan oleh Universitas Cornell pada 1971 dan kemudian diterbitkan kembali oleh penerbit Equinox pada 2009.

Beberapa jabatan pernah diembannya, antara lain: Kepala Bagian Umum Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (Biro MIPI) 1962-1963; Asisten Peneliti Leknas LIPI 1963-1967; Peneliti Leknas 1967-1974; Direkur Leknas LIPI 1974-1978; dan Peneliti Leknas LIPI 1978 hingga menjabat sebagai Ketua LIPI 2000-2002. Selain di LIPI, ia juga menjadi peneliti di Departemen Ilmu Politik Universitas Chicago, Universitas Wisconsin, dan Netherlands Institute for Advanced Studies in the Humanities and Social Science (NIAS), Wassenar, Belanda. Ia menduduki beberapa posisi penting di institusi lintas bangsa, seperti Ketua Komite Eksekutif Program Kajian Asia Tenggara (ISEAS) Singapura, Wakil Presiden Asosiasi Ilmu Sosial Asia Tenggara, Kuala Lumpur, serta Wakil Presiden Asosiasi Sosiologi Internasional Dewan Riset Sosiologi Agama. Tulisannya telah tersebar di berbagai media dan jurnal, baik lokal maupun luar negeri. Hingga saat ini setidaknya sudah ada 30 buku yang berhasil diselesaikannya. Atas kontribusinya dalam dunia keilmuan, pada 2009 ia memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia.

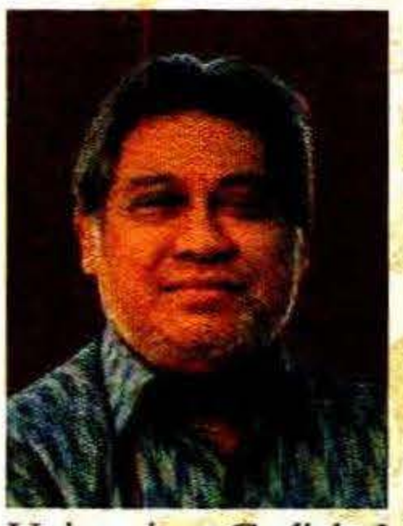

Dr, Mukhlis PaEni

Mukhlis PaEni lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 7 Mei 1948. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gadjah Mada pada 1975. Mengikuti Program Doktor kerjasama Indonesia-Belanda di bidang sejarah, UGM, di bawah Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, 1976; pendidikan PLPIIS (Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial) Banda Aceh, 1977; *Advanced Studies* dalam Antropologi Sosial dan Sejarah, University of Oslo, Norwegia, 1980, dan Doktor dalam Antrologi Sosial melalui kerjasama University of Oslo, Norwegia dan Universitas Hasanuddin, 1983, dengan disertasi berjudul: *Gayo: Kelanjutan Tradisi dalam Perubahan Sosial di Aceh, Disertasi Mengupas tentang Perubahan Sosial dan Aksi-aksi Konflik yang ada di Masyarakat*, dengan predikat Cum Laude.

Berbagai profesi dan jabatan telah disandang, di antaranya: sebagai dosen Universitas Hasanuddin sejak 1975; dosen tamu di Departement of History, Australia National University; peneliti tamu SOAS University of London, 1984; Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, 1998-2003; Staf Ahli Menteri Bidang Pranata Sosial Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004-2006; Ketua Lembaga Sensor Film 2009-2012; Tenaga Pengajar Luar Biasa Fakultas Pascasarjana Program Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 1999-sekarang; dan Ketua Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia 2006-2016.

Dr. Karsono H. Saputra

Karsono H. Saputra adalah editor/copywriter sekaligus seorang dosen Sastra Jawa di Universitas Indonesia sejak 1989 sampai sekarang. Pria kelahiran Klaten, 15 Februari 1953, ini menempuh pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Sampai saat ini, ia telah menghasilkan banyak karya ilmiah, di antaranya adalah *Panji Angreni: Keberpautan Kelisananan dengan Keberaksaraan*, *Aspek Kesastraan Panji Angreni*, dan *Sajak-sajak Bulan*.

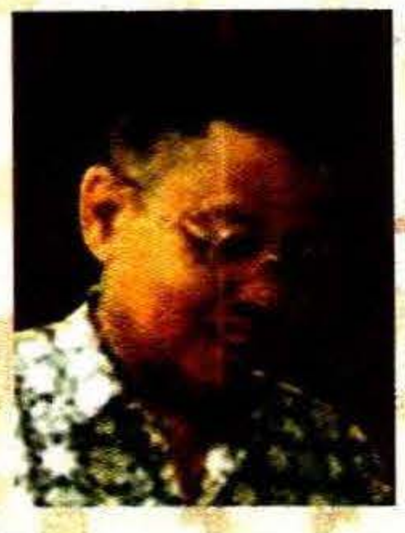

Prof. Dr. Agus Aris Munandar M, Hum

Prof. Dr. Agus Aris Munandar M, Hum lahir di Indramayu, kota kabupaten di utara Jawa Barat pada tanggal 13 Juli 1959. Menempuh pendidikan sarjana di jurusan Arkeologi dan lulus tahun 1984. Tahun 1990 lulus pendidikan S2 pada Program Studi Arkeologi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia. Tahun 1999 lulus pendidikan S3 pada program Studi Arkeologi, Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dengan ***judicium cum claude***. Disertasi yang disusun berjudul "Pelebahan: Upaya Pemberian Makna pada Puri-puri Balai Abad ke-14--19 M". Saat ini berkerja sebagai pengajar tetap di Program Studi Arkeologi, Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Karya-karyanya antara lain buku *Istana Dewa Pulau Dewata* (Komunitas Bambu, 2005) yang diterbitkan dengan bantuan Ford Foundation, buku *Situs Sindangbarang, Bukti kegiatan Keagamaan Masyarakat Kerajaan Sunda abad ke-13--15 M* (Padepokan Giri Sundapura,2007) serta artikel dan makalah yang ditampilkan dalam berbagai jurnal dan seminar.

Dr. Isman Pratama Nasution, S.S., M.Si

Dr. Isman Pratama Nasution, S.S., M.Si, lahir di Jakarta pada 5 Mei 1962. Menempuh Pendidikan S1 bidang Arkeologi di Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta tahun 1988, S2 di bidang Antropologi. Program Pascasarjana Antropologi Universitas Indonesia, Jakarta tahun 1995, dan S3 di bidang Arkeologi Program Pascasarjana Program Studi Doktor Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2014. Bekerja di Universitas Indonesia sebagai pengajar tetap di Program Studi Arkeologi, Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Adapun karya tulisnya yang telah diterbitkan diantaranya adalah *Fitur Budaya Islam dari Masa Lalu*. Penerbit : LSM Males arts studio. 2018., *Jelajah Pusaka Alam dan Budaya Lemah Abang Pekalongan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. 2018. Artikel-artikelnya diterbitkan di berbagai jurnal ilmiah antara lain "The Royal Mosques in Indonesia from 16 tahun to early 20 tahun Centuries as a Power Representation" dalam *International Journal of Heritage Architecture*. Studies, Repairs and Maintenance. Vol.1. Number. 3, 2017., Southampton, Boston : WIT Press. (pp. 494-502.)

Prof. Dr. Jajat Burhanuddin, M. A.

Prof. Dr. Jajat Burhanuddin, M. A. lahir pada tanggal 19 Januari 1967. Pendidikan SD hingga SMA ditempuhnya di Bogor. Gelar sarjana diperolehnya dari Institut Agama Islam Negeri Jakarta, sedang gelar master dan doktor diperoleh dari Universitas Leiden Belanda. Saat ini menjabat sebagai guru besar ilmu sejarah dan kebudayaan Islam di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Jakarta. Di samping mengajar juga aktif melakukan penelitian mengenai Islam dan masyarakat Muslim. Karyanya yang sudah diterbitkan antara lain buku berjudul Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia (2012) dan Islam dalam Arus Sejarah Indonesia (2017). salah satu artikelnya berjudul The Dutch Colonial Policy on Islam: Reading the Intellectual Journey of Snouck Hurgronje diterbitkan dalam jurnal AL Jami'ah pada tahun 2014.

KERAJAAN-KERAJAAN NUSANTARA DALAM SEJARAH:

Sumatera

Buku *Kerajaan-Kerajaan Nusantara dalam Sejarah: Sumatera* merupakan sajian narasi tentang kerajaan-kerajaan yang pernah ada di wilayah pulau Sumatera. Narasi Sejarah ini hadir sebagai usaha menginventarisasi kerajaan Nusantara sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia. Kisah jalinan dan jaringan antar kerajaan-kerajaan yang sudah terbina sejak awal berdiri merupakan bagian dari memori kolektif dalam perjalanan bangsa dan negara yang kini bernama Indonesia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia